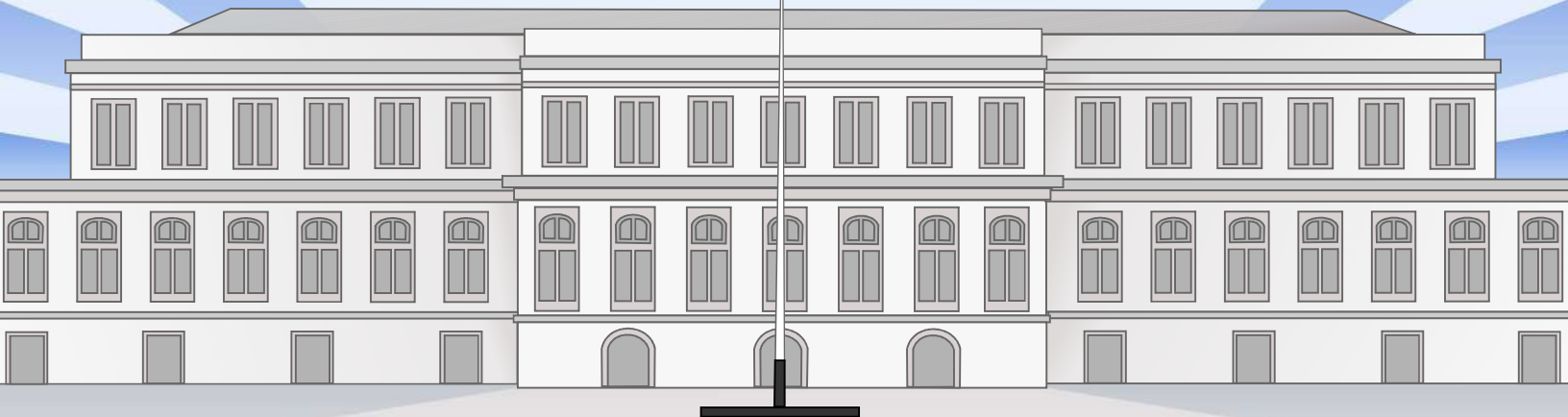


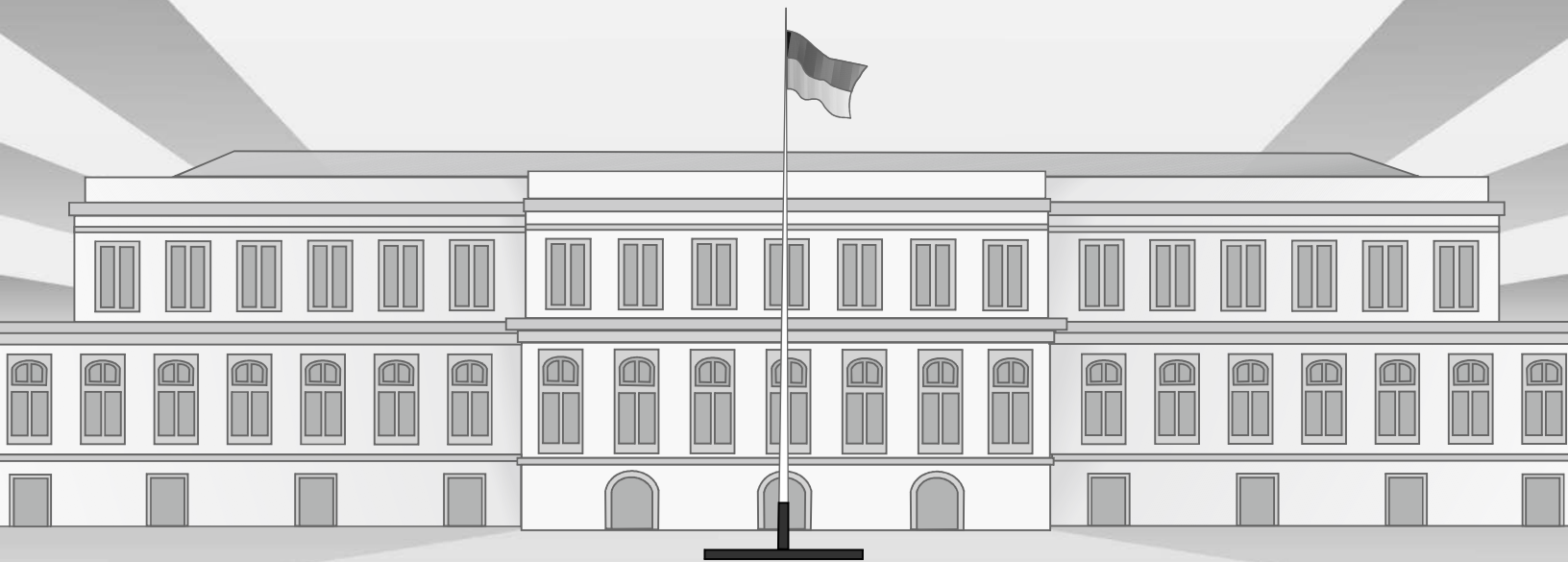


LKBUN

LAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN 2022 *AUDITED*

Mei 2023



LKBUN

LAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN 2022 *AUDITED*

Mei 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2022 *Audited* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

LKBUN Tahun 2022 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2022 *Audited* terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain itu, LKBUN Tahun 2022 *Audited* juga menginformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya.

LKBUN Tahun 2022 *Audited* ini merupakan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUN. Kami menyadari LKBUN Tahun 2022 *Audited* masih belum sempurna. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*). Kami sebagai BUN akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKBUN secara akurat dan tepat waktu.

Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2022 *Audited* yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, kecuali untuk hal-hal yang terkait dengan badan lainnya yang berada di luar kendali Bendahara Umum Negara.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 22 Mei 2023
Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Bendahara Umum Negara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Bendahara Umum Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Bendahara Umum Negara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bendahara Umum Negara tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 28.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota,

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFA.

4/6/23
W 4/6/23



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG DJUANDA II LANTAI IV s.d. XIII, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 3132
TELEPON (021) 3865430, FAKSIMILE (021) 3440907, SITUS www.itjen.kemenkeu.go.id
SALURAN PENGADUAN www.wise.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas nama Bendahara Umum Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 15 Maret 2023
INSPEKTUR JENDERAL



Ditandatangani secara elektronik
AWAN NURMAWAN NUH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
RINGKASAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	2
3. NERACA	3
4. LAPORAN OPERASIONAL	3
5. LAPORAN ARUS KAS	4
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5
A. PENJELASAN UMUM	21
A.1. DASAR HUKUM	21
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	22
A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI	31
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	72
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN	72
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	73
B.2.1. Pendapatan dan Hibah BUN	73
B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	73
B.2.1.2. Penerimaan Hibah.....	83
B.2.2. Belanja BUN	85
B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat.....	85
B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	116
B.2.3. Defisit Anggaran	146
B.2.4. Pembiayaan	146
B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri.....	147
B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri Neto	166
B.2.5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran-SIKPA.....	171
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA.....	172
A. Penjelasan Umum Cluster dan Program PEN Lingkup BUN	172
B. Capaian Output Belanja Lingkup BUN	190
C. Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08	190
D. Kebijakan DAU untuk Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021.....	190
E. Penggunaan Sisa DID dan Sisa DID Tambahan Tahun 2020 – Bidang Kesehatan	192
F. Dukungan APBD Untuk PCPEN	192
G. Program Percepatan Pencegahan Stunting	193
H. Kebijakan DAU untuk Penanganan Dampak dari Kenaikan Inflasi.....	196
I. Perubahan Kebijakan dalam Pengelolaan Dana Desa	197
J. Penyetoran Pengembalian Transfer Satker DAK Fisik dan Dana Desa	197
K. Perubahan Penyaluran Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan.....	197
L. Pelaksanaan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa	198
M. Penggunaan Sisa DID dan Sisa DID Tambahan Tahun 2020 – Bidang Kesehatan.....	199

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL	200
C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL	200
C.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL	200
C.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	200
C.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	201
C.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	201
C.2.4. Penyesuaian Pembukuan	202
C.2.5. Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	205
C.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir	209
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	211
D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM	211
D.2. PENJELASAN PER POS NERACA	212
D.2.1. Aset	212
D.2.1.1. Aset Lancar	212
D.2.1.1.1. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	212
D.2.1.1.2. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing	214
D.2.1.1.3. Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	215
D.2.1.1.4. Kas di Rekening Kas di KPPN	215
D.2.1.1.5. Kas Dalam Transito	216
D.2.1.1.6. Kas di Bendahara Pengeluaran	217
D.2.1.1.7. Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	217
D.2.1.1.8. Kas Lainnya dan Setara Kas	218
D.2.1.1.9. Kas pada Badan Layanan Umum	220
D.2.1.1.10. Uang Muka dari Rekening Khusus	221
D.2.1.1.11. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	221
D.2.1.1.12. Uang Muka Belanja	221
D.2.1.1.13. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	222
D.2.1.1.14. Piutang Bukan Pajak	224
D.2.1.1.15. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	251
D.2.1.1.16. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	254
D.2.1.1.17. Piutang BLU	255
D.2.1.1.18. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak	255
D.2.1.1.19. Piutang PFK	263
D.2.1.1.20. Persediaan	264
D.2.1.2. Investasi Jangka Panjang	265
D.2.1.2.1. Dana Bergulir	265
D.2.1.2.2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih	275
D.2.1.2.3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	281
D.2.1.2.4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	288
D.2.1.2.5. Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	290
D.2.1.2.6. Investasi Permanen BLU	303
D.2.1.2.7. Investasi Permanen Lainnya	304
D.2.1.3. Aset Tetap	310
D.2.1.3.1. Tanah	310
D.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin	310
D.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan	311
D.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	312
D.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	312

D.2.1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	313
D.2.1.3.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	314
D.2.1.4.	Properti Investasi	315
D.2.1.4.1.	Properti Investasi	315
D.2.1.4.2.	Akumulasi Properti Investasi	318
D.2.1.5.	Piutang Jangka Panjang	319
D.2.1.5.1.	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	320
D.2.1.5.2.	Piutang Jangka Panjang Lainnya	320
D.2.1.5.3.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	321
D.2.1.6.	Aset Lainnya	322
D.2.1.6.1.	Aset Tak Berwujud	322
D.2.1.6.2.	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	323
D.2.1.6.3.	Dana Cadangan Penjaminan	341
D.2.1.6.4.	Dana Kelolaan BLU	342
D.2.1.6.5.	Dana Jangka Panjang	346
D.2.1.6.6.	Aset Lain-lain	349
D.2.1.6.7.	Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL	438
D.2.1.6.8.	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Aset Lainnya	444
D.2.2.	Kewajiban	457
D.2.2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	457
D.2.2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	457
D.2.2.1.2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	459
D.2.2.1.3.	Utang Bunga	476
D.2.2.1.4.	Utang Subsidi	477
D.2.2.1.5.	Utang Transfer	481
D.2.2.1.6.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	485
D.2.2.1.7.	Utang Surat Berharga Negara-Jangka Pendek	487
D.2.2.1.8.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	487
D.2.2.1.9.	Pendapatan Diterima di Muka	488
D.2.2.1.10.	Pendapatan Yang Ditangguhkan	496
D.2.2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	496
D.2.2.2.1.	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	496
D.2.2.2.2.	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	497
D.2.2.2.3.	Utang Jangka Panjang Subsidi	498
D.2.2.2.4.	Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	503
D.2.2.2.5.	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri lainnya	503
D.2.2.2.6.	Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	508
D.2.2.2.7.	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	508
D.2.3.	Ekuitas	509
D.3.	Catatan Penting Lainnya	510
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	688
E.1.	PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL BUN	688
E.2.	PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL	689
E.2.1.	Pendapatan Operasional	689
E.2.1.1.	Pendapatan Sumber Daya Alam	690
E.2.1.2.	Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	693
E.2.1.3.	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	693
E.2.1.4.	Pendapatan Hibah	705
E.2.2.	Beban Operasional	706

E.2.2.1. Beban Pegawai	706
E.2.2.2. Beban Persediaan.....	707
E.2.2.3. Beban Jasa	708
E.2.2.4. Beban Pemeliharaan	708
E.2.2.5. Beban Barang Lainnya	709
E.2.2.6. Beban Bunga	710
E.2.2.7. Beban Subsidi.....	712
E.2.2.8. Beban Hibah.....	723
E.2.2.9. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	724
E.2.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	728
E.2.2.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	730
E.2.2.12. Beban Lain-Lain.....	736
E.2.3. Kegiatan Non Operasional.....	742
E.2.3.1. Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	743
E.2.3.2. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	744
E.2.3.3. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	745
E.2.4. Pos Luar Biasa	754
E.3. Catatan Penting Lainnya	755
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	757
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	757
F.1.1. Saldo Awal Kas	757
F.1.2. Perubahan Kas.....	757
F.1.3. Saldo Akhir Kas dan Bank.....	761
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	763
F.2.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	763
F.2.1.1. Penerimaan Perpajakan.....	763
F.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	767
F.2.1.3. Pendapatan Hibah.....	769
F.2.1.4. Belanja Pegawai	770
F.2.1.5. Belanja Barang.....	770
F.2.1.6. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	771
F.2.1.7. Belanja Subsidi.....	773
F.2.1.8. Belanja Hibah.....	774
F.2.1.9. Belanja Bantuan Sosial.....	774
F.2.1.10. Belanja Lain-lain.....	775
F.2.1.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak.....	775
F.2.1.12. Transfer Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam	776
F.2.1.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai.....	776
F.2.1.14. Transfer Dana Alokasi Umum	776
F.2.1.15. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	776
F.2.1.16. Transfer Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Dana Insentif Daerah (DID)	776
F.2.1.17. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	777
F.2.1.18. Dana Desa	778
F.2.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	778
F.2.2.1. Pengelolaan dan Penjualan BMN.....	778
F.2.2.2. Penjualan Aset Program Restrukturisasi.....	779
F.2.2.3. Penerimaan Dana Bergulir	779
F.2.2.4. Penerimaan Investasi Pemerintah.....	779

F.2.2.5. Belanja Modal.....	780
F.2.2.6. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	780
F.2.2.7. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	780
F.2.2.8. Penyertaan Modal Negara	780
F.2.2.9. Pengeluaran Investasi Pemerintah.....	781
F.2.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.....	782
F.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri.....	782
F.2.3.2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	784
F.2.3.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	784
F.2.3.4. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	785
F.2.3.5. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	785
F.2.3.6. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri.....	785
F.2.3.7. RDI/RPD.....	785
F.2.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	786
F.2.4.1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	786
F.2.4.2. Transito (Netto).....	787
F.2.4.3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto).....	787
F.2.4.4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto).....	788
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	790
G.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	790
G.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	791
G.2.1. Ekuitas Awal	791
G.2.2. Surplus (Defisit) LO	792
G.2.3. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	793
G.2.3.1. Koreksi Nilai Persediaan.....	793
G.2.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	794
G.2.3.3. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya.....	796
G.2.3.4. Koreksi SAL	800
G.2.3.5. Lain lain	800
G.2.4. Transaksi Antar Entitas	818
G.2.5. Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs yang Belum Terealisasi.....	821
G.2.6. Mutasi Ekuitas BUN DI K/L	821
G.2.7. Ekuitas Akhir.....	822
H. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	824
I. LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN LRA	
LB.1. Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Per Akun Tahun 2022	LB1
LB.2. Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2022	LB2
LB.3. Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa per Jenis Transfer Tahun 2022	LB3
LB.4. Laporan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022	LB4
LB.5. Rincian Penerimaan Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2022.....	LB5
LB.6. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Tahun 2022	LB6
LB.7. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022	LB7
LB.8. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2022	LB8
LB.9. Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum Tahun 2022.....	LB9
LB.10. Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2022.....	LB10

LB.11. Laporan Realisasi Anggaran Dana Otsus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan DD Tahun 2022	LB11
LB.12. Rekap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022 <i>Audited</i>	LB12
LB.13. Rincian Dokumen SP SABA dan SPP BA BUN 999.08 TA 2022	LB13

B. LAMPIRAN NERACA

LD1a Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah	LD1a
LD1b Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing	LD1b
LD.2. Rekening Pemerintah Lainnya	LD2
LD.3. Rincian Kas di KPPN	LD3
LD4a Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022	LD4a
LD4b Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per K/L Tahun 2022	LD4b
LD5a Kas pada Kementerian Negara/Lembaga berasal dari Hibah Langsung Tahun 2022...	LD5a
LD5b Rincian Kas Hibah per K/L Tahun 2022	LD5b
LD6a Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum Tahun 2022.....	LD6a
LD6b Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum per K/L Tahun 2022.....	LD6b
LD.7. Uang Muka Rekening Khusus	LD7
LD8a Rincian Piutang PNPB Dividen dan Denda per 31 Desember 2022	LD8a
LD8b Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LD8b
LD.9. Rincian Aset Kredit Eks BPPN	LD9
LD.10. Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA.....	LD10
LD.11. Piutang Eks BDL	LD11
LD.12. Penyisihan Piutang tidak Tertagih Tahun 2022.....	LD12
LD.13. Aset Inventaris Eks BPPN	LD13
LD.14. Jumlah dan Nilai Aset Properti Eks BPPN Tahun 2022.....	LD14
LD.15. Rincian Aset Nostro	LD15
LD.16. Surat Berharga Non Saham Eks BPPN	LD16
LD.17. Aset Saham Eks BPPN.....	LD17
LD.18. Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA.....	LD18
LD.19. Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA.....	LD19
LD.20. Aset Saham Eks Kelolaan PT PPA.....	LD20
LD.21. Nilai Pasar Atas ABMA/T Yang Belum Dapat Dilunasi/Diselesaikan	LD21
LD21b Nilai Pasar Atas ABMA/T Yang Ditetapkan Besaran Kompensasinya	LD21b
LD.22. Daftar ABMA/T Yang Telah Diterbitkan KMK Pelepasan Tahun 2022	LD22
LD.23. Daftar Barang Milik Negara Eks BMN Idle yang Diserahkan Kepada Pengguna Barang Atau Pemda Periode Tahun 2022.....	LD23
LD.24. Daftar Barang Milik Negara Eks BMN Idle yang Diterima Pengelola Barang	LD24
LD25a. Utang Retur KPPN.....	LD25a
LD25b. Utang TDF.....	LD25b
LD25c. Utang Transfer ke Daerah Tahun 2022	LD25c
LD.26. Utang SBN Jangka Pendek dan Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Rupiah Tahun 2022.....	LD26
LD.27. Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Valas Tahun 2022	LD27
LD27a Outstanding Utang PDN.....	LD27a
LD.28. Outstanding Utang Program Pinjaman Luar Negeri per Kreditor Tahun 2022	LD28
LD.29. Outstanding Utang Project Pinjaman Luar Negeri per Kreditor Tahun 2022.....	LD29
LD.30. Klarifikasi Utang Pemerintah berdasarkan Jatuh Tempo (Umur Utang).....	LD30
LD.30.a. Unamortized Discount/Premium Obligasi Negara Rupiah Tahun 2022.....	LD30a
LD.30.b. Unamortized Discount/Premium Obligasi Negara Valas per 31 Desember 2022.....	LD30b
LD.30.c. Unamortized Discount/Premium SBSN Rupiah Tahun 2022	LD30c

LD.30.d. Unamortized Discount/Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah Tahun 2022	LD30d
LD.30.e. Unamortized Discount/Premium SPN dan SPN Syariah Tahun 2022	LD30e
LD.31.a. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Pendapatan, Beban, dan Surplus/ Defisit per 31 Desember 2022	LD31a
LD.31.b. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya - Lembaga Non Struktural Dana APBN dan NON APBN Tahun 2022	LD31b
LD.31.c. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya - Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2022.....	LD31c
LD.32.a. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) - Laporan Laba Rugi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022.....	LD32a
LD.32.b. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) – Neraca per 31 Desember 2022	LD32b
LD.32.c. Nilai BPYBDS Pada Persero/Perum Tahun 2022.....	LD32c
LD.32.d. Penyertaan Modal Pemerintah Pada Non BUMN (Minoritas) Tahun 2022.....	LD32d
LD.32.e. Ikhtisar Laporan Keuangan Non-BUMN (Minoritas) – Laporan Rugi Laba Tahun 2022.....	LD32e
LD.32.f. Ikhtisar Laporan Keuangan Non-BUMN (Minoritas) – Neraca Tahun 2022	LD32f
LD.32.g. Perusahaan Negara/Lembaga dibawah Pembinaan Kemenkeu – Laporan Rugi Laba	LD32g
LD.32.h. Perusahaan Negara/Lembaga dibawah Pembinaan Kemenkeu – Neraca	LD32h
LD.32.i. Laporan Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional.....	LD32i
LD.32.j. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan	LD32j
LD.32.k. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.....	LD32k
LD.32.l. Penjelasan Mutasi Lain Lain Perusahaan Negara (BUMN)	LD32l

C. LAMPIRAN LO

LE.1. Daftar Realisasi Pendapatan Hibah Terkait Penanggulangan Pandemi COVID-19 Tahun 2022	LE1
LE.2. Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2022 Per Kementerian/Lembaga Penerima Hibah	LE2

DAFTAR SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEI	:	Bursa Efek Indonesia
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BP MIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CFO	:	<i>Chief Financial Officer</i>
CGI	:	<i>Consultative Group on Indonesia</i>
COO	:	<i>Chief Operating Officer</i>
CPA	:	<i>Contract Price Aramco</i>
CPI	:	<i>Consumer Price Index</i>
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat

EDI	:	<i>Electronic Data Interchange</i>
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
HJE	:	Harga Jual Eceran
ICP	:	<i>Indonesian Crude Price</i>
INDRA	:	<i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
JBT	:	Jenis Bahan Bakar Tertentu
JBKP	:	Jenis Bahan Bakar Penugasan Khusus
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKP	:	Kartu Kredit Pemerintah
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
KL	:	Kilo Liter
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUTPA	:	Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam
LAK	:	Laporan Arus Kas
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKI	:	Lembaga Keuangan Internasional
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
MA	:	Mata Anggaran (Penerimaan dan Pengeluaran)
MBOPD	:	<i>Milion Barel of Oil Per Day</i>
MBOEPD	:	<i>Milion Barrel Oil of Equivalent Per Day</i>
MMKBN	:	Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MPN G-2	:	Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua
MT	:	Metrik Ton
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPG	:	Non Public Goods

NPL	:	<i>Non-Performing Loan</i>
PC-PEN	:	Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Pihak Ketiga
PG	:	Public Goods
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PKP2B	:	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	<i>Past Service Liability</i>
PSO	:	<i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
PT PLN (Persero)	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RANTF	:	<i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RIPPEN	:	Rekening Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SABL	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain
SABS	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAIP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Sisa Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPBL	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Badan Lainnya
SAPP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAPPP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman
SATD Dana Desa	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
SATK	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SAUP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah

SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SiAP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
SIBOR	:	<i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Sikubah	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPAN	:	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	<i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SPPD	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SUN	:	Surat Utang Negara
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TNP	:	<i>Treasury National Polling</i>
TP	:	Tim Pembersihan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	<i>Treasury Single Account</i>
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
UAKBUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
UAKKPA BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAKPA BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAPPA BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran BUN
UAPPA-E1 BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I
		BUN
UAKPBUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN
UAPBUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
UABUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN
USD	:	<i>United State Dollar</i>
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP	:	Uang Persediaan

TKDD : Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TUP : Tambahan Uang Persediaan
TWh : *Tera Whatt Hour*

RINGKASAN

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam rangka pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAP BUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAP BUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK).

LKBUN Tahun 2022 *Audited* merupakan gabungan laporan keuangan entitas pelaporan BUN, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan kementerian Negara/lembaga, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran BUN menggambarkan perbandingan antara Pagu Anggaran BUN Tahun 2022 *Audited* dengan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran BUN menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan serta SiLPA/SiKPA periode Tahun 2022 *Audited*.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah BUN pada Tahun 2022 *Audited* adalah sebesar **Rp238,34 triliun** atau mencapai **110,26 persen** dari anggarannya. Jumlah realisasi Pendapatan tersebut terdiri dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp232,65 triliun** atau **110,47 persen**, dan realisasi Penerimaan Hibah sebesar **Rp5,70 triliun** atau **102,40 persen**. Sementara itu, realisasi Belanja BUN pada Tahun 2022 *Audited* adalah sebesar **Rp2.011,59 triliun** atau **98,52 persen** dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Negara BUN tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.195,35 triliun** atau **98,87 persen** dari anggarannya, dan realisasi Transfer untuk Daerah sebesar **Rp816,23 triliun** atau **97,99 persen** dari anggarannya.

Realisasi Defisit Anggaran BUN Tahun 2022 *Audited* adalah sebesar **Rp1.773,25 triliun** atau **97,12 persen** dari anggarannya. Sedangkan realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2022 *Audited* adalah sebesar **Rp590,98 triliun** atau **70,34 persen** dari anggarannya. Dari data tersebut maka SiKPA sebelum Pendapatan dan Belanja K/L sebesar **Rp1.182,27 triliun**.

Ringkasan LRA BUN Tahun 2022 *Audited* disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022			31 Desember 2021
	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah BUN	216.155.838.535.000	238.341.910.771.353	110,26%	185.630.214.779.513
Penerimaan Negara Bukan Pajak	210.593.452.863.000	232.645.855.357.561	110,47%	180.617.172.344.827
Penerimaan Hibah	5.562.385.672.000	5.696.055.413.792	102,40%	5.013.042.434.686
Belanja Negara BUN	2.041.902.928.700.000	2.011.588.067.001.453	98,52%	1.595.598.098.113.435
Belanja Pemerintah Pusat	1.208.956.098.137.000	1.195.353.240.933.757	98,87%	809.890.512.438.057
Transfer untuk Daerah	832.946.830.563.000	816.234.826.067.696	97,99%	785.707.585.675.378
Surplus (Defisit) Anggaran	(1.825.747.090.165.000)	(1.773.246.156.230.100)	97,12%	(1.409.967.883.333.922)
Pembiayaan	840.226.322.190.000	590.978.140.090.153	70,34%	871.723.163.588.761
SiLPA (SiKPA) Sebelum Pendapatan dan Belanja K/L	(985.520.767.975.000)	(1.182.268.016.139.947)	119,96%	(538.244.719.745.161)

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih 31 Desember 2021 adalah **Rp337,78 triliun**, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah **Rp130,56 triliun**, Penyesuaian sebesar **Rp10,62 triliun**, sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 adalah **Rp478,96 triliun**.

Ringkasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUN Tahun 2022 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126
Penggunaan SAL	0	(143.966.330.873.078)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	130.558.467.051.951	96.658.876.443.878
Penyesuaian	10.619.682.449.104	(3.032.620.083.580)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	478.957.156.319.401	337.779.006.818.346

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BUN mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp5.113,36 triliun** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp538,71 triliun**, Investasi Jangka Panjang sebesar **Rp3.759,59 triliun**, Aset Tetap sebesar **Rp1,05 triliun**, Properti Investasi sebesar **Rp31,06 triliun**, Piutang Jangka Panjang sebesar **Rp52,14 triliun** dan Aset Lainnya sebesar **Rp730,81 triliun**.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp8.375,62 triliun** yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp851,24 triliun** dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp7.524,38 triliun**. Sementara itu, jumlah Ekuitas Neto per 31 Desember 2022 adalah sebesar **minus Rp3.262,26 triliun**.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset		
Aset Lancar	538.706.231.713.917	400.082.938.092.004
Investasi Jangka Panjang	3.759.590.948.039.254	3.478.345.928.647.637
Aset Tetap	1.046.802.105.728	879.331.806.294
Properti Investasi	31.062.733.305.865	
Piutang Jangka Panjang	52.136.458.878.032	54.030.083.179.083
Aset Lainnya	730.812.322.007.366	695.038.764.862.218
Jumlah Aset	5.113.355.496.050.162	4.628.377.046.587.236
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	851.240.032.862.444	622.158.867.092.414
Kewajiban Jangka Panjang	7.524.375.730.483.493	6.848.330.099.010.533
Jumlah Kewajiban	8.375.615.763.345.937	7.470.488.966.102.947
Ekuitas	(3.262.260.267.295.775)	(2.842.111.919.515.711)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.113.355.496.050.162	4.628.377.046.587.236

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional memberikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BUN untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah Tahun 2022 *Audited*. Laporan Operasional memberikan informasi bahwa pendapatan operasional selama Tahun 2022 *Audited* adalah **Rp527,60 triliun**, beban operasional sebesar **Rp2.109,52 triliun** dan defisit kegiatan non operasional sebesar **Rp136,08 triliun**, sehingga terdapat Defisit sebesar **Rp1.718,00 triliun**.

Ringkasan Laporan Operasional BUN Tahun 2022 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kegiatan Operasional		
Pendapatan Operasional	527.599.941.416.642	392.511.848.105.023
Beban Operasional	2.109.524.586.743.946	1.826.730.496.401.606
Surplus (Defisit) Keg. Operasional	(1.581.924.645.327.304)	(1.434.218.648.296.583)
Kegiatan Non Operasional	(136.076.943.706.849)	71.016.861.010.620
Pos Luar Biasa		-
Surplus/Defisit-LO	(1.718.001.589.034.153)	(1.363.201.787.285.963)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun 2022 Audited, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022. Saldo Akhir Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas di Kementerian Negara/Lembaga (K/L) per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp536,44 triliun**. Saldo Akhir tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp374,27 triliun**, dan kenaikan Kas sebesar **Rp150,60 triliun** dan koreksi dan Penyesuaian sebesar **Rp11,57 triliun**. Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari arus kas aktivitas operasi sebesar **minus Rp220,43 triliun**, arus kas aktivitas investasi sebesar **minus Rp347,17 triliun**, arus kas aktivitas pendanaan sebesar **Rp698,17 triliun**, dan arus kas aktivitas transitoris sebesar **Rp20,04 Trilyun**.

Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2022 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal Kas BUN, KPPN, BLU, dan di K/L	374.272.452.880.577	385.326.463.515.635
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(220.433.644.891.532)	(535.924.760.649.717)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(347.174.022.486.045)	(383.858.647.637.838)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	698.166.134.429.528	1.016.442.284.731.433
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	20.042.387.123.266	39.284.569.942.339
Kenaikan (Penurunan) Kas Sebelum Penyesuaian	150.600.854.175.217	135.943.446.386.217
Koreksi SILPA	9.137.971.841.987	(2.548.945.575.660)
Penyesuaian Selisih Kurs	3.676.340.697.318	116.426.281.222
Akumulasi Koreksi Pembukuan	(1.244.462.713.872)	(598.606.853.759)
Penggunaan SAL	-	(143.966.330.873.078)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penyesuaian	162.170.704.000.650	(11.054.010.635.058)
Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan di K/L	536.443.156.881.227	374.272.452.880.577

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **minus Rp2.842,11 triliun**, Defisit LO sebesar **Rp1.718,00 triliun**, Koreksi-Koreksi yang Langsung Mengurangi Ekuitas sebesar **Rp1,35 triliun**, Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp1.301,11 triliun**, dan Mutasi Ekuitas BUN di KL sebesar **minus Rp1,90 triliun**. Dari data tersebut diketahui bahwa penurunan ekuitas sebesar **Rp420,15 triliun** dan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2022 adalah **minus Rp3.262,26 triliun**.

Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2022 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	(2.842.111.919.515.711)	(2.195.273.055.887.776)
Surplus/Defisit LO	(1.718.001.589.034.153)	(1.363.201.787.285.963)
Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(1.348.967.550.000)	110.507.477.072.374
Transaksi Antar Entitas	1.301.105.973.365.087	584.151.119.512.999
Mutasi Ekuitas BUN di K/L	(1.903.764.560.998)	21.704.327.072.655
Kenaikan/Penurunan ekuitas	(420.148.347.780.064)	(646.838.863.627.935)
Ekuitas Akhir	(3.262.260.267.295.775)	(2.842.111.919.515.711)

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum penyusunan LK BUN, metodologi penyusunan LKBUN dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022			31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	B.2.1	216.155.838.535.000	238.341.910.771.353	110,26%	185.630.214.779.513
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.1	210.593.452.863.000	232.645.855.357.561	110,47%	180.617.172.344.827
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.1.1	140.584.459.920.000	150.863.599.696.975	107,31%	98.470.753.470.273
2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.1.2	37.089.849.454.000	40.597.091.946.149	109,46%	30.496.823.293.877
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.1.3	32.919.143.489.000	41.185.163.714.437	125,11%	51.649.595.580.677
II. Penerimaan Hibah	B.2.1.2	5.562.385.672.000	5.696.055.413.792	102,40%	5.013.042.434.686
B. BELANJA BUN	B.2.2	2.041.902.928.700.000	2.011.588.067.001.453	98,52%	1.595.598.098.113.435
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.208.956.098.137.000	1.195.353.240.933.757	98,87%	809.890.512.438.057
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	148.125.030.307.000	144.760.288.597.066	97,73%	139.117.339.442.990
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	1.508.918.595.000	1.249.177.651.197	82,79%	1.167.544.144.617
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.3	386.940.303.647.000	386.341.819.789.815	99,85%	343.495.383.443.849
4. Belanja Subsidi	B.2.2.1.4	258.674.076.847.000	252.812.907.867.326	97,73%	242.086.818.340.688
5. Belanja Hibah	B.2.2.1.5	7.067.685.663.000	5.803.272.496.643	82,11%	4.319.001.438.779
6. Belanja Lain Lain	B.2.2.1.6	406.640.083.078.000	404.385.774.531.710	99,45%	79.704.425.627.134
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2	832.946.830.563.000	816.234.826.067.696	97,99%	785.707.585.675.378
1. Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1	764.946.830.563.000	748.328.687.677.265	97,83%	713.853.875.664.349
a. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1	736.190.566.993.000	719.578.751.333.265	97,74%	679.586.677.685.349
1) Dana Transfer Umum	B.2.2.2.1.1.1	546.596.723.927.000	546.414.110.278.434	99,97%	494.948.379.700.065
a) Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	168.596.723.927.000	168.414.110.278.434	99,89%	117.156.989.412.065
b) Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	378.000.000.000.000	378.000.000.000.000	100,00%	377.791.390.288.000
2) Dana Transfer Khusus	B.2.2.2.1.1.2	189.593.843.066.000	173.164.641.054.831	91,33%	184.638.297.985.284
a) Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	60.874.000.000.000	54.783.954.054.112	90,00%	57.069.673.906.021
b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	128.719.843.066.000	118.380.687.000.719	91,97%	127.568.624.079.263

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022			31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
b. Dana Insentif Daerah	B.2.2.2.1.2	7.000.000.000.000	6.993.672.774.000	99,91%	13.464.278.795.000
c. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta	B.2.2.2.1.3	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100,00%	1.320.000.000.000
d. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.4	20.436.263.570.000	20.436.263.570.000	100,00%	19.482.919.184.000
2. Dana Desa	B.2.2.2.2	68.000.000.000.000	67.906.138.390.431	99,86%	71.853.710.011.029
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	B.2.3	(1.825.747.090.165.000)	(1.773.246.156.230.100)	97,12%	(1.409.967.883.333.922)
D. PEMBIAYAAN	B.2.4	840.226.322.190.000	590.978.140.090.153	70,34%	871.723.163.588.761
I. Pembiayaan Dalam Negeri	B.2.4.1	863.264.003.212.000	563.782.350.533.612	65,31%	881.632.527.734.210
1. Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)	B.2.4.1.1	127.300.000.000.000	-	0,00%	143.966.330.873.078
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.2	4.163.572.651.000	3.952.157.097.370	94,92%	3.934.601.833.324
3. Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	-	667.176.265.512		459.418.995.546
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	961.396.228.000.000	658.816.905.421.376	68,53%	877.506.537.447.298
a. Penerimaan Penjualan Surat Berharga Negara		-	1.097.456.235.269.295		1.352.768.254.205.300
b. Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara		-	(438.639.329.847.919)		(475.261.716.758.002)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	1.753.633.803.000	8.201.282.354.241	467,67%	944.178.723.182
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		3.581.793.803.000	10.125.528.103.890	282,69%	2.482.142.954.931
b. Pembayaran cicilan pokok PDN		(1.828.160.000.000)	(1.924.245.749.649)	105,26%	(1.537.964.231.749)
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah (Neto)	B.2.4.1.6	(210.218.568.242.000)	(86.724.307.604.887)	41,25%	(113.462.804.138.218)
7. Pengeluaran Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(1.130.863.000.000)	(1.130.863.000.000)	100,00%	(2.715.736.000.000)
8. Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(20.000.000.000.000)	(20.000.000.000.000)	100,00%	(29.000.000.000.000)
II. Pembiayaan Luar Negeri	B.2.4.2	(23.037.681.022.000)	27.195.789.556.541	(118,05%)	(9.909.364.145.449)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	B.2.4.2.1	63.543.958.677.000	108.283.083.586.601	170,41%	74.168.116.606.248
a. Penarikan Pinjam Tunai	B.2.4.2.1.1	28.700.000.000.000	65.592.711.439.666	228,55%	41.564.200.800.000
b. Penarikan Pinjaman Kegiatan	B.2.4.2.1.2	34.843.958.677.000	42.690.372.146.935	122,52%	32.603.915.806.248
2. Pemberian Pinjaman	B.2.4.2.2	(3.578.099.699.000)	(1.805.388.784.603)	50,46%	(1.994.500.362.196)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(83.003.540.000.000)	(79.281.905.245.457)	95,52%	(82.082.980.389.501)
E. SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	B.2.5	(985.520.767.975.000)	(1.182.268.016.139.947)	119,96%	(538.244.719.745.161)

Jakarta, 22 Mei 2023
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.2.1.	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126
SAL Awal Setelah Penyesuaian		337.779.006.818.346	388.119.081.331.126
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.2.2.	0	(143.966.330.873.078)
SAL Setelah Penggunaan SAL		337.779.006.818.346	244.152.750.458.048
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.2.3.	130.558.467.051.951	96.658.876.443.878
SAL Akhir Sebelum Penyesuaian Tahun Berjalan		468.337.473.870.297	340.811.626.901.926
Penyesuaian Pembukuan	C.2.4.	11.648.084.260.735	(3.021.299.958.783)
Penyesuaian Lain-Lain	C.2.5.	(1.028.401.811.631)	(11.320.124.797)
Total Penyesuaian		10.619.682.449.104	(3.032.620.083.580)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.2.6.	478.957.156.319.401	337.779.006.818.346

Jakarta, 22 Mei 2023
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas			
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	D.2.1.1.1	238.395.756.100.437	196.189.849.541.605
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing	D.2.1.1.2	155.700.705.471.006	57.493.701.263.708
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.3	5.451.617.307.850	6.202.854.028.961
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.4	2.774.997.342.454	721.442.531.795
Kas Dalam Transito	D.2.1.1.5	799.340.452	150.229.274
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.6	215.927.152.362	248.050.262.873
Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	D.2.1.1.7	2.895.708.729.836	1.745.056.899.938
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.8	29.899.867.163	718.141.075.514
Kas pada Badan Layanan Umum	D.2.1.1.9	78.971.222.880.967	81.993.516.161.352
Jumlah Kas dan Setara Kas		484.436.634.192.527	345.312.761.995.020
Uang Muka			
Uang Muka dari Rekening Khusus	D.2.1.1.10	20.878.963.110	25.427.588.614
Jumlah Uang Muka		20.878.963.110	25.427.588.614
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)			
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	D.2.1.1.11	22.006.153.883	32.048.488.685
Uang Muka Belanja (Prepayment)	D.2.1.1.12	10.000.000	10.000.000
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)		22.016.153.883	32.058.488.685
Piutang			
Pendapatan yang masih harus diterima	D.2.1.1.13	4.121.830.752.438	4.447.535.675.473
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.14	241.374.054.869.037	229.086.433.471.524
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.15	7.695.816.466.255	6.966.022.901.429
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.16	23.717.712.129.347	22.932.217.837.753

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Piutang BLU	D.2.1.1.17	0	1.859.450.374
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak)	D.2.1.1.18	(222.683.814.334.009)	(208.722.626.641.792)
Piutang PFK	D.2.1.1.19	22.005.766	143.818.277
Jumlah Piutang		54.225.621.888.834	54.711.586.513.038
Persediaan			
Persediaan	D.2.1.1.20	1.080.515.563	1.103.506.647
Jumlah Persediaan		1.080.515.563	1.103.506.647
Jumlah Aset Lancar		538.706.231.713.917	400.082.938.092.004
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	D.2.1.2.1	18.311.462.826.420	16.913.827.101.272
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.2	(4.813.478.526.898)	(5.259.103.797.828)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.3	239.872.791.752.439	201.663.256.483.208
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	D.2.1.2.4	(760.196.912.027)	(582.572.724.048)
Jumlah Investasi Non Permanen		252.610.579.139.934	212.735.407.062.604
Investasi Permanen			
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.5	2.909.868.558.921.828	2.647.354.332.364.797
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	D.2.1.2.6	8.958.055.146	8.958.055.146
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.7	597.102.851.922.346	618.247.231.165.090
Jumlah Investasi Permanen		3.506.980.368.899.320	3.265.610.521.585.033
Jumlah Investasi Jangka Panjang		3.759.590.948.039.254	3.478.345.928.647.637
ASET TETAP			
Tanah	D.2.1.3.1	26.594.107.000	26.594.107.000
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	524.353.291.311	494.147.390.874
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	43.006.647.389	26.384.760.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	1.225.899.884.858	944.866.256.194
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	44.013.820.603	60.614.862.626
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	34.045.320.632	29.433.114.852
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(851.110.966.065)	(702.708.685.252)
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		1.897.913.071.793	1.582.040.491.546
Jumlah Aset Tetap (Bersih)		1.046.802.105.728	879.331.806.294

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	D.2.1.4.1	85.204.280.160.868	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	D.2.1.4.2	(54.141.546.855.003)	0
Jumlah Properti Investasi		31.062.733.305.865	0
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.5.1	52.972.302.791.953	54.879.424.507.922
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.5.2	2.236.811.940.347	2.058.522.740.927
(Peny. Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang)	D.2.1.5.3	(3.072.655.854.268)	(2.907.864.069.766)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		52.136.458.878.032	54.030.083.179.083
ASET LAINNYA			
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	D.2.1.6.1	190.240.614.474	183.121.621.530
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.6.2	319.881.409.961.767	273.565.292.980.606
Dana Cadangan Penjaminan	D.2.1.6.3	11.885.648.000.000	10.754.785.000.000
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	D.2.1.6.4	10.340.470.045.889	8.724.468.057.192
Dana Jangka Panjang	D.2.1.6.5	28.798.237.380.309	16.003.441.297.997
Aset Lain-lain	D.2.1.6.6	614.634.699.183.703	672.657.039.394.723
Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL	D.2.1.6.7	29.625.443.493.878	24.344.018.870.873
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		1.015.356.148.680.020	1.006.232.167.222.921
(Akumulasi Penyusutan pada Aset Lainnya)	D.2.1.6.8	(284.543.826.672.654)	(311.193.402.360.703)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		730.812.322.007.366	695.038.764.862.218
JUMLAH ASET		5.113.355.496.050.162	4.628.377.046.587.236
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.2.1.1	3.916.380.112.882	3.765.331.476.323
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	111.016.588.119.672	46.198.539.207.971
Utang Bunga	D.2.2.1.3	97.401.735.689.433	85.472.157.396.255
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	15.233.102.271.564	3.907.340.658.138
Utang Transfer	D.2.2.1.5	49.842.043.112.377	40.517.736.709.001
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	524.941.666.493.795	400.156.608.631.936
<i>Unamortized Discount</i>		(414.105.480.000)	(58.354.649.000)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
<i>Unamortized Premium</i>		795.587.678.000	127.025.791.000
Utang Surat Berharga Negara-Jangka Pendek	D.2.2.1.7	49.028.000.000.000	42.305.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(548.373.999.000)	(337.659.241.000)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	0	1.540.939
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	23.352.703.695	49.141.853.254
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	4.056.160.026	55.997.717.597
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		851.240.032.862.444	622.158.867.092.414
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	D.2.2.2.1	6.361.787.234.099.673	5.732.372.440.844.653
<i>Unamortized Discount</i>		(52.953.994.105.000)	(45.412.322.167.000)
<i>Unamortized Premium</i>		43.768.938.860.000	50.766.925.041.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.2	24.446.771.532.148	0
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.3	27.102.028.797.720	32.398.332.067.684
Utang Jangka Panjang-Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.4	18.141.468.578.073	11.347.703.253.209
Utang Jangka Panjang DN Lainnya	D.2.2.2.5	279.218.156.681.472	339.029.505.513.777
Jumlah Utang Jangka Panjang DN		6.701.510.604.444.086	6.120.502.584.553.323
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.6	822.838.479.742.048	727.802.460.644.502
Utang Jangka Panjang LN Lainnya	D.2.2.2.7	26.646.297.359	25.053.812.708
Jumlah Utang Jangka Panjang LN		822.865.126.039.407	727.827.514.457.210
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		7.524.375.730.483.493	6.848.330.099.010.533
JUMLAH KEWAJIBAN		8.375.615.763.345.937	7.470.488.966.102.947
EKUITAS	D.2.3	(3.262.260.267.295.775)	(2.842.111.919.515.711)
JUMLAH EKUITAS NETO		(3.262.260.267.295.775)	(2.842.111.919.515.711)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.113.355.496.050.162	4.628.377.046.587.236

Jakarta, 22 Mei 2023

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

**BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL**

**Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
A. KEGIATAN OPERASIONAL			
I. Pendapatan			
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak		509.699.262.247.570	366.194.784.269.939
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1	182.453.640.268.794	131.695.429.899.203
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	E.2.1.2	819.575	22.145.205.009
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.3	327.245.621.159.201	234.477.209.165.727
2. Pendapatan Hibah	E.2.1.4	17.900.679.169.072	26.317.063.835.084
a. Pendapatan Hibah Dalam Negeri		6.368.840.606.890	6.509.671.226.490
b. Pendapatan Hibah Luar Negeri		11.531.838.562.182	19.807.392.608.594
Jumlah Pendapatan	E.2.1	527.599.941.416.642	392.511.848.105.023
II. Beban			
1. Beban Pegawai	E.2.2.1	166.825.221.592.907	138.087.396.637.995
2. Beban Persediaan	E.2.2.2	1.451.347.141	2.582.771.336
3. Beban Jasa	E.2.2.3	287.297.634.163	255.076.666.188
4. Beban Pemeliharaan	E.2.2.4	19.052.080	41.587.640
5. Beban Barang Lainnya	E.2.2.5	958.794.033.443	895.609.766.585
6. Beban Bunga	E.2.2.6	409.393.545.381.079	370.196.352.562.436
7. Beban Subsidi	E.2.2.7	253.662.415.148.483	242.070.150.217.497
8. Beban Hibah	E.2.2.8	5.803.272.496.643	4.319.001.994.301
9. Beban Transfer	E.2.2.9	819.069.477.047.347	773.171.878.446.225
10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.2.10	28.515.372.568.357	32.022.203.116.217
11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.2.11	14.826.408.996.259	92.734.242.481.030
12. Beban Lain-Lain	E.2.2.12	410.181.311.446.044	172.975.960.154.156
Jumlah Beban	E.2.2	2.109.524.586.743.946	1.826.730.496.401.606
Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional		(1.581.924.645.327.304)	(1.434.218.648.296.583)
B. KEGIATAN NON OPERASIONAL			
1. Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	E.2.3.1	(81.309.693.787)	(248.052.291.722)
2. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jk. Panjang	E.2.3.2	(1.337.452.801.614)	(1.854.340.752.507)
3. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.3.3	(134.658.181.211.448)	73.119.254.054.849
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	E.2.3	(136.076.943.706.849)	71.016.861.010.620
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(1.718.001.589.034.153)	(1.363.201.787.285.963)
C. POS LUAR BIASA			
1. Pendapatan Luar Biasa		-	-
2. Beban Luar Biasa		-	-
Jumlah Pos Luar Biasa		-	-

D. SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(1.718.001.589.034.153)	(1.363.201.787.285.963)

Jakarta, 22 Mei 2023
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
I Arus Kas Masuk				
1	Pendapatan Perpajakan	F.2.1.1	2.034.552.436.470.075	1.547.841.051.644.624
a	Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1	998.213.803.714.799	696.676.588.239.336
b	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	F.2.1.1.2	687.609.450.256.247	551.900.480.905.676
c	Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.3	23.264.663.527.700	18.924.786.654.220
d	Cukai	F.2.1.1.4	226.880.753.312.323	195.517.827.106.916
e	Pajak Lainnya	F.2.1.1.5	7.686.100.141.265	11.125.975.966.383
f	Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.6	90.897.665.517.741	73.695.392.772.093
2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.1.2	595.010.280.203.205	458.000.251.283.812
a	Penerimaan Sumber Daya Alam	F.2.1.2.1	268.770.896.270.784	149.489.367.918.723
b	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	F.2.1.2.2	40.597.091.946.149	30.496.823.293.877
c	Penerimaan PNBP Lainnya	F.2.1.2.3	195.739.979.810.678	152.011.308.573.915
d	Penerimaan BLU	F.2.1.2.4	89.902.312.175.594	126.002.751.497.297
3	Pendapatan Hibah	F.2.1.3	5.696.055.413.792	5.013.042.434.686
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)			2.635.258.772.087.072	2.010.854.345.363.122
II Arus Kas Keluar				
1	Belanja Pegawai	F.2.1.4	402.441.656.300.334	387.752.487.126.783
2	Belanja Barang	F.2.1.5	426.149.081.519.090	530.059.299.058.191
3	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	F.2.1.6	386.341.819.789.815	343.495.383.443.849
4	Belanja Subsidi	F.2.1.7	252.812.907.867.326	242.086.818.340.688
5	Belanja Hibah	F.2.1.8	5.803.272.496.643	4.319.001.438.779
6	Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.9	161.523.078.405.990	173.654.105.302.037
7	Belanja Lain-lain	F.2.1.10	404.385.774.531.710	79.704.425.627.134
8	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.11	62.998.688.562.915	71.777.109.535.555
9	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.12	100.823.947.472.776	41.566.421.176.518
10	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.13	4.591.474.242.743	3.813.458.699.992
11	Transfer Dana Alokasi Umum	F.2.1.14	378.000.000.000.000	377.791.390.288.000
12	Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.15	54.783.954.054.112	57.069.673.906.021
13	Transfer Dana Otonomi Khusus, DK-DIY, DID	F.2.1.16	28.749.936.344.000	34.267.197.979.000
14	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.17	118.380.687.000.719	127.568.624.079.263
15	Dana Desa	F.2.1.18	67.906.138.390.431	71.853.710.011.029
Jumlah Arus Kas keluar (A.II)			2.855.692.416.978.604	2.546.779.106.012.839
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I-A.II)			(220.433.644.891.532)	(535.924.760.649.717)
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
I Arus Kas Masuk				
1	Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1	584.273.977.400	492.727.054.810
2	Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.2	667.176.265.512	459.418.995.546
3	Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.3	22.000.000.000	0
4	Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.2.4	27.059.703.613.522	24.437.821.226.907
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)			28.333.153.856.434	25.389.967.277.263
II Arus Kas Keluar				
1	Belanja Modal	F.2.2.5	240.570.302.124.070	239.632.253.549.976
2	Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.6	20.000.000.000.000	29.000.000.000.000

URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
3	Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.7	0	18.620.000.000.000
4	Penyertaan Modal Negara	F.2.2.8	60.664.867.718.409	93.092.721.792.114
5	Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.9	54.272.006.500.000	28.903.639.573.011
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)			375.507.176.342.479	409.248.614.915.101
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I – B.II)			(347.174.022.486.045)	(383.858.647.637.838)
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
I Arus Kas Masuk				
1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1	1.107.581.763.373.185	1.499.216.728.033.309
2	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2	108.283.083.586.601	74.168.116.606.248
3	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.3	3.952.157.097.370	3.934.601.833.324
4	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.4	0	0
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)			1.219.817.004.057.156	1.577.319.446.472.881
II Arus Kas Keluar				
1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.5	440.563.575.597.568	476.799.680.989.751
2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.6	79.281.905.245.457	82.082.980.389.501
3	RDI/RPD	F.2.3.7	1.805.388.784.603	1.994.500.362.196
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)			521.650.869.627.628	560.877.161.741.448
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I-C.II)			698.166.134.429.528	1.016.442.284.731.433
D ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS				
1	Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	F.2.4.1	151.170.449.070	(267.579.611.995)
2	Transito (Netto)	F.2.4.2	(3.468.162.038.412)	(19.209.339.592.828)
3	Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	F.2.4.3	23.360.027.823.784	58.761.639.376.438
4	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	F.2.4.4	(649.111.176)	(150.229.276)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris			20.042.387.123.266	39.284.569.942.339
KENAIKAN/PENURUNAN KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN (A+B+C+D)			150.600.854.175.217	135.943.446.386.217
KOREKSI SILPA			9.137.971.841.987	(2.548.945.575.660)
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS			3.676.340.697.318	116.426.281.222
PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI			0	0
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN			(1.244.462.713.872)	(598.606.853.759)
PENGUNAAN SAL			0	(143.966.330.873.078)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN		F.1.2	162.170.704.000.650	(11.054.010.635.058)
SALDO AWAL KAS		F.1.1	374.272.452.880.577	385.326.463.515.635
SALDO AKHIR KAS		F.1.3	536.443.156.881.227	374.272.452.880.577

Jakarta, 22 Mei 2023
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
A. EKUITAS AWAL	G.2.1	(2.842.111.919.515.711)	(2.195.273.055.887.776)
B. SURPLUS/DEFISIT LO	G.2.2	(1.718.001.589.034.153)	(1.363.201.787.285.963)
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
1. Koreksi Nilai Persediaan	G.2.3.1	500.000	2.965.004
2. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi	G.2.3.2	4.723.195.634.678	22.802.496.709.964
3. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	G.2.3.3	5.281.424.623.005	7.046.876.393.764
4. Koreksi SAL	G.2.3.4	9.431.660.376.686	(1.175.557.546.736)
5. Lain-lain	G.2.3.5	(20.785.248.684.369)	81.833.658.550.378
Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	G.2.3	(1.348.967.550.000)	110.507.477.072.374
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.2.4	1.301.105.973.365.087	584.151.119.512.999
E. KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI :	G.2.5	-	-
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L			
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran		(32.123.110.511)	(483.011.012.029)
2. Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah		1.150.651.829.898	(2.117.759.564.152)
3. Mutasi Kas BLU		(3.022.293.280.385)	24.305.097.648.836
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN Di K/L	G.2.6	(1.903.764.560.998)	21.704.327.072.655
G. KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS (B+C+D+E+F)		(420.148.347.780.064)	(646.838.863.627.935)
EKUITAS AKHIR (A+G)	G.2.7	(3.262.260.267.295.775)	(2.842.111.919.515.711)

Jakarta, 22 Mei 2023
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN 2022 *AUDITED*

A. PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/PMK.05/2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Penyaluran Dana bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam Bentuk Nontunai.
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.06/2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara.
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 Tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022.

A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Kewenangan
Menteri
Keuangan
selaku
Bendahara
Umum Negara*

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengelolaan fiskal dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Salah satu tugas Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangan pengelolaan fiskal (*Chief Financial Officer/CFO*) tersebut adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Tugas ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan fungsi BUN.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN berwenang untuk:

1. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
2. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
4. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

5. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
7. menyimpan uang negara;
8. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
10. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
11. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
12. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
13. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
14. melakukan penagihan piutang negara;
15. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
16. menyajikan informasi keuangan negara;
17. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Negara;
18. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
19. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Selain menjalankan fungsi dan kewenangan BUN tersebut di atas, Menteri Keuangan juga mendapat alokasi dana APBN yang hanya dikelola oleh BUN dan tidak dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain, yaitu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). Atas anggaran yang dikelola tersebut, Menteri Keuangan kemudian menunjuk Unit Kementerian Negara/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta, dengan alamat Gedung Juanda I Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat.

Anggaran dan transaksi yang dikelola Menteri Keuangan selaku BUN meliputi transaksi:

1. Utang Pemerintah terdiri dari:
 - a. Penerimaan utang luar negeri;
 - b. Penerimaan utang dalam negeri;
 - c. Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri;
 - d. Pembayaran cicilan utang luar negeri;
 - e. Pembayaran cicilan utang dalam negeri;
2. Hibah terdiri dari:
 - a. Hibah dalam bentuk uang;
 - b. Hibah dalam bentuk barang, jasa, dan/atau surat berharga;
3. Investasi Pemerintah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait Investasi Pemerintah, yang antara lain meliputi Penyertaan Modal pemerintah (PMN), Dana Bergulir, Kewajiban

Penjaminan, Penempatan Dana, dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional;

4. Pemberian Pinjaman yaitu transaksi pemberian pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau BUMD yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu ;
5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - a. Transfer ke Daerah yang berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Belanja Subsidi yaitu transaksi subbagian anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat;
7. Belanja Lain-lain yaitu transaksi untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah;
8. Transaksi Khusus antara lain:
 - a. belanja/ beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional;
 - b. belanja/ beban Fasilitas Penyiapan Proyek;
 - c. belanja/ beban Dukungan Kelayakan;
 - d. PNBPN yang dikelola oleh DJA, kecuali laba BUMN;
 - e. aset yang berada dalam pengelolaan DJKN;
 - f. belanja/beban Jamman sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
 - g. pendapatan dan belanja/ beban untuk pengelolaan kas negara;
 - h. utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pegawai;
 - i. utang PFK Pajak Rokok;
 - j. pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara;
 - k. belanja/ beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan; dan
 - l. pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valas pada kuasa BUN daerah
9. Badan Lainnya yaitu transaksi pada Badan Lainnya (yayasan dan lembaga non struktural) baik yang melalui APBN maupun yang tidak melalui mekanisme APBN;

Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan Menteri Keuangan selaku BUN di atas dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan

pertanggungjawabannya telah ditetapkan Kode Bagian Anggaran BUN (BABUN) yaitu BA 999.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas (LAK). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Entitas Pelaporan terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Kementerian Negara/Lembaga; dan
4. Bendahara Umum Negara.

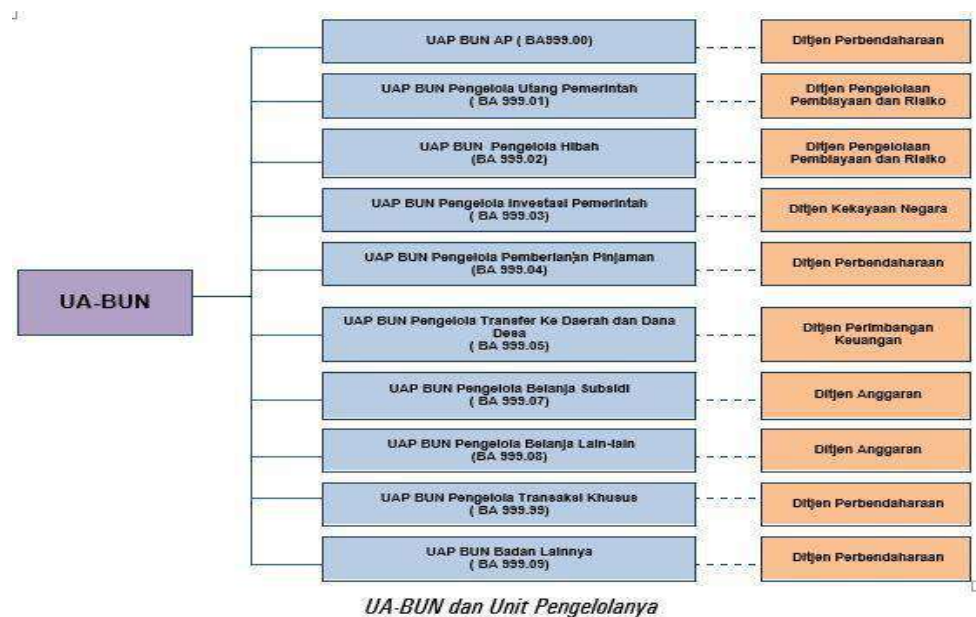
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan tugas BUN serta sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Keuangan selaku BUN merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dihasilkan dari Sistem Akuntansi BUN (SA-BUN). Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BABUN) dan Laporan Keuangan Kuasa BUN yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) beserta Catatan atas Laporan Keuangan.

LAK merupakan Laporan Keuangan yang menginformasikan penerimaan/pengeluaran kas ke/dari kas negara. LAK tidak terkait dengan BA tertentu tetapi mencakup seluruh Bagian Anggaran. Berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya akan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

SA-BUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SA-UP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemberian Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SA-TD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SA-BS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain

(SA-BL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SA-PBL).

Dalam rangka pelaksanaan SA-BUN, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAPBUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK). Setiap UAPBUN membawahi satu atau lebih Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) dan/atau Unit Akuntansi Kuasa BUN (UAKBUN). Struktur organisasi akuntansi dan penanggung jawab untuk setiap subsistem SA-BUN diatur pada masing-masing subsistem SA-BUN. Dalam rangka proses konsolidasi laporan keuangan BUN, Menteri Keuangan membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN (UA BUN). Selain itu dalam kerangka SiAP, Menteri Keuangan selaku BUN juga menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. Fungsi Kuasa BUN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah.



Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UAPBUN, UAKP BUN TK, dan UAK BUN Pusat dan Daerah, UA BUN melakukan proses konsolidasi setiap semester dan tahunan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang dilaksanakan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari masing-masing laporan serta melakukan eliminasi terhadap akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2022 *Audited* merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Koordinator Pembantu BUN yang disajikan per 31 Desember 2022, yang meliputi:

No.	BA	Uraian	Jumlah Satker
1	999.00	UAPBUN Akuntansi Pusat (UAPBUN AP)	185
2	999.01	BA BUN Pengelola Utang Pemerintah (DJPPR)	1
3	999.02	BA BUN Pengelola Hibah (DJPPR)	4
4	999.03	BA BUN Pengelola Investasi (DJKN)	16
5	999.04	BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (DJPb)	1
6	999.05	BA BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DJPK)	179
7	999.07	BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (DJA)	13
8	999.08	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (DJA)	14
9	999.99	Transaksi Khusus	30
10	999.09	Badan Lainnya: Yayasan dan LNS*) (DJPb)	1
Total Satuan Kerja			444

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara dan Jumlah Satker

Dengan demikian, selaku UABUN/entitas pelaporan adalah Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sedangkan anggaran dan transaksi BA-BUN dilaksanakan oleh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang sekaligus sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN)/entitas akuntansi.



Kebijakan Penyusunan LKBUN Tahun 2022 Audited

Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah yang disusun oleh KPPN dan Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat yang disusun oleh Direktorat PKN merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited, penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN menggunakan aplikasi SPAN. Kebijakan penyajian LK Kuasa BUN Tingkat KPPN dan Direktorat PKN dengan SPAN secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transaksi penerimaan dan pengeluaran dari penerbitan SP2D atau dokumen yang dipersamakan yang dilakukan oleh KPPN dan membebani rekening yang dikelola Direktorat PKN disajikan dalam Laporan Arus Kas

Kuasa BUN Direktorat PKN serta Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca pada KPPN;

2. Transaksi penerimaan dan pengeluaran dana retur SP2D dari rekening retur yang dikelola oleh Direktorat PKN disajikan dalam LAK LK Kuasa BUN Direktorat PKN, dan neraca pada KPPN. Untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran atas rekening retur yang dikelola oleh KPPN disajikan dalam LAK dan neraca KPPN bersangkutan;
3. Transaksi penerimaan negara melalui rekening penerimaan yang dikelola KPPN Khusus Penerimaan disajikan LAK KPPN Khusus Penerimaan serta LRA dan neraca KPPN mitra kerja Satuan Kerja.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2022 *Audited* disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman Pinjaman;
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain;
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRABUN disusun berdasarkan LRA yang disampaikan oleh UAPBUN dan UAKP BUN TK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LRA Pendapatan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan negara dan hibah. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pendapatan tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi pendapatan tahun anggaran berjalan. LRA Pendapatan disusun oleh UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos pendapatan berdasarkan pos-pos pendapatan yang disajikan pada LRA UAPBUN.
- b. LRA Belanja dan Transfer menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi belanja dan transfer. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian belanja dan transfer tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi belanja dan transfer tahun anggaran berjalan. LRA Belanja dan Transfer disusun oleh UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada seluruh UAPBUN dan LRA UAKPBUN TK selain UAPBUN AP. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos belanja berdasarkan pos-pos belanja yang disajikan pada LRA UAPBUN dan UAKPBUN TK selain UAPBUN AP.
- c. LRA Pembiayaan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pembiayaan, mengurangi realisasi pembiayaan tahun anggaran berjalan. LRA Pembiayaan disusun oleh UAPBUN yang melaksanakan aktivitas pembiayaan maupun oleh UAPBUN selaku pengelola kas negara (UAPBUN AP). UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.
- d. Penyajian SILPA dalam LRA BUN berisi selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

2. Neraca

Neraca menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca disusun oleh seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menyusun neraca dengan menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada neraca seluruh UAPBUN dan

UAKPBUN TK. Dalam hal terdapat pos-pos neraca yang disajikan ganda antara UAPBUN dan UAPBUN AP dilakukan pengurangan pada neraca UAPBUN agar tidak terjadi duplikasi penyajian. Dalam hal terdapat realisasi pos-pos neraca yang bersifat *reciprocal*, dilakukan eliminasi (*reciprocal elimination*).

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang meliputi data penerimaan dan pengeluaran kas melalui Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih, Rekening Kas Penempatan, Rekening Khusus, Rekening Penerimaan, dan Rekening Pengeluaran termasuk transaksi pendapatan dan belanja operasional pada BLU. UAPBUN AP menyusun LAK dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LAK seluruh UAKBUN Daerah dan UAKBUN Pusat.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah sampai dengan periode 31 Desember 2022. Laporan Operasional disusun berdasarkan data pendapatan dan beban atas kegiatan operasional serta kegiatan nonoperasional yang dilakukan oleh seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam rangka penyajian Laporan Operasional Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos Laporan Operasional berdasarkan hasil konsolidasi pos-pos Laporan Operasional yang disajikan pada Laporan Operasional seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan data ekuitas akhir tahun lalu yang merupakan ekuitas awal tahun berjalan ditambah surplus/defisit yang dihasilkan oleh Laporan Operasional ditambah koreksi karena dampak kumulatif kebijakan akuntansi dan transaksi antar entitas.

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN, penjelasan, daftar terinci, atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan basis akrual yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dan pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penyusunan dan penyajian LKBUN Tahun 2022 *Audited* mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual). Dengan demikian, dalam penyusunan LKBUN telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN ini adalah:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat pengesahan pendapatan oleh BUN. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKBUN Tahun 2022 *Audited* adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN

ditampung dalam rekening antara (rekening 600.000.411980) dan penerimaan panas bumi (rekening 508.000.084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980 diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan negara (PNBP).

Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran BUN merupakan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN berupa realisasi pendapatan pada seluruh UAPBUN dan UAKP BUN TK.

Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari UAPBUN AP berfungsi sebagai penguji (kontrol) data realisasi BA BUN.

SiLPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

Pendapatan-LO diakui pada saat telah timbul hak tagih

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah dalam hal ini UAPBUN yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak tagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (atau tidak setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat pengesahan belanja oleh BUN. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja

disajikan pada muka lembar (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Belanja yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan gabungan dari seluruh belanja Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi Koordinator Pembantu BUN TK.

Untuk transaksi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja tahun berjalan, menggunakan mata anggaran (akun) yang sama dengan mata anggaran (akun) realisasinya, tetapi dibedakan dalam penggunaan dokumen sumber. Jika terjadi pengembalian pendapatan/belanja pada tahun anggaran berjalan, maka langsung mengurangi realisasi pendapatan/belanja dengan mata anggaran pendapatan/belanja yang berkenaan.

SiLPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

*Beban diakui pada saat:
(1) terjadinya penurunan manfaat ekonomi;
(2) potensi jasa atau terjadinya konsumsi aset;
(3) timbulnya kewajiban.*

4. **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: (1) terjadinya penurunan manfaat ekonomi; (2) potensi jasa atau terjadinya konsumsi aset; (3) timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban karena penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Pengakuan beban karena konsumsi aset adalah saat terjadinya pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Pengakuan beban karena timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban yang disajikan pada Laporan Operasional merupakan gabungan dari seluruh beban Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN TK.

5. **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/

*keluar dari
KUN*

diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran), meskipun penyajian dalam LKBUN secara neto. Penyajian pagu anggaran pembiayaan menggunakan data yang bersumber dari pagu APBN dan APBN-P.

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKBUN berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

*Aset terdiri dari
Aset Lancar,
Investasi
Jangka
Panjang, Aset
Tetap dan Aset
Lainnya*

*Aset Lancar
terdiri dari kas
dan setara
kas, investasi
jangka
pendek,*

*piutang, dan
persediaan*

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs penutup BI pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam Neraca LKBUN menggunakan data Kas Bendahara Pengeluaran menurut data KPPN yang telah diverifikasi dengan data Kementerian Negara/Lembaga.

Kas Lainnya dan Setara Kas dapat berupa bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, serta kas penerimaan hibah dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Kas pada BLU merupakan Saldo Kas pada BLU yang telah disahkan pendapatan dan belanja ke KPPN, tidak termasuk pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan ke KPPN.

Kas di BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kas di Kementerian Negara/Lembaga merupakan Saldo Kas yang berada di Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari pengesahan hibah dalam bentuk uang yang langsung diterima oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

1) Transaksi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.

3) Transaksi Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer atau transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat/provinsi.

4) Transaksi Penerimaan Lainnya / Non Anggaran

Penerimaan Negara/Daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah, antara lain berupa penerimaan

perhitungan pihak ketiga.

Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh:

- 1) Transaksi Belanja Negara/Daerah
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 3) Transaksi Pengeluaran Transfer
Pengeluaran transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- 4) Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran
Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang PNB, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan piutang lainnya yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang lainnya adalah piutang bunga atas pemberian pinjaman Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD).

Pada LKBUN Tahun 2022 *Audited* ini, Piutang yang disajikan antara lain Piutang Bukan Pajak BA-BUN, Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, dan Uang Muka Belanja.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

- 1) harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian,
- 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, BMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaannya namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan opname.

b. Investasi

*Investasi
Jangka
Panjang terdiri
dari Investasi
Non
Permanen dan
Investasi
Permanen*

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca per 31 Desember 2022 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP), atau nasabah BPR.

LKBUN Tahun 2022 *Audited* menyajikan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir pada BLU Kementerian/Lembaga yang pendanaan Dana Bergulir berasal dari BA 999.03 (Investasi Pemerintah). Selain itu LKBUN juga menyajikan Investasi Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian dan Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan.

Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

Penilaian Investasi Non Permanen Lainnya menggunakan metode

nilai bersih yang dapat direalisasikan dan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, misalnya dana bergulir.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PMN pada badan usaha yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Termasuk dalam investasi permanen adalah nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bank Indonesia (BI).

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. Aset-aset yang berstatus BPYBDS telah dikeluarkan dari neraca LKKL.

Penyertaan Pemerintah pada lembaga internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN/BHNM dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya (*cost method*).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*net realizable value*). Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Dalam penilaian investasi permanen pada BUMN, terdapat

penilaian yang dilakukan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia (PABU).

*Aset Tetap
terdiri dari
Tanah,
Gedung dan
Bangunan,
Peralatan dan
Mesin, Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan, Aset
Tetap Lainnya
dan KDP*

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca UAPBUN/UAKPBUN TK per 31 Desember 2022 pada harga perolehan.

Sesuai ketentuan pasal 40 ayat (40 dan (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas tidak dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset (diperlakukan sebagai biaya), kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran I PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Dalam LKBUN Tahun 2022 *Audited*, seluruh aset tetap yang dikelola oleh UAPBUN selaku pengguna barang telah disusutkan/didepresiasi. Kebijakan akuntansi umur ekonomis dan nilai buku aset secara nasional sebagai dasar penyusutan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Selain berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014, terdapat beberapa aset dalam pengelolaan BA BUN yang tata cara penyusunannya diatur tersendiri. Pengaturan khusus tersebut meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 233/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Perusahaan Pertambangan Batubara
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 116/PMK.05/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-1/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan BMN yang berasal dari KKKS berupa Aset Lainnya pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus Bendahara Umum Negara;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-08/KN/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina;

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang

Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, serta dana lain yang sejenis.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) minyak dan gas bumi. Di samping itu, piutang macet Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset KKKS yang disajikan pada LKBUN Tahun 2022 *Audited* adalah aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian yang belum diserahkan kepada Pemerintah. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK. Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Terhadap pengakuan Aset KKKS sebagai Aset Lain-lain, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan aset tersebut. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi Milik/Kekayaan Negara. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan Aset KKKS.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan dan piutang pemberian pinjaman yang berasal dari Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman (NPPP) tahun 2009 dan setelah tahun 2009.

Terkait dengan pelaporan Badan Lainnya diantaranya Otorita Asahan, Yayasan Gedung Veteran, dan Taman Mini Indonesia Indah disajikan sebagai Aset Lainnya dari Ekuitas Pada Unit Badan Lainnya.

*Kewajiban
terdiri dari
kewajiban
Jangka
Pendek dan
Kewajiban
Jangka
Panjang*

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Utang SBN Jangka Pendek, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang SBN Jangka Pendek adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan. Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal tanggal pelaporan disajikan sebagai bagian lancar.

Termasuk juga bentuk utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi yang dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

Pengakuan Utang Kompensasi Jangka Pendek:

Kewajiban kompensasi kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat:

- 1) terdapat kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau
- 2) penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah.

Penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah menjadi dasar penyesuaian atas nilai kompensasi sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk.

Dalam hal besaran final nilai kompensasi ditetapkan akan dibayarkan lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban kompensasi

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang-utang jangka panjang lainnya.

Pengukuran Utang Kompensasi Jangka Pendek:

Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui sebesar:

- 1) kekurangan penenmaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau
- 2) besaran final nilai kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000.411980 dan 508.000.084980, seperti *under lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada kontraktor kontrak kerjasama berdasarkan verifikasi yang dilakukan Pemerintah bersama SKK Migas.

Estimasi Kurang Bayar Tagihan Belanja Subsidi

Kewajiban subsidi diestimasi merupakan tagihan kurang pembayaran belanja subsidi kepada pemerintah yang diakui saat KPA BUN belanja subsidi menetapkan nilai estimasi kewajiban kurang bayar belanja subsidi atau dokumen yang dipersamakan. KPA tetap memperhatikan nilai yang andal terkait derajat kepastian estimasi kewajiban berdasarkan asas konservatif harus dilaporkan. Derajat kepastian nilai estimasi kewajiban belanja subsidi dapat disusun dalam kertas kerja yang didukung dengan data sumber yang andal

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Utang jangka panjang pemerintah dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam *Notice of Disbursement (NoD)*, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD. Nilai utang jangka panjang dari sumber pinjaman disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan ketentuan

sebagaimana tercantum dalam PMK No. 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang diakui pada saat tanggal setelmen yang tercantum dalam dokumen setelmen, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN. Nilai utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.

Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo posisi (outstanding) utang jangka panjang dari sumber pinjaman dan utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

Penyesuaian atas penjabaran nilai rupiah utang jangka panjang pada periode semesteran dan tahunan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

Utang jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

c. Konversi Pinjaman

Konversi pinjaman merupakan strategi Direktorat Jenderal Pengelola Pinjaman dan Risiko (DJPPR) selaku BA BUN 999.01 dalam melakukan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang berasal dari penarikan pinjaman.

Konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pertukaran atau konversi yang disetujui oleh pemberi pinjaman (kreditur) dengan memanfaatkan tingkat suku bunga yang rendah untuk pinjaman dan/atau disertai dengan konversi mata uang asing lama dengan mata uang asing baru yang disepakati.

Pada saat tanggal pelaksanaan konversi pinjaman, dapat mengakibatkan selisih lebih atau kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman yang mempengaruhi nilai outstanding pinjaman dalam mata uang asing baru terkonversi maupun penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah.

Selisih lebih perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai outstanding pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih besar dari nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih besar dari semula.

Selisih kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai outstanding pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih kecil dari nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih kecil dari semula.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih

lebih perhitungan, maka nilai selisih lebih perhitungan dicatat sebagai beban penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 596611 (Beban Lain-lain) dan menambah nilai outstanding utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan, maka nilai selisih kurang perhitungan dimaksud dicatat sebagai pendapatan penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 491311 (Pendapatan Penyesuaian Lainnya) dan mengurangi nilai outstanding utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

UAKPA BUN 999.01 melakukan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terhadap penyajian akun 491311 (Pendapatan Penyesuaian Lainnya) dan/atau akun 596611 (Beban Lain-lain) di Laporan Operasional yang timbul dari pelaksanaan konversi pinjaman, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. identitas pinjaman (loan ID) yang menjadi obyek konversi pinjaman;
- b. perubahan tingkat suku bunga yang menjadi obyek konversi pinjaman; dan
- c. kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan konversi pinjaman.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena (i) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau (ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kewajiban kontinjensi belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan paragraf 58 sampai dengan 62 sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontinjensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya

menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Kurs Valuta Asing

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran I dijelaskan sebagai berikut:

- a. Paragraf 99 Kerangka Konseptual Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa “Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah”.
- b. Paragraf 74 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa: “Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca”.
- c. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63-66 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:
 - 1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
 - 2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 - 3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
 - 4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a) transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - b) transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- d. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas Paragraf 43-45 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:
 - 1) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
 - 2) Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri

- harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
- 3) Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.
- e. PSAP 12 tentang Laporan Operasional Paragraf 53-56 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:
- 1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
 - 2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 - 3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
 - 4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
 - b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2022 *Audited*, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang asing di BI, sehingga dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs penutup bank sentral pada tanggal neraca. Pada tahun 2021 terjadi perubahan kebijakan penggunaan kurs BI yang digunakan sebagai acuan penjabaran nilai mata uang asing di tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan tersebut merujuk pada kebijakan BI yang mempublikasikan kurs penutup sebagai kurs untuk keperluan pelaporan. Kebijakan akuntansi terkait penggunaan kurs penutup BI pada entitas lingkup BUN diatur dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-258/PB/2021 tanggal 22 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas penggunaan Kurs Penutup pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Selisih penjabaran pos aset dan

kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan atau selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*). Dengan demikian LKBUN Tahun 2022 *Audited* menyajikan selisih kurs belum terealisasi atas kas dalam mata uang asing, bagian lancar pemberian pinjaman, utang luar negeri, pemberian pinjaman, utang jangka panjang luar negeri, dan SBN Valas sebagai pendapatan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Laporan Operasional, kenaikan/penurunan ekuitas pada Neraca, dan penyesuaian pada Laporan Arus Kas.

Kurs Valuta Asing

Kurs penutup BI tanggal 31 Desember 2022 dan kurs penutup BI tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arab Currency Units (ACU)	1	20.750,46	19.983,35
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	15.592,00	14.278,00
Dolar Australia [AUD]	1	10.571,38	10.375,11
Dolar Canada [CAD]	1	11.503,62	11.212,06
Franc Swiss [CHF]	1	16.865,33	15.629,14
Yuan China [CNY]	1	2.242,16	2.244,51
Kroner Denmark [DKK]	1	2.233,39	2.172,30
EURO [EUR]	1	16.608,60	16.156,27
Poundsterling Inggris [GBP]	1	18.810,19	19.295,29
Yen Jepang [JPY]	100	11.795,59	12.404,00
Korean Won [KRW]	1	12,37	12,00
Special Drawing Right (SDR)	1	20.750,46	19.983,35

Dalam penyajian LKBUN Tahun 2022 *Audited*, sebagai dasar kebijakan serta perlakuan selisih kurs atas investasi pada bentuk mata uang asing dan mata uang rupiah, di mana investasi dalam mata uang asing, selisih kursnya masuk pada Laporan Operasional dan investasi mata uang rupiah yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang asing yang dirupiahkan, selisih kursnya masuk dalam komponen LPE.

Selain itu, secara khusus pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas) dalam penyusunan LKBUN Tahun 2022 *Audited* diatur tersendiri melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Dalam Perdirjen tersebut antara lain mengatur bahwa dalam rangka pengelolaan kas, Kuasa BUN dapat:

- menyimpan kas dalam mata uang asing;
- melakukan konversi;
- melakukan kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan/atau
- melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Pengelolaan kas di atas dapat menimbulkan selisih kurs yang terdiri dari:

- Selisih Kurs Belum Terealisasi (*unrealized*); dan
- Selisih Kurs Terealisasi (*realized*).

Dalam penyusunan, Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas): LKBUN

a. Selisih kurs yang belum terealisasi diakui pada saat translasi/ penjabaran saldo Kas di Rekening Milik BUN dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih Kurs Belum Terealisasi dilakukan penyesuaian pada saat Kuasa BUN melakukan:

- 1) kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan
- 2) pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Selisih kurs belum terealisasi dibukukan pada saat tanggal pelaporan keuangan dengan menjabarkan saldo mata uang asing dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selisih kurs yang belum terealisasi tersebut dibukukan dengan menggunakan akun Selisih Kurs (311711). Pada akhir periode pelaporan (bulanan, semesteran, dan tahunan), saldo akun Selisih Kurs (311711) diakui sebagai Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (491111) apabila bersaldo kredit (negatif) dan diakui sebagai Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211) apabila bersaldo debit (positif) sehingga akan tersaji dalam Laporan Operasional.

b. Selisih Kurs Terealisasi diakui pada saat Kuasa BUN melakukan konversi. Konversi tersebut dapat terjadi:

- 1) dari mata uang asing ke mata uang rupiah; dan/atau
- 2) dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.

Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi transaksi dan diperhitungkan dengan Selisih Kurs Belum Terealisasi yang telah dihitung sebelumnya. Selisih Kurs Terealisasi dan penyesuaian Selisih Kurs dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang dan dibukukan sebagai berikut:

- 1) untuk Selisih Kurs Terealisasi yang dihasilkan dari transaksi konversi, akun yang digunakan adalah Pendapatan Dari Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (423941) atau akun Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (581415).
- 2) untuk penyesuaian Selisih Kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dan pembayaran, akun yang digunakan adalah SILPA (311211).

Untuk selisih kurs pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Utang dan Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Hibah, diatur sebagai berikut:

- a. Sesuai PMK Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah, selisih kurs belum terealisasi dicatat sebagai kerugian/pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada Laporan Operasional dan disajikan pada Kegiatan Non Operasional;
- b. Beban/Pendapatan Selisih Kurs yang timbul sebagai akibat dari perbedaan kurs pada tanggal SPP dengan SP2D seluruhnya

dihilangkan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

- 1) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai akibat dari transaksi pengeluaran pembiayaan (72xxxx) dijurnal ke akun utang (22xxxx);
- 2) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai akibat dari transaksi 54xxxx dijurnal ke akun sesuai dengan SPM/SP2D (54xxxx).

Transaksi Non Anggaran

12. Transaksi Non Anggaran pada Laporan Arus Kas

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Transaksi non anggaran/transitoris dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

a. Transaksi transito

Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

b. Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat negara, dan iuran asuransi kesehatan yang disetor oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah untuk disalurkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga.

c. Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Negara. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

d. Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN merupakan transaksi antara rekening BUN dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

13. Satuan Kerja Transaksi Khusus Suspen Penerimaan

Suspen Penerimaan merupakan transaksi penerimaan yang diterima kasnya di Kas Negara tetapi tidak teridentifikasi entitas penyetornya dan/atau tidak diakui oleh Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Untuk Laporan Keuangan BUN Tahun 2022 *Audited* telah dibentuk satuan kerjanya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-801/PB/2016 tentang Penunjukan KPPN Khusus Penerimaan Sebagai

satuan kerja transaksi khusus suspen penerimaan. Pembentukan satker ini merupakan salah satu bentuk pengendalian atas penerimaan Negara dan upaya menyelesaikan permasalahan suspen penerimaan. Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan merupakan UAKPA BUN TK lingkup Ditjen Perbendaharaan yang bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Penyelesaian atas suspen penerimaan dilakukan terhadap suspen transaksi pendapatan, pengembalian belanja, dan/atau penerimaan transitoris, dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Transaksi setoran penerimaan yang tidak teridentifikasi di dalam SPAN karena COA tidak lengkap; yang terdiri dari:
 - 1) Suspen kode satker (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZXXX menggunakan kode akun sesuai setoran);
 - 2) Suspen kode BA, ES1 (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZ ZZ dengan kode akun sesuai setoran);
 - 3) Suspen kode akun (SPAN mencatat dengan kode akun 498111).
- b. Transaksi setoran dengan kode COA lengkap, namun tidak diakui oleh satker pada saat pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mengakui transaksi penerimaan dari KPA satker.

14. Transfer DAK Fisik, DAK Non Fisik – Dana BOS, Dan Dana Desa

Sesuai Nota Dinas Direktur APK DJPB nomor ND-657/PB.6/2021 tanggal 24 Juni 2021, pada pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan yang terdiri atas:

- a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
- b. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa, yang terdiri atas:

- a. Realisasi Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa
Secara umum kebijakan akuntansi atas pencatatan transaksi dan transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa berpedoman kepada PMK Nomor 83/PMK.05/2018.

Pada tanggal 30 Desember 2022 telah terbit PMK Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah yang mencabut PMK Nomor 83/PMK.05/2018. Sesuai dengan ketentuan peralihan pada Pasal 13 PMK Nomor 229/PMK.05 yang menyatakan unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang menyusun laporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2022 berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 2 PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1008).

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyaluran dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan maka diatur ketentuan mengenai penyaluran dan pelaporan yang ditetapkan dengan KMK No. 31/KM.7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dana BOP Kesetaraan).

- b. Piutang Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa serta beban/pendapatan – LO terkait; dan

Kelebihan penyaluran transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa diakui pada saat nilai kelebihan salur:

- i. ditetapkan sebagai piutang transfer berdasarkan dokumen penetapan lebih salur atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa; dan/atau
 - ii. disepakati/ditetapkan dalam dokumen hasil rekonsiliasi antara KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan Pemerintah Daerah atas perhitungan nilai sisa dana desa di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terhadap penyaluran tahun 2015 sampai dengan 2019 yang harus dikembalikan ke pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa, dan sampai dengan tanggal laporan keuangan tahun berjalan belum dilakukan penyelesaian piutangnya.
- c. Kewajiban Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa serta beban – LO terkait.
- i. Kurang penyaluran transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa diakui pada saat nilai kewajiban: a. ditetapkan sebagai kewajiban transfer berdasarkan dokumen penetapan kurang salur atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

- mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa; dan/atau
- ii. diproses dalam resume tagihan belanja transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa sesuai dengan SPP/SPM namun belum diterbitkan SPM/SP2D oleh KPPN selaku Kuasa BUN sampai dengan tanggal laporan keuangan semesteran.

UAKKPA BUN memastikan bahwa data transaksi transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik – Dana BOS dan Dana Desa dari seluruh UAKPA BUN telah tergabung dengan bantuan aplikasi SAKTI.

15. Penyajian dan Pengungkapan Hak dan Kewajiban Putusan Hukum Inkracht

Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap Entitas Pelaporan yang memiliki perkara tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. Selain melakukan pemutakhiran informasi tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), setiap Entitas Pelaporan juga melaporkan tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas tuntutan hukum kepada Pemerintah dalam Laporan Keuangan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga dalam Neraca setelah tidak ada upaya lainnya;
- 2) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, dan masih ada upaya lainnya maka tidak dilakukan penyajian pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK; dan
- 3) Yang dimaksud dengan upaya lainnya adalah masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan dan belum tersedia anggaran di Entitas Pelaporan/Bagian Anggaran yang bersangkutan.

Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1) Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas yang diselesaikan sebelum jatuh tempo antara lain karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya (*carrying amount*) harus diungkapkan pada CaLK.

2) Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pmJaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Pembayaran kepada Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

3) Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Apabila jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

4) Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah penghapusan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Penghapusan utang dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam restrukturisasi utang di atas.

Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam CaLK yang antara lain mengungkapkan jumlah perbedaan: yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan Uumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

16. Pencatatan Dana ASR

Pemerintah telah mengatur lebih lanjut atas kebijakan akuntansi dan pelaporan atas pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) yang ditempatkan pada rekening bersama antara SKK Migas/ BPMA dan KKKS terkait kegiatan hulu migas. Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022, pencatatan Dana ASR dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan kode satker 999975 yang dikonsolidasi ke BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 99908). Pencatatan dilakukan dengan menggunakan kode akun debet 163119 Dana Lainnya dan kredit 221919 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya.

17. Pencatatan Transaksi Intercept DAU/DBH

Pencatatan Transaksi Intercept DBH sesuai KMK Nomor 32/KM.7/2021 (Realisasi Dana yang Bersumber dari APBN Bulan Juli s.d. September 2021). Satker BA BUN 999.05.999204 (Satker Transfer Dana Perimbangan – DBH) melakukan penerbitan SPM/SP2D belanja transfer DBH tahun anggaran 2022 ke Pemda Provinsi DKI dan sekaligus melakukan pemotongan transfer DBH untuk penggantian dana atas pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari pembebanan anggaran belanja K/L TNI dan POLRI tahun anggaran 2022. Pemotongan transfer DBH sesuai potongan SPM/SP2D belanja transfer menggunakan potongan akun Pendapatan Lain-lain (akun 425999). Pada penyusunan laporan keuangan tahun 2022 di tingkat LKPP, terdapat penyajian beban – LO terlalu besar atas pembebanan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 karena dampak pencatatan dan penyajiannya oleh dua entitas pemerintah pusat yang berbeda (K/L dan BUN). Dengan demikian perlu dilakukan eliminasi penyajian beban – LO (disajikan LK K/L) dan pendapatan – LO (disajikan LK BUN) pada penyusunan laporan keuangan tahun 2022 di tingkat LKPP dengan melakukan jurnal manual di aplikasi SPAN oleh Satker Konsolidasian di LKPP.

Pencatatan Transaksi Intercept DAU/DBH sesuai KMK Nomor 34/KM.7/2021 (Realisasi Dana yang Bersumber dari APBN Bulan Juli s.d. Oktober 2021). Berdasarkan KMK Nomor 34/KM.7/2021, Satker di DJPK selaku Satker BA BUN 999.05.999201 (Transfer Dana Alokasi Umum) dan/atau Satker BA BUN 999.05.999204 (Satker Transfer Dana Perimbangan – DBH) akan melakukan proses pemotongan SPM/SP2D pada penyaluran transfer DAU/DBH tahun anggaran 2022, sebagai penggantian dana atas pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari pembebanan anggaran belanja K/L TNI dan POLRI tahun anggaran 2022. Penyajian hak atas penggantian dana atas pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari pembebanan anggaran belanja K/L TNI dan POLRI tahun anggaran 2022 sesuai KMK Nomor 34/KM.7/2021, maka Satker di DJPK selaku Satker BA BUN

999.05.999201 (Transfer Dana Alokasi Umum) dan/atau Satker BA BUN 999.05.999204 (Satker Transfer Dana Perimbangan – DBH) perlu melakukan jurnal penyesuaian secara manual di buku besar akrual aplikasi SPAN dengan debit 114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada kredit 425999 Pendapatan Lain-lain. Dalam hal telah dilakukan penyusunan LKBUN Transfer ke Daerah dan/atau LKBUN 2021 Audited dan telah terlanjur melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi SPAN yang melibatkan akun Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (akun 114311) dan akun Beban Transfer (akun 611XXX dan/atau akun 62111X), maka perlu dilakukan jurnal balik oleh Satker di DJPK selaku Satker BA BUN 999.05.999201 (Transfer Dana Alokasi Umum) dan/atau Satker BA BUN 999.05.999204 (Satker Transfer Dana Perimbangan – DBH).

Pencatatan Transaksi Intercept DAU/DBH untuk Dana yang Bersumber dari APBN Bulan November s.d. Desember 2021 yang Belum Diterbitkan Dasar Pemotongan DAU/DBH baik berupa keputusan Menteri Keuangan maupun dokumen yang dipersamakan (selain KMK Nomor 32/KM.7/2021 dan KMK Nomor 34/KM.7/2021), maka dilakukan pengungkapan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

18. Pencatatan Kewajiban Dana Talangan Pengadaan Tanah PSN

Kewajiban talangan pengadaan tanah PSN untuk penyajian laporan keuangan tahun 2022 pada LK K/L diakui berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan antara LMAN, badan usaha, Satker penerima dan/atau pengguna tanah PSN, Badan Pengatur Jalan Tol, dan/atau pihak lain yang dibutuhkan konfirmasinya, untuk menentukan nilai kewajiban talangan pengadaan tanah PSN yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum terselesaikan (outstanding), baik skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 maupun skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020.

Berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan, LMAN melakukan jurnal manual penyesuaian di aplikasi SAKTI 2022 untuk penghentian penyajian kewajiban atas pendanaan pengadaan tanah PSN (akun 212191) di Neraca atas akuntabilitas skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 sebesar saldo nilai tercatat penyajiannya per 31 Desember 2022, sebagai upaya konsistensi satu kesatuan penyajian dan penatausahaan perolehan tanah PSN yang berasal dari kewajiban talangan pengadaan tanah PSN pada Satker vertikal penerima dan/atau pengguna tanah PSN, dengan jurnal manual penyesuaian debit 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya pada kredit 391119 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

19. Konsolidasi dan Eliminasi

Kebijakan konsolidasi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan BUN adalah sebagai berikut:

- a. Mengkonsolidasi seluruh akun yang tercatat pada buku besar satker-satker lingkup BUN (BA 999);

- b. Mengkonsolidasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN-AP (BA 999.00), dengan kaidah sebagai berikut:
 - (2) Konsolidasi Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111611 dan 111613 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399911. Saldo akun 111611 dan 111613 disajikan di neraca pos Kas Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399911 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;
 - (3) Konsolidasi Kas pada BLU dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111911 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399912. Saldo akun 111911 disajikan di neraca pos Kas Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399912 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;
 - (4) Konsolidasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111822 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399913. Saldo akun 111911 disajikan di neraca pos Kas Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399912 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;
- c. Mengeliminasi penyajian ganda antar Bagian Anggaran BUN, dengan kaidah sebagai berikut:
 - (1) Transaksi pengeluaran pembiayaan pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dicatat oleh dua entitas yaitu UAPBUN Investasi Pemerintah (999.03) sebagai akun 164111 (Dana Penjaminan) dan UAPBUN-AP (999.00) sebagai akun 163119 (Dana Lainnya). Pada buku besar konsolidasian BUN, nilai akun 163119 akan dieliminasi sebesar nilai akun 164111 dengan akun kontra 391111. Eliminasi akun 163119 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, sedangkan akun 391111 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Koreksi Lain-Lain;
 - (2) Kebijakan konsolidasi atas akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN-AP mengakibatkan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada UAPBUN-AP termasuk Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Anggaran BUN. Oleh karena itu pada buku besar konsolidasian BUN dilakukan eliminasi kembali atas akun 111611 dan 111613 beserta akun kontranya yaitu 399911 senilai saldo yang berada di Bagian Anggaran BUN. Eliminasi akun 111611 dan 111613 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Kas

di Bendahara Pengeluaran, sedangkan akun 399911 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Ekuitas BUN di K/L.

20. Panduan Penerapan SAP Pada Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Pemerintah tetap melanjutkan berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun 2022 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional. Transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan langkah dan kebijakan ini selanjutnya harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan panduan penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pada masa Pandemi Covid-19, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) memberikan penjelasan, sebagai berikut:

- a. KSAP memandang bahwa tidak ada sebuah bagian SAP yang menjadi tidak dapat diberlakukan karena adanya Pandemi Covid-19 sampai dengan tanggal dikeluarkannya panduan ini
- b. Penyusun laporan keuangan menggunakan SAP yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi. Beberapa PSAP dan Buletin Teknis (Bultek) yang terkait dengan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 antara lain:

1) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

Untuk menangani Pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menambah utang dalam rangka mendanai pengeluaran belanja penanganan Pandemi Covid-19. Penundaan beberapa kegiatan pemerintah kemungkinan menyebabkan persediaan menjadi lebih lama tidak tersalurkan dan konstruksi dalam pekerjaan tertunda penyelesaiannya. Hal ini akan menyebabkan perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, sehingga harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas

Program penanganan Pandemi Covid-19 akan berdampak pada

perubahan APBN/APBD tahun 2022 dan realisasinya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pos-pos dalam LRA akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, untuk itu perubahan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

3) PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, informasi penanganan Pandemi Covid-19 dapat diungkapkan secara memadai, antara lain:

- a) Pada bagian kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro dijelaskan dampak Pandemi Covid-19 pada entitas dan kebijakan fiskal, perubahan anggaran dan kondisi ekonomi makro yang terdampak Pandemi Covid19.
- b) Ikhtisar pencapaian target keuangan menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 terhadap pencapaian keuangan.
- c) Kebijakan akuntansi menjelaskan bahwa kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan.
- d) Pos-pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas Pandemi Covid-19 menjelaskan perubahan pos-pos tersebut sebagai dampak dari realokasi atau refocusing anggaran misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal. Dampak penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang, penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi pada penyelesaian dan persediaan.

4) PSAP 06 Akuntansi Investasi

Kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi sistem keuangan yang dilakukan melalui penempatan modal negara pada BUMN/korporasi/swasta, baik melalui penanaman modal langsung maupun melalui lembaga keuangan, serta kemungkinan penurunan nilai kepemilikan pemerintah akibat adanya BUMN yang merugi.

5) PSAP 09 Kewajiban

Kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi dan kontrak yang telah berjalan diakui sesuai dengan PSAP Kewajiban. Kebijakan utang khusus yang dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

6) Buletin Teknis 13 Akuntansi Hibah

Kegiatan pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung, serta kegiatan pemberian hibah oleh pemerintah daerah kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung maupun penerimaan hibah oleh pemerintah yang berasal dari pemerintah atau lembaga lain serta yang berasal dari masyarakat secara langsung dilaporkan dalam laporan keuangan mengikuti ketentuan atau merujuk pada Buletin Teknis ini.

- c. Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa. Namun penanganan Pandemi Covid-19 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan penganggaran yang sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah. Dampak penanganan Pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah dan berdampak pada makro ekonomi sehingga mempengaruhi hampir seluruh pos dalam laporan keuangan. Untuk itu tidak diperlukan penyajian pos khusus dalam Laporan Operasional dan penambahan pos baru dalam Laporan Keuangan.

21. Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia selain membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan merenggut korban jiwa, juga berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya oleh Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU 2/2020).

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, sejalan dengan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 2

Tahun 2020, Pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23/2020), yang antara lain mengatur mengenai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya dengan menggunakan modalitas Penempatan Dana kepada bank peserta untuk disalurkan kepada bank pelaksana yang telah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja bagi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.

Dukungan Pemerintah terhadap pemulihan perekonomian bagi dunia usaha dan masyarakat terdampak merupakan bukti nyata kehadiran Pemerintah bagi kegiatan dunia usaha yang mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya sebagai bagian dari dampak pandemi *Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Berkenaan dengan belum membaiknya perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan masih diperlukannya kelangsungan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi bagi Pelaku Usaha, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang dapat mengakselerasi pelaksanaan program PEN.

22. Pengembalian Sisa Dana PC PEN dan Penggunaan Kembali Sisa PC PEN Tahun Sebelumnya

Kebijakan penggunaan sisa dana penerbitan SBN PG - NPG (SBN Public Goods - Non Public Goods) pada rekening khusus PC PEN PG - NPG setelah laporan keuangan terbit, adalah:

- a. PG untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi Covid-19 di bidang yang terkait dan memenuhi kriteria PG;
- b. NPG untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi Covid-19 di bidang yang terkait dan memenuhi kriteria NPG; dan
- c. Apabila terdapat pengembalian belanja dan pembiayaan PC PEN pada Tahun Anggaran (TA) berikutnya, maka pengembalian tersebut merupakan PNPB dari Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan menambah sisa dana PC PEN PG - NPG pada rekening khusus.

Selanjutnya, kebijakan penggunaan dana pada rekening khusus PG - NPG TAYL di TA berikutnya, sebagai berikut:

- a. Penggunaan atas dana dari pengembalian belanja dan pembiayaan PG - NPG TAYL:
 - i. Pengembalian belanja dan pembiayaan PG digunakan untuk kegiatan lanjutan penanganan pandemi Covid-19 di bidang yang terkait dan memenuhi kriteria PG; dan

- ii. Pengembalian belanja dan pembiayaan NPG digunakan untuk kegiatan lanjutan penanganan pandemi Covid-19 di bidang yang terkait dan memenuhi kriteria NPG.
- b. Penggunaan atas dana dari pengembalian penempatan dana Program PEN ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- c. Kriteria penentuan kegiatan PC-PEN PG - NPG yang dinyatakan telah selesai ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apabila pada akhir tahun anggaran yang ditetapkan, masih terdapat sisa dana pada rekening khusus PC-PEN PG - NPG, maka sisa dana dipindahbukukan ke rekening kas umum negara.
- d. Dalam hal terdapat pengembalian belanja dan pembiayaan dari kegiatan PC PEN PG – NPG yang telah dinyatakan selesai, pengaturan pengembalian belanja dan pembiayaan adalah disetor ke kas negara dan diakui sebagai PNBPN TAYL dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara sesuai mekanisme pengelolaan APBN yang berlaku

23. Transaksi Kontribusi Bank Indonesia Pada Surat Berharga Negara Program PEN

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah dengan Bank Indonesia, Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang dapat berupa Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana untuk pendanaan dalam rangka pemenuhan pembiayaan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional (Program PEN), yang dikelompokkan berdasarkan penggunaan sebagai berikut:

- a. Public Goods;
- b. Non-Public Goods;
- c. Cluster A Kesehatan; dan
- d. Cluster B Kesehatan dan Kemanusiaan.

Transaksi belanja bunga/imbalan oleh Pemerintah atas SBN dan kontribusi Bank Indonesia dilaksanakan dalam kerangka skema burden sharing, yang dimaksudkan agar alokasi anggaran untuk pembayaran belanja bunga tidak terlalu membebani APBN dan menyediakan fiscal space untuk menjaga kesinambungan APBN dalam jangka menengah hingga jangka panjang melalui pengendalian biaya yang timbul di masa depan dari penerbitan SBN masa kini dalam rangka penanganan Covid-19 dan program PEN.

Mekanisme skema burden sharing dilakukan dengan basis kas sehubungan adanya:

- a. Arus kas keluar atas transaksi jatuh tempo pembayaran kupon bunga atau imbalan SUN dan/atau SBSN Program PEN, baik Public Goods maupun Non-Public Goods; dan
- b. Arus kas masuk atas transaksi kontribusi perhitungan burden sharing yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah

Perlakuan transaksi pembayaran jatuh tempo kupon belanja bunga/imbalan SBN dan kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN terkait pembiayaan public goods skema burden sharing dalam rangka penanganan Covid-19 dan Program PEN, sebagai berikut:

- a. Pemerintah melakukan pembayaran saat jatuh tempo bunga/imbalan SBN sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia terkait pembiayaan public goods skema burden sharing dalam rangka penanganan Covid-19 dan program PEN.
- b. Pembayaran jatuh tempo bunga/imbalan SBN dilaksanakan melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D sebesar perhitungan jatuh tempo kupon bunga atau imbalan SBN dengan menggunakan pertanggungjawaban alokasi anggaran pada masing-masing akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara dan akun Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang.
- c. Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia terkait pembiayaan public goods skema burden sharing, terdapat aliran kas masuk pada periode tahun anggaran yang sama sebagai kontribusi Bank Indonesia yang merupakan rangkaian satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembayaran bunga/imbalan SBN dalam skema burden sharing. Berdasarkan hal tersebut, maka aliran kas masuk ke rekening kas umum negara dari kontribusi Bank Indonesia ini diperhitungkan/dicatat menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanja sesuai SPM/SP2D yaitu akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan akun Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
- d. Penyesuaian untuk pemulihan pagu DIPA dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penyesuaian sisa pagu DIPA atas pengembalian belanja pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Perlakuan transaksi kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN terkait pembiayaan non-public goods skema burden sharing dalam rangka penanganan Covid-19 dan Program PEN, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia, terdapat pembagian beban keuangan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, baik beban yang timbul atas penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia maupun kepemilikan SBN oleh investor secara umum. Pada saat jatuh tempo kupon pembayaran bunga/imbalan SBN, disepakati perhitungan kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN untuk pembiayaan non-public goods berdasarkan perhitungan rampung
- b. Berdasarkan perhitungan rampung, Bank Indonesia melakukan pembayaran kontribusi kepada pemerintah yang melibatkan aliran kas masuk ke rekening kas umum negara, dengan menggunakan akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan akun

Belanja Pembayaran Imbalan SBSN – Jangka Panjang

Selanjutnya, Perlakuan Akuntansi Terkait Transaksi Dalam Rangka SKB III, mekanisme skema burden sharing dilakukan dengan basis kas sehubungan adanya:

1. Alur kas keluar atas transaksi jatuh tempo pembayaran kupon bunga atau imbalan SUN dan/atau SBSN Program PEN, untuk pembiayaan anggaran kesehatan; dan
2. Alur kas masuk atas transaksi kontribusi perhitungan burden sharing yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah.

Perlakuan transaksi pembayaran jatuh tempo kupon belanja bunga/imbalan SBN atas beban bunga/imbalan SBN terkait pembiayaan anggaran kesehatan dan anggaran kemanusiaan dalam rangka penanganan COVID-19 dan Program PEN, sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan pembayaran jatuh tempo bunga/imbalan SBN sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia terkait pembiayaan anggaran kesehatan dan anggaran kemanusiaan dalam rangka penanganan COVID-19 dan program PEN.
2. Pembayaran jatuh tempo bunga/imbalan SBN dilaksanakan melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D sebesar perhitungan jatuh tempo kupon bunga atau imbalan SBN dengan menggunakan pertanggungjawaban alokasi anggaran pada masing-masing akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara dan akun Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang.
3. Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Bank Indonesia terkait pembiayaan anggaran kesehatan skema burden sharing, terdapat aliran kas masuk pada periode tahun anggaran yang sama sebagai kontribusi Bank Indonesia yang merupakan rangkaian satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembayaran bunga/imbalan SBN dalam skema burden sharing.
4. Berdasarkan hal tersebut, maka aliran kas masuk ke rekening kas umum negara dari kontribusi Bank Indonesia ini diperhitungkan/dicatat menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanja sesuai SPM/SP2D yaitu akun Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan akun Belanja Pembayaran Imbalan SBSN – Jangka Panjang.
5. Penyesuaian untuk pemulihan pagu DIPA dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penyesuaian sisa pagu DIPA atas pengembalian belanja pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, dilakukan jurnal penyesuaian sehubungan dengan:

- i. SBN dalam rangka pembiayaan Public Goods dan anggaran kesehatan, pengakuan beban pembayaran bunga SBN sebesar nilai realisasi belanja sesuai SPM/SP2D (menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanja sesuai SPM/SP2D) dan pengakuan pendapatan dari kontribusi Bank Indonesia (menggunakan akun Pendapatan Anggaran Lain-lain) sebesar nilai yang sama secara bruto untuk penyajian di Laporan Operasional.
- ii. SBN dalam rangka pembiayaan Non-Public Goods, reklasifikasi untuk pengakuan pendapatan kontribusi – LO (menggunakan akun Pendapatan Anggaran Lain-lain) dari kas masuk yang sebelumnya diperlakukan basis kasnya sebagai pengembalian belanja pembayaran bunga.
- iii. Perhitungan bunga SBN berjalan pembiayaan anggaran public goods dan non-public goods serta anggaran kesehatan dan anggaran kemanusiaan yaitu perhitungan beban kewajiban bunga sampai dengan tanggal laporan keuangan yang belum jatuh tempo berdasarkan nilai pada data dan informasi menggunakan sistem aplikasi Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS), dicatat sebagai pengakuan beban bunga dan pengakuan kewajiban jangka pendek bunga berjalan.
- iv. Perhitungan pendapatan bunga berjalan dari kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN untuk anggaran public goods dan non-public goods serta anggaran kesehatan berdasarkan nilai pada data dan informasi menggunakan sistem aplikasi DMFAS, dicatat sebagai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima dan pengakuan pendapatan bunga berjalan (menggunakan akun Pendapatan Anggaran Lain-lain).

24. Kebijakan Akuntansi dalam Situasi Pandemi dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk keperluan penyajian kebijakan keuangan negara dalam situasi pandemi dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Bendahara Umum Negara melakukan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan paling sedikit pada:

- a. Catatan atas Laporan Keuangan kebijakan akuntansi
- b. Penjelasan per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh
- c. Catatan Penting Lainnya sesuai dengan kebutuhan pengungkapan.

25. Kebijakan Akuntansi Terkait Properti Investasi

- a. Sehubungan dengan terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi (PSAP 17) yang penerapannya mulai berlaku efektif tahun 2022, terdapat kemungkinan satuan kerja (Satker) di lingkungan pemerintah pusat untuk melakukan reklasifikasi keluar dari pos Aset Tetap dan/atau pos

- Aset Lainnya atas penyajian aset berwujud yang bersifat properti.
- b. Paragraf 63 sampai dengan paragraf 66 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan paragraf 4 sampai dengan paragraf 14 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, memberikan panduan bahwa aset tetap pemerintah yang disajikan di Neraca pos Aset Tetap diberikan tekanan hanya yang memenuhi kriteria:
 - 1) aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 2) digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
 - 3) dalam kondisi siap dipakai, dan
 - 4) jika aset tetap tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, maka disajikan di Neraca di pos Aset Lainnya, termasuk dalam hal ini aset Kerjasama dalam kemitraan.
 - c. PSAP 17 memberikan panduan prinsip akuntansi berlaku umum bagaimana suatu Satker memperlakukan kebijakan akuntansi atas aset berwujud yang bersifat properti yang mengandung unsur kejadian digunakannya aset tersebut untuk menghasilkan pendapatan sewa atau intensi untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.
 - d. Atas hal tersebut, untuk kebutuhan penerapan PSAP 17 di lingkungan pemerintah pusat, diperlukan kebijakan teknis akuntansi yang bersifat regulatory-based accounting yang memberikan panduan pencatatan dan penyajian Barang Milik Negara (BMN) yang bersifat properti yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau intensi untuk meningkatkan nilai aset.

26. Kebijakan Akuntansi Pajak Ditanggung Pemerintah (Pajak DTP)

- a. Transaksi atas Pajak DTP dan Bea Masuk (BM) DTP mengakibatkan adanya aliran ekonomi yang terjadi dalam lingkup entitas pemerintah pusat dengan mengakui adanya pendapatan dan belanja dengan nilai yang sama. Berbeda dengan perlakuan belanja perpajakan (tax expenditure), dimana pemerintah tidak mengumpulkan pajak dari pihak ketiga. Tax expenditure tidak dialokasikan dalam mekanisme penganggaran maupun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran terhadap APBN sehingga tax expenditure tersebut dilaporkan secara terpisah dari Laporan Keuangan oleh Satuan Kerja (Satker) yang mempertanggungjawabkan alokasi anggaran belanja subsidi untuk Pajak DTP dan BM DTP maupun pendapatan atas Pajak DTP dan BM DTP.
- b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan
 - 1) Pajak DTP dan BM DTP diakui oleh entitas akuntansi/pelaporan Kementerian Keuangan (BA 015) melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan, yaitu pada saat SPM Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan penerimaan Pajak DTP atau BM DTP telah diterbitkan SP2D-nya

oleh KPPN.

- 2) Dengan demikian secara bersamaan dengan pengakuan pendapatan Pajak DTP dan BM DTP pada potongan SPM/SP2D, Belanja Subsidi Pajak DTP dan BM DTP diakui oleh entitas akuntansi/pelaporan BUN (BA 999) melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan yang diajukan oleh Satker BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07).
 - 3) Belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP diukur sebesar nilai SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan, dan pendapatan dari Halm. 4 dari 8 Pajak DTP atau BM DTP diukur sebesar nilai potongan pada SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan.
 - 4) Nilai belanja subsidi Pajak DTP atau BM DTP disajikan oleh entitas akuntansi/pelaporan BUN (BA 999) melalui Satker BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) sebagai belanja subsidi di LRA dan sebagai beban subsidi di LO pos kegiatan operasional.
 - 5) Nilai pendapatan Pajak DTP atau BM DTP disajikan oleh entitas akuntansi/pelaporan Kementerian Keuangan (BA 015) sebagai pendapatan perpajakan di LRA dan sebagai pendapatan-LO perpajakan di LO pos kegiatan operasional.
 - 6) Belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP dan pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP diungkapkan secara memadai dan paling sedikit menjelaskan informasi mengenai:
 - a) Nilai realisasi anggaran masing-masing belanja subsidi Pajak DTP/BM DTP dan/atau pendapatan Pajak DTP/BM DTP; dan
 - b) Jenis belanja subsidi Pajak DTP/BM DTP dan/atau pendapatan Pajak DTP/BM DTP.
- c. Konsolidasi Transaksi atas Pajak DTP dan BM DTP di Tingkat LKPP
- 1) Konsolidasi Laporan Keuangan di LRA
 - a) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LRA seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran BUN.
 - b) Tidak ada eliminasi atas penyajian belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP terhadap penyajian pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP.
 - c) Konsolidasi pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP disajikan di LRA secara bruto pada masing-masing pos pendapatan perpajakan dan pos belanja subsidi.
 - d) Penyajian pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP di LRA sebagai ketaatan dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang diamanatkan dan ditetapkan dalam APBN/APBN-P, sehingga

penyajian realisasinya diperbandingkan dengan pagu anggarannya dalam satu tahun anggaran.

2) Konsolidasi Laporan Keuangan di LAK

- a) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LAK yang ada di entitas pelaporan BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- b) Tidak ada eliminasi atas penyajian arus kas masuk pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan penyajian arus kas keluar belanja subsidi untuk Pajak DTP dan/atau BM DTP.
- c) Konsolidasi pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP disajikan di LAK secara bruto masing-masing pos arus kas dari operasi.
- d) Penyajian arus kas dari operasi secara bruto di LAK terhadap pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP memberikan informasi historis transaksional masing-masing pos arus kas dari operasi pemerintah, dan dapat juga digunakan sebagai pengendalian dan konsisten perlakuan akuntansi atas transaksi berbasis kas yang berlaku terhadap penyajian LRA dan LAK.

3) Konsolidasi Laporan Keuangan di LO

- a) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LO seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian
- b) Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran BUN.
- c) Dalam melakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud angka 1), diperlukan eliminasi akun-akun timbal balik di tingkat LKPP terhadap penyajian di LO untuk nilai beban subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang berhubungan dengan penyajian pendapatan – LO Pajak DTP dan/atau BM DTP dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan dalam satu dokumen yang sama dalam SPM/SP2D belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pajak DTP dan/atau BM DTP tahun anggaran berjalan.

27. Kebijakan Akuntansi UPSL THT

- a. Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 57 Tahun 2023 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang di antaranya mengatur Kewajiban Kekurangan Pendanaan Program THT / *Unfunded Past Service Liability* atas Program THT (UPSL THT).
- b. Kewajiban Kekurangan Pendanaan Program THT / *Unfunded Past Service Liability* atas Program THT (UPSL THT) merupakan kewajiban masa lalu untuk program THT yang belum terpenuhi sesuai kriteria dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perhitungan,

- pengakuan dan pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program THT.
- c. Kewajiban UPSL THT diakui oleh Pemerintah pada saat ditetapkan besaran dana UPSL THT oleh Kementerian Keuangan.
 - d. Kewajiban UPSL THT diukur sebesar nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Tata cara perhitungan kewajiban UPSL berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perhitungan, pengakuan dan pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program THT.
 - e. UPSL THT disajikan sebagai kewajiban jangka Panjang, kecuali yang rencana penyelesaian kewajibannya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, maka dikelompokkan sebagai bagian lancer kewajiban jangka panjang (kewajiban jangka pendek).
 - f. Pengakuan dan penyajian UPSL THT sebagai Kewajiban Jangka Panjang, sejalan dengan pengaturan dalam Paragraf 11 PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa "Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang".

28. Dana Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Negara

- a. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih. Saldo Anggaran Lebih digunakan untuk:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan kas temporer;
 - 2) Pemenuhan pembiayaan anggaran; dan atau
 - 3) Stabilisasi
- b. Penggunaan dana Saldo Anggaran Bendahara Umum Negara (SAL BUN) Lebih dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan serta awal tahun anggaran berikutnya.
- c. Kebutuhan kas temporer merupakan suatu kondisi saat terjadi dan/atau diperkirakan terjadi di mana saldo Rupiah RKUN lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu, namun pada akhir periode tertentu tersebut diperkirakan akan cukup memenuhi kebutuhan pengeluaran negara tersebut. Lamanya periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari 12 bulan dan akhir periode maksimal 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- d. Tata Cara Perhitungan dan Pemindahbukuan Dana Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Negara serta Formula Perhitungan Jumlah Dana Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Negara Efisien diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2022 sebagaimana terakhir diubah dengan PER-4/PB/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2022 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemindahbukuan Dana Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Negara serta Formula Perhitungan Jumlah Dana Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Negara Efisien
- e. Dalam rangka pengelolaan kas, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan perhitungan sementara jumlah Dana SAL BUN akhir tahun pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- f. Hasil perhitungan sementara ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan
- g. Direktorat Pengelolaan Kas Negara Bersama Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan Perhitungan Jumlah Dana SAL BUN akhir tahun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Audited dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Direktur Pengelolaan Kas Negara Bersama Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mencantumkan antara lain:
 - 1) Saldo Rekening Lain BI SAL;
 - 2) Dana SAL BUN yang masih ditempatkan pada instrumen keuangan jangka pendek pada akhir tahun; dan
 - 3) Saldo Dana SAL BUN yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas temporer yang dikembalikan pada tahun anggaran berikutnya.
- h. Dalam hal terdapat Dana SAL BUN yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer yang dikembalikan pada tahun anggaran berikutnya dan/atau Dana SAL BUN yang masih ditempatkan pada instrumen keuangan jangka pendek pada akhir tahun, diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah pada Tahun 2022 berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Sementara itu, Belanja BUN dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja BUN dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan. Belanja BUN meliputi (i) Belanja Pemerintah Pusat, dan (ii) Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah bertujuan untuk mendukung dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2022 adalah sebesar **Rp 238.341.910.771.353** atau mencapai **110,26 persen** dari target APBN 2022 sebesar **Rp216.155.838.535.000**. Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp232.645.855.357.561** dan Penerimaan Hibah sebesar **Rp5.696.055.413.792**. Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp52.711.695.991.840** atau **28,40 persen** dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2022 dapat dilihat di **Lampiran LRA 1** (halaman LB1).

Realisasi Belanja BUN pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp2.011.588.067.001.453** atau mencapai **98,52 persen** dari target APBN sebesar **Rp 2.041.902.928.700.000**. Realisasi Belanja BUN Tahun 2022 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.195.353.240.933.757** dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar **Rp816.234.826.067.696**.

Realisasi Pembiayaan BUN pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp590.978.140.090.153** atau mencapai **70,34 persen** dari target APBN sebesar **Rp840.226.322.190.000**. Realisasi pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar **Rp563.782.350.533.612** dan pembiayaan luar negeri sebesar **Rp27.195.789.556.541**.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan dan Hibah BA BUN (BA. 999)

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah

Realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2022 sebesar **Rp238.341.910.771.353** berasal dari PNBPN sebesar **Rp232.645.855.357.561** dan Penerimaan Hibah sebesar **Rp5.696.055.413.792**.

B.2.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBPN

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 sebesar **Rp232.645.855.357.561** atau **110,47 persen** dari target sebesar **Rp210.593.452.863.000**. Realisasi PNBPN Tahun 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar 28,81 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Realisasi PNBPN berasal dari (i) Pendapatan Sumber Daya Alam; (ii) Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; dan (iii) PNBPN Lainnya.

B.2.1.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam Tahun 2022 adalah sebesar **Rp150.863.599.696.975** atau **107,31 persen** dari target APBN sebesar **Rp140.584.459.920.000**. Realisasi penerimaan SDA berhasil melebihi target, realisasi pendapatan tersebut lebih besar Rp52.392.846.226.702 atau mengalami kenaikan sebesar 53,21 persen dibandingkan realisasi tahun 2021.

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan PNBPN yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, berasal dari pengolahan minyak bumi, gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sesuai dengan ketentuan perundangan, ketiga jenis pendapatan tersebut dibagikan ke daerah dalam rangka desentralisasi fiskal. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Penerimaan SDA Tahun 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Minyak Bumi	106.487.890.000.000	111.992.940.458.410	105,17%
2	Pendapatan Gas Bumi	32.610.520.000.000	36.705.949.688.708	112,56%
3	Pendapatan Pertambangan dan Panas Bumi	1.486.049.920.000	2.164.709.549.857	145,67%
Jumlah		140.584.459.920.000	150.863.599.696.975	107,31%

Rincian realisasi Penerimaan SDA Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2022	2021	(Kenaikan/Penurunan)
1	Pendapatan Minyak Bumi	111.992.940.458.410	64.998.824.686.934	46.994.115.771.476
2	Pendapatan Gas Bumi	36.705.949.688.708	31.617.569.168.427	5.088.380.520.281
3	Pendapatan Pertambangan dan Panas Bumi	2.164.709.549.857	1.854.359.614.915	310.349.934.942
Jumlah		150.863.599.696.975	98.470.753.470.276	52.392.846.226.699

Pendapatan Minyak Bumi

Pendapatan minyak bumi TA 2022 terealisasi sebesar Rp111.992.940.458.410 atau 110,87 persen dari estimasi APBN 2022 sesuai Perpres No. 98 Tahun 2022 sebesar Rp106.487.890.000.000. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, pendapatan minyak bumi tumbuh sebesar Rp46.994.115.771.475 atau 72,30 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh tingginya realisasi ICP pada tahun 2022.

Pendapatan Gas Bumi

Pendapatan Gas Bumi pada tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp36.705.949.688.708 atau mencapai 112,56 persen dari perkiraan APBN 2022 sesuai Perpres No. 98 Tahun 2022 sebesar Rp32.610.520.000.000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasinya tumbuh sebesar Rp5.088.380.520.281 atau 16,09 persen. Kenaikan Pendapatan Gas Bumi antara lain disebabkan rata-rata kurs tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan realisasi pembayaran faktor-faktor pengurang bagian negara berupa fee penjualan gas bagian negara, PBB Migas, PPN Reimbursement, serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Setoran Bagian Pemerintah atas Pendapatan Pertambangan Panas Bumi (SDA Non Migas)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022, target Pendapatan Panas Bumi tahun 2022 sebagaimana dirinci melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022

tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 sebesar Rp1.621.089.602.000 yang terdiri atas target pendapatan perusahaan panas bumi (PNBP Khusus BUN) sebesar Rp 1.486.049.920.000 dan target pendapatan PNBP yang merupakan bagian dari penerimaan PNBP Kementerian ESDM yaitu pendapatan iuran tetap panas bumi sebesar Rp34.477.945.000 dan pendapatan iuran produksi/royalti panas bumi sebesar Rp100.561.737.000

Realisasi Pendapatan Perusahaan Panas Bumi (Pendapatan LRA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.164.709.549.857 atau mencapai 145,67% dari target pendapatan perusahaan panas bumi tahun 2022 sebesar Rp1.486.049.920.000. Keseluruhan pendapatan panas bumi Satker PNBP Khusus BUN Pengelola Panas Bumi adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pendapatan Perusahaan Panas Bumi adalah PNBP yang berasal dari setoran bagian pemerintah (disetor oleh pengusaha panas bumi existing) setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan (reimbursement PPN dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) dan pungutan lainnya (penggantian bonus produksi).

Realisasi setoran bagian pemerintah (SBP) periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.943.846.689.945, naik sebesar Rp275.402.566.615 atau 10,32% dari realisasi SBP periode yang sama pada TA 2021 sebesar Rp2.668.444.123.332. Kenaikan pada periode ini terutama disebabkan oleh:

1. Kenaikan penjualan pada PT PGE karena meningkatnya produksi uap.
2. Kenaikan penjualan pada Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd (SEGWWL) dan Star Energy Geothermal Salak (SEGS) karena peningkatan harga jual listrik dan/atau uap serta peningkatan produksi listrik dan/atau uap yang disebabkan oleh periode pelaksanaan pemeliharaan PLTP yang lebih singkat daripada tahun 2021.

Rincian realisasi PNBP panas bumi dapat dilihat sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
a	Setoran Bagian Pemerintah	2.943.846.689.945	2.668.444.123.332	10,32%
b	Reimbursement PPN	390.000.000.000	344.500.000.000	13,21%
c	PBB Pertambangan Panas Bumi	400.171.960.144	396.953.473.211	0,81%
d	Penggantian bonus produksi panas bumi	83.668.638.662	83.550.076.937	0,14%
e	Pendapatan perusahaan Panas Bumi (a-b-c-d)	2.070.006.091.139	1.843.440.573.184	12,29%
f	PNBP panas bumi yang berasal dari saldo cadangan reimbursement PPN	76.011.903.302	10.331.458.320	635,73%
g	Pendapatan perusahaan Panas Bumi setelah ditambahkan saldo cadangan reimbursement PPN (e+f)	2.146.017.994.441	1.853.772.031.504	15,76%
h	Pendapatan perusahaan Panas Bumi yang berasal dari kekurangan penyetoran bagian pemerintah	18.691.555.416	587.583.411	3081,09%
Total Pendapatan SBP Panas Bumi (g+h)		2.164.709.549.857	1.854.359.614.915	16,74%

Realisasi Pendapatan Perusahaan Panas Bumi sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 16,74% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Selain kenaikan SBP, kenaikan tersebut disebabkan oleh:

1. Pemindahbukuan saldo cadangan reimbursement PPN menjadi PNBP sebesar Rp76.011.903.302.
2. Adanya penyetoran kekurangan SBP berdasarkan hasil audit internal laporan keuangan tahun buku 2021 oleh PT GDE sebesar Rp695.416.933 sebagaimana disampaikan dalam surat nomor 070/PST.GDE-20/III/2022 tanggal 30 Maret 2022.
3. Adanya penyetoran SBP kurang bayar berdasarkan hasil audit BPKP untuk tahun buku 2017 dan 2018 Rp17.996.138.483 dengan rincian sebagai berikut:

Pengusaha	Surat Pemberitahuan Penyetoran	Tanggal diterima di Rekening Kas Umum Negara	Jumlah diterima di Rekening Kas Umum Negara (Rp)
PT PGE	128/PGE000/2022-S4 tanggal 14 Maret 2022	17 Februari 2022	4.934.019.393
SEGS	SEGS-SEGDI- SEGWW/13-FIN/II/2022 tanggal 17 Februari 2022	16 Februari 2022	6.010.362.539
SEGDI II		16 Februari 2022	3.891.443.768
SEGWWL		15 Februari 2022	3.160.312.783
Total			17.996.138.483

Realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi selama 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 berasal dari setoran bagian Pemerintah atas delapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi (terdiri atas delapan Pengusaha panas bumi yang telah beroperasi) setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan (reimbursement PPN, Pajak Bumi dan Bangunan, serta penggantian bonus produksi panas bumi) sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Badan Usaha	Wilayah Kerja	Jumlah (Rp)
PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang, Jawa Barat	390.461.686.079
PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong, Sulut	125.120.481.240
PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu, Lampung	128.919.344.519
Star Energy Geothermal Salak, Ltd	Gn. Salak, Jawa Barat	647.914.819.985
Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd		
Star Energy Geothermal Darajat I, Ltd	Darajat, Jawa Barat	345.052.937.613
Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd		
PT Darajat Geothermal Indonesia		
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd	Wayang Windu, Jawa Barat	563.437.912.927
PT Geo Dipa Energy	Dieng, Jawa Tengah	62.021.759
PT Geo Dipa Energy	Patuha, Jawa Barat	24.029.245.956
<i>Faktor Pengurang : Pembayaran PBB **</i>		(60.288.900.221)
Total		2.164.709.549.857

Keterangan:

**) Pembayaran PBB sebesar Rp60.288.900.221 adalah pembayaran PBB untuk Wilayah Kerja yang belum menyetorkan bagian Pemerintah

B.2.1.1.2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Realisasi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2022 adalah sebesar **Rp40.597.091.946.149** atau sebesar **109,46 persen** dari target penerimaan selama Tahun 2022 sebesar **Rp37.089.849.454.000**.

Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.100.268.652.272 atau 33,12 persen apabila dibandingkan dengan realisasi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2021 yang mencapai Rp30.496.823.293.877. Secara umum peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh membaiknya kinerja Badan Usaha pada tahun buku 2022. Perbaikan tersebut tercermin dari peningkatan realisasi Penerimaan Bagian Pemerintah dari pembagian dividen

secara tunai Tahun Anggaran 2022 (Audited) dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 (Audited) sebesar Rp10.100.268.652.272 atau 33,11%. Kondisi ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 pada tahun buku 2022.

Dalam realisasi penerimaan bagian pemerintah dari pembagian *dividen* secara tunai pada periode Tahun Anggaran 2022 (Audited) tersebut, juga termasuk pembayaran piutang *dividen* tahun-tahun sebelumnya.

Rincian Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Uraian	2022	2021	%
Pend. Laba BUMN Perbankan	24.577.522.332.666	13.583.583.335.643	80,94
Pend. Laba BUMN Non Perbankan	16.019.569.613.483	16.913.239.958.234	(5,28)
Pend. dari Surplus Bank Indonesia	-	-	-
Jumlah	40.597.091.946.149	30.496.823.293.877	33,12

Rincian Realisasi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2022 dapat dilihat pada **lampiran LRA 2** (halaman LB2).

B.2.1.1.3. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNPB Lainnya

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar **Rp41.185.163.714.437** atau **125,11 persen** dari target sebesar **Rp32.919.143.489.000**. Realisasi PNPB Lainnya Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp10.464.431.866.240 atau turun 20,26 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Realisasi PNPB Lainnya ini terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Pengelolaan BMN	11.244.433.267.622	7.276.148.022.081	3.968.285.245.541
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	248.049.857	295.737.220	(47.687.363)
Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening	18.244.301.898.597	24.875.334.077.599	(6.631.032.179.002)
Pendapatan Iuran dan Denda	7.465.771.656	5.133.041.105	2.332.730.551
Pendapatan Lain-lain	11.688.714.726.705	19.492.684.702.672	(7.803.969.975.967)
Jumlah	41.185.163.714.437	51.649.595.580.677	(10.464.431.866.240)

Pendapatan lain-lain sebesar Rp11.688.714.726.705 berasal dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10.731.561.347.109, dan pendapatan anggaran lain-lain Rp749.758.704.990, Pendapatan dari Retur SP2D Rp 4.024.565.568, Pendapatan Surplus OJK Rp 203.370.109.038. Rincian PNPB lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Realisasi
999.01 (Pengelola Utang)	1.046.449.236.801
Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	966.886.960.600
Pendapatan Premium atas SBSN Dalam Negeri/ Rupiah	49.450.214.300
Pendapatan Anggaran Lain-lain	30.112.061.901
999.02 (Pengelola Hibah)	172.854.902.180
Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	172.854.902.180
999.03 (Pengelola Investasi Pemerintah)	1.205.133.243.210
Pendapatan Bunga Lainnya	902.470.597.162
Pendapatan Denda Lainnya	270.833
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	71.085.329.125
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit	231.577.046.090
999.04 (Pengelola Pemberian Pinjaman)	1.207.922.764.046
Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	1.157.139.600.212
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	3.214.050.020
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)	200.000
Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	88.435.656
Pendapatan Anggaran Lain-lain	291.275.000
Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	47.189.203.158
999.05 (Pengelola Belanja Transfer Daerah)	6.965.702.915.829
Pendapatan Anggaran Lain-lain	708.039.240.000
Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	6.257.663.675.829
999.07 (Pengelola Belanja Subsidi)	2.287.012.043.059
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.443.527.359
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	993.986.372
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	2.284.270.877.047
Pendapatan Denda Lainnya	303.652.281
999.08 (Pengelola Belanja Lain-Lain)	1.541.853.780.828
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	14.125.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	300.068.981
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	47.792.520
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	1.541.142.316.527
Pendapatan Anggaran Lain-lain	349.477.800
999.99 (Pengelola Transaksi Khusus)	26.758.234.828.484
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	203.370.109.038
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	248.049.857
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, Dan Pengelolaan Keuangan	14.817.420.525.922
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	11.244.419.142.622
Pendapatan Denda	2.204.002.182
Pendapatan Lain-lain	490.572.998.863
Jumlah	41.185.163.714.437

Pendapatan pada unit pengelola utang (999.01) berasal dari pengelolaan transaksi SBN mayoritas berasal dari transaksi terkait penjualan Obligasi

Negara dan SBSN dalam rupiah berupa pendapatan premium atas transaksi penerbitan SUN sebesar dan SBSN sebesar Rp1.016.337.174.900. Di samping itu, Pendapatan Anggaran Lain-Lain sebesar Rp30.112.061.901 berasal dari:

- a. Pendapatan atas transaksi MOCK (Uji coba Sistem Penjualan Ritel) Rp6.890, Transaksi evaluasi tahunan atas sistem elektronik Mitra Distribusi (Midis) sebesar Rp1.407.000
- b. Transaksi DRP Drill MPN G3 sebesar Rp50.000.
- c. Transaksi Pinjaman sebesar Rp30.110.598.011 merupakan transaksi pengembalian atas kelebihan pembayaran pinjaman lender ADB, kelebihan pembayaran *insurance premium* kepada lender Bayerische Landesbank pada tahun 2017 dan pengembalian atas sebagian *Premium Fee* dikarenakan tidak ditariknya seluruh nilai pinjaman lender Banco Bilbao Vizcaya Argebtarua, S.A.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada BA BUN 999.02 Rp172.854.902.180 merupakan pengembalian belanja hibah tahun anggaran yang lalu yang disetorkan oleh unit-unit Pemerintah Daerah dari berbagai daerah yang ditujukan kepada Satker 985251 dan Satker 985261 yang dikelola oleh Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Penerimaan bukan pajak lainnya sebesar Rp1.205.133.243.210 pada unit pengelola investasi pemerintah (999.03) merupakan pendapatan yang berasal dari:

- a. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Loss Limit sebesar Rp302.662.375.215 yang diterima dari PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan IJP loss limit untuk pelaku usaha UMKM sebagai salah satu program penanganan *COVID-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur dari proyek KPBU.
- b. Setoran bunga IP PEN dan denda keterlambatan penyeteroran bunga sebesar Rp162.639.365.469.

- c. Pemindahan saldo dana dari RIBUN ke RKUN dan dari RKUN ke RIBUN atas imbal hasil Investasi Pemerintah pada BP Tapera dalam rangka realisasi PNPB Pemerintah sebesar Rp289.597.970.365.
- d. Hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur berupa pendapatan Bunga, Deposito dan Jasa Giro sebesar Rp159.762.701.303. Sedangkan dana yang berasal dari bunga pinjaman sebesar Rp290.470.830.858 yang dipotong dari DAU.

Penerimaan negara bukan pajak lainnya pada unit pengelola pemberian pinjaman (999.04) sebesar Rp1.207.922.764.046 diperoleh dari aktifitas pemberian pinjaman yaitu Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-Lain.

Pada unit pengelola transfer ke daerah dan dana desa (999.05) sebesar Rp6.965.702.915.829 merupakan gabungan penerimaan dari masing-masing Satker BA 999.05 (Satker DAK Non Fisik, Satker DAK Fisik, DAK Non Fisik – Dana BOS, dan Dana Desa, Satker DK DIY dan Satker DBH). Rincian PNPB Lainnya ditampilkan pada table berikut:

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	Realisasi
A. Satker DAU	2.001.468.423.039
B. Satker DAK Non Fisik	3.159.206.570.541
C. Satker DAK Fisik dan Dana Desa	48.108.908.345
D. Satker DK DIY	60.713.022.517
E. Satker DBH	1.696.205.991.387
Jumlah PNPB Lainnya	6.965.702.915.829

Nilai Satker DK DIY sebesar Rp60.713.022.517 tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Hasil Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap III Tahun Anggaran 2021 yang pada tahun anggaran sebelumnya telah di catat sebagai piutang yaitu sebesar Rp60.713.022.516,95. Realisasi PNPB Lainnya pada unit pengelola transfer ke daerah dan dana desa (999.05) dapat dilihat di **Lampiran LRA 1** (halaman LB5).

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya pada unit pengelola belanja subsidi (999.07) sebesar Rp2.287.012.043.059 berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian

Perhubungan. Angka didominasi oleh penyetoran dana PBBKB atas pembayaran subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2015-2018 dari PT AKR Corporindo, Tbk dan PT Pertamina Persero sebesar Rp1.519.657.303.990 dan Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TAYL sebesar Rp484.360.689.299.

Realisasi pendapatan negara BA Belanja Lain-lain (999.08) Tahun 2022 sebesar Rp1.541.853.780.828 seluruhnya merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lainnya. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.371.820.759.918 dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp4.913.674.540.746. Pendapatan negara tersebut terdiri atas Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.541.142.316.527, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp300.068.981, Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp47.792.520, Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp349.477.800, dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp14.125.000. Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu terdapat pada satker SKK Migas sebesar Rp3.945.508.046, OJK sebesar Rp29.500.000, BP Batam sebesar Rp930.280.833, Ditjen PPI Kominfo sebesar Rp2.652.574.564, MPPKP sebesar Rp330.337.784.404, Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp111.607.957, Dit. PNBP SDAKND Satker Kompensasi sebesar Rp1.202.262.980.203, Kanwil DJPb Provinsi Papua sebesar Rp872.080.520. Selain itu, terdapat Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp47.792.520 dari satker Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, yang merupakan satker inaktif/suspend.

Penerimaan PNBP lainnya pada unit pengelola transaksi khusus (999.99) adalah sebesar Rp26.758.234.828.484 terdiri dari Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-lain. Berikut rincian PNBP Lainnya pada BA BUN 999.99:

No	Uraian	Tahun 2022
1	PNBP Pengelolaan Kas Negara	14.804.664.828.343
2	PNBP Pengelolaan Dana Pensiun, Akes dll	497.859.774.137
3	PNBP Satker TK Suspen Penerimaan	5.939.837.239
4	PNBP Lainnya dari Pengelolaan Aset BLBI	2.648.079.087
5	PNBP Lainnya dari Pengelolaan aset Eks Pertamina	207.815.642.292
6	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS	251.840.175.563
7	PNBP Lainnya Pengelolaan BPLS	-
8	PNBP Setoran Lainnya Surplus Otoritas Jasa Keuangan	203.370.109.038
9	PNBP Satker Migas	10.356.457.166.231
10	PNBP Pengelola Panas Bumi	27.818.478
11	PNBP Pengelola BMN PKP2B	352.188.146.613
12	PNBP Pengelolaan Aset Lain-Lain	67.954.060.412
13	PNBP Pengelola KPPN KPH	68
14	PNBP Lainnya Aset Bekas Milik Asing Tionghoa	7.469.190.983
15	PNBP Pengelola BMN Idle	-
Jumlah		26.758.234.828.484

B.2.1.2. Penerimaan Hibah

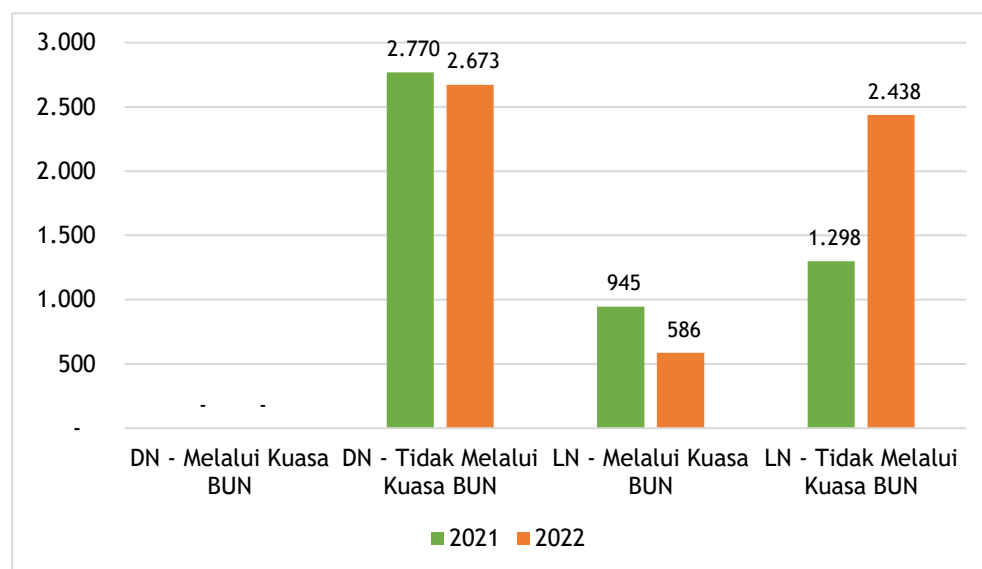
Realisasi Penerimaan Hibah

Realisasi Anggaran atas Penerimaan Hibah selama Tahun 2022 sebesar neto Rp5.696.055.413.792 atau 102,40 persen dari estimasi pendapatan yang terdapat dalam DIPA TA 2022 sebesar Rp5.562.385.672.000. Realisasi pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp683.012.979.106 atau 13,62 persen dibanding realisasi tahun 2021. Penerimaan Hibah bersumber dari Penerimaan Hibah dalam negeri sebesar Rp2.672.694.521.172 dan Penerimaan Hibah luar

negeri sebesar Rp3.023.360.892.620. Rincian Penerimaan Hibah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	2022	2021
Hibah Dalam Negeri	2.672.694.521.172	2.769.614.720.071
Hibah Langsung Bentuk Uang	2.672.694.521.172	2.769.614.720.071
Hibah Luar Negeri	3.023.360.892.620	2.243.427.714.615
Hibah Terencana Bilateral	186.394.259.492	300.894.186.221
Hibah Terencana Multilateral	399.456.041.533	644.162.718.216
Hibah Terencana Lainnya	0	0
Hibah Langsung Bentuk Uang	2.437.510.591.595	1.298.370.810.178
Jumlah	5.696.055.413.792	5.013.042.434.686

Penerimaan Hibah bersumber dari Penerimaan Hibah dalam negeri sebesar Rp2.672.694.521.172 merupakan Penerimaan Hibah dalam negeri tidak melalui kuasa BUN dan Penerimaan Hibah luar negeri sebesar Rp3.023.360.892.620 terdiri atas Penerimaan Hibah luar negeri melalui kuasa BUN sebesar Rp585.850.301.025 dan Penerimaan Hibah luar negeri tidak melalui kuasa BUN sebesar Rp2.437.510.591.595. Hal itu tampak pada gambar berikut:



Kenaikan realisasi Penerimaan Hibah terutama dipengaruhi meningkatnya pemahaman dan kesadaran K/L untuk melaporkan Penerimaan Hibah langsung kepada BUN.

B.2.2. Belanja BUN

Realisasi Belanja BUN Realisasi Belanja BUN Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.011.588.067.001.453 atau 98,52 persen dari anggaran sebesar Rp2.041.902.928.700.000. Realisasi Belanja BUN terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.195.353.240.933.757 dan (ii) Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp816.234.826.067.696 .

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.195.353.240.933.757 atau 98,87 persen dari anggaran sebesar Rp1.208.956.098.137.000. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja antara lain terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Lain-lain.

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai Tahun 2022 adalah sebesar Rp144.760.288.597.066 atau sebesar 97,73 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp148.125.030.307.000 . Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 5.642.949.154.076 atau 4,06 persen. Secara umum realisasi belanja mengalami kenaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Terdapat kenaikan jumlah penerima pensiun sehingga realisasi terkait belanja pegawai pensiun juga mengalami kenaikan.
- b. Terdapat kenaikan realisasi akun Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah (513112) sebesar Rp5.104.740.137.618 dari semula realisasi TA 2021 sebesar Rp75.719.583.664.559 menjadi pada TA 2022 sebesar Rp80.824.323.802.177.
- c. Terdapat kenaikan Belanja Tunjangan Hari Tua (Unfunded Liability) dengan akun (513161) sebesar Rp1.610.191.529.955 semula realisasi TA 2021 sebesar Rp669.808.470.045 menjadi pada TA 2022 sebesar Rp2.280.000.000.000.

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 adalah sebesar **Rp1.249.177.651.197** atau **82,79 persen** dari anggaran sebesar **Rp1.508.918.595.000**. Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp81.633.506.580** atau **6,99 persen** bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar **Rp1.167.544.144.617**. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan belanja fasilitas penyiapan proyek kepada BUMN Pelaksana Penugasan pada Satker TK DJPPR. Rincian Belanja Barang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Satker TK DJPb (987361)	1.227.301.082.000	1.038.696.943.947	84,63%
2	Satker TK BKF (984438)	74.559.379.000	74.579.839.600	100,03%
3	Satker TK DJPPR (978010)	51.716.562.000	51.716.561.215	100,00%
4	Satker TK DJKN (984515)	17.048.714.000	16.190.236.423	94,96%
5	Satker TK DJPPR (999903)	1.463.345.000	1.463.345.000	100,00%
6	Satker TK DJPPR (999982)	136.829.513.000	66.530.725.012	48,62%
	Jumlah	1.508.918.595.000	1.249.177.651.197	82,79%

1. Belanja Barang pada satker TK DJPb sebesar Rp1.038.696.943.947 dari anggaran sebesar Rp1.227.301.082.000. Realisasi tersebut terdiri dari:
 - a. Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi sebesar Rp284.550.329.000;
 - b. Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan sebesar Rp1.325.283.753.
 - c. Belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp752.821.331.194
2. Belanja Barang pada satker TK BKF (984438) sebesar Rp74.579.839.600 atau 100,03% dari anggarannya sebesar Rp74.559.379.000. Pelampauan pagu anggaran sebesar Rp20.460.600 menimbulkan pagu minus atas transaksi pembayaran OFID, AMTF dan GCF. Hal ini disebabkan oleh nilai kurs pada saat SPP/SPM lebih rendah (Rp15.659/US\$) daripada nilai kurs pada saat SP2D untuk pembayaran OFID, AMTF dan GCF (Rp15.731/US\$)

Uraian	31 Desember 2022					
	Anggaran (DIPA)	Mata Uang	SP2D	Konfirmasi	Tgl SP2D	SP2D (IDR)
USAID Trust Fund	6.876.375.000	IDR	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	25/07/2022	5.000.000.000
ADF	57.321.005.000	USD	3.943.600,00	3.943.600,00	22/09/2022	59.197.379.600
OFID	5.965.999.000	USD	380.000,00	380.000,00	30/12/2022	5.977.780.000
AMTF	471.000.000	USD	30.000,00	29.972,50	30/12/2022	471.930.000
GCF	3.925.000.000	USD	250.000,00	250.000,00	30/12/2022	3.932.750.000
JUMLAH	74.559.379.000					74.579.839.600

3. Belanja Barang pada Satker DJKN

Anggaran dan realisasi belanja negara pada aset yang berada dalam pengelolaan DJKN Tahun 2022 adalah sebesar Rp16.190.236.423, berasal dari UAKPA kegiatan penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN.

Belanja penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN Tahun 2022 terealisasi sebesar 94,96% dari alokasi anggaran, disebabkan penggantian biaya dan margin IP PEN berdasarkan hasil reuiu BPKP lebih rendah dibandingkan usulan tagihan yang disampaikan Pelaksana Investasi. Selama Tahun 2022 dilakukan penyaluran penggantian biaya dan margin IP PEN kepada Pelaksana Investasi untuk periode tagihan bulan Oktober 2021, April 2022, dan Oktober 2022 yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, yaitu pada bulan Oktober dan Desember 2022 masing-masing sebesar Rp14.379.473.350 dan Rp1.810.763.074.

4. Belanja Barang pada satker DJPPR

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp119.710.631.227 atau sebesar 63% dari pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp190.009.420.000. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek senilai Rp66.530.725.012; dan Belanja Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit Rp1.463.345.000.

Adapun realisasi Belanja Barang per 2021 adalah sebesar Rp55.486.105.815 atau sebesar 48,67% dari pagu anggaran Tahun 2021 sebesar Rp114.002.522.000. Adapun rincian realisasi pada tahun 2021 adalah senilai Rp54.218.105.815 untuk Belanja Fasilitas Proyek dan Rp1.268.000.000 untuk Belanja Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit*.

Pada kurun waktu 2021 hingga 2022, tidak terdapat kenaikan realisasi anggaran BA BUN Transaksi Khusus secara signifikan. Jumlah capaian keluaran fasilitas penyiapan proyek mengalami penurunan sejak tahun 2020 sehingga mempengaruhi jumlah penggantian biaya penugasan fasilitas penyiapan proyek kepada BUMN Pelaksana Penugasan. Namun demikian, pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek mengalami peningkatan kualitas dengan adanya reuiu Kementerian Keuangan yang dilakukan pada setiap hasil keluaran yang dihasilkan oleh Pelaksana Fasilitas sebagaimana

diamanatkan dalam PMK 180 Tahun 2020.

B.2.2.1.3. Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Pembayaran Bunga Utang Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2022 adalah sebesar **Rp386.341.819.789.815** atau **99,85 persen** dari anggaran sebesar **Rp386.940.303.647.000**. Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp42.846.436.345.966 atau 12,47 persen dari realisasi Tahun 2021. Kenaikan tersebut seiring adanya penambahan utang pada tahun 2021 dan 2022. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp12.723.908.318.349, pembayaran bunga utang Surat Berharga Negara sebesar Rp373.085.036.199.041 dan pembayaran bunga pinjaman dalam negeri senilai Rp532.875.272.425. Adapun komposisi belanja pembayaran bunga tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Jenis Belanja	2022	2021
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	12.723.908.318.349	10.632.254.268.322
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	373.617.911.471.466	332.863.129.175.527
Jumlah	386.341.819.789.815	343.495.383.443.849

Realisasi pembayaran bunga Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan 19,67 persen dibandingkan Tahun 2021. Kenaikan tersebut karena adanya penurunan utang proyek di Tahun 2021 dan kinerja pinjaman yang semakin membaik dengan turunnya belanja biaya proyek. Rincian belanja pembayaran bunga utang luar negeri Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN /JENIS BELANJA/RINCIAN	2022	2021
541411	Belanja Bunga Pinjaman Program	5.665.757.064.090	4.572.480.266.696
541419	Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	218.165.618.289	104.820.278.826
541421	Belanja Bunga Pinjaman Proyek	5.035.738.077.025	5.049.127.501.864
541421	Pengembalian Belanja Bunga Pinjaman Proyek		-
541429	Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	1.803.962.150.480	905.504.869.248
541461	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	285.408.465	321.351.688
JUMLAH PEMBAYARAN BUNGA UTANG LUAR NEGERI		12.723.908.318.349	10.632.254.268.322

Realisasi Pembayaran Bunga SBN Tahun 2022 sebesar Rp373.085.036.199.041 dan Tahun 2021 sebesar Rp332.343.243.173.466. Realisasi Pembayaran Bunga SBN Tahun 2022 terdapat di dalamnya kontribusi BI atas PG sebesar Rp13.167.805.170.000, kontribusi BI atas NPG sebesar Rp6.418.268.694.024 dan Kontribusi BI atas Cluster A sebesar Rp2.176.882.804.300.

Realisasi pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2022 sebesar Rp532.875.272.425 dan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp519.886.002.061. Rincian belanja pembayaran bunga utang dalam negeri Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN /JENIS BELANJA/RINCIAN	2022	2021
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Rupiah	243.909.923.080.418	220.870.889.239.491
541219	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	190.937.201.909	175.364.905.818
541231	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	532.875.272.425	519.886.002.061
541251	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	38.945.153.546.632	38.962.350.985.578
541259	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	61.668.253.633	96.848.899.168
541311	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	60.305.171.837.356	53.318.077.388.430
541312	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya-Imbalan SBSN Jangka Panjang	201.608.457.712	175.580.216.090
541341	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	11.815.228.187.500	10.314.042.712.500
541342	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	27.846.305.423	23.091.645.136
542111	Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara	1.392.880.725.000	1.146.477.741.000
542121	Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara	9.047.825.130.195	2.334.364.811.200
542141	Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara Valas	749.166.902.746	910.992.622.900
544111	Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	444.585.600.000	971.813.000.000
544113	Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas	892.867.201.614	882.527.752.507
545111	Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	4.900.097.616.903	1.863.847.173.648
545131	Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah	200.076.152.000	296.974.080.000
JUMLAH PEMBAYARAN BUNGA UTANG DALAM		373.617.911.471.466	332.863.129.175.527

Realisasi pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri mengalami kenaikan dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar 2,50 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya jadwal pembayaran bunga PDN baru dialokasikan pada Tahun 2022

B.2.2.1.4. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 adalah sebesar **Rp252.812.907.867.326** atau **97,73 persen** dari pagu anggarannya sebesar **Rp258.674.076.847.000**. Sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2021 adalah sebesar Rp242.086.818.340.688 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.726.089.526.638 atau sebesar 4,43 persen.

Anggaran Belanja Subsidi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp206.963.748.116.000, dengan rincian sebagai berikut.

NO	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	ANGGARAN
01	Pelayanan Umum	12.686.403.261.000
01.90	Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya	12.686.403.261.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	12.686.403.261.000
	Pengelolaan Subsidi Pajak	12.686.403.261.000
04	Ekonomi	189.065.871.453.000
04.01	Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan Usaha Kecil	23.517.225.212.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	23.517.225.212.000
	Pengelolaan Subsidi Bunga Kredit Program	76.797.659.000
	Pengelolaan Subsidi IJP KUR dan Bunga KUR	23.440.427.553.000
	Pengelolaan Subsidi Bea Masuk	0
04,03	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan	25.276.643.699.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	25.276.643.699.000

NO	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	ANGGARAN
	Pengelolaan Subsidi Pupuk	25.276.643.699.000
04,05	Bahan Bakar dan Energi	134.028.972.552.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	134.028.972.552.000
	Pengelolaan Subsidi Energi	134.028.972.552.000
04,08	Transportasi	5.843.052.050.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	5.843.052.050.000
	Pengelolaan Subsidi PSO Perkeretaapian	3.508.414.601.000
	Pengelolaan Subsidi PSO Angkutan Laut	2.334.637.449.000
04,09	Telekomunikasi dan Informatika	168.383.356.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	168.383.356.000
	Pengelolaan Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers	168.383.356.000
04,90	Ekonomi Lainnya	231.594.584.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	231.594.584.000
	Pengelolaan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah	231.594.584.000
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	2.063.537.000
06.90	Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya	2.063.537.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	2.063.537.000
	Pengelolaan Subsidi Bunga untuk Air Bersih	2.063.537.000
11	Perlindungan Sosial	5.209.409.865.000
11.07	Bantuan Perumahan	5.209.409.865.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	5.209.409.865.000
	Pengelolaan Subsidi Perumahan	5.209.409.865.000
	JUMLAH TOTAL	206.963.748.116.000

Perkembangan Anggaran Belanja Subsidi menurut Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Dana Belanja Subsidi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Satker	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kementerian Keuangan	193.900.872.053.000	192.672.763.675.000	1.228.108.378.000	0,64
	- Ditjen Anggaran	175.363.617.174.000	147.927.086.432.000	27.436.530.742.000	18,55
	- DitjenPerbendaharaan	75.712.372.000	8.090.930.310.000	(8.015.217.938.000)	(99)
	- Ditjen PPR	2.494.035.076.000	5.207.292.500.000	(2.713.257.424.000)	(52)
	- Ditjen PK	231.594.584.000	78.262.153.000	153.332.431.000	196
	- Direktorat Jenderal Pajak	15.735.912.847.000	31.369.192.280.000	(15.633.279.433.000)	(49,84)
2	Kementerian Pertanian	31.304.689.616.000	29.057.813.388.000	2.246.876.228.000	7,73
	- Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	31.304.689.616.000	29.057.813.388.000	2.246.876.228.000	7,73
3	Kementerian Perhubungan	6.325.566.974.000	5.947.255.798.000	378.311.176.000	6,36
	- Direktorat Jenderal Perkeretaapian	3.508.414.601.000	3.848.246.448.000	(339.831.847.000)	(8,83)
	- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2.817.152.373.000	2.099.009.350.000	718.143.023.000	34,21
4	Kementerian PUPR	3.519.771.472.000	6.600.039.579.000	(3.080.268.107.000)	(46,67)
	- DitjenCipta Karya	2.063.537.000	3.232.730.000	(1.169.193.000)	(36,17)
	- Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur	3.517.707.935.000	6.596.806.849.000	(3.079.098.914.000)	(46,68)
5	Kementerian Kominfo	168.383.356.000	167.687.542.000	695.814.000	0,41
	- Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik	168.383.356.000	167.687.542.000	695.814.000	0,41
6	Kementerian Koperasi dan UKM	23.453.708.089.000	26.976.022.586.000	(3.522.314.497.000)	(13,06)
	- Deputi Bidang Usaha 'Mikro	23.453.708.089.000	26.941.384.390.000	(3.487.676.301.000)	(12,95)
	- Deputi Bidang Perkoperasian	0	34.638.196.000	(34.638.196.000)	(100)
7	Kementerian Perdagangan	1.085.287.000	0	1.085.287.000	-
	- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	1.085.287.000	0	1.085.287.000	-
8	Kementerian BUMN	0	2.193.729.598.000	(2.193.729.598.000)	(100)
	- Sekretariat Kementerian BUMN	0	2.193.729.598.000	(2.193.729.598.000)	(100)
9	Kementerian Perindustrian	0	491.000.000.000	(491.000.000.000)	(100)
	- Direktorat Jenderal ILMATAE	0	108.780.000.000	(108.780.000.000)	(100)
	- Direktorat Jenderal IKFT	0	170.870.000.000	(170.870.000.000)	(100)
	- Direktorat Jenderal IKMA	0	0	0	-
	- Direktorat Jenderal Industri Agro	0	211.350.000.000	(211.350.000.000)	(100,0)
Jumlah		258.674.076.847.000	264.106.312.166.000	5.432.235.319.000	(2,06)

Terdapat pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp72.155.805, yaitu:

1. Pada satker Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR sebesar Rp63.160.103.
2. Pada satker Ditjen PSP sebesar Rp8.995.693.
3. Pada satker Ditjen Cipta Karya sebesar Rp9.

Rincian realisasi belanja subsidi menurut jenis subsidi Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian	31-Des-22	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase Kenaikan/ (penurunan)
Subsidi Minyak Solar	10.126.760.761.603	13.505.087.754.359	(3.378.326.992.756)	- 25,02
Subsidi Minyak Tanah	5.097.998.717.227	2.666.982.603.294	2.431.016.113.933	91,15
Subsidi Elpiji	100.390.005.332.074	67.615.130.344.664	32.774.874.987.410	48,47
Subsidi Listrik	56.129.264.276.198	47.822.316.163.275	8.306.948.112.923	17,37
Subsidi PPh DTP	8.869.124.713.844	11.744.479.010.000	(2.875.354.296.156)	- 24,48
Subsidi BM-DTP	0	0	0	-
Subsidi Bunga KKP dan Energi	999.369.775	5.188.157.265	(4.188.787.490)	- 80,74
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	15.692.064.973	12.793.613.734	2.898.451.239	22,66
Subsidi Risk Sharing KKPE	2.748.956.348	265.613.074	2.483.343.274	934,95
Subsidi Imbalan Jasa Penjamin KUR	0	76.895.021.460	(76.895.021.460)	- 100,00
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	0	100.958.928	(100.958.928)	- 100,00
Subsidi Kredit Resi Gudang	1.078.021.248	324.299.829	753.721.419	232,41
Subsidi Pupuk	29.769.041.487.742	27.155.272.941.894	2.613.768.545.848	9,63
Subsidi PT KAI	3.324.045.262.688	3.416.945.672.209	(92.900.409.521)	- 2,72
Subsidi/PSO PT. PELNI	2.817.152.372.656	2.099.009.350.000	718.143.022.656	34,21
Subsidi PSO lainnya	168.293.494.000	166.151.740.000	2.141.754.000	1,29
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	2.059.732.713	14.843.148.085.554	(14.841.088.352.841)	- 99,99
Subsidi Bunga KPR	2.570.570.451.675	2.333.672.707.269	236.897.744.406	10,15
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	929.968.000.000	714.894.000.000	215.074.000.000	30,08
Subsidi Diskon Listrik- Penanganan Pandemi Covid-19	114.758.426.726	8.785.659.907.900	(8.670.901.481.174)	- 98,69
Subsidi Bunga Program PEN (DJPK) - Penanganan Pandemi Covid-19	155.176.756.597	18.039.431.082	137.137.325.515	760,21
Subsidi BUM Perumahan - Penanganan Pandemi covid-19	0	0	0	-
Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0	-
Subsidi KUR - Penanganan Pandemi Covid-19	23.113.047.044.984	11.882.141.464.092	11.230.905.580.892	94,52
Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	2.496.064.677.101	5.147.786.492.944	(2.651.721.815.843)	- 51,51
Subsidi PPn-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	3.258.885.627.759	4.920.203.290.638	(1.661.317.662.879)	- 33,77
Subsidi PPNBM-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	1.111.299.638.016	4.916.284.423.265	(3.804.984.785.249)	-
Subsidi BM-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	0	324.058.608.997	(324.058.608.997)	- 100,00
Subsidi Bunga/Margin Prog PEN- Penanganan Pandemi Covid-19	0	8.648.200.300.682	(8.648.200.300.682)	- 100,00
Subsidi IJP Program PEN(DJPPR) - Penanganan Pandemi Covid-19	2.348.872.681.379	3.265.786.384.280	(916.913.702.901)	- 28,08
Subsidi Pupuk Pogram PEN-Penanganan Pandemi	0	0	0	-
<i>Total Reguler</i>	<i>220.214.803.014.764</i>	<i>194.178.658.036.808</i>	26.036.144.977.956	13,41
<i>Total PEN</i>	<i>32.598.104.852.562</i>	<i>47.908.160.303.880</i>	(15.310.055.451.318)	- 31,96
Jumlah	252.812.907.867.326	242.086.818.340.688	10.726.089.526.638	4,43

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 pada 7 (tujuh) Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut.

a. Kementerian Keuangan

Pada 31 Desember 2022, Kementerian Keuangan menerima anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp193.900.872.053.000. Realisasi belanja subsidi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp190.117.651.999.620 atau 98,05% dari pagu anggaran. Pada Tahun 2021 realisasi belanja subsidi sebesar Rp176.847.458.502.992, sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi belanja subsidi 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp13.270.193.496.628 (7,50%). Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi pada Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	UNIT ESELON I	Tahun 2022		Tahun 2021	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	Ditjen Anggaran	175.363.617.174.000	171.858.787.513.828	147.927.086.432.000	140.395.176.773.492
2	Ditjen Perbendaharaan	75.712.372.000	19.440.391.096	8.090.930.310.000	6.439.702.697.291
3	Ditjen Pajak	15.735.912.847.000	15.735.374.656.720	31.369.192.280.000	26.728.753.216.847
4	Ditjen PK	231.594.584.000	155.176.756.597	78.262.153.000	18.039.431.082
5	Ditjen PPR	2.494.035.076.000	2.348.872.681.379	5.207.292.500.000	3.265.786.384.280
	Total	193.900.872.053.000	190.117.651.999.620	192.672.763.675.000	176.847.458.502.992

Rincian Realisasi Belanja Subsidi per jenis subsidi Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/turun	%
Reguler	180.633.672.213.290	143.372.668.518.422	37.261.003.694.868	25,99
Subsidi Minyak Solar	10.126.760.761.603	13.505.087.754.359	(3.378.326.992.756)	(25,02)
Subsidi Minyak Tanah	5.097.998.717.227	2.666.982.603.294	2.431.016.113.933	91,15
Subsidi Elpiji	100.390.005.332.074	67.615.130.344.664	32.774.874.987.410	48,47
Subsidi Listrik	56.129.264.276.198	47.822.316.163.275	8.306.948.112.923	17,37
Subsidi PPh DTP	8.869.124.713.844	11.744.479.010.000	(2.875.354.296.156)	(24,48)
Subsidi Bunga KKP dan Energi	999.369.775	5.188.157.265	(4.188.787.490)	(80,74)
Subsidi Bunga Risk Sharing KKPE	2.748.956.348	265.613.074	2.483.343.274	934,95
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	15.692.064.973	12.793.613.734	2.898.451.239	22,66
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	-	100.958.928	(100.958.928)	(100,00)
Subsidi Kredit Resi Gudang	1.078.021.248	324.299.829	753.721.419	232,41
PEN	9.485.057.807.578	35.701.960.230.791	(26.216.902.423.213)	-73,43%
Subsidi Diskon Listrik - Penanganan Pandemi covid-19	114.758.426.726	8.785.659.907.900	(8.670.901.481.174)	(98,69)
Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	2.496.064.677.101	5.147.786.492.944	(2.651.721.815.843)	(51,51)
Subsidi PPN-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	3.258.885.627.759	4.920.203.290.638	(1.661.317.662.879)	(33,77)
Subsidi PPNBM-DTP-Penanganan Pand	1.111.299.638.016	4.916.284.423.265	(3.804.984.785.249)	(77,40)
IJP Prog PEN - Penanganan Pandemi Covid-19	2.348.872.681.379	3.265.786.384.280	(916.913.702.901)	(28,08)
Bunga/Margin Prog PEN-Penanganan Pandemi Covid-19	155.176.756.597	8.648.200.300.682	(8.493.023.544.085)	(98,21)
Subsidi Bunga Program PEN (DJPK)	-	18.039.431.082	(18.039.431.082)	(100,00)
Jumlah	190.118.730.020.868	179.074.628.749.213	11.044.101.271.655	6,17

Direktorat Jenderal Anggaran

Pagu Anggaran Subsidi Energi pada Direktorat Jenderal Anggaran 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp175.363.617.174.000. Realisasi Belanja Subsidi Energi 31 Desember 2022 sebesar Rp171.858.787.513.828 atau 98% dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja Subsidi Energi tersebut, Rp31.463.610.740.336 (22,41%) lebih besar dari realisasinya pada Tahun 2021 Rp140.395.176.773.492 .

Realisasi pembayaran Subsidi Energi Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	% APBNP
1	Subsidi BBM	15.424.826.942.000	15.224.759.478.830	98,70%
	a. Minyak Solar	10.237.818.141.000	10.126.760.761.603	98,92%
	b. Minyak Tanah	5.187.008.801.000	5.097.998.717.227	98,28%
2	Subsidi LPG 3 Kg	103.423.608.813.000	100.390.005.332.074	97,07%
3	Subsidi Listrik	56.515.181.419.000	56.244.022.702.924	99,52%
	a. Subsidi listrik murni	56.400.422.992.000	56.129.264.276.198	99,52%
	b. Diskon listrik	114.758.427.000	114.758.426.726	100,00%
Jumlah		175.363.617.174.000	171.858.787.513.828	98,00%

Realisasi pembayaran subsidi JBT pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.224.759.478.830 terdiri atas 2 jenis, yaitu Minyak Solar dan Minyak Tanah, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- Pembayaran sebesar Rp10.126.760.761.603 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Solar, yang terdiri atas:
 - Rp7.763.375.662.425 merupakan pembayaran subsidi JBT Minyak Solar tahun 2022 kepada PT Pertamina Patra Niaga ;
 - Rp63.635.021.823 merupakan pembayaran subsidi JBT Minyak Solar tahun 2022 kepada PT AKR Corporindo, Tbk.;
 - Rp1.401.153.658.777 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Minyak Solar tahun 2020 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina (Persero);
 - Rp879.093.880.403 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Minyak Solar tahun 2021 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga;
 - Rp12.836.686.533 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Minyak Solar tahun 2020 Hasil Audit BPK RI kepada PT AKR Corporindo, Tbk.
 - Rp6.665.851.642 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Minyak Solar tahun 2021 Hasil Audit BPK RI kepada PT AKR Corporindo, Tbk.
- Pembayaran sebesar Rp5.097.998.717.227 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Tanah, yang terdiri atas:
 - Rp4.631.920.340.241 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis

Minyak Tanah tahun 2022 kepada PT Pertamina Patra Niaga, terdiri atas subsidi harga sebesar Rp4.168.450.592.241 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan JBT Jenis Minyak Tanah oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada Pemerintah sebesar Rp463.469.748.000;

- Rp99.415.617.008 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Minyak Tanah tahun 2020 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina (Persero), terdiri atas subsidi harga sebesar Rp91.054.644.352 dan PPN atas penyerahan JBT Jenis Minyak Tanah oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp8.360.972.656;
- Rp366.662.759.978 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Minyak Tanah tahun 2021 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga, terdiri atas subsidi harga sebesar Rp338.146.725.434 dan PPN atas penyerahan JBT Jenis Minyak Tanah oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada Pemerintah sebesar Rp28.516.034.544;

Total JBT yang disalurkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 berdasarkan berita acara rekonsiliasi asersi antara KPA dengan badan usaha adalah sebesar 18.078,5 ribu KL atau mencapai 98,69% dari kuota pada tahun 2022 APBN sebesar 18.318,4 ribu KL, terdiri dari minyak tanah sebesar 488,6 ribu KL dari kuota penyaluran sebesar 485,0 ribu KL dan minyak solar 17.589,9 ribu KL dari kuota penyaluran sebesar 17.833,4 ribu KL. Penyaluran JBT diupayakan dilakukan secara optimum agar rumah tangga miskin, usaha mikro, petani, dan nelayan kecil dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau, guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menjaga kegiatan ekonomi skala mikro dan kecil tetap berjalan.

Pembayaran subsidi JBT tahun berjalan pada tahun 2022 merupakan pembayaran kepada PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo, Tbk sampai dengan tagihan bulan November 2022, termasuk pembayaran tagihan koreksi Triwulan I s.d. Triwulan II 2022 untuk PT Pertamina Patra

Niaga dan koreksi Triwulan I s.d. Triwulan III 2022 untuk PT AKR Corporindo, Tbk.

Sementara itu, realisasi pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.390.005.332.074 yang terdiri atas:

- Rp85.345.997.493.746 merupakan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2022 kepada PT Pertamina Patra Niaga, terdiri atas subsidi harga sebesar Rp76.963.406.230.660 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada Pemerintah sebesar Rp8.382.591.263.086;
- Rp8.658.861.757.884 merupakan pembayaran kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2020 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina (Persero), terdiri atas subsidi harga sebesar Rp7.888.327.572.053 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp770.534.185.831;
- Rp6.385.146.080.444 merupakan pembayaran kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2021 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga, terdiri atas subsidi harga sebesar Rp5.883.115.934.293 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada Pemerintah sebesar Rp552.030.146.151.

Pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun berjalan pada tahun 2022 merupakan pembayaran kepada PT Pertamina Patra Niaga sampai dengan tagihan periode 1-15 Desember 2022. Sementara itu, jumlah LPG Tabung 3 Kg yang disalurkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 berdasarkan berita acara rekonsiliasi asersi antara KPA dengan badan usaha adalah sebesar 7.999 juta Kg atau mencapai 97,49% dari kuota sebesar 8.000 juta Kg. Meningkatnya realisasi subsidi LPG Tabung 3 Kg pada tahun 2022 diantaranya disebabkan oleh harga produk LPG (Contract Price Aramco) yang lebih tinggi dibandingkan asumsi CPA yang digunakan dalam perhitungan APBN. Penyaluran LPG tabung bersubsidi penting bagi masyarakat miskin, mengingat LPG saat ini telah menjadi sumber energi

utama untuk memasak, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pedagang kecil. Dengan demikian penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg ini selaras dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional melalui penyediaan sumber energi bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak dari menurunnya aktivitas perekonomian akibat Covid-19.

Realisasi pembayaran subsidi listrik pada Periode Tahun Anggaran 2022 Audited adalah sebesar Rp56.244.022.702.924, yang merupakan pembayaran atas beban subsidi listrik tahun berjalan periode tagihan Januari s.d. Desember 2022 sebesar Rp54.154.631.854.534 dan pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2021 sesuai hasil audit BPK RI sebesar Rp2.089.390.848.390 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Subsidi Listrik Tahun Berjalan 2022	54.154.631.854.534
2	Kurang Bayar Subsidi Listrik Tahun 2021	2.089.390.848.390
	a. Subsidi Listrik reguler Tahun 2021	1.974.632.421.664
	b. Subsidi Diskon Tarif Tahun 2021	114.758.426.726

Perbandingan realisasi pembayaran belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 Kg pada Periode Tahun Anggaran 2022 dengan Periode TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
Belanja Subsidi Minyak Solar	10.126.760.761.603	13.505.087.754.359	(3.378.326.992.756)	(25,02)
Belanja Subsidi Minyak Tanah	5.097.998.717.227	2.666.982.603.294	2.431.016.113.933	91,15
Belanja Subsidi Elpiji Tabung 3 Kg	100.390.005.332.074	67.615.130.344.664	32.774.874.987.410	48,47
Jumlah	115.614.764.810.904	83.787.200.702.317	31.827.564.108.587	37,99

Realisasi belanja subsidi BBM JBT dan LPG Tabung 3 Kg Periode Tahun Anggaran 2022 Audited sebesar Rp115.614.764.810.904 lebih tinggi sebesar Rp31.827.564.108.587 atau 37,99% dibandingkan realisasi belanja pada Periode Tahun Anggaran 2021 *Audited* sebesar Rp83.787.200.702.317. Hal ini disebabkan selama periode Tahun Anggaran 2022

terdapat: (1) pembayaran kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2020 dan Tahun 2021; (2) kenaikan harga produk LPG (*Contract Price*

Aramco/ yang berdampak pada peningkatan subsidi LPG Tabung 3 Kg; (3) kenaikan harga produk BBM (Mean of Plats Singapore) yang berdampak pada peningkatan subsidi Minyak Tanah serta (4) kenaikan volume penyaluran JBT dan LPG Tabung 3 Kg.

Sementara itu, perbandingan realisasi Subsidi Listrik Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
Belanja Subsidi Listrik Reguler	56.129.264.276.198	47.822.316.163.275	8.306.948.112.923	17,37
Diskon Tarif Tenaga Listrik	114.758.426.726	8.785.659.907.900	(8.670.901.481.174)	(98,69)
Jumlah	56.244.022.702.924	56.607.976.071.175	(363.953.368.251)	(0,64)

Sementara itu, realisasi subsidi listrik Periode Tahun Anggaran 2022 Audited sebesar Rp56.244.022.702.924 lebih rendah sebesar Rp363.953.368.251 atau 0,64% dibandingkan realisasi Periode Tahun Anggaran 2021 Audited sebesar Rp56.607.976.071.175. Lebih rendahnya nilai pembayaran subsidi listrik tahun 2022 disebabkan karena masih adanya program subsidi diskon tarif listrik pada tahun 2021, sehingga berdampak pada tingginya total realisasi subsidi listrik pada tahun 2021. Namun jika membandingkan data subsidi listrik reguler, maka realisasi periode tahun 2022 lebih tinggi sebesar 17,37% dibandingkan tahun 2021.

Direktorat Jenderal Pajak

Pagu Anggaran Subsidi Pajak DTP pada Direktorat Jenderal Pajak 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.735.912.847.000. Realisasi Belanja Subsidi Pajak-DTP Direktorat Jenderal Pajak 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.735.374.656.720 atau 100% dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja Subsidi Pajak DTP tersebut, Rp10.993.378.560.127 (41,13%) lebih kecil dari realisasinya tahun 2021 Rp26.728.753.216.847.

Secara lengkap, rincian realisasi anggaran subsidi pajak DTP Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut.

URAIAN	BELANJA SUBSIDI PPH DTP		Naik (Turun)
	TAHUN 2022	TAHUN 2021	
Subsidi Pajak DTP Reguler	8.869.124.713.844	11.744.479.010.000	(24,48)
PPH DTP Panas Bumi	3.212.730.422.892	2.401.859.480.000	33,76
PPH DTP SBN Valas	5.654.082.566.485	9.342.594.280.000	(39,48)
PPH DTP Penghapusan utang PDAM	2.277.421.051	-	100,00
PPH DTP <i>Recurrent Cost</i> SPAN	34.303.416	25.250.000	35,86
Subsidi Pajak DTP terkait PEN	6.866.249.942.876	14.984.274.206.847	-
PPH DTP Pasal 21	2.108.854.514.191	4.339.474.353.346	(51,40)
PPH DTP Final P3-TGAI	209.537.893.632	6.968.520.000	2.906,92
PPH DTP Final UMKM	177.672.269.278	801.343.619.598	(77,83)
PPN DTP Non Vaksin	1.670.949.922.818	-	100,00
PPN Rumah Tapak dan Rumah Susun	1.524.165.753.275	286.958.706.790	431,14
PPnBM Kendaraan Bermotor	1.111.299.638.016	4.916.284.423.265	(77,40)
PPN DTP Sewa Outlet	14.796.111.590	173.390.733.796	(91,47)
PPN DTP Kertas Koran	413.765.076	-	100,00
PPN DTP Vaksin	48.560.075.000	2.175.921.540.722	(97,77)
PPN DTP atas Alat Kesehatan	-	2.283.932.309.330	-
Total	15.735.374.656.720	26.728.753.216.847	(41,13)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pada Tahun 2022 DJPB menerima alokasi anggaran subsidi bunga kredit program sebesar Rp75.712.372.000. Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Program 31 Desember 2022 sebesar Rp19.440.391.096 atau 25,68 persen dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Program tersebut, Rp6.420.262.306.195 atau 99,7 persen lebih kecil dari realisasinya pada Tahun 2021 Rp6.439.702.697.291

Pagu dan realisasi belanja tahun 2022 dan tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2022		Realisasi 2021	Selisih
	Pagu	Realisasi		
Subsidi Bunga KKP-E	3.173.000.000	999.369.775	5.188.157.265	(4.188.787.490)
Subsidi Bunga KPEN-RP	60.272.000.000	15.692.064.973	12.793.613.734	2.898.451.239
Subsidi Risk Sharing KKP-E	2.990.372.000	2.748.956.348	265.613.074	2.483.343.274
Subsidi Bunga Kredit Prog Lainnya	9.277.000.000	-	-	-
Subsidi Bunga KUPS	-	-	100.958.928	(100.958.928)
Subsidi Bunga S-SRG	-	-	324.299.829	(324.299.829)
Subsidi Bunga PEN	-	-	6.421.030.054.461	(6.421.030.054.461)
Jumlah	75.712.372.000	19.440.391.096	6.439.702.697.291	(6.420.262.306.195)

Pagu Anggaran tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.015.217.938.000 atau 99,06 persen disebabkan pada tahun 2022 tidak terdapat lagi pagu anggaran untuk belanja subsidi bunga/margin dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Persentase realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan dari disebabkan oleh kondisi sebagai berikut :

- Subsidi Cadangan Pangan Pemerintah yang sudah dianggarkan di tahun 2022 tidak dapat disalurkan karena tidak adanya pengajuan pinjaman dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada perbankan;
- Nominal tagihan yang berhasil diverifikasi untuk terbit Berita Acara Verifikasi lebih kecil dari nominal surat tagihan.
- Surat tagihan yang masuk pada tahun 2022 lebih sedikit jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan telah selesainya masa kredit subsidi skema lama seperti KKPE, KPEN RP, KUPS

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Pagu Anggaran Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.494.035.076.000. Realisasi Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan sebesar Rp2.348.872.681.379 atau 94,18persen dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan tersebut, Rp916.913.702.901 (28,08persen) lebih kecil dari realisasinya Tahun 2021 Rp3.265.786.384.280. Realisasi pembayaran belanja subsidi tersebut merupakan realisasi atas tagihan Imbal Jasa Penjaminan untuk periode Januari s.d. November 2022 sebesar Rp2.233.941.029.296 dan tagihan Imbal Jasa Penjaminan Desember 2021 sebesar Rp114.931.652.083. Realisasi Belanja Subsidi IJP sebagai berikut :

Akun	URAIAN	Jumlah (Rupiah)	
		2022	2021
554118	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	2.348.872.681.379	3.265.786.384.280
Belanja Subsidi IJP		2.348.872.681.379	3.265.786.384.280

Rincian Realisasi Belanja Subsidi IJP Tahun 2022 *Audited*.

No.	Uraian	Realisasi
1	Belanja Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit	195.558.342.584
2	Belanja Subsidi IJP BUMN	10.015.807.173
3	Belanja Subsidi IJP Pelaku Usaha UMKM	2.143.298.531.622
Jumlah		2.348.872.681.379

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pagu Anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp231.594.584.000. Realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebesar Rp155.176.756.597 atau 67% dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah tersebut, Rp137.137.325.515 (760,21 persen) lebih besar dari realisasinya Tahun 2021 sebesar Rp18.039.431.082.

Capaian realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah yang rendah disebabkan oleh rendahnya pencairan dana pinjaman daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sampai dengan 31 Desember 2022, baru 30 pemerintah daerah yang melakukan pencairan dana pinjaman daerah dari 32 pemerintah daerah yang telah melakukan penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN dengan PT SMI. Hal ini disebabkan karena terdapat pemerintah daerah yang melakukan penandatanganan di akhir tahun 2022 sehingga belum dapat memenuhi persyaratan pencairan dan diharapkan proses pencairan pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN tahun 2021 selesai dilaksanakan pada tahun 2022.

b. Kementerian Pertanian

Pada 31 Desember 2022, Kementerian Pertanian menerima alokasi dana belanja subsidi sebesar Rp31.304.689.616.000. Realisasi belanja subsidi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp29.769.041.487.742 atau 95,09% dari pagu anggaran. Pada Tahun 2021 realisasi belanja subsidi sebesar Rp27.155.272.941.894 sehingga apabila dibandingkan dengan 2021, realisasi belanja subsidi 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.613.768.545.848. Rincian pagu dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

JENIS BELANJA SUBSIDI	PAGU	REALISASI	%
Belanja Subsidi Benih	0	0	-
Belanja Subsidi Pupuk	31.304.689.616.000	29.769.041.487.742	95,09
TOTAL	31.304.689.616.000	29.769.041.487.742	95,09

Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Benih dan Pupuk 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian Jenis Belanja	31-Des-22	Tahun 2021	Naik/(Turun)	%
Subsidi Benih	0	0	0	0,00
Subsidi Pupuk	29.769.041.487.742	27.155.272.941.894	2.613.768.545.848	9,63
Jumlah	29.769.041.487.742	27.155.272.941.894	2.613.768.545.848	9,63

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Pengelolaan Belanja Subsidi Benih di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sejak Tahun 2018 sudah tidak mendapat alokasi anggaran karena sudah teralokasi pada Bagian Anggaran 018 (Belanja Sektorial melalui APBN) melalui bantuan benih untuk mendukung kegiatan Mandiri Benih Seribu Desa.

2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pada 31 Desember 2022, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menerima pagu anggaran Subsidi Pupuk sebesar Rp31.304.689.616.000. Realisasi Belanja Subsidi Pupuk 31 Desember 2022 sebesar Rp29.769.041.487.742 atau 95,09% dari pagu anggaran. Pada tanggal 31 Desember 2021 terbit DIPA awal dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp25.276.622.493.000 dengan Total Alokasi Pupuk Bersubsidi sebanyak 9.118.057 ton dan 1.870.380 liter. Alokasi tersebut

memperhatikan Permentan nomor 41 tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Pada tanggal 15 Februari 2022 ditandatangani Perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran Satker Subsidi Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2021 yang menetapkan nilai subsidi sebesar Rp25.276.618.257.807.

Sehingga terdapat selisih sisa pagu senilai Rp4.235.193 dengan DIPA awal. Nilai subsidi diperhitungkan berdasarkan selisih Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan Harga Eceran Tertinggi dikalikan volume Pupuk Bersubsidi.

Pada bulan November ke DIPA Revisi mengalami perubahan Revisi ke 3 yang mengalokasikan anggaran Rp 28.181.490.784.000 termasuk pembayaran Kurang Bayar TA 2021 senilai Rp 2.904.868.291.000,

Pada bulan Desember DIPA Revisi mengalami perubahan Revisi ke 4 dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp31.304.689.616.000 termasuk alokasi pembayaran Kurang Bayar TA. 2021 senilai Rp 3.123.198.832.000 dengan Total Alokasi Pupuk Bersubsidi sebanyak 7.776.281 ton merupakan subsidi pupuk dan 88.269 liter merupakan subsidi pupuk cair.

c. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pada 31 Desember 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima alokasi anggaran belanja subsidi sebesar Rp168.383.356.000. Realisasi belanja subsidi 31 Desember 2022 sebesar Rp168.293.494.000 atau sebesar 99,95 persen dari pagu anggaran. Pada Tahun 2021 realisasi belanja subsidi sebesar Rp166.151.740.000 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi belanja subsidi 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.141.754.000 atau 1,29 persen. Belanja subsidi pada Kementerian

Komunikasi dan Informatika merupakan subsidi bidang pers pada Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (PSO).

d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada 31 Desember 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima alokasi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi sebesar Rp3.519.771.472.000. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.502.598.184.388, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp63.160.112. Sementara itu, realisasi Belanja Subsidi netto Tahun 2021 sebesar Rp3.051.795.697.973. Sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp450.802.486.415 atau 14,77 persen. Rincian pagu dan realisasi pada Kementerian PUPR sebagaimana dalam tabel berikut:

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	929.980.000.000	714.998.000.000	30,07
Belanja Subsidi Bunga KPR	2.570.621.611.769	2.333.703.580.687	10,15
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	2.059.732.722	3.228.990.704	(36,21)
Jumlah Belanja Kotor	3.502.661.344.491	3.051.930.571.391	14,77
Pengembalian Belanja	(63.160.103)	(134.873.418)	(53,17)
Jumlah Belanja	3.502.598.184.388	3.051.795.697.973	14,77

e. Kementerian Perhubungan

Pada 31 Desember 2022, Kementerian Perhubungan menerima alokasi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi sebesar Rp6.325.566.974.000. Realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2022 sebesar Rp6.141.197.635.344 atau 97,09% dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2021 sebesar Rp5.515.955.022.209. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp625.242.613.135 atau 11,34 %. Pagu dan realisasi per jenis subsidi pada Kementerian Perhubungan sampai 31 Desember 2022 sebagaimana dalam tabel berikut.

Jenis Subsidi	Tahun 2022		Realisasi Tahun 2021	Naik/(Turun)	%
	Anggaran	Realisasi 2022			
Subsidi PSO PT KAI	3.508.414.601.000	3.324.045.262.688	2.099.009.350.000	1.225.035.912.688	58,36
Subsidi PSO PT PELNI	2.817.152.373.000	2.817.152.372.656	3.416.945.672.209	(599.793.299.553)	(17,55)
Jumlah	6.325.566.974.000	6.141.197.635.344	5.515.955.022.209	625.242.613.135	11,34

f. Kementerian Koperasi dan UKM

Pada 31 Desember 2022 Kementerian Koperasi dan UKM menerima alokasi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi sebesar Rp23.453.708.089.000. Realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2022 sebesar Rp23.113.047.044.984 atau 98,55% dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2021 sebesar Rp26.833.593.776.402. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.720.546.731.418.

g. Kementerian Perdagangan

Pada 31 Desember 2022 Kementerian Perdagangan menerima alokasi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi berupa Subsidi Kredit Resi Gudang sebesar Rp1.085.287.000. Realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2022 sebesar Rp1.078.021.248 atau 99,33% dari pagu anggarannya, sedangkan Tahun 2021, Kementerian Perdagangan tidak memperoleh alokasi belanja subsidi.

Belanja subsidi ini digunakan untuk pembiayaan Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang (kode 552143) yang baru pertama kali dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pada tahun 2022 ini setelah dialihkan dari Dit. Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

B.2.2.1.5. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 adalah sebesar **Rp5.803.272.496.643** atau **82,11 persen** dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 2022 sebesar **Rp7.067.685.663.000**. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.484.271.057.864 atau 34,37 persen dari realisasi Tahun 2021.

Perbandingan realisasi belanja hibah tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	33.829.048.077	22.003.461.212	53,74
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	13.676.743.266	10.021.136.406	36,48
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	5.755.516.300.341	4.286.871.920.443	34,26
Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah	250.404.959	104.920.718	138,66
Jumlah Belanja	5.803.272.496.643	4.319.001.438.779	34,37

Realisasi belanja hibah tersebut terdiri atas *Banking Commission* sebesar Rp250.404.959, Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri sebesar Rp33.829.048.077, Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional sebesar Rp13.676.743.266, dan Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp5.755.516.300.341.

Alokasi anggaran Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp7.067.685.663.000 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*banking commission*) untuk Satker 977263 berdasarkan revisi ke-1 DIPA Nomor: SP DIPA- 999.02.1.977263/2022 tanggal 14 Juli 2022, alokasi anggaran Belanja Hibah untuk tahun 2022 yaitu sebesar Rp305.000.000.
2. Alokasi anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang bersumber dari Rupiah Murni (Satker 985252) berdasarkan revisi ke-5 DIPA BUN Nomor: SP DIPA- 999.02.1.985252/2022 tanggal 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp53.469.326.000.
3. Alokasi anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (Satker 985251) berdasarkan revisi ke-2 DIPA BUN Nomor: DIPA- 999.02.1.985261/2022 tanggal 16 Agustus 2022 adalah sebesar Rp4.989.984.871.000.
4. Alokasi anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni (Satker 985261) berdasarkan revisi ke-2 DIPA BUN Nomor: DIPA- 999.02.1.985261/2022 tanggal 8 November 2022 adalah sebesar Rp2.023.926.466.000.

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri dan Organisasi Internasional ditujukan untuk Bantuan Dukungan Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana Afghanistan, Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Palestina, Bantuan Pelatihan Perikanan *Melanesian Spearhead Group* (Fiji, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu), Bantuan ICRC Palestina, Bantuan Penanganan Bencana Kemanusiaan Warga Ukraina, Bantuan Peningkatan Pelatihan Kapasitas Ibu dan Anak Afghanistan, *Workshop on Passenger Profiling for Asia Pacific Customs Officer*, dan Bantuan Peralatan Laboratorium Sekolah di Senegal.

Realisasi Belanja Hibah Lainnya merupakan pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (Banking Commission) kepada MUFG Bank Tokyo Japan.

Rincian realisasi Hibah Kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2022
Air Minum	21.551.142.602
Air Limbah	11.496.000.000
Hibah <i>Bio Carbon Fund</i> (Bio-CF)	13.109.775.900
Hibah untuk pembangunan Sanitasi	9.634.110.294
Hibah <i>Provincial Road Improvement and Maintenance</i> (PRIM)	176.500.000.000
Hibah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	151.247.247.031
Hibah <i>Flood Management in Selected River Basins</i> (FMSRB)	979.254.448.764
Hibah <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project</i> (IPDMIP)	2.648.035.617.620
Hibah <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT)	59.721.388.104
Hibah <i>Rural Empowerment and Agricultural Development – Scalling Up Initiative</i> (READSI)	206.851.541.593
Hibah <i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project</i> (UPLAND)	21.551.142.602
Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan daerah (Hibah Jalan Daerah)	387.266.081.067
Hibah Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana (Hibah RR)	521.426.165.000
Hibah Sanitasi (Hibah Sanitasi)	66.444.000.000
Hibah untuk Pengelolaan <i>Nationwide Water</i> (Air Minum)	502.978.782.366
Jumlah	5.755.516.300.341

B.2.2.1.6. Belanja Lain-Lain

Realisasi Belanja Lain-lain Realisasi Belanja Lain-Lain Tahun 2022 sebesar **Rp404.385.774.531.710** atau sebesar **99,45 persen** dari DIPA Tahun 2022 sebesar **Rp406.640.083.078.000**. Realisasi Belanja Lain-lain terdapat pada BA BUN 999.08 dan 999.99. Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja Lain-lain Tahun 2022

mengalami kenaikan sebesar Rp324.681.348.904.576 atau 407,36 persen dari tahun 2021. Peningkatan realisasi belanja lain-lain antara lain disebabkan karena terdapat realisasi belanja lain-lain atas pembayaran dana kompensasi naik sebesar Rp332.719.265.458.240 atau 713,99 persen pada satker Dit. PNPB SDA dan KND. Rincian realisasi Bruto Belanja Belanja Lain-Lain adalah sebagai berikut.

Uraian	Realisasi Belanja		Selisih	Kenaikan/ (Penurunan) %
	2022	2021		
<i>UAP BUN Belanja Lain-lain (999.08)</i>				
Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL)	-	-		
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	5.541.378.587.250	1.347.009.217.679	4.194.369.369.571	311,38
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat	131.714.188.176	151.383.967.923	(19.669.779.747)	(12,99)
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBP dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19		2.428.303.039.000	(2.428.303.039.000)	(100,00)
Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	18.169.247.127.290	21.189.558.220.776	(3.020.311.093.486)	(14,25)
Belanja Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	18.823.101.252	2.176.501.677.646	(2.157.678.576.394)	(99,14)
Belanja lain-lain BUN lainnya Dana Kompensasi	379.319.425.364.154	46.600.159.905.914	332.719.265.458.240	713,99
Belanja Lain-lain	2.403.679.021.802	8.363.008.514.149	(5.959.329.492.347)	(71,26)
Realisasi Belanja Bruto	405.584.267.389.924	82.255.924.543.087	323.328.342.846.837	393,08
Pengembalian Belanja	1.822.959.393.394	2.940.133.594.957	(1.117.174.201.563)	(38,00)
Jumlah Realisasi Belanja Neto dari 999.08	403.761.307.996.530	79.315.790.948.130	324.445.517.048.400	409,06
<i>UAP BUN Transaksi Khusus (999.99)</i>				
Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	-	-		
Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	-	-		
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	93.648.376.675	86.755.531.200	6.892.845.475	7,95
Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening	530.818.155.739	301.879.146.789	228.939.008.950	75,84
Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP/SP2D dan Exotic Currency	2.766	1.015	1.751	172,51
Jumlah Realisasi Belanja Netto dari 999.99	624.466.535.180	388.634.679.004	235.831.856.176	60,68
Realisasi Belanja Neto	404.385.774.531.710	79.704.425.627.134	324.681.348.904.576	4,07

Realisasi Belanja Lain-lain Tahun 2022 pada BA 999.08 di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Belanja Cadangan Beras Pemerintah, pada satker Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku KPA. Realisasi belanja tahun 2022 ini adalah sebesar Rp5.541.378.587.250 atau sebesar 91,25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.072.495.280.000. Realisasi tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 *Audited* yaitu sebesar Rp1.347.009.217.679. Penyebab meningkatnya realisasi pada tahun 2022 yaitu karena terdapat pengajuan tunggakan tagihan Pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pascabencana TA 2020, tunggakan tagihan untuk pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras dan penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan

pascabencana triwulan III dan triwulan IV TA 2021, serta tunggakan tagihan beras BB PPKM TA 2021.

Telah dilakukan usulan atas revisi penambahan pagu anggaran untuk pembayaran tunggakan BB PPKM Tahun 2021 kepada Direktur Jenderal Anggaran sesuai surat nomor S-31/PB.24/2022 tanggal 2 Desember 2022 sesuai hasil revidi Inspektorat Jenderal sebesar Rp3.088.745.280.000 dan telah disetujui yang tertuang dalam DIPA Satker DJPB Nomor SP DIPA-999.08.1.999979/2022 tanggal 28 Desember 2022. Realisasi belanja Penyelesaian Tunggakan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM) TA 2021 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp3.088.745.280.000.

2. Belanja Ongkos Angkut Beras (OAB) PNS Distrik Pedalaman Papua, pada satker Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat selaku KPA. Pada Tahun 2022, realisasi OAB Papua sebesar Rp118.638.882.514 atau 99,77 persen dari anggaran sebesar Rp118.912.008.000. Sementara itu, realisasi OAB Papua Barat sebesar Rp13.075.305.662 atau 83,16 persen dari anggaran sebesar Rp15.722.378.000.
3. Belanja Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 pada Ditjen Anggaran (Penyalur Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik) dengan realisasi sebesar Rp18.823.101.252 dengan anggaran Rp18.823.102.000. Realisasi ini merupakan pembayaran tunggakan kurang bayar Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik dalam rangka PEN Tahun 2020.
4. Belanja Lain-lain BUN Lainnya (Dana Kompensasi) pada satker Dit. PNBP SDA KND, merupakan pembayaran utang kompensasi dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp379.319.425.364.154 dengan rincian:
 - a. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) JBT Minyak Solar Tahun 2019 sebesar Rp2.724.976.410.053.

- b. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Premium Non Jamali Tahun 2019 sebesar Rp8.594.798.412.535.
- c. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Premium Jamali Tahun 2019 sebesar Rp 3.672.416.617.341.
- d. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Solar Tahun 2020 sebesar Rp286.789.823.551.
- e. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Solar Tahun 2021 sebesar Rp40.787.506.830.399;
- f. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Premium Non Jamali Tahun 2021 sebesar Rp4.127.512.591.732;
- g. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Tahun 2021 sebesar Rp19.587.470.437.485;
- h. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Solar Semester I Tahun 2022 sebesar Rp56.788.814.757.588;
- i. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Semester I Tahun 2022 sebesar Rp74.884.881.198.154;
- j. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Solar Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp43.826.528.980.291;
- k. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp50.689.205.322.597;
- l. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar

- Tahun 2021 sebesar Rp403.291.037.185, dengan memperhitungkan koreksi kelebihan penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2020 sebesar Rp22.649.405, sehingga pembayaran menjadi sebesar Rp403.268.387.780;
- m. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Semester I Tahun 2022 sebesar Rp452.050.984.683;
 - n. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp366.144.160.693;
 - o. Pembayaran Kompensasi Tarif Tenaga Listrik atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) Tahun 2021 sebesar Rp24.594.425.188.000 (Terdapat selisih Rp319 dari nilai utang akibat selisih kekurangan kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat kebijakan tarif tenaga listrik tahun 2021 yang seharusnya sebesar Rp24.594.425.188.319 yang belum terbayarkan dan disetujui oleh Pihak Kedua bahwa jumlah tersebut tidak akan ditagihkan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Verifikasi nomor BA-8/AG.6.3/2022 tanggal 30 Juni 2022);
 - p. Pembayaran Kompensasi Tarif Tenaga Listrik atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) Periode Semester I Tahun 2022 sebesar Rp31.220.988.279.713;
 - q. Pembayaran Kompensasi Tarif Tenaga Listrik atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp16.311.646.981.558.
 - r. Koreksi Lainnya sejumlah Rp1 yang merupakan koreksi atas pembulatan nilai desimal dari selisih realisasi pembayaran utang kompensasi HJE BBM dengan saldo utang kompensasi HJE BBM PT Pertamina (Persero) akibat pembulatan komponen PBBKB.
5. Belanja Lain-Lain neto sebesar Rp2.387.337.392.524 dengan rincian realisasi sebagai berikut.

- a. Istana Kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara, sebesar Rp153.334.644.000 dengan pengembalian Rp14.997.163.312 sehingga realisasi neto adalah Rp138.337.480.688 atau 85,95 persen dari anggaran sebesar Rp160.953.530.000.
 - b. Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, sebesar Rp14.564.035.000 dengan pengembalian Rp15.775.014 sehingga realisasi neto adalah Rp14.548.259.986 atau mencapai 99,89 persen dari anggaran Rp14.564.035.000.
 - c. Direktorat PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebesar Rp329.930.974.407 atau 85,75 persen dari anggaran belanja sebesar Rp384.739.880.000 yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Layanan Pos Universal di 2.516 KPC LPU.
 - d. DKPBPB Batam, sebesar Rp240.748.050.135 atau 96,82 persen dari pagu anggaran sebesar Rp248.642.625.000. Belanja Lain-Lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang serta pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.
 - e. Satuan Kerja Khusus Migas, sebesar Rp1.665.101.318.260 dengan pengembalian sebesar Rp1.328.690.952 sehingga realisasi neto adalah sebesar Rp1.663.772.627.308 atau 94,99 persen dari anggaran sebesar Rp1.751.594.316.000. Realisasi Belanja Lain-Lain TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,02 persen dari periode TA 2021. Hal ini disebabkan oleh kegiatan operasional pada Kantor Pusat dan 5 (lima) Kantor Perwakilan SKK Migas sudah berjalan normal dan tidak terpengaruh pandemi.
6. Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 pada satker Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp17.999.997.500.000 dan telah terealisasi 90,90 persen atau sebesar Rp16.362.629.363.174, yang terdiri atas belanja bruto Rp18.169.247.127.290 dikurangi pengembalian Rp1.806.617.764.116. Capaian *output* dari bagian anggaran ini adalah 4.984.790 (5.076.928-92.138) peserta program Kartu Prakerja Batch 23 sampai dengan Batch 47.

Realisasi Belanja Lain-Lain pada BA 999.99 Tahun 2022 sebesar Rp624.466.535.180 atau 659,96 persen dari anggaran sebesar Rp94.622.584.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pembayaran Selisih Harga Bulog sebesar Rp93.648.376.675 pada Satker 987361. Belanja ini berasal dari Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran selisih lebih atau kurang antara nilai HPB Pemerintah yang digunakan dalam potongan beras dalam bentuk natura pada gaji pegawai (PFK) yang sudah dibayarkan oleh KPA BUN kepada Perum Bulog dibandingkan dengan nilai HPB Pemerintah yang seharusnya dibayar KPA BUN kepada Perum Bulog.
- b. Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN yang terjadi karena perbedaan kurs transaksi atas valas eksotik yang dikelola KPPN Khusus pinjaman dan hibah pada satker 999928 sebesar Rp1.075.974.322.
- c. Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN sebesar Rp529.742.181.417 pada satker 999981.
- d. Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency sebesar Rp2.766 pada satker 999981.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp816.234.826.067.696 atau 97,99 persen dari anggaran sebesar Rp832.946.830.563.000. Dibandingkan dengan Tahun 2021 realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan sebesar Rp30.527.240.392.318 atau 3,89 persen.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY serta Dana Desa sebagaimana tabel berikut.

Jenis Dana	Anggaran	Realisasi	%
I. Transfer ke Daerah	764.946.830.563.000	748.328.687.677.265	97,83%
A. Transfer Dana Perimbangan	736.190.566.993.000	719.578.751.333.265	97,74%
1. Dana Bagi Hasil	168.596.723.927.000	168.414.110.278.434	99,89%
a. DBH PPh OP	37.677.680.471.742	37.677.680.471.742	100,00%
b. DBH PBB	25.321.008.091.173	25.321.008.091.173	100,00%
c. DBH CHT	4.700.403.578.428	4.591.474.242.743	97,68%
d. DBH Minyak Bumi	14.388.156.301.036	14.388.156.301.036	100,00%
e. DBH Gas Bumi	13.022.127.844.187	13.022.127.844.187	100,00%
f. DBH Minerba	68.713.989.486.607	68.713.989.486.607	100,00%
g. DBH Panas Bumi	1.726.630.460.219	1.726.630.460.219	100,00%
h. DBH Kehutanan	1.942.165.028.564	1.868.480.715.683	96,21%
i. DBH Perikanan	1.104.562.665.044	1.104.562.665.044	100,00%
2. Dana Alokasi Umum	378.000.000.000.000	378.000.000.000.000	100,00%
3. Dana Alokasi Khusus	189.593.843.066.000	173.164.641.054.831	91,33%
a. Transfer DAK Fisik	60.874.000.000.000	54.783.954.054.112	90,00%
b. Transfer DAK Non Fisik	128.719.843.066.000	118.380.687.000.719	91,97%
B. Dana Insentif Daerah	7.000.000.000.000	6.993.672.774.000	99,91%
C. Dana Keistimewaan DIY	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100,00%
D. Dana Otonomi Khusus	20.436.263.570.000	20.436.263.570.000	100,00%
II. Dana Desa	68.000.000.000.000	67.906.138.390.431	99,86%
Jumlah	832.946.830.563.000	816.234.826.067.696	97,99%

Rincian Realisasi Transfer Daerah per Akun Tahun 2022 dapat dilihat di Lampiran LRA 3 (halaman LB3) dan Rincian Realisasi Transfer Daerah per Daerah Tahun 2022 dapat dilihat di Lampiran LRA 3 (halaman LB4).

B.2.2.2.1. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah

Realisasi belanja Transfer ke Daerah Tahun 2022 sebesar **Rp816.234.826.067.696** atau **97,99 persen** dari anggaran sebesar **Rp832.946.830.563.000**. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY.

B.2.2.2.1.1. Dana Perimbangan

Realisasi penyaluran dana perimbangan

Realisasi transfer dana perimbangan Tahun 2022 mencapai sebesar **Rp719.578.751.333.265** atau sebesar **97,74 persen** dari anggaran/pagunya sebesar **Rp736.190.566.993.000**. Dana perimbangan terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus. Realisasi Transfer Dana Perimbangan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 39.992.073.647.916 atau 5,88 persen dibandingkan dengan realisasi Transfer Dana Perimbangan TA 2021 sebesar

Rp679.586.677.685.349. Komposisi realisasi penyaluran Dana Perimbangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Jenis Dana	Pagu 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	% Perubahan
DTU	546.596.723.927.000	546.414.110.278.434	494.948.379.700.065	10,40%
DBH	168.596.723.927.000	168.414.110.278.434	117.156.989.412.065	43,75%
DAU	378.000.000.000.000	378.000.000.000.000	377.791.390.288.000	0,06%
DTK	189.593.843.066.000	173.164.641.054.831	184.638.297.985.284	-6,21%
DAK Fisik	60.874.000.000.000	54.783.954.054.112	57.069.673.906.021	-4,01%
DAK non Fisik	128.719.843.066.000	118.380.687.000.719	127.568.624.079.263	-7,20%
Jumlah	736.190.566.993.000	719.578.751.333.265	679.586.677.685.349	5,88%

B.2.2.2.1.1. Realisasi Dana Transfer Umum

Realisasi Belanja Dana Transfer Umum Tahun 2022 sebesar **Rp546.414.110.278.434** atau **99,97 persen** dari DIPA Tahun 2022 sebesar **Rp546.596.723.927.000**. Dana Transfer Umum berasal dari Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.

Realisasi Dana Bagi Hasil

Realisasi DBH

Realisasi transfer DBH sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp168.414.110.278.434** atau sebesar **99,89 persen** dari pagu anggaran sebesar **Rp168.596.723.927.000**. Realisasi DBH TA 2022 sebesar Rp168.414.110.278.434 tersebut, antara lain merupakan penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp25.132.963.282.524. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp117.156.989.412.065, realisasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 51.257.120.866.369 atau 43,75 persen. Naiknya realisasi tersebut dikarenakan pada Tahun Anggaran 2022 terdapat kebijakan penambahan pagu Kurang Bayar DBH.

Realisasi DBH per-Daerah dapat dilihat di **Lampiran LRA 1** (halaman LB6). Rincian realisasi dana bagi hasil dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Jenis Dana	Pagu 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
DBH Pajak	67.699.092.141.343	67.590.162.805.658	99,84%	75.590.568.235.547
Reguler	57.612.838.011.000	57.503.908.675.315	99,81%	43.352.080.749.225
Kurang Bayar	10.086.254.130.343	10.086.254.130.343	100,00%	32.238.487.486.322
DBH SDA	100.897.631.785.657	100.823.947.472.776	99,93%	41.566.421.176.518
Reguler	73.083.885.916.000	73.010.201.603.119	99,90%	27.502.025.565.050
Kurang Bayar	27.813.745.869.657	27.813.745.869.657	100,00%	14.064.395.611.468
Jumlah	168.596.723.927.000	168.414.110.278.434	99,89%	117.156.989.412.065

A. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi DBH Pajak

Realisasi Transfer DBH Pajak sampai dengan 31 Desember TA 2022 sebesar Rp67.590.162.805.658. Realisasi Transfer DBH Pajak tersebut merupakan realisasi DBH Pajak Reguler dan DBH Pajak Kurang Bayar. Penyerapan anggaran DBH Pajak pada periode 31 Desember TA 2022 sebesar 99,89 persen dari anggaran sebesar Rp67.699.092.141.343. Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2021, realisasi Transfer DBH Pajak sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.000.405.429.889 persen atau turun sebesar 10,58 persen. Penurunan realisasi tersebut dikarenakan adanya penurunan pagu DBH. Realisasi DBH Pajak per-Daerah dapat dilihat di **Lampiran LRA 1** (halaman LB7). Rincian realisasi DBH Pajak tersaji pada tabel di bawah ini:

Jenis Dana	Pagu 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Reguler	57.612.838.011.000	57.503.908.675.315	99,81%	43.352.080.749.225
DBH PPh	32.597.964.176.935	32.597.964.176.935	100,00%	26.600.261.953.000
DBH PBB	20.508.062.456.515	20.508.062.456.515	100,00%	13.420.406.057.000
DBH CHT	4.506.811.377.550	4.397.882.041.865	97,58%	3.331.412.739.225
Kurang Bayar	10.086.254.130.343	10.086.254.130.343	100,00%	32.238.487.486.322
KB DBH PPh	5.079.716.294.807	5.079.716.294.807	100,00%	13.539.764.133.073
KB DBH PBB	4.812.945.634.658	4.812.945.634.658	100,00%	18.216.677.392.482
KB DBH CHT	193.592.200.878	193.592.200.878	100,00%	482.045.960.767
Jumlah	67.699.092.141.343	67.590.162.805.658	99,84%	75.590.568.235.547

1. Dana Bagi Hasil PPh OP (Orang Pribadi)

Realisasi penyaluran transfer DBH PPh terdiri dari DBH PPh Pasal 21 dan DBH PPh Pasal 25/29. Realisasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 sampai dengan 31 Desember TA 2022 sebesar Rp37.677.680.471.742 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut berasal dari DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp34.539.286.893.569 dan DBH PPh Pasal 25/29 sebesar Rp3.138.393.578.173, sebagaimana terinci dalam tabel berikut.

URAIAN	Tahun 2022		%	Tahun 2021
	Pagu	Realisasi		
Jumlah DBH PPh Pasal 21	34.539.286.893.569	34.539.286.893.569	100%	36.807.663.097.048
Reguler	30.203.313.996.061	30.203.313.996.061	100%	24.784.187.974.000
Kurang Bayar	4.335.972.897.508	4.335.972.897.508	100%	12.023.475.123.048
Jumlah DBH PPh Pasal 25/29	3.138.393.578.173	3.138.393.578.173	100%	3.332.362.989.025
Reguler	2.394.650.180.874	2.394.650.180.874	100%	1.816.073.979.000
Kurang Bayar	743.743.397.299	743.743.397.299	100%	1.516.289.010.025
Jumlah	37.677.680.471.742	37.677.680.471.742	100%	40.140.026.086.073

Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2021, maka realisasi transfer DBH PPh sampai dengan 31 Desember T.A. 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp2.462.345.614.331 atau sebesar 6,13 persen yang terjadi karena turunnya Pagu DBH PPh periode 31 Desember TA 2022 dibandingkan dengan Pagu DBH PPh periode 31 Desember T.A. 2021.

2. Dana Bagi Hasil PBB

Realisasi penyaluran transfer DBH PBB sampai dengan 31 Desember TA 2022 sebesar Rp25.321.008.091.173 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan realisasi DBH PBB reguler dan DBH PBB Kurang Bayar yang terdiri dari Transfer DBH PBB bagian Daerah sebesar Rp21.790.896.009.894 (sebesar 100 persen dari pagu anggaran), Transfer DBH Biaya Pungut PBB bagian Daerah sebesar Rp767.265.031.465 (sebesar 100 persen dari pagu anggaran) dan Transfer DBH PBB Sama Rata Rp2.762.847.049.814 (sebesar 100 persen dari pagu anggaran). Realisasi penyaluran DBH PBB TA 2022 sebagaimana disajikan pada tabel dan gambar dibawah ini.

URAIAN DBH PBB	Pagu 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
Bagian Daerah	21.790.896.009.894	21.790.896.009.894	100,00%	27.552.553.391.044
Reguler	17.534.838.268.819	17.534.838.268.819	100,00%	11.535.842.726.000
Kurang Bayar	4.256.057.741.075	4.256.057.741.075	100,00%	16.016.710.665.044
BP Bagian Daerah	767.265.031.465	767.265.031.465	100,00%	993.820.134.603
Reguler	612.680.562.002	612.680.562.002	100,00%	401.502.846.000
Kurang Bayar	154.584.469.463	154.584.469.463	100,00%	592.317.288.603
Sama Rata ke Kab/Kota	2.762.847.049.814	2.762.847.049.814	100,00%	3.090.709.923.835
Reguler	2.360.543.625.694	2.360.543.625.694	100,00%	1.483.060.485.000
Kurang Bayar	402.303.424.120	402.303.424.120	100,00%	1.607.649.438.835
Jumlah	25.321.008.091.173	25.321.008.091.173	100,00%	31.637.083.449.482

Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2021, realisasi transfer DBH PBB periode 31 Desember TA 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp6.316.075.358.309 atau sebesar 19,96 persen hal ini terjadi karena turunnya Pagu DBH PBB periode 31 Desember TA 2022 dibanding dengan Pagu DBH PBB periode 31 Desember TA 2021.

3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Realisasi penyaluran DBH CHT sampai dengan 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp4.591.474.242.743 atau sebesar 97,68 persen dari pagu anggaran. Dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2021 realisasi transfer DBH CHT pada periode 31 Desember TA 2022 secara keseluruhan mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp778.015.542.751, atau sebesar 20,40 persen. Penurunan realisasi tersebut dikarenakan adanya beberapa daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran DBH CHT sehingga Pagu DBH CHT tahun berjalan (reguler) tidak dapat disalurkan 100 persen. Realisasi penyaluran DBH CHT TA 2022 sebagaimana disajikan pada tabel dan gambar dibawah ini.

URAIAN DBH CHT	Pagu	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Reguler	4.506.811.377.550	4.397.882.041.865	97,58%	3.331.412.739.225
Kurang Bayar	193.592.200.878	193.592.200.878	100,00%	482.045.960.767
Jumlah	4.700.403.578.428	4.591.474.242.743	97,68%	3.813.458.699.992

B. Transfer DBH SDA

Realisasi Transfer DBH SDA sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.823.947.472.776 atau 99,93 persen dari pagu anggaran. Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2021, realisasi Transfer DBH SDA pada 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp59.257.526.296.258 atau naik 142,56 persen. Hal tersebut disebabkan Pagu alokasi DBH SDA TA 2022 lebih besar dibandingkan pagu alokasi DBH SDA 2021. Realisasi DBH SDA per-Daerah dapat dilihat di **Lampiran LRA 1** (halaman LB8). Secara lebih rinci realisasi DBH SDA tersaji pada tabel berikut.

Jenis DBH SDA	Pagu 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Reguler	73.083.885.916.000	73.010.201.603.119	99,90%	27.502.025.565.050
Minyak Bumi	9.833.535.983.842	9.833.535.983.842	100,00%	6.162.159.333.000
Gas Bumi	7.256.736.479.118	7.256.736.479.118	100,00%	2.027.342.214.000
Minerba	51.715.726.546.663	51.715.726.546.663	100,00%	16.061.191.387.000
Panas Bumi	1.328.041.987.271	1.328.041.987.271	100,00%	1.112.535.408.000
Kehutanan	1.845.282.254.062	1.771.597.941.181	96,01%	1.564.482.852.050
Perikanan	1.104.562.665.044	1.104.562.665.044	100,00%	574.314.371.000
Kurang Bayar	27.813.745.869.657	27.813.745.869.657	100,00%	14.064.395.611.468
Minyak Bumi	4.554.620.317.194	4.554.620.317.194	100,00%	2.291.832.516.717
Gas Bumi	5.765.391.365.069	5.765.391.365.069	100,00%	3.236.004.092.680
Minerba	16.998.262.939.944	16.998.262.939.944	100,00%	5.282.663.178.786
Panas Bumi	398.588.472.948	398.588.472.948	100,00%	1.792.671.742.935
Kehutanan	96.882.774.502	96.882.774.502	100,00%	1.183.589.201.801
Perikanan	-	-	-	277.634.878.549
Jumlah	100.897.631.785.657	100.823.947.472.776	99,93%	41.566.421.176.518

1. Transfer DBH SDA Minyak Bumi

Realisasi DBH SDA

Realisasi penyaluran DBH Minyak Bumi sampai dengan 31 Desember TA 2022 sebesar Rp14.388.156.301.036 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan realisasi DBH Minyak Bumi reguler dan DBH Minyak Bumi Kurang Bayar yang terdiri dari Transfer DBH Minyak Bumi 15 persen sebesar Rp13.400.282.797.198 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran, Transfer DBH Minyak Bumi 0,5 persen sebesar Rp410.480.660.096 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran, dan

Transfer Tambahan DBH Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus sebesar Rp577.392.843.742 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran. Dibandingkan periode yang sama 31 Desember TA 2021, realisasi transfer DBH Minyak Bumi periode 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp5.934.164.451.319 atau sebesar 70,19% yang disebabkan Pagu alokasi DBH Minyak Bumi TA 2022 mengalami kenaikan dibandingkan pagu alokasi DBH Minyak Bumi TA 2021. Realisasi secara lebih lengkap tersaji pada tabel dan gambar berikut ini.

Uraian	Pagu 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Jumlah DBH Minyak Bumi 15%	13.400.282.797.198	13.400.282.797.198	100,00%	8.087.328.561.297
Reguler	9.253.930.649.425	9.253.930.649.425	100,00%	5.879.751.736.000
Kurang Bayar	4.146.352.147.773	4.146.352.147.773	100,00%	2.207.576.825.297
Jumlah DBH Minyak Bumi 0,5%	410.480.660.096	410.480.660.096	100,00%	268.689.987.120
Reguler	306.183.904.801	306.183.904.801	100,00%	195.198.768.000
Kurang Bayar	104.296.755.295	104.296.755.295	100,00%	73.491.219.120
Jumlah Minyak Bumi Otsus	577.392.843.742	577.392.843.742	100,00%	97.973.301.300
Reguler	273.421.429.616	273.421.429.616	100,00%	87.208.829.000
Kurang Bayar	303.971.414.126	303.971.414.126	100,00%	10.764.472.300
Jumlah DBH Minyak Bumi	14.388.156.301.036	14.388.156.301.036	100,00%	8.453.991.849.717

2. Transfer DBH SDA Gas Bumi

Realisasi transfer DBH SDA Gas Bumi

Realisasi penyaluran DBH Gas Bumi sampai dengan 31 Desember TA 2022 sebesar Rp13.022.127.844.187 atau sebesar 100persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan realisasi DBH Gas Bumi reguler dan DBH Gas Bumi Kurang Bayar yang terdiri dari Transfer DBH Gas Bumi 30persen sebesar Rp10.651.711.463.778 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran, Transfer DBH Gas Bumi 0,5 persen sebesar Rp133.405.562.216 atau sebesar 100persen dari pagu anggaran, dan Transfer Tambahan DBH Gas Bumi dalam rangka Otsus sebesar Rp2.237.010.818.193 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran. Selengkapnya, informasi mengenai realisasi DBH Gas Bumi tersaji dalam tabel berikut ini.

Uraian	Pagu 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
DBH Gas Bumi 30%	10.651.711.463.778	10.651.711.463.778	100,00%	4.708.995.020.448
Reguler	5.871.254.831.488	5.871.254.831.488	100,00%	1.977.650.376.000
Kurang Bayar	4.780.456.632.290	4.780.456.632.290	100%	2.731.344.644.448
DBH Gas Bumi 0,5%	133.405.562.216	133.405.562.216	100,00%	72.299.493.532
Reguler	81.601.870.159	81.601.870.159	100,00%	32.748.457.000
Kurang Bayar	51.803.692.057	51.803.692.057	100%	39.551.036.532
DBH Gas Bumi Otsus	2.237.010.818.193	2.237.010.818.193	100%	482.051.792.700
Reguler	1.303.879.777.471	1.303.879.777.471	100,00%	16.943.381.000
Kurang Bayar	933.131.040.722	933.131.040.722	100%	465.108.411.700
Jumlah	13.022.127.844.187	13.022.127.844.187	100,00%	5.263.346.306.680

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember TA 2021, maka realisasi transfer DBH Gas Bumi 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp7.758.781.537.507 atau sebesar 147,41 persen, hal ini terjadi karena Pagu alokasi DBH Gas Bumi TA 2022 mengalami kenaikan dibandingkan pagu alokasi DBH Gas Bumi TA 2021.

3. Transfer DBH Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Realisasi penyaluran DBH Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sampai dengan 31 Desember TA 2022 sebesar Rp68.713.989.486.607 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan realisasi DBH Minerba reguler dan DBH Minerba Kurang Bayar yang terdiri dari Transfer DBH Pertambangan Minerba—luran Tetap sebesar Rp1.230.067.070.953 atau sebesar 100persen dan Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba-Royalti sebesar Rp67.483.922.415.654 atau sebesar 100 persen. Dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2021, realisasi transfer DBH Minerba pada 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp47.370.134.920.821 atau sebesar 221,94 persen yang disebabkan Pagu alokasi DBH Minerba TA 2022 mengalami kenaikan apabila dibandingkan pagu alokasi DBH Miinerba TA 2021. Informasi lebih lengkap mengenai realisasi DBH Minerba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

URAIAN	Tahun 2022		%	Tahun 2021
	Pagu	Realisasi		
Iuran Tetap	1.230.067.070.953	1.230.067.070.953	100,00%	405.390.751.100
Reguler	1.016.893.926.799	1.016.893.926.799	100,00%	304.555.881.000
Kurang Bayar	213.173.144.154	213.173.144.154	100,00%	100.834.870.100
Royalti	67.483.922.415.654	67.483.922.415.654	100,00%	20.938.463.814.686
Reguler	50.698.832.619.864	50.698.832.619.864	100,00%	15.756.635.506.000
Kurang Bayar	16.785.089.795.790	16.785.089.795.790	100,00%	5.181.828.308.686
Jumlah	68.713.989.486.607	68.713.989.486.607	100,00%	21.343.854.565.786

4. Transfer DBH SDA Pertambangan Panas Bumi

Realisasi penyaluran DBH Panas Bumi sampai dengan 31 Desember TA 2022 sebesar Rp1.726.630.460.219 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan realisasi DBH Panas Bumi reguler dan DBH Panas Bumi Kurang Bayar yang terdiri dari Transfer DBH Panas Bumi–Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp1.614.976.312.929 atau sebesar 100 persen, Transfer DBH Panas Bumi–Iuran Tetap sebesar Rp30.426.834.964 atau sebesar 100 persen dan Transfer DBH Panas Bumi Iuran Produksi (royalti) sebesar Rp81.227.312.326 atau sebesar 100 persen.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2021, maka realisasi transfer DBH Panas Bumi pada 31 Desember TA 2022 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp1.178.576.690.716 atau sebesar 40,57 persen. Penurunan pada realisasi Panas Bumi ini disebabkan turunnya Pagu DBH Panas Bumi 31 Desember TA 2022 dibandingkan dengan Pagu DBH Panas Bumi 31 Desember TA 2021. Penurunan Pagu DBH Panas Bumi disebabkan karena target penerimaan PNPB Panas Bumi TA 2022 mengalami penurunan. Realisasi DBH Panas Bumi tersebut terdiri dari:

URAIAN	Tahun 2022		%	Tahun 2021
	Pagu	Realisasi		
Bagian Pemerintah	1.614.976.312.929	1.614.976.312.929	100%	2.798.373.421.174
Reguler	1.228.658.020.763	1.228.658.020.763	100%	1.037.988.500.000
Kurang Bayar	386.318.292.166	386.318.292.166	100%	1.760.384.921.174
Iuran Tetap	30.426.834.964	30.426.834.964	100%	41.247.084.637
Reguler	26.306.182.060	26.306.182.060	100%	21.779.905.000
Kurang Bayar	4.120.652.904	4.120.652.904	100%	19.467.179.637
Iuran Produksi	81.227.312.326	81.227.312.326	100%	65.586.645.124
Reguler	73.077.784.448	73.077.784.448	100%	52.767.003.000
Kurang Bayar	8.149.527.878	8.149.527.878	100%	12.819.642.124
Jumlah	1.726.630.460.219	1.726.630.460.219	100%	2.905.207.150.935

5. Transfer DBH SDA Kehutanan

Realisasi penyaluran DBH Kehutanan sampai dengan 31 Desember TA 2022 sebesar Rp1.868.480.715.683 atau sebesar 96,21 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan realisasi DBH Kehutanan reguler dan DBH Kehutanan Kurang Bayar yang terdiri dari Transfer DBH Kehutanan IIUPH/IHPH sebesar Rp67.782.731.654 atau sebesar 98,16 persen, Transfer DBH Kehutanan PSDH sebesar Rp1.052.613.149.269 atau sebesar 93,79 persen, dan Transfer DBH Kehutanan DR sebesar Rp748.084.834.760 atau sebesar 99,64 persen.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2021, maka realisasi transfer DBH Kehutanan pada 31 Desember TA 2022 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp879.591.338.168 atau sebesar 32,01 persen. Penurunan ini disebabkan turunnya pagu alokasi DBH Kehutanan TA 2022 dibanding dengan Pagu DBH Kehutanan TA 2021 sebagaimana rincian pada Tabel berikut ini.

URAIAN	Tahun 2022		%	Tahun 2020
	Pagu	Realisasi		
IIUPH/IHPN	69.051.380.804	67.782.731.654	98,16%	212.817.044.425
Reguler	54.665.222.734	53.396.573.584	97,68%	67.173.926.550
Kurang Bayar	14.386.158.070	14.386.158.070	100%	145.643.117.875
PSDH	1.122.349.152.819	1.052.613.149.269	93,79%	1.680.881.511.100
Reguler	1.062.850.597.669	993.114.594.119	93,44%	869.041.781.702
Kurang Bayar	59.498.555.150	59.498.555.150	100%	811.839.729.398
Dana Reboisasi	750.764.494.941	748.084.834.760	99,64%	854.373.498.326
Reguler	727.766.433.659	725.086.773.478	99,63%	628.267.143.798
Kurang Bayar	22.998.061.282	22.998.061.282	100%	226.106.354.528
Jumlah	1.942.165.028.564	1.868.480.715.683	96,21%	2.748.072.053.851

6. Transfer DBH SDA Perikanan

Realisasi penyaluran DBH Perikanan sampai dengan 31 Desember TA 2022 sebesar Rp1.104.562.665.044 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan Transfer DBH Perikanan Reguler.

Dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2021, realisasi transfer DBH Perikanan pada 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp252.613.415.495 atau sebesar 29,65 persen. Kenaikan ini disebabkan kenaikan pagu alokasi DBH Perikanan TA 2022 dibanding pagu alokasi DBH Perikanan TA 2021 dengan rincian dalam tabel dan gambar berikut.

URAIAN	Tahun 2022		%	Tahun 2021
	Pagu	Realisasi		
Reguler	1.104.562.665.044	1.104.562.665.044	100,00%	574.314.371.000
Kurang Bayar	-	-	-	277.634.878.549
Jumlah	1.104.562.665.044	1.104.562.665.044	100,00%	851.949.249.549

Realisasi Dana Alokasi Umum

Realisasi transfer DAU Realisasi DAU untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 telah mencapai sebesar **Rp378.000.000.000.000** sebagaimana tercantum dalam LRA. Realisasi DAU sampai dengan 31 Desember 2022 terhadap pagunya telah mencapai **100 persen**. Rincian Realisasi Anggaran DAU Tahun 2022 per pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran LB9**.

Pagu DAU pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar **Rp378.000.000.000.000** berdasarkan DIPA Satker Transfer Dana Alokasi Umum Nomor SP DIPA-999.05.6.999201/2022.

Realisasi DAU sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp208.609.712.000 atau naik sebesar 0,06 persen dari realisasi DAU pada periode yang sama di tahun 2021 sebesar Rp377.791.390.288.000. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya pagu Transfer DAU TA 2022.

Realisasi Transfer DAU sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan realisasi bruto yang di dalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU dengan

jumlah potongan sebesar Rp2.856.510.037.061. Pemotongan DAU yang dilaksanakan berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Aceh Timur sebagai Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp16.563.661.200. Pemotongan tersebut dilaksanakan pada penyaluran DAU Bulan Januari sampai dengan DAU Bulan Desember.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan DAU atau DBH Tahap Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 sebesar Rp630.892.880.000. Pemotongan tersebut dikenakan untuk 506 pemda pada penyaluran DAU Bulan Januari.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.7/2022 tentang Pemotongan DAU Tahap Kedua dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 sebesar Rp42.467.060.000. Pemotongan tersebut dikenakan untuk 133 pemda pada penyaluran DAU Bulan November.
4. Pemotongan DAU sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp485.666.987.126 yang dikenakan untuk 15 pemda sebagai berikut:

No	Pemda	Tahun Program PEN	Periode Penyaluran	Jumlah
1	Kota Banda Aceh	2020	DAU Jan-Des	2.322.955.524
2	Kab. Pamekasan	2020	DAU Jan-Des	21.229.282.428
3	Prov. Sulawesi Selatan	2020	DAU Jan-Des	133.877.921.796
4	Prov. Sulawesi Utara	2021	DAU Jan-Des	73.878.208.992
5	Prov. Gorontalo	2020	DAU Mar-Des	12.823.554.920
6	Provinsi Sulawesi Barat	2020	DAU April-Des	7.720.688.690
7	Kab. Ponorogo	2020	DAU Mei-Des	8.819.838.720
8	Kab. Muna	2021	DAU Juni-Okt	12.946.656.480
9	Provinsi Sumatera Selatan	2020	DAU Agt-Des	136.698.703.692
10	Kota Singkawang	2020	DAU Agt-Des	13.888.994.184
11	Kab. Gorontalo	2020	DAU Sept-Des	16.462.179.705
12	Provinsi Bangka Belitung	2020	DAU Nov-Des	19.663.833.387
13	Provinsi Banten	2020	DAU Nov-Des	23.082.955.506
14	Kab. Tulang Bawang Barat	2021	DAU Nov-Des	1.261.698.390
15	Kab. Minahasa	2021	DAU Des	989.514.712
Jumlah				485.666.987.126

5. Pemotongan DAU sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 dikenakan untuk 38 pemerintah daerah sebesar Rp290.470.830.858. Pemotongan tersebut dilaksanakan pada penyaluran DAU Bulan Januari sampai dengan DAU Bulan Desember.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp860.234.913.968. Pemotongan tersebut dikenakan untuk 475 pemda pada penyaluran DAU Bulan Mei.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.7/2022 tentang Perubahan atas KMK Nomor 30/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Kedua atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp380.003.821.535. Pemotongan tersebut dikenakan untuk 343 pemda pada penyaluran DAU Bulan Oktober.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KM.7/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 atas Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp87.869.747.536. Pemotongan tersebut dikenakan untuk 26 pemda pada penyaluran DAU Bulan Mei s.d. DAU Bulan Desember.
9. Pemotongan DAU yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum sebagai Penyelesaian Kewajiban Penyetoran Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 Tahap I sebesar Rp1.574.219.151 yang dikenakan untuk 3 pemda pada penyaluran DAU Bulan September.
10. Pemotongan DAU September yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi

Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.765.915.687 yang dikenakan untuk 8 pemda pada penyaluran DAU Bulan September.

B.2.2.2.1.1.2. Realisasi Dana Transfer Khusus

Realisasi Dana Transfer Khusus

Realisasi keseluruhan Dana Transfer Khusus sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 mencapai sebesar **Rp173.164.641.054.831** atau telah mencapai **91,33 persen** terhadap anggarannya sebesar **RP189.593.843.066.000**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.473.656.930.453 atau turun 6,21 persen dari realisasi periode yang sama tahun anggaran sebelumnya. Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus non Fisik. Realisasi Dana Alokasi Khusus per-Daerah dapat dilihat di **Lampiran LRA 1** (halaman LB10).

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Transfer DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp54.783.954.054.112** dan **Rp57.069.673.906.021**. Realisasi Transfer DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 mencapai **90 persen** dari anggaran transfer DAK Fisik sebesar **Rp60.874.000.000.000**. Nilai realisasi tersebut merupakan penggabungan realisasi transfer DAK Fisik Tingkat UAKPA BUN. Realisasi transfer DAK Fisik sampai dengan Tahun 2022 *Audited* sebesar Rp54.783.954.054.112 disalurkan untuk DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan masing-masing sebesar Rp42.698.467.396.430 dan Rp12.085.486.657.682. Nilai realisasi tersebut secara jumlah mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada periode yang sama Tahun Anggaran 2021. Sedangkan dari persentase penyaluran secara keseluruhan terdapat sedikit kenaikan dibandingkan persentase realisasi pada periode yang sama Tahun Anggaran 2021.

Beberapa kebijakan yang meningkatkan persentase penyaluran di antaranya kebijakan penyaluran DAK Fisik TA 2022 untuk DAK Fisik metode Sekaligus yang dapat diajukan dan disalurkan per-batch (untuk beberapa kontrak) tanpa menunggu seluruh Daftar Kontrak bersifat final.

Uraian	Pagu 2022	Realisasi 2022	% Realisasi	Realisasi 2021	% Perubahan
DAK Fisik Reguler	47.421.623.025.000	42.698.467.396.430	90,04%	37.592.011.228.307	13,58%
DAK Fisik Penugasan	13.452.376.975.000	12.085.486.657.682	89,84%	19.478.721.021.460	-37,96%
DAK Fisik Afirmasi	0	0		0	0,00%
DAK Fisik Bruto	60.874.000.000.000	54.783.954.054.112	90,00%	57.070.732.249.767	-4,01%
Pengembalian DAK Fisik TAB	0			1.058.343.746	-100,00%
Jumlah DAK Fisik Netto	60.874.000.000.000	54.783.954.054.112	90,00%	57.069.673.906.021	-4,01%

Realisasi transfer DAK Fisik pada Tahun 2022 disalurkan per Jenis dan per bidang/subbidang. Penyaluran per Jenis terbagi untuk DAK Reguler dan DAK Penugasan. Bidang pada penyaluran Transfer DAK Fisik pada tahun anggaran 2022 terdiri atas:

1. DAK Fisik Reguler terdapat 6 Bidang.
2. DAK Fisik Penugasan terdapat 11 Bidang

Dari Tabel 30 dapat dijelaskan bahwa total nilai penyaluran Transfer DAK Fisik sebesar Rp54.783.954.054.112 atau 90,0 persen dari total pagu. Persentase pagu terbesar pada Transfer DAK Fisik adalah DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan sebesar 30,24 persen dari total pagu 17 Bidang dan untuk persentase realisasi terbesar sampai dengan Tahun 2022 *Audited* pada DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi sebesar 97,7 persen.

Adapun rincian Realisasi Transfer DAK Fisik pada TA 2022 per bidang sebagaimana tabel berikut ini.

Kode	Bidang	Pagu	Realisasi	persen
DAK Fisik Reguler		47.421.623.025.000	42.698.467.396.430	90,0 %
EH6	Air Minum	3.000.000.000.000	2.729.056.087.133	91,0 %
EF1	Jalan	7.298.810.091.000	6.792.208.300.880	93,1 %
ED1	Kesehatan dan KB	15.774.280.058.000	12.867.484.274.112	81,6 %
EC1	Pendidikan	18.348.532.876.000	17.689.625.337.477	96,4 %
EH8	Perumahan dan Permukiman	1.000.000.000.000	666.676.807.587	66,7 %
EH7	Sanitasi	2.000.000.000.000	1.953.416.589.241	97,7 %
DAK Fisik Penugasan		13.452.376.975.000	12.085.486.657.682	89,8 %
EH1	Industri Kecil dan Menengah	753.233.579.000	644.875.402.963	85,6 %
EG2	Irigasi	1.500.000.000.000	1.271.036.217.158	84,7 %
EF4	Jalan	4.866.356.726.000	4.571.863.835.253	93,9 %
EG6	Kehutanan	350.000.000.000	313.126.608.906	89,5 %
EG4	Kelautan dan Perikanan	1.134.884.349.000	1.006.193.999.677	88,7 %
EG5	Lingkungan Hidup	350.000.000.000	308.501.320.344	88,1 %
EH5	Pariwisata	431.881.642.000	311.634.178.252	72,2 %
EG3	Pertanian	2.200.000.000.000	1.994.413.435.844	90,7 %

Kode	Bidang	Pagu	Realisasi	persen
EF5	Transportasi Perairan	530.697.339.000	463.161.480.375	87,3 %
EF6	Transportasi Perdesaan	1.000.000.000.000	938.895.447.094	93,9 %
EH9	Perdagangan	200.000.000.000	148.565.499.439	74,3 %
EH0	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	135.323.340.000	113.219.232.377	83,7 %
Total		60.874.000.000.000	54.783.954.054.112	90,0 %

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi DAK Nonfisik sebagaimana tercantum dalam LRA untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember mencapai **Rp118.380.687.000.719**. Realisasi DAK Nonfisik sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai **91,97%** dari anggaran DAK Nonfisik Tahun 2022 sebesar Rp128.719.843.066.000.

Realisasi DAK Non Fisik per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.187.937.078.544 atau 7,20% dari realisasi DAK Non Fisik pada periode yang sama Tahun 2021 sebesar Rp127.568.624.079.26300. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pagu alokasi TA 2022 sebesar Rp7.493.244.565.000 atau turun 9,69% dibandingkan pagu alokasi TA 2021. Penurunan ini akibat pengalihan penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan melalui KPPN mulai Tahun 2022, sehingga Pagu untuk kedua jenis dana tersebut dikeluarkan dari Pagu Satker 999820. Adapun penyebab lainnya adalah turunnya Pagu Alokasi Tahun 2021 DAK Nonfisik yaitu Dana TPG PNSD, Dana BOK, Dana Pelayanan Kepariwisata, dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selain itu, penurunan nilai realisasi DAK Non Fisik juga disebabkan oleh kebijakan optimalisasi Sisa DAK Nonfisik di RKUD dan masih terdapat daerah yang tidak memenuhi syarat penyaluran DAK Nonfisik. Laporan Realisasi Anggaran DAK Nonfisik Tahun 2022 per pemerintah daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Uraian	Pagu	Realisasi	%
DAK Non Fisik	128.719.843.066.000	118.380.687.000.719	91,97
Dana TPG ASN Daerah	51.990.474.366.000	46.547.785.535.686	89,53
Dana TKG ASN Daerah	1.651.287.600.000	1.193.073.260.050	72,25
Dana Tamsil Guru ASN Daerah	1.684.280.000.000	991.045.485.177	58,84
Dana BOK	9.933.130.000.000	9.653.384.267.000	97,18
Dana BOKB	2.759.770.000.000	2.663.934.986.000	96,53
Dana Pelayanan Kepariwisata	127.900.000.000	127.814.750.000	99,93
Dana BOP Museum dan Taman Budaya	167.600.000.000	165.887.500.000	98,98
Dana Pelayanan PPA	120.000.000.000	114.052.500.000	95,04
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	225.000.000.000	221.756.002.000	98,56

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	200.000.000.000	197.786.550.000	98,89
Dana Bantuan BLPS	100.000.000.000	55.658.502.955	55,66
Dana PK2UMK	225.000.000.000	223.798.218.000	99,47
Dana PK2SIKM	150.000.000.000	145.057.021.000	96,70
Dana BOS	54.024.296.450.000	51.345.762.364.395	95,04
Dana BOP PAUD	3.832.832.690.000	3.737.218.787.456	97,50
Dana BOP Kesetaraan	1.013.375.400.000	996.671.271.000	98,35
Dana Cadangan BOS Yang disalurkan	84.008.380.000	0	0
Dana Cadangan BOP PAUD Yang disalurkan	422.018.600.000	0	0
Dana Cadangan BOP Kesetaraan Yang disalurkan	8.869.580.000	0	0

Realisasi Dana Tunjangan Guru ASN Daerah

Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASND per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.547.785.535.686 atau 89,53% dari pagu Rp51.990.474.366.000 TA 2022. Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASND Sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-11 Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru ASND Triwulan I TA 2022, rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-2 Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru ASND Triwulan II TA 2022, nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-17 Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru ASND Triwulan III TA 2022, nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-10 Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru ASND Triwulan IV TA 2022 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-2 Penyaluran Dana Cadangan Tunjangan Profesi Guru ASND TA 2022.

Realisasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah

Realisasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASND per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.193.073.260.050 atau 72,25% dari pagu Rp1.651.287.600.000 TA 2022. Realisasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASND Sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-10 Penyaluran Dana Tunjangan Khusus Guru ASND Triwulan I TA 2022, nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-3 Penyaluran Dana Tunjangan Khusus Guru ASND Triwulan II TA 2022, nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-6 Penyaluran Dana Tunjangan Khusus Guru ASND Triwulan III TA 2022, nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-3 Penyaluran Dana Tunjangan Khusus Guru ASND Triwulan IV

TA 2022 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-3 Penyaluran Dana Cadangan Tunjangan Khusus Guru ASND TA 2022.

Realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah

Realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND per 31 Desember 2022 sebesar Rp991.045.485.177 atau 58,84% dari pagu Rp1.684.280.000.000 TA 2022. Realisasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND Sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-11 Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND Triwulan I TA 2022, nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-4 Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND Triwulan II TA 2022, nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-8 Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND Triwulan III TA 2022, nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-3 Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND Triwulan IV TA 2022 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-3 Penyaluran Dana Cadangan Tambahan Penghasilan Guru ASND TA 2022.

Realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.653.384.267.000 atau 97,18% dari pagu Rp9.933.130.000.000 TA 2022. Realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-9 Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahap I TA 2022 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-10 Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahap II TA 2022.

Pencatatan realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp2.672.173.671.696. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

Realisasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Realisasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.663.934.986.000 atau 96,53% dari pagu Rp2.759.770.000.000 TA 2022. Realisasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-8 Penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahap I TA 2022 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-10 Penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahap II TA 2022.

Pencatatan realisasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp367.644.388.403. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

Realisasi Dana Pelayanan Kepariwisataaan

Realisasi Dana Pelayanan Kepariwisataaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp127.814.750.000 atau 99,93% dari pagu Rp127.900.000.000 TA 2022. Realisasi Dana Pelayanan Kepariwisataaan Sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-5 Penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataaan Tahap I TA 2022 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-10 Penyaluran Dana Pelayanan Kepariwisataaan Tahap II TA 2022.

Pencatatan realisasi Dana Pelayanan Kepariwisataaan merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp11.294.657.066. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

Realisasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya

Realisasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp165.887.500.000 atau 98,98% dari pagu Rp167.600.000.000 TA 2022. Realisasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya terdiri atas:

1. realisasi Dana BOP Museum sebesar Rp121.900.000.000 atau 100% dari pagu Dana BOP Museum sebesar Rp121.900.000.000. Realisasi Dana BOP Museum sesuai dengan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-6 Penyaluran Dana BOP Museum Tahap I TA 2022 dan rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-10 Penyaluran Dana BOP Museum Tahap II TA 2022; dan
2. realisasi Dana BOP Taman Budaya sebesar Rp43.987.500.000 atau 96,25% dari pagu Dana BOP Taman Budaya sebesar Rp45.700.000.000. Realisasi Dana BOP Taman Budaya sesuai dengan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-5 Penyaluran Dana BOP Taman Budaya Tahap I TA 2022 dan rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-8 Penyaluran Dana BOP Taman Budaya Tahap II TA 2022.

Pencatatan realisasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp11.084.552.394. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

Realisasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Realisasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak per 31 Desember 2022 sebesar Rp114.052.500.000 atau 95,04% dari pagu Rp120.000.000.000 TA 2022. Realisasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-7 Penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahap I TA 2022 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-8 Penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahap II TA 2022.

Pencatatan realisasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa

dana di RKUD TAYL sebesar Rp25.484.543.049. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

Realisasi Dana Fasilitas Penanaman Modal

Realisasi Dana Fasilitas Penanaman Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp221.756.002.000 atau 98,56% dari pagu Rp225.000.000.000 TA 2022. Realisasi Dana Fasilitas Penanaman Modal sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-12 penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal Tahap I TA 2022 dan rekomendasi ke-1 s.d. rekomendasi ke-13 penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal Tahap II TA 2022.

Pencatatan realisasi Dana Fasilitas Penanaman Modal merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp41.047.871.579. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

Realisasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Realisasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2022 sebesar Rp197.786.550.000 atau 98,89% dari pagu Rp200.000.000.000 TA 2022. Realisasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-7 penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahap I TA 2022 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-8 penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahap II TA 2022.

Pencatatan realisasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp11.102.244.771. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

Realisasi Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)

Realisasi Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.658.502.955 atau 55,66% dari pagu Rp100.000.000.000 TA 2022. Realisasi Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 Penyaluran Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Tahap I TA 2022 dan nota dinas rekomendasi ke-1 Penyaluran Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Tahap II TA 2022.

Pencatatan realisasi Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp6.035.052.050. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

Realisasi Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK (PK2UMK)

Realisasi Dana PK2UMK per 31 Desember 2022 sebesar Rp223.798.218.000 atau 99,47% dari pagu Rp225.000.000.000 TA 2022. Realisasi Dana PK2UMK Sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-8 penyaluran Dana PK2UMK Tahap I TA 2022 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-18 penyaluran Dana PK2UMK Tahap II TA 2022.

Pencatatan realisasi Dana PK2UMK merupakan pencatatan realisasi secara bruto, yang didalamnya termasuk sisa dana di RKUD TAYL sebesar Rp13.339.589.533. Pencatatan realisasi bruto dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pencatatan realisasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

Realisasi Dana Penguatan kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKM)

Realisasi Dana PK2SIKM per 31 Desember 2022 sebesar Rp145.057.021.000 atau 96,70% dari pagu Rp150.000.000.000 TA 2022. Realisasi Dana PK2SIKM Sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan nota dinas rekomendasi penyaluran

Dana PK2SIKM Tahap I TA 2022 dan nota dinas rekomendasi ke-1 s.d. nota dinas rekomendasi ke-9 penyaluran Dana PK2SIKM Tahap II TA 2022.

Penyaluran Dana PK2SIKM belum memperhitungkan sisa dana yang ada di kas daerah, dikarenakan jenis dana PK2SIKM ini adalah dana yang baru pertama kali disalurkan melalui TKDD, sehingga belum terdapat potongan atas sisa dana yang bisa diperhitungkan pada penyaluran.

Realisasi Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesenjangan

Realisasi Transfer Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesenjangan sampai dengan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp56.079.652.422.851 dan Rp52.568.128.975.064. Realisasi sampai dengan Tahun 2022 Audited adalah 95,26% dari pagu anggaran transfer DAK Nonfisik sebesar Rp58.870.504.540.000 yang merupakan penggabungan realisasi transfer DAK Nonfisik Tingkat UAKPA BUN.

Realisasi transfer Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesenjangan (bruto) pada Tahun 2022 sebesar Rp56.091.650.936.776, mengalami kenaikan sebesar Rp3.519.444.505.776 atau sebesar 6,7% dari Tahun 2021. Secara netto pelaksanaan transfer kas mengalami kenaikan 6,7%.

Terdapat pengembalian ke RKUN sebesar Rp11.998.513.925 yang disebabkan oleh penutupan/merger sekolah/ satuan pendidikan. Untuk realisasi dana BOS TA 2022 secara netto sebesar Rp51.350.030.734.776 karena penyaluran dana BOS TA 2022 ke rekening sekolah memperhitungkan sisa dana BOS TA 2020 dan TA 2021.

Realisasi DAK Nonfisik pada TA 2022 yang mulai disalurkan oleh 173 KPPN selaku KPA Penyalur Transfer DAK Fisik dan Dana Desa terdiri atas:

1. DAK Nonfisik – Dana BOS;
2. DAK Nonfisik – Dana BOP PAUD; dan
3. DAK Nonfisik – Dana BOP Kesenjangan.

Berikut Tabel Realisasi BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesenjangan (dalam Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Neto
Dana BOS	54.024.296.450.000	51.350.030.734.776	4.268.370.381	51.345.762.364.395
Dana BOP PAUD	3.832.832.690.000	3.743.408.945.000	6.190.157.544	3.737.218.787.456
Dana BOP Kesenjangan	1.013.375.400.000	998.211.257.000	1.539.986.000	996.671.271.000
Total	58.870.504.540.000	56.091.650.936.776	11.998.513.925	56.079.652.422.851

Penyaluran DAK Nonfisik di KPPN dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran yang didasarkan pada Nota Dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang persetujuan data Rekomendasi Kemendikbud untuk sekolah/satuan pendidikan yang menerima DAK Nonfisik.

Realisasi DAK Nonfisik pada TA 2022 berdasarkan jenis terdiri dari:

1. Dana BOS Reguler yang disalurkan secara bertahap;
2. Dana BOS Kinerja yang disalurkan secara sekaligus.
3. Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan yang disalurkan secara bertahap.

Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu 2021, penyaluran dana transfer DAK Nonfisik secara bruto pada tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,7% dan secara neto pelaksanaan transfer kas juga mengalami kenaikan sebesar 6,7% karena terdapat pengembalian pada tahun anggaran berjalan.

Realisasi transfer DAK Nonfisik Tahun 2022 secara netto Audited sebesar Rp51.350.030.734.776 karena penyaluran dana BOS TA 2022 ke rekening sekolah memperhitungkan sisa dana BOS TA 2020 dan TA 2021.

B.2.2.2.1.2. Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Insentif Daerah

Realisasi Transfer DID periode TA 2022 telah mencapai **Rp6.993.672.774.000** atau **99,91 persen** dari pagu anggarannya sebesar **Rp7.000.000.000.000**. Jika dibandingkan TA 2021 sebesar Rp13.464.278.795.000, realisasi Transfer Dana DID TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.470.606.021.000 atau turun 48,06 persen. Hal ini disebabkan oleh:

- 1) pagu alokasi DID TA 2022 mengalami penurunan sebesar 48,15 persen atau senilai Rp6.500.000.000.000 bila dibandingkan dengan pagu alokasi DID TA 2021; dan
- 2) terdapat 4 daerah yang gagal salur DID tahap II karena belum menyampaikan dokumen syarat penyaluran atau penyerapan DID tahap I kurang dari 70 persen yaitu Kab. Barito Selatan, Kab. Nagekeo, Kab. Waropen, dan Kab. Maybrat.

Berikut tabel Realisasi Penyaluran DID Kinerja Tahun Sebelumnya (dalam Rp)

No	DID Kinerja Tahun Sebelumnya	Tahap 1	Tahap 2
1	Total Alokasi	4.000.000.000.000	
2	Jumlah daerah penerima alokasi	383	
3	Realisasi Penyaluran	1.999.999.908.000	1.999.999.908.000
4	Persentase penyaluran	50,00%	50,00%
5	Jumlah daerah penerima penyaluran	383	383

Berikut tabel Realisasi Penyaluran DID Kinerja Tahun Berjalan (dalam Rp)

DID Kinerja Tahun Berjalan	Periode 1	Periode 2
Total Alokasi	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
Jumlah daerah penerima alokasi	125	107
Realisasi Penyaluran	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
Persentase penyaluran	100%	100%
Jumlah daerah penerima penyaluran	125	107

Berdasarkan laporan realisasi dan penyerapan penggunaan DID per bulan Maret 2023 pada aplikasi SIKD DID, realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun sebelumnya sebesar Rp3.388.241.182.798,00 (84,71%), dan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp1.184.422.113.234,00 (41,43%). Selain itu, berdasarkan aplikasi SIKD Modul Pelaporan DID per tanggal 26 Maret 2023 sebagaimana yang di input oleh masing-masing pemda yang memiliki Sisa DID, terdapat sisa DID/DID Tambahan TA 2020 dan Sisa DID TA 2021 sebagaimana Tabel dibawah ini.

Nama Bidang	Jumlah Pemda	Sisa DID (per 31 Desember 2021)	Realisasi Tahun 2022	Sisa DID (per 26 Maret 2023)
Sisa DID/ DID TA 2020	396	1.945.123.885.660	137.199.474.569	1.807.924.411.091
Sisa DID TA 2021	402	2.207.149.556.368	715.837.753.562	1.491.311.802.806
Jumlah		4.152.273.442.028	853.037.228.131	3.299.236.213.897

B.2.2.2.1.3. Dana Keistimewaan DIY**Realisasi Dana
Keistimewaan DIY**

Realisasi Transfer DK-DIY tahun 2022 adalah sebesar **1.320.000.000.000** yaitu **100 persen** dari pagu anggarannya. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang berjumlah Rp1.320.000.000.000, jumlah tersebut tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini, penyaluran Transfer DK-DIY dengan jumlah tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap penyaluran, penyaluran Tahap I sebesar Rp198 miliar, penyaluran Tahap II sebesar Rp858 miliar dan penyaluran Tahap III sebesar Rp264 miliar.

Uraian	Tahun 2022			Realisasi 2021
	Pagu	Realisasi	%	
Tahap I	1.320.000.000.000	198.000.000.000	15%	198.000.000.000
Tahap II		858.000.000.000	65%	858.000.000.000
Tahap III		264.000.000.000	20%	264.000.000.000
Jumlah	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100%	1.320.000.000.000

Realisasi tersebut merupakan penyaluran DK DIY Tahap I, II dan III yang dilakukan pada bulan Maret 2022, Juni 2022, dan November 2022. Jumlah dan waktu penyaluran tersebut telah sesuai dengan norma yang diatur dalam PMK Nomor 15/PMK.07/2020.

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana DIY Tahap III TA 2022, terdapat sisa Pagu TA 2022 atas realisasi penyerapan Dana DIY Tahap III sebesar Rp47.274.190.776. Berikutnya, realisasi penggunaan DK DIY Tahap I TA 2022 yaitu sebesar Rp137,99 miliar digunakan untuk urusan kebudayaan, 17,03 miliar untuk urusan tata ruang, Rp5,08 miliar untuk urusan kelembagaan, Rp2,13 miliar digunakan untuk membiayai urusan pertanahan, dan sebesar Rp26,88 juta untuk urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

B.2.2.2.1.4. Dana Otonomi Khusus**Realisasi Dana
Otonomi Khusus**

Realisasi Dana Otsus pada Tahun 2022 sejumlah **Rp20.436.263.570.000** atau **100 persen** dari pagu anggaran sebesar **Rp20.436.263.570.000**. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp 19.482.919.184.000, mengalami kenaikan sebesar Rp953.344.386.000 atau sebesar 4,89 persen. Kenaikan ini merupakan dampak dari penerapan tata kelola baru penerimaan dalam rangka otonomi khusus, sesuai dengan amanat dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang diimplementasikan melalui PP Nomor 107 Tahun 2021 dan aturan teknis turunannya dalam PMK Nomor 76 Tahun 2022, dimana penyaluran dilakukan langsung dari RKUN ke RKUD provinsi dan kabupaten/kota. Sebelumnya penyaluran dilakukan dari RKUN hanya sampai ke RKUD provinsi, kemudian ada jeda waktu penyaluran dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota. Sebelumnya penyaluran dilakukan dari RKUN hanya sampai ke RKUD provinsi, kemudian terdapat jeda waktu penyaluran dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota. Rincian realisasi per jenis Dana Otsus TA 2022 dibandingkan dengan TA 2021 tersaji pada tabel dan gambar berikut.

JENIS DANA	Tahun 2022			Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi	%	
Dana Otsus Provinsi Aceh	7.560.000.000.000	7.560.000.000.000	100	7.555.827.806.000
Dana Otsus Provinsi Papua	5.783.400.000.000	5.783.400.000.000	100	5.289.079.464.000
DTI Provinsi Papua	2.404.194.963.000	2.404.194.963.000	100	2.622.758.143.000
Dana Otsus Prov. Papua Barat	2.721.600.000.000	2.721.600.000.000	100	2.266.748.342.000
DTI Provinsi Papua Barat	1.967.068.607.000	1.967.068.607.000	100	1.748.505.429.000
Jumlah	20.436.263.570.000	20.436.263.570.000	100	19.482.919.184.000

B.2.2.2.2. Dana Desa**Realisasi Dana Desa**

Realisasi Transfer Dana Desa pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar **67.906.138.390.431** dan **Rp71.853.710.011.029**. Realisasi Transfer Dana Desa TA 2022 sebesar **99,86 persen** dari anggaran transfer Dana Desa sebesar **Rp68.000.000.000.000** merupakan penggabungan realisasi transfer Dana Desa Tingkat UAKPA BUN.

Realisasi transfer Dana Desa pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.947.571.620.598 atau sebesar 5,49% dari periode Tahun 2021, namun secara

persentase, penyaluran dana desa mengalami kenaikan. Penurunan realisasi transfer Dana Desa disebabkan adanya penurunan pagu alokasi sebesar 5,5% atau sebesar Rp4.000.000.000.000. Sedangkan kenaikan persentase penyaluran disebabkan perubahan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa, dimana penyaluran Dana Desa pada TA 2022 disalurkan sesuai kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah per Desa, penyaluran BLT Desa secara 3 bulan sekaligus (triwulanan), dan adanya batas waktu penyampaian persyaratan Tahap I.

Rincian realisasi Dana Desa Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	persen Realisasi
Desa Reguler	68.000.000.000.000		
Dana Desa Tahap I		15.073.454.285.040	22,17 %
Dana Desa Tahap II		15.024.657.743.789	22,10 %
Dana Desa Tahap III		7.514.654.687.043	11,05 %
Desa Mandiri			
Dana Desa Tahap I		1.241.210.244.840	1,83 %
Dana Desa Tahap II		826.341.163.719	1,12 %
BLT Desa		26.943.101.100.000	39,62 %
Realokasi		1.282.719.166.000	1,89 %
Total Dana Desa	68.000.000.000.000	67.906.138.390.431	99,86 %

Penyerapan penggunaan Dana Realokasi cut off data per 10 Mei 2023 adalah sebesar Rp288.854.961.554 atau 22,52% dari total dana realokasi yang telah disalurkan sebesar Rp1.282.719.166.000. Nilai tersebut adalah nilai penggunaan dana realokasi yang telah dilaporkan oleh 2.817 desa dari 10.520 penerima dana realokasi. Sebesar Rp1.260.634.000 dana realokasi digunakan untuk pembayaran BLT Desa kepada 105 desa dan sebesar Rp371.374.400 digunakan untuk pembayaran tambahan BLT Desa kepada 38 Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, pada Dana Desa terdapat alokasi dan realisasi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), yaitu pada

penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa. Pengungkapan penyaluran BLT Desa periode sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Jumlah desa yang mendapatkan alokasi Dana Desa sebanyak 74.960 desa, dengan rincian:
 - i. jumlah desa yang telah melakukan salur BLT Desa sebanyak 74.935 desa;
 - ii. jumlah desa yang tidak melakukan salur BLT sebanyak 21 desa; dan
 - iii. jumlah desa yang melakukan setting BLT Desa, tapi belum salur BLT Desa sebanyak 4 desa.
- b) Jumlah BLT Desa yang telah disalurkan sebesar Rp26.943.101.100.000,- kepada 7.485.706 KPM pada 74.935 desa.
- c) Jumlah Desa atas penyaluran BLT Desa mengalami perubahan sesuai dengan pengajuan penyaluran BLT Desa oleh Pemda ke KPPN sehingga sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah Desa pada bulan ke-12 terkoreksi menjadi 74.910 desa (berkurang 25 desa).

Realisasi atas penyaluran BLT Desa atau penggunaan/penyerapan BLT Desa yang direkam oleh Pemda pada aplikasi OMSPAN cut off data 9 Mei 2023 sebesar Rp25.502.491.800.000 kepada 7.480.715 KPM pada 74.928 Desa.

Berdasarkan data realisasi penggunaan Dana Desa yang direkam Pemda pada OM SPAN untuk beberapa Desa yang telah disalurkan Dana Desa Tahap II TA 2023 (cut off data 9 Mei 2023) dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Terdapat 56.564 Desa yang nilai realisasi BLT Desa sebesar Rp20.615.896.800.000 sesuai dengan nilai penyaluran BLT Desa
- b. Terdapat 483 Desa yang nilai realisasi BLT Desa sebesar Rp129.114.900.000 melebihi nilai penyaluran, sehingga terdapat penggunaan nonBLT Desa yang digunakan untuk BLT Desa sebesar Rp7.503.300.000.
- c. Terdapat 17.890 Desa dengan realisasi BLT Desa Tahun 2022 sebesar Rp4.757.480.100.000 kurang dari penyaluran BLT Desa karena perekaman

penyerapan BLT Desa baru dilakukan sampai dengan bulan September. Dari 17.890 Desa terdapat 2.053 Desa yang BLT Desa Tahun 2022 penyerapannya lebih kecil dari penyalurannya, sehingga selisih Rp55.254.600.000,- BLT Desa digunakan untuk nonBLT Desa.

Terkait penggunaan Dana Desa untuk program prioritas seperti program ketahanan pangan dan hewani sebesar minimal 20% dari Dana Desa, berdasarkan data penggunaan Dana Desa yang bersumber dari aplikasi Monev DD Kemendes PDTT (<https://monevdd.kemendes.go.id>) per tanggal 15 Mei 2023, diketahui penggunaan Dana Desa yang mendukung program ketahanan pangan adalah sebesar Rp14.145.555.903.301 atau 20,83% dari total Dana Desa yang disalurkan sebesar Rp67.906.138.390.431. Rekap penyaluran bantuan langsung tunai desa dapat dilihat di Lampiran LB12.

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit Anggaran

Berdasarkan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Realisasi Belanja BUN Tahun 2022, maka Defisit Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.773.246.156.230.100 yang berarti 97,12 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.825.747.090.165.000 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Negara dan Hibah	238.341.910.771.353	185.630.214.779.513
Belanja Negara BUN	2.011.588.067.001.453	1.595.598.098.113.435
Defisit Anggaran	1.773.246.156.230.100	1.409.967.883.333.922

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp590.978.140.090.153 atau 70,34 persen dari anggaran sebesar Rp840.226.322.190.000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp871.723.163.588.761, realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp280.745.023.498.608 atau 32,21 persen. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi

Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan dalam negeri Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri selama Tahun 2022 adalah sebesar **Rp563.782.350.533.612** atau **65,31 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2022 sebesar **Rp863.264.003.212.000**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp881.632.527.734.210, realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp317.850.177.200.598 atau turun 36,05 persen. Pembiayaan Dalam Negeri meliputi Penerimaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman, Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Retrukturisasi, Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri, PMN/Dana Investasi Pemerintah, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan Pengeluaran Kewajiban Penjaminan.

B.2.4.1.1. Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Pada Tahun 2022 tidak terdapat realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sehingga realisasi **Rp0** dari anggaran sebesar **Rp127.300.000.000.000**.

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman Tahun 2022 adalah sebesar **Rp3.952.157.097.370** atau **94,92 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2022 sebesar **Rp4.163.572.651.000**. Realisasi penerimaan cicilan pemberian pinjaman mengalami kenaikan sebesar Rp17.555.264.046 atau 0,45 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar **Rp 3.934.601.833.324**.

Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam negeri sebesar Rp29.858.499.715, dan penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman luar negeri sebesar Rp3.922.298.597.655. Pada tahun 2022 tidak terdapat Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah dikarenakan piutangnya telah selesai/lunas di tahun 2021.

Rincian Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman dan Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagaimana berikut:

Uraian		Tahun 2022	Tahun 2021
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri		29.858.499.715	18.586.038.219
715111	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemda	2.922.593.380	593.432.500
715112	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman dalam Negeri kepada BUMD	163.631.368	163.696.368
715113	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	15.954.640.456	7.542.258.199
715114	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman dalam Negeri Kepada Non Pemerintah	10.817.634.511	10.286.651.152
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri		3.922.298.597.655	3.916.015.795.105
715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada Daerah	77.924.682.822	78.799.834.020
715212	Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada BUMD	0	0
715213	Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada BUMN	3.820.849.065.110	3.817.152.995.415
715214	Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada Non Pemerintah	23.524.849.723	20.062.965.670
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah		0	0
717111	Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	0	0
Jumlah		3.952.157.097.370	3.934.601.833.324

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 berasal dari pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman oleh debitur melalui Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Nilai pembayaran terbesar dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dengan nilai pembayaran mencapai Rp2.886.515.565.298 atau 73,03 persen dari jumlah penerimaan pembiayaan. Berikut merupakan 10 (sepuluh) debitur dengan nilai pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman terbesar sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

(dalam rupiah)

No.	Nama Debitur	Nilai
1.	PT. PLN	2.886.515.565.298
2.	PT.SMI	313.602.629.045
3.	PT PGN	251.447.266.744
4.	PERTAMINA	236.102.548.546
5.	PT. TELKOM	129.094.943.877
6.	PEMPROV DKI	33.629.623.430
7.	PT. BANK MANDIRI	15.755.586.842
8.	PEMKAB ACEH TIMUR	10.571.402.112
9.	PT. KERTAS LECES	10.433.646.434
10.	Perusahaan Inti Rakyat	8.593.197.077

Tabel di bawah ini menampilkan realisasi Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2022.

Tahun	Target DIPA	Realisasi	Persentase
2015	4.785.365.489.000	4.854.747.273.706	101,45%
2016	6.349.669.260.000	6.780.671.045.834	106,79%
2017	4.047.359.878.000	4.816.530.007.277	119%
2018	3.884.993.412.000	4.829.999.737.177	124,32%
2019	4.229.683.534.000	4.438.174.482.674	104,93%
2020	10.506.050.881.000	4.646.479.738.112	44,23%
2021	3.906.287.570.000	3.934.601.833.324	100,72%
2022	4.163.572.651.000	3.952.157.097.370	94,92%

B.2.4.1.3. Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Pembiayaan dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi tidak dianggarkan dalam APBN 2022. Namun terdapat realisasi sebesar **Rp667.176.265.512** yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp207.757.269.966 atau 45,22 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar **Rp459.418.995.546**. Penerimaan Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI berasal dari Pengelolaan atas Aset Program Restrukturisasi Perbankan yang dilakukan DJKN melalui mekanisme pengurusan aset kredit

oleh Panitia Urusan Piutang Negara, penjualan secara lelang aset properti, penebusan aset properti, penjualan secara lelang aset inventaris, pengelolaan surat berharga dan saham, dan pengelolaan aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) di mana yang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan adalah yang telah tercatat dalam aplikasi Treasury Billing System (TBS), Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI), SPAN, serta modul Penerimaan setoran ke RKUN (FIRA). Rincian Realisasi Penjualan Aset Program Restrukturisasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Penerimaan hasil penjualan / penyelesaian aset eks BPPN	643.617.367.500	396.116.268.510
2	Penerimaan hasil Penjualan / Penyelesaian aset eks BDL	23.558.898.012	63.302.727.036
Total		667.176.265.512	459.418.995.546

a. Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset eks BPPN aset yang diserahkan kepada PT PPA. Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset inventaris, penebusan aset properti, pencairan aset nostro, pelepasan aset saham/surat berharga dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah 502.000000.980 MAK 711312 baik secara langsung maupun lewat modul SIMPONI dan TBS. Berdasarkan data yang berasal dari data modul FIRA pada OMSPAN dan data modul SIMPONI selama Periode Tahun 2022, DJKN c.q. Direktorat PKNSI selaku unit pengelola aset eks BPPN dan eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) telah membukukan penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN yang telah

diterima di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp643.617.367.500.

Adapun rincian penerimaan tersebut disajikan dalam table berikut:

PERIODE	AKUN	URAIAN	DJKN
			NOMINAL RUPIAH
[1]	[2]	[3]	[4]
Januari	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	14.235.251.112
Februari	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	20.887.049.907
Maret	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	44.856.482.064
April	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	12.675.775.801
Mei	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	419.958.758
Juni	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	366.154.741.155
Juli	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	27.381.751.268
Agustus	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	12.647.923.142
September	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	33.934.452.195
Oktober	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	42.079.637.940
November	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	27.921.038.764
Desember	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	40.423.305.394
TOTAL			643.617.367.500

b. Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BDL

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), penjualan barang jaminan diambil alih/aset properti, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah 502.000000.980 Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 711313 Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL, baik secara langsung dengan monitoring OM SPAN maupun lewat Treasury Billing System (TBS). Berdasarkan data yang berasal dari Modul MPN G3 NOW selama Tahun 2022, telah tercatat setoran per MAP 711313 sebesar Rp23.849.940.619. Direktorat PKNSI selaku unit pengelola aset eks BDL telah melakukan

analisa dan pengakuan terhadap penerimaan pada MAP 711313 tersebut dan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Anggota PUPN Cabang maka terdapat setoran yang harus dikoreksi dari MAP 711312 menjadi MAP 711313 dan terdapat beberapa transaksi yang dibukukan pada TBS telah dilakukan perbaikan transaksi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk reklasifikasi akun (reklas) dan/atau pemecahan transaksi (split transaction). Berdasarkan analisa dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi tersebut maka hasil pengelolaan aset yang menjadi hak pemerintah diperhitungkan sebagai pengurang piutang Pemerintah pada BDL Tahun 2022 sebesar Rp23.558.898.012. Rincian penerimaan Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL disajikan dalam tabel berikut:

PERIODE	AKUN	URAIAN	DJKN
			NOMINAL RUPIAH
[1]	[2]	[3]	[4]
JANUARI	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	6.089.789
FEBRUARI	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	126.719.666
MARET	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	1.993.373.546
APRIL	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	2.429.264.859
MEI	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	161.278.751
JUNI	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	2.820.698.591
JULI	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	4.869.911.605
AGUSTUS	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	1.761.127.642
SEPTEMBER	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	1.988.543.985
OKTOBER	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	361.382.377
NOVEMBER	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	3.414.609.337
DESEMBER	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	3.625.897.864
TOTAL			23.558.898.012

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Surat Berharga
Negara (SBN)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Tahun 2022 adalah sebesar Rp658.816.905.421.376 atau 68,53 persen dari jumlah yang dianggarkan

dalam APBN 2022 sebesar Rp961.396.228.000.000. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp218.689.632.025.922 atau 24,92 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp877.506.537.447.298. Hal tersebut dikarenakan penerbitan SBN Tahun 2022 yang lebih rendah dibandingkan Tahun 2021.

Realisasi Surat Berharga Negara Neto, terdiri dari penerimaan penjualan SBN sebesar Rp1.097.456.235.269.295 dan pengeluaran untuk pembayaran/pelunasan SBN sebesar Rp438.639.329.847.919.

Rincian Realisasi Surat Berharga Negara Neto Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2022	Tahun 2021
Penerimaan Penjualan Surat Berharga Negara		1.097.456.235.269.295	1.352.768.254.205.300
711411	Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	68.605.000.000.000	55.345.000.000.000
711412	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara - PC PEN <i>Non Public Goods</i>	-	-
711421	Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	435.469.216.000.000	616.077.886.000.000
711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara	6.058.451.006.441	9.066.503.319.300
711423	Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara - PC PEN <i>Public Goods</i>	207.423.350.000.000	215.000.000.000.000
711424	Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara - PC PEN <i>Non Public Goods</i>	-	-
711441	Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Panjang	190.396.410.602.999	231.203.800.649.219
711442	Penerimaan Imbalan dibayar dimuka SBSN Jk. Panjang	2.129.747.492.160	3.207.515.082.616
711443	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	16.576.650.000.000	
711451	Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	17.223.000.000.000	20.450.000.000.000
711461	Penerbitan SBSN dlm rangka Pembiayaan Proyek-PBS	29.536.460.397.001	27.576.059.350.781
711611	Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	74.526.126.155.000	131.767.680.000.001
711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valuta Asing	6.373.615.694	287.809.803.383
711641	Penerbitan/Penjualan SBSN Valas Jangka Panjang	49.505.450.000.000	42.786.000.000.000
Pengeluaran Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara		438.639.329.847.919	475.261.716.758.002
721311	Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	58.655.000.000.000	59.420.000.000.000
721321	Pelunasan Obligasi Negara	136.775.733.563.248	159.620.831.535.824
721322	Pelunasan Obligasi Negara melalui Pembelian Kembali	24.061.000.000.000	22.048.000.000.000
721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara	4.953.040.043.397	9.889.221.119.300
721341	Pelunasan SBSN Jangka Panjang	95.679.108.000.000	97.580.589.000.000
721343	Pembayaran Imbalan dibayar dimuka SBSN - Jk Panjang	2.016.085.525.018	3.248.443.882.616
721351	Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	20.450.000.000.000	29.850.000.000.000
721511	Pelunasan Obligasi Negara - Valas	52.955.187.227.000	64.586.541.900.000
721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali	11.579.647.985.000	16.513.294.341.000
721513	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	30.227.504.256	254.994.979.262
721541	Pelunasan SBSN Valas - Jangka Panjang	31.484.300.000.000	12.249.800.000.000
Jumlah SBN Neto		658.816.905.421.371	877.506.537.447.298

Realisasi Penerimaan Penjualan SBN Tahun 2022 sebesar Rp1.097.456.235.269.295 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.352.768.254.205.300.

Realisasi Penerimaan Penjualan SBN didalamnya termasuk penerimaan atas:

- Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk Rupiah sebesar Rp6.058.451.006.441.

- Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang dalam bentuk Rupiah sebesar Rp2.129.747.492.160.
- Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk Valuta Asing sebesar Rp6.373.615.694.

dengan total Realisasi sebesar Rp8.194.572.114.295.

Penerimaan di atas merupakan penerimaan yang terjadi karena tanggal penerbitan SBN berbeda dengan tanggal pembayaran kupon (bunga atau imbalan). Penerimaan dimaksud akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran kupon (bunga atau imbalan).

Realisasi Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan SBN Tahun 2022 sebesar Rp438.639.329.847.919 dan Tahun 2021 sebesar Rp475.261.716.758.002. Realisasi pengeluaran pembiayaan SBN sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat di dalamnya pengeluaran atas penerimaan utang bunga dan imbalan dibayar di muka sebesar Rp6.999.353.072.671 dengan rincian sebagai berikut:

- Pengeluaran atas Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk Rupiah sebesar Rp4.953.040.043.397.
- Pengeluaran atas Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang dalam bentuk Rupiah sebesar Rp2.016.085.525.018.
- Pengeluaran atas Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk Valuta Asing sebesar Rp30.227.504.256.

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Pinjama Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Neto Tahun 2022 adalah sebesar **Rp8.201.282.354.241** atau **467,67 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2022 sebesar **Rp1.753.633.803.000** yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp7.257.103.631.059 atau 768,62 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar **Rp944.178.723.182**.

Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri (Neto) tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp10.125.528.103.890 dan Pembayaran Cicilan Pokok PDN sebesar Rp1.924.245.749.649. Tingginya realisasi pinjaman dalam negeri mencerminkan adanya percepatan penarikan

pinjaman sehingga realisasinya pada Tahun 2022 melebihi jumlah yang dianggarkan. Rincian pemberi Pinjaman Dalam Negeri baik yang berasal dari BUMN dan Perusahaan Daerah, termuat dalam tabel berikut:

	Tahun 2022	Tahun 2021
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	10.125.528.103.890	2.482.142.954.931
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	10.125.528.103.890	2.482.142.954.931
PT. Bank Mandiri Tbk	7.542.277.411.856	1.530.642.517.481
PT. BNI (Persero)	2.583.250.692.034	951.500.437.450
Pengeluaran Pembiayaan - Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	1.924.245.749.649	1.537.964.231.749
Jumlah	8.201.282.354.241	944.178.723.182

Pada Tahun 2022, penarikan pinjaman berasal dari BUMN, yaitu PT. Bank Mandiri dan PT. BNI dan tidak terdapat penarikan pinjaman dari Perusahaan Daerah. Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI dan kegiatan pengadaan Alat Material Khusus Polri.

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah (Neto)

*PMN/Dana Investasi
Pemerintah (Neto)*

Realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah Tahun 2022 adalah sebesar minus Rp86.724.307.604.887 atau 41,25 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2022 sebesar Rp210.218.568.242.000. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26.738.496.533.331 atau 23,57 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021.

Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah Tahun 2022 sebesar Rp86.724.307.604.887 terdiri dari:

- Penerimaan pembiayaan sebesar Rp27.081.703.613.522
- Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp113.806.011.218.409

Rincian penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan bila dibandingkan dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2022		
	Anggaran*)	Realisasi	%
Penerimaan	-	27.081.703.613.522	-
Penerimaan pembiayaan dari UAP DJPK	-	2.311.496.745.459	-
Penerimaan Pembiayaan pada UAKPA KBUMN		8.701.143.500.000	
Penerimaan pembiayaan atas pengesahan belanja modal K/L pada BLU LMAN	-	16.047.063.368.063	-
Penerimaan Investasi dari UAKPA Set BPJT	-	22.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan	(113.806.011.218.409)	(113.806.011.218.409)	100%
Investasi Klaster Infrastruktur	(97.118.999.942.400)	(97.118.999.942.400)	100%
Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat	(3.000.000.000.000)	(3.000.000.000.000)	100%
Investasi Klaster Kerja Sama Internasional	(2.005.867.829.073)	(2.005.867.829.073)	100%
Investasi Pemerintah Lainnya	(11.681.143.446.936)	(11.681.143.446.936)	100%
Jumlah	(113.806.011.218.409)	(86.724.307.604.887)	76%

*) Anggaran sebesar Rp113.806.011.218.409 bersumber dari Pagu DIPA TA 2022, sedangkan anggaran PMN/Dana Investasi Pemerintah (Neto) pada *Face* LRA berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

I. Penerimaan Pembiayaan

Sampai dengan 31 Desember 2022 (*Audited*) terdapat realisasi penerimaan pembiayaan yang bersumber sebesar Rp27.081.703.613.522 yang berasal dari UAP DJPK, UAKPA BLU LMAN dan UAKPA Set BPJT dengan rincian sebagai berikut:

a. UAP DJPK

Pada tahun 2022 terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari pengembalian sisa dana atas Pembiayaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.311.496.745.459. Penerimaan pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah sebesar Rp2.311.496.745.459 terdiri dari pengembalian pokok pinjaman melalui mekanisme pemotongan DAU bulan Januari - Desember 2022 dan pengembalian atas dana yang tidak terserap di PT SMI, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Dana Pinjaman PEN Daerah tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp168.151.321.082.
2. Pengembalian Dana Pinjaman PEN Daerah tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.657.678.437.251.

3. Pengembalian atas pokok pinjaman PEN Daerah melalui mekanisme pemotongan DAU sebesar Rp485.666.987.126.

b. UAKPA KBUMN

Realisasi penerimaan pembiayaan pada UAKPA KBUMN sebesar Rp8.701.143.500.000,00 merupakan Pemindahbukuan dana cadangan Investasi Pemerintah PEN dari RIPPEN ke Rekening Kas Umum Negara yang terdiri dari:

- 1) Setoran pengembalian dana cadangan Investasi Pemerintah PEN yang semula dialokasikan untuk PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000 yang dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara berasal dari investasi pemerintah jangka panjang non permanen dari BUMN Penerima Investasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp7.500.000.000.000 sesuai surat permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-2/KPA999.03.MBU/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 hal Permohonan Pemindahbukuan dari Rekening Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- 2) Pencairan dana cadangan Investasi Pemerintah PEN yang dialokasikan untuk PT Perkebunan Nusantara III sebesar Rp1.201.143.500.000 sesuai surat permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-13/KPA999.03.MBU/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022, nomor S-18/KPA999.03.MBU/10/2022 tanggal 1 Desember 2022, dan nomor S-22/KPA999.03.MBU/10/2022 tanggal 19 Desember 2022.

c. UAKPA BLU LMAN

Sebagai tindak lanjut atas temuan BPK pada pemeriksaan laporan keuangan 2020 yang menyebutkan “Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Masih Sama Dengan TA 2018 Mengakibatkan LKPP Tahun 2019 belum menggambarkan Informasi Belanja dan Defisit

Sesungguhnya”, Pemerintah menerbitkan mekanisme baru pendanaan pengadaan tanah PSN melalui Perpres 66 Tahun 2020 dengan petunjuk teknisnya dalam PMK Nomor 139/PMK.06/2020.

Realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN oleh Entitas akan disahkan sebagai belanja modal pada K/L pemilik PSN selaku instansi yang memerlukan tanah. Dengan terbitnya SP2D pengesahan belanja modal, Entitas UAKPA-BUN LMAN menyajikan penerimaan pembiayaan pada LRA. Pada periode hingga 31 Desember 2022 (*Audited*), realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN oleh Entitas tercatat sebesar Rp16.047.063.368.063 dan telah dilakukan pengesahan belanja modal pada K/L pemilik PSN selaku instansi yang memerlukan tanah. Dengan pengesahan tersebut, Entitas melakukan penghentian atas aset tanah PSN. Rincian pengesahan belanja modal per KL per proyek pada tahun 2022 komparatif dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut.

K/L	Jenis Proyek	2022	2021
		Nilai SP2D	Nilai SP2D
PUPR	Air baku	45.194.933.400	9.180.846.000
	Jalan Tol	12.172.219.871.831	17.873.183.943.975
	Bendungan	3.483.829.231.990	3.540.131.638.270
	Irigasi	67.268.122.796	343.194.986.941
Perhubungan	Jalur KA	202.587.034.586	945.138.771.597
	Pelabuhan	75.649.491.460	61.843.944.513
Parekraf	KSPN	314.682.000	84.925.396.071
Total		16.047.063.368.063	22.857.599.527.367

d. UAKPA Set BPJT

Realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari UAKPA Set BPJT sampai dengan 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp22.000.000.000 merupakan angsuran pelunasan pinjaman pokok dana bergulir BLU BP Set BPJT dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	22-11-2022	1.000.000.000	PT Pemalang Batang Tol Road
2	22-11-2022	10.000.000.000	PT Pejagan Pemalang Tol Road
3	19-12-2022	1.000.000.000	PT Pemalang Batang Tol Road
4	23-12-2022	10.000.000.000	PT Pejagan Pemalang Tol Road
Jumlah		22.000.000.000	

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Program PEN yang diatur dalam PP 23/2020 bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Pada APBN tahun anggaran 2022 pembiayaan investasi dilakukan antara lain dalam rangka: (1) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur; (2) meningkatkan kualitas pendidikan; (3) meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional; serta (4) mendukung perlindungan masyarakat.

Dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pada tahun 2022 pemerintah masih mengalokasikan pembiayaan investasi kepada BUMN dan Lembaga yang ditujukan untuk Program PEN dan nonPEN yang dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, yang kemudian dalam perkembangannya mengalami perubahan alokasi yang rinciannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Realisasi atas Pengeluaran Pembiayaan sebesar (Rp113.806.011.218.409). Rincian realisasi untuk masing-masing KPA berdasarkan klaster dijelaskan dalam tabel berikut:

(dalam triliun)

Uraian	DIPA TA 2022			Realisasi TA 2022 <i>Audited</i>		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Klaster Infrastruktur	(62.769)	(34.350)	(97.119)	(62.769)	(34.350)	(97.119)
KPA Satker KBUMN	(11.744)	(34.350)	(46.094)	(11.744)	(34.350)	(46.093,9)
KPA Satker DJKN	(3.085)	-	(3.085)	(3.085)	-	(3.085)
KPA Dit SMI DJPb	(19.100)	-	(19.100)	(19.100)	-	(19.100)
KPA Satker BLU LMAN	(28.840)	-	(28.840)	(28.840)	-	(28.840)
Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat	(3.000)	-	(3.000)	(3.000)	-	(3.000)
KPA Satker BLU BPD LH	(3.000)	-	(3.000)	(3.000)	-	(3.000)
Investasi Klaster Kerja Sama Internasional	(2.005,9)	-	(2.005,9)	(2.005,9)	-	(2.005,9)
KPA Satker BLU LDKPI	(1.000)	-	(1.000)	(1.000)	-	(1.000)
KPA Satker BKF	(1.005,9)	-	(1.005,9)	(1.005,9)	-	(1.005,9)
Investasi Pemerintah Lainnya	(10.480)	(1.201,1)	(11.681,1)	(10.480)	(1.201,1)	(11.681,1)
KPA Satker KBUMN	(9.980)	(1.201,1)	(11.181,1)	(9.980)	(1.201,1)	(11.181,1)
KPA Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	(500)	-	(500)	(500)	-	(500)
Total	(78.255)	(35.551)	(113.806)	(78.255)	(35.551)	(113.806)

a. Investasi Klaster Infrastruktur

Realisasi investasi klaster infrastruktur sampai dengan 31 Desember 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp97.118.999.942.400) atau 100% dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA. Rincian realisasi klaster infrastruktur pada 31 Desember 2022 (*Audited*) dijelaskan pada tabel berikut.

(dalam triliun)

Uraian	DIPA TA 2022			Realisasi TA 2022 Audited		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Klaster Infrastruktur	(62.769)	(34.350)	(97.119)	(62.769)	(34.350)	(97.119)
KPA Satker KBUMN	(11.744)	(34.350)	(46.094)	(11.744)	(34.350)	(46.093,9)
PMN Kepada PT PLN	(5.000)	-	(5.000)	(5.000)	-	(5.000)
PMN Kepada PT Adhi Karya	(1.976)	-	(1.976)	(1.976)	-	(1.976)
PMN Kepada PT HK	-	(31.350)	(31.350)	-	(31.350)	(31.350)
PMN Kepada PT Waskita Karya	-	(3.000)	(3.000)	-	(3.000)	(3.000)
PMN Kepada Perum Perumnas	(1.568)	-	(1.568)	(1.568)	-	(1.568)
PMN Kepada PT KAI	(3.200)	-	(3.200)	(3.200)	-	(3.200)
KPA Satker DJKN	(3.085)	-	(3.085)	(3.085)	-	(3.085)
PMN Kepada PT SMF	(2.000)	-	(2.000)	(2.000)	-	(2.000)
PMN Kepada PT PII	(1.085)	-	(1.085)	(1.085)	-	(1.085)
KPA Dit SMI DJPb	(19.100)	-	(19.100)	(19.100)	-	(19.100)
KPA Satker BLU LMAN	(28.840)	-	(28.840)	(28.840)	-	(28.840)

b. Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat

Realisasi investasi klaster perlindungan masyarakat sampai dengan 31 Desember 2022 (*Audited*) adalah sebesar (Rp3.000.000.000.000) atau 100% dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA. Rincian realisasi klaster perlindungan masyarakat pada 31 Desember 2022 (*Audited*) dijelaskan pada tabel berikut.

(dalam triliun)

Uraian	DIPA TA 2022			Realisasi TA 200 Audited		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat	(3.000)	-	(3.000)	(3.000)	-	(3.000)
KPA Satker BLU BPDH	(3.000)	-	(3.000)	(3.000)	-	(3.000)

Realisasi investasi klaster perlindungan masyarakat sebesar (Rp3.000.000.000.000) merupakan realisasi kepada KPA Satker BLU BPDH untuk dana bersama penanggulangan bencana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan Kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, BPDH ditunjuk menjadi pengelola dana PFB. Selanjutnya, berdasarkan KMK nomor 393/KMK.06/2022 tanggal 28 September 2022, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BLU BPDH ditetapkan menjadi KPA BUN BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PFB) dan dana DNS.

c. Investasi Klaster Kerja Sama Internasional

Realisasi investasi kerja sama internasional sampai dengan 31 Desember 2022 (*Audited*) adalah sebesar (Rp2.005.867.829.073) atau 100% dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA. Rincian realisasi klaster kerja sama internasional pada 31 Desember 2022 (*Audited*) dijelaskan pada tabel berikut.

(dalam triliun)

Uraian	DIPA TA 2022			Realisasi TA 200 Audited		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Klaster Kerja Sama Internasional	(2.005,9)	-	(2.005,9)	(2.005,9)	-	(2.005,9)
KPA Satker BLU LDKPI	(1.000)	-	(1.000)	(1.000)	-	(1.000)
KPA Satker BKF	(1.005,9)	-	(1.005,9)	(1.005,9)	-	(1.005,9)

d. Investasi Pemerintah Lainnya

Realisasi investasi pemerintah lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 (*Audited*) adalah sebesar (Rp11.681.143.446.936) atau 100% dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA. Rincian realisasi investasi pemerintah lainnya pada 31 Desember 2022 (*Audited*) dijelaskan pada tabel berikut.

(dalam triliun)

Uraian	DIPA TA 2022			Realisasi TA 2022 Audited		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Pemerintah Lainnya	(10.480)	(1.201,1)	(11.681,1)	(10.480)	(1.201,1)	(11.681,1)
KPA Satker KBUMN	(9.980)	(1.201,1)	(11.181,1)	(9.980)	(1.201,1)	(11.181,1)
Realisasi IPPEN kepada PTPN III	-	(1.201,1)	(1.201,1)	-	(1.201,1)	(1.201,1)
PMN Kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	(7.500)	-	(7.500)	(7.500)	-	(7.500)
PMN Kepada PT BTN (Persero) Tbk	(2.480)	-	(2.480)	(2.480)	-	(2.480)
KPA Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	(500)	-	(500)	(500)	-	(500)

B.2.4.1.7. Pengeluaran Kewajiban Penjaminan

Pengeluaran
Kewajiban
Penjaminan

Realisasi Pengeluaran Kewajiban Penjaminan pada tahun 2022 sebesar **Rp1.130.863.000.000** atau **100 persen** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp1.130.863.000.000**. Realisasi tersebut terdiri dari anggaran untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebesar Rp316.863.000.000 dan sebesar Rp814.000.000.000 merupakan anggaran untuk Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Rincian realisasi kewajiban tahun 2022 dijelaskan pada tabel berikut.

No	Penjaminan	Alokasi berdasarkan UU APBN 2022	Realisasi 2022 Audited	%
1	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(316.863.000.000)	(316.863.000.000)	100%
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(5.786.000.000)	(5.786.000.000)	100%
	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(158.470.000.000)	(158.470.000.000)	100%

No	Penjaminan	Alokasi berdasarkan UU APBN 2022	Realisasi 2022 Audited	%
	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(7.664.000.000)	(7.664.000.000)	100%
	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(141.882.000.000)	(141.882.000.000)	100%
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (infrastruktur Ketenagalistrikan)	(3.061.000.000)	(3.061.000.000)	100%
2	Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	(814.000.000.000)	(814.000.000.000)	100%
	Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN	(814.000.000.000)	(814.000.000.000)	100%

B.2.4.1.8. Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Realisasi Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Tahun 2022 adalah sebesar **Rp20.000.000.000.000** atau **100 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2022 sebesar **Rp20.000.000.000.000**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp9.000.000.000.000** atau **31,03 persen** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021.

Realisasi tersebut merupakan pencairan Dana Abadi Pendidikan kepada BLU LPDP. LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola LPDP sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 meliputi Dana Abadi Pendidikan (DAP), Dana Abadi Penelitian (DAPL), Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB). Anggaran pembiayaan dana abadi tahun 2022 sebesar **Rp20.000.000.000.000** telah dicairkan pada 21 Juni 2022 sehingga total akumulasi pokok dana abadi per 31 Desember 2022 menjadi **Rp119.107.700.000.000**. Adapun rincian akumulasi pencairan Dana Abadi di Bidang Pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Akumulasi sd 31 Desember 2021	Pencairan TA 2022	Akumulasi sd 31 Desember 2022
DAP	81.117.700.000.000	20.000.000.000.000	101.117.700.000.000
DAPL	7.990.000.000.000	-	7.990.000.000.000
DAPT	7.000.000.000.000	-	7.000.000.000.000
DAKB	3.000.000.000.000	-	3.000.000.000.000
Jumlah	99.107.700.000.000	20.000.000.000.000	119.107.700.000.000

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri

Pembiayaan luar negeri

Realisasi pembiayaan luar negeri adalah sebesar **Rp27.195.789.556.541** atau **minus 118,05 persen** dari anggaran sebesar **minus Rp23.037.681.022.000**. Angka realisasi pembiayaan luar negeri berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp108.283.083.586.601 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp81.087.294.030.060. Penerimaan pembiayaan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman tunai sebesar Rp 65.592.711.439.666 dan pinjaman kegiatan sebesar Rp 42.690.372.146.935. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa pemberian pinjaman sebesar Rp1.805.388.784.603 dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp79.281.905.245.457.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Penarikan pinjaman luar negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2022 adalah sebesar **Rp108.283.083.586.601** atau sebesar **170,41 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2022 sebesar **Rp63.543.958.677.000**. Adapun realisasi Tahun 2021 sebesar Rp74.168.116.606.248. Dengan demikian realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp34.114.966.980.353 atau 46 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021.

Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman tunai dan (ii) penarikan pinjaman kegiatan. Penarikan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021, yaitu sebesar 46% dikarenakan penarikan pinjaman tunai yang merupakan bagian dari strategi pengelolaan utang Tahunan.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Tunai**Penarikan pinjaman
tunai**

Realisasi Pinjaman tunai Tahun 2022 adalah sebesar **Rp65.592.711.439.666** atau sebesar **228,55 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2022 sebesar **Rp28.700.000.000.000**. Adapun realisasi Tahun 2021 sebesar Rp41.564.200.800.000. Dengan demikian realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp24.028.510.639.666 atau 57,81 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 dikarenakan adanya kebutuhan pembiayaan sebagaimana termuat pada Perpres No 72 Tahun 2022.

Pinjaman tunai dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *underlying* dalam proses pencairan pinjaman. Untuk pinjaman tunai ini, setelah terpenuhinya *policy matrix* akan dilakukan negosiasi dan penandatanganan *loan agreement*, selanjutnya akan dilakukan pencairan. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *modalitas Program for Result (PforR) dan Investment Project Financing with Performance Based Conditions (IPF with PBC's)* dimana untuk PforR pengukuran capaian menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLIs. DLIs merupakan indikator-indikator berupa target-target yang harus dicapai oleh *executing agency/implementing agency*. Dalam proses pencairan pinjaman, DLIs terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Independent Verification Agency (IVA) yang disepakati antara Pemerintah dan *lender* dalam beberapa pinjaman tunai yang ditunjuk adalah BPKP. Hasil verifikasi tersebut akan dijadikan dasar penarikan pinjaman tunai. Untuk pinjaman dengan modalitas IPF with PBC seperti pinjaman *Mangrove for Coastal Resilience (M4CR)* dilakukan penarikan setelah target PBC dicapai oleh *executing agency/implementing agency*. Untuk pinjaman M4CR juga dilibatkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sebagai *fund manager*. Daftar pinjaman tunai dengan menggunakan *policy matrix* dan DLIs / PBC untuk penarikan pinjaman tunai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Lender	Program	Policy Matrix/Output/Pilar
1	AFD	Financial Sector Reform DPL 2	1 Increasing the depth of the financial system 2 Improving the efficiency of the financial system 3 Strengthening the resilience of the financial system.
2	WB	Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19	1 Disbursement Linked Indicators (DLI)
3	AIIB	Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19	1 Disbursement Linked Indicators (DLI)
4	KfW	Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19	1 Disbursement Linked Indicators (DLI)
5	WB	Indonesia Second Financial Sector Reform Development Policy Loan	1 Increasing the depth of the financial system 2 Improving the efficiency of the financial system 3 Strengthening the resilience of the financial system.
6	ADB	BOOSTING PRODUCTIVITY THROUGH HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT SUBPROGRAM 1	1 Penguatan kebijakan untuk membiayai dan memonitor pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) 2 Peningkatan pencapaian pendidikan dan pengembangan keahlian 3 Peningkatan perlindungan sosial dan sistem kesehatan masyarakat.
7	KfW	Human Capital Development Programme	1 Penguatan kebijakan untuk membiayai dan memonitor pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) 2 Peningkatan pencapaian pendidikan dan pengembangan keahlian 3 Peningkatan perlindungan sosial dan sistem kesehatan masyarakat.
8	WB	National Health Insurance (JKN) Reforms and Results Program	1 Penarikan atas advance payment sebesar 25% dari total pinjaman
9	WB	Investing in Nutrition and Early Years	1 Disbursement Linked Indicators (DLI)
10	WB	Mangrove for Coastal Resilience	1 PBC#1: Mangrove area with appraised and approved rehabilitation plans 2 PBC#2: Mangrove area under rehabilitation and management 3 PBC#3: Mangrove area rehabilitated and managed 4 PBC #4: Subnational mangrove management plans submitted for approval and adopted
11	WB	Indonesia Human Capital Development Policy Loan	1 Improving the Effectiveness of Public Spending for Human Capital 2 Protecting Existing Human Capital Investments.
12	WB	Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan	1 Increase Tax Revenue and Improve Equity of the Tax System 2 Strengthen Institutions for Planning and Budgeting, and Fiscal Transfers
13	ADB	Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, Sub Program 1	1 Creating and enabling environment for investments 2 Easing barriers to trade 3 Growing and upscaling enterprises
14	EDCF	Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, Sub Program 1	1 Creating and enabling environment for investments 2 Easing barriers to trade 3 Growing and upscaling enterprises

Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat pinjaman tunai yang ditujukan untuk pembiayaan COVID-19 sebagaimana termuat pada tabel berikut:

No.	Negara	Lender	MTU	Jumlah Yalas	Jumlah Rupiah	Nama Program
1	AIIB	AIIB	USD	500.000.000	7.280.304.078.700	AF EMERGENCY RESPONSE COVID19
2	IBRD	IBRD	USD	500.000.000	7.275.269.974.500	AF Emergency COVID-19
3	GERMANY	KfW	EUR	195.200.000	2.978.388.632.402	Indonesia Emergency Response
Total					17.533.962.685.602	

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Kegiatan

Penarikan pinjaman kegiatan

Realisasi penarikan pinjaman kegiatan Tahun 2022 adalah sebesar **Rp42.690.372.146.935** atau sebesar **122,52 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2022 sebesar **Rp34.843.958.677.000**. Adapun realisasi Tahun 2021 sebesar Rp32.603.915.806.248. Dengan demikian realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.086.456.340.687 atau 30,94 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021. Pinjaman kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.

B.2.4.2.2. Pemberian Pinjaman*Pemberian pinjaman*

Realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman luar negeri Tahun 2022 adalah sebesar **Rp1.805.388.784.603** atau **50,46 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2022 sebesar **Rp3.578.099.699.000**. Realisasi pemberian pinjaman mengalami penurunan sebesar Rp 189.111.577.593 atau turun 9,48 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar **Rp1.994.500.362.196**.

Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman dalam laporan ini hanya terdiri dari Pemberian pinjaman Luar Negeri meliputi:

- a. Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan (725211)

Realisasi Pemberian pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp21.460.809.305 dan Rp434.517.157.913. Realisasi pada Tahun 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp413.056.348.608 atau turun 95,06% bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021. Pemberian pinjaman ini merupakan pemberian pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta.

- b. Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan (725213)

Realisasi Pemberian pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.783.927.975.298 dan Rp1.559.983.204.283. Realisasi pada Tahun 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp223.944.771.015 atau naik 14,36% bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021.

Realisasi ini berdasarkan dokumen Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) Januari – Desember 2022 yang diterbitkan atas Pemberian pinjaman Luar Negeri kepada 3 (tiga) BUMN, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Sarana Multi Infrastruktur, dan PT. Pertamina, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama BUMN	Cara Penarikan	Jumlah (Rp)
1.	PT. Perusahaan Listrik Negara	LC	77.750.127.381
		PL	797.522.784.259
		Jumlah	875.272.911.640
2.	PT. Pertamina	PL	264.291.612.919
		Jumlah	264.291.612.919
3.	PT. SMI	PL	644.363.450.740
		Jumlah	644.363.450.740
Jumlah Keseluruhan			1.783.927.975.298

Tabel di bawah ini menampilkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

Tahun	Pagu DIPA	Realisasi	Persentase
2015	3.443.584.540.000	2.576.441.229.912	74,82%
2016	5.833.652.760.000	5.117.915.204.933	87,73%
2017	7.894.631.273.000	6.868.916.465.167	87,01%
2018	9.872.409.868.000	9.099.739.735.235	92,17%
2019	6.221.641.822.000	5.716.481.102.382	91,88%
2020	3.843.293.750.000	3.631.888.376.473	94,50%
2021	2.482.449.871.000	1.994.500.362.196	80,34%
2022 *)	1.855.637.559.000	1.805.388.784.603	97,29%

*) berdasarkan SP3 TA 2022 yang terbit s.d. 31 Desember 2022

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Tahun 2022 adalah sebesar **Rp79.281.905.245.457** atau **95,52 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2022 sebesar **Rp83.003.540.000.000**. Atas hal tersebut, realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp2.801.075.144.044** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar minus **Rp82.082.980.389.501** atau 3,41 persen. Realisasi tersebut lebih kecil dari yang dianggarkan disebabkan oleh adanya penguatan kurs transaksi pembayaran. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada Tahun 2022.

Realisasi pengeluaran pembiayaan Utang Luar Negeri terdiri dari :

- i. Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Tunai Realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman tunai sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.619.613.777.567.
- ii. Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Kegiatan Realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman kegiatan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp41.662.291.467.890.

Debitur	Tahun 2022	Tahun 2021
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Program	37.619.613.777.567	35.813.236.693.591
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Proyek	41.662.291.467.890	46.269.743.695.910
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible	-	-
Jumlah	79.281.905.245.457	82.082.980.389.501

B.2.5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran –SiKPA

*SiLPA/SiKPA sebelum
Pendapatan/Belanja
K/L*

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA Tahun 2022 sebesar minus **Rp1.182.268.016.139.947** atau **119,96 persen** dari jumlah yang dianggarkan tahun 2022 sebesar minus **Rp985.520.767.975.000**. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA merupakan penjumlahan dari defisit anggaran sebesar minus **Rp1.773.246.156.230.100** dan Pembiayaan Neto sebesar **Rp590.978.140.090.153**. Atas hal tersebut, realisasi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar minus **Rp644.023.296.394.779** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar minus **Rp538.244.719.745.161** atau 119,65 persen.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Selain informasi sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat informasi tambahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Penjelasan Umum *Cluster* dan Progran PEN Lingkup BUN

Sejak tahun 2020, Pemerintah merespon kejadian luar biasa pandemi COVID 19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN). Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan KB I tahun 2020 (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020).

Dalam SKB I yang ditetapkan terdapat hak BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau *Green Shoe Option* (GSO) dan penawaran langsung atau *Private Placement* (PP). SKB I merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang. Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai *backstop* pembiayaan utang untuk mengantisipasi target penerbitan SBN yang tidak dapat diserap oleh investor. Pada tahun 2022, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp49,11 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp25,24 triliun dan SBSN sebesar Rp23,86 triliun.

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme pembagian beban (*burden sharing*) antara Pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II tahun 2020 (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020). Sesuai SKB II, BI membeli SBN yang diperuntukkan untuk *Public Goods* (PG) dan menanggung seluruh beban yang timbul sampai dengan SBN tersebut jatuh tempo. Selain itu, BI dan Pemerintah juga berbagi beban (*burden sharing*) biaya penerbitan SBN yang ditujukan untuk pembiayaan *Non-Public Goods* (NPG). Penerbitan SBN untuk pemenuhan pembiayaan PG dan NPG sesuai SKB II hanya dilakukan pada tahun 2020, yaitu melalui 8 kali transaksi private placement dengan nilai Rp397,56 triliun untuk PG dan 9 kali lelang dengan nilai Rp177,03 triliun untuk NPG.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada tahun 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan, diantaranya kondisi pandemi yang masih berlanjut dan munculnya varian baru virus Covid-19, konsumsi masyarakat yang masih terbatas, belum pulihnya aktivitas dunia usaha, serta masih rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan. Menyebarnya varian delta mengharuskan Pemerintah memberlakukan PPKM dan berdampak pada peningkatan pembiayaan utang Pemerintah. Peningkatan pembiayaan tersebut

utamanya untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan serta upaya untuk pemulihan ekonomi tetap *on track*.

Merespon kondisi tersebut, pada bulan Agustus 2021, Pemerintah kembali melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB III (Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang skema dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 Covid-19 melalui penerbitan Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan pembelian di Pasar perdana oleh BI). Perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah, serta pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia, serta dasar mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia guna menurunkan beban keuangan negara untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan. Besaran nilai SBN sesuai kesepakatan adalah sebesar Rp439 triliun, yang direalisasikan tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun. Adapun rincian tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel Penerbitan SBN untuk Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III

No	Bulan Penerbitan/ Setelmen	Jumlah Private Placement	Nilai Penerbitan Untuk Cluster A dan B
TAHUN 2022			
A. Kesehatan (Cluster A)			
1	Juli	1 kali	21.868.950.000.000
2	Agustus	1 kali	8.794.260.000.000
3	Desember	1 kali	9.336.790.000.000
SUBTOTAL PENERBITAN UNTUK CLUSTER A			40.000.000.000.000
B. Kesehatan dan Kemanusiaan (Cluster B)			
1	Agustus	1 kali	31.605.740.000.000
2	September	1 kali	33.153.310.000.000
3	Desember	1 kali	119.240.950.000.000
SUBTOTAL PENERBITAN UNTUK CLUSTER B			184.000.000.000.000
TOTAL PENERBITAN TAHUN 2021			224.000.000.000.000

Pengungkapan terkait jatuh tempo SUN seri VR sebagaimana yang telah diungkapkan pada LKBUN Tahun 2021 (*audited*), yaitu sebagai berikut.

Total nilai SUN Seri VR yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka Keputusan Bersama II dan III adalah sebesar Rp836,56 triliun. Jatuh Tempo SUN seri VR tersebut adalah sebagai berikut.

- Tahun 2025 sebesar Rp100 Triliun;
- Tahun 2026 sebesar Rp154,50 Triliun;
- Tahun 2027 sebesar Rp210,50 Triliun;
- Tahun 2028 sebesar Rp208,06 Triliun;
- Tahun 2029 sebesar Rp107,50 Triliun;
- Tahun 2030 sebesar Rp56,00 Triliun."

SBN yang diterbitkan pemerintah sesuai SKB II dan SKB III, khususnya dengan seri VR yang dibeli di pasar perdana, bersifat *tradable* dan *marketable* sehingga dapat dipergunakan BI untuk pelaksanaan operasi moneter. Dengan meningkatnya kepemilikan SBN tradable oleh BI maka kondisi ini sejalan

dengan kebijakan untuk penggunaan SBN dalam operasi moneter, yang pada akhirnya dapat mendorong likuiditas pasar SBN.

Dari sisi Pemerintah, SBN dalam rangka SKB II dan III merupakan SBN dengan tingkat bunga mengambang, sehingga dapat menjadi penyeimbang portofolio utang. Dengan kondisi tersebut, SBN dimaksud diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan jatuh tempo untuk mendukung keseimbangan portofolio dalam mewujudkan portofolio optimum. Di samping itu, SBN yang diterbitkan memiliki biaya yang lebih rendah sehingga dengan mempertahankan sampai dengan jatuh tempo maka dapat menunjang tercapainya kesinambungan fiskal pemerintah dan dapat memenuhi kebutuhan BI dalam operasi moneter.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang beban/belanja bunga sebagaimana tujuan skema *burden sharing*. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian beban belanja bunga yang ditanggung Pemerintah. Pada Tahun 2022 rincian kontribusi Bank Indonesia sebagai berikut:

Tabel Porsi Pemerintah dan BI dalam skema *burden sharing*

No	Bulan	Porsi Bank Indonesia	Porsi Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	Januari	526.014.250.000	-	526.014.250.000
2	Februari	963.513.320.000	-	963.513.320.000
3	Maret	1.541.917.700.000	-	1.541.917.700.000
4	April	526.658.750.000	-	526.658.750.000
5	Mei	1.094.228.280.000	-	1.094.228.280.000
6	Juni	1.410.175.650.000	-	1.410.175.650.000
7	Juli	526.751.610.000	-	526.751.610.000
8	Agustus	1.094.026.120.000	-	1.094.026.120.000
9	September	1.407.816.200.000	-	1.407.816.200.000
10	Oktober	582.718.300.000	-	582.718.300.000
11	November	1.400.515.740.000	-	1.400.515.740.000
12	Desember	2.093.469.250.000	-	2.093.469.250.000
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK PG		13.167.805.170.000	-	13.167.805.170.000
B. Non Public Goods				
1	Juni	3.195.336.712.438	1.811.881.194.411	5.007.217.906.849
2	Desember	3.222.931.981.586	1.811.798.111.564	5.034.730.093.150
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK NPG		6.418.268.694.024	3.623.679.305.975	10.041.947.999.999
C. Cluster A				
1	Maret	443.410.000.000	-	443.410.000.000
2	Juni	442.482.000.000	-	442.482.000.000
3	September	441.728.000.000	-	441.728.000.000
4	Oktober	166.291.495.800	-	166.291.495.800
5	November	89.921.308.500	-	89.921.308.500
6	Desember	593.050.000.000	-	593.050.000.000
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK CLUSTER A		2.176.882.804.300	-	2.176.882.804.300
TOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK PG, NPG DAN CLUSTER A		21.762.956.668.324	3.623.679.305.975	25.386.635.974.299

1. Untuk Tahun 2022, pagu dan realisasi SBSN proyek per masing-masin Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Tabel Pagu dan Realisasi SBSN Proyek

NO	Kementerian/Lembaga	Pagu	Realisasi
1	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.574.417.133.000	1.574.397.599.000
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	187.348.450.000	152.006.713.096
3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	118.434.881.000	118.412.093.332
4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	7.226.619.763.000	6.997.990.709.687
5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	2.264.465.704.000	1.784.832.269.049
6	KEMENTERIAN AGAMA	3.046.878.645.000	2.982.865.954.857
7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	108.165.746.000	107.980.315.503
8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	16.626.912.432.000	14.063.927.947.669
9	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	308.896.639.000	307.522.017.518
10	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	144.923.365.000	1.000.674.835
11	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	1.174.591.267.000	852.084.292.309
	JUMLAH	32.781.654.025.000	28.943.020.586.855

2. Nilai realisasi proyek SBSN SYC yang dilanjutkan pelaksanaannya dari tahun 2021 ke tahun 2022 per masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Tabel Nilai Proyek SBSN SYC Tahun 2021 yang Dilanjutkan Pelaksanaannya ke Tahun 2022

NO	Kementerian/Lembaga	Pagu	Realisasi
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	448.450.000	448.450.000
2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	11.797.940.000	11.797.938.219
3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	110.240.773.000	93.054.417.315
4	KEMENTERIAN AGAMA	54.869.138.000	54.175.095.490
5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.483.086.000	3.483.086.000
6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	15.907.688.000	1.913.267.200
	JUMLAH	196.747.075.000	164.872.254.224

3. Pada tahun 2022, nilai proyek SBSN SYC yang dilanjutkan pelaksanaannya ke tahun 2023 masih menunggu proses revisi anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga pada awal tahun 2023.

Adapun data sementara nilai proyek SBSN SYC 2022 yang akan dilanjutkan pelaksanaannya ke tahun 2023 berdasarkan rekonsiliasi data lanjutan 2022 ke 2023 yang dilakukan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga terkait sebagai berikut :

Tabel Nilai Proyek SBSN SYC Tahun 2022 yang Dilanjutkan Pelaksanaannya ke Tahun 2023

NO	Kementerian/Lembaga	Pagu
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	27.516.765.556
2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36.939.298.559
3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	42.760.332.520
4	KEMENTERIAN AGAMA	28.943.872.774
5	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	11.860.674.098
6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	132.051.654.911
	JUMLAH	280.072.598.418

4. Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan Tahun 2022, terdapat penarikan pinjaman kegiatan pada 2 (dua) Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar Rp140.662.197.528,00 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang belum dapat dilakukan pengesahan

dikarenakan ketidakcukupan pagu anggaran sehingga belum terdapat pencatatan pada aplikasi SPAN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Daftar Kementerian Lembaga belum SP3 yang bersumber dari Pinjaman

No	Kementerian/Lembaga	Nilai Rupiah
1	KEMENDIKBUD RISTEK	110.777.364.340
2	KEMEN PU & PERA	29.884.833.188
Grand Total		140.662.197.528

5. Pada Tahun 2022, Direktorat Pengelolaan Kas Negara telah melakukan pengembalian dana (*refund*) kepada *Lender* sebesar Rp87.731.930.479,00 dikarenakan adanya *refund* Prosedur Administratif dan *refund ineligible*. *Refund* merupakan koreksi nilai ekuitas tahun lalu, sehingga tidak mempengaruhi akun penarikan pinjaman kegiatan. Rincian *refund* termuat pada tabel sebagai berikut:

Tabel *Refund (Ineligible dan Prosedur Administratif)*

No	Loan Id	Register	Kementerian Lembaga	Lender	Nilai Rupiah
Refund Ineligible					
1	20398000	10842601	KEMEN PU & PERA	I B R D	(246.162.117)
2	20398000	10842601	KEMEN PU & PERA	I B R D	(109.101.148)
3	20398000	10842601	KEMEN PU & PERA	I B R D	(84.854.675)
4	20407000	10862601	KEMENDESA	I B R D	(4.182.223.541)
5	20407000	10862601	KEMENDESA	I B R D	(683.709.329)
6	20407000	10862601	KEMENDESA	I B R D	(440.211.606)
7	20418000	1NPB3NNA	KEMEN PU & PERA	I B R D	(2.954.286.765)
8	20418000	1NPB3NNA	KEMEN PU & PERA	I B R D	(107.990.759)
9	20407000	10862601	KEMENDESA	I B R D	(2.606.410.004)
10	20418000	1NPB3NNA	KEMEN PU & PERA	I B R D	(11.548.894)
11	20433000	1M1JWRAA	KEMEN PU & PERA	I B R D	(111.682.545)
12	20999014	1YJJ8PSA	KEMENDIKBUDRISTEK	I D B	(8.195.877.930)
13	20999014	1YJJ8PSA	KEMENDIKBUDRISTEK	I D B	(79.269.560)
14	21228000	10811901	KEMEN PU & PERA	A D B	(12.437.553.275)
15	21265000	17D37YEA	KEMEN PU & PERA	A D B	(445.431.957)
Refund Administratif					
16	20999002	10848801	KEMEN PU & PERA	I D B	(19.939.927.427)
17	20408000	10864001	KEMENDIKBUDRISTEK	I B R D	(23.132.554.420)
18	20413000	10881901	L I P I	I B R D	(11.619.087.945)
19	20413000	10881901	L I P I	I B R D	(344.046.582)
JUMLAH					(87.731.930.479)

6. Terdapat transaksi *prepayment* pinjaman ADB sebagai bagian dari pengelolaan portofolio pinjaman dengan detil sebagai berikut:

Tabel *Prepayment* Pinjaman ADB

No	Loan Id	MTU	Nilai Valas	Nilai IDR
1	21169000	USD	2.967.259,83	42.740.410.591,32
2	21173000	USD	1.966.378,32	28.323.713.321,28
3	21174000	USD	1.353.064,74	19.489.544.514,96
4	21176000	USD	1.609.330,44	23.180.795.657,76
5	21178000	USD	783.594,19	11.286.890.712,76
6	21179000	USD	969.003,53	13.957.526.846,12
7	21180000	USD	776.706,52	11.187.680.714,08
8	21181000	USD	9.107.280,07	131.181.262.128,28
9	21182000	USD	1.071.402,41	15.432.480.313,64
10	21189000	USD	3.754.004,41	54.072.679.521,64
11	21190000	USD	702.197,77	10.114.456.679,08
12	21196000	USD	3.163.709,95	45.570.078.119,80
13	21198000	USD	1.982.596,04	28.557.313.360,16
14	21200000	USD	8.241.584,24	118.711.779.392,96
15	21201000	USD	1.131.591,90	16.299.449.727,60
Total				570.106.061.601,44

Prepayment dilakukan dalam rangka pengelolaan portofolio pinjaman, dan telah teridentifikasi adanya *outstanding* pinjaman ADB *non-LIBOR-based loan: Pool-Based Single Currency Loan (PSCL)* yang memiliki nilai *interest rate* tinggi (saat ini 6,40%) dan tidak memiliki opsi untuk dikonversi. Untuk menghemat potensi pembayaran bunga, sebagaimana ketentuan dalam *Loan Agreement* berkenaan dimungkinkan untuk dilakukan *prepayment* atas *outstanding* pinjamandengan pembayaran premium.

7. Penundaan Pembayaran kepada *Lender* Rusia

Akibat adanya sanksi pembatasan transaksi dan penutupan SWIFT terhadap entitas utama di Rusia, *Lender* Rusia menyampaikan kebijakan pemberian penangguhan pembayaran utang sementara untuk Pemerintah Indonesia. Akibat penundaan tersebut, terdapat pembayaran pokok dan bunga yang ditunda pembayarannya sebesar USD 17,26 Juta sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel Penundaan Pembayaran kepada *Lender* Rusia

LOAN_ID	MTU	POKOK	BUNGA	TOTAL
23901000	USD	2.125.000	226.501	2.351.501
23902000	USD	2.384.250	317.668	2.701.918
23903000	USD	2.380.000	380.522	2.760.522
23904000	USD	127.500	20.385	147.885
23906000	USD	2.295.000	489.243	2.784.243
23907000	USD	212.130	45.221	257.352
23908000	USD	4.845.000	1.420.164	6.265.164
Grand Total		14.368.880	2.899.704	17.268.585

Ringkasan Realisasi Anggaran Program PC-PEN dan Capaian Output Per Cluster Tahun 2022

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mulai terjadi di tahun 2020 memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Pandemi Covid-19 merupakan situasi *extraordinary* dan menciptakan implikasi yang luar biasa bagi kehidupan. Pemerintah harus memikirkan efek domino dari pandemi tersebut yang semula merupakan masalah kesehatan, kemudian merembet menjadi masalah sosial, ekonomi, hingga berpotensi berdampak pada sisi finansial. Pemerintah

Indonesia terus berupaya meningkatkan pemulihan perekonomian bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Program Pencanangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) dilaksanakan Pemerintah berupa penyediaan belanja penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak adanya pandemi COVID 19. Program PC PEN dijalankan oleh Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran BUN. Program PC PEN ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia agar terus bergerak dan mencegah terjadinya krisis yang meluas dan berkepanjangan. Walaupun pada tahun 2022 ini kasus covid 19 sudah mulai melandai namun dampak ekonomi dari krisis tahun sebelumnya masih harus ditangani pemerintah dan pemerintah tetap waspada adanya varian baru dari COVID 19.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa “Kinerja APBN menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi yang luar biasa selama tiga tahun, memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.” Selama tahun 2022, APBN berhasil menjadi instrumen stabilisasi (*shock absorber*) dalam melindungi masyarakat, mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerja keras APBN tersebut diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara yang tumbuh 10,92 persen dari tahun 2021 dan sekitar 99,55 persen dari Pagu untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian, Pemerintah memberikan berbagai subsidi nonenergi, subsidi energi, dan kompensasi kepada masyarakat dan dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang sangat baik ini harus terus dipertahankan. Pada sisi belanja negara tetap akan mendukung berbagai program prioritas nasional, yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan ibukota negara (IKN), dan penyelenggaraan Pemilu.

Pada tahun 2022, pemerintah melanjutkan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan fokus pada bidang Penanganan Kesehatan, Perlindungan Masyarakat dan Penguatan Pemulihan Ekonomi. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan PEN 2022, beberapa program telah direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2022 dengan memaksimalkan penggunaan APBN 2022 dan meningkatkan kualitas SDM. Dalam upaya pemutus Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada tahun 2022 pemerintah menambah anggaran sejalan dengan meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penanganan lonjakan kasus Covid 19 dengan prioritas utama untuk Penanganan Kesehatan, Perlindungan Masyarakat dan Penguatan Pemulihan Ekonomi. Berikut program pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2022, sebagai berikut pada table Ringkasan Realisasi Anggaran Program PC-PEN dan Capaian Output Per Cluster Tahun 2022:

No	Uraian	BA BUN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Rincian Output
A. PENANGANAN KESEHATAN						
1	BOK untuk Penanganan Kesehatan	999.05	715.506.059.819 ¹⁾	598.123.512.969 ²⁾	83,59%	503 Pemda yang sudah menyampaikan laporan tahap 1 250 Pemda yang sudah menyampaikan laporan tahap 2 483.429 kasus aktif 7.724 puskesmas
2	Penggunaan Dana Desa untuk penanganan Covid (<i>Earmark</i> Dana Desa)	999.05	5.440.000.000.000	5.432.491.071.234	99,86%	7,49 juta Keluarga Penerima Manfaat
3	Insentif Perpajakan Kesehatan	999.07	1.719.509.999.000	1.719.509.997.818	100%	2 Wajib Pajak
	a. PPN DTP Non Vaksin	999.07	1.670.949.924.000	1.670.949.922.818	100%	1 Wajib Pajak
	b. PPN DTP Vaksin	999.07	48.560.075.000	48.560.075.000	100%	1 Wajib Pajak
	JUMLAH		7.875.016.058.819	7.750.124.582.021		
B. PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Kartu Pra Kerja	999.08	17.999.997.500.000	16.362.629.363.174	90,90%	5.076.928 peserta, pencabutan peserta 92.138 dalam 25 Batch
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	999.05	27.200.000.000.000	26.943.101.100.000	99,06%	7,49 juta KPM
	JUMLAH		45.199.997.500.000	43.305.730.463.174		
C. PENGUATAN PEMULIHAN EKONOMI						
1	Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	999.03	34.350.000.000.000	34.350.000.000.000	100%	100%
2	Investasi Pemerintah Lainnya Dalam Rangka Program PEN	999.03	1.201.143.500.000	1.201.143.500.000	100%	100% Sesuai Satuan RO
3	Jaminan Loss Limit UMKM melalui Badan Usaha Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Program PEN (Jaminan)	999.03	814.000.000.000	814.000.000.000	100%	2 Jaminan kepada PT Askrindo dan PT Jamkrindo, tidak terdapat klaim atas Loss Limit.
4	Penerimaan pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah	999.03	-	2.311.496.745.459	- 100%	
5	Diskon Listrik PEN	999.07	114.758.426.726	114.758.426.726	100%	0,24 terawatt hour (TWh)
6	Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (PEN)	999.07	231.594.584.000	155.176.756.597	67%	30 pemda
7	Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program PEN	999.07	2.494.035.076.000	2.348.872.681.379	94,18%	5 penjamin
	a. IJP UMKM	999.07	2.144.864.482.000	2.143.298.531.622	99,93%	2 penjamin
	b. IJP Korporasi dan loss limit	999.07	277.131.909.000	195.558.342.584	70,57%	2 penjamin
	c. IJP BUMN	999.07	72.038.685.000	10.015.807.173	13,90%	1 penjamin
8	Subsidi Bunga KUR (Subsidi Bunga/Margin Kredit/Pembiayaan UMKM (PEN)	999.07	23.113.280.536.000	23.113.047.044.984	100%	46 penyalur. 7.615.497 Debitur
9	Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)	999.07	5.146.742.290.000	5.146.739.945.058	100%	11 Wajib Pajak
	a. PPh DTP Final P3-TGAI	999.07	209.540.234.000	209.537.893.632	100%	1 Wajib Pajak
	b. PPh DTP Final UMKM	999.07	177.672.270.000	177.672.269.278	100%	3 Wajib Pajak
	c. PPh DTP Pasal 21	999.07	2.108.854.515.000	2.108.854.514.191	100%	3 Wajib Pajak
	d. PPN DTP Kertas Koran	999.07	413.766.000	413.765.076	100%	1 Wajib Pajak
	e. PPN DTP Sewa Outlet	999.07	14.796.112.000	14.796.111.590	100%	1 Wajib Pajak
	f. PPN Rumah Tapak dan Rumah Susun	999.07	1.524.165.754.000	1.524.165.753.275	100%	1 Wajib Pajak
	g. PPh BM Kendaraan Bermotor	999.07	1.111.299.639.000	1.111.299.638.016	100%	1 Wajib Pajak
10	Bantuan Beras PPKM Bulog	999.08	3.088.745.280.000	3.088.745.280.000	100%	288 juta Kilogram beras
11	Pengelolaan Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik dalam rangka PEN	999.08	18.823.102.000	18.823.101.252	100%	1 dokumen berupa dokumen penyelesaian tagihan listrik Tahun 2020
12	Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit Penjaminan PEN	999.99	1.463.345.000	1.463.345.000	100%	1. Laporan Loss Limit Bulan Januari s.d. Desember 2022 2. Proyeksi pembayaran klaim sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan (Januari s.d. Desember 2022) 3. Laporan pelaksanaan kegiatan alih pengetahuan (Transfer Knowledge) I & II 4. Kertas kerja analisa besaran tarif IJP PEN Gen 2
13	DAK Fisik untuk PC-PEN	999.05	13.452.376.975.000	12.085.486.657.682	89,84%	
	JUMLAH		84.026.963.114.726	84.749.753.484.137		

1) Data alokasi berdasarkan data Rencana Kegiatan (RK) Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Kemenkes

2) Data realisasi penyaluran merupakan estimasi penyaluran berdasarkan proporsi menu kegiatan BOK Covid, karena penyaluran BOK secara keseluruhan tanpa membedakan peruntukan dana nya

I. Penanganan Kesehatan

Covid-19 menyerang kesehatan manusia dengan penyebaran yang sangat cepat. Hingga pada akhirnya kejadian ini ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Pemerintah mengambil langkah cepat mencegah penyebaran Covid-19 meluas. Kebijakan dibidang kesehatan dikeluarkan sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Langkah-langkah kebijakan meliputi

sarana dan prasarana Lab Covid-19, pengetesan dan penelusuran, physical distancing, program vaksinasi, insentif perpajakan kesehatan, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah di Indonesia. Kegiatan dalam penanganan Kesehatan dijalankan oleh Bagian Anggaran BUN dan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, sebagai berikut:

1. BOK untuk Penanganan Kesehatan

Dana BOK untuk penanganan PC-PEN 2022 adalah Penyaluran BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 di wilayah kerja provinsi/kabupaten/kota/puskesmas terutama dalam deteksi dini dan respon kesehatan masyarakat.

Pemanfaatan Dana BOK untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada sub menu kegiatan BOK Provinsi, BOK Kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas dilakukan untuk penguatan kegiatan tracing. Pelaksanaan BOK dimaksud dikoordinasikan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Puskesmas. Selain itu, Pelaksanaan BOK dimaksud juga dapat melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama masyarakat lainnya yang diberikan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan BOK provinsi, BOK kabupaten/kota dan BOK Puskesmas untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) harus dialokasikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) masing-masing dari total pagu UKM tersier, UKM sekunder, dan UKM primer. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana diubah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

Alokasi BOK provinsi, BOK kabupaten/kota dan BOK Puskesmas untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Pemda kepada Kemenkes sebesar Rp715.506.059.819. Berdasarkan monitoring penggunaan PC-PEN sampai dengan 31 Maret 2023 atas 503 pemda yang telah menyampaikan laporan tahap 1 2022, jumlah realisasi penyerapan BOK untuk PC-PEN TA 2022 adalah sebesar Rp292,48 miliar. Sementara itu, berdasarkan monitoring penggunaan PC-PEN sampai dengan 31 Maret 2023 atas 250 pemda yang telah menyampaikan laporan tahap 2 2022, jumlah realisasi penyerapan BOK untuk PC-PEN TA 2022 adalah sebesar Rp224,26 miliar dengan jumlah realisasi penyaluran BOK untuk PC-PEN TA 2022 adalah sebesar Rp598.123.512.969 (83,59% dari alokasi dana) yang digunakan untuk mendanai beberapa sub menu kegiatan yang terkait dengan upaya pengendalian penyakit COVID-19 diantaranya:

- a. Jumlah realisasi penyaluran Dana BOK untuk PC-PEN Tahun 2022 tidak dapat diketahui secara eksplisit karena penyalurannya tergabung dalam penyaluran Dana BOK Tahun 2022 secara keseluruhan, tanpa membedakan peruntukan dananya. Realisasi penyerapannya kemudian diketahui melalui penyampaian laporan penyerapan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, dengan membedakan peruntukan dananya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PC-PEN. Nilai alokasi dan penyerapan masih bisa bergerak sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 yaitu batas akhir penyampaian laporan BOK tahun anggaran sebelumnya. Menu Kegiatan BOK Provinsi

- i. Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 ditingkat provinsi
 - ii. Peningkatan kapasitas penanggung jawab surveilans kabupaten/kota dalam rangka surveilans COVID-19 khususnya tracing dan manajemen data
 - iii. Pembinaan dan pendampingan bagi petugas penanganan COVID-19 di Kabupaten/kota, bersama dengan unsur kesehatan TNI-POLRI
 - iv. Monitoring dan Evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 di tingkat provinsi
 - v. Komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi tentang COVID-19
 - vi. Penyelidikan Epidemiologi (PE) kasus dan kontak COVID-19
- b. Menu Kegiatan BOK Kabupaten Kota
- i. Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 di tingkat Kabupaten/Kota
 - ii. Pembinaan pelacakan kontak kasus COVID-19 kepada Puskesmas hingga petugas tracer
 - iii. Kegiatan monitoring dan Evaluasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 tingkat Kabupaten/kota.
 - iv. Peningkatan kapasitas bagi petugas surveilans/pengolah data di Puskesmas dalam rangka tracing dan manajemen data
 - v. Peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak/tracer
 - vi. Penyediaan APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak dan pengambilan specimen kasus COVID-19.
 - vii. Komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi tentang COVID-19
 - viii. Penyelidikan epidemiologi kasus COVID -19.
 - ix. Honor pengolah data kasus COVID-19 bagi petugas Non- Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota
 - x. Pembiayaan komunikasi untuk pelaksanaan pelacakan kontak/tracing bagi petugas penanganan COVID-19
- c. Menu Kegiatan BOK Puskesmas
- i. Pelacakan kontak dan pemantauan harian selama karantina dan/atau isolasi oleh tracer dan/atau petugas Puskesmas
 - ii. Biaya komunikasi pelacakan kontak dan pemantauan
 - iii. Honor pengolah data kasus COVID-19 di Puskesmas
 - iv. Biaya komunikasi untuk pengolah data Puskesmas
 - v. Penyelidikan epidemiologi kasus COVID-19
 - vi. Pengiriman spesimen suspect dan kontak erat COVID-19 ke laboratorium kesehatan daerah atau laboratorium rujukan pemerintah di kabupaten/kota

Sementara itu, jumlah realisasi penyaluran Dana BOK untuk PC-PEN Tahun 2022 tidak dapat diketahui secara eksplisit karena penyalurannya tergabung dalam penyaluran Dana BOK Tahun 2022 secara keseluruhan, tanpa membedakan peruntukan dananya. Realisasi penyerapannya kemudian diketahui melalui penyampaian laporan penyerapan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, dengan membedakan peruntukan dananya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PC-PEN. Nilai alokasi dan penyerapan masih bisa bergerak sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 yaitu batas akhir penyampaian laporan BOK tahun anggaran sebelumnya.

2. Earmark Dana Desa

Penggunaan Dana Desa untuk penanganan Covid telah disalurkan sebesar Rp5.432.491.071.234 (99,86% dari target sebesar Rp5.440.000.000.000). Realisasi output pada *earmark* dana desa diberikan kepada 7,49 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nilai realisasi penyaluran tersebut merupakan nilai proyeksi yang diperoleh total nilai penyaluran Dana Desa TA 2022 dikali 8% ((Rp67.906.138.390.431,00 x 8%). Sedangkan untuk realisasi penggunaan, berdasarkan data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bersumber dari aplikasi Monev Dana Desa, realisasi earmark Dana Desa untuk dukungan penanganan pandemi COVID-19 pada 60.284 desa dari 74.960 desa adalah sebesar Rp3.571.921.258.596,00. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 14.676 desa (merupakan selisih dari total 74.960 desa dan 60.284 desa yang telah menyampaikan realisasi penggunaan) tidak menggunakan Dana Desa untuk dukungan pendanaan penanganan pandemi COVID-19 minimal 8% dari pagu Dana Desa sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.

3. Insentif Perpajakan Kesehatan

Pada tahun 2022, alokasi dan realisasi anggaran PC PEN dalam rangka penanganan Kesehatan yang dijalankan oleh BUN sebagai upaya yang intensif dalam pengendalian COVID-19 salah satunya ialah Subsidi Pajak PPN DTP Vaksin dan Non Vaksin. Realisasi atas subsidi PPN DTP Non Vaksin sebesar Rp1.670.949.922.818 atau 100% dari target sebesar Rp1.670.949.924.000 dan subsidi DTP Vaksin sebesar Rp48.560.075.000 atau 100% dari target sebesar Rp48.560.075.000. Capaian output atas insentif perpajakan kesehatan adalah 2 wajib pajak.

II. Perlindungan Masyarakat

Pemerintah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk tahun 2022, dengan asumsi masih ada covid 19 dan perlu antisipasi dari dampak negatif adanya pandemi. Pemerintah berupaya untuk melaksanakan program perlindungan masyarakat yang diharapkan mampu melindungi masyarakat dari dampak adanya pandemi covid 19. Pembatasan Sosial Berskala Besar memberikan dampak cukup baik dalam menekan penyebaran Covid-19. Di sisi lain, kebijakan ini cukup memukul pergerakan ekonomi masyarakat kelas menengah dan bawah. Pemerintah hadir diseluruh lapisan masyarakat. Perlindungan sosial yang dilakukan adalah dengan program Keluarga Harapan, pemberian logistik/pangan/Sembako, Bantuan sosial Jabodetabek dan non jabodetabek, perluasan kartu Pra Kerja, BLT Dana Desa. Melalui PEN perlindungan sosial, pemerintah menjaga kebutuhan pokok dan konsumsi masyarakat kelas menengah bawah. Program pada Perlindungan masyarakat yang dijalankan Bagian Anggaran BUN sebagai berikut:

1. Program Kartu Prakerja

Pertumbuhan ekonomi sudah mulai tampak di tahun 2022 selepas adanya pandemi Covid 19. Usaha mulai bergeliat dan masyarakat Indonesia sudah memulai kembali untuk dapat bekerja dan berwirausaha. Program Kartu Prakerja sebuah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil diharapkan mampu memberikan nilai lebih kepada masyarakat untuk

dapat kembali bekerja dan berusaha. Pemerintah berharap masyarakat Indonesia selalu meningkatkan kemampuannya dan program ini didesain sebagai sebuah produk dan dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta.

Program Kartu Pekerja dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 pada Satker Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.999.997.500.000 dan telah terealisasi 90,90% atau sebesar Rp16.362.629.363.174 yang terdiri atas belanja bruto Rp18.169.247.127.290 dikurangi pengembalian atas dana operasional Rp30.275.750 dan pencabutan serta pengembalian dari masing masing batch sebesar Rp1.806.587.488.366 sehingga pengembalian atas dana Program kartu pra kerja sebesar Rp1.806.617.764.116. Capaian *output* dari bagian anggaran ini adalah 4.984.790 yaitu 5.076.928 peserta dan terdapat pencabutan peserta sebanyak 92.138 peserta program Kartu Prakerja *Batch* 23 sampai dengan *Batch* 47.

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia, termasuk di desa. Prioritas pemanfaatan dana desa dalam tahun 2022 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa termasuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin di desa.

Bantuan Tunai Langsung diberikan kepada penduduk desa per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kategori (1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem; (2) kehilangan mata pencaharian; (3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; (4) keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN; (5) keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan; (6) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah disalurkan ke RKD sebesar Rp26.943.101.100.000 (99,06% dari target sebesar Rp27.200.000.000.000) dengan total salur sebanyak 7.485.706 KPM. Sedangkan realisasi penggunaan BLT Desa untuk penanganan kesehatan adalah sebesar Rp25.502.491.800.000 atau sebesar 94,65% dari penyaluran.

3. Diskon Listrik PEN

Dalam Rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bahwa pemerintah telah menganggarkan dana untuk Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero). Tahun 2022 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 114.758.426.726 untuk 0,24 terawatt hour (TWh) atas pembayaran tunggakan listrik tahun 2021.

4. Bantuan Beras PPKM Bulog

Belanja Cadangan Beras Pemerintah berupa Penyelesaian Tunggakan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (BB-PPKM) TA 2021 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan pagu dan realisasi sebesar Rp3.088.745.280.000 dengan capaian output berupa 288 juta kilogram.

III. Penguatan Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid 19 di Indonesia, selain berdampak terhadap kesehatan manusia, juga berdampak terhadap melambatnya laju perekonomian. Adanya pembatasan sosial memberi dampak pada aktivitas ekonomi Indonesia dengan menurunnya daya beli masyarakat. Pemerintah terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat adanya Pandemi Covid 19. Beberapa program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka penguatan pemulihan ekonomi, sebagai berikut:

1. **Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**
Dalam rangka Program PEN dialokasikan investasi klaster infrastruktur kepada BUMN sebesar Rp34.350.000.000.000 dan sampai dengan 31 Desember 2022 *Audited* telah terealisasi sebesar Rp34.350.000.000.000 atau 100%. Alokasi anggaran diberikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp3.000.000.000.000 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 dengan tujuan penggunaan Dana PMN untuk memperkuat permodalan dalam rangka restrukturisasi dan digunakan untuk modal kerja dan investasi jalan tol, dan PT Hutama Karya (Persero) Rp31.350.000.000.000 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022 dengan Tujuan Penggunaan Dana PMN untuk memperkuat permodalan sehingga dapat melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
2. **Investasi Pemerintah Lainnya Dalam Rangka Program PEN**
Realisasi investasi pemerintah lainnya dalam rangka Program PEN dialokasikan kepada Satker Kementerian BUMN sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.201.143.500.000 atau 100% dari pagu dana sebesar Rp1.201.143.500.000. Realisasi tersebut merupakan realisasi pembiayaan investasi Non Permanen PEN (IP PEN) dengan penerima investasi adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
3. **Jaminan Loss Limit UMKM melalui Badan Usaha Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Program PEN**
Realisasi Pembiayaan Kewajiban Penjaminan sampai dengan dengan 31 Desember 2022 *(Audited)* yang dialokasikan kepada KPA Satker DJPPR (EAS) adalah sebesar Rp1.130.863.000.000 atau 100% dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA. Realisasi tersebut terdiri dari anggaran untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebesar Rp316.863.000.000 dan sebesar Rp814.000.000.000 merupakan anggaran untuk Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
4. **Pengembalian sisa dana atas Pembiayaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah**
Pada tahun 2022 terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari pengembalian sisa dana atas Pembiayaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 *(Audited)* sebesar Rp2.311.496.745.459. Penerimaan pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah sebesar Rp2.311.496.745.459 terdiri dari pengembalian pokok pinjaman melalui mekanisme pemotongan DAU bulan Januari - Desember 2022 dan pengembalian atas dana yang tidak terserap di PT SMI, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengembalian atas dana yang tidak terserap di PT SMI selama Januari-Desember 2022 sebesar Rp1.825.829.758.333.
- b. Pengembalian atas pokok pinjaman PEN Daerah melalui mekanisme pemotongan DAU sebesar Rp485.666.987.126.

5. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (PEN)

Pagu Anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp231.594.584.000. Realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebesar Rp155.176.756.597 atau 67% dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah tersebut, Rp137.137.325.515 (760,21%) lebih besar dari realisasinya Tahun 2021 Rp18.039.431.082.

Capaian realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah yang rendah disebabkan oleh rendahnya pencairan dana pinjaman daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sampai dengan 31 Desember 2022, ada 30 pemerintah daerah yang melakukan pencairan dana pinjaman daerah dari 32 pemerintah daerah yang telah melakukan penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman daerah dalam rangka mendukung prgram PEN dengan PT SMI. Hal ini disebabkan karena terdapat pemerintah daerah yang melakukan penandatanganan di akhir tahun 2022 sehingga belum dapat memenuhi persyaratan pencairan dan diharapkan proses pencairan pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN tahun 2021 selesai dilaksanakan pada tahun 2022. Rincian realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah kuartal I-IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pemda	Jumlah Subsidi Bunga Pinjaman yang telah disalurkan				Total
	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III	Kuartal IV	
Prov. DKI Jakarta	26.385.411.840	26.081.382.356	24.870.693.585	23.366.833.573	100.704.321.354
Kab. Wajo	338.892.047	330.132.394	333.760.221	327.109.205	1.329.893.867
Kab. Serdang Bedagai	712.933.106	965.430.247	976.039.370	974.492.208	3.628.894.931
Prov. Sulawesi Barat	1.068.375.000	1.658.574.558	1.791.534.246	1.791.534.246	6.310.018.050
Prov. Sumatera Selatan	1.164.767.300	1.568.519.710	1.472.358.638	1.312.857.934	5.518.503.582
Kab. Tapanuli Utara	366.354.522	459.209.949	445.830.358	419.913.251	1.691.308.080
Kab. Lampung Tengah	827.394.599	978.623.312	950.110.038	894.878.032	3.651.005.981
Kab. Mamasa	158.313.750	160.072.792	231.489.884	513.162.832	1.063.039.258
Kab. Lumajang	604.886.740	738.424.765	917.327.577	817.953.422	3.078.592.504
Kab. Trenggalek	242.812.500	406.480.523	955.518.923	1.233.924.553	2.838.736.499
Kab. Lampung Barat	185.790.744	469.286.440	509.303.923	482.125.292	1.646.506.399
Kab. Situbondo	403.541.425	408.025.219	412.509.013	134.513.809	1.358.589.466
Kota Palangkaraya	179.562.500	217.470.139	581.956.827	663.684.230	1.642.673.696
Kota Lubuklinggau	276.551.254	812.073.513	820.997.397	820.997.397	2.730.619.561
Kab. Lampung Utara	137.842.955	633.441.881	801.820.724	801.820.726	2.374.926.286
Kota Subulussalam	40.792.500	176.767.500	363.420.167	602.626.108	1.183.606.275
Kab. Tanggamus	23.921.528	511.018.972	548.898.911	548.898.911	1.632.738.322
Kota Palembang	19.393.581	566.557.427	623.475.722	598.175.261	1.807.601.991

Pemda	Jumlah Subsidi Bunga Pinjaman yang telah disalurkan				Total
	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III	Kuartal IV	
Kab. Lombok Timur		216.472.569	529.411.640	689.918.820	1.435.803.029
Kota Mojokerto		142.792.232	221.144.893	522.106.984	886.044.109
Kab. Tabalong		157.558.333	408.356.666	564.886.803	1.130.801.802
Kab. Luwu Utara		257.655.246	359.155.797	739.846.139	1.356.657.182
Kota Padang		50.818.953	153.286.556	267.554.203	471.659.712
Kota Bandar Lampung		114.269.271	852.795.375	897.724.781	1.864.789.427
Kab. Morowali Utara		79.138.889	330.944.444	698.017.541	1.108.100.874
Kab. Gowa		73.980.113	378.120.576	876.000.940	1.328.101.629
Kab. Lampung Selatan		1.618.750	148.925.000	368.658.784	519.202.534
Kab. Bone Bolango			63.131.250	281.006.037	344.137.287
Kab. Ponorogo			22.302.777	481.607.911	503.910.688
Kota Solok				35.972.222	35.972.222
	33.137.537.891	38.235.796.053	41.074.620.498	42.728.802.155	155.176.756.597

6. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program PEN

Pagu Anggaran Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.494.035.076.000. Realisasi Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan sebesar Rp2.348.872.681.379 atau 94,18% dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan tersebut, Rp916.913.702.901 (28,08%) lebih kecil dari realisasinya Tahun 2021 Rp3.265.786.384.280.

Realisasi pembayaran belanja subsidi tersebut merupakan realisasi atas tagihan Imbal Jasa Penjaminan untuk periode Januari s.d. November 2022 sebesar Rp2.233.941.029.296 dan tagihan Imbal Jasa Penjaminan Desember 2021 sebesar Rp114.931.652.083. Realisasi Belanja Subsidi IJP sebagai berikut :

Akun	URAIAN	Jumlah (Rupiah)	
		2022	2021
554118	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	2.348.872.681.379	3.265.786.384.280
	Belanja Subsidi IJP	2.348.872.681.379	3.265.786.384.280

Rincian Realisasi Belanja Subsidi IJP Tahun 2022 *Audited*:

No	URAIAN	Realisasi (Rupiah)
1	Belanja Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit	195.558.342.584
2	Belanja Subsidi IJP BUMN	10.015.807.173
3	Belanja Subsidi IJP Pelaku Usaha UMKM	2.143.298.531.622
	Total Belanja Subsidi IJP	2.348.872.681.379

Realisasi Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 yang belum optimal disebabkan beberapa hal antara lain :

- Kondisi ekonomi yang masih tidak pasti diakibatkan masih belum optimalnya penanganan pandemi covid-19, sehingga menyebabkan Bank Penyalur masih berhati-hati dalam memberikan

pinjaman kepada UMKM dan Pelaku Usaha Korporasi. Selain itu, dampak dari pandemi covid 19 yang menyebabkan rendahnya sisi *demand* mengakibatkan banyak pelaku usaha belum berminat untuk melakukan ekspansi usaha.

- Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah bersama Pihak Penjamin telah beberapa kali melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sosialisasi melalui media daring (webinar) dengan mengundang pihak-pihak terkait lainnya.

7. Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pada 31 Desember 2022, Deputi Usaha Mikro menerima alokasi anggaran subsidi sebesar Rp23.453.708.089.000 dan mengalami revisi DIPA pagu menjadi Rp23.113.280.536.000. Realisasi belanja subsidi per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.113.047.044.984 atau 100% dari pagu anggarannya.

Rincian alokasi pagu dan realisasi sebagai berikut :

- Pagu Anggaran Belanja Subsidi IJP KUR sebesar Rp340.427.553.000 terdapat realisasi belanja subsidi IJP KUR sebesar Rp0 atau 0% dari pagu anggaran. Sesuai dengan surat Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur BPKP Nomor : PE.04.01/S-605/D403/1/2022 tanggal 15 Desember 2022, bahwa BPKP belum dapat melakukan audit IJP KUR dikarenakan masih ada data yang harus dilengkapi oleh Perusahaan Penjamin KUR.
- Pagu Anggaran Belanja Subsidi bunga/subsidi marjin KUR sebesar Rp23.100.000.000.000 terdapat realisasi belanja subsidi bunga/subsidi marjin KUR sebesar Rp23.099.905.297.058 atau 100% dari pagu anggaran.
- Pagu Anggaran Belanja Tunggalan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR dalam masa covid-19 tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp13.280.536.000 terdapat realisasi sebesar Rp13.141.747.926 atau 98,95% dari pagu anggaran.

Pembayaran subsidi IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp23.113.047.044.984 terdiri dari pembayaran atas subsidi bunga/subsidi marjin KUR serta tunggalan subsidi bunga/subsidi marjin KUR dalam masa covid-19 tahun 2020 yang merupakan beban periode tahun sebelumnya sebesar Rp4.041.720.655.957 dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang merupakan beban tahun berjalan sebesar Rp19.071.326.389.027.

Pada Tahun 2022 pembayaran subsidi IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR direalisasikan kepada 46 Penjamin dan Penyalur dengan target 45 Penjamin dan Penyalur KUR atau sebesar 102,22% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Realisasi IJP KUR di salurkan kepada 0 Perusahaan Penjamin dari target capaian output sebanyak 2 Perusahaan Penjamin atau 0%.
- b. Realisasi Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR Reguler disalurkan kepada 46 Penyalur KUR dari target capaian output sebanyak 43 Penyalur KUR atau 106,98%.

8. Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat adanya Pandemi COVID 19, pemerintah berupaya untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak dengan memberikan insentif perpajakan di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak BM Kendaraan Bermotor dan Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah/DTP. Fasilitas PPN DTP ini diberikan kepada pihak tertentu yang

terdiri dari instansi Pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang terlibat dengan penanggulangan Covid-19. Tidak hanya fasilitas PPN, fasilitas pembebasan PPh juga diberikan kepada orang pribadi dan badan dalam negeri, serta Bentuk Usaha Tetap yang menerima imbalan atas jasa yang diberikan kepada pihak tertentu terkait penanganan virus Covid-19. Realisasi dan capaian output atas Program PEN Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah tahun 2022 *Audited* sebagai berikut:

Uraian	BA BUN	Alokasi Anggaran	Realisasi	Rincian Output
Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)				
a. PPh DTP Final P3-TGAI	999.07	209.540.234.000	209.537.893.632	100% 1 Wajib Pajak
b. PPh DTP Final UMKM	999.07	177.672.270.000	177.672.269.278	100% 3 Wajib Pajak
c. PPh DTP Pasal 21	999.07	2.108.854.515.000	2.108.854.514.191	100% 3 Wajib Pajak
d. PPN DTP Kertas Koran	999.07	413.766.000	413.765.076	100% 1 Wajib Pajak
e. PPN DTP Sewa Outlet	999.07	14.796.112.000	14.796.111.590	100% 1 Wajib Pajak
f. PPN Rumah Tapak dan Rumah Susun	999.07	1.524.165.754.000	1.524.165.753.275	100% 1 Wajib Pajak
g. PPn BM Kendaraan Bermotor	999.07	1.111.299.639.000	1.111.299.638.016	100% 1 Wajib Pajak
TOTAL		5.146.742.290.000	5.146.739.945.058	100% 11 Wajib Pajak

9. Pengelolaan Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik dalam rangka PEN

Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 yang terdapat pada Direktorat PNBPD SDA KND selaku satker Penyalur Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik dalam rangka Pengelolaan Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik dalam rangka PEN dengan pagu Rp18.823.102.000 dan realisasi Rp18.823.101.252 (100%). Realisasi ini merupakan pembayaran tunggakan kurang bayar Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik dalam rangka PEN Tahun 2020 dan capaian output berupa dokumen penyelesaian tagihan listrik Tahun 2020.

10. Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit

Realisasi pembayaran pengelolaan dukungan *loss limit* tahun 2022 sebesar Rp1.463.345.000 dari alokasi DIPA TA 2022 sebesar Rp1.463.345.000 merupakan pembayaran kepada PT RIU sebagai kompensasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dukungan *loss limit* atas tagihan periode bulan April, Agustus, dan Desember 2022 dengan capaian Rincian Output adalah 100%.

Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan memutuskan program penjaminan PEN dilanjutkan dengan beberapa perubahan kebijakan dibandingkan dengan program generasi sebelumnya. PT RIU mendapatkan penugasan tambahan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan tarif IJP program Penjaminan PEN Generasi 2 baik untuk pelaku usaha Korporasi maupun UMKM.

Rincian capaian output atas kegiatan ini adalah (1) Laporan Loss Limit Bulan Januari s.d. Desember 2022 (2) Proyeksi pembayaran klaim sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan (Januari s.d. Desember 2022) (3) Laporan pelaksanaan kegiatan alih pengetahuan (Transfer Knowledge) I & II (4) Kertas kerja analisa besaran tarif IJP PEN Gen 2.

11. DAK Fisik untuk PC PEN

Realisasi DAK Fisik untuk PC-PEN yang telah salur sebesar Rp12.085.486.657.682 atau 89,84% dari pagu sebesar Rp13.452.376.975.000 dengan penyerapan sebesar Rp 10.696.068.630.840 atau 79,51% dari pagu per 31 Desember 2022 dan realisasi output atas DAK Fisik untuk PEN berupa persentase atas penyaluran dana DAK Fisik PEN. Berikut tabel realisasi dan capaian output DAK Fisik PEN tahun 2022 *Audited*.

Uraian	BA BUN	Pagu	Realisasi	Rincian Output	Penyerapan	Presentase Serap
DAK Fisik untuk PC-PEN						
Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah	999.05	2.436.207.023.000	2.105.070.820.269	86,41%	1.939.130.696.276	79,60%
a. Industri Kecil dan Menengah	999.05	753.233.579.000	644.875.402.963	85,61%	595.329.414.877	79,04%
b. Jalan	999.05	794.600.662.000	735.006.615.489	92,50%	682.465.164.864	85,89%
c. Lingkungan Hidup	999.05	171.167.800.000	151.769.891.749	88,67%	134.678.157.710	78,68%
d. Pariwisata	999.05	431.881.642.000	311.634.178.252	72,16%	275.063.719.050	63,69%
e. Perdagangan	999.05	150.000.000.000	148.565.499.439	99,04%	144.587.146.730	96,39%
f. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	999.05	135.323.340.000	113.219.232.377	83,67%	107.007.093.044	79,08%
Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	999.05	8.114.596.549.000	7.247.450.325.837	89,31%	6.545.862.536.842	80,67%
a. Irigasi	999.05	1.500.000.000.000	1.271.036.217.158	84,74%	1.150.778.947.329	76,72%
b. Jalan	999.05	2.700.880.000.000	2.505.948.635.657	92,78%	2.248.798.136.861	83,26%
c. Kehutanan	999.05	350.000.000.000	313.126.608.906	89,46%	280.023.159.991	80,01%
d. Kelautan dan Perikanan	999.05	1.134.884.349.000	1.006.193.999.677	88,66%	907.742.613.658	79,99%
e. Lingkungan Hidup	999.05	178.832.200.000	156.731.428.595	87,64%	121.608.281.530	68,00%
f. Perdagangan	999.05	50.000.000.000	-	0,00%	-	0,00%
g. Pertanian	999.05	2.200.000.000.000	1.994.413.435.844	90,66%	1.836.911.397.473	83,50%
Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	999.05	2.901.573.403.000	2.732.965.511.576	94,19%	2.211.075.397.721	76,20%
a. Jalan	999.05	1.370.876.064.000	1.330.908.584.107	97,08%	1.064.041.062.897	77,62%
b. Transportasi Laut/Perairan	999.05	530.697.339.000	463.161.480.375	87,27%	394.538.147.527	74,34%
c. Transportasi Perdesaan	999.05	1.000.000.000.000	938.895.447.094	93,89%	752.496.187.298	75,25%
TOTAL		13.452.376.975.000	12.085.486.657.682	89,84%	10.696.068.630.840	79,51%

B. Capaian Output Belanja BUN

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa :

a. *Pasal 9 huruf (g):*

Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

b. *Pasal 30 ayat (2):*

Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, termasuk kementerian negara/lembaga.

Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai entitas pelaporan hakikatnya tidak menyusun laporan kinerja sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dalam rangka pelaksanaan APBN, namun pada entitas BUN terdapat Belanja yang pada prinsipnya dapat menghasilkan *out put* dari belanja tersebut walaupun pada beberapa belanja tidak dapat diukur secara ideal seperti pada Kementerian/Lembaga yang menghasilkan *out put* berupa barang dan jasa. Pada entitas BUN beberapa belanja diukur pada target realisasi saja, misalnya belanja bunga utang, belanja hibah dan belanja transfer ke daerah. Beberapa volume keluarannya juga belum ideal misalnya layanan, dokumen dan laporan.

Capaian *output* belanja BUN yang diungkapkan pada Catatan Penting Lainnya LRA ini diambil dari Aplikasi SMART BUN. Beberapa volume keluaran disesuaikan/diberi penjelasan sesuai dengan *output*-riilnya. Capaian *output* Belanja BUN pada seluruh entitas pelaporan pada masing-masing Bagian Anggaran BUN (BA BUN) dapat dilihat di **Lampiran LRA 1** (halaman LB12).

C. Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08

Berdasarkan Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya, dari total anggaran sebesar Rp231.129.082.887.000, telah dilakukan pergeseran anggaran dari anggaran belanja lain ke UAP BUN lain melalui mekanisme SPP BA BUN sebesar Rp 1.797.808.856.000 dan ke Kementerian/Lembaga melalui mekanisme SP SABA sebesar Rp44.977.830.334.500. Selanjutnya, berdasarkan Perpres 98/2022 tentang Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, dari total anggaran sebesar Rp511.534.408.363.000, telah dilakukan pergeseran anggaran dari anggaran belanja lain ke UAP BUN lain melalui mekanisme SPP BA BUN sebesar Rp6.217.236.996.000 dan ke Kementerian/Lembaga melalui mekanisme SP SABA sebesar Rp71.921.482.423.000. Atas pergeseran anggaran melalui SP SABA tersebut, terdapat pengembalian anggaran dari Kementerian/Lembaga ke BA BUN sebesar Rp5.450.302.368.000. Rincian dokumen SP SABA dan SPP BA BUN 999.08 TA 2022 dapat dilihat di Lampiran LB13.

D. Kebijakan DAU untuk Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021

Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi dan penebalan PPKM di daerah pada tahun 2021, pemerintah mengambil kebijakan perlunya dukungan penanganan Covid-19 dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan vaksinator lainnya yang ditunjuk Pemerintah yaitu Badan Intelijen Negara (BIN). Pendanaan atas dukungan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) oleh Kementerian/Lembaga nonkementerian tersebut menggunakan dana yang bersumber dari APBN yang selanjutnya wajib diganti oleh pemerintah daerah melalui pemotongan penyaluran DAU/DBH. Kebijakan tersebut diatur melalui PMK Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya yang telah diubah terakhir dengan PMK 118/PMK.07/2022. Berikut Realiasi Anggaran Intercept DAU/DBH (per 31 Maret 2023).

Dalam Miliar Rp

Kementerian/ Lembaga	Laporan Realisasi TNI, POLRI, BKKBN dan BIN			Realisasi yang Sudah Dipotongkan ke DAU/DBH			Realisasi yang Perlu Diperbaiki Lapornya		
	Vaksinasi	Dukungan Operasional Pelaksanaan Vaksinasi dan PPKM	Total	Vaksinasi	Dukungan Operasional Pelaksanaan Vaksinasi dan PPKM	Total	Vaksinasi	Dukungan Operasional Pelaksanaan Vaksinasi dan PPKM	Total
TNI	566,38	785,20	1.351,58	382,07	-	382,07	184,30	785,20	969,50
POLRI	517,65	47,76	565,40	329,93	-	329,93	187,71	47,76	235,47
BKKBN	42,47	-	42,47	42,47	-	42,47	-	-	-
BIN	127,05	-	127,05	-	-	-	127,05	-	127,05
Total	1.253,54	832,96	2.086,49	754,47	-	754,47	499,06	832,96	1.332,02

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, jumlah realisasi anggaran pada laporan dari TNI/Polri/BKKBN/BIN adalah sebesar Rp2.086.494.361.408 yang terdiri dari kegiatan vaksinasi sebesar Rp1.253.539.357.408 dan kegiatan dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan PPKM sebesar Rp832.955.004.000. Dimana pemotongan penyaluran DAU/DBH sebesar Rp754.474.460.000 sudah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Pemotongan penyaluran DAU/DBH tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KM.7/2021, KMK Nomor 34/KM.7/2021, dan KMK Nomor 39/KM.7/2022. Adapun realisasi anggaran kegiatan vaksinasi dan operasional pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan PPKM yang belum dipotongkan atas penyaluran DAU/DBH adalah sebesar Rp1.332.019.901.408 yang terdiri dari kegiatan vaksinasi sebesar Rp499.064.897.408 dan kegiatan dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan PPKM sebesar Rp832.955.004.000. Realisasi anggaran yang belum ditindaklanjuti dengan pemotongan penyaluran DAU/DBH per daerah melalui KMK pemotongan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai laporan realisasi anggaran per daerah yang terkini dari Kementerian/Lembaga nonkementerian

E. Penggunaan Sisa DID dan Sisa DID Tambahan Tahun 2020 – Bidang Kesehatan

Sesuai dengan PMK Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, apabila pada TA 2022 terdapat sisa DID TA 2020, sisa DID Tambahan TA 2020 dan sisa DID TA 2021, Pemda diminta untuk menyampaikan laporan rencana penggunaan dan realisasi dari masing-masing sisa DID tersebut. Sisa DID dapat digunakan untuk bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan; bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan; penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau perlindungan sosial.

Terkait penggunaan sisa DID TA 2020 dan sisa DID Tambahan TA 2020 untuk bidang kesehatan di tahun 2022, sampai dengan 26 Maret 2023 terdapat 46 daerah yang menyampaikan rencana penggunaan sisa DID TA 2020 dan sisa DID Tambahan TA 2020 sebesar Rp78,41 miliar, 44 daerah telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan sebesar Rp72,05 milyar sehingga masih terdapat 2 daerah belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan.

Untuk penggunaan sisa DID TA 2021 untuk bidang kesehatan di tahun 2022, sampai dengan 26 Maret 2023, terdapat 154 Daerah yang menyampaikan rencana penggunaan sisa DID TA 2021 sebesar Rp498,01 miliar, 126 daerah telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan sisa DID Tahun 2020 sebesar Rp344,25 miliar, dan 28 Daerah belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan.

F. Dukungan APBD Untuk PCPEN

Dalam rangka penanganan Covid-19 pada tahun 2022 pemerintah tidak lagi menetapkan kebijakan earmarking DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 seperti yang sudah dilakukan pada tahun 2021. Pemerintah daerah secara mandiri sesuai ketentuan pengelolaan APBD mengalokasikan pendanaan penanganan Covid-19 sesuai kebutuhan di daerah dengan memperhatikan perkembangan status Covid-19 di daerah.

Berdasarkan data APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah, pemerintah melakukan pemantauan perkembangan penanganan Covid-19 dan dampaknya di daerah yaitu dalam bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial melalui pelaksanaan tagging belanja dalam APBD. Untuk data realisasi bantuan sosial, selain menggunakan data tagging belanja dalam APBD, juga bersumber dari data realisasi per 31 Desember untuk bantuan sosial dari pemda sebagai pelaksanaan dari PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022.

Rincian dukungan APBD untuk bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan Bantuan Sosial dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Dukungan APBD

No	Bidang	Realisasi
1	Kesehatan	13.561.154.162.134
2	Pemberdayaan Ekonomi	5.433.059.381.517
3	Bantuan Sosial	5.163.219.196.683
	a. Tanggung APBD	2.224.206.503.471
	b. Belanja Wajib 2% DTU	2.939.012.693.212

Berdasarkan laporan tersebut, total realisasi dukungan APBD di bidang kesehatan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13,56 triliun. Sementara untuk bidang pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5,43 triliun dan untuk bantuan sosial sebesar Rp5,16 triliun.

G. Program Percepatan Pencegahan Stunting

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, terdapat 3 (tiga) jenis TKDD yang diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, yaitu (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan (3) Dana Desa. Secara khusus untuk Tahun Anggaran 2021, Pemerintah menerbitkan peraturan Menteri keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. akibat dampak pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonom Nasional berpengaruh pada perubahan pagu alokasi cadangan DAK Fisik.

Dukungan DAK Fisik untuk pencegahan stunting pada Tahun Anggaran 2022 terdapat pada Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi. Selain itu, program penanggulangan stunting juga diwujudkan dengan konvergensi sumber-sumber pendanaan tersebut pada lokasi prioritasnya. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, disebutkan bahwa terdapat 514 (lima ratus empat belas) provinsi/kabupaten/kota yang menjadi Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tematik Penurunan Stunting

DAK Fisik berdasarkan PMK Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas DAK Fisik untuk Bidang Kesehatan, Bidang Air Minum Bidang Sanitasi, dan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. berikut gambaran umum atas penyaluran DAK Fisik Tematik Penurunan Stunting sebagai berikut :

dalam miliar rupiah

No.	Program/Kegiatan/Output	Jumlah Kab/Kota	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Penyaluran	%
1	DAK Fisik Bidang Air Minum (Stunting)	470	3.000,0	3.000,0	2.729,1	90,97%
2	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB (Stunting)	514	3.975,1	3.975,1	3.166,6	79,66%
3	DAK Fisik Bidang Sanitasi (Stunting)	477	2.000,0	2.000,0	1.953,4	97,67%
Grand Total		541	8.975,1	8.975,1	7.849,1	87,45%

1. DAK Fisik Bidang Air Minum

DAK Fisik Bidang Air Minum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau TPB Goal ke 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan SPM serta untuk mendukung program prioritas nasional, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah. Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum berupa pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA), pembangunan sumur dalam terlindungi, uprating instalasi pengelolaan air, dan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR). Untuk Tahun 2022, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Air Minum yang mendukung penanganan stunting sudah mencapai 90,97% atau dari pagu Rp3.000 Milyar telah tersalur Rp2.729,06 Milyar dengan 462 daerah lokasi yang disalurkan.

2. DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menu-menu kegiatan dalam DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang mendukung penurunan stunting antara lain BKB Kit, Kit Siap Nikah, Sarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit PONEK, Sarana dan Alat Kesehatan Puskesmas PONEK, dan Alat Antropometri.

Tahun 2022, data penyaluran untuk DAK Fisik Kesehatan dan Keluarga Berencana sudah mencapai 79,66% atau dari pagu Rp3.975,12 Milyar telah tersalur Rp3.166,64 Milyar dengan 513 daerah lokasi yang disalurkan. Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana lebih rendah dikarenakan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KM.7/2022 tentang Penghentian Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Menu Penyediaan Makanan Tambahan (Pabrikan) Tahun Anggaran 2022 tanggal 4 Agustus 2022, sehingga terdapat Rencana Kegiatan senilai Rp 383,1 Milyar yang tidak dapat diteruskan proses penyalurannya, kecuali untuk Provinsi Aceh yang disalurkan sebesar Rp4 Milyar.

3. DAK Fisik Bidang Sanitasi

DAK Fisik Bidang Sanitasi adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target TPB bidang sanitasi serta pemenuhan SPM air limbah melalui dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Sanitasi dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan

instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), penambahan pipa pengumpul dan sambungan rumah (SR), peningkatan instalasi pengolahan lumpur tinja, dan pembangunan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R).

Untuk Tahun 2022, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Sanitasi yang mendukung penanganan stunting telah mencapai 97,67% atau dari pagu Rp2.000 Milyar telah tersalur Rp1.953,42 Milyar dengan 473 daerah lokasi yang disalurkan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dukungan Percepatan Pencegahan Stunting melalui DAK Nonfisik Tahun 2022 meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Alokasi Untuk Dukungan Stunting Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya Daerah lokus stunting dari 360 lokus menjadi 509 lokus. Secara umum total penyaluran untuk ketiga DAK Nonfisik terkait stunting adalah sebesar 94,84%. Gambaran tentang alokasi dan realisasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Rekap Alokasi dan Realisasi Penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022
dalam miliar rupiah

No	Jenis Dana	Jumlah Daerah	Anggaran Semula	Anggaran setelah Revisi	Realisasi Penyaluran	%
1	Biaya Operasional Kesehatan (BOK) - Stunting	509	239	239	231,32	96,79
2	Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) - Stunting	509	1399,39	1399,39	1339,47	95,72
3	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) - Stunting	459	119,37	119,37	96,31	80,68
Total		509	1757,76	1757,76	1667,1	94,84

1. DAK Nonfisik Stunting-BOK

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah. BOK adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai SPM menuju target SDGs atau TPB. Kegiatan yang didanai BOK meliputi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu (1) upaya kesehatan, (2) penyelenggaraan manajemen kesehatan, serta (3) upaya pendukung/penunjang untuk keberhasilannya. Upaya kesehatan wajib yang dibiayai BOK diantaranya upaya kesehatan promotif dan preventif yang meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, perbaikan gizi, promosi kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan upaya kesehatan lainnya. Terkait kegiatan penunjang, BOK juga bisa membiayai kegiatan diantaranya meliputi kegiatan Poskesdes dan Posyandu, pengelolaan administrasi BOK, rapat koordinasi lintas sektor, pendampingan musyawarah masyarakat desa, orientasi kader kesehatan, penyuluhan kesehatan dan studi banding antar Puskesmas. Tahun 2022, penyaluran BOK sudah mencapai 96,79% artinya hampir seluruh daerah sudah mendapatkan penyaluran BOK Stunting, dengan penyerapan per 28 Desember 2022 sebesar Rp73,38M.

2. DAK Nonfisik Stunting -BOKB

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Tujuan dari BOKB adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pemerataan pelayanan KB dan Kespro; mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 HPK.

Sampai akhir 2022, sudah tersalurkan sebesar 95,72% alokasi anggaran ke Kabupaten/Kota untuk DAK Non Fisik Stunting-BOKB dengan penyerapan per 28 Desember 2022 yakni sebesar 313,65 Milyar.

3. DAK Nonfisik – DKPP

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) adalah dana yang ditujukan untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program pekarangan pangan lestari. Dukungan program percepatan pencegahan stunting melalui DKPP ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari yang dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta untuk jangka panjang serta dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Pada tahun 2022, DKPP telah disalurkan sebesar 80,68% dari alokasi DKPP 2022 terkait stunting sebesar Rp119,37 Milyar dengan penyerapan per 28 Desember 2022 sebesar 52,46 Milyar.

H. Kebijakan DAU untuk Penanganan Dampak dari Kenaikan Inflasi

Dalam rangka penanganan dampak dari kenaikan inflasi, Menteri Keuangan menetapkan landasan hukum bagi pemda untuk menggunakan 2% DTU untuk penambahan belanja perlindungan sosial melalui PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Sesuai PMK tersebut pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2 persen dari DTU. Belanja wajib tersebut digunakan untuk: (1) pemberian bantuan sosial; (2) penciptaan lapangan kerja; (3) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah; dan (4) perlindungan sosial lainnya.

Anggaran dan realisasi belanja wajib perlindungan sosial yang dilaporkan Pemda per 31 Desember 2022 dengan rincian pada tabel berikut:

No	Komponen	Anggaran	Realisasi	%
1	Bantuan Sosial	1.793.958.310.876	1.406.128.842.076	78,38%
2	Penciptaan Lapangan Kerja	766.474.502.418	672.547.262.336	87,75%
3	Subsidi Sektor Transportasi	318.803.964.651	222.043.537.930	69,65%
4	Perlindungan Sosial Lainnya	829.241.193.439	638.293.050.871	76,97%
Total		3.708.477.971.383	2.939.012.693.212	79,25%

Belanja wajib tersebut dilaporkan kepada Kementerian Keuangan dan dijadikan sebagai syarat tambahan penyaluran DAU mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022. Berdasarkan laporan tersebut, total anggaran dari belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp3,71 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,94 triliun atau 79,25%.

I. Perubahan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengatur tentang penyaluran Dana Desa dan PMK Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa terdapat perubahan kebijakan sebagai berikut:

- Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap untuk Desa Reguler dan 2 (dua) Tahap untuk Desa Mandiri.
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dilakukan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dan diajukan secara triwulanan.
- Pagu Dana Desa per Desa menjadi Lampiran dalam PMK, sehingga terdapat penyederhanaan persyaratan penyaluran Dana Desa dengan tidak adanya Peraturan Kepala Daerah untuk penetapan alokasi Dana Desa per Desa.
- Relaksasi perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dan dan Tahap II.
- Penyaluran Dana Desa Realokasi sebesar selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dianggarkan/dialurkan BLT Desa sebesar 40%.

J. Penyetoran Pengembalian Transfer Satker DAK Fisik dan Dana Desa

Telah dilakukan penyetoran pengembalian belanja DAK Fisik, dan Dana BOS Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp48.108.908.345, yang terdiri atas pengembalian Transfer DAK Fisik belanja atas lebih salur DAK Fisik sebesar Rp5.130.110,-, DAK Nonfisik Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp48.103.778.235.

K. Perubahan Penyaluran Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan

Pada tahun 2022, terdapat perubahan penyaluran Dana BOS yang semula hanya disalurkan oleh 34 KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menjadi disalurkan oleh 173 KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pada tahun 2022, terdapat perubahan penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) yang semula dari RKUN ke rekening pemerintah provinsi menjadi dari RKUN ke rekening penerima/ satuan pendidikan. Perubahan mekanisme tersebut menyebabkan sisa Dana. BOP PAUD dan BOP Kesetaraan sampai dengan 31 Desember 2021 masih terdapat pada rekening

pemerintah daerah Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan mengatur dalam KMK Nomor 10/KM.7/2022, KMK Nomor 30/KM.7/2022, dan KMK Nomor 35/KM.7/2022 bahwa sisa Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan di RKUD sampai dengan TA 2021 yang telah dicatat sebagai piutang pada LK BUN Transfer ke Daerah Tahun 2021 Audited diselesaikan dengan rincian sebagai berikut.

1. Sisa dana BOS 2011 telah dicatat pada LKTD Tahun 2021 sebesar Rp199.156.051.399,00. Sesuai dengan Kepdirjen Nomor 20/PK/2022, sisa dana BOS 2011 sebesar Rp199.156.051.399. Atas sisa dana tersebut, sebanyak 125 pemda telah menyetorkan sisa dana BOS 2011 ke Kas Negara sebesar Rp40.194.367.189. (jumlah total, termasuk yang tidak diakui sebagai piutang pada LKTD 2021 Audited). Sesuai dengan PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik dijelaskan bahwa pemda yang belum menyelesaikan kewajiban pengembalian sisa dana BOS TA 2011 dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH sebesar sisa dana BOS TA 2011 yang belum dikembalikan. Atas hal tersebut, telah diselesaikan melalui pemotongan DAU bulan Oktober sesuai KMK Nomor 35/KM.7/2022 sebesar Rp145.331.631.982,00 pada 213 pemda, dan pemotongan DBH Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp21.376.012.635 pada 1 pemda. Sisa dana BOS 2011 yang telah ditetapkan melalui Kepdirjen yang belum selesai melalui pemotongan DAU adalah sebesar Rp240.759 dengan rincian sebesar Rp230.769,00 pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebesar Rp9.990,00 pada Provinsi Sulawesi Utara.
2. Sisa Dana BOS 2019 sebesar Rp303.539.975.645,00 telah diselesaikan melalui pemotongan DAU bulan Mei sesuai KMK Nomor 10/KM.7/2022 sebesar Rp249.194.692.624,00 pada 25 pemda, pemotongan DAU bulan Oktober sesuai KMK Nomor 35/KM.7/2022 sebesar Rp17.192.335.526,00 pada 6 pemda, dan pemotongan DBH Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp37.152.947.495,00 pada 1 pemda.
3. Sisa dana BOP PAUD sebesar Rp486.268.210.582,00 diselesaikan melalui pemotongan DAU bulan Mei sesuai KMK Nomor 10/KM.7/2022 sebesar Rp365.515.185.682,00 pada 399 pemda, pemotongan DAU bulan Oktober sesuai KMK Nomor 35/KM.7/2022 sebesar Rp78.711.783.596,00 pada 59 pemda, dan pemotongan DBH Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp42.041.241.304,00 pada 1 pemda.
4. Sisa dana BOP Kesetaraan sebesar Rp167.019.304.513,00 diselesaikan melalui pemotongan DAU bulan Mei sesuai KMK Nomor 10/KM.7/2022 sebesar Rp126.662.890.487,00 pada 345 pemda, pemotongan DAU bulan Oktober sesuai KMK Nomor 35/KM.7/2022 sebesar Rp34.884.617.909,00 pada 81 pemda, dan pemotongan DBH Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp5.471.796.117,00 pada 1 pemda.

L. Pelaksanaan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa

Pada tahun anggaran 2021 Audited Pada tahun anggaran 2021 Audited telah dicatat sisa Dana Desa hasil Rekonsiliasi Sisa Dana Desa pada RKUD dan RKD tahun 2015 s.d 2019 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi antara KPPN dan Pemerintah Daerah sebesar Rp108.143.992.667 dengan rincian:

- a. Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKUD sebesar Rp87.869.747.536 pada 26 Pemda akan diperhitungkan dalam pemotongan penyaluran DAU/DBH Tahun 2022.
- b. Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKD sebesar Rp20.274.245.131 akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dan/atau Tahap III Tahun 2022.

Rincian Sisa Dana Desa di RKUD per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Sisa dana desa di RKUD telah selesai dilakukan pemotongan melalui pemotongan DAU/DBH sebesar Rp87.869.747.536,00, sehingga piutang ini telah tertagih seluruhnya.

- b. Sisa dana desa di RKD sebesar Rp20.274.245.131,00 telah dilakukan pemotongan sebesar Rp13.610.676.453,00 pada penyaluran dana desa TA 2022 tahap II dan tahap III, sehingga sisa dana desa di RKD yang masih menjadi Piutang TKDD lainnya adalah sebesar Rp6.663.568.678,00. 2022.

M. Penggunaan Sisa DID dan Sisa DID Tambahan Tahun 2020 – Bidang Kesehatan

Sesuai dengan PMK Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, apabila pada TA 2022 terdapat sisa DID TA 2020, sisa DID Tambahan TA 2020 dan sisa DID TA 2021, Pemda diminta untuk menyampaikan laporan rencana penggunaan dan realisasi dari masing-masing sisa DID tersebut. Sisa DID dapat digunakan untuk bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan; bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan; penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau perlindungan sosial.

Terkait penggunaan sisa DID Tambahan TA 2020 untuk bidang kesehatan, sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 191 Daerah yang menyampaikan rencana penggunaan sisa DID Tambahan TA 2020 sebesar Rp318,09 miliar, 123 Daerah telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan sisa DID Tambahan TA 2020 sebesar Rp172,64 miliar sehingga masih terdapat 59 Daerah yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan.

Untuk penggunaan sisa DID TA 2020 untuk bidang kesehatan, sampai dengan 31 Desember 2021, terdapat 247 Daerah yang menyampaikan rencana penggunaan sisa DID Tahun 2020, 157 daerah telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan sisa DID Tahun 2020 sebesar Rp192,12 miliar, dan 90 Daerah belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan.

Sedangkan untuk penggunaan Sisa DID TA 2020, sisa DID Tambahan TA 2020, dan sisa DID TA 2021 di tahun 2022 untuk bidang kesehatan, sampai dengan 4 Mei 2023, sebanyak 70 daerah telah menyampaikan rencana penggunaan sebesar Rp95,67 miliar, 67 daerah telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan sebesar Rp88,26 milyar, dan 3 daerah belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL

Ringkasan Laporan Perubahan SAL selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126
Penggunaan SAL	-	(143.966.330.873.078)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah Penggunaan SAL	337.779.006.818.346	244.152.750.458.048
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	130.558.467.051.951	96.658.876.443.878
Penyesuaian Pembukuan	11.648.084.260.735	(3.021.299.958.783)
Penyesuaian Lain-lain	(1.028.401.811.631)	(11.320.124.797)
Total Penyesuaian	10.619.682.449.104	(3.032.620.083.580)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	478.957.156.319.401	337.779.006.818.346

C.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran lebih Awal per 1 Januari 2022

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2022 adalah sebesar **Rp337.779.006.818.346** yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Fisik per 31 Desember 2021. Saldo Anggaran Lebih Fisik meliputi Kas BUN, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang sudah disahkan dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang sudah disahkan setelah memperhitungkan Utang PFK, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan penyesuaian karena selisih transaksi Kiriman Uang dan transito lainnya pada tahun 2021. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sebagai berikut:

Uraian	1 Januari 2022	1 Januari 2021
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Kas BUN	253.683.550.805.313	198.514.075.299.703
Kas di KPPN	721.442.531.795	3.545.188.057.685
Kas di Bendahara Pengeluaran	248.050.262.873	731.061.274.902
Kas pada BLU yang sudah disahkan	81.993.516.161.352	57.688.418.512.516
Kas Hibah Langsung K/L yg telah Disahkan	1.745.056.899.938	3.862.816.464.090
Saldo Anggaran Lebih Awal sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	338.391.616.661.271	264.341.559.608.896
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN	-	57.116.330.873.078
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(612.602.571.149)	(88.455.830.387)
Pengurang Fisik SAL		

Uraian	1 Januari 2022	1 Januari 2021
Utang kepada Pihak Ketiga Pengurang Fisik SAL	(156.183.292)	(300.825.129)
Selisih Kiriman Uang	150.229.276	(52.495.332)
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	-	-
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	-	-
Transito Lainnya	(1.317.760)	-
Penempatan Dana di Bank Umum	-	66.750.000.000.000
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(612.609.842.925)	123.777.521.722.230
Saldo Anggaran Lebih Awal	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126

Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Per 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021

C.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2022

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 8 PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih dinyatakan bahwa SAL digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi. Penggunaan SAL dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya.

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2022 tidak terdapat Penggunaan SAL.

C.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA sampai dengan 31 Desember 2022

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Pada LKBUN, tidak menggunakan nilai SiLPA/SiKPA yang tertera pada LRA LKBUN dikarenakan transaksi yang tertuang dalam LRA LKBUN hanya terbatas pada lingkup Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, tidak dapat mencerminkan keseluruhan realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN (BA BUN dan BA K/L). Pada LKBUN, nilai SiLPA/SiKPA tersebut tercermin pada akumulasi Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan pada LAK.

SiLPA pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp130.558.467.051.951** dan **Rp96.658.876.443.878**. SiLPA Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp33.899.590.608.073 atau naik 35,07% dari Tahun 2021. Kenaikan SiLPA tersebut tergambar pada kenaikan Arus Kas

Bersih Tahun 2022 dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi masing-masing sebesar Rp315.491.115.758.185 dan Rp36.684.625.151.793 walaupun terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp318.276.150.301.902 jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih pada Tahun 2021.

Adapun rincian SiLPA adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2022	TA 2021
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(220.433.644.891.532)	(535.924.760.649.717)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(347.174.022.486.045)	(383.858.647.637.838)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	698.166.134.429.528	1.016.442.284.731.433
SiLPA/(SiKPA)	130.558.467.051.951	96.658.876.443.878

Rincian SiLPA TA 2022 dan TA 2021

C.2.4. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.648.084.260.735 dan minus Rp3.021.299.958.783. Penyesuaian Pembukuan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.669.384.219.518 atau naik 485,53 % dari Tahun 2021.

Penyesuaian Pembukuan merupakan penyesuaian/koreksi tahun berjalan akibat koreksi SiLPA dan selisih kurs (*unrealized*), koreksi kas dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL.

Adapun rincian Penyesuaian Pembukuan adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2022	TA 2021
Koreksi SiLPA	9.137.971.841.987	(2.548.945.575.660)
Selisih Kurs Kas BUN (<i>Unrealized</i>)	3.676.340.697.318	116.426.281.222
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN	(87.732.477.966)	(26.506.042.189)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN	-	-
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah	(58.478.443.129)	455.474.439
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU	(1.098.251.792.777)	(572.556.286.009)
Koreksi Utang PFK	-	(61.420)
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	3.359.288.846	(2.047.117.540)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	74.875.146.456	11.873.368.374
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	11.648.084.260.735	(3.021.299.958.783)

Rincian Penyesuaian Pembukuan TA 2022 dan TA 2021

Penjelasan Penyesuaian Pembukuan sebesar Rp11.648.084.260.735 terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp 9.137.971.841.987 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp319.935.584.924 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp9.457.907.426.911. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan akun SiLPA (311212) melalui penerbitan SPM PP senilai minus Rp26.247.050.225 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL dengan akun 311911 senilai minus Rp293.688.534.699.
2. Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar Rp3.676.340.697.318 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp3.799.706.619.119 dan kerugian selisih kurs sebesar minus Rp123.365.921.801 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp87.732.477.966 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (refund) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.
4. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp58.478.443.129 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2022 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pemindahan saldo kas hibah akibat adanya likuidasi, pengesahan hibah luar negeri TAYL, pengesahan hibah TAYL dengan nilai neto sebesar Rp1.877.411.951, serta revaluasi saldo kas hibah sebesar minus Rp60.355.855.080.

Rincian koreksi Kas Hibah pada tahun 2022 terdapat pada KPPN sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Langsa (002)	(163.600.400)
2	KPPN Pangkal Pinang (015)	45.775.398
3	KPPN Jakarta II (019)	76.756.288
4	KPPN Makassar I (054)	385.418.078
5	KPPN Jakarta III (088)	(76.756.288)
6	KPPN Kutacane (105)	(30.223.354)
7	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	(58.715.812.851)
Jumlah Koreksi Kas Hibah		(58.478.443.129)

Rincian Koreksi Kas Hibah TA 2022

5. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp1.098.251.792.777 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2022, penyesuaian saldo Kas BLU akibat likuidasi, serta penyesuaian saldo kas akibat perubahan menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Berbadan Hukum).

Rincian koreksi Kas BLU pada tahun 2022 terdapat pada KPPN sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Medan I (004)	18.333.125.162
2	KPPN Padang (010)	(480.360.382.027)
3	KPPN Bukittinggi (011)	2.971.266.991
4	KPPN Palembang (014)	1.006.975.507
5	KPPN Bandar Lampung (017)	(1.006.975.507)
6	KPPN Jakarta I (018)	(16.702.566.437)
7	KPPN Jakarta II (019)	17.499.262.783
8	KPPN Bandung I (022)	45.479.416.950
9	KPPN Cirebon (024)	17.467.576.856
10	KPPN Yogyakarta (030)	(26.112.398.796)
11	KPPN Surabaya I (031)	17.531.963.586
12	KPPN Malang (032)	(819.639.010.898)
13	KPPN Samarinda (046)	(4.402.744.647)
14	KPPN Manado (049)	7.163.568.306
15	KPPN Gorontalo (050)	26.259.771.296
16	KPPN Makassar I (054)	26.509.358.098
17	KPPN Jakarta III (088)	69.750.000.000
Jumlah Koreksi Kas BLU		(1.098.251.792.777)

Rincian Koreksi Kas BLU TA 2022

Koreksi pada KPPN Padang (010) sebesar minus Rp480.360.382.027 merupakan penyesuaian saldo Kas dan Bank BLU satuan kerja Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang terkait dengan penetapan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebagaimana diatur di Perpres No.95 Tahun 2021 dan Perpres No.114 Tahun 2021.

Koreksi pada KPPN Malang (032) sebesar minus Rp819.639.010.898 merupakan penyesuaian saldo Kas BLU sehubungan dengan *update* status satuan kerja Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

Koreksi pada KPPN Samarinda (046) sebesar minus Rp4.402.744.647 merupakan reklasifikasi akun Kas BLU ke Aset Lain-lain BLU dikarenakan terdapat selisih kas pada Universitas Mulawarman.

Koreksi pada KPPN Palembang sebesar Rp1.006.975.507 merupakan

penyesuaian saldo kas BLU pada UIN Raden Fatah Palembang dari UIN Raden Inten Bandar Lampung.

6. Tidak terdapat Koreksi Utang PFK pada Tahun 2022.
7. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp3.359.288.846 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat adanya revaluasi, koreksi lainnya, dan penyesuaian selisih kurs pada Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam valuta asing. Rincian koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang dilakukan pada tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I (018)	(2.114.028.915)
2	KPPN Jakarta IV (133)	(477.696)
3	KPPN Jakarta V (139)	(3.334.807)
4	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	7.041.610
5	KPPN Jakarta VI (175)	(9.541.472)
6	KPPN Khusus Penerimaan (140)	854.800
7	Direktorat Pengelolaan Kas Negara (999)	5.478.775.326
Jumlah Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga		3.359.288.846

Rincian Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) TA 2022

8. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp74.875.146.456 merupakan penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN), karena adanya Revaluasi Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas sebesar Rp79.674.137.223 serta koreksi akuntansi/pembukuan lainnya sebesar minus Rp4.798.990.767. Rincian koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2022 terdapat pada KPPN sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I (018)	64.533.234.077
2	KPPN Jakarta II (019)	197.806.249
3	KPPN Manado (049)	24.379.000
4	KPPN Jakarta III (088)	5.537.995.654
5	KPPN Jakarta IV (133)	1.657.971.196
6	KPPN Jakarta V (139)	1.572.407.951
7	KPPN Jakarta VI (175)	1.233.593.483
8	KPPN Jakarta VII (182)	117.758.846
Jumlah Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran		74.875.146.456

Rincian Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022

C.2.5. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan Desember 2022 Penyesuaian Lain-lain pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar minus Rp1.028.401.811.631 dan minus Rp11.320.124.797. Penyesuaian Lain-lain Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.017.081.686.834 atau turun 8984,72 % dari Tahun 2021.

Penyesuaian lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Adapun rincian Penyesuaian Lain-lain adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2022	TA 2021
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL	(1.028.102.350.599)	(4.076.363.682)
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	(150.549.516)	(7.296.256.447)
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yg Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(148.911.516)	52.495.332
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	(1.028.401.811.631)	(11.320.124.797)

Rincian Penyesuaian Lain-lain TA 2022 dan TA 2021

1. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris bukan merupakan bagian fisik SAL, namun pada nilai catatan SAL (yang merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu ditambah dengan SiLPA tahun berjalan) masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening tersebut. Penyesuaian Transaksi RPL sebesar minus Rp1.028.102.350.599 dan Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* sebesar minus Rp150.549.516 merupakan nilai total transaksi yang memengaruhi Catatan SAL tahun berjalan yang berasal dari aktivitas transaksi rekening non-SAL tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap catatan SAL sehingga tersaji nilai SAL yang sesungguhnya.
2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar minus Rp148.911.516 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yg perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2022
Selisih Kiriman Uang TAYL	(150.229.276)
Pendapatan Hibah Dalam Rekening Khusus Ditangguhkan TAYL	-
Transito Lainnya	1.317.760
Pembulatan	-
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(148.911.516)

Selisih Kiriman Uang TAYL sebesar Rp150.229.276 merupakan penyesuaian saldo awal di tahun 2022 yang disebabkan pelimpahan dari RPL tanggal 31 Desember 2021 yang baru diterima di Rekening Dana Investasi tanggal 3 Januari 2022. Transito Lainnya sebesar Rp1.317.760 berasal dari akun 815311 penerimaan persekot gaji tahun 2021.

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021
Saldo Awal SAL	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126
Koreksi Saldo Awal SAL	-	-
Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan TAB	-	(143.966.330.873.078)
SAL Awal setelah Penggunaan SAL & Koreksi Saldo Awal	337.779.006.818.346	244.152.750.458.048
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	130.558.467.051.951	96.658.876.443.878
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL:	468.337.473.870.297	340.811.626.901.926
Penyesuaian Pembukuan:		
Koreksi SiLPA	9.137.971.841.987	(2.548.945.575.660)
Selisih Kurs Kas di BUN (<i>Unrealized</i>)	3.676.340.697.318	116.426.281.222
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN	(87.732.477.966)	(26.506.042.189)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN	-	-
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah	(58.478.443.129)	455.474.439
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU	(1.098.251.792.777)	(572.556.286.009)
Pembulatan	-	-
Koreksi Utang PFK	-	(61.420)
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	3.359.288.846	(2.047.117.540)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	74.875.146.456	11.873.368.374
Total Penyesuaian Pembukuan	11.648.084.260.735	(3.021.299.958.783)
Penyesuaian Catatan SAL		
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL	(1.028.102.350.599)	(4.076.363.682)
Penyesuaian Transaksi Rek. Escrow	(150.549.516)	(7.296.256.447)
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. RPL	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan	(148.911.516)	52.495.332
Transito Lainnya	-	-
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Catatan SAL	(1.028.401.811.631)	(11.320.124.797)
Saldo Akhir SAL	478.957.156.319.401	337.779.006.818.346
SALDO AKHIR CATATAN SAL	478.957.156.319.401	337.779.006.818.346

Rincian Perhitungan Sisa Anggaran Lebih TA 2022 dan TA 2021

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Uraian	TA 2022	TA 2021
Saldo Awal Utang PFK	3.765.331.476.323	4.033.372.635.177
Saldo Akhir Utang PFK	3.916.380.112.882	3.765.331.476.323
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	151.048.636.559	(268.041.158.854)
Mutasi Transaksi PFK	151.170.449.070	(267.579.611.995)
Invoice PFK	121.812.511	(461.608.279)
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	-	(61.420)
Penjelasan Selisih:	-	(61.420)
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Transaksi PFK	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Utang Perhitungan Pihak Ketiga TA 2022 dan TA 2021

2. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Saldo Awal Utang Kepada Pihak Ketiga	251.218.736.876	403.356.201.213
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Akhir	247.752.918.368	251.218.736.876
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	(3.465.818.508)	(152.137.464.337)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga	(106.529.662)	(154.184.581.877)
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	3.359.288.846	(2.047.117.540)
Penjelasan Selisih: Penyesuaian terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat revaluasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas, selisih kurs dan koreksi akuntansi/pembukuan lainnya.	3.359.288.846	(2.047.117.540)
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) TA 2022 dan TA 2021

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2022	TA 2021
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	248.050.262.873	731.061.274.902
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	215.927.152.362	248.050.262.873
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	32.123.110.511	(483.011.012.029)
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran	106.998.256.967	494.884.380.403
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	74.875.146.456	11.873.368.374
Penjelasan Selisih : Revaluasi, Penyesuaian Selisih Kurs dan Penyesuaian lainnya atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (Jurnal Manual)	74.875.146.456	11.873.368.374
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan TA 2021

4. Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2022	TA 2021
Saldo Awal Rekening Pemerintah Lainnya	5.951.791.475.377	2.482.672.653.380
Saldo Akhir Rekening Pemerintah Lainnya	5.203.653.636.302	5.951.791.475.377
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	(748.137.839.075)	3.469.118.821.997
Koreksi Kas RPL	-	-
Mutasi Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya	(1.776.240.189.674)	3.465.042.458.315
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	(1.028.102.350.599)	(4.076.363.682)
Penjelasan Selisih : Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi, Penerimaan di RPL yang belum dipindahbukukan ke RKUN	(1.028.102.350.599)	(4.076.363.682)
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Rekening Pemerintah Lainnya	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Rekening Pemerintah Lainnya TA 2022 dan TA 2021

5. Rekening Escrow

Uraian	TA 2022	TA 2021
Saldo Awal Rekening Escrow	26.773.447.366.321	57.769.594.900.865
Saldo Akhir Rekening Escrow	48.331.400.902.982	26.773.447.366.321
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	21.557.953.536.661	(30.996.147.534.544)
Mutasi Transaksi Rekening Escrow	21.557.802.987.145	(31.003.443.790.991)
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	(150.549.516)	(7.296.256.447)
Penjelasan Selisih : Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening Escrow Dana Cadangan Alutsista TNI AU dan Kemenhan	(150.549.516)	(7.296.256.447)
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Rekening Escrow	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Rekening Escrow TA 2022 dan TA 2021

C.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2022

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp478.957.156.319.401. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL.

Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Kas BUN	394.096.461.571.443	253.683.550.805.313
Kas di KPPN	2.774.997.342.454	721.442.531.795
Kas di Bendahara Pengeluaran	215.927.152.362	248.050.262.873
Kas pada BLU yang sudah disahkan	78.971.222.880.967	81.993.516.161.352
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan	2.895.708.729.836	1.745.056.899.938
Total Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	478.954.317.677.062	338.391.616.661.271
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Penyesuaian Fisik SAL	5.390.038.579	(612.602.571.149)
Utang kepada Pihak Ketiga Penyesuaian Fisik SAL	210.753.180	(156.183.292)
Penyesuaian Rekening Khusus	-	-

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	3.355.675.440	-
Uang Muka Belanja Pegawai (<i>Prepayment</i>)	-	-
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan	-	-
Pengembalian Escrow PNB	-	-
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang	649.111.176	150.229.276
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	(6.766.936.036)	-
Transito Lainnya	-	(1.317.760)
Transito Hibah	-	-
Penempatan Dana di Bank Umum	-	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	2.838.642.339	(612.609.842.925)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	478.957.156.319.401	337.779.006.818.346

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dengan demikian, terdapat kenaikan Saldo SAL pada Tahun 2022 sebesar Rp141.178.149.501.055 atau 41,80% dari Saldo SAL Tahun 2021.

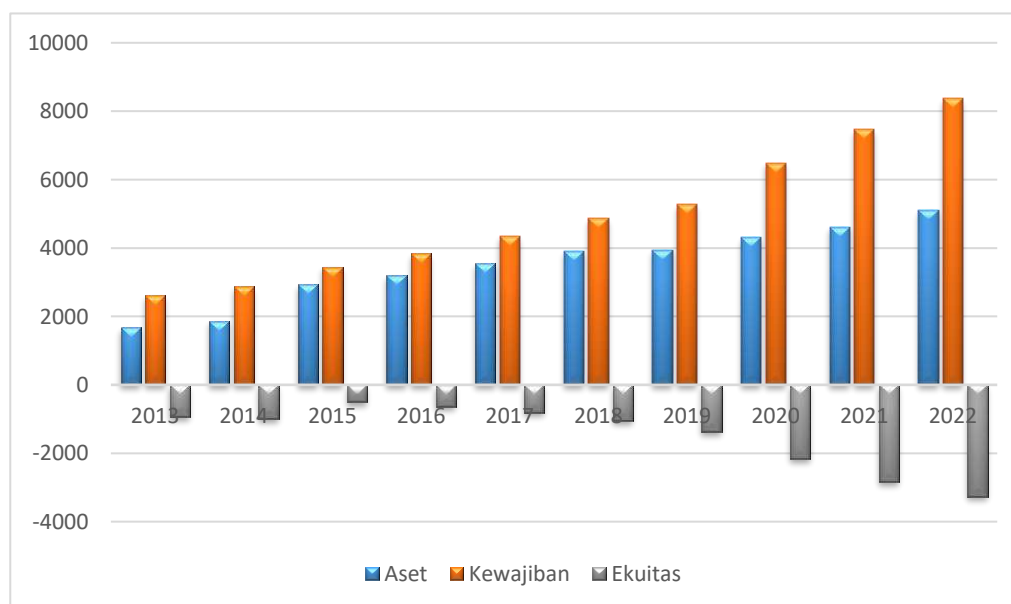
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM**

*Posisi
Keuangan
Secara
Umum*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lancar	538.706.231.713.917	400.082.938.092.004
Investasi Jangka Panjang	3.759.590.948.039.254	3.478.345.928.647.637
Aset Tetap	1.046.802.105.728	879.331.806.294
Properti Investasi	31.062.733.305.865	0
Piutang Jangka Panjang	52.136.458.878.032	54.030.083.179.083
Aset lainnya	730.812.322.007.366	695.038.764.862.218
Jumlah Aset	5.113.355.496.050.162	4.628.377.046.587.236
Kewajiban Jangka Pendek	851.240.032.862.444	622.158.867.092.414
Kewajiban Jangka Panjang	7.524.375.730.483.493	6.848.330.099.010.533
Jumlah Kewajiban	8.375.615.763.345.937	7.470.488.966.102.947
Jumlah Ekuitas	(3.262.260.267.295.775)	(2.842.111.919.515.711)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.113.355.496.050.162	4.628.377.046.587.236

Perbandingan Komposisi Neraca periode 2013-2023 adalah sebagai berikut:

(dalam triliun Rupiah)



D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1. ASET

D.2.1.1. ASET LANCAR

D.2.1.1.1. KAS DI REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM RUPIAH

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp238.395.756.100.437** dan **Rp196.189.849.541.605** atau mengalami kenaikan sebesar Rp42.205.906.558.832 (21,51%). Peningkatan saldo pada Rekening Sub RKUN Penempatan IDR sebesar Rp22.528.867.539.333 bersumber dari transaksi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pemindahbukuan tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi saldo kas lebih setelah memperhitungkan Saldo Kas Minimum dalam RKUN dengan tujuan untuk mendapatkan remunerasi yang lebih baik. Saldo kas lebih tersebut bersumber dari pendapatan perpajakan/non pajak maupun penerimaan pembiayaan dalam rupiah sampai dengan 31 Desember 2022.

Selama tahun 2022, kinerja penerimaan pajak tumbuh positif sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan kinerja penerimaan pajak pada periode Januari-Desember tahun 2022 masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi

yang ekspansif, serta implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) seperti penyesuaian tarif PPN, PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta Pajak Fintech dan Kripto. Kemudian dari sisi penerimaan pembiayaan, terdapat pembiayaan dengan nominal signifikan diantaranya penerbitan SUN (private placement) Seri VR0088, VR0089, VR0090, VR0091, VR0092, VR0093, VR0094 dan VR0095 pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp128.577.740.000.000.

Kemudian berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara, pada akhir tahun anggaran 2022 saldo pada RIBUN harus dinihikan ke RKUN. Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat mutasi dari penerimaan pada RIBUN yang berasal dari penyetoran hasil investasi pemerintah dan pengembalian pokok investasi dari OIP yang sampai dengan Desember Tahun 2022 sebesar Rp289,6 miliar merupakan penerimaan imbal hasil Investasi Pemerintah periode periode tahun 2022.

Adapun secara umum perubahan saldo dalam rekening yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kenaikan saldo kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah adalah Transaksi pindah buku dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih (SAL) nomor rekening 500.000002980 dalam rangka pemindahan saldo SAL Likuid ke Rekening Saldo Anggaran Lebih berdasarkan Berita Acara Perhitungan SAL Likuid dan SAL Non Likuid 2021 sesuai LKPP 2021 *Audited* senilai Rp68.723.948.359.219. Selain itu terdapat penggunaan dana dari rekening SAL sebesar Rp58.000.000.000.000 sebagai pemenuhan kebutuhan kas temporer pada tanggal 21 Desember 2022, yang baru dikembalikan pada tanggal 10 Januari 2023. Penggunaan SAL untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer tersebut telah sesuai dengan Pasal 9 PMK 147 Tahun 2021 tentang Pengelolaan SAL yang mengatur tentang penggunaan SAL untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer dengan memindahbukukan dana SAL dari Rekening Lainnya milik BUN yang digunakan untuk menampung SAL ke Rekening lain di BI Pengelolaan SAL dan selanjutnya diteruskan ke RKUN. Disamping itu, SAL yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer harus dikembalikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah tersebut merupakan saldo rekening pemerintah di BI dan Bank Umum yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara, dengan rincian yang disajikan pada [lampiran LD1a](#).

D.2.1.1.2. KAS DI REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DALAM VALUTA ASING

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp155.700.705.471.006** dan **Rp57.493.701.263.708** atau mengalami kenaikan sebesar Rp98.207.004.207.298 (170,81%). Jumlah Kas di Rekening Pemerintah tersebut merupakan saldo rekening pemerintah di BI yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Kenaikan saldo tersebut dipengaruhi oleh peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO dan Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD, dengan rincian yang disajikan pada [lampiran LD1b](#).

Peningkatan Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing antara lain disebabkan:

- Peningkatan saldo pada Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD (608001411980) sejumlah Rp90.038.737.054.033 dipengaruhi oleh transaksi pemindahbukuan dari RKUN valuta USD ke Rekening Kas Penempatan dalam valuta USD. Adapun sumber atas transaksi pemindahbukuan tersebut adalah penerimaan negara yang berasal dari Modul Penerimaan Negara (MPN). Berdasarkan data MPN per 15 Februari 2023, penerimaan negara dalam valuta USD yang diterima melalui MPN sepanjang triwulan IV tahun 2022 sejumlah USD4.848.687.171,29 atau equivalen Rp679.706.744.520.349. Adapun transaksi penerimaan dengan nilai signifikan selama akhir tahun 2022 adalah pelimpahan pada tanggal 15 Desember 2022 atas pendapatan PPh Gas Bumi dalam bentuk valuta USD senilai USD111.525.908,74 atau equivalen Rp1.741.923.168.610 dari Bank Persepsi BNI melalui rekening Sub RKUN KPPN Khusus Penerimaan Dalam Mata Uang USD (600503411980) serta pelimpahan pada tanggal 10 November 2022 atas Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan dalam bentuk valuta USD senilai USD319.185.907,16 atau equivalen Rp4.996.536.190.683 dari Bank Persepsi Mandiri melalui rekening Sub RKUN KPPN Khusus Penerimaan Dalam Mata Uang USD (600503411980).
- Peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO (600502991980) sejumlah Rp8.933.976.171.516 dipengaruhi oleh transaksi penarikan pinjaman dari IBRD pada tanggal 22 Desember 2022 sebesar EUR1.041.199.900 atau equivalen Rp17.271.986.189.146.

D.2.1.1.3. KAS DI REKENING PEMERINTAH LAINNYA

*Kas di
Rekening
Pemerintah
Lainnya*

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp5.451.617.307.850** dan **Rp6.202.854.028.961** atau mengalami penurunan sebesar Rp751.236.721.111 (12,11%) merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya yang ada di BI dan Bank Umum yang menampung rekening pemerintah selain rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Penurunan saldo tersebut dipengaruhi oleh penurunan pada saldo pada Rekening Pengelolaan Migas (DEPKEU K/HASIL MINYAK PERJANJIAN KARYA PRODUCTION SHARING) yang pada tahun 2022 mengalami penurunan saldo sebesar Rp907.191.076.197 yang dipengaruhi oleh penurunan hasil dari kegiatan-kegiatan pengelolaan migas yang menghasilkan penerimaan bagian Pemerintah dari Sumber Daya Alam di sepanjang periode tahun 2022. Rincian rekening yang membentuk saldo pada pos Rekening Pemerintah Lainnya tersaji pada [lampiran LD2](#).

D.2.1.1.4. KAS DI REKENING KAS DI KPPN

*Kas di
Rekening
Kas di KPPN*

Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp2.774.997.342.454** dan **Rp721.442.531.795** atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.053.554.810.659 (284,65%) merupakan saldo pada Rekening Sub RKUN Penerimaan sebesar Rp7, Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa persepsi) sebesar Rp2.774.907.142.727, Rekening Retur BI dalam Valuta USD KPPN KPH sebesar Rp90.199.720.

Saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) pada KPPN Khusus Penerimaan merupakan saldo setara rupiah dengan kurs JISDOR Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2022 pada *Collecting Agent* (CA). Saldo tersebut merupakan penerimaan negara yang datanya berasal dari MPN G3 yang belum dilimpahkan ke RKUN.

Terdapat selisih sebesar Rp25.212.596.891 antara Saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar Rp2.774.907.142.734 dengan saldo rekening koran pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar Rp2.800.119.739.625. Adapun rincian selisih sebesar Rp25.212.596.891 adalah sebagai berikut:

RINCIAN SELISIH	KETERANGAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT
RK ONLY	Transaksi yang hanya dicatat di laporan rekening koran CA, namun bukan transaksi MPN	(3.387.660.629)	Dilakukan Koreksi Pendebetan di Rekening CA
DUPLIKASI	Pencatatan dobel (lebih dari satu kali) kode billing di laporan rekening koran CA	(169.331.057)	Dilakukan Koreksi Pendebetan di Rekening CA
PERBEDAAN PENCATATAN	Perbedaan tanggal pencatatan antara rekening koran CA dengan catatan di settlement	(25.069.661.653)	Tidak ada tindak lanjut, karena akan match di tanggal berikutnya

RINCIAN SELISIH	KETERANGAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT
LAIN-LAIN / SELISIH SALDO AWAL	Selisih saldo awal periode sebelumnya yang belum terselesaikan	6.124.265	Penyelesaian sesuai dengan tindak lanjut yang belum dieksekusi
SETTLEMENT ONLY	Kode billing hanya ada di settlement, namun tidak ada di laporan rekening koran CA	44.836.693	Dilakukan Pencatatan di Rekening CA
PENDEBETAN RK	Pengurangan di Rekening Koran CA yang bukan merupakan transaksi pelimpahan ke negara	3.543.882.635	Dilakukan Koreksi Kredit di Rekening CA
BEDA NOMINAL	Kesalahan pencatatan nominal di rekening koran CA. Nominal yang tertera berbeda dengan pencatatan di settlement	(180.787.448)	Dilakukan koreksi perbaikan nominal di CA untuk disesuaikan dengan nominal sebenarnya
PENYESUAIAN SPAN		303	
Total selisih		(25.212.596.891)	

Sedangkan Rekening Retur BI dalam Valuta USD sebesar Rp90.199.720 merupakan saldo kas retur per 31 Desember 2022 yang telah diselesaikan pada bulan Januari 2023.

Daftar Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada [lampiran LD3](#).

D.2.1.1.5. KAS DALAM TRANSITO

Kas Dalam Transito

Saldo Kas Dalam Transito per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp799.340.452** dan **Rp150.229.274**. Saldo tersebut terdiri dari kas dalam transito pada BUN, rekening pinjaman/hibah, dan transaksi DTP pada seluruh rekening yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah ditambah selisih penerimaan kiriman uang dan pengeluaran kiriman uang. Kas Dalam Transito pada periode akhir tahun 2022 mengalami peningkatan dari jumlah saldo sebesar Rp649.111.178 atau sebesar 432,08 persen dibandingkan periode akhir tahun 2021 disebabkan pelimpahan dari RPL dan RPKBUNP Valas USD di tanggal 30 Desember 2022 namun diterima di RDI dan RKUN USD pada tanggal 2 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas Dalam Transito BUN	0	0
Selisih Kiriman Uang	799.340.452	150.229.274
Total	799.340.452	150.229.274

D.2.1.1.6. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp215.927.152.362** dan **Rp248.050.262.873** atau mengalami penurunan sebesar Rp32.123.110.512 (12,95%). Penurunan ini dipengaruhi saldo signifikan pada Kementerian/Lembaga:

1. Kementerian Luar Negeri sebesar Rp124.956.673.207.
2. Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp36.343.556.425.
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi sebesar Rp26.814.183.293.
4. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI sebesar Rp4.906.018.925.
5. Kementerian Perdagangan sebesar Rp4.095.346.883.

Kas di Bendahara pengeluaran adalah total saldo yang dibukukan seluruh KPPN atas saldo kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran satuan kerja mitra kerja KPPN yang berasal dari Uang Persediaan (UP). Kas Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran menurut data KPPN yang telah diverifikasi dengan data Kementerian Negara/Lembaga.

Daftar Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per KPPN dapat dilihat pada [lampiran LD4a](#).

Daftar Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada [lampiran LD4b](#).

Fluktuasi penurunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp248.050.262.873.
- b. Terdapat penyelesaian saldo TA 2021 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp249.237.561.379 pada 403 satker.
- c. Terdapat penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran pada 223 satker sebesar Rp15.731.754.631.
- d. Terdapat Kas di BP TA 2022 yg belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp126.507.549.781 pada 234 satker.
- e. Terdapat koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran pada 14 satker sebesar minus Rp4.798.990.768 dan adanya penyesuaian selisih kurs sebesar Rp79.674.137.224.

Sehingga saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp215.927.152.362.

D.2.1.1.7. KAS LAINNYA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kas pada Kementerian Jumlah Kas pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp2.895.708.729.836** dan **Rp1.745.056.899.938** atau mengalami kenaikan sebesar

Negara/Lembaga Rp1.150.651.829.898 (65,94%) merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2022. Kementerian/ Lembaga dengan saldo Kas Lainnya terbesar diantaranya:

1. Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.651.499.391.677.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp590.370.647.054.
3. Kementerian Sosial sebesar Rp305.737.141.978.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp111.239.965.093.
5. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN sebesar Rp84.287.564.044.

Daftar Rincian Saldo Kas pada Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari hibah langsung per KPPN dapat dilihat pada [lampiran LD5a](#).

Daftar Rincian Saldo Kas pada Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari hibah langsung per Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada [lampiran LD5b](#).

Fluktuasi kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat 32 satker yang tidak kembali mendapatkan hibah sehingga pendapatan hibah yang telah disahkan pada TA 2021 sebesar Rp484.325.878.113 digunakan seluruhnya pada TA 2022 sehingga saldo akhir Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga tersebut disajikan nihil.
- b. Terdapat penambahan pendapatan hibah yang telah disahkan baru pada TA 2022 pada 42 satker sebesar Rp1.745.980.657.866 sehingga nilai saldo ahir Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga TA 2022 menjadi sebesar Rp1.745.980.657.866.
- c. Terdapat penurunan saldo dari 51 satker sebesar Rp111.002.949.855 yang berasal dari selisih saldo awal TA 2022 sebesar Rp1.260.731.021.825 dengan saldo akhir TA 2022 sebesar Rp1.149.728.071.970.

Sehingga saldo akhir Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga adalah sebesar Rp2.895.708.729.836.

D.2.1.1.8. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan Setara Kas Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp29.899.867.163** dan **Rp718.141.075.514** atau mengalami penurunan sebesar Rp688.241.208.351 (95,84%). Akun ini merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BA 999.07 dan BA 999.08. Detail menurut BA BUN adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	BA BUN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	999.07	37.162	388.467.325.514
2.	999.08	29.899.830.001	329.673.750.000
Total		29.899.867.163	718.141.075.514

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.162. Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut, Rp388.467.288.352 atau (99,99%) lebih kecil dari Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp388.467.325.514. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 merupakan pendapatan jasa giro yang belum disetor per tanggal 31 Desember 2022.

Rincian jasa giro yang belum disetor sebagai berikut:

- Saldo sebesar Rp37.162 terdapat pada Kementerian PUPR yaitu pendapatan jasa giro yang belum disetor pada Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan per tanggal 31 Desember 2022 terdapat pada Kementerian PUPR yaitu pendapatan jasa giro yang belum disetor pada Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan per tanggal 31 Desember 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/ Kantor/ Pos	DESEMBER
1	1032330505	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BANK BRI SYARIAH	0,93
2	40001209936	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BANK DKI	5.259
3	0070102000821	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD BJB SYARIAH	0,38
4	1000001844	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD KALBAR	0,96
5	0010015000056 / 2003832627	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD KALSEL	11.013,70
6	0010103666778	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD SULAWESI TENGAH	9.504
7	01601420000019	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD SULUT GO	10.548
8	100001000231768	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	MEGA SYARIAH	726
9	70122065906	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	DKI SYARIAH	110
Total				37.162,97

2. Kas lainnya dan setara kas pada BA.999.08

Saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.899.830.001 dan Rp329.673.750.000. Saldo kas lainnya yang terdapat pada satker MPPKP ini merupakan saldo dari top-up e-channel dari peserta atau selain peserta yang diterima pada Rekening Virtual Account (VA) RPL Dana Program Kartu Prakerja Tahun 2022 sebesar Rp630.001 dan ditambah dengan Reklasifikasi sisa dana cadangan kartu prakerja yang tidak berhasil disalurkan kepada peserta dan telah dikembalikan ke RKUN sebesar Rp29.899.200.000, disetorkan kembali ke RKUN karena tidak masuk definisi DDP yang riil (nett) per 31 Des 2022 sebesar Rp29.899.200.000.

D.2.1.1.9. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU

Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp78.971.222.880.967** dan **Rp81.993.516.161.352** atau mengalami penurunan sebesar Rp3.022.293.280.385 (3,69%) terdiri dari Kas pada Badan Layanan Umum yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2D Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Layanan Umum serta koreksi saldo awal kas pada Badan Layanan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kementerian/Lembaga yang memiliki saldo kas pada Badan Layanan Umum terbesar diantaranya:

1. Kementerian Keuangan sebesar Rp49.098.074.663.450.
2. Kementerian Kesehatan sebesar Rp7.141.556.551.270.
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi sebesar Rp6.870.719.402.094.
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.174.913.946.437.
5. Kementerian Agama sebesar Rp2.256.345.239.630.

Daftar Rincian Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per KPPN dapat dilihat pada [lampiran LD6a](#).

Daftar Rincian Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada [lampiran LD6b](#).

Fluktuasi penurunan Kas pada Badan Layanan Umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat sebelas BLU dengan nilai saldo awal sebesar Rp3.478.598.592.835 yang melaporkan tidak terdapatnya laba/rugi pada tahun berjalan dan menggunakan sisa Kas BLU TA 2021 seluruhnya sehingga saldo akhir Kas pada BLU tersebut pada TA 2022 disajikan nihil.

- b. Terdapat penambahan baru Kas pada BLU di TA 2022 pada 23 BLU sebesar Rp347.347.594.854 yang diperoleh dari pengurangan pendapatan BLU yang telah disajikan dengan belanja BLU yang telah disahkan.
- c. Terdapat 237 satker dengan saldo awal sebesar Rp78.514.917.568.517 dimana nilai pendapatan BLU yang disahkan lebih besar sebesar Rp108.957.717.596 dari belanja BLU yang disahkan sehingga saldo akhir meningkat menjadi sebesar Rp78.623.875.286.113.

Sehingga saldo akhir Kas pada Badan Layanan Umum adalah sebesar Rp78.971.222.880.967.

D.2.1.1.10. UANG MUKA DARI REKENING KHUSUS

*Uang Muka
dari
Rekening
Khusus*

Jumlah Uang Muka dari Rekening Khusus per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp20.878.963.110** dan **Rp25.427.588.614** atau mengalami penurunan sebesar Rp4.548.625.504 (17,89%). Uang Muka dari Rekening Khusus merupakan bagian dari kelompok akun uang muka rekening BUN yang digunakan untuk menampung pengeluaran-pengeluaran Satker yang telah diterbitkan SP2D atas kegiatan tertentu yang sumber dananya berasal dari Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan mekanisme Rekening Khusus (Reksus) yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah dan pada tanggal pelaporan keuangan belum dibebankan pada Rekening Khusus berkenaan. Uang Muka dari Reksus tersebut merupakan SPM Nihil yang telah diselesaikan pada tahun 2022.

Rincian Saldo Uang Muka Rekening BUN dapat dilihat pada [lampiran LD7](#).

D.2.1.1.11. BELANJA DIBAYAR DI MUKA (PREPAID)

*Belanja
Dibayar Di
Muka
(Prepaid)*

Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp22.006.153.883** dan **Rp32.048.488.685** atau mengalami penurunan sebesar Rp10.042.334.802 (31,33%). Belanja dibayar di muka tahun 2022 tersebut terdapat pada SKK Migas merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

D.2.1.1.12. UANG MUKA BELANJA

*Uang Muka
Belanja*

Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp10.000.000** dan **Rp10.000.000**, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Uang Muka Belanja Lain-Lain (*Prepayment*) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan

namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Saldo ini terdapat pada satker SKK Migas.

D.2.1.1.13. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

*Pendapatan
Yang Masih
Harus
Diterima*

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp4.121.830.752.438** dan **Rp4.447.535.675.473** atau mengalami penurunan sebesar Rp325.704.923.035 (7,32%). Rincian Pendapatan yang masih harus diterima sebagai berikut:

1. BA 999 01 sebesar Rp2.818.947.688.181 merupakan penyesuaian akrual kontribusi BI dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo tersebut mengalami kenaikan Rp1.199.122.451.085 (74%) dibanding dengan tahun 2021 sebesar Rp 1.619.825.237.096.
2. BA 999 03 sebesar Rp27.077.976.029 merupakan pendapatan yang masih harus diterima berasal pengakuan pendapatan pada UAKPA KBUMN yaitu pengakuan akrual atas bunga yang belum jatuh tempo atas investasi non permanen pada BUMN selaku Penerima Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan Negara selaku Penerima Investasi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	PT Kereta Api Indonesia	15.072.130.141	0
2	PT Perkebunan Nusantara III	8.755.845.888	5.621.419.615
3	Perum Perumnas	3.250.000.000	3.250.000.000
Total		27.077.976.029	8.871.419.615

3. BA 999 05 sebesar Rp0, Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Tahun 2021:

Rincian	2022	2021
DBH	0	34.679.300.000
DAU	0	630.892.880.000
Total	0	665.572.180.000

- a. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima – DBH

Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima Satker DBH per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp34.679.300.000. Jumlah tersebut merupakan Pendapatan yang Masih Harus Diterima berkaitan dengan

Pemotongan DBH berdasarkan PMK Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi COVID-19. Pemotongan DBH berdasarkan KMK 34/KM.7/2021 merupakan Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh TNI dan POLRI.

b. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima – DAU

Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima Satker DAU per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp630.892.880.000. Jumlah tersebut merupakan Pendapatan yang Masih Harus Diterima berkaitan dengan Pemotongan DAU berdasarkan PMK Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi COVID-19.

4. BA 999.07, Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.534.310.221. Jumlah Pendapatan Yang Harus Diterima tersebut, Rp359.632.237.248 lebih kecil dari Jumlah Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2021 sebesar Rp361.166.547.469. Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2022 terdapat pada:

a. Kementerian PUPR

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.482.119.512 dan Rp 47.719.088.626. Pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp1.110.688.157 terdapat pada satuan kerja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berupa pendapatan atas kelebihan bayar SSB dari klaim asuransi BTN. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas debitur tidak layak bayar, maka Pendapatan yang masih harus diterima tersebut bertambah sebesar Rp371.431.355.

b. Kementerian Pertanian

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp52.190.709 dan Rp107.505.367.463 yang terdapat pada satuan kerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp52.190.709 tersebut merupakan koreksi atas Piutang tahun 2020 hasil koreksi Itjentan no. R.470/PW.110/G.3/12/2022 yang merupakan Lebih Bayar pada PT. Pupuk Kaltim TA 2020 untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

5. BA 999.08, Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp675.985.479.244 dan Rp1.202.285.629.608. Saldo ini terdapat pada satker Dana Kompensasi yang merupakan pengakuan Piutang atas

kelebihan pembayaran dana kompensasi tarif tenaga listrik Tahun 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada LHP No. 02/AUDITAMA VII/PDTT/01/2023 tanggal 17 Januari 2023.

6. BA 999.99, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp598.285.298.763 dan Rp589.814.661.685. Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari:
 - a. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.664.858.473 dan Rp4.505.247.574. Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari kewajiban pembayaran ke kas negara atas Transfer BMN Hulu Migas antar KKKS;
 - b. Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp596.620.440.290. Jumlah tersebut merupakan SBP triwulan IV Tahun 2022 (hasil kegiatan usaha Oktober s.d. Desember 2022) yang telah diterima pembayarannya di Rekening Panas Bumi pada 30 Januari 2023.

D.2.1.1.14. PIUTANG BUKAN PAJAK

*Piutang
Bukan Pajak*

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp241.374.054.869.037** dan **Rp229.086.433.471.524** atau mengalami kenaikan sebesar Rp12.287.621.397.513 (5,36%). Piutang Bukan Pajak tersebut merupakan piutang pada Piutang Bukan Pajak Investasi Pemerintah (BA 999.03), Transfer Ke Daerah (BA 999.05), Belanja Subsidi (BA 999.07), Belanja Lain-Lain (BA 999.08) dan Transaksi Khusus (BA 999.99).

Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No	Debitur	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Piutang Hibah (BA.999.02)	0	2.963.815.209
2.	Piutang Dividen (BA 999.03)	56.554.713.538	57.887.908.553
3.	Piutang Transfer ke Daerah (BA 999.05)	10.194.543.595.109	13.983.389.775.793
4.	Piutang Subsidi (BA 999.07)	12.350.000.000	1.532.110.319.124
5.	Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)	304.815.087.684	289.929.611.126

No	Debitur	31 Desember 2022	31 Desember 2021
6.	Piutang PNB (BA 999.99)	230.805.791.472.706	213.220.152.041.719
Jumlah		241.374.054.869.037	229.086.433.471.524

D.2.1.1.14.1. Piutang Hibah (BA 999.02)

Piutang Negara bukan pajak untuk hibah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp2.963.815.209 untuk periode 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.963.815.209 (100%). Piutang Negara bukan pajak pada tahun 2021 tersebut merupakan sisa Hibah RR yang masih harus dikembalikan oleh Pemda. Pada tahun 2022 semua piutang dari sisa Hibah RR telah diselesaikan baik dengan daerah menyetor melalui mekanisme PNB dan melalui mekanisme Pemotongan DAU oleh DJPK.

D.2.1.1.14.2. Piutang Dividen (BA 999.03)

Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp56.554.713.538 dan Rp57.887.908.553, mengalami penurunan sebesar Rp1.333.195.015 (2,30%).

Perubahan saldo piutang negara bukan pajak per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

- Saldo piutang negara bukan pajak pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp57.887.908.553 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp23.936.578.448 dan denda sebesar Rp33.951.330.105.
- Selama Tahun Anggaran 2022 terdapat 103 BUMN yang telah menyampaikan dokumen/risalah RUPS TB 2020 atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan kepada Kementerian Keuangan. Pengakuan dan pengukuran awal piutang negara bukan pajak dari dividen TB 2021 didasarkan pada tanggal pelaksanaan RUPS dan nilai dividen yang ditetapkan sesuai dokumen/risalah RUPS atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan tersebut.
- Terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebelum TB 2021 sebesar Rp1.333.195.015. Pembayaran tersebut merupakan pembayaran denda keterlambatan dividen PT Inhutani I (TB 2000) sebesar Rp62.468.076, pembayaran pokok dividen dan denda keterlambatan PT Inhutani V (TB 1999) sebesar Rp300.000.000, dan pembayaran denda keterlambatan dividen PT Perkebunan Nusantara II (TB 1999) sebesar Rp970.726.939.

- d. Dengan demikian, Piutang Negara Bukan Pajak (Bagian Pemerintah atas Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2022 tercatat menjadi sebesar Rp56.554.713.538 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp23.826.578.448 dan denda sebesar Rp32.728.135.090.

Rincian Piutang PNB Dividen dan Denda dapat dilihat pada [lampiran LD8a](#).

D.2.1.1.14.3. Piutang Transfer ke Daerah (BA 999.05)

Piutang Transfer ke Daerah BA 999.05 per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp10.194.543.595.109 dan Rp14.648.961.955.793 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.454.418.360.684 (30,41%). Penurunan nilai aset terjadi karena adanya penyelesaian piutang TKD, Piutang TKD Lainnya, dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima serta belum ada pengakuan Piutang TKD Diestimasi. Aset yang disajikan dalam Neraca TA 2022 terdiri atas Piutang Transfer ke Daerah sebagaimana rincian berikut:

(dalam Rupiah)

Rincian Aset	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang TKD	8.571.663.494.352	13.852.465.912.897
Piutang TKDD Lainnya	6.663.568.678	108.143.992.667
Piutang TKDD Diestimasi	1.616.216.532.079	22.779.870.229
Total Aset	10.194.543.595.109	13.983.389.775.793

Rincian Piutang Transfer ke daerah per provinsi/kabupaten/kota disajikan pada [lampiran LD8b](#).

A. Piutang TKD

Piutang transfer ke Daerah yang disajikan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sejumlah Rp8.571.663.494.352 dan Rp13.852.465.912.897 sebagaimana rincian pada Tabel berikut. Jika dibandingkan dengan neraca Tahun 2021, Piutang TKD pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.280.802.418.545 atau 38,12%. Rincian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2022 sebagaimana rincian pada tabel berikut ini:

(dalam Rupiah)

Rincian satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021
DBH	5.130.764.211.892	5.715.603.363.566
DAK Non Fisik	3.393.625.091.684	8.076.149.526.814

Rincian satker	31 Desember 2022	31 Desember 2021
DK DIY	47.274.190.776	60.713.022.517
Total	8.571.663.494.352	13.852.465.912.897

1. Satker DBH

Piutang Transfer Dana Perimbangan Per 31 Desember TA 2022 tercatat sebesar Rp5.130.764.211.892 dan mengalami penurunan sebesar Rp584.839.151.674 atau sebesar 10,23% dari 31 Desember TA 2021. Penurunan Piutang Transfer Dana Perimbangan tersebut dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pemotongan Lebih Bayar DBH melalui KMK Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua pada tahun 2022.

Piutang yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran sebelumnya. Piutang atas lebih bayar tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 127/PMK.07/2022. PMK tersebut merupakan PMK penetapan kembali atas saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020.

Saldo Piutang Transfer Dana Perimbangan Per 31 Desember TA 2021 tercatat sebesar Rp5.715.603.363.566. Pada tanggal 25 Agustus 2022 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Pada Tahun 2022, PMK dimaksud menetapkan kembali besaran piutang DBH sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp5.715.603.363.566 dan menetapkan Lebih Bayar DBH tahun 2021 sebesar Rp970.639.891.539.

Berikutnya Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK Nomor 29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2022, melalui KMK dimaksud dilakukan penyelesaian Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2020 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp1.048.603.102.007 dan pemotongan Lebih Bayar Tahun 2021 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp9.456.086.199, sehingga saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun 2020 menjadi sebesar Rp4.667.000.261.559 dan saldo Lebih Bayar DBH tahun 2021 sebesar Rp961.183.805.340. Selanjutnya Kementerian Keuangan menerbitkan KMK Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua pada tahun 2022, melalui KMK ini penyelesaian Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun 2020 atas penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp484.421.027.759 dan penyelesaian Lebih Bayar DBH Tahun 2021 atas penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp12.998.827.248, sehingga saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp4.182.579.233.800 dan saldo Lebih Bayar DBH tahun 2021 sebesar

Rp948.184.978.092. Sehingga sisa saldo Lebih Bayar Audited TA 2022 menjadi Rp5.130.764.211.892.

Rincian sisa Saldo Piutang transfer DBH sebagai berikut:

Uraian	Sisa Saldo Lebih Bayar Tahun 2022 (Rp)
LB DBH PPh Pasal 21	117.037.134.380
LB DBH PPh Pasal 25/29 OP	38.391.576.232
LB DBH PBB Bagian Daerah	515.148.406.814
LB DBH PBBBP Bagian Daerah	26.126.969.359
LB DBH SDA Minyak Bumi 15%	700.613.546.833
LB DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	48.447.545.358
LB DBH SDA Minyak Bumi dalam rangka Otsus	203.547.985.791
LB DBH SDA Gas Bumi 30%	179.973.696.213
LB DBH SDA Gas Bumi 0,5%	5.809.592.977
LB DBH SDA Gas Bumi dalam rangka Otsus	45.332.231.630
LB DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	261.154.715.152
LB DBH SDA Minerba – Royalti	2.251.519.226.868
LB DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	418.293.193
LB DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	7.644.424.706
LB DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	33.993.167.450
LB DBH SDA Kehutanan – IIUPH	172.388.846.225
LB DBH SDA Kehutanan – PSDH	258.805.820.236
LB DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	184.249.949.248
LB DBH SDA Perikanan	80.161.083.227
Total	5.130.764.211.892

Rincian Sisa Saldo Piutang Transfer DBH (dalam Rp)

No.	Transaksi	Jumlah
1.	Piutang DBH TA 2021 Audited	5.715.603.363.566
2.	Pengakuan Piutang DBH TA 2021 berdasarkan PMK 127/PMK.07/2022	970.639.891.539
3.	Penyelesaian Piutang DBH sampai dengan TA 2021 berdasarkan KMK 29/KM.7/2022	(1.058.059.188.206)
4.	Penyelesaian Piutang DBH sampai dengan TA 2021 berdasarkan KMK 37/KM.7/2022	(497.419.855.007)
Total		5.130.764.211.892

2. Piutang Satker DAK Non Fisik

Aset Lancar per 31 Desember 2022 Transfer DAK Nonfisik sebesar Rp3.393.625.091.684. Nilai tersebut menurun sebesar Rp4.682.524.435.130 atau 57,98% bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp8.076.149.526.814. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyelesaian piutang DAK Nonfisik.

No.	Transaksi	Jumlah
1.	Piutang DAK Nonfisik TA 2021 Audited	8.076.149.526.814
2.	Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2021 Audited Per 31 Desember 2022	(3.988.354.924.900)
3.	Pengakuan Piutang DAK Nonfisik atas Sisa Dana TAYL di RKUD pada TA 2021 sampai dengan 31 Desember 2022	3.849.304.449.520
3a.	Pengakuan Piutang DAK Nonfisik atas Sisa Dana TAYL Tahun 2022 di RKUD sampai dengan 31 Desember 2022	828.323.720.690
3b.	Pengakuan Piutang DAK Nonfisik atas Sisa Dana Tahun 2022 di RKUD sampai dengan 31 Desember 2022	3.020.980.728.830
4.	Penyelesaian Piutang DAK Nonfisik pada Penyaluran TA 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	(3.159.206.570.541)
5	Penyelesaian Piutang Sisa Dana DAK Nonfisik melalui pemotongan atas penyaluran DAU per 31 Desember 2022	(1.291.949.224.459)
6	Pemindahan Saldo Piutang dari Satker 999820 ke Satker KPPN	(92.318.164.750)
Total		3.393.625.091.684

Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik TA 2021 Audited pada TA 2022 sebesar Rp3.988.354.924.900 merupakan penyesuaian piutang DAK Nonfisik yang diakui pada TA 2021 Audited dan disesuaikan pada Tahun 2022 Bulan Juni, September dan Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penyesuaian Piutang TAYL atas Dana Bantuan Operasional Kesehatan	1.053.167.394.382
2.	Penyesuaian Piutang TAYL atas Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.100.894.400
3.	Penyesuaian Piutang TAYL atas Dana Pelayanan Kepariwisataaan	2.440.169.818
4.	Penyesuaian Piutang TAYL atas Dana BOP Museum dan Taman Budaya	2.571.230.596
5.	Penyesuaian Piutang TAYL atas Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.014.029.855
6.	Penyesuaian Piutang TAYL atas Dana PK2UMK	2.199.760.288
7.	Penyesuaian Piutang TAYL atas Dana Pelayanan Adminduk	85.972.750.088

No.	Uraian	Jumlah
8.	Penyesuaian Piutang TAYL atas Dana Tunjangan Profesi Guru ASND	2.537.873.663.623
9.	Penyesuaian Piutang TAYL atas Dana Tunjangan Khusus Guru ASND	201.806.445.869
10.	Penyesuaian Piutang TAYL atas Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND	97.208.585.981
Total		3.988.354.924.900

Pengakuan Piutang DAK Nonfisik atas Sisa Dana TAYL di RKUD pada TA 2022 sebesar Rp3.849.304.449.520 terdapat pada satker DAK Non Fisik sebesar Rp3.484.358.723.590 dan satker DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp364.945.725.930. Untuk piutang pada satker DAK Nonfisik, nilai tersebut merupakan Sisa DAK Nonfisik TAYL yang baru diketahui dan diakui pada Bulan Juni, September dan Desember 2022 setelah Audited 2021. Sisa Dana ini dapat bersifat sisa dana yang baru diketahui pada TA 2022 atau bisa juga sisa dana yang bersifat penambahan dari jumlah sisa dana TA 2021 yang perlu diakui pada TA 2022. Sedangkan penambahan piutang DAK Nonfisik sebesar Rp364.945.725.930 pada satker DAK Fisik dan Dana Desa berasal dari reklasifikasi penyesuaian ekuitas atas beban transfer DAK Nonfisik tahun anggaran yang lalu berdasarkan berdasarkan KMK Nomor 10/KM.07/2022 dan senilai Rp37.152.947.495 berdasarkan KMK Nomor 30/KM.07/2022 serta KMK Nomor 35/KM.07/2022. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan Piutang atas Dana Bantuan Operasional Kesehatan	2.379.031.139.388
2.	Pengakuan Piutang atas Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	641.914.167.917
3.	Pengakuan Piutang atas Dana Pelayanan Kepariwisata	12.121.051.501
4.	Pengakuan Piutang atas Dana Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah	148.405
5.	Pengakuan Piutang atas Dana BOP Museum dan Taman Budaya	10.770.258.543
6.	Pengakuan Piutang atas Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	40.706.893.039
7.	Pengakuan Piutang atas Dana Fasilitas Penanaman Modal	35.258.667.712
8.	Pengakuan Piutang atas Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.983.180.288
9.	Pengakuan Piutang atas Dana PK2UMK	15.505.120.346
10.	Pengakuan Piutang atas Dana Pelayanan Adminduk	35.356.539.552
11.	Pengakuan Piutang atas Dana Tunjangan Profesi Guru ASND	86.623.744.626
12.	Pengakuan Piutang atas Dana Tunjangan Khusus Guru ASND	68.673.172.465
13.	Pengakuan Piutang atas Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND	117.629.036.645

No.	Uraian	Jumlah
14.	Pengakuan Piutang atas Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	25.785.603.163
15.	Pengakuan Piutang atas Dana BOS	364.945.725.930
	Total	3.849.304.449.520

Penyelesaian Piutang DAK Nonfisik per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.159.206.570.541 atas Sisa DAK Nonfisik TAYL dilakukan melalui mekanisme pemotongan SPM/SP2D Penyaluran Dana BOK, Dana BOKB, Dana Pelayanan Kepariwisata, Dana BLPS, Dana BOP Museum dan Taman Budaya, Dana PPPA, Dana FPM, Dana KPP, dan Dana PK2UMK selama periode penyaluran dana di Tahun 2022.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penyelesaian Piutang atas Dana Bantuan Operasional Kesehatan	2.672.173.671.696
2.	Penyelesaian Piutang atas Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	367.644.388.403
3.	Penyelesaian Piutang atas Dana Pelayanan Kepariwisata	11.294.657.066
4.	Penyelesaian Piutang atas Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	6.035.052.050
5.	Penyelesaian Piutang atas Dana BOP Museum dan Taman Budaya	11.084.552.394
6.	Penyelesaian Piutang atas Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	25.484.543.049
7.	Penyelesaian Piutang atas Dana Fasilitas Penanaman Modal	41.047.871.579
8.	Penyelesaian Piutang atas Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.102.244.771
9.	Penyelesaian Piutang atas Dana PK2UMK	13.339.589.533
	Total	3.159.206.570.541

Penyelesaian Piutang Sisa Dana DAK Nonfisik melalui pemotongan atas penyaluran DAU/DBH per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.291.949.224.459 meliputi pemotongan Piutang atas Sisa Dana BOK Tambahan, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Khusus Guru ASND dengan total Rp714.127.608.950 dan pada satker DAK Fisik dana Desa sebesar Rp577.821.615.509. Penyelesaian Piutang ini berdasarkan KMK Nomor 10/KMK.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum TA 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan TA 2021, KMK Nomor 30/KMK.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil TA 2022 Tahap Kedua atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan TA 2021, dan KMK Nomor 35/KMK.7/2022 tentang Perubahan atas KMK No. 30/KMK.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil TA 2022 Tahap Kedua atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan TA

2021. Adapun rincian pemotongan yang sudah dilaksanakan sampai dengan Bulan Desember 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penyelesaian Piutang atas Sisa Dana BOK Tambahan TAYL melalui penyaluran DAU	156.098.541.869
2.	Penyelesaian Piutang atas Sisa Dana BOP PAUD TAYL melalui penyaluran DAU	364.958.985.682
3.	Penyelesaian Piutang atas Sisa Dana BOP Pendidikan Kesenjangan TAYL melalui penyaluran DAU	126.416.190.487
4.	Penyelesaian Piutang atas Sisa Dana Tunjangan Khusus Guru ASND	66.653.890.912
5.	Penyelesaian Piutang atas Sisa Dana DAK Nonfisik pada Satker DAK Fisik dan Dana Desa	577.821.615.509
Total		1.291.949.224.459

Sesuai dengan KMK Nomor 10/KMK.7/2022 dan KMK Nomor 35/KMK.7/2022, jumlah sisa dana DAK Nonfisik yang diselesaikan lewat pemotongan DAU adalah sejumlah Rp716.015.854.465. Koreksi atas pemotongan tersebut dilakukan pada Satker 999820 sebesar Rp714.127.608.950 yang terdiri atas Sisa Dana BOK Tambahan, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesenjangan, dan Tunjangan Khusus Guru ASND. Sisa dari dana tersebut yaitu sebesar Rp802.900.000 yang terdiri dari Rp556.200.000 sisa Dana BOP PAUD Kab. Berau dan Rp246.700.000 yang merupakan sisa Dana BOP Kesenjangan Kab. Berau. Koreksi atas Sisa Dana sebesar Rp802.900.000 tidak dilakukan lewat Satker 999820 karena penyelesaian sisa dana tersebut dilakukan setelah adanya pemindahan saldo piutang dari Satker 999820 ke KPPN sebagai tindak lanjut dari pengalihan penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesenjangan ke KPPN. Hal ini menyebabkan koreksi piutang atas penyelesaian sisa Dana BOP PAUD dan BOP Kesenjangan selanjutnya dilakukan di Satker KPPN. Hal ini menyebabkan koreksi piutang atas penyelesaian sisa Dana BOP PAUD dan BOP Kesenjangan selanjutnya dilakukan di Satker KPPN. Selain itu, terdapat pengurangan piutang sebesar Rp577.821.615.509 atas potongan SPM/SP2D penyaluran transfer berdasarkan KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas) Nomor 10/KM.07/2022 sebesar Rp249.195.083.743 dan potongan sebesar Rp328.626.531.766 berdasarkan KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas) Nomor 30/KM.07/2022 serta KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas) Nomor 35/KM.07/2022.

Lebih lanjut, sehubungan dengan adanya Nota Dinas Direktur Dana Transfer Khusus nomor ND-996/PK.3/2022 tanggal 19 Desember 2022 Hal Permohonan Penerbitan Surat Ketetapan Keterlanjutan Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) Kab. Dairi atas Pengembalian Sisa BOK Tambahan 2020, maka dilakukan koreksi atas penyelesaian dan pengakuan piutang atas sisa

Dana BOK Tambahan di Kab. Dairi sebesar Rp1.086.529.976 sehingga jumlah ini mengurangi jumlah DAK Nonfisik yang diselesaikan melalui penyaluran DAU secara keseluruhan.

Kemudian terdapat Pemindahan Saldo Piutang dari Satker 999820 ke Satker KPPN sebagai tindaklanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 31/KM.7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dana BOP Kesetaraan). Sesuai dengan PMK tersebut, Penyaluran kedua dana tersebut dialihkan dari KPA BUN Pengelolaan Penyaluran TKDD ke KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Berdasarkan Saldo Piutang atas Dana BOP PAUD dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan berdasarkan LK TA 2021 Audited dan penyelesaian piutang melalui pemotongan DAU, masih terdapat Saldo Piutang yang diakui di Akun Dana BOP PAUD dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp92.318.164.750. Mengingat penyaluran Dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan sudah dialihkan melalui penyaluran langsung ke Satuan Pendidikan, maka Saldo tersebut juga sudah dipindahkan ke Satker KPPN yang menyalurkan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Lebih lanjut, saldo yang dipindahkan tersebut telah diselesaikan melalui potongan SPM/SP2D penyaluran melalui KMK Nomor 30/KM.07/2022 sebagaimana diubah dengan KMK Nomor 35/KM.07/2022 sebesar Rp91.163.764.750.

Saldo akhir piutang per 31 Desember 2022 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel berikut:

No.	Jenis Dana	Saldo Piutang DAK Nonfisik
1.	Dana TPG ASND	457.838.287.837
2.	Dana TKG ASND	120.945.677.770
3.	Dana Tamsil Guru ASND	199.428.417.148
4.	Dana BOK	1.632.014.160.458
5.	Dana BOKB	543.789.870.167
6.	Dana PK2UMK	14.189.188.386
7.	Dana Pelayanan Adminduk	53.519.220.386
8.	Dana Pelayanan Kepariwisata	17.306.079.825
9.	Dana BOP Museum dan Taman Budaya	10.947.024.799
10.	Dana Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah	148.405
11.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	42.476.705.370
12.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	28.229.322.227
13.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.680.531.299
14.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	25.785.603.163
15.	Dana BOS	230.549.770.420
16.	Dana BOP PAUD	3.226.246.621
17.	Dana BOP Kesetaraan	1.698.837.403
Total		3.393.625.091.684

3. Piutang Lebih Salur Satker DK DIY

Piutang transfer ke Daerah DK DIY yang disajikan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sejumlah Rp47.274.190.776 dan Rp60.713.022.517. Jika dibandingkan dengan neraca Tahun 2021 Audited, Piutang TKD DK DIY pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp13.438.831.741. Hal ini disebabkan karena telah terdapat penyelesaian piutang pada TA 2022 sebesar Rp60.713.022.517 melalui potongan SPM/SP2D penyaluran DK DIY Tahap I TA 2022 dan terdapat pengakuan atas sisa DK DIY di RKUD TAYL pada TA 2022 sebesar Rp47.274.190.776.

Pengakuan atas sisa DK DIY di RKUD TAYL pada TA 2022 sebesar Rp47.274.190.776 sesuai dengan adanya sisa DK DIY di RKUD pada akhir TA 2022 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap III Tahun Anggaran 2022.

B. Piutang TKDD Lainnya

Piutang TKDD Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 ialah sebesar Rp6.663.568.678 dan Rp108.143.992.667 atau menurun sebesar Rp101.480.423.989. (93,84%).

Pengurangan nilai piutang Dana Desa sebesar Rp101.480.423.989 terdiri atas:

1. Potongan SPM/SP2D penyaluran transfer berdasarkan KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas) nomor 16/KMK.07/2022 sebesar Rp87.869.747.536.
2. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III Tahun 2022 sebesar Rp13.610.676.453.

C. Piutang TKD Diestimasi – DBH

Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.616.216.532.079, apabila dibandingkan dengan Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.779.870.229, Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.593.436.661.850 atau 6.994,93%. Terkait dengan kenaikan estimasi piutang/LB Tahun 2022 yang cukup signifikan tersebut, dapat disampaikan bahwa estimasi LB Tahun 2022 merupakan selisih antara realisasi penerimaan negara dan realisasi penyaluran DBH tahun 2022. Berdasarkan perhitungan tersebut, LB Gas Bumi memiliki nilai terbesar apabila dibandingkan dengan jenis DBH lainnya. Di sisi lain, kenaikan burden sharing sebagaimana diatur dalam PMK 100/PMK.02/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 194/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas Terhadap Kenaikan PNBPN Minyak dan Gas Bumi yang Dibagihasikan, juga menjadi salah satu faktor penyebab turunnya penerimaan yang dibagihasikan sehingga berdampak pada bertambahnya Lebih Bayar DBH Gas Bumi.

D.2.1.1.14.4. Piutang Subsidi (BA 999.07)

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.350.000.000. Jumlah Piutang Bukan Pajak tersebut, Rp1.519.760.319.124, lebih kecil dari Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.532.110.319.124.

Terdapat pengurangan atas saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.519.760.319.124,00 yang berasal dari:

1. Pelunasan atas Piutang PBBKB atas pembayaran subsidi JBT Minyak Solar tahun 2015 s.d. 2018 pada PT Pertamina sebesar Rp1.499.485.865.475.
2. Pelunasan atas Piutang PBBKB atas pembayaran subsidi JBT Minyak Solar tahun 2015 s.d. 2018 oleh PT. AKR CORPORINDO TBK sebesar Rp20.171.438.515.
3. Pembayaran atas piutang subsidi oleh PT SHS sebesar Rp103.015.134.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.350.000.000 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Piutang ini merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri.

D.2.1.1.14.5. Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)

Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp304.815.087.684 dan Rp289.929.611.126. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Perbandingan piutang bukan pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2022	31 Desember 2021
059	Kementerian Kominfo	12.262.905.762	0
018	Kementerian Pertanian	288.901.122.353	289.012.730.310
999	MPP Kartu Prakerja	821.544.690	659.624.405
999	OJK	119.223.400	148.723.400
999	SKK Migas	2.710.291.479	108.533.011
Total		304.815.087.684	289.929.611.126

Piutang bukan pajak tersebut terdapat pada:

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp12.262.905.762 yang merupakan kelebihan pembayaran dan pengakuan BO LPU Pos BA 999.08 dari hasil verifikasi. Beban LO diakui sebesar Rp329.930.974.407 sedangkan realisasi hasil verifikasi sebesar Rp317.668.068.645 sehingga terdapat kelebihan realisasi sebesar Rp12.262.905.762 (belum disetorkan kembali ke kas negara).
- b. Kementerian Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp288.901.122.353 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
	PT. SHS	PT. Pertani	Jumlah	PT. SHS	PT. Pertani	Jumlah
Piutang CBN	235.312.610.399	36.794.725.767	272.107.336.166	235.312.610.399	36.794.725.767	272.107.336.166
Biaya Distribusi CBN	13.133.698.434	3.698.612.007	16.832.310.441	13.133.698.434	3.698.612.007	16.832.310.441
Temuan LHP CBN	4.700.000.000	0	4.700.000.000	4.811.607.957	0	4.811.607.957
Jasa Giro Dana CBN	(1.039.912.247)	(3.698.612.007)	(4.738.524.254)	(1.039.912.247)	(3.698.612.007)	(4.738.524.254)
Total	252.106.396.586	36.794.725.767	288.901.122.353	252.218.004.543	36.794.725.767	289.012.730.310

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan rincian piutang bukan pajak sebagai berikut:

1. Saldo Piutang CBN merupakan nilai benih CBN pertanggal pelaporan yang masih terdapat pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero). Nilai Piutang CBN per 31 Desember 2022 ini diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Atas Pengelolaan Bagian Anggaran 999.08 Kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No: R.320/PW.130/G.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020. Nilai Piutang CBN PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp235.312.610.398,50 terdiri dari:
 - a. Persediaan bahan dan pestisida sebesar Rp109.232.000;
 - b. Uang muka fee pengelolaan CBN sebesar Rp7.608.666.240;
 - c. Piutang lain-lain untuk relokasi senilai Rp234.096.700;
 - d. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan CBN sebesar Rp4.930.295.737 (sebesar Rp1.041.018.103 pada rekening bank per 31 Desember 2019);
 - e. Benih yang tidak berada di gudang dan penangkar sebesar Rp222.430.319.721,50.

Sedangkan untuk nilai piutang CBN pada PT. Pertani (Persero) sebesar Rp36.794.725.767 merupakan benih yang tidak berada di gudang penangkar.

2. Biaya Distribusi CBN merupakan nilai biaya distribusi penyaluran CBN pertanggal pelaporan yg masih terdapat pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp13.133.698.434 dan PT. Pertani (Persero) sebesar Rp3.698.612.007. Nilai Biaya Distribusi CBN per 31 Desember 2022 ini diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Atas Pengelolaan Bagian Anggaran 999.08 Kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No: R.320/PW.130/G.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020.
 3. Saldo Piutang Bukan Pajak Tahun 2016 sebesar Rp4.811.607.957 tersebut merupakan Temuan LHP BPK RI No. 25/LHP/XVII/06/2013 berupa uang muka penyegaran benih CBN pada PT Sang Hyang Seri (Persero) yang harus disetorkan ke Kas Negara. Pada periode Laporan Keuangan Semeester I TA. 2022 terdapat cicilan pembayaran penyelesaian kewajiban PT. SHS sebesar Rp111.607.957.
 4. Jasa giro pengelolaan dana CBN pada BUMN pelaksana CBN sebesar Rp4.738.524.254 yang sudah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian: 1) PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp1.039.912.247, merupakan Saldo Induk yang berasal dari biaya penyimpanan dan pemeliharaan CBN; dan 2) PT. Pertani (Persero) sebesar Rp3.698.612.007 merupakan Saldo Induk yang berasal dari biaya distribusi benih yang masih disimpan di rekening bank PT. Pertani (Persero).
- c. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp821.544.690 yang berasal dari pengembalian belanja dan tuntutan perbendaharaan atas rekomendasi BPK RI .
- d. Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp119.223.400 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang tersebut bersumber dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
- e. SKK Migas sebesar Rp2.710.291.479, yang terdiri dari Rp108.533.011 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya dan Rp2.601.758.468 merupakan koreksi untuk Mencatat pengembalian belanja TA 2022 yang dikembalikan tahun berikutnya, telah diakui sebagai beban tahun 2022 sehingga Beban lain-lain dicatat overstated pada tahun 2022.

D.2.1.1.14.6. Piutang Bukan Pajak (BA 999.99)

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp230.805.791.472.706 dan Rp213.220.152.041.719. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu

tidak lebih dari satu tahun yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Pada UAPBUN TK DJPB	201.917.018.643	209.793.541.479
Piutang Pada UAPBUN TK DJA	20.176.468.675.625	18.595.659.568.916
Piutang Pada UAPBUN TK DJKN	210.427.405.778.438	194.414.698.931.324
Jumlah	230.805.791.472.706	213.220.152.041.719

1. Piutang Pada UAPBUN TK DJPB per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp201.917.018.643 dan Rp209.793.541.479 terdiri dari:

- a. Piutang pada satker transaksi khusus pengelola kas Negara sebesar Rp70.254.755.919 yang berasal dari piutang atas Piutang pendapatan Pelaksanaan Treasury Notional Pooling bulan Desember 2022 yang akan diterima pada bulan Januari 2023 senilai Rp34.508.786.416, dan Piutang pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau hibah bulan Desember 2022 yang diterima pada bulan Januari 2023 sebesar Rp35.745.969.503;
- b. Piutang pada satker transaksi khusus Pensiun sebesar Rp131.662.262.724 yang berasal dari:
 - 1) Piutang kelebihan pembayaran jaminan kesehatan polri TW IV 2022 BPJS sebesar Rp150.799.588;
 - 2) Piutang kelebihan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2022 Taspen sebesar Rp55.935.739.005;
 - 3) Jasa Giro Bulan Desember 2022 Taspen sebesar Rp3.369.004.831;
 - 4) SUP Retur bulan Desember 2022 sebesar Rp32.627.394.681;
 - 5) SUP Kompensasi bulan Desember 2022 sebesar Rp30.798.354.630;
 - 6) Setoran Kas Negara Non Dapem dan Susulan bulan Desember 2022 sebesar Rp3.479.128.041;
 - 7) Jasa Giro Bulan Desember 2022 Asabri sebesar Rp153.261.541;
 - 8) Potongan utang Non TGR (Non Dapem Desember 2021) Asabri sebesar Rp241.623.375;
 - 9) SUP Setor Retur bulan Desember 2022 Asabri sebesar Rp4.906.957.032

2. Piutang PNBPN UAPBUN TK DJA merupakan Piutang PNBPN Migas periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.176.468.675.625 dan

Rp18.595.659.568.916 merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas.

Jumlah tersebut terdiri dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, overlifting KKKS dan piutang PNBP migas lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp)	%
Hasil Penjualan Minyak	10.724.087.642.125	7.586.239.061.047	3.137.848.581.078	41,36
Hasil Penjualan Gas	4.543.151.240.677	3.801.172.697.426	741.978.543.251	19,52
Overlifting KKKS	3.951.734.539.222	4.408.191.068.453	(456.456.529.231)	(10,35)
PNBP Migas lainnya	957.495.253.601	2.800.056.741.990	(1.842.561.488.389)	(65,80)
Total Piutang	20.176.468.675.625	18.595.659.568.916	1.580.809.106.709	8,5

Saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.176.468.675.625 lebih tinggi sebesar Rp1.580.809.106.709 dari posisi per 31 Desember 2021.

Dari saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.176.468.675.625 tersebut terdiri dari:

- Hasil penjualan Minyak atas transaksi lifting Minyak bulan Desember 2022 yang belum jatuh tempo sebesar Rp10.724.087.642.125. Piutang dimaksud umumnya jatuh tempo dan diselesaikan pada bulan Januari 2023.
- Hasil Penjualan Gas atas transaksi lifting gas bulan Desember 2022 sebesar Rp4.543.151.240.677. Piutang dimaksud umumnya jatuh tempo dan diselesaikan pada bulan Januari 2023.
- Piutang Overlifting KKKS sebesar USD253,446,289 atau setara dengan Rp3.951.734.539.222 terdiri dari piutang overlifting atas nilai estimasi overlifting sebesar USD231,990,729 atau setara dengan Rp3.617.199.441.777 dan nilai aktual sebesar USD21,455,560 atau setara dengan Rp334.535.097.445.

Nilai aktual sebesar Rp334.535.097.445 setara dengan USD21,455,560 merupakan saldo piutang PNBP Migas Tahun 2022 yang masih belum disepakati dengan KKKS dengan rincian sebagai berikut:

No	KONTRAKTOR	Saldo Overlifting Pemerintah (USD)		
		Minyak	Gas	Total
1	MEDCO E&P MALAKA	2,190,496	- 640,580	1,549,916
2	ENI EAST SEPINGGAN LTD,	-	1,309,577	1,309,577
3	TEXCAL MAHATO EP FZCO	18,596,067	-	18,596,067
Jumlah		20,786,563	668,997	21,455,560

Atas outstanding saldo overlifting sebesar USD21,455,560 di atas, dapat dijelaskan

sebagai berikut:

- Outstanding piutang overlifting KKKS Medco Malaka sebesar USD1,549,916 disebabkan oleh ketidakcukupan bagian negara dari gas bumi untuk menutupi sisa kekurangan Medco E&P Malaka terkait dengan implementasi kebijakan Harga Bumi Tertentu (HGBT), sehubungan dengan pemberlakuan harga USD6,56/MMBTU dari yang seharusnya menggunakan harga USD7,03/MMBTU. Sehubungan dengan hal tersebut, BPMA telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait dengan ketidakcukupan bagian negara dari gas bumi untuk menutupi sisa kekurangan Medco E&P Malaka sebagai dampak dari Pengembalian Volume Gas In Kind kepada buyer (PTGN). Salah satu pokok hasil pembahasan, telah disepakati bahwa periode perhitungan harga gas USD7,03/MMBTU dapat berlaku sebelum Kepmen ESDM Nomor 89K/2020 dan Kepmen 91K/2020 ditetapkan. Dengan demikian, perlu dilakukan perhitungan ulang atas pengembalian secara Volume In-Kind dengan mekanisme business-to-business dan tidak melibatkan entitlement bagian negara. Saat ini, BPMA dan Medco E&P Malaka menunggu konfirmasi dari buyer (PTGN) terkait perhitungan yang disampaikan dengan perhitungan harga gas USD7,03/MMBTU.
 - Outstanding piutang overlifting KKKS Eni East Sepinggan (Eni ES) sebesar USD1,309,577 disebabkan ketidaksepakatan perhitungan overlifting versi Eni ES yang berdasarkan revenue yang dibayarkan oleh buyer. Sementara itu, perhitungan overlifting versi SKK Migas berdasarkan Laporan Lifting Pengiriman Migas (Laporan A0). Oleh karena itu, Eni ES tidak bersedia membayar tagihan overlifting atas revenue yang belum diterima dari buyer. Namun demikian, berdasarkan pembahasan antara SKK Migas dan KKKS, dispute tersebut telah menemukan titik tengah. Eni ES akan melakukan revisi FQR Tahun 2021. Outstanding piutang overlifting KKKS Eni East Sepinggan (Eni ES) sebesar USD1,309,577 telah diselesaikan di Rekening Migas pada tanggal 10 April 2023.
 - Outstanding piutang overlifting KKKS Texcal Mahato sebesar USD18,596,067 disebabkan oleh perbedaan interpretasi kontrak atas perhitungan kewajiban DMO. Namun demikian, berdasarkan pembahasan yang dilakukan antara SKK Migas dan KKKS, dispute tersebut telah menemukan titik tengah dan KKKS telah melakukan revisi perhitungan DMO tersebut. KKKS Texcal Mahato telah menyampaikan tagihan DMO sesuai perhitungan SKK Migas. SKK Migas telah menyampaikan permintaan pembayaran DMO Fee Texcal Mahato dimana salah satu klausul dalam permintaan pembayaran tersebut adalah rekomendasi untuk memperhitungkan (offsetting) kewajiban Pemerintah kepada KKKS dengan kewajiban KKKS kepada Pemerintah atas saldo overlifting KKKS tahun 2021 sebagaimana Surat SKK Migas Nomor SRT-0150/SKKIG0000/2023/S4 tanggal 30 Maret 2023.
- d. Transaksi Piutang PNBP Migas Lainnya sebesar Rp957.495.253.601, dari saldo piutang tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Nilai
1.	Piutang Denda Gas	1.231.539.143
2.	Piutang Denda Minyak	15.798.633.606
3.	Piutang DMO	940.074.315.587
4.	Piutang Jasa Pandu Tunda	390.765.265
Jumlah		957.495.253.601

Atas Piutang Migas lainnya berupa denda keterlambatan penyeteroran MMKBN sebesar Rp15.798.633.606 telah diajukan surat permohonan penghapusan Denda keterlambatan oleh PT Kilang Pertamina Nomor 263/KPI00000/2022-S0 tanggal 16 September 2022 hal Permohonan Keringanan PNBP. Permohonan penghapusan denda dimaksud telah disetujui dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-26/MK.02/2023 tanggal 16 Januari 2023 hal Persetujuan Permohonan Keringanan PNBP an. PT Kilang Pertamina Internasional. Menteri Keuangan menyetujui atas permohonan pengurangan denda dimaksud sebesar Rp11.353.237.376, selanjutnya sisa tagihan atas denda yang tidak disetujui sebesar Rp4.445.396.230 telah disetor ke RKUN via Billing SIMPONI pada tanggal 10 Februari 2023.

3. Piutang PNBP UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp210.427.405.778.438 dan Rp194.414.698.931.324 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	0	1.176.715.352.919
2	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	210.404.156.919.609	193.215.361.403.607
3	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	23.248.858.829	Rp22.622.174.798
TOTAL		210.427.405.778.438	194.414.698.931.324

- a. Piutang yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina.

Perhitungan sewa aset eks Pertamina pada mulanya didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang menjelaskan nilai objek sewa selama 32 Tahun sebesar Rp9.472.807.941.523. Berdasarkan surat tersebut, seluruh BMN eks Pertamina kelompok aset eks KKKS senilai Rp16,2 Triliun yang

digunakan oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP disetujui untuk dikenakan biaya sewa, kecuali terhadap aset berupa sumur dan tanah sepanjang merupakan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).

Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) menyampaikan Laporan Inventarisasi Aset Eks Pertamina kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menerangkan hasil inventarisasi aset eks Pertamina kelompok eks KKKS yang digunakan oleh Pertamina berupa sumur, tanah, peralatan, bangunan, dan aset lainnya, dengan pengelompokan sebagai aset masih digunakan, aset tidak digunakan, aset digunakan anak perusahaan lainnya, aset tidak ditemukan, dan aset dalam proses usul hapus, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Status Aset	Bangunan	Equipment	Lain-Lain	Sumur	Tanah	Grand Total
Digunakan	601.111	5.889.151	140.667	5.404.568	1.741.017	13.776.514
Digunakan Anak Usaha Lain	241	203.899	1.312	-	-	205.452
Proses Usul Hapus	9.366	86.619	519	9.456	2.028	107.988
Tidak Digunakan	103.168	1.161.309	19.121	207.227	449.777	1.940.602
Tidak Ditemukan	11.185	185.587	12.524	1.498	742	211.536
Grand Total	725.071	7.526.565	174.143	5.622.749	2.193.564	16.242.092

SKK Migas melalui suratnya Nomor SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa peralatan, bangunan, dan aset lain-lain yang berstatus digunakan sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan rincian sebagai berikut:

UNIT	Equipment	Bangunan	Lain-lain	Grand Total
	Masih Digunakan	Masih Digunakan	Masih Digunakan	
Reg Jawa	1.224.326.862.000	102.658.104.000	111.023.870.000	1.438.008.836.000
Kawasan Timur	419.133.095.522	77.183.384.000	15.515.077.000	511.831.556.522
Reg Sumatera	2.855.534.590.000	274.425.208.000	3.673.196.000	3.133.632.994.000
UBEP Adera	116.409.369.551	501.242.000	0	116.910.611.551
Talisman	4.065.030.000	1.780.968.000	0	5.845.998.000
UBEP Jambi	144.393.015.000	71.588.257.000	5.153.085.000	221.134.357.000
UBEP Lirik	293.053.917.000	19.668.524.000	3.103.672.000	315.826.113.000
UBEP Satar	36.711.086.000	13.881.564.267	45.894.000	50.638.544.267
UBEP Limau	234.690.912.000	67.942.000	2.133.534.000	236.892.388.000
UBEP Tanjung	560.833.422.333	39.355.713.665	18.819.000	600.207.954.998
TOTAL	5.889.151.299.406	601.110.906.932	140.667.147.000	6.630.929.353.338

Perhitungan Piutang PNBPN didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa equipment, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS).

Atas dasar tersebut, SKK Migas menghitung besaran tunggakan biaya sewa Aset eks Pertamina oleh PT Pertamina EP dari bulan September 2003 s.d. Juni 2014 sebesar Rp2.227.577.829.636,98 dan telah dilunasi dengan cara swap off dengan utang subsidi Pemerintah kepada Pertamina pada Tahun 2014 tersebut.

Kemudian, kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan dokumen perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina EP Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 yang menyatakan objek sewa menyewa adalah BMN yang berasal dari kelompok aset eks KKKS Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP berupa fasilitas produksi, bangunan, HBM bergerak, dan aset lain-lain senilai Rp6.630.929.353.338.

PT Pertamina EP telah melakukan penyetoran kembali pada Tahun 2016 sebesar Rp518.041.355.730 sehingga posisi saldo piutang pada Tahun 2016 berdasarkan perhitungan PT Pertamina EP sudah nihil. Pembayaran tersebut dilanjutkan untuk periode tahun-tahun selanjutnya sebesar Rp207.216.542.292 per tahun.

Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003.

Oleh karena itu, maka tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar Rp6.630.929.353.338: 384 bulan = Rp17.268.045.191 per bulan atau Rp207.216.542.292 per tahun.

Perhitungan Piutang PNBPN untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP hingga Tahun 2022 sebesar Rp0, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Piutang PNB	Nilai (Rp)
Saldo 1 Januari 2022	1.176.715.352.919
Mutasi Tambah:	207.216.542.292
Penggunaan sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2022	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	(1.383.931.895.211)
Pembayaran Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2021	(207.216.542.292)
Koreksi pencatatan Piutang karena telah disepakati perjanjian angka dasar sewa antara Kemenkeu c.q. DJKN dengan PT Pertamina EP	(1.176.715.352.919)
Saldo 31 Desember 2022	0

Adapun progres sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

- Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi BA-01/KN.3/REKON.PEP/2015 antara DJKN dengan Pertamina EP dengan hasil Jumlah aset bangunan, equipment, dan aset lainnya sebesar Rp8,425 Triliun, digunakan sebanyak Rp6,63 Triliun, dan aset yang tidak digunakan sebesar Rp1,794 Triliun.
- Berdasarkan hasil Rekonsiliasi tahun 2015 di atas, dilakukan pemetaan atas aset Rp1,794 Triliun dalam rangka verifikasi atas aset yang benar-benar tidak digunakan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473.
- Oleh karena itu besaran sewa BMN Eks Pertamina yang perlu dibayar oleh PT Pertamina EP selama 32 (tiga puluh dua) tahun setelah ditambahkan hasil pemetaan adalah sebesar Rp7.243.343.227.811 (Rp6.630.929.353.338+Rp612.413.874.473). Sehingga besaran sewa BMN eks Pertamina yang harus dibayarkan per tahun setelah diperhitungkan hasil pemetaan adalah Rp226.354.475.869
- Realisasi biaya sewa yang telah dibayarkan oleh PT PEP mulai periode September 2003 s.d. Desember 2021 (jangka waktu 219 bulan = 18,25 tahun) adalah sebesar Rp3.781.701.896.827

(tiga triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)

- f. Adapun perhitungan sewa yang seharusnya dibayarkan oleh PT Pertamina EP dengan menggunakan tarif sewa setelah pemetaan untuk periode dari September 2003 s.d. Desember 2021 = Rp4.130.969.184.609 (Rp226.354.475.869 x 18,25 tahun), sehingga, kekurangan sewa yang belum dibayar PT Pertamina EP sebesar = Rp349.267.287.782 (Rp4.130.969.184.609 - Rp3.781.701.896.827).
- g. Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat perubahan besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp349.267.287.782
- h. Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.
- i. PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-SO tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:
 - 1) Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil Phisical Check BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.
 - 2) Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK dimaksud, PT Pertamina EP menyampaikan Hasil Phisical Check Aset 2019 sebagai berikut:

Kelas Aset	Digunakan	Tidak Digunakan	Total
Objek Sewa			
Bangunan	502.296.425.065	98.814.481.867	601.110.906.932
Equipment	4.157.250.251.287	1.731.901.048.120	5.889.161.299.406

Kelas Aset		Digunakan	Tidak Digunakan	Total
Lain-lain		94.463.625.000	46.203.522.000	140.667.147.000
Subtotal	Objek Sewa	4.754.010.301.352	1.876.919.051.987	6.630.929.353.338

- 3) Berdasarkan hasil PCA 2019 tersebut, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352.
- j. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Pertamina EP sebanyak dua kali dan disepakati untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan pihak lain yang terkait.
 - k. Selanjutnya, terkait dengan koreksi besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp349.267.287.782 pada laporan keuangan, telah dimintakan permintaan pendapat melalui nota dinas Direktur PKNSI Nomor 2755/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Inspektorat IV dan Nomor 2756/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang pada intinya meminta pendapat apakah surat kepada Pertamina EP perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dapat dijadikan dasar untuk dilakukan koreksi piutang.
 - l. Menanggapi permintaan pendapat tersebut, Inspektorat IV berpendapat agar Dit. PKNSI segera melakukan pembahasan dengan PT. Pertamina EP untuk menyepakati hasil proses identifikasi dan verifikasi atas BMN yang dimanfaatkan dan menyusun perjanjian pemanfaatan BMN berdasarkan hasil kesepakatan dengan PT. Pertamina EP. Mengingat Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua mengatur pencatatan piutang pemanfaatan BMN pada neraca berdasarkan naskah perjanjian sewa.
 - m. Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina, telah dilakukan rapat via Zoom antara DJKN dengan Pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 24 April 2022, dimana berkaitan dengan adanya perbedaan besaran tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk kembali kepada angka dasar sewa sesuai kesepakatan semula yaitu sebesar Rp6.630.929.353.338, dan akan dilakukan koordinasi di internal kedua belah pihak.
 - n. Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-SO tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi

dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp0.

b. Piutang Bukan Pajak Aset Eks BLBI

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp210.404.156.919.609 dan Rp193.215.361.403.607 yang terdiri dari:

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Kredit eks BPPN	100.403.046.368.539	88.395.148.351.941
Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA	100.060.644.793.342	94.856.188.395.927
Piutang BDL	9.940.465.757.728	9.964.024.655.739
Jumlah	210.404.156.919.609	193.215.361.403.607

1. Aset Kredit Eks BPPN

Aset kredit eks BPPN yang dilaporkan di Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.403.046.368.539 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp88.395.148.351.941, atau terjadi penambahan piutang pada Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp12.007.898.016.598.

Adapun rincian Aset Kredit Eks BPPN sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN (ATK serta Non ATK yang telah melalui tahap PB/PJPN)	37.947.642.314.451	28.376.797.487.305
2	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	30.470.191.881.578	30.191.862.559.335
3	Aset kredit ATK yang masih dikelola DJKN	29.321.077.942.229	27.197.048.916.106
4	Aset Kredit ATK Lainnya	2.664.134.230.281	2.629.439.389.195
	Jumlah	100.403.046.368.539	88.395.148.351.941

Rincian lebih lanjut terkait Aset Kredit yang berasal dari Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham disajikan lebih lanjut pada Pengungkapan Penting Lainnya.

Rincian lebih lanjut terkait Aset Kredit dilihat di [lampiran LD9](#).

2. Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Aset kredit eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan kepada PT PPA (Persero) yang kemudian setelah berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima tertanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero).

Pengelolaan Aset Kredit eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dilakukan dengan cara menyerahkan pengurusan/penagihan aset kredit dimaksud kepada PUPN.

Nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp100.060.644.793.342 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp94.856.188.395.927 atau terjadi kenaikan nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp5.204.456.397.415. Detil dapat dilihat pada [lampiran LD10](#).

Adapun rincian Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi	Saldo 31 Desember 2021
1.	Aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN	96.752.034.799.881	5.229.819.161.226	91.522.215.638.655
2.	Aset kredit yang masih dikelola DJKN	3.308.609.993.461	(25.362.763.811)	3.333.972.757.272
	Jumlah	100.060.644.793.342	5.204.456.397.415	94.856.188.395.927

3. Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi

Piutang eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan. Adapun 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan sebagai berikut:

- a. 13 (tiga belas) Bank Dalam Likuidasi telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kemenkeu;
- b. 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham pembubaran Tim Likuidasi;

- c. 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta, namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya.

Sedangkan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan sebagai berikut:

- a) 4 (empat) BDL yaitu PT Bank Prasadha Utama, PT Bank Asiatic, PT Bank Global Internasional, dan PT Bank Dagang Bali telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
- b) 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Ratu, tidak melakukan penandatanganan BAST Aset, namun PT Bank Ratu pada semester II tahun 2017 telah melunasi kewajibannya.

Saldo Piutang eks BDL per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.940.465.757.728 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.964.024.655.739.

Penurunan nilai Piutang eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan pencairan deviden atas saham eks BDL yang telah jatuh tempo pada tahun 2022. Rincian tersebut dapat dilihat pada [lampiran LD11](#).

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
I. Eks Dana Talangan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI	7.698.602.065.423	11.888.938.781.558
Dikurangi : Pengembalian 2006 s.d 2021		4.190.336.716.135
Dikurangi : Pengembalian s.d 31 Desember 2022	19.364.033.540	
Saldo I	7.679.238.031.883	7.698.602.065.423
II. Eks Dana Penjaminan		

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal Kewajiban BLBI	2.265.422.590.316	3.321.282.950.812
Dikurangi : Pengembalian 2006 s.d 2021		1.055.860.360.496
Dikurangi : Pengembalian s.d 31 Desember 2022	4.194.864.471	
Saldo II	2.261.227.725.845	2.265.422.590.316
Jumlah Saldo I & II	9.940.465.757.728	9.964.024.655.739

c. Piutang Bukan Pajak pada satker TK DJKN Pengelola asset KKKS

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.248.858.829 dan Rp22.622.174.798 yang semula tercatat pada akun piutang lain-lain. Piutang Lain-Lain merupakan piutang terhadap pemanfaatan sewa BMN yang berasal dari KKKS oleh Pihak lain yang belum dibayarkan ke kas Negara dan piutang terhadap transfer antar KKKS yang telah melebihi periode 1 tahun dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pihak Ketiga	Jumlah per 31 Desember 2022	
			USD	Rp
1	Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Jawa*	PT. Pertamina (Persero)	1,413,347	22.036.900.967
2	Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Jawa*	PT. Pertamina (Persero)	68,393	1.066.375.860
3	Sewa pada KKKS - Conocophillips Indonesia Inc,Ltd	Perusda Anambas Sejahtera	-	145.582.002
				23.248.858.829

*Kurs konversi mata uang sesuai jisdor 31 Desember 2022

D.2.1.1.15. BAGIAN LANCAR PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Bagian
Lancar
Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp7.695.816.466.255** dan **Rp6.966.022.901.429**, atau mengalami kenaikan sebesar Rp729.793.564.826 (10,48%). Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

No	Debitur	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA.999.03)	27.000.000.000	20.500.000.000
2.	Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA 999.99)	7.668.816.466.255	6.945.522.901.429
Jumlah		7.695.816.466.255	6.966.022.901.429

Mutasi Bagian Lancar Piutang jangka Panjang Lainnya BA 999.03 Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo (Rp)	
1	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021		
	• Jatuh Tempo Akhir 2020	5.500.000.000	
	• Jatuh Tempo Akhir 2021	7.500.000.000	
	• Jatuh Tempo Akhir 2022	7.500.000.000	
	Total Saldo		20.500.000.000
2	Dikurang:		
	Pelunasan Tahun 2022		(1.000.000.000)
3	Ditambah:		
	Reklasifikasi Dari Jk. Panjang ke Bagian Lancar		
	• Jatuh Tempo Akhir 2023		7.500.000.000
4	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021		
	• Jatuh Tempo Akhir 2020	4.500.000.000	
	• Jatuh Tempo Akhir 2021	7.500.000.000	
	• Jatuh Tempo Akhir 2022	7.500.000.000	
	• Jatuh Tempo Akhir 2023	7.500.000.000	
	Total Saldo		27.000.000.000

Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya BA 999.99 sebesar Rp7.668.816.466.255 terdiri dari:

1. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Saldo Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.872.754.606.409 jumlah ini adalah piutang lancar kredit pemerintah dan piutang jangka pendek lainnya PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp773.382.049.559, rincian sebagai berikut:

Bagian lancar piutang jangka panjang 2015	Rp193.345.512.390
Bagian lancar piutang jangka panjang 2016	Rp193.345.512.390
Bagian lancar piutang jangka panjang 2017	Rp193.345.512.390
Bagian lancar piutang jangka panjang 2018	Rp193.345.512.389
Jumlah	Rp773.382.049.559

Ditambah bunga yang timbul hingga tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp275.324.009.644 dengan rincian sebagai berikut:

Bunga tahun 2015	Rp15.467.640.991
Bunga tahun 2016	Rp37.122.338.379
Bunga tahun 2017	Rp37.122.338.379
Bunga tahun 2018	Rp37.122.338.379
Bunga tahun 2019	Rp37.122.338.379
Bunga tahun 2020	Rp37.122.338.379
Bunga tahun 2021	Rp37.122.338.379
Bunga tahun 2022	Rp37.122.338.379
Jumlah	Rp275.324.009.644

Dan denda kelambatan pengembalian pinjaman sebesar Rp1.829.048.547.206 dengan rincian sebagai berikut:

Denda tahun 2016	Rp134.568.476.623
Denda tahun 2017	Rp282.284.448.089
Denda tahun 2018	Rp282.284.448.089
Denda tahun 2019	Rp282.284.448.089
Denda tahun 2020	Rp283.057.830.139
Denda tahun 2021	Rp282.284.448.089
Denda tahun 2022	Rp282.284.448.088
Jumlah	Rp1.829.048.547.206

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang akan nampak sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	773.382.049.559	773.382.049.559
Bunga	275.324.009.644	238.201.671.263
Denda	1.829.048.547.206	1.546.764.099.118
Pembiayaan	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
Jumlah	2.872.754.606.409	2.553.347.819.941

Pada tahun 2018 PT Minarak Lapindo Jaya menyampaikan surat nomor 004/L. Dirut/MLJ/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang menyatakan akan menyetorkan ke rekening pemerintah sebesar Rp5.000.000.000. Pembayaran tersebut terlaksana pada tanggal 20 Desember 2018 dengan kode billing 820181217258580, Pemerintah telah mengakui pembayaran itu sebagai pengurang saldo piutang namun belum mengklasifikasikan pembayaran tersebut sebagai pelunasan pokok, bunga maupun denda.

2. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya kepada Yayasan Supersemar

Bagian Lancar Piutang jangka panjang Yayasan Supersemar per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.796.061.859.846.

Besar piutang negara kepada Yayasan Supersemar seluruhnya sebesar 75 persen x US \$ 420.002.910,64 = US \$ 315.002.183 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan 75 persen x Rp185.918.048.904,75 = Rp139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen). Dari jumlah ini telah dilakukan penyetoran sebesar Rp242.081.000.259 ke Kas Umum Negara pada tanggal 28 November 2019. Dengan demikian saldo piutang per 31 Desember 2019 adalah:

Piutang kepada Yayasan Supersemar per 31 Desember 2019	
Dalam rupiah (Rp)	139.438.536.678,56
Dalam mata uang asing (USD)	315.002.183
Penyetoran	242.081.000.259
Sisa Piutang dalam rupiah (Rp)	0
Sisa Penyetoran dalam rupiah (Rp)	102.642.463.580,44
Konversi sisa penyetoran per 31 Desember 2019 (USD)	7.383.813,38
Sisa Piutang dalam mata uang asing (USD)	307.618.369,62

Saldo Piutang per 31 Desember 2021		4.392.175.081.489
Dalam mata uang asing (USD)	307.618.369,62	
Kurs tengah	14.278	

Saldo Piutang per 31 Desember 2022		4.577.976.576.741
Dalam mata uang asing (USD)	307.618.369,62	
Kurs tengah	15.592	
Konversi (a)		4.796.385.619.174
Penyetoran (b)		323.759.328
Saldo Piutang per 31 Desember 2022 (a)- (b)		4.796.061.859.846

Besar piutang sebesar US \$307.618.392,62 berasal dari pengurangan US \$315.002.183 dengan US \$7.383.813,38.

Bagian Lancar Piutang kepada Yayasan Supersemar disajikan pada Neraca sebagai Aset lancar. Nilai Bagian Lancar Piutang kepada Yayasan Supersemar per 1 Januari 2022 sebesar Rp4.392.175.081.489. Selama periode Tahun 2022 terdapat mutasi Piutang kepada Yayasan Supersemar sebagai berikut:

Mutasi tambah:

Terdapat mutasi tambah pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar yang berasal dari perubahan kurs per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.592. Dengan demikian terdapat kenaikan sebesar Rp404.210.537.686.

Mutasi kurang:

Selama periode Tahun 2022 terdapat mutasi kurang pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar sebesar Rp323.759.328 yang berasal dari pencairan sisa nilai rekening yang telah dilakukan pemblokiran dan pencairan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo Akhir:

Saldo Bagian Lancar Piutang jangka panjang Yayasan Supersemar per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.796.061.859.846.

D.2.1.1.16. BAGIAN LANCAR PIUTANG PEMBERIAN PINJAMAN

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Jumlah Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp23.717.712.129.347** dan **Rp22.932.217.837.753** mengalami kenaikan sebesar Rp785.494.291.594 (3,43%). Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman meliputi Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman, dan Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrua. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	13.243.361.172.791	12.824.977.726.807
2.	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	10.028.553.279.479	9.761.187.808.737
3.	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrua	445.797.677.077	346.052.302.209
Jumlah		23.717.712.129.347	22.932.217.837.753

D.2.1.1.17. PIUTANG BLU

Piutang BLU Piutang Dari Kegiatan operasional BLU per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp0** dan **Rp1.859.450.374** mengalami penurunan sebesar Rp1.859.450.374 (100%). Berdasarkan analisis pisah batas, diketahui bahwa terdapat retur atas pembayaran langsung uang ganti kerugian pengadaan tanah PSN menggunakan Dana Jangka Panjang sebesar Rp1.859.450.374 pada 30 Desember 2021. Atas pembatalan pembayaran dimaksud, pada tanggal yang sama LMAN telah melakukan penagihan kepada mitra perbankan. Pembayaran tagihan pengembalian dana dari mitra perbankan baru direalisasikan penerimaannya pada 01 Januari 2022. Atas transaksi tersebut, LMAN mengakui adanya piutang lain-lain jangka pendek dalam neraca.

D.2.1.1.18. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PIUTANG BUKAN PAJAK

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp222.683.814.334.009** dan **Rp208.722.626.641.792** mengalami kenaikan sebesar Rp13.961.187.692.217 (6,69%). Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Penyisihan Piutang Hibah (999.02)	0	14.819.076
2.	Penyisihan Piutang Deviden (BA 999.03)	70.054.713.538	64.887.908.553
3.	Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman (BA 999.04)	13.005.909.661.729	11.920.008.630.751
4.	Penyisihan Piutang Subsidi (BA 999.07)	6.175.000.000	13.824.794.087
5.	Penyisihan Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)	1.737.684.276	1.705.618.185
6.	Penyisihan Piutang Migas dan BLBI (BA 999.99)	209.599.937.274.466	196.722.184.871.140
Jumlah		222.683.814.334.009	208.722.626.641.792

D.2.1.1.18.1. Penyisihan Piutang Hibah (BA 999.02)

Penyisihan Piutang Tidak tertagih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 0 dan Rp14.819.076. Piutang Negara bukan pajak pada tahun 2021 tersebut merupakan sisa Hibah RR yang masih harus dikembalikan oleh Pemda. Pada tahun 2022 semua piutang dari sisa Hibah RR telah diselesaikan baik dengan daerah menyetor melalui mekanisme PNPB dan melalui mekanisme Pemotongan DAU oleh DJPK.

D.2.1.1.18.2. Penyisihan Piutang Deviden (BA 999.03)

Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019.

Nilai Penyisihan Piutang Bukan Pajak (Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai) per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp70.054.713.538 yang terdiri dari Saldo Penyisihan Piutang Bukan Pajak atas piutang dividen sebelum TB 2021 sebesar

Rp56.554.713.538 dan penyisihan atas saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2022 yang diklasifikasikan dalam kualitas macet sebesar Rp13.500.000.000.

Bagian Lancar atas piutang Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas (hasil restrukturisasi utang) sebesar Rp27.000.000.000 disisihkan sebesar Rp13.500.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo awal Penyisihan Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya sesuai Laporan Keuangan TA 2021 (Audited) sebesar Rp7.000.000.000.
2. Penyisihan atas saldo Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2021 yang ditetapkan kembali menjadi kualitas macet (kualitas piutang sebelum adanya restrukturisasi) sebesar seratus persen atau Rp6.750.000.000.
3. Penghapusan penyisihan saldo Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020 akibat pembayaran bagian lancar piutang tersebut sebesar Rp1.000.000.000.
4. Penyisihan atas saldo Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2022 dengan kualitas kurang lancar sebesar sepuluh persen atau Rp750.000.000.

D.2.1.1.18.3. Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman (BA 999.04)

Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.005.909.661.729 dan Rp11.920.008.630.751. Penyisihan Piutang Tak Tertagih berupa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak, terdiri dari:

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, dan
- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	7.400.532.661.740	6.680.663.133.540
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	5.605.376.999.989	5.239.345.497.211
Jumlah	13.005.909.661.729	11.920.008.630.751

D.2.1.1.18.4. Penyisihan Piutang Subsidi (BA 999.07)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.175.000.000 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.824.794.087. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.175.000.000 terdapat pada Kementerian Pertanian yang terdiri dari:

Uraian	Ditjen TP	Total
Piutang Bukan Pajak	12.350.000.000	12.350.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.175.000.000	6.175.000.000
Piutang Bukan Pajak (Netto)	6.175.000.000	6.175.000.000

D.2.1.1.18.5. Penyisihan Piutang Belanja Lain-Lain (BA 999.08)

Saldo penyisihan piutang tak tertagih-piutang bukan pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.737.684.276 dan Rp1.705.618.185. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Perbandingan penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2022	31 Desember 2021
059	Kementerian Kominfo	61.314.529	0
018	Kementerian Pertanian	1.444.505.613	1.445.063.652
-	MPP Kartu Prakerja	4.107.723	3.298.122
-	Otoritas Jasa Keuangan	119.223.400	148.723.400
-	SKK Migas	108.533.011	108.533.011
Total		1.737.684.276	1.705.618.185

D.2.1.1.18.6. Penyisihan Piutang Migas dan BLBI (BA 999.99)

Nilai penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp209.599.937.274.466 dan Rp196.722.184.871.140 merupakan penyisihan Piutang DJPB, Pemanfaatan Aset Eks Pertamina, Aset Kredit Eks BPPN, Aset KKKS, Piutang kepada Yayasan Supersemar dan Piutang Migas. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penyisihan Piutang DJPB	658.311.314	1.048.967.707
Penyisihan Piutang Aset Kredit eks BPPN	201.684.874.676.673	189.800.588.604.107
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina	-	1.176.715.352.919
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset KKKS	23.248.858.829	10.984.341.009
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Piutang kepada Yayasan Supersemar	4.645.258.459.848	4.241.047.922.162
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset BPLS	2.837.814.206.409	1.259.203.709.970
Penyisihan Piutang Migas	408.082.761.393	232.595.973.266
Total	209.599.937.274.466	196.722.184.871.140

- a. Penyisihan piutang tak tertagih piutang DJPB per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp658.311.314 dan Rp1.048.967.707.
- b. Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas Aset Kredit Eks BPPN berasal dari penyisihan piutang lain-lain.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berasal dari penyisihan piutang lain-lain. Metode penyisihan piutang tidak tertagih atas aset kredit eks BPPN, aset kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero), dan Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak tertagih Eks BPPN, dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero). Sedangkan metode penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang eks BDL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.09/2019.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp201.684.874.676.673 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp189.800.588.604.107 yang menghasilkan beban penyisihan piutang pada Laporan Operasional sebesar Rp11.884.286.072.567.

Rincian Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan di [Lampiran LD12](#)

- c. Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas pemanfaatan aset eks Pertamina

Mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang

Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, atas Piutang PNPB berupa piutang sewa BMN sebesar Rp1.176.715.352.919 dilakukan penyisihan sebesar 100%. Dengan pertimbangan bahwa masih dilakukan proses pembahasan bersama antara DJKN dengan PT Pertamina EP untuk menentukan besarnya nilai piutang sewa.

Piutang sewa sebesar Rp1.176.715.352.919 telah timbul sejak tahun 2017 karena terdapat perbedaan pengakuan nilai perolehan BMN Eks Pertamina yang disewa oleh Pertamina EP antara DJKN dengan Pertamina EP. DJKN mengakui nilai perolehan BMN yang disewa Pertamina EP didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang menjelaskan nilai objek sewa selama 32 Tahun sebesar Rp9.472.807.941.523, sedangkan Pertamina EP mengakui BMN Eks Pertamina yang disewa sebesar Rp6.630.929.353.338 berdasarkan surat SKK Migas Nomor SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina EP Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 yang menyatakan objek sewa menyewa adalah BMN yang berasal dari kelompok aset eks KKKS Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP berupa fasilitas produksi, bangunan, HBM bergerak, dan aset lain-lain senilai Rp6.630.929.353.338.

Mengingat telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka penyisihan piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp0.

d. Penyisihan piutang tak tertagih Aset KKKS

Penyisihan piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp23.248.858.829 dan Rp10.984.341.009. Besaran penyisihan piutang ditentukan berdasarkan PMK 69/PMK.06/2014. Hasil perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 berdasarkan PMK 69/PMK.06/2014 adalah sebesar 100% dari nilai Piutang per 31 Desember 2022 karena umur piutang tersebut telah melebihi 5 tahun setelah tanggal jatuh tempo.

e. Penyisihan piutang tak tertagih kepada Yayasan Supersemar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan

Supersemar per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.645.258.459.848. Perhitungan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019. Besaran penyisihan piutang tak tertagih piutang dihitung berdasarkan persentase nilai piutang sesuai kualitas piutang sebagai berikut:

Dasar perhitungan	Uraian	Keterangan
Klasifikasi piutang	Piutang yang dikelola oleh BUN	PMK No. 127/PMK.05/2018
Jatuh tempo piutang	8 Juli 2015	Tanggal putusan MA Nomor 140/PK/Pdt/2015
Kualitas	Macet	Piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo
Persentase	100%	Dari nilai piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

Nilai agunan atau nilai barang sitaan per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp323.759.328 sehingga menjadi sebesar Rp150.803.399.998 karena adanya penyeteroran uang yang berasal dari pencairan sisa nilai rekening yang telah dilakukan pemblokiran dan pencairan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai tersebut berasal dari nilai likuidasi aset sitaan berupa:

1. Tanah dan bangunan "Gedung Granadi" di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 8-9 Blok X/I, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan (Aset Granadi) sebesar Rp246.173.000.000; dan
2. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Raya Megamendung No. 6 RT 03 RW 03 Kampung Citalingkup, Desa Megamendung, Bogor (Aset Megamendung) sebesar Rp5.166.000.000.

Terdapat selisih sebesar Rp2 yang berasal dari pembulatan minus Rp1 dan kelebihan penyeteroran uang yang berasal dari pencairan sisa nilai rekening minus Rp1.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 69/PMK.06/2014 jo. PMK 207/PMK.06/2019 nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan

(SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya.

Nilai koreksi penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut:

Saldo Piutang per 31 Desember 2022	4.796.061.859.846
Nilai agunan per 31 Desember 2022	150.803.399.998
Penyetoran	323.759.328
Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021	(4.241.047.922.162)
Penyisihan Piutang tak tertagih per 31 Desember 2022	(4.645.258.459.848)
Koreksi Penyajian Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(404.210.537.686)

Saldo penyisihan piutang tak tertagih pada Bagian Lancar Piutang jangka panjang Yayasan Supersemar per 31 Desember 2022 sebesar Rp404.210.537.686.

f. Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset BPLS

Penyisihan piutang per 31 Desember 2022 adalah Rp2.837.814.206.409 sedang nilai penyisihan per 31 Desember 2021 adalah Rp1.259.203.709.971, artinya Penyisihan atas Piutang Tidak Tertagih telah dikenakan tarif 50% atau kategori dengan kualitas piutang diragukan karena piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun namun belum sampai 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo.

Hasil penilaian kembali jaminan adalah sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 622,34 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor : 00347/2.00113-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar sebesar minus 137.276.401.432 rupiah yang kemudian dianggap nol karena nilainya negatif.
- b. Tanah seluas 22,85 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor : 00348/2.013-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar 58.234.000.000 rupiah dan nilai ini yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai penyisihan piutang yang dalam pertemuan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS disepakati sudah mencapai kualitas piutang yang diragukan.
- g. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBPN Migas per 31 Desember 2022 sebesar Rp408.082.761.393 merupakan estimasi atas ketidaktertahiran piutang jangka pendek migas dari piutang minyak bumi, gas bumi dan migas lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan besaran penyisihan piutang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piuang Tidak Tertagih, yaitu sebagai berikut:
 - Piutang lancar adalah piutang yang belum jatuh tempo.
 - Piutang Kurang Lancar adalah piutang yang sudah jatuh tempo sampai dengan 1

tahun setelah jatuh tempo.

- Piutang diragukan adalah piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun setelah jatuh tempo.
- Piutang macet adalah piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 3 tahun.

D.2.1.1.19. PIUTANG PFK

Piutang PFK Piutang PFK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp22.005.766 dan Rp143.818.277 mengalami penurunan sebesar Rp121.812.511 (84,70%). Piutang tersebut berasal dari Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Piutang Dari	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	BPJS Kesehatan	262.632	113.012.873
2	Perum BULOG	21.743.134	30.805.404
	Jumlah	22.005.766	143.818.277

Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu (Akun 118122) adalah akun yang digunakan untuk menampung kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai selama satu tahun kepada Badan Penyelenggara. Kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan Dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) Dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara. Penerimaan PFK Pegawai yang berkurang umumnya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yakni di tahun berjalan terdapat:

- koreksi transaksi penerimaan Dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyeter gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK, dan
- permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai, yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

Badan Penyelenggara memiliki kewajiban untuk mengembalikan kelebihan penyaluran tersebut ke Kas Negara. Karakteristik akun tersebut adalah sebagai berikut:

- Saldo Akun 118122 bertambah hanya dari jurnal manual (koreksi manual) dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai Tahunan. Jurnal manual dilakukan setelah pembayaran atas permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai dan koreksi transaksi penerimaan Dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyeter gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK di tahun berjalan telah selesai. Jurnal manual dilakukan untuk mereklasifikasi saldo negatif (debit) akun utang PFK di akhir tahun ke Akun 118122. Saldo

utang PFK yang bernilai negatif (debit) menunjukkan bahwa terdapat kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara.

- b. Saldo Akun 118122 berkurang ketika Badan Penyelenggara mengembalikan kelebihan penyaluran tersebut ke Kas Negara dengan menggunakan Akun PFK 811921 (Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu).

D.2.1.1.20. PERSEDIAAN

Persediaan Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.080.515.563** dan **Rp1.103.506.647** mengalami penurunan sebesar Rp22.991.084 (2,08%). Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2022	31 Desember 2021
-	Otoritas Jasa Keuangan	0	5.192.000
-	SKK Migas	1.080.515.563	1.038.914.647
-	Istana Kepresidenan	0	59.400.000
Total		1.080.515.563	1.103.506.647

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	1.065.199.951	1.010.246.638
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	6.739.520	14.719.100
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	59.400.000
4	Bahan Baku	0	0
5	Persediaan Lainnya	8.576.092	19.140.909
Jumlah		1.080.515.563	1.103.506.647

1. Persediaan pada OJK sebesar Rp0, terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	0	5.192.000
2	Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Jumlah		0,00	5.192.000,00

2. Persediaan pada SKK Migas sebesar Rp1.080.515.563, terdiri dari:

No	Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Persediaan		
1	117111	Barang Konsumsi	1.065.199.951	1.005.054.638
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	6.739.520	14.719.100
3	117131	Bahan Baku	0	0
4	117199	Persediaan Lainnya	8.576.092	19.140.909
Total Rincian Persediaan			1.080.515.563	1.038.914.647

3. Persediaan pada Istana Kepresidenan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp59.400.000.

D.2.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

D.2.1.2.1. DANA BERGULIR

Dana Bergulir

Nilai Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp18.311.462.826.420** dan **Rp16.913.827.101.272** mengalami kenaikan sebesar Rp1.397.635.725.148 (8,26%). Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir yang dilaporkan merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran 999.03 atau dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran Lainnya, dan sedang dalam proses perguliran atau *outstanding* di masyarakat atau pihak ketiga lainnya.

Nilai dana bergulir yang disajikan sesuai dengan rincian:

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	5.451.564.836.079	5.118.136.113.732
2	BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	4.249.993.794.927	4.271.993.794.927
3	UAIP (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - DNS)	0	17.912.211.670
4	BLU Pusat Investasi Pemerintah	6.640.289.050.977	5.496.601.629.976
5	BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	637.009.941.741	621.181.127.954

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2022	31 Desember 2021
6	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Dit. SMI)	1.314.717.940.318	1.388.002.223.013
7	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	17.887.262.378	0
JUMLAH		18.311.462.826.420	16.913.827.101.272

D.2.1.2.1.1. Dana Bergulir LPDB KUMKM

Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.451.564.836.079 dan Rp5.118.136.113.732.

Adapun rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Piutang Dana Bergulir	5.094.321.064.666
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2022	357.243.771.413
Jumlah	5.451.564.836.079

Nilai Piutang Dana Bergulir 31 Desember 2022 sebesar Rp5.451.564.836.079 merupakan nilai piutang pokok mitra yang didalamnya termasuk pembayaran piutang oleh Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Jawa Tengah) atas klaim subrogasi mitra Koperasi Kampus Unsoed sebesar Rp860.633.286 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LPDB-KUMKM dengan PT. Jamkrida Jateng Nomor: 025/SP3-JJT/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 hal Persetujuan Penjaminan Prinsip (SP3) atas nama Koperasi Kampus Unsoed.

Nilai realisasi bersih dana bergulir merupakan potensi pengembalian atas dana bergulir yang telah dicairkan dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada mitra koperasi dan UKM yang mana pengembalian dana tersebut dikembalikan kepada LPDB-KUMKM sebagai Pengalihan Dana Bergulir. Besarnya nilai realisasi bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, tertagihnya dana bergulir dari mitra Koperasi dan UKM (sebagai pengalihan) serta piutang lancar dan piutang tidak lancar. LPDB-KUMKM mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir dari Biro Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM yang merupakan hasil dari laporan masing-masing Deputi pelaksana program, LPDB-KUMKM melaksanakan rekonsiliasi kas terkait dana pengalihan yang telah masuk ke rekening LPDB-KUMKM.

MUTASI DANA BERGULIR 31 Desember 2022	
Piutang Dana Bergulir Per 1 Januari 2022	4.750.667.596.071
Mutasi Tambah :	
- Penyaluran Tahun 2022	1.861.562.015.269
- NRB Program Kementerian Koperasi	357.243.771.413
- Koreksi subrogasi mitra koperasi Kampus Unsoed	860.633.286
Mutasi Kurang	
- Pengembalian Pokok Tahun 2022	(1.511.848.900.479)
- Crash Program 2022	(5.514.534.316)
- PSBDT 2022	(558.218.300)
- Koreksi reklas dana bergulir tahun 2016	(16.660)
- Koreksi Crash Program Mitra CV Sabina Teknik dan Tabita	(847.510.205)
Piutang Dana Bergulir Per 31 Desember 2022	5.451.564.836.079

Nilai sebesar Rp357.243.771.413 merupakan nilai NRB yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM dan telah dicatat LPDB-KUMKM pada akun dana bergulir sesuai dengan Surat Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Nomor:B-82/SM/KU.02.00/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 hal Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM Periode Semester II Tahun 2022 dan telah dicatat LPDB-KUMKM pada akun dana bergulir sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara LPDB-KUMKM dengan Kementerian Koperasi dan UKM pada rapat tanggal 11-14 Januari 2023.

Mutasi tambah sebesar Rp860.633.286 merupakan nilai koreksi BPK atas reklas dana bergulir terkait klaim subrogasi mitra Koperasi Kampus Unsoed yang sebelumnya diakui sebagai

pengurang dana bergulir. Mutasi kurang sebesar Rp847.510.205 merupakan penghapusan piutang pokok atas 2 mitra Crash Program Tahun 2022 atas nama CV Sabina Teknik dan Koperasi Tabita sebesar Rp683.098.495 dengan nilai pelimpahan dana bergulir dari KPKNL kepada LPDB-KUMKM sebesar atas mitra Crash Program Tahun 2022 sebesar Rp164.411.710.

D.2.1.2.1.2. Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT

Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2022 Audited dan 31 Desember 2021 Audited masing-masing sebesar Rp4.249.993.794.927 dan Rp4.271.993.794.927 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Rincian Dana Bergulir Kementerian Pekerjaan Umum berupa piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BLU BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

Rincian Dana Bergulir BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT adalah sebagai berikut:

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya – Mojokerto	177.572.865.231	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang – Batang	177.730.172.460	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	216.007.138.972	236.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	694.700.739.153
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	765.536.356.328

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	580.448.216.382
PT Jasamarga Gempol Pasuruan/Gempol-Pasuruan	0	0
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways / Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung Tollway / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	173.706.163.639
Jumlah	4.249.993.794.927	4.271.993.794.927

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka sejak bulan Januari Tahun 2015 pembayaran UGR menggunakan dana APBN sehingga penggunaan dana bergulir BLU menjadi terhenti.

Perkembangan Penting Sehubungan dengan Penyaluran Dana Bergulir

- Terdapat 12 BUJT yang telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Piutang Eks Satker BLU BP Set BPJT pada tahun 2022 dan 2023. Sisanya sebanyak satu BUJT, yakni PT Marga Setiapuritama belum menandatangani Perjanjian Penyelesaian Piutang Eks Satker BLU BP Set BPJT.
- Berdasarkan Surat Kepala BPJT No. HK02.03-P/95 tanggal 7 Juli 2015 kepada PT Marga Setiapuritama dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor HK.02.03-Mn/539 tanggal 3 Juli 2015 dilakukan Pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ruas Semarang-Batang dengan nama BUJT PT Marga Setiapuritama. Sebagai tindak lanjut pengakhiran PPJT, Kepala Satker BLU BP Set BPJT telah menyampaikan surat nomor KU.02.03.Pt5/Kasatker/2334 tanggal 9 Juli 2015 kepada PT Marga Setiapuritama untuk Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Layanan Dana Bergulir. Dan sebagai konsekwensinya adalah segala piutang BLU BP Set BPJT kepada PT Marga Setiapuritama menjadi jatuh tempo seketika dan perhitungan Nilai Tambah dan Denda Nilai Tambah dihentikan sejak tanggal 7 Juli 2015.

Selanjutnya Kepala BLU BP Set BPJT mengirim Surat ke Kepala BPJT agar piutang tersebut diatas dijadikan kewajiban bagi BUJT baru yang mendapat hak pengusahaan untuk ruas tersebut.

Ruas Semarang-Batang ditender ulang dan telah dibentuk BUJT baru untuk menyelesaikan ruas jalan tol tersebut yaitu PT Jasamarga Semarang Batang sebagai pemenang tender dengan PPJT Nomor 01/PPJT/BPJT/2016 tanggal 27 April 2016.

BUJT lama yaitu PT Marga Setiapuritama mengajukan permohonan arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diadakan dan diselenggarakan pemeriksaan arbitrase (permohonan arbitrase) atas perselisihan atau sengketa antara BPJT dan PT Marga Setiapuritama, dengan surat nomor 193/MSP-1601/AF/VIII/16 tanggal 18 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Sekretariat BANI dengan Register Nomor 881/VIII/ARB-BANI/2016 tanggal 18 Agustus 2016. BANI telah memberikan keputusan pada tanggal 13 September 2017 namun PT Marga Setiapuritama tidak puas dengan keputusan BANI dan kemudian menggugat keputusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI dengan Register Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2017 dan PN Jakarta telah memberikan keputusan pada tanggal 28 September 2017.

Kemudian PT Marga Setiapuritama mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2018. PN Jakarta Selatan menolak gugatan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018. PT Marga Setiapuritama kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor Register 199/PDT/2019/PT.DKI dan PT DKI Jakarta telah memberikan keputusan pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta.

- c. Terdapat satu BUJT yaitu PT. Translingkar Kita Jaya (Ruas Cinere-Jagorawi) tidak menyepakati hasil perhitungan dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nilai Pokok Pinjaman, Nilai Tambah, dan Denda Nilai Tambah atas penggunaan dana bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka pengusahaan jalan tol Ruas Cinere-Jagorawi.

Satker BLU BP Set BPJT kemudian mengirimkan surat penagihan piutang pokok, piutang nilai tambah dan piutang denda nilai tambah kepada PT Translingkar Kita Jaya sebagai tindak lanjut dari setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

PT Translingkar Kita Jaya telah mengirimkan surat kepada Sekretaris BPJT Nomor D1-472-EB/1019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Konfirmasi Perhitungan Beban Nilai Tambah Penggunaan Dana Bergulir Jalan Tol Cinere-Jagorawi yang berisi bahwa PT Translingkar Kita Jaya mengakui masa pembebanan Nilai Tambah sebatas hanya sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 untuk Seksi II dan tanggal 4 Desember 2016

untuk Seksi III. PT Translingkar Kita Jaya telah membayarkan Beban Nilai Tambah hingga batas waktu tersebut diatas dan dengan demikian menurut PT Translingkar Kita Jaya saldo Hutang Nilai Tambah Layanan Dana Bergulir sampai dengan tanggal 18 April 2019 adalah Nihil, sedangkan dalam Perjanjian Layanan Dana Bergulir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatur mengenai jangka waktu pengenaan nilai tambah sampai dengan tanah telah selesai dibebaskan atau jalan tol beroperasi atau pinjaman telah dilunasi dan seluruh piutang dilunasi.

D.2.1.2.1.3. Dana Bergulir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UAIP)

Dana bergulir yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp17.912.211.670.

Selain itu sesuai PMK Nomor 99/PMK.05/2008, Kementerian Lingkungan Hidup tidak menyalurkan kembali dana bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU.

Dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penyaluran dana bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement (SAA)* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap (DNS)* yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises*. Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selama lima tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010. Pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga pengelolaan dana bergulir untuk program DNS dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Program DNS merupakan program keringanan utang kepada Indonesia melalui penyediaan sejumlah dana oleh Pemerintah Indonesia untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kedua pemerintah sepakat bahwa ada empat indikator keberhasilan program ini, yaitu:

- a. Perbaikan satu indikator kualitas lingkungan di sekitar penerima manfaat, dalam hal ini UMK;
- b. 80% dana tersalurkan ke pengguna;
- c. *Non performing investment* 10%; dan
- d. Terbentuknya mekanisme dana bergulir di akhir pelaksanaan program.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tahun 2010 antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan BSM sebagai bank penyalur, ditetapkan suku bunga dana bergulir yang disalurkan oleh BSM

adalah setinggi-tingginya sebesar 11% per tahun dan serendah-rendahnya sebesar 6% per tahun. Jangka waktu pembiayaan atau penyaluran dana bergulir adalah selama-lamanya 8 (delapan) tahun dan termasuk satu tahun masa tenggang sejak penandatanganan akad pembiayaan.

Pada Tahun 2021 telah dilakukan pengalihan pengelolaan dana bergulir yang berasal dari Dana Reboisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan BAST Nomor BA-105/MK/05/2020 – Nomor BA.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2020 pada tanggal 29 September 2020. Pengalihan dimaksud termasuk pengalihan untuk dana DNS. Pengalihan diwakili oleh Direktur BLU Pusat P2H kepada Direktur BLU BPDH. Selanjutnya, dalam rangka pengalihan dana DNS, telah dilakukan Audit oleh BPKP berdasarkan Surat Nomor S-371/D1/01/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang hasil Audit Dana Debt Nature Swap (DNS) dalam rangka pengalihan Pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

D.2.1.2.1.4. Dana Bergulir Pusat Investasi pemerintah

Nilai Dana Bergulir pada 31 Desember 2022 Audited dan 31 Desember 2021 Audited pada BLU PIP sebesar Rp6.640.289.050.977 dan Rp5.496.601.629.976 terjadi kenaikan sebesar Rp1.143.687.421.001 atau 20,81% karena Dana Bergulir telah disalurkan kepada beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

D.2.1.2.1.5. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi). Jumlah Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2022 Audited dan 31 Desember 2021 Audited adalah sebesar Rp637.009.941.741 dan Rp621.181.127.954.

Saldo Dana Bergulir tersebut bersumber dari saldo awal Dana Dana Bergulir pada tahun 2021 sebesar Rp621.181.127.954 ditambah dengan realisasi pencairan dana bergulir tahun 2022 sebesar Rp133.229.750.000 dikurang dengan pengembalian pokok dana bergulir tahun 2022 sebesar Rp117.415.361.213. Kemudian terdapat koreksi pengurangan sebesar Rp14.425.000, koreksi tersebut terjadi karena terdapat pengembalian kepada debitur sebesar Rp14.425.000 dari rekening Operasional Penerimaan, seharusnya pengembalian tersebut bersumber dari Rekening Dana Kelolaan. Saldo Dana Bergulir pada tahun 2022 sebesar Rp637.009.941.741 mengalami peningkatan Rp15.828.813.787 dari tahun 2021 sebesar Rp621.181.127.954.

Pada tahun 2017 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 18 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha

Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp32.880.000.000 dari total plafon pinjaman yang diajukan sebesar Rp60.330.000.000 yang diajukan oleh 18 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Sampai dengan 31 Desember 2017 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp11.125.000.000 kepada 7 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2018 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 587 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp333.416.340.000 yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Selama tahun 2018 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2018 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp215.732.780.000 kepada 293 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp226.857.780.000 yang telah dicairkan kepada 300 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2019 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 333 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp129.500.260.000 yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Selama tahun 2019 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2019 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp182.530.860.000 kepada 394 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Jumlah Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2019 sebesar Rp323.952.927.325 adalah jumlah Dana Bergulir yang sudah termasuk Pengembalian Pokok dari Debitur (LKM-KP, UMKM-KP dan KUKP) sebesar Rp85.435.712.675.

Pada tahun 2020 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 757 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp250.814.430.000 yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Selama tahun 2020 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2020 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp192.674.433.490 kepada 389 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp602.063.073.490 yang telah dicairkan kepada 1.089 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2021 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 3426 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp1.038.141.265.000

yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Selama tahun 2021 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2021 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp270.553.725.000 kepada 1.074 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp872.616.798.490 yang telah dicairkan kepada 2.162 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Realisasi pencairan pada tahun 2021 sebesar Rp270.553.725.000 mengalami peningkatan Rp77.879.291.510 dari tahun 2020 sebesar Rp192.674.433.490, peningkatan tersebut antara lain karena seiring bertambahnya jumlah pengajuan pinjaman dana bergulir dan bertambahnya jumlah pegawai BLU LPMUKP pada tahun 2021.

Sampai dengan 31 Desember 2022 BLU LPMUKP telah merealisasikan pencairan dana bergulir kepada 2.788 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Selama tahun 2022 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2022 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp133.229.750.000 kepada 626 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.005.846.548.490. Jumlah Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp637.009.941.741 adalah jumlah Dana Bergulir yang sudah termasuk Pengembalian Pokok dari Debitur (LKM-KP, UMKM-KP dan KUKP) sebesar Rp368.851.031.749.

D.2.1.2.1.6. Dana Bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup – Dit. SMI

Saldo dana bergulir pada BLU BPD LH per 31 Desember 2022 Audited dan 31 Desember 2021 Audited sebesar Rp1.314.717.940.318 dan Rp1.388.002.223.013 mengalami penurunan sebesar (Rp73.284.282.695) atau 5,57% dari saldo 31 Desember 2021 Audited. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan Dana Bergulir untuk pembiayaan lingkungan belum disalurkan kepada penyalur/masyarakat dan masih dicatat sebagai dana kelolaan BLU oleh BPD LH.

D.2.1.2.1.7. Dana Bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

KPA BA 999.03 BLU BPD LH ditetapkan melalui KMK nomor 89/KMK.06/2022 tanggal 18 Maret 2022. Pada tanggal 2 November 2022 dilakukan pemindahbukuan dana DNS dari Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sesuai dengan BAST Nomor BA-14/KN.3/2022 dan Nomor BAST-24/BPD LH.2/2022 tanggal 2 November 2022, sehingga pencatatan dana DNS dicatat oleh KPA BLU BPD LH.

Nilai dana bergulir pada KPA BLU BPD LH sampai dengan 31 Desember 2022 Audited adalah sebesar Rp17.887.262.378, meningkat 100% dari per 31 Desember 2021, yang berasal dari pengalihan dana DNS eks KLH.

D.2.1.2.2. DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH

*Dana
Bergulir
Diragukan
Tertagih*

Nilai dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp4.813.478.526.898** dan **Rp5.259.103.797.828** mengalami penurunan sebesar Rp445.625.270.930 (8,47%). Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir. Secara rinci, penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih dibentuk pada entitas sebagai berikut:

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	665.876.447.866	808.205.473.670
2	Satker BUN Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	3.895.630.214.638	4.271.993.794.927
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	17.912.211.670
4	BLU LPMUKP	51.622.093.842	27.411.752.130
5	BLU BPD LH (Dit. SMI)	149.261.062.919	98.621.228.223
6	BLU PIP	33.201.445.255	34.959.337.208
7	BLU BPD LH	17.887.262.378	-
JUMLAH		4.813.478.526.898	5.259.103.797.828

Perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih sesuai dengan metode yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non permanen Dalam Bentuk Tagihan.

1. BLU LPDB KUMKM

Nilai Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp665.876.447.866 dan Rp808.205.473.670.

Dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang.

Rincian perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih sebagai berikut :

URAIAN	Nilai
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2021 (Audited)	(808.205.473.670)
Biaya Penyisihan Piutang Dana Bergulir Semester I 2022	313.857.780
Biaya Penyisihan Piutang Dana Bergulir Semester II 2022	142.015.168.024
Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2022	(665.876.447.866)

Dana bergulir yang diragukan realisasinya sebesar Rp665.876.447.866 disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya adalah resiko bisnis (kegagalan bisnis), karakter pengurus dan/atau manager, dan fraud manajemen/pengurus. Atas penyebab tersebut, dalam rangka pembinaan terhadap mitra LPDB-KUMKM yang telah menerima dana bergulir dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet telah dilakukan upaya penanganan diantaranya monitoring pembayaran piutang mitra, monitoring komitmen pembayaran piutang mitra, rescheduling dan restructuring.

Klasifikasi	Dana Bergulir 31 Des 2022	Tarif Penyisihan	Dana Bergulir yang Dapat Diperhitungkan	Nilai Jamian	Dana
Lancar	3.942.674.502.498	0,5%	19.713.372.512	3.450.161.067.339	2.092.099.051
Kurang Lancar	4.406.273.328	10%	440.627.333	11.662.752.000	-
Diragukan	22.117.038.794	50%	11.058.519.397	26.171.174.000	24.500.000
Macet	1.125.110.126.966	100%	1.125.110.126.966	556.939.867.355	663.759.848.815
Jumlah	5.094.307.941.585		1.156.322.646.208	4.044.934.860.694	665.876.447.866

2. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp3.895.630.214.638 dan Rp4.271.993.794.927. Rincian Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	177.572.865.231	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang - Batang	17.773.017.246	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	21.600.713.897	236.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	694.700.739.153
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways/Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	173.706.163.639
Jumlah	3.895.630.214.638	4.271.993.794.927

Penyebab tidak tertagihnya dana bergulir disebabkan belum seluruh BUJT menandatangani adendum/perjanjian layanan dana bergulir baru antara BPJT dan BUJT pasca dicabutnya status BLU BP Set BPJT sebagai Satker BLU. Terdapat 12 (dua belas) BUJT yang telah menandatangani perjanjian penyelesaian piutang Ex BLU BP Set BPJT. Sedangkan satu BUJT, yakni PT Marga Setiapuritama belum menandatangani Perjanjian Penyelesaian Piutang Eks Satker BLU BP Set BPJT.

Kualitas dana bergulir BUJT PT Pemalang Batang Tol Road dan PT Pejagan Pemalang Tol Road mengalami perubahan dari Macet menjadi Kurang Lancar, berdasarkan PMK 69 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 207 Tahun 2019, pada Pasal 13 ayat (1), sesuai dengan perjanjian atau Restrukturisasi Dana Bergulir sebagai berikut.

1. Akta Notaris Ny. Trie Sulistiowarni, S.H. Nomor 02 tanggal 3 November 2022 tentang Perjanjian Penyelesaian Piutang Ex Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol antara Kepala Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Pejagan Pemalang Tol Road.
2. Akta Notaris Ny. Trie Sulistiowarni, S.H. Nomor 03 tanggal 3 November 2022 tentang Perjanjian Penyelesaian Piutang Ex Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol antara Kepala Satuan Kerja

Sekretariat Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Pemalang Batang Tol Road.

Di dalam perjanjian tersebut disebutkan diantaranya maksud dan tujuan perjanjian yaitu untuk penyelesaian Piutang BUJT kepada Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol dengan ketentuan penyelesaian pokok pinjaman, penyelesaian denda, dan penyelesaian nilai tambah (bunga). Selain itu di dalam perjanjian diatur mengenai jadwal pengembalian pokok pinjaman sampai dengan tahun 2024.

Upaya penagihan yang dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi dengan para BUJT sekaligus menyampaikan tagihan berdasarkan hasil rekonsiliasi.

Selain itu, dalam masa pandemi Covid 19 ini, Menteri PUPR telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Stimulus dalam Pengusahaan Jalan Tol yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang menyebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g bahwa bentuk stimulus yang diberikan dalam bentuk penyelesaian kewajiban BLU BPJT meliputi :

1. Pelunasan pokok pinjaman untuk ruas tol yang sudah beroperasi penuh paling lama 5 (lima) tahun sejak mekanisme disepakati.
2. Pelunasan pokok pinjaman untuk ruas tol yang beroperasi sebagian atau belum beroperasi paling lama 5 (lima) tahun setelah beroperasi penuh.
3. Penyelesaian nilai tambah dan denda keterlambatan nilai tambah yang sudah menjadi piutang berdasarkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa penyelesaian kewajiban BLU-BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dituangkan dalam kesepakatan antara BPJT dengan BUJT dan/atau BUMN yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang dibuat paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut ditetapkan.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (program DNS)

Nilai dana bergulir diragukan tertagih 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp17.912.211.670. Akun dana bergulir diragukan tertagih tersebut merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir. Terjadi penurunan nilai Dana Bergulir Diragukan tertagih sebesar Rp17.912.211.670 sebagai akibat pemindahbukuan pencatatan Dana Bergulir yang ada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dana DNS) yang awalnya dicatat pada Laporan Keuangan UAIP menjadi dicatat pada Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-14/KN.3/2022 dan BAST-24/BPDLH.2/2022..

Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir.

Untuk dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup, nilai realisasi bersih adalah sebesar dana yang sedang dalam proses perguliran di masyarakat, dikurangkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan BSM dengan golongan diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan golongan diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun dana bergulir diragukan tertagih.

4. BLU LPMUKP

Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya. Nilai Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp51.622.093.842 dan Rp27.411.752.130. Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih meningkat Rp24.210.341.712 dibandingkan dengan tahun 2021. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada 31 Desember 2022 senilai Rp51.622.093.842 merupakan nilai penyisihan piutang pokok dari hasil akumulasi outstanding pokok senilai Rp637.009.941.741 dikurang dengan nilai penyisihan jaminan sesuai dengan kualitas piutang setiap debitur, dari total nilai dana bergulir tersebut terdapat perbedaan sebesar Rp561.725 yang merupakan kelebihan pembayaran setoran. Rincian berdasarkan kolektibilitas dijelaskan sebagai berikut.

Kolektibilitas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Lancar	81.763.246	245.630.636
Kurang Lancar	1.960.292.360	2.379.641.040
Diragukan	3.502.921.533	3.744.754.740
Macet	46.077.116.703	21.041.725.714
Jumlah	51.622.093.842	27.411.752.130

5. BLU BPD LH

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp149.261.062.919 dan Rp98.621.228.223, mengalami kenaikan sebesar Rp50.639.834.696 atau 51,35% dari tahun sebelumnya. Pada BLU BPD LH mulai tahun 2021, sesuai dengan rekomendasi BPK, dilakukan perhitungan jaminan sebagai pengurang penyisihan piutang.

Perhitungan nilai dana bergulir diragukan tertagih pada BLU BPD LH disajikan pada tabel berikut:

Kualitas Piutang	Outstanding			Perhitungan Penyisihan	
	Outstanding awal	Pengurang dari nilai jaminan	Outstanding setelah penyesuaian	Tarif	Penyisihan Akhir
Lancar	1.076.114.329.420	249.016.936.585	827.097.392.836	0,50%	4.135.486.964
Kurang Lancar	32.366.171.683	310.949.600	32.055.222.083	10%	3.205.522.208
Diragukan	7.873.873.034	-	7.873.873.034	50%	3.936.936.517
Macet	198.363.566.183	60.380.448.954	137.983.117.229	100%	137.983.117.229
Pembulatan	(2)	-	(2)		
	1.314.717.940.318	309.708.335.138	1.005.009.605.180		149.261.062.919

Berdasarkan pendataan yang dilakukan, nilai perhitungan jaminan ini akan terus bertambah seiring dengan proses pendataan yang saat ini tengah dilakukan.

6. BLU PIP

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU PIP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp33.201.445.255 dan Rp34.959.337.208, mengalami penurunan sebesar Rp1.757.891.953 atau 5,03% dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai penyisihan merupakan dampak dari adanya optimalisasi piutang

BLU PIP baru melaksanakan penyisihan dana bergulir diragukan tertagis pada tahun 2021 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non permanen Dalam Bentuk Tagihan.

Rincian Perhitungan dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut:

	Nilai Outstanding	Tarif	Dana Bergulir diragukan tertagih
		Penyisihan	
Lancar	6.640.289.051.004	0,50%	33.201.445.255
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	6.640.289.051.004		33.201.445.255

7. BLU BPD LH (Dit. SMI)

Nilai dana bergulir diragukan tertagih pada KPA BLU BPD LH per 31 Desember 2022 Audited adalah sebesar (Rp17.887.262.378), nilai tersebut berasal dari pengalihan dana DNS eks KLH yang disisihkan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Nilai Dana Bergulir sesuai BAST DNS	Rp17.912.211.670
Pengembalian DNS dari debitur sepanjang tahun 2022 yang diakui sebagai Pokok	(Rp24.949.292)
Nilai Dana Bergulir DNS akhir TA 2022	Rp17.887.262.378
Dana Bergulir diragukan tertagih akhir TA 2022	(Rp17.887.262.378)

D.2.1.2.3. INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN LAINNYA

*Investasi
Jangka
Panjang Non
Permanen
Lainnya*

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp239.872.791.752.439 dan Rp201.663.256.483.208 mengalami kenaikan sebesar Rp38.209.535.269.231 (18,95%).

Investasi nonpermanen Lainnya merupakan investasi nonpermanen yang dimiliki oleh Pemerintah selain Dana Bergulir. Rincian Investasi Nonpermanen Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2022	31 Desember 2021
IP PEN Kementerian BUMN	9.302.480.860.411	9.101.337.360.411
UAIP	278.424.972.767	278.424.972.767
UAKPA Dit SMI (BLU LPDP dan BP Tapera)	199.619.616.324.242	160.336.184.709.324
UAKPA BLU LDKPI	6.000.000.000.000	5.000.000.000.000
PPA DJPK Pinjaman PEN Daerah	24.672.269.595.019	26.947.309.440.706
Jumlah	239.872.791.752.439	201.663.256.483.208

1. Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional

Investasi Pemerintah Non Permanen lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional adalah masing-masing sebesar

Rp9.302.480.860.411 dan Rp9.101.337.360.411. Terdapat kenaikan realisasi investasi sebesar Rp201.143.500.000 atau 2,21% lebih tinggi dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 karena adanya pencairan dari RIPPEN kepada BUMN Penerima Investasi.

Selain itu terdapat pengurangan nilai investasi yang diakibatkan adanya konversi ke dalam bentuk saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.000.000.000.000,- sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022.

Program pemulihan ekonomi nasional baru dijalankan pada tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Adapun investasi pemerintah non permanen yang telah tersalurkan kepada BUMN penerima adalah sebagai berikut:

Penerima Investasi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000	3.500.000.000.000
Perum Perumnas	650.000.000.000	650.000.000.000
PT Krakatau Steel	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
PT Garuda Indonesia Tbk	0	1.000.000.000.000
PT Perkebunan Nusantara III	2.952.480.860.411	1.751.337.360.411
Jumlah	9.302.480.860.411	9.101.337.360.411

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-13/KN/2020 sesuai

SKP Nomor SK-4/KPA999.03.MBU/12/2020 dan Pengesahan SKP Nomor S-77/PB/PB.3/2020.

2. Perum Perumnas sebesar Rp650.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-12/KN/2020 dan Nomor 179/PPI/SMF -KKRI/XI/2020 sesuai SKP Nomor SK-3/KPA999.03.MBU/11/2020 dan Pengesahan SKP Nomor S-68/PB/PB.3/2020, dan SKP Nomor SK-3/KPA999.03.MBU/11/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-173/PB/PB.3/2021.
3. PT Krakatau Steel sebesar Rp2.200.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-14/KN/2020 dan PERJ-187/SMI/1220 sesuai SKP Nomor SK-5/KPA999.03.MBU/12/2020 dan Pengesahan SKP Nomor S-89/PB/PB.3/2020.
4. PT Garuda Indonesia sebesar Rp1.000.000.000.000 sesuai Perjanjian Nomor PRJ-15/KN/2020 dan PERJ-188/SMI/1220 sesuai SKP Nomor SK-1/KPA999.03.MBU/02/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-11/PB/PB.3/2021. Kemudian, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-442/MK.06/2022 tanggal 19 Mei 2022 maka IPPEN kepada PT Garuda Indonesia tidak dilanjutkan dan berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2022, IPPEN kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp1.000.000.000.000 di konversi menjadi tambahan PMN kepada PT Garuda Indonesia.
5. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp2.952.480.860.411,- sesuai Perjanjian Nomor PRJ-16/KN/2020 dan 595/PKS/12/2020 sesuai SKP Nomor SK-2/KPA999.03.MBU/04/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-103/PB/PB.3/2021, SKP Nomor SK-4/KPA999.03.MBU/06/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-1 85/PB/PB.3/2021, dan SKP Nomor SK-7/KPA999.03.MBU/12/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-309/PB/PB.3/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.02/2022 Tanggal 27 Juli 2022.

2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada UAIP

Investasi nonpermanen pada UAIP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp278.424.972.767 dan Rp278.424.972.767. Pada tahun 2020 investasi jangka panjang non permanen terdiri dari :

- a. Investasi jangka panjang non permanen pada Kementerian Perindustrian yang tidak terdapat mutasi pada Tahun 2020 sehingga saldo tahun 2020 sebesar Rp4.089.232.181.
- b. Investasi jangka panjang non permanen pada tiga entitas yaitu PT Karabha Digdaya PT SEG dan PT Aldevco sebesar Rp274.335.740.586.

Investasi Non Permanen lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) melalui Skim 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

Skim 2 adalah pinjaman pembelian mesin dengan suku bunga rendah melalui sistem modal padanan. Pengelolaan pinjaman dengan suku bunga rendah untuk pembiayaan pembelian mesin/peralatan tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Ditjen BIM dengan Lembaga Pengelola Program (LPP). Proporsi modal padanan untuk pembelian mesin tersebut adalah: perusahaan ITPT sebesar 20%, LPP sebesar 10% dan Kemenperin sebesar 70%.

Pihak yang bertindak sebagai LPP untuk penyaluran pinjaman pada tahun 2007 dan 2008 adalah PT PNM, sedangkan untuk pinjaman TA 2009 adalah BSM.

Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp0 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.181.

Investasi Non Permanen pada PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco tahun 2021 senilai Rp274.335.740.586 merupakan pengalihan pencatatan aset saham dari LK BUN Transaksi Khusus DJKN.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Karabha Digdaya sebesar Rp251.240.740.586. PT Karabha Digdaya adalah perusahaan yang berasal dari aset eks. PT PPA. Perusahaan tersebut memiliki 2 (dua) divisi usaha, yaitu pengelolaan lapangan golf (Emeralda Golf) dan pengembangan perumahan (estate) di Cimanggis, Kota Depok.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT SEG Sebesar Rp22.470.000.000. PT SEG berasal dari aset saham Eks PT PPA. Perusahaan tersebut melakukan usaha pengelolaan *real estate* serta pengembangan kawasan Danau Bogor Raya, serta pengelolaan pariwisata (*club house*) yang dikenal dengan nama "Klub Bogor Raya".

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Aldevco sebesar Rp625.000.000. PT Aldevco berasal dari hibah Ir AR Soehoed. Saat ini, perusahaan memperoleh pendapatan operasional dari sewa Gedung Aldevco Octagon.

3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Dit SMI (BLU LPDP Dan BP Tapera)

Investasi Jangka Panjang nonpermanen pada Direktorat SMI pada 31 Desember 2022 sebesar Rp199.619.616.324.242 terdiri dari:

- a. Investasi Non permanen BLU LPDP Rp119.844.502.324.242
- b. Investasi Non permanen BP Tapera Rp79.775.114.000.000

a. Investasi Non permanen BLU LPDP

Investasi jangka BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU. Nilai investasi jangka panjang non permanen BLU LPDP pada 31 Desember 2022 *Audited* dan 31 Desember 2021 *Audited* sebesar Rp119.844.502.324.242 dan Rp99.661.070.709.324. Terjadi kenaikan Rp20.183.431.614.918 atau 20,25%, disebabkan disebabkan adanya adanya pencairan Dana Abadi Pendidikan kepada BLU LPDP, dan pencairan pokok investasi berupa amortisasi kas bagian premium Surat Utang Negara.

Rincian klasifikasi portofolio LPDP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Instrumen	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Deposito	35.806.595.572.854	52.170.182.907.200
2	Obligasi menurut harga perolehan		
	a. Obligasi Negara-HTM	81.956.506.751.388	45.568.887.802.124
	a. Obligasi Korporasi-HTM	2.081.400.000.000	1.922.000.000.000
	b. Obligasi Korporasi-AFS	0	0
	Total	119.844.502.324.242	99.661.070.709.324

b. Investasi Non permanen BP Tapera

Investasi Non permanen BP Tapera per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.775.114.000.000, terdiri dari:

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera sebesar Rp60.675.114.000.000 berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengalihan dari BLU PPDPP.
- Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera yang berasal dari Rekening Investasi BUN sebesar Rp19.100.000.000.000.

BP Tapera merupakan badan hukum publik (sui generis) yang dibentuk sebagai amanat Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Tujuan

pembentukan badan ini adalah menghimpun dan menyediakan dana murah jangka Panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.675.114.000.000 adalah berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sebelumnya saldo Dana FLPP per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.596.006.813.852 dikelola oleh BLU PPDPP dan dicatat sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Dana Bergulir. Pengalihan pengelolaan tersebut berdasarkan amanat UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 Pasal 34; PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64, PMK Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah; serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Penunjukan BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Nilai saldo awal atas pengalihan dana FLPP sebesar Rp60.675.114.000.000 berdasarkan hasil reviu BPKP.

Nilai saldo tersebut didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021-Nomor BAST-07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021, dari Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bergulir FLPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah FLPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penyaluran investasi Dana FLPP didasarkan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan BP Tapera Nomor PI-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Perjanjian tersebut antara lain mengatur mengenai status dana FLPP sebagai tabungan Pemerintah pada BP Tapera di mana Pemerintah berhak menarik Dana FLPP sewaktu-waktu dari BP Tapera dalam hal tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skema penyaluran dana FLPP oleh BP Tapera menggunakan mekanisme yang sama seperti saat dikelola oleh BLU PPDPP. Pada skema dimaksud, BP Tapera menggulirkan dana melalui Bank Penyalur kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur FLPP.

Investasi Non Permanen BP Tapera Rp60.675.114.000.000 disajikan sebesar nilai perolehannya dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat intensi permintaan penyeteroran sebagian atau seluruh Dana FLPP oleh Pemerintah; merupakan investasi nonpermanen yang tidak untuk dimiliki berkelanjutan; dan bukan merupakan model bisnis investasi nonpermanen berbentuk tagihan.

4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen BLU LDKPI (KPA Dit. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral)

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya BLU LDKPI pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.000.000.000.000 dan Rp5.000.000.000.000. Nilai tersebut terdiri dari saldo awal investasi jangka Panjang non permanen lainnya sebesar Rp5.000.000.000.000, penambahan sebesar Rp1.000.000.000.000 atas pencairan dana kerja sama pembangunan internasional pada bulan April 2022.

Atas pencairan Dana KPI tersebut, LDKPI telah melakukan penempatan pada instrumen investasi jangka panjang dalam bentuk Surat Berharga Negara sesuai Surat Instruksi Menteri Keuangan nomor S-363/MK.08/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp1.000.000.000.000.

5. Investasi Jangka Panjang Non Permanen untuk Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman PEN Daerah merupakan dukungan pembiayaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

Investasi Pemerintah tersebut ditempatkan pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan pasal 4, BAB II, PRJ-2/PK/2020 yang telah diubah menjadi PRJ-3/PK/2020.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen untuk Pinjaman PEN Daerah pada 31 Desember 2022 *Audited* dan 31 Desember 2021 *Audited* masing-masing sebesar Rp24.672.269.595.019 dan Rp26.947.309.440.706.

Berdasarkan data dari PT Sarana Multi Infrastruktur yaitu berupa Laporan Triwulanan Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2022 Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, Hingga 31 Desember 2022 telah ditandatangani Perjanjian Pinjaman PEN Daerah dengan total 92 Pemerintah Daerah (107 Fasilitas). Untuk Pemda yang telah melakukan pencairan dapat ditentukan tanggal pengembalian pokok untuk pertama kalinya. Informasi ini dapat digunakan oleh DJPK Kemenkeu untuk dapat membuat prioritas penyusunan kebijakan pemotongan Dana Transfer Umum dalam rangka pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah.

D.2.1.2.4. INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN LAINNYA DIRAGUKAN REALISASINYA

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya Nilai Investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp760.196.912.027 dan Rp582.572.724.048 mengalami kenaikan sebesar Rp177.624.187.979 (30,49%).

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Investasi nonpermanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.181	4.089.232.181
2	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	726.513.235.359	552.226.805.065
3.	IP PEN	32.262.404.302	26.256.686.802
4.	LDKPI	(2.667.959.815)	0
	JUMLAH	760.196.912.027	582.572.724.048

Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya terdapat pada investasi non permanen skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), IP PEN dan LDKPI.

Kementerian Perindustrian

Tidak terdapat perubahan nilai penyisihan pada investasi jangka Panjang non permanen diragukan realisasinya terdapat pada investasi skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Adapun investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada LPDP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp726.513.235.359 dan Rp552.226.805.065

Perhitungan nilai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya pada BLU LPDP sebagaimana berikut:

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Amortisasi Investasi Held to Maturity :	(726.513.235.359)	(552.226.805.065)
- Akumulasi amortisasi Premium	(736.802.324.242)	(553.370.709.324)
- Akumulasi amortisasi Diskon	10.289.088.883	1.143.904.259
Unrealized Holding Gain Investasi Available for Sale		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	(726.513.235.359)	(552.226.805.065)

Sesuai PMK169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, penilaian investasi jangka panjang non permanen lainnya yang memenuhi karakteristik Held To Maturity yang perolehannya secara premium dan diskonto dilakukan pada periode pelaporan keuangan melalui perhitungan penyesuaian amortisasi tahun berjalan. Hasil penilaian Investasi held to maturity secara premium dan/atau secara diskonto disajikan dengan membentuk nilai alokasi sebagai penyesuaian kenaikan atau penurunan nilai tercatat aset (carrying amount) pada periode pelaporan keuangan sebesar Rp726.513.235.359.

IP PEN

Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.262.404.302 dan Rp26.256.686.802 yang merupakan nilai pencadangan investasi non permanen pada perusahaan negara yang berupa pinjaman. Nilai pencadangan tersebut sebesar 0,5% dari nilai perolehan awal pinjaman, maka rinciannya adalah sebagai berikut:

Perusahaan Negara	Nilai Perolehan Awal Pinjaman	Jumlah
(1)	(2)	(3) =(2) x 0,5%
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2.952.480.860.411	14.762.404.302
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000	17.500.000.000
		32.262.404.302

LDKPI

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya yang tercatat dalam neraca pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp2.667.959.815 dan Rp0. Nilai tersebut berasal dari amortisasi diskonto atas penempatan investasi jangka Panjang non permanen lainnya dalam bentuk Surat Berharga Negara.

D.2.1.2.5. INVESTASI PERMANEN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Nilai investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah, atau dapat disebut juga penyertaan modal Negara, per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp2.909.868.558.921.828** dan **Rp2.647.354.332.364.797** mengalami kenaikan sebesar Rp262.514.226.557.038 (9,92%)

Investasi jangka panjang permanen PMN meliputi:

- Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero;
- Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum;
- Penyertaan Modal Luar Negeri;
- Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero	2.710.666.467.617.671	2.469.317.542.593.930
Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum	33.701.371.856.008	31.188.276.593.109
Penyertaan Modal Luar Negeri	30.842.638.442.071	27.757.687.759.097
Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya	134.658.081.006.078	119.090.825.418.663
Total	2.909.868.558.921.828	2.647.354.332.364.797**

**selisih Rp2 karena pembulatan

1. PMN pada Persero

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp2.710.666.467.617.666** dan **Rp2.469.317.542.593.930**.

Pernyataan Modal Pemerintah atau disebut juga Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Persero, merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah $\geq 51\%$, sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

PMN pada Persero dilakukan oleh 2 pihak yakni:

a. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Negara pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50% sehingga nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.634.727.723.533.045 dan Rp2.398.819.219.811.897 atau terdapat peningkatan sebesar Rp235.908.503.721.133 atau 9,83%. Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya Penambahan Modal Negara pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rp5.000.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022.
2. PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp1.975.999.942.400, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022.
3. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp7.499.999.969.336, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022.
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp2.479.999.977.600, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022.
5. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp3.200.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022.
6. PT Hutama Karya (Perseo) Rp31.350.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022.

Kepemilikan pemerintah untuk BUMN persero disajikan dalam mata uang rupiah untuk itu terhadap 4 BUMN yang Menyusun Laporan Keuangan dengan mata uang asing maka akan ditranslasikan ke dalam mata uang rupiah dengan kurs Rp15.592. Empat BUMN yang menggunakan mata Uang dollar adalah PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel dan PT Dirgantara Indonesia.

b. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp75.938.744.084.626 dan Rp70.498.322.782.030, meningkat sebesar Rp5.440.421.302.596 atau 7,72% dari nilai per 31 Desember 2021. Peningkatan nilai tidak terlepas dari adanya Penambahan Modal Negara pada tahun 2022 kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp2.000.000.000.000 dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebesar Rp1.085.000.000.000 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021.

Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Badan Usaha Milik Negara/lembaga tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

- a. Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
- b. Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan

No	Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	PT Sarana Multigriya Finansial	100%	16.320.507.000.000	14.020.849.000.000
2	PT Sarana Multi Infrastruktur	100%	40.547.733.124.174	38.900.280.295.754
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100%	15.153.468.912.000	13.788.714.741.000
4	PT Geo Dipa Energi	94,5%	3.917.035.048.452	3.788.478.745.276
Total			75.938.744.084.626	70.498.322.782.030

Perubahan nilai kepemilikan pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara/Lembaga dibawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan disebabkan oleh peningkatan nilai ekuitas pada masing-masing Perusahaan dan Lembaga.

Rincian persero di bawah Kementerian Keuangan sebagai berikut :

1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan. PT SMF berfungsi untuk mengalirkan dana dari pasar modal ke sektor perumahan dengan menyediakan fasilitas pinjaman, transaksi sekuritisasi, dan efisiensi pasar primer.

2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.75 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur. PT SMI bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur salah satunya melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral.

3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Negara Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. PT PII bergerak di bidang penjaminan infrastruktur dalam rangka peningkatan kelayakan kredit dari proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS).

4. PT Geo Dipa Energi (Persero)

PT Geo Dipa Energi (Persero) (PT GDE) didirikan pada tanggal 5 Juli 2002. PT GDE memanfaatkan nilai ekonomis dan lingkungan energi panas bumi untuk menghasilkan listrik. PT GDE berupaya untuk memenuhi permintaan daya listrik nasional dengan memanfaatkan sifat-sifat hemat biaya dan lingkungan dari energi panas bumi.

2. PMN pada Perum

Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp33.701.371.856.008** dan **Rp31.188.276.593.109**. Terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp2.513.095.262.899 (8,06%) dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dipengaruhi oleh naiknya bagian laba pemerintah dari perusahaan negara yang mengalami kenaikan kinerja sehingga mampu mencatatkan surplus operasional. Selain itu juga dipengaruhi oleh penambahan Penyertaan Modal Negara yaitu kepada Perum Perumnas sebesar Rp1.568.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022.

Pernyataan Modal Pemerintah pada Perum merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Perum dinilai PMN pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN.

3. PMN Luar Negeri

Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp30.842.638.442.071** dan **Rp27.757.687.759.097**. Terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp3.084.950.682.974 (11,11%) dari tahun sebelumnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, perubahan nilai investasi pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) diakibatkan oleh adanya penambahan investasi pemerintah Indonesia pada 6 LKI, yaitu International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Development Association (IDA), Islamic Development Bank (IsDB), International Finance Corporation (IFC), Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) serta akibat dari perubahan nilai tukar.

No	PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Asian Development Bank (ADB)	5.994.088.940.672	5.782.922.934.404
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	3.380.591.603.871	2.859.344.303.698
3	International Development Association (IDA)	1.240.492.799.803	928.375.863.274
4	International Finance Corporation (IFC)	4.467.430.130.720	3.765.622.608.000

No	PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	59.215.609.440	54.225.273.960
6	Islamic Development Bank (IDB)	3.156.174.715.225	2.964.942.927.749
7	International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)	32.119.520.000	29.412.680.000
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	5.114.841.930	4.934.650.953
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	1.324.680.728.000	1.170.210.602.000
10	Common Fund for Commodities (CFC)	19.753.827.346	18.300.772.637
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	346.805.325.064	317.580.542.422
12	Credit Guarantee and Investment Facility	336.787.200.000	265.570.800.000
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	10.479.383.200.000	9.596.243.800.000
JUMLAH		30.842.638.442.071	27.757.687.759.097

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, anggaran pembiayaan Investasi Pemerintah pada LKI TA 2022 ditetapkan sebesar Rp941.989.242.000 dan dapat dilakukan melebihi pagu sepanjang disebabkan oleh selisih kurs. Realisasi pembiayaan pada tahun 2022 adalah Rp1.005.867.829.073 dari pagu awal Rp941.989.242.000 sehingga melebihi pagu karena pelemahan rupiah. Atas hal ini telah dilakukan revisi anggaran sehingga anggaran menjadi Rp1.005.867.831.000.

Pada tahun 2022 terdapat dua pembayaran LKI yang tagihan dalam kurs dolarnya di bawah nilai yang ditetapkan dalam PMK Nomor 183/PMK.010/2022 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2022, yaitu pembayaran pada Islamic Development Bank (IsDB) dan International Finance Cooperation (IFC). Pembayaran penambahan investasi pada IsDB ditetapkan sebesar USD 5.773.454,16 sementara tagihan senilai USD 5.325.374,01 dan pembayaran penambahan investasi pada IFC ditetapkan sebesar USD 22.784.333,33 sementara tagihan senilai USD 22.784.330. Semua pembayaran yang dilakukan pada tahun 2022 sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh LKI.

4. PMN pada Badan Usaha Lainnya

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp134.658.081.006.078** dan **Rp119.090.825.418.663**.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya terdiri dari :

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penyertaan pada Badan Usaha lainnya (UAKPA DJKN)	126.412.765.043.554	111.177.638.958.100
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (UAKPA Dit EAS DJPPR)	614.509.198	601.774.098
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri (UAKPA Kementerian BUMN)	1.776.283.441.533	2.447.709.189.744*
Penyertaan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri (UAKPA BKF)	1.933.408.000.000	1.770.472.000.000
Penyertaan Pada BP Tapera (UAKPA Dirjen Pembiayaan)	2.740.175.360.701	2.694.403.496.722
Bank Tanah (UAKPA Dirjen Pengadaaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan)	1.794.834.651.092	1.000.000.000.000
JUMLAH	134.658.081.006.078	119.090.825.418.663*

*selisih Rp1 karena pembulatan

UAKPA DJKN

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya pada UAKPA DJKN terdiri dari Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI) dan Lembaga Pengelola Investasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp126.412.765.043.554 dan Rp111.177.638.958.100.

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UAKPA DJKN)	26.868.244.000.000	30.120.377.000.000
PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI)	2.598.680.043.554	2.001.641.958.100
Lembaga Pengelola Investasi	96.945.841.000.000	79.055.620.000.000
Total	126.412.765.043.554	111.177.638.958.100

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset Lembaga/Badan usaha secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia (BEI), merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan di dalam skema, serta melakukan penyertaan modal.

Nilai penyertaan Pemerintah pada LPEI per 31 Desember 2022 Audited dan 31 Desember 2021 Audited adalah Rp26.868.244.000.000 dan Rp30.120.377.000.000, mengalami penurunan yang sangat signifikan karena pada tahun 2022 perusahaan membukukan rugi.

PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI)

Nilai Penyertaan Pemerintah pada PT TPI per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp2.598.680.043.554 dan Rp2.001.641.958.100.

PT TPI didirikan pada 16 Maret 2001, pada awalnya, BPPN adalah pemilik 70% saham PT TPI dan sisanya dikuasai oleh Grup Tirtamas Majutama. Pengakhiran tugas BPPN pada 2004, mengakibatkan beralihnya kepemilikan 70% saham kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). Pada tahun 2019, komposisi kepemilikan saham TubanPetro berubah dikarenakan adanya konversi MYB menjadi saham yang dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penambahan modal saham melalui right issue yang seluruhnya diambil oleh PT Pertamina (Persero), sehingga struktur kepemilikan TubanPetro terdiri dari PT Pertamina (Persero) (51%), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (46,99%) dan PT Pertamina Pedeve Indonesia (2%) per 27 November 2019.

Pada November 2022 terdapat penambahan modal saham oleh pemegang saham lain yaitu PT Pertamina (Persero) ke dalam ekuitas PT TPI. Dengan adanya penambahan modal oleh pemegang saham lainnya tersebut, persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan mengalami penurunan dari 46,99% menjadi 35,23%.

Lembaga Pengelola Investasi

Lembaga Pengelola Investasi ("LPI/INA") didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Pasal 165 yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. ruang lingkup kegiatan INA terutama meliputi mengelola investasi dan merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi investasi. Pemerintah Indonesia adalah entitas induk dan pemegang saham pengendali INA. INA bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Nilai penyertaan Pemerintah pada LPI/INA per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp96.945.841.000.000 dan Rp79.055.620.000.000.

Badan Usaha Milik Negara/Lembaga terkecuali PT TPI dan INA (hanya pembinaannya saja yang berada di bawah Kemenkeu), seluruhnya berada di bawah pengawasan dan pembinaan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
2. Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.
3. Salah satu fiscal tools yang digunakan dalam penentuan kebijakan fiskal oleh Menteri Keuangan.

UAKPA Dit EAS DJPPR

Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN (*special purpose vehicle-SPV*)

Nilai penyertaan Pemerintah pada Perusahaan Penerbit SBSN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp614.509.198 dan Rp601.774.098.

Jumlah Investasi Jangka Panjang merupakan jumlah saldo penyertaan modal pemerintah pada badan usaha lainnya sejak tahun 2008 yang didepositokan dalam deposito mudharabah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Jakarta Thamrin.

UAKPA Kementerian BUMN

PMP pada Perseroan Terbatas Lainnya (minoritas) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.776.283.441.533 dan Rp2.447.709.189.744.

PMN pada Non BUMN merupakan kepemilikan Negara pada perusahaan dengan persentase kepemilikan Negara kurang dari sama dengan 50%. Nilai PMN pada Non BUMN dihitung menggunakan metode ekuitas atau metode biaya.

Metode ekuitas digunakan untuk Non BUMN yang kepemilikannya sebesar lebih dari sama dengan 20%. Adapun metode biaya digunakan untuk Non BUMN yang kepemilikannya di bawah 20%.

Sesuai PP Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.06/2022 dilakukan inbreng saham Pemerintah RI pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung kepada PT Danareksa (Persero) tanggal 18 April 2022, sehingga PT SIER dan PT JIEP sudah tidak termasuk minoritas. Namun terdapat satu tambahan perusahaan negara minoritas yang dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Hasil Rapat Tiga Pihak antara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian BUMN pada tanggal 18 April 2023 yaitu PT Perkebunan Nusantara I dengan kepemilikan negara sebesar 24%.

Non BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan dengan menggunakan metode ekuitas adalah:
 1. PT Perkebunan Nusantara I (24%);
- b. Kepemilikan dengan menggunakan metode biaya adalah:
 1. PT Perkebunan Nusantara II (10%);
 2. PT Perkebunan Nusantara IV (10%);
 3. PT Perkebunan Nusantara V (10%);
 4. PT Perkebunan Nusantara VI (10%);
 5. PT Perkebunan Nusantara VII (10%);
 6. PT Perkebunan Nusantara VIII (13,7%);
 7. PT Perkebunan Nusantara IX (10%);
 8. PT Perkebunan Nusantara X (10%);
 9. PT Perkebunan Nusantara XI (10%);

10. PT Perkebunan Nusantara XII (10%);
11. PT Perkebunan Nusantara XIII (10%);
12. PT Perkebunan Nusantara XIV (10%);
13. PT Nindya Karya (1%);
14. PT Rekayasa Industri (4,97%);
15. PT PANN Pembiayaan Maritim (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
16. PT Indosat Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
17. PT Asean Bintulu Fertilizer (13%);
18. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
19. PT Timah Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
20. PT Aneka Tambang Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
21. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
22. PT Istaka Karya (7,66%);
23. PT Kimia Farma Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
24. PT Indofarma Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
25. PT Asuransi Jasa Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
26. PT Jasa Raharja (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
27. PT Jaminan Kredit Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
28. PT Asuransi Kredit Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
29. PT Energy Management Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
30. PT Pegadaian (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
31. PT Permodalan Nasional Madani (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
32. PT Hotel Indonesia Natour (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
33. PT Sarinah (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
34. PT TWC BP dan RB (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A

35. PT Angkasa Pura I (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
36. PT Angkasa Pura II (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
37. PT Sucofindo (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
38. PT Surveyor Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
39. PT Perikanan Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
40. PT Berdikari (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
41. PT Sang Hyang Seri (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
42. PT Garam (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
43. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
44. PT Kawasan Berikat Nusantara (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
45. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
46. PT Kawasan Industri Medan (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
47. PT Kawasan Industri Makassar (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
48. PT Balai Pustaka (0,01%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
49. PT Kliring Berjangka Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
50. PT Perusahaan Pengelola Aset (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
51. PT Dahana (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
52. PT Pindad (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
53. PT Dirgantara Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
54. PT PAL Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
55. PT Industri Nuklir Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
56. PT Semen Baturaja Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
57. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A

Pada Non BUMN dengan kepemilikan Negara dengan metode biaya, nilai penyertaan negara pada Non BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan

yang dilakukan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non BUMN tersebut tidak tergantung pada status laporan keuangan Non BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas.

UAKPA BKF

PMP Badan Usaha Lainnya pada UAKPA BKF merupakan Penyertaan pada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dan International Rubber Consortium Limited (IRCo). Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada AIF dan IRCo sebesar Rp1.933.408.000.000 dan Rp1.770.472.000.000, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp162.936.000.000 atau 9,2% yang berasal dari pendapatan selisih Kurs yang belum terealisasi dengan rincian sebagai berikut.

LKI	Nilai Investasi per 31 Desember 2021	Nilai Investasi per 31 Desember 2022	Selisih KURS
ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	1.713.360.000.000	1.871.040.000.000	157.680.000.000
International Rubber Consortium Limited (IRCo)	57.112.000.000	62.368.000.000	5.256.000.000
Jumlah	1.770.472.000.000	1.933.408.000.000	162.936.000.000

UAKPA Dirjen Pembiayaan

BP Tapera merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah diundangkan pada tanggal 24 Maret 2016, BP Tapera ditetapkan dengan tujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. BP Tapera bertanggungjawab kepada Komite Tapera (yang terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan unsur profesional).

BP Tapera memperoleh modal awal yang bersumber dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Awal BP Tapera diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal BP Tapera.

Posisi penyertaan pada BP Tapera pada 31 Desember 2022 Audited dan 31 Desember 2021 Audited adalah sebesar Rp2.740.175.360.701 dan Rp2.694.403.496.722, terjadi kenaikan sebesar Rp45.771.863.979 atau 1,70% yang berasal dari pendapatan surplus LO dan pendapatan komprehensif berupa selisih perhitungan aktuarial hasil pengukuran kembali liabilitas (asset) imbalan pasti (netto).

UAKPA Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Bank Tanah)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah yang telah diundangkan pada tanggal 29 April 2021. Bank Tanah ditetapkan dengan tujuan mengelola tanah dengan fungsi untuk melaksanakan perencanaan perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Badan Bank Tanah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk diberi kewenangan khusus dalam mengelola tanah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komite yang terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sedangkan Kepala dan Deputy Badan Pelaksana Bank Tanah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komite Bank Tanah Nomor 04/SK/Kom-BTI/XII/2021 dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pelaksanaan Bank Tanah;
2. Deputy Bidang Perencanaan Strategi dan Pengadaan Tanah; dan
3. Deputy Bidang Pengembangan Usaha dan Keuangan.

Kepala Badan Pelaksana dan Deputy bertanggung jawab kepada Komite Badan Bank Tanah.

Badan Bank Tanah memperoleh modal awal yang bersumber dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Awal Badan Bank Tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Posisi penyertaan pada Badan Bank Tanah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.794.834.651.092 dan Rp1.000.000.000.000. Terjadi kenaikan nilai investasi yang salah satunya dikarenakan adanya penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp500.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022. Selain itu, kenaikan nilai investasi juga dipengaruhi ekuitas lainnya yang merupakan nilai perolehan tanah atas nama Badan Bank Tanah.

D.2.1.2.6. INVESTASI PERMANEN BADAN LAYANAN UMUM

*Investasi
Permanen
Badan*

Nilai investasi jangka panjang permanen BLU per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp8.958.055.146**, tidak ada kenaikan ataupun penurunan nilai investasi.

Layanan
Umum

No	BLU	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	UIN Sumatera Utara Medan	2.320.860.646	2.320.860.646
2	PPK Gelora Bung Karno	6.637.194.500	6.637.194.500
	Jumlah	8.958.055.146	8.958.055.146

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (PP Nomor 74/2012), BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Selain itu, investasi merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Oleh karena itu, semua investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum akan dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi induk Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Investasi permanen BLU terdapat pada BLU Pengelola Kawasan dan BLU Pelayanan Pendidikan. Adapun rincian investasi adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10% dengan nilai sebesar Rp6.637.194.500. Tidak ada perubahan nilai kepemilikan BLU PPK Gelora Bung Karno pada PT STS karena penyertaan BLU PPK Gelora Bung Karno dicatat dengan metode biaya.
2. BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan memiliki penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani dengan kepemilikan sebanyak 3.518 lembar saham seri A dan 30.348 lembar saham seri B. Pada tahun 2019 terdapat penerbitan saham baru dari BPRS yang tidak diambil bagian oleh UIN Sumatera Utara sehingga persentase kepemilikan sahamnya turun atau terdilusi dari 30,82% menjadi 22,82%.

D.2.1.2.7. INVESTASI PERMANEN LAINNYA

Investasi
Permanen
Lainnya

Nilai Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp597.102.851.922.346 dan Rp618.247.231.165.090.

Investasi Permanen Lainnya terdiri dari:

No	Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia	348.428.929.000.000	405.156.109.000.000
2	Penyertaan Modal Negara pada Otorita/Lembaga Penjamin Simpanan	186.024.447.070.000	161.146.075.892.000
3	Penyertaan Modal Negara Lain-lain	62.649.475.852.346	51.945.046.273.090
	Jumlah	597.102.851.922.346	618.247.231.165.090

1. Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia

Nilai Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp348.428.929.000.000 dan Rp405.156.109.000.000. Terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp56.727.180.000.000 yang berasal dari surplus BI dan Kerugian Komprehensif Lainnya.

Sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03.

Dengan mulai efektifnya Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/13/PDG/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, mulai tahun 2014 Bank Indonesia tidak lagi menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan.

Bank Indonesia berpandangan bahwa Bank Indonesia sebagai entitas independen menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara, selain itu Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih (*net worth*).

Selain itu, Bank Indonesia juga tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan tidak tercermin dari kemampuan menghasilkan kas masa depan. Kewenangan Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga *sui generis* yang dapat mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah menyebabkan laporan arus kas tidak relevan karena Bank Indonesia tidak memiliki kendala dalam menghasilkan arus kas.

Dalam menghadapi perubahan kebijakan ini, DJKN dalam menentukan nilai penyertaan Pemerintah pada Bank Indonesia menggunakan pendekatan menjumlahkan sub-sub akun yang pada laporan keuangan Bank Indonesia tahun sebelumnya menjadi komponen ekuitas antara lain:

- a. Selisih Revaluasi.
- b. Modal.
- c. Akumulasi Surplus/Defisit yang terdiri dari:
 - 1) Cadangan Umum;
 - 2) Cadangan Tujuan;
 - 3) Surplus/Defisit Tahun berjalan.

2. Penyertaan Modal Negara pada Otoritas/Lembaga Penjamin Simpanan

Nilai Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp186.024.447.070.000 dan Rp161.146.075.892.000. Terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp24.878.371.178.000 yang berasal dari Surplus LPS dan pendapatan komprehensif lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03.

3. Penyertaan Modal Negara Lain-lain

Investasi Lain-lain terdiri dari Penyertaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Nilai penyertaan modal Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp62.649.475.852.346 dan Rp51.945.046.273.090. Terjadi kenaikan sebesar Rp10.704.429.579.256 yang salah satunya disebabkan oleh adanya penetapan statute PTNBH baru yaitu Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Malang. Adapun rincian investasi lain-lain disajikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Institut Pertanian Bogor	2.795.117.983.603	2.219.908.414.457
2	Universitas Airlangga	3.379.522.194.212	3.360.922.169.555
3	Institut Teknologi Bandung	2.284.725.176.268	2.397.188.606.243
4	Universitas Indonesia	4.598.356.448.112	4.529.804.785.958
5	Universitas Gajah Mada	4.432.725.547.821	4.159.186.259.015
6	Universitas Pendidikan Indonesia	1.052.744.544.568	941.559.438.517
7	Universitas Sumatera Utara	1.891.943.149.520	1.794.964.853.051
8	Universitas Padjajaran	1.285.257.997.803	1.242.018.164.217
9	Universitas Diponegoro	3.651.496.953.823	3.265.487.386.651
10	Universitas Hassanudin	2.436.270.624.650	2.114.173.500.035
11	Institut Teknologi Sepuluh November	1.660.405.319.648	1.474.117.033.222
12	Universitas Negeri Sebelas Maret	1.686.700.442.023	1.640.366.868.642
13	Universitas Negeri Malang	1.881.508.119.085	-
14	Universitas Andalas	1.241.583.274.046	-
15	Universitas Brawijaya	3.529.459.226.042	-
16	Universitas Negeri Padang	1.266.801.389.980	-

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
17	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	10.753.648.947.992	10.630.980.515.892
18	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	12.821.208.513.150	12.174.368.277.635
	Jumlah	62.649.475.852.346	51.945.046.273.090

a. PTN BH

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa Perguruan Tinggi eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 16 Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah.

Rincian Penetapan statuta PTN BH adalah sebagai berikut:

- 1) Institut Teknologi Bandung sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 2) Institut Pertanian Bogor sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
- 3) Universitas Gadjah Mada sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
- 4) Universitas Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- 5) Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- 6) Universitas Sumatera Utara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
- 7) Universitas Airlangga sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
- 8) Universitas Padjajaran sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjajaran;

- 9) Universitas Diponegoro sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
- 10) Universitas Hasanuddin sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
- 11) Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- 12) Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
- 13) Universitas Andalas (UNAND) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas;
- 14) Universitas Brawijaya (UB) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya;
- 15) Universitas Negeri Padang (UNP) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang; dan
- 16) Universitas Negeri Malang (UNM) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.

Dalam PP penetapan masing-masing PTNBH tersebut telah diamanatkan bahwa kekayaan awal dari PTNBH akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nilai kekayaan awal PTNBH yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan menjadi dasar pencatatan pada Laporan Keuangan BUN 999.03. Per 31 Desember 2022, Menteri Keuangan telah menetapkan KMK Penetapan Nilai Kekayaan Awal (PNKA) pada 16 PTNBH.

b. BPJS

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Untuk melaksanakan amanat UU dan PP tersebut, pada akhir tahun 2013 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang pada salah satu pasalnya menetapkan nilai kekayaan awal BPJS sebesar Rp500.000.000.000 berbentuk uang tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013.

Adapun modal yang bersumber dari hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan yaitu bersumber dari PT Askes (Persero) pada tanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp9.151.813.376.805 sehingga total modal BPJS adalah sebesar Rp9.151.813.376.805. Jumlah tersebut telah disahkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Nomor 510/KMK.06/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial per 1 Januari 2014.

Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah RI juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp7.323.338.452.469 sebagaimana tercantum dalam LK Penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000 sesuai PP Nomor 83 Tahun 2013.

Nilai investasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp10.753.648.947.992 dan Rp10.630.980.515.892, sedangkan nilai investasi pada BPJS ketenagakerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.821.208.513.150 dan Rp12.174.368.277.635.

D.2.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.897.913.071.793** dan **Rp1.582.040.491.546** mengalami penurunan sebesar Rp315.872.580.247 (19,97%). Jumlah tersebut merupakan nilai bruto sebelum dikurangi akumulasi penyusutan, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tanah	26.594.107.000	26.594.107.000
Peralatan dan Mesin	524.353.291.311	494.147.390.874
Gedung dan Bangunan	43.006.647.389	26.384.760.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.225.899.884.858	944.866.256.194
Aset Tetap Lainnya	44.013.820.603	60.614.862.626
Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.045.320.632	29.433.114.852
Jumlah Aset Tetap	1.897.913.071.793	1.582.040.491.546

D.2.1.3.1. TANAH

Tanah Saldo tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp26.594.107.000** dan **Rp26.594.107.000**. Tidak ada perubahan dalam nilai sepanjang tahun 2022. Tanah tersebut terdapat pada Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Aset berupa tanah tersebut terletak di Jalan Simpang Parit Rampak – Simpang PT Saipem Kabupaten Karimun, seluas 113.794 m².

D.2.1.3.2. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan Mesin Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp524.353.291.311** dan **Rp494.147.390.874**. Terdapat kenaikan sebesar Rp30.205.900.437 atau 6,11%. Perbandingan peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2022	31 Desember 2021
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	16.532.139.573	14.669.871.733
-	Otoritas Jasa Keuangan	356.903.989.237	356.903.989.237
-	SKK Migas	150.917.162.501	122.573.529.904
Total		524.353.291.311	494.147.390.874

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut sebagai berikut.

Saldo Awal	494.147.390.874
Penambahan :	30.251.860.437
Pembelian	3.345.838.950
Perolehan lainnya	26.892.827.587
Lainnya	13.193.900
Pengurangan:	45.960.000
Transaksi Normalisasi BMN	45.960.000
Saldo per 31 Desember 2022	524.353.291.311
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-471.116.732.583
Nilai buku per 31 Desember 2022	53.236.558.728

D.2.1.3.3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp43.006.647.389** dan **Rp26.384.760.000**, mengalami kenaikan sebesar Rp16.621.887.389 atau 63% Nilai Perbandingan gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian BA Pel	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	43.006.647.389	26.384.760.000
Total	43.006.647.389	26.384.760.000

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	26.384.760.000
Penambahan :	17.858.854.589
Pembelian	4.481.409.290
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	13.377.445.299
Pengurangan	1.236.967.200
Koreksi Pencatatan	1.236.966.900
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	300
Saldo per 31 Desember 2022	43.006.647.389
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1.423.127.498)
Nilai buku per 31 Desember 2022	41.583.519.891

D.2.1.3.4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

*jalan, irigasi,
dan jaringan*

Saldo jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.225.899.884.858** dan **Rp944.866.256.194**, mengalami kenaikan sebesar Rp281.033.628.664 atau 29,74%. Perbandingan jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

(dalam Rupiah)

BA Pe	Uraian BA Pel	31 Desember 2022	31 Desember 2021
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.225.883.794.358	944.850.165.694
-	SKK Migas	16.090.500	16.090.500
Total		1.225.899.884.858	944.866.256.194

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	944.866.256.194
Penambahan :	287.069.349.484
Pembelian	203.210.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	198.580.871.759
Pencatatan Nilai Bertambah	88.285.267.725
Pengurangan :	6.035.720.820
Koreksi Pencatatan	6.035.720.820
Saldo per 31 Desember 2022	1.225.899.884.858
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(364.353.818.077)
Nilai buku per 31 Desember 2022	861.546.066.781

D.2.1.3.5. ASET TETAP LAINNYA

*Aset Tetap
Lainnya*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp44.013.820.603** dan **Rp60.614.862.626**, mengalami penurunan sebesar Rp16.601.042.023 atau 27,39%. Perbandingan aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2022	31 Desember 2021
112	BP Batam	469.663.900	469.663.900
-	Otoritas Jasa Keuangan	997.877.346	18.386.004.686
-	SKK Migas	42.546.279.357	41.759.194.040
Total		44.013.820.603	60.614.862.626

Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	60.614.862.626
Penambahan :	7.487.085.767
Pembelian	217.015.878
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	219.731.073
Perolehan Lainnya	2.108.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	82.046.000
Pengembangan Melalui KDP	220.914.366
Koreksi Susulan	45.270.000
Saldo Awal Aset Tetap Renovasi	6.700.000.450
Pengurangan:	24.088.127.790
Transfer Keluar	6.700.000.450
Hibah Keluar	4.435.242.400
Koreksi Pencatatan	12.952.884.940
Saldo per 31 Desember 2022	44.013.820.603
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(14.217.287.907)

D.2.1.3.6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

*konstruksi
dalam
pengerjaan*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp34.045.320.632** dan **Rp29.433.114.852**, mengalami kenaikan sebesar Rp4.612.205.780 atau 15,67%. KDP tersebut terdapat pada BP Batam sebesar Rp30.845.025.185 dan SKK Migas sebesar Rp3.200.295.447. Mutasi KDP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	29.433.114.852
Penambahan :	285.463.353.442
Perolehan/Penambahan KDP	102.249.009.555
Pengembangan KDP	103.160.378.437
Koreksi Nilai KDP Bertambah	71.617.929.404
Perolehan Lainnya KDP	7.995.390.607
Reklasifikasi Masuk KDP	440.645.439
Pengurangan	280.851.147.662
Penghapusan/Penghentian KDP	68.011.539.726
Reklasifikasi Keluar KDP	440.645.439
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	212.398.962.497
Saldo per 31 Desember 2022	34.045.320.632
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2021	0
Nilai buku per 31 Desember 2021	34.045.320.632

D.2.1.3.7. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp851.110.966.065** dan **Rp702.708.685.252**, mengalami kenaikan sebesar Rp148.402.280.813 atau (21,12%). Akumulasi penyusutan terdiri dari:

1. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp471.116.732.583;
2. Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp1.423.127.498;
3. Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp364.353.818.077;
4. Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp14.217.287.907.

Perbandingan akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2022	31 Desember 2021
112	BP Batam		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.200.111.697	10.471.301.942
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.423.127.498	700.142.684
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	364.348.186.402	237.973.369.416
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	32.854.617	25.553.591
-	Otoritas Jasa Keuangan	0	0
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	356.534.434.202	356.281.550.299
-	SKK Migas	0	0
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	102.382.186.684	83.207.670.395
	Akumulasi Penyusutan Jaringan	5.631.675	4.022.625
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14.184.433.290	14.045.074.300
	Total	851.110.966.065	702.708.685.252

D.2.1.4. PROPERTI INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset atau keduanya. Pada tahun 2022 saldo Properti Investasi sebesar Rp31.062.733.305.865 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp0, dikarenakan baru diterapkan pada tahun 2022.

D.2.1.4.1 PROPERTI INVESTASI

PROPERTI INVESTASI PADA BA 999.03

Posisi Properti Investasi dalam kelolaan LMAN per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.999.078.894.081 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp18.180.688.477.231 sehingga nilai Properti Investasi bersih adalah sebesar Rp11.818.390.416.850. Tidak terdapat saldo Properti Investasi pada tanggal 31 Desember 2021 mengingat penerapan PSAP 17 baru berlaku efektif mulai tahun 2022 (vide paragraf 63 PSAP 17).

Rincian Properti Investasi per kelompok aset menurut penyerahkelolaan secara komparatif pada 31 Desember 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Kelompok Aset Penyerahkelolaan	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
Properti Investasi eks BPPN	599.574.035.280	94.388.927	599.479.646.353
Properti Investasi eks PPA	610.633.699.652	45.603.711.066	565.029.988.586
Properti Investasi eks Pertamina	28.026.302.049.427	18.116.764.260.245	9.909.537.789.182
Properti Investasi eks HTBI	762.569.109.722	18.226.116.993	744.342.992.729
Total Properti Investasi	29.999.078.894.081	18.180.688.477.231	11.818.390.416.850

1. Properti Investasi eks BPPN

Posisi Properti Investasi eks BPPN pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp599.574.035.280 dengan akumulasi penyusutan Rp94.388.927. Nilai bersih dari Properti Investasi eks BPPN adalah sebesar Rp599.479.646.353.

Pada tahun 2022, terdapat penyerahkelolaan aset baru yang oleh LMAN dikategorikan sebagai Properti Investasi. Terdapat 2 (dua) kali penyerahkelolaan terdiri yaitu untuk Aset Taman Sari Karawaci pada awal tahun sebesar Rp169.284.208.606 dan 3 (tiga) unit aset di Medan dan Padang pada akhir tahun sebesar Rp7.774.400.000.

Pada tahun 2022 juga terdapat pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) melalui upgrade Properti Investasi eks BPPN sebesar Rp415.169.280. Selain itu, pada tahun 2022 telah dilakukan penilaian wajar untuk kebutuhan penyajian pada neraca atas Properti Investasi eks BPPN yang diserahkan pada batch 2021 maupun batch 2022 awal tahun. Penilaian wajar menghasilkan nilai tambah sebesar Rp403.226.177.394.

Rincian Properti Investasi eks BPPK per klasifikasi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan
Tanah	597.340.142.000	-
Gedung dan Bangunan	2.127.724.000	94.388.927
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	106.169.280	-
Total	599.574.035.280	94.388.927

2. Properti Investasi eks PPA

Posisi Properti Investasi eks PPA pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp610.633.699.652 dengan akumulasi penyusutan Rp45.603.711.066. Nilai bersih Properti Investasi eks PPA adalah sebesar Rp565.029.988.586.

Pada tahun 2022 terdapat pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) melalui upgrade Properti Investasi eks PPA sebesar Rp11.686.725.966. Selain itu, pada tahun 2022 telah dilakukan penilaian wajar untuk kebutuhan penyajian pada neraca atas Properti Investasi eks PPA yang diserahkan/dikelola pada batch 2018 dan 2019. Penilaian wajar dimaksud menghasilkan nilai tambah sebesar Rp415.298.920.652.

Rincian Properti Investasi eks PPA per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan
Tanah	388.427.787.000	-
Gedung dan Bangunan	210.321.124.057	38.058.654.863
Peralatan dan Mesin	11.679.963.584	7.545.056.203
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	204.825.011	-
Total	610.633.699.652	45.603.711.066

3. Properti Investasi eks Pertamina

Posisi Properti Investasi eks Pertamina pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.026.302.049.427 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp18.116.764.260.245. Nilai bersih Properti Investasi eks Pertamina adalah sebesar Rp9.909.537.789.182.

Penyajian pos Properti Investasi eks Pertamina di tahun 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi. Pada tahun 2022 terdapat pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) melalui upgrade Properti Investasi eks Pertamina sebesar Rp395.356.594.

Rincian Properti Investasi eks Pertamina per kelompok aset kawasan dan properti umum adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan
Properti investasi berupa Kawasan	26.777.396.575.777	18.115.684.810.492
Properti investasi non kawasan	1.248.905.473.650	1.079.449.753
Total	28.026.302.049.427	18.116.764.260.245

4. Properti Investasi eks HTBI

Posisi Properti Investasi eks HTBI pada 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp762.569.109.722 dengan akumulasi penyusutan Rp18.226.116.993. Nilai bersih Properti Investasi eks HTBI adalah sebesar Rp744.342.992.729. Penyajian pos Properti Investasi eks htbi di tahun 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi.

Pada tahun 2022 terdapat penarikan properti investasi oleh DJKN dengan nilai Rp37.186.790.500. Pada tahun 2022 juga terdapat penilaian wajar sebagian properti investasi eks HTBI batch 2020 dengan selisih tambah sebesar Rp2.650.039.100. Atas Properti Investasi eks HTBI dalam kelolaan LMAN juga dilakukan pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) melalui upgrade. Adapun subsequent expenditure pada tahun 2022 adalah sebesar Rp4.017.700.404.

Rincian Properti Investasi eks HTBI per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan
Tanah	633.448.122.140	-
Gedung dan Bangunan	123.214.967.357	17.876.637.860
Peralatan dan Mesin	1.161.337.271	349.479.133
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	4.744.682.954	
Total	762.569.109.722	18.226.116.993

PROPERTI INVESTASI PADA BA 999.99

1. Properti Investasi pada UAKPA BMN Eks BMN Idle

Pada periode pelaporan Tahun Anggaran 2022, terdapat BMN eks BMN idle berupa 68 (enam puluh delapan) bidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan yang direklasifikasi menjadi Properti Investasi dengan pertimbangan kriteria penggolongan aset sebagai Properti Investasi, yaitu menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset. Nilai perolehan atas seluruh BMN eks BMN idle yang direklasifikasi menjadi Properti Investasi adalah sebesar Rp63.197.927.101.

2. Properti Investasi pada UAKPA Eks Pertamina

Pada periode pelaporan Tahun Anggaran 2022 dilakukan reklasifikasi atas Aset Lainnya ke dalam Properti Investasi dengan pertimbangan aset eks Pertamina saat ini telah dilaksanakan pemanfaatan secara sewa oleh Pertamina EP atas sebagian aset eks Pertamina dan telah ada perjanjian sewa antara kedua belah pihak, sehingga memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Demikian juga dengan aset yang tidak masuk dalam perjanjian sewa tersebut, memiliki potensi untuk dilakukan pemanfaatan di masa yang akan datang sehingga memenuhi kriteria juga sebagai properti investasi.

Properti Investasi sebesar Rp15.895.457.535.288, terdiri dari:

- Aset berupa tanah dan/atau bangunan senilai Rp47.580.000.000.
- BMN eks kontrak kerjasama Pertamina senilai Rp15.847.877.535.288.

3. Properti Investasi pada UAKPA PKP2B

Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp39.246.545.804.398 dan Rp0. Pada periode pelaporan Tahun Anggaran 2022, terdapat

BMN Properti pada eks PKP2B yang dimanfaatkan oleh pemegang IUP perlu disajikan sebagai properti investasi sesuai PSAP 17, dengan pertimbangan BMN tersebut dimanfaatkan oleh pemegang IUP dalam skema sewa-operasi dan menghasilkan PNBPN berupa uang sewa sehingga terdapat reklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Properti Investasi senilai Rp39.246.545.804.398.

Saldo Awal 31 Desember 2021	-
Mutasi Tambah:	39.246.545.804.398
Reklas Masuk	39.246.545.804.398
Mutasi Kurang:	-
Koreksi Kurang	-
Saldo Akhir 31 Desember 2022	39.246.545.804.398

D.2.1.4.2 AKUMULASI PROPERTI INVESTASI

AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI PADA BA 999.03

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.180.688.477.231 dengan rincian sebagai berikut:

Properti Investasi	Nilai Properti Investasi	Akumulasi Penyusutan	Nilai Properti Investasi (Netto)
Properti Investasi eks BPPN	599.574.035.280	94.388.927	599.479.646.353
Properti Investasi eks PPA	610.633.699.652	45.603.711.066	565.029.988.586
Properti Investasi eks Pertamina	28.026.302.049.427	18.116.764.260.245	9.909.537.789.182
Properti Investasi eks HTBI	762.569.109.722	18.226.116.993	744.342.992.729
Total Properti Investasi	29.999.078.894.081	18.180.688.477.231	11.818.390.416.850

AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI PADA BA 99.999

Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi maka dilakukan reklasifikasi penyusutan BMN telah diserahkan kepada Pengelola Barang menjadi penyusutan BMN Properti Investasi sebesar Rp35.960.858.377.772,00

1. Akumulasi Properti Investasi pada UAKPA BMN Eks BMN Idle

No	Akun Neraca	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	63.025.491.626	-	63.025.491.626
2	Gedung dan Bangunan	172.435.475	138.679.374	33.756.101
	Total	63.197.927.101	138.679.374	63.059.247.727

2. Akumulasi Properti Investasi pada UAKPA Eks Pertamina

Saldo akumulasi properti investasi pada UAKPA Eks Pertamina pada tahun 2022 sebesar

Rp7.227.368.751.795.

3. Akumulasi Properti Investasi pada UAKPA PKP2B

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp28.733.350.946.603 dan Rp0. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2021	-
Mutasi Tambah:	28.733.350.946.603
Penyusutan	28.733.350.946.603
Mutasi Kurang:	-
Saldo Akhir 31 Desember 2022	28.733.350.946.603

Penjelasan atas nilai akumulasi penyusutan properti investasi yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

- Saldo awal merupakan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada 1 Januari 2022 sebesar Rp0.
- Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp28.733.350.946.603 merupakan hasil dari reklasifikasi Aset Lainnya ke Properti Investasi dari seluruh pemegang IUP kecuali PT Berau Coal.
- Saldo akhir 31 Desember 2022 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi yaitu sebesar Rp28.733.350.946.603.

D.2.1.5 PIUTANG JANGKA PANJANG

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp52.136.458.878.032** dan **Rp54.030.083.179.083** atau mengalami penurunan sebesar Rp1.893.624.301.051 atau (3,50%).

Rincian Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	52.972.302.791.953	54.879.424.507.922
Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.236.811.940.347	2.058.522.740.927
(Peny.Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang)	(3.072.655.854.268)	(2.907.864.069.766)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	52.136.458.878.032	54.030.083.179.083

D.2.1.5.1. PIUTANG JANGKA PANJANG PEMBERIAN PINJAMAN

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman Sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, jumlah Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar **Rp52.972.302.791.953** dan **Rp54.879.424.507.922**, mengalami penurunan sebesar Rp1.907.121.715.969 atau (3,48%). Jumlah ini terdiri dari Rp52.972.302.791.953 yang merupakan Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman pada BA 999.04.

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman pada BA 999.04 per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.972.302.791.953, dengan Rincian adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman (153111)	52.369.302.315.728	54.265.658.397.186
Aset Lainnya Kredit Program (153117)	603.000.476.225	613.766.110.736
Jumlah	52.972.302.791.953	54.879.424.507.922

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman adalah piutang pokok pemberian pinjaman yang belum tempo dalam jangka waktu 12 bulan, sedangkan aset lainnya kredit program terdiri dari Kredit Listrik Pedesaan, Perusahaan Inti Rakyat, Proyek Pemuliaan dan Pengembangan Sapi Bali, Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi, Redistribusi Ternak, dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan.

D.2.1.5.2. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Piutang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp2.236.811.940.347** dan **Rp2.058.522.740.927**, mengalami kenaikan sebesar Rp178.289.199.420 atau (8,66%). Piutang untuk Tahun 2022 terdiri dari BA 999.03 bagian Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perumnas sebesar Rp32.225.637.648 dan pada BA999.99 bagian Piutang Jangka Panjang lainnya sebesar Rp2.204.586.387.052, dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perumnas sebesar Rp32.225.637.648 untuk BA 999.03 sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-693/MK.02/2019 tanggal 23 September 2019 telah dilakukan restrukturisasi piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-1997 sebesar Rp62.225.637.648 menjadi piutang jangka panjang.

Dari jumlah tersebut terdapat pengurangan nilai piutang karena proses reklasifikasi untuk piutang yang jatuh tempo 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaporan menjadi Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang sebesar Rp22.500.000.000, yang terdiri dari Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020, 2021, dan

2022 masing-masing sebesar Rp7.500.000.000.

Dengan demikian, nilai piutang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.225.637.648:

- b. Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.99 sebesar Rp2.204.586.302.699 yang seluruhnya merupakan piutang migas yang berasal dari PT TPPI. Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalti PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp33.659.666.576. Saldo piutang jangka panjang 2022 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100 persen.

D.2.1.5.3. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PIUTANG JANGKA PANJANG

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Piutang
Jangka
Panjang*

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp3.072.655.854.268** dan **Rp2.907.864.069.766**, mengalami penurunan sebesar Rp164.791.784.502 atau (5,67%) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Pemberian Pinjaman	864.846.987.804	885.094.402.722
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.207.808.866.464	2.022.769.667.044
Total		3.072.655.854.268	2.907.864.069.766

1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Pemberian Pinjaman

Sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Pemberian Pinjaman adalah sebesar Rp864.846.987.804. Jumlah ini berasal dari Penyisihan Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman (156511) sebesar Rp261.846.511.579, dan Penyisihan Tidak Tertagih – Aset Lainnya Kredit Program (156513) sebesar Rp603.000.476.225.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.207.808.866.464 dan Rp2.022.769.667.044.

Saldo penyisihan piutang jangka panjang sebesar Rp2.207.808.866.464 berasal dari saldo piutang jangka panjang BA 999.03 sebesar Rp32.225.637.648 disisihkan sebesar 10

(sepuluh) persen atau sejumlah Rp3.222.563.765, dan dari BA 999.99 sebesar Rp2.204.586.302.699 berasal dari saldo piutang jangka panjang PT TPPI yang digolongkan dalam piutang macet, yaitu dengan jumlah penyisihan sebesar 100 persen, sehingga penyisihan piutang jangka panjang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.204.586.302.699.

D.2.1.6. ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.015.356.148.680.020** dan **Rp1.006.232.167.222.921** atau mengalami kenaikan sebesar Rp9.123.981.457.099 (0,91%).

Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tak Berwujud	190.240.614.474	183.121.621.530
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	319.881.409.961.767	273.565.292.980.606
Dana Cadangan Penjaminan	11.885.648.000.000	10.754.785.000.000
Dana Kelolaan BLU	10.340.470.045.889	8.724.468.057.192
Dana Jangka Panjang	28.798.237.380.309	16.003.441.297.997
Aset Lain-lain	614.634.699.183.703	672.657.039.394.723
Aset Lainnya dr Ekuitas UBL	29.625.443.493.878	24.344.018.870.873
TOTAL	1.015.356.148.680.020	1.006.232.167.222.921

D.2.1.6.1. ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp190.240.614.474** dan **Rp183.121.621.530**, mengalami kenaikan sebesar Rp7.118.992.944 atau (3,89%). Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara

umum tidak mempunyai wujud fisik. Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2022	31 Desember 2021
112	BP Batam		
	Hasil Kajian/penelitian	7.705.413.966	4.675.607.750
	Aset Tak Berwujud	2.191.574.089	1.115.432.510
-	Otoritas Jasa Keuangan		
	Software	31.915.327.104	31.915.327.104
	Lisensi	49.611.738.008	49.611.738.008
-	SKK Migas		
	Software	96.319.411.307	93.783.516.158
	Lisensi	2.279.740.000	2.020.000.000
	Aset Tak Berwujud Lainnya	217.410.000	0
Total		190.240.614.474	183.121.621.530

Mutasi Aset Tak Berwujud tersebut per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	183.121.621.530
Penambahan :	7.153.624.944
Pembelian	4.017.547.795
Perolehan Lainnya	741.053.460
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	88.400.000
Koreksi Susulan	2.306.623.689
Pengurangan	34.632.000
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	34.632.000
Saldo per 31 Desember 2022	190.240.614.474
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(165.022.930.588)
Nilai buku per 31 Desember 2022	25.217.683.886

D.2.1.6.2. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp319.881.409.961.767 dan Rp273.565.292.980.606, mengalami kenaikan sebesar Rp46.316.116.981.161 atau (16,93%). Angka untuk tahun 2022 ini didapat setelah dikurangi Dana Cadangan Penjaminan sebesar Rp16.733.167.139.589. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
BA 999.00	52.253.149.048.677	29.926.032.453.218
BA 999.03	4.847.519.139.589	10.607.142.345.516
BA 999.07	20.000.000	2.759.586.350.038
BA 999.08	49.537.201.072.544	38.579.697.558.239
BA 999.99	229.976.687.840.546	212.996.281.913.184
Penyesuaian eliminasi dana yang dibatasi penggunaannya	(16.733.167.139.589)	(21.303.447.639.589)
TOTAL	319.881.409.961.767	273.565.292.980.606

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Akuntansi Pusat

Jumlah Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp52.253.149.048.677** dan **Rp29.926.032.453.218** mengalami peningkatan sebesar Rp22.327.116.595.459 atau naik signifikan 74,61 persen apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2021. Penyebab utama peningkatan saldo dana yang dibatasi penggunaannya pada tahun 2022 berasal dari saldo Rekening Lain BI Treasury Deposit Facility-Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Pemda. Selain itu, terdapat peningkatan saldo pada Rekening Lain BI Dana Cadangan Alutsista TNI AD dalam IDR (519000144980), Rekening Lain BI Dana PFK (510000281980), dan Rekening Lain BI Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980).

No	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
1	Dana di Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)	4.847.519.139.589	10.548.662.639.589
2	Dana di Rekening Treasury Deposit Facility-Transfer Keuangan Daerah	25.132.963.282.524	-
3	Dana Lainnya	18.350.918.480.869	16.224.784.726.732
4	Dana Perhitungan Fihak Ketiga	3.921.748.145.695	3.152.585.086.897
JUMLAH DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA		52.253.149.048.677	29.926.032.453.218

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

sebagai akibat ketetapan/keputusan baik pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Direktorat PKN melaporkan pos aset yang dibatasi penggunaannya sebagai bagian dari aset lainnya dalam rangka mencatat kegiatan untuk tujuan tertentu. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat tahun 2022 tercatat sebesar **Rp52.253.149.048.677**. Dana dibatasi penggunaannya tersebut dieliminasi sebesar Rp16.733.167.139.589 yang terdiri dari:

Akun	Segmen Bank	Deskripsi	Saldo Akhir
163119	S0009	Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	11.513.131.000.000
163119	S2040	Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	372.517.000.000
163134	90039	Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980)	4.847.519.139.589
Total			16.733.167.139.589

Ketiga rekening tersebut menampung pembiayaan dari BA BUN 999.03, sedangkan pada BA BUN 999.03 sudah menyajikan sebagai aset (dana penjaminan dan dana dibatasi penggunaannya) sehingga nilai dana dibatasi penggunaannya pada BA BUN 999.00 dieliminasi sebesar Rp16.733.167.139.589.

Rekening Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang dikelola oleh Direktorat PKN adalah sebagai berikut :

1. Rekening Pembangunan Hutan (RPH) dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi (DR) dibuka berdasarkan :
 - a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/ 2007 dan Nomor 02/MENHUT-11/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan; dan

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.05/2007 tentang Pembukaan Rekening Pembangunan Hutan dan Penempatan Dana Reboisasi Pertama Kali dalam Rekening Pembangunan Hutan.

Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi dilakukan berdasarkan petunjuk-petunjuk teknis sebagai berikut:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Cadangan.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 86/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Cadangan.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 6/PB/2019 tentang Penyimpanan Dana Reboisasi pada Bank Umum.

Rekening Pembangunan Hutan dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi dibuka untuk menampung Dana Reboisasi (dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alami yang berupa kayu) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir.

Transaksi penerimaan meliputi :

- a. penerimaan dalam rangka penyimpanan dana reboisasi ke dalam RPH; dan
- b. penerimaan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RPH.

Transaksi pengeluaran meliputi :

- a. pengeluaran dalam rangka pemindahbukuan/transfer dari RPH ke Rekening KUN; dan
 - b. pengeluaran dalam rangka pemindahbukuan/transfer penerimaan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RPH ke Rekening KUN.
2. Rekening Dana Cadangan Alutsista dibuka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Rekening Dana Cadangan Alutsista adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana titipan milik Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 6 rekening Dana Cadangan Alutsista yang terdiri dari:

- a. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AD (519000144980)
- b. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AU (519000145980)
- c. Rekening Dana Cadangan Alutsista Kemhan (519000146980)
- d. Rekening Dana Cadangan Alutsista Mabes TNI (519000147980)
- e. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AU dalam USD (609027411980)
- f. Rek Lain BI Dana Cadangan Alutsista TNI AL dalam IDR (519000154980)

Jika masih terdapat sisa rekening dana cadangan alutsista sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK 143/PMK.05/2018, maka Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktur PKN menyampaikan surat perintah penihilan saldo rekening dana cadangan alutsista kepada KPA Satker dan dicatat sebagai pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu melalui potongan SPM. Dan jika KPA Satker tidak melakukan penihilan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PMK, maka Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan langsung melakukan pemindahbukuan sisa dana dari rekening dana cadangan alutsista ke Rekening Kas Umum Negara.

- 3. Rekening Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara dibuka berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat untuk menampung dana penerbitan SBN dan dana pembayaran pokok, bunga utang dan kewajiban lainnya SBN yang jatuh tempo dengan Nama "Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara". Rekening ini terdiri dari 3 (tiga) rekening yaitu :
 - a. Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara dalam Rupiah (502000001980)
 - b. Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara dalam valuta USD (609024411980)
 - c. Menteri Keuangan Pengelolaan SBN EURO (609024991980)
- 4. Rekening Khusus Dana PFK dengan nomor 510000281980 dibuka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-66/PB/2016 tentang Pemisahan Dana PFK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Khusus Dana PFK yang digunakan untuk menampung dana realisasi penerimaan PFK dalam rangka meningkatkan akurasi data monitoring dana PFK dan sebagai fungsi kontrol atas saldo dana pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Pengelolaan rekening khusus dana PFK diatur dalam PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Aliran Uang pada rekening ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber dana masuk berasal dari Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Pengeluaran dana keluar berasal Nota Perintah Pemindahbukuan dana ke Rekening Kas Umum Negara dari Direktur PKN.
5. BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan dengan nomor 502000002980 dibuka dengan dasar :
- a. Keppres Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.
 - b. Keppres Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Rekening ini digunakan untuk menampung dana yang berasal dari penerbitan SU-004/MK/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan digunakan untuk membayar kewajiban negara serta untuk menjamin bank umum apabila terjadi krisis moneter

Aliran uang rekening :

- a. Sumber dana berasal dari penerbitan SU-004/MK/1999.
 - b. Pengeluaran dana dari Rekening BUN untuk Obligasi dalam Rangka Penjaminan ditujukan ke bank penjamin.
6. Rekening Stabilisasi Surat Berharga Negara (500000006980) untuk menampung dana pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik dan dibuka berdasarkan PMK nomor 188/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik. Ketentuan penggunaan saldo adalah berdasarkan kondisi pasar SBN domestik ditetapkan dalam level krisis berdasarkan protokol manajemen krisis pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan dan mendapatkan persetujuan Badan Anggaran DPR.
7. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980) dibuka dengan tujuan untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR. Dasar hukum pembukaan rekening adalah Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 31 Januari 2001 tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Pengelolaan Rekening ini diatur dalam:
- a. PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan R Rekening Milik Bendahara Umum Negara.

- b. Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-40/PB/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara melalui Sistem Bank Indonesia *Government-Electronic Banking* (BIG-eB).

Kebijakan pencairan dana pada rekening ini dilakukan setelah status hukum Aset BPR sebagai milik pemerintah sudah jelas. Aliran kas masuk dan kas keluar dari rekening ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber dana berasal dari pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR.
 - b. Pengeluaran/pencairan dana berdasarkan kebijakan.
8. Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980) atau disebut RDCPP ini diperlukan dalam hal anggaran kewajiban penjaminan pemerintah yang telah dialokasikan dalam APBN tidak habis digunakan dalam tahun berjalan. Anggaran dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening tersebut yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

Dasar hukum pembukaan rekening:

- a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.8/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Pengelolaan RDCPP ini diatur menggunakan petunjuk teknis sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.8/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 257/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.8/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan nomor 257/PMK.08/2016 tentang Perubahan PMK nomor 30/PMK.8/2012.

Dirjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah mengajukan permintaan pembukaan RDCPP kepada Kuasa BUN Pusat dan berdasarkan permintaan tersebut Dirjen Perbendaharaan mengajukan

permintaan pembukaan RDCPP kepada Bank Indonesia melalui surat Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia nomor 14/892/DASP tanggal 19 Desember 2013 hal Pembukaan Rekening. Alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah untuk:

- a. Program penjaminan percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW PT PLN (Persero);
- b. Program penjaminan percepatan penyediaan air minum;
- c. Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara;
- d. Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera;
- e. Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
- f. Penjaminan lainnya yang diterbitkan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- g. Pembayaran kewajiban Kementerian/Lembaga untuk memenuhi kewajiban regres kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha DISTRIBUSI II Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Aliran kas masuk dan kas keluar dari rekening ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Dana masuk berasal dari pencairan alokasi DIPA Dana Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang tidak habis dipergunakan sampai dengan akhir dalam tahun anggaran berjalan oleh DJPPR sebagai KPA ke RDCPP.
- b. Dana keluar dari RDCPP akan disalurkan ke penerima jaminan atas permintaan KPA guna melunasi kewajiban Pemerintah akibat pemberian jaminan apabila pihak terjamin tidak dapat membayar kewajibannya dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Anggaran Kewajiban Penjaminan tidak dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan
 - 2) Anggaran Kewajiban Penjaminan dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan tetapi tidak mencukupi; atau

- 3) Sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dapat memenuhi kewajiban Kementerian/Lembaga kepada BUPI.
9. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980) atau disebut Rekening DJPPID adalah rekening yang akan digunakan untuk menampung dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, dan/atau sumber-sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar terlebih dahulu sebagaimana telah diatur dalam PMK 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, dimana nantinya rekening digunakan sebagai rekening penampungan alokasi anggaran kewajiban jaminan pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah dalam hal tidak digunakan pada tahun anggaran berjalan dan penampungan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH. Kemudian, dalam hal tidak terdapat alokasi anggaran kewajiban jaminan pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah atau dana pada alokasi dimaksud tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), maka rekening dimaksud juga digunakan untuk membayar kewajiban penjaminan pemerintah kepada PT. SMI. rekening DJPPID dimaksud dikategorikan pada Rekening Lainnya Milik BUN.
10. Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN *Public Goods* (510000287980) dan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Non Public Goods* (510000288980).

Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN PG dan NPG dibuka pada tahun 2020 sesuai dengan:

- a. PMK 103/PMK.05/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- b. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 326/KMK.08/2020 dan 22/8/KEP.GBI/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 347/KMK.08/2020 dan 22/9/KEP.GBI/2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam rangka Pembiayaan PC PEN (SKB II).
- c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-640/PB/2020 tanggal 27 Juli 2020 hal Permohonan Pembukaan Rekening Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN

- d. Surat Bank Indonesia nomor 22/156/DPPT/Srt/B tanggal 28 Juli 2020 hal Pembukaan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN

Rekening tersebut digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan SBN dengan skema *burden sharing* dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan *Public Goods* dan *Non Public Goods* dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan PEN. *Public Goods* ditujukan untuk belanja barang/jasa atau insentif/bantuan sosial untuk kepentingan umum yang mencakup pembiayaan untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial serta program sektoral pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan PEN, sedangkan *Non Public Goods* adalah belanja subsidi, pemberian insentif dan stimulus fiskal lainnya yang mencakup pembiayaan antara lain untuk memberikan insentif usaha, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan korporasi dan kegiatan insentif lainnya dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan PEN.

11. Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980) adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening tersebut digunakan untuk mengelola dana investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN. Dana investasi Pemerintah tersebut ditujukan kepada penerima investasi sebagaimana diatur dalam KMK 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020.
12. Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980) adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK nomor 574/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Milik BUN. Rekening tersebut untuk menempatkan dana modal awal Lembaga Pengelola Investasi yang telah dialokasikan pada UU APBN Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan investasi Lembaga Pengelola Investasi. Sesuai KMK tersebut, dalam rangka pelaksanaan anggaran, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Pada tahun 2021 rekening ini telah ditutup dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dari Bendahara Umum Negara ke Rekening Lembaga Pengelola Investasi, Surat Direktur PKN perihal Permohonan Penutupan

Rekening nomor S-509/PB.3/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Bank Indonesia nomor 23/97/DPPT-GKPP-LJP/Srt/B tanggal 8 April 2021.

13. Rekening Rek Lain BI Penanganan Dampak Pandemi COVID 19 dan PEN Cluster A (519000152980) dan Rek Lain BI Penanganan Dampak Pandemi COVID 19 dan PEN Cluster B (519000153980) dua rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 347/KM.08/2021 dan 23/11/KEP.GBI/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Melalui Penerbitan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan Pembelian di Pasar Perdana oleh Bank Indonesia (SKB III).
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
 - c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-256/PB/PB.3/2021 tanggal 9 November 2021 hal Pemohonan Pembukaan Layanan Jasa kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.
 - d. Surat Bank Indonesia nomor 23/183/DPPT/Srt/B tanggal 11 November 2021 hal Pemohonan Pembukaan Layanan Jasa kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.

Rekening tersebut digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan SBN untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 dan PEN. *Cluster A* ditujukan untuk Penanganan Kesehatan, yang meliputi pendanaan untuk program vaksinasi, diagnostik (testing, tracing, dan treatment), therapeutic (biaya perawatan pasien COVID-19, insentif/santunan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan), penanganan COVID-19 di daerah, dan penanganan kesehatan terkait pandemi COVID-19 lainnya, sedangkan *Cluster B* adalah untuk Penanganan Kesehatan dan Penanganan Kemanusiaan, yaitu Penanganan Bidang Kesehatan yang belum tagging Cluster A dan Penanganan Bidang Kemanusiaan berupa pendanaan untuk berbagai program perlindungan bagi masyarakat/usaha kecil terdampak yang meliputi bantuan beras, tambahan program sembako, bantuan sembako Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan program perlindungan masyarakat lainnya.

14. Rek Lain BI Investasi Bendahara Umum Negara (513000001980)

Rekening Investasi Bendahara Umum Negara yang disingkat RIBUN adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana dan/atau imbal hasil Investasi Pemerintah. Rekening tersebut dibuka di Bank Indonesia dengan nama Rekening Lain BI Investasi Bendahara Umum Negara dengan nomor 5120000001980 dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.
- c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara.
- d. Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-276/PB/PB.3/2021 tanggal 20 Nopember 2021 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.
- e. Surat Bank Indonesia nomor 23/189/DPPT/Srt/B tanggal 30 Nopember 2021 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.

RIBUN bersifat kumulatif dan berfungsi untuk:

- a. menyalurkan dana Investasi Pemerintah kepada OIP;
- b. menerima dana Investasi Pemerintah beserta imbal hasilnya dari OIP; dan
- c. mengkonsolidasikan pencatatan dana Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh BUN melalui OIP.

Sampai dengan 31 Desember 2022, penerimaan RIBUN bersumber dari pencairan dana Investasi Pemerintah untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari RKUN ke RIBUN yang akan disalurkan ke OIP, dalam hal ini adalah BP Tapera senilai Rp19,1 triliun. Selain itu, penerimaan pada RIBUN juga berasal dari penyetoran hasil investasi pemerintah dan pengembalian pokok investasi dari OIP yang sampai dengan Desember Tahun 2022 sebesar Rp289,6 miliar merupakan penerimaan imbal hasil Investasi Pemerintah periode periode tahun 2022.

Sedangkan pengeluaran RIBUN selama Tahun 2022 dilakukan untuk penyaluran Investasi Pemerintah untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari RIBUN ke rekening BP Tapera di Bank Umum senilai Rp19,1 triliun. Selain penyaluran investasi Pemerintah, pengeluaran RIBUN juga terjadi atas pemindahbukuan hasil

investasi pemerintah dan pokok investasi dari RIBUN ke RKUN atas perintah Menteri Keuangan untuk diperlakukan sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara, pada akhir tahun anggaran saldo pada RIBUN harus dinihilkan ke RKUN, sehingga saldo RIBUN per 31 Desember 2022 adalah Rp0.

15. Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Sentral (Bank Indonesia). Bentuk penyimpanan adalah overnight pada rekening lain BI Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) yang dibuka di Bank Indonesia dengan dasar hukum pembukaan rekening sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Treasury Deposit Facility dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Dalam Bentuk Nontunai.
 - c. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-143/PB/PB.3/2022 tanggal 21 Desember 2022, S-144/PB/PB.3/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan S-146/PB/PB.3/2022 tanggal 23 Desember 2022 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.
 - d. Surat Bank Indonesia nomor 24/272/DPPT/Srt/B tanggal 26 Desember 2022, 24/273/DPPT/Srt/B tanggal 27 Desember 2022 dan 24/275/DPPT/Srt/B tanggal 27 Desember 2022 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia.
- Sampai dengan 31 Desember 2022, terdapat 542 rekening lain BI TDF-TKD Pemda dengan total saldo Rp25,13 triliun.

2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.847.519.139.589 dan Rp10.607.142.345.516 dengan Rincian sebagai berikut:

1. Dana Program DNS (cadangan dana reboisasi)

Dana yang dibatasi penggunaannya pada dana program DNS terkait dengan dana bergulir atas DNS pada rekening DNS di Bank Syariah Mandiri yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Saldo per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp58.479.705.927.

Per 31 Desember 2022 terjadi penurunan nilai Dana yang dibatasi penggunaannya pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp58.596.960.796 dengan rincian penurunan Dana Cadangan Reboisasi sebesar Rp58.479.705.927 dan Jasa Giro Dana Cadangan Reboisasi (Penempatan Dana) yang telah diakui sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp117.254.869 sebagai akibat pemindahbukuan pencatatan Dana yang dibatasi penggunaannya pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang awalnya dicatat pada Laporan Keuangan UAIP menjadi dicatat pada Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-14/KN.3/2022 dan BAST-24/BPDLH.2/2022.

Dana yang dibatasi penggunaannya pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan dana yang disimpan dalam rekening BSM Nomor 0390070002 a.n. DNS Penampungan Dana Pokok dan Bagi Hasil. Adapun komponen dana ini terdiri dari dana pengembalian pokok, bagi hasil, dan jasa giro.

Dana pengembalian pokok dan bagi hasil dari nasabah tertampung dalam Rekening DNS Penampungan Pokok dan bagi hasil yang berada pada PT. BSI sebagai Bank Pelaksana.

2. Dana Cadangan IP PEN

Dana Cadangan IP PEN merupakan dana yang disisihkan dalam RIPPEN untuk menampung kebutuhan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN bagi penerima Investasi yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran Investasi Pemerintah yang berada di Rekening Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (RIPPEN). Penyaluran dana kepada BUMN penerima investasi. dapat dilakukan apabila telah terpenuhi klausul-klausul-klausul pada Perjanjian Investasi, dimana pemenuhannya akan didapatkan informasinya oleh KPA dari Pelaksana Investasi.

Dana Cadangan IP PEN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.847.519.139.589 dan Rp10.548.662.639.589. Dana tersebut berkurang signifikan setelah adanya pengembalian dana yang dialokasikan untuk PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000. Adapun rincian mutasi Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- a. Penyetoran Dana Cadangan untuk alokasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7.500.000.000.000 ke Rekening Kas Umum Negara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai surat permintaan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-2/KPA999.03.MBU/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 hal Permohonan Pemindahbukuan dari Rekening Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

- b. Pencairan dana dari RIPPEN ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp1.201.143.500.000 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.02/2022 Tanggal 27 Juli 2022.
- c. Penambahan dana cadangan dari dana PMN untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang akan direalisasikan ke dalam penyertaan saham yang akan dilakukan pada tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/PMK.06/2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara.

Penyaluran dana pada RIPPEN ke BUMN Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Penerima Investasi	Dana pada 31 Des 2021	Penyetoran ke RKUN	Pencairan dari RIPPEN ke BUMN Penerima Investasi	Dana pada 31 Des 2022
PT Garuda Indonesia	7.500.000.000.000	7.500.000.000.000	0	0
PT Perkebunan Nusantara III	2.248.662.639.589	0	1.201.143.500.000	1.047.519.139.589
PT Krakatau Steel	800.000.000.000	0	0	800.000.000.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	0	0	0	3.000.000.000.000
	10.548.662.639.589	7.500.000.000.000	1.201.143.500.000	4.847.519.139.589

3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.07

Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.000.000 dan Rp2.759.586.350.038. Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.759.566.350.038 atau 99,99 persen dari Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000, merupakan Dana yang dibatasi penggunaannya digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya terdapat pada Kementerian PUPR merupakan dana subsidi yg sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL bank yang bersangkutan. Saldo dana yang dibatasi penggunaannya ini, di luar perhitungan jasa giro pada bank yang bersangkutan. Dana yang dibatasi penggunaannya pada Neraca per 30 September 2022 tercatat pada Bank Mandiri

Nomor Rekening 1260007322810 senilai Rp20.000.000. Saldo dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana Subsidi BUM yang belum disalurkan ke debitur per 31 Desember 2022 dari rekening RPL. Pencairan dana tersebut berdasarkan SP2D Nomor 220191302048263 tanggal 23 November 2022 atas 4 debitur.

4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.08

Saldo Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp49.537.201.072.544 dan Rp38.579.697.558.239. Dana lainnya merupakan dana yang dibatasi penggunaannya yang Terdiri dari:

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp2.208.506.700.000 terdapat pada MPPKP yang merupakan insentif biaya mencari kerja dan insentif survei yang belum disalurkan kepada mitra pembayaran maupun Peserta Program Kartu Prakerja dan akan disalurkan dalam periode 100 hari kalender setelah tahun anggaran berakhir, dengan rincian sebagai berikut.

NO	Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Insentif Mencari Kerja	2.181.253.200.000	743.012.400.000
2	Insentif Survei	27.253.500.000	16.284.500.000
	TOTAL	2.208.506.700.000	759.296.900.000

2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 Satker SKK Migas sebesar Rp47.328.694.372.544 dan Rp37.820.400.658.239 yang merupakan dana kegiatan pasca-operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas. Saldo tersebut merupakan konversi saldo ASR sebesar USD3,035,447,304.55 menggunakan kurs penutup BI Tahun 2022 sebesar Rp15.592,00. Mutasi saldo dana ASR tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai (USD)
Saldo Awal	2,650,529,165.20
Mutasi tambah	391,356,347.60
Mutasi kurang:	(6,438,208.25)
Saldo Akhir	3,035,447,304.55
Saldo Akhir Rupiah	Rp47.328.694.372.544

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS yang digunakan hanya untuk

pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan Abandonment and Site Restoration (ASR) atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasal 36, KKKS sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi kegiatan hulu migas. Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Pengeluaran yang terjadi dalam penanganan pasca operasi sumur eksplorasi dan pemulihan lokasi pemboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi (cost recoverable). Dana ASR dapat diajukan cost recovery pada saat bersamaan setelah KKKS melakukan penyetoran ke rekening bersama.

Kesepakatan substansi pengaturan kebijakan akuntansi Dana ASR tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 hal Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration Yang Ditempatkan pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas, yang mengatur kebijakan akuntansi pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi dimaksud telah diatur sebelumnya dalam surat nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang didalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR on face dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker;
- b. Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, penyajian Saldo Rekening Dana ASR on face dalam laporan keuangan perlu disempurnakan menjadi disajikan sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);
- c. Selanjutnya agar SKK Migas dapat menyampaikan perhitungan jumlah Saldo Rekening Dana ASR dari Kontrak Kerjasama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (Cost Recovery) maupun dari Kontrak Kerjasama yang berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split, disertai penjelasan yang memadai untuk proses pencatatannya pada LKBUN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);
- d. Ketentuan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

Dana ASR sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam Surat Menteri Keuangan nomor S- 9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan maksud surat ini;

- e. Kebijakan akuntansi ini dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara dalam Penyusunan LKBUN untuk dikonsolidasikan ke dalam LKPP yang mulai diberlakukan sejak pelaporan tahun 2020.

Pencatatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 Nomor : 25b/LHP/XV/05/2021 tanggal 29 Mei 2021, yaitu pengaturan yang lebih detil atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR, termasuk Dana ASR yang dikelola oleh BPMA. Hal tersebut berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas dan surat Kuasa Pengguna Anggaran SKK Migas Nomor SRT-0032/SMKPA0000/2022/S4 tanggal 8 Maret 2022 hal Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) Satker SKK Migas Tahun 2021.

5. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.99

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp229.976.687.840.546 dan Rp212.996.281.913.184 atau mengalami peningkatan sebesar Rp16.980.405.927.362 (7,97%).

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan (Penurunan) Rp)
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	205.285.435.523.564	189.639.517.831.246	15.645.917.692.318
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	24.691.252.316.982	23.356.764.081.938	1.334.488.235.044
Total Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	229.976.687.840.546	212.996.281.913.184	16.980.405.927.362

Catatan:

- Berdasarkan Laporan Keuangan AIP TA. 2022 Audited dengan PT Taspen (Persero) tanggal 20 Februari 2023 disebutkan bahwa saldo AIP PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp205.285.435.523.564;
- Berdasarkan Laporan Keuangan AIP TA. 2022 Audited PT Asabri (Persero) tanggal 28 Februari 2023 disebutkan bahwa saldo AIP PT ASABRI (Persero) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.691.252.316.982.

D.2.1.6.3. DANA CADANGAN PENJAMINAN

Dana Cadangan penjaminan adalah dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah.

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Dana Penjaminan EAS	11.513.131.000.000	10.382.268.000.000
Dana Penjaminan PRKN	372.517.000.000	372.517.000.000
Total	11.885.648.000.000	10.754.785.000.000

Dana Penjaminan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.885.648.000.000 dan Rp10.754.785.000.000. Pada Tahun 2019, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah disepakati bahwa pencatatan atas saldo dana cadangan penjaminan (pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN) dialihkan dari satker 999986 (Direktorat PRKN) ke satker 970974 (Direktorat EAS).

Terdapat dua KPA Dana Penjaminan yakni Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.

Dana Penjaminan yang dikelola Direktorat EAS sebesar Rp11.513.131.000.000 dan digunakan untuk:

- Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I);
- Percepatan Penyediaan Air Minum;

- c. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN;
- d. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
- e. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2);
- f. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU);
- g. Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek.
- h. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi
- i. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM.

Adapun Dana Penjaminan yang dikelola oleh Direktorat PRKN adalah sebesar Rp372.517.000.000 yang merupakan dana penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

D.2.1.6.4. DANA KELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM

Nilai dana kelolaan BLU yang belum digulirkan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.340.470.045.889 dan Rp8.724.468.057.192.

Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan adalah dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BA 999.03 atau pengalihan dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarnya atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Rincian dana kelolaan pada masing-masing BLU adalah sebagai berikut:

No	Instansi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	BLU Pusat Investasi Pemerintah	3.359.710.949.023	4.503.398.370.024
2	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Dit. SMI)	699.864.758.682	626.580.475.987
3	BLU Lembaga Penyalur Dana Bergulir KUMKM	1.222.484.034.252	1.561.815.878.152
4	BLU LPMUKP	712.990.058.259	728.818.872.046

No	Instansi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5	BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	1.286.798.335.585	1.303.854.460.983
6	BLU BPDH (Pengelola dana bersama penanggulangan bencana dan dana DNS)	3.058.621.910.088	0
JUMLAH		10.340.470.045.889	8.724.468.057.192

1. Dana Kelolaan pada BLU PIP

Dana Kelolaan BLU PIP yang belum digulirkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.359.710.949.023 dan Rp4.503.398.370.024. Terjadi penurunan sebesar Rp1.143.687.421.001 atau 25,4 persen dari tahun sebelumnya.

2. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Dit. SMI)

Dana kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDH) merupakan dana kelolaan yang diserahterimakan dari BLU P3H. Nilai dana kelolaan BLU BPDH per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp699.864.758.682 dan Rp626.580.475.987, atau mengalami kenaikan sebesar Rp73.284.282.695 atau 11,70% dari tahun sebelumnya yang disebabkan belum digulirkannya dana kelolaan kepada Lembaga Keuangan Non Bank oleh BPDH.

3. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana bergulir KUMKM

Nilai Dana Kelolaan Badan Layanan Umum LPDB-KUMKM per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.222.484.034.252 dan Rp1.561.815.878.152. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan sebagai pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada mitra LPDB-KUMKM. Dana Kelolaan BLU terdiri dari pengembalian pokok dana bergulir dan program Kementerian Koperasi dan UKM pada saldo pengelolaan pokok dana bergulir BA 999.03.

Saldo Rekening Giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp104.418.520.301 kemudian dilakukan rekonsiliasi bank sebesar minus Rp8.734.486.049 dan terdapat nilai deposito sebesar Rp1.126.800.000.000, sehingga dana kelolaan akhir Badan Layanan Umum LPDB-KUMKM per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.222.484.034.252 yang merupakan dana bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2022.

Pada nilai dana kelolaan sebesar Rp1.222.484.034.252 termasuk di dalamnya pembayaran piutang oleh mitra Koperasi Kampus Unsoed dengan mencairkan klaim subrogasi mitra

atas nama kepada Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Jawa Tengah) sebesar Rp860.633.286. Selain itu terdapat koreksi nilai sebesar Rp164.411.710 yang berasal dari pelimpahan dana bergulir dari KPKNL atas mitra CV Sabina Teknik yang transaksinya baru teridentifikasi pada Maret 2023.

4. Dana Kelolaan pada BLU LPMUKP

Dana Kelolaan BLU LPMUKP yang belum Digulirkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp712.990.058.259 dan Rp728.818.872.046. Terjadi penurunan Aset Lainnya berupa Dana Kelolaan Badan Layanan Umum sebesar Rp15.828.813.787 atau 2,17 persen karena meningkatnya realisasi pencairan Dana Bergulir.

Keterangan	Nilai
Saldo Awal dana Kelolaan 1 Januari 2022	728.818.872.046
Realisasi DIPA BA 999.03 2022	(133.229.750.000)
Pengembalian Pokok 2022 yang digulirkan	117.415.361.213
Koreksi Dana Kelolaan	(14.425.000)
Saldo Dana Kelolaan per tanggal 31 Desember 2022	712.990.058.259

Jumlah dana kelolaan Rekening Dana Kelolaan BLU LPMUKP per 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp712.990.058.259, terdapat perbedaan senilai Rp14.425.000 yang merupakan koreksi nilai Dana Kelolaan, Koreksi tersebut terjadi karena terdapat pengembalian kepada debitur sebesar Rp14.425.000 dari rekening operasional Penerimaan, seharusnya pengembalian tersebut bersumber dari Rekening Dana Kelolaan.

5. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

Nilai dana kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.286.798.335.585 dan Rp 1.303.854.460.983. Terjadi penurunan sebesar Rp17.056.125.398 atau 1,31 persen.

Uraian	Nominal (Rp)
Posisi per 31 Desember 2021	1.303.854.460.983
(-) Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks PPA	(415.169.280)
(-) Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks HTBI	(4.534.171.364)
(-) Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset propertyi investasi eks Pertamina dan aset eks Pertamina berupa kawasan	(393.506.595)
(-) Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks PPA	(11.713.278.159)
Posisi per 31 Desember 2022	1.286.798.335.585

Penggunaan dana investasi untuk upgrade aset kelolaan dan penebusan HTBI yang dirinci per tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Alokasi APBN-P TA 2015	1.500.000.000.000
(-) Penggunaan di tahun 2016	(26.734.113.000)
(-) Penggunaan di tahun 2017	(54.778.165.126)
(-) Penggunaan di tahun 2018	(11.908.277.761)
(-) Penggunaan di tahun 2019	(16.608.319.662)
(-) Penggunaan di tahun 2020	(65.868.718.321)
(-) Penggunaan di tahun 2021	(20.247.945.147)
(-) Penggunaan di tahun 2022	(17.056.125.398)
Posisi per 31 Desember 2022	1.286.798.335.585

Rincian penempatan dana kelolaan manajemen aset adalah sebagai berikut:

Kas/Bank	Jenis	Nomor Rekening	Saldo (Rp)
PT Bank Bukopin Tbk	Deposito	2013730949	100.000.000.000
PT BNI (Persero) Tbk	Giro	984125000	36.798.335.585
PT BRI (Persero) Tbk	Deposito	32901028105404	750.000.000.000
PT BRI (Persero) Tbk	Deposito		400.000.000.000
Total			1.286.798.335.585

6. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Pengelola dana bersama penanggulangan bencana dan dana DNS)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan Kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, BPD LH ditunjuk menjadi pengelola dana PFB. Selanjutnya, berdasarkan KMK nomor 393/KMK.06/2022 tanggal 28 September 2022, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BLU BPD LH ditetapkan menjadi KPA BUN BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PFB) dan dana DNS.

Dana kelolaan pada BLU BPD LH per 31 Desember 2022 *Audited* dan per 31 Desember 2021 *Audited* adalah sebesar Rp3.058.621.910.088 dan Rp0. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang berasal dari BA 999.03 pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana dan dana DNS, dengan rincian dana bersama penanggulangan bencana sebesar Rp3.000.000.000.000 dan dana DNS sebesar Rp58.621.910.088.

Nilai dana DNS sebesar Rp58.621.910.088 merupakan pengalihan dana DNS yang di awalnya dicatat pada UAIP menjadi dicatat pada BLU BPD LH sesuai BAST antara UAIP dan UAKPA BLU BPD LH Nomor BA-14/KN.3/2022 dan BAST24/BPD LH.2/2022 tanggal 2 November 2022.

D.2.1.6.5. DANA JANGKA PANJANG

Posisi pos Dana Jangka Panjang pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.798.237.380.309 dan Rp16.003.441.297.997.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Dana Jangka Panjang	28.798.237.380.309	16.003.441.297.997
	Rp Kenaikan/(Penurunan)	12.794.796.082.312
	% Kenaikan/(Penurunan)	79,95

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, dana jangka panjang adalah dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional, yang dikelola oleh LMAN.

Pada tahun 2020, melalui surat nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan kebijakan penyajian atas dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional pada pos Dana Jangka Panjang (165211). Sebelumnya, penyajian atas dana tersebut dilakukan pada pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.²

Mutasi tambah dan kurang untuk pos Dana Jangka Panjang di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Uraian	Nominal (Rp)
Posisi per 31 Desember 2021	16.003.441.298.002
+ Retur/pengembalian dana	1.859.450.374
+ Perolehan dana jangka panjang dari Rekening Kas Umum Negara	28.840.000.000.000

Uraian		Nominal (Rp)
(-)	Penggunaan dana jangka panjang untuk pendanaan pengadaan tanah PSN	(16.047.063.368.063)
Posisi per 31 Desember 2022		28.798.237.380.309

**selisih rincian sebesar Rp4 disebabkan pembulatan.*

Penerimaan dan penggunaan dana jangka panjang untuk pendanaan pengadaan tanah PSN yang dirinci per tahun sejak 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Uraian		Nominal (Rp)
	Alokasi APBN-P TA 2016	16.000.000.000.000
	Alokasi APBN-P TA 2017	32.050.560.000.000
	Alokasi APBN TA 2018	31.152.730.000.000
	Alokasi APBN TA 2019	12.000.000.000.000
	Alokasi APBN TA 2021 **)	11.123.000.000.000
	Alokasi Pembiayaan dari SAL TA 2021 ***)	3.300.000.000.000
	Pencairan Alokasi APBN TA 2022 ****)	28.840.000.000.000
(-)	Penggunaan di tahun 2017 untuk penggantian dana badan usaha	(11.722.231.996.179)
(-)	Penggunaan di tahun 2018 untuk penggantian dana badan usaha	(19.789.900.738.239)
(-)	Penggunaan di tahun 2018 untuk pembayaran langsung	(1.461.797.730.377)
(-)	Penggunaan di tahun 2019 untuk penggantian dana badan usaha	(11.255.023.776.662)
(-)	Penggunaan di tahun 2019 untuk pembayaran langsung	(2.622.078.588.471)
(-)	Penggunaan di tahun 2020 untuk penggantian dana badan usaha *)	(16.188.530.391.558)
(-)	Penggunaan di tahun 2020 untuk pembayaran langsung *)	(3.766.644.434.006)
(+)	Retur/pengembalian dana atas penggantian dana talangan proyek jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	21.928.205.059
(+)	Retur/pengembalian dana atas penggantian pembayaran langsung proyek LRT Jabodebek	19.012.419.000
(-)	Penggunaan di tahun 2021 untuk penggantian dana Badan Usaha *)	(7.075.903.330.513)
(-)	Penggunaan di tahun 2021 untuk pembayaran langsung *)	(15.783.555.647.233)
(+)	Retur/pengembalian dana atas penggantian dana talangan proyek Jalan Tol Pandaan-Malang, Serang-Panimbang, Ciawi-Sukabumi dan Cinere-Serpong	1.877.307.181
(-)	Penggunaan di tahun 2022 untuk penggantian dana Badan Usaha *)	(2.977.320.020.711)
(-)	Penggunaan di tahun 2022 untuk pembayaran langsung *)	(13.069.743.347.352)
(+)	Retur/pengembalian dana atas proyek Jalan Tol Ciawi Sukabumi	1.859.450.374
Posisi per 31 Desember 2022		28.798.237.380.309

**selisih rincian sebesar Rp4 disebabkan pembulatan.*

Sejak pemberlakuan PMK Nomor 139/PMK.06/2020, realisasi penggunaan dana jangka panjang oleh LMAN disahkan sebagai belanja modal pada K/L selaku Entitas yang memerlukan tanah. LMAN melakukan penghentian pengakuan atas tanah PSN yang diperoleh serta penghentian pengakuan atas utang jangka panjang kepada BUN melalui mekanisme SPM/SP2D nihil/non-kas. Rincian pengesahan belanja modal untuk tahun 2022 dan 2021 per KL per jenis proyek adalah sebagai berikut:

K/L	Jenis Proyek	2022	2021
		Nilai SP2D	Nilai SP2D
PUPR	Air baku	45.194.933.400	9.180.846.000
	Jalan Tol	12.172.219.871.831	17.873.183.943.975
	Bendungan	3.483.829.231.990	3.540.131.638.270
	Irigasi	67.268.122.796	343.194.986.941
Perhubungan	Jalur KA	202.587.034.586	945.138.771.597
	Pelabuhan	75.649.491.460	61.843.944.513
Parekraf	KSPN	314.682.000	84.925.396.071
Total		16.047.063.368.063	22.857.599.527.367

Pada tahun 2022, LMAN memperoleh alokasi pembiayaan investasi sebesar Rp28.840.000.000.000. Adapun rincian penempatan dana jangka Panjang pada perbankan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Bank	Deposito	Giro	Total
PT Bank Bukopin Tbk	200.000.000.000		200.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.065.360.000.000	56.140.456.579	3.121.500.456.579
PT BNI (Persero) Tbk	10.176.680.305.614	165.677.124.878	10.342.357.430.492
PT BPD Jawa Barat Banten Tbk	1.900.000.000.000		1.900.000.000.000
PT BRI (Persero) Tbk	11.533.930.863.822	12.357.962.030	11.546.288.825.852
PT BTN (Persero) Tbk	1.000.000.000.000	688.090.667.387	1.688.090.667.387
Total	27.875.971.169.436	922.266.210.874	28.798.237.380.310

Sejak awal penugasan hingga tanggal 31 Desember 2022, LMAN merealisasikan pembayaran pengadaan tanah PSN di beberapa sektor dengan total nilai sebesar Rp105.669.912.070.065. Pembayaran dilakukan melalui skema pembayaran langsung, skema penggantian dana talangan badan usaha melalui verifikasi BPKP, maupun penggantian dana talangan badan usaha dengan mekanisme terbaru menurut Perpres 66 Tahun 2020. Sebesar Rp102.601.433.874.559 dari jumlah tersebut adalah pembayaran uang ganti kerugian (pokok) dan Rp3.068.478.195.506 merupakan pembayaran *cost of fund* (CoF) sebagai nilai tambah kepada badan usaha untuk mekanisme dana talangan. Secara rata-rata CoF adalah sebesar 2,99% dari pokok uang ganti kerugian.

Perincian pendanaan pengadaan tanah sejak tahun 2017 s.d. 31 Desember 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tahun Realisasi	Jalan Tol	KSPN	Pelabuhan	Perkeretaapian
2017	11.722.231.996.179	-	-	-
2018	18.628.040.043.889	-	120.450.425.905	469.643.853.528
2019	10.747.173.270.236	-	365.995.793.437	658.574.602.207
2020	16.872.019.894.368	-	174.860.349.434	622.106.949.199
2021	16.945.386.464.281	84.925.396.071	61.843.944.513	945.138.771.597
2022	11.922.095.883.337	314.682.000	75.649.491.460	202.587.034.586
Total	86.836.947.552.290	85.240.078.071	798.800.004.749	2.898.051.211.117

Tahun Realisasi	Air Baku	Bendungan	Irigasi
2017	-	-	-
2018	-	1.798.625.413.678	-
2019	-	1.452.435.670.847	105.159.044.199
2020	-	1.063.464.137.377	74.957.002.390
2021	9.180.846.000	3.540.131.638.279	343.194.986.941
2022	45.194.933.400	3.483.046.115.733	67.268.122.796
Total	54.375.779.400	11.337.702.975.914	590.579.156.326

Tahun Realisasi	COF Bendungan	COF Jalan Tol
2017	-	-
2018	-	234.938.731.616
2019	17.551.853.654	530.212.130.553
2020	5.709.225.416	1.101.116.643.321
2021	-	927.779.622.887
2022	783.116.257	250.123.988.494
Total	24.044.195.327	3.044.171.116.871

D.2.1.6.6. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp614.634.699.183.703 dan Rp672.657.039.394.723, mengalami penurunan sebesar Rp58.022.340.211.020 atau (8,63%). Nilai pertanggal 31 Desember 2022 terdiri dari aset KKKS, aset PKP2B, aset lainnya BLBI, aset ABMA/T, aset BMN Idle, Aset Eks Pertamina dan Aset Lain-lain.

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Aset KKKS	600.622.193.530.625	577.706.932.941.265
2.	Aset PKP2B	2.489.221.624.116	41.141.130.765.206
3.	Aset Lainnya BLBI	10.279.524.386.452	8.508.560.497.099

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
4.	Aset ABMA/T	37.668.763.100	83.923.260.600
5.	Aset BMN Idle	32.894.062.705	94.180.013.291
6.	Eks Pertamina	0	15.083.556.147.288
7.	Aset Lain-lain	362.543.093.041	371.138.589.415
8.	Aset Lain-lain 999.03	810.653.723.664	29.667.617.180.559
	Jumlah	614.634.699.183.703	672.657.039.394.723

D.2.1.6.6.1. Aset KKKS

Aset KKKS per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp600.622.193.530.625 dan Rp577.706.932.941.265. Aset Lainnya pada KKKS terdiri dari gabungan empat UAKPA sebagai berikut.

NO	Aset KKKS	Per 31 Desember 2022
1	UAKPA BMN Hulu Migas pada DJKN	8.148.384.448
2	UAKPA BMN Hulu Migas pada PPBMN	5.725.853.761
3	UAKPA BMN Hulu Migas pada SKK Migas	586.653.132.958.891
4	UAKPA BMN Hulu Migas pada BPMA	13.955.186.333.525
	Saldo Akhir 31 Desember 2022	600.622.193.530.625

Penjelasan Rincian Pos-pos Aset KKKS

BMN Hulu Migas Pada DJKN

Aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.148.384.448,. Aset lainnya tersebut berupa tanah yang merupakan himpunan dari BMN Hulu Migas yang telah diserahkan ke Pengelola Barang dari 3 KKKS Terminasi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Sekayu (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 0023.BA/92/SJA.4/2019 dan Nomor BA-4/KN.4/2019 tanggal 17 Mei 2019, Berita Acara

Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja West Belida (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 0024.BA/92/SJA.4/2019 dan Nomor BA-5/KN.4/2019 tanggal 17 Mei 2019, dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Citarum (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 16.BA/92/SJA.4/2020 dan Nomor BA-1/KN.4/2020 tanggal 29 Juli 2020.

BMN Hulu Migas Pada PBMN

Aset Lainnya pada KKKS/Hulu Migas PBMN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.725.853.761 dan Rp577.706.932.941.266. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut:

A. Aset Tanah

SALDO 31 DESEMBER 2021	32.615.268.372.153
MUTASI TAMBAH	0
MUTASI KURANG	32.615.268.372.153
Alih Serah	1.571.563.347.819
Koreksi Kurang	88.833.513.857
Transfer keluar ke UAKPA SKK Migas dan BPMA	30.954.871.510.477
SALDO 31 DESEMBER 2022	0

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

- Saldo awal sebesar Rp32.615.268.372.153 merupakan Aset Tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2021 (Audited).
- Mutasi Kurang tanah sebesar Rp32.615.268.372.153 berasal dari:
 - Alih Serah sebesar Rp1.571.563.347.819 karena penyerahan aset tanah dari KESDM kepada KKKS PHE Raja Tempirai sebesar Rp8.369.112.819, KKKS Pertamina Hulu Kalimantan Timur sebesar Rp1.563.194.235.000.
 - Koreksi kurang sebesar Rp88.833.513.857 karena penyerahan aset tanah telah dilakukan sebelum tahun 2022 dari KESDM kepada KKKS PHE Jambi Merang sebesar Rp16.156.660.359; KKKS Pertamina Hulu Energi NSO sebesar Rp5.548.283.000 KKKS Petrogas (Basin) Ltd. sebesar Rp47.059.951.000; serta KESDM kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sebesar Rp394.587.000 pada KKKS Star Energy Sekayu dan sebesar Rp19.674.032.498 pada KKKS Pan Orient Energy.
 - Transfer keluar sebesar Rp30.954.871.510.477 terdiri dari Rp30.737.623.650.724 ke SKK Migas dan Rp217.247.859.753 ke BPMA, dikarenakan berdasarkan PMK 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak Dan Gas Bumi, terdapat reposisi kewenangan pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana SKK Migas dan

BPMA berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang.

B. Aset Non Tanah

B.1. Aset Non Tanah Berubah HBM

Saldo Awal 31 Desember 2021	517.780.153.901.997
Mutasi Tambah:	125.447.999.793
Alih Terima	125.447.524.562
Koreksi Tambah	475.231
Mutasi Kurang:	517.905.601.901.790
Pemindahtanganan/Penjualan Lelang	2.423.019.247
Alih Serah	125.447.524.562
Koreksi Kurang	2.409.753.455
Transfer Keluar ke UAKPA SKK Migas dan BPMA	517.775.321.604.526
Saldo Akhir 31 Desember 2022	0

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

- Saldo awal sebesar Rp517.780.153.901.997 merupakan Aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2021 (Audited).
- Mutasi tambah HBM sebesar Rp125.447.999.793 berasal dari:
 - Alih Terima sebesar Rp125.447.524.562 berasal dari penyerahan relinquish sebagian wilayah kerja Bertak, Pijar, Puyuh yang semula dimiliki oleh KKKS ConocoPhillips Indonesia kepada KESDM.
 - Koreksi Tambah sebesar Rp475.231 karena penyesuaian saldo awal berdasarkan BAST HBM SKK Migas ke KESDM Nomor 2.BA/92/SJA.4/2020 dan BAC-0144/SKKMH3000/2020/S7 tanggal 30 Januari 2020.
- Mutasi kurang HBM sebesar Rp517.905.601.901.790 berasal dari:
 - Penjualan melalui lelang aset HBM pada KKKS PTTEP Malunda Ltd. sebesar Rp2.395.957.089 dan KKKS Star Energy Ltd. sebesar Rp27.062.158.
 - Alih Serah sebesar Rp125.447.524.562 karena penyerahan aset HBM kepada KKKS SSY Petroleum Pte Ltd.
 - Koreksi Kurang sebesar Rp2.409.753.455 karena hibah telah dilakukan sebelum tahun 2022 pada aset KKKS Inpex Babar Selaru Ltd., KKKS Mandala Energy Merangin III Ltd., dan Mandala Energy Sumbagsel Ltd.
 - Transfer keluar sebesar Rp517.775.321.604.526 terdiri dari Rp505.412.719.019.766 ke SKK Migas dan Rp12.362.602.584.760 ke BPMA, dikarenakan berdasarkan PMK 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak Dan Gas Bumi, terdapat reposisi kewenangan pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana SKK Migas dan BPMA berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang.

B.2. Aset Non Tanah Berubah HBI

Saldo Awal 31 Desember 2021	126.867.842.110
Mutasi Tambah:	0
Mutasi Kurang:	126.844.972.162
Pemindahtanganan/Penjualan Lelang	24.438.505
Koreksi Kurang	46.273.954
Transfer Keluar ke UAKPA SKK Migas dan BPMA	126.774.259.703
Saldo Akhir 31 Desember 2022	22.869.948

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2021 (audited).
2. Tidak terdapat Mutasi Tambah pada aset HBI selama Tahun Anggaran 2022
3. Mutasi Kurang sebesar Rp126.844.972.162 berasal dari:
 - a. Penjualan melalui lelang aset HBI pada KKKS PTTEP Malunda Ltd. sebesar Rp24.438.505.
 - b. Koreksi kurang sebesar Rp46.273.954 karena telah dilakukan hibah atas aset HBI pada KKKS Mandala Energy Sumbagsel Ltd. pada tahun 2021.
 - c. Transfer keluar sebesar Rp126.774.259.703 terdiri dari Rp125.090.994.274 ke SKK Migas dan Rp1.683.265.429 ke BPMA, dikarenakan berdasarkan PMK 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak Dan Gas Bumi, terdapat reposisi kewenangan pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana SKK Migas dan BPMA berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang.

B.3. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

	USD	Nilai konversi rupiah
Saldo Awal 31 Desember 2021*	1,903,953,132.44	27.184.642.825.006
Mutasi Tambah:	0	0
Mutasi Kurang:	1,903,590,600.89	27.179.679.282.163
Pemindahtanganan/Penjualan Lelang**	146,374.83	2.302.622.450
Koreksi Kurang**	26,917,988.06	384.335.033.528
Transfer Keluar ke UAKPA SKK Migas dan BPMA*	1,876,526,238.00	26.793.041.626.185
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	362,531.55	4.963.542.843
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2022		739.440.970
Saldo Akhir 31 Desember 2022**	362,531.55	5.702.983.813

Ket : * menggunakan kurs JISDOR pada 31 Desember 2021 (Rp14.278/US\$)

** menggunakan kurs tengah pada 31 Desember 2022 (Rp15.731/US\$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

1. Saldo Awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2021 (audited) sebesar USD1,903,953,132.44 atau setara Rp27.184.642.825.006 (kurs per 31 Desember 2021 adalah Rp14.278/USD)
2. Tidak terdapat Mutasi Tambah pada aset MP selama Tahun Anggaran 2022
3. Mutasi Kurang sebesar USD1,903,590,600.89 berasal dari:
 - a. Penjualan melalui lelang aset MP pada KKKS Star Energy Ltd. sebesar USD146.374,83 atau setara dengan Rp2.302.622.450.
 - b. Koreksi kurang sebesar USD26,917,988.06 atau setara dengan Rp384.335.033.528 karena penyerahan aset MP kepada 11 KKKS sebelum tahun 2022.
 - c. Transfer keluar sebesar USD1,876,526,238.00 terdiri dari USD1,790,134,295.50 setara Rp25.559.537.471.141 ke SKK Migas dan USD86,391,942.50 setara Rp1.233.504.155.044 ke BPMA, dikarenakan berdasarkan PMK 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak Dan Gas Bumi, terdapat reposisi kewenangan pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana SKK Migas dan BPMA berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang.
4. Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS per 31 Desember 2022 senilai USD362,531.55 yang jika dikonversikan

dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2022 yaitu setara dengan Rp5.702.983.813. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan penyesuaian tambah selisih kurs sebesar Rp739.440.970.

BMN Hulu Migas Pada SKK MIGAS

Aset KKKS per 31 Desember 2022 sebesar Rp586.653.132.958.891. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut:

A. Aset Tanah

SALDO 31 DES 2021	0
MUTASI TAMBAH	32.618.893.723.171
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA - PB	30.737.623.650.724
Koreksi Tambah	1.881.270.072.447
MUTASI KURANG	10.426.019.500
Koreksi Kurang	10.426.019.500
SALDO 31 DES 2022	32.608.467.703.671

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
2. Mutasi tambah sebesar Rp32.618.893.723.171 yang terdiri dari:
 - a. Transfer masuk saldo awal dari UAKPA – PB sebesar Rp30.737.623.650.724 sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited)
 - b. Koreksi tambah sebesar Rp1.881.270.072.447 yang terdiri dari:
 - Koreksi PIS dan koreksi tambah buka tutup sebesar Rp9.595.546.770 pada KKKS JOB Pertamina Medco E&P Simenggaris dan SPE Petroleum.
 - Koreksi tambah sebesar Rp2.646.867.500 berasal dari Koreksi yang dilakukan oleh SKK Migas karena sertifikasi BMN Tanah pada KKKS JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi.
 - Koreksi tambah sebesar Rp48.785.224.000 pada KKKS SSY Petroleum Pte. Ltd. Disebabkan koreksi tambah sebesar Rp1.161.770.000 karena alih terima dari operator KKKS Medco E&P (Grissik) Ltd pada KKKS SSY Petroleum Pte. Ltd. dan koreksi tambah sebesar Rp47.623.454.000 disebabkan hasil inventarisasi dan penilaian tanah tahun 2022.

- Koreksi tambah sebesar Rp179.914.192.000.00 pada KKKS Medco E&P (Grissik) Ltd. disebabkan koreksi tambah sebesar Rp2.307.390.000 karena pembenahan pencatatan pada KKKS Medco E&P (Grissik) Ltd. atas aset tanah dengan tahun perolehan 2019 yang seharusnya sudah tercatat di neraca dan koreksi tambah sebesar Rp177.606.802.000 disebabkan hasil inventarisasi dan penilaian tanah tahun 2022.
 - Koreksi tambah pada KKKS PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur sebesar Rp1.563.194.235.000 karena alih terima dari PPBMN Kementerian ESDM.
 - Koreksi tambah pada KKKS PT PHE NSO (GS) sebesar Rp5.548.283.000 karena alih terima dari PPBMN Kementerian ESDM.
 - Koreksi tambah pada KKKS PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang sebesar Rp16.156.660.359 karena alih terima dari Kementerian ESDM.
 - Koreksi tambah pada KKKS Petrogas Ltd (GS) sebesar Rp47.059.951.000 karena alih terima dari Kementerian ESDM.
 - Koreksi tambah pada KKKS JOBP - Golden Spike sebesar Rp8.369.112.819 karena alih terima dari Kementerian ESDM.
3. Mutasi Kurang sebesar Rp10.426.019.500 yang terdiri dari:
- a. Koreksi kurang sebesar Rp1.206.590.000 pada KKKS Medco E&P (Grissik) Ltd. karena
 - 1) Koreksi partial relinquish lapangan Puyuh, Bertak, dan Pijar
 - 2) Koreksi aset non Tanah
 - b. Terdapat koreksi kurang sebesar Rp770.982.000 karena koreksi buka tutup pada KKKS JOB Pertamina Medco E&P Simenggaris.
 - c. Koreksi kurang sebesar Rp5.801.580.000 karena pembenahan pencatatan pada KKKS SPE Petroleum Ltd.
 - d. Terdapat koreksi kurang sebesar Rp2.646.867.500 karena sertifikasi BMN Tanah pada KKKS JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi.

B. Aset Non Tanah

B.1. Aset Non Tanah Berupa HBM

Saldo Awal 31 Desember 2021	0,00
Mutasi Tambah:	529.834.179.470.252,00
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA - PB	505.412.719.019.767,00
PIS	12.579.048.961.886,00
PIS Tahun Sebelumnya	5.087.189.068.537,00
Koreksi Tambah	6.412.869.039.112,00
Alih Terima	132.696.131.188,00
Transfer In	145.307.265.265,00
Selisih Pembulatan	38.189,00
SE	64.349.946.308,00
Mutasi Kurang:	3.066.732.138.952,00
Koreksi Saldo Awal	174.365.256.638,00
Penghapusan	41.887.930.315,00
Alih Serah	132.696.131.188,00
Transfer Out	339.109.502.161,00
Selisih Pembulatan	5.328.734,00
Koreksi Kurang	2.300.351.794.978,00
Dalam Proses Penghapusan	78.316.194.938,00
Saldo Akhir 31 Desember 2022	526.767.447.331.300,00

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

- Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- Mutasi tambah HBM sebesar Rp529.834.179.470.252 berasal dari:
 - Transfer masuk saldo awal dari UAKPA – PB sebesar Rp505.412.719.019.767 sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited).
 - Pembelian HBM pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp12.579.048.961.886.
 - Penambahan HBM yang baru dilaporkan SKK Migas per 31 Desember 2022, dengan tahun perolehan aset sebelum Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.087.189.068.537.
 - Koreksi tambah karena pembenahan pencatatan sebesar Rp6.412.869.039.112.
 - Transfer In sebesar Rp145.307.265.265.
 - Alih Terima sebesar Rp132.696.131.188 merupakan transaksi penerimaan aset dari KKKS Medco E&P Grissik Ltd. kepada KKKS Alih Kelola SSY Petroleum Pte. Ltd. atas pengembalian sebagian Wilayah Kerja Corridor yang terdiri dari Lapangan Puyuh, Bertak, Pijar.
 - Selisih pembulatan pencatatan oleh SKK Migas sebesar Rp38.189.
 - Subsequent Expenditure sebesar Rp64.349.946.308.

3. Mutasi kurang HBM sebesar Rp3.066.732.138.952 berasal dari:
 - a. Koreksi saldo awal disebabkan penyesuaian atas nilai saldo awal pada KKKS Niko Resources South East Seram (B.98) yang semula sebesar Rp174.365.256.638 menjadi nol, dikarenakan ada pencatatan ganda pada Laporan BMN tahun 2021 Audited.
 - b. Penghapusan sebesar Rp41.887.930.315 merupakan penghapusan HBM berdasarkan surat hapus buku SKK Migas yang telah laku lelang sebelum Tahun 2022, namun masih tercatat pada neraca.
 - c. Alih Serah sebesar Rp132.696.131.188 merupakan transaksi penyerahan aset dari KKKS Medco E&P Grissik Ltd. kepada KKKS Alih Kelola SSY Petroleum Pte. Ltd. atas pengembalian sebagian Wilayah Kerja Corridor yang terdiri dari Lapangan Puyuh, Bertak, Pijar.
 - d. Transfer Out sebesar Rp339.109.502.161.
 - e. Selisih Pembulatan sebesar Rp5.328.734
 - f. Koreksi kurang oleh SKK Migas sebesar Rp2.300.351.794.978 disebabkan karena adanya koreksi audit dan pembenahan pencatatan aset.
 - g. Terdapat aset yang sudah laku lelang yang dijelaskan dalam risalah lelang namun belum diterbitkan surat keputusan penghapusan dan/atau surat hapus bukunya dan aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan dari SKK Migas kepada Menteri ESDM sebesar Rp78.316.194.938.

B.2. Aset Non Tanah Berupa HBI

Saldo Awal 31 Desember 2021	0,00
Mutasi Tambah:	127.143.605.057,00
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA - PB	125.090.994.274,00
PIS	1.662.612.010,00
PIS Tahun Sebelumnya	218.911.954,00
Koreksi Tambah	171.086.819,00
Mutasi Kurang:	22.545.225,00
Penghapusan	5.479.312,00
Alih serah	0,00
Transfer Out	0,00
Selisih Pembulatan	0,00
Koreksi Kurang	17.065.913,00
Saldo Akhir 31 Desember 2022	127.121.059.832,00

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali

pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.

2. Mutasi tambah sebesar Rp127.143.605.057 berasal dari:
 - a. Transfer masuk saldo awal dari UAKPA – PB sebesar Rp125.090.994.274 sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited).
 - b. Pembelian HBI pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.662.612.010
 - c. Penambahan HBI yang baru dilaporkan SKK Migas per 31 Desember 2022, dengan tahun perolehan aset sebelum Tahun 2022 adalah sebesar Rp218.911.954
 - d. Koreksi HBI yang disebabkan karena koreksi audit dan pembenahan catatan aset HBI sebesar Rp171.086.819.
3. Mutasi Kurang sebesar Rp22.545.225 berasal dari:
 - a. Penghapusan aset HBI Sebesar Rp5.479.312 pada KKKS PHE WMO
 - b. Koreksi kurang HBI yang disebabkan karena koreksi audit dan pembenahan catatan aset HBI sebesar Rp17.065.913.

B.3. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

	USD	Nilai Konversi Rupiah
Saldo Awal 31 Desember 2021	-	-
Mutasi Tambah :	2.628.769.405	38.731.615.851.958
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA-PB*	1.790.134.295	25.559.537.471.141
Penyesuaian Saldo Awal Tambah*	14.102.219	201.351.475.134
Pengadaan**	717.177.294	11.281.916.005.594
Pengembalian MP Non Cap**	34.614.226	544.516.394.621
Pengembalian MP Cap**	25.206.190	396.518.580.292
Transfer Masuk**	33.356.359	524.728.879.904
Alih Kelola Terima**	14.178.822	223.047.045.272
Mutasi Kurang :	902.871.696	14.155.608.387.944
Penyesuaian Saldo Awal Kurang*	16.109.899	230.017.131.935
Pemakaian Capital**	375.146.089	5.901.423.126.020
Pemakaian Non Capital**	462.564.304	7.276.599.062.900
Transfer Keluar**	32.493.543	511.155.927.393
Penghapusan*	16.557.861	236.413.139.696
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	1.725.897.709	24.576.007.464.014
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2022	-	2.574.086.400.074
Saldo Akhir 31 Desember 2022	1.725.897.709	27.150.093.864.088

Ket :

* menggunakan kurs tengah BI pada 31 Desember 2021 (Rp14.278/US\$)

** menggunakan kurs tengah BI pada 31 Desember 2022 (Rp15.731/US\$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
2. Mutasi tambah sebesar USD2.628.769.405 atau setara dengan Rp38.731.615.851.958 berasal dari:
 - a. Transfer masuk saldo awal dari UAKPA – PB sebesar USD1.790.134.295 atau setara dengan Rp25.559.537.471.141 sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited).
 - b. Koreksi tambah atas saldo awal yang telah ditransfer masuk dari UAKPA - PB sebesar USD14.102.218 atau setara dengan Rp201.351.475.134 terjadi pada 18 KKKS.
 - c. Pengadaan material persediaan sebesar USD717.177.294 atau setara dengan Rp11.281.916.005.594 terjadi pada 65 KKKS.
 - d. Pengembalian atas Material Persediaan Non Capital sebesar USD34.614.226 atau setara dengan Rp544.516.394.621 terjadi pada 20 KKKS.
 - e. Pengembalian atas Material Persediaan Capital sebesar USD25.206.190 atau setara dengan Rp396.518.580.292 terjadi pada 17 KKKS.
 - f. Transfer Masuk sebesar USD33,356,359 atau setara Rp524.728.879.904 terjadi pada 37 KKKS.
 - g. Alih Kelola Terima USD14,178,822 atau setara dengan Rp223.047.045.272 terjadi pada 2 KKKS.
3. Mutasi kurang sebesar USD902,871,696 atau setara dengan Rp14.155.608.387.944 berasal dari:
 - a. Koreksi kurang saldo awal yang telah ditransfer masuk dari UAKPA – PB sebesar USD16,109,899 atau setara dengan Rp230.017.131.935 terjadi pada 34 KKKS.
 - b. Pemakaian atas Material Persediaan capital sebesar USD375,146,089.00 atau setara dengan Rp5.901.423.126.020 terjadi pada 70 KKKS.
 - c. Pemakaian atas Material Persediaan non-capital sebesar USD462,564,304 atau setara dengan Rp7.276.599.062.900 terjadi pada 75 KKKS.
 - d. Transfer Keluar sebesar USD32,493,543 atau setara dengan Rp511.155.927.393 terjadi pada 45 KKKS.
 - e. Penghapusan sebesar USD16,557,861.02 atau setara dengan Rp236.413.139.696 terjadi pada 8 KKKS.

4. Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan SKK Migas per 31 Desember 2022 senilai USD1,725,897,709 yang jika dikonversikan dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2022 (Rp15.731/US\$) yaitu setara dengan Rp27.150.096.864.088. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan penyesuaian tambah selisih kurs sebesar Rp2.574.089.400.074.
5. Selisih Transfer material masuk dan transfer material keluar adalah sebesar USD862,816 yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu antar KKKS dalam mencatatkan transfer.

BMN Hulu Migas Pada BPMA

Aset KKKS per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp13.955.186.333.525 dan Rp0. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut:

Aset Tanah

Mutasi tanah meliputi:

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	220.784.320.793
Transfer Masuk saldo awal dari UAKPA-PB	217.247.859.753
Pengadaan	-
Koreksi berdasarkan Sertifikasi	-
Koreksi pembenahan pencatatan	3.536.461.040
Selisih Pembulatan	-
Mutasi Kurang:	-
Koreksi berdasarkan Sertifikasi	-
Saldo Akhir 31 Desember 2022	220.784.320.793

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama

kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.

2. Mutasi tambah sebesar Rp220.784.320.793 terdiri dari:
 - a. Transfer masuk saldo awal dari UAKPA-PB sebesar Rp217.247.859.753 karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas; dan
 - b. Koreksi pembenahan pencatatan tanah sebesar Rp3.536.461.040 sebagai perolehan tanah diatas Tahun 2010 pada KKKS Medco E&P Malaka yang sebelumnya tidak dilaporkan di neraca.

Aset Non Tanah

1. Aset Non Tanah Berupa HBM

Saldo Awal 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	12.362.833.617.049
Transfer saldo Awal UAKPA-PB	12.362.602.584.760
Koreksi Saldo Awal	231.032.289
Mutasi Kurang:	21.900.208.414
Koreksi Kurang	21.851.208.415
Penjualan Aset	48.999.999
Saldo Akhir 31 Desember 2022	12.340.933.408.635

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
2. Mutasi tambah sebesar Rp12.362.833.617.049 terdiri dari:
 - a. Transfer saldo awal dari UAKPA-PB sebesar Rp12.362.602.584.760 karena UAKPA-PB BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31

Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas;

- b. Koreksi saldo awal sebesar Rp231.032.289 yang merupakan Transfer In yang seharusnya dilaporkan pada tahun 2021.

3. Mutasi kurang sebesar Rp21.900.208.414 terdiri dari:

- a. Koreksi AFE Close Out pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp21.851.208.415.
- b. Penjualan aset BMN KKKS PHE NSB melalui lelang pada KPKNL setempat sebesar Rp48.999.999.

2. Aset Non Tanah Berupa HBI

Saldo Awal 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	1.692.373.208
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA-PB	1.683.265.429
Pembelian	9.107.779
Mutasi Kurang:	0
Penghapusan	
Saldo Akhir 31 Desember 2022	1.692.373.208

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas;
2. Mutasi tambah sebesar Rp1.692.373.208 terdiri dari:
 - a. Transfer masuk saldo awal dari UAKPA-PB sebesar Rp1.683.265.429 karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas; dan
 - b. Pembelian sebesar Rp9.107.779 pada KKKS Triangle Pase Inc.

3. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

	USD	Nilai konversi rupiah
Saldo Awal 31 Desember 2021	0	0
Mutasi Tambah:	94,762,583.46	1.365.182.696.593
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA-PB*	86,391,942.50	1.233.504.155.044
Penyesuaian Saldo Awal Tambah*	7.84	111.940
Pengadaan**	8,071,074.12	126.966.066.982
Pengembalian Non Capital**	21,929.11	344.966.828
Transfer Masuk**	262,536.29	4.129.958.378
Transfer dengan Pembayaran ke Kas Negara**	15,093.60	237.437.421
Mutasi Kurang:	6,289,108.74	98.933.969.552
Pemakaian <i>Capital</i> **	3,125,525.60	49.167.643.176
Pemakaian <i>Non Capital</i> **	3,083,187.97	48.501.629.956
Transfer Keluar**	80,395.17	1.264.696.419
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	88,473,474.72	1.266.248.727.042
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2022		125.527.503.847
Saldo Akhir 31 Desember 2022	88,473,474.72	1.391.776.230.889

Ket : * menggunakan kurs JISDOR pada 31 Desember 2021 (Rp14.278/US\$)

** menggunakan kurs tengah pada 31 Desember 2022 (Rp15.731/US\$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

- Saldo awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2021 (audited) sebesar USD0.00 atau setara Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas .
- Mutasi tambah sebesar USD94.762.583 atau setara dengan Rp1.365.182.696.593 berasal dari:
 - Transfer masuk saldo awal dari UAKPA-PB sebesar USD86,391,942.50 atau setara dengan 1.233.504.155.044.
 - Penyesuaian Saldo Awal Tambah sebesar USD7.84 atau setara dengan Rp111.940.

- c. Pengadaan sebesar USD8,071,074.12 atau setara dengan 126.966.066.982.
 - d. Pengembalian Non Capital sebesar USD21,929.11 atau setara dengan Rp344.966.828.
 - e. Transfer Masuk sebesar USD262,536.29 atau setara dengan 4.129.958.378.
 - f. Transfer dengan Pembayaran ke Kas Negara USD15,093.60 atau setara dengan Rp237.437.421.
3. Mutasi kurang sebesar USD6.289.109 atau setara dengan Rp98.933.969.552 berasal dari:
- a. Pemakaian Capital sebesar USD3,125,525.60 atau setara dengan Rp49.167.643.176;
 - b. Pemakaian non-capital sebesar USD3,083,187.97 atau setara dengan Rp48.501.629.656.
 - c. Transfer Keluar sebesar USD80,395.17 atau setara dengan Rp1.264.696.419.
4. Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan BPMA per 31 Desember 2022 senilai USD88,473,474.72 yang jika dikonversikan dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2022 yaitu setara dengan Rp1.391.776.230.889. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan penyesuaian tambah selisih kurs sebesar Rp125.527.503.847.
5. Penjelasan selisih transfer masuk dan transfer keluar karena adanya pengadaan Capital pada KKKS Medco E&P Malaka dan Talisman Andaman NV.

D.2.1.6.6.2. Aset PKP2B

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.489.221.624.116 dan Rp41.141.130.765.206. Selisih Aset Lainnya terdiri atas Aset Tanah dan Aset NonTanah. Penjelasan atas Aset PKP2B sebagai berikut.

NO	Aset KKKS	Per 31 Desember 2022
1	Aset Tanah	50.671.809.000
2	Aset Non Tanah	2.438.549.815.116
	Saldo Akhir 31 Desember 2022	2.489.221.624.116

Penjelasan Aset Tanah :

Saldo Awal 2022	3.136.222.121.224
Mutasi Tambah:	376.244.454.000
Aset Baru	375.330.053.000
Reklas Masuk	914.401.000
Mutasi Kurang:	- 3.461.794.766.224
Koreksi Kurang	- 39.305.354
Reklas Keluar ke Properti Investasi	- 3.461.755.460.870
Saldo Akhir 31 Desember 2022	50.671.809.000

- Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2021 sebesar Rp3.136.222.121.224.
- Terdapat mutasi tambah pada aset tanah dengan rincian sebagai berikut:
 - Penambahan Aset Tanah sebesar Rp7.170.359.000 pada PT Kaltim Prima Coal berdasarkan Laporan Hasil Penilaian BMN berupa Tanah dengan nomor LHP LAP-0021/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.01/2022 Tanggal 13 Mei 2022.
 - Penambahan Aset Tanah sebesar Rp349.335.304.000 atas 49 (empat puluh sembilan) bidang tanah pada PT Kideco Jaya Agung dengan luas total 2.017.915,50 m² dikarenakan terdapat hasil penilaian dalam rangka pencatatan BMN yang dituangkan dalam Laporan Penilaian dengan Nomor Lap-0164/1/PRO-01/KNL.1301/01.01.00/2022 tanggal 1 Desember 2022.
 - Penambahan aset tanah sebanyak 1 (satu) bidang pada PT Multi Harapan Utama dengan nilai sebesar Rp813.910.000 berdasarkan LHP-0364/1/PRO-01/WKN.13/KNL.02/01.01.00/ 2021 tanggal 18 November 2021.
 - Penambahan BMN berupa tanah sebesar Rp18.010.480.000 atas 7 (tujuh) bidang tanah pada PT Berau Coal dengan luas total sebesar 107.500 m² dikarenakan terdapat hasil penilaian dalam rangka pencatatan BMN yang dituangkan dalam Laporan Penilaian dengan Nomor Lap-0115/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2022 tanggal 28 Desember 2022.

Reklas Masuk

Terdapat reklas masuk dari BMN Non Tanah menjadi BMN Tanah dengan kode aset 101000048 (Tanah di HO Eks. Jakarta Llyod) pada PT Berau Coal dengan nilai sebesar Rp914.401.000. Telah disampaikan dokumen kepemilikan tanah berbentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan No. 569 yang

diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2009.

3. Terdapat mutasi kurang pada aset tanah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koreksi kurang pada kertas kerja sebesar Rp39.305.354 dikarenakan adanya perubahan luasan tanah yang berada pada jalan pengalih sementara ruas Simpang Perdau - Batu Ampar yang semula seluas 472.300 m² menjadi 472.229 m² atau berkurang seluas 71 m² yang menyebabkan perubahan nilai wajar dari Rp 7.170.359.000 menjadi Rp7.131.053.720 berdasarkan Surat Pernyataan CEO PT Kaltim Prima Coal dengan Nomor L638/CEO-HSES7.3/XI/22 tanggal 10 November 2022.
 - b. Reklas keluar dari BMN Tanah menjadi Properti Investasi untuk seluruh aset tanah yang dimanfaatkan oleh pemegang IUP kecuali PT Berau Coal dengan nilai sebesar Rp3.461.755.460.870.
4. Nilai Aset tanah yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp50.671.809.000 dan Rp3.136.222.121.224.

Penjelasan Aset Non Tanah

Saldo Awal 31 Desember 2021	38.004.908.643.984
Mutasi Tambah:	330.111.468.043
Penambahan Aset Baru	206.156.977.624
Kapitalisasi Aset	123.846.865.419
Koreksi Pencatatan	107.625.000
Mutasi Kurang:	(35.896.470.296.911)
Penghapusan dari Daftar BMN Neraca	(110.765.552.383)
Reklas Keluar	(914.401.000)
Reklas Properti Investasi	(35.784.790.343.528)
Saldo Akhir 31 Desember 2022	2.438.549.815.116

Penjelasan atas aset yang disajikan dalam neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Aset NonTanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2021 sebesar Rp38.004.908.643.984.
2. Mutasi tambah aset non tanah sebesar Rp330.111.468.043 berasal dari:
 - a. Penambahan aset baru yang dilaporkan PKP2B per 31 Desember 2022 adalah Rp206.156.977.624 dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Berau Coal sebesar Rp15.908.796.118;
 - PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp189.761.530.715;
 - PT Multi Harapan Utama sebesar Rp314.007.404;
 - PT Kendilo Coal Indonesia sebesar Rp172.643.387.
 - b. Penambahan kapitalisasi aset berupa segala biaya yang dikeluarkan PKP2B setelah perolehan awal aset, yang memberi masa manfaat ekonomi dimasa yang akan datang sebesar Rp123.846.865.419 dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Berau Coal sebesar Rp636.841.998;
 - PT Kideco Jaya Agunng sebesar Rp2.283.462.787;

- PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp120.926.560.634.
- c. Koreksi tambah pencatatan sebesar Rp107.625.000 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - Koreksi tambah pencatatan sebesar Rp107.625.000 pada PT Multi Harapan Utama berdasarkan Laporan Hasil Penilaian BMN dengan nomor LHP LAP-0080/1/PRO.01/KNL.1302/01.01.00/2022 Tanggal 07 Maret 2022 dan LAP-0081/1/PRO.01/KNL.1302/ 01.01.00/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang semula dicatat pada pengungkapan lainnya menjadi dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.
- 3. Mutasi kurang aset non tanah sebesar Rp35.896.470.296.911 berasal dari:
 - a. Pemindahtanganan melalui Hibah dengan rincian:
 - SK Penghapusan nomor 4230.K/95/MEM/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia atas 1 unit Honda Mega Pro dengan kode BMN CYC0120 sebesar Rp7.750.000;
 - SK Penghapusan 21.K/BN.07/SJNA./2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Jembatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana dilakukan penghapusan pada neraca sebesar Rp7.889.676.000.
 - b. Sebab-sebab lain
 - SK Penghapusan nomor 736.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung berupa Infrastruktur Pendukung Kegiatan Pertambangan di Wilayah Usaha Pertambangan Roto Samurangau, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp4.987.648.665.
 - SK Penghapusan nomor 548.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Perbaikan Jalan Tambang di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Rp19.147.763.000.
 - SK Penghapusan nomor 829.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Bangunan dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.348.000.
 - c. Pemindahtanganan melalui penjualan
 - SK Penghapusan nomor 825.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.732.387.000.
 - SK Penghapusan nomor 950.K/BN.07/SJN.A/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Dense Media Plant, Washplant, dan Workshop di Senakin, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan sebesar Rp71.988.239.718.

- SK Penghapusan nomor 544.K/BN.07/SJN.A/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Tanito Harum sebesar Rp4.740.000.

Reklas Keluar

Terdapat reklas keluar dari BMN Non Tanah menjadi BMN Tanah dengan kode aset 101000048 (Tanah di HO Eks. Jakarta Llyod) pada PT Berau Coal dengan nilai sebesar Rp914.401.000. Telah disampaikan dokumen kepemilikan tanah berbentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan No. 569 yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2009.

Reklas keluar dari BMN Non Tanah menjadi Properti Investasi untuk seluruh aset non tanah yang dimanfaatkan oleh pemegang IUP kecuali PT Berau Coal dengan nilai sebesar Rp35.784.790.343.528.

4. Saldo akhir 31 Desember 2022 aset non tanah PKP2B sebesar Rp2.438.549.815.116.

D.2.1.6.6.3. Aset Lainnya Eks BLBI

Jumlah aset Lainnya BLBI per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.279.524.386.452 sedangkan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.508.560.497.099 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.770.963.889.353. Aset eks BPPN terdiri dari aset inventaris, aset properti eks BPPN, aset nostro, surat berharga eks BPPN dan aset saham eks BPPN. Rincian aset eks BPPN per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022	Mutasi	31 Desember 2021
1	Aset Inventaris	5.666.304.672	(2.640.961.515)	8.307.266.187
2	Aset Properti eks BPPN	3.336.970.167.124	721.388.315.813	2.615.581.851.311
3	Aset Nostro	4.089.257.490	(584.179.642)	4.673.437.131
4	Surat Berharga Eks BPPN	521.994.579.888	43.747.383.677	478.247.196.211
5	Aset Saham Eks BPPN	58.284.006.532	(10.731.438.333)	69.015.444.865
6	Aset Lain-lain	6.352.520.070.746	1.019.784.769.352	5.332.735.301.394
	Jumlah	10.279.524.386.452	1.770.963.889.353	8.508.560.497.099

1. Aset Inventaris Eks BPPN

Aset inventaris adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)) berupa aset Properti dan Non Properti. Aset Inventaris yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2022 adalah sejumlah 11.579 unit dengan nilai sebesar Rp5.666.304.672 sedangkan 31 Desember 2021 adalah sejumlah 17.695 unit dengan nilai sebesar Rp8.307.266.187 sehingga terdapat penurunan nilai sebesar Rp2.640.961.515 yang berasal dari penghapusan sebesar Rp1.388.005.772 dan penjualan melalui lelang sebesar Rp1.252.955.743.

Rincian Aset Inventaris Eks BPPN terlampir pada [lampiran LD13](#).

2. Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti eks BPPN yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote).

Jumlah aset properti eks BPPN per 31 Desember 2022 sejumlah 1.480 aset dengan nilai sebesar Rp3.336.970.167.124, sedangkan 31 Desember 2021 sejumlah 1.477 aset dengan nilai sebesar Rp2.615.581.851.311.

Terjadi perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks BPPN disebabkan oleh :

1. Perubahan nilai aset yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp24.397.200.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 14 Februari 2022, nilainya menjadi Rp118.437.678.000.
2. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Kol. Ahmad Syam/Jalan Sinangling, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp2.821.800.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 25 Mei 2022, nilainya menjadi Rp15.747.608.000.
3. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp12.716.801.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 25 Mei 2022, nilainya menjadi Rp71.571.961.000.
4. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Palang Merah No. 15 BC, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp5.752.019.500, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 31 Mei 2022, nilainya menjadi Rp12.126.872.000.

5. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp139.024.087 yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp353.500.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 485/47/2022 tanggal 8 Juli 2022.
6. Perubahan nilai aset yang terletak di Desa Pakuon (dahulu Ds. Cikanyere), Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp148.329.753.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 28 Oktober 2022, nilainya menjadi Rp601.763.860.000.
7. Perubahan nilai aset yang terletak di Plaza Shinta, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp249.285.001.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 5 November 2022, nilainya menjadi Rp343.241.566.000.
8. Penambahan sejumlah 2 (dua) aset dengan nilai Rp1.625.431.500 yang terletak di Jalan Pemuda No. 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara yang telah dilakukan penarikan kembali sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-3/KN/2022 tanggal 9 November 2022.
9. Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp94.545.000 yang terletak di Jalan Medan-Binjai, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara yang telah dilakukan penarikan kembali sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-3/KN/2022 tanggal 9 November 2022.
10. Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp220.392.900 yang terletak di Jalan Sirna Galih No. 3 RT 2 RW 1, Desa Megamendung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang berasal dari aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara yang telah dilakukan penarikan kembali sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-3/KN/2022 tanggal 9 November 2022.

Selain itu terdapat aset yang telah dihibahkan, ditetapkan status penggunaannya dan diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara, namun belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan, yaitu:

1. 1 (satu) aset dengan nilai Rp12.126.872.000 yang terletak di Jalan Palang Merah No. 15 BC, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan status penggunaannya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 516/KN/2022 tanggal 13 Oktober 2022.

2. 1 (satu) aset dengan nilai Rp15.747.608.000 yang terletak di Jalan Kol. Ahmad Syam/Jalan Sinangling, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, ditetapkan status penggunaannya pada Kepolisian Negara RI sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 541/KN/2022 tanggal 4 November 2022.
3. 1 (satu) aset dengan nilai Rp601.763.860.000 yang terletak di Desa Pakuon (dahulu Ds. Cikanyere), Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dihibahkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 550/KN/2022 tanggal 25 November 2022.
4. 1 (satu) aset dengan nilai Rp38.662.804.000 yang terletak di Jalan Cik Ditiro No. 20, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-4/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022.

Aset properti eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote) per 31 Desember 2021 adalah sejumlah 707 aset, sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sejumlah 708 aset. Dilakukan penambahan sejumlah 1 (satu) aset yang terletak di Taman Malibu Indah, Komp. Malibu Blok B No. 77, Kelurahan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari aset yang tercatat pada Daftar Nominatif eks Bank Dagang Nasional Indonesia (BBO), dengan rincian sebagai berikut.

Daftar Aset Properti Eks BPPN Non Asli Dokumen Kepemilikan

No	Uraian	Jumlah Unit
1	Dokumen <i>Copy</i>	262
2	Kepemilikan tidak ada	415
3	Tidak ada keterangan	31
	Jumlah	708

Selain itu, terdapat aset properti eks BPPN, baik sebagian maupun seluruh tanah dan/bangunan, yang disewa oleh pihak ketiga yaitu:

1. Tanah seluas 782 m² berikut bangunan di atasnya seluas 2.205 m² di Jalan Pemuda Nomor 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp108.000.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-389/MK.6/2016 tanggal 6 Desember 2016 sebagaimana direvisi dengan surat nomor S-42/MK.6/2017 tanggal 22 Februari 2017. Jangka waktu sewa 21 Februari 2017 s.d. 21 Februari 2020. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp350.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-84/MK.6/2020 tanggal 18 Februari 2020. Jangka waktu sewa 23 Februari 2020 s.d. 22 Februari 2025. Perhitungan 12 bulan Rp70.000.000.
2. Tanah seluas 2.400 m² di Jalan Legian No. 188 (d.h. Jalan Padma Utara), Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali disewakan dengan nilai Rp3.375.000.000 selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-

- 420/MK.6/2018 tanggal 12 September 2018. Jangka waktu sewa 12 Oktober 2018 s.d. 11 Oktober 2023. Perhitungan 12 bulan Rp675.000.000.
3. Tanah seluas 4.641 m² di Jalan Industri Dusun II, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (sesuai SHM No. 162/Tanjung Morawa) disewakan dengan nilai Rp88.500.000 selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-515/MK.6/2018 tanggal 19 November 2018. Jangka waktu sewa 10 Desember 2018 s.d. 9 Desember 2023. Perhitungan 12 bulan Rp17.700.000.
 4. Tanah seluas 17.654 m² di Jalan Industri Dusun II, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (sesuai SHGB No. 13/Tanjung Morawa) disewakan dengan nilai Rp241.500.000 selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-516/MK.6/2018 tanggal 19 November 2018. Jangka waktu sewa 10 Desember 2018 s.d. 9 Desember 2023. Perhitungan 12 bulan Rp48.300.000.
 5. Tanah dan bangunan seluas 518 m² di Jalan Sambu No. 3, RT 03/RW 03, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp13.000.000 selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.6/2019 tanggal 19 Februari 2019. Jangka waktu sewa 1 Maret 2019 s.d. 29 Februari 2024. Perhitungan 12 bulan Rp2.600.000.
 6. Tanah seluas 69 m² dan bangunan di atasnya seluas 180 m² di Jalan Merbabu No. 7, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp62.895.000 selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-287/MK.6/2019 tanggal 24 April 2019. Jangka waktu sewa 1 Juli 2019 s.d. 30 Juni 2024. Perhitungan 12 bulan Rp12.579.000.
 7. Tanah seluas 50 m² berikut bangunan di atasnya seluas 150 m² di Jalan Medan - Binjai, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp44.100.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-927/MK.6/2019 tanggal 23 Desember 2019. Jangka waktu sewa 13 Maret 2020 s.d. 12 Maret 2025. Perhitungan 12 bulan Rp8.820.000.
 8. Tanah seluas 12.000 m² di Jalan Industri, Dusun II, Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp186.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-31/MK.6/2020 tanggal 27 Januari 2020. Jangka waktu sewa 13 Maret 2020 s.d. 12 Maret 2025. Perhitungan 12 bulan Rp37.200.000.
 9. Sebagian tanah seluas 42.940 m² di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur disewakan dengan nilai Rp222.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-189/MK.6/2020 tanggal 29 April 2020. Jangka waktu sewa 30 Juni 2020 s.d. 29 Juni 2025. Perhitungan 12 bulan Rp44.400.000.

10. Tanah seluas 2.093 m² berikut bangunan di atasnya seluas 210 m² di Kp. Sirnagalih Rt. 03 / 01, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Villa Kuala Deli) disewakan dengan nilai Rp108.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-10/MK.6/WKN.08/2020 tanggal 29 Desember 2020. Jangka waktu sewa 7 Januari 2021 s.d. 7 Januari 2026. Perhitungan 12 bulan Rp21.600.000.
11. Tanah seluas 412 m² berikut bangunan di atasnya seluas 377 m² di Jalan Urip Sumoharjo No. 55 B Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan disewakan dengan nilai Rp726.570.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.15/2022 tanggal 21 Februari 2022. Jangka waktu sewa 20 Mei 2022 s.d. 19 Mei 2027. Perhitungan 12 bulan Rp145.314.000..

Rincian Jumlah dan Nilai Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2022 tersaji dalam [lampiran LD14](#).

3. Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.089.257.490 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.673.437.131. Rincian mutasi aset nostro per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

	Saldo Akhir	Mutasi	Saldo Awal	Ket.
Aset Nostro di Bank Ganesha	4.089.257.490	(584.179.641)	4.673.437.131	
Total	4.089.257.490	(584.179.641)	4.673.437.131	

Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp454.445.361.290,83, dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN. Sehingga dalam hal aset nostro tersebut telah memenuhi syarat pengakuan aset, aset nostro tersebut akan disajikan di Neraca.

Rincian aset Nostro terlampir pada [lampiran LD15](#).

4. Surat Berharga Eks BPPN

Surat berharga eks BPPN merupakan surat berharga yang belum free and clear pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan Custodial Agreement tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Namun, setelah tugas-tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan belum dilakukan pembaharuan

Perjanjian Kustodi.

Nilai surat berharga eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Citibank per 31 Desember 2022 sebesar Rp521.994.579.888 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp478.247.196.211 atau terjadi kenaikan nilai Surat Berharga Eks BPPN sebesar Rp43.747.383.677 yang berasal dari selisih kurs.

Rincian surat berharga non saham eks BPPN terlampir pada [lampiran LD16](#).

5. Aset Saham Eks BPPN

Aset Saham adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari Asset settlement BTO dan BBU. Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Nilai aset saham eks BPPN per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp58.284.006.532 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp69.015.444.865 sehingga terjadi penurunan nilai aset saham eks BPPN sebesar Rp10.731.438.333 yang berasal dari fluktuasi nilai per lembar saham.

Rincian aset saham eks BPPN sebagaimana terlampir pada [lampiran LD17](#).

6. Aset Lain-Lain Eks BPPN

Aset Lain-lain pada neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.352.520.070.746. Sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.332.735.301.394. Terdapat kenaikan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp1.019.784.769.352. Aset Lain-Lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Aset Properti eks PPA	5.181.855.506.388	4.259.066.755.235
2	Surat Berharga eks PPA	1.151.573.752.158	1.053.862.537.494
3	Saham Non Bank eks PPA	19.090.812.200	19.806.008.665
	Jumlah	6.352.520.070.746	5.332.735.301.394

a. Aset Lain-lain Eks BPPN - Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote).

Jumlah aset properti eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2022 sejumlah 1.478 aset dengan nilai sebesar Rp5.181.855.506.388, sedangkan per 31 Desember 2021 sejumlah 1.496 aset dengan nilai sebesar Rp4.259.066.755.235. Terjadi perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang disebabkan oleh:

1. Koreksi pengurangan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu) dokumen dengan nilai sesuai proporsi luasan (6.504/34.345) sebesar Rp37.098.081,23, untuk aset yang terletak di Desa Alue Papeun, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Daerah Istimewa Aceh karena telah laku terjual melalui lelang sebesar Rp195.100.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 158/2013 tanggal 26 November 2013.
2. Koreksi pengurangan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu) dokumen dengan nilai sesuai proporsi luasan (337/2.400) sebesar Rp99.737.958,33 untuk aset yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Daerah Istimewa Aceh karena telah laku terjual melalui lelang sebesar Rp230.100.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 158/2013 tanggal 26 November 2013.
3. Koreksi penambahan nilai aset yang terletak di Jalan Akses Bandara Tabing, RT. 07 RW. 05 (Jalan Padang Bukittinggi KM 18 No. 22), Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp2.603.886.583, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 9 Desember 2021, nilainya menjadi Rp18.860.989.000.
4. Koreksi penambahan nilai aset yang terletak di Jalan H. Kinan (Jalan SMP 10), Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.817.460.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 10 Desember 2021, nilainya menjadi Rp47.976.213.000.
5. Pengurangan sejumlah 5 (lima) aset dengan nilai total Rp169.284.208.606 yang terletak di Supermal Karawaci, Jalan Boulevard Diponegoro Nomor 105, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten karena diserahkan kepada LMAN sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2022 tanggal 11 Januari 2022.
6. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Toba, Perumahan Vila Indah Permai Blok D4 No. 19, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp200.660.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 23 Maret 2022, nilainya menjadi Rp509.016.000.
7. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Padat Karya, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp867.700.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 22 April 2022, nilainya menjadi Rp8.166.323.000.
8. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Yudhistira II, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp6.652.000.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 22 April 2022, nilainya menjadi Rp17.288.851.000.
9. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Desa Pulau Kupang, Desa Kupang, Kecamatan Bataguh (dh. Kecamatan Selat), Kabupaten Kapuas, Provinsi

- Kalimantan Tengah. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp207.000.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 26 April 2022, nilainya menjadi Rp7.054.577.000.
10. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Sandi, Desa Cor Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp666.500.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 13 Mei 2022, nilainya menjadi Rp4.358.176.000.
 11. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Karya Baru RT/RW 09/03, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp853.600.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 17 Mei 2022, nilainya menjadi Rp11.072.688.000.
 12. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Bakti No. 9, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.702.000.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 25 Mei 2022, nilainya menjadi Rp2.729.801.000.
 13. Perubahan nilai aset yang terletak di Desa Sidomakmur, Kecamatan Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp122.500.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 25 Mei 2022, nilainya menjadi Rp314.213.000.
 14. Perubahan nilai aset yang terletak di Desa Kertasari (dh. Desa Peneda Gandor), Kecamatan Labuhan Haji (dh. Kecamatan Selong), Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp277.700.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 27 Mei 2022, nilainya menjadi Rp590.557.000.
 15. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Raya Pedes Kp. Balongjati 04/04, Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp4.190.620.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 31 Mei 2022, nilainya menjadi Rp1.304.355.000.
 16. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Betawi I, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang (dh. Kecamatan Sako), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp4.486.800, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 2 Juni 2022, nilainya menjadi Rp9.641.773.000.
 17. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Antara dan Jalan Tamin, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp9.585.000.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 3 Juni 2022, nilainya menjadi Rp17.772.213.000.
 18. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Desa Sukatani RT/RW 02/03, Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp979.800.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 3 Juni 2022, nilainya menjadi Rp1.452.831.000.
 19. Perubahan nilai aset yang terletak di Perumahan Panggoi Indah, Desa Cot Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp30.989.586, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 7 Juni 2022, nilainya menjadi Rp119.516.000.
 20. Perubahan nilai aset yang terletak di Desa Pematang Palas, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Aset sebelumnya tercatat

dengan nilai Rp361.200.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 8 Juni 2022, nilainya menjadi Rp2.007.483.000.

21. Koreksi penambahan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu) dokumen untuk aset yang terletak di Jalan KH. Noer Ali (d/h Kalimalang Raya) Desa Bintara Jaya dan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Jumlah dokumen sebelumnya tercatat sebanyak 12 dokumen dan dilakukan penambahan menjadi 13 dokumen. Selanjutnya dilakukan penambahan nilai aset yang sebelumnya tercatat senilai Rp287.413.002.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 14 Juni 2022, nilainya menjadi Rp906.313.677.000.
22. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp65.280.000 yang terletak di Dusun Lembanah (dlh. Dusun Jembatan), Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan (dh. Kecamatan Torjun), Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp561.000.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 131/49/2022 tanggal 6 Juli 2022.
23. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp41.250.000 yang terletak di Dusun Kedung Galih, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp232.500.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 485/47/2022 tanggal 8 Juli 2022.
24. Perubahan nilai aset yang terletak di Perumahan Taman Sasana Patra, Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Sebrang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp27.618.500.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 29 Juli 2022, nilainya menjadi Rp189.197.227.000.
25. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Raya Cilegon, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp11.480.040.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 4 Agustus 2022, nilainya menjadi Rp195.297.787.000.
26. Perubahan nilai aset yang terletak di Kampung Kadu Bali, RT 12/RW003, Kelurahan Cibungur, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp63.300.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 5 Agustus 2022, nilainya menjadi Rp106.785.000.
27. Perubahan nilai aset yang terletak di Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp555.000.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 6 Agustus 2022, nilainya menjadi Rp4.503.941.000.
28. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp149.464.000 yang terletak di Dusun Cangkarman, Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan (dlh. Kecamatan Torjun), Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp1.115.000.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 176/49/2022 tanggal 1 September 2022.
29. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan H. Saidin, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp6.381.900.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 7 September 2022, nilainya menjadi Rp19.588.018.000.

30. Perubahan nilai aset yang terletak di Kompleks Pertokoan Bukit Barisan No.35 s.d. 37, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti (d/h Kelurahan Dompok), Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp536.650.583, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 23 September 2022, nilainya menjadi Rp1.262.592.000.
31. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Depok 56, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp6.867.200.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 17 Oktober 2022, nilainya menjadi Rp22.726.055.000.
32. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Kelapa Puan Timur VI Blok NB-7/22, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Provinsi Jakarta Utara. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp850.000.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 25 Oktober 2022, nilainya menjadi Rp2.441.969.000.
33. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp1.137.000.000 yang terletak di Jalan Pondok No. 180, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat karena diserahtelorkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-3/KN/2022 tanggal 9 November 2022.
34. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp4.735.200.000 yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 219-219 A, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara karena diserahtelorkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-3/KN/2022 tanggal 9 November 2022.
35. Pengurangan sejumlah 2 (dua) aset dengan nilai Rp1.902.200.000 yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 60 AA-BB, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara karena diserahtelorkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-3/KN/2022 tanggal 9 November 2022.
36. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Selaparang No. 50-52, Desa Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp5.968.600.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 9 November 2022, nilainya menjadi Rp11.842.134.000.
37. Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp1.471.732.500 yang terletak di Jalan Roa Malaka Selatan No. 27, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara yang telah dilakukan penarikan kembali sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-3/KN/2022 tanggal 9 November 2022.
38. Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp48.759.000 yang terletak di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berasal dari aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara yang telah dilakukan penarikan kembali sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-3/KN/2022 tanggal 9 November 2022.
39. Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp410.594.100 yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono No. 5, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur yang berasal dari aset kelolaan

Lembaga Manajemen Aset Negara yang telah dilakukan penarikan kembali sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-3/KN/2022 tanggal 9 November 2022.

40. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Sultan Abdurrahman No. 142, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selayan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp2.063.564.250, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 18 November 2022, nilainya menjadi Rp15.703.504.000.
41. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp78.100.000 yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Pluit (Duta Lestari) Blok D No. 7, Kelurahan Periuk, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp264.500.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 855/24/2022 tanggal 24 November 2022.
42. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp455.900.000 yang terletak di Perumahan Garaha Raya Bintaro Blok GR 22 No. 01, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp1.815.000.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 855/24/2022 tanggal 24 November 2022.
43. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp239.200.000 yang terletak di Perumahan Garaha Raya Bintaro Blok GR 19 No. 01, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp940.000.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 855/24/2022 tanggal 24 November 2022.
44. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp162.500.000 yang terletak di Perumahan Garaha Raya Bintaro Blok GR 19 No. 05, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp718.750.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 855/24/2022 tanggal 24 November 2022.
45. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp162.500.000 yang terletak di Perumahan Garaha Raya Bintaro Blok GR 19 No. 06, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp687.500.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 855/24/2022 tanggal 24 November 2022.
46. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp162.500.000 yang terletak di Perumahan Garaha Raya Bintaro Blok GR 19 No. 07, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp687.500.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 855/24/2022 tanggal 24 November 2022.
47. Koreksi pengurangan aset dengan nilai Rp90.037.700.000 yang terletak di Kelurahan Mulyaharja dan Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dan Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp148.762.000.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 528/2011 tanggal 19 Juli 2011.
48. Koreksi pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp174.900.000 yang terletak di Komplek Ruko Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok C No. 32 RT/RW 05/01, Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi,

Propinsi Jawa Barat karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp79.150.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 351/2009 tanggal 2 Desember 2009.

49. Koreksi pengurangan sejumlah 3 (satu) aset yang terletak di Jalan Bukit Barisan Blok E No.35, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau karena double pencatatan.
50. Koreksi penambahan sejumlah 1 (satu) aset yang terletak di Jalan Mampang Prapatan II No. 21, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Jumlah aset sebelumnya tercatat 1 (satu) dokumen kemudian dikoreksi menjadi (dua) dokumen.
51. Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp50.500.000.000 yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Kav.1/Th-1 No.63, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang sebelumnya disajikan pada CaLK. Aset selanjutnya disajikan pada neraca karena asli dokumen kepemilikan telah dikuasai.

Selain itu terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya, namun belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan, yaitu:

1. 1 (satu) aset dengan nilai Rp24.300.537.000 yang terletak di Jalan Sejahtera (d.h. Jalan Kober) Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat (d.h. Kecamatan Setu), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, ditetapkan status penggunaannya pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 478/KN/2021 tanggal 7 Desember 2021.
2. 1 (satu) aset dengan nilai Rp21.271.703.000 yang terletak di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Campang raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 489/KN/2021 tanggal 15 Desember 2021.
3. 1 (satu) aset dengan nilai Rp18.860.989.000 yang terletak di Jalan Akses Bandara Tabing, RT. 07 RW. 05 (Jalan Padang Bukittinggi KM 18 No. 22), Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 19/KN/2022 tanggal 25 Januari 2022.
4. 7 (tujuh) aset dengan nilai Rp445.545.294.000 yang terletak di Jalan K.H. Noer Ali (dh. Kalimalang Raya), Desa Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, ditetapkan status penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 170/KN/2022 tanggal 22 April 2022 sebagaimana direvisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 394/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
5. 1 (satu) aset dengan nilai Rp509.016.000 yang terletak di Jalan Toba, Perumahan Vila Indah Permai Blok D4 No. 19, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara,

Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ditetapkan status penggunaannya pada Badan Pusat Statistik sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 182/KN/2022 tanggal 28 April 2022.

6. 20 (dua puluh) aset dengan nilai Rp47.976.213.000 yang terletak di Jalan H. Kinan (Jalan SMP 10), Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 183/KN/2022 tanggal 11 Mei 2022 dan pada Komisi Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 184/KN/2022 tanggal 12 Mei 2022.
7. 1 (satu) aset dengan nilai Rp66.490.645.000 yang terletak di Perumahan Taman Sasana Patra Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Sebrang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan status penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 198/KN/2022 tanggal 7 Juni 2022 sebagaimana direvisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 515/KN/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
8. 1 (satu) aset dengan nilai Rp4.358.176.000 yang terletak di Jalan Sandi, Desa Cot Mamplam (dh. Desa Cot Girek Kandang), Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe (dh. Aceh Utara), Provinsi Aceh, ditetapkan status penggunaannya pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 274/KN/2022 tanggal 29 Juli 2022.
9. 1 (satu) aset dengan nilai Rp2.729.801.000 yang terletak di Jalan Bakti No. 9, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan status penggunaannya pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 366/KN/2022 tanggal 11 Agustus 2022.
10. 1 (satu) aset dengan nilai Rp8.166.323.000 yang terletak di Jalan Padat Karya, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dihibahkan pada Pemerintah Kota Palembang sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 392/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
11. 16 (enam belas) aset dengan nilai Rp14.814.436.000 yang terletak di Desa Cot Panggoi dan Desa Mon Geudong, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 393/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022.

12. 1 (satu) aset dengan nilai Rp590.557.000 yang terletak di Desa Kertasari (dh. Desa Peneda Gandor), Kecamatan Labuhan Haji (dh. Kecamatan Selong), Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditetapkan status penggunaannya pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 445/KN/2022 tanggal 11 September 2022.
13. 1 (satu) aset dengan nilai Rp1.766.210.000 yang terletak di Komplek Ruko Surya Inti Permata Blok A-18, Jalan Juanda Sedati, Desa Sedatiagung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 446/KN/2022 tanggal 11 September 2022.
14. 1 (satu) aset dengan nilai Rp17.772.213.000 yang terletak di Jalan Antara dan Jalan Tamin, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, ditetapkan status penggunaannya pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 447/KN/2022 tanggal 11 September 2022.
15. 1 (satu) aset dengan nilai Rp11.072.688.000 yang terletak di Jalan Karya Baru Rt/Rw 09/03, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan status penggunaannya pada Kejaksaan Agung RI sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 545/KN/2022 tanggal 15 November 2022.
16. 1 (satu) aset dengan nilai Rp19.588.018.000 yang terletak di Jalan H. Saidin, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dihibahkan pada Pemerintah Provinsi Banten sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 546/KN/2022 tanggal 15 November 2022.
17. 3 (tiga) aset dengan nilai Rp1.262.592.000 yang terletak di Kompleks Pertokoan Bukit Barisan No.35 s.d. 37, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti (d/h Kelurahan Dompok), Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian ATR/BPN sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 556/KN/2022 tanggal 29 November 2022.
18. 3 (tiga) aset dengan nilai Rp22.726.055.000 yang terletak di Jalan Depok 56, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi

Jawa Tengah, ditetapkan status penggunaannya pada Kemenkeu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 557/KN/2022 tanggal 30 November 2022.

19. 7 (tujuh) aset dengan nilai Rp2.457.490.000 yang terletak di Jalan Pos No. 17A s.d. 17G RT/RW 001/08, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-4/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022.
20. 1 (satu) aset dengan nilai Rp2.441.969.000 yang terletak di Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Kelapa Puan Timur VI Blok NB-7/22, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Provinsi Jakarta Utara, ditetapkan status penggunaannya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 575/KN/2022 tanggal 26 Desember 2022.
21. 1 (satu) aset dengan nilai Rp15.703.504.000 yang terletak di Jalan Sultan Abdurrahman No. 142, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, ditetapkan status penggunaannya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 593/KN/2022 tanggal 30 Desember 2022..

Adapun aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 543 aset dengan nilai sebesar Rp1.702.047.726.443, sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 546 aset dengan nilai sebesar Rp1.658.969.374.443.

Daftar Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Non Asli Dokumen Kepemilikan

No	Uraian	Jumlah Unit	Nilai
1	Dokumen berupa AJB, APHT, Copi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB	543	Rp1.702.047.726.443

Terjadi perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yang disebabkan oleh:

1. Koreksi penambahan nilai aset yang terletak di Jalan Fujiyama, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp169.600.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 22 November 2021, nilainya menjadi Rp5.376.592.000.
2. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Kalibokor Selatan No. 150, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Aset

sebelumnya tercatat dengan nilai Rp8.406.120.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 22 April 2022, nilainya menjadi Rp14.366.975.000.

3. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Kartini No. 26 - 28, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara (dh. Kecamatan Denpasar Barat), Kota Denpasar (dh. Kabupaten Badung), Provinsi Bali. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp2.472.200.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 13 Mei 2022, nilainya menjadi Rp5.631.732.000.
4. Perubahan nilai aset yang terletak di Komplek Ruko Surya Inti Permata Blok A-18, Jalan Juanda Sedati, Desa Sedatiagung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.248.750.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 13 Mei 2022, nilainya menjadi Rp1.766.210.000.
5. Perubahan nilai aset yang terletak di Desa Giri Tunggal, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.104.000.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 25 Mei 2022, nilainya menjadi Rp641.870.000.
6. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Kyai Maja, Kampung Kelapa, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp12.762.400.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 28 Juni 2022, nilainya menjadi Rp28.265.323.000.
7. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Cendrawasih, Gg. Karet, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp96.000.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 23 September 2022, nilainya menjadi Rp9.633.538.000.
8. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Pahlawan No. 1, Kelurahan Alon - Alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp7.280.960.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 8 November 2022, nilainya menjadi Rp10.588.318.000.
9. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Raya Kosambi, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.248.750.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 10 Agustus 2022, nilainya menjadi Rp61.823.024.000.
10. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp50.500.000.000 yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Kav.1/Th-1 No.63, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI

Jakarta karena asli dokumen kepemilikan telah dikuasai. Aset selanjutnya disajikan pada neraca.

11. Koreksi pengurangan sejumlah 2 (dua) aset dengan nilai Rp1.500.000.000 yang terletak di Komplek Ruko Margajaya, Jalan Ir. H. Juanda No. 5 dan 8 Kav. 143, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Provinsi Jawa Barat karena laku terjual melalui lelang sebesar Rp2.165.000.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 587/2012 tanggal 28 November 2012.

Selain itu, terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya, namun belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan, yaitu:

1. 1 (satu) aset dengan nilai Rp5.376.592.000 yang terletak di Jalan Fujiyama, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, ditetapkan status penggunaannya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 30/KN/2022 tanggal 07 Februari 2022.
2. 1 (satu) aset dengan nilai Rp14.366.975.000 yang terletak di Jalan Kalibokor Selatan No. 150, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, ditetapkan status penggunaannya pada Badan Intelijen Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 202/KN/2022 tanggal 8 Juni 2022.
3. 1 (satu) aset dengan nilai Rp10.588.318.000 yang terletak di Jalan Pahlawan No. 1, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, ditetapkan status penggunaannya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 540/KN/2022 tanggal 4 November 2022.
4. 1 (satu) aset dengan nilai Rp9.633.538.000 yang terletak di Jalan Cendrawasih, Gg. Karet, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian ATR/BPN sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 555/KN/2022 tanggal 29 November 2022.
5. 1 (satu) aset dengan nilai Rp1.243.400.000 yang terletak di Kondominium Graha Famili Pa-202, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuhpakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-4/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022.

Selanjutnya, terdapat aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero), baik sebagian maupun seluruh tanah dan/bangunan, yang digunakan sementara oleh Kementerian Negara/Lembaga, dipinjam pakai oleh pemerintah daerah, serta disewa oleh pihak ketiga, yaitu:

1. Tanah seluas 95 m² berikut bangunan berupa ruko di atasnya seluas 285 m² di Ruko Mirah II No. 30, Komplek Panakukang Mas, Jalan Pangayoman No. 30, Kelurahan

Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai Rp297.041.250 ditempati sementara oleh Kementerian Keuangan selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-224/MK.6/2018 tanggal 7 Juni 2018. Jangka waktu izin menempati sementara 24 Juli 2018 s.d. 23 Juli 2023.

2. 2 (dua) bidang tanah dengan luas total 217 m² beserta 1 (satu) unit bangunan seluas 637 m² di Jalan Urip Sumoharjo No. 169 (d.h. Jalan Gn. Bawakaraeng), Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai Rp4.651.000.000 ditempati sementara selama 5 tahun oleh Kementerian Keuangan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-753/MK.6/2019 tanggal 24 Oktober 2019. Jangka waktu izin menempati sementara 4 November 2019 s.d. 3 November 2024.
3. Tanah seluas 1.629 m² berikut bangunan di atasnya seluas 214 m² di Jalan Sultan Abdurrahman No. 142, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai Rp15.703.504.000 ditempati sementara oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-244/MK.6/2020 tanggal 22 Juni 2020. Jangka waktu izin menempati sementara 27 Juli 2020 s.d. 26 Juli 2025.
4. Tanah seluas 955 m² berikut bangunan rumah di atasnya seluas 417 m² di Jalan Hasanuddin RT/RW 01/09, Kelurahan Pandang-Pandang (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan ditempati sementara oleh Kementerian Perhubungan selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-280/MK.6/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Jangka waktu izin menempati sementara 15 September 2021 s.d. 14 September 2026.
5. Tanah seluas 400 m² berikut bangunan gedung di atasnya seluas 492 m² di Jalan Untung Suropati No. 14, Kelurahan Semara Pura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan nilai Rp1.641.500.000 dipinjam pakai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-159/MK.6/2020 tanggal 6 April 2020. Jangka waktu pinjam pakai 28 Mei 2020 s.d. 27 Mei 2025.
6. Tanah seluas 1.794 m² di Jalan Laksa R.E. Martadinata No.9, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan nilai Rp3.229.000.000 dipinjam pakai oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama 5 tahun sesuai surat persetujuan nomor S-4/KN/2021 tanggal 8 Januari 2021. Jangka waktu pinjam pakai 26 Januari 2021 s.d. 25 Januari 2026.

7. Tanah seluas 93 m² di Jalan Ahmad Yani No.102 A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp125.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-389/MK.6/2016 tanggal 6 Desember 2016 sebagaimana direvisi dengan surat nomor S-42/MK.6/2017 tanggal 22 Februari 2017. Jangka waktu sewa 21 Februari 2017 s.d. 21 Februari 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp129.755.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-3/MK.6/WKN.02/2022 tanggal 2 Juni 2022. Jangka waktu sewa 22 Februari 2022 s.d. 21 Februari 2027. Perhitungan 12 bulan Rp25.792.500.
8. Tanah seluas 712 m² berikut bangunan di atasnya seluas 239 m² di Jalan Bakti No. 72, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp55.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-409/MK.6/2018 tanggal 7 September 2018. Jangka waktu sewa 1 Oktober 2018 s.d. 20 September 2023. Perhitungan 12 bulan Rp11.000.000.
9. Tanah seluas 2.680 m² berikut bangunan di atasnya seluas 117 m² di Jalan Kol. Sugiyono No. 5 (d/h Jalan Damarwulan) RT 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur disewakan dengan nilai Rp54.700.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-443/MK.6/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Jangka waktu sewa 11 Oktober 2018 s.d. 11 Oktober 2019. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp271.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-819/MK.6/2019 tanggal 2 Desember 2019. Jangka waktu sewa 5 Desember 2019 s.d. 4 Desember 2024. Perhitungan 12 bulan Rp54.200.000.
10. Tanah seluas 86 m² berikut bangunan di atasnya seluas 150 m² di Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srandol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp33.500.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-460/MK.6/2018 tanggal 5 Oktober 2018. Jangka waktu sewa 17 Desember 2018 s.d. 16 Desember 2019. Sewa diperpanjang setiap tahunnya, terakhir dengan dengan nilai Rp52.455.000 sesuai surat persetujuan sewa nomor S-18/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 26 Oktober 2022. Jangka waktu sewa 17 Desember 2022 s.d. 16 Desember 2023. Perhitungan 12 bulan Rp52.455.000
11. Tanah seluas 423 m² di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp17.315.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-4/MK.6/WKN.08/2021 tanggal 3 Februari 2021.

Jangka waktu sewa 17 Februari 2021 s.d. 16 Februari 2022. Perhitungan 2 bulan Rp2.885.833,33

12. Sebagian tanah seluas 4.000 m² di Jalan Serang-Cilegon KM. 7, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp180.000.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-84/MK.6/2019 tanggal 8 Februari 2019. Jangka waktu sewa 14 Maret 2019 s.d. 13 Maret 2022. Perhitungan 2 bulan Rp10.000.000.
13. Tanah seluas 100 m² berikut bangunan di atasnya seluas 300 m² di Jalan MT Haryono No. 218, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp182.345.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-344/MK.6/2019 tanggal 15 Mei 2019. Jangka waktu sewa 6 Agustus 2019 s.d. 5 Agustus 2024. Perhitungan 12 bulan Rp36.469.000.
14. Tanah seluas 144 m² berikut bangunan di atasnya seluas 45 m² di Jalan Raya Gading Boulevard Blok E3A-4 Cingcin, Ketapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp5.500.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-5/MK.6.WKN.08/2021 tanggal 3 Februari 2021. Jangka waktu sewa 23 Maret 2021 s.d. 22 Maret 2022. Perhitungan 3 bulan Rp1.375.000.
15. Tanah seluas 195 m² berikut bangunan di atasnya seluas 45 m² di Jalan Raya Gading Boulevard Blok F2-27 Desa Cingcin, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp14.100.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-353/MK.6/2019 tanggal 20 Mei 2019. Jangka waktu sewa 13 Juni 2019 s.d. 12 Juni 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp23.128.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-15/MK.6/WKN.08/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Jangka waktu sewa 13 Juni 2022 s.d. 12 Juni 2024. Perhitungan 12 bulan Rp8.704.000.
16. Tanah seluas 341 m² berikut bangunan di atasnya seluas 128 m² di Komplek Villa Intan Permai Blok A No.1, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi (d.h Kecamatan Pacet), Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp17.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-356/MK.6/2019 tanggal 20 Mei 2019. Jangka waktu sewa 2 Juli 2019 s.d. 1 Juli 2024. Perhitungan 12 bulan Rp3.500.000.
17. Tanah seluas 150 m² berikut bangunan di atasnya seluas 70 m² di Taman Permata Gadog Blok A6 No.3, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cinajur, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp15.000.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-368/MK.6/2019 tanggal 27 Mei 2019. Jangka waktu sewa

24 Juni 2019 s.d. 23 Juni 2021. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp16.224.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.08/2021 tanggal 8 Juni 2021. Jangka waktu sewa 20 Agustus 2021 s.d. 19 Agustus 2023. Perhitungan 12 bulan Rp8.112.000.

18. Tanah seluas 9.810 m² berikut bangunan di atasnya seluas 584 m² di Jalan Ciburial No.15, RT.01 RW.05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp102.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-499/MK.6/2019 tanggal 22 Juli 2019. Jangka waktu sewa 6 Agustus 2019 s.d. 5 Agustus 2024. Perhitungan 12 bulan Rp20.500.000
19. Tanah seluas 242 m² berikut bangunan di atasnya seluas 275 m² di Villa Permata Bogor, Jalan Bangbarung Ujung No. 9, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp15.500.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor KMK-184/MK.6/2019 tanggal 30 Juli 2019. Jangka waktu sewa 6 September 2019 s.d. 5 September 2020. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp98.380.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-7/MK.6/WKN.08/2021 tanggal 25 Maret 2021. Jangka waktu sewa 19 Mei 2021 s.d. 18 Mei 2026. Perhitungan 12 bulan Rp19.676.000.
20. Tanah seluas 1.900 m² di Jalan Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp52.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-550/MK.6/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Jangka waktu sewa 30 Agustus 2019 s.d. 29 Agustus 2024. Perhitungan 12 bulan Rp10.400.000.
21. Tanah seluas 2.083 m² di Jalan Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp57.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-551/MK.6/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Jangka waktu sewa 30 Agustus 2019 s.d. 29 Agustus 2024. Perhitungan 12 bulan Rp11.400.000.
22. Tanah seluas 1.900 m² di Jalan Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp58.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-545/MK.6/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Jangka waktu sewa 30 Agustus 2019 s.d. 29 Agustus 2024. Perhitungan 12 bulan Rp11.700.000.
23. Sebagian tanah seluas 915 m² berikut bangunan di atasnya seluas 705 m² di Jalan Hanjawar Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp4.000.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-573/MK.6/2019 tanggal 23 Agustus 2019. Jangka waktu

sewa 10 September 2019 s.d. 9 September 2021. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp10.620.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-15/MK.6/WKN.08/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Jangka waktu sewa 14 September 2021 s.d. 13 September 2026. Perhitungan 12 bulan Rp2.124.000.

24. Tanah seluas 19.337 m² di Gang Kuburan Cina, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat disewakan dengan nilai Rp17.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-630/MK.6/2019 tanggal 4 September 2019. Jangka waktu sewa 10 Oktober 2019 s.d. 9 Oktober 2024. Perhitungan 12 bulan Rp3.500.000.
25. Tanah seluas 7.205 m² di Perumahan Bogor Nirwana Residence, Jalan Graha Bogor Indah, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp202.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor KMK-233/MK.6/2019 tanggal 9 September 2019. Jangka waktu sewa 30 Oktober 2019 s.d. 29 Oktober 2024. Perhitungan 12 bulan Rp40.400.000.
26. Tanah seluas 80 m² berikut bangunan di atasnya seluas 140 m² di Komplek Pertokoan Amlapura, Jalan Kesatrian, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali disewakan dengan nilai Rp16.600.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-644/MK.6/2019 tanggal 13 September 2019. Jangka waktu sewa 11 November 2019 s.d. 10 November 2020. Sewa diperpanjang dengan nilai Rp17.000.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.14/2020 tanggal 16 November 2020. Jangka waktu sewa 11 November 2020 s.d. 10 November 2021. Selanjutnya, sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp17.500.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-7/MK.6/WKN.14/2021 tanggal 14 Desember 2021. Jangka waktu sewa 11 November 2021 s.d. 10 November 2022.
27. Tanah seluas 3.048 m² berikut bangunan di atasnya seluas 1.500 m² di Jalan Ancol Barat III Blok A5 Nomor 1-2, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta disewakan dengan nilai Rp345.000.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-651/MK.6/2019 tanggal 18 September 2019. Jangka waktu sewa 20 Januari 2020 s.d. 19 Januari 2023. Perhitungan 12 bulan Rp115.000.000.
28. Tanah seluas 49 m² berikut bangunan di atasnya seluas 99 m² di Jalan Irian Barat No. 35/37, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp36.000.000 selama 5 tahun sesuai surat

persetujuan sewa nomor S-928/MK.6/2019 tanggal 23 Desember 2019. Jangka waktu sewa 13 Maret 2020 s.d. 12 Maret 2025. Perhitungan 12 bulan Rp7.200.000.

29. Tanah seluas 410 m² berikut bangunan di atasnya seluas 365 m² di Jalan Roa Malaka Selatan Nomor 27, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta disewakan dengan nilai Rp375.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-36/MK.6/2020 tanggal 30 Januari 2020. Jangka waktu sewa 17 Februari 2020 s.d. 16 Februari 2025. Perhitungan 12 bulan Rp75.000.000.
30. Tanah seluas 73 m² berikut bangunan di atasnya seluas 146 m² di Jalan TGH Faisal Petak II, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat disewakan dengan nilai Rp165.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-207/MK.6/2020 tanggal 5 Mei 2020. Jangka waktu sewa 29 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2025. Perhitungan 12 bulan Rp33.000.000.
31. Sebagian tanah seluas 3.500 m² di Jalan Sentul Nyapah, Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp10.600.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-224/MK.6/2020 tanggal 27 Mei 2020. Jangka waktu sewa 8 Juni 2020 s.d. 9 Juni 2022. Perhitungan 5 bulan Rp2.208.333,33.
32. Tanah seluas 96 m² berikut bangunan di atasnya seluas 288 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok A.5, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp140.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-255/MK.6/2020 tanggal 2 Juli 2020. Jangka waktu sewa 26 Agustus 2020 s.d. 27 Agustus 2025. Perhitungan 12 bulan Rp28.000.000.
33. Sebagian tanah seluas 438 m² berikut bangunan di atasnya seluas 680 m² di Jalan Ahmad Yani No. 79, Kampung Cina, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat disewakan dengan nilai Rp108.204.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-285/MK.6/2020 tanggal 14 Agustus 2020. Jangka waktu sewa 10 September 2020 s.d. 10 September 2023. Perhitungan 12 bulan Rp36.068.000.
34. Tanah seluas 78 m² berikut bangunan di atasnya seluas 234 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok C7, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp137.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-

302/MK.6/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Jangka waktu sewa 16 September 2020 s.d. 17 September 2025. Perhitungan 12 bulan Rp27.500.000.

35. Tanah seluas 78 m² berikut bangunan di atasnya seluas 234 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok E3, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp62.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-303/MK.6/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Jangka waktu sewa 18 September 2020 s.d. 19 September 2025. Perhitungan 12 bulan Rp12.500.000.
36. Tanah seluas 78 m² berikut bangunan di atasnya seluas 234 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B19, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp108.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-308/MK.6/2020 tanggal 10 September 2020. Jangka waktu sewa 1 Oktober 2020 s.d. 2 Oktober 2025. Perhitungan 12 bulan Rp21.600.000.
37. Sebagian tanah seluas 32 m² di Perumahan Taman Asri Blok F2 No. 8, RT 01/RW 06, Kelurahan Larangan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp4.229.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-18/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 25 November 2021. Jangka waktu sewa 20 September 2021 s.d. 19 September 2022. Perhitungan 9 bulan Rp3.171.750.
38. Tanah seluas 96 m² di Ruko Ciputat Mega Mall Blok F9/10, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp150.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-316/MK.6/2020 tanggal 17 September 2020. Jangka waktu sewa 24 September 2020 s.d. 25 September 2025. Perhitungan 12 bulan Rp30.000.000.
39. Tanah seluas 78 m² berikut bangunan di atasnya seluas 234 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok C2, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp120.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-348/MK.6/2020 tanggal 25 September 2020. Jangka waktu sewa 16 Oktober 2020 s.d. 17 Oktober 2025. Perhitungan 12 bulan Rp24.000.000.
40. Sebagian tanah seluas 58 m² di Perumahan Taman Asri Blok F2 No. 8 RT 01/RW 08, Kelurahan Larangan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp38.250.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa

nomor S-179/WKN.06/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Jangka waktu sewa 12 November 2020 s.d. 11 November 2025. Perhitungan 12 bulan Rp7.650.000.

41. Sebagian tanah seluas 8 m² di Jalan Depok No.56, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp200.200.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-368/MK.6/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Jangka waktu sewa 26 Januari 2021 s.d. 25 Januari 2026. Perhitungan 12 bulan Rp40.040.000.
42. Tanah seluas 120 m² di Vila Japos E-2 No. 15, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp14.100.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-9/MK.6/WKN.06/2020 tanggal 13 November 2020. Jangka waktu sewa 7 Desember 2020 s.d. 6 Desember 2021. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp14.459.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-19/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 3 Desember 2021. Jangka waktu sewa 7 Desember 2021 s.d. 6 Desember 2022. Perhitungan 11 bulan Rp13.254.083,33.
43. Tanah seluas 19.630 m² di Blok Zein, Jalan Desa Wanantera, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp40.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-06/MK.6/WKN.08/2020 tanggal 18 November 2020. Jangka waktu sewa 18 Desember 2020 s.d. 17 Desember 2025. Perhitungan 12 bulan Rp8.000.000.
44. Tanah seluas 101 m² berikut bangunan di atasnya seluas 281 m² di Ruko Bona Indah Garden Blok A.2/D Kav. II, Plaza Bona Lebak Bulus, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta disewakan dengan nilai Rp345.000.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-2/MK.6/WKN.07/2020 tanggal 22 November 2020. Jangka waktu sewa 21 Desember 2020 s.d. 20 Desember 2023. Perhitungan 12 bulan Rp115.000.000.
45. Tanah seluas 243 m² di Jalan Petogogan I, Gang IV/13, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta disewakan dengan nilai Rp6.438.450 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-5/MK.6/WKN.07/2020 tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana direvisi dengan surat nomor S-6/MK.6/WKN.07/2021 (Revisi S-5/MK.6/WKN.07/2020 tanggal 08 Desember 2020) tanggal 16 Februari 2021. Jangka waktu sewa 3 Maret 2021 s.d. 2 Maret 2024. Perhitungan 12 bulan Rp2.146.150.
46. Tanah seluas 6.545 m² di Jalan Raya Pengalengan, Desa Margamukti, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp25.000.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-

09/MK.6/WKN.08/2020 tanggal 14 Desember 2020. Jangka waktu sewa 21 Desember 2020 s.d. 20 Desember 2022. Perhitungan 12 bulan Rp12.500.000.

47. Tanah seluas 120 m² di Perumahan Duta Garden Blok F-15 No. 2, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp12.754.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-18/WKN.06/2021 tanggal 13 Januari 2021. Jangka waktu sewa 22 Januari 2021 s.d. 21 Januari 2022. Perhitungan 1 bulan Rp1.062.833,33.
48. Tanah seluas 120 m² berikut bangunan di atasnya seluas 60 m² di Perumahan Tiga Raksa Blok AI 31 No. 57, Desa Margasari, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp3.000.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 14 Januari 2021. Jangka waktu sewa 20 Januari 2021 s.d. 19 Januari 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp4.381.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-17/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 24 November 2021. Jangka waktu sewa 20 Januari 2022 s.d. 19 Januari 2023. Perhitungan 12 bulan Rp4.265.916,67.
49. Tanah seluas 180 m² di Perumahan Ciujung Baru, Jalan Gunung Kerinci III No. 60, Desa Kedayakan, Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp5.844.500 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-2/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 15 Januari 2021. Jangka waktu sewa 26 Januari 2021 s.d. 25 Januari 2022. Perhitungan 1 bulan Rp487.041,67.
50. Tanah seluas 281 m² berikut bangunan di atasnya seluas 140 m² di Jalan Taman Singosari Ujung No.2A RT/RW 01/21, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp18.900.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.08/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan dibayarkan secara bertahap (5 tahap). Tahap I dan II dengan total pembayaran sebesar Rp10.005.601 telah dilakukan masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021 dan 18 Mei 2022. Tahap III sebesar Rp2.875.330 dilakukan paling lambat tanggal 11 Juni 2023, tahap IV sebesar Rp2.963.890 dilakukan paling lambat tanggal 11 Juni 2024, dan tahap V sebesar Rp3.055.179 dilakukan paling lambat tanggal 11 Juni 2025. Jangka waktu sewa 12 Juni 2021 s.d. 11 Juni 2026. Perhitungan 12 bulan Rp3.780.000.
51. Sebagian tanah seluas 16 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp802.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-3/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 22 Februari 2021. Jangka waktu sewa 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp834.000

selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 26 Mei 2022. Jangka waktu sewa 10 Maret 2022 s.d. 9 Maret 2023. Perhitungan 12 bulan Rp828.666,67.

52. Sebagian tanah seluas 20 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp896.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-4/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 23 Februari 2021. Jangka waktu sewa 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp904.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-10/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 30 Mei 2022. Jangka waktu sewa 10 Maret 2022 s.d. 9 Maret 2023. Perhitungan 12 bulan Rp902.666,67.
53. Sebagian tanah seluas 20 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp1.200.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-5/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 23 Februari 2021. Jangka waktu sewa 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp1.206.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-7/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 26 Mei 2022. Jangka waktu sewa 10 Maret 2022 s.d. 9 Maret 2023. Perhitungan 12 bulan Rp1.205.000.
54. Sebagian tanah seluas 6 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp314.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 26 Februari 2021. Jangka waktu sewa 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp271.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-8/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 30 Mei 2022. Jangka waktu sewa 10 Maret 2022 s.d. 9 Maret 2023. Perhitungan 12 bulan Rp278.166,67.
55. Sebagian tanah seluas 30 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp1.800.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-7/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 26 Februari 2021. Jangka waktu sewa 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp1.809.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-9/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 30 Mei 2022. Jangka waktu sewa 10 Maret 2022 s.d. 9 Maret 2023. Perhitungan 12 bulan Rp1.807.500.

56. Sebagian tanah seluas 6 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp269.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-8/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 26 Februari 2021. Jangka waktu sewa 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp271.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-11/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 30 Mei 2022. Jangka waktu sewa 10 Maret 2022 s.d. 9 Maret 2023. Perhitungan 12 bulan Rp270.666,67.
57. Tanah seluas 136 m² berikut bangunan di atasnya seluas 90 m² di Perumahan Banten Indah Blok B6 Nomor 483 RT/RW 078/11, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan disewakan dengan nilai Rp5.000.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.04/2021 tanggal 2 Maret 2021. Jangka waktu sewa 12 Maret 2021 s.d. 11 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp5.000.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.04/2022 tanggal 22 Maret 2022. Jangka waktu sewa 7 April 2022 s.d. 6 April 2023. Perhitungan 12 bulan Rp5.000.000.
58. Tanah seluas 78 m² berikut bangunan di atasnya seluas 234 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B17, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp110.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-3/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 30 Maret 2021. Jangka waktu sewa 7 April 2021 s.d. 6 April 2026. Perhitungan 12 bulan Rp22.000.000.
59. Tanah seluas 78 m² berikut bangunan di atasnya seluas 234 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B18, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp110.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-4/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 16 April 2021 dan dibayarkan secara bertahap (3 tahap). Tahap I sebesar Rp44.000.000 telah dibayarkan pada tanggal 19 April 2021. Tahap II sebesar Rp45.100.000 dilakukan paling lambat 20 Mei 2023 dan Tahap III sebesar Rp22.830.000 dilakukan paling lambat 20 Mei 2024. Jangka waktu sewa 19 April 2021 s.d. 18 April 2026. Perhitungan 12 bulan Rp22.000.000.
60. Tanah seluas 180 m² berikut bangunan di atasnya seluas 540 m² di Jalan Sudirman Nomor 121, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau disewakan dengan nilai Rp360.000.000 selama 10 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-9/MK.6/WKN.03/2021 tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana direvisi terakhir dengan surat nomor S-19/MK.6/WKN.03/2021 tanggal 30 November 2021 dan dibayarkan secara bertahap (3 tahap). Tahap I sebesar Rp90.000.000 dan Tahap

II sebesar Rp93.000.000 telah dibayarkan masing-masing pada tanggal 30 Juli 2021 dan 24 Desember 2021. Tahap III sebesar Rp293.040.000 dilakukan paling lambat tanggal 1 Agustus 2023. Jangka waktu sewa 2 Februari 2022 s.d. 1 Februari 2032. Perhitungan 11 bulan Rp41.250.000.

61. Tanah seluas 48 m² berikut bangunan di atasnya seluas 144 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 23, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp200.000.000 selama 10 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-7/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 10 Mei 2021. Jangka waktu sewa 10 Mei 2021 s.d. 9 Mei 2031. Perhitungan 12 bulan Rp20.000.000.
62. Tanah seluas 48 m² berikut bangunan di atasnya seluas 144 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 25, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp210.000.000 selama 10 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-8/MK.6/WKN.06/2021 (Revisi S-6/MK.5/WKN.06/2021 tanggal 28 April 2021) tanggal 11 Mei 2021. Jangka waktu sewa 11 Mei 2021 s.d. 10 Mei 2031. Perhitungan 12 bulan Rp21.000.000.
63. Sebagian tanah seluas 12 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp1.188.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 25 Mei 2021. Jangka waktu sewa 14 Juni 2021 s.d. 13 Juni 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp1.194.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-13/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 27 Juni 2022. Jangka waktu sewa 14 Juni 2022 s.d. 13 Juni 2023. Perhitungan 12 bulan Rp1.191.500.
64. Sebagian tanah seluas 6 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp308.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-15/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 25 Mei 2021. Jangka waktu sewa 14 Juni 2021 s.d. 13 Juni 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp305.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-12/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 27 Juni 2022. Jangka waktu sewa 14 Juni 2022 s.d. 13 Juni 2023. Perhitungan 12 bulan Rp306.250
65. Sebagian tanah seluas 12 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp832.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa

nomor S-16/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 25 Mei 2021. Jangka waktu sewa 14 Juni 2021 s.d. 13 Juni 2022. Perhitungan 5 bulan Rp346.666,67.

66. Tanah seluas 650 m² berikut bangunan di atasnya seluas - m² di Jalan Rondaan Blok Karyawangi, RT.01/RW.07, Desa Karyawangi, Kec. Parongpong, Bandung Barat disewakan dengan nilai Rp4.940.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-197/WKN.08/2021 (Ralat S-13/MK.6/WKN.08/2021 tgl 25 Juni 2021) tanggal 25 Juni 2021. Jangka waktu sewa 27 Juli 2021 s.d. 26 Juli 2022. Perhitungan 7 bulan Rp2.881.666,67.
67. Sebagian tanah seluas 650 m² berikut bangunan di atasnya seluas 400 m² di Jalan Sudirman Nomor 19, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat disewakan dengan nilai Rp74.195.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.03/2021 tanggal 12 Juli 2021. Jangka waktu sewa 6 Agustus 2021 s.d. 6 Agustus 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp244.275.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.03/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Jangka waktu sewa 7 Agustus 2022 s.d. 6 Agustus 2025. Perhitungan 12 bulan Rp77.207.500.
68. Tanah seluas 8.540 m² di Jalan Pesantren Mulyojati RT 03/RW 03, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung disewakan dengan nilai Rp25.000.000 selama 10 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-135/WKN.05/2021 tanggal 14 Juli 2021. Jangka waktu sewa 29 Juli 2021 s.d. 28 Juli 2031. Perhitungan 12 bulan Rp2.500.000.
69. Sebagian tanah seluas 20 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp1.212.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-18/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 10 Agustus 2021. Jangka waktu sewa 31 Agustus 2021 s.d. 30 Agustus 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp1.206.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 28 Juni 2022. Jangka waktu sewa 31 Agustus 2022 s.d. 30 Agustus 2023. Perhitungan 12 bulan Rp1.210.000.
70. Sebagian tanah seluas 130 m² berikut bangunan di atasnya seluas 54 m² di Perumahan Bukit Nusa Indah, Jalan Pinang No. 1016, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp8.000.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-10/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 23 Agustus 2021. Jangka waktu sewa 26 Agustus 2021 s.d. 25 Agustus 2023. Perhitungan 12 bulan Rp4.000.000.

71. Sebagian tanah seluas 4 m² di Jalan Depok No.56, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp91.685.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-19/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana direvisi dengan surat nomor S-22/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Jangka waktu sewa 21 Oktober 2021 s.d. 20 Oktober 2026. Perhitungan 12 bulan Rp18.337.000.
72. Sebagian tanah seluas 727 m² di Jalan Sudirman Nomor 19, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat disewakan dengan nilai Rp81.625.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-17/MK.6/WKN.03/2021 tanggal 8 September 2021. Jangka waktu sewa 1 Desember 2021 s.d. 30 November 2026. Perhitungan 12 bulan Rp16.325.000.
73. Sebagian tanah seluas 64 m² di Jalan Raya Blega No.16, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur disewakan dengan nilai Rp3.100.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-9/MK.6/WKN.10/2021 tanggal 24 September 2021. Jangka waktu sewa 1 Oktober 2021 s.d. 30 September 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp7.900.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-33/MK.6/WKN.10/2022 tanggal 21 Oktober 2022. Jangka waktu sewa 1 November 2022 s.d. 30 September 2024. Perhitungan 12 bulan Rp3.241.666,67.
74. Sebagian tanah seluas 2.000 m² di Desa Sukamantri, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp13.200.000 selama 10 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 18 Oktober 2021. Jangka waktu sewa 19 Oktober 2021 s.d. 18 Oktober 2031. Perhitungan 12 bulan Rp1.320.000.
75. Tanah seluas 15.000 m² di Jalan Raya Terbanggi Besar, Dusun VII Way Kekah RT/RW 01/01, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung disewakan dengan nilai Rp10.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-4/MK.6/WKN.05/2021 tanggal 22 Oktober 2021. Jangka waktu sewa 30 November 2021 s.d. 29 November 2026. Perhitungan 12 bulan Rp2.000.000.
76. Tanah seluas 167 m² berikut bangunan di atasnya seluas 328 m² di Jalan Imam Bonjol Blok A No. 10-11, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau disewakan dengan nilai Rp481.568.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.03/2022 tanggal 21 Januari 2022 dan dibayarkan secara bertahap (5 tahap). Tahap I sebesar Rp178.920.000 telah dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022. Tahap II sebesar Rp75.662.000 dilakukan paling lambat tanggal 1 Juli 2023, Tahap III sebesar Rp75.662.000 dilakukan paling

lambat tanggal 1 Juli 2024, Tahap IV sebesar Rp75.662.000 dilakukan paling lambat tanggal 1 Juli 2025, serta Tahap V sebesar Rp75.662.000 dilakukan paling lambat tanggal 1 Juli 2026. Jangka waktu sewa 1 Mei 2022 s.d. 30 April 2027. Perhitungan 8 bulan Rp 64.209.066,67.

77. Tanah seluas 412 m² berikut bangunan di atasnya seluas 377 m² di Jalan Urip Sumoharjo No. 55 B Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sumatera Selatan disewakan dengan nilai Rp726.570.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.15/2022 tanggal 21 Februari 2022. Jangka waktu sewa 20 Mei 2022 s.d. 19 Mei 2027. Perhitungan 7 bulan Rp84.766.500.
78. Tanah seluas 57 m² berikut bangunan di atasnya seluas 57 m² di Komplek Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No.137 Blok D12 dan D15, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp142.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.08/2022 tanggal 17 Mei 2022. Jangka waktu sewa 8 Agustus 2022 s.d. 7 Agustus 2027. Perhitungan 5 bulan Rp11.875.000.
79. Tanah seluas 88 m² berikut bangunan di atasnya seluas 144 m² di Jalan Imam Bonjol No. 64, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp12.540.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-2/MK.6/WKN.02/2022 tanggal 2 Juni 2022. Jangka waktu sewa 10 Juni 2022 s.d. 9 Juni 2027. Perhitungan 7 bulan Rp1.463.000.
80. Sebagian tanah seluas 32 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp1.930.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-15/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 28 Juni 2022. Jangka waktu sewa 31 Agustus 2022 s.d. 30 Agustus 2023. Perhitungan 5 bulan Rp804.166,67.
81. Tanah seluas 120 m² berikut bangunan di atasnya seluas 45 m² di Perumahan Duta Garden Blok F15 No. 02, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp17.710.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-7/MK.6/WKN.06/2022 tanggal 14 Juli 2022. Jangka waktu sewa 3 Oktober 2022 s.d. 2 Oktober 2023. Perhitungan 3 bulan Rp4.427.500.
82. Tanah seluas 48 m² berikut bangunan di atasnya seluas 144 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 8, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp61.764.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-10/MK.6/WKN.06/2022 tanggal 18 Juli

2022. Jangka waktu sewa 5 Agustus 2022 s.d. 4 Agustus 2025. Perhitungan 5 bulan Rp8.578.333,33.

83. Sebagian tanah seluas 44 m² di Jalan Raya Mallengkeri, Lorong 3, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan disewakan dengan nilai Rp2.000.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-2/MK.6/WKN.15/2022 tanggal 22 Juli 2022. Jangka waktu sewa 7 Oktober 2022 s.d. 6 Oktober 2023. Perhitungan 3 bulan Rp500.000.
84. Sebagian tanah seluas 12 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp873.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-16/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 11 Agustus 2022. Jangka waktu sewa 19 Agustus 2022 s.d. 18 Agustus 2023. Perhitungan 5 bulan Rp363.750.
85. Tanah seluas 373 m² di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 58 Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp17.725.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-10/MK.6/WKN.08/2022 tanggal 15 Agustus 2022. Jangka waktu sewa 9 September 2022 s.d. 8 September 2023. Perhitungan 5 bulan Rp7.385.416,67.
86. Tanah seluas 423 m² di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94 RT 02 RW 09, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp19.334.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-11/MK.6/WKN.08/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Jangka waktu sewa 12 September 2022 s.d. 11 September 2023. Perhitungan 5 bulan Rp8.055.833,33.
87. Tanah seluas 307 m² berikut bangunan di atasnya seluas 433 m² di Jalan Trunojoyo No. 29, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur disewakan dengan nilai Rp132.343.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-29/MK.6/WKN.10/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Jangka waktu sewa 25 November 2022 s.d. 24 November 2027. Perhitungan 1 bulan Rp2.205.716,67.
88. Sebagian tanah seluas 172 m² di Jalan Sudirman Nomor 19, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat disewakan dengan nilai Rp14.580.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-12/MK.6/WKN.03/2022 tanggal 7 September 2022. Jangka waktu sewa 12 September 2022 s.d. 11 September 2023. Perhitungan 5 bulan Rp6.075.000.

89. Sebagian tanah seluas 140 m² berikut bangunan di atasnya seluas 80 m² di Komplek Gading Tutuka I Blok N3 No. 1, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp13.650.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.08/2022 tanggal 13 Oktober 2022. Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2024. Perhitungan 2 bulan Rp1.137.500.
90. Tanah seluas 35.000 m² di Desa Bengkulu Induk RT 01, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung disewakan dengan nilai Rp60.000.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.05/2022 tanggal 6 Desember 2022. Jangka waktu sewa 11 Januari 2023 s.d. 10 Januari 2025.
91. Tanah seluas 48 m² berikut bangunan di atasnya seluas 144 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 5, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp41.716.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-17/MK.6/WKN.05/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sudah dilakukan pembayaran dan sedang proses penandatanganan perjanjian sewa.

Rincian Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA terlampir pada [lampiran LD18](#).

b. Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA

Surat berharga eks kelolaan PT PPA merupakan surat berharga yang telah free and clear pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Nilai surat berharga eks PT PPA per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.151.573.752.158 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.053.862.537.494. Terdapat kenaikan nilai surat berharga eks kelolaan PT PPA pada periode Tahun 2022 karena penyesuaian kurs senilai Rp97.711.214.664.

Rincian Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA terlampir pada [lampiran LD19](#).

c. Saham Non Bank Eks PPA

Nilai aset saham (non bank) eks PT PPA per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.090.812.200 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.806.008.665 atau terjadi kenaikan nilai saham sebesar Rp715.196.465.

Saham eks kelolaan PT PPA merupakan saham telah free and clear pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA dilakukan sendiri oleh DJKN dengan berpedoman kepada PMK Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui PMK Nomor 230/PMK.06/2022. Pengelolaan aset saham

eks kelolaan PT PPA oleh DJKN meliputi menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS, permintaan pembayaran atas dividen saham atau hasil likuidasi, penjualan, penilaian, dan/atau penatausahaan.

Terdapat tindak lanjut transfer keluar aset saham PT Sejahtera Eka Graha senilai Rp26.563.266.134 ke Dit. KND (BA 999.03 Aset Investasi) sesuai Surat Perintah PRIN-25.1/KN/2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020. Rincian terlampir pada [lampiran LD20](#).

D.2.1.6.6.4. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam pengelolaan DJKN bernilai Rp37.668.763.100 yang berasal dari nilai saldo akhir aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp83.923.260.600 ditambah dengan penambahan nilai aset lainnya dari nilai wajar ABMA/T yang ditetapkan kompensasinya sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.098.190.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi hingga Tahun 2022 sebesar Rp16.686.048.000 yang ditandai dengan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pelepasan ABMA/T atau dengan cara lain sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021 dan/atau ditetapkan kembali besaran kompensasinya sehingga menimbulkan kenaikan nilai dari aset terdahulu serta dikurangi dengan Koreksi atas double catat ABMA/T SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah di Provinsi Jawa Timur dan ABMA/T SMP Muhammadiyah 2 Taman (dh. SMP Muhammadiyah Taman) di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp45.666.639.500.

Adapun rincian nilai saldo awal Aset Lainnya Tahun 2022 yang merupakan nilai saldo akhir Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp83.923.260.600 berasal dari nilai wajar atas ABMA/T yang belum dapat dilunasi/diselesaikan sejak awal pengurusan pelepasan ABMA/T hingga 31 Desember 2021 disajikan pada [lampiran LD21](#).

Guna membentuk saldo akhir Aset Lainnya sampai dengan Tahun 2022, maka saldo awal Aset Lainnya tersebut selanjutnya ditambah dengan nilai wajar atas ABMA/T yang ditetapkan besaran kompensasinya hingga Tahun 2022 dan/atau ditetapkan kembali besaran kompensasinya sehingga menimbulkan kenaikan nilai dari aset terdahulu, dengan total nilai sebesar Rp16.098.190.000,00 dengan rincian yang disajikan pada [lampiran LD21b](#).

Selanjutnya dikurangi dengan nilai wajar atas ABMA/T yang dilepaskan karena telah diterbitkan KMK pelepasannya, koreksi penetapan kembali besaran kompensasi ABMA/T, dan koreksi double catat ABMA/T SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah di Provinsi Jawa Timur dan ABMA/T SMP Muhammadiyah 2 Taman (dh. SMP Muhammadiyah Taman), dengan total nilai sebesar Rp 62.352.687.500 disajikan pada [lampiran LD22](#).

Dengan demikian, total nilai aset hingga Tahun 2022 adalah sebesar Rp37.668.763.100 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).

D.2.1.6.6.5. Aset BMN Idle

Aset BMN idle per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp32.894.062.705 dan Rp94.180.013.291. BMN idle merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN idle dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN idle yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN idle dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN Idle dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain.

BMN idle yang telah diserahkan ke Pengelola Barang sebesar Rp5.839.615.000 (nilai sebelum penyusutan). Sementara itu BMN eks BMN idle yang diserahkan ke Pengguna Barang serta dihibahkan ke Pemerintah Daerah sebesar Rp3.927.638.485 (nilai sebelum penyusutan).

Pada periode Tahun 2022 terdapat mutasi atas BMN idle sebagai berikut:

Mutasi kurang:

Nilai mutasi kurang BMN eks BMN idle pada Tahun 2022 sebesar Rp3.927.638.485 dengan rincian sebagai berikut:

- Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp2.152.950.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp285.172.000 dari Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang kepada KemenESDM cq. Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas.
- Hibah satu bidang Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan dengan nilai perolehan sebesar Rp1.380.400.000 dan satu unit Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat dengan nilai perolehan sebesar Rp109.116.485 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Nilai mutasi kurang BMN eks BMN Idle pada Periode Tahun 2022 lebih rinci disajikan pada lampiran LD23.

Mutasi Tambah:

Nilai mutasi tambah BMN idle pada Periode Tahun 2022 sebesar Rp5.839.615.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama dengan nilai perolehan sebesar Rp111.817.000, dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Darurat dengan nilai perolehan Rp75.470.000 dari Kementerian Keuangan c.q. Kantor

- Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tunggl kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi;
2. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dengan nilai perolehan sebesar Rp182.480.000 dan satu unit Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen dengan nilai perolehan Rp129.539.000 dari Badan Pusat Statistik c.q. BPS Kabupaten Kudus kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang;
 3. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Pos Jaga dengan nilai perolehan sebesar Rp251.125.000 dan satu unit Gedung Pos Jaga Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp122.813.000 dari Kementerian Keuangan c.q. KPPBC TMP C Bojonegoro kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya;
 4. Penetapan status penggunaan dua bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan masing-masing sebesar Rp70.303.000 dan Rp149.500.000 serta dua unit Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen dengan nilai perolehan masing-masing sebesar Rp50.172.000 dan Rp8.000.000 dari Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Gresik kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya;
 5. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dengan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000.000 dari Kementerian ATR/BPN c.q. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya;
 6. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp397.800.000 dari Mahkamah Agung c.q. Pengadilan Agama Kota Ambon kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
 7. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.293.000.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp116.834.000 dari Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima;
 8. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp39.300.000 dan empat unit Pagar Permanen dengan nilai perolehan masing-masing sebesar Rp179.567.000; Rp168.684.000; Rp108.590.000; dan Rp126.513.000 dari Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Sintete kepada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang;
 9. Penetapan status penggunaan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.111.399.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp15.866.000 dari Kementerian Keuangan c.q. Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Lahat kepada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat;

10. Penetapan status penggunaan satu unit Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan sebesar Rp130.843.000 dari Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan kepada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam.

Reklasifikasi Aset Lainnya ke Properti Investasi

Pada periode pelaporan per tanggal 31 Desember 2022, Satker BUN TK BMN Idle di Pengelola Barang menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 17 Properti Investasi. Penerapan PSAP ini berdampak pada berkurangnya saldo aset lainnya karena adanya reklasifikasi aset lainnya ke Properti Investasi. Adapun aset yang direklasifikasi dengan total nilai perolehan sebesar Rp63.197.927.101 (nilai sebelum penyusutan).

Nilai mutasi tambah BMN eks BMN Idle pada Periode Tahun 2022 lebih rinci disajikan pada lampiran LD24.

Saldo Akhir:

Saldo BMN *Idle* yang telah diserahkan ke Pengelola Barang (sebelum penyusutan) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.894.062.705.

D.2.1.6.6.6. Aset Eks Pertamina

Aset Lain-Lain adalah berupa BMN eks Pertamina sebesar Rp0, sebelumnya sebesar Rp15.895.457.535.288 pada tahun 2022 dilakukan reklasifikasi ke Properti Investasi, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Aset Eks Pertamina	Per 31 Desember 2022
1	Aset aset berupa tanah dan/atau bangunan	47.580.000.000
2	Aktiva kilang LNG Arun	0
3	Aktiva kilang LNG Badak	0
4	Aset Eks Kontrak Kerjasama Pertamina	15.847.877.535.288
Jumlah		15.895.457.535.288
Reklasifikasi ke Properti Investasi		(15.895.457.535.288)
Saldo Akhir 31 Desember 2022		0

1. Aset aset berupa tanah dan/atau bangunan

BMN eks Pertamina berupa aset tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Depok berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara menetapkan bahwa terdapat 10 Aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok dan Bandung yang dijadikan Barang Milik Negara yang dalam penguasaan Pengelola Barang. Adapun 10 (sepuluh) aset tersebut terdiri dari:

No	Lokasi Aset	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Nilai (Rp)
1	Jl. Agus Salim 108 dan 108A, Jakpus	1.057	837	35.037.558.000
2	Jl. Surabaya 60 & 60 Pav, Jakpus	1.468	357	36.505.456.000
3	Jl. Brawijaya VIII/30, Jaksel	665	401	14.490.489.000
4	Jl. Tarogong 33, Jakarta Selatan	105.557	-	1.233.433.545.000
5	Jl. Tanjung 34, Jakarta Pusat	1.076	337	15.379.053.000
6	Jl. Dipati Ukur 31, Bandung	751	-	2.991.056.000
7	Jl. Jatibarang IV, Jakarta Timur	-	-	-
8	Sawangan, Depok	8.345	-	-
9	Jl. Abdul Muis 68, Jakarta	22.305	-	265.899.043.000
10	Jl. Kapten Tendean, Jaksel	46.280	-	77.191.137.000
	Jumlah			1.680.927.337.000

Terhadap aset tetap lainnya yang berlokasi di Jalan Jatibarang Jakarta Timur dan Sawangan Depok, serta sebagian lahan di Jalan Tendean, belum dapat dilakukan penilaian wajar oleh DJKN, dikarenakan terkendala hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sebagian lahan di Jalan Tendean, Jakarta Selatan tidak dapat dilakukan survey lapangan oleh Tim Penilai DJKN karena dikuasai oleh Pihak Ketiga;
- 2) Tanah di Sawangan Depok masih dalam proses identifikasi lahan oleh PT Pertamina (Persero); dan
- 3) Tim Penilai KPKNL Jakarta II telah melakukan survey lapangan dalam rangka penilaian tanah di Jalan Jatibarang Jakarta Timur pada tanggal 24 September 2012, namun sampai dengan saat ini Laporan Penilaian belum dapat diterbitkan karena terdapat kelengkapan dokumen yang belum dilengkapi, yaitu Sertifikat Tanah dan/atau Surat Keterangan Tanah, sebagaimana Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data No: BASL-183/WKN.07/KNL.02/2012.

Adapun progress Terhadap aset tetap lainnya yang berlokasi di Jalan Jatibarang Jakarta Timur dan Sawangan Depok dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Aset tanah di Jl. Abdul Muis Jakarta dan Sawangan Depok, Direktorat PKN telah mengirimkan surat kepada SVP Asset Management PT Pertamina (Persero) Nomor S-369/KN.4/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Penyelesaian Tindak Lanjut Pengelolaan atas Aset Eks Pertamina di Jalan Abdul Muis dan Sawangan, Depok.
2. Untuk aset tanah di Jatibarang, telah dilakukan penetapan status penggunaannya pada Kementerian Agama sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/KN.3/2022 tanggal 19 April 2022 dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 10/KM.6/KN.4/2022 tanggal 8 Agustus 2022. Oleh sebab itu aset tersebut telah dihapuskan dari daftar barang.

Terhadap aset di Jalan Brawijaya VIII No.30, Jakarta Selatan telah ditetapkan status penggunaannya sebagai BMN pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KM.6/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, aset tersebut telah dihapuskan dari Daftar Barang. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, aset di Jalan Tanjung 34, Jakarta Pusat telah diperuntukkan menjadi BMN pada Kementerian Keuangan. Untuk itu, telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 95 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng tanggal 10 September 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Selanjutnya, aset di Jalan Tanjung 34, Jakarta Pusat telah ditetapkan status penggunaan-nya sebagai BMN pada Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal.

Aset di Jalan Dipati Ukur 31, Bandung telah ditetapkan status penggunaan-nya sebagai BMN pada Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 364/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2016 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina tertanggal 16 Mei 2016 untuk Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Dipati Ukur Nomor 31, Bandung dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KM.6/2016 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina tertanggal 16 Mei 2016 untuk Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Tanjung Nomor 34, Menteng, Gondangdia, Jakarta Pusat dihapuskan untuk Daftar Barang Pengelola untuk selanjutnya dicatatkan dalam Daftar Barang Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang.

Dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 114/KN/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Penyerahkelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara yang mengamanatkan untuk mengalihkan aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Tarogong Nomor 33, Jakarta Selatan senilai Rp1.233.433.545.000 kepada Lembaga Manajemen Aset Negara. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Des 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus. Oleh karena itu, dilakukan transfer keluar atas pencatatan Aset di Jl. Tarogong 33 Jakarta Selatan sebesar Rp1.233.433.545.000.

Selanjutnya, Dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 164/KN/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Penyerahkelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara yang mengamanatkan untuk mengalihkan aset berupa tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jalan Agus Salim Nomor 108 dan 108A, Jakarta Pusat senilai Rp35.037.558.000, di Jalan Suarabaya 60 dan 60 Pav, Jakarta Pusat senilai Rp36.505.456.000, dan di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan senilai Rp77.191.137.000 kepada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Selain itu, terdapat Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas sebagian aset yang berlokasi di Jalan Abdul Muis 68, Jakarta sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KM.6/2018 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-02/MK.6/2018 tanggal 7 Agustus 2018 telah di-PSP-kan atas tanah senilai Rp158.262.975.000 dan bangunan senilai Rp581.068.000 kepada Badan Narkotika Nasional.
- 2) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 116/KM.6/2018 dan Berita Acara

Serah Terima Nomor BA-03/MK.6/2018 tanggal 7 Agustus 2018 telah di-PSP-kan atas tanah senilai Rp59.475.000.000 kepada Kementerian Luar Negeri.

Oleh karena itu, berdasarkan ketetapan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka aset tetap berupa tanah dan bangunan yang masih tercatat menjadi, sebagai berikut:

No	Lokasi Aset	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Nilai (Rp)
1	Jl. Jatibarang IV, Jakarta Timur	-	-	-
2	Sawangan, Depok	8.345	-	-
3	Jl. Abdul Muis 68, Jakarta	4.000	-	47.580.000.000
Jumlah				47.580.000.000

2. Aktiva Kilang LNG Arun

BMN eks Pertamina berupa aktiva kilang LNG Arun terdiri dari:

Aktiva Kilang LNG Badak	Nilai (Rp)
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 16 Maret 2011	11.029.729.944.488
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 18 Januari 2014	16.470.844.894
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 2 Oktober 2015	4.381.376.000
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 339/KM.6/2015</i>)	(2.570.455.868)
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 340/KM.6/2015</i>)	(18.474.997.789)
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 341/KM.6/2015</i>)	(205.328.524.794)
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 623/KM.6/2015</i>)	(3.333.854.641)
TOTAL	10.820.874.332.290

Terhadap aset eks Pertamina berupa aktiva kilang LNG Arun telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh dan KPKNL

Lhokseumawe bersama dengan PT Arun NGL, dengan nilai wajar BMN sebagaimana Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor: 01/TIM IP/KWL.01.DJKN/2011 tanggal 17 Maret 2011, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan BMN		Nilai Wajar BMN Per 16 Maret 2011	
		Unit	Nilai(Rp)	Unit	Nilai(Rp)
1	Tanah	6	845.893.806.000	6	4.213.575.943.416
2	Gedung & bangunan	1.360	288.937.613.435	1.360	761.222.025.575
3	Jalan, Irigasi, & Jaringan	778	692.325.984.971	778	700.343.645.942
4	Peralatan dan Mesin	5.199	4.664.321.429.775	5.199	5.351.946.333.542
5	Aset Tetap Lainnya	25	343.179.538	25	216.503.322
6	Aset Tak Berwujud	42	7.133.155.989	42	2.425.492.691
TOTAL		7.410	6.498.955.169.708	7.410	11.029.729.944.488

Terdapat BMN senilai Rp106.700.306.000 yang belum dilakukan penilaian, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran BA-04 (Daftar Barang Yang Tidak Ditemukan) Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor: 01/TIM IP/KWL.01.DJKN/2011 tanggal 17 Maret 2011.

Untuk itu, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari KPKNL Lhokseumawe bersama dengan PT Arun NGL atas BMN yang belum dilakukan penilaian tersebut, dengan hasil sebagaimana Berita Acara Inventarisasi BMN Nomor: BA-01/WKN.01/KNL.02/TIM-III/2013 tanggal 18 Januari 2013, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan BMN Per 28 Desember 2012		Nilai Wajar BMN Per 18 Januari 2013	
		Unit	Nilai(Rp)	Unit	Nilai(Rp)
1	Gedung & bangunan	24	7.943.508.000	27	6.056.287.826
2	Jalan, Irigasi, & Jaringan	39	3.333.650.000	39	2.858.978.563
3	Peralatan dan Mesin	148	47.482.293.000	149	7.555.578.505
TOTAL		211	58.759.451.000	215	16.470.844.894

Selanjutnya, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kanwil DJKN Aceh bersama dengan PT Arun NGL atas BMN yang belum dilakukan penilaian, dengan hasil sebagaimana Berita Acara Inventarisasi BMN Nomor: BA-01/WKN.01/2015 tanggal 2 Oktober 2015, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan BMN		Nilai Wajar BMN Per 2 Oktober 2015	
		Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
1	Aktiva kilang Arun	131	4.593.608.000	131	4.381.376.000
TOTAL		131	4.593.608.000	131	4.381.376.000

Berdasarkan KMK Nomor 339/KM.6/2015 tentang Penghapusan BMN Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah ditetapkan penghapusan tanah seluas 39.770 m2 yang terletak di kawasan Bandara Malikussaleh, Kabupaten Aceh Utara, dengan nilai sebesar Rp2.570.455.868, sebagai tindak lanjut atas penetapan status penggunaan BMN dimaksud sebagai BMN pada BMKG.

Berdasarkan KMK Nomor 340/KM.6/2015 tentang Penghapusan BMN Yang Berasal Dari

Aset Eks Pertamina, telah ditetapkan penghapusan atas tanah seluas 6.819 m2 beserta bangunan sekolah eks Yayasan Pendidikan Arun dengan nilai sebesar Rp19.829.457.789, sebagai tindak lanjut atas penghibahan BMN dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Penghapusan aset dari Daftar Aktiva Kilang LNG Arun hanya dilakukan atas aset senilai Rp18.474.997.789, sedangkan terhadap aset senilai Rp1.354.460.000 dilakukan penghapusan secara ekstrakomptabel.

Berdasarkan KMK Nomor 341/KM.6/2015 tentang Penghapusan BMN Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah ditetapkan penghapusan atas tanah seluas 681.503 m2 beserta bangunan, peralatan dan perlengkapan operasional Bandara Malikussaleh yang terletak di Gampong Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dengan nilai sebesar Rp205.435.143.544, sebagai tindak lanjut atas penghibahan BMN dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Penghapusan aset dari Daftar Aktiva Kilang LNG Arun hanya dilakukan atas aset senilai Rp205.328.524.794, sedangkan terhadap aset senilai Rp106.618.750 dilakukan penghapusan secara ekstrakomptabel.

Sebagai tindak lanjut dari KMK Nomor 343/KM.6/2015, KMK Nomor 346/KM.6/2015, dan KMK Nomor 361/KM.6/2015 tentang Penjualan Melalui Lelang Atas BMN Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah dilaksanakan penjualan lelang atas 55 item aktiva kilang LNG Arun pada tanggal 22 September 2015, dengan 15 item aktiva kilang LNG Arun senilai Rp3.333.854.641 terjual dengan nilai pokok penjualan lelang sebesar Rp415.000.000; dan 40 item lainnya tidak terjual karena Tidak Ada Penawar (TAP). Selanjutnya, dengan KMK Nomor 623/KM.6/2015 tanggal 31 Desember 2015 telah ditetapkan penghapusan atas 15 item aktiva kilang LNG Arun yang telah laku terjual tersebut. Penghapusan aset dilakukan dengan menggunakan nilai buku aset per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.017.124.033.

Aktiva kilang LNG Arun telah diserahkan pengelolaannya kepada Lembaga Manajemen Aset Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST-01/KN.3/2016 dan BAST-01/LMAN/2016 tanggal 8 April 2016. Pada Laporan Keuangan 2016, Aset Eks Pertamina kelolaan LMAN dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BA 999.99 Tahun Buku 2016. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Des 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus. Oleh karena itu, dilakukan koreksi atas pencatatan Aktiva Kilang Arun sebesar Rp10.820.874.332.290.

3. Aktiva Kilang LNG Badak

BMN eks Pertamina berupa aktiva kilang LNG Badak terdiri dari:

Aktiva Kilang LNG Badak	Nilai (Rp)
Hasil Inventarisasi & Penilaian DJKN per 12 Nov 2010	16.302.447.401.562
Hasil Inventarisasi dan Penilaian DJKN per 20 April 2012	3.725.430.479
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 255/KM.6/2012</i>)	(3.212.808.000)
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 478/KM.6/2014</i>)	(982.510.206)
Penghapusan aset (<i>KMK Nomor 508/KM.6/2015</i>)	(96.002.202)
TOTAL	16.301.881.511.633

Aktiva kilang LNG Badak telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kantor Wilayah XIII DJKN Samarinda dan KPKNL Bontang bersama dengan PT Badak NGL, dengan nilai wajar BMN sebagaimana Berita Acara Inventarisasi Aset PT Badak NGL Nomor: BA-01/WKN.13/KP.05/2010 tanggal 12 November 2010, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan BMN per 31 Desember 2009		Nilai Wajar BMN Per 12 November 2010	
		Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
1	Tanah	10	2.532.466.920.500	4	2.705.609.608.000
2	Gedung & bangunan	1.519	541.241.096.784	1.395	437.639.955.000
3	Jalan, Irigasi, & Jaringan	62	431.840.845.147	42	127.049.681.662
4	Peralatan dan Mesin	12.017	20.018.233.434.891	9.568	13.032.148.156.900
TOTAL		13.608	23.523.782.297.322	11.009	16.302.447.401.562

Terdapat BMN senilai Rp82.261.199.399 yang belum dilakukan penilaian, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi Aset PT Badak NGL Nomor: BA-01/WKN.13/KP.05/2010 tanggal 12 November 2010.

Untuk itu, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kantor Wilayah XIII DJKN Samarinda dan KPKNL Bontang bersama dengan PT Badak NGL atas BMN yang belum dilakukan penilaian tersebut, dengan hasil sebagaimana Berita Acara Inventarisasi Aset PT Badak NGL Nomor: BA-01/WKN.13/2012 tanggal 20 April 2012, sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan BMN per 31 Desember 2010		Nilai Wajar BMN Per 20 April 2012	
		Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
1	Gedung dan bangunan	20	5.648.622.958	8	968.207.000
2	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3	126.001	2	1.248.000
3	Peralatan & Mesin	2.442	76.612.450.440	2.218	2.755.975.479
TOTAL		2.465	82.261.199.399	2.228	3.725.430.479

Berdasarkan KMK Nomor 255 /KM.6/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penghapusan BMN Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah ditetapkan penghapusan atas 132 item aktiva kilang LNG Badak, dengan nilai buku aset hasil penilaian DJKN per 12 November 2010 sebesar Rp3.212.808.000.

Dalam pelaksanaan lelang penjualan sebagai tindak lanjut dari KMK Nomor 255/KM.6/2012 dimaksud, terdapat 1 item aset berupa Tug Boat Bontang 03 senilai Rp531.075.000 yang tidak laku terjual karena Tidak Ada Penawar (TAP) pada lelang penjualan tanggal 13 November 2012.

Selanjutnya, dengan KMK No. 218/KM.6/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Perubahan Atas KMK No. 255/KM.6/2012, telah ditetapkan nilai limit penjualan yang baru atas Tug Boat Bontang 03. Namun, pada lelang penjualan ulang tanggal 5 November 2014, Tug Boat Bontang 03 tidak laku terjual karena Tidak Ada Penawar.

Sebagai tindak lanjut dari KMK Nomor 245/KM.6/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Penjualan Melalui Lelang Atas BMN Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, telah dilaksanakan penjualan lelang atas 1.421 aktiva kilang LNG Badak pada tanggal 5 November 2014, dengan hasil sebagai berikut:

1. 50 item aktiva kilang LNG Badak senilai Rp982.510.206 terjual dengan nilai bersih penjualan lelang sebesar Rp1.937.111.100; dan
2. 1.371 item aktiva kilang LNG Badak senilai Rp96.002.202, penjualannya dibatalkan karena Pemenang Lelang tidak melakukan pelunasan sampai dengan batas waktu (wanprestasi).

Dengan KMK Nomor 478/KM.6/2014 tanggal 24 Desember 2014 telah ditetapkan penghapusan atas 50 item aktiva kilang LNG Badak yang telah laku terjual tersebut.

Dengan KMK Nomor 336/KM.6/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 245/KM.6/2014, telah ditetapkan nilai limit penjualan yang baru atas 1.371 item aktiva kilang LNG Badak yang belum laku terjual tersebut. Pada lelang penjualan ulang tanggal 14 Agustus 2015, 1.371 item aktiva kilang LNG Badak senilai Rp96.002.202 dimaksud terjual dengan nilai pokok penjualan lelang sebesar Rp276.700.523.

Untuk itu, dengan KMK Nomor 508/KM.6/2015 tanggal 15 Oktober 2015 telah ditetapkan penghapusan atas 1.371 item aktiva kilang LNG Badak yang telah laku terjual tersebut. Penghapusan aset dilakukan dengan menggunakan nilai buku aset per tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp506.979.

Aktiva kilang LNG Arun telah diserahkan pengelolaannya kepada Lembaga Manajemen Aset Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST-01/KN.3/2016 dan BAST-01/LMAN/2016 tanggal 8 April 2016. Pada Laporan Keuangan 2016, Aset Eks Pertamina kelolaan LMAN dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BA 999.99 Tahun Buku 2016. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Des 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus. Oleh karena itu, dilakukan koreksi atas pencatatan Aktiva Kilang Badak sebesar Rp16.301.881.511.633.

4. Aset Eks Kontrak Kerjasama Pertamina

BMN eks Pertamina berupa aset eks Kontrak kerjasama yang ada pada PT Pertamina EP per 31 Desember 2022 terdiri dari:

No	Wilayah Kerja	Nilai (Rp)
1	Kanwil I Banda Aceh	474.123.116.000
2	Kanwil II Medan	442.661.579.040
3	Kanwil III Pekanbaru	1.211.399.974.499
4	Kanwil IV Palembang	4.815.965.056.064
5	Kanwil VI Serang	16.903.044.000

No	Wilayah Kerja	Nilai (Rp)
6	Kanwil VII Jakarta	2.369.256.486
7	Kanwil VIII Bandung	5.495.615.347.615
8	Kanwil IX Semarang	396.640.557.166
9	Kanwil X Surabaya	44.987.096.409
10	Kanwil XII Banjarmasin	876.316.852.300
11	Kanwil XIII Samarinda	1.478.753.638.330
12	Kanwil XVII Papua	592.142.017.378
TOTAL		15.847.877.535.288

Adapun transaksi yang mempengaruhi aset eks kontrak kerjasama pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penghapusan 26 aset berupa peralatan dan mesin pada Field Tanjung berdasarkan keputusan penghapusan KMK No 3/KM.6/KN.3/2022 tanggal 8 April 2022 sebagai tindak lanjut penjualan BMN tersebut secara lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 341/58/2021 dan BAST BMN Aset Eks Pertamina tanggal 18 Januari 2022 senilai Rp1.391.550.000.
2. Inventarisasi dan Penilaian aset eks Pertamina semester 2 tahun 2022, sesuai BA-01 (Cirebon) senilai Rp686.540.354.000.
3. Inventarisasi dan Penilaian aset eks Pertamina semester 2 tahun 2022, sesuai BA-02 (Cirebon) senilai Rp126.752.584.000.

D.2.1.6.6.7. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan TK DJKN

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp362.543.093.041. Nilai ini merupakan saldo akhir aset lain-lain dalam pengelolaan DJKN. Rincian nilai aset lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Barang Gratifikasi	1.692	114.432.301.041
2	Aset yang berasal dari perjanjian antara pemerintah dan badan internasional/negara asing	0	0
3	Aset yang berasal dari pembubaran Badan yang Dibentuk K/L;	0	0
4	Aset yang berasal dari pembubaran badan-badan ad hoc:	0	0
5	Aset yang berasal dari Pembubaran Yayasan sebagai tindak lanjut temuan BPK	0	0
6	Aset eks Proyek N250 Gatotkaca	0	0
7	Aset Rampasan PT TLI	7.604 m2	248.110.792.000
Total			362.543.093.041

1. BARANG GRATIFIKASI

Nilai barang gratifikasi dalam pengelolaan DJKN per 01 Januari 2022 adalah Rp123.027.797.415. Nilai tersebut merupakan barang gratifikasi perolehan tahun 2015 hingga 2021 yang masih belum selesai proses pengelolaannya. Barang gratifikasi diakui sebagai aset lainnya dalam pengelolaan DJKN setelah diserahkan kepada DJKN. Aset lain-lain dicatat berdasarkan nilai perolehan. Apabila nilai perolehan dicatat dalam mata uang asing maka nilai pencatatan dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penyerahan.

Tahun 2022 KPK melakukan penyerahan barang gratifikasi sebanyak 9 kali. Penerimaan barang gratifikasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) antara DJKN dan KPK, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Nomor dan Tanggal BAST	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)
1	BAST-01/GTF.02.00/13/01/2022 tanggal 01 Januari 2022	1	500.000
2	BAST-02/GTF.02.00/13/01/2022 tanggal 11 Januari 2021	5	1.700.000
3	BAST-03/GTF.02.00/13/03/2022 tanggal 24 Februari 2022	3	600.000
4	BAST-04/GTF.02.00/13/03/2022 tanggal 16 Juni 2022	2	2.000.000
5	BAST-05/GTF.02.00/13/03/2022 tanggal 14 Juli 2022	794	595.739.881
6	BAST-06/GTF.02.00/13/11/2022 tanggal 8 November 2022	15	3.970.000
7	BAST-07/GTF.02.00/13/11/2022 tanggal 10 November 2022	7	8.000.000
8	BAST-08/GTF.02.00/13/11/2022 tanggal 10 November 2022	1	500.000
9	BAST-09/GTF.02.00/13/11/2022 tanggal 15 November 2022	5	2.300.000
Jumlah		833	615.309.881

Selama tahun 2022 telah dilaksanakan 11 kali lelang dengan barang yang laku terjual sebanyak 476 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan nilai perolehan sebesar Rp364.974.255 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Mutasi Keluar Tahun 2022 Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
1	Penjualan Barang Gratifikasi 31-01-2022	42	44.213.400
2	Penjualan Barang Gratifikasi 8-04-2022	1	500.000
3	Penjualan Barang Gratifikasi 21-04-2022	3	600.000
4	Penjualan Barang Gratifikasi 21-04-2022	52	26.139.000
5	Penjualan Barang Gratifikasi 30-06-2022	31	28.395.000
6	Penjualan Barang Gratifikasi 27-07-2022	117	66.980.000
7	Penjualan Gratifikasi 6 Oktober 2022	127	44.517.000
8	Penjualan Gratifikasi 25 Oktober 2022	77	42.845.000
9	Penjualan Gratifikasi 2 Desember 2022	6	18.639.000
10	Penjualan Gratifikasi 2 Desember 2022	6	17.357.855
11	Penjualan Gratifikasi 9 Desember 2022	14	74.788.000
Jumlah		476	364.974.255

Terdapat penjelasan tambahan terkait dengan penjualan barang gratifikasi tanggal 21 April 2022 sebanyak 52 barang, namun penulisan di Risalah Lelang Nomor RL-268/27/2022 sebanyak 28 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 52 barang, RL-413/27/2022 sebanyak 20 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 31 barang, RL-464/27/2022 sebanyak 44 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 117 barang, RL-623/27/2022 sebanyak 66 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 127 barang, RL-671/27/2022 sebanyak 15 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 77 barang, RL-1913/45/2022 sebanyak 5 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 6 barang, dan RL-815/27/2022 sebanyak 13 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 14 barang, dengan nilai PNPB keseluruhan sebesar Rp248.649.857 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Risalah Lelang	PNBP (Rp)
1	RL 25/27/2022	31.042.502
2	RL 32/64/2022	456.999
3	RL 221/44/2022	754.000
4	RL 268/27/2022	17.839.865
5	RL 413/27/2022	17.859.267
6	RL 464/27/2022	38.085.518
7	RL 623/27/2022	28.543.015
8	RL 671/27/2022	19.177.691
9	RL 1914/45/2022	21.200.000
10	RL 1913/45/2022	5.675.000
11	RL 815/27/2022	68.016.000
Jumlah		248.649.857

Selama Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 kali PSP sebanyak 14 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Keputusan Menteri Keuangan	BAST dan Tanggal BAST	Satker Penerima	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	KMK 11/KM.6/KN.5/2022	BAST-2/KN.4/2022 tanggal 13 Juli 2022	Kementerian Sekretariat Negara	14	8.788.723.000
2	KMK 9/KM.6/KN.4/2022	BAST-3/KN.4/2022 tanggal 04 Agustus 2022	Komisi Pemberantasan Korupsi	2	19.699.000

Selama tahun 2022, telah dilaksanakan satu kali pemusnahan barang gratifikasi sejumlah 185 barang dengan perolehan sebesar Rp37.410.000 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.6/KN.4/2022 tanggal 21 Desember 2022 dan Berita Acara Pemusnahan Nomor 01/KN.43/2022 tanggal 28 Desember 2022.

Dengan demikian, saldo akhir barang gratifikasi yang dicatat sebagai aset lain-lain adalah sebesar Rp114.439.179.638. Nilai tersebut merupakan barang gratifikasi dalam

pengelolaan DJKN sampai dengan 31 Desember 2022 dengan jumlah barang sebanyak 1.692 unit/buah/set/lembar.

2. ASET EKS PROYEK N250 GATOTKACA

Program N250 merupakan proyek penelitian dan pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang dihentikan Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1998.

Setelah dihentikan, program N250 menyisakan aset-aset yang tidak dapat diakui secara korporasi oleh PT DI antara lain berupa beberapa prototype pesawat, mockup, dan beberapa parts pesawat yang belum sempat dibuat, untuk selanjutnya aset-aset tersebut diserahkan kepada Pemerintah untuk ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Pada tahun 2010, BPK RI melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT DI dan terdapat temuan serta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan terkait permasalahan status dana dan aset tetap yang telah diserahkan kepada PT DI dalam rangka pelaksanaan program N250.

Mengingat aset-aset tersebut akan ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga sebagaimana disebut pada angka 4, maka dilakukan penilaian oleh KPKNL Bandung pada bulan Februari 2020, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Objek Penilaian	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Nilai Wajar (Rp) Aset
1	<i>Prototype Aircraft</i> PA-01 (Gatotkaca)	Lap-0134/1/2/WKN.08/KNL.01/01.00/2020 tanggal 30 Maret 2020	2.249.623.000
2	<i>Prototype Aircraft</i> PA-02 (Krincing Wesi)	Lap-0135/1/2/WKN.08/KNL.01/01.00/2020 tanggal 30 Maret 2020	3.440.600.000
3	<i>Prototype Aircraft</i> PA-03 (Koconegoro)	Lap-0136/1/2/WKN.08/KNL.01/01.00/2020 tanggal 30 Maret 2020	267.263.000
4	<i>Mock Up</i> (Maket Pesawat) N-250	Lap-0137/1/2/WKN.08/KNL.01/01.00/2020 tanggal 30 Maret 2020	1.020.000.000

Selain berupa prototype pesawat, aset eks proyek N250 juga berupa aset dalam bentuk dokumen/HAKI. Apabila aset berupa prototype pesawat dicatat menggunakan nilai hasil penilaian, untuk aset berupa dokumen/haki nilai BMN dicatat mengacu kepada Surat Direksi dalam hal ini Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Dirgantara Indonesia (Persero) nomor PTD/191/DU0000/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp675.950.000.000.

Untuk itu, aset-aset eks proyek N250 Gatotkaca yang berupa prototype, mockup pesawat dan aset dokumen/HAKI diakui dan dicatat sebagai aset lain-lain.

Terhadap aset eks proyek N250 berupa prototype pesawat PA-01 dilakukan pengelolaan dengan PSP kepada Kementerian Pertahanan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 166/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Untuk menindaklanjuti KMK tersebut, dilaksanakan serah terima aset antara Pengelola Barang dengan Kementerian Pertahanan melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-16/KN.5/2020 tanggal 16 September 2020.

Terhadap aset eks proyek N250 berupa prototype pesawat PA-02, prototype pesawat PA-03, Mock up pesawat N250 dan dokumen HAKI dilakukan pengelolaan dengan PSP kepada LAPAN melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020, Nomor 164/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dan Nomor 165/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Untuk menindaklanjuti KMK tersebut, dilaksanakan serah terima aset antara Pengelola Barang dengan LAPAN melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BA-183/KN/2020 tanggal 23 November 2020.

Namun demikian, dalam perkembangannya LAPAN mengeluarkan pencatatan terhadap dokumen HAKI dari Neraca Laporan Keuangannya untuk disajikan secara memadai pada CaLK LAPAN sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK yang memeriksa Laporan Keuangan LAPAN tahun 2020. Menindaklanjuti hal tersebut serta memperhatikan hasil keputusan rapat pada tanggal 20 April 2021 yang diadakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit APK DJPb) yang dihadiri oleh LAPAN, BPK, DJPb dan DJKN bahwa terhadap dokumen hasil kajian (Eks HAKI) dilakukan koreksi atas pencatatan dan transfer keluar pada LK BUN, maka DJKN telah melakukan koordinasi dengan LAPAN melalui surat Nomor S-1284/KN.5/2021 tanggal 08 Juni 2021 hal Klarifikasi Mengenai Pengeluaran HAKI dari Neraca LAPAN Sebagai Bentuk Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2020 oleh BPK RI. Surat tersebut ditanggapi oleh LAPAN melalui surat Nomor B/1090/PW.03.02/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 hal Klarifikasi Mengenai Pengeluaran HAKI dari Neraca LAPAN Sebagai Bentuk Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2020 oleh BPK RI yang pada pokoknya menerangkan bahwa LAPAN telah mengeluarkan pencatatan Dokumen eks HAKI tersebut dari Neraca dan mengungkapkan secara memadai pada CaLK TA 2020. Direktorat PKNSI sedang melakukan koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Humas DJKN dalam hal permintaan masukan atas konsep

Perubahan KMK Nomor 163/KM.6/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; untuk mengeluarkan dokumen hasil kajian (Eks Haki) dari daftar BMN yang ditetapkan status penggunaannya.

Dirjen Kekayaan Negara telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KM.6/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/KM.6/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional yang intinya merevisi BMN yang ditetapkan status penggunaannya kepada LAPAN dari semula berupa satu unit Prototype Aircraft PA-02 Kerincing Wesi dan 1 Paket Dokumen HAKI menjadi hanya satu unit Prototype Aircraft PA-02 Kerincing Wesi.

Melalui surat Anggota BPK RI Nomor 53/S/IV-XV/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 hal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2020, disampaikan temuan terkait pengakuan dan penetapan status penggunaan BMN atas aset eks Program N250 berupa dokumen hasil kajian (eks. HaKI) yang dinyatakan belum memadai. Terhadap temuan dimaksud, BPK RI memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara selaku pengelola Aset Lain-lain dalam pengelolaan DJKN untuk:

1. Melakukan upaya perolehan dokumen dasar dan melakukan kajian/evaluasi harga wajar untuk menetapkan BMN Aset Eks Program N250 dari PT DI sebagai Aset Lain-lain pada LKBUN, dan
2. Melakukan koordinasi dengan pihak LAPAN sebagai calon penerima BMN Aset Eks Program N250 agar penggunaan dan/atau pemanfaatan BMN Aset Eks Program N250 yang lebih optima.

Dit. PKNSI telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan melaksanakan rapat pembahasan dengan mengundang Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN Jawa Barat, KPKNL Bandung, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa Direktorat PKNSI akan menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan atas pengakuan dan penetapan status penggunaan BMN atas aset eks Program N250 berupa dokumen hasil kajian (eks. HaKI) yang dinyatakan belum memadai, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat kepada PT DI dan BRIN untuk meminta dokumen dasar dan komposisi rincian biaya perolehan yang digunakan untuk menghasilkan masing-masing komponen dokumen hasil kajian (Eks HAKI) sesuai surat Nomor S-1725/KN.5/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

2. Setelah diperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat PKNSI selanjutnya akan meminta bantuan kepada Direktorat Penilaian untuk melakukan proses penilaian terhadap aset dimaksud dalam rangka memperoleh nilai wajar.

Dit. PKNSI telah menerima surat PT DI Nomor PTD/101/DU0000/09/2021 tanggal 01 September 2021 yang pada intinya menyampaikan dokumen dasar perolehan, komposisi biaya perolehan dan analisa potensi ketergunaan dokumen hasil kajian (Eks HAKI). Dit. PKNSI kemudian menindaklanjuti data yang diterima tersebut dengan mengadakan rapat pada tanggal 14 September 2021 sesuai undangan nomor UND-276/KN.5/2021 tanggal 12 September 2021 yang dihadiri oleh Direktorat Penilaian dan PT Dirgantara Indonesia. Adapun kesimpulan rapat tersebut sebagai berikut:

1. Kelengkapan dokumen yang telah di sampaikan oleh PT DI dipandang telah memadai sebagai dokumen dasar perolehan atas Dokumen Hasil Kajian (Eks Proyek N250).
2. Terkait Kajian/evaluasi terhadap harga wajar Dokumen Hasil Kajian, forum rapat menyampaikan dua alternatif, yaitu:
 - a. Kajian/evaluasi dilakukan dalam bentuk penilaian nilai wajar atas Dokumen Hasil Kajian sebagai Aset Tak Berwujud;
 - b. Kajian/evaluasi dilakukan dalam bentuk argumentasi bahwa tidak perlu dilakukan penilaian, sehingga Dokumen Hasil Kajian dicatat menggunakan nilai Perolehan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil rapat pada tanggal 14 September 2021 tersebut, Direktorat PKNSI telah mengajukan permohonan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar dokumen hasil kajian (Eks HaKI) kepada Direktorat Penilaian melalui nota dinas Nomor ND-3104/KN.5/2021 tanggal 27 Desember 2021.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI untuk melakukan koordinasi dengan pihak LAPAN sebagai calon penerima BMN Aset Eks Program N250 agar penggunaan dan/atau pemanfaatan BMN Aset Eks Program N250 menjadi lebih optimal; serta mempertimbangkan kesanggupan BRIN sebagai induk seluruh badan riset nasional untuk menerima aset eks program N250 termasuk Eks HAKI sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris Utama BRIN pada pelaksanaan rapat tanggal 4 Agustus 2021; maka Direktorat PKNSI telah bersurat kepada Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional pada melalui surat Direktur PKNSI Nomor S-2469/KN.5/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya adalah meminta agar Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dapat menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima BMN Aset Eks Program N250 berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HaKI).

Direktorat PKNSI telah menerima hasil penilaian objek BMN berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HaKI) sesuai laporan penilaian Nomor Lap-0027/1/PRO-

01/KNL.07.01/01.01.00/2002 tanggal 9 Maret 2022 melalui nota dinas Kepala KPKNL Jakarta I Nomor ND-33/KNL.07.01/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang pada intinya menyampaikan bahwa nilai wajar atas BMN dimaksud adalah sebesar Rp8.500.651.000 (delapan miliar lima ratus juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hasil penilaian tersebut kemudian telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rapat pembahasan hasil penilaian pada tanggal 5 April 2022 sesuai surat undangan Nomor S-262/KN.5/2022 tanggal 30 Maret 2022. Pelaksanaan rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan BRIN, perwakilan Direktorat BMN dan Tim Penilai terkait, adapun hasil kesimpulan rapat tersebut yaitu:

1. Nilai Wajar BMN berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HAKI) adalah sebesar Rp.8.500.651.000 (delapan miliar lima ratus juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) sesuai hasil penilaian Tim Penilai KPKNL Jakarta I (LAP-0027/1/PRO-01/KNL.0701/01.01.00/2022 tanggal 9 Maret 2022)
2. BMN berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HAKI) dalam neraca BRIN masuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya (ATL) bukan sebagai Aset Tidak Berwujud (ATB). Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan sebelum pelaksanaan penilaian bahwa aset dimaksud hanya memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, sedangkan kriteria dapat dikendalikan dan memiliki potensi manfaat di masa yang akan datang tidak dapat dipenuhi.
3. BRIN bersedia untuk menerima BMN berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HAKI) tersebut, sesuai kategori/jenis BMN beserta dengan nilai wajarnya.
4. Direktorat PKNSI akan segera menyampaikan surat kepada BRIN guna meminta kesediaan secara resmi untuk menerima aset dimaksud.

Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-281/KN.5/2022 tanggal 08 April 2022 kepada BRIN yang intinya meminta pernyataan kesediaan menerima eks HAKI sebagai tindak lanjut hasil kesimpulan rapat pada tanggal 5 April 2022.

BRIN melalui surat Sekretaris Utama Nomor B-2611.II.2.PL.02.02.4.2022 tanggal 20 April 2022 telah menyampaikan surat kesediaan menerima BMN eks Program N250 berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HAKI) dengan nilai BMN sebesar Rp. 8.500.651.000 sesuai dengan laporan penilaian Nomor LAP-0027/1/PRO-01/KNL.0701/01.01.00/2022 tanggal 09 Maret 2022.

Direktorat PKN telah menyampaikan Nota Dinas Nomor ND-913/KN.4/2022 tanggal 07 Juli 2022 kepada Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat yang intinya meminta review atas konsep perubahan kedua KMK Nomor 163/KM.6/2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap pencatatan aset eks N250 pada

LKBUN Tahun 2020.

Direktorat Hukum dan Humas telah menyampaikan Nota Dinas Nomor ND-974/KN.7/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang pada intinya menyampaikan masukan mengenai konsep KMK PSP BMN berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HAKI), yang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) diintegrasikan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sehingga kiranya perlu dibuat konsep KMK PSP yang baru dengan subjek PSP BMN yaitu BRIN sebagai pengganti LAPAN, bukan konsep KMK PSP perubahan kedua pada LAPAN;
- b. Dalam konsideran menimbang huruf c, perbaikan drafting menjadi “bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020, Pengelola Barang perlu melakukan penggantian atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HaKI) dengan menggunakan nilai wajar;”
- c. KMK PSP yang baru tersebut akan mencabut 2 (dua) KMK PSP sebelumnya yaitu KMK Nomor 163/KM.6/2020 sebagaimana telah diubah dengan KMK 119/KM.6/2021; Menindaklanjuti Nota Dinas masukan tersebut, Direktorat PKN telah menyampaikan konsep KMK PSP atas BMN berupa Dokumen Hasil Kajian (Eks HAKI) yang telah disesuaikan dengan masukan Direktorat Hukum dan Humas kepada Dirjen KN sesuai nota dinas Nomor ND-1059/KN.4/2022 tanggal 28 Juli 2022.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KM.6/2022 tanggal 18 Agustus 2022 menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa satu unir Prototype Aircraft PA-02 Kerincing Wesi dan satu paket Dokumen Hasil Kajian (Eks HaKI) pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Guna menindaklanjuti keputusan PSP tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Prototype Pesawat Terbang PA-02 Krincing Wesi Dokumen dan Hasil Kajian (Eks HaKI) dari Pengelola Barang kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Nomor BA-367/KN/2022 tanggal 7 November 2022. Dengan telah ditandatanganinya BAST tersebut, maka Prototype Pesawat Terbang PA-02 Krincing Wesi Dokumen dan Hasil Kajian (Eks HaKI) kini dicatat sebagai BMN pada BRIN.

3. ASET RAMPASAN PT TUBAN LPG INDONESIA (PT TLI)

Dalam surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor PRIN-257/M.1.10/Ft.1/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang

diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Sdr. Honggo Wendratno diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2020 atas nama HONGGO WENDRATNO, pengadilan telah menetapkan bahwa barang bukti berupa tanah dan bangunan di atasnya berupa pabrik/kilang LPG PT TLI yang berada di kawasan pabrik PT TPPI yang terletak di Jl. Tanjung Dusun Tanjung Awar-Awar, Desa Remen Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 dan 12 dengan alamat Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur atas nama PT. Tuban LPG Indonesia, dirampas untuk Negara cq. Menteri Keuangan RI.

Guna menjalankan putusan dimaksud, Kejaksaan RI diwakili Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menyerahkan barang bukti dimaksud kepada Menteri Keuangan diwakili Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 07 Juli 2020, bertempat di Gedung Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI Jakarta. Dengan penyerahan sesuai BAST tanggal 07 Juli 2020 dimaksud, Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari rampasan dimaksud dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

BAST aset tidak mencantumkan nilai perolehan aset beserta akumulasi penyusutan maupun nilai wajar aset. Selayaknya aset tetap, memperhatikan PSAP 07 Paragraf 20, apabila penilaian aset dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset agar didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Berkenaan dengan hal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Surabaya sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Penilaian Nomor LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diperoleh nilai wajar sebagai berikut:

No.	Objek Penilaian	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Nilai Wajar (Rp) Aset
1	Tanah	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/0 1.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	2.277.846.000
2	Tanah	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/0 1.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	2.309.215.000
3	Bangunan pabrik/kilang LPG	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/0 1.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	243.523.731.000

Kemudian, dalam rangka pengamanan serta menjunjung prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan BMN, Kilang LPG tersebut dititipkan kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) sejak tanggal 7 Juli 2020 melalui surat penitipan aset Pengelola Barang Nomor S-429/KN/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan Berita Acara Penitipan BMN eks Rampasan tanggal 7 Juli 2020 untuk dioperasikan dengan ketentuan hasil pengelolaan Kilang LPG disetorkan ke kas negara setelah dikurangi segala biaya yang timbul akibat proses penitipan

Atas kegiatan penitipan Kilang LPG tersebut, PT TPPI telah melakukan perhitungan hasil pengelolaan Kilang LPG (setelah dikurangi segala biaya yang timbul akibat proses penitipan) dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Sepanjang Tahun 2022, PNBP hasil pengelolaan kilang LPG yang telah disetorkan sebesar:

No.	Periode	Jumlah	Ket.
1.	1 Sept s.d. 31 Des 2021	19.290.003.553	Disetorkan pada 03 Februari 2022
2.	01 Januari s.d. 31 Maret 2022	17.738.991.941	Disetorkan pada 09 Juni 2022
3.	1 April s.d. 30 Juni 2022	16.243.904.727	Disetorkan pada 31 Agustus 2022
4.	1 Juli s.d. 30 September 2022	14.108.751.006	Disetorkan pada 3 November 2022

Kegiatan penitipan bersifat sementara sampai Pengelola Barang memutuskan bentuk pengelolaan lebih lanjut atas aset dimaksud. Dalam hal ini, Dit. PKNSI selaku Pengelola Barang telah melakukan pengkajian optimalisasi aset Kilang LPG dalam jangka pendek dengan opsi bentuk pemanfaatan sewa serta optimalisasi dalam jangka panjang menjadi

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP).

Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan penilaian nilai wajar atas sewa aset tersebut oleh KPKNL Surabaya sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Penilaian Nomor LAP- 0024/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diperoleh nilai wajar atas sewa sebagai berikut:

No.	Periodesitas Sewa	Nilai Sewa (Rp)
1.	1 Tahun	20.650.659.000
2.	3 Tahun	73.184.696.000

Namun, memperhatikan trend hasil pengelolaan Kilang LPG melalui kegiatan penitipan yang cukup tinggi dibandingkan dengan nilai sewa aset tersebut, dilakukan revaluasi kembali atas bentuk pemanfaatan Kilang LPG yang mempertimbangkan nilai keekonomian kilang LPG sehingga lebih menguntungkan bagi Pengelola Barang dengan bentuk pemanfaatan berupa Kerja Sama Pemanfaatan untuk Mengoperasikan Kilang LPG.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pengelola Barang telah memintakan permohonan penilaian kelayakan bisnis KSP Operasional kepada KPKNL Surabaya melalui Nota Dinas Nomor ND-1619/KN.5/2021 tanggal 16 Juli 2021 hal Permohonan Penilaian KSP Untuk Mengoperasikan Barang Milik Negara berupa Kilang LPG Eks PT TLI dan saat ini sedang dilakukan proses penilaian oleh Tim Penilai KPKNL Surabaya.

Kemudian terhadap rencana KSPO tersebut, telah dilaksanakan penilaian atas Kilang LPG sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Nomor LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022 dan Laporan Analisis Kelayakan Bisnis Nomor Lap-001/WKN.10/KNL.01/AKB/KSP/2022 tanggal 15 Februari 2022. Atas penilaian tersebut diperoleh nilai wajar BMN berupa Kilang LPG sebesar Rp164.937.148.000 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Objek Penilaian	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Nilai Wajar (Rp) Aset
1	Tanah	LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022	2.279.710.000
2	Tanah	LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022	2.311.105.000
3	Bangunan pabrik/kilang LPG	LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022	160.346.333.000

Namun, tidak perlu dilakukan koreksi pencatatan nilai aset TLI untuk tahun 2022 karena tujuan penilaian kembali atas aset TLI tersebut adalah untuk memperoleh nilai wajar

dalam rangka pemanfaatan aset dan bukan sebagai nilai perolehan baru. Sehingga, nilai aset TLI yang tercatat pada neraca tetap sebesar Rp248.110.792.000

D.2.1.6.6.8. Aset Lain-Lain BA 999.03

Aset Lain-lain BA 999.03 per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp810.653.723.664 dan Rp29.667.617.180.559 berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

No.	Rincian	2022	2021
1	UAIP		
	- Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981	13.234.602.981
2	BLU LMAN		
	- Aset eks BPPN	-	18.874.080.000
	- Aset eks kelolaan PT PPA	187.409.252.504	203.123.400.144
	- Aset eks Pertamina	590.639.298.679	28.619.926.367.215
	- Aset lain-lain BUN	19.370.569.500	812.458.730.219
	TOTAL	810.653.723.664	29.667.617.180.559

Aset lain-lain pada Laporan Keuangan BA 999.03 terdiri dari :

- 1) Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp13.234.602.981.

Dana bergulir pada Kementerian Kelautan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
- b) Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
- c) Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);

d) Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi mereka pada umumnya relatif rendah, maka diperlukan peran optimal Pemerintah dalam memberdayakan mereka.

Dana bergulir yang dilaporkan pada dasarnya adalah bantuan barang dalam program PUPTSK, dimana Kelompok Usaha Barang (KUB) penerima barang mempunyai kewajiban untuk menggulirkan barangnya kembali kepada KUB lain, dengan cara hasil dari operasional sebuah KUB disetorkan kepada instansi daerah (UPT/Kantor Dinas) selaku pihak pembina yang akan meneruskannya kembali kepada KUB lain yang membutuhkan, sehingga terjadi efek perguliran.

PUPTSK terutama OPTIKAPI dan OPTIHANDIS tidak diberikan kepada perorangan, melainkan pada satu komunitas yang tergabung dalam kelompok dan satu-satunya kelompok yang menerima program PUPTSK adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB). KUB dimaksud dapat berupa KUB multi usaha atau KUB yang bergerak pada bidang usaha tertentu dengan diberikan sub program PUPTSK yang sesuai. Program OPTIKUB terutama diarahkan kepada KUB-KUB yang masih memerlukan pembinaan, baik dalam manajemen maupun pengembangan usaha. Sedangkan OPTILANPI diberikan terhadap institusi lelang, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan KUB.

Bantuan barang yang diberikan kepada KUB punya andil dalam mencapai tujuan masyarakat yang mandiri, melihat kondisi nelayan kita yang masih membutuhkan perhatian Pemerintah, bantuan barang dapat secara langsung menunjang kegiatan operasional para nelayan.

Bantuan berupa barang diberikan secara bergiliran dari KUB yang berhasil kepada KUB berikutnya. Program bantuan dalam PUPTSK diberikan kepada KUB sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a) KUB yang belum pernah atau tidak menerima bantuan program PUPTSK pada tahun sebelumnya, untuk lebih memperluas bantuan program secara lebih merata;
- b) Program penyaluran dana bergulir sudah berhenti;
- c) Banyak aset dana bergulir tersebut yang telah rusak atau hilang;
- a) KUB yang telah memenuhi manajemen operasional dan keuangan yang relatif baik. Hal ini untuk lebih menjamin kelancaran perguliran bantuan yang diberikan dan juga untuk meningkatkan peluang keberhasilan program.

Pada tahun 2010, dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan masih dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2011, dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan BA 999.03 sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi

Pemerintah.

Berdasarkan penelitian, diskusi dan *pilot project* inventarisasi dan verifikasi yang telah dilakukan, aset dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan direklasifikasi dari akun dana bergulir menjadi akun aset lain-lain, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Program penyaluran dana bergulir sudah berhenti;
- b) Banyak aset dana bergulir tersebut yang telah rusak atau hilang; dan
- c) Aset tersebut sudah tidak digulirkan lagi.

2) Aset Lain-Lain BLU LMAN

Total aset lain-lain LMAN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp797.419.120.683 dan Rp29.654.382.577.578. Aset lain-lain LMAN terdiri dari :

Aset lain-lain LMAN terdiri dari :

No.	Rincian	Jumlah
BLU LMAN		
1	Aset eks BPPN	0
2	Aset eks kelolaan PT PPA	187.409.252.504
3	Aset eks Pertamina	590.639.298.679
4	Aset lain-lain BUN	19.370.569.500
TOTAL		797.419.120.683

1. Aset Eks BPPN

Nilai aset Lain-lain eks BPPN yang berada pada pengelolaan LMAN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dan Rp18.874.080.000. Terjadi penurunan dikarenakan seluruh Aset Lain-lain eks BPPN telah diklasifikasikan sebagai Properti Investasi sebagai tindak lanjut atas penerapan PSAP 17 Properti Investasi sehingga saldo Aset eks BPPN pada neraca adalah nihil.

2. Aset Eks Kelolaan PT PPA

Nilai aset Lain-lain eks Kelolaan PT PPA yang berada pada pengelolaan LMAN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp187.409.252.504 dan Rp203.123.400.144. Mutasi tambah Aset eks PPA pada tahun 2022 berasal dari

penilaian wajar yang merupakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi pada pemeriksaan BPK dan KAP.

Secara terperinci mutasi Aset eks PPA sebelum akumulasi penyusutan pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	Uraian	Nominal (Rp)
	Posisi per 31 Desember 2021	19.475.347.146
(+)	Penilaian wajar aset	167.933.905.358
	Posisi 31 Desember 2022	187.409.252.504

3. Aset Eks Pertamina

Aset eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus (*Audited*) pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan.

Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp590.639.298.679 dan Rp28.619.926.367.215. Pos ini menyajikan Aset eks Pertamina yang tidak direklasifikasi ke properti investasi.

Informasi Penatausahaan Aset Kilang LNG Badak

Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Berupa Scrap dan Kendaraan

Pada tahun 2022 LMAN melakukan penghentian pengakuan Aset eks Pertamina di Kilang LNG Badak sebesar Rp4.091.891.541 (nilai sisa sebesar Rp0 setelah akumulasi penyusutan) atas aset yang telah dipindahtanggankan. Pemindahtanganan aset tersebut di atas disajikan dalam Risalah Lelang 54/64/2022 tanggal 19 Mei 2022 dengan nilai Rp6.960.000.000. Mengacu pada ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012, proceed dari pemindahtanganan aset disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Nilai yang dilakukan penghentian pengakuan merupakan nilai objek pemindahtanganan dan penghapusan sebelum akumulasi penyusutan. Aset yang dipindahtanggankan adalah berupa 352 aset yang telah menjadi besi tua (scrap) dan 31 unit aset berupa kendaraan dengan kondisi rusak berat. Seluruh aset telah berstatus inaktif dan masuk dalam formulir usulan penghapusan dan pemusnahan (FUPP). Dari 352 aset besi tua (scrap) sebagaimana dimaksud, terdapat 9 aset pada objek

pemindahtanganan dan penghapusan yang belum tercatat pada daftar aset LMAN pada 31 Desember 2021.

Nilai dari 9 aset tersebut menurut catatan PT Badak NGL dan MySAP PT Pertamina (Persero) tahun 2017 adalah Rp9.395.732.002 (nilai sisa sebesar Rp0 setelah akumulasi penyusutan). Dengan mempertimbangkan:

- a. Ketentuan pada perjanjian pengelolaan BMN Aktiva Kilang LNG Badak antara Entitas dengan PT Pertamina (Persero) nomor PRJ-107/LMAN/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang dalam Pasal 2 ayat 2) mendefinisikan Aktiva Kilang LNG Badak adalah termasuk seluruh penggantian, perbaikan, penambahan, pengurangan, perubahan, dan perluasan atas Aktiva Kilang LNG Badak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 dan BA Inventarisasi Aset BMN Eks Pertamina di PT Badak NGL tahap III tanggal 13 Desember 2017, dan
- b. Alasan kepraktisan dan alasan trade-off antara manfaat dan biaya karena aset yang dipindahtangankan merupakan besi tua yang tidak lagi memiliki nilai sebagai aset, meskipun masih memiliki nilai likuidasi untuk dijual sebagai besi tua (scrap).

Maka atas 9 aset berupa besi tua yang belum tercatat tersebut dilakukan pengakuan seketika dengan penghentian pengakuan pada saat pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan.

Rekonsiliasi Data dengan PT Badak NGL

Pada tanggal 13 Januari 2023, Entitas, PT Badak NGL, dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan rekonsiliasi data aset kelolaan Entitas pada Kilang LNG Badak per 31 Desember 2022. Rekonsiliasi dimaksud ditujukan untuk memperoleh data dan informasi aset di Kilang LNG Badak guna disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan serta sebagai salah satu langkah awal tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK dan KAP terkait inventarisasi Aset Kilang LNG Badak.

Hasil rekonsiliasi pada tanggal 13 Januari 2023 dimaksud dituangkan dalam berita acara nomor BA-001/LMAN.1.1/2023, BA-001/G30340/2023-S0, dan BA-001/PTB/BJ72/2023-812 yang kemudian dimutakhirkan dengan BA pemutakhiran nomor BA-2/LMAN.1.1/2022, BA-006/G30340/2023-S0, dan BA-172/BJ70/2023-113.00.

Informasi Penatausahaan Aset Kilang LNG Arun

Inventarisasi Aset Kilang LNG Arun

Pada akhir tahun 2020, Entitas dengan bantuan konsultan melakukan inventarisasi aset Kilang Arun. Beberapa catatan dalam inventarisasi tersebut adalah:

- Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) line item aset yang telah dihibahkan sebelum penyerahkelolaan ke LMAN, namun masih termasuk dalam penyajian di neraca.

- Dari pelaksanaan inventarisasi juga diketahui bahwa terdapat indikasi mutasi tambah aset di Kilang LNG Arun sebanyak 1.689 line item dengan indikasi nilai wajar sebesar Rp321.604.056.078. Potensi tersebut berasal dari aset-aset objek inventarisasi yang belum menjadi bagian penyajian aset pada neraca. Entitas belum melakukan pengakuan atas aset-aset tersebut mengingat perlunya dilakukan penilaian wajar sesuai ketentuan perolehan aset.

Pada 31 Desember 2021, Entitas menandatangani BAST penyerahan material inventory yang terdapat di Kilang Gas Arun. Besaran nilai yang tersaji di BAST tersebut menggunakan hasil physical check yang dilakukan hingga Bulan Oktober 2021. Berdasarkan data yang Entitas dapatkan, indikasi nilai perolehan material inventory tersebut adalah sebesar USD14,044,989.34 atau setara Rp198.806.964.557,59 menggunakan kurs translasi pada 15 Oktober 2021. Tanggal tersebut diindikasikan sebagai tanggal akhir pelaksanaan physical check.

Entitas belum menyajikan material inventory dimaksud pada neraca mengingat belum terdapat kejelasan kepemilikan fisik dan belum tersedia nilai wajar yang dapat menjadi nilai yang memenuhi prinsip keandalan. Hal tersebut kiranya dapat dipandang sebagai belum terpenuhi kriteria pengakuan. Untuk kebutuhan penyajian pada laporan keuangan serta untuk kebutuhan pengelolaan, Entitas merencanakan untuk melaksanakan inventarisasi dan penilaian atas material inventory tersebut.

Entitas telah menyampaikan permintaan informasi tentang mutasi tambah/kurang material inventory kepada PT PHE selaku unit yang melaksanakan inventarisasi dan PT PAG selaku unit yang menyewa gudang penyimpanan material inventory. Berdasarkan konfirmasi tersebut LMAN telah menerima warehouse transfer yang memuat informasi penggunaan material inventory oleh PT PHE (s.d. Desember 2022) dan daftar penggunaan material inventory oleh PT PAG. Perhitungan saldo material inventory menggunakan saldo awal dikurangi penggunaan menghasilkan indikasi nilai material inventory per 31 Desember 2022 adalah sebesar USD13,920,270.63 atau setara Rp218.979.777.225 dengan kurs translasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.731/USD.

Informasi Penatausahaan Aset Kawasan Ciperna

Penilaian Tanah Aset eks Pertamina Kawasan Ciperna

Pada tanggal 20 Agustus 2019, LMAN memperoleh tambahan aset kelolaan yang berasal dari Aset eks Pertamina berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin yang terletak di Ciperna, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Penyerahkelolaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 276/KN/2019. Penyerahan aset Ciperna ditetapkan dalam berita acara serah terima nomor BA-08/LMAN/2020 tanggal 18 April 2020.

Pada tanggal 05 Maret 2021, LMAN dengan unit pada DJKN yang sebelumnya

melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas Aset eks Pertamina di Ciperna (Direktorat KND dan Direktorat PKNSI) menerbitkan berita acara pemutakhiran data nomor BA-1/LMAN.1/2021; BA-6/KN.3.3/2021; BA-1/KN.5.1/2021 yang pada substansinya menyepakati adanya informasi tambahan terkait aset yang diserahkan yaitu hasil revaluasi atas tanah pada akhir tahun 2019 dan nilai akumulasi penyusutan serta perlakuan akuntansi yang perlu dilakukan tiap-tiap entitas guna memastikan resiprositas dalam pencatatan transaksi transfer penyerahkelolaan tersebut. Transaksi tersebut dibukukan sebagai peristiwa penyesuaian setelah tanggal neraca 31 Desember 2020.

Pada tahun 2022, sebagai tindak lanjut pengakhiran atas Kerjasama Manajemen (KSM) atas Aset eks Pertamina Kawasan Ciperna, LMAN memperoleh aset berupa printer dengan nilai Rp1.850.000. Pengakuan tersebut didasarkan pada angka 2 huruf g Berita Acara Kesepakatan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor BA- 2/LMAN/2022 tanggal 5 September 2022.

Pada tahun 2022 juga terdapat pengeluaran untuk pemasangan patok dan jasa konsultasi pengukuran dan topografi atas tanah kawasan Ciperna dengan nilai Rp152.006.952.

Penyusutan Dipercepat Sebagian Aset eks Pertamina di Ciperna

Pada pelaksanaan cek fisik dalam rangka audit laporan keuangan 2021 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas aset di Kawasan Ciperna ditemukan bahwa terdapat beberapa aset yang tidak lagi memiliki manfaat ekonomi namun masih tersaji pada neraca. Mengingat belum terdapat penghapusan atas aset-aset tersebut, diambil langkah untuk melakukan penyusutan dipercepat sehingga dihasilkan nilai bersih setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp0 untuk aset-aset tersebut. Besaran penyusutan dipercepat tersebut adalah Rp151.231.708. Pada periode pelaksanaan audit, LMAN juga telah melakukan inventarisasi atas aset di Kawasan Ciperna. Rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan inventarisasi juga selaras dengan rekomendasi KAP yaitu penyusutan dipercepat.

4. Aset Lain-lain BUN

Pos Aset Lain-lain BUN menyajikan:

- 1) Aset hasil pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020, dan PMK Nomor 139/PMK.06/2020 yang belum dihentikan pengakuannya melalui pengesahan belanja modal pada KL.
- 2) Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI) yang tidak memenuhi klasifikasi Properti Investasi.

Posisi Aset Lain-lain BUN (setelah akumulasi penyusutan) pada tanggal 31 Desember

2022 adalah Rp19.301.322.987. Seluruh Aset Lain-lain BUN hasil pendanaan pengadaan tanah PSN telah dilakukan penghentian pengakuan setelah dilakukan pengesahan belanja modal.

1) Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional

Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui pembayaran langsung dari Entitas kepada pihak yang berhak diakui sebagai aset sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui skema penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu dan telah lolos verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diakui sebagai aset berdasarkan pada PMK Nomor 5/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Dengan telah terbitnya PMK Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, pencatatan aset hasil pengadaan tanah oleh Entitas dilakukan sebesar ganti kerugian kepada pihak yang berhak dalam skema pembayaran langsung dan sebesar penggantian dana kepada badan usaha untuk skema penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu.

LMAN melakukan penghentian pengakuan atas aset hasil pengadaan tanah setelah adanya pengesahan belanja modal oleh kementerian/lembaga terkait.

Saldo aset Lain-lain BUN tanah infrastruktur PSN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian mutasi pada periode yang berakhir di tanggal tersebut sebagai berikut:

	Uraian	Nominal (Rp)
	Posisi per 31 Desember 2021	-
(+)	Pendanaan pengadaan tanah untuk sektor sumber daya air	3.596.292.288.186
(+)	Pendanaan pengadaan tanah untuk sektor jalan tol	12.172.219.871.831
(+)	Pendanaan pengadaan tanah untuk sector perhubungan	278.236.526.046
(+)	Pendanaan pengadaan tanah untuk sector Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	314.682.000
(+)	Pengesahan Belanja Modal K/L Teknis atas realisasi sepanjang tahun 2022*	(16.047.063.368.063)
	Posisi 31 Desember 2022	-

Pengesahan Belanja Modal Tahun 2021 dan 2022

Sesuai dengan Perpres 66 Tahun 2020, PMK Nomor 139/PMK.06/2020, dan kebijakan akuntansi pada S-941/PB/2020, atas seluruh dana jangka panjang yang dikeluarkan LMAN untuk pendanaan pengadaan tanah PSN dilakukan pengesahan sebagai belanja modal pada Kementerian/Lembaga yang mengelola PSN tersebut. Dengan pengesahan tersebut, LMAN melakukan penghentian atas aset tanah PSN.

2) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia

Pos ini menyajikan Aset eks HTBI yang tidak direklasifikasi ke properti investasi. Posisi Aset eks HTBI pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.370.569.500 dengan akumulasi penyusutan Rp69.246.513. Nilai bersih Aset eks HTBI adalah sebesar Rp 19.301.322.987, tidak terdapat mutasi nilai Aset eks HTBI sebelum penyusutan pada tahun 2022.

D.2.1.6.7. ASET LAINNYA DARI EKUITAS PADA UBL

Jumlah Aset Lainnya dari ekuitas UBL per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp29.625.443.493.878** dan **Rp24.344.018.870.873** mengalami kenaikan sebesar Rp5.281.424.623.005 atau (21,69%) merupakan Aset Lainnya dari Unit Badan Lainnya yang berada di 8 (delapan) Unit Badan Lainnya Bukan Satker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya pada neraca Laporan Keuangan Badan Lainnya merupakan nilai ekuitas bersih dari UBL bukan satuan kerja. Rincian aset lainnya UBL berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

NO	UBL	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Otorita Asahan	5.396.635.686	6.852.392.874
2	Taman Mini Indonesia Indah	4.334.012.243	68.368.872.564
3	Yayasan Gedung Veteran	0	2.326.894.868
4	Baznas	186.239.265.940	191.628.189.740
5	Badan Wakaf Indonesia	20.372.797.851	16.949.579.101
6	SKK MIGAS	0	(25.382.208.452)
7	Badan Pengelola Keuangan Haji	21.539.318.410.709	17.711.413.227.545
8	Otoritas Jasa Keuangan	7.869.782.371.449	6.371.861.922.633
JUMLAH		29.625.443.493.878	24.344.018.870.873

Penjelasan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp5.396.635.686 dan Rp6.852.392.874**. Aset Lainnya sebesar Rp5.396.635.686 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 15 Mei 2019 dikurangi nilai Aset yang telah dilikuidasi periode 2022 Audited. Penurunan nilai aset lainnya sebesar Rp1.455.757.188 merupakan pengurangan nilai Aset bersih yang berasal dari serah terima Aset tetap Otorita Asahan kepada pengelola barang (DJKN).

Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 barang milik negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2022 belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa tim likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

2. Aset Lainnya dari Yayasan Harapan Kita/Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (YHK/BPP TMII) yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan

Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp4.334.012.243** dan **Rp68.368.872.564**. Aset Lainnya Sebesar **Rp4.334.012.243** merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan YHK/BPP TMII Tahun 2020 *Audited* serta hasil Inventarisasi Aset Tahap I Kemensetneg pada TMII. Penurunan nilai aset lainnya sebesar Rp64.034.860.321 terdiri dari:

- a. Koreksi Ekuitas atas Laporan Keuangan periode 2020 Unaudited ke 2020 Audited sebesar minus Rp15.862.160.521.
- b. Penyesuaian nilai Aset bersih yang berasal dari penyesuaian nilai Aset tetap atas penetapan status penggunaan barang milik negara pada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan KMK Nomor 99/KM.6/2021 yang telah dicatat pada Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara tahun 2022 sebesar minus Rp48.172.699.800. Sampai dengan batas akhir penyampaian LK Badan Lainnya Tahun 2022 Audited TMII masih dalam proses Likuidasi yang dilakukan dengan Inventarisasi Aset Tahap II oleh Kemensetneg.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, YHK/BPP TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Yayasan Harapan Kita TMII telah dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, sesuai pasal 1 ayat 1 penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan pasal 2 dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara maka pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022 *Audited* proses Likuidasi Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah masih dalam proses penyelesaian.

3. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp0** dan **Rp2.326.894.868**. Aset Lainnya sebesar **Rp0** adalah total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2022 *Unaudited* yang telah dilakukan penyesuaian penyajian ekuitas negatif. Aset Lainnya Yayasan Gedung Veteran dicatat berdasarkan Laporan Keuangan 2022 Unaudited dikarenakan YGVRI belum menyampaikan Laporan Keuangan 2022 Audited yang dijadwalkan pada November 2023. Laporan keuangan Yayasan Gedung Veteran disusun berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp186.239.265.940 dan Rp191.628.189.740**.

Aset Lainnya yang berasal dari Baznas sebesar Rp186.239.265.940 merupakan total Ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Baznas Tahun 2022 *Unaudited* dikarenakan Baznas belum menyampaikan Laporan Keuangan 2022 Audited yang dijadwalkan pada Agustus 2023. Laporan Keuangan BAZNAS disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sejak tanggal 1 Januari 2012.

5. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp20.372.797.851 dan Rp16.949.579.101**. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp20.372.797.851 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2022 *Audited*. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia merupakan jumlah keseleruhan dana yang bersumber dari APBN dan Dana Wakaf. Dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Wakaf Indonesia berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dimodifikasi dengan akuntansi pemerintahan karena Badan Wakaf Indonesia menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp0 dan minus Rp25.382.208.452**.

Aset Lainnya sebesar minus Rp0 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK MIGAS Tahun 2022 *Audited* sebesar minus Rp1.472.237.778.270 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.539.753.566.287 dan dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK MIGAS (BA 999.08) sebesar Rp92.577.568.415 dan dilakukan penyesuaian atas penyajian Ekuitas Negatif sebesar minus Rp25.061.780.398.

Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut :

KETERANGAN	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Tahun 2022 Audited	(1.472.237.778.270)
Penyesuaian Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.539.753.566.287
Dikurangi Ekuitas Bersih Satker SKK Migas BA 999.08	92.577.568.415
Ekuitas bersih BPMIGAS per tanggal 13 November 2012	0

KETERANGAN	Nilai
Penyesuaian Penyajian Ekuitas Negatif	(25.061.780.398)
Aset Lainnya yang berasal dari SKK Migas	0

Penyesuaian atas ekuitas bersih BPMIGAS per 13 November 2012 tidak dilakukan lagi pada tahun 2018 berdasarkan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-1/MK.05/2018 tanggal 9 November 2018 hal Penyesuaian Kebijakan Pencatatan Ekuitas Bersih Eks BP Migas, bahwa nilai ekuitas bersih eks BP Migas disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara pada Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah (BA 999.03). Selanjutnya terhadap penyesuaian pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012 yang membubarkan kelembagaan BPMIGAS, pemerintah telah menerbitkan beberapa payung hukum sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu migas dialihkan ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru.
- 2) Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi, dan Organisasi, dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain menetapkan bahwa:
 - ❖ pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas);
 - ❖ Seluruh personalia Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada SKSP Migas.
- 3) Keputusan Menteri ESDM Nomor 3136 K/73/MEM/2012, yang antara lain menetapkan bahwa:
 - ❖ Para pekerja yang semula jabatannya sebagai Wakil Kepala dan Deputi pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas dialihkan pada jabatan yang sama pada SKSP Migas;

- ❖ Seluruh pejabat dan pekerja lainnya dialihkan sebagai pejabat dan pekerja pada SKSP Migas dengan jabatan yang sama.

4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain mengatur bahwa pegawai SKK Migas untuk pertama kali berasal dari pengalihan pegawai eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dapat diketahui bahwa :

- ❖ Tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara eks BPMIGAS dengan para pekerjanya.
 - ❖ Tidak ada kewajiban finansial yang harus ditanggung oleh Pemerintah terkait pengalihan para pekerja eks BPMIGAS baik ke SKSP Migas maupun ke SKK Migas.
7. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp21.539.318.410.709 dan Rp17.711.413.227.545**. Aset Lainnya sebesar Rp21.539.318.410.709 merupakan Aset Bersih Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2022 *Audited*. Laporan Keuangan BPKH yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan syariah, PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.
8. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai UBL Satker dan UBL Bukan Satker. Hal ini dilakukan mengingat OJK sebagai sebuah lembaga yang independen, namun di sisi lain juga merupakan UBL Satker dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.08 (BA BUN Belanja Lain-Lain).

Aset bersih OJK selaku satker BA 999.08 per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp8.479.840.532 dan Rp31.087.217.667**.

Selanjutnya, sebagai UBL Bukan Satker OJK mulai tahun 2014 mulai melakukan pungutan. Pungutan ini dilakukan sehubungan dengan fungsi, tugas dan wewenang OJK dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam PP di atas, mengatur antara

lain bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal pungutan pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Otoritas Jasa, selaku lembaga independen nilai aset OJK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp7.878.262.211.981** dan **Rp6.402.949.140.300**. Saldo Aset Lainnya dari OJK sebagai bukan satker Tahun 2021 Audited berdasarkan Laporan Keuangan OJK yang telah diaudit adalah sebesar Rp6.402.949.140.300.

Berdasarkan dua Laporan Keuangan OJK yaitu selaku satuan kerja BA BUN 999.08 dan OJK selaku lembaga independen, maka untuk konsolidasi Laporan Keuangan, nilai aset bersih OJK adalah sebesar **Rp7.869.782.371.449**, yaitu nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BA BUN 999.08, laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BA BUN 999.08.

Laporan Keuangan OJK disusun berdasarkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

D.2.1.6.8. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PADA ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp284.543.826.672.654** dan **Rp311.193.402.360.703** dengan perhitungan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Aset Lainnya (BA 999.03)	415.810.802.081	17.253.171.238.342
2.	Aset Lainnya (BA 999.08)	165.022.930.588	150.286.556.720
3.	Aset Lainnya (BA 999.99)	283.962.992.939.985	293.789.944.565.641
	Jumlah	284.543.826.672.654	311.193.402.360.703

D.2.1.6.8.1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BA 999.03

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2020
1.	BA 999.03 – Eks Kelolaan PT PPA	430.160.983	38.977.009.188
2.	BA 999.03 – Aset Eks Pertamina	415.311.394.585	17.202.171.758.957
3.	BA 999.03 – Aset Lain-lain BUN	69.246.513	12.022.470.197
	Jumlah	415.810.802.081	17.253.171.238.342

1. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET EKS KELOLAAN PT PPA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain eks Kelolaan PT PPA yang berada pada pengelolaan LMAN per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp430.160.983 dan Rp38.977.009.188.

2. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET EKS PERTAMINA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain eks Pertamina yang berada pada pengelolaan LMAN per tanggal 31 Desember 2022 Audited dan 31 Desember 2021 Audited adalah sebesar Rp415.311.394.585 dan Rp17.202.171.758.957.

3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET LAIN-LAIN BUN

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 Audited dan 31 Desember 2021 Audited adalah sebesar Rp69.246.513 dan Rp12.022.470.197.

D.2.1.6.8.2. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.08

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp165.022.930.588 dan Rp150.286.556.720. Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya terdiri dari:

1. Akumulasi amortisasi *software* sebesar Rp121.399.613.731;
2. Akumulasi amortisasi lisensi sebesar Rp43.623.316.857.

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2022	31 Desember 2021
999.08	Otoritas Jasa Keuangan		
	Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	31.915.327.104	31.915.327.104
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	42.499.329.857	37.538.155.965
999.08	SKK Migas		
	Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	89.484.286.627	79.924.073.651
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	1.123.987.000	909.000.000
Total		165.022.930.588	150.286.556.720

D.2.1.6.8.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.99

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp283.962.992.939.985** dan **Rp293.789.944.565.641**, mengalami penurunan sebesar Rp9.826.951.625.656 atau (3,34%) yang terdiri dari akumulasi penyusutan aset lain-lain Aset Eks Pertamina, akumulasi penyusutan aset lain-lain aset BMN *Idle*, akumulasi penyusutan aset KKKS dan akumulasi penyusutan aset PKP2B.

Kelompok	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Akumulasi penyusutan Aset Eks Pertamina	0	6.521.367.491.837
Akumulasi penyusutan aset BMN <i>Idle</i>	5.796.697.173	5.339.065.554
Akumulasi penyusutan aset Hulu Migas pada PPBMN	22.869.948	257.556.546.026.445

Kelompok	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Akumulasi penyusutan aset Hulu Migas pada SKK Migas	276.024.402.148.317	0
Akumulasi penyusutan aset Hulu Migas pada BPMA	6.384.148.840.234	0
Akumulasi penyusutan aset PKP2B	1.535.885.268.820	29.700.120.024.058
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	12.737.115.493	6.571.957.747
TOTAL	283.962.992.939.985	293.789.944.565.641

1. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina

Nilai Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.227.368.751.795 yang berasal dari penyusutan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi penyusutan 2021 di Neraca	6.521.367.491.837
Mengakui penyusutan selama semester I tahun 2022	353.963.452.104
Menghapus Akumulasi penyusutan untuk asset di Field Tanjung yang terjual secara lelang dan dihapus dari daftar barang sesuai BAST tanggal 18 Januari 2022	(1.141.866.000)
Mengakui penyusutan selama semester II tahun 2022	353.179.673.854
Akumulasi Penyusutan 2022 di Neraca	7.227.368.751.795
Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya ke Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(7.227.368.751.795)
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	0

Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi maka dilakukan reklasifikasi atas akumulasi penyusutan Aset Lainnya tersebut menjadi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.

2. Akumulasi Penyusutan Aset BMN Idle

Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat maka diimplementasikan penyusutan BMN termasuk untuk BMN *idle* yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang.

No.	Akun Neraca	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	17.210.697.000	-	17.210.697.000
2	Gedung dan Bangunan	15.683.365.705	5.796.697.173	9.886.668.532
	Total	32.894.062.705	5.796.697.173	27.097.365.532

Akumulasi penyusutan pada akhir periode Tahunan Tahun 2022:

Akumulasi penyusutan periode Tahun 2021 (Audited)	(5.339.065.554)
Penyusutan Reguler	(489.208.550)
Penyusutan Transaksional mutasi tambah BMN idle	(354.019.266)
Penyusutan Transaksional mutasi kurang BMN eks idle	246.916.823
Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan ke Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	138.679.374
Akumulasi penyusutan periode Tahun 2022	(5.796.697.173)

3. Akumulasi Penyusutan Aset Hulu Migas/KKKS Pada PPBMN

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp22.869.948 dan Rp257.556.546.026.446. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Saldo Awal per 31 Desember 2021	257.556.546.026.446
Mutasi Tambah:	305.932.219
Mutasi Kurang:	257.556.829.088.716
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	22.869.948

Akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca terdiri dari:

1. Akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBM,
2. Akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBI.

Penjelasan atas penyusutan aset HBM yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Saldo Awal 31 Desember 2021	257.471.073.448.677
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan:	302.877.406
Penyusutan Tahun Berjalan	302.877.406
Mutasi Kurang :	257.471.376.326.083
Pemindahtanganan Tahun Berjalan	2.725.896.653
Koreksi Kurang	1.170.446.189
Transfer Keluar ke UAKPA SKK Migas dan BPMA	257.467.479.983.241
Saldo Akhir 31 Desember 2022	0

1. Saldo awal merupakan penyusutan Aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2021 (audited).
2. Penambahan penyusutan Aset HBM sebesar Rp302.877.406 berasal dari penyusutan pada tahun berjalan atas aset pada KKKS PTTEP Malunda Ltd. sebesar Rp299.494.636 dan KKKS Star Energy Ltd. sebesar Rp3.382.770 yang dikelola di tahun 2022.
3. Pengurangan penyusutan Aset HBM sebesar Rp257.471.376.326.083 berasal dari:
 - a. Pemindahtanganan aset HBM pada tahun berjalan sebesar Rp2.725.896.653 terdiri dari KKKS PTTEP Malunda Ltd. sebesar Rp2.695.451.725 dan KKKS Star Energy Ltd. sebesar Rp30.444.928.
 - b. Koreksi kurang sebesar Rp1.170.446.189 karena pemindahtanganan aset HBM pada tahun anggaran yang lalu pada KKKS Inpex Babar Selaru Ltd., KKKS Mandala Energy Merangin III Ltd., dan Mandala Energy Sumbagsel Ltd.
 - c. Transfer keluar sebesar Rp257.467.479.983.241 terdiri dari Rp251.633.487.002.417 ke SKK Migas dan Rp5.833.992.980.824 ke BPMA, dikarenakan berdasarkan PMK 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak Dan Gas Bumi, terdapat reposisi kewenangan pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana SKK Migas dan BPMA berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang.

Penjelasan atas penyusutan aset HBI yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal 31 Desember 2021	85.472.577.768
Mutasi Tambah:	3.054.813
Penyusutan Tahun Berjalan	3.054.813
Mutasi Kurang:	85.452.762.633
Pemindahtanganan Tahun Berjalan	27.493.319
Koreksi Kurang	45.890.769
Transfer Keluar ke UAKPA SKK Migas dan BPMA	85.379.378.545
Saldo Akhir 31 Desember 2022	22.869.948

1. Saldo awal merupakan penyusutan Aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2021 (audited).
2. Penambahan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp3.054.813 berasal dari penyusutan aset HBI pada tahun berjalan atas aset yang dikelola pada tahun 2022.
3. Pengurangan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp85.452.762.633 berasal dari pemindahtanganan aset HBI pada tahun berjalan sebesar Rp27.493.319 dan pemindahtanganan aset HBI pada tahun anggaran yang lalu sebesar Rp45.890.769. Serta Transfer keluar sebesar Rp85.379.378.545 terdiri dari Rp84.651.216.553 ke SKK Migas dan Rp728.161.992 ke BPMA, dikarenakan berdasarkan PMK 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak Dan Gas Bumi, terdapat reposisi kewenangan pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana SKK Migas dan BPMA berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Hulu Migas/KKKS Pada SKK Migas

Akumulasi penyusutan aset non tanah terdiri dari:

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM

Saldo Awal 31 Desember 2021	0,00
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan:	279.683.009.344.908,00
Transfer Masuk Selisih Saldo Awal dari UAKPA -PB	251.633.487.002.417,00
Penyusutan Tahun Berjalan	25.225.068.398.472,00
Koreksi Tambah	2.824.453.944.019,00
Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan:	3.765.336.156.834,00
Koreksi Saldo Awal Kurang	0,00
Koreksi Kurang	3.765.336.156.834,00
Saldo Akhir 31 Desember 2022	275.917.673.188.074,00

- Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- Penambahan penyusutan Aset HBM sebesar Rp279.683.009.344.908 berasal dari:
 - Transfer masuk saldo awal dari UAKPA – PB sebesar Rp251.633.487.002.417 sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited).
 - Beban penyusutan tahun berjalan untuk aset PIS perolehan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.225.068.398.472.
 - Koreksi tambah sebesar Rp2.824.453.944.019.
- Pengurangan penyusutan Aset HBM sebesar Rp3.765.336.156.834 berasal dari koreksi kurang sebesar Rp3.765.336.156.834.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBI

Penjelasan atas penyusutan aset HBI yang disajikan dalam Neraca 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2021	0,00
Mutasi Tambah:	111.579.375.436,00
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA-PB	84.651.216.553,00
Koreksi Saldo Awal Tambah	0,00
Penyusutan Tahun Berjalan	8.066.224.443,00
Koreksi Tambah	18.861.934.440,00
Mutasi Kurang:	4.850.415.193,00
Koreksi Kurang	4.850.415.193,00
Saldo Akhir 31 Desember 2022	106.728.960.243,00

- Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- Penambahan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp111.579.375.436 berasal dari:
 - Transfer masuk saldo awal dari UAKPA – PB sebesar Rp84.651.216.553 sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited).
 - Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp8.066.224.443.
 - Koreksi tambah Rp18.861.934.440.
- Pengurangan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp4.850.415.193 berasal dari koreksi kurang sebesar Rp4.850.415.193.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Hulu Migas/KKKS Pada BPMA

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM dan HBI sebesar Rp6.384.148.840.234

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM

Saldo 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	6.382.829.985.002
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA-PB	5.833.992.980.824
Penyusutan Tahun Berjalan	366.398.665.522
Koreksi Tambah	182.438.338.656

Mutasi Kurang:	48.999.999
Penghapusan	48.999.999
Koreksi Kurang	
Saldo Akhir 31 Desember 2022	6.382.780.985.003

- Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- Mutasi tambah sebesar Rp6.382.829.985.002 merupakan:
 - Transfer masuk saldo awal dari UAKPA – PB sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp5.833.992.980.824 karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas;
 - Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp366.398.665.522;
 - Koreksi tambah dari KKKS Medco E&P Malaka dan Triangle Pase Inc sebesar Rp182.428.338.656.
- Mutasi Kurang berupa penghapusan aset BMN PHE NSB sebesar Rp48.999.000,- yang sudah dilelang pada KPKNL setempat.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBI

Saldo 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	1.367.855.231
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA-PB	728.161.992
Penyusutan Tahun Berjalan	170.784.923
Koreksi Tambah	468.908.316
Mutasi Kurang:	0
Koreksi Kurang	0
Saldo Akhir 31 Desember 2022	1.367.855.231

- Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- Mutasi tambah sebesar Rp1.367.855.231 merupakan:
 - Transfer masuk saldo awal dari UAKPB – PB sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited) sebesar Rp728.161.992;
 - Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp170.784.923;
 - Koreksi tambah dari KKKS Medco E&P Malaka dan Triangle Pase Inc

sebesar Rp468.908.316.

6. Akumulasi Penyusutan Aset PKP2B

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.535.885.269.458 dan Rp29.700.120.024.058. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo 31 Desember 2021	29.700.120.024.058
Mutasi Tambah:	703.347.938.509
Penyusutan	703.347.938.509
Mutasi Kurang:	(28.867.582.693.109)
Penghapusan dari daftar BMN Neraca	(88.789.729.707)
Koreksi Akumulasi Penyusutan	(44.527.615.799)
Koreksi atas reklasifikasi Aset	(914.401.000)
Koreksi atas reklasifikasi Aset	(28.733.350.946.603)
Saldo Akhir 31 Desember 2022	1.535.885.269.458

Penjelasan atas nilai akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

- Saldo awal merupakan Akumulasi penyusutan aset non tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2021 sebesar Rp29.700.120.024.058.
- Mutasi tambah Akumulasi penyusutan aset non tanah sebesar Rp703.347.938.509 merupakan penyusutan tahun 2022.
- Mutasi kurang akumulasi penyusutan aset non tanah sebesar Rp28.867.582.693.109 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemindahtanganan melalui Penjualan
 - SK Penghapusan nomor 825.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.732.387.000.

- SK Penghapusan nomor 950.K/BN.07/SJN.A/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Dense Media Plant, Washplant, dan Workshop di Senakin, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan sebesar Rp56.255.673.678.
- SK Penghapusan nomor 544.K/BN.07/SJN.A/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Tanito Harum sebesar Rp4.740.000.
- b. Pemindahtanganan melalui Hibah
 - SK Penghapusan nomor 4230.K/95/MEM/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia atas 1 unit Honda Mega Pro dengan kode BMN CYC0120 sebesar Rp7.750.000;
 - SK Penghapusan 21.K/BN.07/SJNA./2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Jembatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana dilakukan penghapusan pada neraca sebesar Rp7.889.676.000.
- c. Sebab-sebab Lain
 - SK Penghapusan nomor 736.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung berupa Infrastruktur Pendukung Kegiatan Pertambangan di Wilayah Usaha Pertambangan Roto Samurangau, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp2.576.393.962.
 - SK Penghapusan nomor 548.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Perbaikan Jalan Tambang di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Rp15.318.210.400.
 - SK Penghapusan nomor 829.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penghapusan BMN dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Bangunan dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.898.667.
- d. Koreksi Akumulasi Penyusutan
Terdapat koreksi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp44.527.615.799.
- e. Koreksi Pencatatan
Terdapat koreksi dari BMN Non Tanah menjadi BMN Tanah dengan kode asset 101000048 (Tanah di HO Eks. Jakarta Llyod) dengan nilai sebesar Rp914.401.000. Terlampir disampaikan dokumen kepemilikan tanah

berbentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan No. 569 yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2009.

f. Reklasifikasi Keluar

Reklas keluar untuk seluruh Akumulasi Penyusutan Aset Non Tanah ke akun Akumulasi Penyusutan Properti Investasi yang dimanfaatkan oleh pemegang IUP kecuali PT Berau Coal dengan nilai sebesar Rp28.733.350.946.603.

4. Saldo Akhir 31 Desember 2022 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp1.535.885.269.458.

7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain

Terhadap aset lainnya berupa bangunan pabrik/kilang LPG eks PT TLI dilakukan penyusutan. Akumulasi penyusutan aset tersebut sebesar Rp12.737.115.493 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Akun Neraca	Akumulasi Penyusutan Awal	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan Akhir
1.	Aset Eks PT TLI	6.165.157.747	6.165.157.746	12.330.315.493
2.	Aset GIZ	406.800.000	0	406.800.000
	Jumlah	6.571.957.747	6.165.157.746	12.737.115.493

Aset tersebut mulai dioperasikan pada tahun 2010 dengan masa manfaat aset 50 tahun. Nilai akumulasi penyusutan aset eks PT TLI tahun 2022 sebesar Rp12.330.315.493 dan penyusutan aset GIZ tahun 2022 sebesar Rp406.800.000, sehingga total nilai penyusutan aset lain-lain tahun 2022 adalah sebesar Rp12.737.115.493.

D.2.2. KEWAJIBAN**D.2.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK****D.2.2.1.1. UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA**

*Utang
Perhitungan
Pihak
Ketiga*

Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp3.916.380.112.882** dan **Rp3.765.331.476.323** atau mengalami kenaikan sebesar Rp151.048.636.559 (4,01%). dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Utang PFK BA 999.99 DJPb	809.370.991.446	961.059.001.096
2	Utang PFK BA 999.99 DJKN	273.494.832	1.527.596.549
3	Utang PFK BA 999.99 DJPK	3.106.735.626.604	2.802.744.878.678
	Jumlah	3.916.380.112.882	3.765.331.476.323

1. UTANG PFK BA 999.99 DJPb

Utang Perhitungan Pihak Ketiga DJPB per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp809.370.991.446, dan Rp961.059.001.096, rincian Utang PFK Pegawai sebagai berikut:

No	Badan Penyelenggara	Akun	Nilai (Rp)	
			31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	BPJS Kesehatan	211111, 211112, 211116, 211117, 211118, 211119, & 211121	743.361.910.994	905.029.903.526
2	Perum BULOG	211113	2.772.212	2.975.164
3	PT Taspen (Persero)	211114	61.290.354.601	52.391.828.013

No	Badan Penyelenggara	Akun	Nilai (Rp)	
			31 Desember 2022	31 Desember 2021
4	PT Asabri (Persero)	211151	158.273.803	150.961.077
5	BAPERTARUM-PNS	211115, 211152, 211153, & 211154	4.557.679.836	3.483.333.316
Jumlah			809.370.991.446	961.059.001.096

Saldo Utang PFK Pegawai di atas diperoleh dari saldo awal Utang PFK Pegawai Bulan Januari 2022 ditambah penerimaan dana PFK Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2022 dikurangi pembayaran dana PFK Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2022. Apabila Badan Penyelenggara menerima kelebihan penerimaan pada tahun anggaran berjalan (tahun lalu), maka saldo utang (awal utang) ikut diperhitungkan dengan saldo 118122 berjalan (tahun lalu). Pelunasan atas piutang Akun 118122 tahun lalu menggunakan akun 811921 di tahun berjalan juga turut diperhitungkan dalam komponen penerimaan penambah saldo Utang PFK 2022.

2. UTANG PFK BA 999.99 DJKN

Utang Perwalian/PFK Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3 Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp273.494.832.

3. UTANG PFK BA 999.99 DJPK

Utang Perhitungan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.106.735.626.604 dan Rp2.802.744.878.678. Utang PFK tersebut merupakan Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok yang akan disetorkan pada periode penyetoran Tahun Anggaran 2022. Penyetoran periode Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berdasarkan data penerimaan yang disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

KETERANGAN	NOMINAL	
A. Saldo Awal Tahun 2022 (Utang PFK Tahun 2021)		(2.802.744.878.678) (21.705.480.691.701)
B. Penerimaan Tahun 2022		
C. Penyetoran Tahun 2022		
Penyetoran Utang Saldo PFK Tahun 2021		
Penyetoran Triwulan I	2.679.012.181.066	
Penyetoran Triwulan II	5.318.515.263.800	
Penyetoran Triwulan III	6.358.150.971.697	
Penyetoran Triwulan IV	7.045.811.527.212	
Total		21.401.489.943.775
D. Hak daerah yang akan disetorkan pada Triwulan I TA 2023		(3.106.735.626.604)

D.2.2.1.2. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

*Utang
Kepada
Pihak
Ketiga*

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp111.016.588.119.672** dan **Rp46.198.539.207.971** atau mengalami kenaikan sebesar Rp64.818.048.911.701 (140,30%). Rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

No.	Instansi	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan
1.	(BA 999.00)	247.752.918.368	251.218.736.876	(3.465.818.508)
2.	(BA 999.01)	0	0	0
3.	(BA 999.02)	0	0	0
4.	(BA 999.03)	109.925.186	651.221.303	(541.296.117)
5.	(BA 999.04)	0	0	0
6.	(BA 999.05)	25.139.730.218.560	0	25.139.730.218.560
7.	(BA 999.07)	0	2.759.562.350.038	(2.759.562.350.038)
8.	(BA 999.08)	71.536.103.327.320	24.444.213.806.209	47.091.889.521.111
9.	(BA 999.99)	14.288.902.064.342	18.941.858.062.022	(4.652.955.997.680)

Jumlah	111.212.598.453.776	46.397.504.176.448	64.815.094.277.328
Eliminasi	(196.010.334.104)	(198.964.968.477)	2.954.634.373
Jumlah Bersih	111.016.588.119.672	46.198.539.207.971	64.818.048.911.701

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada:

D.2.2.1.2.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.00

Jumlah Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp247.752.918.368 dan Rp251.218.736.876 yang mengalami penurunan sebesar Rp3.465.818.508 atau turun 1,38%. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Unit Akuntansi Keuangan Kuasa BUN Pusat adalah Utang kepada Pihak Ketiga berupa utang dari Retur SP2D, Kelebihan Pelimpahan Bank/Pos Persepsi, dan utang dari adanya kesalahan perbankan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

No.	Utang	Jumlah	Penjelasan
1	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (Utang Retur)	249.097.971.958	1. Utang retur SP2D di KPPN selaku Kuasa BUN sebesar Rp249.049.255.853 2. Utang yang berasal dari penerimaan reklasifikasi kelebihan setoran uang persediaan yang belum diterbitkan SPM pengembalian pendapatannya pada satker pengembalian penerimaan negara atas beban SAL sebesar Rp48.716.105
2	Utang Jangka Pendek Lain-lain	5.451.579	Kewajiban ini berasal dari kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang belum selesai dilakukan kompensasi per 31 Desember 2022
3	Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem	(2.648.823.214)	a. Terdapat kesalahan sistem SPAN swift pada BRI berdasarkan surat Kepala Departemen Institutional Business Division Bank BRI nomor B.44.e-INS/FPC/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 hal Permasalahan Transaksi

	Perbankan (219944)		SPAN BRI, dengan kronologi sebagai berikut: • Terdapat retur atas 5 SP2D pada RR RPKBUNP SPAN BRI (817111) tanggal 8 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp2.296.240.629. • BRI melakukan pemindahan dana dari RR RPKBUNP BRI (827911) ke RPKBUNP SPAN BRI (817911) dan menyebabkan berkurangnya dana sebesar Rp2.296.240.629 pada RR RPKBUNP SPAN BRI. • BRI melakukan penyaluran dana kembali atas 5 SP2D (827911), namun proses tersebut gagal dan menyebabkan saldo minus Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari kesalahan perbankan. • Pada tanggal 22 Desember 2022, KPPN melakukan penyelesaian retur atas 5 SP2D dari RR RPKBUNP SPAN BRI (827111). • Atas saldo minus Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan sebesar Rp2.296.240.629, Direktorat PKN melalui surat nomor S-1/PB.3/PB.33/2023 tanggal 31 Januari 2023 hal Persetujuan Pendebetan RR RPKBUNP SPAN BRI, meminta BRI untuk menyelesaikan permasalahan dan BRI telah melakukan penyetoran kembali pada Februari 2023 ke RR RPKBUNP SPAN BRI senilai Rp2.296.240.629 (817911). b. Terdapat transaksi pendebetan otomatis oleh Global Billing System yang diimplementasikan oleh Citibank sejak bulan Oktober 2022 sebesar USD 22.777,10 ekuivalen Rp355.120.585. Permasalahan tersebut telah dilakukan penyelesaian pada Bulan Februari 2023 sebagaimana surat Direktur PKN nomor S-61/PB.3/2023 tgl 30 Januari 2023. c. Berdasarkan Surat Kepala Divisi Banking Operation Bank BNI nomor OPR/6/503 tanggal 24 Januari 2023 Terdapat tiga transaksi kredit atas retur tahun 2017 dari BJB yang baru diterima

			di RR RPKBUNP SPAN BNI tanggal 15 Desember 2022 dengan detail: • SP2D 170881303009704002489 Rp846.000 • SP2D 170881303009704003514 Rp846.000 • SP2D 170881303009704001839 Rp846.000. Atas transaksi tersebut telah dilakukan penyelesaian pada Bulan Februari 2023.
4	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga yang masih harus dibayar	1.298.318.045	Berasal dari pengeluaran transito yang masih harus dibayar pada KPPN Jakarta V.
Jumlah		247.752.918.368	

Rincian utang pihak ketiga pada BA 999.00 tersaji dalam [Lampiran LD25a](#)

D.2.2.1.2.2. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.03

Nilai kewajiban jangka pendek pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 Audited sebesar Rp109.925.186 dan Rp651.221.303 merupakan kewajiban kepada penyedia jasa upgrade/renovasi aset yang mana hasil pekerjaan upgrade/renovasinya telah diterima oleh LMAN namun belum dilakukan pembayaran dengan rincian Sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Retensi pekerjaan pengawasan upgrade Aset eks HTBI di Danadyaksa Cikini	2.453.000
Retensi pekerjaan perencanaan upgrade Aset eks PPA di Puri Casablanca tahap III	37.416.500
Retensi pekerjaan pengawasan upgrade Aset eks PPA di Puri Casablanca tahap I	1.877.150
Retensi Pekerjaan Konstruksi Renovasi 3 Unit Apartemen Hayam Wuruk	3.943.287

Uraian	Nominal (Rp)
Retensi pekerjaan renovasi dan konsultan renovasi Properti Investasi eks PPA eks PPA di Apartemen Mitra Bahari	64.235.249
Total	109.925.186

Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, mengacu pada ketentuan PMK Nomor 139/PMK.06/2020, pengakuan atas kewajiban dana talangan tanah PSN dilakukan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pemilik PSN.

D.2.2.1.2.3. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.05

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp25.139.730.218.560 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan penyaluran Dana Bagi Hasil secara nontunai dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah nontunai berupa penyimpanan dana overnight pada rekening lain Bank Indonesia TDF-TKD Pemda di Bank Indonesia.

Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp25.139.730.218.560 terdiri dari dua bagian, yaitu utang pokok kepada Pihak Ketiga sebesar Rp25.132.963.282.524 dan utang remunerasi kepada Pihak Ketiga sebesar Rp6.766.936.306. Selain itu, terdapat koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga yang disebabkan oleh penyesuaian pencatatan Remunerasi TDF-TKD bulan Desember 2022 sebesar Rp270.

Utang pokok kepada Pihak Ketiga yang merupakan penyaluran Dana Bagi Hasil dalam bentuk TDF pada tahun 2022 yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

1. berdasarkan KMK Nomor 46/MK.7/2022, penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 untuk 52 daerah dilaksanakan melalui penyaluran secara nontunai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Treasury Deposit Facility Daerah sebesar Rp5.536.859.393.355;
2. berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.07/2022, penyaluran perubahan rincian DBH Tahun 2022 untuk 542 daerah dilaksanakan melalui penyaluran secara nontunai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Treasury Deposit Facility Daerah sebesar Rp12.168.344.332.000;
3. berdasarkan PMK Nomor 218/PMK.07/2022, penyaluran Dana Bagi Hasil Reguler Tahun Anggaran 2022 untuk 133 daerah dilaksanakan melalui penyaluran secara nontunai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening

Treasury Deposit Facility Daerah sebesar Rp7.427.759.557.169.

Rincian Utang Pihak Ketiga dalam bentuk utang pokok Treasury Deposit Facility (TDF) terlampir pada [lampiran LD25b](#)

D.2.2.1.2.4. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.08

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp71.536.103.327.320** dan **Rp24.444.213.806.209**. Utang Kepada Pihak Ketiga pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp47.091.889.521.111 atau sebesar 192,65% dibandingkan Tahun 2021. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Kementerian Keuangan	69.306.159.273.984	23.679.555.804.885
	MPP Kartu Prakerja	2.208.507.330.001	759.296.900.000
	SKK Migas	21.436.723.335	5.361.101.324
	Total	71.536.103.327.320	24.444.213.806.209

1. KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

No	Uraian Entitas	31 Desember 2022
1	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	3.431.019.600
2	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat	2.174.168.000
3	Satuan Kerja Pengelola Cadangan Beras Pemerintah	3.101.577.212.413
4	Satuan Satker Dana Kompensasi	66.198.976.873.971
	Jumlah	69.306.159.273.984

a. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2022 pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.431.019.600 yang berasal dari biaya pembayaran tahap III atas penyedia jasa hukum sebesar USD200.000 sesuai Perjanjian Penyediaan Jasa Hukum Nomor 1/PPK-ICSID/2014 tanggal 2 Desember 2014 ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai dan biaya transfer yang dihitung berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S940/MK.01/2017 tanggal 24 November 2017 hal Usulan Penggunaan Anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08). Angka tersebut mengalami perubahan nilai dibanding 31 Desember 2021 karena adanya selisih kurs yang digunakan sebagai rujukan transaksi.

Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker ICSID Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.431.019.600 yang merupakan hasil konversi dari kurs penutup BI per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian		Nilai
1	Pembayaran Tahap III atas Penyedia Jasa Hukum oleh Rajah dan Tann LPP	USD200.000 x Rp15.592 (Nilai Kurs Tengah BI per 31 Desember 2022)	3.118.400.000
2	PPN	10% x USD2000	311.840.000
3	Biaya Transfer valuta asing	USD50 x Rp15.592	779.600
Total Nilai Utang kepada Pihak Ketiga			3.431.019.600

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp2.174.168.000. Utang tersebut merupakan Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.174.168.000 yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2020.

c. Ditjen Perbendaharaan

Ditjen Perbendaharaan selaku satker Satuan Kerja Pengelola Cadangan Beras Pemerintah memiliki saldo sebesar Rp3.101.577.212.413. Nilai utang dimaksud merupakan:

- Saldo per 31 Desember 2021 sesuai hasil Audit BPK atas HPB Tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.359.619.096.329. Pada tahun 2022, Pembayaran Penggantian CBP KPSH TW III dan IV 2021 telah dibayarkan sesuai SPM

Nomor 00006A/999979/2022 sebesar Rp1.249.849.252.952. Sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp109.769.843.377.

- Saldo per 31 Desember 2021 sesuai hasil Audit BPK atas HPB Tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.470.962.214.728. Pada tahun 2022, Pembayaran Pembayaran Penggantian CBP BB PPKM 2021 telah dibayarkan sesuai SPM Nomor 00007A/999979/2022 sebesar Rp3.088.745.280.000. Sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp382.216.934.728
- Kekurangan penerimaan Perum BULOG atas CBP KPSH dan CBP Keadaan Darurat Bencana Tahun 2022 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK tanggal 6 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - CBP KPSH sebesar Rp2.582.541.468.316; dan
 - CBP keadaan Darurat Bencana sebesar Rp27.048.965.992

d. Direktorat PNBP SDA dan KND

Direktorat PNBP SDA dan KND, selaku satker Dana Kompensasi, sebesar Rp66.198.976.873.971 terdiri dari:

1. Pengakuan Utang atas Kekurangan Pembayaran Kompensasi Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022 sesuai asersi KPA, reviu BPKP, dan pemeriksaan BPK sebesar Rp16.770.789.494.089;
2. Pengakuan Utang atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2022 sesuai asersi KPA, reviu BPKP, dan pemeriksaan BPK sebesar Rp35.823.174.618.999;
3. Pengakuan Utang atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Tahun 2022 sesuai asersi KPA, reviu BPKP, dan pemeriksaan BPK sebesar Rp13.317.579.839.913; dan
4. Pengakuan Utang atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. Akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2022 sesuai asersi KPA, reviu BPKP, dan pemeriksaan BPK sebesar Rp287.432.920.970.

2. MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRAKERJA

Saldo utang kepada pihak ketiga pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp2.208.507.330.001 adalah sisa dana cadangan (Dana yang dibatasi penggunaannya) untuk disalurkan peserta Program Kartu Prakerja selama periode 100 hari kalender sejak berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan Pasal 39 PMK Nomor 200/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.

3. SKK MIGAS

Saldo utang kepada pihak ketiga pada SKK Migas sebesar Rp21.436.723.335 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

D.2.2.1.2.5. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TRANSAKSI KHUSUS BA 999.99

Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp14.092.891.730.238 dan Rp18.742.893.093.545 dengan rincian sebagai berikut

No	Instansi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPB	103.373.291.426	85.386.037.244
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA	14.183.589.743.957	18.850.582.918.573
3.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJKN	0	4.113.878.824
4	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF	1.939.028.959	1.775.227.381
Jumlah		14.288.902.064.342	18.941.858.062.022
Eliminasi		(196.010.334.104)	(198.964.968.477)
Total		14.092.891.730.238	18.742.893.093.535

a. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJPB

Utang Kepada Pihak Ketiga DJPB sebesar Rp103.373.291.426, rincian Utang Kepada Pihak Ketiga sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang IJP Bank/Pos Persepsi (termasuk Utang IJP rampung 2020)	42.241.136.000

No	Uraian	Jumlah (Rp)
2	Utang PPN RTGS/Swift Bank pada BI s.d Desember 2022	453.753.351
3	Utang suku bunga negatif bulan Desember 2022	1.476.249
4	Utang PPN BO bulan Desember 2022	23.152.030
5	Utang pembayaran kekurangan Jamkes TW IV BPJS 2022	53.356.138.139
6	Utang BO Valas bulan Desember 2022	88.725.000
7	Utang PPN RTGS BI s.d Des 22	14.194.950
8	Utang Imbal Jasa Kustodian Des 22	3.418.800
9	Utang Kekurangan Pencairan Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Triwulan IV 2022 Asabri	548.669.688
10	Utang Kekurangan Pencairan Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Triwulan IV 2022 Taspen	610.603.101
11	Utang Kekurangan Pencairan Dana Iuran Jaminan Kematian Triwulan IV 2022 Asabri	716.810.403
12	Utang Kekurangan Pencairan Dana Iuran Jaminan Kematian Triwulan IV 2022 Taspen	1.831.748.815
13	Utang Kekurangan Pencairan Belanja Pensiun Desember 2022 Taspen	316.861.287
14	Utang Kekurangan Pencairan Belanja Pensiun Desember 2022 Asabri	1.707.417.078
15	Utang Kekurangan Pencairan Belanja Pensiun KAI TW IV 2022	1.459.186.535
Jumlah		103.373.291.426

b. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJA

Utang Kepada Pihak Ketiga DJA sebesar Rp14.183.589.743.957 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga Migas	11.998.639.798.900
2	Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi	2.184.949.945.057
Jumlah		14.183.589.743.957

1) Utang Kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Jumlahnya yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.998.639.798.900. Sumber dana pembayaran kewajiban kontraktual tersebut berasal dari penerimaan migas pada Rekening Migas Nomor 600.000411980. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022
1.	PBB Migas	0
2.	Reimbursement PPN	0
3.	Pajak Air Tanah dan Air Permukaan	0
4	Pajak Penerangan Jalan	6.203.805.865
5	DMO Fee KKKS	1.634.482.801.835
6	Utang Underlifting KKKS	9.520.469.965.562
7	Utang Fee Penjualan Migas	837.483.225.638
Jumlah		11.998.639.798.900

1. PBB Migas

Pada Laporan Keuangan tahun 2022 ini tidak terdapat saldo utang yang berasal dari PBB Migas. Total tagihan awal PBB Migas tahun 2022 adalah nihil, sedangkan total tagihan yang dapat diproses pembayarannya setelah melalui tahap verifikasi dan proses pengembalian tagihan oleh Ditjen Anggaran serta penagihan kembali oleh Ditjen Pajak adalah

sebesar Rp8.584.829.806.983. Dari total tagihan yang dapat dibayarkan tersebut, penyelesaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap dan melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Migas Ke RKUN.

2. *Reimbursement* PPN

Mekanisme pembayaran reimbursement PPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. KKKS menagihkan reimbursement PPN kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas meneruskan tagihan kepada Kementerian Keuangan (dhi. Direktur Jenderal Anggaran).

Rincian utang reimbursement PPN per 31 Desember 2022 dan Desember 2021 sebesar Rp0 dan Rp11.874.338.280, adalah sebagai berikut:

No	KKKS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	EXXONMOBIL OIL INDONESIA / PHE NSB (PAPUA)	-	11.874.338.280
Jumlah		-	11.874.338.280

Utang reimbursement PPN PT Exxonmobil oil tahun 2014 sebesar Rp11.874.338.280 telah seluruhnya diselesaikan berdasarkan penerbitan SP2D Nomor 229990401000019 tanggal 21 April 2022.

Sebagai informasi, atas tagihan reimbursement PPN pada PT Exxonmobil oil tahun 2014 tertunda penyelesaiannya disebabkan adanya isu double penagihan dan isu kewenangan penagihan. Namun, atas isu tersebut sudah dikonfirmasi oleh SKK Migas bahwa tagihan tersebut belum pernah ditagihkan sebelumnya oleh SKK Migas kepada DJA dan kewenangan penagihan telah tepat dilakukan melalui BPMA.

3. Pajak Air Tanah dan Air Permukaan

Pajak Air Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi assumed and discharged yang diatur dalam PSC.

Mekanisme penyampaian tagihan permintaan pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan dan kelengkapan dokumen penagihan diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017.

Pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan untuk kegiatan usaha hulu migas melalui Rekening Migas Nomor 600.000411.980 pada Bank Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.02/2021. Per 31 Desember 2022 tidak ada saldo atas Pajak Air Tanah dan Air Permukaan.

Sepanjang periode 2022 tidak terdapat tagihan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Air Tanah (PAT) dari SKK Migas atau BPMA. Hal ini salah satunya disebabkan karena belum adanya ketentuan terkait pedoman/tata cara perhitungan besaran NPA Tanah untuk kegiatan usaha hulu Migas, yang sedang disusun oleh Kementerian ESDM dan nantinya menjadi dasar bagi Pemda dalam menetapkan besaran NPA Tanah.

4. Pajak Penerangan Jalan

Seperti halnya Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas juga merupakan pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi assumed and discharged yang diatur dalam PSC. Demikian pula halnya dengan mekanisme penyampaian tagihan dan kelengkapan dokumen penagihan serta mekanisme pembayarannya mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada Pajak Air Tanah dan Air Permukaan.

Berikut rincian saldo utang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.203.805.865 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp818.152.107.

No	Pemerintah Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kab. Tabalong	-	215.302
2	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	817.936.805
3	Kab. Berau	5.955.617.782	-
4	Kab. Barito Utara	37.077.712	-
5	Kab. Tuban	211.110.371	-
Jumlah		6.203.805.865	818.152.107

Saldo Utang Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebesar Rp6.203.805.865 telah diselesaikan seluruhnyapada bulan Januari 2023.

5. DMO Fee KKKS

Mekanisme pembayaran DMO Fee kepada KKKS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/ atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. KKKS menagihkan DMO Fee kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan (d.h.i Direktur Jenderal Anggaran). Utang DMO Fee per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar USD104,828,297 atau setara dengan Rp1.634.482.801.835 dan USD251,864,542 atau setara dengan Rp3.596.121.891.256. Nilai saldo akhir Utang DMO Fee per 31 Desember 2022 sebesar USD104,828,297, telah diselesaikan sebesar USD47,636,098 pada 8 Februari 2023 untuk DMO Fee bulan November 2022 dan sebesar USD57,192,199 pada 9 Maret 2023 untuk DMO Fee bulan Desember 2022.

6. Utang *Underlifting* KKKS

Underlifting KKKS adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor apabila dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. Saldo utang per 31 Desember 2022 adalah sebesar USD610,599,664 atau setara dengan Rp9.520.469.965.562, sedangkan saldo utang per 31 Desember 2021 adalah sebesar USD744.658.968 atau setara dengan Rp10.632.240.745.719. Saldo akhir underlifting tahun 2022 sebesar USD610,599,664 terdiri dari nilai estimasi underlifting sebesar USD609,729,473 dan nilai aktual underlifting sebesar USD870,191. Dari nilai saldo akhir utang under lifting per 31 Desember 2022 sebesar USD610,599,664.28, telah diselesaikan sebesar USD17,351,258.05 pada periode 31 Maret 2023.

Terhadap Utang atas underlifting KKKS yang masih merupakan nilai estimasi dapat disampaikan sebagai berikut:

- Terdapat nilai outstanding utang underlifting pada 4 KKKS sebesar USD12,741,153 yang tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya karena belum adanya realiasi tagihan yang disampaikan kepada Pemerintah. Keempat KKKS tersebut meliputi Inpex Mahakam, JOB Pertamina - Petrochina East Java, Pertamina Hulu Attaka, dan JOB Pertamina Talisman Jambi Merang. Berdasarkan hasil monitoring antara Ditjen Anggaran dan SKK Migas/BPMA, nilai

oustanding tersebut disebabkan karena proses terminasi kontrak yang masih berjalan dan belum disepakatinya nilai FQR Final, sehingga penyampaian realisasi tagihan dari keempat KKKS ini belum dapat dilakukan.

- Pada 2 KKKS terdapat utang *under lifting* dari tahun sebelumnya yang belum dapat diselesaikan, yaitu pada Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd dengan nilai sebesar USD117,858 dan PHE NSO dengan nilai sebesar USD1,976,608. Outstanding utang *under lifting* pada Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd disebabkan oleh adanya permasalahan dalam proses penyelesaian hak dan kewajiban Kontraktor kepada Pemerintah yang masih menunggu proses penyelesaian. Sedangkan outstanding utang *under lifting* PHE NSO belum dapat dilakukan penyelesaiannya karena masih terdapat permasalahan ketidakcukupan bagian negara untuk meng-*keptwhole* bagian KKKS sebagai dampak implementasi kebijakan HGBT, yang hingga saat ini masih dilakukan proses rekonsiliasi ulang antara hulu dan hilir untuk volume gas bumi tertentu dan harga gas bumi sesuai ketentuan terbaru dalam Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pedoman Penetapan Serta Evaluasi Pengguna Dan Harga Gas Bumi Tertentu Di Bidang Industri dan Di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum yang ditetapkan pada 13 Mei 2022.

7. Utang Fee Penjualan Migas

Utang fee penjualan Migas merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang berasal dari tagihan fee atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang telah diverifikasi, diteliti dan disepakati bersama antara DJA dan SKK Migas. Pada 31 Desember 2022 terdapat saldo utang fee penjualan migas sebesar USD53,712,367 atau ekuivalen sebesar Rp837.483.225.638 (terdapat selisih pembulatan sebesar Rp2) menggunakan kurs JISDOR per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.592. Sedangkan pada tahun 2021, saldo Utang Fee Penjualan Migas adalah sebesar USD181,843,469 (terdapat selisih pembulatan sebesar USD0.3) atau ekuivalen Rp2.596.361.055.069 menggunakan kurs JISDOR per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.278.

Utang Fee Penjualan Migas tersebut merupakan fee penjualan Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) periode September-Desember 2021 sebesar USD16,390,380 dan Januari-Agustus 2022 sebesar USD37,321,987 yang dihitung berdasarkan kriteria dan besaran tarif imbalan (fee) penjualan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri ESDM

Nomor 7.K/MG.05/MEM.M/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 21.K/MG.05/MEM.M/2022. Atas Utang Fee Penjualan MMKBN periode September-Desember 2021 dan Januari-Agustus 2022 dimaksud telah dilakukan penyelesaian pembayarannya melalui nota dinas Direktur Jenderal Anggaran nomor ND-37/AG/2023 tanggal 19 Januari 2023.

b. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PANAS BUMI

Utang kepada pihak ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (reimbursement) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi.

Pada Neraca, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (reimbursement PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga reimbursement PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi.

Utang kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp1.988.939.610.953 terdiri dari utang pihak ketiga panas Bumi sebesar Rp2.184.949.945.057 ditambah eliminasi sebesar minus Rp196.010.334.104. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi- <i>reimbursement</i> PPN *	517.482.177.628
2	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-PBB Panas bumi	-
3	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-penggantian bonus produksi **	55.629.004.186
4	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- <i>reimbursement</i> PPN *	1.094.461.665.255
5	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- PBB	321.366.763.884
6	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi	-
7	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	196.010.334.104
8	Total (1+2+3+4+5+6+7)	2.184.949.945.057
	Eliminasi	(196.010.334.104)
	Total Akhir	1.988.939.610.953

c. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJKN

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp4.113.878.824. Seluruh kewajiban pembayaran penggantian biaya dan margin IP PEN yang menjadi saldo pada tahun 2021 audited telah dibayarkan kepada para Pelaksana Investasi selama tahun 2022.

d. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – BKF

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.939.028.959 dan Rp1.775.227.381. Besaran nilai utang kepada pihak ketiga dalam rupiah meningkat dikarenakan perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (EURO dan USD).

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tanggal	USD	EUR
31 Desember 2022 (kurs penutup)	Rp15.592	Rp16.608,60
31 Desember 2021 (kurs tengah BI)	Rp14.278	Rp16.156,27

Pada laporan keuangan terdapat saldo awal utang jangka pendek yang disebabkan oleh kekurangan pembayaran kontribusi dan trust fund akibat selisih kurs karena pagu anggaran yang tidak mencukupi dan/atau karena terdapat pengurangan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak Organisasi Internasional (OI) akibat adanya biaya transfer bank (*bank charges*).

Utang tersebut berasal dari transaksi pembayaran sejak awal dibentuknya BA BUN 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus) BKF-PKPPIM (Kode Satker: 984438) tahun 2014. Sampai dengan tahun 2022, PKPPIM dalam proses melakukan konfirmasi kepada masing-masing focal point. Adanya saldo awal utang jangka pendek tersebut akan menimbulkan pendapatan atau kerugian selisih kurs yang belum terealisasi.

Pada saldo awal utang jangka pendek yang berasal dari ISFD, GCF, dan APTCF berasal dari akumulasi kurang bayar akibat selisih kurs antara anggaran dan pada saat pembayaran sehingga mengakibatkan kurangnya pagu anggaran saat pembayaran. Sedangkan pada saldo awal utang jangka pendek yang berasal dari OI lainnya diakibatkan adanya pengurangan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak OI akibat adanya biaya transfer bank (*bank charges*).

D.2.2.1.3. UTANG BUNGA

Utang
Bunga

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp97.401.735.689.433** dan **Rp85.472.157.396.255**. Utang Bunga terdiri dari:

Uraian	Utang Biaya Pinjaman 31 Desember 2022	Utang Biaya Pinjaman 31 Desember 2021
Utang Bunga Luar Negeri	5.593.565.712.511	2.179.149.350.636
Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	150.623.558.002	114.632.364.171
Utang Bunga Dalam Negeri	91.657.546.418.920	83.178.375.681.448
Jumlah	97.401.735.689.433	85.472.157.396.255

Utang Bunga Luar Negeri Tahun 2022 sebesar Rp5.593.565.712.511 mengalami kenaikan sebesar 156,69% dari Tahun 2021 sebesar Rp2.179.149.350.636, terdiri dari Utang Bunga/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman sebagaimana berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Bunga Pinjaman Program	3.231.531.081.596	1.080.059.190.840
Utang Bunga Pinjaman Proyek	2.201.922.166.211	1.099.090.159.796
Utang Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	9.810.121.334	0
Utang Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	150.302.343.370	0
Jumlah	5.593.565.712.511	2.179.149.350.636

Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2022 sebesar Rp150.623.558.002 mengalami kenaikan sebesar 31,40% dari Tahun 2021 sebesar Rp114.632.364.171.

Utang Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp91.657.546.418.920 meningkat 10,19% dibanding Tahun 2021. Utang Bunga SBN Tahun 2022 di dalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah, penerimaan imbalan diterima di muka SBSN Jangka Panjang dan penerimaan utang bunga obligasi negara-valuta asing yang belum dibayarkan sebesar Rp1.532.607.615.745.

Akibat adanya sanksi pembatasan transaksi dan penutupan SWIFT terhadap entitas utama di Rusia, Kementerian Keuangan Rusia menyampaikan kebijakan pemberian penangguhan pembayaran utang sementara untuk Pemerintah Indonesia. Akibat penundaan tersebut, terdapat pembayaran bunga yang ditunda pembayarannya sebesar USD 2,90 juta sesuai dengan tabel sebagai berikut:

LOAN_ID	MTU	POKOK	BUNGA	TOTAL
23901000	USD	2.125.000	226.501	2.351.501
23902000	USD	2.384.250	317.668	2.701.918
23903000	USD	2.380.000	380.522	2.760.522
23904000	USD	127.500	20.385	147.885
23906000	USD	2.295.000	489.243	2.784.243
23907000	USD	212.130	45.222	257.352
23908000	USD	4.845.000	1.420.164	6.265.164
Grand Total		14.368.880	2.899.705	17.268.585

D.2.2.1.4. UTANG SUBSIDI

Utang Subsidi

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp15.233.102.271.564**. Jumlah Utang Subsidi tersebut, Rp11.325.761.613.426 (289,86%) lebih besar dari Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp3.907.340.658.138**. Kenaikan tersebut disebabkan karena terdapat penambahan utang subsidi pada Tahun 2022.

Terdapat Utang Subsidi Estimasi dikarenakan terdapat tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud, yaitu pada Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

NO.	K/L	JUMLAH		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Keuangan	2.177.773.329.663	138.797.358.298	2.038.975.971.365	1.469,03
2	Perhubungan	560.887.183.498	0	560.887.183.498	100
3	PUPR	454.467.613	26.745.363.911	-26.290.896.298	-98,30
4	KUKM	12.493.964.459.630	3.741.797.935.929	8.752.166.523.701	233,90
5	Kemendag	22.831.160	0	22.831.160	100
	Jumlah	15.233.102.271.564	3.907.340.658.138	11.325.761.613.426	289,99

1. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN KEUANGAN

Saldo Utang Subsidi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.177.773.329.663 dan sebesar Rp138.797.358.298 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.038.975.971.365 (1.469,03%). Rincian utang subsidi disajikan pada tabel berikut:

Rincian utang jangka pendek disajikan pada tabel berikut.

Utang Subsidi	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DJA	2.089.390.848.390	0	2.089.390.848.390	100
DJPPR	88.343.565.059	114.931.652.083	(26.588.087.024)	(23,13)
DJPB	38.916.214	23.865.706.215	(23.826.790.001)	(99,84)
Total	2.177.773.329.663	138.797.358.298	2.038.975.971.365	1.469,03

a. DJA

Utang subsidi pada satker Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp2.089.390.848.390,00 merupakan reklasifikasi utang jangka panjang menjadi jangka pendek untuk penyelesaian pembayaran sebagian utang subsidi listrik Tahun 2022 berdasarkan LHP BPK AKN VII Audited.

b. DJPPR

Utang subsidi jangka pendek IJP pada Satker DJPPR sebesar Rp88.343.565.059 merupakan Utang Subsidi-Estimasi periode Desember 2022 yang terdiri dari PT Askindo sebesar Rp45.505.768.773 dan PT Jaskindo sebesar Rp42.837.796.286. Utang subsidi estimasi tersebut akan dibayarkan setelah Tahun 2022.

c. DJPB

Utang subsidi pada satker Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp38.916.214,00, saldo Utang Subsidi tersebut merupakan tagihan subsidi atas periode penyaluran, Tahun 2019 sebesar Rp24.919.705, dan Tahun 2020 sebesar Rp13.996.509 yang hingga penyusunan laporan keuangan ini belum dibayarkan/diterbitkan SP2D-nya.

2. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Utang Subsidi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp560.887.183.498 dan Rp0. Nilai Utang Subsidi tersebut berasal dari Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp493.414.776.938 yang merupakan hasil audit BPK RI atas pelaksanaan PSO PT KAI, dan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp67.472.406.560 yang merupakan hasil audit BPK RI atas pelaksanaan PSO PT PELNI.

3. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PUPR

Utang Subsidi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp454.467.613 dan Rp26.745.363.911. Utang subsidi terdiri dari:

1. Utang Subsidi sebesar Rp20.000.000 merupakan Utang Subsidi pada Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan. Jumlah tersebut adalah dana subsidi yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan

dan masih tercatat di rekening RPL bank yang bersangkutan pada 31 Desember 2022.

2. Utang sebesar Rp434.467.613 merupakan utang subsidi – estimasi pada Ditjen Cipta Karya yang merupakan estimasi tagihan subsidi bulan September s.d. Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	PDAM	UTANG SUBSIDI ESTIMASI				
		Sep-22	Okt-22	Nov-22	Des-22	Total
1	Kota Banjarmasin	24.264.706	1.617.647	-	-	25.882.353
2	Kota Denpasar	21.862.640	22.591.394	21.862.640	22.445.643	88.762.317
3	Kota Palopo	18.722.588	19.346.674	18.722.588	19.211.549	76.003.399
4	Kab. Cilacap	12.238.556	12.646.508	12.238.556	12.646.508	49.770.128
5	Giri Menang	32.122.090	33.192.826	32.122.090	32.835.914	130.272.920
6	Kab. Banyumas	16.543.814	16.505.738	15.401.548	15.325.396	63.776.496
TOTAL						434.467.613

utang subsidi bulan September – Desember 2022 sebesar Rp434.467.613 akan dibayarkan pada periode April 2023 untuk 6 PDAM.

4. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Utang Subsidi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp12.493.964.459.630 dan Rp3.741.797.935.929. Terdapat kenaikan sebesar Rp8.752.166.523.701 dari Tahun 2021 atau 233,90%. Kenaikan kewajiban disebabkan pada TA 2022 pengajuan penambahan anggaran tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.493.964.459.630 tersebut merupakan Utang Subsidi berdasarkan tagihan-tagihan subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang sudah dilakukan verifikasi dan telah terbit Berita Acara Verifikasi, dengan rincian per penyalur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Nama Penjamin / Penyalur	Rincian Utang
1	BRI	9.412.835.940.327
2	Mandiri	1.492.586.675.480
3	BNI	1.114.467.008.668
4	Bank KB Bukopin	497.830.592
5	OCBC-NISP	6.578.123
6	Bank Artha Graha	2.820.126
7	BPD Bali	11.694.698.093

No	Nama Penjamin / Penyalur	Rincian Utang
8	BPD DI Yogyakarta	6.473.561.546
9	BPD Sulselbar	1.476.821.385
10	BPD Jateng	75.309.850.346
11	BPD Sumut	19.172.589.769
12	Bank Riau Kepri Syariah	7.680.390.802
13	Bank Nagari	13.313.167.363
14	Bank Sinarmas	13.488.117.902
15	BPD NTB Syariah	360.111
16	BCA	3.316.535.758
17	BPD Kalbar	3.022.147.479
18	Bank Permata	46.674.792
19	Bank Jabar Banten (BJB)	50.694.847.600
20	BPD Papua	2.180.612.628
21	BPD NTT	275.302.502
22	BPD Kalsel	4.204.299.138
23	BPD Jambi	1.905.831.175
24	Bank Raya Indonesia	338.001.258
25	BPD Lampung	5.455.638.856
26	Bank Syariah Indonesia	182.748.521.812
27	BPD Bengkulu	493.594.531
28	Kospin Jasa	1.502.438.551
29	BPD Sumsel Babel	13.402.992.106
30	BPD Kalteng	472.344.038
31	BTN	6.222.265.133
32	Kopdit Obor Mas	568.435.785
33	BPD Kaltimara	2.864.270.131
34	BPD Sulawesi Tenggara	677.893.168
35	KSP Guna Prima Dana	268.004.522
36	Bank Nationalnobu	2.363.266.528
37	BPD SulutGo	1.305.669.404
38	Bank Jatim	25.637.480.473
39	Bank OKI	9.716.510.696
40	PT Pegadaian	4.936.106.339
41	Bank INA Perdana	142.298.320
42	Bank Aceh Syariah	162.990.156
43	BPR Indra Candra	32.998.965
44	BPR Agung Sejahtera	77.153
Jumlah		12.493.964.459.630

Berdasarkan hasil audit BPK RI (NKF Nomor NKF-107/999.07/PB.06/2023 tanggal 20 Mei 2023) terdapat koreksi kelebihan bayar subsidi bunga KUR Reguler (pelunasan utang subsidi pada tahun 2023) atas debitur yang tidak eligible yang akan diperhitungkan pada perhitungan tagihan periode selanjutnya yaitu:

- BRI sebesar Rp308.865.169
- Bank Mandiri sebesar Rp44.151.951
- BNI sebesar Rp4.223.213.814
- BSI sebesar Rp429.518.891

5. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Utang Subsidi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp22.831.160 dan Rp0. Terdapat kenaikan sebesar Rp22.831.160 dari Tahun 2021 atau 100%.

D.2.2.1.5. UTANG TRANSFER

*Utang
Transfer*

Jumlah Utang Transfer per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp49.842.043.112.377** dan **Rp40.517.736.709.001**. Jika dibandingkan neraca Tahun 2021 Audited, Kewajiban pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.324.306.403.376 atau 23,01%. Kenaikan ini disebabkan penyelesaian kewajiban pada periode Tahun 2022. Kewajiban yang disajikan dalam Neraca Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

(dalam rupiah)

Jenis Kewajiban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban TKD	4.134.863.367.428	110.719.821.377
Kewajiban TKD Estimasi	45.707.179.744.949	40.407.016.887.624
TOTAL	49.842.043.112.377	40.517.736.709.001

1. KEWAJIBAN TKD

Kewajiban transfer ke Daerah yang disajikan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sejumlah Rp4.134.863.367.428 dan Rp110.719.821.377 sebagaimana rincian pada Tabel berikut. Jika dibandingkan dengan neraca Tahun 2021 *Audited*, Kewajiban TKD pada Tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp4.024.143.546.051 atau 3.634,533%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan piutang DBH.

Rincian	Nilai
DBH	3.968.894.493.111
DAK Non fisik	165.968.874.317
Total	4.134.863.367.428

1. Kewajiban TKD Satker DBH

Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar (Transfer Dana Perimbangan YMHD) merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Transfer Dana Perimbangan YMHD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Daerah atas Kurang Bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. Nilai Kewajiban Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar per tanggal 31 Desember TA 2022 sebesar Rp3.968.894.493.111 atau naik 100% dibandingkan dengan 31 Desember TA 2021.

Saldo akhir Kurang Bayar Dana Bagi Hasil per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp0 atau nihil. Kemudian melalui PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 Pemerintah menetapkan Kurang Bayar Kurang Bayar DBH TA 2021 sebesar Rp41.868.894.493.111. Selanjutnya pada Bulan September 2022 Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 yang menjadi dasar penyaluran Kurang Bayar DBH TA 2021 sebesar Rp12.342.146.957.860. Pada bulan Oktober 2022 melalui KMK Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH Penyelesaian Lebih Bayar DBH Periode Kedua pada Tahun 2022, Pemerintah menyalurkan Kurang Bayar DBH TA 2021 sebesar Rp10.555.113.923.289. Dan pada akhir tahun 2022 Kementerian Keuangan menetapkan KMK Nomor 46/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH periode Ketiga pada Tahun 2022 untuk menyalurkan Kurang Bayar DBH TA 2021 sebesar Rp15.002.739.118.851 sehingga sisa saldo Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 adalah Rp3.968.894.493.111.

No	Transaksi	Jumlah
1.	Kewajiban DBH TA 2021 Audited	0
2.	Penetapan kewajiban DBH TA 2021 berdasarkan PMK No. 127/PMK.07/2022	41.868.894.493.111

No	Transaksi	Jumlah
3.	Penyelesaian kewajiban DBH TA 2021 berdasarkan KMK No. 29/KM.7/2022	(12.342.146.957.860)
4.	Penyelesaian kewajiban DBH TA 2021 berdasarkan KMK No. 37/KM.7/2021	(10.555.113.923.289)
5.	Penyelesaian kewajiban DBH TA 2021 berdasarkan KMK No. 46/KM.7/2022	(15.002.739.118.851)
Total		3.968.894.493.111

2. Kewajiban TKD Satker DAK Non Fisik

Nilai kewajiban Transfer DAK Nonfisik sebagaimana tersaji pada Neraca Satker Transfer DAK Nonfisik per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp165.968.874.317. dan Rp110.719.821.377. Nilai tersebut naik sebesar Rp55.249.052.940 atau 49,90% apabila dibandingkan dengan LKTD TA 2021 Audited. Nilai tersebut merupakan saldo Utang Transfer DAK Nonfisik yang terdiri dari saldo utang DAK Nonfisik TA 2021 Audited, penyesuaian utang DAK Nonfisik TA 2021 Audited Per 31 Desember 2022, pengakuan utang DAK Nonfisik atas kurang salur Dana TPG ASND, Dana TKG ASND, dan Dana Tamsil ASND di RKUD pada TA 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai dengan Nota Dinas Penyampaian Data dan Informasi DAK Nonfisik Nomor ND-413/PK.3/2022, ND-708/PK.3/2022, ND-64/PK.3/2023 dan ND-215/PK.3/2023.

No	Transaksi	Jumlah (Rp)
1.	Utang DAK Nonfisik TA 2021 Audited	110.719.821.377
2.	Penyesuaian utang DAK Nonfisik TA 2021 Audited Per 31 Desember 2022	(120.070.443.746)
3.	Pengakuan utang DAK Nonfisik atas kurang salur DAK Nonfisik di RKUD pada TA 2021 sampai dengan 31 Desember 2022	175.319.496.686
Total		165.968.874.317

Penyesuaian utang DAK Nonfisik TA 2021 Audited Per 31 Desember 2022 sebesar Rp120.070.443.746 merupakan penyesuaian atas utang DAK Nonfisik yang diakui pada TA 2021 Audited dan disesuaikan pada Tahun 2022 Bulan Juni, September dan Desember 2022 sesuai dengan Nota Dinas Penyampaian Data dan Informasi DAK Nonfisik Nomor ND-413/PK.3/2022, ND-708/PK.3/2022, ND-64/PK.3/2023 dan ND-215/PK.3/2023.

No	Transaksi	Jumlah (Rp)
1	Penyesuaian utang TAYL atas Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	13.546.412.158

No	Transaksi	Jumlah (Rp)
2	Penyesuaian utang TAYL atas Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	9.616.252.521
3	Penyesuaian utang TAYL atas Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	96.907.779.067
Total		120.070.443.746

Pengakuan utang DAK Nonfisik atas Sisa Dana TAYL di RKUD pada TA 2022 sebesar Rp175.319.496.686 sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan Kurang Salur DAK Nonfisik TAYL yang baru diketahui dan diakui pada Bulan Juni, September dan Desember 2022 setelah Audited 2021 sesuai dengan Nota Dinas Penyampaian Data dan Informasi DAK Nonfisik Nomor ND-413/PK.3/2022, ND-708/PK.3/2022, ND-64/PK.3/2023 dan ND-215/PK.3/2023.

Pengakuan Utang DAK Nonfisik TA 2021 Audited pada TA 2022 sebagai berikut:

No	Transaksi	Jumlah (Rp)
1	Pengakuan utang atas Dana Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	39.496.958.668
2	Pengakuan utang atas Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	36.926.919.345
3	Pengakuan utang atas Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	98.895.618.673
Total		175.319.496.686

Utang DAK Nonfisik per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

No	Jenis Dana	Utang atas Kurang Salur Dana Tunjangan Guru Tahun 2022
1	TPG ASND	52.585.123.249
2	TKG PNSD	37.952.927.237
3	Tamsil Guru PNSD	75.430.823.831
Total		165.968.874.317

Rincian Utang Transfer disajikan pada [lampiran LD25c](#)

2. KEWAJIBAN TKD ESTIMASI

Kewajiban TKD Diestimasi - DBH per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp45.707.179.744.949, apabila dibandingkan dengan Kewajiban TKD-Diestimasi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.407.016.887.624, Kewajiban TKD-Diestimasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5.300.162.857.325 atau 13%. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada tahun 2022 meningkat sehingga potensi/estimasi Kurang Bayar pada Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi.

D.2.2.1.6. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

*Bagian
Lancar
Utang
Jangka
Panjang*

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp524.941.666.493.795** dan **Rp400.156.608.631.936**. Saldo tersebut merupakan reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. *Unamortized Discount* sebesar **minus Rp414.105.480.000** dan *Unamortized Premium* sebesar **Rp795.587.678.000**.

Akun	Uraian	Jumlah	
		Tahun 2022	Tahun 2021
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	524.941.666.493.795	400.156.608.631.936
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	85.328.172.549.984	80.968.594.103.233
216112	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	3.534.774.838.832	2.127.257.809.455
216121	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	159.631.684.170.979	136.619.003.563.248
216131	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing	82.383.552.934.000	54.943.415.156.000
216141	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	174.573.482.000.000	95.514.538.000.000
216151	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing	19.490.000.000.000	29.983.800.000.000
	<i>Unamortized Discount</i>	(414.105.480.000)	(58.354.649.000)
213122	<i>Discount</i> Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	(383.383.489.000)	(38.420.148.000)

Akun	Uraian	Jumlah	
		Tahun 2022	Tahun 2021
213124	<i>Discount</i> Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing	(20.830.004.000)	(3.642.143.000)
213126	<i>Discount</i> Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	(9.891.987.000)	(16.292.358.000)
<i>Unamortized Premium</i>		795.587.678.000	127.025.791.000
213131	<i>Premium</i> Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.	45.332.293.000	125.518.783.000
213133	<i>Premium</i> Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	750.255.385.000	1.507.008.000

Dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri, termasuk didalamnya penundaan pembayaran pokok utang kepada *Lender* Rusia, namun atas penundaan tersebut pihak Rusia tidak memperlakukan sebagai tunggakan.

Akibat adanya sanksi pembatasan transaksi dan penutupan SWIFT terhadap entitas utama di Rusia, *Lender* Rusia menyampaikan kebijakan pemberian penangguhan pembayaran utang sementara untuk Pemerintah Indonesia. Akibat penundaan tersebut, terdapat pembayaran pokok yang ditunda pembayarannya sebesar USD 14,37 juta sesuai dengan tabel sebagai berikut:

LOAN_ID	MTU	POKOK	BUNGA	TOTAL
23901000	USD	2.125.000	226.501	2.351.501
23902000	USD	2.384.250	317.668	2.701.918
23903000	USD	2.380.000	380.522	2.760.522
23904000	USD	127.500	20.385	147.885
23906000	USD	2.295.000	489.243	2.784.243
23907000	USD	212.130	45.222	257.352
23908000	USD	4.845.000	1.420.164	6.265.164
Grand Total		14.368.880	2.899.705	17.268.585

Rincian Bagian Lancar utang SBN dan Pinjaman termuat pada [Lampiran LD26, LD27, LD27a, LD28, dan LD29](#).

D.2.2.1.7. UTANG SURAT BERHARGA NEGARA – JANGKA PENDEK

Utang
Surat
Berharga
Negara –
Jangka
Pendek

Utang Surat Berharga Negara – Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp49.028.000.000.000** dan **Rp42.305.000.000.000** dengan *Unamortized Discount* sebesar minus **Rp548.373.999.000**

Akun	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Utang Surat Berharga Negara – Jangka Pendek		49.028.000.000.000	42.305.000.000.000
217111	Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah	47.255.000.000.000	37.305.000.000.000
217132	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.773.000.000.000	5.000.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(548.373.999.000)	(337.659.241.000)
213121	<i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah	(535.810.411.000)	(317.207.375.000)
213125	<i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Rupiah	(12.563.588.000)	(20.451.866.000)

D.2.2.1.8. UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PENDAPATAN

Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp0** dan **Rp1.540.939** yang sepenuhnya berasal dari utang kelebihan pembayaran TNP dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bank	Periode	Jumlah	Keterangan
1	Bank Bukopin	2013	666.041	Tidak akan memintakan kembali
2	Bank Aceh	2013	148.532	Tidak akan memintakan kembali
3	Bank Aceh	2016	1.731	Tidak akan memintakan kembali
4	BPD Papua	2016	1.147	Tidak akan memintakan kembali
5	Bank DKI	2018	603.319	Tidak akan memintakan kembali
6	BPD Kalbar	2019	120.167	Tidak akan memintakan kembali
7	Pembulatan		2	-
8	Penghapusan	2022	1.540.939	Penghapusan utang
Total Utang			0	

Atas kelebihan pembayaran TNP tersebut, Dit. PKN telah melakukan konfirmasi kepada Bank DKI dan Bank Kalbar, Bank Aceh, Bank Papua dan Bank Bukopin melalui Surat Direktur PKN nomor S-65/PB.3/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan nomor S-69/PB.3/2022 tanggal 21 Februari 2022 hal Konfirmasi Kelebihan Setoran Treasury Notional Pooling (TNP). Atas surat konfirmasi tersebut, Bank Bukopin, Bank Aceh, Bank Papua, Bank DKI dan Bank Kalbar sudah menyampaikan Surat Pernyataan bahwa tidak akan memintakan kembali atas kelebihan atas setoran TNP tersebut. Sehingga total utang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.

D.2.2.1.9. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp23.352.703.695** dan **Rp49.141.853.254**.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNB. Pendapatan diterima dimuka terdiri dari:

1. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas pada SKK Migas, Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.024.529.080 sebagaimana tabel berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	39.261.997.862
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA-PB	32.237.468.782
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	7.024.529.080
Mutasi Kurang:	32.237.468.782
Penutupan Saldo Pendapatan Diterima Di Muka Tahun 2021	32.237.468.782
Saldo pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2022	7.024.529.080

2. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas pada BPMA, Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2022 Rp139.737.722 sebagaimana tabel berikut:

Saldo 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	139.737.722
Penerimaan sewa tahun 2022	139.737.722
Mutasi Kurang:	0
Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka tahun 2022	0
Saldo pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2022	139.737.722

3. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.997.847.288 dan sebesar Rp5.859.512.288 yang berasal dari:
 - a. Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.859.512.288
 - b. Mutasi tambah sebesar Rp15.000.000 yang merupakan uang muka sewa atas pemanfaatan BMN PKP2B pada PT Kaltim Prima Coal oleh PT PLN (Persero) berupa tanah untuk tapak tower dan jalur span ROW yang tersebar di 8 (delapan) titik pada area lahan konsesi PKP2B PT KPC.
 - c. Mutasi kurang sebesar Rp1.876.665.000 yang merupakan pengakuan PNPB atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal pada tahun 2022.
 - d. Saldo Akhir 31 Desember 2022 Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp3.997.847.288.
4. Pendapatan Diterima di Muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI, nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.997.277.913, sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.104.525.610 dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENYEWA	SISA BULAN	PDDM
1	Srijati Pohan II	2	4.166.667
2	Robby Mesa Nura	9	8.250.000
3	William Tanoto	11	16.225.000
4	William Tanoto	11	44.275.000
5	PT Graha Wisata Sukses	9	506.250.000
6	Fitriansyah Pratama Putra	14	3.033.333
7	Milyardi Salim	18	18.868.500
8	Milyardi Salim	17	51.664.417
9	TB Muhammad Syamún	19	32.458.333
10	Sukanto Yuwono, Yayasan Syalom Probolinggo	23	103.883.333
11	Taupik Rahmat	18	5.250.000
12	Budiyanto Sartono	20	19.500.000
13	Budiyanto Sartono	20	19.000.000
14	Yanti	20	17.333.333

NO	PENYEWA	SISA BULAN	PDDM
15	Kurniawan	21	6.125.000
16	Dewi Sulastri	24	80.800.000
17	Bambang Sungkono	1	9.583.333
18	William Tanoto	26	80.600.000
19	Ng Deni	26	162.500.000
20	Dra. Hj. Srijati Pohan M.Psi (Perpanjangan)	26	151.666.667
21	Milyardi Salim	26	19.110.000
22	Milyardi Salim	26	15.600.000
23	Denny Sumantri	29	79.750.000
24	Faidul Wahab	30	111.000.000
25	Kuswinarti	32	74.666.667
26	Yayasan Perg. Tinggi H. Agus Salim	8	24.045.333
27	Jonathan Wijaya	34	77.916.667
28	Ketua Jemaat GMAHK Di Indonesia (Jemaat Koinonia)	33	34.375.000
29	Ricky Wijaya (PT Siap Kirim)	33	82.500.000
30	Firman	33	59.400.000
31	Jonathan Wijaya	33	66.000.000
32	Syafrudin Mr	34	21.675.000
33	Direktur Utama Pt. Geotronix Pratama Indonesia	12	115.000.000
34	Sugiyanto (Ketua Rw 11)	12	500.000
35	H. Mohammad Suman	36	24.000.000
36	Syahrul	36	64.800.000
37	Karina Santoso (Dir CV. Tirtamas Kreasitama P.)	37	123.456.667
38	Sugiyanto (Ketua RW 11)	12	1.646.150
39	Ahmad Kosasih	9	16.500.000

NO	PENYEWA	SISA BULAN	PDDM
40	Rd. Kartono Dwidjosewojo/Dir. PT Atra Widiya Agung	4	2.933.333
41	Mukhammad Ervan S.	4	481.079
42	Iting Sarwati	41	67.226.333
43	Ricky Wijaya	100	100.000.000
44	Ricky Wijaya	100	175.000.000
45	Wahid Asngari	103	21.458.333
46	H. Samsul, S.E.	18	13.500.000
47	Ricky Wijaya	100	35.000.000
48	Dayat Sudaryono	8	5.408.000
49	Sari Setiyawati	8	2.666.667
50	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama Pariwara)	46	70.291.833
51	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama P.)	46	35.147.833
52	Ricky Wijaya	100	33.333.333
53	Dede Ajat	44	19.470.000
54	Narsan	106	11.660.000
55	Ricky Wijaya	100	35.000.000
56	Bank Nagari Payakumbuh	47	63.939.583
57	Yorni Wahid	47	7.833.333
58	Kusmantono	1	365.083
59	Ricky Wijaya	100	33.333.333
60	H. Samsul, S.E.	109	84.475.000
61	Dahlan	53	158.046.000
62	Ricky Wijaya	100	35.966.667
63	Ricky Wijaya	100	34.254.167
64	Samsul Roman	3	1.250.000
65	Ricky Wijaya	100	35.966.667
66	Mukhammad Ervan S.	53	2.463.984

NO	PENYEWA	SISA BULAN	PDDM
67	PT Indomarco Prismatama Makassar	53	641.803.500
68	Nurhadi	2	150.667
69	Muchtazan	2	201.000
70	Rudiono	2	45.167
71	Wahidin	2	301.500
72	Ridho Azhari	53	11.077.000
73	Ricky Wijaya	100	34.254.167
74	Zaemubah	2	45.167
75	Carito Adi Prabowo	2	139.000
76	Jamal	5	127.083
77	Vinorita Arifin	8	804.000
78	Vinorita Arifin	8	1.286.667
79	Rudiono	2	199.000
80	Ahmad Kosasih	39	36.192.000
81	Dra. Hj. Srijati Pohan, M.Psi.	50	108.129.167
82	Buyung	31	53.185.667
83	Suliono	55	130.625.000
84	Agung Huda Saputra	8	582.000
85	LB LIA Payakumbuh	31	210.347.917
86	Kino	8	9.720.000
87	Ahmad Taufiq	8	11.816.667
88	Nurbaiti	8	12.889.333
89	Tsjoe Eng Siong	9	13.282.500
90	Herlina	9	1.500.000
91	Ella Widiastuty	22	12.512.500
92	Agus Kusniadi	17	16.382.333
93	ST. Rohmah	22	7.241.667
94	Syarif Chanafi	12	52.455.000

NO	PENYEWA	SISA BULAN	PDDM
95	Abdul Basid SP	59	130.137.283
96	William Wijaya	24	60.000.000
JUMLAH			4.997.277.913

5. Pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, nilai Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai Kewajiban hingga Tahun 2022 adalah senilai Rp2.706.210.783 (dua miliar tujuh ratus enam juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) yaitu kewajiban jangka pendek yang merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga untuk kompensasi ABMA/T namun belum dapat diterbitkan KMK pelepasan ABMA/T sampai dengan Semester I Tahun 2022, yang berasal dari nilai saldo akhir kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.286.911.000, dengan rincian sebagai berikut:

- a. ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Veteran Palopo sebesar Rp100.000.000;
- b. ABMA/T Rumah Sakit Bersalin Sentosa di Provinsi Sulawesi Selatan secara bertahap sebanyak 99 kali selama 11 tahun sejak tahun 2002 s.d. 2011 sebesar Rp2.186.911.000.

Ditambah dengan kewajiban yang berasal dari nilai pembayaran/pelunasan kompensasi ABMA/T yang dilakukan sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp7.469.190.983 (tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. ABMA/T Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT) Pangkalan Susu (d.h ST dan STM) di Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Berkala Pertama sebesar Rp23.528.890;
- b. ABMA/T Tanah dan Bangunan Penguasaan Alm. Hj. Nur Salim (d.h Kantor Koramil Bulakamba) di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.380.465.000;
- c. ABMA/T Tempat Tinggal (d.h Pertokoan) atas nama R. Thiagu Rajen di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp316.283.000;
- d. ABMA/T Tempat Tinggal Shanlunt (d.h Pertokoan) atas nama Shanlunt di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp316.283.000;
- e. ABMA/T Tempat Tinggal dan Tempat Usaha (d.h Pertokoan) atas nama Djulyta di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp349.286.000;
- f. ABMA/T Tempat Tinggal Henry Pin (d.h Pertokoan) atas nama Henry Pin di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp338.285.000;

- g. ABMA/T Ruko dan Tempat Tinggal (d.h Pertokoan) atas nama Tumini Als To Moy Nai di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp338.285.000;
 - h. ABMA/T Tempat Tinggal Mustafa Tantono (d.h Pertokoan) atas nama Mustafa Tantono di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp338.385.000;
 - i. ABMA/T Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT) Pangkalan Susu (d.h ST dan STM) di Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Berkala Kedua sebesar Rp23.528.890;
 - j. ABMA/T SD Harapan di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp65.809.800;
 - k. ABMA/T Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT) Pangkalan Susu (d.h ST dan STM) di Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Berkala Ketiga sebesar Rp23.528.890;
 - l. ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pembayaran Berkala Pertama sebesar Rp95.696.113;
 - m. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Budiyanto (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp16.920.000;
 - n. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Jimmy Hartono (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp22.842.000;
 - o. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Liong Mung Kian (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp18.733.000;
 - p. ABMA/T Universitas Muhammadiyah Makasar (d.h Universitas Muhammadiyah dan SDN Ranggong) di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp3.606.809.400;
 - q. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Lie Jun (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp35.569.000;
 - r. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Lie Bun Fan (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp24.171.000;
 - s. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Wie Lim (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp37.131.000;
 - t. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Nyuk Min (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp37.344.000;
 - u. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Fie Sian (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp22.237.000;
 - v. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Cham A Moi (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp19.337.000;
 - w. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Lie Ki Sang (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp18.733.000.
- Nilai tersebut selanjutnya dikurangi dengan nilai kompensasi atas ABMA/T yang diselesaikan/diterbitkan KMK pelepasan sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp7.049.891.200 dengan rincian sebagai berikut:

- a. ABMA/T Tanah dan Bangunan Penguasaan Alm. Hj. Nur Salim (d.h Kantor Koramil Bulakamba) di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.380.465.000;
- b. ABMA/T Tempat Tinggal (d.h Pertokoan) atas nama R. Thiagu Rajen di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp316.283.000;
- c. ABMA/T Tempat Tinggal Shanlunt (d.h Pertokoan) atas nama Shanlunt di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp316.283.000;
- d. ABMA/T Tempat Tinggal dan Tempat Usaha (d.h Pertokoan) atas nama Djulyta di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp349.286.000;
- e. ABMA/T Tempat Tinggal Henry Pin (d.h Pertokoan) atas nama Henry Pin di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp338.285.000;
- f. ABMA/T Ruko dan Tempat Tinggal (d.h Pertokoan) atas nama Tumini Als To Moy Nai di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp338.285.000;
- g. ABMA/T Tempat Tinggal Mustafa Tantono (d.h Pertokoan) atas nama Mustafa Tantono di Provisi Sumatera Utara sebesar Rp338.385.000;
- h. ABMA/T SD Harapan di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp65.809.800;
- i. ABMA/T Universitas Muhammadiyah Makasar (d.h Universitas Muhammadiyah dan SDN Ranggong) di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp3.606.809.400;

Dengan demikian membentuk nilai kewajiban sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.706.210.783.

6. Pada UAKPA BUN TK BMN Eks Pertamina, Jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp589.100.909 merupakan pendapatan diterima dimuka yang akan berubah menjadi pendapatan pada tahun 2023. Komponennya adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat aset yang telah laku lelang sebesar Rp323.000.000 (SK 05/KM.6/KN.3/2022 dan 06/KM.6/KN.3/2022) berupa bongkaran bangunan gudang Cirebon dan scrap Majalengka namun belum dilakukan BAST dengan pembeli.
 - b. Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Palembang Rp9.150.000.
 - c. Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Palembang untuk KCP Prabumulih Rp69.060.000.
 - d. Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Sudirman untuk aset yang berada di Jalan Cemara Rp136.600.000.
 - e. Pendapatan diterima di muka dari sewa penyediaan infrastruktur PT PLN untuk aset yang berada di Cirebon Rp1.900.000.
 - f. Pendapatan diterima di muka dari sewa Bass Oil Sukananti Limited Rp49.390.909.

7. Saldo pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp3.898.000.000 dan Rp25.050.575, Tahun 2022 merupakan PNBP Migas Lainnya atas kelebihan bayar bonus produksi yang akan dikompensasikan dengan pembayaran berikutnya, sedangkan saldo Tahun 2021 merupakan kelebihan pembayaran atas Jasa Pemanduan dan Penundaan yang dikompensasikan dengan kegiatan Jasa Pemanduan dan Penundaan.

D.2.2.1.10. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Saldo Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.056.160.026 dan Rp55.997.717.597 merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per 31 Desember 2022, yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

D.2.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

D.2.2.2.1. UTANG JANGKA PANJANG SURAT BERHARGA NEGARA

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.361.787.234.099.673 dan Rp5.732.372.440.844.653 dengan *Unamortized Discount* sebesar minus Rp52.953.994.105.000 dan *Unamortized Premium* sebesar Rp43.768.938.860.000.

Akun	Uraian	Jumlah	
		Tahun 2022	Tahun 2021
	Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	6.361.787.234.099.673	5.732.372.440.844.653
221211	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah	4.234.235.051.631.673	3.775.191.899.802.652
221221	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	981.985.834.468.000	930.621.762.042.001

Akun	Uraian	Jumlah	
		Tahun 2022	Tahun 2021
221231	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Rupiah	834.895.748.000.000	773.124.279.000.000
221241	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Valuta Asing	310.670.600.000.000	253.434.500.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(52.953.994.105.000)	(45.412.322.167.000)
221251	<i>Discount Obligasi Negara - dalam rupiah</i>	(32.818.760.067.000)	(28.858.620.865.000)
221252	<i>Discount Obligasi Negara - dalam valuta asing</i>	(4.400.865.622.000)	(4.080.379.212.000)
221253	<i>Discount SBSN - dalam rupiah</i>	(15.734.368.416.000)	(12.473.322.090.000)
<i>Unamortized Premium</i>		43.768.938.860.000	50.766.925.041.000
221261	<i>Premium Obligasi Negara - dalam rupiah</i>	32.666.834.421.000	36.050.147.794.000
221262	<i>Premium Obligasi Negara - dalam valuta asing</i>	611.233.837.000	667.747.348.000
221263	<i>Premium SBSN - dalam rupiah</i>	10.490.870.602.000	14.049.029.899.000

Rincian Profil Jatuh tempo Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri dapat dilihat pada [Lampiran LD30, LD30a, LD30b, LD30c](#)

D.2.2.2.2. UTANG KEPADA DANA PENSIUN DAN THT

Saldo Utang Kepada Dana Pensiun dan THT 31 Desember 2022 sebesar **24.446.771.532.148**. Pada Tahun 2022 telah ditetapkan Kewajiban Kekurangan Pendanaan Program THT dan Unfunded Past Service Liability (UPSL) pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-56/MK.02/2022 hal Penetapan Unfunded Past Service Liability Program

Tabungan Hari Tua pada PT Asabri (Persero) tanggal 30 Januari 2022 sebesar Rp4.550.263.772.727.000 dan S-75/MK.02/2023 hal Penetapan dan Pengakuan Kewajiban atas Kekurangan Pendanaan Program Tabungan Hari Tua pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp22.176.507.759.421. UPSL PT Asabri (Persero) telah dibayarkan sebesar Rp2.280.000.000.000 pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Pembayaran	Sisa
1	Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Asabri	4.550.263.772.727	2.280.000.000.000	2.270.263.772.727
2	Pengakuan Utang Jangka Panjang Program THT Taspen	22.176.507.759.421		22.176.507.759.421
Jumlah				24.446.771.532.148

D.2.2.2.3. UTANG JANGKA PANJANG SUBSIDI

*Utang
Jangka
Panjang
Subsidi*

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp27.102.028.797.720 dan sebesar Rp32.398.332.067.684. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi tersebut, lebih kecil sebesar Rp5.296.303.269.964 atau turun sebesar 16,35% dibandingkan dengan jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.398.332.067.684.

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

No	K/L	Jumlah		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
1	Keuangan	10.202.763.161.231	24.567.083.985.523	-14.364.320.824.292	-58,47
2	Pertanian	16.788.763.757.968	6.457.882.669.235	10.330.881.088.733	159,97
3	Perhubungan	110.501.878.521	1.373.365.412.926	-1.262.863.534.405	-91,95
	Jumlah	27.102.028.797.720	32.398.332.067.684	-5.296.303.269.964	-16,35

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp10.202.763.161.231 dan Rp24.567.083.985.523 atau mengalami penurunan sebesar Rp14.364.320.824.292.

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2022 terdiri dari:

UAKPA BUN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN	8.828.383.816.304	19.899.227.141.059
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	1.374.379.344.927	4.667.856.844.464
JUMLAH	10.202.763.161.231	24.567.083.985.523

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Dengan demikian, utang subsidi sampai per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Utang Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Rp 6.240.446.338.191,00
 - Utang Subsidi Listrik Rp2.587.937.478.113,00
- Total Utang Subsidi Rp8.828.383.816.304,00

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat pembayaran kekurangan subsidi JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik Tahun 2020 sejumlah Rp10.172.267.720.202,00, dan pembayaran kekurangan subsidi JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik Tahun 2021 sejumlah Rp9.726.959.420.857,00 sehingga sisa utang subsidi jangka panjang menjadi sebesar Rp0,00 (Rp19.889.227.141.059,00 - Rp10.172.267.720.202,00 - Rp9.726.959.420.857,00).

Selain itu terdapat utang sebesar Rp2.089.390.848.390,00 yang telah dianggarkan dalam DIPA999.07.1.979321/2023, sehingga dilakukan reklas menjadi Utang Subsidi sesuai NKF Nomor: NKF-107/999.07/PB.6/2023 tanggal 20 Mei 2023.

Rincian Utang Subsidi Jangka Panjang Rp8.828.383.816.304,00 adalah sebagai berikut:

- Rp960.636.296.967,00 merupakan kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar kepada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan hasil audit BPK RI;
 - Rp7.334.058.431,00 merupakan kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar kepada PT AKR Corporindo Tbk. berdasarkan hasil audit BPK RI;
 - Rp634.189.574.285,00 (termasuk PPN) merupakan kekurangan Subsidi JBT Minyak Tanah kepada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan hasil audit BPK RI;
 - Rp4.638.286.408.508,00 (termasuk PPN) merupakan kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan hasil audit BPK RI;
- Rp2.587.937.478.113,00 merupakan kekurangan subsidi listrik tahun 2022 berdasarkan Koreksi Kelebihan Pengakuan Beban dan Utang Subsidi Listrik hasil audit BPK atas perhitungan subsidi listrik TA 2022 NKF Nomor : NKF-107/999.07/PB.06/2023 tanggal 20 Mei 2023.

b. Direktorat Jenderal Pajak

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.374.379.344.927,00 dan Rp4.667.856.844.464,00. Utang Subsidi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 meliputi Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2022 atas tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2022 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2022 yang tidak mencukupi. Utang subsidi jangka panjang tersebut atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2022 sebesar Rp666.708.245.363,00 dan PPh DTP SBN Valas tahun 2022 sebesar Rp33.388.410.699,00. Selain itu, terdapat pula Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2022 yang berasal dari tagihan Subsidi P-DTP PC-PEN tahun 2022 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran, yang meliputi Utang Subsidi Jangka Panjang atas tagihan Subsidi PPN DTP Non-Vaksin sebesar Rp125.663.295.584,00, PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun sebesar Rp429.943.383.074,00, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp42.930.305.015,00, dan PPN DTP Vaksin sebesar Rp75.745.705.192,00.

2. Kementerian Pertanian

Utang subsidi jangka panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah senilai Rp16.788.763.757.968 dan Rp6.457.882.669.235

Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (penurunan)	
			(Rp)	%
Utang Subsidi Jangka Panjang	16.788.763.757.968	6.457.882.669.235	10.330.881.088.733	159,97
	16.788.763.757.968	6.457.882.669.235	10.330.881.088.733	159,97

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi sampai dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp16.788.763.757.968 merupakan Kurang Bayar TA. 2020 Audited yang dikoreksi oleh Itjen Kementan senilai Rp419.393.598 menjadi Rp420.266.452.272 dan tagihan PSO Penyalur subsidi pupuk atas pupuk bersubsidi yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp739.597.961.996 berdasarkan asersi hasil verifikasi KPA belanja subsidi pupuk tahun 2022 serta Kurang Bayar TA. 2022 Audited senilai Rp15.628.899.343.700.

Total kurang bayar tahun 2020 dapat dijelaskan, bahwa total kurang bayar tahun 2020 senilai Rp2.500.466.516.828 menggunakan perhitungan kurang bayar Tahun 2020 pembulatan desimal ke bawah sehingga terdapat selisih Rp3 dengan yang tercatat di neraca senilai Rp2.500.466.516.831.

Sedangkan yang sudah terbayarkan di tahun 2021 senilai Rp2.070.231.577.000 dan terkoreksi dari hasil reviu Itjen Kementan No. R-662/PW.220/G/12/2021 senilai

Rp419.393.598 dan No R.470/PW.110/G.3/12/2022 senilai Rp9.601.284.671 sehingga masih ada sisa kurang bayar tahun 2020 senilai Rp420.266.452.269.

Aseri Manajemen KPA

Pada tanggal 31 Januari 2022 disampaikan Aseri Manajemen KPA Belanja Subsidi Pupuk TA. 2022.

Total penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan hasil verifikasi yang disetujui untuk dibayarkan sebesar Rp24.480.572.326.738. Total tersebut yang telah dibayarkan sebesar Rp23.740.974.364.742 dan tagihan yang belum dibayarkan sebesar Rp739.597.961.996.

Berikut rincian Aseri Manajemen KPA TA. 2022 :

No	Produsen	Jumlah Tagihan Yang Sudah dibayar	Jumlah Tagihan Yang Belum Dibayar	Jumlah Tagihan Yang Disetujui Untuk Dibayar	Jumlah Tagihan Yang Tidak Disetujui Untuk Dibayar
1	PT. Pupuk Sriwidjaja	5.707.832.901.942	138.142.676.857	5.845.975.578.799	15.123.180.576
2	PT. Pupuk Kujang	2.517.536.235.884	84.413.650.132	2.601.949.886.016	1.291.850.897
3	PT. Petrokima Gresik	12.016.008.907.820	406.189.475.673	12.422.198.383.493	20.336.415.545
4	PT. Pupuk kaltim	1.495.758.273.447	39.364.587.643	1.535.122.861.090	203.405.804
5	PT. Pupuk Iskandar	2.003.838.045.649	71.487.571.691	2.075.325.617.340	5.474.462.528
Jumlah		23.740.974.364.742	739.597.961.996	24.480.572.326.738	42.429.315.350

Selanjutnya jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2021 yang sudah dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kurang Bayar Tahun 2021 senilai Rp6.028.067.123.002 sudah dilakukan pembayaran di tahun 2022 senilai Rp6.028.067.123.000 sehingga masih ada sisa

kurang bayar tahun 2021 senilai Rp2 dikarenakan selisih pembulatan sebagaimana pada tabel dibawah ini:

No.	Produsen	Jumlah Kurang Bayar TA. 2021	Sudah Realisasi Bulan November 2022	Realisasi Akhir Desember 2022
1	PT Petrokimia Gresik	4.278.187.424.501	2.328.769.794.216	1.949.417.630.285
2	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	778.166.366.939	282.493.763.121	495.672.603.818
3	PT Pupuk Kalimantan Timur	318.518.381.669	52.070.239.449	266.448.142.220
4	PT Pupuk Kujang	653.194.949.894	241.534.494.214	411.660.455.680
5	PT Pupuk Iskandar Muda	-		
JUMLAH		6.028.067.123.002	2.904.868.291.000	3.123.198.832.002

KET. Sisa Kurang Bayar TA. 2021 Rp2 merupakan pembulatan desimal, sehingga Kurang Bayar TA. 2021 sudah lunas terbayar.

- Kurang Bayar TA 2022

Sesuai dengan NKF Nomor : NKF-107/999.07/PB.6/2023 tanggal 20 Mei 2023, nilai kurang bayar TA 2022 menjadi sebesar Rp16.569.331.365.264,00 yang sebelumnya dicatat sebesar Rp739.597.961.996,00, sehingga dilakukan koreksi tambah utang dan beban sebesar Rp15.628.899.343.699,70. Rinciannya antara lain pada:

No.	Produsen	Jumlah Kurang Bayar TA. 2022
1	PT Petrokimia Gresik	12.891.483.416.860,70
2	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.371.240.660.878,76
3	PT Pupuk Kalimantan Timur	512.286.647.669,37
4	PT Pupuk Kujang	680.751.365.652,99
5	PT Pupuk Iskandar Muda	173.137.252.637,86
JUMLAH		15.628.899.343.699,70

3. Kementerian Perhubungan

Utang Jangka Panjang Subsidi merupakan Kewajiban pemerintah yang belum dianggarkan pembayarannya. Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember

2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp110.501.878.521,00 dan Rp1.373.365.412.926,00

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp110.501.878.521,00 berada di Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp110.501.878.521,- terdiri dari kurang bayar PSO TA 2015 sebesar Rp2.216.878.521,- dan TA 2016 sebesar Rp108.285.000.000,-.

Rincian nilai utang jangka panjang sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang subsidi PSO TA 2015	2.216.878.521
2	Utang subsidi PSO TA 2016	108.285.000.000
Total		110.501.878.521

D.2.2.2.4. UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN DALAM NEGERI

*Utang
Jangka
Panjang
Pinjaman
Dalam
Negeri*

Jumlah Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp18.141.468.578.073** dan **Rp11.347.703.253.209**.

No	Nama	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Hutang Jangka Panjang DN	18.141.468.578.073	11.347.703.253.209
221771	Hutang Jangka Panjang Pinjaman DN	18.141.468.578.073	11.347.703.253.209

Utang Jangka Panjang – Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2022 sebesar Rp18.141.468.578.073 mengalami kenaikan sebesar Rp6.793.765.324.864 atau 59,87% dibandingkan Tahun 2021, dikarenakan penarikan pinjaman lebih besar dari pembayaran pokok.

Rincian Profil Jatuh tempo Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri dapat dilihat pada Lampiran **LD30**.

D.2.2.2.5. UTANG JANGKA PANJANG DN LAINNYA

*Utang
Jangka
Panjang
Pinjaman
DN Lainnya*

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp279.218.156.681.472** dan **Rp339.029.505.513.777** Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	BA 999.04	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
2	BA 999.08	47.328.694.372.544	124.119.912.155.091
3	BA 999.99	229.977.534.581.769	212.997.665.631.527
Jumlah		279.218.156.681.472	339.029.505.513.777

a. BA 999.04

Tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban Jangka Panjang posisi 31 Desember 2022 dengan posisi 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp1.911.927.727.159. Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan Kewajiban atas risk sharing Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat dua pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola executing dan pola channeling. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola channeling yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen channeling) ke Koperasi/LSM. Sedangkan koperasi/LSM bertindak sebagai executing yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian risk sharing atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1999/1998 adalah sebesar Rp7.677.429.744.359,79, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.699,61, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660,18. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110,09 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235,53. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk risk sharing adalah sebesar Rp3.659.191.822.314,56. Risk sharing yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas

Risk Sharing Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159,36 (52,25% x Rp3.659.191.822.314,56).

Terdapat temuan BPK atas laporan keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2011, yaitu penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, BI dan Perum Jamkrindo atas Risk Sharing Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola Channeling sebesar Rp5,71 Triliun berlarut-larut. Pada tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan hal Tindak Lanjut Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1998/99. Dalam surat tersebut, Kemenko meminta pendapat BPK terkait rekomendasi BPK untuk mengajukan penyelesaian tersebut ke DPR dan harus dapat memisahkan penerima KUT petani dan bukan petani, karena saat ini hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

Surat Bank Indonesia nomor 21/5/DOTP/Srt/B tanggal 16 Januari 2019 kepada Direktorat SMI perihal penyampaian dokumen klarifikasi Bank pelaksana KUT TP 1998/99 Pola Channeling menyatakan bahwa Bank pelaksana (Bank BRI, Bank Danamon, Bank BTPN, Bank Bukopin dan Bank Muamalat) mengalami kesulitan untuk melakukan pemilahan debitur penerima KUT TP 1998/99 Pola Channeling antara petani dan bukan petani.

Terhadap Penyajian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya atas risk sharing Kredit Usaha Tani (KUT) Menteri Keuangan selaku BUN akan berkoordinasi dengan Gubernur BI dan Pihak lain untuk penyelesaian piutang KUT setelah itu akan dilanjutkan dengan rekonsiliasi dengan BI dan Jamkrindo serta akan dilakukan penyesuaian nilai di LKBUN. Sampai dengan 31 desember 2022 telah dilakukan Rapat Koordinasi Penyelesaian Kewajiban Risk Sharing Kredit Usaha Tani (KUT) dengan Bank Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan kesimpulan rapat BI akan melengkapi kronologis penyaluran KUT dan progres yang telah dilakukan termasuk klarifikasi perbedaan nilai antara audit BPK dengan LK BI.

b. BA 999.08

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.328.694.372.544 dan Rp124.119.912.155.091. Saldo utang tersebut berasal dari satker SKK Migas yang merupakan kontra-akun dana kegiatan pasca-operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment and Site Restoration (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas yang disajikan sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya. Pencatatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 Nomor : 25b/LHP/XV/05/2021 tanggal 29 Mei 2021, yaitu pengaturan

yang lebih detil atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR, termasuk Dana ASR yang dikelola oleh BPMA. Hal tersebut berdasarkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas dan surat Kuasa Pengguna Anggaran SKK Migas Nomor SRT-0032/SMKPA0000/2022/S4 tanggal 8 Maret 2022.

c. BA 999.99

Berdasarkan PMK Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 127/PMK.05/2018, pencatatan utang jangka panjang dalam negeri lainnya merupakan penjumlahan dari aset lainnya sebagai akun lawannya.

Utang jangka panjang dalam negeri lainnya terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). AIP ini dicatat selain dicatat sebagai Aset Lainnya, juga dicatat sebagai utang karena merupakan dana milik peserta yang kolektif dikuasai oleh pemerintah.

Perbandingan nilai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Utang Jangka Panjang Lainnya			
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	205.285.435.523.564	189.639.517.831.246	15.645.917.692.318
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	24.691.252.316.982	23.356.764.081.938	1.334.488.235.044
Aset Eks Pertamina	846.741.223	1.383.718.343	(536.977.120)
Total Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	229.977.534.581.769	212.997.665.631.527	16.979.868.950.242

Nilai AIP di atas dicatat berdasarkan dokumen sumber dari Laporan Keuangan AIP 2022 Audited PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dengan penjelasan sebagaimana dijelaskan pada D.2.1.6.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.99 yaitu:

- Berdasarkan Laporan Keuangan AIP TA. 2022 Audited dengan PT Taspen (Persero) tanggal 20 Februari 2023 disebutkan bahwa saldo AIP PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp205.285.435.523.564.
- Berdasarkan Laporan Keuangan AIP TA. 2022 Audited PT Asabri (Persero) tanggal 28 Februari 2023 disebutkan bahwa saldo AIP PT ASABRI (Persero) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.691.252.316.982.
- Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada DJKN per 31 Desember 2022 berasal dari Aset Eks Pertamina sebesar Rp846.741.223. Hingga akhir 2022, eksisting kewajiban jangka panjang sebesar Rp1.383.718.343 dikurangi kewajiban jangka panjang yang menjadi pendapatan pada 2022 sebesar Rp495.011.676 dengan rincian:
 - Sewa oleh Bank Mandiri Area Palembang Sudirman senilai Rp65.635.000;
 - Sewa Tanah oleh PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), Tbk sebesar Rp3.383.343;
 - Sewa oleh Bank Mandiri Palembang - untuk KCP Prabumulih senilai Rp69.060.000;
 - Sewa oleh PT Elnusa sebesar Rp277.250.000;
 - Sewa oleh Bank Mandiri Palembang Sudirman, untuk Aset di Jalan Pramuka dan Jalan Cemara Rp79.683.333.

Ditambah dengan pendapatan yang dibayarkan pada tahun 2022 dan baru menjadi pendapatan mulai tahun 2023 dengan rincian:

- Sewa dalam rangka penyediaan infrastruktur oleh PLN sebesar Rp93.575.000 untuk 50 tahun mulai tahun 2022 s.d. tahun 2072;
- Sewa oleh Bass Oil Sukananti Limited, untuk 3 tahun mulai tahun 2022 s.d. tahun 2025 sebesar Rp131.709.091. Dikurangi dengan pengakuan pendapatan sebesar Rp1.148.626, merupakan pendapatan yang belum diakui atas sewa Bass Oil (seharusnya jangka waktu 43 bulan), tetapi sampai dengan Triwulan III 2022 dihitung 44 bulan.

Dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang yang direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek berupa pendapatan diterima di muka di tahun 2023 yaitu:

- Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Palembang Rp9.150.000.

- Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Palembang untuk KCP Prabumulih Rp69.060.000.
- Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Sudirman untuk aset yang berada di Jalan Cemara Rp136.600.000.
- Pendapatan diterima di muka dari sewa penyediaan infrastruktur PT PLN untuk aset yang berada di Cirebon Rp1.900.000.
- Pendapatan diterima di muka dari sewa Bass Oil Sukananti Limited Rp49.390.909.

D.2.2.2.6. UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN LUAR NEGERI

*Utang
Jangka
Panjang LN
Perbankan*

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp822.838.479.742.048** dan **Rp727.802.460.644.502** Terdapat kenaikan utang di Tahun 2021 sebesar 13,06% dibandingkan Tahun 2021 dikarenakan penarikan pinjaman pada Tahun 2022 yang lebih besar dari pembayaran pokoknya dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan			
222115	Utang Program	467.695.863.960.429	424.246.273.811.877
222116	Utang Proyek	355.142.615.781.619	303.556.186.832.625
Jumlah		822.838.479.742.048	727.802.460.644.502

Rincian Profil Jatuh tempo Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri dapat dilihat pada Lampiran **LD30**.

D.2.2.2.7. UTANG JANGKA PANJANG LN LAINNYA

*Utang
Jangka
Panjang LN
Lainnya*

Nilai utang jangka panjang luar negeri lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp26.646.297.359** dan **Rp25.053.812.708**. Kewajiban berasal dari utang jangka panjang luar negeri lainnya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat tagihan pencairan utang. Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa promissory notes. Kenaikan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan nilai tukar. Rincian kewajiban sebagai berikut.

No	Lembaga Keuangan internasional	Mata Uang Asal		31 Des 2021 (IDR)	31 Des 2022 (IDR)	Naik/(turun)
1	International Development Association (IDA)	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545	-
2	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	1.135.018	16.205.787.004	17.697.200.656	(1.491.413.652)
3	Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223.450	3.610.124.159	3.711.195.158	(101.070.999)
Jumlah utang jangka panjang luar negeri				25.053.812.708	26.646.297.359	(1.592.484.651)

Detail *promissory note* Pemerintah Indonesia pada IDA adalah sebagai berikut:

No	Rincian	Tanggal	Jumlah
1	2 (two) promissory notes	19 Januari 1973	129.523.754,28
2	1 (one) promissory note	21 September 1973	355.340.803,50
3	1 (one) promissory note	26 Desember 1973	71.956.501,40
4	1 (one) promissory note	25 Mei 1974	514.542.828,77
5	1 (one) promissory note	31 Desember 2000	2.163.936.250
6	1 (one) promissory note	14 Mei 2003	2.002.601.407
Total			5.237.901.545

D.2.3. EKUITAS

Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **minus Rp3.262.260.267.295.775** dan **minus Rp2.842.111.919.515.711**.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

A. BA 999.00

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari 2 (dua) jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas dan Rekening Penerimaan Panas Bumi) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980

Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut.

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian Kontrak *Production Sharing* (KPS) atau rekening Migas per tanggal 31 Desember 2022 (*Audited*) adalah sebesar USD231,869,842.68. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama periode Tahun 2022:

URAIAN	31 Desember 2022 (<i>Audited</i>)		31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)	
	USD	RpJuta	USD	RpJuta
I. Saldo Awal	316.746.439,48	4.522.505,66	89.498.909,10	1.262.382,11
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PNB SDA Migas dan PNB Lainnya	3.073.324.604,32	45.667.074,58	3.605.391.362,06	51.681.863,69
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI	2.405,75	35,8	22.434.078,24	318.510,58
3. Penerimaan Lain-lain	258.453,90	4.040,37	3.909.744,97	56.145,75
4. Retur/Pengembalian karena Salah Rekening	74.957,86	1.113,72	267.112,36	3.855,88
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit	-	3.519.130,49	-	2.538.097,68
Total Penerimaan	3.073.660.421,83	49.191.394,96	3.632.002.297,63	54.598.473,59
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. PBB Migas ke DJP	566.568.706,40	8.584.829,81	647.012.574,18	9.346.136,98
b. Pajak Penerangan Jalan Non PLN & ABT ke Pemda	1.027.212,50	14.990,66	7.004.739,91	99.932,64

URAIAN	31 Desember 2022 (Audited)		31 Desember 2021 (Audited)	
	USD	RpJuta	USD	RpJuta
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
• Pendapatan dari PNBPD SDA Migas	-	-	416.674.556,94	5.943.445,88
• Pendapatan dari PNBPD Migas Lainnya	17.731.473,47	277.657,14	1.944.218,40	27.734,28
Subtotal Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/APBD	585.327.392,37	8.877.477,61	1.072.636.089,43	15.417.249,78
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
• Reimbursement PPN ke Kontraktor	436.017.865,70	6.509.641,58	520.955.773,25	7.439.456,07
• Pembayaran DMO Fee KKKS	849.199.258,55	12.747.652,55	409.876.561,41	5.862.218,46
• Pembayaran Underlifting KKKS	1.010.447.192,88	15.429.489,77	1.298.551.670,98	18.609.343,98
• Pembayaran Fee Penjual Migas	277.467.945,52	4.042.870,40	80.013.130,25	1.153.125,34
Subtotal Pengeluaran Non APBN/APBD	2.573.132.262,65	38.729.654,30	2.309.397.135,89	33.064.143,85
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI	2.405,75	35,8	22.434.078,24	318.510,58
4. Retur/Pengembalian karena Salah Rekening	74.957,86	1.125,19	287.463,69	4.099,24
5. Pengeluaran Lainnya	-	-	-	-
6. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit	-	2.490.293,14	-	2.534.346,59
Total Pengeluaran	3.158.537.018,63	50.098.586,04	3.404.754.767,25	51.338.350,04
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	-84.876.596,80	-907.191,08	227.247.530,38	3.260.123,55
V. Saldo Akhir (I + IV) I)	231.869.842,68	3.615.314,59	316.746.439,48	4.522.505,66

Penjelasan:

- Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNBPD SDA Migas dan PNBPD Migas lainnya merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan lifting minyak dan gas bumi bagian Negara, Overlifting KKKS, serta setoran atas penerimaan non-lifting migas sebesar USD3.073.324.604,32 atau setara Rp45.667.074.576.558.
- Koreksi Pembukuan oleh BI merupakan koreksi atas pendebetan dua kali transaksi di Rekening Migas sebesar USD2.405,75 atau setara Rp35.802.372. Atas transaksi tersebut, masing-masing telah dilakukan koreksi pembukuan debit dan kredit oleh BI.
- Penerimaan Lain-lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar USD258.453,90 atau setara dengan Rp4.040.373.680 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyeter maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.
- Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi sebesar USD74.957,86 atau Rp1.113.723.884 atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima.
- Selisih Kurs Pembukuan Kredit dan Debit sebesar Rp3.519.130.486.468 dan Rp2.490.293.138.201 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor

600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

Transaksi pada rekening Migas tersebut belum menyajikan penerimaan bagian negara dan penggunaannya terkait pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) Tahun 2022. Kebijakan HGBT merupakan kebijakan Pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi tertentu di titik serah pengguna Gas Bumi (plant gate) dengan harga paling tinggi USD 6/MMBTU yang didasarkan pada Perpres Nomor 40 Tahun 2016 jo. Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Penetapan HGBT tersebut diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan serta bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Implementasi kebijakan HGBT berdampak pada terjadinya pengurangan (penyesuaian) atas penerimaan bagian negara sebagai akibat dari adanya penurunan harga gas dan penerimaan bagian negara yang digunakan untuk menutupi bagian kontraktor yang berkurang.

Berdasarkan data *resume* rekapitulasi FQR *Preliminary* Kuartal IV 2022 yang diperoleh dari SKK Migas, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas, pada tahun 2022 terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas sebesar USD612,794,782 dan penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (kept-whole) sebesar USD1,021,815,576.

Pada tahun 2021 dan 2020, penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas masing-masing sebesar USD424,282,072 dan USD174,605,350; sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (kept-whole) masing-masing sebesar USD716,635,684 dan USD279,465,750.

Besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

**Penyesuaian Bagian Negara yang Terdampak oleh Kebijakan HGBT Tahun 2022
untuk KKKS di bawah kewenangan SKK Migas**

(dalam USD)

No.	KKKS	Wilayah Kerja	Entitlement GOI					Keterangan
			Harga Awal	Penurunan GOI Entitlement	Besaran kept-whole bagian KKKS	Total Penyesuaian	Net GOI	
1	BP BERAU LTD.	BERAU, OFF. IRIAN JAYA	683.361.608	131.078.754	276.721.270	407.800.024	275.561.585	
2	BP MUTURI HOLDINGS B.V.	MUTURI BLOCK, IRIAN JAYA	174.751.738	29.914.013	92.785.490	122.699.503	52.052.235	
3	BP WIRIAGAR LTD.	WIRIAGAR BLOCK, ONS. IRIAN JAYA	50.463.424	9.511.717	31.705.764	41.217.480	9.245.944	
4	CONOCOPhillips (GRISIN) LTD.	CORRIDOR, ONS. SOUTH SUMATRA	731.560.016	178.218.608	297.031.014	475.249.023	256.310.393	
5	EMP (BENTU) LTD.	BENTU SEGAT, ONS. RIAU	71.011.513,37	11.059.881	10.346.326	21.406.207	49.605.306	
6	HUSKY CNOOC MADURA LTD.	MADURA STRAIT, ONS. & OFF. EAST JAVA	114.093.587	21.481.920	20.256.897	41.738.816	72.354.771	**
7	KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	KANGEAN, ONS. & OFF. EAST JAVA SEA	101.528.488	11.119.446	10.729.272	21.848.718	79.679.770	**
8	MEDCO ENERGI SAMPANG PTY. LTD.	SAMPANG, EAST JAVA	-	-	-	-	-	Berdasarkan Kepmen ESDM No. 135/2021 Implementasi HGBT hanya untuk tahun 2021
9	MEDCO ENERGI MADURA OFFSHORE PTY. LTD.	MADURA OFFSHORE, SOUTH EAST MADURA	17.090.690	4.370.302	7.283.837	11.654.139	5.436.552	**
10	PEARL OIL (SEBUKU) LTD.	SEBUKU, OFF. SULAWESI	-	-	-	-	-	Berdasarkan Kepmen ESDM No. 135/2021 Implementasi HGBT hanya untuk tahun 2021
11	PETROCHINA INTERNATIONAL (ABUNG) LTD.	ABUNG, ONS. JAMBI	294.921.489	6.679.052	13.750.995	20.430.047	274.491.442	
12	PT MEDCO E&P INDONESIA	SOUTH SUMATRA	54.042.014	6.606.347	5.011.720	11.618.067	42.423.947	
13	PT PERTAMINA EP	INDONESIA	369.101.959,15	65.162.700	133.667.132	198.829.832	170.272.107	
14	PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	MAHAKAM	499.233.965	111.234.294	84.384.792	195.619.087	303.614.879	
15	PT PHE WMO	WEST MADURA, OFF. EAST JAVA	22.823.106,14	7.093.522	11.693.513	18.787.035	4.036.071	
16	PHE OGAN KOMERING / GROSS SPLIT	OGAN KOMERING, ONS. SOUTH SUMATRA	2.900.572	697.999	880.181	1.578.180	1.322.392	
17	PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES	SOUTHEAST SUMATRA, OFF.	-	-	-	-	-	Berdasarkan Kepmen ESDM No. 135/2021 Implementasi HGBT hanya untuk tahun 2021 dan tahun 2022 tidak ada lifting gas bumi
18	Pertamina Hulu Energi ONWJ LTD.	OFFSHORE NORTH WEST JAVA	25.836.223	1.811.141	3.645.990	5.457.130	20.379.093	
19	PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG (OS)	JAMBI MERANG, ONS. JAMBI	97.597.865	14.284.984	11.135.197	25.420.181	72.177.684	
20	MINARAK BRANTAS GAS INC. (OS)	BRANTAS, ONS. & OFF. EAST JAVA	1.108.272	267.301	282.653	549.954	558.318	
21	PHE NSO / GROSS SPLIT	NORTH SUMATRA OFF.	4.196.808	1.218.837	1.655.537	2.874.374	1.322.435	
22	PC KETAPANG II LTD.	KETAPANG, EAST JAVA SEA	8.474.273	388.119	4.786.802	5.174.922	3.299.352	
23	JINDI SOUTH JAMBI B. Co. Ltd.	SOUTH JAMBI B	3.102.938	210.458	264.042	474.500	2.628.438	
24	SAKA INDONESIA PANGKAH LTD	PANGKAH	11.220.616	35.201	434.140	469.340	10.751.276	**
25	PT PERTAMINA EP CEPU	CEPU	2.037.481	112.785	1.391.015	1.503.800	533.681	
26	MEDCO LEMATANG	LEMATANG	2.226.171	237.402	1.971.988	2.209.401	16.771	
TOTAL			3.342.694.799	612.794.782	1.021.815.576	1.634.610.356	1.706.074.441	

Keterangan:

- Net GOI adalah nilai entitlement Pemerintah Indonesia setelah memperhitungkan harga sesuai Keputusan Menteri ESDM dan kept whole KKKS. Nilai tersebut belum termasuk pajak dan belum memperhitungkan kewajiban Pemerintah (faktor pengurang).
- Data di atas tidak termasuk Wilayah Kerja di bawah kewenangan BPMA.
Data masih bersifat sementara, berdasarkan FQR Preliminary Kuartal IV 2022. Sedangkan data bertanda ** telah dihitung berdasarkan FQR Final Kuartal IV 2022.

Berdasarkan data resume rekapitulasi yang diperoleh dari BPMA*), terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan BPMA, pada tahun 2022 terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas sebesar USD506,280 dan penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (kept-whole) sebesar USD6,156,078. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2020, penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas masing-masing sebesar USD512,842 dan USD228,433; sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (kept-whole) masing-masing sebesar USD4,609,270 dan USD3,099,982. Nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (kept-whole) sebesar USD3,099,982, merupakan penyesuaian atas kekurangan bagian KKKS Medco E&P Malaka tahun 2020. Dari nilai tersebut telah diperhitungkan/diserahkan untuk mengganti kekurangan penerimaan KKKS Medco E&P Malaka sebesar USD1,814,347 sehingga masih terdapat sisa sebesar USD1,285,635. Penyelesaian atas kekurangan bagian KKKS Medco E&P Malaka tahun 2020

saat ini sedang dalam pembahasan antara BPMA – KKKS karena adanya koreksi yang harus dilakukan sesuai arahan KESDM bahwa acuan Harga Gas untuk Penyesuaian Kesetaraan Tagihan adalah USD7,03/mmbtu dan KKKS PT Medco E&P Malaka menyelesaikan Penyesuaian Kesetaraan Tagihan dengan konsumennya (PT Pertagas Niaga) secara business to business.

Besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan BPMA secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut:

**Penyesuaian Bagian Negara yang Terdampak oleh Kebijakan HGBT Tahun 2022
untuk KKKS di bawah kewenangan BPMA**

dalam USD

KKKS	WILAYAH KERJA	ENTITLEMENT GOI					
		HARGA AWAL	PENURUNAN GOI ENTITLEMENT	BESARAN KEPT-WHOLE BAGIAN KKKS	TOTAL PENYESUAIAN	NET GOI	KET
MEDCO E&P MALAKA	BLOCK A	6.627.611,03	439.722,21	6.156.077,92	6.595.800,12	31.810,91	Berdasarkan Berita Acara Penyesuaian Gas Bumi Bagian Negara diserahkan untuk KKKS Medco untuk Menutupi Kekurangan KKKS dan Adjustment penyesuaian Penerimaan Bagian Negara dan KKKS Terkait Penerapan Kepmen ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021
TRIANGLE PASE INC,	BLOCK PASE	320.185,05	-	-	-	320.185,05	Belum ada implementasi HGBT
PEMA GLOBAL ENERGI	BLOCK B	1.167.086,71	66.558,14		66.558,14	1.100.528,57	Adanya koreksi pasca implementasi HGBT atas pemakaian Gas WK "B" sebagai Tindak Lanjut Kesepakatan Implementasi Kepmen ESDM 134K/2021 Periode Januari sampai April 2022, tidak terdapat besaran kept-whole bagian KKKS dikarenakan sudah ada penetapan Harga Non Kepmen dan Harga Kepmen.
		8.114.882,79	506.280,35	6.156.077,92	6.662.358,27	1.452.524,53	

*) Keterangan:

1. Net GOI adalah nilai entitlement Pemerintah Indonesia setelah memperhitungkan harga sesuai Keputusan Menteri ESDM dan kept whole KKKS. Nilai tersebut belum termasuk pajak dan belum memperhitungkan kewajiban Pemerintah (faktor pengurang).
2. Data di atas tidak termasuk Wilayah Kerja di bawah kewenangan SKK Migas.

Skema penyelesaian atas transaksi yang timbul dari penyesuaian pengurangan penerimaan bagian negara adalah dengan diperhitungkan melalui mekanisme bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Rekening Lain pada Bank Indonesia Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi 508.000084980 digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi, antara lain reimbursement PPN, PBB, dan penggantian bonus produksi. Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.588.329.504.770 dan Rp1.428.552.738.965. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
I.	Saldo Awal	1.428.552.738.965	1.220.126.090.533
II.	Penerimaan:		
1.	Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	2.944.542.106.880	2.669.031.706.742
2.	Koreksi Pembukuan Kredit		
	Total Penerimaan	2.944.542.106.880	2.669.031.706.742
III.	Pengeluaran:		
1.	Pembayaran PBB Panas Bumi ^{a)}	400.171.960.144	396.953.473.211
2.	Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ^{b)}	147.221.743.521	88.788.521.026
3.	Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum ^{c)}	90.658.226.036	120.503.449.156
4.	Pemindahbukuan PNPB Perusahaan Panas Bumi ke Rek. KUN ^{d)}	2.146.713.411.374	1.854.359.614.912
5.	Koreksi Pembukuan debit		5
	Total Pengeluaran	2.784.765.341.075	2.460.605.058.310
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)	159.776.765.805	208.426.648.432
V.	Saldo Akhir (I + IV) ^{e)}	1.588.329.504.770	1.428.552.738.965

Penjelasan:

- a) Pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2022 sebesar Rp400.171.960.144.
- b) Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp147.221.743.521 adalah *reimbursement* PPN dengan perincian: (1) Pengajuan Tahun 2020 sebesar Rp3.692.442.795 (2) Pengajuan Tahun 2021 sebesar Rp127.010.383.271 dan (3) Pengajuan Tahun 2022 sebesar Rp16.518.917.455.
- c) Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rp90.658.226.036 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Penggantian Bonus Produksi Tahun	Jumlah
2019	746.535.503
2020	573.166.133
2021	50.410.232.153
2022	38.928.292.247
Total	90.658.226.036

- d) Pemindahbukuan PNPB Panas Bumi Tahun 2022 ke RKUN sebesar Rp2.146.713.411.374 terdiri dari:
- PNPB Panas Bumi Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp198.964.968.477.
 - PNPB Panas Bumi Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp562.650.490.312.
 - PNPB Panas Bumi Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp711.941.149.592.
 - PNPB Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp673.156.802.993.
- e) Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2022 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban reimbursement PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian:

(dalam Rupiah)

No	Pengusaha	Reimbursement PPN	Bonus Produksi	Nilai
1.	PT Pertamina Geothermal Energy (Persero)	454.052.470.413	12.238.165.515	466.290.635.928
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	344.791.158.891	4.552.263.831	349.343.422.722
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	301.434.633.129	3.344.297.949	304.778.931.078
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	410.992.360.438	1.947.252.718	412.939.613.156
5.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	46.173.220.006	8.803.681.871	54.976.901.877
Jumlah*)		1.557.443.842.877	30.885.661.884	1.588.329.504.761

*) Selisih total sebesar Rp9 karena pembulatan

2. Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)

Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening dengan nomor 5190001518980 tersebut digunakan untuk mengelola dana investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN. Dana investasi

Pemerintah tersebut ditujukan kepada penerima investasi sebagaimana diatur dalam KMK 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020 yaitu:

No.	Keperluan	Jumlah
1.	PT Garuda Indonesia (Persero)	8.500.000.000.000
2.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000
3.	Perum Perumnas	650.000.000.000
4.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000.000.000.000
5.	PT Krakatau Steel (Persero)	3.000.000.000.000
Jumlah		19.650.000.000.000

Realisasi RIPPEN Tahun 2020-2021

Sampai dengan Tahun 2021, rincian realisasi investasi pemerintah yang telah disalurkan kepada penerima investasi adalah senilai Rp.9.101.337.360.411 dengan rincian:

No.	Keperluan	Jumlah
Realisasi 2020		
1.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000
2.	Perum Perumnas	200.000.000.000
3.	PT Krakatau Steel (Persero)	2.200.000.000.000
Realisasi 2021		
1.	PT Garuda Indonesia (Persero)	1.000.000.000.000
2.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	627.409.598.719
3.	Perum Perumnas	450.000.000.000
4.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	180.267.213.112
5.	PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	832.697.430.784
6.	PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	110.963.117.796
Jumlah		9.101.337.360.411

Saldo RIPPEN per 31 Desember 2020 yang dilaporkan dalam LKPP 2021 Audited adalah sebesar Rp10.548.662.639.589.

Realisasi RIPPEN Tahun 2022

Pada semester I tahun 2022, terdapat penyetoran atas sisa alokasi untuk PT Garuda Indonesia (Persero) senilai Rp7.500.000.000.000 (alokasi Rp8.500.000.000.000 dikurangi realisasi tahun 2021 Rp1.000.000.000.000) ke RKUN pada tanggal 31 Mei 2022.

Selanjutnya, pada semester II tahun 2022 terdapat penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan nilai total Rp1.847.519.139.589 dalam 3 tahapan, yaitu: sebesar Rp685.588.236.151 sesuai Surat KPA Satker BUN Penerima Investasi Berbentuk BUMN nomor S-13/KPA999.03.MBU/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 hal Permohonan Pemindahbukuan dari Rekening Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero); Rp290.343.076.582

sesuai Surat KPA Satker BUN Penerima Investasi Berbentuk BUMN nomor S-18/KPA999.03.MBU/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 hal Permohonan Pemindahbukuan dari Rekening Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero); dan Rp225.212.187.267 sesuai Surat KPA BUN Penerima Investasi Berbentuk BUMN nomor S-22/KPA999.03.MBU/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 hal Pemindahbukuan dari Rekening Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Atas hal tersebut, dilakukan pemindahbukuan Dana Cadangan IP PEN dari RIPPEN ke RKUN.

Selain penyaluran Dana Cadangan IP PEN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero), pada semester II tahun 2022 terdapat transaksi berupa pemindahbukuan dari RKUN ke RIPPEN sebesar Rp3.000.000.000.000 yang merupakan dana titipan. Sesuai KMK Nomor 519/KMK.06/2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara, Pemerintah mengalokasikan dana penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Waskita Karya Tbk paling banyak sebesar Rp3.000.000.000.000 pada RIPPEN. Dana titipan tersebut akan dipindahkan ke rekening penampungan dana penyertaan modal negara milik BUN pada bulan Januari 2023. Sesuai KMK Nomor 519/KMK.06/2022 dan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-62/PB.6/2023 tanggal 20 Januari 2023 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 07: Akuntansi Transaksi Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara pada Rekening Milik BUN, dana titipan pada RIPPEN tersebut dicatat sebagai dana yang dibatasi penggunaannya (akun 163134: Dana di Rekening Investasi Pemerintah PEN/RIPPEN) oleh Kuasa BUN Pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas, rincian saldo pada RIPPEN s.d. 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Saldo RIPPEN 31 Desember 2021	10.548.662.639.589
2.	Setoran ke RKUN atas sisa alokasi PT Garuda Indonesia (Persero)	(7.500.000.000.000)
3.	Setoran ke RKUN atas penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	(685.588.236.151)
		(290.343.076.582)
		(225.212.187.267)
4.	Dana titipan	3.000.000.000.000
Saldo RIPPEN per 31 Desember 2022		4.847.519.139.589

Terkait Dana Titipan pada angka 4 adalah dana yang diterima di RIPPEN tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal PT

Waskita Karya (Persero) Tbk sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.06/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara, melalui SPM Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (986917) nomor 00016T/986917/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan SP2D nomor 220191304031488 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp3.000.000.000.000, dan dana tersebut disalurkan ke Rek Lain BI Penampungan Dana PMN pada tahun 2023 sesuai surat Kementerian BUMN nomor S-1/KPA999.03.MBU/01/2023 tanggal 27 Januari 2023 hal Permohonan Pemindahbukuan Dana dari Rek Lain BI Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Penampungan Dana PMN.

Terkait dengan sisa dana cadangan IPPEN kepada PT Krakatau Steel (Persero), sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-346/MK.06/2023 tanggal 2 Mei 2023, Surat Direktur Jenderal Keuangan Negara Nomor S-78/KN/2023 tanggal 11 Mei 2023 dan Surat Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Nomor S-5/KPA999.03.MBU/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 maka pencairan dana IP PEN untuk penerbitan OWK Seri B pada PT Krakatau Steel (Persero) sebesar Rp800.000.000.000 tidak dilanjutkan. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2023, sisa dana cadangan IPPEN kepada PT Krakatau Steel (Persero) dipindahbukukan dari RIPPEN ke RKUN.

3. Rekening Lain BI Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster A dan Rekening Lain BI Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster B.

Seiring dengan perkembangan penanganan Pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersama-sama menyepakati kerja sama pembiayaan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 347/KM.08/2021 dan 23/11/KEP.GBI/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19.

Skema penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia berdasarkan SKB III adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan SBN oleh Pemerintah sebesar Rp58T (APBN Tahun 2021) dan Rp40T (APBN Tahun 2022) akan dibeli sepenuhnya oleh Bank Indonesia dimana beban biaya atas penerbitan SBN tersebut ditanggung Bank Indonesia sebesar tingkat suku bunga *Reverse Repo* Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan untuk pembiayaan penanganan kesehatan.
2. Penerbitan SBN oleh Pemerintah sebesar Rp157T (APBN Tahun 2021) dan Rp184T (APBN Tahun 2022) akan dibeli sepenuhnya oleh Bank Indonesia, dimana beban biaya atas

penerbitan SBN tersebut ditanggung Pemerintah sebesar tingkat suku bunga *Reverse Repo* Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan untuk pembiayaan anggaran penanganan Kesehatan dan kemanusiaan selain yang telah diberikan kontribusi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir a.

Skema penerbitan SBN tersebut menggunakan metode pembelian dengan cara *Private Placement* yang terdiri dari SBN tenor 5,6,7 dan 8 tahun. Adapun jumlah penerbitan SBN tersebut adalah sebesar Rp215T (APBN Tahun 2021) dan Rp224T (APBN Tahun 2022).

Hasil penerbitan SBN SKB III tersebut, ditempatkan oleh Pemerintah pada rekening khusus di Bank Indonesia yi. pada Rekening Lain BI Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster A dengan nomor rekening 519000152980 dan Rekening Lain BI Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster B dengan nomor rekening 519000153980 dan terhadap rekening tersebut tidak diberikan remunerasi oleh Bank Indonesia.

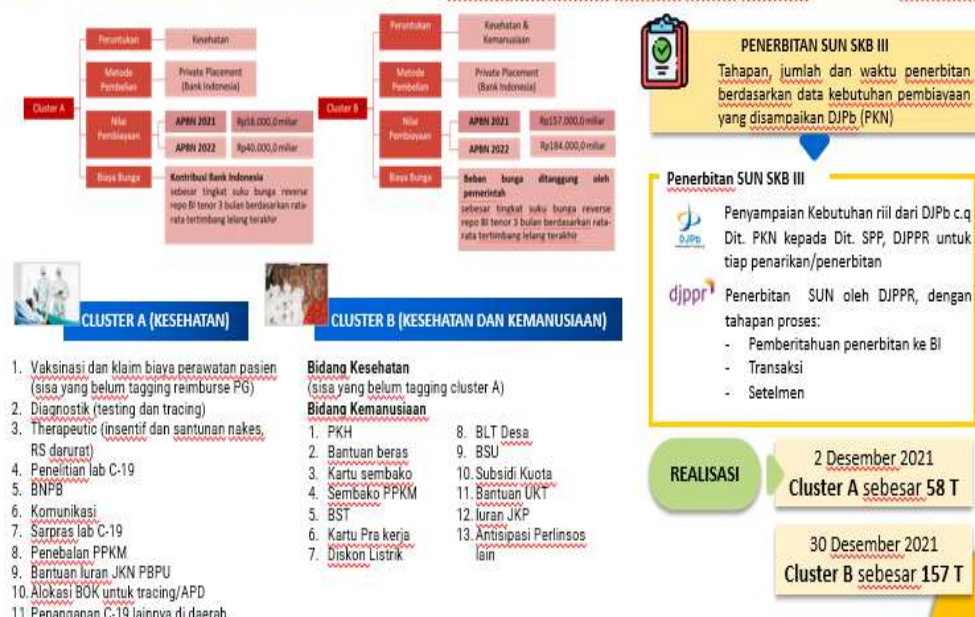
Pembukaan rekening lain BI penanganan pandemi COVID-19 dan PEN cluster A dengan nomor rekening 519000152980 dan rekening lain BI penanganan pandemi COVID-19 dan PEN Cluster B dengan nomor rekening 519000153980 berdasarkan:

- a. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor ND-378/PR/2021 tanggal 8 Nopember 2021 hal Permintaan Pembukaan Rekening Khusus terkait Penempatan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
- b. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-259/PB/PB.3/2021 tanggal 9 Nopember 2021 hal Permohonan Pembukaan Layanan Rekening Giro di BI tanggal 9 Nopember 2021
- c. Surat Bank Indonesia nomor 23/DPPT/Srt/B tanggal 11 Nopember 2021 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia

Tata Kelola rekening diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 146/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN.

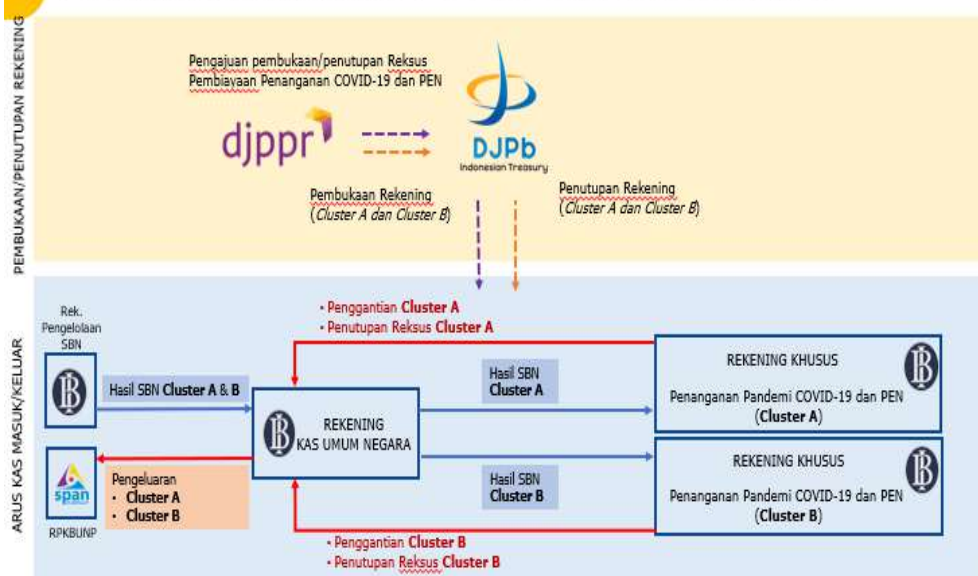
SKB III ANTARA KEMENKEU DAN BANK INDONESIA

347/KMMK.08/2021 – 23/11/KEP.GBI/2021. Kerjasama BI-Kemenkeu dalam penyediaan pembiayaan anggaran penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan



Mekanisme Rekening Lain BI Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster A dengan nomor rekening 519000152980 dan Rekening Lain BI Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster B dengan nomor rekening 519000153980 adalah sebagai berikut:

MEKANISME REKSUS PC PEN CLUSTER A DAN B



Realisasi SKB III pada Tahun 2021

Realisasi penerbitan SKB III pada tahun 2021 adalah senilai Rp215 triliun dengan rincian untuk Cluster A senilai Rp58 triliun dan Cluster B senilai Rp157 triliun. Atas penerbitan SBN tersebut, DJPPR memerintahkan pemindahbukuan dana tersebut ke rekening lain BI penanganan pandemi

COVID-19 Cluster A dan Cluster B. Kemudian dengan data realisasi yang disampaikan oleh Direktorat PA dilakukan reimburse senilai angka realisasi PC PEN Cluster A dan Cluster B ke RKUN. Pada Triwulan IV tahun 2021 realisasi PC PEN untuk Cluster A dan Cluster B adalah senilai Rp215 triliun dengan rincian sebagai berikut:

(dalam triliun Rp)

Rekening	Realisasi	Keterangan
Rekening Lain BI Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster A	58	A. Penanganan Kesehatan • Vaksinasi (1,48) • Diagnostik (3,09) • Therapeutic (28,03) • Penanganan COVID-19 di daerah (21,15) • Penanganan Kesehatan terkait pandemic COVID-19 lainnya (4,25)
Rekening Lain BI Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster B	157	A. Penanganan Kesehatan • Vaksinasi (2,68) • Diagnostik (0,02) • Therapeutic (6,12) • Penanganan COVID-19 di daerah (2,10) • Penanganan Kesehatan terkait pandemic COVID-19 lainnya (2,87) B. Penanganan Kemanusiaan • Bantuan Beras (0) • Program Sembako (41,88) • Bantuan Sembako PPKM (2,98) • Program Perlindungan Masyarakat Lainnya (98,35)

Realisasi SKB III pada tahun 2022

Jumlah pembelian SUN dan/atau SBSN SKB III di pasar perdana oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan dalam APBN Tahun 2022 adalah sebesar Rp224 triliun dengan rincian:

- Penanganan Kesehatan sebesar Rp40 triliun
- Penanganan Kemanusiaan sebesar Rp184 triliun

Selama tahun 2022, realisasi penerbitan SKB III adalah sebagai berikut:

(dalam triliun Rp)

Periode	Rekening	Realisasi	Keterangan
Triwulan III	Rekening Lain BI Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster A	30,66	A. Penanganan Kesehatan - Vaksinasi (1,67) - Therapeutic (23,56) - Penanganan COVID-19 di daerah (5,43)
Triwulan IV		9,34	A. Penanganan Kesehatan - Diagnostik (0,015) - Therapeutic (9,32)
Total Realisasi Cluster A s.d. 31 Desember 2022			40
Sisa Alokasi Cluster A (per 31 Desember 2022)			0
Triwulan III	Rekening Lain BI Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN Cluster B	64,76	A. Penanganan Kesehatan Belum ada realisasi B. Penanganan Kemanusiaan - Program Sembako (28,37) - Program Perlindungan Masyarakat Lainnya (36,39)
Triwulan IV		119,24	A. Penanganan Kesehatan - Vaksinasi (1,67) - Therapeutic (3,36) - Penelitian (0,21) - BOK untuk penanganan COVID-19 (0,30) - Dukungan APBN untuk penanganan COVID-19 lainnya (10,66) B. Penanganan Kemanusiaan - Program Keluarga Harapan/PKH (7,36) - Program Kartu Sembako (23,42)

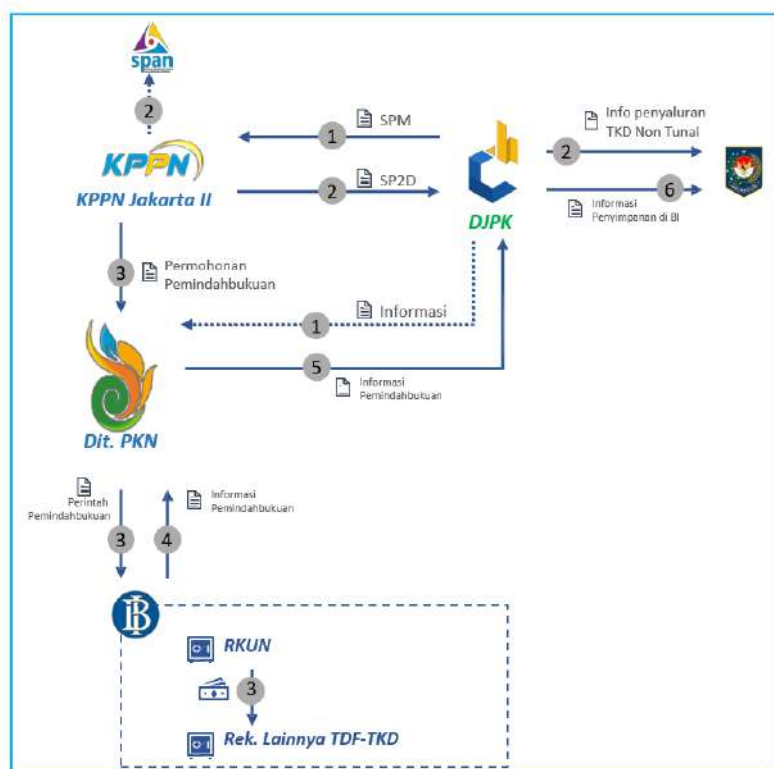
			• Program Kartu Prakerja (7,88) • BLT Dana Desa (21,70) • Bantuan PKLW Nelayan (1,71) • Program Perlindungan Masyarakat Lainnya (40,97)
Total Realisasi Cluster B s.d. 31 Desember 2022			184
Sisa Alokasi Cluster B (per 31 Desember 2022)			0

1. Rekening Lainnya di BI TDF-TKD Pemda

Sesuai PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilakukan dalam bentuk nontunai berupa Treasury Deposit Facility (TDF). TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai berupa TDF dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif melalui pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, serta untuk mengurangi kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar.

Dalam rangka penyimpanan DBH dan/atau DAU yang disalurkan dalam bentuk nontunai berupa TDF pada BI, Kuasa BUN Pusat telah membuka 542 rekening lain BI TDF-TKD Pemda berdasarkan permohonan KPA BUN Pengelolaan DTU di Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Atas penyimpanan dana dalam rekening lain BI TDF-TKD Pemda tersebut, BI memberikan remunerasi sesuai kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Gubernur BI, dimana remunerasi tersebut ditransfer oleh BI ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) secara bulanan. Ketentuan mengenai pembentukan dan pengelolaan TDF dalam rangka penyaluran DBH TA 2022 dalam bentuk nontunai diatur dalam KMK Nomor 10/KM.5/2022, di mana pengisian rekening lain BI TDF-TKD Pemda didahului dengan penerbitan SPM nihil penyaluran DBH nontunai oleh KPA BUN Penyaluran DTU yang diajukan Bersama dokumen pendukungnya ke KPPN Jakarta II. Berdasarkan SPM tersebut, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D nihil penyaluran DBH nontunai, dilanjutkan dengan pemindahbukuan dana oleh Kuasa BUN Pusat dari RKUN ke

rekening lain BI TDF-TKD Pemda. Alur penyaluran DBH nontunai berupa TDF adalah sebagaimana gambar berikut:



Realisasi TDF pada tahun 2022

Selama tahun 2022, telah dilakukan penyaluran DBH nontunai berupa TDF kepada 542 pemda dengan total nilai Rp25.132.963.282.524 dalam 3 tahap berdasarkan KMK Nomor 46/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun 2022 serta PMK Nomor 215/PMK.07/2022 dan PMK Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian tahapan penyaluran DBH nontunai berupa TDF selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahap	Tanggal	Nilai (Rp)	Jumlah Pemda Penerima	Keterangan
I	29 Desember 2022	5.536.859.393.355	52	Penyaluran kurang bayar DBH tahun 2021
II	30 Desember 2022	12.168.344.332.000	542	Penyaluran perubahan rincian DBH tahun 2022
III	30 Desember 2022	7.427.759.557.169	133	Penyaluran DBH reguler tahun 2022
Total		25.132.963.282.524		

Terhadap penyimpanan dana dalam rekening lain BI TDF-TKD Pemda tersebut, sampai dengan 31 Desember 2022 telah diterima remunerasi dengan nilai total **Rp6.766.936.306** pada RKUN. Rincian detail terkait nomor rekening dan saldo pokok TDF masing-masing pemda beserta remunerasi sampai dengan 31 Desember 2022 dituangkan dalam lampiran Kas DDP.

B. BA 999.01

1. Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut:

No.	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah
		valas (Rp)	Rupiah (Rp)	(Rp)
1	Utang Luar Negeri			
a	SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	1.277.871	762.186	2.040.057
b	Pinjaman luar negeri	908.167	-	908.167
	Jumlah Utang Luar Negeri	2.186.038	762.186	2.948.223
2	Utang Dalam Negeri			
a	SBN yang dimiliki oleh penduduk	116.659	4.690.178	4.806.837
b	Pinjaman dalam negeri	-	21.676	21.676
	Jumlah Utang Dalam Negeri	116.659	4.711.855	4.828.513
	Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri pemerintah	2.302.697	5.474.040	7.776.737

*) Data tabel (dalam milyar) di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized* diskon dan *unamortized premium*)

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (Part IV Balance of Payments Manual (BOPM) IMF, Edisi 4, Public Sector Debt Statistic: Guide for Compilers and Users Tahun 2013 dan External Debt Statistics: Guide for Compiler and User Tahun 2014).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua.

2. Adapun penggunaan koefisien dalam perhitungan Discount dan Premium yang belum diamortisasi (Unamortized Discount dan Unamortized Premium) atas seri-seri SBN yang

diterbitkan sebelum tahun 2007, perhitungan nilainya yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 (Audited) menjadi saldo awal Discount dan Premium yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Seri SBN yang diterbitkan mulai 2007, nilai unamortized diskon/premium disajikan pada neraca dengan memperhitungkan amortisasinya menggunakan metode garis lurus dan koefisiennya sebesar nilai unamortized diskon/premium saat penerbitan yang diperhitungkan selama umur utang tersebut sampai dengan tanggal pelunasannya.

3. BMN yang digunakan sebagai underlying asset SBSN pada penerbitan SBSN sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sejumlah 510 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan nilai sebesar Rp183.535.951.310.267. Seluruh BMN yang digunakan sebagai underlying asset SBSN sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 merupakan BMN yang telah menggunakan nilai revaluasi.
4. Outstanding SBSN per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.303.421.530.000.000 (menggunakan kurs saat penerbitan) atau sebesar Rp1.341.402.830.000.000 (menggunakan kurs 31 Desember 2022). Adapun Outstanding asset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.326.771.953.038.040 yang terdiri dari:
 - a. BMN sebesar Rp691.755.865.566.659;
 - b. Proyek sebesar Rp625.661.087.471.381; dan
 - c. Jasa sebesar Rp9.355.000.000.000
5. Pada tahun 2020, telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi underlying asset, khususnya untuk BMN dengan perolehan setelah tahun 2011 untuk memitigasi risiko adanya double underlying asset antara underlying asset berupa proyek dengan underlying asset berupa BMN sehingga pada tahun 2022 sudah tidak terdapat BMN yang memiliki perolehan di atas tahun 2011. Adapun pada tahun 2021 telah dilakukan penggantian atas aset BMN yang sudah tidak memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai underlying asset SBSN (sengketa, dan terdapat pemindahtanganan/penghapusan BMN). Selanjutnya pada Tahun 2022 telah dilakukan penggantian aset BMN untuk memanfaatkan nilai BMN yang telah dilakukan revaluasi sebagai dasar penerbitan SBSN dengan mempertimbangkan hasil analisis kebutuhan pendanaan dari unsur syariah.
6. Transisi LIBOR ke ARR

UK-Financial Conduct Authority (FCA) telah menerbitkan pernyataan resmi pada tanggal 5 Maret 2021 yang menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2022 seluruh tenor LIBOR dalam berbagai mata uang (USD, EURO, Swiss Franc, Yen) secara resmi tidak akan lagi dipublikasikan, kecuali beberapa tenor LIBOR US Dollar (*overnight*, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan) yang masih dipublikasi sampai 30 Juni 2023. Akibat hal tersebut, loan-loan yang memakai LIBOR sebagai dasar perhitungan bunga, akan mengubah rate nya dengan ARR (*Alternative Reference Rates*) dengan melakukan amandemen pada Loan Agreement. ARR yang akan digunakan untuk setiap mata uang adalah sebagai berikut:

- 1) *Secured Overnight Financing Rate (SOFR)* untuk mata uang US Dollar.

- 2) *Tokyo Overnight Average Rate* (TONA) untuk pinjaman dari World Bank dan ADB, dan *Tokyo Term Risk Free Rate* (TORF) untuk JICA dengan mata uang Yen Jepang.
- 3) *Swiss Average Rate Overnight* (SARON) untuk mata uang Frank Swiss.
- 4) *Sterling Overnight Index Average* (SONIA) untuk mata uang Poundsterling

Untuk mata uang Euro, Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan sejak awal telah menggunakan Euribor sebagai suku bunga acuan dimana Euribor tidak termasuk tingkat bunga yang mengalami transisi menjadi ARR.

Sebagai dampak penggunaan ARR, menunjukkan bahwa perubahan dari LIBOR ke ARR dapat berpotensi menaikkan beban biaya bunga pinjaman khususnya untuk pinjaman dari Lender komersial. Namun demikian, Sebagian besar pinjaman dari lender komersial memiliki tenor yang lebih pendek, sehingga kenaikan beban bunga tidak terlalu signifikan untuk keseluruhan total pinjaman luar negeri pemerintah.

C. BA 999.02

Penyusunan laporan keuangan BA 999.02 Tahun 2022 mencakup Pendapatan hibah terencana maupun langsung yang telah dilakukan pengesahan sesuai amanat PMK Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah serta PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, serta PMK 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 39 PMK No.99/PMK.05/2017 bahwa PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. Berdasarkan pasal tersebut, sepanjang belum terdapat BAST antara pemberi dan penerima hibah, baik KL maupun Kementerian Keuangan belum dapat mengakui hal tersebut sebagai pendapatan hibah tahun berjalan. Hal tersebut karena belum terdapat perpindahan kepemilikan serta peralihan hak dan kewajiban dari donor kepada penerima hibah.

PMK 195/PMK.05.2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, menyatakan bahwa “Dalam hal Pemberi PHLN tidak menyampaikan NoD dalam batas waktu yang wajar, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dapat menggunakan rekening koran yang menunjukkan nomor rekening, nama rekening, dan nilai transfer sesuai dengan Surat Penarikan Dana (withdrawal application) untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembukuan Penarikan PHLN”. Transaksi pendapatan hibah dapat mempengaruhi pos neraca untuk transaksi yang masih dalam proses dan belum dilakukan pengesahan atau reklasifikasi akun.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) Pasal 131 ayat (3) mengatur bahwa Hibah Kepada Daerah ditetapkan merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada

perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Implikasi dari amanat UU HKPD tersebut, maka tata kelola hibah kepada daerah disesuaikan dengan siklus pengalokasian Transfer ke Daerah.

Adapun sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan dinamika yang ada, Entitas Akuntansi Satuan Kerja (Satker) 985261 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Hibah Rupiah Murni) - Pengelolaan Hibah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan Satker 985251 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Pengelolaan Hibah yang bersumber dari Hibah dan/atau Pinjaman Luar Negeri yang menjadi bagian BA BUN 999.02 (Pengelolaan Hibah), pada tahun 2023 akan digabung menjadi satu menjadi bagian dari BA BUN 999.05 (Transfer ke Daerah).

D. BA 999.03

1. Kondisi Status ILKPN

Laporan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai UAKPA BUN BA 999.03 Investasi Pemerintah pada PMN Tahun 2022 Audited telah disusun berdasarkan ILKPN yang disampaikan melalui aplikasi internal Kementerian Badan Usaha Milik Negara Silaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) sampai dengan tanggal 10 Mei 2023. Adapun rekapitulasi status laporan keuangan perusahaan negara dirinci pada tabel berikut:

Tabel Status Laporan Keuangan BUMN

No	Status	Jenis Laporan	
		Neraca	Laba/Rugi
1.	Audited 2022	44	44
2.	Proforma Audited 2022	1	1
3.	Unaudited 2022	20	20
4.	Triwulan III	3	3
5.	Triwulan I 2022	2	2
6.	Unaudited 2021	1	0
7.	Audited 2020	1	0
8.	Triwulan III 2018	1	0
Total		73	70

Tabel Status Laporan Keuangan Minoritas/Non BUMN

No	Status	Jenis Laporan	
		Neraca	Laba/Rugi
1.	Audited 2022	46	46
2.	Unaudited 2022	11	11
3.	Triwulan III 2022	0	0
4.	Audited 2020	1	0
Total		58	57

Dikarenakan terdapat kondisi BUMN yang mengalami kesulitan likuiditas dan kondisi lain yang menyebabkan Perusahaan Negara tidak menerbitkan ILKPN maka masih terdapat

perbedaan status periode pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.06/2017 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian BUMN Pasal 4 ayat 4 yang menyatakan bahwa “dikecualikan bagi UAKPA BUN dari ketentuan melampirkan Ikhtisar LKPN dan LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal:

- Perusahaan Negara memiliki periode pelaporan yang berbeda dengan periode pelaporan Investasi Pemerintah; atau
- Perusahaan Negara tidak menerbitkan LKPN karena alasan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesulitan likuiditas, proses likuidasi, dan kondisi lain yang menyebabkan Perusahaan Negara tidak menerbitkan LKPN.”

Adapun daftar BUMN Material dengan nilai Investasi Permanen Pemerintah lebih dari Rp1 Triliun yang mengalami keterlambatan penyampaian LK 2022 Audited dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	BUMN	Alasan Keterlambatan
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Seluruh anak perusahaan (termasuk ex-BUMN) sudah selesai proses auditnya, kecuali PT Askrindo yang masih dalam proses konfirmasi KAP atas pencatatan <i>revenue recognition</i> . Diharapkan dapat rilis audit report pada minggu ke-4 Mei.
2	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Sedang dalam proses koordinasi tagihan atas <i>Track Access Charges</i> (TAC) sebagai dampak penerapan aturan baru pada Kementerian Perhubungan.
3	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Terdapat pergantian partner di KAP dan KAP masih melakukan konfirmasi atas masalah restrukturisasi keuangan serta isu strategis KS ke depan. Target penerbitan laporan audit adalah 31 Mei.
4	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	KAP masih dalam proses review atas pencatatan akuisisi pada anak perusahaan di tahun lalu dan memungkinkan timbul <i>restatement</i> .
5	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Terdapat pergantian KAP sehingga perlu melakukan review terutama atas nilai wajar asset yang masih dilakukan KJPP sampai dengan 30 April.

Adapun daftar BUMN dengan nilai Investasi Permanen Pemerintah kurang dari Rp1 Triliun yang mengalami keterlambatan penyampaian LK 2022 Audited dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	BUMN	Alasan Keterlambatan
1	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Diakibatkan ada permasalahan keterlambatan pembayaran KAP untuk audit Tahun Buku 2021, sehingga laporan audit tahun 2021 baru rilis di akhir tahun 2022. Target rilis audit Tahun 2022 adala 30 Juni.
2	Perum Produksi Film Negara	Proses finalisasi KAP untuk konfirmasi beberapa isu pencatatan. Laporan audit akan rilis selambatnya pada 30 Juni.
3	Perum Damri	Dalam proses konfirmasi beberapa Barang Milik Negara (BMN) yang sudah digunakan, namun belum dicatat dalam buku perusahaan. Laporan audit akan rilis pada 31 Mei.
4	Perum PPD	Dalam proses konfirmasi beberapa Barang Milik Negara (BMN) yang sudah digunakan, namun belum dicatat dalam buku perusahaan serta adanya kemungkinan <i>restatement</i> untuk tahun 2021. Laporan audit akan rilis pada minggu ke-2 Mei.

Selain BUMN tersebut di atas, terdapat BUMN yang saat ini dititipkelolakan pada PT Danareksa (Persero) dan PT PPA yang terlambat menyampaikan laporan audit Tahun Buku 2022 dikarenakan perusahaan dalam proses restrukturisasi keuangan dan mengalami kesulitan likuiditas yaitu PT Semen Kupang (Persero), PT DKB (Persero), PT DPS (Persero), PT BBI (Persero), PT Barata (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT PDIP Batam (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Virama Karya (Persero), PT Indra Karya (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Primissima (Persero), PT VTP (Persero) dan PT PANN (Persero).

2. Pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan

Dalam rangka membangun industri pertahanan nasional yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing, Kementerian BUMN menginisiasi pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan. Manfaat pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan antara lain meningkatkan kemampuan finansial dan akses terhadap pendanaan bagi anggota holding, memperluas pasar industri pertahanan ke skala regional dan internasional, termasuk meningkatkan bargaining power dalam kerja sama alih teknologi dengan mitra asing. Pelaksanaan pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan melalui inbreng saham seri B Negara RI pada PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), dan PT Dahana (Persero) ke dalam PT LEN Industri (Persero) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai sebagai berikut:

No	Perusahaan	Lembar Saham	Nilai
1	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	7.778.082	Rp8.065.269.692.946
2	PT PAL Indonesia (Persero)	5.165.660	Rp5.299.101.418.213
3	PT Pindad (Persero)	1.367.541	Rp4.250.552.926.938
4	PT Dahana (Persero)	249.999	Rp1.850.395.735.401
Total			Rp19.465.319.773.498

Pada tanggal 01 Maret 2022 telah dilakukan perjanjian pengalihan hak atas saham seri B Negara RI pada PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), dan PT Dahana (Persero) ke dalam PT LEN Industri (Persero). Dengan demikian, PT LEN Industri (Persero) menjadi induk holding BUMN Industri Pertahanan dan status PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad dan PT Dahana berubah menjadi perusahaan minoritas.

3. Pembentukan Holding BUMN Danareksa

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Danareksa serta meningkatkan skala bisnis perusahaan anggota holding Danareksa agar lebih memberikan kontribusi positif kepada Indonesia, Kementerian BUMN mentransformasikan PT Danareksa (Persero) menjadi Holding Pengelola BUMN Lintas Sektor. Pelaksanaan transformasi Danareksa menjadi Holding Lintas Sektor dilaksanakan

secara bertahap. Pada tahap pertama dilakukan pengalihan saham Negara RI pada 10 Perusahaan Negara kepada PT Danareksa (Persero) sesuai PP Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.06/2022 tanggal 18 April 2022 dengan nilai sebesar:

No	Perusahaan	Lembar Saham	Nilai
1	PT Nindya Karya (Persero)	5.890.500 Seri B 59.499 Seri C	Rp1.968.999.699.076
2	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	249.999 seri B	Rp679.597.281.600
3	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	89.999 seri B	Rp339.502.382.709
4	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	76.838 seri B	Rp1.117.484.521.616
5	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	23.999 seri B	Rp188.086.870.721
6	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	266.219 seri B	Rp1.139.971.222.919
7	PT Balai Pustaka (Persero)	14.399 seri B	Rp80.194.430.556
8	PT PPA (Persero)	5.952.662 seri B	Rp10.906.998.167.699
9	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	100.000	Rp427.750.588.000
10	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	100.000	Rp782.834.635.000
Total			Rp17.631.419.769.896

Pada tanggal 24 Juni 2022, telah ditandatangani perjanjian pengalihan saham Negara RI pada PT Nindya Karya (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Kawasan Industri Medan (Persero), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), PT Kawasan Industri Makassar (Persero), PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), PT Balai Pustaka (Persero), PT PPA (Persero), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung/JIEP, dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut/SIER ke dalam modal saham PT Danareksa (Persero).

Dengan demikian, PT Danareksa (Persero) resmi menjadi induk holding lintas sektor, sementara PT Nindya Karya (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Kawasan Industri Medan (Persero), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), PT Kawasan Industri Makassar (Persero), PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), PT Balai Pustaka (Persero), PT PPA (Persero) berubah status menjadi minoritas, sedangkan PT JIEP & PT SIER sudah tidak menjadi minoritas dan menjadi sepenuhnya anak perusahaan PT Danareksa (Persero).

4. Pembentukan Holding BUMN Pangan

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat operasional excellence dan modernisasi teknologi, Kementerian BUMN berinisiasi membuat Holding BUMN Pangan. Upaya pembentukan holding BUMN Pangan dilakukan melalui penggabungan yang dimulai sejak tahun 2021 dan selanjutnya dilakukan pengalihan saham Negara Republik Indonesia pada tahun 2022.

Pengalihan saham seri B Negara RI pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Garam (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Perikanan Indonesia (Persero) kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.06/2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan nilai sebagai berikut:

No	Perusahaan	Lembar Saham	Nilai
1	Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	942.744	Rp3.725.494.000.000
2	PT Garam (Persero)	599.999	Rp684.461.000.000
3	PT Sang Hyang Seri (Persero)	1.506.992	Rp4.211.690.000.000
4	PT Berdikari (Persero)	74.999	Rp201.783.000.000
5	PT Perikanan Indonesia (Persero)	495.216	Rp458.477.000.000
Total			Rp9.281.905.000.000

Pada tanggal 7 Januari 2022 telah dilakukan perjanjian pengalihan hak atas saham seri B negara RI pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Garam (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Perikanan Indonesia (Persero) kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Dengan demikian PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menjadi Induk holding BUMN Pangan dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Garam, PT Sang Hyang Seri, PT Berdikari, dan PT Perikanan Indonesia berubah menjadi anak perusahaan.

5. Integrasi PT INUKI (Persero) ke Holding Farmasi

Dalam rangka pengembangan industri kesehatan berbasis nuklir dan untuk memperkuat holding BUMN Farmasi, Kementerian BUMN mengintegrasikan PT Industri Nuklir Indonesia/INUKI (Persero) ke dalam PT Bio Farma (Persero). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan No 183/KMK.06/2022 tanggal 23 Mei 2022, inbreng saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT INUKI (Persero) ke dalam PT Bio Farma (Persero) sebanyak 27.199 saham yang seluruhnya senilai Rp1.457.703.206.

Pada tanggal 15 Juli 2022 telah dilakukan pengalihan saham Negara Republik Indonesia pada PT INUKI (Persero) ke dalam PT Bio Farma (Persero) sesuai surat Menteri BUMN No. S-445/MBU/07/2022 tanggal 15 Juli 2022, yang mengakibatkan PT INUKI berubah status menjadi anak perusahaan PT Bio Farma (Persero).

6. Integrasi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Dalam rangka menguatkan posisi Holding Semen Indonesia dalam industri semen di Indonesia, sesuai PP No 33 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan No 413/KMK.06/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Kementerian BUMN mengintegrasikan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ke dalam PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pelaksanaannya dilakukan melalui inbreng saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ke dalam PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 7.499.999.999 lembar saham yang seluruhnya senilai Rp2.848.672.369.646.

Pada tanggal 19 Desember 2022, telah dilakukan pengalihan saham negara RI pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ke dalam PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Saham No. W12/22/PPS-SI yang mengakibatkan PT Semen

Baturaja (Persero) Tbk berubah status menjadi anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

7. Hibah Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk kepada Pemerintah Republik Indonesia

Berkaitan dengan harapan terwujudnya aspirasi Pemerintah Republik Indonesia terhadap PT Bank Syariah Indonesia Tbk/ ("BSI") untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia yang memiliki daya saing secara global, untuk menjadi agent of development ekonomi syariah, serta untuk menguatkan dan mendukung pertumbuhan bisnis melalui kebijakan strategis, telah dilakukan hibah satu lembar saham BSI yang berasal dari salah satu pemegang saham BSI yaitu Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI kepada Pemerintah Negara RI yang tertuang dalam Perjanjian Hibah Saham No. 4 Tanggal 13 Mei 2022. Proses hibah tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Mei 2022 yang menyetujui satu lembar saham tersebut diklasifikasikan sebagai saham khusus Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500.

Dengan demikian, atas hibah satu lembar saham BSI yang telah dilakukan kepada Pemerintah Negara RI mengakibatkan adanya penambahan entitas BSI yang dicatat sebagai Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas pada pelaporan periode 31 Desember 2022.

8. Perkembangan Pembubaran BUMN

Berdasarkan arahan Presiden RI dalam Rapat Internal Pembentukan Holding Danareksa — PPA tanggal 8 Maret 2021 dan Rakor KBUMN tanggal 14 Oktober 2021 mengenai BUMN yang mengalami kinerja operasional dan keuangan yang buruk untuk dilakukan penutupan. Dalam rangka menindaklanjuti arahan tersebut Menteri BUMN telah menyampaikan rencana pembubaran 7 BUMN kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor SR-1009/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Tujuh BUMN yang dinilai tidak layak dipertahankan sehingga diusulkan untuk dilakukan pembubaran, antara lain PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero). Menteri Keuangan telah memberikan tanggapan melalui surat No. S-494/MK.06/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang menyampaikan sependapat 7 BUMN tersebut dapat dibubarkan.

Rencana Pembubaran 7 (tujuh) BUMN dimaksud terbagi dalam 3 kategori, yaitu pembubaran melalui RUPS, Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi), dan Pembubaran atas BUMN yang saat ini telah dalam status kepailitan, dengan rincian sebagai berikut:

No	BUMN	Kondisi	Skema Penutupan
Pembubaran melalui RUPS			
1	PT Industri Gelas (Persero)	- Operasi berhenti sejak 2015. - Fasilitas produksi sudah obsolete.	RUPS Pembubaran

No	BUMN	Kondisi	Skema Penutupan
2	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	- Berhenti produksi sejak 2008. - Fasilitas produksi sudah obsolete. - Ketersediaan bahan baku sangat terbatas - Sejak 2012 pendapatan berasal dari optimalisasi pembangkit listrik bersama PLN dengan skema KSO sewa pembangkit dengan Pi BS.	RUPS Pembubaran
3	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	- Industri dalam fase <i>sunset</i>. - Fasilitas produksi tidak kompetitif. - Pendapatan berasal dari penyewaan aset tetap.	- Penyelesaian Laporan Audit 2021 - RUPS Pembubaran
4	PT PANN (Persero)	Sudah tidak menjalankan <i>core business</i> .	- Penjualan aset PT PANN berupa saham anak perusahaan (PT PPM) - RUPS Pembubaran
Pembubaran melalui Pembatalan Putusan PKPU/Homologasi			
1	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	- Tidak beroperasi sejak 2014. - Tidak berjalannya skenario penyehatan sebagaimana putusan PKPU.	Pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) oleh PT PPA sebagai kreditur.
2	PT Istaka Karya (Persero)	- Saat ini masih menjalankan kegiatan operasional namun mengalami kesulitan permodalan. - Tidak memiliki keunggulan kompetitif. - Tidak mampu menjalankan putusan PKPU.	Pembatalan oleh kreditur homologasi.
Dalam Kepailitan			
1	PT Kertas Leces (Persero)	- Telah dinyatakan pailit oleh PN Niaga Surabaya pada 2018. - Seluruh SDM telah di-PHK.	Penyelesaian penjualan tanah/bangunan oleh kurator

Sampai dengan saat ini, perkembangan proses pembubaran 7 (tujuh) BUMN tersebut, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan RUPS Pembubaran pada 3 BUMN

- PT Industri Sandang Nusantara (Persero) telah dilaksanakan RUPS Pembubaran melalui surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-90/MBU/02/2022 pada tanggal 2 Februari 2022. Pada tanggal 17 Maret 2023 sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.
- PT Iglas (Persero) telah dilaksanakan RUPS Pembubaran melalui surat keputusan RUPS Nomor: S-149/MBU/03/2022 pada tanggal 10 Maret 2022. Pada tanggal 3 April 2023 sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Gelas.
- PT Kertas Kraft Aceh (Persero) telah dilaksanakan RUPS Pembubaran melalui RUPS Luar biasa KKA pada tanggal 11 Maret 2022 ("RUPS Pembubaran KKA") sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kertas Kraft Aceh (Persero) No. 07 tanggal 11 Maret 2022. Pada tanggal 3 April 2023 sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh.

b. Pelaksanaan pembatalan perjanjian putusan PKPU / Homologasi pada 2 BUMN

- PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dinyatakan pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan

Perdamaian/2022/PN Niaga Sby Jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby pada tanggal 2 Juni 2022. Pada tanggal 20 Februari 2023 sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines.

- PT Istaka Karya (Persero) dinyatakan pailit dan harta pailit berada dalam keadaan insolven berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 12 Juli 2022. Pada tanggal 17 Maret 2023 sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya.

Sementara itu, terkait dengan proses pembubaran PT PANN (Persero) saat ini sedang dalam tahapan permintaan persetujuan RUPS Pembubaran PT PANN (Persero).

9. Pemindahbukuan Dana Debt for Nature Swap (DNS)

Pada tahun 2022, Menteri Keuangan menetapkan Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana pada BLU BPDH sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah atas dana DNS.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada November 2022 telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor BA-14/KN.3/2022 dan BAST-24/BPDH.2/2022 yang menyepakati pemindahbukuan dana Debt For Nature Swap (DNS) dari Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BLU BPDH.

Dengan ditandatanganinya BAST tersebut, maka Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan selaku pelaksana UAIP menyerahkan pencatatan dana DNS kepada UAKPA BLU BPDH.

Adapun rincian akun yang dipindahbukukan adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun	Nilai (Rp)
121321	Dana Bergulir Kementerian Negara	17.912.211.670
123112	Dana Bergulir Diragukan Tertagih Kementerian Negara	(17.912.211.670)
163111	Cadangan Dana Reboisasi	58.596.960.796

BLU BPDH melaksanakan Pelaporan keuangan tingkat UAKPA BUN BA 999.03 kepada PPA BUN BA 999.03 mulai terhitung untuk periode Pelaporan atas laporan Unaudited 2022.

10. Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum selama tahun 2022

Pada tahun 2022, Menteri Keuangan menetapkan nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Malang, Universitas

Andalas, dan Universitas Brawijaya melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 444/KMK.06/2022, 445/KMK.06/2022, 446/KMK.06/2022, dan 447/KMK.06/2022.

Atas penetapan tersebut selanjutnya dilakukan koreksi awal pada saldo ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal
Universitas Negeri Malang	1.846.612.548.097
Universitas Andalas	1.454.766.175.940
Universitas Brawijaya	3.422.807.945.353
Universitas Negeri Padang	1.221.702.131.367
Koreksi Saldo Awal Ekuitas	7.945.888.800.757

11. Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB)

Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI (Persero)

Dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB), Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015. Perpres 107 Tahun 2015 menugaskan kepada konsorsium Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan PT Perkebunan Nusantara VIII dengan pimpinan konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk membentuk perusahaan patungan yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

Dalam pelaksanaan penugasan ini konsorsium BUMN atau melalui PT PSBI bekerja sama dengan badan usaha lainnya dhi. Beijing Yawan membentuk perusahaan patungan, yaitu PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC). Pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan tersebut bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan, pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, dan/atau pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penugasan ini tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 2021, Pemerintah menetapkan Perpres 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perpres ini mengubah pimpinan konsorsium BUMN menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Selain itu, Perpres ini juga menambah skema pendanaan dapat didukung dengan pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal. Pembiayaan dari APBN tersebut berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN.

Pada tahun 2021, Pemerintah memberikan penyertaan modal negara kepada PT KAI (Persero) sebagai pimpinan konsorsium BUMN sebesar Rp4,3 Triliun untuk pemenuhan kebutuhan kekurangan setoran modal (base equity) konsorsium BUMN kepada PT KCIC (vide Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2021).

Cost Overrun

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT KCIC, penyelesaian proyek KCJB, yang semula membutuhkan biaya investasi awal sebesar USD6,071 Miliar, mengalami peningkatan biaya (cost overrun).

Sesuai ketentuan Perpres 93 Tahun 2021, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai melakukan reviu atas besaran cost overrun proyek KCJB, dengan hasil reviu sebesar USD1,45 Miliar. Pemenuhan kebutuhan cost overrun tersebut dilakukan secara proporsional dengan porsi PT PSBI sebesar 60% dan Beijing Yawan sebesar 40% (sesuai porsi kepemilikan pada PT KCIC), baik melalui tambahan setoran modal dan/atau pinjaman.

Terhadap nilai cost overrun hasil reviu BPKP tersebut, telah dilaksanakan rapat Komite KCJB (yang beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan) tanggal 3 Oktober 2022. Rapat Komite KCJB telah memutuskan untuk memberikan dukungan penyertaan modal negara kepada PT KAI sebesar Rp3,2 Triliun untuk kebutuhan cost overrun porsi ekuitas konsorsium BUMN pada PT KCIC. Dukungan PMN kepada PT KAI (Persero) ini telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022. Selanjutnya, hasil kesepakatan tanggal 14 Februari 2023 dengan pihak China diputuskan bahwa nilai cost overrun proyek KCJB sebesar USD1,205 miliar sehingga kebutuhan cost overrun porsi ekuitas konsorsium BUMN pada PT KCIC turun menjadi 2,82 Triliun

Adapun atas sisa kebutuhan cost overrun porsi konsorsium BUMN, PT KAI akan mengajukan pinjaman kepada China Development Bank (CDB). Kesepakatan atas pengajuan pinjaman tersebut saat ini masih dalam proses negosiasi antara pihak Indonesia dan pihak Tiongkok.

12. Penyertaan Modal Negara pada Waskita Tahun 2022

Penambahan PMN ke dalam modal saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Waskita) ditetapkan dengan PP Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk. Mengingat Waskita merupakan perusahaan terbuka, maka penambahan modal dilaksanakan melalui Hak dengan Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui mekanisme pasar modal.

Dalam perkembangan pelaksanaan restrukturisasi keuangan, perusahaan mengalami kekurangan likuiditas untuk modal kerja penyelesaian proyek-proyek yang dimiliki dan

kekurangan likuiditas untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo sehingga going concern Waskita perlu dievaluasi lebih lanjut. Di sisi lain, proses rights issue telah berjalan namun harga saham Waskita terus menurun di bawah range harga rights issue yang ditetapkan. Hal ini selanjutnya dibahas dalam rapat Komite Privatisasi pada tanggal 27 Desember 2022 sehingga diputuskan rights issue Waskita ditinjau ulang sampai restrukturisasi keuangan Waskita selesai.

Untuk itu, sesuai keputusan rapat komite Privatisasi, dana PMN TA 2022 ditempatkan sementara pada rekening milik Bendahara Umum Negara dan Menteri Keuangan menindaklanjutinya dengan menetapkan KMK Nomor 519/KMK.06/2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara.

Sejalan dengan tindak lanjut catatan Komite Privatisasi untuk melakukan reviu restrukturisasi keuangan, Waskita mendapatkan gugatan PKPU dari beberapa vendor, yang semakin meningkatkan isu kepastian going concern Waskita di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu kepastian skema restrukturisasi keuangan terhadap going concern perusahaan sebagai pertimbangan rights issue dan pencairan dana PMN 2022 yang masih disimpan dalam rekening penampungan PMN. Dengan kondisi tersebut, potensi right issue tidak terserap publik (undersubscribed) cukup besar sehingga tujuan rights issue untuk perolehan modal kerja dari porsi publik tidak dapat dicapai yang pada akhirnya tidak bisa mendorong perbaikan kinerja perusahaan secara komprehensif. Dengan exposure risiko keuangan negara yang cukup besar tersebut, penundaan rights issue dan PMN merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan.

Dalam perkembangannya hingga bulan Mei 2023, proses restrukturisasi keuangan Waskita belum selesai dilakukan dan terdapat potensi tidak terlaksananya proses rights issue yang berdampak pada tidak dapat dilakukannya penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Waskita. Setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Privatisasi mengenai pengembalian dana PMN ke Rekening Kas Umum Negara dan pembatalan rights issue Waskita, Menteri Keuangan menetapkan KMK Nomor 162 Tahun 2023 tentang Pengembalian Dana Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 Ke Rekening Kas Umum Negara. Realisasi pengembalian dana PMN dimaksud dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023.

13. Realisasi Investasi Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN)

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada tahun 2022 pemerintah masih menganggarkan pembiayaan investasi yang ditujukan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan dalam perkembangannya mengalami perubahan alokasi yang rinciannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

a. KPA BUMN

Penyertaan Modal Negara untuk BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional sampai 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.350.000.000.000 atau 100% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp34.350.000.000.000 dengan rincian penerima PMN untuk BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai berikut:

- PT Waskita Karya (Persero) Tbk Rp3.000.000.000.000 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022. Tujuan Penggunaan Dana PMN untuk memperkuat permodalan dalam rangka restrukturisasi dan digunakan untuk modal kerja dan investasi jalan tol.
- PT Utama Karya (Perseo) Rp31.350.000.000.000 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022. Tujuan Penggunaan Dana PMN untuk memperkuat permodalan sehingga dapat melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Namun, sesuai keputusan rapat komite Privatisasi, dana PMN TA 2022 ditempatkan sementara pada rekening milik Bendahara Umum Negara dan Menteri Keuangan menindaklanjutinya dengan menetapkan KMK Nomor 519/KMK.06/2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara.

Selain itu juga terdapat realisasi pembiayaan investasi non permanen PEN sebesar Rp1.201.143.500.000 atau 100% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp1.201.143.500.000 dengan penerima investasi non permanen yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Selain itu terdapat konversi obligasi menjadi saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.000.000.000.000 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022.

Rincian penyaluran dana IP PEN kepada Penerima Investasi sebagai berikut:

No	BUMN Penerima	Saldo (Rp)			
		Per 31 Desember 2021	Mutasi Dana dari RIPPEN ke BUMN	Konversi ke Saham	Per 31 Desember 2022
1	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000.000	0	1.000.000.000.000	0
2	Perum Perumnas	650.000.000.000	0	0	650.000.000.000
3	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1.751.337.360.411	1.201.143.500.000	0	2.952.480.860.411
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	2.200.000.000.000	0	0	2.200.000.000.000
5	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000	0	0	3.500.000.000.000
Jumlah		9.101.337.360.411	1.201.143.500.000	1.000.000.000.000	9.302.480.860.411

b. KPA Direktorat EAS

Dalam rangka penjaminan Program PEN, Pemerintah memberikan dukungan loss limit kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo yang melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku UMKM. Pada tahun 2022, untuk dukungan loss limit atas penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha UMKM Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp814,00 miliar yang telah direalisasikan pada bulan November 2022 sesuai dengan rencana penarikan dana pada DIPA. Selanjutnya, untuk dukungan backstop loss limit atas skema penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi, di tahun 2022, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan karena berdasarkan proyeksi yang telah dihitung di awal penyusunan program, total dana cadangan yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi potensi klaim loss limit kepada Pemerintah. Adapun untuk penjaminan kepada BUMN dilakukan dengan penjaminan bersama Badan Usaha Penjaminan (BUP) dengan skema first loss basis sehingga dalam hal terjadi klaim, maka BUP akan menanggung terlebih dahulu sampai dengan porsi first loss yang ditanggung, sehingga tidak terdapat Indikasi Kebutuhan Dana Cadangan Penjaminan PEN BUMN untuk tahun 2022.

Di Tahun 2022, dalam rangka pelaksanaan Penjaminan UMKM dan Korporasi Program PEN Generasi ke-2, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terdapat realisasi atas penjaminan Program PEN untuk UMKM sebesar Rp12.669,74 miliar dari 763.944 debitur, sedangkan untuk penjaminan program PEN Korporasi sebesar Rp2.147,17 miliar dari 8 debitur. Sedangkan untuk Penjaminan BUMN sejak Januari sampai dengan 31 Desember 2022 telah diterbitkan 6 penjaminan dengan total nilai sebesar Rp50,11 triliun.

Berdasarkan data pada sistem e-penjaminan Korporasi dan UMKM (e-JamKU), sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, jumlah kredit modal kerja yang masih aktif (outstanding) atas Penjaminan PEN UMKM Generasi ke-1 adalah sebesar Rp22.836,82 miliar dari 200.641

transaksi penjaminan dan atas Penjaminan PEN UMKM Generasi ke-2 adalah Rp12.648,87 miliar dari 759.942 transaksi penjaminan. Sedangkan jumlah kredit modal kerja yang masih aktif (outstanding) atas Penjaminan PEN Korporasi Generasi ke-1 adalah Rp1.508,63 miliar dari 26 transaksi penjaminan dan atas Penjaminan PEN Korporasi Generasi ke-2 adalah Rp2.147,17 miliar dari 8 transaksi penjaminan. Adapun nilai outstanding atas penjaminan PEN BUMN sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp10,43 triliun, dengan rincian nilai obligasi sebesar Rp3,90 triliun dan sukuk sebesar Rp1,15 triliun serta pinjaman sebesar Rp 5,38 triliun dari total plafond penjaminan sebesar Rp61,05 triliun dan €134,98 juta. Nilai Outstanding tersebut memperhitungkan penjaminan yang diterbitkan sebelumnya.

Terhadap Penjaminan UMKM Program PEN Generasi ke-2, pemerintah tidak memberikan dukungan loss limit kepada penjamin sehingga Pemerintah tidak akan menanggung kerugian klaim dalam hal loss ratio penjamin melebihi threshold yang ditentukan sebagaimana Penjaminan UMKM Program PEN Generasi ke-1. Oleh karena itu, realisasi penjaminan UMKM Program PEN Generasi ke-2 tidak diperhitungkan dalam outstanding penjaminan Pemerintah.

Adapun rincian kewajiban penjaminan dalam rangka penjaminan Program PEN pada Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Rincian Program Penjaminan	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Transaksi Penjaminan	Rentang Tenor Penjaminan (Tahun)			Nilai KMK/Plafon yang Dijamin (miliar)		Porsi Penjaminan (miliar)	
								Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1	Penjaminan Kepada Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Program PEN	Pelaku Usaha UMKM	Perbankan	200.641	0	s.d.	3	IDR 22.836,82	IDR 22.836,82	IDR 18.269,45	IDR 18.269,45
2	Penjaminan Kepada Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Program PEN	Pelaku Usaha Korporasi	Perbankan	34	0	s.d.	3	IDR 3.705,79	IDR 3.705,79	IDR 3.655,79	IDR 3.655,79
3	Penjaminan Kepada Pelaku Usaha BUMN dalam rangka Program PEN	Pelaku Usaha BUMN	Perbankan dan Wali Amanat	8	2	s.d.	7	IDR 61.045,24	IDR 61.045,24	IDR 53.261,37	IDR 53.261,37
								EUR 0,135	IDR 2.255,87	EUR 0,135	IDR 2.255,87
Total				200.683				IDR 87.587,85	IDR 87.587,85	IDR 75.186,62	IDR 75.186,62
								EUR 0,135	IDR 2.255,87	EUR 0,135	IDR 2.255,87

Sebagai tambahan informasi, sampai dengan 31 Desember 2022 klaim pihak yang dijamin oleh Pemerintah tidak mencapai ambang batas loss limit 90% sehingga Pemerintah tidak memberikan dukungan loss limit. Adapun nilai klaim yang sudah dilaporkan oleh penjamin per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- Pelaku Usaha UMKM

Penjamin	Akumulasi Klaim yang Disetujui	Jumlah Debitur	Loss ratio
Askindo	267.972.412.151	3.714	9,68%
Jamkrindo	130.255.327.032	2.127	4,78%
Total	398.277.739.183	5.841	

Loss Ratio = (akumulasi klaim yang disetujui/akumulasi IJP yang diterima) x 100%

- Pelaku Usaha Korporasi

Penjamin	Akumulasi Klaim yang disetujui	Jumlah Debitur	Loss Ratio
LPEI	8.501.466.578	1	2,29%

- Pelaku Usaha BUMN

Belum terdapat klaim.

c. UAP DJPK

Terdapat realisasi penerimaan pembiayaan pada UAP DJPK berupa pengembalian dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp2.311.496.745.459 yang terdiri dari pengembalian pokok pinjaman melalui mekanisme pemotongan DAU bulan Januari-Desember 2022 sebesar Rp485.666.987.126 dan pengembalian atas dana yang tidak terserap di PT SMI selama Januari-Desember 2022 sebesar Rp1.825.829.758.333.

Sesuai dengan Pasal 14A ayat (2) PMK Nomor 43/PMK.07/2021, bahwa hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah pada rekening penampungan PT Sarana Multi Infrastruktur setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada setiap triwulan. Hasil penempatan dana sampai dengan 31 Desember 2022 berupa pendapatan bunga deposito dan jasa giro sebesar Rp159.762.701.303 dan pendapatan bunga pinjaman Rp290.470.830.858.

14. Estimasi Dari Dampak Finansial yang Diukur Kewajiban Penjaminan

Menurut Undang-Undang nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021, kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.

Kewajiban penjaminan belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintah dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP No, 4 paragraf 58 tentang Catatan atas Laporan Keuangan sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontijensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019, kewajiban kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- a. Karakteristik kewajiban kontijensi;
- b. Estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- c. Indikasi tingkat ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
- d. Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga;

Lebih lanjut, IPSAS 19-Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets paragraph 100 juga menyatakan bahwa *"Unless the possibility of any outflow in settlement is remote, an entity should disclose for each class of contingent liability at the reporting date a brief description of the nature of the contingent liability and, where practicable:*

- a. An estimate of its financial effect, measured under paragraphs 44 to 62;*
- b. An indication of the uncertainties relating to the amount or timing of any outflow;*
- c. The possibility of any reimbursement."*

Kewajiban penjaminan adalah:

- a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
- b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Amanat pengaturan pemberian jaminan

Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.

Kemudian melalui Perpres Nomor 46/2019, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan Pemerintah tersebut menjadi beban utang PDAM apabila Pemerintah Pusat telah membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memungkinkan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber (risk factor) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber (risk factor) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Kemudian melalui Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Kemudian melalui Perpres Nomor 49/2017, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. Kereta Api (Persero) dalam rangka mendukung proyek penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 14/2017 memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. PLN (Persero) dalam rangka mendukung percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (35GW).

Kemudian melalui Perpres Nomor 58/2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres 109/2020, Pemerintah memberikan jaminan atas risiko politik bagi Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerjasama/dokumen yang dipersamakan dengan Badan Usaha dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020), Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk. Penjaminan secara langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN, sedangkan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan di Tahun 2020 kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah

menugaskan/menunjuk PT Jaminan Kredit Indonesia/Jamkrindo (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia/Askindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan loss limit kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askindo (Persero). Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal usaha bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk pelaksanaan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan loss limit yang ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan loss limit tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT Penjaminan infrastruktur Indonesia (PII). PT PII sebagai pelaksana dukungan loss limit juga menerima dukungan Pemerintah berupa backstop Loss Limit sebagai antisipasi adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan loss limit yang ditanggung oleh PT PII. Selain itu, bagi BUMN yang melakukan penugasan dari Pemerintah dan terdampak pandemic Covid-19, Pemerintah bersama PT PII juga memberikan penjaminan bersama untuk pinjaman kredit dari BUMN dimaksud.

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (BUMN, BUMD, PJPB/Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya (mengalami default). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Latar belakang timbulnya penjaminan antara lain sebagai berikut:

- a. Perlu pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian v.s. keterbatasan dana Pemerintah; dan
- b. Perlu dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi.

Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan

dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp316,86 miliar, untuk anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Adapun alokasi anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional tersebut dalam APBN TA 2022 sebagai konsekuensi dan komitmen dalam penerbitan jaminan pemerintah dan untuk mendukung mitigasi risiko default dari program penjaminan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (10.000 MW tahap I), penjaminan infrastruktur pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penjaminan pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN, penjaminan pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera, penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), dan penjaminan pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 diatur bahwa anggaran kewajiban penjaminan pada APBN diakumulasikan ke rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang digunakan untuk pembayaran klaim pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan akhir September tahun 2022 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 adalah 94 surat jaminan pemerintah dengan nilai sebesar ekuivalen Rp634,16 triliun (USD27 miliar, Rp207,50 triliunan EUR1,04 miliar), dimana terdapat 40 penjaminan yang telah berakhir sebesar ekuivalen Rp137,51 triliun (USD6,82 miliar dan Rp36,32 triliun) serta akumulasi posisi outstanding kredit dan eksposur investasi dari 9 program infrastruktur yang telah diberikan penjaminan oleh Pemerintah posisi akhir September tahun 2022 adalah sebesar ekuivalen Rp354,97 triliun (USD16,42 miliar dan Rp96,17 triliun dan EUR0,57miliar). Adapun rincian portofolio kewajiban penjaminan yang masih aktif per program penjaminan sampaidengan akhir September tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Rentang Tenor Penjaminan (Tahun)*	Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar)	
						Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara	PT PLN (Persero)	Perbankan	5	10 s.d. 15	USD 1,24 IDR 4.674,96	IDR 23.091,99	USD 0,21 IDR 2.258,02	IDR 5.517,61
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum**	PDAM	Perbankan	6	6 s.d. 13	IDR 229,50	IDR 229,50	IDR 33,23	IDR 33,23
3.	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan	BUMN	Lembaga Keuangan	11	15 s.d. 35	EUR 1,04 USD 3,58 IDR 54.943,75	IDR 69.455,44	EUR 0,57 USD 1,78 IDR 34.282,68	IDR 35.517,83 IDR 43.430,88
4.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	PT HK (Persero)	Lembaga Keuangan	10	5 s.d. 25	USD 0,60	IDR 63.852,55	USD 0,60	IDR 43.430,88
5.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	PT PLN (Persero)	Pengembang Listrik Swasta	7	15 s.d. 20	USD 3,91	IDR 58.124,29	USD 4,00	IDR 60.951,74
6.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan	PJPK	Badan Usaha	7	15 s.d. 21	USD 4,24 IDR 68.536,14	IDR 131.549,57	USD 4,04 IDR 35.806,07	IDR 97.447,29
7.	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	Pemda	PT SMI (Persero)	1	5 s.d. 9	IDR 6.958,78	IDR 6.958,78	IDR 2.982,94	IDR 2.982,94
8.	Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodetabek	PT KAI (Persero)	Perbankan	2	15 s.d. 18	IDR 23.419,13	IDR 23.419,13	IDR 13.730,48	IDR 13.730,48
9.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan***	PT PLN (Persero)	Perbankan Pengembang Listrik Swasta	3 2	10 s.d. 10 15 s.d. 20	IDR 12.423,79 USD 6,60	IDR 110.420,59	IDR 7.076,40 USD 5,79	IDR 95.357,39
Total				54		USD 20,18 EUR 1,04 IDR 171.186,04	IDR 487.101,83	USD 16,42 EUR 0,57 IDR 96.169,82	IDR 354.969,38

Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 30 September 2022

USD 15.247,00
EUR 14.716,42

*) Rentang tenor penjaminan Proyek 10.000MW Tahap 2, KPBU dan PIK (nomor 5, 6 dan 9 (Penerima Jaminan Pengembang listrik Swasta)) sejak Tanggal Operasi Komersial

**) Nilai penjaminan hanya sebesar 70% nilai perjanjian kredit

Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/ badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut:

- Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT. PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT. PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
- Berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.08/2020 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70% dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya menjadi utang PDAM kepada Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Pusat telah membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memampukan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah. Atas beban utang dimaksud, Pemerintah Daerah dapat: (i) membayar secara langsung melalui mekanisme penganggaran APBD tahun berjalan dan/atau (ii) mengkonversi beban menjadi pinjaman Pemerintah Daerah melalui perjanjian pinjaman antara Pemerintah

- Daerah dengan Kementerian Keuangan, dimana dalam hal terdapat tunggakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian pinjaman, Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan atas penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
- c. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 25). Penjaminan untuk proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara *risk sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 3, atau *amount sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 37 ayat (4).
 - d. Berdasarkan PMK Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Utama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Utama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Utama Karya (Persero).
 - e. Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara.
 - f. Berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.08/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
 - g. Berdasarkan PMK Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi, setiap pelaksanaan

- atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
- h. Berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.8/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, setiap pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat mengakibatkan timbulnya piutang Pemerintah kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN), kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPSN.
 - i. Berdasarkan PMK Nomor 71/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi, pelaksanaan pembayaran klaim dukungan loss limit yang berasal dari dana cadangan penjaminan, tidak mengakibatkan piutang Pemerintah dan/ atau Regres Pemerintah.
 - j. Berdasarkan PMK Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI/Pemerintah kepada Terjamin (pelaku usaha korporasi) sebagaimana diubah dalam PMK 32/PMK.08/2021.
 - k. Berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah menimbulkan piutang dan/atau Regres dari PT PII/Pemerintah kepada Terjamin (BUMN penugasan).

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan Desember Tahun 2022, tidak terdapat gagalbayar (default) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/PJPSN/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL.

Realisasi anggaran kewajiban penjaminan APBN TA 2022 hingga akhir Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp1.130.863.000.000.

Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir Desember tahun 2022 sebesar Rp11,51 triliun dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp372,52 miliar.

E. BA 999.04

1. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM

- Untuk melaksanakan 9 agenda prioritas (Nawacita) yang diwujudkan dalam salah satu target RPJMN 2015-2019 yaitu 100% Akses Aman Air Minum, perlu segera mengupayakan perbaikan kondisi keuangan PDAM yang saat ini mengalami utang macet sebesar Rp4,3 triliun (tingkat NPL 85%), agar PDAM semakin *bankable* di tengah terbatasnya sumber pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- Program 10 juta sambungan rumah harus didukung dengan perbaikan kemampuan keuangan PDAM sehingga perlu upaya untuk mengubah hambatan di PDAM menjadi potensi pencapaian target.
- Target MDGs untuk cakupan pelayanan air minum tahun 2019 adalah 100%, namun baru tercapai 71,14% di tahun 2016 dan 72,04% di tahun 2017.
- Utang PDAM selama bertahun-tahun telah membebani PDAM, sehingga mempengaruhi kemampuan PDAM dalam mencapai target yang ditetapkan.

Landasan hukum mekanisme penyelesaian piutang negara pada PDAM diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI, dan RPD pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu.

Skema penyelesaian piutang Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu sebagai berikut:

- Penjadwalan kembali seluruh kewajiban Pokok dan/atau.
- Penghapusan seluruh kewajiban Non Pokok.

Selama tahun 2022, terdapat 1 PDAM yang telah mendapat persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Menteri Keuangan yaitu PDAM Kota Ambon dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok (Rp)
1.	PDAM Kota Ambon	Menteri Keuangan	KMK Nomor 440 /KMK.05/2022	589.182.544
Jumlah				589.182.544

Selanjutnya, penyelesaian piutang negara pada PDAM Ambon akan ditempuh melalui penetapan penghapusan secara mutlak Piutang Negara oleh Menteri Keuangan.

2. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pemda

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang Negara pada Pemda adalah:

- Tunggakan pinjaman Pemda tidak selesai selama bertahun-tahun.
- Pemda tidak dapat melakukan investasi infrastruktur melalui skema pinjaman karena masih terdapat tunggakan pinjaman kepada pemerintah.
- Membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
- Membuka kesempatan Pemda dalam melakukan investasi.

Landasan hukum mekanisme penyelesaian piutang negara pada Pemda diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 104/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah.

Skema penyelesaian Piutang Negara sebagaimana diatur dalam PMK No.104/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah, secara umum dilaksanakan dengan:

- Penjadwalan kembali.
- Perubahan persyaratan dan/atau.
- Penghapusan tunggakan non pokok melalui skema debt swap untuk penyediaan sarana dan prasarana pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Selama tahun 2022, terdapat 3 Pemda yang telah mendapatkan penghapusan secara bersyarat/mutlak Piutang Negara Non Pokok, yaitu :

- Pemkab Labuhan Batu, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.05/2022 tanggal 9 Februari 2022
- Pemkot Manado, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-11/KSN/S/PB.06/03/2022 tanggal 8 Maret 2022.
- Pemprov Riau, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-13/KSN/S/PB.06/04/2022 tanggal 7 April 2022.

Sampai dengan tahun 2022 terdapat 5 Pemda dalam proses penyelesaian piutang negara, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi pelaksanaan debt swap yaitu Pemprov Maluku.
- 1 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penjadwalan pembayaran pokok yaitu Pemkab Lampung Utara dan Pemkab Lampung Tengah. Untuk, Pemkab Lampung Tengah telah melakukan percepatan pembayaran kewajiban pokok pada April 2022.
- 1 Pemda dalam proses penghapusan piutang negara non pokok secara bersyarat yaitu Pemkab Lampung Tengah.
- 1 Pemda dalam proses penyelesaian pinjaman Two Step Loan (TSL) yaitu Pemkot Makassar.
- 1 Pemda dalam proses cicilan melalui potong Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Pemkab Aceh Timur.

Adapun rincian nilai piutang negara kepada Pemda yang telah mendapat penetapan penghapusan piutang negara non pokok baik mutlak maupun bersyarat dari Presiden dan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

- Tabel Piutang Negara kepada Pemda Yang Telah Mendapat Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok oleh Presiden

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok (Rp)
1.	Pemkot Manado	Presiden	B-11/KSN/S/PB.06/03/2022	33.368.935.048,33
2.	Pemprov Riau	Presiden	B-13/KSN/S/PB.06/04/2022	10.811.255.624,49
Jumlah				44.180.190.672,82

- Tabel Piutang Negara kepada Pemda Yang Telah Mendapat Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok oleh Menteri Keuangan

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok (Rp)
1.	Pemkab Labuhan Batu	Menteri Keuangan	KMK Nomor 35/KMK.05/2022	7.152.177.124,03
Jumlah				7.152.177.124,03

Penghapusan hak tagih Pemerintah akan dilakukan apabila piutang negara pada pemerintah daerah di atas mendapatkan penetapan penghapusan piutang negara secara mutlak dari Presiden/Menteri Keuangan sesuai kewenangannya.

3. Usaha-Usaha Penyelesaian Tunggakan Kredit Program Non Subsidi

A. Proyek Perkebunan

Proyek Perkebunan terdiri dari Proyek PIR dan Proyek UPP Perkebunan. Proyek PIR dimulai tahun 1976 (Repelita II) dan sampai tahun 1992 telah ada di 68 lokasi yang tersebar di seluruh

Indonesia. Sedangkan UPP terdiri dari 4 Proyek, yaitu P3RSU, P3RSB, PRPTE, dan TCSDP yang juga tersebar di 30 propinsi.

Pada tahun 2010 telah dilakukan rekonsiliasi sisa utang Proyek PIR/UPP Perkebunan yang melibatkan pihak perbankan sebagai bank penatausaha, Ditjen Perkebunan sebagai penanggung jawab program, PT Perkebunan Nusantara sebagai perusahaan inti untuk PIR, dan Dinas Perkebunan sebagai pihak yang menerima pelimpahan tugas/pengelolaan UPP setelah UPP ditutup oleh Menteri Pertanian.

Kemudian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penyebab tunggakan perlu diketahui kondisi dan permasalahan petani/kebun. Untuk itu, telah dilakukan uji petik di 15 lokasi Proyek PIR/UPP Perkebunan yang melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perkebunan, perbankan, dan Dinas Perkebunan Propinsi. Uji petik ini dilakukan dengan melihat kondisi kebun, mewawancarai petani/kelompok tani serta memberikan kuesioner. Petani yang menjadi responden adalah 212 orang untuk PIR dan 104 orang untuk UPP. Berdasarkan uji petik diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Sebagian petani saat ini sudah tidak memelihara kebunnya sesuai dengan aturan, dikarenakan kurangnya biaya untuk pemeliharaan.
- 2) Kondisi kebun sebagian rusak berat karena kurangnya pemeliharaan.
- 3) Hanya sedikit petani yang membayar cicilan kredit.
- 4) Sudah tidak ada petugas penyuluh lapangan di lokasi proyek yang memungut angsuran petani karena ditarik ke instansi lain setelah otonomi daerah.

Kemudian pada November 2010 telah dilakukan inventarisasi di lima lokasi Proyek PIR Perkebunan lingkup PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I/Aceh dengan melibatkan BPKP. Tim telah bertemu dan melakukan wawancara serta memberikan kuesioner kepada kelompok petani/pekebun dan pihak perbankan. Adapun kesimpulan dari inventarisasi di lima lokasi Proyek PIR Perkebunan lingkup PTPN I adalah:

- 1) lahan perkebunan sebagian besar sudah ditinggalkan oleh petani peserta akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif ditambah dengan kondisi tanaman yang sudah rusak berat, tidak terpelihara dan sudah menjadi hutan kembali.
- 2) kondisi bangunan kantor, gudang, dan fasilitas lainnya rusak berat, bahkan terdapat bangunan yang hanya tersisa puing-puingnya karena dibakar.
- 3) peralatan pertanian, peralatan berat dan peralatan angkutan sudah tidak ada (dibakar, hilang atau diambil Gerakan Aceh Merdeka (GAM)).
- 4) pada saat inventarisasi sudah tidak ada petugas kebun/dialihkan ke kebun lain.

Upaya penyelesaian piutang negara pada Proyek PIR/UPP tersebut dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK. 05/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta eks Proyek Perusahaan Inti

Rakyat dan eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 /PMK.05/2015 tanggal 30 September 2015.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut kemudian didukung dengan pedoman teknis pelaksanaan penyelesaian piutang negara yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan. Diharapkan dengan diterbitkannya dua Peraturan Menteri tersebut pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada Proyek PIR/UPP lebih optimal.

Tahun 2019 Direktorat SMI menginisiasi untuk pengembangan aplikasi penatausahaan data hutang petani yang dinamai aplikasi Penyelesaian Hutang Petani (PHP), diharapkan pengembangan aplikasi tersebut dapat memudahkan proses penyelesaian hutang petani PIR UPP Perkebunan.

Di tahun 2021 telah diterbitkan KMK Mutlak untuk 330 petani eks proyek Durian Luncuk. Dan di tahun 2022 Direktorat SMI bekerjasama dengan BPKP dalam penyusunan Pedoman Audit Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek PIR UPP Perkebunan guna memudahkan BPKP daerah dalam melakukan audit terhadap proyek PIR UPP tersebut.

B. Proyek Peternakan

Proyek Peternakan terdiri dari Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) dan Redistribusi ternak yang dimulai sejak tahun 1990 yang berlokasi di Bali dan Nusa Tenggara Barat (Dompu), sedangkan Proyek Redistribusi Ternak dimulai sejak tahun 1978 dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui gambaran tentang kondisi terkini, pada tahun 2010 telah dilakukan uji petik di Dompu, NTB oleh Ditjen Peternakan dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Ternak sapi sudah tidak diketahui keberadaannya.
- 2) Kondisi bangun kantor dan fasilitas lainnya sudah rusak dan tidak terurus.
- 3) Peternak/kelompok ternak sudah tidak diketahui keberadaannya.

Di tahun 2022 Ditjen Kementerian Keuangan melakukan inventarisasi terhadap kredit program lama yang macet termasuk Proyek Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) dan Redistribusi ternak, namun belum ada kelanjutannya.

C. Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi (P2A)

P2A adalah proyek yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah lulusan kursus akuntansi yang dapat bekerja, meningkatkan jumlah lembaga kursus akuntansi yang dapat memperoleh akreditasi, serta memantapkan sistem dan mekanisme pengujian dan sertifikasi akuntansi. Pada tanggal 29 Juni 2010, dilakukan rapat persiapan dan koordinasi dalam rangka rekonsiliasi dan pengumpulan data piutang Pemerintah pada Proyek P2A dengan melibatkan Dit. SMI dan Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kemendiknas yang merupakan

reorganisasi dari Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga. Peserta rapat sepakat perlunya dibentuk Tim Kerja Penyelesaian Proyek P2A yang melibatkan Direktorat SMI dan Ditjen PNFI.

Menindaklanjuti kesepakatan rapat dimaksud, Dirjen PNFI dan Direktur SMI menunjuk petugas untuk duduk dalam Tim Tindak Lanjut Penyelesaian Proyek P2A yang tugasnya melakukan visitasi dan penelusuran data dalam rangka tindak lanjut P2A. Namun demikian, setelah Ditjen PNFI menyampaikan surat kepada Itjen Kemendiknas perihal Permintaan Data Proyek P2A, pihak Itjen Kemendiknas memberikan jawaban bahwa tidak terdapat data pemeriksaan terhadap Proyek P2A dimaksud di Kemendiknas.

Ditjen PNFI juga telah melakukan rapat koordinasi intern Ditjen PNFI tentang pengumpulan data-data P2A dengan melibatkan pensiunan-pensiunan pegawai Kemendiknas yang pernah terlibat dalam proyek P2A, namun Ditjen PNFI mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran dan pengumpulan data proyek P2A dimaksud. Selanjutnya, Ditjen PNFI melalui Setditjen PNFI menyampaikan surat permintaan data-data lembaga yang pernah menerima bantuan dalam Proyek P2A kepada 33 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi di Indonesia, namun baru dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang telah memberikan jawaban atas surat Ditjen PNFI dimaksud.

Ditjen PNFI juga telah menyampaikan surat kepada Pimpinan LP3I dan LPK Wijaya Kusuma (Jakarta) serta LPK Jurnal (Garut) perihal permintaan informasi proyek P2A mengingat ketiga lembaga termasuk yang pernah menerima dana bantuan Proyek P2A, namun baru Pimpinan LPK Jurnal yang telah menyampaikan jawaban bahwa kewajibannya telah diselesaikan namun tidak dapat memberikan bukti pembayaran mengingat telah lebih dari 15 tahun.

Pada tanggal 21 s.d. 23 Desember 2010, Tim Direktorat SMI melaksanakan tugas monitoring ke Kabupaten Malang dalam rangka penelusuran data Proyek P2A. Monitoring dilakukan dengan melakukan visitasi dan penelusuran data ke Bank BRI Cabang Malang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang serta melakukan visitasi dan penelusuran ke LKP Ganesha yang pernah mendapatkan bantuan dalam Proyek P2A. Mengingat belum adanya surat tanggapan atas surat permintaan data yang telah disampaikan oleh Ditjen PNFI kepada Pimpinan LP3I dan LPK Wijaya Kusuma (Jakarta), perwakilan dari Ditjen PNFI telah melakukan penelusuran Proyek P2A secara langsung kepada kedua lembaga dimaksud, namun diperoleh informasi bahwa kedua lembaga dimaksud belum memperoleh data yang diminta dan dalam waktu dekat akan memberikan jawaban secara resmi atas surat permintaan data yang telah disampaikan oleh Ditjen PNFI.

Hingga saat ini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) sebagai reorganisasi dari Ditjen PNFI, serta Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) masih

mencoba melakukan penelusuran atas data-data proyek P2A dengan berkoordinasi dengan Dit. SMI.

Di tahun 2022 Itjen Kementerian Keuangan melakukan inventarisasi terhadap kredit program lama yang macet termasuk proyek P2A, namun belum ada kelanjutannya.

D. Kredit Listrik Pedesaan (KLP)

KLP adalah program Pemerintah dalam bentuk penyediaan dana untuk kredit biaya penyambungan dan pemasangan instalasi listrik di rumah konsumen, termasuk biaya asuransi melalui PT Askindo. Berdasarkan temuan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 terkait dengan hak tagih Pemerintah atas KLP yang masih diragukan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realized Value*), maka perlu dilakukan langkah awal penyelesaian piutang Negara pada proyek KLP dengan melakukan rekonsiliasi dan pengumpulan data.

Pada 30 September 2010, telah dilakukan rapat antara Direktorat SMI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Bank BRI sebagai persiapan dan koordinasi dalam rangka rekonsiliasi dan pengumpulan data KLP serta menetapkan *time line* terkait penyelesaian permasalahan KLP dimaksud.

PLN dan Bank BRI mengundang Direktorat SMI guna melakukan verifikasi lapangan dan *sampling* data KLP di PLN Disjaya dan Tangerang (APJ Cisoka) serta Bank BRI Cabang Tangerang. Namun, Bank BRI dan PLN Tangerang mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran atas data-data dimaksud mengingat KLP di wilayah Tangerang dilaksanakan pada tahun 1986-1987 dan pencatatan saat itu dilakukan secara manual. Selanjutnya, telah disepakati bahwa akan dibentuk Tim Koordinasi KLP wilayah Tangerang untuk melakukan penelusuran ke langsung ke lapangan (pelanggan-pelanggan KLP) serta perlu dilakukan penelusuran data hingga ke Kantor Unit Bank BRI. Menindaklanjuti kesepakatan dimaksud, PLN APJ Cisoka telah melakukan uji petik ke pelanggan KLP di Desa Saga dan Keronjo, namun sebagian sudah tidak lagi menjadi pelanggan/sudah dibongkar. Di samping itu, Bank BRI Cabang Tangerang juga telah meminta data KLP kepada seluruh Kantor Unit Bank BRI di Cabang Tangerang, namun data dimaksud tidak dapat ditemukan. Hingga saat ini, Bank BRI dan PLN masih mencoba melakukan penelusuran atas data-data KLP.

Ditahun 2022 dilakukan penelusuran dan pendalaman informasi KLP yang dilakukan Direktorat SMI bersama dengan Itjen Kementerian Keuangan. Pendalaman informasi terkait KLP oleh Itjen ini diharapkan dapat membantu penyelesaian piutang KLP.

4. Usaha-usaha Penyelesaian Tunggakan Pemberian Pinjaman

Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)/Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Status beberapa bank swasta nasional menjadi BBO/BBKU/BDL, diantaranya merupakan bank penerima pinjaman *Two Step Loan* (TSL) dari BI dan BTN. BBO/BBKU/BDL meliputi PT

Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), PT Bank Umum Nasional (BUN), PT Bank Asia Pasifik (ASPAC), PT Bank Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO), PT Bank Dagang Bali, PT UNIBANK, PT Bank Andromeda, PT Bank Central Dagang, PT Bank Papan Sejahtera, PT Bank Putra Surya Perkasa, dan BPD Timor Timur.

Langkah awal penyelesaian BBO/BBKU/BDL pada BI setelah pembekuan status tersebut, pihak Kementerian Keuangan, BI, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan Tim Administrasi BBO/BBKU/BDL telah melakukan beberapa kali rekonsiliasi perhitungan posisi pinjaman TSL eks BBO/BBKU/BDL guna mengetahui perkembangan tingkat pengembalian atas pinjaman TSL dari BBO/BBKU/BDL. Berdasarkan Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-36/BPPN/0204 tanggal 17 Februari 2004 tentang Penyelesaian Aset dan Kewajiban BBO/BBKU/BDL, disebutkan bahwa penyelesaian kewajiban Bank Beku akan dilakukan dengan cara memperhitungkan hasil penyelesaian aset Bank Beku dengan kewajiban Bank Beku. Terkait dengan penyelesaian beberapa permasalahan di bidang keuangan termasuk di dalamnya permasalahan BBO/BBKU/BDL yang menyalurkan kredit TSL, dibentuk Tim Penyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang Keuangan Kementerian Keuangan dan BI melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 209/KMK.06/2005 dan Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005. Dalam pertemuan tanggal 28 Maret 2005, Tim Penyelesaian BPPN mengemukakan bahwa berdasarkan hasil likuidasi kelima bank BBO/BBKU/BDL, aset yang tersisa hanya cukup untuk mengurangi kewajiban utang pajak bank beku, utang bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah dialihkan hak dan penagihannya kepada BPPN, serta utang program penjaminan Pemerintah. Sedangkan utang kepada pihak lainnya tidak mampu ditutupi.

Pasal 3 Ayat 3.03 dari sebagian besar Perjanjian Pemberian Pinjaman (SLA) kepada BI yang terkait dengan Pemberian pinjaman kepada bank BBO/BBKU/BDL di atas, menyebutkan bahwa "BI harus memastikan bahwa setiap bank swasta memenuhi seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Pemberian Pinjaman dan Akad Pemberian Pinjaman, dan BI wajib mengikuti serta memantau perkembangan masing-masing Bank Swasta dalam melaksanakan Pinjaman Pemberian, mengambil segala upaya yang diperlukan untuk mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah, keadaan atau hal-hal mana meliputi peristiwa yang disebutkan dalam Pasal V Perjanjian Pinjaman". Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun saat ini proses likuidasi bank BBO/BBKU/BDL telah selesai (bank BBO/BBKU/BDL sudah tidak beroperasi lagi dan tidak ada lagi proses BPPN terhadap BBO/BBKU/BDL), kiranya BI masih tetap memiliki kewajiban kepada Pemerintah untuk mengambil segala upaya yang diperlukan untuk mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3.03) dari SLA kepada BI terkait dengan penyaluran TSL.

BBO/BBKU/BDL/BDL tidak dapat mengikuti proses restrukturisasi dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 17/2007 sehubungan dengan tidak adanya

institusi yang akan memenuhi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti restrukturisasi. Dalam rangka penyelesaian pinjaman TSL eks BBO/BBKU/BDL telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Permintaan konfirmasi atas tata cara penghapusan pinjaman terhadap entitas yang sudah tidak ada kepada Ditjen Kekayaan Negara (DJKN).
2. Pembahasan opsi penyelesaian dengan DJKN dan Biro Bantuan Hukum menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan tujuan penghapusan piutang setelah piutang diurus secara optimal dan diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
 - b. Penyelesaian diluar mekanisme PUPN sebagaimana diatur dalam PP 14/2005 Bab IV terkait Piutang BUMN maupun Pemerintah Daerah.

Akan disusun tahapan-tahapan penyelesaian sesuai dengan kedua opsi tersebut. Berkaitan dengan tindak lanjut penyelesaian pinjaman BBO/BBKU/BDL, Menteri Keuangan telah menetapkan surat penghentian perhitungan non pokok melalui surat nomor S-626/MK.05/2015 tanggal 18 Agustus 2015. Sesuai dengan surat tersebut, penghentian perhitungan kewajiban non pokok dilakukan pada saat pembubaran/likuidasi entitas berkenaan, yaitu pada tanggal 26 April 2004.

Perkembangan selanjutnya, pada saat rapat pembahasan Penyelesaian Pengelolaan Two Step Loan (TSL) dari Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Nusa Dua Bali, Kementerian Keuangan menyampaikan pendapat bahwa Kementerian Keuangan tidak dapat menindaklanjuti penyelesaian TSL OLA (BBO/BBKU/BDL) sepanjang belum mendapatkan kejelasan mengenai konstruksi hukum, proses bisnis, dan data pendukung yang memadai. BI dan Kemenkeu harus memastikan bahwa telah ada dokumen hukum yang menyatakan bahwa debitur-debitur TSL OLA (BBO/BBKU/BDL) telah hapus status badan hukum dan diambil alih oleh Pemerintah.

Pada hari Rabu, 31 Maret 2021 telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut penyelesaian *Two Step Loan* (TSL) Bank Indonesia pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB, melalui fasilitas *video conference* menggunakan aplikasi Zoom dengan peserta perwakilan Biro Hukum, Biro Advokasi, Inspektur III, dan Direktorat SMI. Adapun beberapa poin penting hasil rapat pembahasan dengan para undangan adalah sebagai berikut:

- a. BI tidak dapat mengalihkan pengurusan pengelolaan TSL kepada Pemerintah sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerima pengelolaan tersebut dari BI. Sampai dengan saat itu, BI masih harus bertanggung jawab atas pengelolaan TSL sampai ditunjuk instansi/unit yang akan mengelolanya;
- b. Apabila BI ingin mengalihkan pengelolaan TSL, maka dokumentasinya harus clear, data-data peminjamnya harus clear sampai dengan perjanjian juga mungkin harus

- dialihkan atas nama Pemerintah dalam hal ini Dit. SMI agar debitur juga clear pada saat akan melakukan pembayaran dan penutupan perjanjian;
- c. Pentingnya komitmen bersama dari pimpinan untuk mengambil sikap menerima atau menolak baik seluruh atau sebagian atas TSL ini. Hal tersebut penting agar kita dapat menentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan ini;
 - d. Pasal 74 UU BI tahun 1999 belum bisa dijadikan dasar pengalihan TSL karena kita memberikan mandat melalui surat kuasa Menteri Keuangan untuk melakukan penatausahaan penerusan pinjaman. Maka dari itu, mandat tidak menghilangkan tanggung jawab Pemerintah atas penerusan pinjaman untuk melakukan penatausahaan TSL. Sehingga kalau maksudnya BI ingin mengalihkan TSL menjadi tidak tepat juga, mungkin harusnya mengembalikan tanggung jawab kepada pemerintah;
 - e. Karena dulu pengelolaan TSL oleh BI diberikan melalui mandat surat kuasa, maka jika kita ingin melepaskan tanggung jawab BI dapat dilakukan dengan mencabut surat kuasa tersebut. Namun, jika misalnya tidak dicabut juga tidak mengapa karena kewenangan atas pengelolaan TSL pada prinsipnya masih di Menteri Keuangan;
 - f. Mengenai hal-hal teknis terkait pengalihan pengelolaan TSL BI, sebaiknya dicantumkan dalam PMK mengenai penatausahaan TSL. Namun harus dipikirkan juga dasar hukum pembentukan PMK apakah ada amanat pembuatannya;
 - g. Permasalahan pengalihan pengelolaan TSL membutuhkan keputusan dari pimpinan mengingat banyaknya debitur yang sudah tidak ada wujudnya.

5. Penyelesaian Pinjaman BUMN

Direktorat Sistem Manajemen Investasi melaksanakan fungsi koordinasi antar unit yang terkait dalam lingkup Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN selaku *Unit in Charge* dalam pelaksanaan program penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/PT. Upaya perbaikan terus dilakukan agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program selama tahun 2016. Pemerintah telah menerbitkan aturan hukum baru sebagai landasan pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/PT/Badan Hukum Lainnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/PT/BHL.

Optimalisasi penyelesaian piutang negara dilakukan dengan cara:

- Penjadwalan kembali;
- Perubahan persyaratan;
- *Debt to Asset Swap*;
- PMN;
- Penghapusan dan/atau
- Keringanan/*Discount*/Pembayaran

a. Pengajuan penyelesaian piutang Negara pada BUMN

Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa untuk beberapa BUMN sehingga mengalami kesulitan dalam penyelesaian utang terhadap Negara. Terdapat beberapa BUMN yang mengajukan restrukturisasi/relaksasi dalam penyelesaian utang terhadap Negara, diantaranya:

1) PT Djakarta Llyod (Persero)

Pasca putusan PKPU, telah dilakukan amandemen perjanjian pinjaman PT Djakarta Lloyd (Persero). Dalam amandemen tersebut, apabila PT Djakarta Lloyd (Persero) tidak melakukan pembayaran kewajiban selama dua kali berturut-turut, maka seluruh kewajiban menjadi jatuh tempo. PT Djakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU) tidak melakukan pembayaran dan telah menunggak pembayaran lebih dari dua kali berturut-turut sejak kewajiban jatuh tempo 31 Desember 2019 hingga saat ini.

Pada tanggal 19 September 2022 melalui surat nomor 177/KG.104.00/Dirut/IX/2022 PT Djakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU) mengajukan permohonan penyelesaian piutang Negara berupa skema penjadwalan kembali terhadap seluruh kewajiban PT Djakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU) yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan amandemen perjanjian dan 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/PT/BHL Dirjen Perbendaharaan dapat menyerahkan penyelesaian kewajiban PT Djakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU) kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 9 November 2022 telah dilakukan rapat pembahasan terkait usulan penyelesaian piutang Negara pada PT Djakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU). Berdasarkan arahan Biro Advokasi, Dit. SMI telah berkoordinasi dengan DJKN untuk menyerahkan optimalisasi penyelesaian piutang Negara PT Djakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU) kepada PUPN.

2) PT Merpati

Sehubungan dengan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 5/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.SBY Tanggal 2 Juni 2022 penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan PT Merpati sudah dibawah kurator. Atas hal tersebut sebagai pengganti BAR kami membuat konfirmasi negatif kepada kurator terkait nilai hak tagih pemerintah yang terdapat pada PT Merpati sebesar Rp2.917.489.789.947.

3) Progres Penyelesaian Piutang Negara pada PTPN XIV

Melalui surat Nomor: S.994/03.N14/X/XI/2019 tanggal 18 November 2019, Direksi PTPN XIV mengajukan permohonan penyelesaian hutang RDI/SLA dengan skema 1) Hutang Pokok sebesar Rp84.702.120.539,08 di konversi menjadi PMN Non Tunai dan 2) Hutang Non Pokok sebesar Rp121.709.486.635,46 dijadwalkan kembali.

Atas pengajuan tersebut, Direktorat SMI telah meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan penyelesaian hutang RDI/SLA dan masih terdapat dokumen persyaratan yang belum disampaikan oleh PTPN XIV. Melalui surat Direktur SMI Nomor S-375/PB.4/2019 tanggal 31 Desember 2019 telah meminta direksi PTPN XIV untuk segera menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung penyelesaian piutang Negara. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, dokumen yang belum diterima Direktorat SMI yaitu rekomendasi dari Kementerian BUMN terkait proses restrukturisasi hutang PTPN XIV, belum disampaikan oleh direksi PTPN XIV.

Direktur SMI membatalkan permohonan restrukturisasi hutang PTPN XIV melalui surat nomor S-123/PB.4/2021 tanggal 29 Maret 2021 karena dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tidak dapat dilengkapi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima.

b. Progres penyelesaian permohonan restrukturisasi pinjaman SLA dan RDI pada yang dititipkelolakan pada PT PPA

Pada klaster titip kelola danareksa-PPA terdapat penyelesaian utang SLA/RDI melalui pengadilan/penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yaitu pada PT Barata dan PT DPS dengan proses sebagai berikut:

1) PT Barata Indonesia

- Berdasarkan Putusan sela majelis hakim pengadilan niaga Surabaya tanggal 23 Agustus 2021 dan pengumuman tim pengurus PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) tanggal 30 Agustus 2021;
- Kewajiban dari pinjaman RDI dengan jumlah sampai dengan 23 Agustus 2021 sebesar Rp 76.268.526.518,41;
- Progress terakhir pengesahan perjanjian perdamaian/homologasi telah ditentukan oleh Hakim Pemutus tanggal 6 Desember 2021, dengan skema penyelesaian melalui penjadwalan kembali dan opsi konversi atas sisa tagihan pada tahun ke-10.

- 2) PT Dok dan Perkapalan Surabaya
 - Hak Tagih Pemerintah pada PT DPS sebesar Rp33 Miliar akan dibayarkan terdahulu sebelum Kreditur Finansial dan Kreditur Dagang melalui skema balloon payment dari kas tersedia selama 15 tahun
 - Proposal perdamaian yang disampaikan PT DPS selaku debitur pada rapat tersebut belum dapat diterima oleh seluruh kreditur;
 - Agenda sidang pembahasan lanjutan perbaikan proposal perdamaian akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2022.
- c. Progres penyelesaian restrukturisasi pinjaman pada klaster holding BUMN sebagai berikut:

Holding Pangan: Menteri Keuangan melalui surat nomor S-559/MK.05/2022 tanggal 30 Juni 2022, menyetujui restrukturisasi pinjaman BUMN Holding Pangan dengan skema:

 - 1) Novasi pinjaman dari anak usaha ke induk usaha
 - 2) Konversi utang nonpokok menjadi utang pokok
 - 3) Konversi utang pokok menjadi PMN Nontunai

Pada holding BUMN industri pertahanan yang antara lain beranggorakan PT Len (rencana sebagai induk holding), PT PAL, dan PT Pindad, sampai dengan akhir tahun 2021 masih menunggu penetapan PP Holding Industri Pertahanan. Selanjutnya proses restrukturisasi pinjaman akan dilakukan setelah PP Holding terbit atau ditetapkan.

F. BA 999.05

1. Penyaluran DBH dan/atau DAU Nontunai melalui fasilitas TDF

Sesuai PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang mencakup DBH dan/atau DAU dapat dilakukan dalam bentuk nontunai berupa Treasury Deposit Facility (TDF). TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai berupa TDF dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif melalui pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, serta untuk mengurangi kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar. Teknis pelaksanaan DBH/DAU nontunai melalui fasilitas TDF diatur dalam PMK Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi hasil dan/atau Dana Alokasi Umum/yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, yang diantaranya mengatur bahwa dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan

Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, serta batas saldo kas.

2. Realisasi PNPB SDA Kehutanan yang Belum dapat Dibagihasilkan

Berdasarkan Berita Acara Konfirmasi nomor BA-4/PK.2.1/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan nomor BA-6/PK.2.1/2022 tanggal 20 Juni 2022, terdapat PNPB Kehutanan yang diusulkan untuk dibagihasilkan masing-masing sebesar Rp49.832.436.556,00 dan Rp92.985.150,00. Akan tetapi, sampai saat ini belum dapat ditetapkan sebagai realisasi penerimaan PNPB Kehutanan disebabkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup belum melengkapi dokumen pendukung.

3. Sisa Dana Desa

Pada tahun anggaran 2021 Audited Pada tahun anggaran 2021 Audited telah dicatat sisa Dana Desa hasil Rekonsiliasi Sisa Dana Desa pada RKUD dan RKD tahun 2015 s.d 2019 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi antara KPPN dan Pemerintah Daerah sebesar Rp108.143.992.667,00 dengan rincian:

- a. Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKUD sebesar Rp87.869.747.536,00 pada 26 Pemda akan diperhitungkan dalam pemotongan penyaluran DAU/DBH Tahun 2022.
- b. Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKD sebesar Rp20.274.245.131,00 akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dan/atau Tahap III Tahun 2022.

Nilai piutang Sisa Dana Desa per 31 Desember 2022 adalah Rp6.663.568.678,00 berdasarkan sisa Piutang Dana Desa pada tahun 2021 (Audited) sebesar Rp108.143.992.667,00 yang sebagian telah diperhitungkan sebesar Rp101.480.423.989 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi pada RKUD sebesar Rp87.869.747.536,00 sampai dengan 31 September 2022 telah diperhitungkan dalam pemotongan penyaluran DAU/DBH Tahun 2022 berdasarkan KMK Nomor 16/KMK.07/2022 sebesar Rp87.869.747.536,00.
- b. Sisa Dana Desa hasil Rekonsiliasi pada RKD sebesar Rp20.274.245.131,00 telah diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III Tahun 2022 sebesar Rp13.610.676.453,00.

G. BA 999.07

PENGUNGKAPAN PENTING PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Kementerian Perhubungan

- a. Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 - 1) Pagu Anggaran Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2022 adalah :
 - Pagu Awal sesuai DIPA Nomor: SP.DIPA-999.07.1.985120/2022 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.334.637.449.000,-.

- Pagu Setelah Revisi I untuk mengakomodir pembayaran kurang bayar TA. 2021 sesuai DIPA Nomor: SP.DIPA-999.07.1.985120/2022 tanggal 18 November 2022 sebesar Rp 2.334.637.449.000,- dengan perincian untuk Subsidi PSO TA. 2022 sebesar Rp. 2.150.524.860.000,- dan untuk kurang bayar TA. 2021 sebesar Rp. 184.112.589.000,-.
 - Pagu Setelah Revisi II penambahan pagu untuk mengakomodir pembayaran kurang bayar TA. 2020 sesuai DIPA Nomor: SP.DIPA-999.07.1.985120/2022 tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp. 2.817.152.373.000,- dengan perincian untuk Subsidi PSO TA. 2022 sebesar Rp. 2.150.524.860.000,- dan untuk kurang bayar TA. 2021 sebesar Rp. 184.112.589.000,- dan untuk kurang bayar TA. 2020 sebesar Rp. 482.514.924.000.
- 2) Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021 Nomor HK. 201/1/12/DJPL/2022 dan TH.01.03-06/SS/2022 tanggal 3 Januari 2022;
- 3) Dilakukan Adendum I untuk mengakomodir pembayaran Kurang Bayar TA. 2021 sebesar Rp. 184.112.589.000,- sesuai Amandemen Nomor 1 Perjanjian tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2022 Nomor HK.201/1/12/DJPL/2022 dan Nomor TH.01.03-06/SS/2022 tanggal 3 Januari 2022.
- 4) Rekapitulasi SPM

No.	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nilai SP2D
1.	00001T/985120/2022	26 April 2022	137.503.663.336
2.	00002T/985120/2022	20 Juni 2022	132.512.590.250
3.	00003T/985120/2022	20 Juni 2022	154.775.354.938
4.	00004T/985120/2022	20 Juni 2022	141.306.304.896
5.	00005T/985120/2022	21 September 2022	144.344.416.957
6.	00006T/985120/2022	21 September 2022	136.895.787.666
7.	00007T/985120/2022	02 November 2022	138.630.398.380
8.	00008T/985120/2022	09 November 2022	134.480.822.588
9.	00009T/985120/2022	02 November 2022	87.277.159.880
10.	00010T/985120/2022	15 November 2022	89.721.630.106
11.	00011T/985120/2022	18 November 2022	172.161.262.528
12.	00012T/985120/2022	12 Desember 2022	191.970.518.960

No.	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nilai SP2D
13.	00013T/985120/2022	12 Desember 2022	184.112.588.462
14.	00014T/985120/2022	19 Desember 2022	99.594.842.790
15.	00015T/985120/2022	26 Desember 2022	193.781.900.707
16.	00016T/985120/2022	26 Desember 2022	195.568.206.556
17.	00017T/985120/2022	29 Desember 2022	482.514.923.656

- 5) Belum dilakukannya pembayaran atas sisa tagihan untuk Bulan Oktober, November dan Desember tanggal 14 – 31 (Triwulan IV) TA. 2022 dari hasil verifikasi oleh konsultan pengawas dengan PT. Peln (Persero) senilai Rp. 166.993.173.234,-, sehingga nilai tersebut disajikan sebagai utang subsidi diestimasi (214112) pada Laporan Keuangan Unaudited. Dengan demikian, Hasil pemeriksaan oleh BPK RI terhadap total belanja maupun beban subsidi telah menjadi acuan satker dalam menyajikan akun Belanja Subsidi Yang Masih Harus Dibayar (214211) pada Laporan Keuangan Audited.
- 6) Sisa Tagihan untuk bulan Oktober, November dan Desember (tanggal 14-31) adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Tagihan	Jumlah yang Dibayarkan	Sisa Tagihan
1.	Oktober	213.300.576.622	191.970.518.960	21.330.057.662
2.	November	215.313.223.008	193.781.900.707	21.531.322.301
3.	Desember	319.699.999.827	195.568.206.556	124.131.793.271
Total		748.313.799.457	581.320.626.223	166.993.173.234

- 7) Terdapat Addendum Kontrak 1 terkait perubahan:
- Target voyage yang semula 622 voyage menjadi 598 voyage;
 - Nilai kegiatan yang semula sebesar Rp. 2.334.637.499.000,- menjadi sebesar Rp. 2.150.524.860.000,- untuk mengakomodir Pembayaran Kurang Bayar TA. 2021 sebesar Rp. 184.112.588.462

b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian

- 1) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2022 ini merupakan dana APBN (BA BUN 999.07) yang merupakan penggunaan untuk subsidi angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi, Pasal 4 ayat 1 menyebutkan "Menteri Keuangan selaku PA BA BUN menunjuk Direkur Jenderal Perkeretaapian Kementerian

Perhubungan, selaku KPA penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta api kelas ekonomi.”.

- 3) Pagu Belanja Subsidi PSO Perkeretaapian TA 2022 adalah sebesar Rp3.508.414.601.000,- sesuai DIPA Nomor SP-DIPA 999.07.1.957337/2022 dengan rincian nilai sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI
1	KA Ekonomi Antarkota	649.057.194.000
2	KA Ekonomi Perkotaan	2.859.357.407.000
Total		3.508.414.601.000

- 4) Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik PSO Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2022 Nomor HK.201/1/2/DJKA/2022 dan Nomor KL.701/I/7/KA-2022 tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp3.051.477.703.211,- dengan rincian sebagai berikut:Dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	PSO 2022
1	KA Antarkota	
	KA Ekonomi Jarak Jauh	209.240.701.530
	KA Ekonomi Jarak Sedang	433.304.397.763
	KA Ekonomi Lebaran	2.025.484.827
2	KA Perkotaan	
	KA Ekonomi Jarak Dekat	738.338.197.392
	KRD Ekonomi	208.969.380.000
	KRL Jabodetabek	1.402.924.256.699
	KRL Yogyakarta	56.675.285.000
Total		3.051.477.703.211

- 5) Amandemen Kontrak Nomor HK.201/1/2/DJKA/2022 dan Nomor: KL.701/I/7/KA-2022 tanggal 12 Januari 2022 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik PSO Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2022 Nomor PL.107/1/7/DJKA/2022 dan Nomor KL.701/X/20/KA-2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp2.967.202.133.590,- dengan rincian nilai sebagai berikut:

No	Uraian	PSO 2022
1	KA Antarkota	
	KA Ekonomi Jarak Jauh	181.051.582.477
	KA Ekonomi Jarak Sedang	418.013.090.900
	KA Ekonomi Lebaran	3.444.351.132
2	KA Perkotaan	

No	Uraian	PSO 2022
	KA Ekonomi Jarak Dekat	719.910.033.242
	KRD Ekonomi	185.183.534.139
	KRL Jabodetabek	1.402.924.256.699
	KRL Yogyakarta	56.675.285.000
Total		2.967.202.133.590

- 6) Amandemen Kedua Kontrak Nomor HK.201/1/2/DJKA/2022 dan Nomor: KL.701/I/7/KA-2022 tanggal 12 Januari 2022 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik PSO Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2022 Nomor PL.107/1/10/DJKA/2022 dan Nomor KL.701/XII/6/KA-2022 tanggal 05 Desember 2022 sebesar Rp2.729.248.487.134,- dengan rincian nilai sebagai berikut:

No	Uraian	PSO 2022
1	KA Antarkota	
	KA Ekonomi Jarak Jauh	33.811.530.167
	KA Ekonomi Jarak Sedang	243.729.829.441
	KA Ekonomi Lebaran	1.048.243.504
2	KA Perkotaan	
	KA Ekonomi Jarak Dekat	499.920.563.340
	KRD Ekonomi	117.891.110.767
	KRL Jabodetabek	1.774.470.198.146
	KRL Yogyakarta	58.377.011.769
Total		2.729.248.487.134

2. Kementerian Keuangan

a. Ditjen Anggaran

Umum:

- 1) Subsidi JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dianggarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan harga yang terjangkau.
- 2) Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah adalah Jenis BBM Tertentu yang terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- 3) Menteri ESDM menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.

- 4) Harga jual eceran untuk Minyak Tanah sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Harga jual eceran untuk Minyak Solar dihitung berdasarkan harga dasar ditambah dengan PPN dikurangi subsidi dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- 5) Subsidi JBT Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg oleh badan usaha kepada Pemerintah. Sedangkan, JBT Jenis Minyak Solar diberikan subsidi terbatas.
- 6) Penyaluran JBT dalam Tahun 2022 dilakukan melalui PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk. Sementara itu, penyaluran LPG Tabung 3 Kg dilakukan melalui PT Pertamina Patra Niaga.
- 7) LPG bersubsidi merupakan LPG Tabung 3 Kilogram dan diberikan kepada konsumen rumah tangga, usaha mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran.
- 8) Dalam rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022, diantaranya diputuskan penambahan kuota BBM disetujui sesuai usulan Kementerian ESDM yaitu untuk kuota JBT Minyak Solar naik dari 15,10 juta KL menjadi 17,83 juta KL (naik sebesar 2,73 juta KL) dan kuota JBT Minyak Tanah naik dari 0,48 juta KL menjadi 0,485 juta KL (naik sebesar 05 juta KL).
- 9) Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat/pelanggan dengan golongan tariff yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut.
- 10) Subsidi listrik tidak diberikan kepada golongan tarif yang telah menerapkan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sesuai ketentuan perundangan.
- 11) Pelaksanaan atas pemberian subsidi listrik melalui BUMN operator yaitu PT PLN (Persero).

b. Ditjen Perbendaharaan

Secara umum, dalam hal terdapat pengembalian realisasi anggaran belanja subsidi, baik melalui setoran ke kas negara maupun kompensasi melalui potongan SPM/SP2D belanja subsidi periode berikutnya, tanpa didahului adanya pengakuan dan pencatatan aset hak tagih pengembalian belanja subsidi, maka:

- 1) Pengembalian realisasi anggaran belanja subsidi di tahun yang sama dengan penerbitan SPM/SP2D realisasi anggaran belanja subsidi, dicatat menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanjanya dan mengurangi belanja subsidi di LRA dan mengurangi beban subsidi pada pos beban operasional di LO.
- 2) Pengembalian realisasi anggaran belanja subsidi di tahun berikutnya (yaitu berbeda tahun anggaran atau tahun berikutnya dari tahun diterbitkannya SPM/SP2D realisasi belanja subsidi), dicatat menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu pada pos PNBP lainnya di LRA dan pada pos non operasional di LO

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK186/KMK.02/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka Skema Subsidi Resi Gudang pada Kementerian Perdagangan, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2022, KPA SSRG telah dialihkan kepada Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas pada Kemendag.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-5/MK.05/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pelaksanaan Kredit Program Skema Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, Penyaluran kredit program KUPS dan KPEN-RP untuk sementara dihentikan per 1 Januari 2015 dan hanya membayarkan subsidi bunga atas kredit yang telah disalurkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian. KUPS memiliki masa kredit 6 tahun sehingga subsidi yang dapat dibayarkan sampai dengan periode 2020. KPEN-RP memiliki masa kredit 5 tahun untuk komoditas kelapa sawit dan kakao sehingga subsidi yang dapat dibayarkan sampai dengan periode 2019, dan untuk komoditas karet memiliki masa kredit 7 tahun sehingga subsidi yang dapat dibayarkan sampai dengan periode 2021. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor-1050/MK.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghentian Penyaluran KKPE, penyaluran baru KKPE dihentikan terhitung sejak 1 Januari 2016. Dengan Penghentian ini maka perjanjian kerja sama pendanaan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penutupan. Subsidi bunga KKPE tetap dibayarkan atas kredit yang diperjanjikan paling akhir tanggal 31 Desember 2015 dan memiliki masa kredit 5 tahun sehingga subsidi yang dapat dibayarkan sampai dengan periode 2020. Dengan berakhirnya periode pemberian subsidi, pada tahun 2022 seluruh kewajiban subsidi KKPE dan KPEN-RP pemerintah telah selesai dibayarkan. Terkait kewajiban subsidi KUPS akan diselesaikan pada tahun 2023 dengan memperhatikan ketersediaan anggaran tahun 2023.

Subsidi Bunga Pinjaman Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan arahan presiden Joko Widodo dalam Perpres CPP Nomor 125 Tahun 2022 agar mengoptimalkan Dana Transfer Umum (DTU) maupun Anggaran Tak Terduga untuk digunakan dalam fasilitasi distribusi pangan dalam rangka pemerataan stok pangan dari daerah surplus ke defisit. Dalam rangka ketersediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu melakukan penguasaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada BUMN. Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan subsidi bunga kepada Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan (Pasal 15 ayat 1). Ketentuan mengenai tata cara pemberian jaminan kredit dan/atau subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Pasal 15 ayat 3). Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka

Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah. Tujuan dari Subsidi Bunga Pinjaman CPP adalah mendukung penyelenggaraan CPP dari sisi APBN dalam bentuk subsidi bunga, dengan mekanisme pinjaman B-to-B. Pinjaman diberikan dalam rangka pengadaan CPP, tidak termasuk pengelolaan dan penyaluran. Pinjaman diberikan untuk 11 komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Stakeholders dalam Subsidi Bunga Pinjaman CPP antara lain Bapenas yang mendapat penugasan untuk penyelenggaraan urusan di bidang pangan, Kementerian BUMN selaku induk organisasi dari BUMN (Bulog, BUMN Pangan, dan Himbara), Kementerian Keuangan sebagai penetapan kebijakan dukungan APBN dhi. Subsidi Bunga Pinjaman CPP dan sebagai KPA Penyaluran, Penyelenggara CPP dilakukan oleh Bulog dan IDE Food, dan sebagai penyalur adalah Bank Himbara (BRI, Mandiri, dan BNI).

c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020), Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk. Penjaminan secara langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN, sedangkan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Penjaminan Program PEN adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Dalam pelaksanaan penjaminan program PEN bagi UMKM, Korporasi dan BUMN :

- 1) Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Keuangan menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melakukan penjaminan untuk sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 2) Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah Pelaku Usaha Korporasi, Menteri menugaskan LPEI untuk memberikan Penjaminan Pemerintah bagi pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang kekayaan bersihnya di atas Rp10 miliar

dan omzet tahunannya di atas Rp50 miliar yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam Pelaksanaan Penjaminannya Menteri menugaskan LPEI untuk melakukan penjaminan bersama dengan PT PII.

- 3) Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri menugaskan PT PII dan LPEI untuk memberikan Penjaminan kepada BUMN yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mendapat penugasan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional.

DIPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi IJP Tahun Anggaran 2022:

- 1) Pada tanggal 21 Februari 2022, telah dilakukan pengesahan DIPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun Anggaran 2022 dengan nomor SP DIPA-999.07.01.999701/2022 dengan Pagu sebesar Rp1.797.808.856.000 oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- 2) Pada tanggal 20 Juni 2022, telah dilakukan Revisi 01 DIPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun Anggaran 2022 dengan nomor DIPA-999.07.01.999701/2022 dengan Pagu sebesar Rp2.494.035.076.000 oleh Direktorat Jenderal Anggaran untuk penambahan pagu alokasi IJP UMKM dan Korporasi Program PEN Gen 2.
- 3) Pada tanggal 14 Desember 2022, telah dilakukan Revisi 02 DIPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun Anggaran 2022 dengan nomor DIPA-999.07.01.999701/2022 dengan Pagu sebesar Rp2.777.808.856.000 oleh Direktorat Jenderal Anggaran untuk keperluan realokasi subsidi IJP Korporasi ke IJP BUMN.
- 4) Pada tanggal 28 Desember 2022, telah dilakukan Revisi 03 DIPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun Anggaran 2022 dengan nomor DIPA-999.07.01.999701/2022 dengan Pagu sebesar Rp2.494.035.076.000 oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bertujuan untuk pergeseran subsidi IJP Korporasi ke IJP UMKM.

d. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan data dari PT. SMI, realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Selama TA 2022 adalah sebesar Rp155.176.756.597 digunakan untuk pembayaran subsidi bunga atas 30 pemerintah daerah penerima Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN dalam 4 tahap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pemda	Jumlah Subsidi Bunga yang telah disalurkan	Jumlah Subsidi Bunga yang seharusnya dibayarkan
1.	Prov. DKI Jakarta	100.704.321.354	-
2.	Kab. Wajo	1.329.893.867	-
3.	Kab. Serdang Bedagai	3.628.894.931	-
4.	Prov. Sulawesi Barat	6.310.018.050	-
5.	Prov. Sumatera Selatan	5.518.503.582	-
6.	Kab. Tapanuli Utara	1.691.308.080	-

No	Nama Pemda	Jumlah Subsidi Bunga yang telah disalurkan	Jumlah Subsidi Bunga yang seharusnya dibayarkan
7.	Kab. Lampung Tengah	3.651.005.981	-
8.	Kab. Mamasa	1.063.039.258	-
9.	Kab. Lumajang	3.078.592.504	-
10.	Kab. Trenggalek	2.838.736.499	-
11.	Kab. Lampung Barat	1.646.506.399	-
12.	Kab. Situbondo	1.358.589.466	-
13.	Kota Palangkaraya	1.642.673.696	-
14.	Kota Lubuklinggau	2.730.619.561	-
15.	Kab. Lampung Utara	2.374.926.286	-
16.	Kota Subulussalam	1.183.606.275	-
17.	Kab. Tanggamus	1.632.738.322	-
18.	Kota Palembang	1.807.601.991	-
19.	Kab. Lombok Timur	1.435.803.029	-
20.	Kota Mojokerto	886.044.109	-
21.	Kab. Tabalong	1.130.801.802	-
22.	Kab. Luwu Utara	1.356.657.182	-
23.	Kota Padang	471.659.712	-
24.	Kota Bandar Lampung	1.864.789.427	-
25.	Kab. Morowali Utara	1.108.100.874	-
26.	Kab. Gowa	1.328.101.629	-
27.	Kab. Lampung Selatan	519.202.534	-
28.	Kab. Bone Bolango	344.137.287	-
29.	Kab. Ponorogo	503.910.688	-
30.	Kota Solok	35.972.222	-
Total		155.176.756.597	-

e. Direktorat Jenderal Pajak

Aseri Manajemen

Jumlah tagihan subsidi P-DTP untuk tahun anggaran 2022 yang telah diverifikasi adalah sebesar Rp17.115.681.347.073 yang terdiri dari tagihan subsidi tahun 2019, 2020, dan 2021 sebesar Rp7.245.958.842.669 serta tagihan subsidi tahun 2022 sebesar Rp9.869.722.504.404. Jumlah tagihan yang telah dibayarkan pada tahun 2022 sebesar Rp15.735.374.656.720. Dengan demikian, jumlah tagihan yang belum dibayar yang merupakan selisih jumlah tagihan subsidi dengan jumlah tagihan yang telah dibayarkan dan dicatat sebagai utang subsidi pada neraca tahun 2022 adalah sebesar Rp1.380.306.690.353.

Berdasarkan administrasi dokumen sumber, subsidi P-DTP yang tidak dapat dibayarkan per 31 Desember 2022 untuk P-DTP reguler adalah sebesar Rp700.096.656.062, yang terdiri dari kurang bayar subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp666.708.245.363 dan kurang

bayar subsidi PPh DTP SBN Valas sebesar Rp33.388.410.699. Kemudian, terdapat pula subsidi P-DTP Program PC-PEN yang belum dapat dibayarkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp737.243.824.542, yang terdiri dari kurang bayar subsidi PPN DTP Non Vaksin sebesar Rp125.663.295.584, kurang bayar subsidi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun sebesar Rp433.626.022.124, kurang bayar PPnBM Kendaraan bermotor sebesar Rp42.930.305.015, dan kurang bayar PPN DTP Vaksin sebesar Rp77.990.411.568. Kurang bayar tersebut terjadi karena pagu anggaran tahun 2022 yang tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran sisa tagihan di tahun 2022. Berdasarkan NKF Nomor: NKF-107/999.07/PB.6/2023 tanggal 20 Mei 2023, terdapat usulan koreksi kurang sebesar Rp5.927.345.426,00 dikarenakan berdasarkan hasil audit BPK terdapat pemanfaatan insentif PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun serta PPN DTP Alkes dan Vaksin Tahun 2022 yang diindikasikan di luar ketentuan/tidak sesuai kriteria. Sehingga nilai utang jangka panjang subsidi pajak DTP sebesar Rp1.374.379.344.927,00.

Selain itu, dapat disampaikan bahwa terdapat data tagihan belanja subsidi P-DTP reguler berupa PPh DTP Panas Bumi periode Triwulan IV Tahun 2022 yang diterima pada bulan Februari 2023 sebesar Rp596.620.440.290. Di sisi lain, terdapat pula tagihan belanja subsidi P-DTP terkait Program PC-PEN untuk masa pajak Desember 2021 yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2021 karena pada saat penyusunan laporan keuangan nilai tagihan belum dapat diketahui dengan pasti nilainya. Berdasarkan laporan pemanfaatan insentif/fasilitas P-DTP terkait program PC-PEN yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada tahun 2022 dan setelah dilakukan penelitian, diperoleh data tagihan untuk masa pajak Desember 2021 sebesar Rp1.975.302.128.615. Selanjutnya, terdapat pula tagihan belanja subsidi PDTP terkait Program PC-PEN berupa PPN DTP Non Vaksin dan PPN DTP Vaksin masa pajak Desember 2022 yang nilainya baru dapat diketahui pada akhir bulan Januari 2023 (batas akhir pelaporan SPT Masa PPN masa pajak Desember 2022). Berdasarkan data pelaporan SPT Masa PPN masa pajak Desember 2022 yang disampaikan pada tahun 2023 dan setelah dilakukan penelitian, diperoleh data tagihan untuk masa pajak Desember 2022 sebesar Rp57.033.790.251.

DIPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi P-DTP Tahun Anggaran 2022 :

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 serta sebagaimana yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Pengelolaan Belanja Subsidi P-DTP Tahun 2022 Nomor DIPA-999.07.1.980522/2022 tanggal 31 Desember 2021, Bagian Pengelolaan Subsidi Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak mengelola subsidi P-DTP sebesar Rp12.686.403.261.000.
- 2) Telah dilakukan revisi dalam rangka penyelesaian kekurangan pembayaran subsidi P-DTP Reguler TA 2020 yang tercatat sebagai Utang Jangka Panjang pada Laporan

Kuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 sebesar Rp578.667.554.000. Sehubungan dengan hal tersebut, telah terbit DIPA Revisi-1 No. SP DIPA-999.07.1.980522/2022 tanggal 2 November 2022 yang mengakomodasi perubahan alokasi anggaran subsidi P-DTP TA 2022 dari yang semula sebesar Rp12.686.403.261.000 menjadi sebesar Rp13.265.070.815.000.

- 3) Selanjutnya, terdapat perubahan kebijakan terkait tarif pemotongan PPh yang digunakan untuk menghitung besaran alokasi anggaran atas PPh DTP SBN Valas dari 20% menjadi 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Di sisi lain, terdapat kekurangan pembayaran subsidi P-DTP terkait Program PC-PEN TA 2020 dan TA 2021 yang perlu diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan revisi DIPA dan telah terbit DIPA Revisi-2 No. SP DIPA999.07.1.980522/2022 tanggal 29 November 2022 yang mengakomodasi optimalisasi anggaran SBN DTP Valas untuk penyelesaian kurang bayar subsidi P-DTP terkait Program PC-PEN TA 2020 dan TA 2021.
- 4) Selain itu, dengan adanya lanjutan program Penanganan Pandemi COVID19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di tahun 2022, Pemerintah kembali memberikan insentif berupa subsidi pajak ditanggung pemerintah (P-DTP). Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan revisi DIPA dan telah terbit DIPA Revisi-3 No. SP DIPA-999.07.1.980522/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang mengakomodasi penambahan alokasi anggaran untuk pembayaran subsidi P-DTP TA 2022 terkait Program PC-PEN sebesar Rp1.168.512.000.000. Dengan demikian, terdapat perubahan alokasi anggaran subsidi P-DTP TA 2022 dari Rp13.265.070.815.000 menjadi Rp14.433.801.815.000.
- 5) Selanjutnya, telah dilakukan kembali revisi DIPA untuk mengakomodasi penyelesaian sisa kekurangan pembayaran subsidi P-DTP Reguler TA 2019 s.d. TA 2021 serta P-DTP terkait Program PC-PEN TA 2020 dan TA 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, telah terbit DIPA Revisi-4 No. SP DIPA999.07.1.980522/2022 tanggal 28 Desember 2022, alokasi anggaran untuk subsidi P-DTP TA 2022 menjadi Rp15.735.912.847.000.

3. Kementerian Pertanian

Pada Tahun Anggaran 2022 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan sebagai penanggungjawab kegiatan penyaluran dana subsidi pupuk. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam pelaksanaan dana subsidi pupuk, peraturan tersebut adalah:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara

Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan

Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terkait dengan pengelolaan anggaran subsidi pupuk adalah Direktorat Pupuk dan Pestisida. Pelaksanaan pengelolaan anggaran subsidi pupuk berpedoman pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), adapun kegiatannya meliputi: subsidi pupuk, subsidi harga melalui produsen (PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda dan Pt. Pupuk Kaltim.

Anggaran subsidi pupuk digunakan untuk kegiatan penyediaan dan penyaluran subsidi harga pupuk, penggantian biaya produksi pupuk yang harus dibayar oleh pemerintah meliputi pupuk urea, ZA, SP-36, NPK serta pupuk organik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Nomor 28 Tahun 2020.

Pendistribusian pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dilakukan melalui pola tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi:

Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Alokasi tersebut memperhatikan Permentan nomor 41 tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR320/M/12/2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Sasaran kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani dan melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan / atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam serta Petani yang melakukan usaha tani sub sector tanaman pangan pada PATB; dan/atau Petani yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas kewajiban umum/Publik Service Obligation (PSO) Bidang Pers, Lembaga Kantor Berita Antara yang beralamatkan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110, menerima anggaran dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Periode Tahun Anggaran 2022 melalui DIPA Nomor DIPA-999.07.1.984192/2022 tanggal 31 Desember 2021 Bagian Anggaran 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi dengan kode satker 984192. Adapun produk berita yang dihasilkan oleh PSO Antara adalah:

1. Berita Text Hardnews

2. Berita Text Artikel
3. Berita Photo
4. Produk TV (Hardnews)
5. Produk TV (Features)
6. Infografis
7. Photo Story

Sedangkan Distribusi Produk PSO Antara yaitu:

1. Jaringan Internal Antara
 - Portal Antara Pusat
 - Portal Antara Biro
 - Facebook antaranews.com
 - Twitter antaranews.com
 - Facebook antarafoto.com
 - Twitter antarafoto.com
2. Jaringan Kerjasama Antara
 - Kerjasama OANA (40 kantor berita se-Asia Pasific)
 - Media Centre Kominfo
 - Koran Sisipan
 - TV Lokal
 - Portal TV
 - TV Kabel
3. Pelanggan Antara
 - Media Online
 - Media Cetak
 - Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
 - KBRI dan KJRI Luar Negeri
 - Kantor Berita dan Media Asing
 - Kedutaan Besar Negara Sahabat
 - TV dan Radio
 - Perusahaan Swasta
4. Kanal Distribusi yang disubsidi dan ditetapkan melalui Konstruksi Program
 - I Media dan Videotron yang dikelola oleh anak perusahaan Antara
 - TVRI Nasional dan TVRI daerah
 - TV Lokal
 - RRI
 - Radio lokal dan komunitas
 - Penempatan rubrik pada 3 koran lokal di 34 Provinsi
 - Media Sosial Ads pada Facebook, Instagram dan Line

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan produk yang dihasilkan LKBN ANTARA yaitu Podcast. Podcast merupakan produk baru yang menggantikan produk siaran perbatasan RRI dan dikehendaki dapat menambah jangkauan informasi ke daerah 3T.

Adanya UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana di dalamnya menyatakan bahwa jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan dikenai pajak. Adapun berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022 dan PMK 58/PMK.03/2022 di dalamnya menyatakan bahwa penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah melalui pihak lain dipungut PPN 11% dari seluruh nilai pembayaran dalam invoice, hal ini mengakibatkan perubahan harga satuan produk untuk produk yang dihasilkan mulai dari periode Mei 2022. Perubahan harga satuan produk tertuang dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Produk dan Konstruksi Program Kewajiban Pelayanan Publik untuk informasi publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2022.

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Direktorat Jenderal Cipta Karya

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum. Peraturan Presiden ini mengatur jaminan Pemerintah Pusat sebesar 70% dari jumlah pokok kredit investasi yang telah jatuh tempo kepada perbankan dalam hal terjadi gagal bayar oleh PDAM dan tanggungan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat setinggi-tingginya 5% atas bunga kredit investasi.

Untuk pemberian subsidi bunga, Pemerintah Pusat menyediakan anggaran Subsidi Bunga melalui mekanisme APBN. Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga dan bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan penyediaan anggaran kepada Kementerian Keuangan.

Pembayaran subsidi bunga dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober. Pembayaran subsidi bunga pada tanggal 1 April dihitung berdasarkan kewajiban periode antara tanggal 1 September sampai dengan akhir bulan Februari, sedangkan pembayaran subsidi bunga pada tanggal 1 Oktober dihitung berdasarkan kewajiban periode antara tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Agustus.

Hasil evaluasi kinerja sehat masing-masing PDAM yang mendapatkan pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana tabel berikut:

No	PDAM KAB/KOTA	Kinerja 2019	Kinerja 2020
1	Kab. Ciamis	Sehat	Sehat
2	Kab. Bogor	Sehat	Sehat
3	Kab. Lombok Timur	Sehat	Sehat
4	Kota Malang	Sehat	Sehat
5	Kota Banjarmasin	Sehat	Sehat
6	Kota Denpasar	Sehat	Sehat
7	Kota Palopo	Sehat	Sehat
8	Kab. Cilacap	Sehat	Sehat
9	Giri Menang	Sehat	Sehat
10	Kab. Banyumas	Sehat	Sehat

Satker Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak memiliki PC PEN, terlampir data alokasi pagu, realisasi, dan capaian output Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Output	Capaian Output	
				Vol	%
Subsidi Bunga Air Bersih	2.063.537.000	2.059.732.713	6 PDAM	6 PDAM	99,82

b. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

Laporan Keuangan ini disusun menggunakan data aplikasi SAKTI per 23 Januari 2023 dan telah mengakomodir reviu Itjen. Migrasi saldo awal ke Aplikasi Sakti telah selesai dilaksanakan.

Telah dilakukan penyetoran atas pendapatan yang masih harus diterima senilai Rp1.110.688.157,0 pada Bulan Januari 2023, berarti merupakan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas transaksi 2021 senilai total Rp47.719.088.626 (3.495 debitor) dengan setoran senilai Rp46.581.949.640. Selisih penyelesaian senilai Rp1.137.138.986 merupakan nominal yang didrop sesuai BA Rekonsiliasi dengan Bank BTN.

Tidak terdapat penyaluran baru SBK/SSM pada TA.2022. Penyaluran yang terjadi adalah pembayaran atas akad sebelum tahun 2021. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah akan besarnya beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah dalam masa tenor SBK/SBM hingga 20 tahun. Sedangkan penyaluran SBUM sejalan dengan FLPP.

6. Kementerian KUKM :

Pagu anggaran belanja Subsidi IJP KUR dan Subsidi Bunga / Subsidi Marjin KUR TA 2022 didasarkan pada DIPA Nomor DIPA-999.07.1.984620/2022 tanggal 31 Desember 2021 dengan Nama Satker Deputi Bidang Usaha Mikro (Kode 984620) sebesar Rp23.440.427.553.000.

Berdasarkan hasil rapat PC PEN tanggal 8 Januari 2022, serta hasil koordinasi informal dengan Direktorat Penyusunan APBN, diperoleh informasi bahwa Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR Reguler TA 2022 adalah termasuk dalam program PEN dan telah tercantum dalam tabel PC-PEN TA 2022. Untuk mengakomodir hal tersebut dilakukan revisi dan telah ditetapkan dengan Surat Pengesahan DIPA Nomor DIPA-999.07.1.984620/2022 tanggal 19 Maret 2022 (DIPA Revisi I).

Dalam rangka mengakomodir tunggakan tagihan tambahan subsidi bunga/subsidi marjin KUR dalam masa covid-19 tahun 2020, telah ditetapkan dengan Surat Pengesahan DIPA Nomor DIPA-999.07.1.984620/2022 tanggal 28 Desember 2022 dengan Nama Satker Deputy Bidang Usaha Mikro (Kode 984620) sebesar Rp23.453.708.089.000, (DIPA Revisi II) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Subsidi	Pagu Awal	Pagu Revisi
1.	Subsidi IJP KUR	340.427.553.000	340.427.553.000
2.	Subsidi Bunga / Subsidi Marjin KUR PEN	23.100.000.000.000	23.113.280.536.000
	Jumlah	23.440.427.553.000	23.453.708.089.000

Pada Tahun 2022 pembayaran subsidi IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR direalisasikan kepada 46 Penjamin dan Penyalur dengan target 45 Penjamin dan Penyalur KUR atau sebesar 102,22% dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi IJP KUR di salurkan kepada 0 Perusahaan Penjamin dari target capaian output sebanyak 2 Perusahaan Penjamin atau 0%.
- Realisasi Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR Reguler disalurkan kepada 46 Penyalur KUR dari target capaian output sebanyak 43 Penyalur KUR atau 106,98%.

7. Kementerian Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas terkait belanja subsidi Skema Subsidi Resi Gudang, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka yang beralamatkan di Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430, menerima anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Periode Tahun Anggaran 2022 melalui DIPA Nomor DIPA-999.07.1.956101/2022 tanggal 14 November 2022 Bagian Anggaran 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi dengan kode satker 956101.

Pandemi Covid-19 tidak menimbulkan dampak secara langsung untuk belanja subsidi Skema Subsidi Resi Gudang. Penyaluran Skema Subsidi Resi Gudang berkontribusi meringankan beban bunga/margin pembiayaan Resi Gudang yang diajukan Petani dan UKM sehingga membantu pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Volume realisasi output adalah sebanyak 332 debitur dimana realisasi penyalurannya sebanyak 552 debitur.

H. BA 999.08

- a. Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Papua Barat pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Untuk Tahun 2021, dalam rangka untuk memperbaiki pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan OAB, operator tidak lagi diberikan uang muka kerja sebagaimana diberikan di tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2021, sebagaimana telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, untuk setiap permohonan tagihan yang disampaikan PPK tetap melakukan pengujian secara formil atas lampiran dokumen sebagaimana diatur dalam PMK 181/PMK.02/2017, yang meliputi Tanda bukti Pengiriman (Delivery Order) beras, Rekapitulasi Berita Acara Penyaluran Beras, dan SPTJM.

- 1) Guna meningkatkan pengendalian dan kebenaran tagihan yang diajukan oleh operator, untuk tahun 2021 setiap lampiran tagihan tetap ditambahkan dengan BAPB (Berita Acara Penyerahan Beras) yang merupakan berita acara yang ditandatangani operator, pihak pengangkut beras, dan pejabat/pegawai (PNS) yang ditunjuk masing-masing distrik sebagai penerima beras. Adapun kewajiban melampirkan BAPB tersebut diatur dalam kontrak OAB tahun 2021 dan Peraturan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Papua Barat Nomor PER-01/WPB.33/999976/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Papua Barat Nomor PER-01/WPB.33/999976/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat, yang antara lain menegaskan bahwa terkait dengan pencairan dana, operator harus pula menyampaikan BAPB masing-masing distrik selain persyaratan-persyaratan yang sudah ada di peraturan sebelumnya. Selain untuk penyaluran ke distrik pedalaman, BAPB juga menjadi persyaratan pada pengambilan dalam kota.
- 2) Berdasarkan Peraturan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Nomor PER-1/WPB.33/999976/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor PER01/WPB.33/999976/2018, BAPB untuk pengambilan dalam kota pada Gudang Operator ditandatangani oleh operator dan pejabat/pegawai (PNS) yang ditunjuk masing-masing distrik sebagai penerima beras.
- 3) Untuk pengajuan tagihan di masa pandemi Covid-19 ini, sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian kegiatan OAB, operator tetap diwajibkan untuk menyampaikan tagihan lengkap secara hardcopy kepada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, meskipun transportasi udara/darat masih terdapat kendala di beberapa lokasi di Provinsi Papua Barat.
- 4) Untuk pengajuan tagihan di masa pandemi Covid-19 ini, sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian kegiatan OAB, operator tetap diwajibkan untuk menyampaikan tagihan lengkap secara hardcopy kepada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, meskipun

transportasi udara/darat masih terdapat kendala di beberapa lokasi di Provinsi Papua Barat.

- 5) Pada tahun 2022, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI atas Laporan Keuangan tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya juga terus dilakukan. Terdapat progress tindak lanjut rekomendasi BPK-RI yang masih dalam proses yaitu rekomendasi BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018, dimana terdapat perbedaan pencatatan jumlah kuantum (kilogram) beras yang diantar antara pihak Bulog dan pihak PD. Irian Bhakti selaku operator. Untuk menyelesaikan rekomendasi BPK tersebut, telah dilakukan Rekonsiliasi tiga pihak antara Kanwil DJPb prov. Papua Barat, Bulog dan PD. Irian Bhakti. Oleh karena itu, kami lampirkan laporan progres tindak lanjut rekomendasi BPK dimaksud beserta dokumen pendukung yang menjadi bukti tindak lanjut atau penyelesaian rekomendasi sebagaimana terlampir.
 - 6) Selanjutnya dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan kegiatan OAB PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat tahun 2021 sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan guna menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat pada bulan September sampai dengan Desember 2021 telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan OAB. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan di BPKAD/DPPKAD, OPD, SubDivre Perum Bulog, dan Kantor Cabang Irian Bhakti di beberapa kabupaten lingkup Provinsi Papua Barat.
- b. Satker Pengelola Dana Kompensasi pada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Dan Kekayaan Negara Dipisahkan.
- 1) Pelaksanaan pembayaran kompensasi akan dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan administratif pencairan dan dengan mempertimbangkan ketersediaan kas Pemerintah.
 - 2) Berdasarkan surat Plh. Direktur Keuangan PT PLN (Persero) nomor 1404/AGA.02.01/F01070000/2023 tanggal 7 Januari 2023, telah disampaikan perhitungan dana kompensasi listrik tahun 2022 sebesar Rp64.487.492.129.281, sehingga masih terdapat potensi kewajiban kompensasi listrik tahun 2022 sebesar Rp16.954.856.868.010.
 - 3) Terhadap perhitungan dana kompensasi listrik dan potensi kewajiban kompensasi listrik tahun 2022 berdasarkan perhitungan PT PLN (Persero), KPA telah melakukan rekonsiliasi dan menyusun asersi dengan mengacu pada hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan BPKP Nomor PE.12.01/S-118/D404/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang menyatakan bahwa nilai perhitungan dana kompensasi listrik tahun 2022 adalah sebesar Rp64.325.806.858.314, sehingga masih terdapat kewajiban kompensasi listrik tahun 2022 sebesar Rp16.793.171.597.043 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Atas Asersi Manajemen PT PLN (Persero) Terkait Kekurangan Penerimaan Akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2022 nomor: BA - 2/AG.6/2023 tanggal 14 Februari 2023.

- 4) Berdasarkan Asersi Manajemen PT Pertamina Patra Niaga nomor 005/PNF000000/2023-S4 tanggal 6 Januari 2023 hal Penyampaian Asersi Manajemen PT Pertamina Patra Niaga Untuk Dana Kompensasi Selisih HJE BBM Tahun 2022, terdapat potensi kewajiban sebesar Rp.49.297.042.752.640 terdiri dari:
 - Kewajiban Kompensasi BBM JBT Minyak Solar kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp35.784.912.175.334.
 - Kewajiban Kompensasi BBM JBKP Peralite kepada PT Pertamina Patra Niaga Peralite sebesar Rp13.512.130.577.306.
 - 5) Berdasarkan Asersi Manajemen PT AKR Corporindo, Tbk. nomor 014/L-FIN/2023 tanggal 6 Januari 2023 hal Penyampaian Asersi Manajemen atas Perhitungan Dana Kompensasi PT AKR Corporindo, Tbk. Untuk Penyaluran Janis BBM Tertentu Januari s.d. Desember Tahun 2022, terdapat potensi kewajiban sebesar Rp287.598.634.346.
 - 6) Terhadap potensi kewajiban kompensasi berdasarkan Asersi Manajemen PT Pertamina Patra Niaga dan Asersi Manajemen PT AKR Corporindo, Tbk., KPA telah melakukan rekonsiliasi dan menyusun asersi berdasarkan:
 - Notisi Reviu BPKP atas Perhitungan Potensi Dana Kompensasi BBM Periode Januari s.d. Desember Tahun 2022 pada PT Pertamina Patra Niaga tanggal 10 Februari 2023;
 - Notisi Reviu BPKP atas Perhitungan Potensi Dana Kompensasi BBM Periode Januari s.d. Desember Tahun 2022 pada PT AKR Corporindo, Tbk tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi atas Asersi Manajemen PT Pertamina Patra Niaga terkait Kekurangan Penerimaan sebagai Akibat dari Penetapan Harga Jual Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Peralite Tahun 2022 nomor: BA-3 /AG.6/2023 tanggal 13 Februari 2023 dan Berita Acara Rekonsiliasi atas Asersi Manajemen PT AKR Corporindo, Tbk terkait Kekurangan Penerimaan sebagai Akibat dari Penetapan Harga Jual Jenis BBM Tertentu Minyak Solar Tahun 2022 nomor: BA - 4/AG.6/2023 tanggal 13 Februari 2023.
- c. Satker Penyalur Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik pada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Dit. PNBPD SDA dan KND.
- 1) Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik PT PLN (Persero) kepada pelanggan listrik golongan industri, bisnis, dan sosial, dialokasikan pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).
 - 2) Kegiatan tersebut merupakan bagian PC PEN klaster Dukungan UMKM dan Korporasi dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun 2021, dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021.

- 3) Bantuan diberikan dengan kriteria penerima Bantuan tersebut sebagai berikut:
 - a) Bantuan pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil dengan rekening minimum diberlakukan bagi:
 - o Pelanggan golongan sosial daya 1300 VA ke atas;
 - o Pelanggan golongan bisnis daya 1300 VA ke atas; dan
 - o Pelanggan golongan industri daya 1300 VA ke atas;
 - b) Pembebasan biaya beban atau abonemen, diberlakukan bagi:
 - o Pelanggan golongan sosial daya 220 VA, 450 VA, dan 900 VA;
 - o Pelanggan golongan bisnis daya 900 VA; dan
 - o Pelanggan golongan industri daya 900 VA
 - 4) Pelaksanaan Program Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik dalam rangka PEN Tahun 2020 terdapat kurang bayar sebesar Rp18.823.102.000.
 - 5) Tunggakan kurang bayar tersebut belum dapat diselesaikan pada Tahun 2021, penyelesaian pembayaran tunggakan kurang bayar Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik dalam rangka PEN Tahun 2020 baru dilakukan di Triwulan IV Tahun 2022 dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-999.08.1.999256/2022 tanggal 30 November 2022.
- d. Satker Penyalur Bantuan Iuran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 1) Penyaluran bantuan iuran oleh Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Penyalur Bantuan Iuran) Kode Satker 954001 merupakan bagian dari kluster Kesehatan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
 - 2) Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan diberikan kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III.
 - 3) Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-957/MK.02/2021 tanggal 22 Oktober 2021 hal Penyampaian Usul Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyalur Bantuan Iuran JKN TA 2022, maka Kuasa Pengguna Anggaran yang semula dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktur Sistem Pembendaharaan, mulai penganggaran tahun 2022 akan dialihkan kepada Kementerian Kesehatan.
 - 4) Kekurangan pencairan dana bantuan iuran bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp269.329.268.400 sesuai Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih atau Selisih Kurang Pembayaran Bantuan Iuran Tahun 2021 Nomor: BA-6/PB.7/2022 & Nomor: 67/BA/0122

tanggal 27 Januari 2022, akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2022 pada DIPA Kementerian Kesehatan.

- 5) Pada tanggal 29 Juni 2022 dilakukan serah terima utang sebesar Rp244.258.773.900 dari Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Penyalur Bantuan Iuran) (954001) kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (465921) dengan nomor Berita Acara Serah Terima nomor BA-32/PB.7/2022 & nomor KN.01.01/4/2772/2022.

e. Satker Dana CBP

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KM.1/UP.11/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan atas nama Wibawa Pram Sihombing yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III, diangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU I serta atas nama Vicensia Retnasari yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang PPA 1 Kanwil NTT diangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III.
- 2) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 Nomor 49.b/LHP/XV/05/2022 tanggal 28 Mei 2022, terdapat temuan dan rekomendasi BPK atas Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Belanja Lain-Lain (BA 999.08), yaitu Proses Penganggaran dan Pelaksanaan Pembayaran Dana Cadangan Beras Pemerintah Belum Memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar:
 - Berkordinasi dengan K/L dan pihak terkait dalam proses perencanaan anggaran dana CBP sesuai dengan ketentuan dan peraturan terkait penyusunan dan perencanaan anggaran yang berlaku; dan
 - Menetapkan kebijakan atas tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana CBP dengan mempertimbangkan optimalisasi penyerapan anggaran.
- 3) KPA telah melakukan berkoordinasi bersama stakeholder dan K/L dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Alokasi DIPA TA 2022	KPA telah melakukan koordinasi dengan Perum BULOG melalui surat nomor S-13/PB.24/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Permintaan Dokumen Pendukung Kegiatan Dana Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2022.
2	Pembukaan blokir pertama	1. Telah dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu melalui surat KPA

		Nomor S-5/PB.24/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang permohonan rewi RKA BUN BA 999.08 Kegiatan Penyaluran Dana Cadangan Beras Pemerintah TA 2022. 2. Telah dilakukan koordinasi dengan Perum BULOG dalam rangka penjelasan atas rencana penganggaran TA 2022 melalui surat KPA nomor S-6/PB.24/2022 tanggal 22 Februari 2022.
3	Tindak Lanjut atas Audit HPB TA 2021 oleh BPK	Telah dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BA BUN Direktorat Jenderal Anggaran melalui rapat yang dilaksanakan pada 27 Juni 2022 dalam rangka Pembahasan Pembayaran Bantuan Beras PPKM TA 2021 Pasca Audit Harga Pembelian Beras (HPB) CBP tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (UND-9/PB.24/2022 tanggal 23 Juni 2022)
4	Mekanisme Pengalokasian Kegiatan BBPPKM TA 2021 pada DIPA Satker CBP Tahun Anggaran 2022	Telah dilakukan koordinasi dengan 1. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara selaku Unit Pendukung PPA BUN 999.08, dan 3. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara selaku Mitra PPA BUN, melalui rapat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2022 dalam rangka pembahasan mekanisme pengalokasian kegiatan BB PPKM TA 2021(UND-10/PB/24/2022 tanggal 12 Juli 2022)
5	Rapat Koordinasi Pembayaran CBP TA 2022	▪ Telah dilakukan koordinasi dengan: 1. Inspektorat III, Itjen Kemenkeu, 2. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, 3. Perum BULOG, 4. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 5. Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial,

		6. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, dan 7. Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Dalam Negeri melalui rapat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022 dalam rangka pembayaran tunggakan CBP dalam rangka KPSH serta penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana TA 2021 dan rencana pencairan TA 2022 (UND-12/PB.24/2022 tanggal 21 Juli 2022). KPA telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial dan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui surat nomor S-19/PB.24/2022 tanggal 9 Agustus 2022.
6	Pembukaan blokir kedua	Telah dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu melalui surat KPA S-20/PB.24/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Permintaan Reviu atas Update RKA BUN Kegiatan Penyaluran Dana Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran (TA) 2022.

- 4) KPA telah melakukan tindak lanjut dengan mengirimkan hasil reviu pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui nota Dinas nomor ND-286/PB.24/2022 tanggal 29 September 2022 hal Reviu Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

f. Satker Dit. Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

- 1) Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA.999.08.969380.KP merupakan satker inaktif karena tidak lagi mendapat alokasi anggaran sejak tahun 2013.
- 2) Surat Sesditjen TP No.B.1524/KU.050/C1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penutupan Rekening CBN, Instruksi ke PT. Pertani dan PT. SHS agar melakukan penyetoran pada Semester I Tahun 2021.
- 3) Dana pengelolaan CBN yang terdapat di PSO berdasarkan Laporan Hasil Audit Atas Pengelolaan Bagian Anggaran 999.08 Kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dilakukan oleh Tim Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:
 - BNI A/n PT.Syang Hyang Seri (Persero) Rek. No.10539904 saldo Rp1.041.018.103
 - BNI A/n PT. Pertani (Persero) Rek.No. 042601000502301 saldo Rp.3.698.612.007

Sedangkan dana pengelolaan CBN berdasarkan dari Laporan Rekening Koran dari kedua PSO sampai dengan 30 Juni 2021 sebagai berikut:

- BNI A/n PT.Syang Hyang Seri (Persero) Rek. No.10539904 saldo Rp0. Per tanggal 17 Juni 2021 telah dilakukan penutupan rekening dana pengelolaan CBN BNI A/n PT.Syang Hyang Seri (Persero).
- BNI A/n PT. Pertani (Persero) Rek.No. 042601000502301 saldo Rp0. Per tanggal 18 Juni 2021 telah dilakukan penutupan rekening dana pengelolaan CBN BNI A/n PT. Pertani (Persero).

g. Satker Layanan Pos Universal, Kemenkominfo

Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO LPU) atau Subsidi Operasional Layanan Pos Universal digunakan untuk membiayai Kantor Layanan Pos Universal (Kantor LPU) sesuai kriteria yang terdapat pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan dan Pengawasan Subsidi Operasional Layanan Pos Universal. Dana BO LPU diberikan berdasarkan metode pelaporan realisasi pendapatan dan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud.

Jumlah Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPC LPU) sebanyak 2.516 kantor berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 184 Tahun 2022.

h. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mengelola rekening di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu Tebet dengan nomor rekening sebagai berikut:

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Status
1	1158388788	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) TA 2021	Non-Aktif
2	0946044942	Bendahara Pengeluaran Manajemen Pelaksana	Aktif
3	1055845437	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) untuk Penihilan	Aktif
4	1334621057	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) TA 2022	Aktif

Rekening RPL Dana Kartu Prakerja Tahun 2021 digunakan untuk menampung Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan disalurkan kepada Peserta selama 100 hari kalender setelah tahun anggaran berakhir. Rekening ini telah bersaldo nihil sejak tanggal 28 Maret 2022 dan diusulkan ditutup berdasarkan Surat Direktur Eksekutif MPPKP Nomor S-216/Dir-Eks/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal permintaan penutupan Rekening

Induk pada Program Kartu Prakerja (RPL 2021). RPL tahun 2021 telah ditutup oleh pihak BNI pada tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan surat Direktur PKN nomor S-260/PB.3/2022.

Rekening RPL Dana Kartu Prakerja Tahun 2022 telah mendapat persetujuan dari Direktur PKN No S-3/PB.3/2021 tanggal 11 Januari 2022, rekening ini digunakan sebagai Rekening Penampungan untuk Pengelolaan Dana Program Tahun Anggaran 2022.

i. **SKK Migas**

- Menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan – Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 04 Maret 2022, perihal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas. Pencatatan dan pelaporan pada laporan keuangan Dana ASR dilakukan secara periodik dengan menyajikan saldonya pada tanggal pelaporan. Penyajian atas saldo Dana ASR disajikan pada Neraca SKK Migas dan tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.
- Dana ASR merupakan akumulasi dana yang disimpan di dalam rekening bersama (escrow account) yang diawasi oleh SKK MIGAS dan Kontraktor yang dicadangkan untuk pelaksanaan kegiatan pasca operasi (ASR) yaitu kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pencadangan dana ASR dimulai sejak KKKS berproduksi komersial sampai dengan produksi berakhir (umur ekonomis lapangan) dan dilakukan setiap semester dalam mata uang USD ke Rekening Bersama berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir dibagi dengan jangka waktu pengumpulan.
- Pengelolaan dan penatausahaan dana ASR pada rekening bersama dilakukan oleh SKK Migas berdasarkan Perjanjian Rekening Bersama antara SKK Migas, KKKS dan Bank.

I. BA 999.09

1. Entitas UAP BUN PBL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-296/PB/2021 Tentang Perubahan Unit Badan Lainnya yang tercantum dalam daftar Unit Badan Lainnya pada sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Pada tahun 2022 terdapat penambahan 3 UBL baru, pengurangan 3 UBL, dan penyesuaian 3 UBL dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan 3 UBL Baru, antara lain:
 - a. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
 - b. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
 - c. Kantor Staf Presiden
2. Pengurangan 3 UBL, antara lain:
 - a. Lembaga Perlindungan Saksi Korban
 - b. Bapertarum
 - c. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
3. Penyesuaian 3 UBL, yaitu:
 - a. Badan Restorasi Gambut menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
 - b. Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
 - c. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal menjadi Badan Pengelola Masjid Istiqlal

Dalam Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022 Audited, terhadap 70 UBL tersebut secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut:

1. UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 62 UBL.
2. UBL Bukan Satker sebanyak 8 UBL.

Untuk SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

1. Badan Pertimbangan Kepegawaian
Pada Tahun 2021 Badan Pertimbangan Kepegawaian berganti menjadi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
2. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.
3. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan nomor S-03/D.I.M.EKON/01/2017 tanggal 30 Januari 2020 bahwa pada tahun 2018 tidak ada usulan PTP maupun tambahan PTP sehingga belum ada kegiatan Rapat koordinasi Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero) ataupun alokasi Dana.
4. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)
Pada tahun 2018 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) tidak mendapatkan alokasi Dana.
5. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)
Pada tahun 2018 Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) tidak mendapatkan alokasi Dana.

6. Otorita Asahan

Sesuai dengan PERPRES 73 TAHUN 2018 Otorita Asahan telah dibubarkan dan proses Likuidasinya saat ini masih dalam penyelesaian oleh Kementerian Perekonomian.

7. Komite Nasional Geopark Indonesia

Pada tahun 2020, Komite Nasional Geopark Indonesia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.

8. Otoritas Nasional Senjata Kimia

Pada tahun 2020, Otoritas Nasional Senjata Kimia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.

9. Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pada tahun 2020, Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.

2. Laporan Keuangan Badan Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, UAP BUN-PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Ikhtisar laporan Keuangan. Dalam Laporan Keuangan UAP BUN-PBL Tahun 2022 *Audited*, menyajikan ekuitas bersih atas beberapa Unit Badan Lainnya sebagai berikut:

1. Otorita Asahan
2. Taman Mini Indonesia Indah
3. Yayasan Gedung Veteran RI
4. Badan Amil Zakat Nasional
5. Badan Wakaf Indonesia
6. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. Otorita Asahan

Otorita Asahan dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 5 tahun 1976 sebagai Badan yang bertugas mewakili Pemerintah dan bertanggung jawab atas kelancaran pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1788/A/2000 tanggal 4 Mei 2000 dinyatakan bahwa sejak tahun 2000 Otorita Asahan tidak dibiayai APBN, dan selanjutnya akan disediakan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Pada tanggal 8 Mei 2000 telah ditandatangani perjanjian sehubungan dengan penggantian biaya Otorita Asahan (*the Agreement Concerning the Reimbursement of Expenses of Otorita*) antara PT. Inalum dan Otorita Asahan, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. PT. Inalum akan mengganti sebagian dari pengeluaran Otorita Asahan atas jasa yang telah diberikan kepada PT. Inalum, kecuali pengeluaran untuk kegiatan pemerintah dan administrasi yang dilakukan Otorita Asahan seperti ijin dan lain-lain.
2. PT. Inalum akan membayar kepada Otorita Asahan setiap tahun fiskal dengan basis seimbang sebagaimana dilakukan pada NAA atas imbalan jasanya kepada PT. Inalum. Basis seimbang berarti pembayaran kembali kepada Otorita Asahan merupakan kompensasi atas pengeluaran Otorita Asahan yang terjadi dalam rangka pemberian jasa kepada PT. Inalum seperti halnya kepada NAA. Jumlah pembayaran kembali ke Otorita tersebut tidak melebihi jumlah yang dibayarkan PT. Inalum kepada NAA.

Pada tanggal 26 Maret 2002 dalam *Shareholder Forum* PT. Inalum di Jakarta, telah disepakati bersama bahwa atas penjualan alumunium yang tidak dapat diserap oleh pasar Indonesia, Otorita Asahan dapat melakukan kerjasama dengan PT. Inalum untuk menjual alumunium kepada pihak ketiga di luar negeri.

a. Sifat dan Kedudukan

- 1) Berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- 2) Badan Pembina Proyek Asahan berkedudukan di Jakarta;
- 3) Otorita Pengembangan Proyek Asahan berkedudukan di Medan.

b. Tujuan Pendirian

Mewakili Pemerintah untuk mengawasi dan membantu pelaksanaan proyek Asahan baik selama masa konstruksi maupun setelah perusahaan beroperasi sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Induk mengenai Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan (Proyek Asahan).

c. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Memberikan fasilitas dan jaminan bagi pelaksanaan persetujuan induk secara tepat dan berhasil;
- 2) Mengamankan kepentingan-kepentingan Pemerintah dan PERSERO Perusahaan serta Pengembangan usaha Perlistrikan dan Peleburan Aluminium;
- 3) Mengawasi pelaksanaan Proyek sesuai dan di dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Induk;
- 4) Memelihara kerjasama dan koordinasi secara terus menerus antara pihak-pihak dalam mencapai tujuan Persetujuan Induk;
- 5) Menjamin agar tata cara perijinan dan pemberian jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan dapat berjalan lancar dan tertib;
- 6) Mengembangkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- 7) Merencanakan dan mengendalikan pengembangan jangka panjang wilayah Proyek Asahan berserta prasarananya dalam kerjasama dengan instansi yang bersangkutan;
- 8) Berdasarkan MOU antara PT. Inalum dengan Otorita Asahan tanggal 7 Desember 1999, Otorita Asahan ditugaskan untuk mengelola seluruh upaya pemulihan dan pelestarian

lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Proyek Asahan dengan mengalokasikan dan memanfaatkan *environmental fund*.

d. Sumber Dana

o APBN

Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 barang milik negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2022 *Audited* belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa tim likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

2. Yayasan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah

a. Dasar Hukum

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1977 tanggal 10 September 1977 dan naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Republik Indonesia tanggal 10 April 1975, bahwa :

- 1) "Taman Mini Indonesia Indah" yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Dukuh, Lubang Buaya, dan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Jakarta Timur seluas 120 Ha beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia;
- 2) Penguasaan dan pengelolaan "Taman Mini Indonesia Indah" tersebut diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita;
- 3) Yayasan Harapan Kita bertugas dan berkewajiban mengurus serta memelihara TMII dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan "Taman Mini Indonesia Indah" tersebut secara berkala kepada Presiden; sesuai Akta Persembahan "Taman Mini Indonesia Indah" kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia no 47 tanggal 7 September 1987, bahwa luas "Taman Mini Indonesia Indah" menjadi +150 Ha.

b. Tugas dan Kewajiban

Tugas dan kewajiban Badan Pengawas TMII adalah:

1. Membantu Yayasan Harapan Kita khususnya di bidang pengawasan, pengelolaan dan pengembangan TMII.
2. Berkewajiban merencanakan dan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan TMII dengan berkoordinasi dengan Badan Pengelola dan Pengembangan TMII dan membuat laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita.
3. Ketua, Anggota, dan Sekretaris Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh ketua Yayasan Harapan Kita dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.
4. Pengurus dan anggota Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita.

Tugas dan kewajiban Badan Pengelola dan Pengembangan TMII adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama
 - a. Mengendalikan, memelihara dan mengembangkan TMII yang merupakan kawasan wisata budaya, sebagai wahana pelestarian dan pengembangan budaya bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
 - b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan secara operasional unit anjungan daerah, unit kerja di bawah BUMN, unit usaha, serta mengendalikan operasional dan administrasi unit kerja di bawah BPP TMII.
 - c. Menyusun rencana dan program kerja dan rencana anggaran dan pendapatan dan belanja TMII dan diajukan kepada Ketua Yayasan Harapan Kita untuk mendapatkan persetujuan.
 - d. Membina dan mengkoordinasikan para direktur dalam melaksanakan tugasnya.
2. Direktur Umum
 - a. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan administrasi, keuangan, SDM, hukum, teknik dan tata lingkungan.
 - b. Membantu Direktur Utama dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit anjungan daerah, unit kerja di bawah BUMN, unit usaha dan unit kerja BPP, serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan TMII.
3. Direktur Operasi

Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan operasional, pembangunan, pemeliharaan dan keamanan
4. Direktur Budaya
 - a. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan seni budaya, wisata, promosi dan informasi, hubungan masyarakat dan keamanan.
 - b. Membantu Direktur Utama dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan unit anjungan daerah, unit kerja di bawah

Departemen/BUMN, unit usaha dan unit kerja Badan Pengelola dan pengembangan, serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan TMII.

c. BPP TMII membuat laporan secara periodik kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita, tentang hasil pelaksanaan dan pengelolaan TMII.

d. BPP TMII membuat laporan secara periodik kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita, tentang hasil pelaksanaan dan pengelolaan TMII.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara maka pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir. Proses Likuidasi Taman Mini Indonesia sampai dengan penyusunan LKBL tahun 2022 *Audited* masih berlangsung.

Sebagai tindak lanjut atas penguasaan dan pengelolaan TMII, telah diterbitkan KMK Nomor 99/KM.6/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara. KMK tersebut telah menetapkan status penggunaan BMN pada Kemen Setneg sebesar Rp48.172.699.800,00. Pada tahun 2023, sedang dilakukan proses inventarisasi dan penilaian tahap II atas aset-aset YHK/BPP TMII.

3. Yayasan Gedung Veteran RI

Tanggal 22 Februari 1977 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1977 yang isinya:

- 1) Seluruh bangunan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha" beserta tanahnya Kaveling 50 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, adalah milik Negara Republik Indonesia.
- 2) Penguasaan dan pengelolaan Gedung Veteran dimaksud diserahkan kepada Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia.
- 3) Tugas dan wewenang :
 - a. Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia bertugas mengurus dan memelihara Gedung dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan para Veteran Republik Indonesia serta masyarakat umumnya.
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan gedung tersebut secara berkala kepada Presiden RI.
- 4) Pelaksanaan administratif dari Keputusan Presiden ini dilaksanakan oleh Menteri Sekretaris Negara bersama-sama Pimpinan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia. Pada tahun 1983, Kongres V LVRI di Medan menetapkan YGVRI sebagai anak organisasi LVRI, sebagai salah satu unit pelaksana organik LVRI.

4. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip transparansi, professional dan amanah dalam melaksanakan kegiatannya.

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Susunan keanggotaan BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004.

b. Visi dan Misi

Visi : "Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional."

Misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

c. Fungsi dan Wewenang

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kewenangan BAZNAS:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

d. Sumber Dana

APBN (Kementerian Agama), Penerimaan Zakat, Infaq dan sedekah, amil, hibah dan non syariah.

5. Badan Wakaf Indonesia

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta 13 Juli 2007. Jadi BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan beralamat di Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2, Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).

a. Dasar Hukum

- 1) Badan Wakaf Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

b. Visi dan Misi

Visi Badan Wakaf Indonesia adalah "Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional".

Sedangkan misinya yaitu "Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat".

c. Tugas dan Wewenang

Sesuai Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- 3) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 4) Memberhentikan dan mengganti nazhir;
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;

d. Struktur Organisasi

- 1) Terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan;
- 2) Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia;
- 3) Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia;
- 4) Masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota;
- 5) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh para anggota.

e. Sumber Dana

- 1) APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama dan dapat diperpanjang.
- 2) Dibebankan kepada Anggaran Kementerian Agama.

6. SKK MIGAS

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 31 Desember 2012 menyatakan bahwa fungsi dan tugas BP MIGAS diambil alih oleh pemerintah c.q. kementerian terkait sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang sebelumnya dilaksanakan oleh BPMIGAS dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh SKK Migas dan berlaku surut mulai 13 November 2012.

a. Visi dan Misi

Visi

Menjadi mitra yang proaktif dan terpercaya dalam mengoptimalkan manfaat industri hulu minyak dan gas bumi bagi bangsa dan seluruh pemangku kepentingan serta menjadi salah satu lokomotif penggerak aktivitas ekonomi Indonesia.

Misi

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama dengan semangat kemitraan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Tugas dan fungsi

Tugas

Melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Fungsi

- a) Memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja sama.
- b) Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama.
- c) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- d) Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- e) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran.
- f) Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama.
- g) Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Wewenang

- a) Membina kerjasama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor kontrak kerja sama.
- b) Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor kontrak kerja sama.
- c) Mengawasi kegiatan utama operasional KKKS.
- d) Membina seluruh aset kontraktor kontrak kerja sama yang menjadi milik Negara.

- e) Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu.

7. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Visi dan Misi

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan, Fungsi dan Tugas

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB.

8. Badan Pengelola Keuangan Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, kemudian ditindaklanjuti dengan penunjukan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana melalui Keputusan Presiden Nomor 74P Tahun 2017 Tanggal 7 September 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;

3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
4. Keputusan Presiden Nomor 74P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Badan Pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

Untuk melaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji Badan Pelaksana bertugas:

- a. merumuskan kebijakan;
 - kemampuan Keuangan Haji;
 - perkembangan ekonomi; dan
 - hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji.
- b. menyiapkan rencana strategis; dan
- c. menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.

J. BA 999.99

UAP BUN TK DJPb

A. Satker PFK

1. Saldo akhir utang menurut akrual sama dengan saldo akhir utang menurut kas

Saldo akhir utang menurut akrual sama dengan saldo akhir utang menurut kas. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: saldo akhir utang menurut akrual dipengaruhi oleh saldo awal utang menurut akrual ditambah dengan penerimaan PFK Pegawai, dikurangi pengeluaran PFK Pegawai, ditambah/dikurangi saldo akhir piutang (menggambarkan potensi penerimaan kas yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan), serta dipengaruhi oleh koreksi utang.

Sampai dengan Bulan Desember tahun 2022, rincian saldo utang menurut akrual dan utang menurut kas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	LK UAKPA (Rp)	Neraca Percobaan Ledger Kas (Rp)
1.	Saldo Awal Utang	961.059.001.096	961.059.001.096
2.	Mutasi Utang / Kas (81-82)	(151.688.368.539)	(151.710.374.305)
	Akun 81		36.048.495.420.376
	Akun 82		36.200.205.794.681
3.	Saldo Akhir (1+2)	809.370.632.557	809.348.626.791
4.	Koreksi Utang		
5.	Piutang (/h. B.2)		22.005.766
6.	Selisih Kas Akrual		
7.	Saldo Akhir (3+4+5+6)	809.370.632.557	809.370.632.557

2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).

Pada prinsipnya Satuan Kerja (440780) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menyusun Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai hanya meliputi Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional tidak diperkenankan terdapat dalam Laporan Keuangan dimaksud. Namun demikian, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyusunan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai Bulan Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dicantumkan dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

3. Penyajian Neraca Percobaan Basis Akrua dan Neraca Percobaan Basis Kas dalam lampiran Laporan Keuangan.

Penyajian dimaksudkan untuk memberikan keyakinan mengenai rincian saldo utang per 31 Desember 2022 dan memberikan informasi mengenai transaksi penerimaan setoran/potong PFK Pegawai dan transaksi pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pegawai.

4. Penerimaan dana PFK untuk BP Tapera tercatat pada laporan keuangan karena sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan 212/PMK.05/2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, akun-akun terkait penerimaan BP Tapera sudah diaktifkan.

5. Terdapat beberapa akun yang sudah tidak digunakan namun tetap dimunculkan dalam Laporan Keuangan ini untuk kepentingan historical data. Akun-akun tersebut telah dinonaktifkan (deactivated) pada sistem (SAKTI dan SPAN) sesuai dengan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-690/PB.6/2022 tanggal 25 Juli 2022 hal Kebijakan atas Penonaktifan Akun Kas Penerimaan dan Pengeluaran Non Anggaran PFK pada SAKTI, SPAN, dan Aplikasi Terkait.

6. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Dalam rangka menyalurkan hasil penerimaan Dana PFK Pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-4/PB/PB.3/2023 Tanggal 31 Januari 2023 tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Lanjutan kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Perum Bulog Berdasarkan Realisasi Penerimaan PFK Sampai Dengan Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2022. Penerbitan SKP ini sejalan dengan BAB VI Penetapan SKP-PFK Lanjutan dan Pembayaran Dana PFK Pegawai atas SK-PPFK Lanjutan PMK Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 212/PMK.05/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. Adapun realisasi pembayaran per badan penyelenggara adalah sebagai berikut:

No	Pihak Ketiga	Nilai Utang (Rp)	Realisasi SKP (Rp)	Sisa (Rp)
1	Perum Bulog	(18.970.922)	0	(18.970.922)
2	PT Taspen (Persero)	61.250.214.341	61.238.107.424	12.106.917
3	PT Asabri (Persero)	158.273.803	158.273.803	0
4	BP Tapera	4.557.679.836	0	4.557.679.836

Khusus untuk BPJS Kesehatan, dirinci sebagai berikut:

No	Utang	Nilai Utang (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
5	211111	102.730.036.490	109.432.043.463	(6.702.006.973)	
	211116	(262.632)	0	(262.632)	
	211117	585.090.781.839	582.441.487.269	2.649.294.570	
	211118	0	0	0	
	211119	55.135.684.082	50.619.638.820	4.516.045.262	
	211112	0	0	0	
	211121	445.189.954	659.028.684	(213.838.730)	

B. Satker Pensiun

1. Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05.2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi yang menjadi payung hukum program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela. Dengan belum terbentuknya dana pensiun, pembebanan belanja pensiun masih bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (a) UU Nomor 11 Tahun 1969.
2. Undang-undang tersebut beserta regulasi turunannya mengamanatkan bahwa program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit). Sedangkan mekanisme pendanaan yang digunakan adalah pay as you go yang dibiayai dari APBN. Implikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan pendanaan Pay As You Go adalah Pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun (sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan.
3. Pengungkapan Nilai kewajiban jangka panjang program pensiun per 31 Desember 2022 yang dihitung oleh Badan Penyelenggara berdasarkan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Menteri yang tertera dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran Nomor ND-171/AG/2023 Hal Penyampaian Nilai Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Tahun 2022 Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp2.950.742.901.216.800,00 yang terdiri dari:
 - a. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Pusat sebesar Rp936.578.012.599.817.
 - b. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Daerah sebesar Rp2.014.164.888.616.983.
 Kewajiban jangka panjang Program Pensiun tahun 2022 tersebut dapat terbagi juga sebagai berikut:
 - a. Kewajiban terhadap pegawai aktif sebesar Rp1.372.169.725.854.802.
 - b. Kewajiban terhadap Pensiunan sebesar Rp1.578.573.175.361.998.
4. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, terdapat UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan yang dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPb yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan. Akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang mengelola belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.

5. Berkaitan dengan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) atau Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Kereta Api Indonesia / PT KAI (Persero), dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Perubahan Nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) yang semula Rp1.207.373.859.616,- menjadi Rp1.182.060.998.353,- sesuai Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Dephub pada PT KAI (Persero) Per 31 Desember 2022 Audited tanggal 20 Februari 2023 dan per 31 Desember 2021 Audited Tanggal 15 Maret 2022.
 - b. Pada saat ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) dikelola terpisah dari AIP PNS. Dalam hal ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) akan disetorkan ke dalam AIP PNS pada saat program penyesuaian pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) berakhir, yakni pada saat tidak ada lagi penerima pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero). Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (4), yang berbunyi "Pada saat program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) berakhir, Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke dalam akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil."
 - c. Sehubungan dengan poin b, maka nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) tidak masuk ke dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (kode satker 987361).
6. Menunjuk Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan keuangan Nomor ND-78/PB.6/2022 tanggal 24 Januari 2022 hal Laporan Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI atas LKBUN s.d Semester II Tahun 2021, terdapat 1 temuan sebagai berikut:

Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Entitas yang Telah Dilakukan
Dana AIP yang Dibayarkan untuk Biaya Investasi dan Biaya Imbal Jasa Sebesar Rp911,26 Miliar Tidak Dapat Dimanfaatkan untuk Pengembangan Dana AIP	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar menyusun kajian terkait kebijakan alternatif pendanaan biaya investasi dan biaya imbal jasa dari pengelolaan AIP melalui APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Telah dibuatkan Nota Dinas Direktur SP DJPb kepada Direktur HPP dan PNBPN KND DJA terkait progress tindak lanjut penyelesaian temuan BPK RI LKBUN TA 2021 No ND-1642 Tanggal 2 Nov 2022 2. Penerbitan Surat DJA Nomor S-5/AG/AG.1/2022 tanggal 4 Agt 2022 tentang Penyampaian TL Terakhir rekomendasi BPK RI s.d Semester I TA 2022 di DJA Tahap II

UAP BUN TK DJA

A. Penjelasan Berkaitan Dengan Dampak Covid-19

a. Satker Panas Bumi

Realisasi pendapatan pengusahaan panas bumi sebesar Rp2.164.709.549.857 atau mencapai sebesar 145,67% dari target pendapatan 2022 sebesar Rp1.486.049.920.000.

Penyusunan LKBUN PNBP panas bumi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dengan merebaknya pandemi covid-19 berdampak pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya pelaksanaan proyek-proyek pada tahun 2022 yang telah mengalami penundaan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat berdampak pada biaya operasi dan penghasilan bersih usaha (Nett operating Income /NOI) tahun berjalan.
- b. Realisasi setoran bagian pemerintah (IDR) pada periode ini mengalami kenaikan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan:
 - Kenaikan penjualan pada PT PGE karena meningkatnya produksi uap.
 - Kenaikan penjualan pada Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd (SEGWWL) dan Star Energy Geothermal Salak (SEGS) karena peningkatan harga jual listrik dan/atau uap serta peningkatan produksi listrik dan/atau uap yang disebabkan oleh periode pelaksanaan pemeliharaan PLTP yang lebih singkat daripada tahun 2021.

B. Ringkasan Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dari Kontrak Kerja Sama Tahun 2022

Berikut ini adalah ringkasan hasil kegiatan usaha hulu migas dari kontrak kerjasama selama tahun 2022 (periode lifting Januari s.d. Desember) pada Kontraktor Kerja Sama (KKKS):

		Jumlah
Lifting Oil	MBBLS	220.196,01
Lifting Gas	MMSCF	1.891.848,03
Oil Price	USD/ICP	100,33
Gas Price	Harga Rata-rata tertimbang	8,91
Gross Revenue	(USD 000)	37.734.146
First Tranche Petroleum	(USD 000)	3.987.645
Total Recoverable	(USD 000)	7.876.943
Equity to be Split	(USD 000)	25.664.552
Government Share *)	(USD 000)	13.065.168
Lifting Pemerintah	(USD 000)	13.447.450
Net Overlifting Pemerintah	(USD 000)	382.282

*) berdasarkan % *Split Production Sharing Contract*

keterangan:

MBBLS = 000 Barrels

MSCF = 000 Square Cubic Feet

ICP = Indonesian Crude Price

Data tersebut di atas berasal dari resume rekapitulasi FQR *Preliminary* Kuartal IV 2022 dan FMR 2022 yang masih belum final karena masih dalam proses riviui oleh SKK Migas.

UAP BUN TK DJPK

A. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok

Sesuai dengan Bab IV tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 juncto PMK Nomor 102/PMK.07/2015 juncto PMK Nomor 41/PMK.07/2016 juncto PMK Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan atau karena adanya pengembalian Cukai Rokok. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok tersebut dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan pembayaran Pajak Rokok berikutnya (kompensasi) atau dilakukan secara tunai. Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan dan memeriksa jangka waktu berlaku Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok. Dalam hal hasil penelitian telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat permintaan kepada Kepala KPPN untuk menerbitkan SKTB dilampiri copy lembar ke-1 SSBP yang telah mendapatkan NTPN. Setelah diterbitkannya SKTB oleh Kepala KPPN, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada DJPK dengan dilampiri dokumen permohonan dari Wajib Pajak Rokok, tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok, dan SKTB. Kemudian berdasarkan surat rekomendasi tersebut, DJPK menerbitkan SKP-KP2R. Atas dasar SKP-KP2R yang diterbitkan, pejabat perbendaharaan Pajak Rokok menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok melalui KPPN Jakarta II.

Sampai dengan akhir periode Tahun Anggaran 2022, terdapat 4 (empat) pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak Rokok a.n. PT. Sampoerna Indonesia Sembilan yang didasarkan pada surat Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan dan ditindaklanjuti oleh DJPK sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Triwulan	Dokumen		Nama Perusahaan	Nilai
		Tanggal	Nomor		
1	II	6 April 2022	Kep- 11/PK.3/KPA/2022	PT Sampoerna Indonesia Sembilan	5.433.856.163
Total					5.433.856.163

Jumlah penyelesaian pengembalian tersebut diperhitungkan dengan penerimaan Pajak Rokok yang menjadi hak daerah pada periode penyetoran berikutnya. Untuk pengembalian kepada PT. Sampoerna Indoensia Sembilan sebesar Rp5.433.856.163 diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan II Tahun Anggaran 2022.

Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak Rokok a.n. RR Restu Jaya Abadi yang didasarkan pada surat Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dan ditindaklanjuti oleh DJPK sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Triwulan	Dokumen		Nama Perusahaan	Nilai
		Tanggal	Nomor		
1	II	17 Mei 2022	Kep-14/PK.3/KPA/2022	PR Restu Jaya Abadi	8.640.000
Total					8.640.000

Jumlah penyelesaian pengembalian tersebut diperhitungkan dengan penerimaan Pajak Rokok yang menjadi hak daerah pada periode penyetoran berikutnya. Untuk pengembalian kepada RR Restu Jaya Abadi sebesar Rp8.640.000 diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan II Tahun Anggaran 2022.

No	Triwulan	Dokumen		Nama Perusahaan	Nilai
		Tanggal	Nomor		
1	II	29 Juli 2022	Kep-17/PK.3/KPA/2022	PR Lancar Nunut Urip	16.560.000
Total					16.560.000

Jumlah penyelesaian pengembalian tersebut diperhitungkan dengan penerimaan Pajak Rokok yang menjadi hak daerah pada periode penyetoran berikutnya. Untuk pengembalian kepada RR Lancar Nunut Urip sebesar Rp16.560.000 diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan III Tahun Anggaran 2022.

No	Triwulan	Dokumen		Nama Perusahaan	Nilai
		Tanggal	Nomor		
1	IV	5 Desember 2022	Kep-193/PK.4/2022	PT Sampoerna Indonesia Sembilan	52.543.214
Total					52.543.214

Jumlah penyelesaian pengembalian tersebut diperhitungkan dengan penerimaan Pajak Rokok yang menjadi hak daerah pada periode penyetoran berikutnya. Untuk pengembalian kepada PT Sampoerna Indonesia Sembilan sebesar Rp52.543.214 diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

B. Tindak Lanjut atas Temuan BPK

Tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang adanya perbedaan data penerimaan Pajak Rokok tahun 2015 menurut DJBC (SAC-S) sebesar Rp12.254.041.168.540 dan menurut DJPB (SPAN) sebesar Rp13.953.934.936.936 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp1.699.893.768.396), telah ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan antara DJPK, DJPB, DJBC dan Itjen. Kemudian disepakati akan dilakukan penelusuran perbedaan data tersebut dengan mengacu pada NTPN. Selanjutnya melalui surat DJPK nomor S-17/PK.3/2017 tanggal 14 Februari 2017 hal Permintaan Penjelasan Data Pajak Rokok TA 2015 dan 2016 yang telah ditindaklanjuti dengan surat Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai nomor S-552/BC.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 hal Penyampaian hasil Rekonsiliasi Data Pajak Rokok Tahun 2015 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. DJBC telah mengirimkan surat nomor S-304/BC.04/2017 tanggal 31 Juli 2017 hal Permintaan Penjelasan Data Pajak Rokok tahun 2015 kepada beberapa KPPBC yang menangani Pajak Rokok.
2. DJBC telah melakukan rekonsiliasi Pajak Rokok tahun 2015 kepada beberapa KPPBC secara langsung dengan mendatangi kantor tersebut serta melakukan wawancara dengan pegawai yang menangani Pajak Rokok di kantor tersebut.
3. Didapatkan hasil rekonsiliasi sebagai berikut:
 - a. Dari 124 NTPN yang ada pada aplikasi SPAN namun tidak ada dalam aplikasi SAC-S telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 110 NTPN.
 - b. Dari 21 NTPN yang ada pada aplikasi SACS namun tidak ada dalam aplikasi SPAN telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 21 NTPN.
 - c. Dari 24 NTPN yang memiliki nilai setoran yang sama dengan frekuensi penyetoran pada tanggal penyetoran yang sama lebih dari 1 kali telah terkonfirmasi sebanyak 24 NTPN.
 - d. Dari 13 data pajak rokok yang memiliki NTPN yang sama tetapi nominal penyetorannya berbeda telah terkonfirmasi sebanyak 13 data.
 - e. Dari 6 transaksi pajak rokok yang double dan memiliki perbedaan pada detail transaksinya telah terkonfirmasi sebanyak 1 transaksi.
4. Terdapat kendala dalam pencarian data pajak rokok dikarenakan penelusuran data hanya dari nama penyetor, tidak menyebutkan nama KPPBC-nya. Hal tersebut mengakibatkan data pajak rokok tidak ditemukan.
5. Data pajak rokok yang belum ditemukan masih dalam proses pencarian dan menunggu konfirmasi dari KPPBC terkait.

Pada Semester I Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pembahasan bersama antara DJPK, DJPB, DJBC, dan Itjen Kemenkeu pada tanggal 23 Mei 2018 di Ruang Rapat II, Gedung Papua Lantai 4, DJBC sesuai dengan undangan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai nomor UND-148/BC.04/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Undangan Rapat Pembahasan dan Penelahaan Bersama. Pada rapat tersebut telah disimpulkan bahwa dari 17 transaksi pajak rokok yang belum ditemukan sampai akhir tahun 2017, telah ditemukan dokumen sumber dari 6 transaksi tersebut. Sehingga total sisa selisih data tahun 2015 adalah sebanyak 11 transaksi dengan jumlah pajak rokok sebesar Rp22.705.652.400. Untuk transaksi yang belum ditemukan akan dilakukan konfirmasi ke KPPBC/Perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nomor ND-69/BC.04/2019 tanggal 25 Januari 2019 hal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekonsiliasi Data Pajak Rokok Tahun 2015 dapat disampaikan bahwa:

1. DJBC telah melakukan rekonsiliasi Pajak Rokok Tahun 2015 dengan meminta penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) secara langsung (mendatangi kantor tersebut) ataupun tidak langsung.
2. Telah ditemukan hasil rekonsiliasi sebagai berikut:
 - a. Dari 25 NTPN yang ada pada aplikasi SPAN namun tidak ada dalam aplikasi SAC-S telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 24 NTPN dan tersisa 1 NTPN yang belum terkonfirmasi.
 - b. Dari 9 NTPN yang ada pada aplikasi SAC-S namun tidak ada di aplikasi SPAN telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 9 NTPN.
 - c. Dari 2 data pajak rokok yang memiliki NTPN berbeda antara aplikasi dan aplikasi SAC-S (indikasi salah input) namun nominal penyetorannya sama, telah terkonfirmasi sebanyak 2 data.

- d. Dari 5 transaksi pajak rokok yang double entry dan memiliki perbedaan pada detail transaksinya telah terkonfirmasi sebanyak 5 transaksi.
3. Bahwa tersisa 1 transaksi yang belum ditemukan dengan jumlah sebesar Rp21,59 Juta atau sebesar 01% dari jumlah nilai temuan seluruhnya (Rp1,69 Triliun).

C. Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Rokok

Rekonsiliasi Semester II dilaksanakan tanggal 28 bulan Februari tahun 2023 untuk Data Penerimaan Pajak Rokok periode Tahun Anggaran 2022 antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui aplikasi Ms Teams.

Rekonsiliasi dilaksanakan untuk menyesuaikan informasi catatan penerimaan Pajak Rokok yang disediakan oleh SPAN/MPN-DJPB dengan dokumen pendukung pemungutan yang tercatat dalam catatan penerimaan Pajak Rokok yang disediakan oleh SACS-DJBC. Sumber data yang digunakan antara lain berupa rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok yang disampaikan DJPB ke DJPK setiap triwulan serta data pendukung rincian transaksi yang diunduh melalui SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dan MPN (Modul Penerimaan Negara) dan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok yang disampaikan DJBC ke DJPK setiap bulan serta data pendukung rincian transaksi yang ditarik dari SACS (Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi).

Rincian rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok dari DJPB dan DJBC periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 yang ditarik pada tanggal 17 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Bulan	SACS (DJBC) (rupiah)	SPAN/MPN (DJPB) (rupiah)
Januari	1.735.837.053.647	1.730.206.940.147
Februari	2.455.561.105.900	2.450.270.991.160
Maret	1.306.066.533.423	1.310.275.260.383
April	2.059.016.977.587	2.053.824.401.947
Mei	2.634.600.139.361	2.637.955.512.881
Juni	1.424.201.100.372	1.430.426.208.492
Juli	486.538.092.682	487.506.392.182
Agustus	1.244.262.129.590	1.236.249.281.330
September	1.854.478.795.230	1.855.403.490.170
Oktober	1.732.393.336.459	1.739.369.607.899
November	1.765.873.020.509	1.755.520.033.709
Desember	3.006.652.407.001	3.018.472.571.401
Total	21.705.480.691.761	21.705.480.691.701

Total rekapitulasi penerimaan Pajak Rokok berdasarkan data SACS-DJBC adalah sebesar Rp21.705.480.691.761 sedangkan total rekapitulasi penerimaan Pajak Rokok berdasarkan data SPAN/MPN-DJPB sebesar Rp21.705.480.691.701 atau terdapat selisih sebesar 60.

Atas kedua data penerimaan tersebut, telah dilakukan rekonsiliasi dengan mencocokkan NTPN dan nilai transaksi pada data SPAN/MPN dan data SACS. Perbedaan yang ditemukan tersebut karena perbedaan nominal total data di SPAN dan SACS yaitu sebesar Rp60,00 (lebih besar SACS). Data SACS dengan NTPN 12FE51BOQAAFVD45 nominal Rp3.875.100,00 sedangkan data SPAN dengan NTPN yang sama menunjukkan nominal Rp3.875.040,00. Terkait hal tersebut, DJBC akan melakukan koreksi dan menyampaikan hasilnya kepada DJPK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah disepakati bahwa nilai penerimaan Pajak Rokok periode Tahun Anggaran 2022 yang dimuat dalam SACS dan SPAN telah sesuai dengan dokumen sumernya yaitu sebesar Rp21.705.480.691.701,00

D. Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan yang merupakan amanat dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Mekanisme pemotongan penerimaan Pajak Rokok untuk disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan mengacu kepada ketentuan Pasal 6 PMK Nomor 128/PMK.07/2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Apabila anggaran kontribusi Jaminan Kesehatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi, sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) atau lebih, tidak dilakukan pemotongan Pajak Rokok;
- b. Apabila anggaran kontribusi Jaminan Kesehatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi, kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen), pemotongan Pajak Rokok dilakukan sebesar selisih kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen); atau
- c. Apabila pemerintah provinsi tidak menyampaikan kompilasi berita acara kesepakatan dikenakan pemotongan Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).

Berita acara kesepakatan memuat kesepakatan antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan mengenai besaran penerimaan Pajak Rokok yang akan dipotong sebagai bentuk kontribusi daerah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Berita acara kesepakatan dari daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi dikompilasi oleh pemerintah provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pemotongan dilaksanakan sesuai dengan kompilasi berita acara kesepakatan untuk daerah yang memenuhi ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 6 PMK Nomor 128/PMK.07/2018 pada setiap periode penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 115/PMK.07/2013 beserta perubahannya.

Selanjutnya terkait dengan mekanisme pemotongan dalam penyetoran PR sebagai berikut:

- Pagu alokasi Desember TA 2021 dan pagu alokasi TW I TA 2022, dibagi secara proporsional berdasarkan data jumlah penduduk kepada provinsi.
- Apabila terdapat selisih kurang atas kewajiban jamkes daerah TA 2021 dalam Kompilasi BAK akan dipotong dari realisasi penerimaan PR periode Desember TA 2021. Dalam hal selisih kurang atas kewajiban jamkes daerah TA 2021 lebih kecil dari perhitungan realisasi Desember 2021 maka dipotong sebesar selisih kurang, dan apabila selisih kurang atas kewajiban jamkes daerah TA 2021 lebih besar dari perhitungan realisasi Desember 2020 maka dipotong sebesar realisasi Desember 2020, dan atas sisa pemotongan akan diperhitungkan dalam TW I 2022.
- Apabila terdapat selisih kurang atas kewajiban jamkes daerah TA 2021 dalam Kompilasi BAK akan dipotong dari realisasi penerimaan PR TW I TA 2021 dengan memperhitungkan sisa pemotongan Desember 2021. Dalam hal selisih kurang lebih kecil dari 37,5% perhitungan realisasi TW I maka dipotong sebesar selisih kurang dan apabila selisih kurang lebih besar dari 37,5% perhitungan realisasi TW I maka dipotong sebesar 37,5% dari realisasi TW I dan atas sisa pemotongan akan diperhitungkan dalam TW II sampai dengan TW IV TA 2022.
- Untuk pemda yang tidak mengganggu Anggaran Jamkesda dalam Kompilasi BAK TA 2021 akan dilakukan pemotongan sebesar 37,5% dari realisasi penerimaan PR TW I TA 2022.

Ringkasan besaran pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan masing-masing Provinsi sebagaimana tabel di bawah:

No	Provinsi	Desember 2021		Triwulan I 2022		Triwulan II 2022		Triwulan III 2022		Triwulan IV 2022	
		RKUD	BPIS	RKUD	BPIS	RKUD	BPIS	RKUD	BPIS	RKUD	BPIS
1	Provinsi Aceh	53.854.023.010	-	107.296.946.322	-	119.754.758.941	-	62.008.070.611	-	76.364.259.960	-
2	Provinsi Sumatera Utara	139.264.763.514	13.800.169.656	290.754.036.461	15.133.286.482	337.200.892.371	4.201.765.186	176.775.606.111	-	217.702.924.903	-
3	Provinsi Sumatera Barat	56.578.106.510	126.973.202	112.764.063.052	-	125.856.640.389	-	65.167.576.746	-	80.255.259.075	-
4	Provinsi Riau	57.957.509.349	5.384.507.703	129.686.766.540	374.035.519	145.161.633.505	-	75.163.550.075	-	92.565.513.180	-
5	Provinsi Kepulauan Riau	18.221.239.535	1.976.718.727	41.413.077.768	-	46.221.382.016	-	23.933.067.421	-	29.474.082.393	-
6	Provinsi Jambi	35.249.882.083	366.770.362	71.673.681.504	-	79.995.421.540	-	41.420.998.975	-	51.010.842.659	-
7	Provinsi Sumatera Selatan	80.190.963.784	4.752.403.146	171.077.053.143	-	190.940.114.903	-	98.867.287.045	-	121.757.170.237	-
8	Provinsi Bangka Belitung	14.322.518.498	-	29.327.474.675	-	32.732.568.637	-	16.948.666.134	-	20.872.643.414	-
9	Provinsi Bengkulu	20.511.293.869	-	37.525.693.986	3.433.795.608	43.453.338.763	2.261.790.799	23.469.812.856	201.121.034	29.151.259.364	-
10	Provinsi Lampung	80.425.728.217	11.855.803.466	177.578.404.441	811.753.033	199.102.314.074	-	103.093.609.465	-	126.961.976.333	-
11	Provinsi DKI Jakarta	113.035.107.739	-	226.604.015.248	-	252.914.087.039	-	130.956.921.511	-	161.276.238.712	-
12	Provinsi Jawa Barat	452.246.673.963	17.086.780.753	942.456.858.045	16.402.124.139	1.070.188.203.915	-	554.135.019.782	-	682.429.082.000	-
13	Provinsi Banten	81.419.293.538	31.021.095.642	233.239.291.217	4.299.138.838	265.118.052.335	-	137.276.038.587	-	169.058.366.010	-
14	Provinsi Jawa Tengah	350.757.059.281	24.943.779.591	743.314.614.606	6.807.587.625	837.215.844.287	-	433.503.767.598	-	533.869.125.041	-
15	Provinsi DI Yogyakarta	37.352.471.839	-	74.063.205.198	-	82.662.383.124	-	42.801.930.670	-	52.711.489.460	-
16	Provinsi Jawa Timur	374.565.641.393	42.542.041.874	809.797.500.765	16.226.539.654	921.569.182.036	361.154.573	477.368.264.242	-	587.889.187.134	-
17	Provinsi Kalimantan Barat	54.409.698.339	1.159.738.353	106.942.578.053	3.114.524.137	122.835.385.296	-	63.603.194.664	-	78.328.689.214	-
18	Provinsi Kalimantan Tengah	26.496.052.854	-	49.752.612.938	3.442.191.451	59.371.037.061	-	30.741.855.195	-	37.859.240.588	-
19	Provinsi Kalimantan Selatan	41.445.996.072	-	71.682.459.419	11.005.933.141	88.271.810.821	4.017.195.136	47.786.520.123	-	58.850.117.562	-
20	Provinsi Kalimantan Timur	36.392.328.119	887.410.188	76.648.603.382	-	85.547.961.390	-	44.296.060.360	-	54.551.542.004	-
21	Provinsi Kalimantan Utara	6.758.078.435	-	13.948.355.183	-	15.567.842.047	-	8.060.905.950	-	9.927.177.404	-
22	Provinsi Sulawesi Utara	26.243.128.947	842.164.287	52.469.474.107	1.047.321.265	59.031.119.297	699.293.811	30.565.848.455	362.088.826	37.917.548.356	170.865.285
23	Provinsi Gorontalo	11.624.296.635	489.659.967	24.154.663.345	-	26.959.163.195	-	13.959.242.286	-	17.191.104.259	-
24	Provinsi Sulawesi Tengah	25.555.389.641	4.866.950.217	57.476.107.047	3.668.187.231	64.430.964.832	3.812.545.099	34.468.548.766	867.402.974	42.300.605.552	1.216.371.803
25	Provinsi Sulawesi Selatan	92.670.570.729	763.669.829	184.826.019.080	401.832.511	206.733.905.081	-	107.045.187.157	-	131.828.428.445	-
26	Provinsi Sulawesi Barat	15.918.175.906	-	29.043.808.276	-	32.415.966.885	-	16.784.732.242	-	20.670.755.333	-
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	25.366.995.286	1.615.027.126	52.627.908.400	1.168.362.249	59.098.313.577	944.023.548	31.089.449.079	-	38.287.318.862	-
28	Provinsi Bali	43.396.849.308	-	84.309.659.682	1.809.669.710	96.118.294.929	-	49.769.295.781	-	61.291.948.025	-
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	54.186.654.438	-	108.916.472.307	-	121.562.321.509	-	62.944.012.266	-	77.516.892.048	-
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	54.695.276.541	829.509.929	108.256.936.958	2.255.284.777	121.707.772.756	1.635.574.166	63.866.213.192	-	78.652.602.134	-
31	Provinsi Maluku	18.569.161.380	414.412.660	35.249.827.918	2.540.911.744	41.412.093.385	766.375.561	21.839.678.889	-	26.896.029.818	-
32	Provinsi Maluku Utara	13.422.335.396	-	26.536.510.033	-	29.617.556.427	-	15.335.737.356	-	18.886.287.262	-
33	Provinsi Papua	41.402.485.623	2.936.844.854	86.682.047.957	137.521.149	96.899.836.631	-	50.173.971.917	-	61.790.315.308	-
34	Provinsi Papua Barat	11.675.916.029	-	23.142.608.208	-	25.829.602.447	-	13.374.364.631	-	16.470.814.967	-
Total		2.566.181.665.800	168.662.431.532	5.391.239.335.264	94.080.000.263	6.103.497.765.441	18.699.717.879	3.168.595.006.138	1.430.612.834	3.902.566.846.016	1.387.237.088
Grand Total											21.416.340.618.255

UAP BUN TK DJKN

A. ABMA/T

1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT CAPAIAN KINERJA PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, pada Tahun 2022 sebanyak 14 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 1 aset diselesaikan sebagian status hukumnya.

Sampai dengan Tahun 2022, dari total ABMA/T sebanyak 1.020 dalam Lampiran PMK Nomor 182/PMK.06/2021, sebanyak 550 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 470 aset yang belum diselesaikan yang terdiri dari 76 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 394 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.

2. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LAINNYA

Sejak awal pengelolaan ABMA/T sampai dengan Tahun 2022, terdapat 53 Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T dengan cara dilepaskan kepada Pihak Ketiga dengan pembayaran kompensasi.

3. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT RAPAT PEMBAHASAN

Sebagai upaya dalam penyelesaian ABMA/T, Tim Penyelesaian melaksanakan agenda rapat rutin pembahasan yang telah dilakukan selama dari awal tahun hingga tahun 2022.

4. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT PENAMBAHAN JUMLAH ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA DALAM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 182/PMK.06/2021

Sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020, dijelaskan bahwa aset yang dilakukan penyelesaian tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. Selanjutnya, dalam rangka mengakomodir penyelesaian ABMA/T telah dilakukan perubahan terhadap Lampiran PMK 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dengan menambahkan lima ABMA/T yang belum diselesaikan secara keseluruhan (penyelesaian sebagian), yakni:

- Kantor Dispenda Kodya Dati II Bogor-TK/SD/SMP/SMA/ Akademi Management, berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat.
- SDN Waluyo I dan Perumahan/Pertokoan, berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- SDN VII, IX, XIV dan XVI Karawang, Masyarakat, Pemerintah Daerah untuk fasilitas Jalan, berlokasi di Karawang, Jawa Barat.
- SMA Negeri Blitar, SD Negeri Sananwetan, berlokasi di Kotamadya Blitar, Jawa Timur.
- SD Negeri Jatituri 1 dan 3, Madrasah Aliyah Negeri, TK Pertiwi, SMP/SMA/SMEA Kodya Blitar, Perkoveri dan Makoramil, berlokasi di Kotamadya Blitar, Jawa Timur.

Atas dasar tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, yang mengakibatkan terjadinya pemutakhiran data ABMA/T yang sebelumnya berjumlah 1.015 aset menjadi 1.020 aset.

5. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA YANG MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN DENGAN CARA PELEPASAN KEPADA PIHAK KETIGA

ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi: pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih berlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKN sampai dengan Tahun 2022.

6. **PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS PENGELOLAAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA**

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara dan/atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK-RI terkait pengelolaan ABMA/T, terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan atas Aset Bekas Milik Asing/Cina pada DJKN Tahun 2007 yang menyisakan 2 (dua) butir rekomendasi masih berstatus dalam proses tindak lanjut.

7. **TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN 2021 TERKAIT PENGELOLAAN ABMA/T**

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Undang-Undang Bendahara Umum Negara Tahun 2021 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 49.b/LHP/XV/05/2022 tanggal 28 Mei 2022, terdapat temuan yang berkaitan dengan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dengan dua rekomendasi yang hingga saat ini masih dalam proses tindak lanjut.

B. Aset Eks Pertamina

1. **PEMANFAATAN BMN OLEH PT PERTAMINA C.Q. PT PERTAMINA EP**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Pertamina telah dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003, telah ditetapkan aset, liabilitas, ekuitas, termasuk modal dasar dan modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara kepada PT Pertamina (Persero).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, terhadap aset eks Pertamina yang tidak masuk dalam penyertaan modal Negara pada PT Pertamina (Persero) berupa 10 aset tetap berupa tanah dan bangunan, aktiva kilang yang dikelola oleh PT Arun dan PT Badak, dan aset eks Kontrak kerjasama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP telah ditetapkan statusnya sebagai BMN dalam penguasaan Pengelola Barang. BMN berupa 10 aset tetap eks Pertamina adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Aset	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Nilai (Rp)
1	Jl. Agus Salim 108 dan 108A, Jakpus	1.057	837	9.293.188.000
2	Jl. Surabaya 60 & 60 Pav, Jakpus	1.468	357	9.410.537.000
3	Jl. Brawijaya VIII/30, Jaksel	665	401	6.486.717.000
4	Jl. Tarogong 33, Jakarta Selatan	105.557	-	207.375.000.000
5	Jl. Tanjung 34, Jakarta Pusat	1.076	337	1
6	Jl. Dipati Ukur 31, Bandung	751	-	2.131.297.000
7	Jl. Jatibarang IV, Jakarta Timur	-	-	1.284.185.000
8	Sawangan, Depok	8.345	-	22.465.100.000
9	Jl. Abdul Muis 68, Jakarta	22.305	-	121.275.536.000
10	Jl. Kapten Tendean, Jaksel	46.280	-	15.505.583.177
Jumlah				395.227.143.178

Terhadap 10 aset tetap tersebut diatas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan inventarisasi dan penilaian tahun 2012 dan diperoleh nilai sebagai berikut:

No	Lokasi Aset	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Nilai (Rp)
1	Jl. Agus Salim 108 & 108A Jakarta Pusat	1.057	837	35.037.558.000
2	Jl. Surabaya 60 & 60 Pav Jakarta Pusat	1.468	357	36.505.456.000
3	Jl. Brawijaya VIII/30 Jakarta Selatan	665	401	14.490.489.000
4	Jl. Tarogong 33, Jakarta Selatan	105.557	-	1.233.433.545.000
5	Jl. Tanjung 34 Jakarta Pusat	1.076	337	15.379.053.000
6	Jl. Dipati Ukur No 31 Bandung	751	-	2.991.056.000
7	Jl. Jatibarang IV Jakarta Timur	-	-	-
8	Sawangan Depok Jawa Barat	8.345	-	-
9	Jl. Abdul Muis 68 Jakarta Pusat	22.305	-	265.899.043.000
10	Jl. Kapten Tendean Jakarta Selatan	46.280	-	77.191.137.000
Jumlah				1.680.927.337.000

Status pengelolaan 10 aset tetap eks Pertamina saat ini adalah:

1. Sebanyak 4 (empat) aset telah diserahkan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yaitu tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Agus Salim 108 dan 108A Jakarta Pusat, tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Surabaya 60 Jakarta Pusat, tanah yang berlokasi di Jl. Tarogong 33 Jakarta Selatan, dan tanah yang berlokasi di Jl. Kapten Tendean Jakarta Selatan.
2. Di samping itu, terdapat 3 (tiga) aset tanah dan bangunan yang telah ditetapkan status penggunaannya yang berlokasi di Jl. Brawijaya VIII/30 Jakarta Selatan, Jl. Tanjung 34 Jakarta Pusat, dan Jl. Dipati Ukur 31 Bandung, dan sebagian sisanya masih tercatat di Laporan Keuangan ini.

BMN berupa aktiva kilang LNG Arun dan Badak adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Aset	Lokasi	Nilai
1	Aktiva LNG Arun	Blang Lancang. Lhokseumawe Aceh Utara, NAD	10.820.874.332.290
2	Aktiva LNG Badak	Bontang, Kalimantan Timur	16.301.881.511.633

Dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 114/KN/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Penyerahkelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara yang mengamanatkan untuk mengalihkan Aktiva kilang liquefied natural gas (LNG) yang dikelola oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL, maka pencatatan atas kedua aktiva tersebut selanjutnya akan dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

BMN berupa aset eks Kontrak Kerjasama (KKS) Pertamina yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP dengan nilai perolehan per 17 September 2003 sebesar Rp16.242.092.564.001, dengan rincian sebagai berikut: (Nilai dalam satuan jutaan rupiah)

No	Unit	Sumur	Tanah	FasProd	Bangunan	HBM Bergerak	Lain-Lain
1	DOH NAD	619.896	0	600.360	145.201	69.449	32
2	DOH SBT	605.977	438.003	697.618	112.362	48.284	15.194
3	DOH SBS	1.779.580	196.677	3.423.418	195.954	146.755	27.734
4	DOH JBT	266.183	28.617	124.668	22.121	21.250	0
5	DOH JBB	1.113.622	337.926	1.079.784	86.410	160.675	112.627
6	DOH KAL	1.086.353	0	885.674	1.185.066	63.659	18.556
7	DOH PAP	144.790	127.838	192.341	23.514	11.962	0
8	KP Hulu	6.349	17.475	75	0	2.066	0

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan Inventarisasi dan Penilaian terhadap aset eks Kontrak Kerjasama Pertamina yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP dengan nilai perolehan

per 17 September 2003 sebesar Rp16.242.092.564.001 pada tahun 2012 dan membagi rincian aset tersebut diatas ke dalam 12 wilayah sesuai Kantor Wilayah DJKN lokasi aset berada, sebagai berikut:

No	Uraian	Data Awal		Hasil IP s.d 2022		
		Unit	Nilai Perolehan	Unit	Nilai Perolehan	Nilai Wajar
1	Kanwil DJKN Aceh	6.807	988.909	4.110	455.989	474.123
2	Kanwil DJKN Sumatera Utara	803	446.027	2.995	825.326	444.833
3	Kanwil DJKN Riau, Kepri dan Sumbar	1.902	704.162	1.476	558.964	1.215.496
4	Kanwil DJKN Sumatera Selatan dan Babel	18.783	6.986.215	13.634	5.558.610	4.822.474
5	Kanwil DJKN Serang	20	5.366	18	2.504	16.903
6	Kanwil DJKN Jakarta	10	3.378	10	3.378	2.369
7	Kanwil DJKN Jawa Barat	4.757	2.845.486	3.884	2.521.560	6.080.258
8	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY	1.283	466.800	1.274	466.712	398.074
9	Kanwil DJKN Jawa Timur	39	57.411	39	57.411	48.026
10	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah	2.065	1.562.415	1.483	980.252	893.528
11	Kanwil DJKN Kaltimara	5.406	1.675.382	5.034	1.625.324	1.481.158
12	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, Maluku	1.114	500.536	1.114	500.536	733.557
Jumlah		42.989	16.242.087	35.071	13.556.566	16.610.799

Atas BMN sejumlah 42.989 unit tersebut telah dilakukan inventarisasi dan penilaian dari tahun 2012 s.d. tahun 2022 sebanyak 35.071 unit. Adapun untuk sisanya, 7.918 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp2.685.520.522.990, akan dilakukan inventarisasi dan penilaian secara bertahap, dengan memprioritaskan objek penilaian berupa tanah dan teknis pelaksanaan IP-nya lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan pembatasan sosial terkait pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian dari tahun 2012 s.d 2020 terdapat 45 unit Aset Tidak Ditemukan dengan nilai Rp3,245,3240 dan 4.285 Unit Aset Kondisi Rusak Total dan atau FUPP dengan nilai Rp422,597,125,014 yang belum dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Terkait dengan hal tersebut,

Direktorat PKNSI melalui surat Direktur PKNSI Nomor 1143/KN.5/2021 tanggal 20 Mei 2021 telah menyampaikan permintaan kepada Pertamina EP untuk segera menindaklanjuti dengan mengajukan usul penghapusan dan penjualan atas aset tersebut kepada Menteri Keuangan.

2. PEMANFAATAN BMN OLEH PT PERTAMINA C.Q. PT PERTAMINA EP

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, Menteri Keuangan menanggapi surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 1105/C00000/2008-S0 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, Menteri Keuangan antara lain menyetujui skema sewa atas pemanfaatan aset-aset Eks KKKS Pertamina senilai Rp16,2 Triliun, dengan mengeluarkan objek sewa berupa lahan dan sumur yang dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak Wilayah Kerja dengan BP Migas (SKK Migas), sehingga pengakuan beban sewa sementara untuk Barang Milik Negara Eks Aset KKKS Hulu sebesar Rp16,2 Triliun adalah sebesar Rp9,472 Triliun. Untuk itu, perlu dilakukan pemilahan aset-aset eks KKKS Pertamina sebagai objek sewa dalam rangka penghitungan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Negara Eks Aset KKKS.

Menindaklanjuti skema sewa tersebut, melalui surat Nomor: S-155/KN.3/2014 tanggal 5 Juni 2014 perihal Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun 2013, Direktur KND meminta agar PT Pertamina (Persero) dan/atau Pertamina EP menyelesaikan pelunasan tunggakan hutang sewa BMN Eks Aset Pertamina. Melalui surat Nomor: SRT-0365/SKKC0000/2014/S4 tanggal 29 September 2014 perihal Sewa BMN Eks Pertamina Rp3,03 Triliun, SKK Migas berkeberatan apabila pengembalian biaya sewa dilakukan dengan mekanisme cost recovery.

Menjawab surat dari SKK Migas, Menteri Keuangan kemudian bersurat kepada Kepala SKK Migas melalui surat Nomor: S-837/MK.06/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal Piutang Sewa BMN oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP yang pada pokoknya menyampaikan bahwa SKK Migas memperhitungkan Biaya Sewa BMN sebagai biaya operasi PT Pertamina EP yang dapat dikembalikan sesuai ketentuan perundangan.

Pada tanggal 30 Desember 2014, SKK Migas melalui surat Nomor: SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 bersurat kepada Menteri Keuangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

Pada prinsipnya SKK Migas menyetujui sewa aset eks Pertamina dapat dibebankan sebagai biaya operasi (cost recovery) sepanjang aset tersebut digunakan dalam operasi hulu migas.

Sebagai tindak lanjut, SKK Migas telah meminta konfirmasi kepada PT Pertamina EP melalui surat Nomor: SRT-2498/SKKC2000/2014/S4 tanggal 17 Desember 2014 perihal Sewa Aset Eks Pertamina atas nilai aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP.

PT Pertamina EP melalui surat Nomor 127/EP4000/2014-S4 tanggal 24 Desember 2014 perihal Sewa Aset Eks Pertamina memberikan konfirmasi bahwa berdasarkan hasil inventarisasi aset eks BMN Pertamina yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks Pertamina, maka nilai aset BMN Eks Pertamina kategori equipment, bangunan dan aset lainnya yang saat ini digunakan oleh PT Pertamina EP sebesar Rp6.630.929.353.338.

Berdasarkan hal tersebut, maka SKK Migas meminta agar pengenaan sewa didasarkan pada hasil konfirmasi PT Pertamina EP sebagai Pengguna Barang Aset Eks KKKS Pertamina dengan nilai sebesar Rp6.630.929.353.338.

Hal ini sejalan juga dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat tripartit antara BPK, Kementerian Keuangan dan SKK Migas pada tanggal 13 November 2015 bahwa atas BMN Eks Aset Pertamina yang dikuasai oleh Pertamina EP dikenakan sewa dan perlu dibuat perjanjian sewa antara Pemerintah (DJKN) dengan PT Pertamina EP.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pertamina EP telah menyelesaikan pembayaran sewa sampai dengan per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.745.619.185.367 dan melalui surat Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor: S-21/KN.3/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Draft Perjanjian Sewa Menyewa BMN Eks Pertamina, maka disusun dan ditandatangani perjanjian sewa menyewa Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 dengan menggunakan dasar perhitungan sewa sebesar Rp6.630.929.353.338.

Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184, sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015 kepada Menteri Keuangan, Direktorat KND telah dilakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.

Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473.

Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.

Mempertimbangkan prinsip konservatisme dalam akuntansi, yaitu prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana Direktorat KND mengakui segera potensi adanya piutang sewa yang tidak tertagih, maka dasar perhitungan pendapatan PNBP Lainnya menggunakan nilai Rp6.630.929.353.338.

Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp0.

3. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TERKAIT ASET EKS PERTAMINA

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu

“Pengendalian atas Pemanfaatan BMN KKKS dan Pencatatan Aset Eks Pertamina Belum Tertib”. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar melakukan penelusuran dan menetapkan status aset Eks Pertamina yang belum dilakukan IP atau belum dapat ditentukan nilai wajarnya.

- a. Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan kebijakan yang disepakati dengan BPK adalah Menteri Keuangan akan memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menelusuri BMN yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya berdasarkan Laporan Hasil IP tahun 2012 dan mengungkapkan status aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya tetap berstatus BMN sebagaimana ditetapkan dalam KMK nomor 92/KMK.06/2008.
- b. Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan tahun 2022 adalah:
 - 1) Berdasarkan hasil penelusuran, telah terpetakan BMN Eks Pertamina yang menjadi objek IP sejumlah 42.989 berdasarkan data hasil appraisal Uljatek saat aset tersebut dilimpahkan kepada Kementerian Keuangan. Sampai dengan Tahun 2022, BMN Eks Pertamina yang telah dilakukan IP adalah 42.989 unit. Nilai wajar hasil IP tersebut telah disajikan dalam LK SATK BMN Eks Pertamina. Adapun untuk sisanya 7.918 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp2.685.520.522.990, akan dilakukan inventarisasi dan penilaian secara bertahap, dengan memprioritaskan objek penilaian berupa tanah dan teknis pelaksanaan IP-nya lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan pembatasan sosial terkait pandemi Covid-19.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2019, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu “Terdapat perbedaan penghitungan Piutang atas sewa Aset Eks Pertamina antara PT Pertamina EP dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)” .

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN untuk memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menyusun perjanjian pemanfaatan BMN Eks Pertamina dengan PT Pertamina EP sesuai dengan hasil peninjauan lapangan untuk menetapkan nilai BMN Eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP serta menyesuaikan nilai piutang yang tercatat berdasarkan perjanjian yang telah disusun.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2022 adalah:

- a. Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi BA- 01/KN.3/REKON.PEP/2015 antara DJKN dengan Pertamina EP dengan hasil Jumlah aset bangunan, equipment, dan aset lainnya sebesar Rp8,425 Triliun, digunakan sebanyak Rp6,63 Triliun, dan aset yang tidak digunakan sebesar Rp1,794 Triliun.
- b. Berdasarkan hasil Rekonsiliasi tahun 2015 di atas, dilakukan pemetaan atas aset Rp1,794 Triliun dalam rangka verifikasi atas aset yang benar-benar tidak digunakan.
- c. Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi

sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473.

- d. Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.
- e. PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-S0 tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:
 - 1) Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil Physical Check BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.
 - 2) Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK dimaksud, PT Pertamina EP menyampaikan Hasil Physical Check Aset 2019 sebagai berikut:

Kelas Aset	Digunakan	Tidak Digunakan	Total
Objek Sewa			
Bangunan	502.296.425.065	98.814.481.867	601.110.906.932
Equipment	4.157.250.251.286	1.731.901.048.120	5.889.151.299.406
Lain-lain	94.463.625.000	46.203.522.000	140.667.147.000
Subtotal Objek Sewa	4.754.010.301.352	1.876.919.051.987	6.630.929.353.338

- 3) Berdasarkan hasil PCA 2019 tersebut, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352.
- f. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Pertamina EP sebanyak dua kali dan disepakati untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan pihak lain yang terkait.
- g. Terkait dengan koreksi besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp349.267.287.782 pada laporan keuangan, telah dimintakan permintaan pendapat melalui nota dinas Direktur PKNSI Nomor 2755/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Inspektorat IV dan Nomor 2756/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang pada intinya meminta pendapat apakah surat kepada Pertamina EP perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dapat dijadikan dasar untuk dilakukan koreksi piutang.
- h. Menanggapi permintaan pendapat tersebut, Inspektorat IV berpendapat agar Dit. PKNSI segera melakukan pembahasan dengan PT. Pertamina EP untuk menyepakati hasil proses identifikasi dan verifikasi atas BMN yang dimanfaatkan dan menyusun perjanjian pemanfaatan BMN berdasarkan hasil kesepakatan dengan PT. Pertamina EP. Mengingat Standar Akuntansi

Pemerintah Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua mengatur pencatatan piutang pemanfaatan BMN pada neraca berdasarkan naskah perjanjian sewa.

- i. Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina telah dilakukan rapat via Zoom antara DJKN dengan Pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 24 April 2022, dimana berkaitan dengan adanya perbedaan besaran tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk kembali kepada angka dasar sewa sesuai kesepakatan semula yaitu sebesar Rp6.630.929.353.338 dan akan dilakukan koordinasi di internal kedua belah pihak.
- j. Telah dilakukan pembahasan draft perjanjian sewa BMN Eks Pertamina pada 9 September 2022 sesuai undangan dari Direktur Regional 2 PT Pertamina EP melalui surat undangan nomor 1058/PEP00000/2022-S0 tanggal 07 September 2022. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan pembahasan lanjutan draft perjanjian sewa bersama PT Pertamina EP dan masih akan diagendakan pembahasan lanjutan untuk finalisasi draft perjanjian tersebut. Sehubungan dengan jangka waktu sewa, telah dimintakan pendapat kepada Direktorat PKKN melalui nota dinas Direktur PKN Nomor ND-1505/KN.4/2022 tanggal 20 September 2022 hal Permintaan Pendapat terkait Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Eks Aset Pertamina.
- k. Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp0

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2020, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu *"Pengelolaan Aset Eks Pertamina Belum Memadai serta Belum Selesai Perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Pertamina EP"* dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

- a. menyelesaikan inventarisasi dan penilaian atas 8.057 Aset Eks Pertamina dan menyajikan dalam Laporan Keuangan serta melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap minimal 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total dan atau FUPP sesuai ketentuan.
- b. memerintahkan Dit. PKNSI melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dit. PNKNL atas penyelesaian, pengukuran dan pencatatan 18 bidang tanah Aset Eks Pertamina; dan
- c. melakukan verifikasi dan penilaian bersama dengan PT Pertamina EP untuk menetapkan nilai Aset Eks Pertamina dalam perjanjian pemanfaatan Aset Eks Pertamina dengan PT Pertamina EP dan menyelesaikan perbedaan nilai piutang serta menyesuaikan dampak pengakuan piutang terhadap nilai Investasi Permanen Pemerintah pada PT Pertamina yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Adapun progress tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK tersebut sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Dalam rangka penyelesaian IP BMN Eks Pertamina, Kementerian Keuangan telah melakukan IP atas 42.989 unit aset atau sekitar 82% dari total aset 42.989 unit, dan terhadap sisa aset 7.918

unit (18%) akan dilakukan rencana aksi melaksanakan IP dengan PT Pertamina EP secara bertahap, dengan memprioritaskan objek yang teknis, pelaksanaan IP yang lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan Pembatasan Sosial terkait Pandemi.

Sehubungan ditetapkan PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terdapat perubahan tugas unit baru di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk juga antara lain peralihan tugas kegiatan Penatausahaan BMN pada Pengelola Barang yang dahulu pada Direktorat PKNSI menjadi tugas Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara. Menindaklanjuti hal tersebut telah dilakukan peralihan Tugas Penatausahaan serta pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN eks Pertamina kepada Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara sesuai nota dinas Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor ND-471/KN.4/2022 tanggal 13 Mei 2022..

- b. Dalam rangka tindak lanjut temuan pengelolaan lebih lanjut terhadap minimal 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total dan atau FUPP, Dir. PKNSI dengan surat Nomor : S-1143/KN.5/2021 tanggal 20 Mei 2021 hal tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara eks Pertamina, meminta Pertamina untuk segera mengajukan FUPP terhadap 4.330 unit aset sebagai tindak lanjut IP 2012 s.d 2020 (terdiri dari 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total.
- c. Dalam rangka tindak lanjut temuan perbedaan pencatatan 18 bidang tanah Aset Eks Pertamina, telah dilakukan rekonsiliasi dengan pihak PT Pertamina EP, Kementerian ESDM dan SKK Migas terkait 18 aset tersebut, berdasarkan rekonsiliasi tersebut disepakati bahwa 17 aset merupakan aset eks Pertamina sedangkan 1 aset sisanya akan dilakukan penelitian dokumen terlebih dahulu oleh PT Pertamina EP.
- d. Terkait dengan sisa 1 aset tersebut, Direktorat PKN telah menyampaikan permintaan konfirmasi kepada pihak Pertamina EP melalui Surat Direktur PKN Nomor S-225/KN.4/2022 tanggal 10 Juli 2022. Namun belum mendapat tanggapan dari pihak PT Pertamina EP.
- e. Progress penyelesaian perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Pertamina EP sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - 1) Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi BA- 01/KN.3/REKON.PEP/2015 antara DJKN dengan Pertamina EP dengan hasil Jumlah aset bangunan, equipment, dan aset lainnya sebesar Rp8,425 Triliun, digunakan sebanyak Rp6,63 Triliun, dan aset yang tidak digunakan sebesar Rp1,794 Triliun.
 - 2) Berdasarkan hasil Rekonsiliasi tahun 2015 di atas, dilakukan pemetaan atas aset Rp1,794 Triliun dalam rangka verifikasi atas aset yang benar-benar tidak digunakan.
 - 3) Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi

sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473.

- 4) Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.
- 5) PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-S0 tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:
 - a) Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil Physical Check BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.
 - b) Berdasarkan hasil PCA 2019, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352.
 - c) Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina telah dilakukan rapat via Zoom antara DJKN dengan Pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 24 April 2022, dimana berkaitan dengan adanya perbedaan besaran tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk kembali kepada angka dasar sewa sesuai kesepakatan semula yaitu sebesar Rp6.630.929.353.338, dan akan dilakukan koordinasi di internal kedua belah pihak.
- 6) Telah dilakukan pembahasan draft perjanjian sewa BMN Eks Pertamina pada 9 September 2022 sesuai undangan dari Direktur Regional 2 PT Pertamina EP melalui surat undangan nomor 1058/PEP00000/2022-S0 tanggal 07 September 2022. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan pembahasan lanjutan draft perjanjian sewa bersama PT Pertamina EP dan masih akan diagendakan pembahasan lanjutan untuk finalisasi draft perjanjian tersebut. Sehubungan dengan jangka waktu sewa, telah dimintakan pendapat kepada Direktorat PKKN melalui nota dinas Direktur PKN Nomor ND-1505/KN.4/2022 tanggal 20 September 2022 hal Permintaan Pendapat terkait Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Eks Aset Pertamina.
- 7) Telah dilakukan pembahasan draft perjanjian sewa BMN Eks Pertamina pada 9 September 2022 sesuai undangan dari Direktur Regional 2 PT Pertamina EP melalui surat undangan nomor 1058/PEP00000/2022-S0 tanggal 07 September 2022. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan pembahasan lanjutan draft perjanjian sewa bersama PT Pertamina EP dan masih akan diagendakan pembahasan lanjutan untuk finalisasi draft perjanjian tersebut. Sehubungan dengan jangka waktu sewa, telah dimintakan pendapat kepada Direktorat PKKN melalui nota dinas Direktur PKN Nomor ND-1505/KN.4/2022 tanggal

20 September 2022 hal Permintaan Pendapat terkait Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Eks Aset Pertamina.

- 8) Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp0.

4. **KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA OLEH LMAN**

Pada periode pelaporan 2016, Aset eks Pertamina yang diserahkan ke LMAN masih dicatat oleh UAKPA BUN BA 999.99 pada Direktorat KND. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan atas aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada aset tersebut tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus periode pelaporan 2017. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan 2017 atas pos-pos yang terkait pengelolaan Aset eks Pertamina kelolaan LMAN yang telah diserahkan sebelum periode pelaporan. Selanjutnya, atas transaksi penyerahan aset kepada LMAN yang terjadi pada periode berjalan, diperlakukan sebagai Transfer Keluar.

5. **PERALIHAN PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA KEPADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA**

Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020, memberikan penugasan pengelolaan BMN eks Pertamina yang sebelumnya dikelola oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, dialihkan kepada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

Berdasarkan surat perintah tersebut, kewenangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan untuk menandatangani persetujuan/keputusan yang terkait dengan pengelolaan BMN eks Pertamina sebagaimana diatur dalam KMK 781/KM.01/2019 dan tanggung jawab sebagai UAKPA BUN TK pengelola Aset Eks Pertamina sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2017 masih berlaku. Namun untuk tindak lanjut persetujuan/keputusan pengelolaan BMN eks Pertamina dan penyusunan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK pengelola Aset Eks Pertamina periode pelaporan tahun 2020 dilaksanakan oleh Direktorat PKNSI berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terjadi perubahan nomenklatur dari semula Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menjadi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara.

C. BMN Idle

1. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN idle namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:
 - Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagai BMN idle melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017 tentang Penetapan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara Sebagai BMN Idle. KPKNL Surabaya telah melakukan cek fisik dan ditemukan fakta bahwa tanah dimaksud telah terpasang papan nama Pemerintah Kota Surabaya. Saat ini KPKNL Surabaya tengah melakukan koordinasi terkait pemasangan papan nama tersebut. Melalui nota dinas Kepala KPKNL Surabaya kepada Kepala KPP Gresik Utara Nomor ND-269/WKN.10/KNL.01/2019 tanggal 16 April 2019, Kepala KPKNL telah menyampaikan permohonan penjelasan dokumen kepemilikan untuk selanjutnya dapat dilaksanakan serah terima BMN idle dimaksud.
 - Sembilan Bidang Tanah Bangunan Pos Jaga dan Sembilan unit Gedung Pos Jaga Permanen yang terletak di Kabupaten Sumenep, Sampang, dan Bangkalan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 44/KM.6/WKN.10/KNL.05/2021 tanggal 26 Oktober 2021 karena belum terdapat Berita Acara Serah Terima Antara Kementerian Keuangan c.q. KPPBC Pratama Madura dengan Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan.
2. Terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang namun belum dilakukan serah terima antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang dengan rincian sebagai berikut:
 - Satu unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jalan Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan RI.
 - Satu unit Bangunan Gedung kantor Permanen yang terletak di Jl. Pelajar Pejuang 45 No 8, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan RI.
 - Satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Komplek Taman Mutiara Blok C-IV/18 Bandung Barat ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan RI.
 - Satu bidang Tanah Persil Lainnya dan satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Jl. Jabir no.3 RT 05/07 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu ditetapkan status penggunaan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 - Satu bidang Tanah Persil Lainnya dan satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Jl. Mawar luar RT 03 RW 06 Kel. Tugu Utara Kec. Koja ditetapkan status penggunaan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 - Satu Bidang Tanah Rumah Negara dalam Proses Penggolongan dan dua unit Bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen, serta dua unit Bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen yang terletak di Jl. Indrakila Kel. Panjer, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen ditetapkan status penggunaan pada Mahkamah Agung RI.
3. Pada periode Tahun 2022, tidak terdapat program Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2022 maupun penggunaan sisa dana PC-PEN Tahun 2020. Lebih lanjut

Realisasi Anggaran Semester II Tahun 2022 adalah nihil dan tidak berdampak pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca Semester II Tahun 2022.

D. Aset BLBI

1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LANCAR

a. Aset Kredit eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank.

Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit Asset Transfer Kit (ATK), aset kredit Non Asset Transfer Kit (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB). Sedangkan, Aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB. SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN. Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Nilai Per 31 Desember 2022
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJPN	365.388.343.253
2	Aset Kredit Non ATK Yang Masih Dikelola DJKN	31.142.123.653.733
3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN	0

No	Uraian	Nilai Per 31 Desember 2022
4	Hasil Inventarisasi Aset Kredit Non ATK	4.382.757.616.247
	Jumlah	35.890.269.613.233

Sedangkan untuk tagihan PKPS yang belum diterbitkan PB/PJPN oleh PUPN c.q. KPKNL yaitu:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021
-	-	0
	Jumlah	0

Pada Tahun 2022 telah dilakukan penyerahan aset kredit eks BPPN baik ATK maupun Non ATK senilai Rp2.818.863.434.285 dengan rincian sebagai berikut:

No	Mata Uang	Nilai	Jumlah Aset Kredit	Nilai dalam Rupiah
1	Dollar Amerika	12.910.861	7	201.306.142.997
2	ATK	12.910.861	7	
3	Rupiah	2.617.557.291.289	121	2.617.557.291.289
4	ATK	2.558.502.750.372	90	
5	Non ATK	59.054.540.917	31	
	Grand Total	5.235.140.404.300	256	2.818.863.434.285

Direktorat PKN melakukan penatausahaan barang jaminan atas aset kredit eks BPPN (selain PKPS) dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang telah diserahkan kepada PUPN sampai dengan periode Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Jenis Kepemilikan	Jumlah Aset Kredit
1	AJB	296
2	BORTOGCH	205
3	BPK	47
4	BPKB	1.233
5	FAKTUR	10
6	GIRIK	83
7	IJAZAH	70

No	Jenis Kepemilikan	Jumlah Aset Kredit
8	KET-KEPALA-DESA	3
9	KWITANSI	10
10	LAIN-LAIN	898
11	SHGB	575
12	SHGU	8
13	SHM	1.784
14	SHP	31
15	SIPTB	4
16	TASPEN	45
17	(blank)	59
Jumlah		5.361

Direktorat PKN akan menyempurnakan data penatausahaan barang jaminan dimaksud sampai dengan Tahun 2022. Atas daftar barang jaminan aset kredit Eks BPPN (selain PKPS) dan eks Kelolaan PT. PPA (Persero) yang masih dikelola dan belum diadministrasikan oleh DJKN serta masih dalam proses inventarisasi DJKN.

b. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) diatur formula penyisihan sebagai berikut:

- Penyisihan piutang tidak tertagih dari piutang eks BPPN selain tagihan PKPS dan piutang eks kelolaan PT PPA (Persero) dihitung dengan cara saldo akhir piutang dikurangi hasil perkalian dari saldo akhir piutang dikalikan tingkat pengembalian (recovery rate) piutang eks BPPN selain tagihan PKPS dan piutang eks kelolaan PT PPA;
- Penyisihan piutang tidak tertagih yang berasal dari tagihan PKPS ditetapkan sebesar 100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan. Ketentuan mengenai penilaian agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih, dilaksanakan secara penuh paling lambat untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2016.

Hingga saat laporan keuangan ini disusun, penilaian agunan PKPS sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih belum dilakukan secara menyeluruh, pada tahun 2015 penilaian baru dilakukan terhadap sebagian barang jaminan PKPS Obligor atas nama Kaharudin Ongko, Samadikun Hartono dan Trijono Gondokusumo. Sampai tahun 2020 belum dilakukan penilaian pada barang jaminan PKPS yang belum dinilai sebelumnya.

Penyisihan piutang tidak tertagih atas Piutang pada BDL ditetapkan sebesar 100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan (bukan tagihan BBO/BBKU/BPPN) kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN, dengan demikian, maka tagihan tersebut termasuk dalam piutang Pemerintah yang bersifat lancar sehingga penyisihan atas piutang tersebut merupakan ruang lingkup dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014. Besaran penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang lancar ditetapkan sebesar 5 000(lima permil) dari piutang.

c. ASET PROPERTI EKS BDL

1. Penerimaan Pembiayaan Non Tunai dari Penetapan Status Penggunaan Aset Properti
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset properti adalah penetapan aset properti menjadi Barang Milik Negara. Aset Properti yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara terlebih dahulu dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai wajar aset properti.

Dalam Pasal 68 telah diatur bahwa hasil pengelolaan aset berupa uang tunai atau non tunai diperhitungkan sebagai pengurang piutang Pemerintah Republik Indonesia pada Bank Dalam Likuidasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/KM.6/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Pengelola Barang, Aset Properti dari Eks Bank Dalam Likuidasi berupa 7 (tujuh) bidang tanah yang berada di Jalan H. Jaya I RT 02/RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/KM.6/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Badan Narkotika Nasional, Aset Properti dari Eks Bank Dalam Likuidasi berupa tanah dan bangunan di Jl. Raya Baros No.33 RT.04/RW.01, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Penetapan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rp45.694.058.000 (empat puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima puluh delapan ribu rupiah) dan pada Badan narkotika Nasional dengan nilai sebesar Rp35.143.950.000 (tiga puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh rupiah) belum diakui sebagai pengurang kewajiban PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dikarenakan belum ada BAST dimana terdapat peralihan pencatatan yang sebelumnya hanya sebagai underlying atas Piutang BDL menjadi aset tetap pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (UAKPA BUN TK BLBI).

2. Penerimaan dari Pemanfaatan Aset Properti Dalam Bentuk Sewa

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset properti adalah pemanfaatan aset properti dengan cara sewa. Dalam Pasal 65 telah diatur bahwa hasil pengelolaan aset berupa uang tunai berasal dari sewa aset properti, dikenakan biaya pengelolaan aset pada MAP 425149 (Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Satuan Kerja Kantor Pusat DJKN, Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015).

Rincian sewa aset properti eks Bank Dalam Likuidasi selama tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut:

No	Keputusan Sewa	BDL	MAP 711313	MAP 425149
1	Kepdirjen 193/KN/2021	Bank Dagang Bali	11.278.800	1.300.000
2	Kepdirjen 505/KN/2021	Bank Sejahtera Umum	7.200.000	800.000
Jumlah			18.478.800	2.100.000

d. ASET KREDIT EKS BANK DALAM LIKUIDASI

1. Penerimaan dari Pengelolaan Aset Kredit yang Telah Diserahkan kepada PUPN

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset kredit meliputi penatausahaan dan penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pelaporan pengelolaan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan rekonsiliasi aset kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester antara Direktorat PKNSI selaku Penyerah Piutang dengan PUPN (dhi. KPKNL).

Berdasarkan data yang berasal dari Modul MPN G3 NOW selama Tahun 2022, telah tercatat setoran per MAP 711313 sebesar Rp23.558.898.012. Direktorat PKNSI selaku unit pengelola aset eks BDL telah melakukan analisa dan pengakuan terhadap penerimaan pada MAP 711313 tersebut dan berdasarkan hasil rekonsiliasi Semester I dan Tahunan dengan KPKNL selaku Anggota PUPN Cabang.

Rincian hasil pengelolaan aset dari pembayaran/pelunasan aset kredit per KPKNL selama tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut:

No.	KPKNL (Anggota PUPN Cabang)	MAP 711313	MAP 817713
1	MANADO	114.905.149	
2	DENPASAR	2.149.380.786	80.267.329
3	LHOKSUMAWE	1.080.650	
4	MEDAN	50.189.422	
5	PEMATANGSIANTAR	14.454.859	
6	MAKASAR	934.110.000	35.890.000
7	PURWAKARTA		29.110.210
8	SURABAYA	37.445.004	1.398.360

No.	KPKNL (Anggota PUPN Cabang)	MAP 711313	MAP 817713
9	PONTIANAK	13.636.365	
10	TANGERANG II	436.804.123	15.684.666
11	SIDOARJO	17.016.485	185.950
12	BANDA ACEH	1.181.819	
13	JAKARTA V	729.816.999	
14	SEMARANG	26.908.000	
15	PALEMBANG	1.800.000	
16	SERANG	7.045.449	
17	BEKASI	32.681.818	
18	JAKARTA IV	18.886.915.655	36.297.372
Jumlah		23.455.372.583	198.833.887

Sebagai catatan pada hasil pengelolaan aset dari aset kredit adalah terdapat selisih lebih pada MAP 711313 dari KPKNL Jakarta IV sebesar Rp83.479.066 dengan uraian pada Bukti Penerimaan Negara "Pembayaran an Hutoro Chandra 201703001871 KW6 01 Maret" dikarenakan double setor oleh KPKNL Jakarta IV untuk pelunasan hutang debitur atas nama Hutoro Chandra. Terkait selisih lebih masih dikonfirmasi kepada KPKNL Jakarta IV akan ditindaklanjuti dengan perhitungan hasil pengelolaan aset periode berikutnya

e. ASET SURAT BERHARGA EKS BANK DALAM LIKUIDASI

1. Penerimaan Pembiayaan dari Dividen Tunai Saham

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset surat berharga adalah permintaan pembayaran atas dividen saham atau bunga obligasi. Direktorat PKNSI selaku pengelola barang atas aset eks Bank Dalam Likuidasi meminta pembayaran atas dividen saham dan/atau bunga obligasi setiap jatuh tempo.

Sesuai surat dari Yayasan Perbanas Nomor 04/Skr/YP/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang menginformasikan bahwa Yayasan Perbanas sebagai representasi pemegang saham kolektif kelompok Yayasan Perbanas telah menerima dividen tunai saham PT Aplikasi Lintasarta tahun 2019 tahap II. Melalui surat tersebut dividen tunai diteruskan kepada Kementerian Keuangan untuk Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 711313 Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL sebesar Rp122.127.130 melalui Treasury Billing System (TBS) pada tanggal 22 Juni 2022.

Rincian dividen tunai yang diterima Yayasan Perbanas tahun 2021 per masing-masing nama pemegang saham, disajikan dalam table berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Dividen Tunai
1	Bank Harapan Santosa	10.349.740
2	Bank Pinaesaan	20.699.507
3	Sejahtera Bank Umum	80.728.143
4	Bank Industri	10.349.740
Jumlah		122.127.130

f. DANA FIHAK KETIGA

1. Penjelasan Umum Nasabah Penyimpan Dana

MAP Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi) merupakan pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3, yang selanjutnya akan disetorkan oleh Pemerintah ke rekening Nomor:

- a. 0019955279 atas nama Otoritas Jasa Keuangan qq. Nasabah eks Bank Dalam Likuidasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk : untuk PT Bank Asiatic (Dalam Likuidasi);
- b. 070-0004080201 atas nama Otoritas Jasa Keuangan qq. Nasabah eks Bank Dalam Likuidasi pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk : untuk PT Bank Global Internasional, Tbk (DL) dan PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi).

Penyetoran hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3 dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan penyetoran sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor MoU-07/MK.06/2015 – PRJ-39/D.01/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Percepatan Penyelesaian Kewajiban Bank Dalam Likuidasi eks Program Penjaminan kepada Pemerintah.

2. Proporsi Hasil Pengelolaan Aset setelah Diperhitungkan dengan Pembayaran kepada Nasabah Penyimpan Dana yang merupakan Hak Pemerintah

- a. PT Bank Global Internasional, Tbk (DL):
 - 1) hak Pemerintah sebesar 96,3% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).
 - 2) hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,7% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita "hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Global Internasional Tbk., (DL)".
- b. PT Bank Asiatic (DL)
 - 1) hak Pemerintah sebesar 99,93% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).
 - 2) hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 0,07% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita "hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Global Internasional Tbk., (DL)".
- c. PT Bank Dagang Bali (DL)
 - 1) hak Pemerintah sebesar 96,40% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).

- 2) hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,60% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita "hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Dagang Bali (DL)".
3. Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi

Rincian penerimaan Nasabah Penyimpan Dana atas hasil pengelolaan aset disajikan dalam tabel berikut:

a. Tahun 2017

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	1.874.999
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	16.650.000
BANK DAGANG BALI	0
JUMLAH	18.524.999

b. Tahun 2018

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	480.235
BANK DAGANG BALI	149.327.009
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	20.350.000
JUMLAH	170.157.244

c. Tahun 2019

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	89.678
BANK DAGANG BALI	100.518.124
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	28.318.966
BANK GLOBAL INTERNASIONAL (Non Tunai)	122.089.640
JUMLAH	251.016.408

d. Tahun 2020

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	15.273
BANK DAGANG BALI	78.401.540

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	35.150.000
JUMLAH	113.566.813

e. Tahun 2021

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK DAGANG BALI	85.325.255
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	1.320.120.232
BANK GLOBAL INTERNASIONAL (Non Tunai)	61.420
JUMLAH	1.405.506.907

f. Tahun 2022

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK DAGANG BALI	29.168.645
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	82.439.750
BANK GLOBAL INTERNASIONAL (Non Tunai)	33.498.844
JUMLAH	145.107.239

4. Pembayaran Nasabah Penipman Dana

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur mekanisme pembayaran Nasabah Penyimpan Dana (NPD). Pembayaran NPD dilakukan ke rekening pada bank yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan realisasi dana pembayaran NPD pada kas negara pada tahun berjalan.

Dalam Pasal 77 telah diatur bahwa Direktur Jenderal menetapkan keputusan mengenai besaran pembayaran NPD untuk masing-masing BDL berdasarkan realisasi dana pembayaran NPD pada kas negara tahun berjalan. Selanjutnya, berdasarkan data realisasi dana NPD dan keputusan Direktur Jenderal mengenai besaran pembayaran NPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Direktur PKNSI selaku KPA Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (UAKPA BUN TK BLBI) menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran (SKP).

a. Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2017 s.d. 2019

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 195/KN/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatik (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL)

Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2020 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2020 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2020 sebesar Rp317.609.011. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2020 tanggal Juli 2020 sebesar Rp2.444.912 untuk pembayaran NPD PT Bank Asiatic (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2020 tanggal Juli 2020 sebesar Rp249.845.133 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00003A/978706/2021 tanggal Juli 2020 sebesar Rp65.318.966 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2020.

b. Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2020

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 153/KN/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatic (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2020, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2021 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2021 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2021 sebesar Rp113.566.813. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2021 tanggal 1 April 2021 sebesar Rp15.273 untuk pembayaran NPD PT Bank Asiatic (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2021 tanggal 1 April 2021 sebesar Rp78.401.540 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00003A/978706/2021 tanggal 1 April 2021 sebesar Rp35.150.000 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2020.

c. Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2021

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 127/KN/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatic (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2021, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2021 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2022 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2021 sebesar Rp1.405.445.487. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp85.325.255 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2021. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp1.320.120.232 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2021.

2. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LAINNYA

a. ASET PROPERTI EKS BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan hutang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran hutang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan hutang yang berupa fixed asset dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran hutang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, Direktorat PKNSI telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 September 2013. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPK, maka sisa aset properti eks BPPN yang masih harus ditelusuri per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.152.309.824
Hasil Penelusuran TA 2013:		
Terjual di BPPN dan PPA	7	36.496.849.932
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	16	13.376.203.837
Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	145	482.990.603.126,92
Aset jaminan BDL dan PKPS	26	35.552.445.176,15
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	23	101.446.523.368,23
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	627	400.289.684.383,89

Untuk menindaklanjuti sisa selisih penelusuran data aset properti eks BPPN dalam LHP BPK per 31 Desember 2013, pada tahun 2014, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI telah melakukan upaya sebagai berikut:

- a) Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 31 Desember 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).
- b) Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 31 Desember 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.
- c) Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014 terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.
- d) Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

Data dan dokumen yang diperoleh dari upaya-upaya tersebut di atas, telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJKN kepada BPK RI melalui surat Nomor S-1503/KN/2014 tanggal 3 Oktober 2014. Dari hasil verifikasi BPK terhadap data dan dokumen-dokumen tersebut diperoleh keyakinan sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	626	400.289.684.383,89
Hasil Penelusuran TA 2014:		
Terjual di BPPN dan PPA	122	50.135.490.148
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	8	59.069.114.858
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	20	5.090.723.763
Aset jaminan BDL dan PKPS	84	94.040.671.431
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	35	69.934.452.664
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	358	122.069.231.521

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKBUN tahun 2014 disebutkan bahwa sisa aset properti yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak 358 unit senilai Rp122.019.231.521. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan selama bulan Januari s.d. Desember 2015 telah berhasil ditemukan dokumen pendukung atas 156 unit aset senilai Rp59.022.012.099.

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	358	122.069.231.521
Hasil Penelusuran TA 2015:		
Terjual di BPPN dan PPA	20	6.266.711.167
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita	1	133.203.182
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
Aset jaminan BDL dan PKPS	-	-
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	64	30.341.227.055
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.328.090.117

Berdasarkan hasil penelusuran aset eks BPPN tersebut selama periode 2016-2019, telah ditemukan 24 aset dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.328.090.117
Hasil Penelusuran TA 2016-2019:		
Terjual di BPPN dan PPA	3	912,345,839
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA		
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita		
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)		
Aset jaminan BDL dan PKPS	1	0
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	20	10,800,137,076
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2020)	248	73,615,607,202

Dengan demikian, sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 248 aset senilai Rp73.615.607.202.

b. Aset Nostro

Dalam rangka penelusuran Aset Nostro, Direktorat PKNSI telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain berupa:

1) Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Bank Indonesia

DJKN melalui surat Nomor S-1376/KN.5/2014 s.d. S-1381/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 Bank Dalam Negeri dimaksud, terkait keberadaan rekening nostro eks. BBO/BBKU di bank-bank tersebut. PT

Bank Mutiara mengkonfirmasi rekening tersebut serta telah menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tanggal 18 September 2014 dan PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta tambahan data mengenai rekening tersebut. Sedangkan tiga bank lainnya (Citibank, BRI, dan BPR Tri Sejahtera Makmur) tidak memberikan tanggapan.

Menanggapi surat Direktorat PKNSI, DJKN nomor S-2369/KN.5/2014 tanggal 30 September 2014, Bank Indonesia melalui surat nomor 16/156/DPTP tanggal 26 November 2014, menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan koreksi fasilitas diskonto dan koreksi overdraft (bukan aset nostro eks. BBO/BBKU) namun demikian BI masih melakukan penelitian dan penelusuran. Untuk rekening senilai Rp406.733.525.331,33 BI belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. Sedangkan untuk rekening Bank Indover, tidak terdapat nama bank eks. BBO/BBKU yang mengklaim dana ke Bank Indover, namun demikian sebagai informasi terdapat tagihan Pemerintah kepada Trustee Indover Bank senilai EUR 338.538,20 yang berstatus dispute.

Selanjutnya, melalui surat undangan nomor UND-57/KN.5/2017 tanggal 25 Februari, DJKN mengundang Bank Indonesia untuk melakukan rapat pembahasan dana nostro di Bank Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014. Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam sistem penatausahaan rekening Bank Indonesia, saat ini tidak tercatat rekening atas nama eks. Bank BDNI. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia meminta informasi yang lebih rinci atas rekening dimaksud berupa nomor rekening, nama rekening, nominal dan periode penyimpanan, untuk melakukan pengecekan apakah pernah ada rekening atas nama Bank BDNI di Bank Indonesia dan apabila ada bagaimana proses penutupan rekening tersebut. Sesuai penjelasan Bank Indonesia, penutupan rekening dilakukan setelah rekening tersebut bersaldo nol.
 - b) Berdasarkan Dokumen Daftar Klaim dari Trustee Indover Bank per tanggal 20 Oktober 2009 yang disampaikan Bank Indonesia, diketahui bahwa terdapat tagihan Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan kepada Trustee Indover Bank yang berasal dari dana eks. BBO/BBKU dengan nilai sebesar EUR 338.538,20 yang berstatus dispute, dengan Person in Charge (PIC) Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu, namun berdasarkan Dokumen Daftar Klaim per tanggal 10 September 2010, tagihan Kementerian Keuangan tersebut telah bersaldo nol.
 - c) Bank Indonesia saat ini menatausahakan rekening eks. Bank Ficorinvest dan Bank Tata dengan nilai sebesar Rp10.028.227.629,98, namun dikarenakan kedua rekening tersebut dibuka oleh internal Bank Indonesia terkait fasilitas diskonto dan koreksi overdraft maka Bank Indonesia masih memerlukan waktu untuk melakukan penelitian dan penelusuran atas dana di kedua rekening tersebut.
- 2) Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Bank Ganesha
- Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks BDR di Bank Ganesha sebesar Rp5.841.796.415, namun PT Bank Ganesha juga menyatakan memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083.

Melalui surat Nomor S-2586/KN.5/2014 tanggal 15 Oktober 2014, DJKN telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan dana eks BPPN yang tersimpan di PT Bank Ganesha ke rekening KUN. Melalui surat Nomor 277/Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Bank Ganesha menyampaikan bahwa terdapat kewajiban PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415, namun PT Bank Ganesha juga memiliki tagihan kontinjensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083 sehingga secara set off eks BDR masih mempunyai kewajiban membayar kepada PT Bank Ganesha sebesar Rp45.605.763.668.

Melalui surat Nomor S-35/KN.5/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan dan S-1157/KN.5/2015 tanggal 15 April 2015, DJKN telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan kewajibannya kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415 ke Kas Negara karena dana tersebut tidak dapat dilakukan set off sedangkan tagihan PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp51.447.560.083 penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme APBN dan harus didukung dengan dokumen yang lengkap.

Melalui surat nomor S-200/KN.5/2015 tanggal 16 Februari 2016, DJKN telah mengundang PT Bank Ganesha untuk melakukan pembahasan, namun PT Bank Ganesha tidak hadir. Atas ketidakhadiran tersebut, melalui surat No.088/DIR/II/16 tanggal 23 Februari 2016, PT Bank Ganesha menyampaikan permintaan waktu untuk memastikan dan melengkapi data.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.05/2005, program penjaminan yang dilaksanakan oleh BPPN dengan memberikan jaminan terhadap pembayaran Bank Umum telah berakhir sejak tanggal 22 September 2005, dengan demikian maka tagihan Bank Ganesha kepada Bank BDR sudah tidak dijamin pemerintah sehingga sehingga set off dengan dana Bank BDR tidak dapat dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui surat nomor S-2369/KN.5/2016 tanggal 23 Desember 2016, DJKN telah meminta kembali Bank Ganesha untuk menyetorkan dana Bank BDR ke Kas Negara, namun sampai dengan tanggal penyajian Laporan Keuangan ini, Bank Ganesha belum menyetorkan dana eks. BDR tersebut ke Kas Negara.

Melalui surat nomor S-772/KN.5/2019 tanggal 5 September 2019 dan S-624/KN.5/2020 tanggal 21 Juni 2020, DJKN kembali meminta Bank Ganesha untuk menyetorkan dana BDR ke Kas Negara dan menyampaikan bahwa tagihan kontinjensi Bank Ganesha tidak dapat dibayarkan. Sebagai tanggapan atas surat nomor S-624/KN.5/2020 tanggal 21 Juni 2020, telah dilakukan koordinasi dengan Bank Ganesha dan disepakati pencairan dana eks BDR sebesar Rp5.841.796.415 akan dilakukan secara bertahap selama 10 kali pembayaran dengan jangka waktu pembayaran selama 10 tahun.

Pada tanggal 8 Oktober 2020 ditandatangani perjanjian dengan Bank Ganesha untuk kesepakatan pembayaran dana BDR yang dilakukan bertahap selama 10 kali, dimulai sejak tahun 2020 dan berakhir tahun 2029 dengan jumlah pembayaran angsuran masing-masing sebesar Rp584.179.641,50 yang jatuh tempo setiap tanggal 1 Desember. Adapun jatuh tempo untuk pembayaran I adalah pada tanggal 1 Desember 2020. Melalui surat nomor S-1196/KN.5/2020 tanggal 19 November 2020, telah disampaikan surat penagihan pembayaran I kepada Bank Ganesha. Atas perjanjian tersebut telah dilakukan pembayaran tahap I pada

tanggal 30 November 2020 sebesar Rp584.179.642 (NTPN EFE9F48VUA3TIN28). Pembayaran tahap II pada tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp584.179.642 (NTPN 4277E2G4UU94Q4BT).
f. Pembayaran tahap III pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp584.179.642 (NTPN 3E86D6QR9C4NU3PM).

- 3) Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Clearstream Banking SA
Rekening eks. Bank BIRA di Clearstream Banking SA senilai USD 258.438,50 telah terkonfirmasi sebagai Aset Nostro eks BPPN. Saat ini rekening tersebut masih dalam tahap pengembalian ke Kas Negara.

Melalui surat nomor S-1125/KN.5/2019 tanggal 29 November 2019, DJKN telah meminta Clearstream Banking SA untuk melakukan transfer dan penutupan rekening Bank BIRA pada Clearstream Banking SA, namun belum mendapat balasan dan tindak lanjut dari Clearstream Banking SA.

DJKN kembali menyurati Clearstream Banking SA melalui surat nomor S-725/KN.5/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang kemudian mendapatkan balasan melalui surat elektronik, sehingga komunikasi dengan Clearstream Banking SA dapat dilakukan dua arah. Pihak Clearstream meminta specimen tanda tangan pihak yang berwenang dalam pencairan dana Bank BIRA dan dilegalisasi oleh notaris publik. Sedang dalam proses pembuatan dokumen dimaksud.

Clearstream Banking SA telah mencairkan dana Bank BIRA dan telah tercatat masuk ke Kas Negara pada tanggal 18 Desember 2020 senilai Rp3.655.871.021 (No. Dok. Penerimaan 9186676352FS) sehingga pengelolaan aset nostro Bank BIRA pada Clearstream Banking SA telah selesai.

c. SURAT BERHARGA EKS BPPN

Pada tanggal 29 s.d. 31 Juli 2013, Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan fisik atas Saham dan Surat Berharga milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disimpan di kustodi Citibank. Hasil pemeriksaan fisik surat berharga di Kustodi Citibank yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK RI adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat kekeliruan pada data surat berharga yang disampaikan oleh pihak DJKN yakni pada kolom jumlah lembar karena berdasarkan cek fisik dan wawancara dengan pihak Citibank kolom tersebut tidak menunjukkan jumlah lembar melainkan nilai total coupon atau nilai principal dari surat berharga yang bersangkutan.
- 2) Terdapat perbedaan dan kesalahan klasifikasi jenis surat berharga yaitu masukan ke dalam Government Bond namun setelah dilakukan cek fisik dan wawancara dengan pihak Citibank surat berharga tersebut masuk kedalam Corporate Bond.
- 3) Sebagian besar surat berharga yang ada tidak mempunyai principal, hanya terdapat Coupon saja, sehingga tidak diketahui secara pasti tanggal jatuh tempo dari obligasi (principal) tersebut serta beberapa Coupon yang ada sudah melewati masa jatuh tempo.
- 4) Surat Berharga milik DGS Finance International sudah dihapuskan dari Market Trading Hongkong karena nilainya sudah nihil dan perusahaannya sudah tidak ada lagi. Penyajian surat berharga eks BPPN telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK RI tersebut di atas yaitu terdapat penyesuaian akun Government Bond yang di reclass ke

Corporate Bond serta pencatatan Corporate Bonds Dgs International Finance Co dengan nilai Rp0 karena telah dihapuskan Market Trading Hongkong.

d. ASET SAHAM EKS BPPN

Pengelolaan aset saham yang disimpan di Kustodi Citibank meliputi pencatatan saham, monitoring melalui Monthly Report, serta mencatat atau mengkoordinasikan pembagian dividen. Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan fisik atas Saham dan Surat Berharga milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disimpan di kustodi Citibank. Pada saat pemeriksaan tersebut berdasarkan informasi dari Citibank, diketahui bahwa sebagian perusahaan yang sahamnya di simpan di di kustodi Citibank telah tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui 14 saham yang disimpan di kustodi Citibank Jakarta berstatus aktif dan saat ini masih diperdagangkan di BEI. Melalui surat Nomor S-1348/KN.5/2014 s.d. S-1353/KN.5/2014 dan Nomor S-1367/KN.5/2014 s.d. S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham tersebut, atas kepemilikan saham eks. BPPN tersebut. Namun hingga akhir periode penyusunan Laporan Keuangan, hanya 9 emiten dari 15 emiten yang disurati, yang menjawab surat Direktorat PKNSI tersebut. Dari 9 emiten yang memberikan tanggapan hanya 2 emiten yang mengkonfirmasi kepemilikan saham eks. BPPN sedangkan emiten lainnya tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham eks. BPPN dan hanya menginformasikan nama Biro Administrasi Efeknya masing-masing. Untuk aset saham eks BPPN yang status emitennya belum diketahui, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI melalui surat Nomor S-1233/KN.5/2014 tanggal 28 Mei 2014 telah meminta informasi kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham atas status emiten tersebut, namun belum mendapat tanggapan.

Terkait saham PT Mulia Industrindo, Tbk berdasarkan hasil penelitian dokumen, 50.000.000 lembar saham PT Mulia Industrindo, Tbk yang tersimpan di Kustodi Citibank bukan merupakan aset eks. BPPN (Bank Bira). Berdasarkan Agency Agreement tanggal 15 Desember 1996, diketahui bahwa 30.000.000 lembar saham tersebut merupakan milik Willow Overseas Investment Limited, dan berdasarkan Placement Agreement tanggal 4 April 1997, diketahui 20.000.000 saham PT Mulia tersebut merupakan milik Crestlawn Ltd, Saham tersebut telah dikembalikan kepada Ery Yunasri & Partners selaku kuasa Willow Overseas Investment Limited dan Crestlawn Ltd.

Berdasarkan surat PT Dadyndo Entricom selaku Biro Administrasi Efek emiten nomor DE/X/2014-7152 tanggal 9 Oktober 2014, diketahui saham PT Reksadana Perdana, Tbk dh. PT BDN Reksadana telah berubah bentuk menjadi unit KIK Reksadana Prima dengan jumlah konversi atas saham 80.000.000 lembar saham milik Kementerian Keuangan adalah menjadi 29.625.788 unit KIK. Saat ini pengkonversian saham milik Kementerian Keuangan menjadi unit KIK Reksadana Prima belum dilakukan.

Pada tahun 2018 dilakukan reklasifikasi aset saham PT Sukarpaja Estetika Padang Golf dari aset saham eks BPPN menjadi aset saham eks kelolaan PT PPA. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan perseroan. Berdasarkan Laporan Keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian

Kuangan c.q. DJKN dh. PT PPA (Persero). Pinjaman Subordinasi tersebut dapat dikonversi menjadi Transferable Membership.

Pada tahun 2020 saham PT Karabha Digdaya telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020.

e. ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA adalah aset properti yang berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara di pengadilan (free and clear) yang semula diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kemudian dikembalikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai berita acara serah terima tanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Sesuai PMK Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui PMK Nomor 230/PMK.06/2022, Pengelolaan Aset Properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dilakukan dengan cara penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, penjualan, pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi kepada Pemerintah, hibah, penetapan status penggunaan, izin menempati sementara, penyertaan modal negara, pemanfaatan, penyerahkelolaan kepada badan layanan umum di bidang pengelolaan aset, pengadaan jasa yang berkaitan dengan Aset Properti dalam hal diperlukan, pemusnahan, penghapusan, bongkaran, dan/atau penilaian.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain aset properti eks kelolaan PT PPA belum disajikan dengan nilai wajar dan agar penyajian aset properti eks kelolaan PT PPA diseragamkan dengan penyajian aset properti eks BPPN dimana aset properti eks BPPN disajikan sesuai jumlah dokumen yang dikuasai Kementerian Keuangan c.q. DJKN (antara lain Sertifikat, Girik, AJB, dsb) sedangkan aset properti eks kelolaan PT PPA disajikan sesuai kode PRK yang berasal sejak awal penyerahan dari PT PPA kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN, oleh karena itu, dilakukan penilaian terhadap sisa aset properti eks kelolaan PT PPA serta penyajian jumlah aset properti eks kelolaan PT PPA disesuaikan dengan penyajian aset properti eks BPPN.

Aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang didukung dengan asli dokumen kepemilikan (sertipikat / covernote) disajikan di Neraca sebesar nilai wajar, sedangkan yang tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote) per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 543 aset dengan nilai sebesar Rp1.702.047.726.443. Aset properti yang belum didukung dengan asli dokumen kepemilikan dan/atau covernote sebagai berikut:

Uraian	Jumlah unit	Nilai (Rp)
BJDA Diragukan (Dokumen berupa AJB, APHT, Copi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	543	1.702.047.726.443

f. ASET SAHAM (NON BANK) EKS KELOLAAN PT PPA

Aset saham PT Bina Prima Perdana yang merupakan perusahaan yang termasuk dalam Grup Texmaco tidak lagi masuk dalam draft perjanjian pengelolaan aset kepada PT PPA, sehingga direklasifikasi dari aset saham yang diserahkan kepada PT PPA menjadi aset saham non bank eks kelolaan PT PPA.

Pada tahun 2016, aset saham PT Asia Natural Resources Tbk, PT Jemblo Cable Company Tbk, PT Sukapraja Estetika Padang Golf tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT Asia Natural Resources Tbk di bursa telah di-suspend oleh BEI.

Pencatatan kepemilikan pemerintah pada PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) dicatat sebagai Investasi Permanen pada BA 999.03. Kepemilikan pemerintah pada PT. TPI pada dasarnya adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pada saatnya, pemerintah akan melepaskan kepemilikannya kepada pihak yang tepat.

Pengelolaan PMN berupa aset saham pada PT. TPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset eks badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana Pasal 4 PP No. 66 Periode Tahun 2020. Pengelolaan aset eks BPPN pada dasarnya dalam rangka recovery atas BLBI yang sudah dikeluarkan.

Pada Tahun 2020 saham PT Sejahtera Eka Graha telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan BA 999.03 Aset Investasi sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020.

g. Pengungkapan Penting Terkait Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero) menjadi PMN pada PT. TPI:

A. Kepemilikan saham Pemerintah pada PT TPI

1. Salah satu aset kredit eks BPPN yang dikelola oleh Menteri Keuangan cq. DJKN adalah piutang kepada TPI dalam bentuk *Multi Years Bond (MYB)* yang diterbitkan oleh TPI, dan Menteri Keuangan sebagai satu-satunya Pemegang Obligasi (*MYB Holder*). TPI merupakan suatu *holding company* yang bergerak di bidang industri petrokimia yang dibentuk pada tahun 2004, sebagai tindak lanjut restrukturisasi yang dilakukan oleh BPPN terhadap utang-utang Grup Silakencana Tirtalestari. Struktur kepemilikan TPI pada saat terbentuk adalah sebesar 70% dimiliki oleh BPPN, dan sebesar 30% dimiliki oleh PT Silakencana Tirtalestari (PT ST). Setelah TPI terbentuk, langkah selanjutnya dari kesepakatan restrukturisasi adalah diterbitkannya *MYB* oleh TPI, dan BPPN adalah sebagai satu-satunya *Bond Holder*.

2. Berdasarkan Keppres Nomor 15 tahun 2004, Menteri Keuangan kemudian menggantikan kedudukan BPPN sebagai pemegang saham di TPI, dan sekaligus juga sebagai *MYB Holder*. Sampai dengan saat ini, DJKN telah melaksanakan pengelolaan aset kredit dimaksud dengan berpedoman kepada ketentuan pengelolaan aset eks BPPN, dengan tujuan utama untuk mewujudkan *recovery* aset kredit yang pada dasarnya merupakan piutang negara.
 3. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan petrokimia Indonesia, diambil suatu tindakan strategis dalam konteks pengelolaan aset kredit eks BPPN, yaitu melakukan konversi utang (*MYB*) menjadi saham Menteri Keuangan di TPI dengan melakukan konversi utang TPI, sejalan dengan isi Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 4. Konversi utang TPI pada dasarnya adalah strategi DJKN dalam pengelolaan aset kredit eks BPPN, sebagaimana Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries, yang berbunyi bahwa pengelolaan penyertaan modal negara berupa aset saham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset eks Badan Khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan.
 5. Mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah (vide. PP71 dan aturan turunannya), maka kepemilikan saham pemerintah pada TPI sebesar Rp2.908.409.694.537 dalam bentuk penyertaan modal negara, dicatatkan menjadi bagian dari investasi pemerintah berupa Investasi Permanen, sehingga DJKN mencatat pada BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. Sedangkan sisa utang TPI sebesar Rp811.643.881.275 tetap dicatatkan pada BA 999.99 Transaksi Khusus.
 6. Penyertaan Modal Negara pada PT TPI pada saatnya nanti akan diserahkan kepada PT PERTAMINA Persero dengan maksud agar PT TPI dapat lebih berkembang.
- B. Mutasi Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero)
1. Rincian perubahan nilai pokok MYB per tahun sampai dengan dikonversi
Perubahan nilai pokok MYB disebabkan adanya pembayaran angsuran oleh TPI (tahun 2005 s.d. 2017) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal (Utang Pokok MYB)	Mutasi (Angsuran Pokok)	Saldo Akhir
2004	3.266.000.000.000	0	3.266.000.000.000
2005	3.266.000.000.000	(11.000.000.000)	3.255.000.000.000
2006	3.255.000.000.000	0	3.255.000.000.000
2007	3.255.000.000.000	(50.000.000.000)	3.205.000.000.000
2008	3.205.000.000.000	0	3.205.000.000.000
2009	3.205.000.000.000	(35.000.000.000)	3.170.000.000.000
2010	3.170.000.000.000	(85.000.000.000)	3.085.000.000.000
2011	3.085.000.000.000	(130.000.000.000)	2.955.000.000.000
2012	2.955.000.000.000	(126.765.000.000)	2.828.235.000.000
2013	2.828.235.000.000	(50.215.738.593,06)	2.778.019.261.406,94
2014	2.778.019.261.406,94	(90.526.680.949)	2.687.492.580.457,94
2015	2.687.492.580.457,94	(32.610.184.030)	2.654.882.396.427,94
2016	2.654.882.396.427,94	(36.640.901.891)	2.618.241.494.536,94
2017	2.618.241.494.536,94	0	2.618.241.494.536,94

2. Dasar penilaian aset yang diserahkan untuk dikelola PT PPA sebesar Rp873.811.488.440
- Berdasarkan Perjanjian Serah Kelola dari Kemenkeu kepada PT PPA (Persero), Nilai Aset merupakan nilai atas Aset yang diserahkan yang ditetapkan oleh Menkeu pada tanggal serahkelola berdasarkan hasil penilaian yang masih berlaku.
 - Nilai Aset tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.06/2008, dengan rincian sebagai berikut:

No	Aset Kredit	Nominal	Nilai Aset
1	Multi Years Bond (MYB)	3.266.000.000.000	1.024.000.000.000
2	Mandatory Convertible Bond (MCB)	4.167.000	497.813.000.000
Total Nilai Aset (Saldo Akhir 2008)			1.521.813.000.000

- Adapun mutasi Nilai Aset selama diserahkan kepada PT PPA (Persero) tahun 2009 s.d. 2017 adalah sebagai berikut:

	Nilai Aset	Keterangan
Saldo Awal (2009)	1.460.570.023.903	Selisih sebesar Rp61,2M (1.521.813.000.000-1.460.570.023.902,64), karena pengaruh penurunan Nilai Aset. Awalnya Nilai Aset MYB dihitung dengan nilai pokok 3.266.000.000.000, namun dinilai ulang menjadi 3.205.000.000.000 karena adanya pembayaran tahun 2005 dan 2007.
Mutasi (2009 s.d. 2017)	(586.758.535.463)	Angsuran pokok selama tahun 2009 s.d. 2017
Saldo Akhir (2017)	873.811.488.440	

- d. Nilai Saldo akhir digunakan sebagai nilai pada saat diserahkan kepada PT PPA, sebagai dasar dalam penghitungan Imbalan Pengelolaan Aset/Imbalan Kinerja kepada PT PPA.
- e. Ketika pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA kepada Kemenkeu, maka saldo Aset Kredit menggunakan jumlah utang *as is* TPI dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok. Dengan demikian, hubungan antara Nilai Aset yang dikelola oleh PT PPA sebesar Rp873.811.488.440,40 dengan utang pokok MYB TPI sebesar Rp3.266.000.000.000 yang dikelola oleh DJKN sebagai berikut:

Keterangan	Utang Pokok (DJKN)
Saldo Awal	3.266.000.000.000
Saldo 2009	3.205.000.000.000
Mutasi (2009 s.d. 2017)	(586.758.505.463,06)
Saldo Akhir (2017)	2.618.241.494.536,94

3. Mutasi saldo dari Rp873.811.488.440,40 menjadi Rp811.643.881.275 dan Perhitungan bunga dan penalti MYB TPI sebesar Rp811.643.881.275
 - a. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, saldo sebesar Rp873.811.488.440,40 merupakan saldo akhir Nilai Aset yang dikelola oleh PT PPA per 31 Desember 2017, yang kemudian dengan pengembalian pengelolaan aset kepada Kemenkeu, maka saldo Aset Kredit menggunakan jumlah utang *as is* TPI dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok.
 - b. Sementara saldo sebesar Rp811.643.881.275 merupakan saldo utang bunga dan penalti (*unconverted portion MYB*) per 31 Desember 2020, dengan keterangan:

Tanggal	Transaksi	Angsuran	Saldo
30/12/2018	Saldo Bunga+Penalti		733.924.166.667
31/03/2019	Saldo Bunga+Penalti		767.787.633.619
30/09/2019	Saldo Bunga+Penalti		836.643.881.275
20/11/2019	Angsuran	(5.000.000.000)	831.643.881.275
19/12/2019	Angsuran	(20.000.000.000)	811.643.881.275

Cat: Pembayaran bunga dan penalti dilakukan 2 kali dalam setahun (setiap tanggal 27 Februari dan 27 Agustus). Dalam periode 30 Desember 2018 s.d. 30 September 2019, TPI tidak melakukan pembayaran angsuran. Atas keterlambatan tersebut, TPI dikenakan penalti yang berakibat meningkatnya saldo utang dari Rp733.924.166.677 menjadi Rp836.643.881.275

- C. Penjelasan atas koreksi dan penyerahan aset kredit eks kelolaan PT PPA (Persero) atas nama Grup Texmaco
 Aset kredit Grup Texmaco telah diserahkan ke PUPN DKI Jakarta melalui KPKNL Jakarta III dengan Surat Nomor S-840/KN/KN.5/2021 tanggal 22 Oktober 2021 hal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Grup Texmaco; dengan jumlah hak tagih sebesar Rp.31.722.860.855.522 dan USD.3.912.137.146,21. Atas penyerahan tersebut, KPKNL melakukan penelitian, dan meminta konfirmasi atas selisih outstanding sebesar USD 1,21. Setelah dilakukan penelitian kembali, PKNSI menyampaikan konfirmasi atas besaran outstanding, dengan surat nomor S-2327/KN.5/2021 tgl. 18 November 2021, yg mengkonfirmasi outstanding utang sebesar Rp.31.722.860.855.522 dan USD.3.912.137.145. Setelah mendapatkan konfirmasi, PUPN kemudian menerbitkan Surat

Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. Grup Texmaco, dengan outstanding utang sebesar Rp.31.722.860.855.522 dan USD.3.912.137.145.

Terkait pengakuan dan pengukuran Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero), khususnya terkait aset kredit Group Texmaco pada LKBUN TK BLBI Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam PMK No. 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 127/PMK.05/2018, diatur bahwa Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) diakui pada saat berakhirnya perjanjian serahkelola antara PT PPA (Persero) dengan Menteri Keuangan sebagaimana Berita Acara Pengembalian Aset dari PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan Tahun 2009, diatur pula bahwa aset kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) diukur sebesar nilai yg belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Outstanding Utang Grup Texmaco sebagaimana diserahkan piutangnya kepada PUPN didasarkan pada Surat Direktur PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) nomor S-590/PPA/ID/0415 tanggal 24 Juni 2015. Hal tersebut sebagaimana permintaan konfirmasi dari Direktorat PKNSI kepada PT PPA (Persero) melalui surat Nomor: S-1379/KN.5/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan surat nomor S-1309/KN.5/2021 tanggal 10 Juni 2021.

3. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET BERPERKARA

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset eks BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan eks Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pembersihan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, aset eks BPPN yang terkait perkara hukum di lembaga peradilan penanganannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Bantuan Hukum.

4. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT INVENTARISASI KELENGKAPAN DATA, DOKUMEN KEPEMILIKAN DAN PERALIHAN, SERTA PENGUASAAN FISIK ATAS ASET EKS BLBI

Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan terhadap aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero). Pemetaan atas aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) masih berdasarkan data rekapitulasi aset properti yang disandingkan dengan arsip dokumen penguasaan dan pengalihan yang dimiliki Kementerian Keuangan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2009 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut:

a. Pemetaan Aset Properti eks BPPN

- 1) Terdapat 188 unit aset senilai Rp975.847.375.874 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
- 2) Terdapat 1.070 unit aset senilai Rp1.588.417.106.561,70 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.

- 3) Terdapat 222 unit aset senilai Rp772.705.684.688,20 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.
- 4) Terdapat 708 unit aset yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.
- b. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero)
 - 1) Terdapat 1.171 unit aset senilai Rp4.043.772.167.044 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.
 - 2) Terdapat 279 unit aset senilai Rp963.954.085.344 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.
 - 3) Terdapat 28 unit aset senilai Rp174.129.254.000 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.
 - 4) Terdapat 543 unit aset senilai Rp1.702.047.726.443 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut atas data dan dokumentasi yang ada diketahui bahwa:

- a. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 474 aset.
- b. Aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 533 aset.
- c. Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 803 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemasangan papan nama pengamanan pada aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) sebanyak 510 unit.

Saat ini, Kementerian Keuangan sedang melakukan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen kepemilikan atau peralihan dan penguasaan aset Properti, sebagai dasar penyajian aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) tersebut pada Laporan Keuangan selanjutnya. Terhambatnya penyelesaian inventarisasi terjadi karena adanya himbauan Work From Home (WFH) serta adanya PSBB DKI Jakarta selama beberapa waktu yang meniadakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi. Selain itu, terdapat beberapa pegawai yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 (adanya cluster Gudang Kustodi DJKN), sehingga perlu dilakukan penutupan dan sterilisasi kustodi selama beberapa minggu.

Kegiatan inventarisasi yang dilakukan tahun 2020 dan masih berlangsung sampai dengan tahun 2022, belum sepenuhnya selesai dan belum dilakukan revidi oleh APIP, sehingga aset properti yang disajikan pada Neraca belum berdasarkan hasil inventarisasi dokumen. Hasil inventarisasi aset properti akan digunakan setelah kegiatan inventarisasi selesai dan dilakukan revidi oleh APIP, serta akan disajikan pada Neraca Semester II Tahun 2023.

5. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT PEMANFAATAN ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO)

Aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa. Sampai dengan Tahun 2022, jumlah persetujuan sewa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa adalah sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) persetujuan, dengan total PNBP sebesar Rp36.625.387.551.

Rincian atas pemanfaatan aset dimaksud disajikan dalam Lampiran LDCPL1.

6. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT PENGGUNAAN ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA

Terhadap sebagian aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan penetapan status penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2022, telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 302 aset, dengan total nilai sebesar Rp2.767.920.835.055.

7. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT SERAH KELOLA ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) KEPADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Serah kelola aset properti kepada LMAN dilakukan dalam beberapa tahap:

a. Tanggal 17 Juni 2016

Serah kelola 23 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp26.734.113.000. Dari 23 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 1 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan (digunakan sebagai rumah negara DJKN).

b. Tanggal 18 Januari 2017

Serah kelola 106 unit aset properti eks PT PPA (Persero) berupa apartemen Puri Casablanca senilai Rp39.248.043.000.

c. Tanggal 22 September 2017

Serah kelola 4 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp53.295.000.000. Dari 4 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 2 unit untuk kemudian dilakukan Penetapan Status Penggunaan kepada Kementerian Agama (digunakan sebagai kantor BAZNAS).

d. Tanggal 27 Desember 2018

Serah kelola 12 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp12.752.216.000.

e. Tanggal 18 Desember 2019

Serah kelola 87 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp64.722.339.651.

f. Tanggal 27 Desember 2020

Serah kelola 61 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp53.833.690.650.

g. Tanggal 24 September 2021

Serah kelola 8 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp18.874.080.000

h. Tanggal 11 Januari 2022 dan 9 November 2022

Serah kelola 9 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp177.058.608.606.

8. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET EKS BDL

Atas Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) pada 20 (dua puluh) BDL baik eks Dana Talangan maupun eks Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3) sebesar Rp9.940.465.757.727,45, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan menguasai dokumen dan fisik atas aset eks BDL berupa aset kredit, aset

inventaris, surat berharga dan aset properti eks BDL dengan total Rp12.741.392.403.667,56. Berdasarkan PMK Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan c.q. DJKN mengelola aset Eks BDL tersebut dengan melakukan penjualan aset, pelunasan kredit, sewa, menjadikan sebagai BMN, kemudian hasil pengelolaan menjadi pengurang nilai Piutang BDL.

Aset adalah harta atau kekayaan eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Nilai sisa aset eks BDL yang dikelola Pemerintah per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.741.392.403.667,56. Aset eks BDL terdiri dari aset kredit, aset inventaris, Aset surat berharga, dan aset properti eks BDL.

Rincian aset eks BDL per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022
1	Aset Kredit	10.981.894.481.979
2	Aset Inventaris	1.342.300
3	Aset Surat Berharga	1.524.031.350
4	Aset Properti eks BDL	1.757.972.548.038,56
	Jumlah	12.741.392.403.667,56

Rincian lebih lanjut atas Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Aset Eks BDL dicatat pada Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Aset yang Timbul dari Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), sebagai berikut:

a. ASET KREDIT EKS BDL

Aset kredit adalah hak Pemerintah yang berasal dari tagihan BDL terhadap debiturnya. Pengelolaan atas aset kredit meliputi penatausahaan dan penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Untuk pelaporan pengelolaan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan rekonsiliasi aset kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester antara Direktorat dengan PUPN/Kantor Pelayanan. Sisa aset kredit eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.981.894.481.979.

Adapun rincian Aset Kredit untuk masing-masing per BDL, sebagai berikut:

Bank Dalam Likuidasi	Debitur	Mata Uang	Nilai Penyerahan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
BDL eks Dana Talangan				
PT. Bank Anrico	230	IDR	139.152.320.971	86.100.756.579
PT. Bank Guna Internasional	1163	IDR	56.173.480.710	25.732.761.066
PT. Bank Harapan Sentosa	2514	IDR	2.547.641.678.104	2.503.531.067.209
PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	59	IDR	162.864.160.886	160.394.425.086
PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	121	IDR	103.570.287.580	80.406.192.353
PT. Bank Mataram Dhanarta	41	IDR	272.592.033.555	265.911.823.535
PT. Bank Pasific	125	IDR	880.188.948.627	694.533.611.928
	27	USD	124.298.607	114.190.117
	1	HKD	294.260	294.260
	1	JPY	3.955.200	0

Bank Dalam Likuidasi	Debitur	Mata Uang	Nilai Penyerahan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
PT. Sejahtera Bank Umum	2088	IDR	758.710.127.098	533.144.868.856
	37	USD	94.436.883	93.842.532
	1	GBP	53.213	53.213
	4	SGD	865.717	724.928
	3	EUR	4.324.797	4.324.797
	3	JPY	82.457.575	29.302.198
PT. South East Asia Bank	259	IDR	675.646.127.344	630.007.787.337
PT. Bank Dwipa Semesta	39	IDR	76.815.133.911	75.698.536.071
PT. Astria Raya Bank	96	IDR	209.559.496.757	429.062.238.642
PT. Bank Pinaesaan	1600	IDR	340.449.673.624	325.068.367.378,58
PT. Bank Jakarta	-	-	0	0
PT. Bank Industri	240	IDR	155.425.392.631	147.955.762.478,22
PT. Bank Umum Majapahit Jaya	-	-	0	0
BDL eks Dana Penjaminan				
PT Bank Asiatic	69	IDR	847.964.963.398	844.337.452.604
PT Bank Dagang Bali	3270	IDR	81.725.533.259	68.919.188.764,51
	1	USD	122.074	122.074
PT Bank Global Internasional	24	IDR	772.426.242.048	763.616.712.417,37
PT Bank Ratu	-	-	0	0
PT Bank Prasadha Utama	3	IDR	31.837.451.315	31.435.571.234

Adapun rincian Aset Kredit eks BDL sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN	8.414.181.883.416
2	Aset kredit yang ditatausahakan oleh DJKN	2.567.712.598.562
	Jumlah	10.981.894.481.979

Rincian untuk masing-masing Aset Kredit eks BDL diuraikan rinci dalam lampiran LDCPL2

b. **ASET INVENTARIS EKS BDL**

Aset inventaris adalah aset yang berupa barang selain tanah dan/atau bangunan, termasuk kendaraan bermotor, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas aset inventaris meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, lelang, penetapan sebagai Barang Milik

Negara (BMN), dan pemusnahan. Sisa aset inventaris eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2022 adalah sejumlah 54 unit dengan nilai sebesar Rp1.342.300.

Adapun rincian Aset Inventaris eks BDL sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022
1	Kendaraan Bermotor	0
2	Peralatan dan Mesin	1.342.300
	Jumlah	1.342.300

c. ASET SURAT BERHARGA EKS BDL

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas surat berharga meliputi penatausahaan, permintaan konfirmasi kepemilikan, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), permintaan pembayaran atas dividen saham atau bunga, pencairan obligasi, dan penjualan. Sisa aset surat berharga eks BDL yang dicatatkan dengan nilai sebesar Rp1.524.031.350.

Adapun rincian Aset Surat Berharga eks BDL sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Nilai
1	Obligasi	0
2	Saham	1.524.031.350
	Jumlah	1.524.031.350

Rincian untuk masing- masing Aset Surat Berharga eks BDL diuraikan rinci dalam lampiran LDCPL3.

d. ASET PROPERTI EKS BDL

Aset properti adalah aset berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau satuan rumah susun/apartemen berikut benda yang melekat dan merupakan satu kesatuan, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas aset properti eks BDL meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, lelang, penebusan, penetapan aset properti menjadi Barang Milik Negara (BMN), dan pemanfaatan dalam bentuk sewa. Sisa aset properti eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2022 adalah sejumlah 674 aset dengan nilai sebesar Rp1.757.972.548.038,56.

Adapun rincian Aset Properti eks BDL sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022
1	Aset tetap	328.023.350.000
2	Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA)	876.433.104.038,56
3	Aset yang diperoleh berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	224.390.154.000
4	Aset yang berasal dari penyerahan Pemegang Saham kepada BDL untuk menyelesaikan permasalahan permodalan dan likuiditas BDL	329.125.940.000
	Jumlah	1.757.972.548.038,56

9. SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

Penyelesaian penagihan dana BLBI yang tidak kunjung selesai selama lebih dari dua puluh tahun menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga diperlukan satu kekuatan baru yang dapat mendukung instrumen yang sudah berjalan selama ini, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam pemulihan hak negara. Bukti keseriusan pemerintah untuk memulihkan hak negara adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keppres Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Satgas BLBI dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien. Satgas BLBI yang terdiri dari berbagai Kementerian dan Lembaga berkomitmen melakukan upaya *extraordinary* untuk mengembalikan hak negara dengan total 110,45 triliun rupiah dimana lebih dari 90% dari nilai tersebut merupakan aset kredit dari obligor/debitur. Sehingga pembentukan Satgas BLBI adalah sebagai katalisator dalam penyelesaian hak negara atas dana BLBI serta memperkuat fungsi PUPN.

Satgas BLBI terdiri dari gabungan Kementerian dan Lembaga bertugas dengan waktu yang terbatas hingga 31 Desember 2023, memiliki struktur keanggotaan sebagai berikut:

1. Pengarah (terdiri dari 8 orang Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara)
2. Ketua Pelaksana Satgas (Dirjen Kekayaan Negara)
3. Wakil Ketua Satgas (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI)
4. Sekretaris (Deputi Bidkor Hukum dan HAM, Kemenkopolhukam)
5. Anggota Pelaksana (9 orang Pejabat Eselon I antar Kementerian dan Lembaga)
6. Sekretariat yang berkedudukan di Kementerian Keuangan c.q. DJKN diketuai oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN
7. Kelompok Kerja (Pokja):
 - a. Tim A, B, dan C. Masing-masing tim terdiri dari gabungan tiga Pokja yaitu Pokja Data dan Bukti, Pokja Pelacakan, dan Pokja Penagihan dan Litigas
 - b. Pokja Tanah
 - c. Pokja Peraturan
 - d. Tim Penegakkan Hukum Bareskrim POLRI.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim Pokja Satgas melakukan telaah dan pendalaman terhadap obligor, debitur, dan aset properti dengan nilai yang signifikan dan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Terkait penanganan penagihan obligor/debitur, mekanisme pemanggilan yang dilakukan adalah sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak antar panggilan berselang 7 hari, dalam hal obligor/debitur tidak memenuhi panggilan, maka akan dilakukan pemanggilan berselang 7 (tujuh) hari melalui media massa nasional.

Untuk tahap awal, Satgas BLBI bertugas untuk menangani sejumlah 8 obligor, 14 debitur, dan 9 unit aset property prioritas dengan nilai yang besar dan tingkat permasalahan yang kompleks. Saat ini proses pengelolaan hak tagih negara dari dana BLBI sudah memasuki tahap kedua dengan prioritas penanganan kepada 13 obligor, 15 debitur, dan 14 unit aset properti.

Selain upaya penagihan melalui pemanggilan, Satgas juga melakukan serangkaian upaya terkait aset-aset obligor/debitur seperti penguasaan fisik dan pemblokiran aset-aset milik debitur dan obligor yang ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pelelangan. Sejak dilantik pada tanggal 4 Juni 2021, Satgas BLBI telah efektif melaksanakan *special mission* penanganan hak tagih negara hingga 31 Desember 2022.

Dengan jangka waktu yang relatif singkat tersebut, Satgas telah berhasil membukukan capaian perolehan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Progres	Nilai (Rp)	Luas (m2)
1	PNBP dari Pembayaran	950.785.009.091,10	0
2	PNBP dari Lelang	43.625.719.998,70	0
3	PNBP Penjualan Tanpa Lelang	92.400.000.000	6.933
4	Penguasaan Fisik Aset Properti	7.394.038.779.936	18.255.614,64
5	Sita Aset dan Penyerahan Barang Jaminan	13.542.006.043.000	17.726.554,38
6	PSP dan Hibah	2.561.641.132.125	2.203.238
7	PMN Nontunai	2.490.875.366.653	540.714
Total		27.075.372.050.803,80	38.733.054,02

E. PIUTANG DALAM RANGKA DANA ANTISIPASI PENANGANAN LUMPUR SIDOARJO

1. Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo pasal 15 ayat (1):

“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 maret 2007, dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah”.

Ayat (2):

“Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 (dua) tahun habis”

PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) merupakan badan hukum asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di Indonesia. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dibentuk PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Di dalam pelaksanaannya, proses pembayaran pelunasan jual beli tanah dan bangunan di wilayah PAT 22 Maret 2007 yang dilakukan PT MLJ tidak lancar Berdasarkan Peraturan Presiden no. 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret

2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

2. Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20% dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80% dari nilai jual beli.

Kebijakan MLJ dalam pelaksanaan pembayaran pembelian tanah dan bangunan milik warga PAT 22 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran tahap I 20%, seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga.
- b. Pembayaran tahap II 80%, dibagi menjadi tiga jenis pembayaran sebagai berikut:
 - 1) 80% seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga
 - 2) Program Resettlement dengan formula tanah pekarangan/darat mendapat relokasi dengan perbandingan 1:1 dari luas tanah asal + bangunan seluas tertentu (yang dibangun PT Wahana Artha Raya) + “susuk” (kembali) sebesar nilai sisa dari luas bangunan menurut data Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), dengan tidak memperhitungkan uang muka 20%. Warga yang menerima program resettlement, setelah 12 (dua belas) bulan diberikan kesempatan untuk menjual kembali kepada MLJ (buyback) dengan nilai yang sama. Dalam perhitungan selanjutnya, uang muka 20% yang tidak diperhitungkan dalam program resettlement, dianggap pemberian uang kerohiman dalam bentuk bonus yang diberikan MLJ kepada warga.
 - 3) 80% dibayar secara tunai kepada warga dengan memperhitungkan sisa pokok KPR warga yang bersangkutan. Selanjutnya, sisa pokok KPR warga diselesaikan oleh MLJ kepada bank yang terkait.

3. Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah dilakukan penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi beberapa kali yaitu :

- a. Surat no. PMS.04.02/293/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang peringatan untuk penagihan atas Pinjaman Dana Antisipasi
- b. Surat no. PMS.04.02/281/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang peringatan II Penagihan Pinjaman atas Dana Antisipasi
- c. Surat dari kementerian keuangan no. S-1375/KN/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- d. Surat no. PMS.04.02/56/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penagihan Kewajiban Terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- e. Surat dari kementerian keuangan no. S-170/MK.6/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- f. Surat dari kementerian keuangan no. S-4946/KN/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pengihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo

- g. Surat no. KU.01.12/PPLS/222 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- h. Surat dari kementerian keuangan no. S-1893/KN/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- i. Surat dari kementeria keuangan no. S-527/MK.6/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Peringatan Untuk Penagihan Atas Pinjaman Dana Antisipasi lumpur Sidoarjo
- j. Surat no. KU 0403-AI/63 tanggal 15 Maret 2021 tentang jumlah piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo sampai dengan 31 Desember 2020
- k. Surat dari kementerian keuangan no. S-291/MK.6/2021 tanggal 12 Juli 2021 tetang peringatan Penagihan atas Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- l. Surat dari kementerian keuangan no. S-15/KN/2022 tentang Penagihan Piutang Pemerintah Terhadap Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALs)
- m. Surat no. HM 0503-AI/170 tanggal 21 April 2022 tanggal 21 April 2022 tentang Konfirmasi Catatan piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
- n. Surat Kepada DJKN No. HM 0501-AI/93 tanggal 28 Februari 2023 tentang Konfirmasi Catatan piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
- o. Surat No. KU 0403-AI/94 tanggal 28 Februari 2023 hal Konfirmasi Catatan Piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo, yang pada intinya merupakan konfirmasi kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya yaitu besaran saldo piutang DALs per 31 Desember 2022.

Hasil penilaian kembali jaminan adalah sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 622,34 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor : 00347/2.00113-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar sebesar (137.276.401.432) rupiah yang kemudian dianggap nol karena nilainya negatif
- b. Tanah seluas 22,85 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor : 00348/2.013-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar 58.234.000.000 rupiah dan nilai ini yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai penyisihan piutang yang dalam pertemuan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS disepakati sudah mencapai kualitas piutang yang diragukan.

F. PENGUNGKAPAN PENTING PIUTANG NEGARA ATAS YAYASAN SUPERSEMAR

Penyusunan laporan keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar.

Sepanjang Tahun 2020 tidak terdapat transaksi apapun terkait penyelesaian piutang. Namun demikian terdapat perubahan saldo piutang akibat perubahan kurs.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kementerian Sekretariat Negara masih terus dilakukan dalam rangka menyelesaikan Piutang kepada Yayasan Supersemar. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKNSI juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar

yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya. Di samping itu, DJKN telah menawarkan bantuan jasa penilai di lingkungan DJKN untuk selanjutnya dapat melakukan penilaian atas aset yang telah disita.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain:

1. Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku principal, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.
2. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara.
3. Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan.
4. Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan Sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25 Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.
5. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp242.081.000.259 ke Kas Umum Negara. Adapun besaran uang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebesar Rp242.404.759.586. Dengan demikian terdapat perbedaan antara uang yang telah disita dengan uang yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp323.759.327.
6. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa outstanding Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa:
 - a. Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016);
 - b. Sebidang tanah seluas 8.120 m² (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016).

7. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar.
8. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-220/KN/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Nomor S-380/KN/2020 tanggal 08 Juni 2020 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar sekaligus menawarkan bantuan penilaian oleh Penilai DJKN.
9. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengajukan usulan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6 melalui surat Nomor B-313/G/Gp.2/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Yayasan Beasiswa Supersemar. Teknis penilaian tersebut telah dibahas bersama Direktorat Penilaian dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Juli 2020 sesuai pelaksanaan Hukum Acara Perdata dengan mempertimbangkan factor keamanan.
10. Kejaksaan Agung telah menyampaikan surat permohonan penetapan penilai pemerintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat melakukan penilaian aset di Jalan Raya Megamendung dalam rangka mendukung pelaksanaan lelang eksekusi (Surat Jamdatun Nomor B-368/G/Gp.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020).
11. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-958/KN.5/2020 tanggal 15 September 2020 yang pada intinya meminta progres tindak lanjut penilaian aset.
12. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN melalui surat Nomor B-616/G/Gp.2/11/2020 tanggal 04 November 2020 hal Permohonan Bantuan Biaya Appraisal Aset Tanah dan Bangunan Dalam Perkara Yayasan Beasiswa Supersemar menyampaikan permintaan bantuan biaya penilaian aset sitaan oleh KJPP dalam perkara perdata Piutang Yayasan Supersemar.
13. Menindaklanjuti surat tersebut, Direktur PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-1171/KN.5/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa biaya penilaian aset sitaan Yayasan Supersemar akan dibebankan pada POK Direktorat PKNSI.
14. Direktorat PKNSI menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan ditunjuk sebagai pelaksana penilaian aset yang telah diletakkan sita sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6. Kontrak pelaksanaan penilaian aset dilaksanakan pada mulai tanggal 23 November sampai dengan 14 Desember 2020.
15. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah menyerahkan hasil penilaian aset sitaan sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar permohonan lelang sita pengadilan dari Kejaksaan Agung kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Cibinong.
16. Jamdatun melalui surat Nomor B-260/G/Gp.2/04/2021 tanggal 14 April 2021 meminta agar laporan penilaian Aset Granadi dan Aset Megamendung direvisi mengingat penilaian dilakukan sebelum ada penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri.
17. Menindaklanjuti surat tersebut, telah dilakukan pengambilan sumpah Tim Penilai Aset Granadi pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Ketua PN Jaksel dan tanggal 4 Juni 2021 oleh Ketua PN Cibinong.

18. Berdasarkan Surat Direktur PKNSI Nomor S-1320/KN.5/2021 tanggal 15 Juni 2021, telah dimohonkan penilaian ulang berikut penambahan pengguna laporan penilaian (PN Jaksel, PN Cibinong, Jamdatun).
19. Rencana survei (inspeksi) lapangan dalam rangka penilaian dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Juli 2021. Namun demikian, rencana tersebut harus ditunda mengingat daerah Jabodetabek sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19.
20. Tim Penilai KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan inspeksi lapangan terhadap Aset Megamendung pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Aset Granadi pada tanggal 26 Agustus dan 6 September 2021. Laporan penilaian tersebut diserahkan kepada Direktorat PKNSI melalui surat Nomor 00194/2.0014-00/PI/11/0080/1/XI/2021 dan 00195/2.0014-00/PI/11/0080/1/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
21. Direktorat PKNSI menyampaikan laporan penilaian dimaksud kepada Ketua PN Jakarta Selatan melalui surat Nomor S-2632/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 dan kepada Ketua PN Cibinong melalui surat Nomor S-2631/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 (tembusan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN).
22. Di samping sitaan berupa uang dan aset tanah-bangunan, terdapat aset finansial yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Jenis	Status	Keterangan
1	Plaza Indonesia Realty (PLIN)	Saham dan Deviden	Listing	Terdapat deviden sebesar Rp3.592.500.000 tahun 2012 s.d. 2015
2	PT Granadi	Saham dan Deviden	Non Listing	-
3	PT Wisma Kosgoro	Saham dan Deviden	Non Listing	-
4	PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP)	Saham dan Deviden	Listing	-
5	PT Indofood Sukses Makmur (INDF)	Saham dan Deviden	Listing	-
6	PT Bank Muamalat	Saham dan Deviden	Non Listing	-
7	PT Bank Danamon (BDMN)	Saham dan Deviden	Listing	-
8	Timber Dana Jakarta	Saham dan Deviden	Non Listing	-
9	PT Pelita Indonesia Baru	Saham dan Deviden	Non Listing	-
10	PT Tri Megah Sekuritas (TRIM)	Saham	Listing	-
11	PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	Saham	Non Listing	-
12	Aset Yayasan Supersemar di PT Samuel Internasional	Saham	Non Listing	-

No	Perusahaan	Jenis	Status	Keterangan
13	Rekening/Giro/Deposito an. Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar di PT BPR Mitra Sejahtera Lestari Bekasi	Rekening/Giro/Deposito	-	

23. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-4/KN/2022 tanggal 17 Januari 2022 kepada Kemsetneg dan Kejagung untuk menyelesaikan outstanding piutang Yayasan Supersemar, termasuk dan tidak terbatas pada pengajuan permohonan lelang eksekusi Pengadilan terhadap aset yang telah disita dan telah dilakukan penilaian.
24. Direktorat PKNSI telah melaksanakan rapat dengan Jamdatun, Kejagung dan Kedeputan Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kemsetneg pada tanggal 6 Februari 2022 dengan simpulan:
 - a. Tindak lanjut penyelesaian piutang yang saat ini akan dilakukan adalah mendorong pelaksanaan lelang aset sitaan (aset Granadi dan Megamendung) dan pencairan saham-saham yang telah disita.
 - b. JPN akan menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai selisih uang yang telah dieksekusi dengan uang yang diserahkan/diseter, rencana lelang aset sitaan, dan pencairan saham.
25. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-40/KN/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Kemsetneg dan Kejagung yang pada intinya meminta penjelasan terkait selisih saldo yang dicairkan dengan saldo yang diserahkan serta sita eksekusi rekening lainnya jika ada.
26. Direktorat PKN telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-69/KN/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Ketua PN Jakarta Selatan dan Ketua PN Cibinong untuk dapat mengajukan lelang eksekusi ke KPKNL setempat. Selanjutnya, telah disampaikan pula surat Dirjen KN Nomor S-70/KN/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Jamdatun dan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum untuk dapat menyampaikan progres tindak lanjut atas hasil penilaian aset yang telah disita tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada upaya mendorong permohonan pelaksanaan lelang sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri.
27. Direktorat PKN telah melakukan beberapa kali koordinasi yaitu pada tanggal 09 Juni 2022, 12 Juli 2022, dan 14 Juli 2022 guna mendorong pelaksanaan lelang sita eksekusi dan penyetoran uang sisa hasil eksekusi dengan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Cibinong.
28. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan uang sisa hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 14 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp323.759.328 ke Kas Umum Negara.
29. Adapun progres terkait aset sitaan berupa tanah dan/atau bangunan serta aset finansial (aset saham) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakan lelang eksekusi aset berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Megamendung No. 6 RT 03 RW 03 Kampung

- Citalingkup, Desa Megamendung, Bogor telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui KPKNL Bogor. Namun demikian, tidak terdapat penawaran atas lelang tersebut (TAP). Lelang ulang akan dilaksanakan setelah terdapat pembaruan penilaian oleh KJPP (laporan penilaian berakhir pada tanggal 25 Agustus 2022).
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memproses permohonan lelang eksekusi aset berupa tanah dan bangunan "Gedung Granadi" di Jl. HR. Rasuna Said Kav 8-9 Blok X/I, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Namun demikian, lelang belum dapat dilaksanakan mengingat laporan penilaian telah habis masa berlakunya.
 - c. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PMK 213/PMK.06/2020, masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran yang digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Limit paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang.
 - d. Mengingat diperlukan penilaian baru oleh KJPP, pelaksanaan penilaian akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dengan pertimbangan tidak tersedianya dana.
 - e. Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset finansial (aset saham) akan dilakukan setelah principal melakukan pembayaran panjar SKUM yang diestimasikan sebesar Rp19.100.000
30. Terkait aset sitaan berupa saham, Direktur PKN telah menyampaikan surat kepada Direktur Perdata Ditjen AHU Nomor S-594/KN.4/2022 tanggal 02 November 2022 yang pada intinya memohon informasi kepemilikan Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar pada aset yang telah ditetapkan sita eksekusi/pemblokirannya sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018.

G. Aset PKP2B

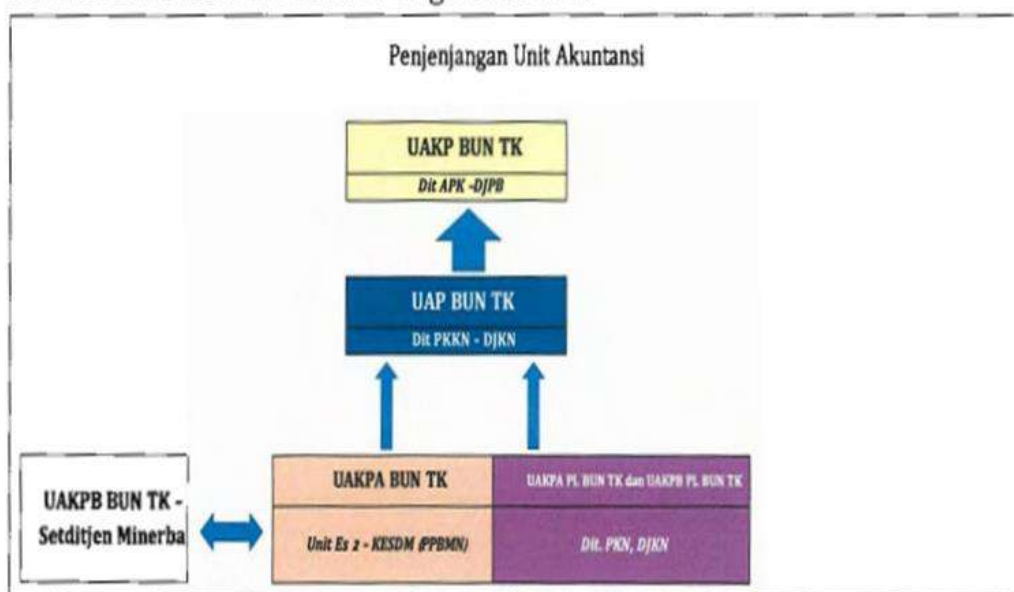
- 1. Terdapat kontraktor PKP2B yang asetnya tidak/belum disajikan pada laporan keuangan Bendahara Umum Negara semester 1 TA 2021 pada PKP2B PT Indominco Mandiri Berdasarkan pasal 15 angka 1 Kontrak (perjanjian) Nomor 097.B.Ji/292/U/90 tanggal 5 Oktober 1990 antara pemerintah (dh. PN Batubara) dengan PT Indominco Mandiri, dinyatakan bahwa "peralatan (termasuk suku cadang) dan perlengkapan lainnya tersebut adalah milik Kontraktor." Dengan demikian aset PKP2B PT Indominco Mandiri tidak termasuk dalam BMN.
- 2. Pengakhiran Perjanjian PKP2B Generasi I
Terdapat kontraktor PKP2B yang telah berakhir perjanjian PKP2B Generasi I dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2020 PT Arutmin Indonesia melalui surat keputusan menteri ESDM nomor 221.K/33/MEM/2020 tanggal 2 November 2020 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - b. Pada tahun 2021 PT Kendilo Coal Indonesia melalui surat keputusan menteri ESDM nomor 60/1/IUP/PMA/2021 tanggal 14 September 2021 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - c. Pengakhiran perjanjian PKP2B Generasi I PT Tanito Harum didasarkan pada adanya putusan perkara kasasi Tata Usaha Negara dengan Nomor 581.K/TUN/2020 dari Mahkamah Agung

- dimana hasilnya menolak permintaan dari APBI selaku penggugat untuk membatalkan SK Menteri ESDM Nomor 101.K/30/MEM/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang pembatalan atas SK Menteri ESDM Nomor 07.K/30/MEM/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan Pertama sebagai kelanjutan operasi PKP2B PT Tanito Harum. Sesuai pasal 25 PMK 67/2012 tentang Pengelolaan BMN PKP2B, BMN wajib diserahkan kepada pemerintah apabila perjanjian telah berakhir dan/atau telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan.
- d. Pada tahun 2021 PT Kaltim Prima Coal melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 90/1/IUP/PMA/2021 tanggal 31 Desember 2021 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - e. Pada tahun 2022 PT Multi Harapan Utama melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 608/1/IUP/PMDN/2022 tanggal 1 April 2022 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - f. Pada tahun 2022 PT Adaro Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 11/1/IUP/PMA/2022 tanggal 13 September 2022 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - g. Pada tahun 2022 PT Kideco Jaya Agung melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 14/1/IUP/PMA/2022 tanggal 16 Desember 2022 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
3. Terhadap kewajiban PT Kendilo Coal Indonesia dalam rangka pemanfaatan kembali BMN yang telah dilakukan serah terima kepada Pemerintah dengan nilai IDR 1.972.745.000, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. PT Kendilo Coal Indonesia telah membayarkan uang muka/panjar sebanyak IDR 1.700.000.000 pada tanggal 6 Juni 2018;
 - b. Sesuai surat dari Direktur PNKNL DJKN No. S-303/KN.4/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Sewa BMN PT BHP Kendilo Coal Indonesia menyatakan bahwa surat Menteri Keuangan S-566/MK.6/2018 tanggal 18 Desember 2018 Hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Eks PKP2B PT BHP Kendilo Coal Indonesia tidak dapat dijadikan dasar dalam melakukan perjanjian sewa untuk saat ini. Kementerian ESDM telah mengajukan kembali permohonan pemanfaatan sewa kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN melalui surat Sekretaris Jenderal an. Menteri ESDM No. T-1571/BN.04/SJN.A/2021 tanggal 7 Desember 2021 Hal: Permohonan Persetujuan Sewa BMN Eks PKP2B PT BHP Kendilo Coal Indonesia. Adapun terkait uang muka yang telah dibayarkan tetap dicatat sebagai uang muka yang telah dibayarkan untuk pelaksanaan pemanfaatan berupa sewa. PT Kendilo Coal Indonesia diharapkan dapat mengajukan surat terkait permintaan penyelesaian lebih lanjut atas status uang muka sewa yang telah dibayarkan.
 4. Terdapat mutasi tambah pada pendapatan diterima dimuka sebesar Rp15.000.000,00 dengan penjelasan yaitu terdapat penyeteroran ke kas negara uang muka sewa atas pemanfaatan BMN PKP2B pada PT Kaltim Prima Coal oleh PT PLN (Persero) berupa tanah untuk tapak tower dan jalur span ROW yang tersebar di 8 (delapan) titik pada area lahan konsesi PKP2B PT KPC, sebesar Rp15.000.000,00 pada tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan surat Direktur PKN atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemanfaatan Terlebih Dahulu atas BMN PKP2B pada PT Kaltim Prima Coal oleh PT PLN (Persero) nomor S-22/MK.6/KN.4/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan telah

diperpanjang izin pemanfaatannya berdasarkan surat Direktur PKN atas nama Menteri Keuangan Nomor S-172/MK.6/KN.4/2022 tanggal 13 Desember 2022 hal Perpanjangan Pemanfaatan Terlebih Dahulu Barang Milik Negara PKP2B Pada PT Kaltim Prima Coal Oleh PT PLN (Persero).

5. Sesuai dengan PMK 188/PMK.05/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa BMN yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, penjenjangan Unit Akuntansi dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan BMN PKP2B diilustrasikan sebagai berikut:

Penjenjangan unit akuntansi yang mencatat dan/atau melaporkan BMN PKP2B diilustrasikan dalam bagan berikut:



Pedoman Akuntansi BMN PKP2B ini mulai diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022, sehingga pada penyusunan LK TA 2022 ini tidak lagi konsolidasi di Biro Keuangan KESDM.

6. Pengungkapan Lainnya
 - a. Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor PKP2B yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut:
Kontraktor PKP2B yang disajikan dalam mata uang USD

Nama	Status	NP 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	NP 31 Desember 2022
PT Adaro Indonesia	IUPK	637.408	-	-	-	-	637.408
PT Berau Coal	PKP2B	29.383.093	-	-	-	(5.000.000)	24.383.093
PT Multi Harapan Utama	IUPK	363.203	-	(158.980)	-	(128.984)	75.240
PT Kideco Jaya Agung	IUPK	45.279.082	-	(16.155.864)	591.000	-	29.714.218
PT Arutmin Indonesia	IUPK	97.475.103	-	(2.860.799)	-	-	94.614.304
PT Kaltim Prima Coal	IUPK	38.994.016	-	(1.610.840)	-	(3.879.414)	33.503.762
PT Kendilo Coal Indonesia	IUPK	-	-	-	-	-	-
Total		212.131.905	-	(20.786.482)	591.000	(9.008.398)	182.928.024

- 1) Saldo Awal BMN sebesar USD212.131.905
- 2) Mutasi kurang sebesar USD20.786.482 dikarenakan terdapat SK penghapusan dengan rincian sebagai berikut

- Terdapat koreksi pencatatan selama periode Januari sd Desember 2022 dari CaLK ke Neraca sebesar USD 128.984,32 dikarenakan terhadap BMN di CaLK tersebut telah dilakukan inventarisasi dan penilaian BMN tidak ditemukan menjadi ditemukan sebagai tindak lanjut dari KMK 573 Tahun 2020 dan telah terbit Laporan Penilaian dengan rincian sebagai berikut:
 - Laporan Penilaian Nomor LAP-0080/1/PRO.01/KNL.1302/01.01.00/2022 Tanggal 07 Maret 2022 terdiri atas 57 line item sebanyak 57 buah dengan total USD 81.842,91.
 - Laporan Penilaian Nomor LAP-0081/1/PRO.01/KNL.1302/ 01.01.00/2022 tanggal 07 Maret 2022 terdiri atas 1 line item sebanyak 4 buah dengan total USD 47.141,41.Sehingga sesuai dengan PMK 233 tahun 2016 pasal 8 (a) BMN yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.
- SK Menteri ESDM Nomor 482.K/BN.07/SJN.A/2022 tanggal 16 Juni 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Limbah Padat/ Scrap atas Alat - Alat Berat yang Berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan total nilai sebesar USD10.689.709,39 di CaLK;
- Persetujuan Penjualan BMN Eks PKP2B PT Kideco Jaya Agung Nomor S-430/MK.6/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas 1.446 unit Barang Milik Negara yang dilelang tersebut berada di CaLK sebesar USD4.810.947,45;
- SK Menteri ESDM Nomor 736.K/BN.07/SJN.A/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Infrastruktur Pendukung Kegiatan Pertambangan yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung di Wilayah Usaha Pertambangan Roto Samurangau, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar USD64.207,15 di CaLK;
- SK Penghapusan dengan Nomor 950.K/BN.07/SJN.A/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penghapusan BMN Berupa Dense Media Plant, Washplant, dan Workshop yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia di Senakin, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD1.134.966,88;
- SK Penghapusan dengan Nomor 664.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Non Tanah yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia Berupa Lisensi, Software dan Aktiva Tak Berwujud di Provinsi DKI Jakarta, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD26.597;
- SK Penghapusan dengan Nomor 4230 K/95/MEM/2014 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Eks PKP2B PT Arutmin Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Dihilangkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru C.Q. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD6.431,90 atas 1 unit Isuzu Panther G Royale dengan kode BMN AUP0021;
- SK Penghapusan dengan Nomor 848.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penghapusan BMN Non Tanah yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia

- di Provinsi Kalimantan Selatan, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD1.206.134,93;
- SK Penghapusan dengan Nomor 909.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia berupa Bangunan, Construction Tailings dan Aktiva Tak Berwujud di Senakin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kuningan, Provinsi DKI Jakarta dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD486.668,22;
 - SK Penghapusan dengan Nomor 596.K/BN.07/SJN.A/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari Eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal Berupa Early Coal Facility Bengalon 040740 di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD1.610.840.
- 3) Koreksi tambah sebesar USD591.000 dikarenakan terdapat penerimaan negara hasil lelang BMN dengan NTPN Nomor 8C6DA6U8EC9090FJ tanggal 21 September 2022 dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp 539.633.000 sehingga dilakukan koreksi dari Neraca ke Pengungkapan penting lainnya sebesar USD591.000 pada PT Kideco Jaya Agung.
- 4) Koreksi Kurang sebesar USD9.008.398 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- Pengungkapan Lainnya ke Neraca sebesar USD128.984 pada PT Multi Harapan Utama dikarenakan terhadap BMN tersebut telah dilakukan inventarisasi dan penilaian BMN tidak ditemukan menjadi ditemukan sebagai tindak lanjut dari KMK 573 Tahun 2020 dan telah terbit Laporan Penilaian Nomor LAP-0080/1/PRO.01/KNL.1302/01.01.00/2022 Tanggal 07 Maret 2022 dan Laporan Penilaian Nomor LAP-0081/1/PRO.01/KNL.1302/01.01.00/2022 tanggal 07 Maret 2022, Sehingga sesuai dengan PMK 233 tahun 2016 pasal 8 (a) BMN yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya;
 - Terdapat koreksi pencatatan BMN selama Januari sd Desember 2022 terhadap BMN dengan kode aset 101000054 dengan nilai sebesar USD 5.000.000 dengan nama aset Land TRH dilakukan koreksi kurang dari CaLK pada Kertas Kerja BMN Pemerintah pada periode pelaporan Tahunan 2022, yang dimana koreksi kurang ini didasarkan pada surat permohonan PT Berau Coal Nomor 025/BC/BOD-SAN/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Permintaan Koreksi Administratif (terlampir). Hal ini sesuai dengan hasil rapat Pembahasan Evaluasi Hasil Sensus Barang Milik Negara yang Dilaksanakan Secara Mandiri Oleh PT Berau Coal, Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sampling Hasil Sensus BMN pada PT Berau Coal dan Permasalahan Tanah pada PT Berau Coal yang telah tercatat pada Kertas Kerja Pemerintah (KK) BMN Pemerintah yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 13 Januari 2023;
 - Koreksi kurang pada kertas kerja sebesar USD3.879.414 di CaLK sesuai surat Nomor S-829/KN.4/2022 tanggal 30 Desember 2022 Hal Penyampaian Surat Persetujuan Penghapusan Karena Sebab-Sebab Lain BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal atas 5 (lima) unit BMN yang dilakukan koreksi pencatatan karena kekeliruan pencatatan sebelumnya (terlampir).
- 5) Saldo akhir 31 Desember 2021 sebesar USD183.519.024.

b. Kontraktor PKP2B yang disajikan dalam mata uang rupiah

PKP2B		NP 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	NP 31 Des 2022
PT Tanito Harum	IUPK	4.540.684.961	-	-	4.540.684.961
		4.540.684.961			4.540.684.961

- 1) Saldo Awal PT Tanito Harum sebesar Rp4.540.684.961.
- 2) Tidak terdapat mutasi tambah untuk TA 2022 pada PT Tanito Harum.
- 3) Sehingga saldo akhir PT Tanito Harum pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.540.684.961.

H. Aset KKKS

1. ASET KKKS PADA DJKN YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA PER 31 Desember 2022

Selain aset yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 tersebut di atas, pada Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Citarum (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 16.BA/92/SJA.4/2020 dan Nomor BA-1/KN.4/2020 tanggal 29 Juli 2020.terdapat aset yang yang tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di Neraca yaitu tanah eks Pan Orient Energy (Citarum) dengan perolehan Tahun 2006 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian berlokasi di Kec. Jonggol, Kab. Bogor, Jawa Barat dengan luas 174.301 M2 dan nilai perolehan Rp5.321.420.280.

2. ASET KKKS PADA PPBMN YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA PER 31 Desember 2022

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember 2022 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN TK yang Berasal dari KKKS per 31 Desember 2022 karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

Aset Tanah

Mutasi CaLK Tanah 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2022	11.926.809.917.703,10
Mutasi Tambah:	0
Mutasi Kurang:	11.926.809.917.703,10
Transfer Akhir 31 Desember 2022	11.926.809.917.703,10
Saldo Akhir 31 Desember 2022	0

Penjelasan atas mutasi CaLK Tanah adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2021 (Audited).
2. Mutasi kurang sebesar Rp11.926.809.917.703,10 berasal dari Transfer keluar ke UAKPA (SKK Migas dan BPMA) yang merupakan dampak dari reposisi kewenangan pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana SKK Migas dan BPMA berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang.

Aset Harta Benda Modal

1. Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi yang sudah di plug and abandoned. Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini di off-balance dan disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Nilai aset sumur yang tidak digunakan rinciannya adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset HBM Berupa Sumur yang Tidak Digunakan

Saldo Awal (USD)	Mutasi (USD)	Saldo Akhir (USD)
151,575,875	-151,575,875	0

Mutasi kurang sebesar USD151.757.875 berasal dari Transfer keluar ke UAKPA (SKK Migas dan BPMA) yang merupakan dampak dari reposisi kewenangan pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana SKK Migas dan BPMA berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang.

2. Aset Kondisi Rusak Berat

Aset kondisi rusak berat merupakan aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas. Total aset kondisi rusak berat per 31 Desember 2022 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Mutasi (USD)	Saldo Akhir (USD)
104,445,406	-104,445,406	0

Mutasi kurang sebesar USD104.445.406 berasal dari Transfer keluar ke UAKPA (SKK Migas dan BPMA) sebesar yang merupakan dampak dari reposisi kewenangan pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana SKK Migas dan BPMA berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang.

3. Aset Subsequence Expenditure (SE)

Mutasi Aset HBM Berupa Aset SE

Saldo Awal (USD)	Mutasi (USD)	Saldo Akhir (USD)
655,192,166	-655,192,166	0

Mutasi kurang sebesar USD655.192.166 berasal dari Transfer keluar ke UAKPA (SKK Migas dan BPMA) sebesar yang merupakan dampak dari reposisi kewenangan pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana SKK Migas dan BPMA berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang.

4. Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan SKK Migas pada 31 Desember 2022

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2022 serta yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagai berikut:

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Belum di IP

Saldo Awal (USD)	Mutasi (USD)	Saldo Akhir (USD)
6,498,299,050	-6,498,299,050	0

Mutasi kurang sebesar USD6.498.299.050 berasal dari:

- a. Transfer keluar ke UAKPA (SKK Migas dan BPMA) sebesar USD6.498.203.493 yang merupakan dampak dari reposisi kewenangan pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana SKK Migas dan BPMA berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang.
 - b. Penghapusan BMN yang sudah laku lelang pada KKKS PTTEP Malunda sebesar USD95.557
5. Aset dalam proses penghapusan
- Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Dalam Proses Penghapusan

Saldo Awal (USD)	Mutasi (USD)	Saldo Akhir (USD)
293,289,760	-293,289,760	0

Mutasi kurang sebesar USD293.289.760 berasal dari Transfer keluar ke UAKPA (SKK Migas dan BPMA) sebesar yang merupakan dampak dari reposisi kewenangan pengelolaan BMN Hulu Migas, dimana SKK Migas dan BPMA berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang.

6. Kesalahan Pengkategorian Aset
- Aset-aset dengan pengkategorian tidak sesuai tidak disajikan pada neraca untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebagai berikut:

Mutasi Selisih Pencatatan dengan Unit Pengendali pada HBM

Saldo Awal (USD)	Mutasi (USD)	Saldo Akhir (USD)
438,995	-443,995	0

7. Aset Harta Benda Inventaris
- Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada laporan 31 Desember 2022 serta belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP). Tidak terdapat mutasi selama periode Tahun Anggaran 2022.

Mutasi HBI perolehan sebelum tahun 2010 yang belum dilakukan IP
(Dalam Rupiah)

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Saldo Akhir (USD)
4.576.535	- 4.576.535	-

Mutasi HBI perolehan sebelum tahun 2010 yang belum dilakukan IP

Saldo Awal (USD)	Mutasi (USD)	Saldo Akhir (USD)
4,576,535	-4,576,535	0

3. ASET KKKS PADA BPMA YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA PER 31 Desember 2022

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember 2022 tersebut diatas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN TK yang Berasal dari KKKS per 31 Desember 2022 karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Aset Tanah

Tabel 15
Mutasi CaLK Tanah 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

Saldo Awal 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	41.856.409.570
Transfer Masuk saldo awal dari UAKPA-PB	41.856.409.570
Pengadaan	-
Koreksi berdasarkan Sertifikasi	
Koreksi pembenahan pencatatan	
Selisih Pembulatan	0
Mutasi Kurang:	3.536.461.040
Koreksi kurang	3.536.461.040
Saldo Akhir 31 Desember 2022	38.319.948.530

Penjelasan atas mutasi CaLK Tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- 2) Mutasi tambah sebesar Rp41.856.409.570 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB.
- 3) Mutasi kurang sebesar Rp3.536.461.040 yang disebabkan pembenahan pencatatan pada KKKS Medco E&P Malaka atas aset tanah dengan tahun perolehan 2019 yang seharusnya tercatat di neraca.

B. Harta Benda Modal (HBM)

B.1 Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi yang sudah di *plug and abandoned*. Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini di off-balance dan disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2022 adalah senilai USD10,321,967.00.pada KKKS PHE NSB.

Tabel 16

Mutasi Aset HBM Berupa Sumur yang Tidak Digunakan

Jumlah KKKS	Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
1	-	10,321,967.00	-	10,321,967.00

Mutasi tambah sebesar USD10,321,967.00 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB

B.2 Aset Kondisi Rusak Berat

Aset kondisi rusak berat merupakan aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas. Total aset kondisi rusak berat per 31 Desember 2022 adalah senilai USD6,202,713.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
0	6,202,713.00	-	6,202,713.00

Mutasi tambah sebesar USD6,202,713.00 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB

B.3 Aset *Subsequence Expenditure* (SE)

Tabel 18

Mutasi Aset HBM Berupa Aset SE

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
0	104,296,313.00	-	104,296,313.00

Mutasi tambah sebesar USD104,296,313.00 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB

B.4 Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan BPMA pada 31 Desember 2021

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2022 serta yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagai berikut:

Tabel 19

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Belum di IP

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
0	196,395,074.00	3,229.40	196,391,845.00

Mutasi tambah asset terdiri dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB sebesar USD196,395,074.00 dan mutasi kurang yang berasal dari penghapusan asset KKKS Talisman Andaman B.V sebesar USD3,229.40.

B.5 Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Tabel 20

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Dalam Proses Penghapusan

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
0	2,807,278.00	-	2,807,278.00

Mutasi tambah sebesar USD2,807,278.00 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB

C. Aset Harta Benda Inventaris

Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh BPMA pada laporan 31 Desember 2022 serta belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP).

Tabel 21

Mutasi HBI perolehan sebelum tahun 2010 yang belum dilakukan IP

Nilai Perolehan Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2022 (USD)
-	47,260.59	-	47,260.59

4. REPOSISI SUBJEK PENGELOLAAN BMN PADA SKK MIGAS

Reposisi subjek pengelolaan BMN merupakan proses perubahan kewenangan SKK Migas yang semula merupakan Unit Pengendali menjadi UAKPA/B BUN TK dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 dan 207/PMK.05/2022. Reposisi dimaksud menyebabkan terjadinya transfer masuk pencatatan keuangan dan aset atas pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan SKK Migas. Dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaporan transaksi pengelolaan BMN Hulu Migas, maka transfer masuk pada UAKPA/B BUN TK SKK Migas menggunakan saldo per 31 Desember 2021 (Audited). Penyampaian laporan barang mengacu pada PMK 140/PMK.06/2020 sementara penyampaian laporan keuangan mengacu pada PMK 207/PMK.05/2022.

5. ASET KKKS PADA SKK MIGAS YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA PER 31 Desember 2022

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember 2022 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN TK yang Berasal dari KKKS 31 Desember 2022 karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut.

Aset Tanah

Saldo Awal 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah :	11.885.606.199.835
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPB - PB	11.884.953.508.133
Pelaporan Aset Tanah Baru	0
Alih Kelola Terima	652.691.702
Mutasi Kurang :	7.789.747.560
Koreksi Kurang	7.789.747.560
Saldo Akhir 31 Desember 2022	11.877.816.452.275

Penjelasan atas mutasi CaLK Tanah adalah sebagai berikut:

- Saldo awal yang disajikan sebesar Rp0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- Mutasi tambah sebesar Rp11.885.606.199.835 terdiri dari:
 - Transfer masuk saldo awal dari UAKPB – PB sebesar Rp11.884.953.508.133 sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited)
 - Koreksi tambah karena alih terima dari operator KKKS Medco (Grissik) Ltd. kepada KKKS SSSY Petroleum Pte. Ltd. sebesar Rp351.922.074

- c. Koreksi tambah disebabkan adanya pembenahan atas nilai perolehan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada PT. Pertamina Hulu Rokan sebesar Rp300.769.628.
3. Mutasi kurang sebesar Rp7.789.747.560 yang terdiri dari:
 - a. koreksi kurang pada KKKS Medco E&P (Grissik) Ltd. sebesar Rp2.659.312.074 yang terdiri dari Mutasi relinquish Buyuh, Bertak, Pijar sebesar Rp351.922.074 dan Mutasi kurang sebesar Rp2.307.390.000 yang disebabkan pembenahan pencatatan pada KKKS Medco E&P (Grissik) Ltd. atas aset tanah dengan tahun perolehan 2019 yang seharusnya tercatat di neraca
 - b. Koreksi kurang karena verifikasi dokumen perolehan pada PT. Pertamina Hulu Rokan sebesar Rp5.130.435.486

Aset Harta Benda Modal

1. Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi yang sudah di plug and abandoned. Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini di off-balance dan disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2022 adalah senilai USD28,868,860,91.

Saldo Awal 31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2022
-	141.435.908,09	112.567.047,18	28.868.860,91

Penjelasan atas mutasi Aset HBM Berupa Sumur yang Tidak Digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Saldo awal yang disajikan sebesar USD0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- b. Mutasi tambah sebesar USD141.435.908,09 merupakan transfer masuk saldo awal dari UAKPB – PB sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited)
- c. Mutasi kurang sebesar USD112.567.047,18 adanya alih serah dan atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA pada KKKS:

No	KKKS	Nilai (USD)
1	KKKS Medco E&P Grissik	1,973,974.00
2	PetroChina International Bangko Ltd	1,178,914.74
3	PHE WMO	2,738,087.00
4	Star Energy Kakap Ltd	13,782,983.00
5	Pertamina Hulu Mahakam	91,804,384.44
6	Pertamina Hulu Sanga Sanga	1,088,704.00
	Total	112,567,047,18

2. Aset Kondisi Rusak Berat

Aset kondisi rusak berat merupakan aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas. Total aset kondisi rusak berat per 31 Desember 2022 adalah senilai USD41,750,817.55

Saldo Awal 31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2022
-	96.911.041,83	55.160.224,28	41.750.817,55

Penjelasan atas mutasi Aset HBM Berupa Aset Kondisi Rusak Berat adalah sebagai berikut

- Saldo awal yang disajikan sebesar USD0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- b) Mutasi tambah sebesar USD96.911.041,83 merupakan transfer masuk saldo awal dari UAKPB – PB sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited)
- c. Mutasi kurang sebesar USD55.160.224,28 karena adanya transaksi penjualan lelang/ transfer out/ selisih pembulatan/alih serah, penghapusan dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA pada KKKS:

No	Nama KKKS	Nilai (USD)
1	BOB Pertamina – Bumi Siak Pusako	123,884.00
2	Medco E&P (Grissik) Ltd.	2,192,240.00
3	EMP Korinci Baru Ltd.	1,145.00
4	Eni Krueng Mane	245,635.38
5	Kangean Energy Indonesia Limited	2,557.53

No	Nama KKKS	Nilai (USD)
6	PT Minarak Brantas Gas	111,187.35
7	Petrochina International Jabung Ltd.	19,170.00
8	PT Pertamina Ep	21,068,318.84
9	PT Pertamina Hulu Energi WMO	23,721,509.00
10	Star Energy Kakap Ltd.	860,046.18
11	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd	36,468.88
12	PT Pertamina Hulu Mahakam	3,722,491.60
13	PHE Ogan Komering	5,970.00
14	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	1,919,315.15
15	PT Pertamina Hulu Rokan	17,091.00
16	Camar Resources Canada Inc.	1,078,164.00
17	AED Rombebai Bv	977.20
18	Ecosse Manokwari	23,632.92
19	Citic Seram	10,420.25
	Total	55,160,224.28

3. Aset Subsequence Expenditure (SE)

Aset Subsequence Expenditure (SE) berasal dari kapitalisasi SE yang direklasifikasi ke neraca.

Total Aset Subsequence Expenditure per 31 Desember 2022 adalah senilai USD209,751,395.60

Saldo Awal 31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2022
-	341.532.215,87	131.780.820,27	209.751.395,60

Penjelasan atas mutasi Aset HBM Berupa Aset SE adalah sebagai berikut:

- Saldo awal yang disajikan sebesar USD0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- Mutasi tambah sebesar USD341.532.215,87 merupakan transfer masuk saldo awal dari UAKPB – PB sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited)

- c. Mutasi Kurang aset sebesar USD131.780.820,27 berasal dari kapitalisasi SE yang direklasifikasi ke neraca, yaitu pada sebagaimana informasi tabel dibawah ini:

No	Nama KKKS	Nilai (Dalam USD)
1	BOB Pertamina – Bumi Siak Pusako	- 33,533
2	BP Berau Ltd,	- 6,565,097
3	BP Muturi Holdings BV,	- 1,975,165
4	BP Wiriagar Ltd,	- 663,591
5	Chevron Makassar Ltd,	- 278,167
6	Citic Seram Energy Limited	- 719,227
7	Medco (Grissik) Ltd,	- 631,986
8	PT, Medco E&P Natuna Ltd,	- 6,874,390
9	PT Imbang Tata Alam	- 4,907,757
10	Saka Indonesia Pangkah, Ltd	- 85,451
11	JOB Pertamina–Medco Tomori Sulawesi	- 556,630
12	Kalrez Petroleum Limited	- 193,892
13	PT Minarak Brantas Gas	- 5,750
14	Exxonmobil Cepu Ltd	- 713,727
15	Petrochina International Jabung Ltd	- 1,456,418
16	Premier Oil Natuna Sea Bv	- 76
17	PT Medco E&P Rimau	- 321,761
18	PT Pertamina EP	- 20,588,589
19	PT Pertamina Hulu Energi WMO	- 14,106,687
20	Star Energy Kakap Ltd	- 1,547,767
21	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd	- 501,705
22	PHE Ogan Komering	- 491,653
23	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	- 17,690,527
24	PT Pertamina Hulu Energi Oses	348,490
25	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	- 81,148,170

No	Nama KKKS	Nilai (Dalam USD)
26	Petrogas Ltd (Gs)	- 918,693
27	PT Pertamina Hulu Rokan	77,045,884
28	Bunga Mas International Company	- 186,329
29	PT Pertamina Hulu Attaka	- 46,012,456
		-131,780,820

4. Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan SKK Migas pada 31 Desember 2022
- Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2022 serta yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dengan total nilai USD 5,939,218,893.49 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2022
-	6.372.511.523,53	433.292.630,04	5.939.218.893,49

Penjelasan atas mutasi Aset HBM Berupa Aset Belum di IP adalah sebagai berikut:

- a. Saldo awal yang disajikan sebesar USD0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- b. Mutasi tambah sebesar USD6.372.511.523,53 merupakan:
 - 1) Transfer masuk saldo awal dari UAKPB – PB sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited) sebesar USD6,125,739,644.73
 - 2) Perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan KKKS dan atau koreksi pembenahan KKKS sebesar USD246,771,878.80
- c. Mutasi Kurang aset sebesar USD433,292,630.04 berasal dari:
 - 1) Aset belum di IP yang telah dilakukan IP pada tahun 2022 dan telah dinaikkan ke neraca sebesar USD 1,428,677.83
 - 2) Mutasi kurang karena penghapusan/transfer out/koreksi pembenahan/alih serah/selisih pembulatan dan atau penjualan lelang yang direklasifikasi ke neraca sebesar USD431,863,952.21

5. Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas atau surat keputusan penghapusan Kementerian ESDM sebagai Pengguna Barang atau surat keputusan penghapusan Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang serta belum dilaporkan mutase penghapusannya oleh KKKS. Pada 31 Desember 2022 nilai aset dalam proses penghapusan adalah sebesar USD3,948,591.69, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2022
-	165.183.975,68	161.235.383,99	3.948.591,69

Penjelasan atas mutasi Aset Dalam Proses Penghapusan adalah sebagai berikut:

- Saldo awal yang disajikan sebesar USD0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- Mutasi tambah sebesar USD165.183.975,68 merupakan:
 - Transfer masuk saldo awal dari UAKPB – PB sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited) sebesar USD163,697,198.68
 - merupakan reklasifikasi aset yang di off-balance ke CaLK dikarenakan sudah terjual lelang/dihibahkan/dialihstatuskan ke pihak ketiga pada 31 Desember 2021 namun belum diterbitkan Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan sebesar USD1,486,777.00
- Mutasi Kurang aset sebesar USD161.235.383,99 berasal dari merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas yang terdiri dari 16 KKKS.

6. Kesalahan Pengkategorian Aset

Pada tahun 2022 aset – aset telah terkategori dengan sesuai, sehingga tidak ada kesalahan pengkategorian aset.

Saldo Awal 31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2022
-	438,995.00	438,995.00	-

Penjelasan atas mutasi Aset Berupa Kesalahan Pengkategorian Aset adalah sebagai berikut:

- a. Saldo awal yang disajikan sebesar USD0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- b. Mutasi tambah sebesar USD438,995.00 merupakan transfer masuk saldo awal dari UAKPB – PB sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited)
- c. Mutasi Kurang sebesar USD438,995.00 merupakan pembenahan catatan aset pada KKKS Pertamina EP

7. Aset Harta Benda Inventaris

Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan pada laporan 31 Desember 2022 serta belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebesar USD3,337,051.82, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2022
-	4,524,761.59	1,187,709.77	3,337,051.82

Penjelasan atas mutasi Aset HBI perolehan sebelum tahun 2010 yang belum dilakukan IP adalah sebagai berikut:

- a. Saldo awal yang disajikan sebesar USD0 disebabkan karena UAKPA BUN TK merupakan unit yang menyusun Laporan Keuangan Hulu Migas pertama kali pada periode 31 Desember 2022 sebagai bagian dari reposisi subjek pengelolaan BMN Hulu Migas.
- b. Mutasi tambah sebesar USD4,524,761.59 merupakan transfer masuk saldo awal dari UAKPB – PB sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited).
- c. Mutasi kurang sebesar USD1,187,709.77 merupakan pembenahan catatan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

H.1.1. PENJELASAN ATAS PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN BMN BERUPA TANAH DI WILAYAH KERJA ROKAN OLEH KKKS PHR (ALIH KELOLA EKS PT CPI) TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN

PPBMN bersama dengan DJKN, SKK Migas dan KKKS melakukan pengelolaan BMN Tanah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, selain itu dalam rangka pengamanan BMN Tanah khususnya Eks KKKS PT CPI, telah dilakukan pengamanan secara administratif melalui pencatatan dan sertifikasi BMN Tanah Hulu migas yang saat ini terus berlangsung. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK RI, diketahui bahwa masih terdapat BMN Tanah yang bersengketa dengan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Kasus	Tahun
1	Area 361 Ha (Murini)	1994
2	Ivomas Tunggal	1994
3	Kelompok Masyarakat Pemilik Tanah (KMPT- Bangko Jaya)	2004
4	Kelompok Sawit Permai (KTSP)	2004
5	Candi Pemburu Bypass	2001
6	PT. INTERNATIONAL PRIMA COAL (PT.IPC)	2011

Kasus Litigasi

No	Nama/Lokasi	No. Perkara PN/PT/MA	Status Perkara
1	Sarbini – PN Dumai	16/Pdt.G/2019/PN Dum	Putusan PN (Inkrah
2	Yayasan Menara – PN Dumai	44/Pdt.G/2019/PN Dum 245/PDT/2020/PT PBR	Putusan PN (Inkrah
3	Buyung Nahar – PN Bengkalis	0/Pdt.G/2020/PN Bls	Proses Persidangan
4	Yulizar – PN Bengkalis	31/Pdt.G/2020/PN Bls	Proses Persidangan
5	Mastison Isa – PN Pekanbaru	194/Pdt.G/2019/PN Pbr 152/PDT/2020/PT PBR	Kasasi Oleh Mastison (P) PN, PT dan Kasasi menang
6	Syamsuri (Rantau Bais) – PN Rokan Hilir)	10/PDT.PLW/2015/PN RHL 237/PDT/2017/PT PBR 1485 K/PDT/2021	Putusan Kasasi MA (Belum menerima Relas Pemberitahuan Putusan)

Sebagai salah satu bentuk preventif dalam rangka mitigasi dan pemantauan risiko terhadap BMN Tanah yang bersengketa dengan pihak lain, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan SKK Migas selaku Kuasa Pengguna Barang melalui surat :

1. Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Deputi Dukungan Bisnis, SKK Migas Nomor 669/90/SJA.4/2020, tanggal 14 September 2020, hal Pelaporan Sertifikasi dan Bukti Kepemilikan BMN Hulu Migas Berupa Tanah;
2. Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Deputi Dukungan Bisnis, SKK Migas Nomor T-135/BN.05/SJA.4/2022, tanggal 22 Februari 2022, hal Penyampaian Bukti Kepemilikan BMN Hulu Migas berupa Tanah;
3. Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN yang ditujukan kepada Direktur PNKNL, Kementerian Keuangan Nomor T-145/BN.10/SJA.4/2022 tanggal 15 Februari 2022, hal Permintaan Pendapat/Masukan Atas Rancangan Roadmap Sertifikasi BMN Hulu Migas Berupa Tanah;
4. Surat Sekretaris Jenderal KESDM kepada Kepala SKK Migas Nomor T-540/BN.05/SJN.A/2021, tanggal 28 April 2021, hal Penyerahan Barang Milik Negara pada WK Rokan.

H.1.2. PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN BMN BERUPA TANAH PADA KKKS PERTAMINA HULU MAHAKAM TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN

Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 PMK 140/PMK.06/2020, bahwa Kontraktor, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna barang dan Pengelola Barang wajib melakukan Pengaman BMN Hulu Migas yang menjadi tanggung jawabnya dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran masing-masing dan sesuai ketentuan pasal 77 ayat 2, Pengamanan BMN Hulu Migas oleh Kontraktor dilakukan sampai dengan Terjadinya penyerahan atau peralihan kepada Pemerintah atau Pihak Lain dan/atau Selesaiannya pelaksanaan permusnahan yang dibuktikan dengan suatu berita acara. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Tim BPK RI, masih terdapat 3 bidang tanah dalam sengketa dengan pihak lain, yaitu:

1. Sengketa atas BMN Tanah Handil berlokasi di Kelurahan Muara Jawa Ulu seluas 40.800 m² perkara nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Trg dengan penggugat a.n. Ramli dkk, 5 (orang) dan tergugat adalah PT PHM, PT Total Fina Elf E&P Balikpapan, BPN Kab. Kutai Kartanegara dan Kelurahan Muara Jawa Ulu. Status terakhir atas perkara ini telah diputus sampai dengan tingkat Banding di bawah perkara No. 79/PDT/2021/PT SMR, dengan amar gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Sengketa atas BMN Tanah Muara Kembang Perkara 45/Pdt.G/2020/PN.Trg, dengan penggugat a.n. M.Nursidiq dkk (4 orang) dan tergugat adalah PT PHM dan SKK Migas, gugatan terkait dengan klaim atas tanah di wilayah Muara Kembang. Status terakhir atas perkara ini gugatan ini telah dicabut oleh Para Penggugat.

H.1.3. PENGENDALIAN ATAS PEMANFAATAN ASET BMN HULU MIGAS BELUM MEMADAI
Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 37 pemanfaatan BMN Hulu Migas, dengan rincian sebagai berikut:

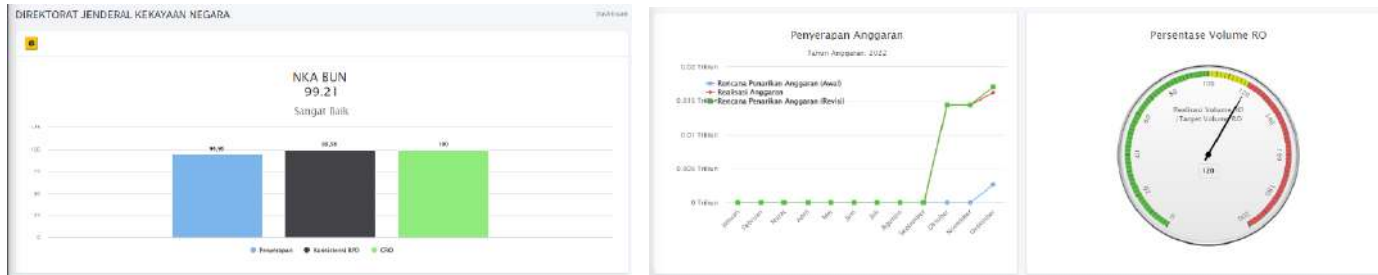
Kriteria	Jumlah Usulan	Nilai Sewa
Sewa dengan status aktif (Telah dicatat sebagai Pendapatan LO dan di akrualkan)	24	154.864.240.029
Sewa mendahului dengan pembayaran uang muka (dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka)	12	4.852.306.700
Usulan Sewa dibatalkan dan uang muka sudah disetor ke kas negara	1	100.000.000
	37	159.816.546.729

Pada 24 pemanfaatan BMN yang aktif, terdapat 10 pemanfaatan yang belum ditindaklanjuti dengan perjanjian, yaitu::

No	KKKS	Penyewa	Nama Aset	Keterangan
1	PT ConocoPhillips (Grissik) Ltd	PT Pertagas	Sebagian tanah koridor untuk pipa tapping Luas 1.170 m2	Pembayaran pendahuluan PT Pertagas (pemanfaatan tanah/sewa selama 5 tahun), BMN terletak di Grissik, Kecamatan Banyulencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan
2	VICO Indonesia & PT Pertamina EP	PT PLN (Persero)	Tanah	Pembayaran pendahuluan pemanfaatan tanah/sewa oleh PT PLN
3	Husky CNOOC Madura Ltd.			
4	BOB BSP-PH	PT Pertagas	Tanah pada KKKS BOB PT Bumi Siak Pusako yang terletak pada Kecamatan Koto Gasib, Dayun, Mempura Pusako, Kab Siak, Prov. Riau	Jalur Pipa di Kec. Goto Gasib, Kec. Dayun, Kec. Mempura. Kec. Pusako, Kab. Siak, Prov Riau seluas 63.000m2
5	PT CPI	CV JC Ransom & Manna	Tanah dan/atau Bangunan di Rumbai dan Duri Camp	Permintaan Pembayaran atas Pemanfaatan sesuai S-506/KN.4/2018 tanggal 24 Agustus 2018
6	PT. Petrochina Jabung Limited	PT. Erasakti Wiraforestama	Tanah seluas 200 m ² pada KKKS PT. Petrochina Jabung Limited	
7	ExxonMobil Oil Indonesia	PT Pertamina Gas	Tanah Exxon Mobil Cepu Limited	Pembayaran sebagian sewa
8	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	PT Telkomsel	Tower Komunikasi dan Lahan	Lahan terletak di Grissik, Suban, Rawa, dan Keri
9	PT CPI	PT Nasional Hijau Lestari	Pemanfaatan lahan bersama PT CPI seluas 47 ha	Surat izin pemanfaatan S-35/KN.4/2019 Tanggal 12 Februari 2019
10	BOB Bumi Siak Pusako PH	PT Medco Ratch Power Riau	Tanah Seluas 58.035 m ² yang terletak di Kecamatan Koto Gasib	Surat Persetujuan Pemanfaatan Nomor S-629/MK.6/2019 Tanggal 3 September 2019

I. CATATAN PENTING LAINNYA PENGANTIAN BIAYA DAN MARGIN WAJAR ATAS INVESTASI PEMERINTAH DALAM RANGKA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pengantian biaya dan margin IP PEN merupakan bagian dari program PC PEN kluster Pembiayaan Korporasi. Realisasi penyaluran pengantian biaya dan margin IP PEN Tahun 2022 sebesar Rp16.190.236.424, dari alokasi DIPA sebesar Rp17.048.714.000, merupakan pembayaran kepada 2 (dua) BUMN dan 1 (satu) Lembaga sebagai Pelaksana Investasi Pemerintah PEN atas tagihan pengantian biaya dan margin untuk periode Oktober 2021, April 2022, dan Oktober 2022, dengan capaian Rincian Output adalah 100%.



J. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA PENGELOLA PIUTANG KEPADA YAYASAN SUPERSEMAR

Penyusunan laporan keuangan UKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar.

Sepanjang Tahun 2020 dan Tahun 2021 tidak terdapat transaksi apapun terkait penyelesaian piutang. Namun demikian terdapat perubahan saldo piutang akibat perubahan kurs. Di samping itu, terdapat penilaian aset sitaan yang dilakukan oleh KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kementerian Sekretariat Negara masih terus dilakukan dalam rangka menyelesaikan Piutang kepada Yayasan Supersemar. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKNSI juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya. Di samping itu, DJKN telah menawarkan bantuan jasa penilai di lingkungan DJKN untuk selanjutnya dapat melakukan penilaian atas aset yang telah disita.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain:

1. Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku principal, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.

2. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara.
3. Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan.
4. Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25 Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.
5. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp242.081.000.259 ke Kas Umum Negara. Adapun besaran uang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebesar Rp242.404.759.586. Dengan demikian terdapat perbedaan antara uang yang telah disita dengan uang yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp323.759.327.
6. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa outstanding Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa:
 - a. Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016);
 - b. Sebidang tanah seluas 8.120 m² (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016)
7. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar.
8. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-220/KN/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Nomor S-380/KN/2020 tanggal 08 Juni 2020 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk

- menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar sekaligus menawarkan bantuan penilaian oleh Penilai DJKN.
9. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengajukan usulan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6 melalui surat Nomor B-313/G/Gp.2/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Yayasan Beasiswa Supersemar. Teknis penilaian tersebut telah dibahas bersama Direktorat Penilaian dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Juli 2020 sesuai pelaksanaan Hukum Acara Perdata dengan mempertimbangkan faktor keamanan.
 10. Kejaksaan Agung telah menyampaikan surat permohonan penetapan penilai pemerintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat melakukan penilaian aset di Jalan Raya Megamendung dalam rangka mendukung pelaksanaan lelang eksekusi (Surat Jamdatun Nomor B-368/G/Gp.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020).
 11. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-958/KN.5/2020 tanggal 15 September 2020 yang pada intinya meminta progres tindak lanjut penilaian aset.
 12. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN melalui surat Nomor B-616/G/Gp.2/11/2020 tanggal 04 November 2020 hal Permohonan Bantuan Biaya Appraisal Aset Tanah dan Bangunan Dalam Perkara Yayasan Beasiswa Supersemar menyampaikan permintaan bantuan biaya penilaian aset sitaan oleh KJPP dalam perkara perdata Piutang Yayasan Supersemar.
 13. Menindaklanjuti surat tersebut, Direktur PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-1171/KN.5/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa biaya penilaian aset sitaan Yayasan Supersemar akan dibebankan pada POK Direktorat PKNSI.
 14. Direktorat PKNSI menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan ditunjuk sebagai pelaksana penilaian aset yang telah diletakkan sita sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6. Kontrak pelaksanaan penilaian aset dilaksanakan pada mulai tanggal 23 November sampai dengan 14 Desember 2020.
 15. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah menyerahkan hasil penilaian aset sitaan sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar permohonan lelang sita pengadilan dari Kejaksaan Agung kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Cibinong.
 16. Jamdatun melalui surat Nomor B-260/G/Gp.2/04/2021 tanggal 14 April 2021 meminta agar laporan penilaian Aset Granadi dan Aset Megamendung direvisi mengingat penilaian dilakukan sebelum ada penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri.
 17. Menindaklanjuti surat tersebut, telah dilakukan pengambilan sumpah Tim Penilai Aset Granadi pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Ketua PN Jaksel dan tanggal 4 Juni 2021 oleh Ketua PN Cibinong.
 18. Berdasarkan Surat Direktur PKNSI Nomor S-1320/KN.5/2021 tanggal 15 Juni 2021, telah dimohonkan penilaian ulang berikut penambahan pengguna laporan penilaian (PN Jaksel, PN Cibinong, Jamdatun).
 19. Rencana survei (inspeksi) lapangan dalam rangka penilaian dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Juli 2021. Namun demikian, rencana tersebut harus ditunda mengingat daerah Jabodetabek sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19.
 20. Tim Penilai KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan inspeksi lapangan terhadap Aset Megamendung pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Aset Granadi pada tanggal 26 Agustus dan 6 September 2021. Laporan penilaian tersebut diserahkan kepada Direktorat PKNSI melalui surat

Nomor 00194/2.0014-00/PI/11/0080/1/XI/2021 dan 00195/2.0014-00/PI/11/0080/1/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

21. Direktorat PKNSI menyampaikan laporan penilaian dimaksud kepada Ketua PN Jakarta Selatan melalui surat Nomor S-2632/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 dan kepada Ketua PN Cibinong melalui surat Nomor S-2631/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 (tembusan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN).
22. Di samping sitaan berupa uang dan aset tanah-bangunan, terdapat aset finansial yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018 dengan rincian:

No	Perusahaan	Jenis	Status	Keterangan
1	Plaza Indonesia Realty (PLIN)	Saham dan Deviden	Listing	Terdapat deviden sebesar Rp3.592.500.000 tahun 2012 s.d. 2015
2	PT Granadi	Saham dan Deviden	Non Listing	-
3	PT Wisma Kosgoro	Saham dan Deviden	Non Listing	-
4	PT Indocement Tunggul Prakarsa (INTP)	Saham dan Deviden	Listing	-
5	PT Indofood Sukses Makmur (INDF)	Saham dan Deviden	Listing	-
6	PT Bank Muamalat	Saham dan Deviden	Non Listing	-
7	PT Bank Danamon (BDMN)	Saham dan Deviden	Listing	-
8	Timber Dana Jakarta	Saham dan Deviden	Non Listing	-
9	PT Pelita Indonesia Baru	Saham dan Deviden	Non Listing	-
10	PT Tri Megah Sekuritas (TRIM)	Saham	Listing	-
11	PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	Saham	Non Listing	-
12	Aset Yayasan Supersemar di PT Samuel Internasional	Saham	Non Listing	-
13	Rekening/Giro/Deposito an. Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar di PT BPR Mitra Sejahtera Lestari Bekasi	Rekening/Giro/Deposito	-	

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL BUN

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Penyesuaian. Sedangkan Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Barang Lainnya, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Transfer, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih dan Beban Lain-lain.

Terdapat defisit pada Laporan Operasional pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.718.001.589.034.153 dan Rp1.363.201.787.285.963. Defisit pada Laporan Operasional pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp354.799.801.748.190 atau sebesar 26,03% bila dibandingkan dengan Tahun 2021.

Defisit LO selama Tahun 2022 sebesar Rp1.718.001.589.034.153 tersebut berasal dari defisit kegiatan operasional dan surplus kegiatan non operasional. Adapun defisit kegiatan operasional pada Tahun 2022 sebesar Rp1.581.924.645.327.304 yang terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp527.599.941.416.642 dan Beban Operasional sebesar Rp2.109.524.586.743.946.

Sedangkan dari kegiatan non operasional pada Tahun 2022 terdapat defisit sebesar Rp136.076.943.706.849 yang merupakan rekapitulasi dari defisit penjualan aset non lancar sebesar Rp81.309.693.787, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang sebesar Rp1.337.452.801.614 dan defisit kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp134.658.181.211.448.

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional

E.2.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp527.599.941.416.642 dan Rp392.511.848.105.023. Pendapatan Operasional pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp135.088.093.311.619 atau naik 34,42% bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Hibah seperti tersebut di bawah ini:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	509.699.262.247.570	366.194.784.269.939
2.	Pendapatan Hibah	17.900.679.169.072	26.317.063.835.084
Jumlah		527.599.941.416.642	392.511.848.105.023

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp509.699.262.247.570 dan Rp366.194.784.269.939. PNPB pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp143.504.477.977.631 atau naik 39,19% bila dibandingkan dengan tahun 2021. Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2022 sebesar Rp509.699.262.247.570 terdiri dari Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, dan PNPB Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Pendapatan Sumber Daya Alam	182.453.640.268.794	131.695.429.899.203
2.	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	819.575	22.145.205.009
3.	PNBP Lainnya	327.245.621.159.201	234.477.209.165.727
Jumlah		509.699.262.247.570	366.194.784.269.939

Pendapatan Hibah pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp17.900.679.169.072 dan Rp26.317.063.835.084. Pendapatan Hibah pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.416.384.666.012 atau turun 31,98% bila dibandingkan dengan Tahun 2021.

*Pendapatan
Sumber
Daya Alam*

E.2.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp182.453.640.268.794** dan **Rp131.695.429.899.203**. Pendapatan SDA pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp50.758.210.369.591** atau naik **38,54%** bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Pendapatan Sumber Daya Alam terdiri dari PNBP Sektor Migas dan Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah atas Pertambangan Panas Bumi. Pendapatan LO sektor hulu migas diakui pada saat diterimanya tagihan atas piutang migas yang diterbitkan oleh SKK Migas. Sementara itu, Pendapatan LO-Setoran Bagian Pemerintah (SBP) Pertambangan Panas Bumi diakui pada saat selesainya perhitungan hak pemerintah atas Bagian Pendapatan Panas Bumi yaitu pada saat selesainya penyusunan kertas kerja perhitungan PNBP sebagai dasar pemindahbukuan PNBP panas bumi dan/atau pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran setoran bagian pemerintah. Adapun Pendapatan Sumber Daya Alam pada Tahun 2022 sebesar **Rp182.453.640.268.794** merupakan PNBP dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Pendapatan SDA Minyak dan Gas	179.565.389.364.224	129.112.324.086.300
2.	Pendapatan SDA Panas Bumi	2.888.250.904.570	2.583.105.812.903
Jumlah		182.453.640.268.794	131.695.429.899.203

A. Pendapatan SDA Minyak dan Gas Bumi

Pendapatan SDA Minyak dan Gas pada Tahun 2022 sebesar **Rp179.565.389.364.224** mengalami kenaikan sebesar **Rp50.453.065.277.924** atau **39,08%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh tingginya kenaikan ICP di mana realisasinya mencapai USD97,03 per barel untuk periode Januari 2022 – Desember 2022. Tumbuhnya realisasi ICP tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 antara lain adanya kekhawatiran pelaku pasar minyak dunia akibat ketidakmampuan OPEC untuk memenuhi target kuota produksi yang merupakan kombinasi dari kurangnya investasi, pengenaan sanksi kepada Rusia, penurunan produksi Libya, Ekuador dan Nigeria serta Produksi UAE dan Arab Saudi yang berdasarkan kuota produksi telah mendekati kapasitas produksi maksimum. Pendapatan Operasional sektor hulu migas yang selanjutnya disebut dengan Pendapatan LO sektor hulu migas merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan LO sektor hulu migas diakui pada saat diterimanya tagihan atas hak negara dari kegiatan usaha hulu migas yang diterbitkan oleh SKK Migas dalam periode Januari s.d. Desember 2022. Pendapatan LO yang berasal dari PNBP SDA Migas (Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi) dikoreksi apabila terdapat tagihan PBB Migas dari Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang dibayarkan oleh DJA (sebagai pengurang PNBP SDA Migas), namun di sisi lain merupakan pendapatan pajak yang dilaporkan oleh DJP. Apabila tidak dilakukan koreksi, penyajian total pendapatan negara dalam LKPP akan mengalami distorsi, karena menyajikan angka PBB Migas sebanyak dua kali.

Pendapatan SDA Minyak dan Gas dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Pendapatan Minyak Bumi	136.951.787.024.759	94.733.729.865.640
2.	Pendapatan Gas Bumi	42.613.602.339.465	34.378.594.220.660
Jumlah		179.565.389.364.224	129.112.324.086.300

Pendapatan Minyak Bumi-LO merupakan nilai *lifting* SDA minyak bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Minyak Bumi-LO diakui pada saat ditetapkan hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi-LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Minyak Bumi. Pendapatan Minyak Bumi berdasarkan laporan pengiriman minyak bumi dan/atau surat tagihan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp143.740.489.661.152 kemudian dikurangi dengan PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Minyak Bumi sebesar Rp6.788.702.636.393, sehingga Pendapatan Minyak Bumi-LO tahun 2022 yang berasal dari nilai hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama adalah sebesar Rp136.951.787.024.759.

Pendapatan Gas Bumi-LO merupakan nilai *lifting* SDA gas bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Gas Bumi-LO diakui pada saat ditetapkan hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Gas Bumi berdasarkan laporan pengiriman gas bumi dan/atau surat tagihan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp44.409.322.743.192 kemudian dikurangi dengan PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Gas Bumi sebesar Rp1.795.720.403.727, sehingga Pendapatan Gas Bumi-LO tahun 2022 berasal dari nilai hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama adalah sebesar Rp42.613.602.339.465.

B. Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO)

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO) merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Sesuai dengan PMK Nomor 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi, Pendapatan PNBPN Panas Bumi LO diakui berdasarkan asas bruto yakni diakui:

- pada saat timbulnya hak atas bagian pemerintah yang harus dibayarkan oleh Pengusaha; dan/atau
- pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran SBP; dan/atau
- pada saat dibayarkan Setoran Bagian Pemerintah oleh Pengusaha.

Selain itu, sesuai pengaturan PMK di atas, pengeluaran terkait dengan penyelesaian

kewajiban pemerintah akan diakui sebagai:

- beban yaitu pengeluaran terkait penyelesaian reimbursement PPN dan penggantian bonus produksi, atau;
- pengurang pendapatan laporan operasional yaitu terkait penyelesaian pembayaran PBB panas bumi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dengan demikian perhitungan pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO Tahun 2022 diperoleh dari SBP yang diterima triwulanan di rekening panas bumi dikurangkan dengan jumlah pembayaran PBB panas bumi, sebagai berikut:

PNBP Panas Bumi-LO = Setoran bagian pemerintah – PBB panas bumi

Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO (Pendapatan LO) periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar **Rp2.888.250.904.570** meningkat sebesar **Rp305.145.091.667** (**Rp2.888.250.904.570 - Rp2.583.105.812.903**) atau sebesar **11,81%** dibandingkan realisasi Pendapatan LO pada periode yang sama tahun 2021.

Rincian realisasi Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Total
a	Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah triwulanan (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	2.955.853.133.059
	1) PT Pertamina Geothermal Energy- Area Kamojang	493.574.081.858
	2) PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong	210.361.439.567
	3) PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu	207.050.683.103
	4) PT Pertamina Geothermal Energy Area Lumut Balai	21.088.472.847
	5) Star Energy Geothermal Salak, Ltd	897.045.993.836
	6) Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	473.067.201.550
	7) Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	561.951.935.467
	8) PT Geo Dipa Energy area Dieng	11.331.096.645
	9) PT Geo Dipa Energy area Patuha	80.382.228.186
b	SBP dari tagihan hasil audit BPKP TB 2017-2018 (1+2+3+4)	18.052.113.155
	1) PT PGE	4.935.154.788
	2) SEGS	6.023.399.290
	3) SEG D II	3.912.681.706
	4) SEG W WL	3.180.877.371
c	Tagihan PBB panas bumi TA 2022	85.654.341.644
d	Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO (a+b-c)	2.888.250.904.570

Pendapatan
dari
Kekayaan
Negara
yang
Dipisahkan

E.2.1.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara Dipisahkan pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp819.575 dan Rp22.145.205.009. Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan pendapatan bagian laba BUMN pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebesar Rp22.145.205.009 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp22.144.385.434 atau 100% bila dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan ini utamanya disebabkan karena penurunan pendapatan bagian laba BUMN dengan kepemilikan minoritas. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan	-	-
2	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan	819.575	22.145.205.009
Jumlah		819.575	22.145.205.009

Pendapatan
PNBP
Lainnya

E.2.1.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp327.245.621.159.201 dan Rp234.477.209.165.727. PNBP Lainnya pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp92.768.411.993.474 atau naik 39,56%. Kenaikan terbesar terjadi pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) yang naik 44,52% dikarenakan adanya kenaikan yang signifikan Rp327.245.621.159.201 terjadi pada penyesuaian nilai investasi pada Kementerian BUMN. Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp327.245.621.159.201 merupakan pendapatan dari BUN dengan rincian sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2022	TA 2021
999.01	Pengelola Utang	30.337.952.650.210	26.248.233.647.114
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	259.165.527.768.465	179.333.146.889.620
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	1.580.095.997.358	1.376.900.021.849
999.05	Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa	42.467.060.000	712.007.400.000
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	1.747.298.384	9.502.792.430
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	649.546.781	1.216.267.320.960
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	36.117.180.838.003	25.581.151.093.754
Jumlah		327.245.621.159.201	234.477.209.165.727

- Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelolaan Utang (BA BUN 999.01) sebesar Rp30.337.952.650.210 mengalami kenaikan sebesar Rp4.076.209.013.096 atau 15,58%. PNBP Lainnya tersebut merupakan Pendapatan Premium dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain. Berikut rincian PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelolaan Utang (999.01):

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	4.430.386.823.600	4.688.412.110.200
2	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	56.513.511.000	45.169.447.000
3	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara Syariah (SBSN)	2.858.861.134.300	2.480.388.046.872
4	Pendapatan Anggaran lain-lain:	22.992.191.181.310	19.034.264.043.042
	- SBN	22.962.080.583.299	19.032.059.276.834
	- Pinjaman	30.110.598.011	2.204.766.208
Jumlah		30.337.952.650.210	26.248.233.647.114

Pendapatan Premium merupakan amortisasi dari Penerimaan Premium atas Penerbitan SBN sampai dengan Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Anggaran lain-lain terdiri dari Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Surat Berharga Negara dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Pinjaman. Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Surat Berharga Negara merupakan pendapatan dari kontribusi BI sebesar **Rp22.962.079.119.409** dengan rincian sebagaimana pada Catatan Penting Lainnya Pos LO, pendapatan atas transaksi *Mock-Production Line* (Uji coba Sistem Penjualan Ritel) sebesar **Rp6.890**, dan transaksi evaluasi tahunan atas sistem elektronik Mitra Distribusi (Midis) sebesar Rp1.407.000, serta pendapatan atas transaksi DRP *Drill* MPN G3 sebesar **Rp50.000**.

Selanjutnya, Pendapatan Anggaran Lain-Lain Instrumen Pinjaman sebesar **Rp30.110.598.011** merupakan transaksi pengembalian atas kelebihan pembayaran *insurance premium* kepada *lender* Bayerische Landesbank pada tahun 2017 dan kelebihan pembayaran pinjaman lender ADB.

- Pendapatan PNB Lain-lain pada BA BUN Pengelola Investasi (BA BUN 999.03) sebesar **Rp259.165.527.768.465** mengalami kenaikan sebesar **Rp79.832.380.878.845** atau naik **44,52%** dibanding PNB Lain-lain pada Tahun 2021. Kenaikan yang signifikan terjadi pada penyesuaian nilai investasi pada Kementerian BUMN. Rincian Pendapatan PNB Lain-lain pada BA BUN Pengelola Investasi (999.03) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	257.942.187.968.841	178.543.257.342.573
2	Pendapatan Bunga Lainnya	920.677.153.576	445.077.335.782
3	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	71.085.329.125	14.636.000.000
4	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (penjaminan korporasi)	231.577.046.090	330.176.211.265
5.	Pendapatan Denda Lainnya	270.833	-
Jumlah		259.165.527.768.465	179.333.146.889.620

a. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi

Pendapatan penyesuaian investasi merupakan pendapatan penyesuaian nilai investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan

usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah.

Pendapatan Penyesuaian Investasi pada BA BUN 999.03 pada tahun 2022 dan 2021 terdiri dari:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	KPA Kementerian BUMN (986917)	203.019.948.099.344	130.405.124.065.158
2	KPA KND DJKN (977191)	6.169.734.758.509	4.127.538.336.641
3	KPA DJPPR dit EAS (970974)	12.735.100	18.674.403
4	UAIP (999244)	48.695.506.414.956	43.944.470.552.750
5	Direktorat SMI DJPB (961671)	9.145.184.624	37.624.444.259
6	Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR, modal Awal BP Tapera (987253)	45.172.816.493	28.481.269.362
7	KPA LDKPI (979015)	2.667.959.815	-
Jumlah		257.942.187.968.841	178.543.257.342.573

Pendapatan yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian BUMN senilai **Rp203.019.948.099.344** merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar **Rp72.614.824.034.186** atau naik **55,68%**. Peningkatan Bagian Laba Pemerintah pada Perusahaan Negara ini dipengaruhi oleh naiknya kinerja laba BUMN yang disebabkan karena telah pulihnya *demand global* pasca pandemi Covid-19 sehingga mendorong kenaikan harga komoditas dan bertumbuhnya ekonomi domestik yang berakibat pada kenaikan penyaluran kredit. Selain itu, kinerja laba BUMN juga didukung oleh kebijakan Pemerintah melalui pemberian kompensasi atas produk BUMN di bidang energi yang harga jualnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Rincian Pendapatan Penyesuaian Investasi pada satuan kerja Kementerian BUMN dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	BUMN Persero	201.173.013.798.316	129.148.763.709.502
2	BUMN Perum	1.788.297.724.944	1.149.256.159.133
3	Non BUMN (minoritas)	58.636.576.084	107.104.196.523
Jumlah		203.019.948.099.344	130.405.124.065.158

Perum mencatatkan pendapatan sebesar Rp1.788.297.724.944 atau naik 55,60% dari tahun 2021 yang sebagian besar dikontribusikan oleh peningkatan laba Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNI) yang mencatatkan reversal/CKPN atas restrukturisasi piutang Lion Group senilai Rp196 miliar. Sebelumnya pada Tahun 2021, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia mencatatkan kerugian.

Di sisi lain, Persero mencatatkan kenaikan pendapatan dibandingkan Audited 2021 sebesar Rp72.024.250.088.814 atau naik 55,77% yang sebagian besar dikontribusikan oleh signifikannya kenaikan laba BUMN klaster energi dan migas. Selain itu, laba klaster perbankan, pertambangan, dan pupuk pangan juga berkontribusi bagi peningkatan pendapatan terutama akibat masih didukung dengan tingginya harga barang komoditas seperti batubara, amonia, dan sebagainya.

Sedangkan kontribusi bagian laba pemerintah dari perusahaan negara minoritas hanya sebesar Rp58.636.576.084 atau turun 45,25% jika dibandingkan tahun 2021 dikarenakan adanya pelaksanaan inbreng saham Pemerintah RI pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung kepada PT Danareksa (Persero) sesuai PP Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.06/2022 tanggal 18 April 2022. Namun terdapat satu tambahan perusahaan negara minoritas yang dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Hasil Rapat Tiga Pihak antara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian BUMN pada tanggal 18 April 2023 yaitu PT Perkebunan Nusantara I dengan kepemilikan negara sebesar 24%.

Pendapatan yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) senilai Rp6.169.734.758.509 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan (sebagaimana tersaji dalam lampiran Mutasi Lain-lain BUMN/Badan Usaha/Non BUMN di bawah Kementerian Keuangan) berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2022 yang disampaikan BUMN/Lembaga/Perusahaan. Terjadi peningkatan sebesar Rp2.042.196.421.868 atau 49,48% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan ini didominasi oleh laba bersih dari badan usaha lainnya yaitu Lembaga Pengelola Investasi yang mencatat laba tahun 2022 sebesar Rp2.620.401.000.000. Rincian pendapatan yang dibukukan BUMN dibawah Kementerian Keuangan sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Persero DJKN	3.444.105.236.348	3.085.206.591.941
2	Badan Usaha Lainnya	2.725.629.522.161	1.042.331.744.700
Jumlah		6.169.734.758.509	4.127.538.336.641

Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha (Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko) senilai Rp12.735.100 merupakan pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito mudharabah dari penempatan dana Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin. Perusahaan SBSN merupakan Special Purpose Vehicle (SPV) maka perusahaan mendepositokan seluruh modal usaha SBSN pada PT. Bank Syariah Mandiri, dan bunga jasa giro deposito tersebut menjadi laba perusahaan. Terjadi penurunan sebesar Rp5.939.303 atau (31,8%) apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2021 yang sebesar Rp18.674.403.

Pendapatan Penyesuaian pada UAIP sebesar Rp48.695.506.414.956 terdiri dari kenaikan nilai Investasi permanen lainnya yang bersumber dari kenaikan investasi permanen lainnya. Pendapatan Penyesuaian pada UAIP pada tahun 2022 mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4.751.035.862.206 atau sebesar 10,81%. Rincian pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi UAIP sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
1	LPS	24.867.390.102.000	21.964.823.683.000
2	Bank Indonesia	21.762.810.000.000	19.175.543.000.000
3	Institut Pertanian Bogor	224.671.061.612	168.345.829.276
4	Universitas Airlangga	18.600.024.657	423.017.770.926
5	Institut Teknologi Bandung	-	-
6	Universitas Indonesia	69.517.294.741	424.927.038.949
7	Universitas Gadjah Mada	271.088.456.888	227.507.217.911
8	Universitas Pendidikan Indonesia	111.185.106.051	55.238.418.035
9	Universitas Sumatera Utara	100.196.965.601	4.103.280.498
10	Universitas Padjajaran	43.021.641.505	15.456.208.236
11	Universitas Diponegoro	403.051.326.098	496.878.619.982
12	Universitas Hasanudin	322.097.124.615	111.470.940.423
13	Institut Teknologi 10 November	186.288.286.427	225.745.443.129
14	Universitas Sebelas Maret	51.485.410.570	121.126.892.540
15	Universitas Negeri Malang	34.895.570.989	-
16	Universitas Andalas	24.368.521.664	-
17	Universitas Brawijaya	106.651.280.689	-
18	Universitas Negeri Padang	45.099.258.613	-
19	BPJS Ketenagakerjaan	53.088.982.236	33.136.322.115
20	BPJS Kesehatan	-	497.149.887.730
Jumlah		48.695.506.414.956	43.944.470.552.750

Pendapatan Penyesuaian Tahun 2022 pada Direktorat SMI DJPb sebesar **Rp9.145.184.624** dimana terjadi penurunan sebesar **Rp28.479.259.635** atau turun **75,69%** dibandingkan Tahun 2021 yang membukukan pendapatan penyesuaian sebesar **Rp37.624.444.259**. Pendapatan penyesuaian pada Direktorat SMI merupakan kenaikan nilai wajar investasi LPDP dalam bentuk aset keuangan (ditempatkan pada obligasi korporasi) yang memenuhi karakteristik *available for sale* dan *held to maturity* diskonto.

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, modal Awal BP Tapera sebesar **Rp45.172.816.493** atau naik sebesar **Rp16.691.547.131** atau naik **58,61%** jika dibandingkan pendapatan penyesuaian pada Audited 2021 yang menyajikan **Rp28.481.269.362**. Pendapatan penyesuaian pada modal awal BP Tapera merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera.

b. Pendapatan Bunga Lainnya

Pendapatan Bunga Lainnya sebesar **Rp920.677.153.576** terdiri dari pendapatan UAIP, Bunga DNS, Pendapatan Kementerian BUMN Bunga IP PEN, Pendapatan DJPK hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah dan Penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur. Rincian Pendapatan Bunga Lainnya adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan UAIP, Bunga DNS	-	149.978.958
2	Pendapatan KBUMN Bunga IP PEN	180.845.651.050	42.080.852.839
3	Pendapatan DJPK, hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah	450.233.532.161	402.846.503.985
4	KPA Direktorat SMI	289.597.970.365	
Jumlah		920.677.153.576	445.077.335.782

PNBP Lainnya periode TA 2021 Audited pada UAIP berasal dari pengelolaan Dana *Debt For Nature Swap* (DNS) yang dikelola oleh BLU BPD LH. Dengan berpindahnya pemindahbukuan Dana Debt For Nature Swap (DNS) dari Laporan Keuangan UAIP kepada Laporan Keuangan UAKPA BLU BPD LH, maka tidak terdapat pendapatan PNBP Lainnya pada Laporan Keuangan UAIP TA 2022 Audited.

Pendapatan Bunga pada KPA Kementerian BUMN merupakan pendapatan bunga dari Investasi Non Permanen dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN) pada A 2022 nilai pendapatan bunga IP PEN sebesar Rp180.845.921.883 yang terdiri dari:

- Setoran Bunga yang telah disetorkan dan dicatat dalam LRA sebesar Rp162.639.365.469;
- Pengakuan pendapatan bunga secara akrual yang telah dicatatkan sebagai pendapatan yang masih harus diterima dalam neraca sebesar Rp18.206.556.414.

Adapun rincian pendapatan bunga IP PEN berdasarkan penerima investasi adalah sebagai berikut:

No	Penerima Investasi	Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2021	Pengakuan Pendapatan Bunga Tahun 2022	Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2022
1	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	15.072.130.141	15.072.130.141
2	PT Perkebunan Nusantara III	5.621.419.615	3.134.426.273	8.755.845.888
3	Perum Perumnas	3.250.000.000	-	3.250.000.000
Jumlah		8.871.419.615	18.206.556.414	27.077.976.029

Pendapatan bunga pada PPA DJPK adalah pendapatan bunga pinjaman PEN Daerah maupun pendapatan bunga lainnya yang berasal dari imbalan atas saldo dana pinjaman PEN Daerah di rekening khusus yang dibentuk PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menampung dana pinjaman PEN Daerah dan belum di salurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur kepada Pemda sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan Pasal 14A ayat (2) PMK Nomor 43/PMK.07/2022, bahwa hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah pada rekening penampungan PT Sarana Multi Infrastruktur setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada setiap triwulan. Hasil penempatan dana sampai dengan Tahun Anggaran 2022 berupa pendapatan bunga

deposito dan jasa giro dapat di rinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	159.762.701.303
2	Pendapatan Bunga Pinjaman	290.470.830.858
Jumlah		450.233.532.161

Hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur berupa pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro sebesar Rp159.762.701.303, sedangkan dana yang berasal dari bunga pinjaman adalah sebesar Rp290.470.830.858, yang dipotong dari DAU Pemda untuk periode penyaluran Januari-Desember.

Pendapatan bunga pada KPA Direktorat SMI pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp289.597.970.365 dan Rp0. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan bunga lainnya yang merupakan pemindahan saldo dana dari RIBUN ke RKUN dan dari RKUN ke RIBUN imbal hasil atas dari imbal hasil Investasi Pemerintah pada BP Tapera dalam rangka realisasi PNBPN Pemerintah.

c. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur

Direktorat EAS IJP Infrastruktur sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP nomor 62 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN Yang Berlaku di Kementerian Keuangan, mengatur IJP Infrastruktur sebagai PNBPN BA 015 DJPPR, dimana IJP tersebut dibayarkan Badan Usaha Pelaksana Proyek Infrastruktur Skema KPBU yang menerima Jaminan Bersama dari Pemerintah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang tertuang dalam Surat IJP Pemerintah. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan Ditjen Anggaran dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang masing-masing disampaikan melalui nota dinas nomor ND-301/AG.7/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan ND-800/SJ/2020 tanggal 22 Juni 2020 ditetapkan bahwa klasifikasi PNBPN IJP Infrastruktur diubah yang tadinya merupakan PNBPN K/L BA 015 menjadi PNBPN BUN.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur pada Tahun 2022 sebesar **Rp71.085.329.125** dirinci sebagai berikut:

No	Tanggal Setoran	Uraian	Jumlah
1	13 Jan 2022	PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek	5.168.000.000
2	31 Agt 2022	PT Bhimasena Power Indonesia	60.901.329.125
3	5 Des 2022	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	1.860.000.000
4	12 Des 2022	PT Waskita Bumi Wira	3.156.000.000
Jumlah			71.085.329.125

d. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (penjaminan korporasi)

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (penjaminan korporasi) pada UAKPA Direktorat EAS merupakan merupakan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 4 sampai dengan 7 PMK nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam pemberian dukungan berupa loss limit, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dikenakan IJP loss limit dan disetor ke kas negara sebagai PNBPN.

Pelaksanaan lebih lanjut terkait PNBPN Loss Limit diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dengan PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero), dimana telah diatur tarif PNBPN IJP Loss Limit ditetapkan sebesar 1% per tahun dari plafon pinjaman yang dijamin oleh PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero) dan PNBPN IJP Loss Limit diterima Pemerintah maksimal 15 hari kerja setelah Subsidi IJP diterima oleh PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero), selanjutnya terdapat addendum atas Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, yang diantaranya terdapat penyesuaian tarif PNBPN IJP Loss Limit dari sebesar 1% menjadi sebesar 0,8%, dimana penyesuaian tarif PNBPN IJP Loss Limit tersebut mulai berlaku untuk sertifikat penjaminan yang diterbitkan pada 1 Februari 2021.

Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 nilai Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit masing-masing sebesar **Rp231.577.046.090** dan **Rp330.176.211.265** dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Penyeter	TA 2022	TA 2021
1	PT Jamkrindo	115.199.927.983	173.592.251.007
2	PT Askrindo	116.377.118.107	156.583.960.258
Jumlah		231.577.046.090	330.176.211.265

- Pendapatan PNBPN Lainnya pada BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) pada Tahun 2022 sebesar **Rp1.580.095.997.358** mengalami kenaikan sebesar **Rp203.195.975.509** atau naik **14,76%** bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Kenaikan ini utamanya terjadi pada pendapatan denda atas keterlambatan pengembalian pemberian pinjaman dikarenakan adanya koreksi tagihan piutang negara PT. Merpati (dalam pailit) sesuai dengan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga. Sby Jo. Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 02 Juni 2022. Koreksi tagihan piutang karena adanya penyesuaian terhadap perhitungan hari denda atas nilai tunggakan kewajiban pokok dan kewajiban lainnya yang dihitung dari jatuh tempo utang pokok/non pokok yang harus dibayar sampai dengan saat putusan pailit ditetapkan. Pendapatan PNBPN Lainnya pada BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman pada Tahun 2022 sebesar **Rp1.580.095.997.358** terdiri dari:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.477.111.277.663	1.373.921.874.269
2	Pendapatan Denda	101.910.456.486	1.807.226.648
3	Pendapatan lain-lain	1.074.263.209	1.170.920.932
Jumlah		1.580.095.997.358	1.376.900.021.849

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.477.111.277.663 dan Rp1.373.921.874.269. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari Pendapatan Bunga dari Piutang Pemberian Pinjaman, Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah, Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman, dan Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Pendapatan Bunga dari Piutang Pemberian Pinjaman (425713)	1.430.982.029.683	1.096.378.661.573
2.	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman (425762)	12.013.305	5.076.645
3.	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman (425763)	46.117.234.675	277.538.136.051
Jumlah		1.477.111.277.663	1.373.921.874.269

Pendapatan Denda pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp101.910.456.486 dan Rp1.807.226.648. Pendapatan Denda terdiri dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman, Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program, dan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman (425823)	101.910.256.486	1.734.826.648
2.	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program (425824)	-	-
3.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK) – (425826)	200.000	72.400.000
Jumlah		101.910.456.486	1.807.226.648

Kenaikan signifikan pada pendapatan denda atas keterlambatan pengembalian pemberian pinjaman yaitu naik sebesar Rp100.175.429.838 atau 5.774,38% dikarenakan adanya koreksi tagihan piutang negara PT. Merpati (dalam pailit). Koreksi tagihan piutang karena adanya penyesuaian terhadap perhitungan hari denda atas nilai tunggakan kewajiban pokok dan kewajiban lainnya yang dihitung dari jatuh tempo

utang pokok/non pokok yang harus dibayar sampai dengan saat putusan pailit ditetapkan

Pendapatan Lain-Lain pada BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman per 31 Desember Tahun 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.074.263.209 dan Rp1.170.920.932. Pendapatan Lain-Lain hanya terdiri dari Pendapatan Anggaran Lain-Lain (425999). Pendapatan Anggaran Lain-Lain Tahun 2022 berasal dari:

1. Kapitalisasi *service charge* yang dikenakan oleh lender kepada penerima pinjaman sebesar Rp782.988.209; dan
 2. Setoran yang diterima oleh rekening pemerintah lainnya yaitu rekening Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur, dan kios KUD (GLK-KUD) sebesar Rp291.275.000.
- Pendapatan PNBPN Lainnya pada BA BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) sebesar **Rp42.467.060.000** mengalami penurunan sebesar Rp669.540.340.000 atau turun 94,04% dari PNBPN lainnya tahun 2021 sebesar Rp712.007.400.000. Penurunan Pendapatan sebesar Rp42.467.060.000 berasal dari penerimaan anggaran lain-lain dari pemotongan penyaluran Transfer DAU berdasarkan KMK Nomor 39/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran DAU TA 2022 Tahap Kedua dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi COVID-19. Pemotongan tersebut dilaksanakan pada penyaluran DAU November sebagai penggantian dana dari unsur BKKBN yang dikenakan untuk 113 pemda.

Sedangkan PNBPN Lainnya di tahun 2021 sebesar Rp712.007.400.000 berasal dari penerimaan anggaran lain-lain dari pemotongan penyaluran Transfer DAU/DBH berdasarkan KMK Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran DAU atau DBH TA 2022 Tahap Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi COVID-19. Pemotongan tersebut dilakukan pada penyaluran DAU Januari sebagai penggantian dana dari unsur TNI dan Polri yang dikenakan untuk 506 pemda.

- Pendapatan PNBPN Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) sebesar **Rp1.747.298.384** mengalami penurunan sebesar **Rp7.755.494.046** atau turun **81,61%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Pendapatan PNBPN Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi tersebut terdiri dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan pendapatan denda keterlambatan pada Bank pelaksana yang terlambat menyalurkan SBUM Perumahan pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR sebesar **Rp1.443.631.671**, pendapatan denda keterlambatan pada Kementerian Perhubungan yang merupakan pembayaran denda atas komisi KM. Ciremai, KM. Sangiang dan KM. Umsini pada Kegiatan PSO Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi TA. 2012 Berdasarkan LHP BPK RI Pada PT. PELNI (Persero) sebesar **Rp303.652.281**, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening

giro pemerintah pada Kementerian Keuangan sebesar Rp5.926 serta pendapatan Jasa Giro pada Kementerian BUMN sebesar Rp8.506.

Rincian PNBPN lainnya sebesar Rp1.443.631.671 pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	47.836	1.349.929
2	Pendapatan Denda	1.443.583.835	106.858.743
Jumlah		1.443.631.671	108.208.672

Pendapatan Denda sebesar Rp1.443.583.835 berasal dari akun 425811 (pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah) dan koreksi atas setoran jasa giro pada triwulan IV Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL BAYAR	KODE BILLING	NTPN	NTB/ NTP	NILAI	KETERANGAN
1	1/21/2022	82022011 7752599	615B855DEMC A460N	0931078 88228	9.315	Denda 2021 Bank Riau Kepri
2	1/24/2022	82022011 7752316	8265C61QUGU MH6FS	0000097 41741	58.247	Denda 2021 Bank Sumut
3	1/26/2022	82022012 4377916	D634061QUGUS RCPS	0000084 93828	12.712	Denda 2021 Bank Jateng Syariah
4	2/10/2022	82022020 8830882	E000C0N9VHJ2 UMD2	0000009 78336	56.986	Denda SBUM 2021 Bank Sulselbar
5	2/11/2022	82022020 8832138	BE4CF1JNFC5F BNKA	0000166 91821	106.192	Denda 2021 Bank Jatim
6	3/11/2022	82022030 7234601	AD5EC61QUH4 B7NP9	0000168 25650	39.452	Denda SBUM 2021 Bank Jatim Syariah
7	3/17/2022	82022031 4978031	E9B6648VURVP Q1NF	0102317 00018	25.753	Denda SBUM 2021 Bank DIY
8	4/13/2022	82022041 1825722	2FB6C3CIF1G90 JHQ	0000011 82917	43.397	Denda 2021 Bank Sulteng
9	4/14/2022	82022041 1826809	3D7641JNFCBG UKJP	0009126 14794	88.110	Denda SBUM 2021 Denda Bank Kalsel Syariah
10	4/20/2022	82022041 4281139	30ABB6U8EBP TNHDJ	'2204200 04699	30.301	Bank BJB Syariah denda SBUM 2021
11	4/27/2022	82022042 0789738	1A01E7QLU6CG B5FA	'0018141 00024	539.890	Bank BTN Denda SBUM 2021
12	5/12/2022	82022051 0130423	783AB3CIF1J7G K7N	'0012476 00040	2.000.027	Bank BTNS Denda SBUM 2021
13	5/13/2022	82022051 1326335	8671C61QUHAD S43V	'0032012 16331	149.644	Bank KALTIMTARA SBUM 2021
14	5/30/2022	82022052 3436354	48F353CIF1JK6 MA2	'0009689 97811	125.223.000	Bank BRI SBUM 2021
15	7/11/2022	82022070 7297142	B37A148VUSBF ULRM	'0010184 47058	246.630	Denda Keterlambatan Penyaluran SBUM 2022 Bank BRI
16	7/11/2022	82022070 6186731	831981JNFK9L PFB	'0006932 00125	1.286.753.977	Denda Keterlambatan Penyaluran SBUM 2019 Bank BTN
17	9/1/2022	82022082 5384316	E955C61QUHJP CDBS	'0000003 40407	25.293.370	Denda Keterlambatan Penyaluran SBUM 2021 Bank BNI

NO	TANGGAL BAYAR	KODE BILLING	NTPN	NTB/ NTP	NILAI	KETERANGAN
18	9/20/2022	82022092 0186561	028F71JNFCQL OHM1	'2156366 86022	1.456.493	Denda keterlambatan penyaluran SBUM 2021 Bank Mandiri
19	06/10/2022	82022100 6117733	EDFEA3CIF220G UR5	0016722 00169	385.863	Denda Penyaluran SBUM Bank BTN TA 2022
20	13/12/2022	82022121 2499410	1FF930N9VIH04 7EI	2212130 00020	1.008.000	Denda penyaluran SBUM BJB Syariah TA 2022
21	Koreksi jasa giro (425764) karena setoran ke kas negara				56.476	
JUMLAH					1.443.583.835	

- Pendapatan PNBPN Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA BUN 9999.08) pada Tahun 2022 sebesar **Rp649.546.781** mengalami penurunan sebesar **Rp1.215.617.774.179** atau turun **99,95%** bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Penurunan paling besar sebesar Rp1.215.751.289.815 terdapat pada Pendapatan Anggaran Lain-Lain. Pendapatan PNBPN Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain yang sebesar **Rp649.546.781** adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan Jasa	-	27.853.151
2	Pendapatan iuran dan Denda	300.068.981	138.700.194
3	Pendapatan Lain-lain	349.477.800	1.216.100.767.615
Jumlah		649.546.781	1.216.267.320.960

Pendapatan iuran dan denda sebesar Rp300.068.981 terdapat pada:

- Kanwil DJPb Provinsi Papua berupa Pendapatan terhadap Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp82.581.682;
- MPPKP yang berasal dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah penyedia jasa atas kontrak tahun 2022 yang dikenai denda keterlambatan penyerahan laporan sebesar Rp25.153.288;
- BP Batam berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp191.525.170. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan dan Kota Tanjung Pinang;
- SKK Migas berupa Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp808.841.

Pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp349.477.800 berupa Pendapatan atas klaim jaminan pemeliharaan pada BP Bintan wilayah Kabupaten Bintan atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan pada TA 2019.

- Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) Tahun 2022 sebesar **Rp36.117.180.838.003** mengalami kenaikan sebesar **Rp10.536.029.744.249** atau naik **41,91%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dari BUN Pengelola Transaksi Khusus sebesar **Rp36.117.180.838.003** dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	PNBP Pengelolaan Kas Negara	14.811.384.936.954	8.668.904.315.705
2	PNBP Pengelolaan Dana Pensiun, Akas dll	22.948.130.970	811.321.040.967
3	PNBP Satker TK Suspen Penerimaan	5.939.837.239	10.163.890.740
4	PNBP Lainnya dari Pengelolaan Aset BLBI	2.900.587.248	6.517.153.981
5	PNBP Lainnya dari Pengelolaan aset Eks Pertamina	207.763.518.504	208.129.260.635
6	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS pada PPBMN	-	157.583.089.255
7	PNBP Lainnya Pengelolaan BPLS	319.406.786.468	319.406.786.468
8	PNBP Setoran Lainnya dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	203.370.109.038	116.836.904.813
9	PNBP Satker Migas	19.966.452.518.439	15.217.394.919.625
10	PNBP Pengelola Panas Bumi	27.818.478	135.010.356
11	PNBP Pengelola BMN PKP2B	334.157.940.613	1.876.665.000
12	PNBP Pengelolaan Aset Lain-Lain	67.630.301.084	36.512.557.324
13	PNBP Pengelola KPPN KPH	68	3.489.785
14	PNBP Lainnya Aset Bekas Milik Asing Tionghoa	7.049.891.200	26.333.009.100
15	PNBP Pengelola BMN Idle	-	33.000.000
16	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS pada SKK Migas	168.028.168.614	-
17	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS pada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)	120.293.086	-
Jumlah		36.117.180.838.003	25.581.151.093.754

Pendapatan Hibah

E.2.1.4. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp17.900.679.169.072** dan **Rp26.317.063.835.084**. Pendapatan Hibah merupakan pendapatan operasional yang berasal dari Pendapatan-LO BUN Pengelola Hibah (BA 999.02). Pendapatan Hibah pada Tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar **Rp8.416.384.666.012** atau turun **31,98%** bila dibanding dengan tahun 2021. Dari nilai pendapatan hibah sebesar **Rp17.900.679.169.072**, sebesar 20,25% atau sebesar **Rp3.624.632.458.132** merupakan realisasi pendapatan hibah kepada Pemerintah Indonesia terkait penanganan Covid-19. Pada periode tahun 2022 (*Audited*), terdapat 58 register hibah penanganan Covid-19 yang telah dilakukan pengesahan pendapatan hibahnya (daftar register terdapat pada **Lampiran E.1**).

Pendapatan Hibah pada Tahun 2022 sebesar **Rp17.900.679.169.072** terdiri dari Pendapatan Hibah terencana dan langsung dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
	a. Melalui Kuasa BUN (Terencana)	-	-
	b. Tdk Melalui Kuasa BUN (langsung)	6.368.840.606.890	6.509.671.226.490
	- Hibah Uang	2.672.694.521.172	2.769.614.720.071
	- Hibah Barang	3.587.433.576.302	3.736.935.982.393
	- Hibah Jasa	108.712.509.416	3.120.524.026
	Jumlah	6.368.840.606.890	6.509.671.226.490

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
2	Pendapatan Hibah Luar Negeri		
	a. Melalui Kuasa BUN (Terencana)	581.693.945.628	945.056.904.437
	b. Tdk Melalui Kuasa BUN (Langsung)	10.950.144.616.554	18.862.335.704.157
	- Hibah Uang	2.437.510.591.595	1.298.370.810.178
	- Hibah Barang	4.749.496.033.745	14.234.089.390.698
	- Hibah Jasa	3.763.137.991.214	3.329.875.503.281
	Jumlah	11.531.838.562.182	19.807.392.608.594
	Jumlah Pendapatan Hibah	17.900.679.169.072	26.317.063.835.084

Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Tidak Melalui Kuasa BUN (langsung) dirinci per Kementerian/Lembaga penerima hibah terdapat pada **Lampiran E2**.

Beban Operasional

E.2.2. Beban Operasional

Beban Operasional pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp2.109.524.586.743.946** dan **Rp1.826.730.496.401.606**. Beban Operasional pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp282.794.090.342.340** atau naik **15,48%** bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Kenaikan yang signifikan terdapat pada beban lain-lain yang naik 137,13% dibandingkan Tahun 2021.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional pada Tahun 2022 sebesar **Rp2.109.524.586.743.946** tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Pegawai	166.825.221.592.907	138.087.396.637.995
2	Beban Persediaan	1.451.347.141	2.582.771.336
3	Beban Jasa	287.297.634.163	255.076.666.188
4	Beban Pemeliharaan	19.052.080	41.587.640
5	Beban Barang Lainnya	958.794.033.443	895.609.766.585
6	Beban Bunga	409.393.545.381.079	370.196.352.562.436
7	Beban Subsidi	253.662.415.148.483	242.070.150.217.497
8	Beban Hibah	5.803.272.496.643	4.319.001.994.301
9	Beban Transfer	819.069.477.047.347	773.171.878.446.225
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	28.515.372.568.357	32.022.203.116.217
11	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	14.826.408.996.259	92.734.242.481.030
12	Beban Lain-Lain	410.181.311.446.044	172.975.960.154.156
	Jumlah	2.109.524.586.743.946	1.826.730.496.401.606

Beban Pegawai

E.2.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp166.825.221.592.907** dan **Rp138.087.396.637.995**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai merupakan beban pegawai pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) yang seluruhnya merupakan beban pegawai satker PNPB pengelolaan Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN BI RTGS, Belanja Selisih Harga Beras Bulog.

Beban Pegawai pada Tahun 2022 pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rp28.737.824.954.912 atau naik 20,81% bila dibandingkan dengan Tahun 2021 salah satunya karena adanya pengakuan Beban Tunjangan Hari Tua (*Unfunded Liability*) yang berasal dari *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) PT Taspen (Persero) sesuai dengan S-75/MK.02/2023 hal Penetapan dan Pengakuan Kewajiban atas Kekurangan Pendanaan Program Tabungan Hari Tua pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp22.176.507.759.421. Selain itu juga karena adanya Belanja Tunjangan, Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan PKRI & KNIP.

Beban Pegawai pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus sebesar Rp166.825.221.592.907 terdiri dari:

1. Belanja Pensiun, Uang Tunggu sebesar dan Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun Eks PNS Kementerian Perhubungan pada PT KAI Rp129.084.087.142.598;
2. Belanja Tunjangan, Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan PKRI & KNIP sebesar Rp4.715.216.944.300;
3. Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai sebesar Rp10.849.409.746.588;
4. Pengakuan Beban Tunjangan Hari Tua yang berasal dari *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) PT Taspen (Persero) sebesar Rp22.176.507.759.421.

Beban Persediaan

E.2.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.451.347.141 dan Rp2.582.771.336. Beban Persediaan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.131.424.195 atau turun 43,81% bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dan beban persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat. Beban Persediaan pada Tahun 2022 tersebut terdapat BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08).

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Kementerian Setneg	59.400.000	128.700.000
	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	59.400.000	128.700.000
2	BP BATAM	291.005.604	130.503.165
	Beban Persediaan konsumsi	278.145.604	129.246.425

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan leges	500.000	-
	Beban Persediaan bahan baku	12.360.000	1.256.740
3	Otoritas Jasa Keuangan	5.192.000	162.236.690
	Beban Persediaan Konsumsi	5.192.000	162.236.690
4	SKK MIGAS	1.095.749.537	2.161.331.481
	Beban Persediaan Konsumsi	1.066.633.920	1.915.496.567
	Beban Persediaan lainnya	29.115.617	245.834.914
	Jumlah Beban Persediaan	1.451.347.141	2.582.771.336
	Rincian Beban Persediaan:		
1	Beban Persediaan Konsumsi	1.349.971.524	2.206.979.682
2	Beban Persediaan bahan baku	12.360.000	1.256.740
3	Beban Persediaan Lainnya	29.115.617	245.834.914
4	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan leges	500.000	-
5	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	59.400.000	128.700.000
	Jumlah	1.451.347.141	2.582.771.336

Beban Jasa E.2.2.3. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp287.297.634.163** dan **Rp255.076.666.188**. Beban Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp32.220.967.975** atau naik **12,63%** dibandingkan Tahun 2021. Rincian Beban Jasa yang terdapat pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) terdiri dari:

1. Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi (Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA) sebesar Rp285.947.915.000;
2. Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan (Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran jasa SWIFT BO Valas, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa (*fee*) Bank Kustodian sebesar Rp1.349.719.163.

Beban Pemeliharaan E.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp19.052.080** dan **Rp41.587.640**. Beban Pemeliharaan pada Tahun 2022 mengalami penurunan yakni sebesar **Rp22.535.560** atau turun **54,19%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya ke kondisi normal untuk tetap dapat dipergunakan.

Rincian perbandingan Beban Pemeliharaan pada Tahun 2022 dan 2021 berasal dari BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) yang sebesar **Rp19.052.080** dapat dirinci berdasarkan satuan kerja sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	BP Batam	8.677.500	15.391.000
2	SKK Migas	10.374.580	26.196.640
Jumlah		19.052.080	41.587.640

*Beban
Barang
Lainnya*

E.2.2.5. Beban Barang Lainnya

Beban Barang Lainnya pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp958.794.033.443 dan Rp895.609.766.585. Beban Barang Lainnya pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp63.184.266.858 atau naik 7,05% bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Beban Barang Lainnya merupakan beban barang lainnya pada BA BUN 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus.

Secara lebih rinci beban barang lainnya pada BA BUN 999.99 terdiri dari:

1. Beban Biaya Operasional Penyelenggaraan

Beban Barang Lainnya sebesar Rp752.821.331.194 merupakan Beban Biaya Operasional Penyelenggaraan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk penugasan pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) guna penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, yang terdiri atas :

- BOP kepada PT Taspen (Persero) Rp642.567.018.370
- BOP kepada PT ASABRI (Persero) Rp110.254.312.824

2. Beban Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar IP PEN

Beban barang lainnya dalam rangka penyaluran penggantian biaya dan margin yang wajar atas pelaksanaan investasi pemerintah PEN selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp12.076.357.599 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai beban/belanja selama tahun 2022 sebesar Rp12.076.357.599 merupakan nilai belanja penggantian biaya dan margin yang terjadi selama tahun 2022, yaitu sesuai SP2D yang dibayarkan kepada Pelaksana Investasi setelah dikurangi kewajiban yang telah dicatat pada tahun 2021. Nilai beban tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 kurang lebih 58,30%, karena tagihan penggantian biaya dan margin yang disampaikan Pelaksana Investasi di tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021t. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Pelaksana Investasi	Realisasi SP2D April 2022	Realisasi SP2D Oktober 2022
PT SMI (Persero)	10.235.550.356	552.489.856
PT SMF (Persero)	632.471.876	51.522.053
LPEI	3.511.451.118	1.206.751.164
Total	14.379.473.350	1.810.763.073
Total SP2D	16.190.236.423	
Kewajiban Tahun 2021	(4.113.878.824)	
Jumlah Beban Tahun 2022	12.076.357.599	

3. Beban Operasional keperluan pembayaran Kontribusi dan *Trust Fund*

Jumlah Beban Operasional keperluan pembayaran kontribusi dan *trust fund* pada organisasi internasional per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp74.185.713.423.

4. **Beban Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF)**
Jumlah Beban Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp66.530.725.012 dan Rp54.218.105.815. Jumlah beban pada 31 Desember 2022 mengalami penurunan karena penurunan capaian keluaran yang mempengaruhi jumlah penggantian biaya penugasan fasilitas penyiapan proyek kepada BUMN Pelaksana Penugasan.
5. **Beban Kontribusi Dukungan Kelayakan Proyek Kerja Sama**
Jumlah beban per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp51.716.561.215 dan Rp0. Pada tahun anggaran 2022, pencairan anggaran dukungan kelayakan diberikan kepada proyek KPBU SPAM Pekanbaru. Sementara pada tahun 2021, Kementerian Keuangan tidak mengalokasikan dana Dukungan Kelayakan dikarenakan tidak ada rencana pencairan dana Dukungan Kelayakan pada tahun tersebut.
6. **Beban Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit**
Jumlah beban per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.463.345.000 dan Rp1.268.000.000. Realisasi atas Belanja Dukungan Loss Limit, baik pada tahun 2022 maupun 2021 tercapai 100%.

Beban Bunga

E.2.2.6. Beban Bunga

Beban Bunga pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp409.393.545.381.079** dan **Rp370.196.352.562.436**. Beban Bunga pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp39.197.192.818.643** atau **10,59%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan beban bunga karena penarikan pinjaman yang lebih tinggi pada Tahun 2022 dan adanya tambahan Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman. Beban bunga sebesar **Rp409.393.545.381.079** terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar **Rp392.686.354.234.599** dan Beban Bunga Instrumen Pinjaman sebesar **Rp16.707.191.146.480**. Perbedaan nilai antara beban bunga di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan dan pencatatan kontribusi BI sebagai beban dan pendapatan, penyajian *loss on bond redemption* sebagai beban non operasional, pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon untuk Surat Berharga Negara Tahun 2022.

Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar **Rp392.686.354.234.599** terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar **Rp384.504.445.234.755** dan Beban Diskon yang menambah Beban Bunga sebesar **Rp8.181.908.999.844**.

Beban Bunga dari BUN Pengelola Utang (999.01) Tahun 2022 sebesar **Rp409.393.545.381.079** dapat dirinci sebagai berikut:

a. Beban Bunga Surat Berharga Negara

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah	270.298.703.420.368	244.782.699.177.355

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
2	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	190.937.201.909	175.364.905.818
3	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	40.563.447.448.571	38.943.081.272.590
4	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	61.668.253.633	96.848.899.168
5	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	61.160.484.557.848	56.381.715.722.266
6	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang	201.608.457.712	175.580.216.090
7	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	11.999.749.589.291	10.304.029.877.417
8	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	27.846.305.423	23.091.645.136
	Jumlah	384.504.445.234.755	350.882.411.715.840

b. Beban Diskon Yang Menambah Beban Bunga

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara	1.174.277.689.000	1.253.965.527.000
2	Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara	4.742.722.587.195	4.282.154.684.200
3	Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	411.492.631.746	408.666.115.900
4	Beban Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	1.645.451.661.903	1.785.269.932.648
5	Beban Pembayaran Discount SPN Syariah	207.964.430.000	348.908.328.000
	Jumlah	8.181.908.999.844	8.078.964.587.748

Nilai beban bunga atas beban diskon termasuk beban diskon atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS). Adapun realisasi nilai beban diskon dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. Beban Bunga Instrumen Pinjaman

Beban Bunga Instrumen pinjaman Tahun 2022 sebesar **Rp16.707.191.146.480** mengalami kenaikan sebesar **Rp5.472.214.887.632** atau naik **48,71%** dari Tahun 2021 sebesar **Rp11.234.976.258.848**. Hal tersebut terjadi karena penarikan pinjaman yang lebih tinggi pada Tahun 2022 dan adanya tambahan Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman dari *commitment fee* dan dari *Mark Up*. Rincian beban bunga instrumen pinjaman adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	568.866.466.256	518.422.315.598
2	Beban Bunga Pinjaman Program	7.817.228.859.548	4.811.598.429.632
3	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	227.975.739.623	104.820.278.826
4	Beban Bunga Pinjaman Proyek	6.138.570.178.738	4.894.309.013.874
5	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	1.954.264.493.850	906.015.722.468
6	Pengembalian Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	-	(510.853.238)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
7	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	285.408.465	321.351.688
	Jumlah	16.707.191.146.480	11.234.976.258.848

Terdapat tambahan Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman sebesar Rp160.112.464.704 pada Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman berasal dari *commitment fee* dan dari *mark up* pada Tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	9.810.121.334	-
	Beban Biaya/kewajiban lainnya dari <i>Commitment Fee</i>	9.810.121.334	-
2	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	150.302.343.370	-
	Beban Biaya/kewajiban lainnya dari <i>Commitment Fee</i>	46.659.982.582	-
	Beban Biaya/kewajiban lainnya dari <i>Mark Up</i>	103.642.360.788	-

Beban Subsidi

E.2.2.7. Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp253.662.415.148.483 dan Rp242.070.150.217.497. Beban subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.592.264.930.986 atau naik 4,79% bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Penurunan beban subsidi diantaranya terjadi karena penurunan pada jenis subsidi Bunga Kredit Program Lainnya.

Pada Beban Subsidi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp253.662.415.148.483 terdapat Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp88.778.032.672. Beban Subsidi Estimasi sampai dengan 31 Desember 2022 tersebut terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Keuangan. Masing-masing beban subsidi estimasi sebesar Rp88.343.565.059 pada Kementerian Keuangan dan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp434.467.613.

Beban Subsidi berasal pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp253.662.415.148.483 dirinci jenis subsidi sebagai berikut:

Jenis Subsidi/PSO	TA 2022	TA 2021
Minyak Solar	8.794.981.039.646	7.794.803.126.418
Minyak Tanah	5.266.109.914.526	2.482.117.197.483
Elpiji	89.984.283.902.254	70.279.354.484.325
Listrik	58.831.960.181.037	49.796.948.584.939
Pupuk	40.109.471.670.438	27.224.636.429.433

Jenis Subsidi/PSO	TA 2022	TA 2021
PPh-DTP	7.436.169.902.935	11.818.114.299.858
PT KAI	3.221.224.017.339	3.527.359.955.112
PT PELNI	2.217.997.267.098	2.283.121.938.462
PSO Lainnya	168.293.494.000	166.151.740.000
Bantuan Uang Muka Perumahan	919.140.000.000	714.894.000.000
Bunga KPR	2.563.079.496.205	2.320.932.407.063
Bunga KKP dan Energi	-	308.106
Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	-	9.293.521.004
Bunga Kredit Program Lainnya	1.237.435.466	18.059.012.949.129
Kredit Resi Gudang	12.388.510	466.936.731
Beban Subsidi – Estimasi	88.778.032.672	126.044.517.179
Listrik - Penanganan Pandemi COVID-19	-	8.081.350.891.677
Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19	29.827.547.271.599	8.320.885.789.744
PPh-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	77.997.660.000	6.150.008.959.981
BM-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19		324.058.608.997
Bunga/Margin Prog PEN-Penanganan Pandemi Covid-19	155.176.756.597	7.610.876.590.074
Imbal Jasa Penjaminan Prog PEN - Penanganan Pandemi COVID-19	2.233.941.029.296	3.026.032.450.245
PPN-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	1.223.919.843.850	6.424.264.010.256
PPnBM DTP	541.093.845.015	5.529.420.521.281
Jumlah	253.662.415.148.483	242.070.150.217.497

Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp88.778.032.672 terdiri dari beban Beban Subsidi Estimasi-Bunga Air Bersih-Ditjen Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp434.467.613 dan Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya-Kementerian Keuangan sebesar Rp88.343.565.059.

Beban Subsidi berasal pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) sebesar **Rp253.662.415.148.483** dirinci jenis menurut Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

No	Kementerian Negara/Lembaga	TA 2022	TA 2021
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.483.891.399.284	3.048.954.318.499
2	BUMN	-	2.112.302.965.780
3	Koperasi dan UKM	29.827.547.271.599	26.412.521.888.533
4	Perhubungan	5.439.221.284.437	5.810.481.893.574
5	Perindustrian	-	324.058.608.997
6	Perdagangan	12.388.510	-
7	Komunikasi dan Informatika	168.293.494.000	166.151.740.000
8	Pertanian	40.109.471.670.438	27.224.636.429.433
9	Keuangan	174.633.977.640.215	176.971.042.372.681
	Jumlah	253.662.415.148.483	242.070.150.217.497

Beban Subsidi sampai dengan Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Beban Subsidi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan Tahun 2022 sebesar **Rp3.483.891.399.284**. Beban Subsidi dimaksud terdiri dari:

Uraian Jenis Beban	TA 2022	TA 2021
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	1.237.435.466	2.015.046.340
Beban Subsidi - Estimasi	434.467.613	11.112.865.096
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	919.140.000.000	714.998.000.000
<i>Pengembalian Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan</i>	-	(104.000.000)
Beban Subsidi Bunga KPR	2.563.079.496.205	2.320.963.280.481
<i>Pengembalian Beban Subsidi Bunga KPR</i>	-	(30.873.418)
Jumlah	3.483.891.399.284	3.048.954.318.499

- a. Pada Satker Ditjen Cipta Karya Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya sebesar Rp1.237.435.466 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	PDAM					
		Kota Banjarmasin	Kota Denpasar	Kota Palopo	Kab. Cilacap	Giri Menang	Kab. Banyumas
1	Januari	50.147.059	27.109.674	23.535.549	15.135.014	44.257.102	21.817.274
2	Februari	45.294.118	24.486.156	21.257.915	12.564.917	39.974.157	19.171.025
3	Maret	50.147.059	27.109.673	23.535.549	13.911.159	44.257.102	20.636.932
4	April	24.264.706	26.235.167	22.776.338	13.462.412	42.829.454	19.399.478
5	Mei	25.073.529	27.109.673	23.535.549	13.911.159	44.257.102	19.456.591
6	Juni	24.264.706	26.089.417	22.776.338	13.462.412	42.115.629	18.257.212
7	Juli	25.073.529	22.591.394	20.022.299	13.870.363	33.192.826	18.276.250
8	Agustus	25.073.529	22.591.394	19.346.672	12.646.508	33.192.826	17.933.570
TOTAL		269.338.235	203.322.548	176.786.209	108.963.944	324.076.198	154.948.332

Beban Subsidi – Estimasi sebesar Rp434.467.613 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	PDAM					
		Kota Banjarmasin	Kota Denpasar	Kota Palopo	Kab. Cilacap	Giri Menang	Kab. Banyumas
1	September	24.264.706	21.862.640	18.722.588	12.238.556	32.122.090	16.543.814
2	Oktober	1.617.647	22.591.394	19.346.674	12.646.508	33.192.826	16.505.738
3	November	-	21.862.640	18.722.588	12.238.556	32.122.090	15.401.548
4	Desember	-	22.445.643	19.211.549	12.646.508	32.835.914	15.325.396
TOTAL		25.882.353	88.762.317	76.003.399	49.770.128	130.272.920	63.776.496

- b. Pada Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Bunga Kredit Perumahan sebesar Rp3.482.053.222.859 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021
1	Beban Subsidi Bunga Kredit Perumahan	2.563.079.496.205	2.333.672.707.269
2	Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	919.140.000.000	714.894.000.000

No	URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021
3	Beban Subsidi - Estimasi	-	10.287.598.952
	Jumlah	3.482.219.496.205	3.058.854.306.221

2. Kementerian BUMN

Jumlah Beban Subsidi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.112.302.965.780.

3. Kementerian Koperasi dan UKM

Jumlah Beban Subsidi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp29.827.547.271.599 dan Rp26.412.521.888.533. Beban subsidi per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.827.547.271.599 merupakan realisasi pembayaran subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19 pada satker Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM.

4. Kementerian Perhubungan

Jumlah Beban Subsidi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.439.221.284.437 dan Rp5.810.481.893.574. Beban subsidi diakui pada saat resume tagihan telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN dan/atau timbulnya kewajiban berdasarkan hasil perhitungan dan rekonsiliasi dengan unit teknis, dan verifikasi oleh KPA BUN. Rincian beban subsidi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021
PSO Perkeretaapian	3.221.224.017.339	3.527.359.955.112
PSO Perhubungan Laut	2.217.997.267.098	2.283.121.938.462
Jumlah	5.439.221.284.437	5.810.481.893.574

Terdapat perbedaan nilai saldo Beban Subsidi dengan realisasi Belanja Subsidi yang diakibatkan adanya pembayaran atas utang subsidi tahun anggaran yang lalu, dan adanya nilai kekurangan atas pembayaran berdasarkan verifikasi atas pelaksanaan PSO namun belum dilakukan pembayaran kepada operator.

5. Kementerian Perindustrian

Jumlah Beban Subsidi pada Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp324.058.608.997.

6. Kementerian Perdagangan

Jumlah Beban Subsidi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.388.510 dan Rp0. Beban subsidi pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp12.388.510 dikarenakan pada tahun 2021 Kuasa Pengguna Anggaran masih berada pada Dit. Sistem Manajemen Investasi, Kementerian Keuangan, sedangkan pada tahun 2022 dialihkan ke Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi

Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Beban subsidi yang tercatat merupakan hasil koreksi penyajian beban atas pengakuan utang subsidi kredit resi gudang periode sebelum TA 2022 yang ditagihkan dan diverifikasi di TA 2022.

7. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jumlah Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp168.293.494.000 dan Rp166.151.740.000. Beban Operasional pada Bagian Anggaran 999.07 (Beban Subsidi) Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa Beban Subsidi yang digunakan untuk pembayaran produk dan layanan publik untuk informasi publik bidang pers. Beban subsidi yang tercatat merupakan tagihan PSO LKBN ANTARA yang telah dibayarkan serta tagihan yang telah dilakukan verifikasi sesuai dengan Berita Acara Verifikasi untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023.

Perbandingan jumlah Beban Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, dalam kerangka wawasan kebangsaan (*educating, enlightening, empowering, nationalism/3E+1N*):

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)	
			Jumlah	%
Beban Operasional				
Beban Subsidi	168.293.494.000	166.151.740.000	2.141.754.000	1,29
Total Beban Operasional	168.293.494.000	166.151.740.000	2.141.754.000	1,29

Berdasarkan tabel di atas, Beban Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp168.293.494.000 dan Rp166.151.740.000. Jumlah Beban Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp2.141.754.000 atau 1,29%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan volume realisasi produk, adanya perubahan beban distribusi produk yang menyebabkan kenaikan pada beberapa harga satuan produk, serta adanya produk baru yaitu podcast.

Rincian per produk atas Beban Subsidi PSO LKBN ANTARA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp168.293.494.000 adalah sebagai berikut:

Produk	Total Produk	Harga	Jumlah
Teks Hardnews	145.190		109.542.120.000,00
Periode Jan-Apr	49.095	728.000,00	35.741.160.000,00
Periode Mei-Des	96.095	768.000,00	73.800.960.000,00
Teks Artikel	1.500		4.437.474.000,00
Periode Jan-Apr	381	3.297.000,00	1.256.157.000,00
Periode Mei-Des	1.119	2.843.000,00	3.181.317.000,00
Foto Hardnews	18.000		13.528.712.000,00
Periode Jan-Apr	5.356	753.000,00	4.033.068.000,00
Periode Mei-Des	12.644	751.000,00	9.495.644.000,00
TV Features	45		25.980.360.000,00
Periode Jan-Apr	12	584.429.000,00	7.013.148.000,00
Periode Mei-Des	33	574.764.000,00	18.967.212.000,00
TV Hardnews	7.500		4.976.897.000,00
Periode Jan-Apr	3.307	871.000,00	2.880.397.000,00
Periode Mei-Des	4.193	500.000,00	2.096.500.000,00
Infografis	150		7.733.290.000,00
Periode Jan-Apr	58	54.487.000,00	3.160.246.000,00
Periode Mei-Des	92	49.707.000,00	4.573.044.000,00
Photo Story	40		816.416.000,00
Periode Jan-Apr	14	23.741.000,00	332.374.000,00
Periode Mei-Des	26	18.617.000,00	484.042.000,00
Podcast	15		1.278.225.000,00
Periode Jan-Apr	5	85.137.000,00	425.685.000,00
Periode Mei-Des	10	85.254.000,00	852.540.000,00
Jumlah			168.293.494.000,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Produk Berita Teks Hardnews sebanyak 145.190 produk dengan nilai sebesar Rp109.542.120.000 berupa berita langsung atau berita lempang yang memuat fakta atau pernyataan aktual hingga perkembangan terkini atas isu tertentu yang memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, dalam kerangka wawasan kebangsaan (educating, enlightening empowering, nasionalism/3E+ IN).
- Produk Berita Teks Artikel sebanyak 1.500 produk dengan nilai sebesar Rp4.437.474.000 berupa berita tertulis dalam bentuk tulisan faktual yang memuat analisis, penggambaran latar belakang dan argumentasi/opini penulis dan tulisan kreatif hasil reportase atas isu aktual atau bersifat *human interest* liputan mendalam, profil, dan news feature.
- Produk Berita Foto sebanyak 18.000 produk dengan nilai sebesar Rp13.528.712.000 berupa berita gambar/visual yang memuat fakta aktual, disertai keterangan tertulis atas gambar dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (educating, enlightening empowering, nasionalism/3E+ IN).
- Produk Berita TV berupa program audio visual yang digunakan untuk kepentingan yang lebih luas yaitu mendistribusikan program dan kegiatan baik dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta permintaan dan kebutuhan stasiun TV dan mitra dalam bentuk:
 - Produk Berita TV Features sebanyak 45 produk dengan nilai sebesar Rp25.980.360.000 berupa tayangan dalam bentuk audio visual yang memuat fakta dan memiliki daya tarik insani (human interest), tak terikat waktu

- (timeless), dilengkapi dengan motion grafis, dan/atau animasi dengan durasi paling kurang 24 menit terbagi dalam 3 (tiga) segmen dengan memuat 5W+1H, dan memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (educating, enlightening empowering, nasionalism/3E+ IN).
- Produk Berita TV Hardnews sebanyak 7.500 produk dengan nilai sebesar Rp4.976.897.000 berupa berita lempang atau berita ringan dalam bentuk audio visual yang memuat fakta atau pernyataan aktual mengenai peristiwa terkini dengan durasi minimal 1 (satu) menit dan memuat 5W+1H, memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (educating, enlightening empowering, nasionalism/3E+ IN).
 - e. Produk Infografis sebanyak 150 produk dengan nilai sebesar Rp7.733.290.000 berupa produk berita yang menampilkan visualisasi data, fakta, pengetahuan, atau penjelasan atas isu tertentu sehingga mudah dipahami oleh pembaca dengan memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (*educating, enlightening empowering, nasionalism/ 3E+IN*).
 - f. Produk Photo Story sebanyak 40 produk dengan nilai sebesar Rp816.416.000 berupa rangkaian gambar/visual berisi cerita atas fakta yang tak terikat waktu (timeless), disertai narasi/tulisan yang menceritakan rangkaian isi foto yang mengandung human interest dengan memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (educating, enlightening empowering, nasionalism/ 3E+IN).
 - g. Produk Podcast sebanyak 15 produk dengan nilai sebesar Rp1.278.225.000 berupa tayangan khas audio visual berupa perbincangan topik aktual maupun ringan dengan narasumber kompeten dipandu oleh presenter/host durasi sekurang-kurangnya 24 menit dengan spesifikasi memuat 5W+1H, mengandung isu prioritas/strategi, memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (educating, enlightening empowering, nasionalism/ 3E+IN).

8. Kementerian Pertanian

Jumlah Beban Subsidi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp40.109.471.670.438 dan Rp27.224.636.429.433. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada Produsen Pupuk untuk disalurkan kepada Petani. Beban subsidi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.884.835.241.005 atau naik 47,33% dari Tahun 2021.

Beban subsidi sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp40.109.471.670.438 berada pada Eselon I Ditjen PSP berupa penyaluran subsidi pupuk sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Penyaluran subsidi pupuk senilai Rp23.740.974.364.742 sebagai berikut:

No	Produsen	Pagu Kontrak	Realisasi Reguler
1	Pupuk Sriwidjaja Palembang	6.080.670.432.630	5.707.832.901.942
2	Pupuk Kaltim	1.621.723.770.630	1.495.758.273.447
3	Pupuk Kujang	2.665.176.957.915	2.517.536.235.884

No	Produsen	Pagu Kontrak	Realisasi Reguler
4	Petrokimia Gresik	12.719.626.715.934	12.016.008.907.820
5	Pupuk Iskandar Muda	2.171.793.680.572	2.003.838.045.649
	TOTAL	25.258.991.557.681	23.740.974.364.742

- Jumlah tagihan atas penyaluran pupuk bersubsidi yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp739.597.961.996, berdasarkan asersi manajemen hasil verifikasi KPA belanja subsidi pupuk tahun 2022.

No	Produsen	Jumlah Tagihan Yang Belum Dibayar
1	Pupuk Sriwidjaja Palembang	138.142.676.857
2	Pupuk Kaltim	84.413.650.132
3	Pupuk Kujang	406.189.475.673
4	Petrokimia Gresik	39.364.587.643
5	Pupuk Iskandar Muda	71.487.571.691
	TOTAL	739.597.961.996

- Kurang Bayar TA. 2022 koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan senilai Rp16.569.331.365.264 yang sebelumnya dicatat sebesar Rp739.597.961.996. Sehingga dilakukan koreksi tambah utang dan beban senilai Rp15.628.899.343.699 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Produsen	Jumlah Kurang Bayar TA. 2022
1	PT Petrokimia Gresik	12.891.483.416.860,70
2	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.371.240.660.878,76
3	PT Pupuk Kalimantan Timur	512.286.647.669,37
4	PT Pupuk Kujang	680.751.365.652,99
5	PT Pupuk Iskandar Muda	173.137.252.637,86
	JUMLAH	15.628.899.343.699,70

9. Kementerian Keuangan

Beban Subsidi Kementerian Keuangan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar **Rp174.633.977.640.215** dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN KELOMPOK BEBAN	TA 2022	TA 2021
Beban Subsidi Untuk Energi	162.877.335.037.463	138.434.574.284.842
Beban Subsidi Untuk Pajak DTP	9.279.181.251.800	29.921.807.791.376
Beban Subsidi Untuk Kredit Program	-	5.455.656.763.053
Beban Subsidi Untuk Imbal Jasa Penjaminan dan subsidi estimasi	2.322.284.594.355	3.140.964.102.328
Beban Subsidi Margin Program PEN - Penanganan Pandemi COVID-19	155.176.756.597	18.039.431.082
Jumlah	174.633.977.640.215	176.971.042.372.681

- Jumlah Beban Subsidi Energi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp162.877.335.037.463. Jumlah Beban Subsidi dimaksud merupakan Beban

Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg atas tagihan Tahun Anggaran 2021 yang telah diverifikasi sebesar Rp104.045.374.856.426 serta beban Subsidi Listrik Tahun 2022 yang telah diverifikasi sebesar Rp58.831.960.181.037.

- b. Jumlah Beban Subsidi Pajak DTP sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.279.181.251.800. Beban subsidi ini terdiri atas beban subsidi PPh DTP regular sebesar Rp7.436.169.902.935 yang terdiri dari PPh DTP Panas Bumi Periode Triwulan I, II, dan III tahun 2022 yang masing-masing sebesar Rp737.406.273.117, Rp836.114.410.880, dan Rp804.403.654.188, PPh DTP SBN valas Periode Januari s.d. Desember 2022 sebesar Rp5.055.968.143.699. Kemudian, PPh DTP Penghapusan Utang PDAM sebesar Rp2.277.421.051.

Selain itu, ada juga beban subsidi terkait Program PC-PEN sebesar Rp1.843.011.348.865 yang terdiri atas: PPh DTP Final WP P3-TGAI sebesar Rp77.997.660.000, PPN DTP Non-Vaksin sebesar Rp413.607.504.208, PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun sebesar Rp683.761.853.074, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp541.093.845.015, dan PPN DTP Vaksin sebesar Rp126.550.486.568.

- c. Beban Subsidi Kredit Program sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0.
- d. Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.322.284.594.355 yang terdiri dari Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp2.233.941.029.296. Beban ini merupakan belanja subsidi IJP periode Januari s.d. September 2022 dan Beban Subsidi IJP Estimasi Periode Desember 2022 yang akan dibayarkan setelah 31 Desember 2022 sebesar Rp88.343.565.059.
- e. Beban Subsidi Bunga/Subsidi Margin Pinjaman Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp155.176.756.597 yang merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode Tahun 2022. Jumlah Beban Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Tahun 2022 sama dengan realisasi Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Tahun 2022.

Beban Subsidi Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 dapat diuraikan per Eselon I sebagai berikut:

No	Eselon I Kemenkeu	TA 2022	TA 2021
1	DJA	162.877.335.037.463	138.434.574.284.842
2	DJP	9.279.181.251.800	29.921.807.791.376
3	DJPPR	2.322.284.594.355	3.140.964.102.328
4	DJPb	-	5.455.656.763.053
5	DJPK	155.176.756.597	18.039.431.082
	Jumlah	174.633.977.640.215	176.971.042.372.681

Direktorat Jenderal Anggaran :**Beban Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg atas tagihan Tahun Anggaran 2021 yang telah diverifikasi, terdiri atas:****104.045.374.856.426**

▪ Penyaluran Subsidi Minyak Solar 2022 kepada PT Pertamina Patra Niaga	7.763.375.662.425
▪ Penyaluran Subsidi Minyak Solar 2022 kepada PT AKR Corporindo, Tbk	63.635.021.823
▪ Penyaluran Subsidi Minyak Tanah 2022 kepada PT Pertamina Patra Niaga (termasuk PPN)	4.631.920.340.241
▪ Penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 Kg 2022 kepada PT Pertamina Patra Niaga (termasuk PPN)	85.345.997.493.746
▪ Kurang bayar Subsidi Minyak Solar 2022 kepada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan hasil audit BPK RI	960.636.296.967
▪ Kurang bayar Subsidi Minyak Solar 2022 kepada PT AKR Corporindo Tbk. berdasarkan hasil audit BPK RI	7.334.058.431
▪ Kurang bayar Subsidi Minyak Tanah 2022 kepada PT Pertamina Patra Niaga (termasuk PPN) berdasarkan hasil audit BPK RI	634.189.574.285
▪ Kurang Bayar Subsidi LPG Tabung 3 Kg 2022 kepada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan hasil audit BPK RI	4.638.286.408.508

Beban subsidi Listrik Tahun 2022 yang telah diverifikasi**58.831.960.181.037****Direktorat Jenderal Pajak**

Jumlah Beban hanya mencakup akun beban subsidi Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp9.279.181.251.800. Beban subsidi ini terdiri atas beban subsidi PPh DTP regular sebesar Rp7.436.169.902.935 yang terdiri dari PPh DTP Panas Bumi Periode Triwulan I, II, dan III tahun 2022 yang masing-masing sebesar Rp737.406.273.117, Rp836.114.410.880, dan Rp804.403.654.188, PPh DTP SBN valas Periode Januari s.d. Desember 2022 sebesar Rp5.055.968.143.699. Kemudian, PPh DTP Penghapusan Utang PDAM sebesar Rp2.277.421.051.

Selain itu, ada juga beban subsidi terkait Program PC-PEN sebesar Rp1.843.011.348.865 yang terdiri atas: PPh DTP Final WP P3-TGAI sebesar Rp77.997.660.000, PPN DTP Non-Vaksin sebesar Rp413.607.504.208, PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun sebesar Rp683.761.853.074, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp541.093.845.015, dan PPN DTP Vaksin sebesar Rp126.550.486.568.

Uraian	Beban Subsidi 2022	Beban Subsidi Tahun-Tahun Sebelumnya	Subsidi PPh DTP yang Telah Dibayarkan	Subsidi PPh DTP yang Belum Dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. PPh DTP Reguler	7.436.169.902.936	2.133.051.466.971	8.869.124.713.844	700.096.656.062
A. PPh DTP Panas Bumi	2.377.924.338.185	1.501.514.330.070	3.212.730.422.892	666.708.245.363
- Triwulan III 2019		308.444.080.204	308.444.080.204	-
- Triwulan III 2020		341.871.338.039	341.871.338.039	-
- Triwulan III 2021		266.585.004.649	266.585.004.649	-
- Triwulan IV 2021		584.613.907.178	584.613.907.178	-
- Triwulan I 2022	737.406.273.117		737.406.273.117	-
- Triwulan II 2022	836.114.410.880		836.114.410.880	-
- Triwulan III 2022	804.403.654.188		137.695.408.825	666.708.245.363
B. PPh DTP SBN Valas	5.055.968.143.699	631.502.833.485	5.654.082.566.485	33.388.410.699
- 1 Oktober s.d. 11 Desember 2020		131.451.145.411	131.451.145.411	-
- 14 Desember s.d. 31 Desember 2020		105.329.750.000	105.329.750.000	-
- November 2021		187.367.340.574	187.367.340.574	-
- Desember 2021		207.354.597.500	207.354.597.500	-
- Januari s.d. Juni 2022	2.479.082.817.516		2.479.082.817.516	-
- Juli s.d. September 2022	1.800.792.428.425		1.800.792.428.425	-
- Oktober s.d. November 2022	543.745.781.280		543.745.781.280	-
- Desember 2022	232.347.116.478		198.958.705.779	33.388.410.699
C. PPh DTP Penghapusan Utang PDAM	2.277.421.051	-	2.277.421.051	-
D. PPh DTP Recurrent Cost SPAN	-	34.303.416	34.303.416	-
- 2019		18.982.678	18.982.678	-
- 2020		15.320.738	15.320.738	-
II. PPh DTP PC-PEN	1.843.011.348.865	5.697.521.282.876	6.866.249.942.876	674.282.688.865
A. PPh DTP Pasal 21	-	2.108.854.514.191	2.108.854.514.191	-
- April s.d. November 2020		792.864.335.708	792.864.335.708	-
- Desember 2020		424.567.954.874	424.567.954.874	-
- Januari s.d. November 2021		891.422.223.609	891.422.223.609	-
B. PPh DTP Final WP P3-TGAI	77.997.660.000	131.540.233.632	209.537.893.632	-
- April s.d. November 2020		19.431.554.292	19.431.554.292	-
- Desember 2020		1.445.719.340	1.445.719.340	-
- Januari s.d. November 2021		110.662.900.000	110.662.900.000	-
- Januari s.d. Desember 2022	77.997.660.000		77.997.660.000	-
C. PPh DTP Final atas UMKM	-	177.672.269.278	177.672.269.278	-
- April s.d. November 2020		26.397.094.629	26.397.094.629	-
- Desember 2020		151.137.891.221	151.137.891.221	-
- Januari s.d. November 2021		137.283.428	137.283.428	-
D. PPh DTP Non Vaksin	413.607.504.208	1.380.761.007.818	1.670.949.922.818	123.418.589.208
- April s.d. November 2020		559.813.786.205	559.813.786.205	-
- Desember 2020		602.029.896.860	602.029.896.860	-
- Januari s.d. November 2021		218.917.324.753	218.917.324.753	-
- Januari s.d. November 2022	413.607.504.208		290.188.915.000	123.418.589.208
E. PPh DTP Rumah Tapak & Rumah Susuk	683.761.853.074	1.270.347.283.275	1.524.165.753.275	429.943.383.074
- Maret s.d. November 2021		1.270.347.283.275	1.270.347.283.275	-
- Januari s.d. September 2022	683.761.853.074		253.818.470.000	429.943.383.074
F. PPh DTP Kendaraan Bermotor	541.093.845.015	613.136.098.016	1.111.299.638.016	42.930.305.015
- Maret s.d. November 2021		613.136.098.016	613.136.098.016	-
- Januari s.d. September 2022	541.093.845.015		498.163.540.000	42.930.305.015
G. PPh DTP Sewa Outlet	-	14.796.111.590	14.796.111.590	-
- Agustus s.d. November 2021		14.796.111.590	14.796.111.590	-
H. PPh DTP Kertas Koran	-	413.765.076	413.765.076	-
- April s.d. November 2020		302.358.976	302.358.976	-
- Desember 2020		111.406.100	111.406.100	-
G. PPh DTP Vaksin	126.550.486.568	-	48.560.075.000	77.990.411.568
- Januari s.d. November 2022	126.550.486.568		48.560.075.000	77.990.411.568
TOTAL	9.279.181.251.800	7.830.572.749.847	15.735.374.656.720	1.374.379.349.927

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Jumlah beban dari kegiatan operasional adalah Rp2.322.284.594.355 yang terdiri dari:

1. Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp2.233.941.029.296. Beban ini merupakan belanja subsidi IJP periode Januari s.d. November 2022;
2. Beban Subsidi – Estimasi sebesar Rp88.343.565.059. Yang merupakan Beban Subsidi IJP Estimasi Periode Desember 2022 yang akan dibayarkan setelah 31 Desember 2022.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Beban operasional pada laporan keuangan ini merupakan Beban Subsidi yang diakui berdasarkan Berita Acara Verifikasi (BAV) yang diterbitkan pada Tahun 2022 (tidak termasuk BAV subsequent event LK Tahun 2021) atas tagihan subsidi periode Januari s.d. Desember 2022 dan SP2D atas tagihan berupa SPP/SPM bunga program PEN dan Non-

PEN yang diajukan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2022. Beban Subsidi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, Beban Subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.455.656.763.053, terjadi Penurunan signifikan beban subsidi sebesar (Rp5.455.656.763.053) atau minus 100% disebabkan oleh antara lain:

- Sudah tidak ada penyaluran subsidi bunga program PEN dalam rangka penanganan dampak covid-19 untuk tahun 2022.
- Tagihan yang diajukan Bank bank penyalur telah diterbitkan Berita Acara Verifikasi (BAV) proses penerbitan SPP/SPM/SP2D telah selesai diterbitkan.
- Nilai BAV periode penagihan subsidi yang ditagihkan oleh bank penyalur merupakan tagihan periode TAYL sehingga nilai tersebut tidak tercatat di LO namun pada koreksi di LPE.

Jika dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran, beban subsidi pada Laporan Operasional bernilai lebih kecil hal ini disebabkan antara lain:

- Basis akuntansi yang diterapkan pada LO adalah basis akrual sedangkan pada LRA basis kas
- Nilai BAV periode penagihan subsidi yang ditagihkan oleh bank penyalur merupakan tagihan periode TAYL sehingga nilai tersebut tidak tercatat di LO namun pada koreksi di LPE.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Beban Subsidi Bunga/Bunga Margin Pinjaman Daerah Tahun 2022 (akun 554117) merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode Tahun 2022. Jumlah Beban Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Tahun 2022 sama dengan realisasi Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Tahun 2022, yaitu sebesar Rp155.176.756.597.

Beban Hibah

E.2.2.8. Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.803.272.496.643 dan Rp4.319.001.994.301. Beban Hibah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.484.270.502.342 atau naik 34,37% bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Kenaikan beban hibah salah satunya terjadi pada hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp1.468.644.379.898 atau naik 34,26%. Beban Hibah sebesar Rp5.803.272.496.643 tersebut berasal dari BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	33.829.048.077	22.003.461.212
2	Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	13.676.743.266	10.021.136.406
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	5.755.516.300.341	4.286.871.920.443
4	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya terkait Pendapatan/Belanja Hibah	250.404.959	105.476.240
Jumlah		5.803.272.496.643	4.319.001.994.301

Beban hibah sebesar Rp47.505.791.343 merupakan pemberian hibah kepada pemerintah/lembaga asing yang dikelola oleh LDKPI (Satker 985252) yang terdiri atas realisasi belanja hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri sebesar Rp33.829.048.077 dan belanja hibah Kepada Organisasi Internasional Rp13.676.743.266.

Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp5.755.516.300.341 bersumber dari belanja hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (Satker 985251) sebesar Rp4.277.401.271.908 dan belanja hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni (Satker 985261) sebesar Rp1.478.115.028.433. Nilai Beban Hibah tersebut seluruhnya merupakan nilai Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah sesuai nilai SPM/SP2D dan SP3 yang telah diterbitkan selama periode tahun 2022.

Beban pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah sebesar Rp250.404.959 merupakan beban terkait pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*Banking Commission*) kepada MUFG Bank Tokyo.

E.2.2.9. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp819.069.477.047.347 dan Rp773.171.878.446.225. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp45.897.598.601.122 atau naik 5,94% bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Kenaikan tersebut antara lain terjadi pada Beban Transfer Dana Perimbangan. Beban Transfer berasal dari BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Transfer Dana Perimbangan	722.460.676.503.692	667.199.007.999.350
2	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	20.436.263.570.000	19.482.919.184.000
3	Beban Transfer Dana Keistimewaan DIY	1.272.725.809.224	1.259.286.977.483
5	Beban Transfer Dana DID	6.993.672.774.000	13.464.278.795.000
6	Beban Transfer Dana Desa	67.906.138.390.431	71.766.385.490.392
Jumlah		819.069.477.047.347	773.171.878.446.225

Beban Dana Perimbangan pada Tahun 2022 sebesar Rp722.460.676.503.692 tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp55.261.668.504.342 atau naik 8,28% bila dibandingkan dengan tahun 2021. Secara rinci Beban Dana Perimbangan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Dana Bagi Hasil (DBH)	174.605.073.491.304	111.238.343.331.670
2	Beban Dana Alokasi Umum (DAU)	378.000.000.000.000	377.791.390.288.000
3	Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.783.954.054.112	57.069.673.906.021
4	Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	115.071.648.958.276	121.099.600.473.659
Jumlah		722.460.676.503.692	667.199.007.999.350

Beban Dana Bagi Hasil (DBH)

Beban Transfer DBH merupakan kewajiban yang terutang dan telah terbayar sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar **Rp174.605.073.491.304**. Jika dibandingkan Beban DBH per 31 Desember 2021, secara nominal nilai Beban Transfer Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp63.366.730.159.634** atau sebesar **56,96%**. Naiknya jumlah beban tersebut disebabkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada tahun 2022 meningkat. Beban Transfer DBH secara terinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Transfer DBH Reguler	130.514.110.278.434	70.888.785.614.275
2	Pengakuan Beban atas Potensi KB dan LB DBH di tahun berjalan	44.090.963.212.870	40.349.557.717.395
Jumlah		174.605.073.491.304	111.238.343.331.670

Beban Transfer DBH Reguler untuk masa periode Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar **Rp130.514.110.278.434**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp59.625.324.664.159** atau sebesar **84,11%** dibandingkan Beban Transfer DBH per 31 Desember TA 2021 yang mencapai **Rp111.238.343.331.670**. Naiknya Beban Transfer DBH Reguler disebabkan Pagu alokasi reguler DBH TA 2022 lebih besar dibandingkan pagu alokasi DBH TA 2021. Rincian beban transfer DBH Reguler sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Transfer DBH Pajak Reguler	57.503.908.675.315	43.386.760.049.225
2	Beban Transfer DBH SDA Reguler	73.010.201.603.119	27.502.025.565.050
Jumlah		130.514.110.278.434	70.888.785.614.275

Beban DBH Pajak Reguler untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp57.503.908.675.315**. Nilai tersebut berasal dari kewajiban yang telah terbayar untuk masa periode sampai dengan 31 Desember TA 2022. Jika dibandingkan Beban Transfer DBH Pajak 31 Desember TA 2021, nilai Beban Transfer DBH Pajak per 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp14.117.148.626.090** atau sebesar **32,54%**. Beban Transfer DBH Pajak secara terinci tercantum pada tabel dibawah ini:

Uraian	TA 2022	TA 2021
Beban DBH PPh Pasal 21	30.203.313.996.061	24.818.867.274.000
Beban DBH PPh Pasal 25/29 OP	2.394.650.180.874	1.816.073.979.000
Beban DBH PBB Bagian Daerah	17.534.838.268.819	11.535.842.726.000
Beban DBH PBB Biaya Pemungutan	612.680.562.002	401.502.846.000
Beban DBH PBB Bagi Rata	2.360.543.625.694	1.483.060.485.000
Beban DBH Cukai Hasil Tembakau	4.397.882.041.865	3.331.412.739.225
Jumlah	57.503.908.675.315	43.386.760.049.225

Beban transfer DBH SDA Reguler per 31 Desember 2022 sebesar **Rp73.010.201.603.119**. Jika dibandingkan Beban Transfer DBH SDA per 31 Desember TA 2021, nilai Beban Transfer DBH SDA per 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp45.508.176.038.069** atau sebesar **165,47%**. Naiknya Beban Transfer DBH SDA Reguler

disebabkan Pagu alokasi DBH SDA TA 2022 lebih besar dibandingkan pagu alokasi DBH TA 2021. Beban Transfer DBH SDA secara terinci tercantum pada tabel dibawah ini:

Uraian	TA 2022	TA 2021
Beban DBH SDA Minyak Bumi 15%	9.253.930.649.425	5.879.751.736.000
Beban DBH SDA Minyak Bumi 0.5%	306.183.904.801	195.198.768.000
Beban DBH SDA Minyak Bumi Otsus	273.421.429.616	87.208.829.000
Beban DBH SDA Gas Bumi 30%	5.871.254.831.488	1.977.650.376.000
Beban DBH SDA Gas Bumi 0,5%	81.601.870.159	32.748.457.000
Beban DBH SDA Gas Bumi Otsus	1.303.879.777.471	16.943.381.000
Beban DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	1.016.893.926.799	304.555.881.000
Beban DBH SDA Minerba - Royalti	50.698.832.619.864	15.756.635.506.000
Beban DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	1.228.658.020.763	1.037.988.500.000
Beban DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	26.306.182.060	21.779.905.000
Beban DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	73.077.784.448	52.767.003.000
Beban DBH SDA Kehutanan - IIUPH	53.396.573.584	67.173.926.550
Beban DBH SDA Kehutanan - PSDH	993.114.594.119	869.041.781.702
Beban DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	725.086.773.478	628.267.143.798
Beban DBH SDA Perikanan	1.104.562.665.044	574.314.371.000
Jumlah	73.010.201.603.119	27.502.025.565.050

Penambah dan pengurang beban Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember TA 2022 sebesar **Rp44.090.963.212.870** dengan nilai penambah beban DBH atas Potensi/Estimasi KB sebesar Rp45.707.179.744.949 dan Nilai pengurang Beban Dana Bagi Hasil atas timbulnya estimasi Piutang DBH sebesar Rp1.616.216.532.079. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, penambah dan pengurang beban Dana Bagi Hasil Tahun 2022 meningkat sebesar Rp3.741.405.495.475 atau naik 9,27%. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan DBH TA 2022 meningkat sehingga potensi/estimasi Kurang Bayar pada TA 2022 lebih tinggi.

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Penambah Beban DBH atas potensi KB	45.707.179.744.949	40.407.016.887.624
2	Pengurang Beban DBH atas potensi LB	1.616.216.532.079	22.779.870.229
3	Pengurang Beban DBH atas Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	-	34.679.300.000
Jumlah		44.090.963.212.870	40.349.557.717.395

Beban Dana Alokasi Umum (DAU)

Beban Transfer DAU periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp378.000.000.000.000 dan Rp377.791.390.288.000. Beban DAU per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp208.609.712.000 atau 0,06% dari periode yang sama Tahun 2021. Kenaikan Beban DAU disebabkan karena meningkatnya pagu DAU TA 2022.

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp54.783.954.054.112 dan Rp57.069.673.906.021. Beban

transfer DAK Fisik Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.285.719.851.909 atau 4,01%.

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Beban DAK Non Fisik untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp115.071.648.958.276 dan Rp121.099.600.473.659. Beban transfer DAK Non Fisik Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.027.951.515.383 atau 4,98% bila dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan piutang selama Periode Tahun 2022, sehingga mengurangi besarnya beban DAK Nonfisik TA 2022. Rincian Beban DAK Nonfisik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Dana TPG ASND	46.500.658.749.728
Beban Dana TKG ASND	1.161.327.006.930
Beban Dana Tamsil Guru ASND	972.312.067.205
Beban Dana BOK	7.274.354.312.073
Beban Dana BOKB	2.022.020.818.083
Beban Dana Pelayanan Kepariwisata	115.693.698.499
Beban Dana BOP Museum & Taman Budaya	155.117.241.457
Beban Dana Pelayanan PPA	73.345.606.961
Beban Dana FPM	186.497.334.288
Beban Dana KPP	182.803.369.712
Beban Dana Bantuan BLPS	55.658.354.550
Beban Dana PK2UMK	208.293.097.654
Beban PK2SIKM	119.271.417.837
Beban Dana Pelayanan Adminduk	(35.356.539.552)
Beban Dana BOS	51.345.762.364.395
Beban Dana BOP PAUD	3.737.218.787.456
Beban Dana BOP Kesetaraan	996.671.271.000
Total Beban DAK Nonfisik	115.071.648.958.276

Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus pada Tahun 2022 sebesar **Rp20.436.263.570.000** merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode pada Tahun 2022. Beban Dana Otonomi Khusus mengalami kenaikan sebesar **Rp953.344.386.000** atau naik **4,89%** dibandingkan dengan tahun 2021. Beban Dana Otonomi Khusus pada laporan ini merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode Tahun 2022. Jumlah Beban Dana Otsus Tahun 2021 sama dengan jumlah realisasi Transfer Dana Otsus Tahun 2022.

Rincian Beban Dana Otonomi Khusus sebagaimana berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Dana Otonomi Khusus Prov Aceh	7.560.000.000.000	7.555.827.806.000
2	Beban Dana Otonomi Khusus Prov Papua	5.783.400.000.000	5.289.079.464.000
3	Beban Dana Otonomi Khusus Papua Barat	2.404.194.963.000	2.266.748.342.000

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
4	Beban Dana Tambahan Infrastruktur Prov Papua	2.721.600.000.000	2.622.758.143.000
5	Beban Dana Tambahan Infrastruktur Prov Papua Barat	1.967.068.607.000	1.748.505.429.000
Jumlah		20.436.263.570.000	19.482.919.184.000

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban DK DIY Tahun 2022 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Selanjutnya, jumlah Beban Transfer DK DIY Tahun 2022 sebesar **Rp1.272.725.809.224**. Jumlah Beban tersebut terdiri dari nilai SPM penyaluran Transfer DK DIY yang telah terbayarkan (telah diterbitkan SP2D) sampai dengan 31 Desember 2022. Selama periode Tahun 2022 tidak terdapat pengakuan lebih salur, adapun lebih salur Tahun 2021 sejumlah Rp60.713.022.517 telah diakui sebagai pengurang Beban DK DIY dalam Laporan Keuangan Tahunan TA 2021.

Dana Insentif Daerah (DID)

Beban DID untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp6.993.672.774.000** dan **Rp13.464.278.795.000**. Beban transfer DID TA 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp6.470.606.021.000** atau **48,06%**.

Beban DID Tahun Anggaran 2022 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2022. Jumlah Beban DID Tahun 2022 sama dengan realisasi DID Tahun 2022, yaitu sebesar **Rp6.993.672.774.000**. Hal ini dikarenakan semua SPM Transfer DID yang terbit pada periode tersebut telah terbayarkan (telah terbit semua SP2D nya).

Beban Dana Desa

Beban Dana Desa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar **Rp67.906.138.390.431** dan **Rp71.766.385.490.392**. Beban Transfer Dana Desa Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp3.860.247.099.961** atau **5,38%**.

E.2.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi*

Beban Penyusutan pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp28.515.372.568.357** dan **Rp32.022.203.116.217**. Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi atas Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp3.506.830.547.860** atau turun **10,95%** bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2022 dapat dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2022	TA 2021
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	1.348.040.230.088	1.599.099.500.281
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	150.176.901.927	125.355.688.033
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	27.017.155.436.342	30.297.747.927.903
Jumlah		28.515.372.568.357	32.022.203.116.217

- Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah (BA 999.03) pada Tahun 2022 yang sebesar **Rp1.348.040.230.088** tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp251.059.270.193** atau turun **15,70%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Nilai tersebut merupakan pembebanan penyusutan dan amortisasi aset kelolaan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan melalui sewa dan kerja sama periode tahunan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pembebanan Penyusutan Properti Investasi	1.329.552.037.466	-
2	Pembebanan Penyusutan atas Aset Kelolaan Nonklasifikasi Properti Investasi	18.488.192.622	1.599.099.500.281
Jumlah		1.348.040.230.088	1.599.099.500.281

- Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) pada Tahun 2022 yang sebesar **Rp150.176.901.927** tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp24.821.213.894** atau naik **19,80%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	BP Batam		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.728.809.755	1.765.323.008
	▪ Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	722.984.814	450.648.920
	▪ Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	113.402.903.732	88.969.958.098
	▪ Beban Penyusutan Irigasi	10.160.500	-
	▪ Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.301.026	7.301.026
2	Otoritas Jasa Keuangan		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	252.883.903	2.011.935.703
	▪ Beban Amortisasi Lisensi	4.961.173.892	4.961.173.895
3	SKK Migas		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	19.174.516.289	18.276.716.024
	▪ Beban Penyusutan Jaringan	1.609.050	1.609.050
	▪ Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	139.358.990	69.244.022
	▪ Beban Amortisasi Software	9.560.212.976	8.639.778.287
	▪ Beban Amortisasi Lisensi	214.987.000	202.000.000
Jumlah		150.176.901.927	125.355.688.033

- Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) pada Tahun 2022 yang sebesar **Rp27.017.155.436.342** tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp3.280.592.491.561** atau turun **10,83%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Transaksi Khusus tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban penyusutan aset eks pertamina	707.143.125.959	707.926.323.859
2	Beban penyusutan aset pada pengelola BMN Idle	489.208.550	460.080.857
3	Beban penyusutan aset pada PKP2B	703.347.938.509	984.002.745.313
4	Beban penyusutan aset KKKS pada PPBMN	305.932.219	28.599.015.220.127
5	Beban penyusutan aset KKKS pada SKK Migas	25.233.134.622.915	-
6	Beban penyusutan aset KKKS pada BPMA	366.569.450.444	-
7	Beban penyusutan aset pada pengelola aset lain-lain	6.165.157.746	6.343.557.747
Jumlah		27.017.155.436.342	30.297.747.927.903

E.2.2.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp14.826.408.996.259** dan **Rp92.734.242.481.030**. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp77.907.833.484.771** atau turun **84,01%** bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Penurunan terbesar terjadi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) salah satunya karena penambahan nilai piutang pada BLBI Tahun 2022 tidak sebesar piutang pada tahun 2021 sehingga beban penyisihan piutangnya turun jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Beban tersebut merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih – piutang jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2022	TA 2021
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	(295.013.403.881)	294.514.336.630
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	1.066.242.798.604	50.524.593.537
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	(51.507.567)	(737.185.087)
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	32.066.091	1.056.281.976
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	14.055.199.043.012	92.388.884.453.974
Jumlah		14.826.408.996.259	92.734.242.481.030

- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.03 sebesar minus **Rp295.013.403.881** merupakan beban penyisihan piutang tidak tertagih–piutang PNPB dan beban dana bergulir diragukan tertagih lainnya. Perhitungan Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir – Kementerian Negara/Lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam Bentuk Tagihan.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN 999.03 dapat dirinci berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	KPA Direktorat PNPB DJA (984501)	6.500.000.000	5.600.000.000
2	KPA BLU Set BPJT (984102)	(376.363.580.289)	230.851.476.628
3	KPA BLU LPMUKP (984848)	24.210.341.712	23.103.522.794
4	KPA Dit. SMI (961617)	50.639.834.696	34.959.337.208

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
5	KPA BLU BPD LH (955787)	-	-
	Jumlah	(295.013.403.881)	294.514.336.630

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) adalah sebagai berikut:

1. KPA Direktorat PNBPD DJA (984501)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada KPA Direktorat PNBPD DJA pada 2022 Rp6.500.000.000 sedangkan pada 2021 adalah sebesar Rp5.600.000.000. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.500.000.000 yang berasal dari Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas sebesar Rp6.500.000.000, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sesuai hasil restrukturisasi piutang Perum Perumnas, Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas yang jatuh tempo pada akhir tahun 2021 sebesar Rp7.500.000.000 dikategorikan ke dalam kualitas kurang lancar sehingga dialokasikan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10% atau Rp750.000.000 pada Laporan Keuangan TA 2021 (Audited). Pengalokasian penyisihan tersebut menimbulkan pengakuan beban penyisihan dengan nilai yang sama pada Laporan Keuangan TA2021 (Audited). Pada TA 2022, nilai beban penyisihan tersebut telah terakumulasi ke dalam nilai ekuitas awal.
- Sampai dengan akhir tahun 2021, Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas yang jatuh tempo pada akhir tahun 2021 sebesar Rp7.500.000.000 tersebut belum dilunasi sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019, kualitas piutangnyaditetapkan kembali menjadi kualitas macet (kualitas piutang sebelum adanya restrukturisasi) dan dialokasikan penyisihan sebesar 100% atau Rp7.500.000.000.
- Pengalokasian penyisihan tersebut menimbulkan pengakuan tambahan beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp6.750.000.000 yang merupakan tambahan alokasi beban penyisihan dari pengalokasian sebelumnya di TA 2021 sebesar Rp750.000.000.
- Pada tanggal 28 Desember 2022, atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020 dilakukan pembayaran sebagian sebesar Rp1.000.000.000. Sesuai proporsi pembayaran tersebut, pengakuan penyisihan dengan kualitas piutang macet yang diakui di awal Tahun Anggaran 2021 dikurangi sebesar Rp1.000.000.000.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020, reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat pengakuan Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.500.000.000 (berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-693/MK.02/2019 tanggal 23 September 2019) sehingga terdapat pengakuan beban penyisihan dengan kualitas piutang kurang lancar sebesar Rp750.000.000.

2. KPA Set BPJT (984102)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih untuk tahun 2022 dan Audited 2021 adalah masing-masing sebesar minus Rp376.363.580.289 dan Rp230.851.476.628. Pada tahun 2022 terdapat pembayaran sebesar Rp22.000.000.000 yang merupakan angsuran pelunasan pinjaman pokok dana bergulir BLU BP Set BPJT berdasarkan perjanjian perjanjian Penyelesaian Piutang Eks Satuan Kerja BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT dari PT Pemalang Batang Tol Road dan PT Pejagan Pemalang Tol Road sehingga beban penyisihan piutang bernilai negatif sebesar minus Rp376.363.580.289. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencadangkan investasi non permanen BLU yang tak tertagih dengan rincian sebagai berikut:

BUJT/Ruas Jalan Tol	Dana Bergulir Diragukan tertagih 2021	Beban Penyisihan	Dana Bergulir Diragukan terttagih 2022
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	177.572.865.231	-	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang - Batang	179.730.172.460	(161.957.155.214)	17.773.017.246
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	-	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	-	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972	(214.406.425.075)	21.600.713.897
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	-	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	-	694.700.739.153
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	-	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	-	645.432.549.442
PT. Citra Waspahutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	-	580.448.216.382
PT. MTD-CPP Expressway / Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	-	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	-	173.706.163.639
Jumlah	4.271.993.794.927	(376.363.580.289)	3.895.630.214.638

3. KPA BLU LPMUKP (984848)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih untuk 2022 dan Audited 2021 masing-masing sebesar Rp24.210.341.712 dan Rp23.103.522.794. Beban Penyisihan Piutang tak tertagih pada tahun 2022 sebesar Rp24.210.341.712 meningkat Rp1.106.818.918 atau 4,79% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp23.103.522.794, peningkatan tersebut antara lain karena bertambahnya tunggakan angsuran pokok dana bergulir sehingga mempengaruhi kualitas piutang dana bergulir dan menambah beban penyisihan piutang.

4. KPA Dit. SMI (961671)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih untuk pada Direktorat SMI sejumlah Rp50.639.834.696 berasal dari beban penyisihan piutang tak tertagih pada BLU BPDH dengan rincian sebagai berikut:

Kualitas	Per 31 Desember 2022					Per 31 Desember 2021	Beban Penyisihan Piutang TA 2022
1	2	3	4=(2-3)	5	6=(4*5)	7	8=(6-7)
	SALDO POKOK	NILAI JAMINAN	SALDO SETELAH JAMINAN	TARIF PENYISIHAN	AKM PENYISIHAN TAHUNAN	AKM PENYISIHAN TAHUNAN	TAHUNAN
LANCAR	1.076.114.329.420	249.016.936.585	827.097.392.836	0,005	4.135.486.964	5.032.881.254	-897.394.290
KURANG LANCAR	32.366.171.683	310.949.600	32.055.222.083	0,1	3.205.522.208	1.401.374.558	1.804.147.650
DIRAGUKAN	7.873.873.034	-	7.873.873.034	0,5	3.936.936.517	770.267.408	3.166.669.109
MACET	198.363.566.183	60.380.448.954	137.983.117.229	1	137.983.117.229	91.416.705.003	46.566.412.226
PEMBULATAN	-2	-	-2	0	-	-	-
JUMLAH	1.314.717.940.318	309.708.335.139	1.005.009.605.179		149.261.062.919	98.621.228.223	50.639.834.696

Pada BLU BPDH mulai tahun 2021, sesuai dengan rekomendasi BPK sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BA Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2020 pada UAKPA BUN BPDH yang disampaikan oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan kepada Direktur Utama BLU BPDH sebagai tembusan melalui ND-805/PB.6/2021, dilakukan perhitungan jaminan sebagai pengurang penyisihan piutang. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, Nilai perhitungan jaminan ini akan terus bertambah seiring dengan proses pendataan yang saat ini tengah dilakukan.

5. KPA BLU BPDH (955787)

Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih pada tahun 2022 sebesar Rp0. Nilai tersebut diperoleh akibat adanya reklasifikasi beban penyisihan piutang pokok tak tertagih ke koreksi lainnya atas adanya penerimaan pembayaran pokok yang diterima dari debitur sebesar Rp24.949.929.

- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (999.04) tahun 2022 sebesar **Rp1.066.242.798.604** mengalami kenaikan sebesar **Rp1.015.718.205.067** atau naik **2.010,34%** dari tahun 2021 sebesar **Rp50.524.593.537**.

Kenaikan signifikan pada beban penyisihan piutang - bagian lancar pemberian pinjaman dikarenakan adanya kenaikan kurs USD (semula Rp14.278 menjadi Rp15.592) pada pinjaman PT PANN dan PT AAF yang memiliki porsi piutang pokok yang besar

sehingga penyisihan piutangnya bernilai tinggi juga. PT PANN memiliki piutang pokok sebesar USD261.304.449,49 dengan penyisihan piutang –bagian lancar sebesar USD261.304.449,49. PT AAF memiliki piutang pokok sebesar USD15.414.370,31 dengan penyisihan piutang –bagian lancar sebesar USD15.414.370,31 .

Selain itu, kenaikan signifikan pada beban penyisihan piutang - bagian lancar pemberian pinjaman disebabkan adanya koreksi tagihan piutang negara PT. Merpati (dalam pailit) akibat adanya putusan pailit dari pengadilan) sesuai dengan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga. Sby Jo. Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 02 Juni 2022. Koreksi tagihan tersebut mengakibatkan tagihan yang belum jatuh tempo ditarik menjadi jatuh tempo sehingga penyisihan piutang - bagian lancar PT.Merpati (dalam pailit) menjadi tinggi. Kenaikan penyisihan piutang - bagian lancar PT.Merpati (dalam pailit) sebesar Rp357.040.079.289.

Kenaikan signifikan pada beban penyisihan piutang – bunga pemberian pinjaman dikarenakan adanya kenaikan kurs USD (semula Rp14.278 menjadi Rp15.592) pada pinjaman PT PANN yang memiliki porsi piutang bunga yang besar sehingga penyisihan piutangnya bernilai tinggi juga. PT PANN memiliki piutang bunga sebesar USD131.171.989,43 dengan penyisihan piutang - bunga sebesar USD131.171.989,43.

Selain itu, kenaikan signifikan pada beban penyisihan piutang - bunga pemberian pinjaman disebabkan adanya koreksi tagihan piutang negara PT. Merpati (dalam pailit) akibat adanya putusan pailit dari pengadilan. Koreksi tagihan tersebut mengakibatkan tagihan yang belum jatuh tempo ditarik menjadi jatuh tempo sehingga penyisihan piutang - bunga PT.Merpati (dalam pailit) menjadi menjadi tinggi. Kenaikan penyisihan piutang – piutang bunga PT Merpati (dalam pailit) sebesar Rp117.649.728.517.

Kenaikan signifikan pada beban penyisihan piutang - denda pemberian pinjaman disebabkan adanya koreksi tagihan piutang negara PT. Merpati (dalam pailit) akibat adanya putusan pailit dari pengadilan. Koreksi tersebut menyebabkan adanya penyesuaian terhadap perhitungan hari denda atas nilai tunggakan kewajiban pokok dan kewajiban lainnya yang dihitung dari jatuh tempo utang pokok/non pokok yang harus dibayar sampai dengan saat putusan pailit ditetapkan. Penyesuaian tersebut mengakibatkan denda PT. Merpati (dalam pailit) lebih besar sehingga penyisihan piutang - denda PT.Merpati (dalam pailit) menjadi menjadi tinggi. Kenaikan penyisihan piutang – piutang denda PT Merpati (dalam pailit) sebesar Rp389.681.490.

Rincian Beban Penyisihan Piutang pada BUN Pengelola Pemberian Pinjaman sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Penyisihan Piutang - Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	719.869.528.200	11.571.393.001
2	Beban Penyisihan Piutang - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman	366.105.887.990	74.223.648.259

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
3	Beban Penyisihan Piutang – Piutang Denda Pemberian Pinjaman	514.797.332	6.865.770
4	Beban Penyisihan Piutang - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	(9.481.780.407)	(25.042.362.341)
5	Beban Penyisihan Piutang - Aset Lainnya Kredit Program	(10.765.634.511)	(10.234.951.152)
Jumlah		1.066.242.798.604	50.524.593.537

- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (999.07) sebesar minus **Rp51.507.567** merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih Tahun 2022 sebesar minus **Rp51.507.567** terdapat pada Satker Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban penyisihan Piutang Tak Tertagih dari piutang subsidi -Kementerian BUMN	-	(635.402)
2	Beban Penyisihan piutang atas kelebihan pembayaran subsidi pupuk -Kementerian Pertanian	(51.507.567)	-
3	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas piutang karena kelebihan bayar subsidi lisitrik regular - Ditjen Anggaran	-	(736.549.685)
Jumlah		(51.507.567)	(737.185.087)

- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) sebesar minus **Rp32.066.091** merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban tersebut merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih – piutang jangka pendek. Beban penyisihan piutang terdapat pada:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Kementerian Pertanian	(558.039)	963.735.139
2	Kementerian Kominfo	61.314.529	-
3	MPP Kartu Prakerja	809.601	(3.583.097)
	Otoritas Jasa Keuangan	(29.500.000)	(1.549.776)
4	SKK Migas		97.679.710
Jumlah		32.066.091	1.056.281.976

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terdapat pada Kementerian Pertanian sebesar minus Rp558.039, MPPKP sebesar Rp809.601; Otoritas Jasa Keuangan sebesar minus Rp29.500.000, serta Ditjen PPI Kemenkominfo sebesar Rp61.314.529 yang merupakan penyisihan atas piutang kelebihan pembayaran dan pengakuan BO LPU Pos BA 999.08 dari hasil verifikasi.

Tata cara pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Pasal 4 (3) disebutkan bahwa selisih penurunan penyisihan piutang tidak

tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai pengurang (dikredit ke) beban penyisihan piutang tidak tertagih dan sebagai pengurang (didebet ke) penyisihan piutang tidak tertagih. Pasal 4 (4) menyebutkan bahwa dalam hal selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan beban penyisihan piutang tidak tertagih bersaldo negatif (kredit), disajikan di dalam Laporan Operasional sebagai beban negatif.

- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) sebesar **Rp14.055.199.043.012** dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Dana Pensiun & THT	658.311.314	731.286.766
2	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BLBI	11.884.286.072.567	91.077.973.138.281
3	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Satker KKKS	12.264.517.820	461.584.653
4	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Supersemar	404.210.537.686	53.216.439.853
5	Beban Penyisihan Piutang pada pengelola PNBP Migas	175.486.788.127	-
6	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Kas Negara	(317.680.941)	(2.701.705.549)
7	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BPLS	1.578.610.496.439	1.259.203.709.970
Jumlah		14.055.199.043.012	92.388.884.453.974

Beban Lain-lain

E.2.2.12. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp410.181.311.446.044** dan **Rp172.975.960.154.156**. Beban Lain-lain pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp237.205.351.291.888** atau naik **137,13%** bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Kenaikan signifikan terjadi pada beban lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi. Beban Lain-lain bila dirinci berdasarkan pengelola sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2022	TA 2021
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	8.754.397.169.969	14.311.664.270.980
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	363.060.552.806.547	125.603.094.911.781
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	38.562.371.803.632	33.260.165.939.872
999.99	Eliminasi Beban Lain-lain	(196.010.334.104)	(198.964.968.477)
Jumlah		410.181.311.446.044	172.975.960.154.156

• **Beban Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03)**

Beban Lain-lain pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah pada Tahun 2022 sebesar **Rp8.754.397.169.969** merupakan Beban Penyesuaian Nilai Investasi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar **Rp5.557.267.101.011** atau turun **38,83%** utamanya dikarenakan penurunan pada KPA Kementerian BUMN. Rincian Beban penyesuaian nilai investasi sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Penyesuaian nilai investasi UAIP	122.849.327.751	39.553.145.244
2	Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Kementerian BUMN	5.507.023.288.710	14.235.630.585.736
3	Beban Penyesuaian nilai investasi KPA DJKN	3.114.554.000.000	-
4	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Pemerintah Dit SMI	-	36.480.540.000
5	Beban Penyesuaian nilai investasi Badan Bank Tanah	9.970.553.508	-
Jumlah		8.754.397.169.969	14.311.664.270.980

Beban Penyesuaian nilai investasi UAIP (999244)

Beban Penyesuaian nilai investasi pada UAIP tahun 2022 sebesar **Rp122.849.327.751** dan tahun 2021 sebesar **Rp39.553.145.244**. Rincian Beban Penyesuaian Nilai Investasi UAIP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Institut Teknologi Bandung	117.907.872.951	39.553.145.244
2	BPJS Kesehatan	4.941.454.800	-
Jumlah		122.849.327.751	39.553.145.244

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Kementerian BUMN (986917)

Beban penyesuaian yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian BUMN senilai **Rp5.507.023.288.710** merupakan bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan. Beban Penyesuaian Nilai Investasi pada Kementerian BUMN terdiri dari :

1. Penyisihan investasi nonpermanen sebesar Rp6.005.717.500.
2. Bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan sebesar Rp5.501.017.571.210.

Rincian Penyisihan Investasi Non Permanen pada Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan Negara	Penyisihan Investasi TA 2022	Penyisihan Investasi TA 2021	Kenaikan/penurunan beban penyesuaian nilai investasi
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	14.762.404.302	8.756.686.802	6.005.717.500
2	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	17.500.000.000	17.500.000.000	-
Jumlah		32.262.404.302	26.256.686.802	6.005.717.500

Rincian Beban Penyesuaian Nilai Investasi PA Kementerian BUMN (986917) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	BUMN Persero	5.031.081.370.056	13.164.468.321.563
2	BUMN Perum	469.936.201.154	1.044.905.577.371
	Jumlah	5.501.017.571.210	14.209.373.898.934

Penurunan beban didominasi oleh penurunan beban penyesuaian nilai investasi di Persero yaitu sebesar Rp8.133.386.951.507 atau turun 61,78% dari periode Audited 2021, yang sebagian besar dikontribusikan oleh penurunan kerugian signifikan pada PT Utama Karya (Persero). Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga mencatatkan laba pada *Audited* 2022 setelah mengalami rugi signifikan di Audited 2021 pada masa pandemi Covid-19. Beban Perum juga mengalami penurunan/perbaikan sebesar 55,03% yang didukung oleh Perum LPPNPI yang mencatatkan laba pada *Audited* 2022 setelah mencatat kerugian pada *Audited* 2021.

Selanjutnya terhadap BUMN dengan ekuitas negatif yang membukukan rugi operasional tahun berjalan dalam Laporan Keuangan (sebagaimana tersaji dalam lampiran Laba Rugi Kementerian BUMN). Sesuai dengan PSAP 06 tentang Investasi Pemerintah paragraph 46 menyatakan selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah diungkapkan dalam CaLK. BUMN/Perusahaan Negara yang mengalami defisit ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 14 perusahaan hal ini mengalami perubahan dari posisi per 31 Desember 2021. Perubahan tersebut dikarenakan ada tambahan dua perusahaan yang mengalami defisit ekuitas yaitu PT Indah Karya (Persero) dan PT Semen Kupang (Persero) dan satu perusahaan yang berubah status semula BUMN menjadi minoritas yaitu PT Industri Nuklir Indonesia. Dari 14 BUMN yang mengalami defisit ekuitas terdapat lima BUMN dalam proses likuidasi. Adapun perkembangan perusahaan yang mengalami defisit ekuitas adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Ekuitas Atribusi Entitas Pengendali (Rp Juta)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2022
1	PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (dalam likuidasi)	(1.095.704)	(1.238.462)
2	PT Kertas Leces (Persero) (dalam pailit)	(722.649)	(722.649)
3	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (dalam pailit)	(6.773.311)	(1.920.826)
4	PT Iglas (Persero) (dalam likuidasi)	(1.338.345)	(1.378.913)
5	PT PANN (Persero)	(5.786.668)	(5.807.943)
6	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	(1.609.466)	(1.577.292)
7	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	(305.209)	(405.974)
8	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	(5.943.654)	(3.117.534)
9	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	(535.621)	(620.610)
10	PT ASABRI (Persero)	(5.240.850)	(1.579.441.)

No	Perusahaan	Ekuitas Atribusi Entitas Pengendali (Rp Juta)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2022
11	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	(65.885.939)	(23.357.142)
12	PT Barata Indonesia (Persero)	(1.027.869)	(1.124.318)
13	PT Indah Karya (Persero)	9.167	(4.200)
14	PT Semen Kupang (Persero)	30.734	(126.659)
15	PT Industri Nuklir Indonesia	(14.630)	0

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan laba yang sangat signifikan pada periode ini terutama diakibatkan dari dampak pengakuan pendapatan (*income*) dari restrukturisasi utang sebesar Rp62,37 Triliun sehingga berdampak langsung pada laba Garuda yaitu sebesar Rp55,61 Triliun pada periode ini. Selain itu adanya penambahan PMN sebesar Rp7,5 Triliun turut berdampak pada penurunan defisit ekuitas.

PT ASABRI (Persero) mencatatkan peningkatan laba yang cukup signifikan pada periode ini yang dipengaruhi dengan adanya pendapatan premi Unfunded Past Service Liability (UPSL) yang diperoleh berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-56/MK.02/2022 untuk program Tabungan Hari Tua sebesar Rp4,55 Triliun yang dibukukan sebagai pendapatan premi.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatatkan peningkatan pada ekuitas khususnya pos Tambahan Modal Disetor (dampak dari penerapan PSAK 38) karena adanya transaksi pengalihan aset dan liabilitas ke IFG Life pada bulan Juni 2022. Hal ini mengakibatkan penurunan yang cukup signifikan pada negatif ekuitas PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Badan Bank Tanah (986392)

Beban penyesuaian nilai investasi yang dibukukan KPA Badan Bank Tanah merupakan bagian pemerintah atas rugi tahun berjalan sebesar Rp9.970.553.508 pada tahun 2022. Defisit ini merupakan pendapatan Badan Bank Tanah sampai dengan periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp24.917.238.301 dikurangi beban administrasi dan umum sebesar Rp34.887.791.809.

• Beban Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA BUN 999.08)

Beban Lain-lain dari BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) sebesar **Rp363.060.552.806.547** mengalami kenaikan sebesar **Rp237.457.457.894.766** atau naik **189,05%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan ini terjadi salah satunya karena naiknya beban lain-lain Dana Kompensasi. Belanja Lain-lain pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Beban Cadangan Beras Pemerintah	3.711.471.783.128	5.368.899.195.443
2	Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat	131.714.188.176	151.383.967.923
3	Beban Lain-Lain Dana Kompensasi	340.739.237.539.248	89.500.206.085.120

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
4	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2.387.563.305.900
5	Beban Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	16.332.056.618.484	17.928.200.073.180
6	Beban Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	-	2.176.501.677.646
7	Beban Lain-Lain	2.146.072.677.511	8.090.340.606.569
Jumlah		363.060.552.806.547	125.603.094.911.781

- Beban Cadangan Beras Pemerintah sebesar Rp 3.711.471.783.128 yang berasal dari nilai jumlah penggantian atas CBP tahun 2022 yang telah dibayarkan dengan SP2D sebesar Rp5.541.378.587.250 dikurangi nilai kekurangan penggantian atas CBP tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp4.439.497.238.430; ditambah pengakuan kurang bayar CBP tahun 2022 sebesar Rp2.609.590.434.308 terdiri dari CBP KPSH sebesar Rp2.582.541.468.316 dan CBP Keadaan Darurat bencana sebesar Rp27.048.965.992 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK tanggal 6 April 2023;
- Beban ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat sebesar **Rp131.714.188.176** terdapat pada:
 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar Rp118.638.882.514;
 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebesar Rp13.075.305.662
- Beban Lain-lain Dana Kompensasi sebesar Rp340.739.237.539.248 terdiri dari :
 - a. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Periode Semester I Tahun 2022 sebesar Rp56.788.814.757.588.
 - b. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Peralite Periode Semester I Tahun 2022 sebesar Rp74.884.881.198.154
 - c. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp43.826.528.980.291
 - d. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp50.689.205.322.597
 - e. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. Akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Periode Semester I Tahun 2022 sebesar Rp452.050.984.683
 - f. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. Akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Periode Triwulan III Tahun 2022

sebesar Rp366.144.160.693

- g. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat penetapan tarif tenaga listrik non subsidi periode semester I Tahun 2022 sebesar Rp31.220.988.279.713
 - h. Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat penetapan tarif tenaga listrik non subsidi periode triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp16.311.646.981.558
 - i. Pengakuan Utang atas Kekurangan Pembayaran Kompensasi Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022 sebesar Rp16.770.789.494.089
 - j. Pengakuan Utang atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2022 sebesar Rp35.823.174.618.999
 - k. Pengakuan Utang atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Tahun 2022 sebesar Rp13.317.579.839.913
 - l. Pengakuan Utang atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. Akibat Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2022 sebesar Rp287.432.920.970
- Beban Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 terdapat pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, sebesar Rp18.139.347.927.290 dengan pengembalian sebesar Rp(1.807.291.308.806) sehingga beban lain-lain neto sebesar Rp16.332.056.618.484.;
 - Beban Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Tahun 2022 yang terdapat pada Dit. PNBPD SDA dan KND sebesar Rp0.
 - Beban lain-lain sebesar Rp2.146.072.677.511 terdapat pada:
 - Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp138.337.480.688 merupakan beban untuk keperluan dana bantuan kemasyarakatan Presiden;
 - Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp14.548.259.986 merupakan beban untuk keperluan dana bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden;
 - Ditjen PPI Kemenkominfo sebesar Rp317.668.068.645 merupakan beban yang digunakan untuk bantuan operasional Layanan Pos Universal;
 - BP Batam sebesar Rp24.721.826.082 merupakan beban operasional kegiatan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun;
 - SKK Migas sebesar Rp1.650.797.042.110 merupakan beban operasional kegiatan SKK Migas.
 - **Beban Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA BUN 999.99)**

Sedangkan Beban Lain-lain dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) tahun 2022 sebesar **Rp38.562.371.803.632** mengalami kenaikan sebesar **Rp5.302.205.863.760** atau naik **15,94%** bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Beban Lain-lain Pengelola Transaksi Khusus bila dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Satker Pengelola PNBPN Pengelola Dana Pensiun, Askes, Program THT, Belanja PPN BI RTGS, Belanja Selisih Harga Beras Bulog (987361)		
	Beban Jasa Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	93.648.376.675	-
2	Satker Transaksi Khusus pada KPPN KPH (999928)		
	Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	1.075.974.322	135.307.235
3	Satker Transaksi Khusus Pengelola Kas Negara (999981)		
	Belanja Rugi selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	529.742.181.417	301.743.839.554
4	Satker Pengelola Migas (984572)		
	Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah	-	-
	Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan Non PLN	-	34.474.391.979
	Beban Pihak Ketiga Migas-DMO Fee KKKS	10.302.719.284.230	7.256.067.751.341
	Beban Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN	6.497.767.243.449	5.041.396.294.846
	Beban Pihak Ketiga Migas-Underliftng KKKS	19.556.336.655.071	19.691.275.618.936
	Beban Pihak Ketiga Migas - Fee Penjualan	581.924.419.717	-
5	Satker Pengelola Panas Bumi (984588)		
	Beban pembayaran reimbursement PPN	98.185.229.492	73.264.314.536
	Beban pembayaran penggantian bonus produksi	88.280.570.763	84.590.149.004
	Beban pihak ketiga diestimasi – reimbursement PPN	295.314.770.508	263.735.685.464
	Beban pihak ketiga diestimasi – PBB panas bumi	321.366.763.884	314.517.618.500
	Beban pihak ketiga diestimasi – penggantian bonus produksi	-	-
	Beban diestimasi setoran kepada pemerintah	196.010.334.104	198.964.968.477
Jumlah		38.562.371.803.632	33.260.165.939.872

Terdapat beban lain-lain yang di eliminasi pada LKBUN Tahun 2022 sebesar minus Rp196.010.334.104 yang merupakan beban diestimasi setoran kepada pemerintah pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99).

Surplus/
Defisit
Kegiatan
Non
Operasional

E.2.3 . Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing pada tahun 2022 defisit sebesar **Rp136.076.943.706.849** dan tahun 2021 surplus **Rp71.016.861.010.620**. Surplus (Defisit) kegiatan non operasional pada Tahun 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp207.093.804.717.469** atau turun **291,61%** bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Penurunan tersebut berasal dari surplus (defisit) Selisih Kurs belum

terrealisasi pada BA BUN Pengelola Utang dan dari Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain dan Transaksi Khusus. Defisit tahun 2022 berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit kegiatan non operasional lainnya dan bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebagaimana rincian berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(81.309.693.787)	(248.052.291.722)
2	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(1.337.452.801.614)	(1.854.340.752.507)
3	Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	(134.658.181.211.448)	73.119.254.054.849
Jumlah		(136.076.943.706.849)	71.016.861.010.620

E.2.3.1. Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/
Defisit
Penjualan
Aset Non
Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar defisit Rp81.309.693.787 dan defisit Rp248.052.291.722. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar mengalami penurunan defisit sebesar Rp166.742.597.935 atau defisitnya turun 67,22% bila dibandingkan dengan tahun yang lalu. Penurunan defisit ini terjadi utamanya karena penurunan beban pelepasan aset non lancar BA BUN Pengelola Transaksi Khusus yaitu pada satker Pengelola Aset KKKS.

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 sebesar Rp81.309.693.787 bila dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	111.168.115.313	61.724.548.408
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	192.477.809.100	309.776.840.130
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(81.309.693.787)	(248.052.291.722)

Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2022 berdasarkan BA BUN dapat dirinci sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2022	TA 2021
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	(72.521.057.126)	(27.419.988.781)
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	(8.788.636.661)	(220.632.302.941)
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(81.309.693.787)	(248.052.291.722)

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2022 pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) sebesar Rp72.521.057.126 terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp14.125.000 dan Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp72.535.182.126 merupakan Beban Pelepasan Aset Non Lancar disebabkan adanya hibah keluar Aset Gedung dan Bangunan dalam Renovasi (GBR) pada satker OJK sebesar Rp4.435.242.400 dan sebesar Rp68.099.939.726 pada DKPBPB Batam berupa koreksi pencatatan KDP pada BP Bintang atas kesalahan input NUP pada KDP.

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2022 terdapat pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) sebesar defisit Rp8.788.636.661 terdiri dari Pendapatan

Pelepasan Aset Non Lancar sebesar **Rp111.153.990.313** dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar **Rp119.942.626.974** dan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	TA 2022
1	Satker DJKN PKP2B (984555)		(2.083.951.676)
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	19.891.871.000	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(21.975.822.676)	
2	Satker DJKN Pengelola Aset Lain-lain (984594)		(402.384.255)
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(402.384.255)	
3	Satker DJKN Pengelola Aset KKKS pada PPBMN (999242)		(1.445.590.232)
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	551.100.000	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(1.996.690.232)	
4	Satker DJKN Pengelola Aset KKKS pada SKK Migas (999904)		8.013.013.739
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	84.292.171.402	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(76.279.157.663)	
5	Satker DJKN Pengelola Aset KKKS pada BPMA (999905)		48.999.999
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	48.999.999	
6	Satker DJKN Pengelola ABMAT (984608)		(16.686.048.000)
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(16.686.048.000)	
7	Satker DJKN Pengelola Aset BLBI (978706)		4.547.006.170
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	5.719.531.913	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(1.172.525.743)	
8	Satker DJKN Pengelola Aset eks Pertamina (984413)		650.315.999
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	650.315.999	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar		
9	Satker DJKN Pengelola BMN Idle (984614)		(1.429.998.405)
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(1.429.998.405)	
Jumlah			(8.788.636.661)

Surplus/

Defisit

Penyelesaian

Kewajiban Jk

Panjang

E.2.3.2. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar defisit **Rp1.337.452.801.614** dan **Rp1.854.340.752.507**. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp516.887.950.893 atau 27,87% bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2022 berasal dari BA BUN Pengelola Utang (999.01) yang merupakan Beban *Pembayaran Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Debtswitch*) baik dalam rupiah maupun valas. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dilihat pada rincian berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021
<i>gain on bond redemption</i>	-	-
<i>loss on bond redemption</i>	(1.337.452.801.614)	1.854.340.752.507
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(1.337.452.801.614)	(1.854.340.752.507)

E.2.3.3. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Surplus/
Defisit
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya*

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar defisit **Rp134.658.181.211.448** dan surplus **Rp73.119.254.054.849**. Surplus (defisit) ini mengalami penurunan sebesar **Rp207.777.435.266.297** atau 284,16% bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Defisit sebesar **Rp134.658.181.211.448** terdiri dari defisit selisih kurs belum terealisasi sebesar **Rp160.452.211.952.999** dan surplus kegiatan non operasional lainnya sebesar **Rp25.794.030.741.551**.

Defisit Dari Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar **Rp160.452.211.952.999** apabila dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2022	TA 2021
999.01	Pengelola Utang	(172.084.465.902.995)	36.843.206.487.960
999.02	Pengelola Hibah	-	555.522
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	2.224.985.787.320	51.935.184.126
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	653.556.837.624	(2.716.400.832.510)
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	(289.145.700)	(36.088.200)
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	8.754.000.470.752	(161.430.867.441)
Jumlah		(160.452.211.952.999)	34.017.274.439.457

Defisit dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Bagian Anggaran BUN Pengelola Utang (999.01) sebesar **Rp172.084.465.902.995** tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Selisih Kurs yang belum terealisasi sebesar **Rp16.096.522.130.835** yang merupakan pendapatan atas selisih antara nilai neraca dan nilai transaksi kewajiban dengan Beban Selisih Kurs yang belum terealisasi sebesar **Rp188.180.988.033.830** yang merupakan beban atas selisih antara nilai neraca dan nilai transaksi kewajiban. Penurunan pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi dan kenaikan beban kerugian selisih kurs yang belum terealisasi disebabkan utamanya karena kenaikan nilai tukar Rupiah pada mata uang asing di 31 Desember 2022 apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Pendapatan dan Beban selisih kurs dapat dirinci antara selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN sebagaimana tabel berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	16.096.522.130.835	54.727.997.729.574
Surat Berharga Negara	4.713.238.930.000	20.497.834.200.000
Pinjaman	11.383.283.200.835	34.230.163.529.574
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	188.180.988.033.830	17.884.791.241.614
Surat Berharga Negara	102.247.308.191.000	12.244.041.639.000
Pinjaman	85.933.679.842.830	5.640.749.602.614
Jumlah	(172.084.465.902.995)	36.843.206.487.960

Surplus (Defisit) dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Hibah (999.02) pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan surplus **Rp555.522**.

Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar surplus

Rp2.224.985.787.320 dan surplus Rp51.935.184.126. Surplus dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.173.050.603.194 atau 4.184,16% bila dibandingkan dengan tahun 2021. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA 999.03 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	2.226.578.271.971	239.336.075.023
2	Beban selisih kurs belum terealisasi	(1.592.484.651)	(187.400.890.897)
Jumlah		2.224.985.787.320	51.935.184.126

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi pada UAKPA BKF yaitu, adanya peningkatan atas investasi pada Lembaga Keuangan Internasional dan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri yang menggunakan mata uang asing dalam pencatatannya. Pada 2022 pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp2.226.578.271.971 berasal dari kenaikan nilai investasi pemerintah.

Adapun rincian peningkatan investasi akibat selisih kurs adalah sebagai berikut:

Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional		Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi
1	Asian Development Bank (ADB)	211.166.006.268
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	262.036.470.212
3	International Development Association (IDA)	84.529.459.967
4	International Finance Corporation (IFC)	345.022.553.890
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	4.990.335.480
6	Islamic Development Bank (IDB)	107.458.601.478
7	International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)	2.706.840.000
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	180.190.977
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	107.493.126.000
10	Common Fund for Commodities (CFC)	1.453.046.913
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	29.226.840.786
12	Credit Guarantee and Investment Facility	24.239.400.000
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	883.139.400.000
Jumlah pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional		2.063.642.271.971
Badan Usaha Lainnya		
1	ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	157.680.000.000
2	International Rubber Consortium Limited (IRCo)	5.256.000.000
Jumlah		162.936.000.000
JUMLAH		2.226.578.271.971

Sedangkan Beban selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp1.592.484.651 yang terdiri dari kenaikan nilai utang jangka panjang pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai tukar. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Lembaga Keuangan Internasional	2021	2022	Beban Selisih Kurs
1	Multilateral Investment and Gyarantee Agency (MIGA)	16.205.787.004	17.697.200.656	1.491.413.652
2	Common Fund For Commodities (CFC)	3.610.124.159	3.711.195.158	101.070.999
Total		19.815.911.163	21.408.395.814	1.592.484.651

Sedangkan Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Pemberian Pinjaman (BA 999.04) pada Tahun 2022 adalah surplus sebesar **Rp653.556.837.624** dan pada tahun 2021 defisit **Rp2.716.400.832.510**. Terdapat kenaikan surplus (defisit) selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp3.369.957.670.134 atau 124,06% jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Kenaikan Surplus/(Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi disebabkan nilai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi lebih besar daripada beban kerugian selisih kurs belum terealisasi. Nilai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi berasal dari jumlah selisih kurs akibat nilai kurs pada saat tanggal dilakukannya pembayaran kembali oleh debitur lebih besar dari pada kurs saat pelaporan. Sedangkan untuk beban kerugian selisih kurs belum terealisasi berlaku sebaliknya. Pendapatan dan beban selisih kurs belum terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Pemberian Pinjaman dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi (491111)	3.567.071.695.937	-
2	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211)	(2.913.514.858.313)	(2.716.400.832.510)
Jumlah Suprlus (Defisit)		653.556.837.624	(2.716.400.832.510)

Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada Tahun 2022 dan 2021 adalah pada tahun 2022 defisit sebesar **Rp289.145.700** dan pada tahun 2021 defisit sebesar Rp36.088.200. Defisit dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp253.057.500** atau defisit naik **701,22%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada Tahun 2022 merupakan beban kerugian selisih kurs belum terealisasi yan terdapat pada Setjen Kementerian Keuangan atas satker Pengelola Dana ICSID dengan menggunakan kurs penutup BI Rp15.592.

Rincian Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	-
2	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(289.145.700)	(36.088.200)
Jumlah Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		(289.145.700)	(36.088.200)

Selanjutnya Surplus (Defisit) dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BA BUN Pengelola

Transaksi Khusus pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar surplus **Rp8.754.000.470.752** dan defisit **Rp161.430.867.441**. Surplus (Defisit) dari Selisih Kurs Sebelum Realisasi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar **Rp8.915.431.338.193** atau naik **5.552,76%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Surplus dari Selisih Kurs Belum Terealisasi terdiri dari Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar **Rp10.055.493.705.433** yang merupakan Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar **Rp1.301.493.234.681** merupakan Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency. Pendapatan dan Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi dirinci sebagai berikut:

No	Uraian		TA 2022
1	Satker Pengelola Suspen Penerimaan		42.381.389.959
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	48.665.757.179	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	6.284.367.220	
2	Satker Pengelola BLBI		5.419.350.170.435
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	5.423.026.401.637	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	3.676.231.202	
3	Satker Pengelola Kas Negara		3.639.413.776.301
	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	3.639.413.779.067	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.766	
4	Satker Pengelola Migas		(344.434.996.852)
	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	827.286.366.897	
	Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi	1.171.721.363.749	
5	Satker Pengelola PNPB Panas Bumi		(55.974.672)
	Beban selisih kurs belum terealisasi	55.974.672	
6	Satker Pengelola TK KPPN KPH		17.990.430
	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	117.092.072.818	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	117.074.082.388	
7	Satker Badan Kebijakan Fiskal		(557.927.755)
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	557.927.755	
8	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta I		(2.114.028.912)
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	6	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.114.028.918	
9	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta II		(2)
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2	

No	Uraian	TA 2022
10	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta III	3
	Pendapatan kerugian selisih kurs belum terealisasi	3
11	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta IV	1
	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	2
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1
12	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta V	(1)
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	2
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	3
13	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta VI	(507)
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	9.255.497
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	9.256.004
14	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta VI	(1)
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1
15	Satker Pengelola Transaksi Khusus SKK Migas	72.325
	Pendapatan Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	72.325
TOTAL		8.754.000.470.752

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp25.794.030.741.551** apabila dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2022	TA 2021
999.01	Pengelola Utang	3.239.719.886.778	188.976.548.956
999.02	Pengelola Hibah	171.767.554.842	84.999.686.353
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	15.440.581.930	323.767.116.577
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	2	(3)
999.05	Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	116.753.541.918	109.649.129.569
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	553.455.768.731	2.768.901.262.174
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	343.580.616.047	2.909.517.062.611
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	21.353.312.791.303	32.716.168.809.155
Jumlah		25.794.030.741.551	39.101.979.615.392

Jumlah Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Utang (999.01) sebesar Rp3.239.719.886.778 yang diperoleh dari pengurangan antara Pendapatan penyesuaian Lainnya sebesar Rp3.239.719.886.778 dan Beban Lain-Lain sebesar Rp0. Pendapatan tersebut merupakan selisih atas pelaksanaan konversi pinjaman. Pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan yang

dicatat sebagai pendapatan penyesuaian lainnya sebesar Rp3.239.719.886.778.

Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp3.239.719.886.778** pada BUN Pengelola Utang (999.01) tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan Penyesuaian Lainnya	3.239.719.886.778	336.867.929.727
2	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	(147.891.380.771)
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.239.719.886.778	188.976.548.956

Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp171.767.554.842** pada BUN Pengelola Hibah (999.02) tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	171.767.554.842	84.999.686.353
2	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		171.767.554.842	84.999.686.353

Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN 999.02 sebesar **Rp171.767.554.842** berasal dari Penerimaan Kembali Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu pada satker 985251 sebesar Rp735.955.086 dan Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL pada satker 985261 sebesar Rp171.031.599.756 yang merupakan setoran pengembalian belanja hibah dari pemerintah daerah yang sifatnya tidak rutin. Nilai Pendapatan-LO tersebut tidak sama dengan nilai Pendapatan-LRA yakni sebesar Rp172.118.947.094. Hal ini dikarenakan terdapat penyelesaian piutang lainnya (akun 115211) pada tahun berjalan (2022) dengan total Rp1.087.347.338 yang mengurangi Pendapatan-LO, yang terdiri atas piutang sisa Hibah RR Kab. Bolaang Mongondow sebesar Rp7.034.222, Kab. Palembang sebesar Rp1.075.724.000 (mekanisme Pemotongan DAU), dan Prov. Jawa Timur Sebesar Rp4.589.116. Berdasarkan hal tersebut tercatat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp171.031.599.756.

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) adalah sebesar **Rp15.440.581.930**. Surplus ini berasal dari Pendapatan Penyesuaian Investasi Nilai Investasi Hasil Konfirmasi sebesar **Rp15.442.912.628** dan Beban Penyesuaian Investasi Hasil Konfirmasi sebesar **Rp2.330.698**.

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya merupakan Pendapatan penyesuaian nilai investasi hasil konfirmasi pada LKI UAKPA BKF (984393). Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp15.442.912.628 dan Audited 2021 Rp323.771.828.317. Pengakuan pendapatan merupakan pengakuan selisih lebih antara nilai rupiah dalam konfirmasi LKI dengan nilai rupiah tercatat dalam pembukuan pemerintah. Perhitungan penambahan saldo investasi pemerintah pada IBRD sebesar Rp225.712.910, IDA sebesar Rp15.212.046.562, IFC sebesar Rp5.145.360, dan CFC sebesar

Rp7.796. Penambahan tersebut merupakan pengakuan atas pembayaran penambahan investasi pemerintah pada bulan Desember 2021 namun diakui diterima pada bulan Januari 2022. Hal ini dikarenakan pihak IBRD, IDA, IFC dan CFC belum mengakui penambahan investasi pemerintah pada konfirmasi saldo akhir tahun 2021.

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan beban penyesuaian nilai investasi hasil konfirmasi pada LKI UAKPA BKF. Pada Tahun 2022, selisih kurang hasil konfirmasi sebesar Rp2.330.698 berasal dari IsDB sebesar Rp272.554 dan ICD sebesar Rp2.058.144. Pengakuan Beban merupakan pengakuan selisih kurang antara nilai rupiah dalam konfirmasi LKI dengan nilai rupiah tercatat dalam pembukuan pemerintah.

Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (999.04) Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar surplus Rp2 dan defisit Rp3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan Pembulatan (597111) berasal dari akumulasi pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah.

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa (999.05) pada Tahun 2022 sebesar **Rp116.753.541.918**. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 Surplus Kegiatan Non Operasional pada BUN Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami kenaikan sebesar **Rp7.104.412.349** atau naik **6,48%**. Peningkatan ini terjadi pada satker DAU yang disebabkan karena adanya pemotongan DAU berdasarkan KMK Nomor 35/KM.07/2022 tentang Perubahan atas KMK Nomor 30/KM.07/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Kedua atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

NO	URAIAN	TA 2022	TA 2021
1.	Satker DAU	107.626.528.730	-
2.	Satker DAK Non Fisik (Non Dana BOS)	-	91.834.599.342
3.	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	9.127.013.188	17.814.530.227
TOTAL		116.753.541.918	109.649.129.569

a. Satker DAU

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp107.626.528.730 dan Rp0. Apabila diperbandingkan, pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp107.626.528.730. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari pemotongan DAU berdasarkan KMK Nomor 35/KM.07/2022 tentang Perubahan atas KMK Nomor 30/KM.07/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Kedua atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya satker DAU sebesar

Rp107.626.528.730 merupakan pendapatan dari pemotongan DAU yang tidak diakui piutang sebelumnya. Sedangkan, atas pendapatan yang sudah diakui piutang dan sudah diselesaikan dengan pemotongan DAU tersebut, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sudah dilakukan penyesuaian. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Satker DAU tersebut terdiri dari sisa dana BOS TA 2011 sebesar Rp13.097.644.623; sisa dana BOS TA 2019 sebesar Rp17.192.335.526; sisa dana BOP PAUD s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp54.580.513.595; dan sisa dana BOP Kesetaraan s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp22.756.034.986.

b. Satker Satker DAK Non Fisik (Non Dana BOS)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 (Nihil) dan Rp91.834.599.342. Apabila dibandingkan, pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp91.834.599.342. Hal ini disebabkan oleh jumlah penerimaan dari pengembalian TKDD TAYL, yang tidak terkait dengan pengakuan dan penyelesaian piutang transfer, melalui potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer yang mana diakui di Tahun 2021, namun masuk sebagai pos penerimaan dari pengembalian TKDD TAYL di Tahun 2022.

c. Satker DAK Fisik dan Dana Desa

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.127.013.188 dan Rp17.814.530.227. Pendapatan pada tahun anggaran 2022 merupakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional berdasarkan dari penggabungan setoran pengembalian Transfer DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa tahun 2021 yang baru disetorkan ke RKUN pada tahun anggaran 2022 yang dibukukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp48.108.908.345 dan perhitungan penyesuaian pencatatan terhadap piutang sebesar minus Rp38.981.895.157.

Perhitungan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional tahun 2022 sebesar Rp9.127.013.188 dengan rincian sebagai berikut:

1. setoran pengembalian Transfer DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa tahun 2021 yang baru disetorkan ke RKUN pada tahun anggaran 2022 yang dibukukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp48.108.908.345 Nilai Pendapatan Kegiatan Operasional dan Pendapatan Kegiatan Non Operasional dibukukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Terdapat kenaikan yang sangat signifikan pada Pendapatan dari Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 62% dibandingkan 2021, hal tersebut disebabkan karena kenaikan setoran pengembalian sisa Dana BOS Tahun 2011.

No	Pendapatan	2022	2021
1	DAK Fisik	5.130.110	-
2	DAK Non Fisik – Dana BOS	48.103.778.235	3.045.739.084
3	Dana Desa	-	14.768.791.143
	Total	48.108.908.345	17.814.530.227

2. Perhitungan penyesuaian pencatatan terhadap piutang DAK Nonfisik – Dana BOS yang berasal dari setoran pengembalian sisa Dana BOS Tahun 2011 sebesar minus Rp38.981.895.157.

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (999.07) pada Tahun 2022 sebesar **Rp553.455.768.731**. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2022 pada BUN Pengelola Belanja Subsidi mengalami penurunan sebesar **Rp2.215.445.493.443** atau turun **80,01%** bila dibandingkan dengan tahun 2021.

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional pada Belanja Subsidi untuk Periode 31 Desember 2022 sebesar Rp553.405.768.731 terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp553.405.768.731 pada Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian KUKM dan Kementerian PUPR, serta pendapatan penyesuaian lainnya pada Kementerian Pertanian Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp50.000.000.

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp 343.580.616.047** dan **Rp2.909.517.062.611**. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp2.565.936.446.564** atau **88,19%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional BUN Pengelola Belanja Lain-lain terdiri dari Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dan Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar **Rp343.581.116.047** dan beban penyesuaian nilai persediaan satker BP Batam sebesar **Rp500.000**. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dan Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp343.581.116.047 terdapat pada:

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Kementerian Keuangan	872.080.520	1.141.660
2	Kemenko Perekonomian (MMPKP)	330.337.784.404	2.900.540.235.107
3	Kementerian Kominfo	2.652.574.564	5.396.397.483
4	BP Batam	5.725.375.993	1.468.429.601
5	SKK Migas	3.945.508.046	2.110.858.760
6	Kementerian Sosial	47.792.520	-
Jumlah		343.581.116.047	2.909.517.062.611

Selanjutnya Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp21.353.312.791.303** dan **Rp32.716.168.809.155**. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp11.362.856.017.852** atau turun **34,73%** bila dibandingkan dengan tahun 2021. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

sebesar Rp27.729.341.585.024 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp6.376.028.793.721. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) dirinci sebagai berikut:

1. Penerimaan pada satker 987361 sebesar Rp332.176.561.307 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL (425921).
2. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada PPBMN, Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp739.440.970 yang berasal dari penyesuaian selisih kurs pada MP.
3. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada SKK Migas, Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.438.749.632.054.
4. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada BPMA, Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp252.502.678.608.
5. Pada UAKPA BUN BMN PKP2B, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp705.173.272.085 dan Rp1.508.361.965.074. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari penambahan aset baru pada PT Berau Coal sebesar Rp34.556.118.116; PT Multi Harapan Utama sebesar Rp1.127.917.404; PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp 541.380.297.502; PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp128.096.919.634; dan PT Kendilo Coal Indonesia sebesar Rp12.019.430.

Sedangkan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) sebesar Rp6.376.028.793.721 berasal dari:

1. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada SKK Migas, Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.732.082.668.280.
2. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada BPMA, Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp48.156.663.127.
3. Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Piutang Yayasan Supersemar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp404.210.537.686.

Pos Luar
Biasa

E.2.4. Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah nihil.

Catatan
Penting
Lainnya

E.3. Catatan Penting Lainnya

1. Pendapatan Penyesuaian Lainnya pada BA BUN Pengelola Utang (BA 999.01) sebesar Rp3.239.719.886.778 merupakan selisih atas pelaksanaan konversi pinjaman. Pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan yang dicatat sebagai pendapatan penyesuaian lainnya dengan rincian sebagai berikut:

LOAN ID LAMA	LOAN ID BARU	CREDIT R COUNTS Y	CREDITOR REF	NAMA PINJAMAN	JENIS PINJAMAN	POSISI LOAN LAMA	POSISI LOAN BARU	TANGGAL KONVERSI	MTU LAMA	MTU BARU	KURS LOAN LAMA	KURS LOAN BARU	SELISIH	TINGKAT RUMBA LAMA	TINGKAT RUMBA BARU
21272000	212726A0	A D B	3971-IND	Disaster Resilience Improvement Program (DRIP)	FINANCING OF PROGRAMS	500.000.000	62.750.000.000	1-Sep-22	USD	JPY	14,853	107,1908	(595.011.756.000)	Libor 6 MT+	0.1982
21278000	212780A0	A D B	4137-IND	Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program (CITAI) Subprogram-1	FINANCING OF PROGRAMS	500.000.000	64.665.000.000	1-Oct-22	USD	JPY	15,232	105,5908	(787.202.172.000)	Libor 6 MT+	0.1956
21238000	212380A0	A D B	2628-IND	Polytechnics Education Development Project (PEDP)	FINANCING OF PROJECTS	49.730.741	6.325.793.300	19-Oct-22	USD	JPY	15,260	104,3294	(105.400.701.778)	Libor 6 MT+	0.2219
21213000	212130A0	A D B	4144-IND	Boosting Productivity through Human Capital Program (BPHCP) SUBPROGRAM 1	FINANCING OF PROGRAMS	500.000.000	62.530.000.000	1-Nov-22	USD	JPY	15,596	105,3977	(1.103.990.016.000)	Libor 6 MT+	0.0790
21273000	212730A0	A D B	4038-IND	Promoting Innovative Financial Inclusion Program (PIFPI) Subprogram-1	FINANCING OF PROGRAMS	500.000.000	62.560.000.000	1-Dec-22	USD	JPY	15,742	113,6401	(848.035.244.000)	Libor 6 MT+	0.0900
Total													(3.239.719.886.778)		

2. Kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai Pendapatan-LO. Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam skema burden sharing termasuk yang terjadi saat tanggal penerimaan kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	Penyesuaian Akrua 2021	(1.173.575.720.000)	-	(1.173.575.720.000)
2	Januari	526.014.250.000	-	526.014.250.000
3	Februari	963.513.320.000	-	963.513.320.000
4	Maret	1.541.917.700.000	-	1.541.917.700.000
5	April	526.658.750.000	-	526.658.750.000
6	Mei	1.094.228.280.000	-	1.094.228.280.000
7	Juni	1.410.175.650.000	-	1.410.175.650.000
8	Juli	526.751.610.000	-	526.751.610.000
9	Agustus	1.094.026.120.000	-	1.094.026.120.000
10	September	1.407.816.200.000	-	1.407.816.200.000
11	Oktober	582.718.300.000	-	582.718.300.000
12	November	1.400.515.740.000	-	1.400.515.740.000
13	Desember	2.093.469.250.000	-	2.093.469.250.000
14	Penyesuaian Akrua 2022	2.142.456.970.000	-	2.142.456.970.000
SUBTOTAL PG		14.136.686.420.000	-	14.136.686.420.000
B. Non Public Goods				
1	Penyesuaian Akrua 2021	(298.465.517.096)	(169.241.650.028)	(467.707.167.124)
2	Juni	3.195.336.712.438	1.811.881.194.411	5.007.217.906.849
3	Desember	3.222.931.981.586	1.811.798.111.564	5.034.730.093.150
3	Penyesuaian Akrua 2022	50.498.383.561	417.208.783.562	467.707.167.123
SUBTOTAL NPG		6.170.301.560.489	3.871.646.439.509	10.041.947.999.998

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
C. Cluster A				
1	Penyesuaian AkruaI 2021	(147.784.000.000)	-	(147.784.000.000)
2	Maret	443.410.000.000	-	443.410.000.000
3	Juni	442.482.000.000	-	442.482.000.000
4	September	441.728.000.000	-	441.728.000.000
5	Oktober	166.291.495.800	-	166.291.495.800
6	November	89.921.308.500	-	89.921.308.500
7	Desember	593.050.000.000	-	593.050.000.000
8	Penyesuaian AkruaI 2022	625.992.334.620	-	625.992.334.620
SUBTOTAL CLUSTER A		2.655.091.138.920	-	2.655.091.138.920
TOTAL PG, NPG DAN CLUSTER A		22.962.079.119.409	3.871.646.439.509	26.833.725.558.918

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (UA-PBUN-AP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bertindak sebagai penggabung Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN yang terdiri dari Laporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat (UAKBUN-P) serta Laporan Keuangan KPPN Khusus.

Penggabungan Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN dilakukan atas seluruh angka realisasi bersih (*netto*) penerimaan dan pengeluaran kas yang dibukukan oleh KPPN dan Dit PKN selaku Kuasa BUN, baik berasal dari transaksi BA BUN maupun transaksi BA Kementerian Negara/Lembaga.

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1. SALDO AWAL KAS

Saldo Awal
Kas per 1
Januari 2021

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2022 adalah sebesar **Rp374.272.452.880.577** yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2021. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas per 1 Januari 2021 sebesar **Rp385.326.463.515.635**, maka mengalami penurunan sebesar Rp11.054.010.635.058. Rincian Saldo Awal Kas per 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	1 Januari 2022	1 Januari 2021
Kas di BUN Pusat	253.683.550.805.313	198.514.075.299.703
Kas di KPPN	721.442.531.795	3.545.188.057.685
Kas pada BLU	81.993.516.161.352	57.688.418.512.516
Kas di K/L dari Hibah	1.745.056.899.938	3.862.816.464.090
Kas Escrow	29.926.032.453.218	118.830.237.152.177
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	6.202.854.028.961	2.885.728.029.464
Saldo Awal Kas	374.272.452.880.577	385.326.463.515.635

Rincian Saldo Awal Kas Per 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021

F.1.2. PERUBAHAN KAS

Perubahan
Kas

Kenaikan (Penurunan) Kas dari berbagai aktivitas Pemerintah pada TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(220.433.644.891.532)	(535.924.760.649.717)	-58,87%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(347.174.022.486.045)	(383.858.647.637.838)	-9,56%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	698.166.134.429.528	1.016.442.284.731.433	-31,31%

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	20.042.387.123.266	39.284.569.942.339	-48,98%
Koreksi:			
Akumulasi Koreksi Pembukuan	11.569.849.825.433	(3.031.126.148.197)	-481,70%
Penggunaan SAL	0	(143.966.330.873.078)	-100,00%
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penyesuaian	162.170.704.000.650	(11.054.010.635.058)	1367,12%

Rincian Kenaikan/Penurunan Kas TA 2022 dan TA 2021



I. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp11.569.849.825.433 terdiri dari:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	Koreksi SILPA	9.137.971.841.987
2	Koreksi Selisih Kurs	3.676.340.697.318
3	Koreksi Pembukuan	(1.244.462.713.872)
Jumlah Akumulasi Pembukuan		11.569.849.825.433

Penjelasan Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp11.569.849.825.433 terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp9.137.971.841.987 terdiri dari:

a. Pengembalian atas Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu yang berasal dari akun:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (311212)	(26.247.050.225)
2	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung (311911)	(293.688.534.699)
Jumlah Pengembalian Pendapatan TAYL		(319.935.584.924)

b. Penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp9.457.907.426.911

2. Koreksi Selisih Kurs sebesar Rp3.676.340.697.318 merupakan saldo selisih kurs belum terealisasi setelah perhitungan selisih kurs terealisasi dan penyesuaian selisih kurs yang selanjutnya disesuaikan sebagai pendapatan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi dari proses revaluasi yaitu pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp3.799.706.619.119 dan kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar minus Rp123.365.921.801.

3. Penjelasan Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp1.244.462.713.872 terdiri dari koreksi Kas Hibah, koreksi Kas BLU dan koreksi kas di BUN dengan rincian berikut:
- a. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp58.478.443.129 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2022 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pemindahan saldo kas hibah akibat adanya likuidasi, pengesahan hibah luar negeri TAYL, pengesahan hibah TAYL dengan nilai neto sebesar Rp1.877.411.951, serta revaluasi saldo kas hibah sebesar minus Rp60.355.855.080. Rincian koreksi Kas Hibah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Langsa (002)	(163.600.400)
2	KPPN Pangkal Pinang (015)	45.775.398
3	KPPN Jakarta II (019)	76.756.288
4	KPPN Makasar I (054)	385.418.078
5	KPPN Jakarta III (088)	(76.756.288)
6	KPPN Kutacane (105)	(30.223.354)
7	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	(58.715.812.851)
Jumlah Koreksi Kas Hibah		(58.478.443.129)

- b. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp1.098.251.792.777 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2022, penyesuaian saldo Kas BLU akibat likuidasi, serta penyesuaian saldo kas akibat perubahan menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Berbadan Hukum). Rincian koreksi Kas BLU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Medan I (004)	18.333.125.162
2	KPPN Padang (010)	(480.360.382.027)
3	KPPN Bukittinggi (011)	2.971.266.991
4	KPPN Palembang (014)	1.006.975.507
5	KPPN Bandar Lampung (017)	(1.006.975.507)
6	KPPN Jakarta I (018)	(16.702.566.437)
7	KPPN Jakarta II (019)	17.499.262.783
8	KPPN Bandung I (022)	45.479.416.950
9	KPPN Cirebon (024)	17.467.576.856
10	KPPN Yogyakarta (030)	(26.112.398.796)
11	KPPN Surabaya I (031)	17.531.963.586
12	KPPN Malang (032)	(819.639.010.898)
13	KPPN Samarinda (046)	(4.402.744.647)
14	KPPN Manado (049)	7.163.568.306
15	KPPN Gorontalo (050)	26.259.771.296

No	KPPN	Jumlah (Rp)
16	KPPN Makassar I (054)	26.509.358.098
17	KPPN Jakarta III (088)	69.750.000.000
Jumlah Koreksi Kas BLU		(1.098.251.792.777)

Koreksi pada KPPN Padang (010) sebesar minus Rp480.360.382.027 merupakan penyesuaian saldo Kas dan Bank BLU satuan kerja Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang terkait dengan penetapan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebagaimana diatur di Perpres No.95 Tahun 2021 dan Perpres No.114 Tahun 2021.

Koreksi pada KPPN Malang (032) sebesar minus Rp819.639.010.898 merupakan penyesuaian saldo Kas BLU sehubungan dengan update status satuan kerja Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

Koreksi pada KPPN Samarinda (046) sebesar minus Rp4.402.744.647 merupakan reklasifikasi akun Kas BLU ke Aset Lain-lain BLU dikarenakan terdapat selisih kas pada Universitas Mulawarman.

Koreksi pada KPPN Palembang sebesar Rp1.006.975.507 merupakan penyesuaian saldo kas BLU pada UIN Raden Fatah Palembang dari UIN Raden Inten Bandar Lampung.

- c. Koreksi Kas di BUN terdiri dari pengembalian dana (*refund*) PHLN pada Rekening Khusus di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar minus Rp87.732.477.966, yang dilaksanakan oleh Pemerintah atas permintaan donor (pemberi PHLN) sampai dengan periode tahun 2022 serta pembulatan atas setoran pengembalian Uang Persediaan sebesar Rp1. Rincian koreksi pembukuan yang berasal dari transaksi *refund* dana PHLN yaitu:

Kode Bank	Nama Bank	Nilai
00225	Reksus Kemenkeu /second Additional financ. For Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities/CBWSP (PAMSIMAS III) (601324411980)	(19.939.927.427)
00236	Reksus Kemenkeu untuk Development of Four Heigher Education Institutions Project (601327411980)	(8.275.694.978)
00239	Reksus Kementerian Keuangan Dalam Rangka Refund (600504411980)	(24.765.213.197)
00175	Reksus Kemenkeu untuk Research and Innovation in Science and Technology Project-Riset-Pro (IBRD 8245-ID) (601314411980)	(23.132.554.420)
00211	Reksus Kemenkeu Untuk Pinjaman IBRD 8338-ID COREMAP-CTI Project (601322411980)	(11.619.087.945)
Jumlah		(87.732.477.967)

- II. Penggunaan Dana SAL pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp143.966.330.873.078. Penggunaan SAL Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 adalah sebesar Rp127.300.000.000.000, namun pada tahun 2022 dana tersebut tidak digunakan.

F.1.3. SALDO AKHIR KAS DAN BANK

*Saldo Akhir
Kas TA 2022*

Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp536.443.156.881.227 dan Rp374.272.452.880.577. Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp162.170.704.000.650 atau 43,33 % dari TA 2021. Saldo Akhir Kas dan Bank merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun anggaran berikutnya. Adapun rincian Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Kas pada BLU	78.971.222.880.967	81.993.516.161.352	-3,69%
Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah	2.895.708.729.836	1.745.056.899.938	65,94%
Rekening Kas di KPPN	2.774.997.342.454	721.442.531.795	284,65%
Rekening Kas di BUN	394.096.461.571.443	253.683.550.805.313	55,35%
Rekening Pemerintah Lainnya	5.451.617.307.850	6.202.854.028.961	-12,11%
Kas Transitoris	0	0	
Kas Rekening Escrow	52.253.149.048.677	29.926.032.453.218	74,61%
Jumlah Saldo Akhir Kas	536.443.156.881.227	374.272.452.880.577	43,33%

Rincian Saldo Akhir Kas dan Bank TA 2022 dan TA 2021

Sesuai PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, Kas di Rekening Kas SAL telah dicatat sebagai bagian dari Rekening Kas BUN di BI. Perlakuan yang sama terhadap Kas di Rekening Khusus yang merupakan bagian dari Rekening Kas BUN di BI. Untuk Laporan Tahun 2022, transaksi keuangan pada Rekening Khusus telah dicatat sesuai Sistem Akuntansi Pusat dan dikonsolidasikan dalam Laporan Arus Kas ini.

Rincian Kas Bendahara Umum Negara (Kas BUN) terdiri dari:

1. Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah ;
2. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta USD;
3. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta JPY;
4. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta Euro;
5. Rekening Penempatan dalam Rupiah ;
6. Rekening Penempatan dalam Valuta USD;
7. Rekening Penempatan dalam Valuta JPY;
8. Rekening Penempatan dalam Valuta Euro;
9. Rekening Saldo Anggaran Lebih (SAL);
10. Rekening Khusus dalam Rupiah;
11. Rekening Khusus dalam Valuta AUD;
12. Rekening Khusus dalam Valuta EUR;
13. Rekening Khusus dalam Valuta JPY;
14. Rekening Khusus dalam Valuta USD;
15. RPKBUN P SPAN-Gaji;
16. RPKBUN P SPAN-Non Gaji Mandiri;

17. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BTN;
18. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BNI;
19. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BRI;
20. Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH;
21. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Rupiah;
22. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta USD;
23. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Euro;
24. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta JPY;

Rincian Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari:

1. Rekening Retur SPAN Non Gaji;
2. Rekening Retur Gaji;
3. Rekening Dana Investasi dalam Valuta IDR;
4. Rekening Dana Investasi dalam Valuta JPY;
5. Rekening Dana Investasi dalam Valuta AUD;
6. Rekening Dana Investasi dalam Valuta USD;
7. Rekening Dana Investasi dalam Valuta GBP;
8. Rekening Dana Investasi dalam Valuta Euro;
9. Rekening Pembangunan Daerah;
10. Rekening Depkeu k/ Hasil minyak perjanjian karya *prodsharing*;
11. Rekening Penerimaan Panas Bumi;
12. Rekening Dana Bergulir;
13. Rekening Kelolaan TDR;
14. Rekening Retur SBSN;
15. Rekening Menkeu untuk Penerimaan Hibah *Educt Sector Support* program ESSP;

Rincian Rekening Dana Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

1. Rekening Pembangunan Hutan;
2. Rekening Cadangan Dana Reboisasi;
3. Rekening Dana Cadangan Alutsista;
4. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta IDR;
5. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta USD;
6. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta Euro;
7. Rekening Lain BI Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah;
8. Rekening Lain BI Pengelolaan Aset BPR;
9. Rekening Lain BI Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah;
10. Rekening Lain BI BUN untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan
11. Rekening Stabilisasi SBN;
12. Rekening Lain BI Dana PFK;
13. Rekening Lain BI Investasi Pemerintah PEN;
14. Rekening Lain BI Investasi BUN;
15. Rekening Lain BI RIBUN Imbal Hasil;
16. Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda.

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas BUN pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

F.2.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

*Arus Kas
Bersih dari
Aktivitas
Operasi*

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **minus Rp220.433.644.891.532** dan **minus Rp535.924.760.649.717**. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp315.491.115.758.185 atau 58,87 % dari TA 2021. Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2022 terutama berasal dari kenaikan pendapatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Penerimaan Sumber Daya Alam, serta terdapat penurunan pada belanja barang. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah pada TA 2022. Adapun rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Arus Kas Masuk	2.635.258.772.087.072	2.010.854.345.363.122	31,05%
Dikurangi Arus Kas Keluar	2.855.692.416.978.604	2.546.779.106.012.839	12,13%
Arus Kas Bersih	(220.433.644.891.532)	(535.924.760.649.717)	58,87%

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih pada TA 2022 sebesar **minus Rp220.433.644.891.532** bahwa pendapatan operasional pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Lebih rendahnya arus kas masuk dibandingkan dengan arus kas keluar mengindikasikan rendahnya capaian realisasi penerimaan negara yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian domestik maupun global serta tingginya belanja pemerintah seperti belanja lain-lain.

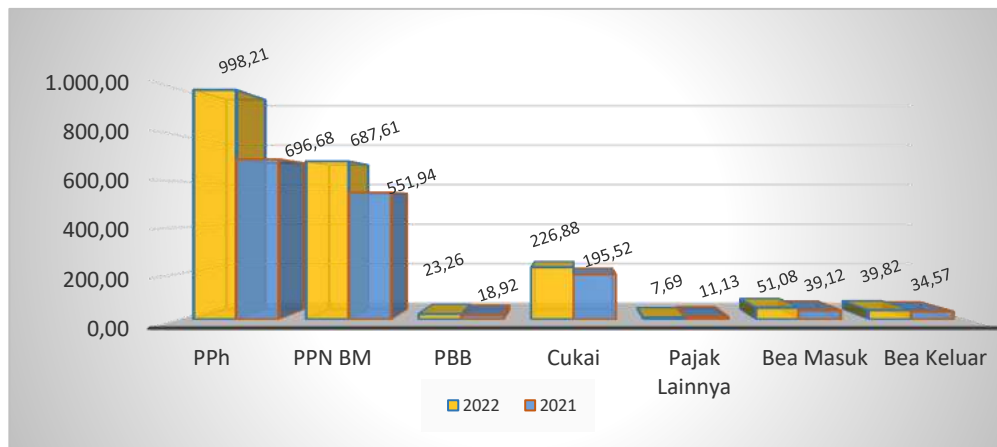
F.2.1.1. Pendapatan Perpajakan

*Pendapatan
Perpajakan*

Pendapatan Perpajakan pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp2.034.552.436.470.075** dan **Rp1.547.841.051.644.624**. Pendapatan Perpajakan pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp486.711.384.825.450 atau 31,44 % dari TA 2021. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar **Rp1.943.654.770.952.334** dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar **Rp90.897.665.517.741**. Pendapatan Perpajakan merupakan pendapatan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan pada TA 2022 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Adapun rincian Pendapatan Perpajakan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Pajak Dalam Negeri			
Pajak Penghasilan (PPh)	998.213.803.714.799	696.676.588.239.336	43,28%
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN&PNBM)	687.609.450.256.247	551.900.480.905.676	24,59%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.264.663.527.700	18.924.786.654.220	22,93%
Cukai	226.880.753.312.323	195.517.827.106.916	16,04%
Pajak Lainnya	7.686.100.141.265	11.125.975.966.383	-30,92%
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.943.654.770.952.334	1.474.145.658.872.531	31,85%

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Pajak Perdagangan Internasional			
Bea Masuk	51.077.726.593.610	39.122.672.165.783	30,56%
Bea Keluar	39.819.938.924.131	34.572.720.606.310	15,18%
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	90.897.665.517.741	73.695.392.772.093	23,34%
Pendapatan Perpajakan	2.034.552.436.470.075	1.547.841.051.644.624	31,44%



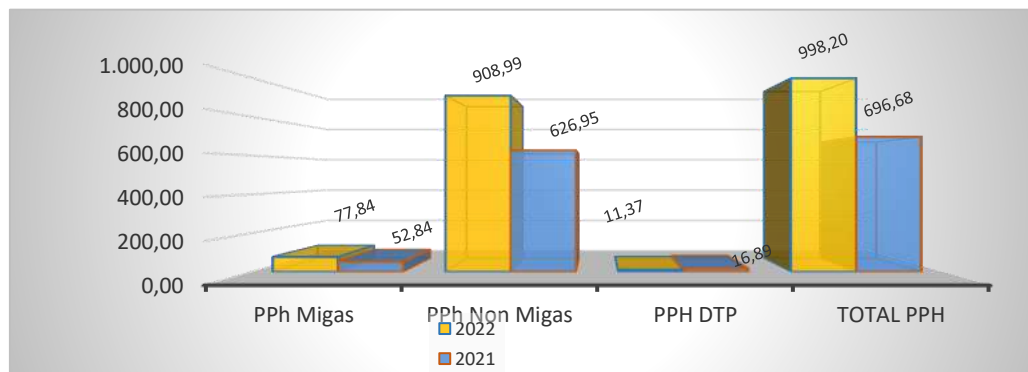
Rincian Pendapatan Perpajakan TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.1.1. Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp998.213.803.714.799** dan **Rp696.676.588.239.336**. Pajak Penghasilan pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp301.537.215.475.463 atau 43,28 % dari TA 2021. Adapun rincian Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
PPh Migas			
PPH Minyak Bumi	29.599.710.570.513	19.423.528.050.699	52,39%
PPH Gas Alam	48.239.737.523.971	33.414.132.762.937	44,37%
PPH Migas Lainnya	3.108.450.219	1.355.773.486	129,28%
Jumlah PPh Migas	77.842.556.544.703	52.839.016.587.122	47,32%
PPh Non Migas			
PPH Pasal 21	172.271.504.252.153	145.547.925.434.497	18,36%
PPH Pasal 22	33.047.948.496.551	22.793.787.953.073	44,99%
PPH Pasal 22 Import	74.199.825.147.250	40.474.042.207.718	83,33%
PPH Pasal 23	48.703.438.992.715	42.859.812.966.140	13,63%
PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.577.509.255.097	12.356.102.005.619	-6,30%
PPH Pasal 25/29 Badan	337.592.447.567.747	196.067.075.816.120	72,18%
PPH Pasal 26	65.293.293.607.543	56.940.836.263.524	14,67%
PPH Final	166.183.983.224.667	109.774.774.324.219	51,39%
PPH Non Migas Lainnya	129.343.789.152	130.949.178.360	1,23%
Jumlah PPh Non Migas	908.999.294.332.875	626.945.306.149.270	44,99%
Pendapatan PPH Ditanggung Pemerintah	11.371.952.837.221	16.892.265.502.944	-32,68%
Jumlah Pajak Penghasilan	998.213.803.714.799	696.676.588.239.336	43,28%

Rincian Pajak Penghasilan TA 2022 dan TA 2021



F.2.1.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp687.609.450.256.247** dan **Rp551.900.480.905.676**. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp135.708.969.350.571 atau 24,59 % dari TA 2021. Adapun rincian Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) adalah sebagai berikut:

	TA 2022	TA 2021	%
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	401.484.611.754.430	343.244.493.307.404	16,97%
PPN dan PPnBM Impor	275.593.721.527.266	194.853.082.483.190	41,44%
PPN dan PPnBM Lainnya	6.160.421.866.226	3.966.417.401.179	55,31%
PPN Ditanggung Pemerintah	4.370.695.108.325	9.836.487.713.903	-55,57%
Jumlah PPN dan PPnBM	687.609.450.256.247	551.900.480.905.676	24,59%

Rincian Pendapatan Pajak PPN & PPnBM TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp23.264.663.527.700** dan **Rp18.924.786.654.220**. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.339.876.873.480 atau 22,93 % dari TA 2021. Adapun rincian Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
PBB Perkebunan	2.979.222.049.742	3.025.469.507.897	-1,53%
PBB Kehutanan	774.422.597.198	825.388.636.421	-6,17%
PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	5.292.431.739.792	2.937.852.802.378	80,15%
PBB Pertambangan Minyak Bumi	13.711.084.449.060	11.594.155.744.835	18,26%
PBB Pertambangan Panas Bumi	490.714.138.086	445.582.008.684	10,13%
PBB Lainnya	16.788.553.822	96.337.954.005	-82,57%
Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan	23.264.663.527.700	18.924.786.654.220	22,93%

Rincian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.1.4. Cukai

Cukai pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp226.880.753.312.323** dan **Rp195.517.827.106.916**. Cukai pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp31.362.926.205.407 atau 16,04 % dari TA 2021. Adapun rincian Cukai adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Cukai Hasil Tembakau	218.621.484.007.231	188.811.334.187.553	15,79%
Cukai Ethyl/Alkohol	127.411.014.195	113.384.108.912	12,37%
Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	8.067.276.626.590	6.497.646.858.520	24,16%
Denda Administrasi Cukai	43.076.467.478	72.497.489.830	-40,58%
Cukai Lainnya	21.505.196.829	22.964.462.101	-6,35%
Jumlah Cukai	226.880.753.312.323	195.517.827.106.916	16,04%

Rincian Cukai TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.1.5. Pajak Lainnya

Pajak Lainnya pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 7.686.100.141.265** dan **Rp11.125.975.966.383**. Pajak Lainnya pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.439.875.825.118 atau 30,92 % dari TA 2021. Adapun rincian Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Pendapatan Pajak Lainnya			
Pendapatan Bea Materai	1.070.263.327.848	1.496.835.931.822	-28,50%
Pendapatan dari Penjualan Bea Materai	5.661.404.285.336	5.938.022.861.361	-4,66%
Pendapatan PPN Batubara	417.224.046.910	389.129.516.345	7,22%
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	3.659.888.938	6.812.576.468	-46,28%
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	7.152.551.549.032	7.830.800.885.996	-8,66%
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak			
Bunga Penagihan PPH	124.551.321.166	2.543.907.000.301	-95,10%
Bunga Penagihan PPN	408.996.871.067	751.217.832.361	-45,56%
Bunga Penagihan PPnBM	400.000	-	0%
Bunga Penagihan PTLL	-	50.247.725	0%
Jumlah Bunga Penagihan Pajak	533.548.592.233	3.295.175.080.387	-83,81%
Jumlah Pajak Lainnya (Netto)	7.686.100.141.265	11.125.975.966.383	-30,92%

Rincian Pajak Lainnya TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.1.6. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp90.897.665.517.741** dan **Rp73.695.392.772.093**. Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp17.202.272.745.648 atau sebesar 23,34 % dari TA 2021. Adapun rincian Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Bea Masuk:			
Bea Masuk	45.608.785.765.341	35.542.525.390.983	28,32%
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	749.777.238.893	678.410.166.473	10,52%
Bea Masuk dalam Rangka KITE	1.087.732.642.874	844.983.337.637	28,73%
Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (Transaksi Non Kas)	0	324.058.608.997	-100,00%
Pendapatan Pabean Lainnya	9.504.407.160	9.651.667.020	-1,53%
Bea Masuk Anti Dumping	320.462.589.000	233.486.773.590	37,25%
Bea Masuk Imbalan	0	0	0
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	3.301.463.950.342	1.489.556.221.083	121,64%
Jumlah Bea Masuk	51.077.726.593.610	39.122.672.165.783	30,56%
Bea Keluar:			

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Bea Keluar	39.781.491.339.398	34.572.646.928.879	15,07%
Denda Administrasi Bea Keluar	38.359.518.733	25.575.431	149.885,82%
Pendapatan Bunga Bea Keluar	88.066.000	48.102.000	83,08%
Jumlah Bea Keluar	39.819.938.924.131	34.572.720.606.310	15,18%
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	90.897.665.517.741	73.695.392.772.093	23,34%

Rincian Pajak Perdagangan Internasional TA 2022 dan TA 2021

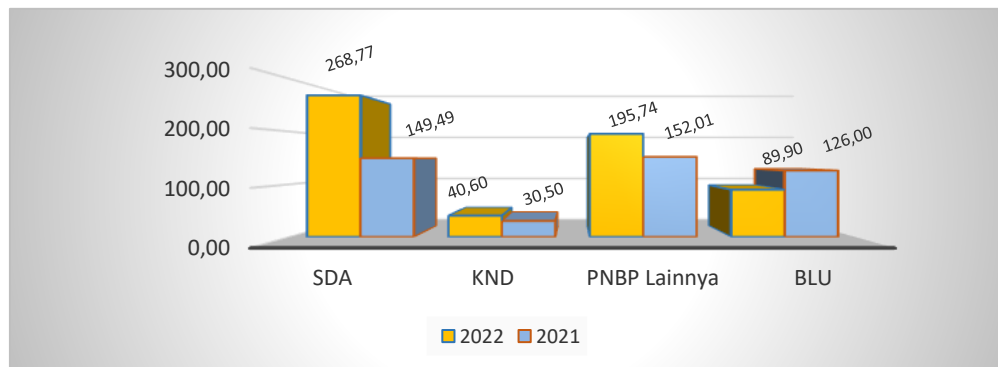
F.2.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp595.010.280.203.205** dan **Rp458.000.251.283.812**. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp137.010.028.919.393 atau 29,91 % dari TA 2021. Adapun rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Pendapatan SDA	268.770.896.270.784	149.489.367.918.723	79,79%
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	40.597.091.946.149	30.496.823.293.877	33,12%
Pendapatan PNBP Lainnya	195.739.979.810.678	152.011.308.573.915	28,77%
Pendapatan BLU	89.902.312.175.594	126.002.751.497.297	-28,65%
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	595.010.280.203.205	458.000.251.283.812	29,91%

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2022 dan TA 2021

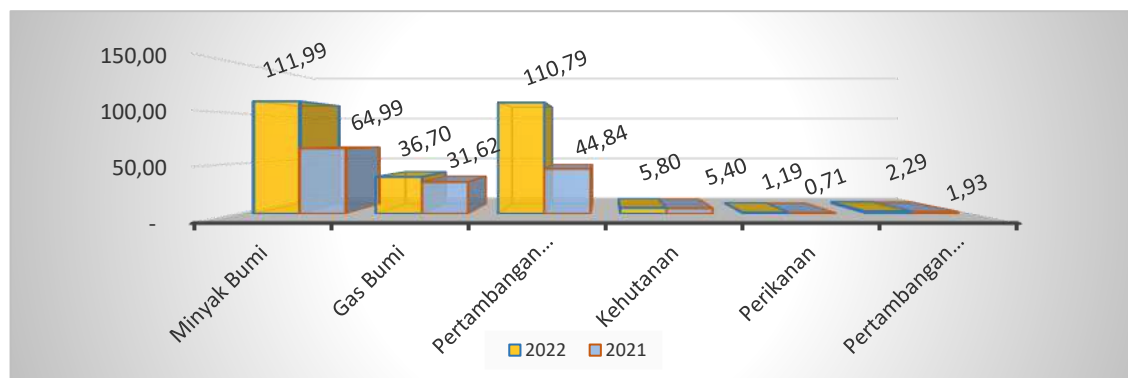


F.2.1.2.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp268.770.896.270.784** dan **Rp149.489.367.918.723**. Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp119.281.528.352.061 atau 79,79 % dari TA 2021. Adapun rincian Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Pendapatan Minyak Bumi	111.992.940.458.410	64.998.824.686.934	72,30%
Pendapatan Gas Bumi	36.705.949.688.708	31.617.569.168.427	16,09%
Pendapatan Pertambangan Umum	110.786.795.000.708	44.835.418.882.229	147,10%
Pendapatan Kehutanan	5.804.080.517.216	5.400.260.383.957	7,48%
Pendapatan Perikanan	1.192.945.829.371	708.187.057.318	68,45%
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.288.184.776.371	1.929.107.739.858	18,61%
Jumlah Pendapatan SDA	268.770.896.270.784	149.489.367.918.723	79,79%

Rincian Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2022 dan TA 2021



F.2.1.2.2. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp40.597.091.946.149** dan **Rp30.496.823.293.877**. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.100.268.652.272 atau 33,12 % dari TA 2021. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND adalah merupakan pendapatan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara. Adapun rincian Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	39.735.630.261.242	29.542.724.205.314	34,50%
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian Keuangan	861.461.684.907	954.099.088.563	-9,71%
Pendapatan dari KND Lainnya	0	0	0
Jumlah Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40.597.091.946.149	30.496.823.293.877	33,12%

Rincian Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.2.3. Pendapatan PNPB Lainnya

Pendapatan PNPB Lainnya pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp195.739.979.810.678** dan **Rp152.011.308.573.915**. Pendapatan PNPB Lainnya pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp43.728.671.236.763 atau 28,77 % dari TA 2021. Adapun rincian Pendapatan PNPB Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Pendapatan Klaim Asuransi	84.763.757.395.235	40.912.697.991.258	107,18%
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	22.171.748.332.761	15.099.928.308.373	46,83%
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	6.559.445.155.292	6.553.620.338.342	0,09%
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.192.602.721.151	4.403.240.629.309	-4,78%
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	27.825.117.011.476	27.746.212.411.403	0,28%
Pendapatan Jasa Lainnya	687.537.690.411	449.630.317.436	52,91%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	19.410.172.403.219	25.914.660.711.878	-25,10%
Pendapatan Denda	3.039.782.178.442	664.908.225.812	357,13%

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Pendapatan Lain-lain	27.089.816.922.691	30.266.409.640.104	10,50%
Jumlah PNBPN Lainnya	195.739.979.810.678	152.011.308.573.915	28,77%

Rincian Pendapatan PNBPN Lainnya TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp89.902.312.175.594** dan **Rp126.002.751.497.297**. Pendapatan Badan Layanan Umum pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp36.100.439.321.703 atau 28,65 % dari TA 2021. Adapun rincian Pendapatan Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	81.310.459.555.633	112.160.423.521.832	-27,51%
Pendapatan Hibah BLU	169.778.059.270	147.424.833.601	15,16%
Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	974.371.121.113	852.458.312.080	14,30%
Pendapatan dari Alokasi APBN	3.245.497.850.139	8.984.388.917.129	-63,88%
Pendapatan BLU Lainnya	4.202.205.589.439	3.858.055.912.655	8,92%
Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum	89.902.312.175.594	126.002.751.497.297	-28,65%

Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.3. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp5.696.055.413.792** dan **Rp5.013.042.434.686**. Pendapatan Hibah pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp683.012.979.106 atau 13,62% dari TA 2021. Pendapatan Hibah tersebut merupakan pendapatan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Pendapatan Hibah tersebut hanya merupakan pendapatan hibah berupa uang secara langsung maupun terencana. Adapun rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Hibah Dalam Negeri Langsung:			
Bentuk Uang-Perorangan	766.400.000	919.339.000	-16,64%
Bentuk Uang-Lembaga/Badan Usaha	130.825.019.513	108.156.511.422	20,96%
Bentuk Uang-Pemerintah Daerah	2.526.187.637.207	2.660.237.398.562	-5,04%
Bentuk Uang-Lainnya	14.915.464.452	301.471.087	4.847,56%
Jumlah Hibah Dalam Negeri	2.672.694.521.172	2.769.614.720.071	-3,50%
Hibah Luar Negeri Terencana:			
Bilateral	186.394.259.492	300.894.186.221	-38,05%
Multilateral	399.456.041.533	644.162.718.216	-37,99%
Hibah Luar Negeri Langsung:			
Perorangan	2.061.618.178	670.859.410	207,31%
Bilateral	96.937.080.633	655.413.721.245	-85,21%
Multilateral	2.314.500.561.582	605.830.425.519	282,04%
Lainnya	24.011.331.202	36.455.804.004	-34,14%
Jumlah Hibah Luar Negeri	3.023.360.892.620	2.243.427.714.615	34,77%
Jumlah Hibah	5.696.055.413.792	5.013.042.434.686	13,62%

Rincian Pendapatan Hibah TA 2022 dan TA 2021

Belanja Pegawai

F.2.1.4 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp402.441.656.300.334** dan **Rp387.752.487.126.783**. Belanja Pegawai pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.689.169.173.551 atau 3,79 % dari TA 2021. Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.886.751.274.793	86.041.290.682.924	0,98%
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	64.667.920.553.197	63.030.141.539.344	2,60%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.451.426.586.090	969.884.613.998	49,65%
Belanja Gaji Dokter PTT	1.414.494.400	1.732.049.000	-18,33%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	17.710.735.289.385	18.384.551.163.781	-3,67%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	536.846.863.726	61.258.265.740	776,37%
Belanja Honorarium	1.490.800.609.821	1.443.134.468.081	3,30%
Belanja Lembur	902.549.970.369	793.078.487.455	13,80%
Belanja Tunj.Khusus	84.032.922.061.487	77.910.076.413.470	7,86%
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	133.926.708.913.263	128.337.297.423.536	4,36%
Belanja Asuransi Kesehatan	10.833.579.683.803	10.780.042.019.454	0,50%
Jumlah Belanja Pegawai	402.441.656.300.334	387.752.487.126.783	3,79%

Rincian Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.5 Belanja Barang

Belanja Barang

Belanja Barang pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp426.149.081.519.090** dan **Rp530.059.299.058.191**. Belanja Barang pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp103.910.217.539.101 atau 19,60 % dari TA 2021. Belanja Barang adalah merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Adapun rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Belanja Barang	166.133.854.715.131	218.581.976.410.482	-23,99%
Belanja Jasa	41.614.533.719.335	37.749.376.423.475	10,24%
Belanja Pemeliharaan	44.489.975.895.976	40.466.311.285.722	9,94%
Belanja Perjalanan Dinas	37.975.602.578.401	27.233.886.140.437	39,44%
Belanja Badan Layanan Umum	79.477.221.388.001	91.811.567.555.041	-13,43%
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	56.156.161.774.746	114.216.181.243.034	-50,83%
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	301.731.447.500	0	0%
Jumlah Belanja Barang	426.149.081.519.090	530.059.299.058.191	-19,60%

Rincian Belanja Barang TA 2022 dan TA 2021

Penurunan belanja barang tersebut sebagian besar berasal dari Belanja Peralatan dan Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang/barang dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 antara lain berupa Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM), belanja bantuan subsidi upah, belanja pengadaan perlengkapan *cold chain* untuk vaksin COVID-19, dan lain-lain.

Adapun rincian belanja barang yang dicatat menggunakan akun khusus dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yaitu sebagai berikut :

Uraian	TA 2022
Belanja Barang	39.719.439.714.947
Belanja Jasa	1.125.633.232.352
Belanja Pemeliharaan	8.778.386.642
Belanja Perjalanan Dinas	137.200.997.764
Belanja BLU	598.071.864.805
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4.676.350.639.070
Jumlah Belanja Barang dalam rangka PC - PEN	46.265.474.835.580

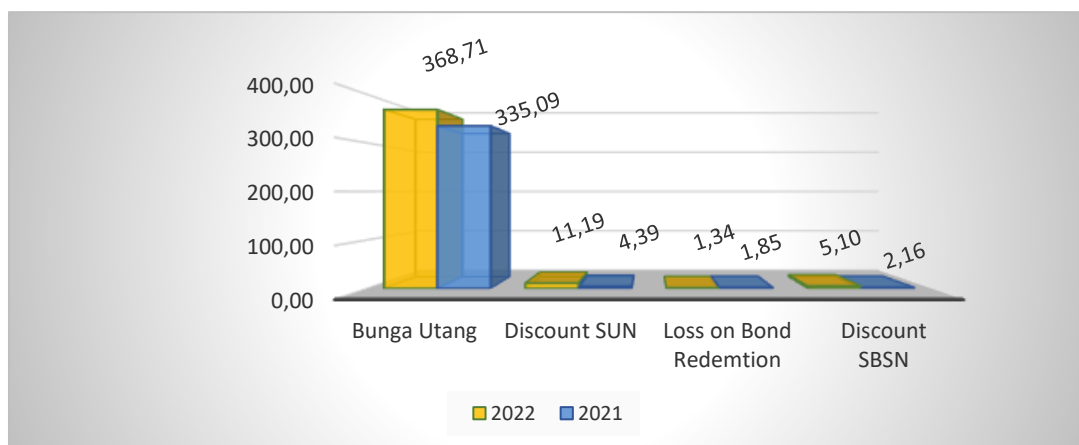
F.2.1.6 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

Belanja
Pembayaran
Kewajiban
Utang

Belanja Pembayaran Kewajiban Utang pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp386.341.819.789.815** dan **Rp343.495.383.443.849**. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp42.846.436.345.966 atau 12,47 % dari TA 2021. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga melalui rekening pengeluaran Bank Indonesia pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Adapun rincian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Bunga Utang	368.714.320.461.357	335.088.386.262.594	10,03%
Discount SUN	11.189.872.757.941	4.391.835.175.100	154,79%
Loss On Bond Redemption	1.337.452.801.614	1.854.340.752.507	-27,87%
Discount SBSN	5.100.173.768.903	2.160.821.253.648	136,03%
Jumlah Pembayaran Kewajiban Utang	386.341.819.789.815	343.495.383.443.849	12,47%

Rincian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TA 2022 dan TA 2021



F.2.1.6.1 Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp368.714.320.461.357** dan **Rp335.088.386.262.594**. Pembayaran Bunga Utang pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp33.625.934.198.763 atau 10,03 % dari TA 2021. Pembayaran Bunga Utang adalah merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Adapun rincian Pembayaran Bunga Utang adalah

sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Belanja Pemby.Bunga Utang Dalam Negeri-Jangka Panjang	283.640.557.355.017	260.625.340.032.116	8,83%
Belanja Pemb.lmbalan SBSN Dalam Negeri	72.349.854.787.991	63.830.791.962.156	13,35%
Belanja Pemb.Bunga Utang Luar Negeri-Jangka Panjang *)	12.723.908.318.349	10.632.254.268.322	19,67%
Jumlah Pembayaran Bunga Utang	368.714.320.461.357	335.088.386.262.594	10.03%

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2022 dan TA 2021

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar **Rp12.723.908.318.349** dan **Rp10.632.254.268.322**. Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar Rp2.091.654.050.027 atau 19,67 % dari TA 2021. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Adapun rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Belanja Bunga Pinjaman Program	5.883.922.682.379	4.677.300.545.522	25,80%
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	6.839.700.227.505	5.954.632.371.112	14,86%
Belanja Pembayaran Biaya Transfer	285.408.465	321.351.688	-11,19%
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	12.723.908.318.349	10.632.254.268.322	19,67%

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.6.2 Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara

Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp11.189.872.757.941** dan **Rp4.391.835.175.100**. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.798.037.582.841 atau 154,79% dari TA 2021. Adapun rincian Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara	1.392.880.725.000	1.146.477.741.000	21,49%
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara	9.047.825.130.195	2.334.364.811.200	287,59%
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	749.166.902.746	910.992.622.900	-17,76%
Jumlah Pembayaran Discount SUN	11.189.872.757.941	4.391.835.175.100	154,79%

Rincian Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.6.3 Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption*

Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption* pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp1.337.452.801.614** dan **Rp1.854.340.752.507**. Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption* pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp516.887.950.893 atau 27,87% dari TA 2021. Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption* merupakan belanja yang timbul saat pembelian kembali atau pelunasan atas obligasi negara saat jatuh tempo lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*).

F.2.1.6.4 Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara

Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp5.100.173.768.903** dan **Rp2.160.821.253.648**. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.939.352.515.255 atau 136,03% dari TA 2021. Adapun

rincian Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SBSN - Jangka Panjang	4.900.097.616.903	1.863.847.173.648	162,90%
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SPNS	200.076.152.000	296.974.080.000	-32,63%
Jumlah Pembayaran <i>Discount</i> SBSN	5.100.173.768.903	2.160.821.253.648	136,03%

Rincian Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.7 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 252.812.907.867.326 dan Rp242.086.818.340.688. Belanja Subsidi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.726.089.526.638 atau 4,43% dari TA 2021. Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Adapun rincian Belanja Subsidi sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Belanja Subsidi Perusahaan Negara Lembaga Non Keuangan-BBM	115.614.764.810.904	83.787.200.702.317	37,99%
Belanja Subsidi Perusahaan Negara Lembaga Non Keuangan-Non BBM	94.767.430.477.784	86.722.068.115.169	9,28%
Belanja Subsidi Perusahaan Negara Dalam Rangka PSO	6.309.491.129.344	5.682.106.762.209	11,04%
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	3.523.116.596.732	17.987.282.457.113	-80,41%
Belanja Subsidi - Darurat Bencana	32.598.104.852.562	47.908.160.303.880	-31,96%
Jumlah Belanja Subsidi	252.812.907.867.326	242.086.818.340.688	4,43%

Rincian Belanja Subsidi TA 2022 dan TA 2021

Adapun Belanja Subsidi Darurat Bencana dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp32.598.104.852.562 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2022
Belanja Subsidi Darurat Bencana I	
Belanja Subsidi Listrik	114.758.426.726
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	0
Belanja Subsidi Bunga KPR	0
Belanja Subsidi Bunga KUR	23.113.047.044.984
Belanja Subsidi PPh-DTP	2.496.064.677.101
Belanja Subsidi BM – DTP	0
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN	155.176.756.597
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program PEN	2.348.872.681.379
Belanja Subsidi PPh-DTP	3.258.885.627.759
Belanja Subsidi Darurat Bencana II	
Belanja Subsidi Pupuk Program PEN	0
Belanja Subsidi PPhBM-DTP	1.111.299.638.016
Jumlah Belanja Subsidi dalam rangka PC-PEN	32.598.104.852.562

Rincian Belanja Subsidi dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2022

F.2.1.8. Belanja Hibah**Belanja Hibah**

Belanja Hibah pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp5.803.272.496.643** dan **Rp4.319.001.438.779**. Belanja Hibah pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.484.271.057.864 atau 34,37% dari TA 2021. Belanja Hibah merupakan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri, Kepada Organisasi Internasional, Kepada Pemerintah Daerah dan Hibah Lainnya. Adapun rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	33.829.048.077	22.003.461.212	53,74%
Hibah Kepada Organisasi Internasional	13.676.743.266	10.021.136.406	36,48%
Hibah Kepada Pemerintah Daerah	5.755.516.300.341	4.286.871.920.443	34,26%
Hibah Lainnya (<i>Banking Commision</i>)	250.404.959	104.920.718	138,66%
Jumlah Belanja Hibah	5.803.272.496.643	4.319.001.438.779	34,37%

Rincian Belanja Hibah TA 2022 dan TA 2021

Kenaikan Belanja Hibah salah satunya karena pada TA 2022 terdapat kenaikan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah. Adapun realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah terbesar yang bersumber dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri adalah Hibah *Mass Rapid Transit* (MRT) sebesar Rp2.648.035.617.620 dengan *progress* proyek MRT untuk pekerjaan konstruksi Fase 2A (Bundaran HI-Monas) mencapai 39,72% serta untuk pekerjaan Monas-Kota mencapai 8,98% dan secara keseluruhan proyek Fase 2A (Bundaran HI-Kota) adalah sebesar 18,09%. Sedangkan realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah terbesar yang bersumber dari Pendapatan Dalam Negeri/Rupiah Murni adalah Hibah Air Minum (Pengelolaan *Nationwide Water Hibah Program*) sebesar Rp900.000.000.000 dan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RR) sebesar Rp523.926.466.000.

F.2.1.9. Belanja Bantuan Sosial**Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp161.523.078.405.990** dan **Rp173.654.105.302.037**. Belanja Bantuan Sosial pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.131.026.896.047 atau 6,99% dari TA 2021. Belanja Bantuan Sosial merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Rehabilitasi Sosial	614.198.479.237	90.228.950.992	580,71%
Jaminan Sosial	63.192.475.915.731	64.161.594.263.339	-1,51%
Pemberdayaan Sosial	177.267.352.566	131.476.520.977	34,83%
Perlindungan Sosial	30.840.927.705.975	30.051.591.067.275	2,63%
Penanggulangan Kemiskinan	62.227.287.274.121	72.224.248.514.507	-13,84%
Penanggulangan Bencana	4.470.921.678.360	6.994.965.984.947	-36,08%
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	161.523.078.405.990	173.654.105.302.037	-6,99%

Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021

Penurunan Belanja Bantuan Sosial pada TA 2022, didominasi oleh belanja bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang menurun sebesar Rp10.074.246.440.386 serta Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana yang menurun sebesar Rp2.524.044.306.587.

F.2.1.10. Belanja Lain-lain**Belanja
Lain-lain**

Belanja Lain-lain pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp404.385.774.531.710** dan **Rp79.704.425.627.134**. Belanja Lain-lain pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp324.681.348.904.576 atau 407,36% dari TA 2021. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan adanya pembayaran kompensasi atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran (HJE) BBM Tahun 2019, 2020, 2021, Semester I dan Triwulan III Tahun 2022 serta pembayaran kompensasi Tarif Tenaga Listrik (TTL) Tahun 2021, Semester I dan Triwulan III Tahun 2022.

Adapun rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	5.541.378.587.250	1.347.009.217.679	311,38%
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	93.648.376.675	86.755.531.200	7,95%
Belanja Lain-lain BUN	379.968.882.402.407	47.042.382.585.406	707,72%
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	16.381.452.464.426	22.863.339.664.231	-28,35%
Belanja Lain-lain Lainnya	2.400.412.698.186	8.364.938.627.603	-71,30%
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice	2.766	1.015	172,51%
Jumlah Belanja Lain-lain	404.385.774.531.710	79.704.425.627.134	407,36%

Rincian Belanja Lain-lain TA 2022 dan TA 2021

Pada periode TA 2022 terdapat Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat yang merupakan belanja lain-lain dalam rangka Program PEN dan penanganan pandemi COVID-19, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2022
Belanja Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas III	0
Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja	16.362.629.363.174
Belanja Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	18.823.101.252
Jumlah Belanja Lain-lain untuk Penanganan Pandemi COVID-19	16.381.452.464.426

Rincian Belanja Lain-lain dalam rangka Program PEN dan Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2022

F.2.1.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak**Transfer
Dana Bagi
Hasil Pajak**

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp62.998.688.562.915** dan **Rp71.777.109.535.555**. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.778.420.972.640 atau 12,23% dari TA 2021. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Adapun rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	37.677.680.471.742	40.140.026.086.073	-6,13%
Bagi Hasil PBB	25.321.008.091.173	31.637.083.449.482	-19,96%
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	62.998.688.562.915	71.777.109.535.555	-12,23%

Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.12. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

*Transfer
Dana Bagi
Hasil Sumber
Daya Alam*

Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp100.823.947.472.776** dan **Rp41.566.421.176.518**. Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp59.257.526.296.258 atau 142,56% dari TA 2021. Adapun rincian Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Bagi Hasil Minyak Bumi	14.388.156.301.036	8.453.991.849.717	70,19%
Bagi Hasil Gas Bumi	13.022.127.844.187	5.263.346.306.680	147,41%
Bagi Hasil Pertambangan Umum	68.713.989.486.607	21.343.854.565.786	221,94%
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	1.726.630.460.219	2.905.207.150.935	-40,57%
Bagi Hasil Kehutanan	1.868.480.715.683	2.748.072.053.851	-32,01%
Bagi Hasil Perikanan	1.104.562.665.044	851.949.249.549	29,65%
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	100.823.947.472.776	41.566.421.176.518	142,56%

Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai

*Transfer
Dana Bagi
Hasil Cukai*

Transfer Bagi Hasil Cukai pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp4.591.474.242.743** dan **Rp3.813.458.699.992**. Transfer Bagi Hasil Cukai pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp778.015.542.751 atau 20,40% dari TA 2021.

F.2.1.14. Transfer Dana Alokasi Umum

*Transfer
Dana Alokasi
Umum*

Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 378.000.000.000.000** dan **Rp377.791.390.288.000**. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp208.609.712.000 atau 0,06% dari TA 2021. Transfer Dana Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi/kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

F.2.1.15 Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik

*Transfer
Dana Alokasi
Khusus Fisik*

Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp54.783.954.054.112** dan **Rp57.069.673.906.021**. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.285.719.851.909 atau 4,01% dari TA 2021. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik adalah alokasi dari APBN kepada propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

F.2.1.16. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Dana Insentif Daerah (DID)

*Transfer
Dana Otsus,
Dana
Keistimewaa
n DIY dan*

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Dana Insentif Daerah (DID) pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp28.749.936.344.000** dan **Rp34.267.197.979.000**. Dana Otonomi Khusus pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.517.261.635.000 atau 16,10% dari TA 2021. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.

DID

Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Rincian Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut.

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Dana Otonomi Khusus Aceh	7.560.000.000.000	7.555.827.806.000	0,06%
Dana Otonomi Khusus Papua	8.187.594.963.000	7.911.837.607.000	3,49%
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	4.688.668.607.000	4.015.253.771.000	16,77%
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	0,00%
Dana Insentif Daerah	6.993.672.774.000	13.464.278.795.000	-48,06%
Jumlah Transfer Dana Otsus, DIY, DID	28.749.936.344.000	34.267.197.979.000	-16,10%

Rincian Transfer Dana Otsus, DIY, DID TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.17. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp118.380.687.000.719** dan **Rp127.568.624.079.263**. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.187.937.078.544 atau 7,20% dari TA 2021. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	47.740.858.795.736	55.752.963.456.199	-14,37%
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	991.045.485.177	420.101.290.000	135,91%
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.345.762.364.395	52.568.128.975.064	-2,33%
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	12.372.977.755.955	11.736.808.788.000	5,42%
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Kepariwisata	351.612.968.000	1.296.490.473.000	-72,88%
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan-Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD), Pendidikan Kesetaraan dan Museum dan Taman	4.899.777.558.456	5.323.882.800.000	-7,97%
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	114.052.500.000	77.786.205.000	46,62%

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Dana Fasilitas Penanaman Modal	221.756.002.000	193.510.092.000	14,60%
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	197.786.550.000	198.952.000.000	-0,59%
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	145.057.021.000	0	100,00%
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	118.380.687.000.719	127.568.624.079.263	-7,20%

Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 dan TA 2021

F.2.1.18. Dana Desa

Transfer
Dana Desa

Dana Desa pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp67.906.138.390.431** dan **Rp71.853.710.011.029**. Dana Desa pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.947.571.620.598 atau 5,49% dari TA 2021. Dana Desa merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sejak tahun 2021 Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan melalui penyaluran langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran tersebut dilakukan dengan cara pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten/Kota untuk kemudian dana pemotongan tersebut disalurkan ke RKD.

F.2.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas
Bersih dari
Aktivitas
Investasi
Aset Non
Keuangan

Arus Kas bersih netto dari Aktivitas Investasi pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **minus Rp347.174.022.486.045** dan **minus Rp383.858.647.637.838**. Arus Kas dari Aktivitas Investasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp36.684.625.151.793 atau 9,56% dari TA 2021. Kenaikan arus kas bersih netto dari Aktivitas Investasi pada TA 2022 terutama berasal dari adanya peningkatan penerimaan investasi pemerintah serta penurunan arus kas keluar pada penyertaan modal negara, pengeluaran pembiayaan dana bergulir dan pengeluaran pengembangan pendidikan nasional. Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Adapun rincian Arus Kas bersih netto dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Arus Masuk	28.333.153.856.434	25.389.967.277.263	11,59%
Dikurangi Arus Keluar	375.507.176.342.479	409.248.614.915.101	-8,24%
Arus Kas Bersih	(347.174.022.486.045)	(383.858.647.637.838)	-9,56%

F.2.2.1. Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pengelolaan
dan Penjualan
BMN

Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp584.273.977.400** dan **Rp492.727.054.810**. Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp91.546.922.590 atau 18,58% dari TA 2021. Pengelolaan dan Penjualan BMN adalah merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah tinggal, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Adapun rincian Pengelolaan dan Penjualan BMN adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	15.693.033.806	6.497.829.791	141,51%
Penjualan Peralatan dan Mesin	192.382.505.577	187.079.938.603	2,83%
Penjualan Sewa Beli	7.513.819.425	6.492.854.218	15,72%
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	0	26.628.799.000	-100,00%
Pemindahtanganan BMN Lainnya	361.215.427.609	239.694.624.098	50,70%
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	7.469.190.983	26.333.009.100	-71,64%
Jumlah Pengelolaan & Penjualan BMN	584.273.977.400	492.727.054.810	18,58%

F.2.2.2. Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penjualan Aset
Restrukturisasi

Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp667.176.265.512** dan **Rp459.418.995.546**. Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp207.757.269.966 atau 45,22% dari TA 2021. Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Adapun rincian Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	643.617.367.500	396.116.268.510	62,48%
Penjualan/Penyelesaian Aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	23.558.898.012	63.302.727.036	-62,78%
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	667.176.265.512	459.418.995.546	45,22%

Rincian Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2022 dan TA 2021

F.2.2.3. Penerimaan Dana Bergulir

Penerimaan
Dana Bergulir

Penerimaan Dana Bergulir pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp22.000.000.000** dan **Rp0**. Penerimaan Dana Bergulir pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp22.000.000.000.

F.2.2.4. Penerimaan Investasi Pemerintah

Penerimaan
Investasi
Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp27.059.703.613.522** dan **Rp24.437.821.226.907**. Penerimaan Investasi Pemerintah pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.621.882.386.615 atau 10,73% dari TA 2021. Penerimaan Investasi Pemerintah merupakan Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah. Rincian penerimaan investasi pemerintah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Penerimaan Pengembalian Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	2.311.496.745.459	1.580.221.699.540	46,27%
Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara	16.047.063.368.063	22.857.599.527.367	-29,79%
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen atas Transaksi pada Rekening Investasi BUN	8.701.143.500.000	0	0%
Jumlah	27.059.703.613.522	24.437.821.226.907	10,73%

F.2.2.5. Belanja Modal

Belanja Modal

Belanja Modal pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp240.570.302.124.070** dan **Rp239.632.253.549.976**. Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp938.048.574.094 atau 0,39% dari TA 2021. Kenaikan Belanja Modal terbesar terdapat pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp15.286.130.108.147 dibanding dengan TA 2021. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Modal Tanah	19.595.016.027.337	26.723.352.041.155	-26,67%
Peralatan dan Mesin	100.701.911.264.860	85.415.781.156.713	17,90%
Gedung dan Bangunan	30.368.008.162.912	29.507.430.578.203	2,92%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.951.253.743.088	85.595.377.571.642	-14,77%
Lainnya	6.754.076.109.763	5.957.791.964.587	13,37%
Modal BLU	10.200.036.816.110	6.432.520.237.676	58,57%
Jumlah Belanja Modal	240.570.302.124.070	239.632.253.549.976	0,39%

Rincian Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021

Rincian Belanja Modal dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 pada TA 2022 senilai Rp2.524.431.876.112 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19	1.804.302.845.675
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19	339.325.528.340
Belanja Modal Lainnya Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19	359.827.343.134
Belanja Modal BLU Darurat Bencana Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19	20.976.158.963
Jumlah Belanja Modal Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19	2.524.431.876.112

Rincian Belanja Modal Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2022

F.2.2.6. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional

Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional

Pembiayaan Pengembangan Pendidikan pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp20.000.000.000.000** dan **Rp29.000.000.000.000**. Pembiayaan Pengembangan Pendidikan pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.000.000.000.000 atau 31,03% dari TA 2021.

F.2.2.7. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp18.620.000.000.000**. Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp18.620.000.000.000 atau 100,00% dari TA 2021.

F.2.2.8. Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp60.664.867.718.409** dan **Rp93.092.721.792.114**. Penyertaan Modal Negara pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp32.427.854.073.705 atau 34,83% dari TA 2021. Penyertaan Modal Negara adalah penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, PMN/Dana

Investasi Pemerintah. Adapun rincian Penyertaan Modal Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	59.158.999.889.336	71.184.999.994.500	-16,89%
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan	1.005.867.829.073	907.721.797.614	10,81%
PMN Lainnya	500.000.000.000	21.000.000.000.000	-97,62%
Jumlah Penyertaan Modal Negara	60.664.867.718.409	93.092.721.792.114	-34,83%

Rincian Penyertaan Modal Negara TA 2022 dan TA 2021

Penyertaan Modal Negara pada BUMN untuk Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	BUMN/Lembaga/Badan Lainnya	TA 2022
1.	PT Sarana Multigriya Finansial	2.000.000.000.000
2.	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	1.085.000.000.000
3.	PT Garuda Indonesia	7.499.999.969.336
4.	PT Kereta Api Indonesia	3.200.000.000.000
5.	PT Perusahaan Listrik Negara	5.000.000.000.000
6.	PT Adhi Karya Persero TBK	1.975.999.942.400
7.	PT Bank Tabungan Negara	2.479.999.977.600
8.	Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)	1.568.000.000.000
9.	PT Hutama Karya	31.350.000.000.000
10.	Penerimaan pada RIPPEN untuk disalurkan ke Rekening Penampungan PMN pada Waskita Karya	3.000.000.000.000
Jumlah		59.158.999.889.336

Rincian Penyertaan Modal Negara pada BUMN TA 2022

F.2.2.9. Pengeluaran Investasi Pemerintah

*Pengeluaran
Investasi
Pemerintah*

Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp54.272.006.500.000** dan **Rp28.903.639.573.011**. Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp25.368.366.926.989 atau 87,77% dari TA 2021. Adapun rincian Pengeluaran Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Investasi Pemerintah	53.141.143.500.000	26.187.903.573.011	102,92%
Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah	1.130.863.000.000	2.715.736.000.000	-58,36%
Jumlah Pengeluaran Investasi Pemerintah	54.272.006.500.000	28.903.639.573.011	87,77%

Rincian Pengeluaran Investasi Pemerintah TA 2022 dan TA 2021

Pada Pengeluaran Investasi Pemerintah tersebut terdapat pembiayaan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain:

1. Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam bentuk Penyaluran Investasi Pemerintah pada PT Perkebunan Nusantara III dalam rangka Program PEN (RIPPEN) sebesar Rp1.201.143.500.000,
2. Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp814.000.000.000

Arus Kas bersih
dari Aktivitas
Pendanaan

F.2.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp698.166.134.429.528** dan **Rp1.016.442.284.731.433**. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp318.276.150.301.902 atau 31,31% dari TA 2021. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Adapun rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Arus Masuk	1.219.817.004.057.156	1.577.319.446.472.881	-22,67%
Dikurangi Arus Keluar	521.650.869.627.628	560.877.161.741.448	6,99%
Arus Kas Bersih	698.166.134.429.528	1.016.442.284.731.433	-31,31%

F.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan
Pembiayaan
Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp1.107.581.763.373.185** dan **Rp1.499.216.728.033.309**. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp391.634.964.660.124 atau 26,12% dari TA 2021. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Penerimaan Pembiayaan DN-Perbankan	0	143.966.330.873.078	-100,00%
Penjualan Surat Berharga Negara-Rupiah	973.418.285.498.601	1.177.926.764.401.916	-17,36%
Penjualan Surat Berharga Negara-Valas	124.037.949.770.694	174.841.489.803.384	29,06%
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	10.125.528.103.890	2.482.142.954.931	307,93%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	1.107.581.763.373.185	1.499.216.728.033.309	26,12%

Rincian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2022 dan TA 2021

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri berasal dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan pada TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar **Rp0** dan **Rp143.966.330.873.078**. Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan sebesar Rp143.966.330.873.078 atau 100,00% dari TA 2021. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan berasal dari Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Penerimaan Pembiayaan SAL *Earmark*, dimana pada TA 2022 tidak terdapat Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Penerimaan Pembiayaan SAL *Earmark*.

b. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) - Rupiah

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan

Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar **Rp973.418.285.498.601** dan **Rp1.177.926.764.401.916** dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	68.605.000.000.000	55.345.000.000.000	23,96%
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara	648.951.017.006.441	840.144.389.319.300	-22,76%
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	209.102.808.095.159	234.411.315.731.835	-10,80%
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	17.223.000.000.000	20.450.000.000.000	-15,78%
Penerimaan Penerbitan SBSN Dalam Rangka Pembiayaan Proyek	29.536.460.397.001	27.576.059.350.781	7,11%
Jumlah Penerimaan SBN-Rupiah	973.418.285.498.601	1.177.926.764.401.916	-17,36%

Rincian Penerimaan Pembiayaan SBN (Rp) TA 2022 dan TA 2021

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan SBN Rupiah sebesar Rp204.508.478.903.315 atau 17,36% dari TA 2021. Terdapat Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program PEN sebesar Rp 207.423.350.000.000.

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) – Valas

Penerimaan pembiayaan SBN – Valuta Asing pada TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar **Rp124.037.949.770.694** dan **Rp174.841.489.803.384**, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Penerbitan Penjualan Obligasi Luar Negeri-Valas	74.532.499.770.694	132.055.489.803.384	-43,56%
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas-Jangka Panjang	49.505.450.000.000	42.786.000.000.000	15,70%
Jumlah Penerimaan SBSN-Valas	124.037.949.770.694	174.841.489.803.384	-29,06%

Rincian Penerimaan Pembiayaan SBN (Valas) TA 2022 dan TA 2021

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan SBN – Valuta Asing sebesar Rp50.803.540.032.690 atau 29,06 persen dari TA 2021, yang berasal dari penurunan Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Luar Negeri – Valuta Asing sebesar Rp57.522.990.032.690 atau turun 43,56 persen serta berasal dari peningkatan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas – Jangka Panjang sebesar Rp6.719.450.000.000 atau turun 15,7 persen.

d. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN pada TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar **Rp10.125.528.103.890** dan **Rp2.482.142.954.931**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	10.125.528.103.890	2.482.142.954.931	307,93%
• Bank Mandiri	7.542.277.411.856	1.530.642.517.481	392,75%
• PT. BNI (Persero)	2.583.250.692.034	951.500.437.450	171,49%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dari BUMN	10.125.528.103.890	2.482.142.954.931	307,93%

F.2.3.2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan
Pembiayaan
Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp108.283.083.586.601** dan **Rp74.168.116.606.248**. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp34.114.966.980.353 atau 46,00% dari TA 2021. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari Pinjaman Program/Tunai dan Pinjaman Proyek/Kegiatan. Pinjaman Proyek/Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN.

Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Pinjaman Program / Tunai	65.592.711.439.666	41.564.200.800.000	57,81%
Pinjaman Proyek / Kegiatan	42.690.372.146.935	32.603.915.806.248	30,94%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	108.283.083.586.601	74.168.116.606.248	46,00%

Rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2022 dan TA 2021

Penerimaan
Pengembalian
Pemberian
Pinjaman

F.2.3.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 3.952.157.097.370** dan **Rp3.934.601.833.324**. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp17.555.264.046 atau 0,45% dari TA 2021. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	29.858.499.715	18.586.038.219	60,65%
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri	3.922.298.597.655	3.916.015.795.105	0,16%
Jumlah Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	3.952.157.097.370	3.934.601.833.324	0,45%

Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2022 dan TA 2021

F.2.3.4. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain

Penerimaan
Pembiayaan
Lain-Lain

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan Lain-lain baik pada TA 2022 maupun pada TA 2021.

F.2.3.5. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan
Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2022 dan TA 2021 sebesar Rp440.563.575.597.568 dan Rp476.799.680.989.751. Realisasi pengeluaran pembiayaan dalam negeri pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp36.236.105.392.183 atau 7,60% dari TA 2021. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Pelunasan SBN-Rupiah	342.589.967.131.663	381.657.085.537.740	-10,24%
Pelunasan SBN-Valas	96.049.362.716.256	93.604.631.220.262	2,61%
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	1.924.245.749.649	1.537.964.231.749	25,12%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	440.563.575.597.568	476.799.680.989.751	7,60%

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2022 dan TA 2021

F.2.3.6. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan
Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp79.281.905.245.457 dan Rp82.082.980.389.501. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp-Rp2.801.075.144.044 atau 3,41% dari TA 2021. Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Cicilan Pokok Utang LN-Pinjaman Tunai	37.619.613.777.567	35.813.236.693.591	5,04%
Cicilan Pokok Utang LN-Pinjaman Kegiatan	41.662.291.467.890	46.269.743.695.910	-9,96%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan LN	79.281.905.245.457	82.082.980.389.501	-3,41%

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2022 dan TA 2021

F.2.3.7. RDI/RPD

RDI/RPD

RDI/RPD pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.805.388.784.603 dan Rp1.994.500.362.196. RDI/RPD pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp189.111.577.593 atau 9,48% dari TA 2021. RDI/RPD adalah pengeluaran pemerintah atas pemberian pinjaman luar negeri yang diberikan untuk Pemda/BUMN/BUMD melalui RDI/RPD

F.2.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**Arus Kas
Bersih dari
Aktivitas
Transitoris**

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp20.042.387.123.266** dan **Rp39.284.569.942.339**. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris sampai dengan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp-19.242.182.819.073 atau 48,98% dari TA 2021. Kenaikan Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris TA 2022 terutama berasal dari kenaikan transaksi Netto Non Anggaran Pihak Ketiga. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Adapun rincian Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Perhitungan Fihak Ketiga (Netto)	151.170.449.070	(267.579.611.995)	-156,50%
Transito (Netto)	(3.468.162.038.412)	(19.209.339.592.828)	-81,95%
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga	23.360.027.823.784	58.761.639.376.438	-60,25%
Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	(649.111.176)	(150.229.276)	332,08%
Arus Kas Bersih	20.042.387.123.266	39.284.569.942.339	-48,98%

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 dan TA 2021

F.2.4.1. Perhitungan Fihak Ketiga (Netto)**Perhitungan
Fihak Ketiga**

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp151.170.449.070** dan **minus Rp267.579.611.995**. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp418.750.061.065 atau 156,50% dari TA 2021. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) atau diterima secara tunai untuk fihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada fihak ketiga yang berhak menerimanya dan transitoris Fihak Ketiga. Adapun rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK			
Penerimaan PFK 10% Gaji	25.504.271.807.301	24.968.884.217.094	2,14%
Penerimaan PFK Beras BULOG	301.458.681.292	281.419.699.507	7,12%
Penerimaan PFK 3% Iuran Kesehatan Pemda	9.730.400.014.403	9.442.753.100.307	3,05%
Penerimaan PFK 2% Simpanan Peserta TAPERA	1.074.346.520	3.483.302.316	-69,16%
Potongan PFK 1% Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	4.340.889.187	3.460.625.827	25,44%
Penerimaan PFK Lain-lain	507.093.858.839	296.018.630.522	71,30%
Penerimaan PFK Setoran Pajak Rokok	89.956.796.341.185	91.994.759.261.313	-2,22%
Jumlah Penerimaan PFK	126.005.435.938.727	126.990.778.836.886	-0,78%
PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji	22.021.688.086.123	22.006.532.844.474	0,07%
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	2.028.180.273.264	1.967.712.362.212	3,07%
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	301.480.627.378	281.447.529.747	7,12%

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Jaminan Kesehatan	11.327.710.057.307	10.762.661.675.729	5,25%
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	-	-	-
Pengembalian Penerimaan PFK 1 % Jaminan Kesehatan anggota keluarga Lain	3.895.699.233	3.519.732.043	10,68%
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	517.251.051.376	229.976.913.522	124,91%
Pengeluaran PFK Setoran Pajak Rokok	89.654.059.694.976	92.006.507.391.154	-2,56%
Jumlah Pengeluaran PFK	125.854.265.489.657	127.258.358.448.881	-1,10%
JUMLAH PFK (Netto)	151.170.449.070	(267.579.611.995)	-156,50%

Rincian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2022 dan TA 2021

F.2.4.2. Transito (Netto)

Transito

Transito pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **minus Rp3.468.162.038.412** dan **minus Rp19.209.339.592.828**. Transito pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp15.741.177.554.416 atau 81,95% dari TA 2021. Transito merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) TA berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima TA berjalan maupun TA yang lalu. Adapun rincian transito adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Penerimaan Transito:			
Penerimaan Transito	9.307.539.574.005	13.081.021.993.111	-28,85%
Penerimaan Persekot/Uang Muka	-	1.317.760	-100,00%
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	76.949.092.307.037	143.797.349.038.589	-46,49%
Penerimaan Escrow	29.805.455.049.871	8.038.704.086.097	270,77%
Jumlah Penerimaan Transito	116.062.086.930.913	164.917.076.435.557	-29,62%
Pengeluaran Transito:			
Pengeluaran Transito	9.214.959.096.181	12.554.823.347.373	-26,60%
Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan	76.934.674.527.894	143.828.663.303.924	-46,51%
Pengeluaran Escrow	33.380.615.345.250	27.742.929.377.088	20,32%
Jumlah Pengeluaran Transito	119.530.248.969.325	184.126.416.028.385	-35,08%
Jumlah Transito (Netto)	(3.468.162.038.412)	(19.209.339.592.828)	-81,95%

Rincian Transito TA 2022 dan TA 2021

F.2.4.3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp23.360.027.823.784** dan **Rp58.761.639.376.438**. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp35.401.611.552.654 atau 60,25% dari TA 2021. Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena kesalahan rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RKUN yang ditangguhkan, kesalahan sistem perbankan dan koreksi pemindahbukuan. Adapun rincian Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA			
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	3.668.620.729	1.962.022.738	86,98%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	67.653.593.843.752	47.477.366.601.063	42,50%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.174.714.894.129.600	1.409.833.250.304.163	-16,68%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	718.693.308.384	6.466.246.645.221	-88,89%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	637.136.376.401.370	646.338.286.452.734	-1,42%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus	12.235.900.092.053	9.279.438.271.091	31,86%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	59.240.475.106.648	109.300.000.000.000	-45,80%
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Sistem Perbankan	24.788.242.815.554	77.922.666.557.397	-68,19%
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	1.976.491.844.318.090	2.306.619.216.854.404	-14,31%
PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA			
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	3.632.606.027	2.166.309.621	67,69%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	67.656.545.297.434	47.631.378.880.325	42,04%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.104.622.742.269.127	1.375.871.284.489.847	-19,71%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	47.607.131.905.781	48.470.815.149.654	-1,78%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	636.976.599.635.567	646.129.859.804.299	-1,42%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus	12.239.255.767.493	9.279.438.271.091	31,90%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	59.240.475.106.648	42.550.000.000.000	39,23%
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Sistem Perbankan	24.785.433.906.236	77.922.634.573.129	-68,19%
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	1.953.131.816.494.313	2.247.857.577.477.969	-13,11%
Jumlah Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	23.360.027.823.784	58.761.639.376.438	-60,25%

Rincian Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga TA 2022 dan TA 2021

F.2.4.4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)

Kiriman Uang

Kiriman Uang Antar Rekening Bank pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **minus Rp649.111.176** dan **minus Rp150.229.276**. Kiriman Uang Antar Rekening Bank pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp498.881.900 atau 332,08% dari TA 2021. Kiriman Uang (KU) antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan sebaliknya. Pemindahbukuan intern rekening BUN dan pemindahbukuan intern KPPN. Dalam transaksi KU TA 2022 dan TA 2021 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi

Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Adapun rincian Kiriman Uang Antar Rekening Bank adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2022	TA 2021	%
Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank	20.410.110.617.317.699	17.580.778.454.639.782	16,09%
Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank	20.410.111.266.428.875	17.580.778.604.869.058	16,09%
Jumlah Kiriman Uang (Netto)	(649.111.176)	(150.229.276)	332,08%

Rincian Kiriman Uang antar Rekening Bank TA 2022 dan TA 2021

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2022 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
A. EKUITAS AWAL	(2.842.111.919.515.711)	(2.195.273.055.887.776)
B. SURPLUS/DEFISIT LO	(1.718.001.589.034.153)	(1.363.201.787.285.963)
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		
1. Koreksi Nilai Persediaan	500.000	2.965.004
2. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi	4.723.195.634.678	22.802.496.709.964
3. Revaluasi Aset	-	-
4. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	5.281.424.623.005	7.046.876.393.764
5. Koreksi SAL	9.431.660.376.686	(1.175.557.546.736)
6. Lain-lain	(20.785.248.684.369)	81.833.658.550.378
Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	(1.348.967.550.000)	110.507.477.072.374
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1.301.105.973.365.087	584.151.119.512.999
E. KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI :	0	0
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L		
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran	(32.123.110.511)	(483.011.012.029)
2. Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah	1.150.651.829.898	(2.117.759.564.152)
3. Mutasi Kas BLU	(3.022.293.280.385)	24.305.097.648.836

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN Di K/L	(1.903.764.560.998)	21.704.327.072.655
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	(420.148.347.780.064)	(646.838.863.627.935)
G. EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E)	(3.262.260.267.295.775)	(2.842.111.919.515.711)

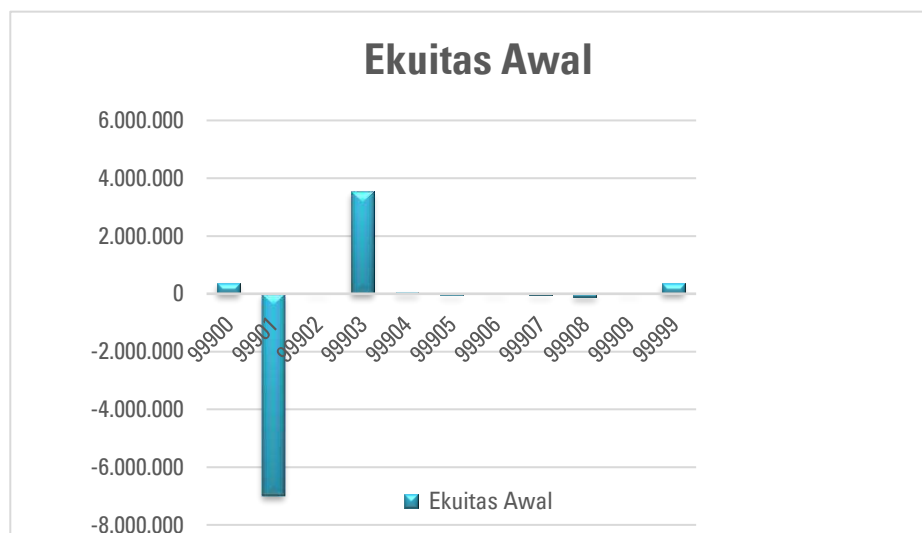
G.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.2.1. EKUITAS AWAL

*Ekuitas
Awal*

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar minus Rp2.842.111.919.515.711. Rincian nilai Ekuitas awal tersebut adalah:

Kode BA	Uraian BA BUN	Ekuitas Awal 2022	Ekuitas Awal 2021
999.00	Akuntansi Pusat	374.294.862.224.462	452.415.931.706.685
999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(7.002.922.160.308.459)	(6.164.224.439.381.990)
999.02	BA BUN Hibah	2.948.996.133	502.439.993.075
999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	3.536.884.490.200.420	3.250.422.732.601.557
999.04	BA BUN Pen erusan Pinjaman	63.094.611.585.043	67.659.310.012.518
999.05	BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Des	(25.868.774.753.208)	(31.510.791.045.453)
999.06	BA BUN BSBL Likuidasi	-	-
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(34.037.729.327.802)	(33.012.354.618.263)
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(107.218.916.164.076)	(56.454.399.366.235)
999.09	Badan Lainnya	24.344.018.870.873	17.297.142.477.109
999.99	BA BUN Transaksi Khusus	350.419.211.832.015	323.224.317.458.707
Jumlah Ekuitas Awal		(2.821.007.436.844.599)	(2.173.680.110.162.287)
Eliminasi		(21.104.482.671.112)	(21.592.945.725.489)
Ekuitas Setelah eliminasi		(2.842.111.919.515.711)	(2.195.273.055.887.776)

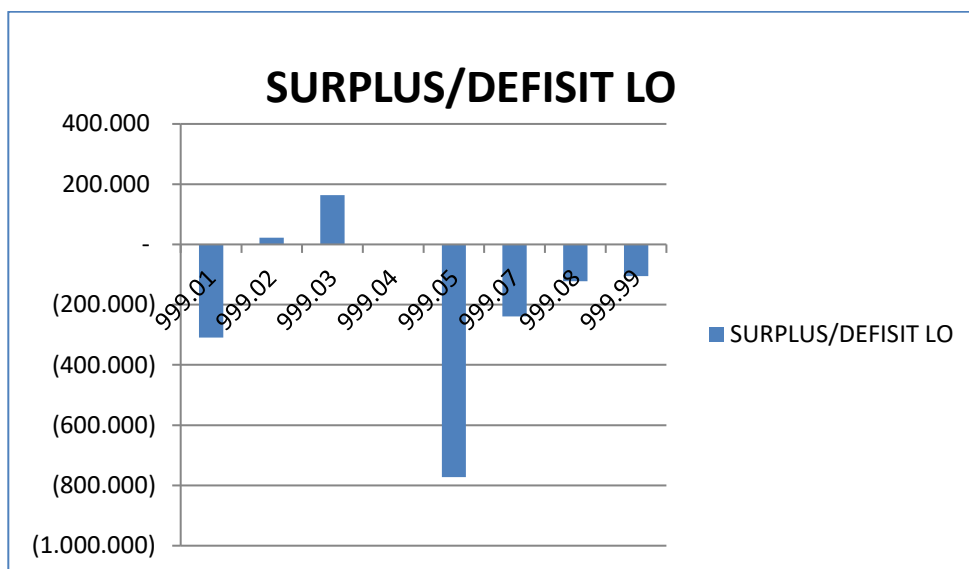


G.2.2. SURPLUS/DEFISIT LO

*Surplus
(defisit) LO*

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **minus Rp1.718.001.589.034.153** dan minus **Rp1.363.201.787.285.963**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Rincian nilai Defisit LO adalah:

No	UNIT		31 DESEMBER 2022	31 Desember 2021
	KODE	URAIAN		
1	999.01	BA BUN Utang	(549.237.791.548.700)	(308.770.276.630.913)
2	999.02	BA BUN Hibah	12.269.174.227.271	22.083.062.082.658
3	999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	251.598.530.961.114	163.525.716.287.441
4	999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	1.167.410.036.380	(1.390.025.404.201)
5	999.05	BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(818.910.256.445.429)	(772.350.221.916.656)
6	999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(253.107.160.573.801)	(239.291.008.977.806)
7	999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(362.940.812.213.784)	(121.633.802.934.176)
8	999.99	BA BUN Transaksi Khusus	963.306.188.692	(105.574.194.760.787)
JUMLAH			(1.718.197.599.368.257)	(1.363.400.752.254.440)
Penyesuaian			196.010.334.104	198.964.968.477
JUMLAH AKHIR			(1.718.001.589.034.153)	(1.363.201.787.285.963)



G.2.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

*Koreksi-
Koreksi
Yang
Langsung
Menambah/
Mengurangi
Ekuitas*

Jumlah Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar **minus Rp1.348.967.550.000** dan **Rp110.507.477.072.374** dengan rincian sebagai berikut :

KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Koreksi Nilai Persediaan	500.000	2.965.004
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.723.195.634.678	22.802.496.709.964
Revaluasi Aset	-	-
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	5.281.424.623.005	7.046.876.393.764
Koreksi SAL	9.431.660.376.686	(1.175.557.546.736)
Lain-lain	(25.156.564.215.892)	81.544.160.464.478
TOTAL	(5.720.283.081.523)	110.217.978.986.474
Eliminasi	4.371.315.531.523	289.498.085.900
JUMLAH	(1.348.967.550.000)	110.507.477.072.374

G.2.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi
Nilai AT
Non
Revaluasi*

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 500.000** dan **Rp2.965.004**. Koreksi nilai persediaan tahun 2022 sebesar Rp 500.000 pada Badan Pengusahaan Kawasan BP Batam yang merupakan Persediaan pada transaksi

Pita Cukai, Materai dan Leges pada BP Bintang karena mengalami pencatatan ganda.

G.2.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap / Aset lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi sebesar **Rp4.723.195.634.678** dan **Rp22.802.496.709.964** dengan rincian sebagai berikut:

BA	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi	Total
999.03	-	141.203.754.502	141.203.754.502
999.08	126.610.907.944	88.400.000	126.699.307.944
999.99	-	4.455.292.572.232	4.455.292.572.232
	126.610.907.944	4.596.584.726.734	4.723.195.634.678

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi sebesar **Rp4.723.195.634.678** dengan rincian sebagai berikut:

1. BA 999.03 sebesar **Rp141.203.754.502** merupakan koreksi nilai akumulasi penyusutan aset kelolaan pada KPA Satker BLU LMAN, yang meliputi :
 - a) Koreksi atas kelebihan saji maintenance/upgrade aset eks PPA di tahun 2021 sebesar **Rp1.727.000** (mengurangi ekuitas).
 - b) Pengakuan kembali atas line item Aset Kilang eks LNG Arun yang sebelumnya terindikasi telah dihibahkan namun berdasarkan penelitian lanjutan ternyata sedang dilakukan pemanfaatan melalui skema sewa guna senilai **Rp711.515.821** (menambah ekuitas)
 - c) Koreksi yang mengurangi ekuitas atas transaksi penarikan 6 unit properti investasi eks HTBI batch III di Medan, Mataram, Probolinggo, Jakarta Barat, dan Bogor sebesar **Rp36.566.492.925** (bersih setelah akumulasi penyusutan).
 - d) koreksi yang menambah ekuitas sebesar **Rp177.060.458.606** yang terdiri atas transaksi :
 - penerimaan penyerahkelolaan properti investasi eks BPPN di Taman Sari Karawaci kepada Entitas dengan nilai **Rp169.284.208.606**;
 - penerimaan penyerahkelolaan properti investasi eks BPPN di Medan dan Padang kepada Entitas dengan nilai **Rp7.774.400.000**;
 - penerimaan penambahan aset kelolaan eks Pertamina dari hasil Kerja Sama Manajerial Kawasan Lapangan Golf Ciperna sebesar **Rp1.850.000**

2. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp126.699.307.944. Koreksi atas Aset Tetap /Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp126.699.307.944 dan minus Rp100.033.663.842. Koreksi tersebut terdapat pada:
 - a. OJK sebesar minus Rp12.952.884.940 yang merupakan Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi.
 - b. BP Batam sebesar Rp139.563.792.884 yang merupakan nilai koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.
 - c. BP Batam sebesar Rp88.400.000 yang merupakan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi.
3. BA 999.99 sebesar Rp4.455.292.572.232 terdapat pada DJKN dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah Rp45.670.961.043. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset lainnya yang bukan dikarenakan hasil revaluasi. Koreksi ini berasal dari :
 1. Koreksi tambah pada PT Kendilo Coal Indonesia sebesar Rp160.623.958,
 2. Koreksi tambah akumulasi penyusutan sebesar Rp44.635.643.439 dengan rincian yaitu :
 - PT Arutmin Indonesia sebesar Rp1;
 - PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp60.729.210;
 - PT Berau Coal sebesar Rp102.843.194;
 - PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp36.643.455.025; dan
 - PT Adaro Indonesia sebesar Rp7.828.616.009
 3. koreksi kurang akumulasi penyusutan pada PT Multi Harapan Utama sebesar Rp107.625.000; dan PT Tanito Harum sebesar Rp402.000.
 4. Koreksi tambah karena penambahan asset sebelum tahun berjalan sebesar Rp1.022.026.000
 5. Koreksi kurang karena pengurangan nilai tanah pada PT KPC sebesar Rp39.305.354
 - b. Koreksi Nilai Aset tetap non revaluasi pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 saldonya adalah Rp4.587.767.004.437 yang terdiri dari :
 - Pada UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas pada DJKN, terdapat mutasi ekuitas sebesar Rp8.148.384.448 sebagai saldo awal aset BMN hulu

- migas pada neraca dicatat dengan akun koreksi aset lainnya non reval.
- Pada UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas pada PPBMN, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 saldonya adalah sebesar minus Rp1.570.346.535.629.
 - Pada UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas pada SKK Migas, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 saldonya adalah sebesar Rp6.397.020.949.531.
 - Pada UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas pada BPMA, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 saldonya adalah minus Rp247.055.793.913.
- c. Koreksi Nilai Aset tetap non revaluasi pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari BLBI untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 saldonya adalah minus Rp173.187.153.606 yang berasal dari transfer masuk sebesar Rp3.871.455.000 berupa penarikan kembali aset properti dari pengelolaan LMAN dan transfer keluar dalam rangka penyerahkelolaan aset lain-lain ke LMAN sebesar Rp177.058.608.606,00 yang berupa serahkelola aset properti kepada LMAN
- d. Koreksi Nilai Aset tetap non revaluasi pada UAKPA BUN TK Lain-lain yang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 saldonya adalah minus Rp8.193.112.119
- e. Koreksi Nilai Aset tetap non revaluasi pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari BMN Idle untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 saldonya adalah Rp3.234.872.477 dengan rincian :
- Koreksi tambah senilai Rp5.485.595.734 yang berupa Tanah Idle yang diserahkan DJKN senilai Rp4.737.567.000 dan Bangunan Idle yang diserahkan ke DJKN senilai Rp748.028.734
 - Koreksi kurang senilai Rp2.250.723.257 yang berupa Tanah Idle yang diserahkan DJKN senilai Rp2.152.950.000 dan Bangunan Idle yang diserahkan DJKN senilai Rp97.773.257

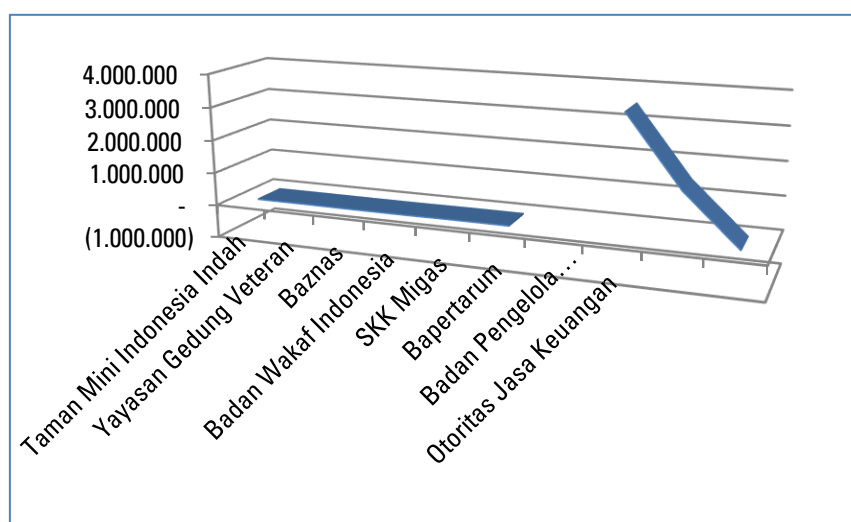
*Mutasi
Ekuitas
Bersih
Badan
Lainnya*

G.2.3.3. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya

Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp5.281.424.623.005** dan **Rp7.046.876.393.764** merupakan mutasi saldo Ekuitas pada neraca konsolidasian BUN yang berasal dari penambahan net aset satker Unit Badan Lainnya. Penambahan *net* aset satker UBL ini merupakan akumulasi dari kenaikan dan penurunan Ekuitas bersih UBL Bukan Satker tahun

2022 dengan kontra akun Aset Lainnya Pada Unit Badan Lainnya. Rincian penambahan *net* aset satker Unit Badan Lainnya, sebagai berikut:

NO	UBL	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	Otorita Asahan	(1.455.757.188)	-
2	Taman Mini Indonesia Indah	(64.034.860.321)	-
3	Yayasan Gedung Veteran	(2.326.894.868)	(3.783.336.195)
4	Baznas	(5.388.923.800)	17.135.870.741
5	Badan Wakaf Indonesia	3.423.218.750	5.210.732.068
6	SKK Migas	25.382.208.452	26.434.577.467
7	Bapertarum	-	-
8	Badan Pengelola Keuangan Haji	3.827.905.183.164	6.883.219.410.674
9	Otoritas Jasa Keuangan	1.497.920.448.816	118.659.139.009
JUMLAH		5.281.424.623.005	7.046.876.393.764



Penjelasan mutasi Ekuitas adalah sebagai berikut:

- Mutasi Ekuitas yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp1.455.757.188. Mutasi Ekuitas sebesar minus Rp1.455.757.188 merupakan pengurangan nilai Aset bersih yang berasal dari serah terima Aset tetap Otorita Asahan kepada pengelola barang (DJKN).
- Mutasi Ekuitas yang berasal dari Yayasan TMII per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp64.034.860.321. Mutasi sebesar minus Rp64.034.860.321 terdiri dari :
 - koreksi Ekuitas atas Laporan Keuangan periode 2020 Unaudited ke 2020 Audited sebesar minus Rp15.862.160.521

2. Penyesuaian nilai Aset bersih yang berasal dari penyesuaian nilai Aset tetap atas penetapan status penggunaan barang milik negara pada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan KMK Nomor 99/KM.6/2021 yang telah dicatat pada Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara tahun 2022 sebesar minus Rp48.172.699.800. Sampai dengan batas akhir penyampaian LK Badan Lainnya Tahun 2022 Audited TMII masih dalam proses Likuidasi yang dilakukan dengan Inventarisasi Aset Tahap II oleh Kemensetneg.
- c. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp2.326.894.868 yang terdiri dari :
1. Penyesuaian penyajian ekuitas negatif sebesar Rp 2.676.557.833,
 2. penurunan Ekuitas dari defisit laporan operasional sebesar minus Rp1.165.474.931 Defisit Laporan operasional Yayasan Gedung Veteran sebesar minus Rp1.165.474.931 terdiri dari pendapatan sebesar Rp6.149.454.846, dikurangi dengan beban biaya personalia sebesar Rp1.240.925.597, biaya dukungan dana ke MB-LVRI sebesar Rp4.747.700.000 dan Beban biaya administrasi dan umum sebesar Rp1.326.304.180 dan
 3. koreksi laporan Tahun 2021 Audited sebesar minus Rp3.837.977.770..
- d. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Baznas per tanggal 31 Desember 2022 sebesar minus Rp5.388.923.800. Mutasi Ekuitas sebesar minus Rp5.388.923.800 terdiri dari :
1. surplus laporan operasional pada dana zakat sebesar Rp31.509.979.053,
 2. surplus laporan operasional dana infak sebesar Rp17.891.493.251,
 3. defisit laporan operasional dana amil sebesar minus Rp730.914.292,
 4. Koreksi atas transaksi Tahun lalu sebesar minus Rp405.963.779 dan
 5. koreksi saldo ekuitas sebesar minus Rp53.653.518.033 yang merupakan koreksi laporan Tahun 2021 Audited.
- e. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.423.218.750 terdiri dari :
1. surplus/defisit laporan operasional yang terdiri dari surplus dana pengelolaan APBN sebesar Rp141.818,
 2. defisit dana pengelolaan non APBN sebesar minus Rp22.205.417,
 3. defisit dana pengelolaan non kas sebesar minus Rp176.918.779,
 4. surplus dana pengelolaan wakaf sebesar Rp3.332.775.233 dan
 5. surplus dana pengelolaan dana operasional sebesar Rp289.425.895.

- f. Mutasi Ekuitas yang berasal dari SKK MIGAS per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp25.382.208.452. Mutasi Ekuitas sebesar Rp25.382.208.452 merupakan penurunan Ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

PENJELASAN	JUMLAH
I. SURPLUS (DEFISIT) KINERJA BERSIH	(111.457.446.346)
II. EKUITAS LAINNYA	
Penyesuaian penyajian Ekuitas negatif	25.061.780.398
III. Koreksi Ekuitas tahun lalu	0
a. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS sebelum penyesuaian (a=I+II+III)	(86.395.665.948)
b. Ditambah Mutasi Imbalan pasca kerja SKK Migas terdiri dari selisih imbalan pasca kerja TA 2022 dikurangi imbalan pasca kerja TA 2021	94.556.651.176
c. Dikurang Mutasi Ekuitas SKK Migas satker 999.08	(17.221.223.224)
d. Ditambah Penyesuaian LK 2021 <i>Audited</i> LKBL dengan SKK Migas	0
e. Dikurang penyesuaian Ekuitas BP Migas sesuai ND Kemenkeu ND-1/MK.05/2018	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS setelah penyesuaian(I + II = a) (a + b – c + d +e)	25.382.208.452

- g. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.827.905.183.164. Kenaikan Ekuitas Laporan Keuangan Badan Pengelola Kegiatan Haji sebesar Rp3.827.905.183.164 merupakan surplus sebesar Rp3.369.364.235.128 ditambah koreksi aset Neto senilai Rp64.254.928.498 dan Pengakuan Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp394.286.019.538.
- h. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.497.920.448.816. Mutasi ekuitas merupakan kenaikan Ekuitas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan setelah penyesuaian. Mutasi Ekuitas sebesar sebesar Rp1.497.920.448.816 merupakan perubahan Ekuitas dari OJK sebagai satker BA 999.08. dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Jumlah
a. surplus (defisit) tahun berjalan		1.474.891.220.281
b. Mutasi Ekuitas OJK satker 999.08		(22.607.377.135)
c. koreksi ekuitas :		421.851.400
Penyesuaian Aset Neto Awal	-	421.851.400
koreksi utang setoran Ke kas Negara	-	
Koreksi Saldo Awal Piutang atas Kelebihan Pembayaran Gaji	-	
Koreksi Utang PPh	-	
Koreksi Beban Dibayar Dimuka	-	
d. PENYESUAIAN SALDO AUDITED		0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS setelah penyesuaian (a-b+c+d)		Rp1.497.920.448.816

G.2.3.4. Koreksi SAL

Koreksi SAL Koreksi SAL sebesar **Rp9.431.660.376.686** merupakan mutasi transaksi atas akun SILPA 311211 yang merupakan jurnal penyesuaian SILPA selisih kurs atas rekening milik BUN pada Direktorat PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah berdasarkan Perdirjen Nomor 19 Tahun 2016 dan transaksi pada akun koreksi 311212 yang merupakan transaksi pengembalian pendapatan negara Tahun Anggaran Yang Lalu.

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi
311211	SILPA	9.457.907.426.911
311212	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang lalu	(26.247.050.225)
Jumlah		9.431.660.376.686

G.2.3.5. Lain-lain

Koreksi Lain-lain Pos Lain-lain sampai dengan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **minus Rp20.785.248.684.369** dan **Rp81.833.658.550.378**. Nilai lain-lain sebesar minus Rp20.785.248.684.369 merupakan nilai koreksi lain-lain sebesar Rp minus Rp25.156.564.215.892 ditambah eliminasi sebesar Rp4.371.315.531.523 yang merupakan eliminasi atas transaksi Utang pihak ketiga yang merupakan bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan pada BA 999.99 Transaksi Khusus. Rincian nilai pos lain-lain adalah sebagai berikut:

UNIT		31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
KODE	URAIAN		
999.00	Akuntansi Pusat	20.515.913.199.663	(141.236.930.401.826)
999.01	BA BUN Utang Pemerintah	825.169.398.659	(507.896.124.594)
999.02	BA BUN Hibah	1.037.365.564.206	794.259.119.266
999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	(52.049.031.031.088)	(9.177.731.853.301)
999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	-	-
999.05	BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(4.137.591.470.498)	1.781.335.408.789
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(5.708.407.644.565)	(745.476.633.201)
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	590.056.898.607	(3.432.799.572.211)
999.99	BA BUN Transaksi Khusus	13.769.960.869.124	234.069.400.521.556
JUMLAH		(25.156.564.215.892)	81.544.160.464.478
Penyesuaian		4.371.315.531.523	289.498.085.900
Lain-lain setelah penyesuaian		(20.785.248.684.369)	81.833.658.550.378

Pos Lain-Lain pada Laporan Perubahan Ekuitas pada prinsipnya berasal dari koreksi dan/atau penyesuaian yang menggunakan akun Ekuitas, koreksi nilai Utang pihak ketiga, reklasifikasi Utang diestimasi, pemotongan atas lebih salur-Piutang PNPB, reklasifikasi Piutang Lain-Lain.

- **Lain-Lain pada BA 999.00**

Lain-Lain sebesar **Rp20.515.913.199.663** pada 999.00 merupakan mutasi transaksi atas akun SAL 311111, dan akun ekuitas 391111 pada ledger akrual.

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi
311111	SAL	854.804
391111	Ekuitas	20.515.912.344.859
Jumlah		20.515.913.199.663

- **Lain-Lain pada BA 999.01**

Lain-Lain sebesar **Rp825.169.398.659** pada 999.01 adalah Koreksi Lain-lain LPE yang merupakan penyesuaian atas nilai utang pinjaman dikarenakan adanya penyesuaian utang yang masih harus dibayar dan penyesuaian pinjaman luar negeri yang mempengaruhi ekuitas:

Komponen Penyesuaian Ekuitas	Nominal
Penyesuaian Utang yang Masih Harus Dibayar	(2.395.705.414)
Penyesuaian Reksus Ditangguhkan	(3.355.675.440)
Penyesuaian Pinjaman Luar Negeri	830.920.779.513
Total Penyesuaian	825.169.398.659

Rincian atas penyesuaian untuk Pinjaman Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Penyesuaian Lainnya	
Penyesuaian saldo awal utang Proyek	14.272.626.281
Refund pembayaran utang Proyek	(28.736.475.097)
Penyesuaian pembayaran Pokok Proyek	(3.299.064.707)
Penyesuaian set-of pembayaran	8.871.105.615
Penyesuaian SP3 atas NoD TAYL	977.291.831.179
Penyesuaian NoD TAB yang belum terbit SP3	(140.662.197.528)
Penyesuaian Utang Proyek	3.182.953.770
Total	830.920.779.513

Nilai penyesuaian saldo awal utang Proyek sebesar 14.272.626.281 dan penyesuaian utang Proyek sebesar 3.182.953.770 dalam tabel rincian penyesuaian untuk Pinjaman Luar Negeri pada LK BUN berbeda dengan nilai penyesuaian saldo awal utang Proyek sebesar 15.059.874.587 dan penyesuaian utang Proyek sebesar 2.395.705.465 pada LK UAPBUN BA 999.01. Nilai total di LKBUN sebesar 830.920.779.513 berbeda dengan nilai total di LK UAPBUN BA 999.01 sebesar 830.920.779.514.

- **Lain-Lain pada BA 999.02**

Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.037.365.564.206 dan Rp794.259.119.266. Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.037.365.564.206 berasal dari :

a) Satker 977263

Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.037.403.921.872 dimana nilai tersebut diperoleh dari transaksi Pengesahan hibah langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp1.030.247.566.475

b) Satker 985261

Terdapat transaksi Lain-Lain sebesar minus Rp1.861.648.795 (Rp14.819.076 – Rp1.876.467.871), merupakan jurnal Penyesuaian atas penyelesaian Piutang PNB (piutang lainnya) di mana bukti setor atas penyelesaian Sisa Dana Hibah RR dilakukan pada tahun anggaran yang lalu atau sebelum tahun 2022 sebesar Rp1.876.467.871. Serta atas jurnal Penyesuaian Penghapusan Piutang Tak Tertagih pada Ekuitas sebesar Rp14.819.076.

• **Lain-Lain pada BA 999.03**

Lain-Lain sebesar minus Rp52.049.031.031.088 merupakan koreksi penyesuaian Ekuitas pada satker BA 999.03 yang terdiri dari :

NO	NAMA UAKPA	Nilai
1	UAP DJPK	36.456.899.772
2	KPA Dit PNBPDJA	40.596.841.126.574
3	BLU LPDB KUMKM	136.425.904.251
4	KPA BLU LMAN	989.109.042.522
5	KPA Kementerian BUMN	(19.543.900.681.635)
6	KPA DJKN	14.535.366.629.542
7	KPA Dit SMI	(19.387.840.078.412)
8	UAIP	(69.716.919.075.080)
9	KPA Modal Awal BP Tapera	599.047.486
10	KPA Badan Bank Tanah	304.805.204.600
11	BPD LH	24.949.292
Jumlah		(52.049.031.031.088)

Adapun penjelasan lebih lanjut atas rincian mutasi lain-lain masing masing KPA adalah sebagai berikut:

- a. Mutasi lain-lain pada UAP DJPK sebesar Rp36.456.899.772 merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi untuk periode 31 Desember 2022 berupa Jurnal Investasi Non Permanen Pinjaman PEN Daerah ke Koreksi Koreksi lainnya yang disebabkan karena Kelebihan Pengembalian Dana Pinjaman PEN ke RKUN oleh PT SMI.
Sesuai surat PT SMI nomor: S-157/SMI/DU/0223 tanggal 22 Februari 2023 perihal Permohonan Arahan Kelebihan Pengembalian Dana Pinjaman PEN ke RKUN, disampaikan bahwa :
 - i. PT SMI telah melakukan transfer ke RKUN sebesar Rp394.370.024.227,00 untuk pengembalian dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah TA 2020; serta Rp1.263.308.413.024,00 untuk pengembalian dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah TA 2021; dengan total pengembalian sebesar Rp1.657.678.437.251,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022 berdasarkan BA Rekonsiliasi Pengembalian.
 - ii. Atas dana yang dikembalikan pada poin di atas, terdapat kelebihan pengembalian sebesar Rp36.456.899.772,00. Kelebihan pengembalian ini terjadi karena ada data pencairan Pemda yang belum diperhitungkan.

- b. Mutasi lain-lain pada KPA Dit PNBPDJA sebesar Rp40.596.841.126.574 yang berasal dari :
- penambahan ekuitas atas pengakuan piutang bukan pajak dari Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai TB 2021 dengan pencatatan Metode Ekuitas saat pengumuman pembagian dividen tunai sesuai dengan RUPS sebesar Rp40.594.757.931.542.
 - penambahan ekuitas akibat penghapusan penyisihan piutang tidak tertagih atas pembayaran piutang sebelum TB 2021 sebesar Rp1.333.195.015 yang berasal dari PT Inhutani I (TB 2000) sebesar Rp62.468.076, PT Inhutani V (TB 1999) sebesar Rp300.000.000, PT Perkebunan Nusantara II (TB 1999) sebesar Rp970.726.939.
 - penambahan ekuitas atas pengenaan denda keterlambatan atas piutang dividen PT Geo DIPA Energi tahun 2021 sebesar Rp17.
 - penambahan ekuitas akibat penghapusan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang jangka panjang Perum Perumnas sebesar Rp750.000.000.
- c. Mutasi lain-lain pada LPDB KUMKM
- Mutasi lain-lain pada KPA BLU LPDB KUMKM sebesar Rp136.425.904.251 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain	Jumlah
Mutasi Tambah	
(+) Pengalihan dari Program Kementerian Tahun 2021	10.216.859.180
(+) Beban Penyisihan Dana Bergulir Bersaldo Minus	142.329.025.804
(+) Koreksi Subrogasi Mitra Koperasi Kampus Unsoed	860.633.286
Mutasi Kurang	
(-) Mutasi NRB Tahun 2022	(10.224.746.248)
(-) Transaksi Non Kas Mitra Crash Program	(5.514.534.316)
(-) Transaksi Non Kas Mitra PSBDT	(558.218.300)
(-) Koreksi reklas Dana Bergulir Tahun 2016	(16.660)
(-) Koreksi Crash Program Mitra CV Sabina Teknik dan KSP Tabita	(683.098.495)
Koreksi Lain-lain	136.425.904.251

- d. Mutasi lain-lain pada KPA BLU LMAN

Mutasi lain-lain pada KPA BLU LMAN sebesar Rp989.109.042.522 yang terdiri dari :

- a) sebagian besar merupakan nilai tambah (capital gain) dari pelaksanaan penilaian wajar untuk kebutuhan penyajian pada laporan keuangan atas sebagian Aset eks BPPN, Aset eks PPA, dan Aset eks HTBI yang dilaksanakan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Rincian capital gain untuk tiap-tiap kategori aset adalah sebagai berikut:

Kategori Aset	Nilai Tambah	Nilai
Aset eks BPPN	403.226.177.394	2,14 x
Aset eks PPA	583.232.826.010	8,87 x
Aset eks HTBI	2.650.039.100	3,052 x
Total	989.109.042.504	

- b) Selisih sebesar Rp18 merupakan koreksi minor yang disebabkan oleh pembulatan saldo aset lain-lain BUN

e. Mutasi Lain-lain KPA Kementerian BUMN

Mutasi Lain pada KPA Kementerian BUMN pada tahun 2022 sebesar minus Rp19.543.900.681.635 yang terdiri dari dua sumber yaitu dari ILKPN sebesar Rp minus Rp5.342.757.212.298 dan koreksi ekuitas lainnya terkait dengan pergerakan kas masuk dan kas keluar dari dana cadangan yang berasal dari DIPA PMN/IPPEN sebesar minus Rp14.201.143.469.336.

Mutasi yang berasal dari ILKPN dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	Perusahaan	Nilai
1	Perusahaan Umum (Perum)	(373.266.260.891)
2	Perseroan (Persero)	(4.239.428.627.112)
3	Minoritas/Non BUMN	(730.062.324.295)
Jumlah		(5.342.757.212.298)

Selanjutnya Rincian mutasi dari masing masing BUMN Persero, Perum dan Minoritas dapat dilihat pada Lampiran mutasi lain LKIP, berikut adalah ikhtisarnya.

a. Perusahaan Umum (Perum)

Rincian mutasi lain-lain sebesar minus Rp373.266.260.891 adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah Rp	
1	OCI Non Reval		(254.032.081.586)
2	Dividen		(51.000.000.000)
3	Selisih dijelaskan terdiri dari		
	a. Selisih saldo awal	(102.879.161.272)	
	b. Selisih Restatement	-	

NO	Uraian	Jumlah Rp	
	c. Selisih Pencatatan Dividen	(1.106.779.290)	
	d.Selisih Pencatatan Tambahan Modal Disetor		
	e. Selisih karena Komponen LPE Lain	35.751.761.257	
	Jumlah (a+b+c+d+e)		(68.234.179.305)
	Saldo Akhir (1+2+3)		(373.266.260.891)

b. Perseroan (Persero)

Rincian mutasi lain-lain sebesar minus Rp4.239.428.627.113 adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah Rp	
1	OCI Reval		2.056.676.931.800
2	OCI Non Reval		(18.540.091.212.629)
3	Dividen		(39.643.297.000.000)
4	Mutasi BPYBDS		-
5	Selisih dijelaskan terdiri dari		
	a. Selisih karena Treasury Stock/(ESOP)	(960.604.253.600)	
	b. Selisih Saldo Awal	(3.200.366.634.484)	
	c. Selisih Restatement	1.293.799.111.958	
	d. Selisih Pencatatan Dividen	(4.837.129.585.332)	
	e. Selisih Pencatatan Tambahan Modal Disetor	49.202.024.876.443	
	f. Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	44.127.169.485.200	
	g. Penihilan Ekuitas Negatif	(28.062.482.581)	
	h. Selisih karena Komponen LPE Lain	(33.709.547.862.903)	
	i. Selisih karena pembulatan excel	(985)	
	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i)		51.887.282.653.716
	Saldo Akhir (1+2+3+4+5)		(4.239.428.627.113)

c. Minoritas

Rincian mutasi lain-lain sebesar minus Rp730.062.324.295 adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah Rp	
1	OCI Non Reval		(6.106.194.236)
2	Dividen		0
3	Selisih dijelaskan terdiri dari		
	a. Selisih Restatement		
	b. Selisih Pencatatan Dividen		
	c. Selisih Tambahan Modal Disetor		
	d. Selisih Penjabaran Kurs Laporan Keuangan	5.460.000.000	
	e. Selisih karena LPE Komponen Lain	(729.416.130.058)	
	f. Selisih karena pembulatan excel	(1)	
	Jumlah (a+b+c+d+e+f)		(723.956.130.059)
	Saldo Akhir (1+2)		(730.062.324.295)

Sementara itu, Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar minus Rp14.201.143.469.336 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Ekuitas Lainnya dari Reklas Dana Investasi Permanen ke Dana Cadangan untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp3.000.000.000.000 yang akan direalisasikan pada tahun 2023.
- Koreksi Ekuitas Lainnya dari ekuitas negative PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar minus Rp7.499.999.969.336.
- Koreksi Ekuitas Lainnya dari Penyaluran Dana RIPPEN ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar minus Rp1.201.143.500.000.
- Koreksi Ekuitas Lainnya dari Reklas Dana Cadangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar minus Rp7.500.000.000.000 karena dikembalikan ke RKUN dan Investasi Non Permanen sebesar minus Rp1.000.000.000.000 karena dijadikan Penyertaan Modal Negara melalui mekanisme konversi saham.

f. Mutasi Lain-lain KPA DJKN

Mutasi Lain pada KPA DJKN tahun 2022 sebesar Rp14.535.366.629.542 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai
1.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT SMI (Persero) : a. Dividen b. Pendapatan Komprehensif Lainnya c. Selisih karena Komponen LPE Lain - Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya	(457.534.000.000) (87.746.894.246) 28.986.348.141
		(516.294.546.105)
2.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT PII (Persero): a. Dividen b. pendapatan komprehensif lainnya	(156.350.534.000) (278.068.916.000)
		(434.419.450.000)
3.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT SMF (Persero): a. Dividen b. pendapatan komprehensif lainnya	(114.981.000.000) (3.046.000.000)
		(118.027.000.000)
4.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT GDE (Persero) a. Pendapatan komprehensif lainnya b. Selisih karena komponen LPE Lain - Perubahan Persentase Kepemilikan Pemerintah RI . c. Selisih Karena Komponen LPE Lainnya	(16.974.834.918) (2.968.101.900) (829)
		(19.942.937.647)
5.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT TPI a. Dividen b. Pendapatan Komprehensif Lainnya	96.327.312.697 395.482.250.597
		491.809.563.294

No	Keterangan	Nilai
6.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada LPEI	
	a. Dividen	(110.795.000.000)
	b. Pendapatan Komprehensif Lainnya	(26.784.000.000)
		(137.579.000.000)
7.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada LPI	
	Pendapatan Komprehensif Lainnya	15.269.820.000.000
		15.269.820.000.000
	TOTAL	14.535.366.629.542

- 1) Seluruh saldo akun Dividen pada tabel di atas tersebut, terdiri dari: 1) dividen dari PT SMI, PT PII, PT SMF, dan PT GDE; dan 2) PNBP dan Bagian Laba Pemerintah dari LPEI, yang telah disetor ke kas Negara.
- 2) Pendapatan/Beban komprehensif lainnya bersumber dari Pendapatan/Beban komprehensif pada Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited* BUMN/Lembaga/PT. Untuk Pendapatan/Beban komprehensif PT GDE dan PT TPI merupakan Pendapatan/Beban komprehensif perusahaan yang dikalikan porsi kepemilikan Pemerintah.
- 3) Penjelasan atas Selisih karena komponen LPE lainnya, sebagai berikut :
 - a. Pada PT SMI senilai Rp28.986.348.141 merupakan saldo atas penghasilan komprehensif lain PT SMI yang belum ditentukan penggunaannya.
 - b. Pada PT GDE senilai minus Rp829 merupakan selisih pembulatan atas perhitungan terhadap persentase porsi kepemilikan Pemerintah.
 - c. Pada PT TPI senilai Rp395.482.250.597 merupakan Penambahan ekuitas lain, yang disebabkan adanya penambahan modal saham oleh pemegang saham lain yaitu PT Pertamina (Persero) ke dalam ekuitas PT TPI yang dilakukan pada 28 November 2022. Dengan adanya penambahan modal oleh pemegang saham lainnya tersebut, persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah cq Kementerian Keuangan mengalami penurunan dari 46,99% menjadi 35,22%.
- g. Mutasi Lain-lain pada KPA Dit. SMI
Mutasi Lain pada KPA Dit SMI DJPb pada tahun 2022 sebesar minus Rp19.387.840.078.412 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pencatatan penyaluran dana FLPP tahun 2022 dari Rekening Investasi BUN kepada Operator Investasi Pemerintah sebesar minus Rp19.100.000.000.000.
 - 2) Koreksi beban penyisihan yang bersifat negatif sebesar Rp1.757.891.953.

3) Pencatatan imbal hasil atas Investasi Pemerintah pada BP Tapera sebesar minus Rp289.597.970.365.

h. Mutasi Lain-lain pada KPA UAIP

Mutasi Lain pada UAIP tahun 2022 sebesar minus Rp69.716.919.075.080. Mutasi lain-lain terdiri dari Mutasi dari Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya berdasarkan ILKPN pada LPS, BI, PTNBH, dan BPJS dan Koreksi saldo awal PTNBH. Rincian mutasi lain-lain satker UAIP adalah sebagai berikut:

a) Mutasi dari Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya sebagai berikut :

Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
Bank Indonesia	(78.489.990.000.000)
LPS	10.981.076.000
Institut Pertanian Bogor	(2.904.648.101)
Institut Teknologi Bandung	5.444.442.976
Universitas Indonesia	(965.632.587)
Universitas Gadjah Mada	2.450.831.918
Universitas Sumatera Utara	(3.218.669.132)
Universitas Padjajaran	218.192.082
Universitas Diponegoro	(17.041.758.928)
Universitas Sebelas Maret	(5.151.837.188)
Universitas Andalas	(237.551.423.558)
BPJS Kesehatan	127.609.886.900
BPJS Ketenagakerjaan	104.507.495.665
Mutasi Ekuitas Cadangan Dana Reboisasi	117.254.869
Total	(78.505.494.789.084)

b) Mutasi dari koreksi awal sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal LK UAIP 2021 Audited (A)	Saldo Awal Seharusnya (B)
Institut Pertanian Bogor	2.219.908.414.457	2.573.351.570.091
BPJS Ketenagakerjaan	12.174.368.277.636	12.663.612.035.249
Universitas Negeri Malang		1.846.612.548.097
Universitas Andalas		1.454.766.175.940
Universitas Brawijaya		3.422.807.945.353
Universitas Negeri Padang		1.221.702.131.367
Total	14.394.276.692.093	23.182.852.406.097
Total Koreksi (B-A)	Rp8.788.575.714.004 (undervalued)	

i. Mutasi Lain-lain pada Modal Awal BP Tapera

Mutasi Lain pada KPA Modal Awal BP Tapera tahun 2022 sebesar Rp599.047.486 yang merupakan pengakuan penghasilan komprehensif dari

selisih perhitungan aktuarial hasil pengukuran kembali liabilitas (asset) imbalan pasti (netto)

j. Mutasi lain-lain pada Badan Bank Tanah

Mutasi Lain pada BLU PPDPP tahun 2022 sebesar Rp304.805.204.600 merupakan nilai realisasi perolehan tanah sampai dengan 31 Desember 2022 yang dinilai dari luas perolehan dikalikan NJOP di masing-masing lokasi. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Asahan (300.000 m2) sebesar Rp2.145.000.000.
- 2) Kabupaten Tanjung Balai (100.000 m2) sebesar Rp2.000.000.000
- 3) Kabupaten Serang (75.000 m2) sebesar Rp750.000.000
- 4) Kabupaten Purwakarta (950.000 m2) sebesar Rp34.200.000.000
- 5) Kabupaten Lombok Utara (12.608 m2) sebesar Rp63.040.000
- 6) Kabupaten Lombok Timur (10.000 m2) sebesar Rp12.000.000
- 7) Kabupaten Tabanan Bali (45.240 m2) sebesar Rp5.790.720.000
- 8) Kabupaten Semarang (7.896 m2) sebesar Rp1.010.688.000
- 9) Kabupaten Brebes (6.605 m2) sebesar Rp125.495.000
- 10) Kabupaten Penajam Kaltim (41.619.000 m2) sebesar Rp145.666.500.000
- 11) Kabupaten Paso (6.648 m2) sebesar Rp113.016.761.600
- 12) Kabupaten Batang (5.000 m2) sebesar Rp25.000.000

k. Mutasi Lain-Lain pada BLU BPD LH

Lain-lain pada KPA BLU BPD LH pada 31 Desember 2022 Lain-lain sebesar Rp24.949.292, merupakan koreksi lainnya yang berasal dari penerimaan pembayaran pokok yang diterima dari debitur sebesar nilai tersebut

• **Lain-Lain pada BA 999.05**

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi (DPKPA)/Lain-lain sebesar **minus Rp4.137.591.470.498** yang berasal dari Satker DAU, DBH, DAK Non Fisik, serta Satker DAK Fisik dan Dana Desa. Nilai ini turun sebesar Rp-5.918.926.879.287 atau 332,27% jika dibandingkan dengan periode Tahun 2021 sebesar Rp1.781.335.408.789.

1. Satker DAK Non Fisik

DKPKA sebesar minus Rp4.674.729.070.393,00 merupakan saldo penyesuaian Piutang dan Utang DAK Nonfisik TA 2021 Audited serta koreksi lain-lain atas penyelesaian Piutang BOK tambahan, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan melalui penyaluran DAU Tahun Anggaran 2022 dan Pemindahan Saldo Piutang dari Satker 999820 ke Satker KPPN. DKPKA Per 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp6.683.808.211.367,00

atau 332,68% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp2.009.079.140.974,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian atas Piutang TA 2021 Audited	(3.988.354.924.900)
Penyesuaian atas Utang TA 2021 Audited	120.070.443.746
Koreksi lain-lain atas penyelesaian Piutang BOK Tambahan, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan melalui penyaluran DAU TA 2022	(714.126.424.489)
Pemindahan Saldo Piutang dari Satker 999820 ke Satker KPPN	(92.318.164.750)
Total	(4.674.729.070.393)

2. Satker DAK Fisik dan Dana Desa

Koreksi lain-lain tahun 2022 Audited dan tahun 2021 masing-masing sebesar minus Rp275.374.418.411,- dan sebesar Rp260.982.726.014,-. Koreksi lain-lain merupakan penyesuaian, reklasifikasi dan/atau koreksi terhadap nilai akun aset dan kewajiban di Neraca dan/atau nilai akun pendapatan-LO dan beban yang dilakukan secara jurnal penyesuaian manual dengan melibatkan akun ekuitas yang berdampak kepada penyajian nilai ekuitas.

Rincian koreksi lain-lain sebesar minus Rp275.374.418.411,- berdasarkan penggabungan jurnal penyesuaian manual yang dilakukan pada tingkat UAKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai berikut:

- Penyesuaian kurang nilai ekuitas dan kurang piutang Rp640.320.385.100.
- Penyesuaian tambah nilai ekuitas dan tambah piutang Rp364.945.966.689.

3. Satker Dana Alokasi Umum

DKPKA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp1.220.481.954.309,00 berasal dari Koreksi Lainnya atas Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan tersebut berasal dari pemotongan penyaluran DAU atas sisa DAK Nonfisik di RKUD sampai dengan TA 2021 sebesar Rp1.132.612.206.773,00 dan pemotongan penyaluran DAU atas Sisa Dana Desa di RKUD TA 2015 sampai dengan TA 2019 sebesar Rp87.869.747.536.

Pendapatan atas pemotongan yang dikoreksi tersebut telah dilakukan pengakuan piutang pada Satker DAK Nonfisik, Satker DAK Fisik, dan Dana Desa. Penyesuaian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya

pada Satker Transfer DAU dilaksanakan sehubungan telah dilaksanakan penyesuaian nilai piutang pada Satker Transfer DAK Nonfisik dan Satker DAK Fisik dan Dana Desa.

4. Satker Dana Bagi Hasil

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi (DPKPA/Lain-lain) merupakan angka selisih antara nilai estimasi dengan nilai yang telah ditetapkan/definitif. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Keuangan satker Dana Bagi Hasil per 31 Desember TA 2022 sebesar minus Rp407.969.936.003,00 dengan rincian sebagai berikut :

Ket.	Nilai Estimasi tahun 2021	Penetapan KB/LB di PMK 127 Tahun 2022	Koreksi lain-lain ekuitas
Utang Distimasi (KB)	40.407.016.887.624	41.868.894.493.111	(1.461.877.605.487)
Piutang Diestimasi (LB)	22.779.870.229	970.639.891.539	947.860.021.310
Penerimaan dari Pmotongan DBH - Sisa dana Bos			106.047.648.174
Jumlah			(407.969.936.003)

• Lain-Lain pada BA 999.07

Lain-Lain pada BA 999.07 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp5.708.407.644.565. Koreksi Lain-Lain tersebut terdapat pada 5 (lima) Kementerian Negara/Lembaga, yaitu sebagai berikut :

		(dalam rupiah)
No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(38.656.857.919)
2	Kementerian BUMN	-
3	KUKM	(2.037.666.297.086)
4	Bapebti	(1.088.463.898)
5	Pertanian	(171.930.552)
6	Keuangan	(3.630.824.095.110)
	Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2022	(5.708.407.644.565)

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2022 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar minus Rp38.656.857.919 adalah sebagai berikut :

a) Ditjen Pembiayaan Perumahan

Pada Ditjen Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar minus Rp38.659.826.816, yang merupakan koreksi pembebanan dan koreksi ekuitas lainnya.

b) Ditjen Cipta Karya

Pada Ditjen Cipta Karya sebesar Rp2.968.897 merupakan selisih antara utang subsidi estimasi bulan September - Desember 2021 dikurangi dengan nilai real pencairan sp2d di bulan April 2022 atas utang estimasi tersebut:

URAIAN/ PDAM	UTANG SUBSIDI ESTIMASI	REALISASI REAL SP2D	SELISIH
Kota Banjarmasin	223.235.294	221.617.647	1.617.647
Kota Denpasar	124.325.544	124.325.544	-
Kota Palopo	108.973.897	107.622.647	1.351.250
Kab. Cilacap	59.724.153	59.724.153	-
Giri Menang	217.359.477	217.359.477	-
Kab Banyuwangi	91.647.779	91.647.779	-
Jumlah Belanja	825.266.144	822.297.247	2.968.897

2. Kementerian Koperasi dan UKM

Koreksi sebesar minus Rp2.037.666.297.086 berasal dari koreksi:

- Pembayaran subsidi bunga/subsidi margin KUR yang sebelumnya tidak dicatat sebagai utang subsidi KUR tahun 2021 sebesar minus Rp300.061.507.255.
- Utang tunggakan tambahan subsidi bunga/subsidi margin KUR pada masa covid-19 tahun 2020 pada PT. Bank Permata, Tbk yang gagal dilakukan pembayaran dikarenakan debitur sudah lunas sebesar Rp138.787.227.
- Utang subsidi KUR periode sampai dengan 2021 yang baru ditagihkan dan terverifikasi di tahun 2022 sebesar minus Rp1.737.743.577.058

3. Kementerian Pertanian

Jumlah Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar minus Rp171.930.552.

4. Kementerian Keuangan

Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2021 pada Kementerian Keuangan sebesar minus Rp3.630.824.095.110, yang terdapat pada Eselon I sebagai berikut:

- a) Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp7.598.286.520 merupakan Penyesuaian atas penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp100.857.193 yang berasal dari piutang atas sisa PBBKB bagian dari subsidi solar 2015-2018 pada PT AKR sebesar Rp20.171.438.515 yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 27 Mei 2022 dan Penyesuaian atas penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp7.497.429.327 yang berasal dari piutang atas sisa PBBKB bagian dari subsidi solar 2015-2018 pada PT Pertamina Persero sebesar Rp1.499.485.865.475 telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Agustus 2022.
- b) Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar minus Rp475.706.476.247 dikarenakan terdapat penihilan kas dan setara kas akibat sisa dana cadangan pada RPL 019 DJPB sebesar minus Rp382.726.681.399, penyetoran pendapatan yang masih harus diterima 2021 yang disetor di tahun 2022 sebesar minus Rp97.366.193.753, koreksi penghapusan kewajiban estimasi karena surat tagihan dikembalikan dan menghapus kelebihan estimasi sebesar Rp8.960.602.458, koreksi yang dilakukan terhadap BAV yang diterbitkan pada tahun berjalan atas periode penagihan subsidi bunga dari bank penyalur TAYL yang belum masuk pada Utang Subsidi Diestimasi tahun 2021 per 31 Desember 2022 sebesar minus Rp4.574.203.553.
- c) Direktorat Jenderal Pajak sebesar minus Rp3.162.715.905.383 merupakan beban subsidi P-DTP yang tidak dapat dibebankan di tahun 2022 yang terdiri atas beban subsidi PPh DTP Panas Bumi triwulan IV tahun 2021 sebesar minus Rp584.613.907.178, PPh DTP Pasal 21 tahun 2020 sebesar minus Rp1.217.432.290.582, PPh DTP Final WP P3-TGAI tahun 2020 sebesar minus Rp20.877.273.632, PPh DTP Final UMKM tahun 2020 sebesar minus Rp177.534.985.850, PPN DTP Non Vaksin tahun 2020 sebesar minus Rp1.161.843.683.065, dan PPN DTP Koran tahun 2020 sebesar minus Rp413.765.076.

- **Lain-Lain pada BA 999.08**

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp590.056.898.607 dan minus Rp3.432.799.572.211. Koreksi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar minus Rp330.185.374.405 yang merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas piutang, dan utang.
- b) Satker Dana Kompensasi sebesar Rp675.985.479.562. Nilai tersebut merupakan selisih kekurangan kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat kebijakan tarif tenaga listrik tahun 2021 yang belum terbayarkan dan disetujui oleh Pihak Kedua bahwa jumlah tersebut tidak akan ditagihkan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Verifikasi nomor BA-8/AG.6.3/2022 tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp319; koreksi atas pembulatan nilai desimal dari selisih realisasi pembayaran utang kompensasi HJE BBM dengan saldo utang kompensasi HJE BBM PT Pertamina (Persero) akibat pembulatan komponen PBBKB sebesar minus Rp1; dan Koreksi Lainnya untuk pengakuan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atas kelebihan pembayaran hasil pemeriksaan BPK pada LHP No. 02/AUDITAMA VII/PDTT/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp675.985.479.244.
- c) Satker Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, selaku KPA Penyalur Bantuan Iuran Tahun 2021 yang dialihkan ke Kementerian Kesehatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-32/PB.7/2022 dan KN.01.01/4/2772/2022 sebesar Rp244.258.773.900.
- d) Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebesar minus Rp1.980.450 yang merupakan koreksi lainnya atas koreksi kurs yang digunakan pada periode 2021 yang sebelumnya menggunakan kurs penutup BI.

• **Lain-Lain pada BA 999.99**

Koreksi Lain-Lain sebesar Rp13.769.960.869.124 merupakan nilai koreksi lain-lain pada BA 999.99 (transaksi Khusus) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	
1	UAPBUN TK DJPb	(2.269.532.490.961)
2	UAPBUN TK DJKN	14.426.191.314.069
3	UAPBUN TKDJA	1.613.302.046.016
4	UAPBUN TK BKF	0
5	UAPBUN TK DJPK	0
6	UAPBUN TK DJPPR	0
Jumlah		13.769.960.869.124

- Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas pada UAPBUN TK DJPB sebesar **minus Rp2.269.532.490.961** terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Satker Pengelola Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Program Tunjangan Hari Tua	(2.269.532.490.961)
	Total	(2.269.532.490.961)

- Satker Pengelolaan Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), sebesar **minus Rp2.269.532.490.961** yang merupakan perubahan terhadap ekuitas yang diakibatkan antara lain:
 - Adanya pencatatan atas transaksi pendapatan atau beban tahun anggaran yang lalu, terdiri dari Penjurnalan Penutupan Piutang Tak Tertagih Tahun 2021 sebesar Rp731.286.766;
 - Penyelesaian Piutang Imbal Jasa Perbankan Rampung TA 2020 sebesar (Rp5.000);
 - Adanya koreksi penjurnalan Kewajiban Jangka Panjang UPSL PT Asabri (Persero) TA. 2022 sebesar (Rp4.550.263.772.727).
 - Ada Koreksi penjurnalan pembayaran Kewajiban Jangka Panjang UPSL PT Asabri (Persero) TA. 2022 sebesar Rp2.280.000.000.000.
- Koreksi lain-lain Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas pada UAPBUN TK DJKN sebesar Rp14.426.191.314.069 . Koreksi tersebut terdiri dari:
 - Pada Tahun 2022 *Audited* pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, terdapat dampak kumulatif yang disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar yang mengurangi ekuitas sebesar minus Rp29.568.449.500 (dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Nilai tersebut timbul atas adanya ABMA/T yang ditetapkan besaran nilai kompensasinya hingga Tahun 2022 sebesar Rp16.098.190.000.
 - Pada UAKPA BUN TK Pengelola Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2022 Saldo Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi sebesar Rp14.376.080.387.405.
 - Pada UAKPA BUN TK BMN Eks Pertamina, nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan-Kebijakan Mendasar sebesar Rp813.292.938.000

- d. Pada UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas pada PPBMN, Saldo Koreksi Nilai Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp475.624.574.794.
 - e. Pada UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas pada SKK Migas, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 saldonya adalah minus Rp260.474.936.234.
 - f. Pada UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas pada BPMA, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 saldonya adalah Rp2.485.949.192.
- Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas pada UAPBUN TK DJA sebesar Rp1.613.302.046.016 berasal dari :
 - a. Koreksi Lain-Lain dari Sektor Migas sebesar Rp1.338.325.174.237 seluruhnya berasal dari Koreksi lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas. Terdiri dari koreksi pendapatan tahun lalu sebesar Rp855.706.372.621 dan koreksi beban tahun lalu sebesar Rp482.618.801.615
 - b. Koreksi Lain-Lain dari Panas Bumi sebesar Rp274.976.871.779 dipengaruhi oleh beberapa transaksi sebagai berikut :

No.	Uraian	(D) / K
1	pemindahbukuan PNPB panas bumi TW I TA 2021 dimana sebelumnya sudah diakui sebagai beban diestimasi setoran kepada pemerintah	198.964.968.477
2	koreksi atas beban diestimasi pengajuan reimbursement PPN dengan pencadangan sebelum tahun 2022	145.058.998.394
3	koreksi atas bagian beban pengajuan reimbursement PPN dengan saldo pencadangan sebelum tahun 2022	(145.058.998.394)
4	pemindahbukuan saldo cadangan reimbursement PPN	76.011.903.302
Total koreksi lain-lain		274.976.871.779

G.2.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.301.105.973.365.087** . Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

BA	DKEL	DDEL	TK	TM	Total
999.00	4.770.937.927.524.620	(4.636.843.589.345.650)		-	134.094.338.178.970
999.01	4.047.435.897.369.470	(4.358.068.804.779.810)			(310.632.907.410.341)
999.02	6.385.105.627.540	(19.694.594.415.150)			(13.309.488.787.610)
999.03	184.988.134.537.894	(93.844.447.652.001)	(58.596.960.796)	58.596.960.796	91.143.686.885.893
999.04	2.072.321.976.965	(5.427.013.053.780)			(3.354.691.076.815)
999.05	791.032.474.096.885	(6.903.081.163.578)			784.129.392.933.307
999.07	252.798.601.088.599	(2.272.705.264.332)			250.525.895.824.267
999.08	405.688.899.013.660	(3.469.444.797.958)			402.219.454.215.702
999.99	398.014.514.151.214	(431.724.221.549.500)	(318.078.326.866.684)	318.078.326.866.684	(33.709.707.398.286)
TOTAL					1.301.105.973.365.087

*Transaksi
Antar
Entitas*

1. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.00

Transaksi Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar minus Rp134.094.338.178.970, Rincian transaksi antar entitas adalah sebagai berikut:

a. Ditagihkan Ke Entitas Lain

Ditagihkan Ke Entitas Lain untuk 31 Desember 2022 sebesar Rp4.770.937.927.524.620 merupakan penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transito.

b. Diterima Dari Entitas Lain

Diterima Dari Entitas Lain untuk 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp4.636.843.589.345.650 merupakan pengurangan kas Kuasa BUN yang bersumber dari belanja (selain belanja BLU dan belanja dengan sumber dana hibah langsung), transfer, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran transito.

2. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.01

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp310.632.907.410.341 yang berasal dari Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp4.047.435.897.369.470 dan Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp4.358.068.804.779.810.

3. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.02

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp13.309.488.787.610 yang berasal dari Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp6.385.105.627.540, Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp19.694.594.415.150.

4. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.03

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp91.143.686.885.893 berasal dari selisih antara Diterima Dari Entitas Lain ,Ditagihkan ke Entitas Lain, dan Transfer Keluar dengan rincian sebagai berikut :

- a) Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp184.988.134.537.894
- b) Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar minus Rp93.844.447.652.001
- c) Transfer keluar sebesar minus Rp58.596.960.796
- d) Transfer masuk sebesar Rp58.596.960.796

5. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.04

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp3.354.691.076.815 yang berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp3.354.691.076.815 merupakan selisih antara Diterima Dari Entitas Lain sebesar minus Rp 5.427.013.053.780 dan Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp2.072.321.976.965.

6. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.05

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp784.129.392.933.307 yang berasal dari :

- a) Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp791.032.474.096.885
- b) Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar minus Rp6.903.081.163.578

7. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.07

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp250.525.895.824.267 yang berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp250.525.895.824.267 terdiri dari Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp2.272.705.264.332 dan Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp 252.798.601.088.599.

8. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.08

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp402.219.454.215.702 yang berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 terdiri dari akun Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp405.688.899.013.660, Diterima Dari Entitas Lain sebesar minus Rp3.469.444.797.958.

9. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.99

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp33.709.707.398.286 yang berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp33.709.707.398.286 terdiri dari :

- 1) UAPBUN TK DJPb sebesar Rp127.586.854.703.508 berasal dari selisih antara DDEL – DKEL atas transaksi pengeluaran dan penerimaan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian :
 - a) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp211.133.987.434.520.
 - b) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp83.547.132.731.012.
- 2) UAPBUN TK DJKN sebesar minus Rp1.539.647.222.322 terdiri dari :
 - a) Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp16.190.236.423
 - b) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp1.555.837.949.088
 - c) Transfer Keluar sebesar minus Rp318.078.326.866.684
 - d) Transfer masuk sebesar Rp318.078.326.866.684
- 3) UAPBUN TK DJA sebesar minus Rp159.647.214.602.373 yang terdiri dari :
 - a) Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp142.358.768.244.040
 - b) Diterima dari Entitas Lain per tanggal 31 Desember 2022 sebesar minus Rp302.005.982.846.413
- 4) UAPBUN TK BKF sebesar Rp74.579.839.600 yang terdiri dari :
 - a) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp74.579.839.600
 - b) Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp0
- 5) UAPBUN TK DJPK sebesar minus Rp303.990.747.926 yang terdiri dari :
 - a) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp43.391.230.635.072

- b) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp43.695.221.382.998
- 6) UAPBUN TK DJPPR sebesar Rp119.710.631.227
 - a) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp119.710.631.227
 - b) Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp0

G.2.5. KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI

*Keuntungan
(/Kerugian)
Selisih Kurs
Yang Belum
Terealisasi*

Nilai Keuntungan / (Kerugian) Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp0** merupakan kerugian selisih kurs dari Bagian Anggaran Transaksi Khusus 999.99 hasil revaluasi aset moneter yang telah direklasifikasi ke beban selisih kurs belum terealisasi.

G.2.6. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L

*Mutasi
Ekuitas BUN
di K/L*

Nilai mutasi ekuitas bun di K/L pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **minus Rp1.903.764.560.998**, merupakan perubahan Ekuitas yang berasal dari aset yang bukan milik Kuasa BUN tapi menurut ketentuan wajib disajikan dalam neraca Kuasa BUN dengan rincian sebagai berikut :

1. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar minus Rp32.123.110.512, merupakan mutasi transaksi akun kas pada Bendahara Pengeluaran di Ledger Akrua dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kisaran Akun		Jumlah
1	111611	111611	(21.787.760.776)
2	111613	111613	(10.335.349.736)
Total			(32.123.110.512)

2. Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp1.150.651.829.898 merupakan jumlah mutasi transaksi akun kas lainnya di K/L dari hibah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kisaran Akun		Jumlah
1	111822	111822	1.150.651.829.898
Total			1.150.651.829.898

3. Mutasi Kas BLU sebesar minus Rp3.022.293.280.385 merupakan jumlah mutasi akun kas BLU dengan rincian sebagai berikut:

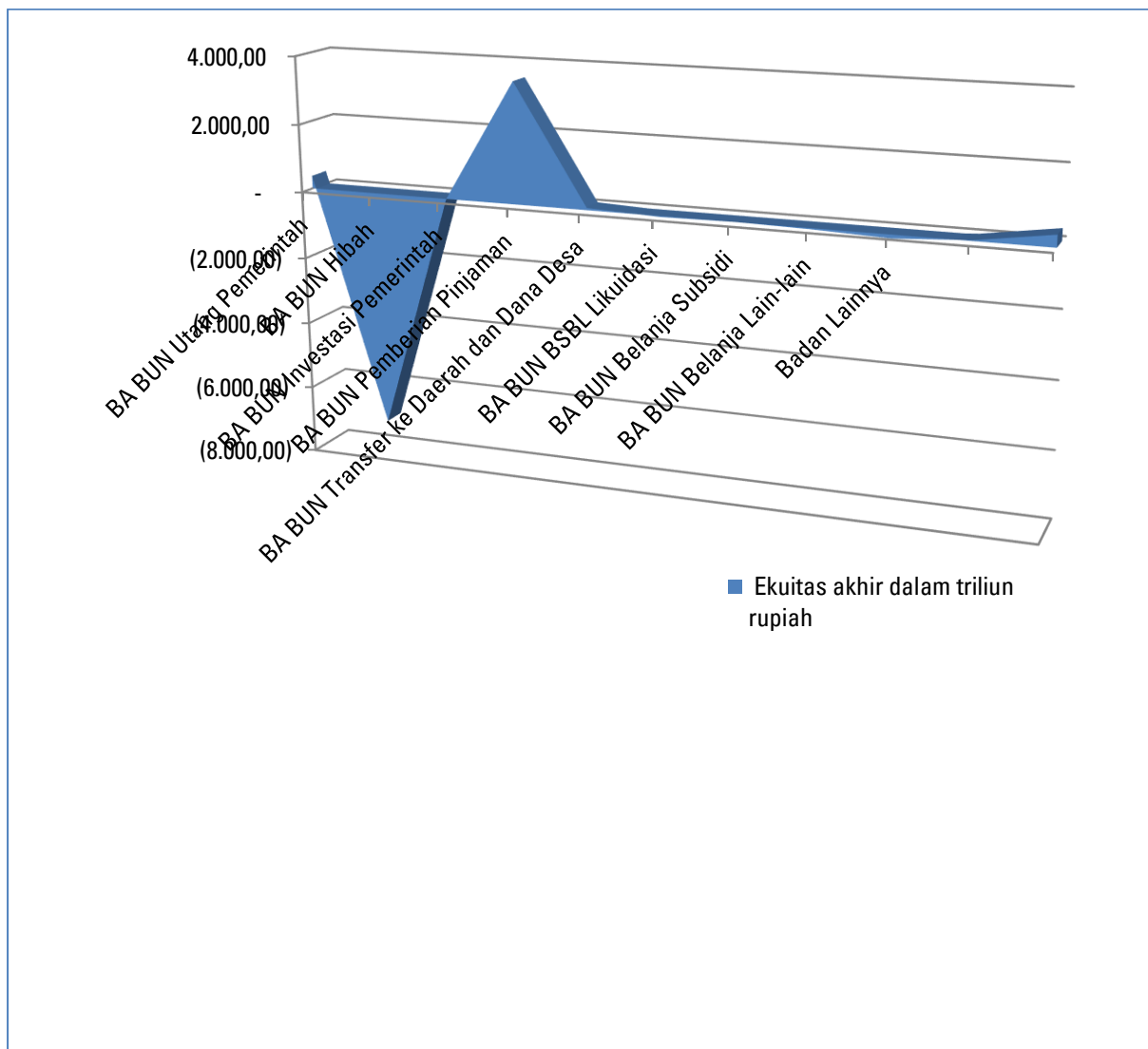
No.	Kisaran Akun		Jumlah
1	111911	111911	(3.022.293.280.385)
Total			(3.022.293.280.385)

G.2.7. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas
Akhir*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp3.262.260.267.295.775. Ekuitas akhir tersebut merupakan seluruh Ekuitas akhir BABUN sebesar minus Rp3.245.723.110.490.290 ditambah eliminasi sebesar minus Rp16.537.156.805.485. Rincian nilai Ekuitas akhir adalah:

NO	UNIT		31 DESEMBER 2022
	KODE	URAIAN	
1	999.00	Akuntansi Pusat	536.433.009.418.783
2	999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(7.861.967.689.868.841)
3	999.02	BA BUN Hibah	0
4	999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	3.827.718.880.770.841
5	999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	60.907.330.544.608
6	999.05	BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(64.787.229.735.828)
7	999.06	BA BUN BSBL Likuidasi	-
8	999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(42.327.401.721.901)
9	999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(67.223.517.455.607)
10	999.09	Badan Lainnya	29.625.443.493.878
11	999.99	BA BUN Transaksi Khusus	335.898.064.063.777
JUMLAH			(3.245.723.110.490.290)
ELIMINASI			(16.537.156.805.485)
EKUITAS AKHIR			(3.262.260.267.295.775)



H. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

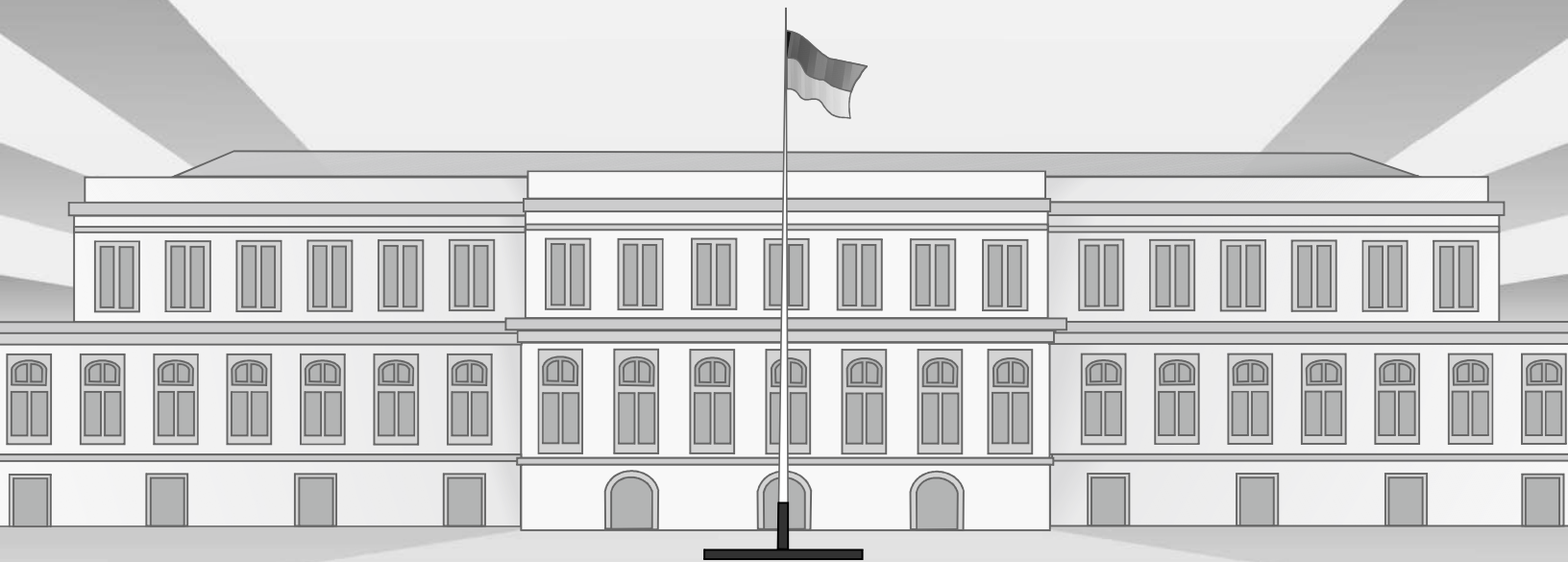
*Penutup
Catatan
atas
Laporan
Keuangan*

Demikianlah Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2022 *Audited* yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 22 Mei 2023
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN 2022 *AUDITED*

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2022
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	216.155.838.535.000	238.341.910.771.353	110,26%	185.630.214.779.513	52.711.695.991.840
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	210.593.452.863.000	232.645.855.357.561	110,47%	180.617.172.344.827	52.028.683.012.734
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	140.584.459.920.000	150.863.599.696.975	107,31%	98.470.753.470.273	52.392.846.226.702
4211	Pendapatan Minyak bumi	106.487.890.000.000	111.992.940.458.410	105,17%	64.998.824.686.934	46.994.115.771.476
42111	Pendapatan Minyak Bumi	106.487.890.000.000	111.992.940.458.410	105,17%	64.998.824.686.934	46.994.115.771.476
421111	Pendapatan Minyak Bumi	106.487.890.000.000	111.992.940.458.410	105,17%	64.998.824.686.934	46.994.115.771.476
4212	Pendapatan Gas Bumi	32.610.520.000.000	36.705.949.688.708	112,56%	31.617.569.168.427	5.088.380.520.281
42121	Pendapatan Gas Bumi	32.610.520.000.000	36.705.949.688.708	112,56%	31.617.569.168.427	5.088.380.520.281
421211	Pendapatan Gas Bumi	32.610.520.000.000	36.705.949.688.708	112,56%	31.617.569.168.427	5.088.380.520.281
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.486.049.920.000	2.164.709.549.857	145,67%	1.854.359.614.912	310.349.934.945
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.486.049.920.000	2.164.709.549.857	145,67%	1.854.359.614.912	310.349.934.945
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	1.486.049.920.000	2.164.709.549.857	145,67%	1.854.359.614.912	310.349.934.945
422	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	37.089.849.454.000	40.597.091.946.149	109,46%	30.496.823.293.877	10.100.268.652.272
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	37.089.849.454.000	40.597.091.946.149	109,46%	30.496.823.293.877	10.100.268.652.272
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	36.393.596.454.000	39.735.630.261.242	109,18%	29.542.724.205.314	10.192.906.055.928
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	20.294.729.871.000	24.577.522.332.666	121,10%	13.583.583.335.643	10.993.938.997.023
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	16.098.866.583.000	15.158.107.928.576	94,16%	15.959.140.869.671	(801.032.941.095)
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	696.253.000.000	861.461.684.907	123,73%	954.099.088.563	(92.637.403.656)
422141	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	-	-	-	-	-
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	696.253.000.000	861.461.684.907	123,73%	954.099.088.563	(92.637.403.656)
422211	Pendapatan dari Surplus Bank	-	-	-	-	-
425	Pendapatan PNBP Lainnya	32.919.143.489.000	41.185.163.714.437	125,11%	51.649.595.580.677	(10.464.431.866.240)
4251	Pendapatan Penjualan dan Sewa	-	11.244.433.267.622	-	7.276.148.022.081	3.968.285.245.541
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	14.125.000	-	180.009.999	(165.884.999)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	14.125.000	-	180.009.999	(165.884.999)
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	-	600.000	-	-	600.000
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	600.000	-	-	600.000
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	-	889.666.645.093	-	483.297.642.229	406.369.002.864
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	-	251.840.175.563	-	395.395.237.670	(143.555.062.107)
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	-	352.188.146.613	-	5.120.111.999	347.068.034.614
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	-	2.099.951.416	-	1.510.982.135	588.969.281
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain	-	548.127.671	-	4.305.313.289	(3.757.185.618)
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	-	7.469.190.983	-	26.333.009.100	(18.863.818.117)
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	-	275.521.052.847	-	50.632.988.036	224.888.064.811
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	-	10.354.751.897.529	-	6.792.670.369.853	3.562.081.527.676
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	-	9.908.737.554.844	-	6.605.682.013.164	3.303.055.541.680
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	-	446.014.342.685	-	186.988.356.689	259.025.985.996
4252	PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN	-	248.049.857	-	295.737.220	(47.687.363)
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	-	248.049.857	-	295.737.220	(47.687.363)
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	-	248.049.857	-	295.737.220	(47.687.363)
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	1.166.778.205.000	18.244.301.898.597	1563,65%	24.875.334.077.599	(6.631.032.179.002)

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
TAHUN 2022
(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN		40.597.091.946.149
DIVIDEN		39.733.296.936.047
BUMN		39.733.296.246.652
PERBANKAN		24.577.522.332.647
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.751.423.016.699
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.636.944.231.460
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14.046.581.539.080
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	142.573.545.408
PERBANKAN (MINORITAS)		19
1	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.	19
NON PERBANKAN (MAYORITAS)		15.155.773.914.005
1	PT Pertamina (Persero)	2.928.000.000.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.738.577.913.038
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	750.000.000.000
4	PT Biofarma (Persero)	150.000.000.000
5	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	522.342.000.000
6	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.316.854.000.000
7	PT Sucofindo (Persero)	25.000.000.500
8	PT Surveyor Indonesia (Persero)	15.000.000.467
9	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	10.000.000.000
10	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	900.000.000.000
11	Perum Perhutani	50.000.000.000
12	PT PLN (Persero)	750.000.000.000
NON PERBANKAN (MINORITAS)		689.395
1	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	39
2	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	3.443
3	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	125
4	PT Timah (Persero) Tbk	62
5	PT Kawasan Berikat Nusantara	29.921
6	PT Pegadaian (Persero)	291.212
7	PT Jamkrindo	104.646
8	PT Kawasan Industri Makassar	21.053
9	PT Kawasan Industri Medan	4.771
10	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	234.123
PEMBAYARAN PIUTANG SEBELUM TB 2021		2.333.325.176
1	PT Perkebunan Nusantara II	970.726.939
2	PT Inhutani I	62.468.077
3	PT Inhutani V	300.000.000
4	Perum Perumnas	1.000.000.000
5	PT Jaminan Kredit Indonesia	44.785
6	PT Asuransi Kredit Indonesia	85.375
BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		861.461.684.907

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
TAHUN 2022
(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	457.534.000.000
2	PT Sarana Multigriya Finansial	114.980.750.000
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	156.350.534.000
4	LPEI	110.795.176.254
5	PT Geo Dipa Energi (Persero)	16.974.835.764
6	PT Sejahtera Eka Graha	4.826.388.889
JUMLAH TOTAL		40.597.091.946.149

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA PER JENIS TRANSFER
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	832.946.830.563.000	816.234.826.067.696	97,99%	16.712.004.495.304
I	TRANSFER KE DAERAH	764.946.830.563.000	748.328.687.677.265	97,83%	16.618.142.885.735
A	DANA PERIMBANGAN	736.190.566.993.000	719.578.751.333.265	97,74%	16.611.815.659.735
A.1	Dana Transfer Umum	546.596.723.927.000	546.414.110.278.434	99,97%	182.613.648.566
A.1.1	Dana Bagi Hasil	168.596.723.927.000	168.414.110.278.434	99,89%	182.613.648.566
A.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	67.699.092.141.343	67.590.162.805.658	99,84%	108.929.335.685
6111	DBH PPh Perorangan	37.677.680.471.742	37.677.680.471.742	100,00%	-
611111	Belanja DBH PPh psl 21	34.539.286.893.569	34.539.286.893.569	100,00%	-
611112	Belanja DBH PPh psl 25/29 OP	3.138.393.578.173	3.138.393.578.173	100,00%	-
6112	DBH PBB	25.321.008.091.173	25.321.008.091.173	100,00%	-
611211	Belanja DBH PBB untuk Propinsi	4.366.797.211.455	4.366.797.211.455	100,00%	-
611212	Belanja DBH PBB untuk Kabupaten/Kota	17.424.098.798.439	17.424.098.798.439	100,00%	-
611213	Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	136.500.227.457	136.500.227.457	100,00%	-
611214	Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	630.764.804.008	630.764.804.008	100,00%	-
611215	Belanja DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke Kabupaten/Kota	2.762.847.049.814	2.762.847.049.814	100,00%	-
6131	DBH Cukai	4.700.403.578.428	4.591.474.242.743	97,68%	108.929.335.685
613111	Belanja DBH Cukai Hasil Tembakau	4.700.403.578.428	4.591.474.242.743	97,68%	108.929.335.685
A.1.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	100.897.631.785.657	100.823.947.472.776	99,93%	73.684.312.881
6121	DBH SDA Minyak Bumi	14.388.156.301.036	14.388.156.301.036	100,00%	-
612111	Belanja DBH Minyak Bumi 15%	13.400.282.797.198	13.400.282.797.198	100,00%	-
612112	Belanja DBH Minyak Bumi 0,5%	410.480.660.096	410.480.660.096	100,00%	-
612113	Tambahan Belanja DBH Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	577.392.843.742	577.392.843.742	100,00%	-
6122	DBH SDA Gas Bumi	13.022.127.844.187	13.022.127.844.187	100,00%	-
612211	Belanja DBH Gas Bumi 30%	10.651.711.463.778	10.651.711.463.778	100,00%	-
612212	Belanja DBH Gas Bumi 0.5%	133.405.562.216	133.405.562.216	100,00%	-
612213	Tambahan Belanja DBH Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	2.237.010.818.193	2.237.010.818.193	100,00%	-
6123	DBH SDA Mineral dan Batubara	68.713.989.486.607	68.713.989.486.607	100,00%	-
612311	Belanja DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	1.230.067.070.953	1.230.067.070.953	100,00%	-
612312	Belanja DBH Pertambangan Umum - Royalti	67.483.922.415.654	67.483.922.415.654	100,00%	-
6124	DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	1.726.630.460.219	1.726.630.460.219	100,00%	-

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA PER JENIS TRANSFER
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
612411	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah	1.236.807.548.641	1.236.807.548.641	100,00%	-
612412	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi- luran Tetap	30.426.834.964	30.426.834.964	100,00%	-
612413	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi- luran Produksi (Royalti)	459.396.076.614	459.396.076.614	100,00%	-
6125	DBH SDA Kehutanan	1.942.165.028.564	1.868.480.715.683	96,21%	73.684.312.881
612511	Belanja DBH Kehutanan - IIUPH/IHPH	69.051.380.804	67.782.731.654	98,16%	1.268.649.150
612512	Belanja DBH Kehutanan - PSDH	1.122.349.152.819	1.052.613.149.269	93,79%	69.736.003.550
612513	Belanja DBH Kehutanan - Dana Reboisasi	750.764.494.941	748.084.834.760	99,64%	2.679.660.181
6126	DBH Perikanan	1.104.562.665.044	1.104.562.665.044	100,00%	-
612611	Belanja DBH Perikanan	1.104.562.665.044	1.104.562.665.044	100,00%	-
A.1.2	Transfer Dana Alokasi Umum	378.000.000.000.000	378.000.000.000.000	57,33%	0
621111	Belanja Dana Alokasi Umum	378.000.000.000.000	378.000.000.000.000	100,00%	-
A.2	Dana Transfer Khusus	189.593.843.066.000	173.164.641.054.831	40,09%	16.429.202.011.169
A.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	60.874.000.000.000	54.783.954.054.112	90,00%	6.090.045.945.888
631111	Belanja DAK Fisik Reguler	47.421.623.025.000	42.698.467.396.430	90,04%	4.723.155.628.570
631212	Belanja DAK Fisik Penugasan	13.452.376.975.000	12.085.486.657.682	89,84%	1.366.890.317.318
631311	Belanja DAK Afirmasi	-	-		-
A.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	128.719.843.066.000	118.380.687.000.719	91,97%	10.339.156.065.281
654111	Belanja Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	51.990.474.366.000	46.547.785.535.686	89,53%	5.442.688.830.314
654112	Belanja Dana Tunjangan Khusus Guru	1.651.287.600.000	1.193.073.260.050	72,25%	458.214.339.950
654211	Belanja Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	1.684.280.000.000	991.045.485.177	58,84%	693.234.514.823
654711	Belanja Bantuan Operasional Kesehatan	9.933.130.000.000	9.653.384.267.000	97,18%	279.745.733.000
654712	Belanja Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.759.770.000.000	2.663.934.986.000	96,53%	95.835.014.000
654821	Belanja Dana Pelayanan Kepariwisata	127.900.000.000	127.814.750.000	99,93%	85.250.000
654721	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	100.000.000.000	55.658.502.955	55,66%	44.341.497.045
655211	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	120.000.000.000	114.052.500.000	95,04%	5.947.500.000
654921	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	167.600.000.000	165.887.500.000	98,98%	1.712.500.000
655311	Dana Fasilitas Penanaman Modal	225.000.000.000	221.756.002.000	98,56%	3.243.998.000
655411	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	200.000.000.000	197.786.550.000	98,89%	2.213.450.000
654811	Belanja PK2UMK	225.000.000.000	223.798.218.000	99,47%	1.201.782.000
654921	Belanja PK2SIKM	150.000.000.000	145.057.021.000	96,70%	4.942.979.000
654311	Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	54.108.304.830.000	51.345.762.364.395	94,89%	2.762.542.465.605
654911	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.254.851.290.000	3.737.218.787.456	87,83%	517.632.502.544
654912	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.022.244.980.000	996.671.271.000	97,50%	25.573.709.000
64	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Insentif Daerah	28.756.263.570.000	28.749.936.344.000	99,98%	6.327.226.000
B	DANA OTONOMI KHUSUS	20.436.263.570.000	20.436.263.570.000	100,00%	-
641111	Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.560.000.000.000	7.560.000.000.000	100,00%	-

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA PER JENIS TRANSFER
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
641211	Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.783.400.000.000	5.783.400.000.000	100,00%	-
641212	Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.404.194.963.000	2.404.194.963.000	100,00%	-
641311	Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.721.600.000.000	2.721.600.000.000	100,00%	-
641312	Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.967.068.607.000	1.967.068.607.000	100,00%	-
C	DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100,00%	-
642111	Belanja Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100,00%	-
D	DANA INSENTIF DAERAH	7.000.000.000.000	6.993.672.774.000	99,91%	6.327.226.000
643111	Belanja Dana Insentif Daerah (DID)	7.000.000.000.000	6.993.672.774.000	99,91%	6.327.226.000
II	DANA DESA	68.000.000.000.000	67.906.138.390.431	99,86%	93.861.609.569
662111	Belanja Dana Desa	68.000.000.000.000	67.906.138.390.431	99,86%	93.861.609.569

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
1	Provinsi Aceh	427.859.000.234	1.947.783.847.000	969.346.501.336	7.591.880.169.000	10.936.869.517.570
2	Kab. Aceh Barat	86.290.874.735	543.825.941.000	164.078.457.561	272.954.160.000	1.056.096.165.296
3	Kab. Aceh Besar	23.995.725.214	746.906.382.000	244.078.571.028	422.944.648.320	1.424.734.408.562
4	Kab. Aceh Selatan	21.342.438.003	595.943.979.000	224.410.440.767	198.586.498.480	1.028.184.165.250
5	Kab. Aceh Singkil	27.677.642.378	407.073.542.000	153.673.908.836	112.512.246.800	784.310.408.014
6	Kab. Aceh Tengah	22.387.241.378	565.665.428.000	155.850.450.627	209.801.406.219	936.641.403.224
7	Kab. Aceh Tenggara	18.308.294.603	539.841.465.000	166.188.290.264	265.892.419.000	1.064.523.943.867
8	Kab. Aceh Timur	61.518.852.744	760.233.269.000	261.568.974.241	373.119.830.000	1.451.476.768.985
9	Kab. Aceh Utara	94.241.419.715	882.657.786.000	433.919.662.302	619.250.594.463	1.983.933.485.480
10	Kab. Bireuen	23.107.356.667	801.251.152.000	284.213.597.934	442.090.317.300	1.568.982.344.901
11	Kab. Pidie	23.089.808.433	823.251.463.000	241.473.455.168	494.353.834.841	1.537.818.003.211
12	Kab. Simeulue	16.760.934.812	419.892.376.000	87.719.986.306	111.223.367.000	721.724.801.675
13	Kota Banda Aceh	55.695.513.109	539.238.114.000	173.776.403.031	120.655.519.000	909.573.269.140
14	Kota Sabang	16.959.624.338	332.134.428.000	67.133.849.514	32.503.003.000	513.987.629.852
15	Kota Langsa	22.339.038.902	407.519.092.000	108.892.291.352	73.142.669.733	626.771.857.987
16	Kota Lhokseumawe	29.847.602.752	418.626.656.000	99.832.178.774	88.345.200.902	670.760.157.428
17	Kab. Gayo Lues	19.340.385.634	420.433.218.000	96.935.071.543	106.145.480.910	642.854.156.087
18	Kab. Aceh Barat Daya	18.166.454.058	411.099.627.000	136.571.013.169	120.790.553.000	721.444.949.227
19	Kab. Aceh Jaya	17.718.086.471	393.215.559.000	139.304.261.312	134.953.479.000	697.721.266.783
20	Kab. Nagan Raya	37.525.279.009	477.405.680.000	153.170.878.855	167.595.609.000	841.935.166.864
21	Kab. Aceh Tamiang	109.533.494.454	488.964.332.000	219.740.055.692	162.463.169.800	980.832.283.946
22	Kab. Bener Meriah	18.034.613.764	418.060.203.000	119.462.411.996	179.506.139.000	738.032.612.760
23	Kab. Pidie Jaya	17.523.315.521	404.301.754.000	173.217.294.700	170.644.585.000	767.019.882.221
24	Kota Subulussalam	19.835.628.692	314.289.551.000	136.695.218.471	82.927.992.000	562.234.563.163
25	Provinsi Sumatera Utara	809.148.873.356	2.463.686.589.000	2.045.139.099.557	36.188.247.000	5.186.557.259.913
26	Kab. Asahan	106.937.021.436	818.693.947.000	317.173.027.414	151.463.892.800	1.363.072.954.400
27	Kab. Dairi	36.752.763.688	557.382.089.000	304.422.943.970	127.395.282.000	1.033.293.740.815
28	Kab. Deli Serdang	133.059.872.856	1.354.889.566.000	641.576.951.680	323.862.404.000	2.388.121.955.536
29	Kab. Karo	31.613.060.360	679.135.837.000	215.031.542.338	196.828.398.710	1.111.634.850.158
30	Kab. Labuhanbatu	74.008.852.105	638.234.403.000	210.689.208.993	67.408.046.530	988.564.201.628

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
31	Kab. Langkat	217.932.821.106	1.081.981.083.000	448.149.744.564	214.996.733.380	1.914.111.148.800
32	Kab. Mandailing Natal	79.821.038.329	743.340.668.000	325.748.673.058	284.748.020.740	1.421.159.671.127
33	Kab. Nias	24.875.199.104	412.621.552.000	212.429.019.286	171.145.636.080	947.777.267.701
34	Kab. Simalungun	88.148.070.208	1.120.786.035.000	514.683.264.296	306.916.025.000	1.990.158.294.504
35	Kab. Tapanuli Selatan	461.148.868.452	595.549.093.000	187.617.936.614	171.523.914.400	1.396.958.229.466
36	Kab. Tapanuli Tengah	34.616.284.868	603.228.847.000	253.916.012.302	137.323.317.000	1.069.892.850.170
37	Kab. Tapanuli Utara	86.776.576.707	597.808.962.000	228.886.422.026	188.374.828.000	1.089.010.154.733
38	Kab. Toba Samosir	31.928.836.846	510.871.853.000	189.348.578.792	174.807.668.000	956.987.151.638
39	Kota Binjai	34.697.389.816	532.627.031.000	150.082.030.823	9.792.420.000	716.736.081.639
40	Kota Medan	260.973.290.875	1.526.073.171.000	539.603.432.191	11.500.663.000	2.338.150.557.066
41	Kota Pematang Siantar	41.560.590.458	556.772.164.000	114.403.911.557	10.436.540.000	721.762.314.015
42	Kota Sibolga	27.853.920.731	384.535.437.000	83.849.834.135	18.430.524.000	526.666.100.101
43	Kota Tanjung Balai	27.232.429.423	403.249.168.000	82.901.265.889	2.014.604.000	509.993.253.293
44	Kota Tebing Tinggi	28.142.880.060	386.845.565.000	97.738.023.407	9.617.444.000	524.910.311.467
45	Kota Padang Sidempuan	29.999.430.748	468.092.452.000	111.837.446.983	47.895.899.000	709.585.213.481
46	Kab. Pakpak Bharat	26.336.666.528	318.945.304.000	94.681.721.246	53.281.186.487	535.270.390.261
47	Kab. Nias Selatan	33.365.107.224	617.556.640.000	311.446.518.229	371.959.764.729	1.317.123.280.182
48	Kab. Humbang Hasundutan	27.265.982.612	481.987.960.000	186.374.887.504	123.378.258.000	819.806.012.116
49	Kab. Serdang Bedagai	75.200.609.771	718.135.179.000	356.895.296.816	190.168.426.038	1.313.322.877.625
50	Kab. Samosir	26.649.074.876	414.328.359.000	164.563.406.713	111.392.766.000	750.630.737.589
51	Kab. Batu Bara	47.869.942.099	555.512.477.000	213.680.440.069	129.537.977.247	946.756.637.415
52	Kab. Padang Lawas	59.208.896.912	490.835.624.000	166.831.496.358	222.666.084.880	921.252.827.919
53	Kab. Padang Lawas Utara	51.251.991.822	513.951.816.000	186.006.605.462	283.958.375.149	1.025.052.088.433
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	103.763.384.904	472.807.253.000	161.769.827.688	56.978.087.000	868.825.409.592
55	Kab. Labuhanbatu Utara	65.018.550.515	552.684.492.000	183.300.027.891	76.894.522.690	897.733.878.596
56	Kab. Nias Utara	25.255.466.147	389.171.996.000	166.695.862.342	122.038.991.813	741.111.605.802
57	Kab. Nias Barat	25.046.509.081	330.192.600.000	234.877.240.114	106.413.206.480	722.199.704.675
58	Kota Gunungsitoli	27.349.819.466	399.419.428.000	109.617.814.963	115.034.187.839	662.888.732.018
59	Provinsi Sumatera Barat	200.038.461.281	1.887.033.911.000	1.108.962.770.948	-	3.075.021.763.229
60	Kab. Lima Puluh Kota	20.208.734.544	686.668.871.000	286.994.731.726	74.850.449.000	1.073.445.435.270
61	Kab. Agam	26.318.153.628	745.501.923.000	322.265.029.638	75.099.628.000	1.148.254.940.266
62	Kab. Kepulauan Mentawai	19.945.439.911	549.794.757.000	138.220.948.692	44.685.845.300	741.215.890.903

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
63	Kab. Padang Pariaman	19.838.161.169	706.486.730.000	305.471.125.481	96.089.965.000	1.162.410.922.650
64	Kab. Pasaman	17.651.371.639	551.732.418.000	225.183.411.767	42.840.885.000	841.247.798.406
65	Kab. Pesisir Selatan	30.391.748.920	777.545.595.000	388.151.730.515	161.021.564.000	1.334.887.827.435
66	Kab. Sijunjung	25.099.102.346	502.198.374.000	212.100.257.205	56.318.263.000	798.251.717.551
67	Kab. Solok	21.939.561.780	654.499.415.000	292.368.330.131	78.683.020.000	1.031.552.332.911
68	Kab. Tanah Datar	19.486.717.433	637.174.929.000	236.360.548.226	78.090.662.000	958.554.644.659
69	Kota Bukit Tinggi	20.943.287.646	421.334.282.000	98.167.283.504	-	568.424.148.650
70	Kota Padang Panjang	16.039.117.585	346.447.747.000	52.355.208.370	12.775.829.000	445.144.936.955
71	Kota Padang	102.520.564.143	1.044.871.353.000	354.871.231.824	24.363.996.000	1.494.899.045.967
72	Kota Payakumbuh	17.782.903.502	413.827.474.000	110.789.344.840	1.946.993.000	536.439.867.342
73	Kota Sawahlunto	40.350.872.804	341.393.550.000	119.466.508.134	25.142.847.000	549.367.367.938
74	Kota Solok	18.179.930.716	369.336.357.000	67.619.749.415	7.213.458.000	491.416.062.131
75	Kota Pariaman	17.455.815.121	382.767.313.000	86.117.285.423	48.458.051.000	537.428.551.544
76	Kab. Pasaman Barat	38.116.665.788	597.346.929.000	263.871.263.800	46.673.940.000	942.522.594.588
77	Kab. Dharmasraya	32.420.644.851	472.606.168.000	174.049.578.893	54.283.677.000	731.798.910.744
78	Kab. Solok Selatan	75.928.315.578	437.443.271.000	174.741.857.486	37.621.151.000	728.681.593.064
79	Provinsi Riau	1.879.974.710.923	1.455.383.959.000	958.441.404.619	40.001.129.000	4.277.693.968.542
80	Kab. Bengkalis	2.372.933.931.802	338.312.985.000	307.591.934.194	127.024.597.939	3.170.982.241.722
81	Kab. Indragiri Hilir	276.453.953.060	885.858.086.000	301.079.695.267	199.481.174.000	1.616.567.453.327
82	Kab. Indragiri Hulu	266.736.426.541	630.760.891.000	226.530.690.275	151.242.826.160	1.268.026.254.976
83	Kab. Kampar	645.874.927.467	768.144.602.000	450.225.422.710	220.298.670.324	2.077.753.978.501
84	Kab. Kuantan Singingi	188.098.068.820	600.053.050.000	175.394.052.317	174.960.655.200	1.138.505.826.337
85	Kab. Pelalawan	409.221.793.056	596.380.358.000	211.305.081.902	98.018.806.000	1.327.469.873.958
86	Kab. Rokan Hilir	741.196.952.375	495.023.160.000	360.904.676.911	141.598.411.800	1.738.723.201.086
87	Kab. Rokan Hulu	249.192.187.282	642.947.308.000	326.332.145.577	163.317.241.000	1.377.871.937.859
88	Kab. Siak	946.717.014.113	369.707.154.000	252.233.167.403	118.268.404.000	1.703.255.595.516
89	Kota Dumai	207.359.464.246	429.554.051.000	177.582.619.648	20.360.896.000	872.615.673.894
90	Kota Pekanbaru	279.125.311.333	800.145.136.000	346.641.217.235	-	1.426.003.832.568
91	Kab. Kepulauan Meranti	249.978.800.000	407.577.804.000	172.348.069.625	88.309.772.000	930.065.857.625
92	Provinsi Jambi	671.460.930.129	1.284.884.150.000	610.518.896.401	14.187.913.000	2.508.969.244.530
93	Kab. Batanghari	249.218.131.828	560.125.901.000	219.507.236.579	97.364.495.000	1.138.412.499.407
94	Kab. Bungo	187.176.166.971	589.404.249.000	175.011.487.108	123.343.769.664	1.071.796.353.743

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
95	Kab. Kerinci	103.788.945.025	557.771.989.000	167.009.858.749	210.039.423.639	1.019.807.087.413
96	Kab. Merangin	107.751.007.766	658.892.837.000	205.931.893.617	166.996.055.600	1.118.623.982.983
97	Kab. Muaro Jambi	206.547.450.118	620.129.875.000	228.585.507.276	124.043.914.000	1.192.424.722.394
98	Kab. Sarolangun	236.230.454.407	529.502.380.000	193.618.611.246	125.111.737.400	1.075.223.539.053
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	742.357.809.546	479.788.318.000	185.388.443.874	107.146.265.000	1.516.548.341.420
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	211.971.735.200	514.988.353.000	226.040.530.967	80.938.218.000	1.019.893.787.167
101	Kab. Tebo	157.723.577.699	528.684.400.000	245.650.535.667	120.466.880.700	1.050.556.459.066
102	Kota Jambi	177.371.019.970	675.288.713.000	229.391.186.882	22.192.745.000	1.087.753.412.852
103	Kota Sungai Penuh	102.642.188.996	405.067.761.000	95.050.812.128	60.315.986.168	670.068.129.292
104	Provinsi Sumatera Selatan	2.652.587.335.213	1.563.041.287.000	1.026.167.130.978	60.870.557.000	5.262.353.017.191
105	Kab. Lahat	1.073.134.409.505	640.553.208.000	274.162.038.034	288.494.958.000	2.276.344.613.539
106	Kab. Musi Banyuasin	2.305.490.988.294	374.562.563.000	356.582.702.087	231.006.467.000	3.270.914.796.381
107	Kab. Musi Rawas	539.865.788.141	587.338.179.000	294.290.818.496	225.248.779.000	1.626.248.179.637
108	Kab. Muara Enim	1.712.479.684.959	606.756.199.000	336.007.679.109	244.471.014.000	2.879.929.591.068
109	Kab. Ogan Komering Ilir	314.622.367.597	967.657.461.000	392.338.867.999	302.343.163.640	1.928.221.016.236
110	Kab. Ogan Komering Ulu	344.425.592.045	590.080.276.000	198.932.083.254	132.656.997.225	1.266.700.503.524
111	Kota Palembang	348.282.298.514	1.207.730.107.000	498.713.957.791	8.972.792.000	1.999.508.588.305
112	Kota Prabumulih	344.821.832.830	392.368.815.000	111.538.406.352	17.313.529.000	907.166.687.182
113	Kota Pagar Alam	224.093.835.880	365.676.108.000	133.455.024.727	38.155.519.000	761.380.487.607
114	Kota Lubuk Linggau	230.492.243.127	441.802.413.000	128.639.333.025	27.740.966.000	855.870.137.152
115	Kab. Banyuasin	322.205.833.129	876.013.711.000	467.145.543.449	289.310.409.776	1.939.581.024.354
116	Kab. Ogan Ilir	301.467.098.570	579.569.016.000	295.892.222.716	198.614.564.400	1.361.210.301.686
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	235.151.216.657	743.468.343.000	344.012.246.886	265.160.725.000	1.572.513.995.543
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	236.169.352.233	581.290.776.000	211.797.063.087	213.364.818.763	1.339.900.456.617
119	Kab. Empat Lawang	221.094.313.554	398.163.201.000	229.352.647.541	136.983.549.000	1.001.530.465.095
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	816.115.573.725	291.104.702.000	133.844.973.114	74.552.480.600	1.326.197.354.439
121	Kab. Musi Rawas Utara	310.499.044.048	362.621.650.000	138.096.886.215	83.303.775.000	916.112.543.263
122	Provinsi Bengkulu	124.469.113.160	1.213.764.868.000	492.739.138.838	49.548.556.000	1.813.066.419.998
123	Kab. Bengkulu Selatan	28.282.290.510	513.903.304.000	183.280.853.754	108.230.948.000	842.549.610.264
124	Kab. Bengkulu Utara	118.838.918.942	580.035.368.000	202.885.003.392	166.387.524.000	1.046.001.330.334
125	Kab. Rejang Lebong	28.976.861.360	553.778.571.000	188.430.944.584	110.525.603.400	875.546.126.344
126	Kota Bengkulu	45.925.492.404	635.162.215.000	187.174.993.704	9.465.842.000	867.714.054.108

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
127	Kab. Kaur	28.894.566.787	408.812.452.000	146.110.652.743	144.200.469.000	725.163.983.530
128	Kab. Seluma	36.679.087.480	468.688.044.000	176.829.116.043	138.736.403.000	830.820.160.523
129	Kab. Mukomuko	45.895.969.263	452.918.047.000	149.574.162.404	118.938.012.840	780.146.037.507
130	Kab. Lebong	31.857.269.978	370.515.620.000	126.648.660.662	71.281.592.031	650.064.961.671
131	Kab. Kepahiang	27.415.376.335	395.317.091.000	134.679.785.701	85.723.073.000	815.499.444.036
132	Kab. Bengkulu Tengah	82.841.154.192	400.452.040.000	174.083.269.527	124.422.785.482	797.601.601.201
133	Provinsi Lampung	276.417.192.959	1.726.296.248.000	1.126.830.054.223	1.441.174.000	3.036.755.743.182
134	Kab. Lampung Barat	30.037.614.343	492.394.862.000	226.828.356.880	129.042.977.000	937.915.078.223
135	Kab. Lampung Selatan	57.852.266.678	947.733.529.000	457.319.974.438	273.080.607.000	1.689.705.986.116
136	Kab. Lampung Tengah	81.908.415.650	1.233.938.840.000	610.972.892.699	318.212.844.100	2.179.021.625.449
137	Kab. Lampung Utara	44.606.702.448	868.735.213.000	312.090.187.682	224.935.998.000	1.426.270.919.130
138	Kab. Lampung Timur	83.299.392.361	996.893.721.000	431.300.712.205	279.183.363.800	1.790.677.189.366
139	Kab. Tanggamus	134.596.870.096	711.914.649.000	372.496.858.947	261.388.300.000	1.453.307.589.043
140	Kab. Tulang Bawang	48.843.160.626	571.687.479.000	250.341.871.999	135.335.401.000	966.463.710.875
141	Kab. Way Kanan	48.553.094.360	616.918.686.000	312.949.934.815	183.269.898.000	1.117.267.560.425
142	Kota Bandar Lampung	80.360.349.156	1.002.213.665.000	323.411.141.415	8.791.675.000	1.393.214.721.571
143	Kota Metro	34.267.418.099	427.590.058.000	109.717.434.391	30.673.067.000	599.795.739.490
144	Kab. Pesawaran	37.963.136.960	611.838.446.000	254.799.700.579	150.905.219.600	1.047.345.242.139
145	Kab. Pringsewu	31.204.812.899	569.803.319.000	274.054.139.612	139.047.741.000	1.012.774.616.511
146	Kab. Mesuji	48.550.854.886	403.974.381.000	182.693.762.919	96.405.483.400	750.890.135.205
147	Kab. Tulang Bawang Barat	32.979.335.403	437.174.360.000	197.608.845.928	82.600.289.000	764.742.847.331
148	Kab. Pesisir Barat	29.320.375.175	402.002.138.000	130.415.469.171	124.054.283.000	692.457.750.346
149	Provinsi DKI Jakarta	17.988.440.631.584	-	2.783.467.654.866	29.684.233.000	20.801.592.519.450
150	Provinsi Jawa Barat	2.331.202.008.590	3.015.641.290.000	4.732.815.734.726	39.615.757.000	9.902.039.062.316
151	Kab. Bandung	581.122.393.346	1.947.251.242.000	1.080.867.049.107	396.654.737.800	3.882.681.827.253
152	Kab. Bekasi	488.467.154.564	1.097.123.037.000	718.766.057.657	278.513.360.000	2.582.869.609.221
153	Kab. Bogor	424.530.843.899	1.865.830.791.000	1.422.039.873.308	568.002.884.307	4.162.661.668.514
154	Kab. Ciamis	90.852.127.811	1.099.393.370.000	576.542.779.918	296.574.889.000	2.002.623.355.729
155	Kab. Cianjur	113.818.485.510	1.483.406.286.000	856.121.529.597	439.743.792.800	2.802.843.909.907
156	Kab. Cirebon	129.313.575.966	1.407.550.394.000	747.970.020.573	498.685.290.000	2.595.120.609.039
157	Kab. Garut	285.118.550.018	1.665.908.667.000	975.395.835.438	530.022.372.200	3.358.652.611.656
158	Kab. Indramayu	244.872.457.800	1.282.966.828.000	538.222.892.180	401.124.868.800	2.439.250.939.780

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
159	Kab. Karawang	432.238.896.352	1.199.911.350.000	717.214.274.184	355.943.391.000	2.708.143.535.536
160	Kab. Kuningan	92.369.762.454	1.112.116.937.000	586.301.774.833	315.201.708.000	2.085.708.372.287
161	Kab. Majalengka	138.329.456.663	1.112.419.642.000	535.758.301.603	408.734.078.000	2.148.596.884.266
162	Kab. Purwakarta	135.969.962.109	799.002.962.000	385.645.600.282	186.739.458.600	1.524.292.206.991
163	Kab. Subang	208.774.901.644	1.182.520.441.000	635.770.426.688	234.728.039.000	2.198.882.945.332
164	Kab. Sukabumi	231.685.537.012	1.491.039.889.000	863.430.044.580	410.991.005.000	2.923.879.691.592
165	Kab. Sumedang	115.294.189.766	1.058.905.256.000	628.357.841.698	274.422.186.800	2.036.220.981.264
166	Kab. Tasikmalaya	98.486.167.371	1.375.992.285.000	702.143.415.855	410.271.552.000	2.505.891.931.226
167	Kota Bandung	405.220.988.354	1.566.037.358.000	672.868.696.394	-	2.670.876.754.748
168	Kota Bekasi	196.108.091.061	1.137.891.061.000	587.399.967.068	16.318.528.000	1.905.018.554.129
169	Kota Bogor	129.330.739.732	751.862.545.000	362.628.950.888	32.306.424.000	1.464.776.880.620
170	Kota Cirebon	98.729.875.992	536.524.293.000	171.532.476.223	27.043.861.000	951.391.081.215
171	Kota Depok	150.110.183.272	843.688.626.000	416.712.072.890	-	1.495.689.392.162
172	Kota Sukabumi	89.235.840.784	463.567.655.000	163.846.747.222	24.415.056.000	794.050.774.006
173	Kota Tasikmalaya	93.837.790.031	742.097.940.000	299.607.412.313	26.767.451.000	1.224.086.286.344
174	Kota Cimahi	99.726.434.962	530.425.978.000	168.511.997.586	5.528.168.000	814.532.031.548
175	Kota Banjar	83.826.068.634	346.807.146.000	115.808.184.812	19.422.326.000	590.061.040.446
176	Kab. Bandung Barat	114.176.426.749	1.012.676.514.000	513.213.214.154	252.779.335.000	1.925.751.645.903
177	Kab. Pangandaran	83.552.547.232	505.200.629.000	218.038.253.363	86.475.129.900	989.992.225.495
178	Provinsi Jawa Tengah	1.036.169.049.559	3.435.721.631.000	3.387.936.813.713	61.352.500.000	7.741.783.767.272
179	Kab. Banjarnegara	49.240.941.743	895.961.511.000	380.753.151.814	292.520.420.000	1.643.805.177.557
180	Kab. Banyumas	62.386.046.172	1.289.633.614.000	626.891.327.940	413.800.657.000	2.342.806.377.112
181	Kab. Batang	51.487.258.220	737.685.667.000	323.614.786.712	208.032.695.000	1.294.457.792.932
182	Kab. Blora	156.382.899.089	863.598.364.000	405.535.482.662	272.816.766.050	1.719.043.391.801
183	Kab. Boyolali	62.186.440.659	944.891.188.000	479.390.698.054	244.744.538.000	1.739.544.544.713
184	Kab. Brebes	47.408.274.408	1.239.370.246.000	585.411.166.468	453.819.700.000	2.289.312.114.876
185	Kab. Cilacap	79.001.274.788	1.274.344.606.000	627.195.412.941	332.117.164.104	2.245.846.923.833
186	Kab. Demak	64.810.326.460	856.667.569.000	404.807.071.429	330.195.314.000	1.706.373.311.889
187	Kab. Grobogan	73.311.641.482	1.034.216.110.000	510.649.178.731	328.472.904.000	1.959.008.527.213
188	Kab. Jepara	61.418.792.478	928.866.409.000	426.686.679.792	281.811.395.000	1.745.631.064.270
189	Kab. Karanganyar	54.369.656.357	903.630.027.000	408.317.636.818	192.281.648.000	1.571.538.570.175
190	Kab. Kebumen	43.284.781.282	1.179.288.910.000	506.795.167.607	416.756.373.000	2.162.517.178.889

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
191	Kab. Kendal	59.190.847.057	901.810.918.000	428.439.941.873	270.485.163.000	1.647.431.172.930
192	Kab. Klaten	54.774.377.523	1.149.421.184.000	422.530.545.324	390.547.930.000	1.966.199.297.847
193	Kab. Kudus	313.040.612.019	747.504.503.000	302.868.980.146	162.086.034.000	1.533.515.472.165
194	Kab. Magelang	50.630.351.636	975.296.878.000	477.844.318.858	407.599.290.000	1.868.726.737.494
195	Kab. Pati	51.659.402.411	1.107.122.582.000	447.362.088.985	462.559.784.200	2.038.285.138.596
196	Kab. Pekalongan	38.001.651.164	871.105.712.000	368.992.358.987	265.196.596.350	1.523.267.584.501
197	Kab. Pemalang	43.523.085.376	1.107.792.827.000	485.129.141.763	324.866.407.900	1.953.385.103.039
198	Kab. Purbalingga	37.583.331.525	830.529.715.000	455.817.109.113	246.998.927.400	1.543.818.327.038
199	Kab. Purworejo	36.729.495.142	913.937.548.000	385.947.577.671	387.982.413.375	1.934.745.700.188
200	Kab. Rembang	77.619.319.491	718.204.574.000	310.087.803.761	260.642.250.000	1.381.367.024.252
201	Kab. Semarang	53.641.523.033	897.099.063.000	458.593.607.540	222.297.041.000	1.628.839.510.573
202	Kab. Sragen	40.100.653.495	984.484.500.000	404.311.481.717	197.103.111.000	1.593.657.735.212
203	Kab. Sukoharjo	49.363.359.210	847.875.034.000	305.921.429.383	148.559.522.000	1.334.642.034.593
204	Kab. Tegal	44.635.726.988	1.077.039.778.000	517.204.894.382	359.312.887.800	2.011.720.826.170
205	Kab. Temanggung	75.663.409.968	753.174.275.000	390.343.237.364	248.317.905.000	1.490.918.979.332
206	Kab. Wonogiri	47.855.293.134	1.059.941.416.000	453.588.537.729	227.881.447.400	1.778.343.777.263
207	Kab. Wonosobo	48.434.205.170	792.381.589.000	349.665.682.363	225.391.858.000	1.380.650.465.533
208	Kota Magelang	36.031.954.384	409.629.499.000	88.941.191.026	17.049.883.000	553.312.907.410
209	Kota Pekalongan	37.781.735.701	426.399.738.000	158.623.950.133	4.696.260.000	658.647.132.834
210	Kota Salatiga	36.062.871.110	418.013.566.000	102.586.171.426	52.018.907.000	649.149.551.536
211	Kota Semarang	211.118.878.072	1.167.622.970.000	450.176.025.523	54.251.362.000	1.892.941.000.595
212	Kota Surakarta	63.259.747.054	781.825.148.000	328.414.940.733	30.558.815.000	1.185.387.554.787
213	Kota Tegal	37.891.563.190	451.704.750.000	137.986.407.095	9.097.912.000	697.312.643.285
214	Provinsi DI Yogyakarta	119.685.528.942	1.224.852.487.000	607.267.582.940	1.384.312.676.000	3.288.954.971.882
215	Kab. Bantul	41.250.489.895	911.168.107.000	376.254.429.082	159.814.381.000	1.487.707.640.977
216	Kab. Gunung Kidul	29.849.014.214	868.017.352.000	435.601.538.073	156.794.746.000	1.513.712.968.287
217	Kab. Kulon Progo	28.561.758.630	648.511.047.000	252.956.375.499	130.860.087.000	1.069.138.723.129
218	Kab. Sleman	65.743.272.814	925.964.567.000	438.012.738.290	139.140.652.000	1.535.822.716.104
219	Kota Yogyakarta	64.790.496.796	617.524.294.000	230.975.171.363	73.496.525.000	1.016.600.868.159
220	Provinsi Jawa Timur	3.694.117.343.830	3.652.119.082.000	3.993.764.834.552	67.259.302.000	11.159.191.374.382
221	Kab. Bangkalan	144.075.226.636	933.349.619.000	466.366.405.582	316.703.996.400	1.874.976.327.618
222	Kab. Banyuwangi	370.540.942.748	1.292.954.428.000	504.499.098.234	264.832.917.000	2.358.836.832.982

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
223	Kab. Blitar	151.532.489.489	1.043.910.472.000	402.238.202.267	228.147.314.000	1.763.094.665.756
224	Kab. Bojonegoro	3.341.312.528.652	870.125.915.000	393.393.480.101	373.390.417.827	4.998.027.916.580
225	Kab. Bondowoso	178.650.834.228	843.301.657.000	331.375.881.420	239.393.195.000	1.552.664.902.648
226	Kab. Gresik	276.766.951.731	870.446.047.000	426.580.131.160	345.809.012.600	1.916.275.781.491
227	Kab. Jember	240.537.031.404	1.607.489.075.000	634.562.261.576	325.708.307.000	2.750.500.715.980
228	Kab. Jombang	169.901.863.872	1.005.652.395.000	450.162.846.559	318.220.820.000	1.919.983.941.431
229	Kab. Kediri	195.704.726.725	1.149.914.158.000	463.796.780.373	366.374.903.000	2.181.111.460.098
230	Kab. Lamongan	183.650.096.130	1.086.400.453.000	504.512.935.059	416.449.939.000	2.175.238.307.189
231	Kab. Lumajang	156.516.646.894	899.452.272.000	390.434.654.903	202.373.672.440	1.663.576.204.237
232	Kab. Madiun	152.852.941.787	808.127.553.000	359.321.025.757	183.330.013.200	1.484.623.852.744
233	Kab. Magetan	141.421.639.059	837.710.006.000	287.304.075.715	196.858.367.000	1.456.249.443.774
234	Kab. Malang	257.814.095.679	1.558.477.503.000	697.887.878.022	410.781.576.400	2.924.961.053.101
235	Kab. Mojokerto	161.282.103.070	903.718.844.000	365.418.789.214	276.369.842.800	1.719.808.126.084
236	Kab. Nganjuk	152.137.121.205	982.963.245.000	460.993.256.159	288.473.460.800	1.837.487.945.164
237	Kab. Ngawi	154.714.533.313	966.397.195.000	416.399.447.286	217.466.765.000	1.712.086.904.599
238	Kab. Pacitan	141.015.406.905	731.754.165.000	351.985.592.374	157.239.551.000	1.353.958.294.279
239	Kab. Pamekasan	209.692.963.334	791.549.034.000	364.560.719.821	207.406.714.000	1.543.260.330.155
240	Kab. Pasuruan	407.613.167.519	1.096.961.554.000	516.210.486.020	370.739.138.800	2.376.041.560.339
241	Kab. Ponorogo	153.343.290.346	979.474.402.000	363.553.368.019	286.573.725.000	1.741.478.350.365
242	Kab. Probolinggo	206.670.857.302	926.631.817.000	396.290.753.455	408.774.237.000	1.933.483.126.757
243	Kab. Sampang	149.489.060.626	782.215.299.000	374.827.537.427	233.634.470.000	1.459.320.988.803
244	Kab. Sidoarjo	276.974.336.577	1.132.080.961.000	568.476.379.863	313.804.958.000	2.340.854.574.440
245	Kab. Situbondo	177.224.303.430	744.920.418.000	320.216.270.248	136.619.102.400	1.378.980.094.078
246	Kab. Sumenep	187.938.408.186	1.082.451.781.000	422.208.576.283	346.712.967.000	2.003.150.005.469
247	Kab. Trenggalek	147.736.057.750	823.518.272.000	354.534.392.005	176.074.941.400	1.492.563.361.155
248	Kab. Tuban	239.165.534.984	960.230.004.000	393.401.214.478	298.269.163.200	1.862.507.108.662
249	Kab. Tulungagung	158.685.920.346	1.062.757.430.000	422.504.292.198	245.102.197.000	1.878.265.855.544
250	Kota Blitar	141.727.155.776	393.968.854.000	79.866.251.906	56.255.400.000	711.497.414.682
251	Kota Kediri	323.167.238.059	569.724.453.000	130.061.933.275	27.517.079.000	1.036.493.844.334
252	Kota Madiun	146.060.740.347	465.495.171.000	79.759.406.884	28.870.790.000	753.932.013.231
253	Kota Malang	206.418.714.990	792.693.133.000	230.837.013.880	40.048.548.000	1.337.897.068.870
254	Kota Mojokerto	139.392.398.630	367.576.298.000	77.201.745.808	30.946.546.000	663.095.912.438

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
255	Kota Pasuruan	141.433.965.777	403.383.780.000	108.308.284.136	18.008.742.000	730.221.090.913
256	Kota Probolinggo	140.667.404.882	430.613.654.000	97.366.992.704	10.418.443.000	773.685.132.586
257	Kota Surabaya	631.529.362.065	1.182.439.723.000	769.746.469.559	41.136.702.000	2.610.119.979.624
258	Kota Batu	138.132.481.503	445.511.050.000	91.816.717.937	25.178.994.000	754.046.692.440
259	Provinsi Kalimantan Barat	446.611.533.470	1.572.247.838.000	849.577.227.327	16.330.650.000	2.848.570.851.797
260	Kab. Bengkayang	60.474.698.338	543.574.136.000	235.505.855.288	105.596.918.000	896.525.854.376
261	Kab. Landak	84.989.883.999	608.634.091.000	315.157.292.275	173.919.037.777	1.174.426.787.301
262	Kab. Kapuas Hulu	70.749.413.351	893.022.913.000	227.251.235.490	259.838.203.760	1.400.279.791.851
263	Kab. Ketapang	484.194.660.776	1.034.131.410.000	403.853.840.205	253.206.714.400	2.133.411.174.381
264	Kab. Mempawah	51.528.479.397	531.669.620.000	184.083.052.783	67.968.166.000	819.844.112.180
265	Kab. Sambas	67.757.507.744	804.339.073.000	384.837.628.473	184.669.598.000	1.436.049.356.217
266	Kab. Sanggau	292.063.167.354	741.779.049.000	247.627.728.245	165.421.048.800	1.446.890.993.399
267	Kab. Sintang	88.622.628.351	838.160.435.000	297.656.815.341	353.507.373.000	1.586.841.480.692
268	Kota Pontianak	86.937.129.532	646.760.997.000	229.494.333.702	33.656.679.000	1.049.147.771.234
269	Kota Singkawang	50.689.915.170	457.023.658.000	127.012.826.380	24.789.804.000	665.246.505.550
270	Kab. Sekadau	57.352.791.958	464.250.612.000	147.093.798.718	84.378.685.000	753.075.887.676
271	Kab. Melawi	61.634.237.183	554.276.092.000	172.378.582.922	148.634.494.994	962.122.695.099
272	Kab. Kayong Utara	55.274.413.081	445.774.205.000	136.240.222.503	47.820.871.939	712.424.331.273
273	Kab. Kubu Raya	80.777.409.969	719.085.365.000	324.611.286.647	129.940.602.600	1.267.083.026.216
274	Provinsi Kalimantan Tengah	1.290.739.009.442	1.431.363.200.000	567.269.497.054	41.180.938.000	3.133.358.121.746
275	Kab. Barito Selatan	246.108.116.981	517.055.110.000	184.860.613.904	72.959.760.240	1.059.936.049.125
276	Kab. Barito Utara	614.036.604.054	501.624.803.000	219.659.869.024	79.936.498.000	1.444.111.959.078
277	Kab. Kapuas	624.690.526.986	778.146.334.000	395.855.517.504	182.519.443.044	1.982.398.093.534
278	Kab. Kotawaringin Barat	196.432.558.143	593.355.915.000	226.372.282.756	83.028.425.086	1.058.499.364.485
279	Kab. Kotawaringin Timur	281.596.424.590	761.133.294.000	267.158.186.281	166.701.382.000	1.447.297.304.871
280	Kota Palangkaraya	141.827.416.300	592.472.958.000	166.016.582.649	7.471.798.000	890.171.673.449
281	Kab. Katingan	200.067.929.838	627.676.390.000	206.452.769.539	131.348.607.000	1.148.772.642.377
282	Kab. Seruyan	208.491.023.998	560.402.241.000	140.059.011.299	98.204.836.400	1.035.411.280.697
283	Kab. Sukamara	138.120.017.690	382.001.321.000	102.219.058.164	27.379.223.000	715.188.087.854
284	Kab. Lamandau	193.056.345.480	420.223.849.000	126.728.679.495	85.991.428.000	860.790.813.975
285	Kab. Gunung Mas	173.408.939.434	511.464.950.000	199.782.397.469	94.036.222.720	978.692.509.623
286	Kab. Pulang Pisau	144.458.752.285	515.815.678.000	189.764.568.896	106.317.876.000	988.682.138.181

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
287	Kab. Murung Raya	626.911.579.947	616.067.644.000	180.863.392.676	108.834.948.200	1.547.349.063.593
288	Kab. Barito Timur	209.320.655.097	437.443.208.000	128.814.871.018	78.780.783.000	854.359.517.115
289	Provinsi Kalimantan Selatan	2.791.979.290.690	1.093.343.743.000	611.690.556.749	25.985.007.000	4.497.038.715.439
290	Kab. Banjar	643.437.655.995	674.149.822.000	312.742.170.798	213.931.343.800	1.869.995.443.593
291	Kab. Barito Kuala	432.669.992.263	526.801.142.000	288.217.782.999	149.636.488.000	1.409.336.843.512
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	681.561.609.647	474.753.627.000	214.607.625.688	119.371.510.000	1.552.802.608.335
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	426.407.417.606	478.160.029.000	146.560.920.428	128.668.007.000	1.179.796.374.034
294	Kab. Hulu Sungai Utara	421.573.723.591	447.697.809.000	147.521.721.417	157.162.041.000	1.176.841.868.238
295	Kab. Kotabaru	773.246.836.175	584.509.383.000	215.041.988.085	164.277.089.910	1.768.899.281.170
296	Kab. Tabalong	1.009.616.916.312	451.421.653.000	168.911.088.949	135.096.035.000	1.804.590.934.261
297	Kab. Tanah Laut	1.270.383.468.508	494.306.446.000	248.735.185.057	114.436.736.400	2.391.012.878.965
298	Kab. Tapin	877.531.522.425	416.699.835.000	161.827.625.090	98.669.843.760	1.627.750.039.275
299	Kota Banjarbaru	452.425.846.690	411.679.729.000	118.178.600.193	-	1.034.970.068.883
300	Kota Banjarmasin	481.164.025.684	659.847.387.000	236.179.028.498	10.392.912.000	1.402.871.208.182
301	Kab. Balangan	1.682.833.119.366	346.527.140.000	129.008.282.381	121.169.306.240	2.342.074.045.987
302	Kab. Tanah Bumbu	1.677.292.140.027	428.237.770.000	233.768.378.599	120.407.503.000	2.501.238.627.626
303	Provinsi Kalimantan Timur	6.776.822.751.680	828.907.266.000	674.913.470.032	37.169.461.000	8.256.633.764.962
304	Kab. Berau	2.591.915.056.144	547.451.781.000	155.714.337.238	87.834.603.000	3.427.499.109.382
305	Kab. Kutai Kartanegara	5.582.015.055.222	449.315.895.000	482.968.640.400	176.844.267.000	6.691.143.857.622
306	Kab. Kutai Barat	2.349.631.462.056	544.622.975.000	102.321.983.099	184.128.626.400	3.231.145.976.555
307	Kab. Kutai Timur	4.772.381.472.615	560.135.883.000	305.841.573.358	142.421.628.067	5.780.780.557.040
308	Kab. Paser	2.258.224.038.019	376.914.440.000	222.831.328.683	118.454.291.592	2.976.424.098.294
309	Kota Balikpapan	1.406.201.902.845	428.306.693.000	242.588.317.011	44.427.677.000	2.128.770.497.586
310	Kota Bontang	1.490.680.395.390	225.977.741.000	78.891.390.834	16.205.606.000	1.872.942.819.224
311	Kota Samarinda	1.596.651.251.985	660.405.062.000	300.060.366.601	46.434.416.000	2.637.080.459.586
312	Kab. Penajam Paser Utara	1.423.537.159.378	272.437.796.000	115.873.343.754	45.430.588.000	1.867.406.475.132
313	Kab. Mahakam Ulu	1.286.297.218.738	443.038.268.000	51.798.133.950	78.278.764.751	1.852.897.363.155
314	Provinsi Sulawesi Utara	268.006.858.424	1.330.463.660.000	685.055.638.622	44.748.344.000	2.269.691.250.046
315	Kab. Bolaang Mongondow	90.776.547.874	511.266.733.000	200.115.712.451	154.695.670.600	990.862.911.675
316	Kab. Minahasa	66.937.582.231	614.935.145.000	248.284.925.825	171.844.313.880	1.102.001.966.936
317	Kab. Sangihe	38.164.707.059	494.152.589.000	180.808.439.521	106.833.079.890	820.786.777.470
318	Kota Bitung	241.327.938.222	464.686.698.000	132.864.794.085	46.371.207.000	881.552.777.307

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
319	Kota Manado	75.215.811.898	702.057.099.000	283.286.436.893	-	1.039.452.697.791
320	Kab. Kepulauan Talaud	33.836.707.941	458.306.668.000	242.370.631.561	113.432.083.000	848.545.132.502
321	Kab. Minahasa Selatan	37.513.252.087	501.161.793.000	164.504.473.592	130.936.553.000	819.978.367.444
322	Kota Tomohon	57.062.828.058	393.387.326.000	75.731.556.226	6.750.142.000	581.346.285.284
323	Kab. Minahasa Utara	130.878.033.981	468.182.610.000	225.790.169.357	94.737.548.600	946.630.904.938
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	33.230.290.027	361.963.958.000	71.618.599.469	68.403.117.440	572.396.262.936
325	Kota Kotamobagu	36.073.375.783	353.039.596.000	98.776.174.222	26.768.717.000	515.869.255.005
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	33.544.925.916	348.896.970.000	181.255.992.380	77.755.122.000	710.914.904.296
327	Kab. Minahasa Tenggara	34.990.456.741	379.906.431.000	127.327.358.764	104.262.387.000	651.953.684.505
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	37.972.941.818	324.405.495.000	75.989.336.691	64.182.038.000	536.495.532.509
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	62.801.205.325	328.616.753.000	75.918.486.047	64.870.526.000	554.194.987.372
330	Provinsi Sulawesi Tengah	610.267.123.072	1.494.941.239.000	772.394.845.797	60.958.070.000	2.860.683.030.869
331	Kab. Banggai	651.990.569.180	805.938.719.000	273.508.534.971	250.001.275.000	1.933.064.786.901
332	Kab. Banggai Kepulauan	82.485.733.263	441.263.415.000	125.496.128.835	109.076.987.000	758.322.264.098
333	Kab. Buol	94.675.412.888	477.755.362.000	138.034.901.545	84.405.346.000	810.309.156.683
334	Kab. Tolitoli	91.620.664.869	579.299.327.000	151.049.663.567	81.887.390.179	890.600.756.615
335	Kab. Donggala	86.448.619.054	619.609.701.000	278.394.051.632	136.357.536.800	1.123.263.684.486
336	Kab. Morowali	493.921.704.561	458.893.660.000	175.385.452.844	96.438.859.000	1.280.738.615.405
337	Kab. Poso	86.950.356.937	672.294.065.000	242.169.712.841	125.888.156.997	1.114.262.426.775
338	Kota Palu	105.055.475.412	636.284.819.000	235.242.397.407	17.308.014.000	961.587.781.819
339	Kab. Parigi Moutong	86.633.354.446	720.186.220.000	382.554.566.213	230.184.615.800	1.428.169.760.459
340	Kab. Tojo Una Una	85.970.186.791	544.410.196.000	213.935.289.546	116.853.620.000	971.980.927.337
341	Kab. Sigi	88.558.107.332	579.175.622.000	264.135.821.786	145.952.396.995	1.066.865.464.113
342	Kab. Banggai Laut	81.326.954.552	386.229.968.000	80.083.531.822	49.741.100.000	613.904.838.374
343	Kab. Morowali Utara	186.398.755.590	533.286.782.000	197.080.707.339	116.641.871.000	1.036.444.588.929
344	Provinsi Sulawesi Selatan	404.958.003.721	2.340.040.525.000	1.390.585.472.162	-	3.993.041.259.883
345	Kab. Bantaeng	26.922.131.198	468.052.247.000	231.912.648.866	44.937.967.000	761.697.903.064
346	Kab. Barru	27.382.743.117	482.675.239.000	179.022.730.620	52.842.733.000	737.386.989.737
347	Kab. Bone	40.756.913.445	996.360.633.000	487.825.919.796	348.705.632.400	1.828.553.627.641
348	Kab. Bulukumba	31.894.062.875	659.907.896.000	320.486.796.728	113.765.625.000	1.116.683.037.603
349	Kab. Enrekang	27.049.558.328	496.696.804.000	210.176.746.241	104.467.038.400	832.690.970.969
350	Kab. Gowa	33.738.155.106	795.804.286.000	419.892.903.433	139.402.403.604	1.341.352.205.143

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
351	Kab. Jeneponto	30.001.355.769	604.867.921.000	268.186.188.024	93.926.022.670	1.001.609.582.463
352	Kab. Luwu	29.428.275.820	647.617.174.000	336.874.095.625	187.536.367.000	1.170.190.965.445
353	Kab. Luwu Utara	30.680.036.124	617.420.659.000	264.290.521.561	156.620.217.000	1.054.479.567.685
354	Kab. Maros	40.009.806.879	660.026.786.000	321.516.166.084	98.915.617.000	1.099.081.459.963
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	50.624.558.967	702.238.532.000	317.293.581.491	67.994.230.000	1.117.823.248.458
356	Kota Palopo	29.855.800.410	487.717.402.000	218.564.804.140	9.008.187.000	740.387.548.550
357	Kab. Luwu Timur	331.743.047.399	503.126.813.000	211.479.698.588	103.003.087.000	1.125.313.235.987
358	Kab. Pinrang	28.439.413.032	661.435.610.000	347.671.378.006	72.444.282.000	1.096.634.532.038
359	Kab. Sinjai	28.402.873.920	542.287.308.000	299.169.389.453	76.885.973.000	946.745.544.373
360	Kab. Kepulauan Selayar	26.632.664.967	560.595.329.000	252.536.518.735	73.995.426.000	913.759.938.702
361	Kab. Sidenreng Rappang	28.010.137.628	575.549.310.000	266.710.055.255	67.226.412.000	928.548.689.883
362	Kab. Soppeng	31.461.396.718	579.187.870.000	307.171.543.775	54.320.306.000	963.633.261.493
363	Kab. Takalar	31.097.033.812	564.934.568.000	268.927.735.209	75.045.028.000	931.092.661.021
364	Kab. Tana Toraja	27.296.152.302	537.324.447.000	258.682.759.285	110.910.140.000	918.856.427.587
365	Kab. Wajo	63.919.971.039	668.126.385.000	359.560.603.630	119.304.350.500	1.184.308.859.169
366	Kota Parepare	29.967.367.183	429.881.874.000	153.778.313.323	20.713.617.000	630.176.551.506
367	Kota Makassar	154.431.253.377	1.257.670.897.000	439.064.042.553	18.033.979.000	1.791.778.995.930
368	Kab. Toraja Utara	26.851.073.503	498.503.368.000	231.415.688.324	119.966.904.000	959.773.519.827
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	772.502.713.439	1.456.620.465.000	758.470.332.511	36.466.405.000	3.033.695.529.950
370	Kab. Buton	103.941.314.395	395.460.748.000	151.927.462.731	68.711.064.000	734.048.183.376
371	Kab. Konawe	111.094.458.880	654.840.854.000	268.499.036.020	210.396.173.613	1.258.803.441.577
372	Kab. Kolaka	465.831.160.651	542.631.257.000	191.939.457.471	84.332.795.400	1.282.904.464.022
373	Kab. Muna	101.126.036.525	611.804.752.000	302.336.819.169	109.501.771.000	1.062.426.979.132
374	Kota Kendari	123.298.905.920	629.053.541.000	257.022.734.068	34.779.474.000	1.042.453.034.988
375	Kota Bau-bau	102.136.751.621	486.630.411.000	128.030.662.175	9.770.256.000	766.264.884.296
376	Kab. Konawe Selatan	278.991.114.769	661.712.484.000	239.589.384.443	253.601.238.000	1.414.012.188.212
377	Kab. Bombana	356.312.186.128	449.798.400.000	176.733.321.195	106.490.334.000	1.119.012.599.323
378	Kab. Wakatobi	99.755.424.168	439.094.930.000	214.086.763.039	63.136.695.000	827.757.511.207
379	Kab. Kolaka Utara	163.371.385.049	455.008.254.000	144.205.707.894	116.826.688.000	904.111.021.193
380	Kab. Konawe Utara	605.380.807.740	421.367.680.000	128.638.057.283	135.951.542.100	1.330.642.688.123
381	Kab. Buton Utara	99.614.979.535	385.010.964.000	126.514.578.106	60.020.550.000	728.348.511.641
382	Kab. Konawe Kepulauan	99.988.021.801	300.065.908.000	91.087.334.072	67.809.434.000	589.969.709.873

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
383	Kab. Kolaka Timur	94.175.468.222	379.028.144.000	119.816.859.896	102.901.069.000	763.805.712.552
384	Kab. Muna Barat	99.201.116.937	336.932.590.000	138.134.347.894	72.666.312.000	646.934.366.831
385	Kab. Buton Tengah	125.465.531.690	340.057.923.000	143.613.571.618	56.391.811.000	723.368.292.308
386	Kab. Buton Selatan	99.429.094.548	335.320.148.000	102.140.570.125	53.168.454.000	654.263.954.173
387	Provinsi Bali	183.025.618.202	1.201.511.839.000	613.630.242.405	50.359.663.000	1.992.707.179.607
388	Kab. Badung	64.196.110.672	330.011.170.000	222.900.158.346	124.794.927.000	781.429.690.018
389	Kab. Bangli	22.047.842.563	525.978.399.000	202.281.067.223	66.075.718.000	813.389.342.786
390	Kab. Buleleng	32.807.679.609	890.141.572.000	372.653.300.528	178.226.158.000	1.445.017.763.137
391	Kab. Gianyar	28.227.678.301	637.644.039.000	321.866.688.824	127.791.491.000	1.146.973.685.125
392	Kab. Jembrana	23.579.114.596	513.845.294.000	190.315.562.986	68.073.875.000	822.840.106.582
393	Kab. Karangasem	24.803.627.531	700.663.380.000	256.348.160.125	87.367.605.000	1.064.690.907.656
394	Kab. Klungkung	23.014.898.313	494.287.735.000	158.173.819.844	67.112.116.000	764.750.696.157
395	Kab. Tabanan	29.110.691.262	746.276.084.000	247.424.335.922	142.845.557.000	1.148.374.452.184
396	Kota Denpasar	97.974.516.839	609.734.565.000	238.325.156.786	88.523.004.000	1.029.935.703.625
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	494.439.515.184	1.478.509.073.000	1.010.177.444.476	39.164.046.000	2.949.482.322.660
398	Kab. Bima	83.350.579.857	833.301.560.000	454.284.842.181	191.141.948.000	1.540.901.769.038
399	Kab. Dompu	78.849.525.081	536.573.279.000	304.874.844.812	75.993.447.000	983.762.486.893
400	Kab. Lombok Barat	94.090.344.265	717.540.694.000	407.243.667.550	166.820.017.000	1.364.904.018.815
401	Kab. Lombok Tengah	144.369.904.779	939.405.513.000	550.411.376.064	211.687.300.000	1.845.995.198.843
402	Kab. Lombok Timur	152.127.771.989	1.072.534.185.000	780.416.119.233	335.245.872.000	2.291.169.038.222
403	Kab. Sumbawa	97.285.486.502	781.730.762.000	393.884.980.096	151.609.242.700	1.419.290.021.298
404	Kota Mataram	159.832.744.556	569.742.255.000	177.191.070.434	54.171.364.000	968.451.237.990
405	Kota Bima	75.632.260.016	432.159.814.000	160.430.247.423	39.108.685.000	790.597.952.439
406	Kab. Sumbawa Barat	693.827.031.709	371.041.136.000	176.294.444.335	58.572.186.400	1.310.206.104.444
407	Kab. Lombok Utara	75.376.361.572	374.284.147.000	182.363.492.269	83.938.494.000	751.089.171.841
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	73.319.178.651	1.730.933.330.000	1.244.464.470.636	13.956.241.000	2.953.833.983.287
409	Kab. Alor	11.990.673.392	566.240.969.000	237.701.368.294	153.836.938.000	972.988.860.686
410	Kab. Belu	12.872.503.172	466.681.212.000	216.376.231.006	75.681.074.352	771.611.020.530
411	Kab. Ende	16.641.973.282	587.010.907.000	269.760.491.270	194.227.164.206	1.067.640.535.758
412	Kab. Flores Timur	12.741.417.759	583.050.585.000	252.395.578.133	173.824.841.800	1.022.012.422.692
413	Kab. Kupang	14.396.782.970	629.437.173.000	295.085.176.435	156.822.935.000	1.097.257.067.405
414	Kab. Lembata	11.713.402.003	438.496.561.000	156.973.885.414	129.709.942.030	736.621.690.447

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
415	Kab. Manggarai	15.872.830.800	552.299.937.000	295.352.248.339	123.185.581.000	992.137.324.139
416	Kab. Ngada	11.917.885.188	439.602.004.000	155.047.965.674	113.107.127.598	719.674.982.460
417	Kab. Sikka	14.757.729.000	579.933.112.000	252.119.011.985	156.140.891.000	1.002.950.743.985
418	Kab. Sumba Barat	11.552.414.709	373.384.668.000	145.277.305.946	84.811.157.000	879.791.071.529
419	Kab. Sumba Tim ur	17.810.742.113	597.856.916.000	314.695.873.183	145.113.244.000	1.084.175.242.296
420	Kab. Tim or Tengah Selatan	14.212.431.951	706.597.159.000	367.770.345.883	276.362.054.800	1.364.941.991.634
421	Kab. Tim or Tengah Utara	13.667.848.759	554.794.481.000	291.319.515.431	156.504.653.319	1.016.286.498.509
422	Kota Kupang	34.917.716.792	609.915.054.000	189.648.668.105	2.604.965.000	828.187.383.897
423	Kab. Rote Ndao	11.714.116.629	420.312.379.000	228.243.462.537	103.415.684.000	753.237.569.166
424	Kab. Manggarai Barat	12.484.953.640	496.029.645.000	383.852.453.092	145.840.976.000	1.031.697.090.732
425	Kab. Nagekeo	11.321.578.352	407.517.873.000	147.823.133.047	81.495.971.000	669.318.366.399
426	Kab. Sumba Barat Daya	11.995.198.364	457.331.762.000	296.990.101.058	216.307.497.000	982.624.558.422
427	Kab. Sumba Tengah	10.706.217.639	330.446.192.000	179.236.662.992	65.153.933.000	605.968.264.631
428	Kab. Manggarai Tim ur	11.825.217.984	487.094.037.000	340.351.913.188	171.952.201.000	1.015.409.237.172
429	Kab. Sabu Raijua	10.703.143.492	337.332.898.000	119.666.449.251	60.882.277.028	556.150.890.771
430	Kab. Malaka	11.915.495.174	422.513.118.000	182.884.216.987	113.569.793.000	731.496.686.161
431	Provinsi Maluku	96.751.480.988	1.525.401.858.000	634.429.770.946	38.600.009.000	2.394.848.876.184
432	Kab. Kepulauan Tanim bar	16.268.997.382	525.794.951.000	194.468.848.859	77.692.036.000	875.214.493.241
433	Kab. Maluku Tengah	25.972.496.737	878.408.027.000	345.651.160.688	165.903.956.579	1.384.276.921.004
434	Kab. Maluku Tenggara	15.704.410.018	453.350.155.000	236.196.275.792	143.311.636.000	848.266.497.810
435	Kab. Buru	17.616.301.508	476.797.877.000	218.545.308.715	76.487.986.734	882.856.692.707
436	Kota Ambon	34.122.934.401	621.203.847.000	201.872.121.946	38.871.753.000	880.894.914.347
437	Kab. Seram Bagian Barat	16.864.619.573	561.546.470.000	186.803.683.708	91.438.698.905	834.863.426.186
438	Kab. Seram Bagian Timur	43.732.889.584	502.009.628.000	218.134.543.399	153.130.379.000	927.411.606.169
439	Kab. Kepulauan Aru	17.561.725.399	555.383.670.000	194.002.708.974	97.374.806.000	891.801.103.123
440	Kota Tual	15.143.686.686	363.800.033.000	151.805.930.320	58.820.233.200	587.196.560.206
441	Kab. Maluku Barat Daya	39.277.692.419	532.204.473.000	190.680.151.988	107.463.787.000	869.626.104.407
442	Kab. Buru Selatan	19.795.300.222	400.746.716.000	116.754.823.706	74.937.214.219	612.234.054.147
443	Provinsi Papua	2.079.382.363.292	2.314.920.067.000	751.861.175.640	3.804.141.054.000	8.950.304.659.932
444	Kab. Biak Num for	119.372.486.834	532.363.441.000	344.848.447.619	318.924.781.000	1.345.324.000.453
445	Kab. Jayapura	128.771.957.895	629.527.573.000	223.996.481.515	237.934.637.000	1.210.857.944.410
446	Kab. Jayawijaya	119.274.894.656	662.518.235.000	283.151.787.267	449.799.368.000	1.471.093.250.016

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
447	Kab. Merauke	155.457.301.103	1.122.851.373.000	335.978.464.706	350.820.510.600	1.940.978.499.409
448	Kab. Mimika	4.163.916.775.074	550.841.316.000	262.994.266.681	284.194.378.000	5.261.946.735.755
449	Kab. Nabire	137.703.148.555	662.363.758.000	187.049.124.209	213.070.378.000	1.189.703.868.764
450	Kab. Paniai	112.606.900.785	538.889.485.000	190.131.701.799	356.122.687.000	1.194.645.384.584
451	Kab. Puncak Jaya	117.810.106.693	690.770.380.000	110.638.355.416	466.095.202.000	1.392.595.373.109
452	Kab. Kepulauan Yapen	117.187.447.627	513.130.572.000	233.690.561.103	269.451.168.600	1.133.459.749.330
453	Kota Jayapura	164.928.241.805	580.485.618.000	189.753.389.875	148.212.930.000	1.094.801.435.680
454	Kab. Sarmi	135.774.573.257	631.560.556.000	107.755.991.802	224.160.281.000	1.099.251.402.059
455	Kab. Keerom	130.955.712.119	492.219.568.000	119.489.518.960	208.601.954.200	951.266.753.279
456	Kab. Yahukimo	118.523.680.371	695.666.855.000	221.720.338.222	641.285.455.000	1.677.196.328.593
457	Kab. Pegunungan Bintang	132.032.529.733	764.629.326.000	170.337.623.648	406.597.720.000	1.473.305.863.381
458	Kab. Tolikara	117.617.419.345	677.982.398.000	196.371.976.275	620.433.189.000	1.536.085.915.078
459	Kab. Boven Digoel	133.686.666.425	746.663.814.000	116.166.998.796	252.468.229.000	1.248.985.708.221
460	Kab. Mappi	119.787.971.231	697.790.298.000	260.774.887.598	327.891.033.000	1.437.472.845.829
461	Kab. Asmat	117.348.222.992	815.868.403.000	229.687.378.432	389.070.089.000	1.579.266.110.174
462	Kab. Waropen	118.144.797.375	522.616.999.000	85.073.570.640	203.934.329.000	929.769.696.015
463	Kab. Supiori	116.539.979.749	408.327.705.000	90.977.194.566	136.903.112.000	766.199.203.315
464	Kab. Mamberamo Raya	119.173.338.859	669.250.559.000	91.905.535.427	210.580.706.000	1.090.910.139.286
465	Kab. Mamberamo Tengah	116.415.307.642	592.696.848.000	65.183.266.623	191.158.163.000	946.982.276.265
466	Kab. Yalimo	116.674.299.487	561.979.012.000	82.452.190.566	375.810.278.000	1.136.915.780.053
467	Kab. Lanny Jaya	116.331.334.132	597.590.991.000	295.647.680.046	525.222.643.000	1.516.183.745.178
468	Kab. Nduga	111.223.353.989	560.571.126.000	186.448.510.374	373.011.436.000	1.231.726.913.363
469	Kab. Dogiyai	113.521.766.561	454.617.213.000	114.422.726.347	252.366.158.000	934.927.863.908
470	Kab. Puncak	113.647.832.955	736.247.211.000	178.290.459.349	358.648.801.000	1.377.786.736.304
471	Kab. Intan Jaya	115.318.715.870	629.502.649.000	84.749.154.644	259.108.609.000	1.079.878.274.144
472	Kab. Deiyai	113.822.385.143	447.601.680.000	146.381.609.375	216.215.498.000	918.554.475.518
473	Provinsi Maluku Utara	507.690.871.766	1.223.453.650.000	572.175.467.907	38.679.345.000	2.292.497.963.673
474	Kab. Halmahera Tengah	324.253.683.651	411.186.722.000	150.943.457.557	65.457.753.000	963.601.050.208
475	Kota Ternate	116.163.271.007	588.615.360.000	159.319.657.976	11.789.245.000	857.951.643.983
476	Kab. Halmahera Barat	101.378.190.588	456.627.847.000	164.101.664.889	129.293.146.000	841.216.043.477
477	Kab. Halmahera Timur	371.756.554.784	443.769.351.000	220.379.777.101	85.614.222.200	1.093.286.884.585
478	Kab. Halmahera Selatan	262.003.849.018	694.880.031.000	357.074.907.416	214.352.649.820	1.561.516.745.254

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
479	Kab. Halmahera Utara	222.627.567.254	450.753.682.000	223.062.346.097	143.654.906.000	1.052.357.104.351
480	Kab. Kepulauan Sula	117.540.319.156	450.292.909.000	176.113.504.477	67.098.921.032	927.146.786.665
481	Kota Tidore Kepulauan	98.733.784.741	504.088.132.000	206.775.521.688	85.431.555.000	892.584.451.429
482	Kab. Pulau Morotai	95.708.676.084	360.907.950.000	294.212.470.991	72.574.312.000	844.154.001.075
483	Kab. Pulau Taliabu	167.819.995.507	329.026.044.000	117.209.855.346	59.759.575.000	680.356.454.853
484	Provinsi Banten	868.927.254.072	1.071.260.267.000	1.093.347.841.345	46.276.463.000	3.028.158.609.417
485	Kab. Lebak	85.659.223.839	1.014.969.505.000	572.860.317.683	324.844.445.000	1.954.944.904.522
486	Kab. Pandeglang	100.364.262.926	1.111.234.459.000	568.247.087.465	304.076.830.000	2.056.504.377.391
487	Kab. Serang	115.686.364.315	1.021.090.210.000	537.597.841.617	312.294.335.000	1.929.115.084.932
488	Kab. Tangerang	286.068.687.034	1.115.215.153.000	758.680.218.666	315.901.807.430	2.423.522.441.130
489	Kota Cilegon	147.072.474.492	586.064.288.000	151.705.557.137	4.420.181.000	868.534.885.629
490	Kota Tangerang	326.984.274.117	827.928.901.000	420.903.459.529	-	1.542.031.987.646
491	Kota Serang	104.411.688.031	604.815.966.000	230.394.407.742	20.663.526.000	944.609.243.773
492	Kota Tangerang Selatan	246.657.182.598	552.258.319.000	312.539.396.025	8.885.795.000	1.118.135.411.623
493	Provinsi Bangka Belitung	529.422.362.410	940.858.778.000	296.859.105.501	58.131.167.000	1.781.173.160.911
494	Kab. Bangka	342.502.272.449	490.539.118.000	228.802.054.138	70.375.082.000	1.164.540.934.587
495	Kab. Belitung	191.127.550.582	453.691.144.000	167.276.692.306	75.973.454.600	888.040.425.488
496	Kota Pangkal Pinang	153.439.469.813	424.862.442.000	133.321.770.660	29.979.805.000	761.185.565.473
497	Kab. Bangka Selatan	233.509.527.148	435.231.369.000	190.629.397.014	47.975.811.500	916.462.071.662
498	Kab. Bangka Tengah	186.719.572.266	417.898.398.000	159.410.398.925	60.016.714.000	819.383.880.191
499	Kab. Bangka Barat	228.170.355.126	420.296.956.000	126.983.762.162	58.720.679.000	850.913.992.288
500	Kab. Belitung Timur	229.579.780.400	416.123.631.000	110.842.787.935	38.206.219.000	806.870.987.335
501	Provinsi Gorontalo	27.202.942.989	940.903.029.000	300.644.772.993	70.650.356.000	1.324.711.625.982
502	Kab. Boalemo	13.472.687.852	422.520.030.000	176.448.529.860	82.591.609.733	686.856.646.445
503	Kab. Gorontalo	16.954.794.575	611.185.280.000	260.057.948.716	198.820.602.000	1.087.018.625.291
504	Kota Gorontalo	20.651.906.334	481.877.171.000	121.035.566.138	11.272.265.000	632.921.616.472
505	Kab. Pohuwato	15.437.926.669	481.613.630.000	182.074.054.834	121.098.269.368	795.299.413.871
506	Kab. Bone Bolango	14.086.491.618	452.419.931.000	151.749.483.233	147.574.309.000	758.445.223.851
507	Kab. Gorontalo Utara	13.595.304.026	377.664.009.000	207.935.290.450	93.152.740.000	722.229.275.476
508	Provinsi Kepulauan Riau	733.270.977.278	1.092.929.539.000	415.196.709.847	50.148.653.000	2.260.483.937.125
509	Kab. Natuna	336.227.730.256	392.551.408.000	116.901.648.421	54.851.547.000	912.260.280.677
510	Kab. Kepulauan Anambas	268.004.195.061	368.970.082.000	80.402.187.642	42.927.635.500	773.920.212.203

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
511	Kab. Karim un	234.154.382.100	417.642.353.000	157.768.964.648	64.398.384.532	932.731.500.280
512	Kota Batam	286.549.962.202	627.464.615.000	387.099.139.913	25.781.460.000	1.329.608.691.115
513	Kota Tanjung Pinang	192.768.567.802	448.777.293.000	122.866.211.532	11.509.778.000	779.166.859.334
514	Kab. Lingga	190.034.525.901	455.214.962.000	133.386.925.037	67.708.208.114	929.795.076.052
515	Kab. Bintan	188.706.776.091	477.093.608.000	186.035.823.800	48.111.931.120	912.611.466.011
516	Provinsi Papua Barat	3.275.580.202.272	1.307.710.344.000	477.232.413.320	2.317.594.751.000	7.403.855.281.092
517	Kab. Fak Fak	132.218.285.908	641.700.770.000	110.602.899.945	310.625.802.000	1.195.147.757.853
518	Kab. Manokwari	98.432.517.049	491.575.047.000	223.279.910.939	364.923.599.000	1.192.443.465.988
519	Kab. Sorong	228.040.120.388	496.641.880.000	256.666.638.937	375.847.121.300	1.349.305.165.811
520	Kota Sorong	90.922.306.963	457.994.121.000	149.710.299.654	187.113.829.000	888.126.914.617
521	Kab. Raja Ampat	163.827.038.331	644.234.374.000	238.700.934.681	296.836.389.000	1.381.742.672.012
522	Kab. Sorong Selatan	83.091.742.949	434.873.296.000	150.527.020.592	266.450.850.200	947.077.269.741
523	Kab. Teluk Bintuni	1.114.755.697.022	494.344.389.000	151.362.252.561	299.972.025.000	2.077.388.188.583
524	Kab. Teluk Wondama	82.246.240.568	422.301.104.000	156.557.459.560	231.688.586.000	902.940.951.378
525	Kab. Kaimana	104.110.287.393	569.173.342.000	78.363.031.659	255.868.042.000	1.007.514.703.052
526	Kab. Maybrat	79.234.106.012	401.833.080.000	287.098.475.358	379.752.397.000	1.192.353.099.603
527	Kab. Tambora	78.312.396.430	463.243.481.000	222.645.325.090	351.920.608.000	1.111.545.495.520
528	Kab. Manokwari Selatan	81.198.887.469	317.050.694.000	72.124.670.895	174.998.537.000	645.372.789.364
529	Kab. Pegunungan Arfak	83.029.060.859	344.097.123.000	108.806.712.921	315.057.322.000	847.578.059.953
530	Provinsi Sulawesi Barat	21.162.626.769	972.189.180.000	403.833.159.296	42.863.133.000	1.396.332.476.065
531	Kab. Majene	11.970.844.721	486.476.378.000	186.914.048.877	57.886.546.000	752.099.522.598
532	Kab. Mamuju	19.595.667.725	593.740.140.000	237.213.045.638	95.951.480.200	946.500.333.563
533	Kab. Polewali Mandar	13.927.980.762	664.134.140.000	325.583.145.091	167.131.862.200	1.165.231.865.053
534	Kab. Mamasa	11.467.516.655	490.054.190.000	185.459.616.821	139.651.360.000	820.908.807.476
535	Kab. Pasangkayu	22.407.530.998	453.872.270.000	231.866.284.988	62.219.653.600	779.257.310.586
536	Kab. Mamuju Tengah	13.083.324.965	334.410.183.000	159.851.523.238	48.271.763.000	559.334.957.203
537	Provinsi Kalimantan Utara	609.145.050.406	1.079.281.761.000	230.067.663.425	33.821.037.000	1.890.713.527.831
538	Kab. Bulungan	407.163.814.862	525.787.279.000	269.337.832.858	88.732.210.000	1.347.331.514.720
539	Kab. Malinau	513.787.176.862	782.097.116.000	99.955.405.518	121.920.235.000	1.554.539.643.380
540	Kab. Nunukan	396.088.854.200	505.057.181.000	161.698.545.900	177.488.116.200	1.225.745.530.300
541	Kota Tarakan	339.373.629.792	423.128.084.000	133.408.355.468	15.199.717.000	918.669.554.260
542	Kab. Tana Tidung	437.058.051.927	407.450.064.000	43.717.701.140	34.591.873.000	938.687.863.817

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	DAU	DAK	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa	Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
Jumlah		168.414.110.278.434	378.000.000.000.000	173.164.641.054.831	96.656.074.734.431	816.234.826.067.696

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU	DAU	DAU	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	DAK Nonfisik		DAK Nonfisik	Dana Desa	DBH	Penerimaan Kembali TKDD TAYL	Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		425999	425919		Dana Alokasi Umum	DAK Nonfisik						
						KPP	PK2UKM					
(1)	(2)			(3)	(3)			(6)	(8)		(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(11)=(9)+(10)
1	Provinsi Aceh	0	6031597124	6.031.597.124	-	-	457.665.112	3.677.169.007	-	-	3.677.169.007	9.708.766.131
2	Kab. Aceh Barat	664380000	651400000	1.315.780.000	-	18.796.000	-	4.971.046.524	-	-	4.971.046.524	6.286.826.524
3	Kab. Aceh Besar	1765490000	227272729	1.992.762.729	-	1.633.000	-	15.877.561.282	-	-	15.877.561.282	17.870.324.011
4	Kab. Aceh Selatan	694020000	497950000	1.191.970.000	-	1.274	-	9.212.381.732	-	-	9.212.381.732	10.404.351.732
5	Kab. Aceh Singkil	1271220000	1275623644	2.546.843.644	-	26.900	-	4.321.937.112	-	-	4.321.937.112	6.868.780.756
6	Kab. Aceh Tengah	853260000	655422775	1.508.682.775	-	378.000	-	8.827.827.221	-	-	8.827.827.221	10.336.509.996
7	Kab. Aceh Tenggara	1078380000	1536552278	2.614.932.278	-	200.000	-	1.666.321.624	-	-	1.666.321.624	4.281.253.902
8	Kab. Aceh Timur	899280000	1989579383	2.888.859.383	-	22.600	-	13.924.556.039	-	-	13.924.556.039	16.813.415.422
9	Kab. Aceh Utara	828640000	367527817	1.196.167.817	-	206.000	-	13.821.580.752	-	-	13.821.580.752	15.017.748.569
10	Kab. Bireuen	1219330000	740100000	1.959.430.000	-	7.992.381	-	11.141.627.687	-	-	11.141.627.687	13.101.057.687
11	Kab. Pidie	1646510000	585590500	2.232.100.500	-	-	-	12.319.790.338	-	-	12.319.790.338	14.551.890.838
12	Kab. Simeulue	940170000	49136996	989.306.996	-	807.900	-	2.408.161.077	-	-	2.408.161.077	3.397.468.073
13	Kota Banda Aceh	6968400000	5729732939	12.698.132.939	-	-	21.321.000	455.078.848	-	-	455.078.848	13.153.211.787
14	Kota Sabang	1567470000	493388621	2.060.858.621	-	100.850.000	19.429.838	1.460.423.222	-	-	1.460.423.222	3.521.281.843
15	Kota Langsa	1462550000	32025303	1.494.575.303	-	-	1.960.000	1.278.175.980	-	-	1.278.175.980	2.772.751.283
16	Kota Lhokseumawe	2031300000	912126263	2.943.426.263	-	7.002.400	12.154.820	310.203.586	-	-	310.203.586	3.253.629.849
17	Kab. Gayo Lues	646790000	288192215	934.982.215	-	4.577.000	-	4.325.710.625	-	-	4.325.710.625	5.260.692.840
18	Kab. Aceh Barat Daya	561970000	1426285507	1.988.255.507	-	42.563.013	-	907.010.463	-	-	907.010.463	2.895.265.970
19	Kab. Aceh Jaya	358380000	778942820	1.137.322.820	-	18.000.200	-	5.368.796.019	-	-	5.368.796.019	6.506.118.839
20	Kab. Nagan Raya	665980000	491250000	1.157.230.000	-	-	-	3.208.242.483	-	-	3.208.242.483	4.365.472.483
21	Kab. Aceh Tamiang	1498830000	911650530	2.410.480.530	-	20.402.800	-	5.882.552.925	-	-	5.882.552.925	8.293.033.455
22	Kab. Bener Meriah	814690000	14114373	828.804.373	-	7.350.000	11.725.000	5.833.552.400	-	-	5.833.552.400	6.662.356.773
23	Kab. Pidie Jaya	667170000	313042842	980.212.842	-	9.600.000	76.021.000	964.386.414	-	-	964.386.414	1.944.599.256
24	Kota Subulussalam	322780000	193423334	516.203.334	-	3.500.000	-	2.987.314.261	-	-	2.987.314.261	3.503.517.595
25	Provinsi Sumatera Utara	0	30732485181	30.732.485.181	-	-	86.563.225	5.269.986.559	-	-	5.269.986.559	36.002.471.740
26	Kab. Asahan	1765670000	4075915112	5.841.585.112	-	585.750	-	2.978.918.215	-	-	2.978.918.215	8.820.503.327
27	Kab. Dairi	379440000	337849416	717.289.416	-	-	-	5.519.977.586	-	-	5.519.977.586	6.237.267.002
28	Kab. Deli Serdang	2429150000	3945357030	6.374.507.030	-	9.464.000	54.535.000	10.657.674.025	-	-	10.657.674.025	17.032.181.055
29	Kab. Karo	1313420000	4479233331	5.792.653.331	-	-	4.000.000	995.466.272	-	-	995.466.272	6.788.119.603
30	Kab. Labuhanbatu	1136690000	2115650200	3.252.340.200	-	17.893.000	-	4.390.116.876	-	-	4.390.116.876	7.642.457.076
31	Kab. Langkat	617360000	1399736266	2.017.096.266	-	32.551.200	-	10.301.074.155	-	-	10.301.074.155	12.318.170.421
32	Kab. Mandailing Natal	475250000	1161918600	1.637.168.600	-	3.000.637	56.760.000	7.866.634.352	-	-	7.866.634.352	9.503.802.952
33	Kab. Nias	1029840000	6051410974	7.081.250.974	-	3.200.750	39.973.800	8.262.069.408	-	-	8.262.069.408	15.343.320.382
34	Kab. Simalungun	504380000	1066000414	1.570.380.414	-	62.210.000	-	6.854.543.331	-	-	6.854.543.331	8.424.923.745
35	Kab. Tapanuli Selatan	1530410000	1733700000	3.264.110.000	-	747.000	-	5.648.169.297	-	-	5.648.169.297	8.912.279.297
36	Kab. Tapanuli Tengah	501720000	1081243750	1.582.963.750	-	70.450.900	1.685.828	2.680.379.252	-	-	2.680.379.252	4.263.343.002
37	Kab. Tapanuli Utara	678180000	891535991	1.569.715.991	-	-	-	1.209.419.242	-	-	1.209.419.242	2.779.135.233
38	Kab. Toba Samosir	505760000	3554369394	4.060.129.394	-	52.740.000	-	8.059.119.087	-	-	8.059.119.087	12.119.248.481
39	Kota Binjai	1409070000	1182030183	2.591.100.183	-	-	9.371.100	4.689.676.798	-	-	4.689.676.798	7.280.776.981
40	Kota Medan	8512790000	18023365706	26.536.155.706	-	-	23.098.000	8.271.673.668	-	-	8.271.673.668	34.807.829.374
41	Kota Pematang Siantar	2402830000	1614062500	4.016.892.500	-	-	32.391.494	891.933.256	-	-	891.933.256	4.908.825.756
42	Kota Sibolga	923360000	432626800	1.355.986.800	-	-	50.627.300	1.855.721.785	-	-	1.855.721.785	3.211.708.585
43	Kota Tanjung Balai	177080000	1481275000	1.658.355.000	-	35.000.000	49.880.000	621.247.787	-	-	621.247.787	2.279.602.787
44	Kota Tebing Tinggi	138320000	895156950	1.033.476.950	-	6.700.000	2.014.100	3.216.927.462	-	-	3.216.927.462	4.250.404.412
45	Kota Padang Sidempuan	1298780000	867049778	2.165.829.778	-	12.285.000	69.519.125	3.974.510.460	-	-	3.974.510.460	6.140.340.238
46	Kab. Pakpak Bharat	82650000	31228580	113.878.580	-	-	21.437.300	5.586.119.476	-	-	5.586.119.476	5.699.998.056
47	Kab. Nias Selatan	388930000	48201132967	48.590.062.967	-	76.500.000	2.539.120	5.283.752.428	-	-	5.283.752.428	53.873.815.395
48	Kab. Humbang Hasundutan	759420000	934800000	1.694.220.000	-	-	-	2.242.025.298	-	-	2.242.025.298	3.936.245.298
49	Kab. Serdang Bedagai	344280000	906757580	1.251.037.580	-	-	1.724.000	10.882.100.073	-	-	10.882.100.073	12.133.137.653

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU	DAU	DAU	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	DAK Nonfisik		DAK Nonfisik	Dana Desa	DBH	Penerimaan Kembali TKDD TAYL	Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		425999	425919		Dana Alokasi Umum	DAK Nonfisik						
						KPP	PK2UKM					
(1)	(2)			(3)	(3)			(6)	(8)		(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(11)=(9)+(10)
50	Kab. Samosir	223310000	716364201	939.674.201	-	13.985.000	7.038.010	6.861.614.882	-	-	6.861.614.882	7.801.289.083
51	Kab. Batu Bara	1128960000	754453424	1.883.413.424	-	114.900	3.420.500	3.418.049.873	-	-	3.418.049.873	5.301.463.297
52	Kab. Padang Lawas	288670000	4748805360	5.037.475.360	-	-	-	6.159.877.306	-	-	6.159.877.306	11.197.352.666
53	Kab. Padang Lawas Utara	119000000	1232450497	1.351.450.497	-	506.000	-	2.045.935.851	-	-	2.045.935.851	3.397.386.348
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	23750000	2082526600	2.106.276.600	-	66.650.000	-	4.735.214.378	-	-	4.735.214.378	6.841.490.978
55	Kab. Labuhanbatu Utara	152000000	954318169	969.518.169	-	296.200	-	5.235.664.920	-	-	5.235.664.920	6.205.183.089
56	Kab. Nias Utara	14250000	5202786700	5.217.036.700	-	1.586	-	9.822.097.862	-	-	9.822.097.862	15.039.134.562
57	Kab. Nias Barat	12350000	6932482555	6.944.832.555	-	103.700	-	3.807.400.805	-	-	3.807.400.805	10.752.233.360
58	Kota Gunungsitoli	15200000	5053169549	5.068.369.549	-	14.176.500	35.019.360	3.615.226.594	-	-	3.615.226.594	8.683.596.143
59	Provinsi Sumatera Barat	0	9039303415	9.039.303.415	-	-	403.669.250	3.207.155.648	-	-	3.207.155.648	12.246.459.063
60	Kab. Lima Puluh Kota	755000000	3157687926	3.912.687.926	-	-	22.968.996	7.425.280.342	-	-	7.425.280.342	11.337.968.268
61	Kab. Agam	262400000	647050005	909.450.005	-	1.090.000	98.976.200	15.997.639.112	-	-	15.997.639.112	16.907.089.117
62	Kab. Kepulauan Mentawai	313000000	497007406	810.007.406	-	-	61.602.440	6.544.565.583	-	-	6.544.565.583	7.354.572.989
63	Kab. Padang Pariaman	186000000	1852405290	2.038.405.290	-	2.080.000	11.356.750	8.037.807.645	-	-	8.037.807.645	10.076.212.935
64	Kab. Pasaman	185000000	805404958	990.404.958	-	13.600.000	53.976.400	11.140.685.488	-	-	11.140.685.488	12.131.090.446
65	Kab. Pesisir Selatan	496000000	297075241	793.075.241	-	39.888.170	35.664.540	2.769.452.221	-	-	2.769.452.221	3.562.527.462
66	Kab. Sijunjung	496000000	1324789291	1.820.789.291	-	35.305.700	7.326.133	8.454.371.958	-	-	8.454.371.958	10.275.161.249
67	Kab. Solok	881500000	917874572	1.799.374.572	-	80.600.000	8.441.720	1.271.889.316	-	-	1.271.889.316	3.071.263.888
68	Kab. Tanah Datar	488500000	553439725	1.041.939.725	-	13.897.550	40.013.100	12.947.523.205	-	-	12.947.523.205	13.989.462.930
69	Kota Bukit Tinggi	1183000000	1123847560	2.306.847.560	-	55.670.500	7.069.450	3.565.289.907	-	-	3.565.289.907	5.872.137.467
70	Kota Padang Panjang	226500000	698823124	925.323.124	-	-	34.866.688	1.524.282.460	-	-	1.524.282.460	2.449.605.584
71	Kota Padang	4609000000	5231685230	9.840.685.230	-	-	15.976.500	3.193.988.374	-	-	3.193.988.374	13.034.673.604
72	Kota Payakumbuh	128000000	830360494	958.360.494	-	21.265.300	20.869.246	3.257.785.237	-	-	3.257.785.237	4.216.145.731
73	Kota Sawahlunto	87000000	507366739	594.366.739	-	-	59.691.014	4.458.459.739	-	-	4.458.459.739	5.052.826.478
74	Kota Solok	296000000	154960678	450.960.678	-	-	58.107.000	3.032.889.135	-	-	3.032.889.135	3.483.849.813
75	Kota Pariaman	452000000	873389842	1.325.389.842	-	10.836.000	24.504.500	1.492.292.922	-	-	1.492.292.922	2.817.682.764
76	Kab. Pasaman Barat	333200000	313640140	646.840.140	-	15.440.000	24.211.200	6.945.914.776	-	-	6.945.914.776	7.592.754.916
77	Kab. Dharmasraya	180000000	67799451	247.799.451	-	148.000	32.921.750	2.392.780.793	-	-	2.392.780.793	2.640.580.244
78	Kab. Solok Selatan	94000000	451310438	545.310.438	-	23.933.500	23.617.000	5.685.150.280	-	-	5.685.150.280	6.230.460.718
79	Provinsi Riau	0	3138080000	3.138.080.000	-	-	230.232.288	2.112.991.129	-	-	2.112.991.129	5.251.071.129
80	Kab. Bengkalis	485800000	2099557000	2.585.357.000	-	2.970.000	50.519.400	4.805.670.027	-	-	4.805.670.027	7.391.027.027
81	Kab. Indragiri Hilir	557800000	448350000	1.006.150.000	-	1.592.500	-	13.981.267.208	-	-	13.981.267.208	14.987.417.208
82	Kab. Indragiri Hulu	199600000	754605436	954.205.436	-	38.200.000	32.000.000	10.605.328.789	-	-	10.605.328.789	11.559.534.225
83	Kab. Kampar	1356200000	2907446635	4.263.646.635	-	28.096.400	7.000.000	9.396.163.022	-	-	9.396.163.022	13.659.809.657
84	Kab. Kuantan Singingi	418600000	150255037	568.855.037	-	106.821.400	41.873.500	4.576.369.571	-	-	4.576.369.571	5.145.224.608
85	Kab. Pelalawan	340000000	1663242948	2.003.242.948	-	15.390.000	-	5.656.499.980	-	-	5.656.499.980	7.659.742.928
86	Kab. Rokan Hilir	522200000	2937246123	3.459.446.123	-	5.391.000	21.518.000	5.371.609.809	-	-	5.371.609.809	8.831.055.932
87	Kab. Rokan Hulu	311300000	577518523	888.818.523	-	-	-	13.879.193.246	-	-	13.879.193.246	14.768.011.769
88	Kab. Siak	315000000	2165459637	2.480.459.637	-	79.700.000	36.119.000	3.452.248.603	-	-	3.452.248.603	5.932.708.240
89	Kota Dumai	983800000	827993862	1.811.793.862	-	-	-	1.991.874.033	-	-	1.991.874.033	3.803.667.895
90	Kota Pekanbaru	4752800000	5108076970	9.860.876.970	-	-	14.574.815	8.264.887.443	-	-	8.264.887.443	18.125.764.413
91	Kab. Kepulauan Meranti	237600000	1931592712	2.169.192.712	-	-	-	2.239.295.171	-	-	2.239.295.171	4.408.487.883
92	Provinsi Jambi	0	4136919999	4.136.919.999	-	-	54.457.900	2.567.383.794	-	-	2.567.383.794	6.704.303.793
93	Kab. Batanghari	819200000	479992434	1.299.192.434	-	280.260	-	8.950.551.181	-	-	8.950.551.181	10.249.743.615
94	Kab. Bungo	987600000	513941380	1.501.541.380	-	199.491.450	100.100	12.316.530.126	-	-	12.316.530.126	13.818.071.506
95	Kab. Kerinci	653200000	3752324075	4.405.524.075	-	28.200.620	-	4.729.529.874	-	-	4.729.529.874	9.135.053.949
96	Kab. Merangin	614000000	345635184	959.635.184	-	2.758.900	-	12.609.546.537	-	-	12.609.546.537	13.569.181.721
97	Kab. Muaro Jambi	692000000	1329005125	2.021.005.125	-	24.230.000	-	3.885.588.388	-	-	3.885.588.388	5.906.593.513
98	Kab. Sarolangun	718900000	138687902	857.587.902	-	1.985	-	2.363.824.281	-	-	2.363.824.281	3.221.412.183
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	644000000	1675933268	2.319.933.268	-	3.165.000	19.818.656	4.010.487.756	-	-	4.010.487.756	6.330.421.024
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	562800000	360254499	923.054.499	-	993.000	-	8.019.493.481	-	-	8.019.493.481	8.942.547.980

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU	DAU	DAU	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	DAK Nonfisik		DAK Nonfisik	Dana Desa	DBH	Penerimaan Kembali TKDD TAYL	Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		425999	425919		Dana Alokasi Umum	DAK Nonfisik						
						KPP	PK2UKM					
(1)	(2)			(3)	(3)			(6)	(8)		(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(11)=(9)+(10)
101	Kab. Tebo	612000000	862837107	1.474.837.107	-	120.000	-	7.353.772.525	-	-	7.353.772.525	8.828.609.632
102	Kota Jambi	2598000000	2035910320	4.633.910.320	-	-	15.035.543	821.243.486	-	-	821.243.486	5.455.153.806
103	Kota Sungai Penuh	459000000	719300000	1.178.300.000	-	23.802.150	34.769.200	3.772.078.167	-	-	3.772.078.167	4.950.378.167
104	Provinsi Sumatera Selatan	0	9430187000	9.430.187.000	-	-	6.441.320	2.722.272.348	-	-	2.722.272.348	12.152.459.348
105	Kab. Lahat	346000000	1027026126	1.373.026.126	-	137.159.000	-	8.619.823.996	-	-	8.619.823.996	9.992.850.122
106	Kab. Musi Banyuasin	578000000	2529013469	3.107.013.469	-	6.807.500	12.571.220	12.750.959.988	-	-	12.750.959.988	15.857.973.457
107	Kab. Musi Rawas	592000000	1504755000	2.096.755.000	-	169.348.400	-	6.083.119.747	-	-	6.083.119.747	8.179.874.747
108	Kab. Muara Enim	761700000	3564251100	4.325.951.100	-	29.282.800	61.199.179	10.267.493.079	-	-	10.267.493.079	14.593.444.179
109	Kab. Ogan Komering Ilir	1599000000	723895501	2.322.895.501	-	27.500.000	-	1.472.153.700	-	-	1.472.153.700	3.795.049.201
110	Kab. Ogan Komering Ulu	679200000	6339626588	7.018.826.588	-	-	-	4.478.560.705	-	-	4.478.560.705	11.497.387.293
111	Kota Palembang	3805000000	8770894134	12.575.894.134	-	-	55.264.700	9.238.506.145	-	-	9.238.506.145	21.814.400.279
112	Kota Prabumulih	329600000	919171967	1.248.771.967	-	-	46.159.750	2.958.164.212	-	-	2.958.164.212	4.206.936.179
113	Kota Pagar Alam	293800000	507122863	800.922.863	-	1.200	47.866.200	1.505.985.543	-	-	1.505.985.543	2.306.908.406
114	Kota Lubuk Linggau	699000000	1163848416	1.862.848.416	-	-	60.052.000	3.927.372.135	-	-	3.927.372.135	5.790.220.551
115	Kab. Banyuasin	1144400000	842734304	1.987.134.304	-	-	-	6.582.902.694	-	-	6.582.902.694	8.570.036.998
116	Kab. Ogan Ilir	831700000	1577823572	2.409.523.572	-	75.724.000	-	4.094.629.326	-	-	4.094.629.326	6.504.152.898
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	784000000	6198068055	6.982.068.055	-	17.290.000	30.162.100	9.167.545.961	-	-	9.167.545.961	16.149.614.016
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	464400000	2084577217	2.548.977.217	-	43.740	-	2.075.566.140	-	-	2.075.566.140	4.624.543.357
119	Kab. Empat Lawang	790500000	565658687	1.356.158.687	-	57.362.000	-	3.573.535.000	-	-	3.573.535.000	4.929.693.687
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	348000000	3437364269	3.785.364.269	-	-	29.815.300	2.513.428.758	-	-	2.513.428.758	6.298.793.027
121	Kab. Musi Rawas Utara	215000000	2901607107	3.116.607.107	-	-	-	2.955.937.978	-	-	2.955.937.978	6.072.545.085
122	Provinsi Bengkulu	0	3746159529	3.746.159.529	-	-	31.367.000	277.330.195	-	-	277.330.195	4.023.489.724
123	Kab. Bengkulu Selatan	784000000	187801800	971.801.800	-	-	6.218.500	5.359.819.694	-	-	5.359.819.694	6.331.621.494
124	Kab. Bengkulu Utara	651300000	798207199	1.449.507.199	-	-	18.652.000	3.653.221.490	-	-	3.653.221.490	5.102.728.689
125	Kab. Rejang Lebong	701000000	43853361	744.853.361	-	-	17.620.150	2.558.693.814	-	-	2.558.693.814	3.303.547.175
126	Kota Bengkulu	1438400000	1686566129	3.124.966.129	-	-	2.900.000	7.417.313.329	-	-	7.417.313.329	10.542.279.458
127	Kab. Kaur	596600000	889213132	1.485.813.132	-	25.136.350	-	3.237.129.650	-	-	3.237.129.650	4.722.942.782
128	Kab. Seluma	542800000	1129385603	1.672.185.603	-	19.900	-	5.395.968.613	-	-	5.395.968.613	7.068.154.216
129	Kab. Mukomuko	542000000	872364218	1.414.364.218	-	12.603.200	29.491.328	8.529.669.965	-	-	8.529.669.965	9.944.034.183
130	Kab. Lebong	556000000	1721583736	2.277.583.736	-	5.600.000	-	3.491.128.553	-	-	3.491.128.553	5.768.712.289
131	Kab. Kepahiang	892800000	428920074	1.321.720.074	-	-	-	5.374.375.216	-	-	5.374.375.216	6.696.095.290
132	Kab. Bengkulu Tengah	745000000	1838196262	2.583.196.262	-	-	-	6.010.916.529	-	-	6.010.916.529	8.594.112.791
133	Provinsi Lampung	0	7120787273	7.120.787.273	-	-	48.705.800	304.421.600	-	-	304.421.600	7.425.208.873
134	Kab. Lampung Barat	1006800000	365100000	1.371.900.000	-	-	-	4.078.138.492	-	-	4.078.138.492	5.450.038.492
135	Kab. Lampung Selatan	1807900000	4634758120	6.442.658.120	-	3.200	-	1.624.141.376	-	-	1.624.141.376	8.066.799.496
136	Kab. Lampung Tengah	1608000000	2799497088	4.407.497.088	-	2.976.400	7.987.000	10.653.493.194	-	-	10.653.493.194	15.060.990.282
137	Kab. Lampung Utara	1537900000	6496525800	8.034.425.800	-	1.400.000	-	10.640.164.795	-	-	10.640.164.795	18.674.590.595
138	Kab. Lampung Timur	1480600000	8218031742	9.698.631.742	-	1.800.000	1.894.000	7.863.678.761	-	-	7.863.678.761	17.562.310.503
139	Kab. Tanggamus	1044200000	392556274	1.436.756.274	-	23.000.000	-	6.893.291.698	-	-	6.893.291.698	8.330.047.972
140	Kab. Tulang Bawang	1323400000	2494768845	3.818.168.845	-	-	-	753.810.000	-	-	753.810.000	4.571.978.845
141	Kab. Way Kanan	1095200000	800500000	1.895.700.000	-	1.520.800	-	3.359.593.575	-	-	3.359.593.575	5.255.293.575
142	Kota Bandar Lampung	3006000000	4721723273	7.727.723.273	-	-	20.358.500	2.202.088.183	-	-	2.202.088.183	9.929.811.456
143	Kota Metro	594600000	1255493994	1.850.093.994	-	37.816.900	5.671.400	3.087.009.679	-	-	3.087.009.679	4.937.103.673
144	Kab. Pesawaran	1702600000	648199000	2.350.799.000	-	-	-	1.435.965.449	-	-	1.435.965.449	3.786.764.449
145	Kab. Pringsewu	1260400000	1164521412	2.424.921.412	-	-	61.890.200	2.978.239.955	-	-	2.978.239.955	5.403.161.367
146	Kab. Mesuji	652600000	822848127	1.475.448.127	-	29.050.000	-	5.264.163.650	-	-	5.264.163.650	6.739.611.777
147	Kab. Tulang Bawang Barat	698000000	1133603650	1.831.603.650	-	-	-	4.219.323.200	-	-	4.219.323.200	6.050.926.850
148	Kab. Pesisir Barat	463000000	842216794	1.305.216.794	-	3.026.725	-	3.417.520.012	-	-	3.417.520.012	4.722.736.806
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	-	-	-	52.335.692	14.321.971.654	-	-	14.321.971.654	14.321.971.654
150	Provinsi Jawa Barat	0	33948539183	33.948.539.183	-	-	58.480.000	1.350.060.875	-	-	1.350.060.875	35.298.600.058
151	Kab. Bandung	16337740000	15560130445	31.897.870.445	-	4.436.400	6.171.200	2.884.599.192	-	-	2.884.599.192	34.782.469.637

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU	DAU	DAU	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	DAK Nonfisik		DAK Nonfisik	Dana Desa	DBH	Penerimaan Kembali TKDD TAYL	Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		425999	425919		Dana Alokasi Umum							
						KPP	PK2UKM					
(1)	(2)			(3)	(3)			(6)	(8)		(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(11)=(9)+(10)
152	Kab. Bekasi	702300000	18001648979	18.703.948.979	-	82.600.000	-	6.391.365.459	-	-	6.391.365.459	25.095.314.438
153	Kab. Bogor	12735980000	11677148140	24.413.128.140	-	10.971.400	29.447.000	28.874.971.043	-	-	28.874.971.043	53.288.099.183
154	Kab. Ciamis	3208520000	2581237569	5.789.757.569	-	2.400.000	-	10.564.082.047	-	-	10.564.082.047	16.353.839.616
155	Kab. Cianjur	3272300000	1804476436	5.076.776.436	-	2.430.000	-	3.408.481.960	-	-	3.408.481.960	8.485.258.396
156	Kab. Cirebon	5973800000	5577890691	11.551.690.691	-	-	36.112.900	16.521.663.392	-	-	16.521.663.392	28.073.354.083
157	Kab. Garut	5751280000	3012338832	8.763.618.832	-	262.040.000	6.516.000	11.131.761.265	-	-	11.131.761.265	19.895.380.097
158	Kab. Indramayu	4465700000	4802718269	9.268.418.269	-	49.485.900	-	16.539.340.441	-	-	16.539.340.441	25.807.758.710
159	Kab. Karawang	8370000000	10915499920	19.285.499.920	-	-	240.000	462.299.748	-	-	462.299.748	19.747.799.668
160	Kab. Kuningan	2574060000	1844979794	4.419.039.794	-	4.900.000	-	11.566.763.656	-	-	11.566.763.656	15.985.803.450
161	Kab. Majalengka	9813860000	968501416	10.782.361.416	-	97.406.600	-	5.501.733.487	-	-	5.501.733.487	16.284.094.903
162	Kab. Purwakarta	3777960000	1137242369	4.915.202.369	-	7.062.313	1.899.000	8.142.306.677	-	-	8.142.306.677	13.057.509.046
163	Kab. Subang	9386820000	3281156737	12.667.976.737	-	541.000	-	10.869.814.721	-	-	10.869.814.721	23.537.791.458
164	Kab. Sukabumi	2630160000	4279697250	6.909.857.250	-	-	-	18.499.950.914	-	-	18.499.950.914	25.409.808.164
165	Kab. Sumedang	3778940000	2895124000	6.674.064.000	-	77.700.600	28.900.000	5.736.160.743	-	-	5.736.160.743	12.410.224.743
166	Kab. Tasikmalaya	11455040000	3016552350	14.471.592.350	-	12.100.000	1.344.650	12.159.874.138	-	-	12.159.874.138	26.631.466.488
167	Kota Bandung	8643460000	7847321051	16.490.781.051	-	1.400	22.116.950	13.644.004.785	-	-	13.644.004.785	30.134.785.836
168	Kota Bekasi	22360920000	9866506320	32.227.426.320	-	41.300.000	59.800.100	9.517.832.995	-	-	9.517.832.995	41.745.259.315
169	Kota Bogor	2075720000	4127471800	6.203.191.800	-	73.206.000	-	7.021.854.582	-	-	7.021.854.582	13.225.046.382
170	Kota Cirebon	2884340000	2054976317	4.939.316.317	-	-	76.373.000	3.171.209.341	-	-	3.171.209.341	8.110.525.658
171	Kota Depok	8167600000	12535271804	20.702.871.804	-	54.560.000	32.165.000	3.595.296.713	-	-	3.595.296.713	24.298.168.517
172	Kota Sukabumi	8239000000	1251312500	2.075.212.500	-	-	720.000	2.394.711.590	-	-	2.394.711.590	4.469.924.090
173	Kota Tasikmalaya	935340000	1131454898	2.066.794.898	-	27.382.150	1.230.026	2.161.511.240	-	-	2.161.511.240	4.228.306.138
174	Kota Cimahi	7738620000	2749956390	10.488.576.390	-	11.800.000	126.075.500	7.450.463.317	-	-	7.450.463.317	17.939.039.707
175	Kota Banjar	3783000000	816492422	1.194.792.422	-	1.878.000	2.096.450	4.811.600.505	-	-	4.811.600.505	6.006.392.927
176	Kab. Bandung Barat	1189800000	2571173053	3.760.973.053	-	-	28.500	9.942.915.964	-	-	9.942.915.964	13.703.889.017
177	Kab. Pangandaran	162700000	3134269000	3.296.969.000	-	8.874.000	10.010.625	5.344.546.466	-	-	5.344.546.466	8.641.515.466
178	Provinsi Jawa Tengah	0	3540595	3.540.595	-	-	21.023.960	2.825.539.211	-	-	2.825.539.211	2.829.079.806
179	Kab. Banjarnegara	1519900000	3363966400	4.883.866.400	-	-	-	16.642.695.585	-	-	16.642.695.585	21.526.561.985
180	Kab. Banyumas	2828300000	6663606836	9.491.906.836	-	-	-	18.036.575.907	-	-	18.036.575.907	27.528.482.743
181	Kab. Batang	1408400000	1514016000	2.922.416.000	-	-	1.795.050	8.176.717.973	-	-	8.176.717.973	11.099.133.973
182	Kab. Blora	2328700000	2817275549	5.145.975.549	-	19.810.660	25.992.360	4.953.255.509	-	-	4.953.255.509	10.099.231.058
183	Kab. Boyolali	3044800000	1803828875	4.848.628.875	-	122.897.250	6.553.000	10.567.998.963	-	-	10.567.998.963	15.416.627.838
184	Kab. Brebes	5845700000	3432728640	9.278.428.640	-	141.440	-	7.347.001.737	-	-	7.347.001.737	16.625.430.377
185	Kab. Cilacap	2632800000	2722888880	5.355.688.880	-	117.040.200	5.598.000	12.503.332.131	-	-	12.503.332.131	17.859.021.011
186	Kab. Demak	1661200000	2076000000	1.868.800.000	-	3.820.000	-	4.055.079.024	-	-	4.055.079.024	5.923.879.024
187	Kab. Grobogan	2019600000	5507602549	7.527.202.549	-	2.800.200	-	5.419.139.408	-	-	5.419.139.408	12.946.341.957
188	Kab. Jepara	1516300000	3726868228	5.243.168.228	-	-	3.410.500	8.202.024.362	-	-	8.202.024.362	13.445.192.590
189	Kab. Karanganyar	2435200000	2058460317	4.493.660.317	-	15.968.000	-	8.903.892.749	-	-	8.903.892.749	13.397.553.066
190	Kab. Kebumen	2645500000	2938341200	5.583.841.200	-	11.887.000	76.048.248	9.605.900.378	-	-	9.605.900.378	15.189.741.578
191	Kab. Kendal	2798400000	4456888968	7.255.288.968	-	-	36.407.550	12.370.241.949	-	-	12.370.241.949	19.625.530.917
192	Kab. Klaten	3984200000	4725635873	8.709.835.873	-	122.660.200	36.656.100	24.116.150.186	-	-	24.116.150.186	32.825.986.059
193	Kab. Kudus	2160100000	4225584512	6.385.684.512	-	-	15.763.400	8.225.569.971	-	-	8.225.569.971	14.611.254.483
194	Kab. Magelang	1821400000	2762508288	4.583.908.288	-	-	249.200	12.483.383.164	-	-	12.483.383.164	17.067.291.452
195	Kab. Pati	1582000000	1630140600	3.212.140.600	-	12.032.450	17.161.700	8.227.632.766	-	-	8.227.632.766	11.439.773.366
196	Kab. Pekalongan	2442900000	1205250000	3.648.150.000	-	2.400.000	12.242.000	9.162.653.591	-	-	9.162.653.591	12.810.803.591
197	Kab. Pemalang	2068400000	1888959965	3.957.359.965	-	3.100	-	11.257.224.542	-	-	11.257.224.542	15.214.584.507
198	Kab. Purbalingga	1885100000	562352841	2.447.452.841	-	-	101.635.152	9.787.754.357	-	-	9.787.754.357	12.235.207.198
199	Kab. Purworejo	1704900000	3127762100	4.832.662.100	-	-	1.348.500	11.373.327.926	-	-	11.373.327.926	16.205.990.026
200	Kab. Rembang	1418500000	4245813375	5.664.313.375	-	-	10.527.742	4.536.688.930	-	-	4.536.688.930	10.201.002.305
201	Kab. Semarang	2795900000	2734834606	5.530.734.606	-	-	4.297.500	9.360.922.644	-	-	9.360.922.644	14.891.657.250
202	Kab. Sragen	3558100000	1621370661	5.179.470.661	-	75.456.000	3.202.330	9.088.718.943	-	-	9.088.718.943	14.268.189.604

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU	DAU	DAU	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	DAK Nonfisik		DAK Nonfisik	Dana Desa	DBH	Penerimaan Kembali TKDD TAYL	Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		425999	425919		Dana Alokasi Umum	DAK Nonfisik						
						KPP	PK2UKM					
(1)	(2)			(3)	(3)			(6)	(8)		(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(11)=(9)+(10)
203	Kab. Sukoharjo	3094300000	2091300000	5.185.600.000	-	1.451.000	73.990.100	5.758.161.962	-	-	5.758.161.962	10.943.761.962
204	Kab. Tegal	1959700000	2761591607	4.721.291.607	-	25.640.500	30.498.000	3.991.939.759	-	-	3.991.939.759	8.713.231.366
205	Kab. Temanggung	1297200000	1560438000	2.857.638.000	-	101.666.800	80.300.493	9.455.522.278	-	-	9.455.522.278	12.313.160.278
206	Kab. Wonogiri	3089800000	1765404031	4.855.204.031	-	656.473	1.239.111	8.475.301.724	-	-	8.475.301.724	13.330.505.755
207	Kab. Wonosobo	1145800000	1692878460	2.838.678.460	-	-	57.068.000	9.154.660.438	-	-	9.154.660.438	11.993.338.898
208	Kota Magelang	1212400000	556100000	1.768.500.000	-	92.132.000	12.210.500	3.349.065.581	-	-	3.349.065.581	5.117.565.581
209	Kota Pekalongan	623100000	1349389821	1.972.489.821	-	100	11.128.500	3.061.898.977	-	-	3.061.898.977	5.034.388.798
210	Kota Salatiga	2370200000	838294254	3.208.494.254	-	8.282.500	10.000.200	3.380.790.576	-	-	3.380.790.576	6.589.284.830
211	Kota Semarang	4949600000	9551393339	14.500.993.339	-	3.051.000	51.328.300	3.763.711.158	-	-	3.763.711.158	18.264.704.497
212	Kota Surakarta	1621000000	3653531386	5.274.531.386	-	-	32.802.200	3.023.479.827	-	-	3.023.479.827	8.298.011.213
213	Kota Tegal	1114400000	1429044962	2.543.444.962	-	18.650.000	1.335.000	2.109.662.788	-	-	2.109.662.788	4.653.107.750
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	5928786815	5.928.786.815	-	-	153.775.285	636.820.015	-	-	636.820.015	67.278.629.347
215	Kab. Bantul	2248000000	6889374434	9.137.374.434	-	21.600.000	4.295.920	5.377.340.774	-	-	5.377.340.774	14.514.715.208
216	Kab. Gunung Kidul	1008700000	1128324335	2.137.024.335	-	115.230.000	4.330.000	10.661.492.854	-	-	10.661.492.854	12.798.517.189
217	Kab. Kulon Progo	804340000	4527648332	5.331.988.332	-	29.284.000	41.539.700	7.665.554.938	-	-	7.665.554.938	12.997.543.270
218	Kab. Sleman	3426660000	4437618720	7.864.278.720	-	31.117.200	23.261.399	7.201.734.901	-	-	7.201.734.901	15.066.013.621
219	Kota Yogyakarta	3350680000	3057894501	6.408.574.501	-	50	27.154.195	4.958.245.126	-	-	4.958.245.126	11.366.819.627
220	Provinsi Jawa Timur	0	55199027915	55.199.027.915	-	-	960.812	393.047.120	-	-	393.047.120	55.592.075.035
221	Kab. Bangkalan	1725720000	1745064150	3.470.784.150	-	23.468.850	31.764.800	7.710.126.577	-	-	7.710.126.577	11.180.910.727
222	Kab. Banyuwangi	2315190000	3219300000	5.534.490.000	-	164.768.200	42.679.570	18.386.213.184	-	-	18.386.213.184	23.920.703.184
223	Kab. Blitar	1185150000	2379307379	3.564.457.379	-	59.226.000	2.346.000	8.400.028.259	-	-	8.400.028.259	11.964.485.638
224	Kab. Bojonegoro	2821900000	6275115198	9.097.015.198	-	181.304.400	86.810.600	17.892.720.722	-	-	17.892.720.722	26.989.735.920
225	Kab. Bondowoso	1434620000	12275860381	13.710.480.381	-	10.601.500	2.535.000	17.128.911.000	-	-	17.128.911.000	30.839.391.381
226	Kab. Gresik	3357000000	2801329239	6.158.329.239	-	17.044.236	19.920.146	15.251.068.496	-	-	15.251.068.496	21.409.397.735
227	Kab. Jember	2361040000	7613901350	9.974.941.350	-	121.250.000	-	14.491.164.516	-	-	14.491.164.516	24.466.105.866
228	Kab. Jombang	1581130000	2130772031	3.711.902.031	-	52.250.000	10.379.500	2.830.196.172	-	-	2.830.196.172	6.542.098.203
229	Kab. Kediri	3723510000	4217340887	7.940.850.887	-	61.820.000	57.066.810	6.073.209.072	-	-	6.073.209.072	14.014.059.959
230	Kab. Lamongan	2660250000	2062420216	4.722.670.216	-	2.080.000	14.578.100	11.663.881.511	-	-	11.663.881.511	16.386.551.727
231	Kab. Lumajang	1727030000	1434060236	3.161.090.236	-	388.691	12.929.400	3.714.221.672	-	-	3.714.221.672	6.875.311.908
232	Kab. Madiun	2238190000	1194828912	3.433.018.912	-	33.142.591	52.217.546	8.337.282.542	-	-	8.337.282.542	11.770.301.454
233	Kab. Magetan	2565550000	2019310040	4.584.860.040	-	65.328.600	40.005.700	5.569.999.087	-	-	5.569.999.087	10.154.859.127
234	Kab. Malang	23812250000	5049285445	28.861.535.445	-	115.302.000	-	6.594.573.084	-	-	6.594.573.084	35.456.108.529
235	Kab. Mojokerto	2307330000	2160821873	4.468.151.873	-	10.618.800	32.032.050	8.031.291.518	-	-	8.031.291.518	12.499.443.391
236	Kab. Nganjuk	1453410000	2516485102	3.969.895.102	-	97.985.990	23.824.250	10.717.238.488	-	-	10.717.238.488	14.687.133.590
237	Kab. Ngawi	992620000	3174748300	4.167.368.300	-	3.244.000	36.790.250	6.011.478.636	-	-	6.011.478.636	10.178.846.936
238	Kab. Pacitan	834700000	1680585850	2.515.285.850	-	63.832.950	500.150	7.119.921.574	-	-	7.119.921.574	9.635.207.424
239	Kab. Pamekasan	949930000	7461584035	8.411.514.035	-	66.576.950	13.300.000	8.289.083.317	-	-	8.289.083.317	16.700.597.352
240	Kab. Pasuruan	2570270000	2557924491	5.128.194.491	-	300	84.005.600	6.754.860.541	-	-	6.754.860.541	11.883.055.032
241	Kab. Ponorogo	1759430000	2227684000	3.987.114.000	-	13.713.200	5.761.380	11.263.542.850	-	-	11.263.542.850	15.250.656.850
242	Kab. Probolinggo	1072800000	2739138407	3.811.938.407	-	75.816.400	17.878.350	7.366.535.405	-	-	7.366.535.405	11.178.473.812
243	Kab. Sampang	888300000	12337244399	13.225.544.399	-	61.766.280	61.403.400	9.014.079.212	-	-	9.014.079.212	22.239.623.611
244	Kab. Sidoarjo	4522700000	11608713272	16.131.413.272	-	92.726.250	16.771.200	10.725.129.364	-	-	10.725.129.364	26.856.542.636
245	Kab. Situbondo	1302660000	1814288348	3.116.948.348	-	45.324.120	66.259.180	6.019.348.206	-	-	6.019.348.206	9.136.296.554
246	Kab. Sumenep	919290000	5901685653	6.820.975.653	-	139.742.089	65.267.608	13.862.090.853	-	-	13.862.090.853	20.683.066.506
247	Kab. Trenggalek	1088490000	2727279972	3.861.269.972	-	53.629.000	70.716.825	8.349.515.775	-	-	8.349.515.775	12.210.785.747
248	Kab. Tuban	1976200000	2198484300	4.174.684.300	-	3.570.000	88.724.750	9.863.728.840	-	-	9.863.728.840	14.038.413.140
249	Kab. Tulungagung	1511990000	3093774285	4.605.764.285	-	-	9.767.500	16.287.086.539	-	-	16.287.086.539	20.892.850.824
250	Kota Blitar	778200000	561904930	1.340.104.930	-	-	1.515.800	1.927.965.117	-	-	1.927.965.117	3.268.070.047
251	Kota Kediri	854000000	6017296825	6.871.296.825	-	119.605.000	11.623.000	3.690.126.976	-	-	3.690.126.976	10.561.423.801
252	Kota Madiun	754110000	1254312879	2.008.422.879	-	26.547.625	43.703.200	975.416.835	-	-	975.416.835	2.983.839.714
253	Kota Malang	3124900000	3894719240	7.019.619.240	-	87.314.500	14.363.500	8.812.438.645	-	-	8.812.438.645	15.832.057.885

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU	DAU	DAU	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	DAK Nonfisik		DAK Nonfisik	Dana Desa	DBH	Penerimaan Kembali TKDD TAYL	Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		425999	425919		Dana Alokasi Umum	DAK Nonfisik						
						KPP	PK2UKM					
(1)	(2)			(3)	(3)			(6)	(8)		(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(11)=(9)+(10)
254	Kota Mojokerto	835000000	787414831	1.622.414.831	-	16.438.000	14.394.754	596.590.004	-	-	596.590.004	2.219.004.835
255	Kota Pasuruan	726940000	1978918113	2.705.858.113	-	280.000.000	16.956.200	1.404.388.309	-	-	1.404.388.309	4.110.246.422
256	Kota Probolinggo	693780000	1113545525	1.807.325.525	-	10.000	71.025.304	2.153.395.070	-	-	2.153.395.070	3.960.720.595
257	Kota Surabaya	13064590000	31661864761	44.726.454.761	-	123.550.000	554.660	10.358.403.550	-	-	10.358.403.550	55.084.858.311
258	Kota Batu	1499130000	816547849	2.315.677.849	-	117.560.300	186.246.300	1.965.948.779	-	-	1.965.948.779	4.281.626.628
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	18943553190	18.943.553.190	-	-	10.157.705	2.820.013.912	-	-	2.820.013.912	21.763.567.102
260	Kab. Bengkayang	871800000	313600000	1.185.400.000	-	-	-	5.629.863.252	-	-	5.629.863.252	6.815.263.252
261	Kab. Landak	570000000	53150000	623.150.000	-	-	-	5.340.380.703	-	-	5.340.380.703	5.963.530.703
262	Kab. Kapuas Hulu	409600000	353250000	762.850.000	-	1.520.000	6.178.000	15.176.890.010	-	-	15.176.890.010	15.939.740.010
263	Kab. Ketapang	1106800000	1040010286	2.146.810.286	-	-	12.086.204	16.492.125.062	-	-	16.492.125.062	18.638.935.348
264	Kab. Mempawah	540000000	103321944	643.321.944	-	6.955.100	-	8.557.786.630	-	-	8.557.786.630	9.201.108.574
265	Kab. Sambas	682800000	2996368383	3.679.168.383	-	20.676.145	22.312.163	14.821.787.424	-	-	14.821.787.424	18.500.955.807
266	Kab. Sanggau	663200000	21507207	684.707.207	-	1.182.160	7.940.950	2.264.598.874	-	-	2.264.598.874	2.949.306.081
267	Kab. Sintang	622400000	1162138582	1.784.538.582	-	-	-	14.033.158.099	-	-	14.033.158.099	15.817.696.681
268	Kota Pontianak	2539800000	3003207381	5.543.007.381	-	-	290	4.805.555.111	-	-	4.805.555.111	10.348.562.492
269	Kota Singkawang	686200000	529950357	1.216.150.357	-	7.440.000	10.937.907	4.225.870.788	-	-	4.225.870.788	5.442.021.145
270	Kab. Sekadau	515400000	29550000	544.950.000	-	4.041.000	18.525.800	6.054.640.200	-	-	6.054.640.200	6.599.590.200
271	Kab. Melawi	472800000	6600000	479.400.000	-	341.600	-	3.421.646.070	-	-	3.421.646.070	3.901.046.070
272	Kab. Kayong Utara	592200000	64514815	656.714.815	-	-	-	2.457.447.356	-	-	2.457.447.356	3.114.162.171
273	Kab. Kubu Raya	2230600000	601804200	2.832.404.200	-	3.286.580	-	4.473.988.074	-	-	4.473.988.074	7.306.392.274
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	8673839997	8.673.839.997	-	-	127.576.400	2.223.038.089	-	-	2.223.038.089	10.896.878.086
275	Kab. Barito Selatan	376600000	217505455	594.105.455	-	3.900.000	-	5.142.603.291	-	-	5.142.603.291	5.736.708.746
276	Kab. Barito Utara	384010000	606578555	990.588.555	-	7.464.000	-	5.067.000.950	-	-	5.067.000.950	6.057.589.505
277	Kab. Kapuas	489460000	377467133	866.927.133	-	2.940.000	-	11.811.207.849	-	-	11.811.207.849	12.678.134.982
278	Kab. Kotawaringin Barat	881620000	673911200	1.555.531.200	-	6.060.048	-	5.170.698.355	-	-	5.170.698.355	6.726.229.555
279	Kab. Kotawaringin Timur	564680000	1065000000	1.629.680.000	-	12.217.650	10.508.800	9.950.985.114	-	-	9.950.985.114	11.580.665.114
280	Kota Palangkaraya	1089100000	1151956133	2.241.056.133	-	-	1.082.856	2.899.080.302	-	-	2.899.080.302	5.140.136.435
281	Kab. Katingan	273900000	596761461	870.661.461	-	224.874.800	12.858.800	8.970.465.780	-	-	8.970.465.780	9.841.127.241
282	Kab. Seruyan	302530000	962597743	1.265.127.743	-	14.810.000	-	3.760.475.390	-	-	3.760.475.390	5.025.603.133
283	Kab. Sukamara	254460000	133900477	388.360.477	-	9.406.400	97.144.700	3.672.995.390	-	-	3.672.995.390	4.061.355.867
284	Kab. Lamandau	352270000	513560667	865.830.667	-	15.097.000	-	4.449.628.904	-	-	4.449.628.904	5.315.459.571
285	Kab. Gunung Mas	362890000	2857610930	3.220.500.930	-	154.920	-	3.966.443.322	-	-	3.966.443.322	7.186.944.252
286	Kab. Pulang Pisau	413150000	118365968	531.515.968	-	140.232.000	-	3.079.128.170	-	-	3.079.128.170	3.610.644.138
287	Kab. Murung Raya	260360000	1580331168	1.840.691.168	-	19.881.150	-	7.120.051.857	-	-	7.120.051.857	8.960.743.025
288	Kab. Barito Timur	338980000	847141001	1.186.121.001	-	451.000	74.901.000	6.879.707.333	-	-	6.879.707.333	8.065.828.334
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	5012948262	5.012.948.262	-	-	351.241.100	2.069.433.806	-	-	2.069.433.806	7.082.382.068
290	Kab. Banjar	504600000	1274601558	1.779.201.558	-	57.869.000	48.276.000	10.723.957.199	-	-	10.723.957.199	12.503.158.757
291	Kab. Barito Kuala	317000000	498363619	815.363.619	-	6.000	10.111	6.551.406.830	-	-	6.551.406.830	7.366.770.449
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	344400000	508761760	853.161.760	-	3.500.000	-	7.699.751.958	-	-	7.699.751.958	8.552.913.718
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	117000000	1384759493	1.501.759.493	-	32.645.000	84.571.300	2.095.341.059	-	-	2.095.341.059	3.597.100.552
294	Kab. Hulu Sungai Utara	440000000	874832095	1.314.832.095	-	123.900.000	-	6.488.478.221	-	-	6.488.478.221	7.803.310.316
295	Kab. Kotabaru	741800000	2323573500	3.065.373.500	-	-	15.148.500	11.654.842.300	-	-	11.654.842.300	14.720.215.800
296	Kab. Tabalong	492400000	1251455000	1.743.855.000	-	5.160.194	-	7.573.444.096	-	-	7.573.444.096	9.317.299.096
297	Kab. Tanah Laut	552400000	1914409107	2.466.809.107	-	44.068.000	110.954.851	7.994.659.045	-	-	7.994.659.045	10.461.468.152
298	Kab. Tapin	392400000	1794051318	2.186.451.318	-	7.320.000	-	6.976.094.194	-	-	6.976.094.194	9.162.545.512
299	Kota Banjarbaru	453100000	1298286267	1.751.386.267	-	-	37.730.250	2.287.037.452	-	-	2.287.037.452	4.038.423.719
300	Kota Banjarmasin	1906400000	5400487600	7.306.887.600	-	18.287.000	876.500	9.020.928.539	-	-	9.020.928.539	16.327.816.139
301	Kab. Balangan	197000000	1144604759	1.341.604.759	-	3.050.000	12.287.500	997.564.085	-	-	997.564.085	2.339.168.844
302	Kab. Tanah Bumbu	537800000	1534401616	2.072.201.616	-	12.870.000	-	5.124.946.731	-	-	5.124.946.731	7.197.148.347
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	5655370750	5.655.370.750	-	-	356.298.027	1.609.338.199	-	-	1.609.338.199	7.264.708.949
304	Kab. Berau	888200000	1322839211	2.211.039.211	-	-	-	9.204.775.345	-	-	9.204.775.345	11.415.814.556

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU	DAU	DAU	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	DAK Nonfisik		DAK Nonfisik	Dana Desa	DBH	Penerimaan Kembali TKDD TAYL	Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		425999	425919		Dana Alokasi Umum	DAK Nonfisik						
						KPP	PK2UKM					
(1)	(2)			(3)	(3)			(6)	(8)		(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(11)=(9)+(10)
305	Kab. Kutai Kartanegara	942300000	4403200500	5.345.500.500	-	28.500.000	-	10.380.225.937	-	-	10.380.225.937	15.725.726.437
306	Kab. Kutai Barat	544880000	231900000	776.780.000	-	-	-	13.699.686.114	-	-	13.699.686.114	14.476.466.114
307	Kab. Kutai Timur	893680000	1014700000	1.908.380.000	-	22.620.000	-	420.460.139	-	-	420.460.139	2.328.840.139
308	Kab. Paser	612640000	924372706	1.537.012.706	-	24.640.390	724.000	3.995.110.149	-	-	3.995.110.149	5.532.122.855
309	Kota Balikpapan	2998240000	5961412968	8.959.652.968	-	12.275.000	56.804.833	4.432.483.897	-	-	4.432.483.897	13.392.136.865
310	Kota Bontang	453140000	1420245510	1.873.385.510	-	48.000.000	31.035.600	1.695.916.092	-	-	1.695.916.092	3.569.301.602
311	Kota Samarinda	2211320000	7437655000	9.648.975.000	-	3.500.000	-	6.973.055.198	-	-	6.973.055.198	16.622.030.198
312	Kab. Penajam Paser Utara	496480000	971618365	1.468.098.365	-	72.657.027	-	7.460.143.071	-	-	7.460.143.071	8.928.241.436
313	Kab. Mahakam Ulu	126400000	325204545	451.604.545	-	27.500.000	-	1.675.947.383	-	-	1.675.947.383	2.127.551.928
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	8527540000	8.527.540.000	-	-	4.461.607	121.382.156	-	-	121.382.156	8.648.922.156
315	Kab. Bolaang Mongondow	138600000	3759261521	3.897.861.521	-	29.589.450	-	3.013.761.470	-	-	3.013.761.470	6.911.622.991
316	Kab. Minahasa	564200000	244397400	808.597.400	-	66.073.125	-	5.264.431.527	-	-	5.264.431.527	6.073.028.927
317	Kab. Sangihe	971460000	1018416100	1.989.876.100	-	132.400	-	6.659.571.084	-	-	6.659.571.084	8.649.447.184
318	Kota Bitung	337100000	628230284	965.330.284	-	-	-	659.027.956	-	-	659.027.956	1.624.358.240
319	Kota Manado	2438840000	2815898800	5.254.738.800	-	-	7.266.220	6.502.419.657	-	-	6.502.419.657	11.757.158.457
320	Kab. Kepulauan Talaud	535540000	148251964	683.791.964	-	-	-	11.638.341.256	-	-	11.638.341.256	12.322.133.220
321	Kab. Minahasa Selatan	196660000	1213413956	1.410.073.956	-	8.159.500	-	4.391.554.379	-	-	4.391.554.379	5.801.628.335
322	Kota Tomohon	59620000	424822304	484.442.304	-	-	13.217.000	1.433.435.678	-	-	1.433.435.678	1.917.877.982
323	Kab. Minahasa Utara	239580000	27163273	266.743.273	-	-	-	4.699.804.513	-	-	4.699.804.513	4.966.547.786
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	41800000	3355747273	3.397.547.273	-	-	-	10.202.427.073	-	-	10.202.427.073	13.599.974.346
325	Kota Kotamobagu	401620000	310923973	712.543.973	-	2.400.000	10.971.950	1.331.117.908	-	-	1.331.117.908	2.043.661.881
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	62700000	615380966	678.080.966	-	34.270.600	-	3.987.526.088	-	-	3.987.526.088	4.665.607.054
327	Kab. Minahasa Tenggara	69300000	322569020	391.869.020	-	-	-	5.851.571.074	-	-	5.851.571.074	6.243.440.094
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	89100000	283671347	372.771.347	-	-	-	2.902.640.768	-	-	2.902.640.768	3.275.412.115
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	16500000	393640219	410.140.219	-	-	-	4.923.882.772	-	-	4.923.882.772	5.334.022.991
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	5945894487	5.945.894.487	-	-	638.877.075	1.735.250.587	-	-	1.735.250.587	7.681.145.074
331	Kab. Banggai	542460000	239759875	782.219.875	-	35.647.800	4.611.447	2.753.530.741	-	-	2.753.530.741	3.535.750.616
332	Kab. Banggai Kepulauan	76760000	207676000	284.436.000	-	-	-	4.455.499.768	-	-	4.455.499.768	4.739.935.768
333	Kab. Buol	265430000	750199693	1.015.629.693	-	16.211.644	-	2.306.616.077	-	-	2.306.616.077	3.322.245.770
334	Kab. Tolitoli	925320000	2946485265	3.871.805.265	-	24.475.000	-	4.659.113.286	-	-	4.659.113.286	8.530.918.551
335	Kab. Donggala	231490000	584563250	816.053.250	-	2.425.000	35.370.000	7.619.044.971	-	-	7.619.044.971	8.435.098.221
336	Kab. Morowali	639060000	0	639.060.000	-	144.957.778	-	2.156.181.311	-	-	2.156.181.311	2.795.241.311
337	Kab. Poso	621580000	1107144828	1.728.724.828	-	203.705.400	104.000	434.197.607	-	-	434.197.607	2.162.922.435
338	Kota Palu	1450850000	1353918980	2.804.768.980	-	21.000.000	2.302.400	3.174.298.147	-	-	3.174.298.147	5.979.067.127
339	Kab. Parigi Moutong	147250000	0	147.250.000	-	922.600	4.728.000	6.895.623.182	-	-	6.895.623.182	7.042.873.182
340	Kab. Tojo Una Una	140900000	1023035886	1.163.935.886	-	42.537.000	-	5.953.484.977	-	-	5.953.484.977	7.117.420.863
341	Kab. Sigi	157130000	420900404	578.030.404	-	28.233.040	-	3.888.767.999	-	-	3.888.767.999	4.466.798.403
342	Kab. Banggai Laut	11400000	1106364279	1.117.764.279	-	-	-	3.221.648.118	-	-	3.221.648.118	4.339.412.397
343	Kab. Morowali Utara	120460000	94923086	215.383.086	-	19.709.430	-	3.546.812.247	-	-	3.546.812.247	3.762.195.333
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	22943080000	22.943.080.000	-	-	610.000	4.151.661.248	-	-	4.151.661.248	27.094.741.248
345	Kab. Bantaeng	310600000	1347420604	1.658.020.604	-	14.400.000	-	2.544.002.457	-	-	2.544.002.457	4.202.023.061
346	Kab. Barru	395740000	2474939810	2.870.679.810	-	-	-	6.213.873.533	-	-	6.213.873.533	9.084.553.343
347	Kab. Bone	1150560000	4469884037	5.620.444.037	-	4.000.000	-	16.502.028.916	-	-	16.502.028.916	22.122.472.953
348	Kab. Bulukumba	462080000	2342656212	2.804.736.212	-	3.700.000	2.220.000	10.779.383.761	-	-	10.779.383.761	13.584.119.973
349	Kab. Enrekang	592320000	2859566082	3.451.886.082	-	151.000	680.000	6.728.383.829	-	-	6.728.383.829	10.180.269.911
350	Kab. Gowa	1296420000	2507135715	3.803.555.715	-	-	-	12.303.354.853	-	-	12.303.354.853	16.106.910.568
351	Kab. Jenepono	284360000	1042632400	1.326.992.400	-	70.000	32.250.000	2.576.348.627	-	-	2.576.348.627	3.903.341.027
352	Kab. Luwu	418080000	891562471	1.309.642.471	-	27.226.760	-	2.378.354.427	-	-	2.378.354.427	3.687.996.898
353	Kab. Luwu Utara	210500000	2352103429	2.562.603.429	-	51.000	-	6.303.139.999	-	-	6.303.139.999	8.865.743.428
354	Kab. Maros	899640000	436350000	1.335.990.000	-	18.900.000	-	6.385.605.385	-	-	6.385.605.385	7.721.595.385
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	953940000	1124885703	2.078.825.703	-	-	100.000	7.337.316.957	-	-	7.337.316.957	9.416.142.660

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU	DAU	DAU	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	DAK Nonfisik		DAK Nonfisik	Dana Desa	DBH	Penerimaan Kembali TKDD TAYL	Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		425999	425919		Dana Alokasi Umum							
						KPP	PK2UKM					
(1)	(2)			(3)	(3)			(6)	(8)		(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(11)=(9)+(10)
356	Kota Palopo	278200000	1569227528	1.847.427.528	-	-	14.519.600	3.568.491.582	-	-	3.568.491.582	5.415.919.110
357	Kab. Luwu Timur	573680000	1529694750	2.103.374.750	-	3.707.569	-	4.874.563.545	-	-	4.874.563.545	6.977.938.295
358	Kab. Pinrang	367960000	1059162751	1.427.122.751	-	10.266.600	-	1.948.257.556	-	-	1.948.257.556	3.375.380.307
359	Kab. Sinjai	237500000	432435748	669.935.748	-	75.240.000	-	1.050.960.560	-	-	1.050.960.560	1.720.896.308
360	Kab. Kepulauan Selayar	207360000	462265719	669.625.719	-	-	-	5.719.806.317	-	-	5.719.806.317	6.389.432.036
361	Kab. Sidenreng Rappang	297960000	2081347800	2.379.307.800	-	-	-	7.555.134.300	-	-	7.555.134.300	9.934.442.100
362	Kab. Soppeng	379260000	953441871	1.332.701.871	-	9.690.400	2.725.000	7.361.219.708	-	-	7.361.219.708	8.693.921.579
363	Kab. Takalar	571840000	1199685283	1.771.525.283	-	-	-	3.319.388.886	-	-	3.319.388.886	5.090.914.169
364	Kab. Tana Toraja	317800000	213691806	531.491.806	-	-	7.012.000	3.530.789.303	-	-	3.530.789.303	4.062.281.109
365	Kab. Wajo	411880000	1819465594	2.231.345.594	-	94.942.500	-	11.379.889.883	-	-	11.379.889.883	13.611.235.477
366	Kota Parepare	316260000	769025848	1.085.285.848	-	-	905.200	2.398.440.430	-	-	2.398.440.430	3.483.726.278
367	Kota Makassar	20431080000	6417411344	26.848.491.344	-	9.558.660	53.411.000	9.894.495.858	-	-	9.894.495.858	36.742.987.202
368	Kab. Toraja Utara	430620000	593574698	1.024.194.698	-	3.108.300	4.610.000	10.386.184.656	-	-	10.386.184.656	11.410.379.354
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	4067106849	4.067.106.849	-	-	55.295.700	2.354.515.500	-	-	2.354.515.500	6.421.622.349
370	Kab. Buton	280000000	447538644	727.538.644	-	-	7.787.950	4.824.336.855	-	-	4.824.336.855	5.551.875.499
371	Kab. Konawe	140000000	1908015578	2.048.015.578	-	-	-	8.846.375.848	-	-	8.846.375.848	10.894.391.426
372	Kab. Kolaka	681400000	109521763	790.921.763	-	-	3.985.000	5.038.628.951	-	-	5.038.628.951	5.829.550.714
373	Kab. Muna	264400000	901350000	1.165.750.000	-	-	-	596.243.240	-	-	596.243.240	1.761.993.240
374	Kota Kendari	1489000000	2253850000	3.742.850.000	-	90.000	320	2.160.006.882	-	-	2.160.006.882	5.902.856.882
375	Kota Bau-bau	94200000	1414258031	1.508.458.031	-	-	49.680.000	6.715.912.277	-	-	6.715.912.277	8.224.370.308
376	Kab. Konawe Selatan	95200000	916712600	1.011.912.600	-	35.983.075	-	10.032.444.972	-	-	10.032.444.972	11.044.357.572
377	Kab. Bombana	149800000	2076463166	2.226.263.166	-	-	-	7.359.828.048	-	-	7.359.828.048	9.586.091.214
378	Kab. Wakatobi	35000000	1706259340	1.741.259.340	-	-	-	4.784.774.870	-	-	4.784.774.870	6.526.034.210
379	Kab. Kolaka Utara	58800000	437350000	496.150.000	-	31.305.100	-	3.632.567.148	-	-	3.632.567.148	4.128.717.148
380	Kab. Konawe Utara	67000000	432750000	499.750.000	-	-	-	2.115.693.570	-	-	2.115.693.570	2.615.443.570
381	Kab. Buton Utara	160000000	97200000	257.200.000	-	-	-	1.757.682.613	-	-	1.757.682.613	2.014.882.613
382	Kab. Konawe Kepulauan	2000000	596467880	598.467.880	-	1.058.800	-	2.242.285.985	-	-	2.242.285.985	2.840.753.865
383	Kab. Kolaka Timur	7000000	1257558999	1.264.558.999	-	8.800	-	5.315.171.738	-	-	5.315.171.738	6.579.730.737
384	Kab. Muna Barat	18000000	655378571	673.378.571	-	-	-	1.185.430.372	-	-	1.185.430.372	1.858.808.943
385	Kab. Buton Tengah	19000000	4164351798	4.183.351.798	-	2.100.000	-	8.629.143.167	-	-	8.629.143.167	12.812.494.965
386	Kab. Buton Selatan	13000000	85841282	98.841.282	-	-	-	3.962.600.377	-	-	3.962.600.377	4.061.441.659
387	Provinsi Bali	0	6879738155	6.879.738.155	-	-	329.684.575	1.605.604.381	-	-	1.605.604.381	8.485.342.536
388	Kab. Badung	1211200000	1892600000	3.103.800.000	-	-	7.108.612	2.161.270.521	-	-	2.161.270.521	5.265.070.521
389	Kab. Bangli	405840000	869015959	1.274.855.959	-	3.272.000	6.846.450	6.805.358.305	-	-	6.805.358.305	8.080.214.264
390	Kab. Buleleng	1505440000	1551108051	3.056.548.051	-	20.540.042	8.691.500	10.378.114.791	-	-	10.378.114.791	13.434.662.842
391	Kab. Gianyar	743280000	2539076000	3.282.356.000	-	35.380.317	107.680.850	7.770.228.752	-	-	7.770.228.752	11.052.584.752
392	Kab. Jembrana	533760000	149164050	682.924.050	-	174.184.500	14.242.000	3.280.230.199	-	-	3.280.230.199	3.963.154.249
393	Kab. Karangasem	470880000	965248184	1.436.128.184	-	24.800.400	40.713.750	4.170.765.806	-	-	4.170.765.806	5.606.893.990
394	Kab. Klungkung	307440000	1310549650	1.617.989.650	-	11.254.000	15.973.000	3.754.572.723	-	-	3.754.572.723	5.372.562.373
395	Kab. Tabanan	529920000	1066300000	1.596.220.000	-	32.886.800	43.948.625	8.729.443.262	-	-	8.729.443.262	10.325.663.262
396	Kota Denpasar	4812160000	3619929302	8.432.089.302	-	32.600.000	17.584.242	5.099.216.434	-	-	5.099.216.434	13.531.305.736
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	3228867919	3.228.867.919	-	-	50.378.700	2.641.059.249	-	-	2.641.059.249	5.869.927.168
398	Kab. Bima	80250000	4012728000	4.092.978.000	-	10.835.000	773.000	2.611.958.728	-	-	2.611.958.728	6.704.936.728
399	Kab. Dompu	124200000	51137000	175.337.000	-	-	-	793.335.152	-	-	793.335.152	968.672.152
400	Kab. Lombok Barat	265650000	2210845700	2.476.495.700	-	1.145.000	425.000	5.064.089.004	-	-	5.064.089.004	7.540.584.704
401	Kab. Lombok Tengah	413080000	147000000	560.080.000	-	14.400.000	716.475	5.129.742.391	-	-	5.129.742.391	5.689.822.391
402	Kab. Lombok Timur	1619810000	1541645200	3.161.455.200	-	63.700.000	36.750.000	5.727.381.211	-	-	5.727.381.211	8.888.836.411
403	Kab. Sumbawa	252060000	1586549000	1.838.609.000	-	10.000	2.680.600	6.939.763.779	-	-	6.939.763.779	8.778.372.779
404	Kota Mataram	1810580000	2036655476	3.847.235.476	-	1.037	138.159.650	1.988.566.856	-	-	1.988.566.856	5.835.802.332
405	Kota Bima	314090000	1342194877	1.656.284.877	-	-	16.827.144	3.280.361.866	-	-	3.280.361.866	4.936.646.743
406	Kab. Sumbawa Barat	162150000	643979294	806.129.294	-	37.976.000	6.203.158	3.341.453.106	-	-	3.341.453.106	4.147.582.400

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU	DAU	DAU	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	DAK Nonfisik		DAK Nonfisik	Dana Desa	DBH	Penerimaan Kembali TKDD TAYL	Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		425999	425919		Dana Alokasi Umum	DAK Nonfisik						
						KPP	PK2UKM					
(1)	(2)			(3)	(3)			(6)	(8)		(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(11)=(9)+(10)
407	Kab. Lombok Utara	374900000	229986070	604.886.070	-	24.025.000	14.068.500	3.840.407.958	-	-	3.840.407.958	4.445.294.028
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	113960000	113.960.000	-	-	98.154.841	876.150.890	-	-	876.150.890	990.110.890
409	Kab. Alor	244420000	752144182	996.564.182	-	-	-	13.318.894.137	-	-	13.318.894.137	14.315.458.319
410	Kab. Belu	559000000	709282288	1.268.282.288	-	-	405.000	5.179.587.909	-	-	5.179.587.909	6.447.870.197
411	Kab. Ende	230520000	3333196651	3.563.716.651	-	-	21.065.401	14.526.926.143	-	-	14.526.926.143	18.090.642.794
412	Kab. Flores Timur	217360000	646182050	863.542.050	-	-	7.540.240	744.777.948	-	-	744.777.948	1.608.319.998
413	Kab. Kupang	893860000	807246250	1.701.106.250	-	-	361.400	2.436.246.984	-	-	2.436.246.984	4.137.353.234
414	Kab. Lembata	173360000	1348950505	1.522.310.505	-	10.195.000	600.048	549.918.504	-	-	549.918.504	2.072.229.009
415	Kab. Manggarai	168960000	3289788415	3.458.748.415	-	-	24.060.400	11.406.705.480	-	-	11.406.705.480	14.865.453.895
416	Kab. Ngada	298320000	24071289	322.391.289	-	1.133.700	13.792.840	8.549.826.734	-	-	8.549.826.734	8.872.218.023
417	Kab. Sikka	702300000	727030032	1.429.330.032	-	-	-	18.300.709.732	-	-	18.300.709.732	19.730.039.764
418	Kab. Sumba Barat	444180000	214900231	659.080.231	-	61.197.200	-	3.832.669.698	-	-	3.832.669.698	4.491.749.929
419	Kab. Sumba Timur	304440000	266426874	570.866.874	-	-	-	10.605.519.129	-	-	10.605.519.129	11.176.386.003
420	Kab. Timor Tengah Selatan	197340000	3439086325	3.636.426.325	-	-	-	22.276.160.173	-	-	22.276.160.173	25.912.586.498
421	Kab. Timor Tengah Utara	198000000	1307051651	1.505.051.651	-	-	22.966.300	7.483.346.166	-	-	7.483.346.166	8.988.397.817
422	Kota Kupang	1844180000	3022027356	4.866.207.356	-	-	94.500	3.705.624.454	-	-	3.705.624.454	8.571.831.810
423	Kab. Rote Ndao	452400000	2000000	454.400.000	-	6.850.000	-	5.077.433.886	-	-	5.077.433.886	5.531.833.886
424	Kab. Manggarai Barat	214720000	129911008	344.631.008	-	130	-	8.717.333.325	-	-	8.717.333.325	9.061.964.333
425	Kab. Nagekeo	935000000	173487263	266.987.263	-	15.133.600	122.483.658	2.158.123.998	-	-	2.158.123.998	2.425.111.261
426	Kab. Sumba Barat Daya	935000000	1008224604	1.101.724.604	-	24.000.000	34.090.497	8.921.668.640	-	-	8.921.668.640	10.023.393.244
427	Kab. Sumba Tengah	55000000	222723252	228.223.252	-	-	-	4.143.982.301	-	-	4.143.982.301	4.372.205.553
428	Kab. Manggarai Timur	67100000	8310086852	8.377.186.852	-	330.000	15.948.400	5.602.863.731	-	-	5.602.863.731	13.980.050.583
429	Kab. Sabu Raijua	46200000	1025885698	1.072.085.698	-	-	-	5.096.516.289	-	-	5.096.516.289	6.168.601.987
430	Kab. Malaka	94600000	775581864	870.181.864	-	-	-	9.533.590.786	-	-	9.533.590.786	10.403.772.650
431	Provinsi Maluku	0	4809755755	4.809.755.755	-	-	167.204.417	3.643.756.324	-	-	3.643.756.324	8.453.512.079
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	200800000	52584741	253.384.741	-	-	-	1.744.036.822	-	-	1.744.036.822	1.997.421.563
433	Kab. Maluku Tengah	408000000	1627683850	2.035.683.850	-	2.290.400	-	7.110.215.447	-	-	7.110.215.447	9.145.899.297
434	Kab. Maluku Tenggara	285200000	289457399	574.657.399	-	-	13.614.600	5.760.084.026	-	-	5.760.084.026	6.334.741.425
435	Kab. Buru	68600000	229350000	297.950.000	-	8.400.000	-	106.751.797	-	-	106.751.797	404.701.797
436	Kota Ambon	4038800000	8717750200	12.756.550.200	-	-	-	7.132.307.298	-	-	7.132.307.298	19.888.857.498
437	Kab. Seram Bagian Barat	52600000	443177950	495.777.950	-	-	-	3.705.769.510	-	-	3.705.769.510	4.201.547.460
438	Kab. Seram Bagian Timur	12000000	2396481656	2.408.481.656	-	68.200.000	-	4.288.942.795	-	-	4.288.942.795	6.697.424.451
439	Kab. Kepulauan Aru	105600000	2300	105.602.300	-	-	-	11.497.030.955	-	-	11.497.030.955	11.602.633.255
440	Kota Tual	508000000	775355552	1.283.355.552	-	-	11.973.800	4.088.836.219	-	-	4.088.836.219	5.372.191.771
441	Kab. Maluku Barat Daya	11600000	1772569448	1.784.169.448	-	138.850.000	-	5.586.054.200	-	-	5.586.054.200	7.370.223.648
442	Kab. Buru Selatan	12000000	71950000	83.950.000	-	-	-	523.292.000	-	-	523.292.000	607.242.000
443	Provinsi Papua	0	107477272	107.477.272	-	-	216.470.037	1.022.331.998	-	-	1.022.331.998	1.129.809.270
444	Kab. Biak Numfor	1104560000	827747317	1.932.307.317	-	-	-	4.427.560.741	-	-	4.427.560.741	6.359.868.058
445	Kab. Jayapura	3576600000	405238999	3.981.838.999	-	1.920.000	5.494.500	1.540.708.661	-	-	1.540.708.661	5.522.547.660
446	Kab. Jayawijaya	317640000	661578168	979.218.168	-	-	-	6.013.942.661	-	-	6.013.942.661	6.993.160.829
447	Kab. Merauke	2584600000	428550576	3.013.150.576	-	95.600.000	1.000	8.900.244.695	-	-	8.900.244.695	11.913.395.271
448	Kab. Mimika	1262120000	1517478357	2.779.598.357	-	2.500.000	-	615.752.653	-	-	615.752.653	3.395.351.010
449	Kab. Nabire	750880000	82300248	833.180.248	-	-	-	9.812.872.385	-	-	9.812.872.385	10.646.052.633
450	Kab. Paniai	8400000	1944188500	1.952.588.500	-	-	-	701.187.347	-	-	701.187.347	2.653.775.847
451	Kab. Puncak Jaya	15400000	288000000	303.400.000	-	-	-	1.724.174.082	-	-	1.724.174.082	2.027.574.082
452	Kab. Kepulauan Yapen	118760000	60135000	178.895.000	-	124.850.000	-	780.542.115	-	-	780.542.115	959.437.115
453	Kota Jayapura	2439060000	910435865	3.349.495.865	-	-	-	901.142.750	-	-	901.142.750	4.250.638.615
454	Kab. Sarmi	14000000	1588000000	1.602.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.602.000.000
455	Kab. Keerom	182280000	1694192401	1.876.472.401	-	49.850.000	-	7.063.314.505	-	-	7.063.314.505	8.939.786.906
456	Kab. Yahukimo	11200000	2975415000	2.986.615.000	-	42.600.000	-	1.635.720.708	-	-	1.635.720.708	4.622.335.708
457	Kab. Pegunungan Bintang	4200000	2016283649	2.020.483.649	-	-	-	15.946.932.100	-	-	15.946.932.100	17.967.415.749

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU	DAU	DAU	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	DAK Nonfisik		DAK Nonfisik	Dana Desa	DBH	Penerimaan Kembali TKDD TAYL	Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		425999	425919		Dana Alokasi Umum							
						KPP	PK2UKM					
(1)	(2)			(3)	(3)			(6)	(8)		(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(11)=(9)+(10)
458	Kab. Tolikara	4200000	701924500	706.124.500	-	-	-	2.394.498.531	-	-	2.394.498.531	3.100.623.031
459	Kab. Boven Digoel	11200000	412319160	423.519.160	-	-	99.850.000	11.618.878.740	-	-	11.618.878.740	12.042.397.900
460	Kab. Mappi	28840000	1271599416	1.300.439.416	-	-	27.000.000	6.517.717.294	-	-	6.517.717.294	7.818.156.710
461	Kab. Asmat	7000000	528008000	535.008.000	-	-	957.150	4.863.718.134	-	-	4.863.718.134	5.398.726.134
462	Kab. Waropen	8400000	162672000	171.072.000	-	-	31.145.595	31.146.595	-	-	31.146.595	202.218.595
463	Kab. Supiori	5600000	1772356003	1.777.956.003	-	-	-	1.020.959.104	-	-	1.020.959.104	2.798.915.107
464	Kab. Mamberamo Raya	2800000	577100000	579.900.000	-	-	-	-	-	-	-	579.900.000
465	Kab. Mamberamo Tengah	1400000	874322787	875.722.787	-	-	-	-	-	-	-	875.722.787
466	Kab. Yalimo	1400000	1081690550	1.083.090.550	-	-	-	53.308.000	-	-	53.308.000	1.136.398.550
467	Kab. Lanny Jaya	4200000	1932634550	1.936.834.550	-	-	25.000.000	1.695.012.440	-	-	1.695.012.440	3.631.846.990
468	Kab. Nduga	9800000	720419250	730.219.250	-	-	-	-	-	-	-	730.219.250
469	Kab. Dogiyai	8400000	618435000	626.835.000	-	-	400.000	2.019.366.746	-	-	2.019.366.746	2.646.201.746
470	Kab. Puncak	2800000	0	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000
471	Kab. Intan Jaya	11200000	310298000	321.498.000	-	-	4.495.300	2.885.571.378	-	-	2.885.571.378	3.207.069.378
472	Kab. Deiyai	2800000	0	2.800.000	-	-	-	51.348.000	-	-	51.348.000	54.148.000
473	Provinsi Maluku Utara	0	2574505714	2.574.505.714	-	-	-	42.656.578	-	-	1.121.572.927	3.696.078.641
474	Kab. Halmahera Tengah	13200000	1085693750	1.098.893.750	-	-	112.000.000	-	-	-	2.604.135.773	3.703.029.523
475	Kota Ternate	1342740000	1870143750	3.212.883.750	-	-	-	1.158.900	-	-	475.506.490	3.688.390.240
476	Kab. Halmahera Barat	75900000	1421761409	1.497.661.409	-	-	3.585.000	-	-	-	5.852.183.920	7.349.845.329
477	Kab. Halmahera Timur	26400000	497400000	523.800.000	-	-	-	-	-	-	6.764.709.773	7.288.509.773
478	Kab. Halmahera Selatan	260000000	3176414	263.176.414	-	-	18.826.900	-	-	-	3.315.342.830	3.578.519.244
479	Kab. Halmahera Utara	9900000	1067249247	1.077.149.247	-	-	42.930.000	290.750	-	-	8.690.256.240	9.767.405.487
480	Kab. Kepulauan Sula	8800000	2420644500	2.429.444.500	-	-	4.900.000	-	-	-	4.143.726.490	6.573.170.990
481	Kota Tidore Kepulauan	11000000	2496339632	2.507.339.632	-	-	10.000	5.500.150	-	-	5.061.466.295	7.568.805.927
482	Kab. Pulau Morotai	791500000	4336363	795.836.363	-	-	-	-	-	-	1.554.211.158	2.350.047.521
483	Kab. Pulau Taliabu	3300000	7200000	10.500.000	-	-	-	-	-	-	43.814.152	54.314.152
484	Provinsi Banten	0	1171407014	1.171.407.014	-	-	-	73.270.000	-	-	2.645.374.900	3.816.781.914
485	Kab. Lebak	1588000000	728218000	2.316.218.000	-	-	-	13.181.375	-	-	29.910.000	17.266.126.840
486	Kab. Pandeglang	729000000	1501727000	2.230.727.000	-	-	-	-	-	-	17.266.126.840	19.582.344.840
487	Kab. Serang	2470000000	5321231982	7.791.231.982	-	-	5.805.800	-	-	-	16.979.647.054	19.210.374.054
488	Kab. Tangerang	1500500000	7340797908	8.841.297.908	-	-	82.016.000	-	-	-	10.932.874.179	18.724.106.161
489	Kota Cilegon	1865300000	1827013083	3.692.313.083	-	-	40.600.000	-	-	-	15.525.356.075	24.366.653.983
490	Kota Tangerang	15731060000	8856628745	24.587.688.745	-	-	210.000.000	-	-	-	2.970.826.654	6.663.139.737
491	Kota Serang	3028600000	130546112	3.159.146.112	-	-	100.000	-	-	-	1.903.991.701	26.491.680.446
492	Kota Tangerang Selatan	7726360000	4445382000	12.171.742.000	-	-	16.380.000	-	-	-	4.416.818.235	7.575.964.347
493	Provinsi Bangka Belitung	0	32583965	32.583.965	-	-	-	9.904.000	-	-	4.416.818.235	7.575.964.347
494	Kab. Bangka	562800000	1664732170	2.227.532.170	-	-	-	9.506.674.731	-	-	9.506.674.731	21.678.416.731
495	Kab. Belitung	1430000000	751087540	2.181.087.540	-	-	7.239.000	-	-	-	1.437.347.035	1.469.931.000
496	Kota Pangkal Pinang	695800000	1423060272	2.118.860.272	-	-	-	122.414.700	-	-	3.008.853.919	5.236.386.089
497	Kab. Bangka Selatan	749400000	467350000	1.216.750.000	-	-	2.735.000	-	-	-	4.249.476.361	6.430.563.901
498	Kab. Bangka Tengah	483200000	729959527	1.213.159.527	-	-	1.052.000	-	-	-	2.020.654.981	4.139.515.253
499	Kab. Bangka Barat	577400000	637259995	1.214.659.995	-	-	16.821.100	-	-	-	3.167.682.775	4.384.432.775
500	Kab. Belitung Timur	602900000	646079750	1.248.979.750	-	-	1.750.000	-	-	-	956.990.469	2.170.149.996
501	Provinsi Gorontalo	0	1814840000	1.814.840.000	-	-	-	200.000	-	-	3.543.604.418	4.758.264.413
502	Kab. Boalemo	26000000	527952566	553.952.566	-	-	200.300	-	-	-	47.780.400	3.543.604.418
503	Kab. Gorontalo	1054200000	55894467	1.110.094.467	-	-	87.500	-	-	-	3.587.796.211	4.836.775.961
504	Kota Gorontalo	725200000	911300000	1.636.500.000	-	-	6.860.300	-	-	-	81.004.987	3.587.796.211
505	Kab. Pohuwato	27000000	377068195	404.068.195	-	-	13.796.365	-	-	-	1.024.637.567	1.458.587.651
506	Kab. Bone Bolango	18000000	281007449	299.007.449	-	-	-	-	-	-	1.603.077.651	3.417.917.651
507	Kab. Gorontalo Utara	16000000	648842360	664.842.360	-	-	81.309.010	-	-	-	5.578.832.866	6.132.785.432
508	Provinsi Kepulauan Riau	0	433950084	433.950.084	-	-	-	-	-	-	7.092.155.153	8.202.249.620

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU	DAU	DAU	Satker DAK Fisik dan Dana Desa	DAK Nonfisik		DAK Nonfisik	Dana Desa	DBH	Penerimaan Kembali TKDD TAYL	Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		425999	425919		Dana Alokasi Umum	DAK Nonfisik						
						KPP	PK2UKM					
(1)	(2)			(3)	(3)			(6)	(8)		(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(11)=(9)+(10)
509	Kab. Natuna	1704200000	287950000	1.992.150.000	-	12.377.500	86.781.320	8.351.263.786	-	-	8.351.263.786	10.343.413.786
510	Kab. Kepulauan Anambas	621200000	104209750	725.409.750	-	6.994.814	-	2.130.835.106	-	-	2.130.835.106	2.856.244.856
511	Kab. Karimun	332000000	1329106850	1.661.106.850	-	-	-	7.072.877.719	-	-	7.072.877.719	8.733.984.569
512	Kota Batam	4677100000	4728349902	9.405.449.902	-	410.000	12.684.260	7.849.823.479	-	-	7.849.823.479	17.255.273.381
513	Kota Tanjung Pinang	1715800000	1340345074	3.056.145.074	-	799.950	120.672.751	2.511.153.604	-	-	2.511.153.604	5.567.298.678
514	Kab. Lingga	630000000	285000300	915.000.300	-	23.180.400	-	5.461.633.154	-	-	5.461.633.154	6.376.633.454
515	Kab. Bintan	1086600000	155400000	1.242.000.000	-	2.678.507	9.686.088	7.437.982.695	-	-	7.437.982.695	8.679.982.695
516	Provinsi Papua Barat	0	1073124000	1.073.124.000	-	-	529.798.539	1.561.330.550	-	-	1.561.330.550	2.634.454.550
517	Kab. Fak Fak	26400000	209722639	236.122.639	-	33.000.000	-	6.910.793.389	-	-	6.910.793.389	7.146.916.028
518	Kab. Manokwari	1024360000	1519874616	2.544.234.616	-	185.500.000	-	6.614.866.045	-	-	6.614.866.045	9.159.100.661
519	Kab. Sorong	1603800000	1582832746	3.186.632.746	-	300.000	-	5.159.616.958	-	-	5.159.616.958	8.346.249.704
520	Kota Sorong	1078760000	603300000	1.682.060.000	-	-	-	3.413.353.514	-	-	3.413.353.514	5.095.413.514
521	Kab. Raja Ampat	12000000	3374498500	3.386.498.500	-	82.100.000	-	1.871.415.115	-	-	1.871.415.115	5.257.913.615
522	Kab. Sorong Selatan	4800000	248358000	253.158.000	-	-	-	7.582.810.730	-	-	7.582.810.730	7.835.968.730
523	Kab. Teluk Bintuni	128400000	583357142	711.757.142	-	-	-	8.343.121.250	-	-	8.343.121.250	9.054.878.392
524	Kab. Teluk Wondama	13200000	135503803	148.703.803	-	113.250	-	295.486.374	-	-	295.486.374	444.190.177
525	Kab. Kaimana	244320000	144387498	388.707.498	-	500.000	-	4.699.928.437	-	-	4.699.928.437	5.088.635.935
526	Kab. Maybrat	0	90000000	90.000.000	-	-	-	1.013.462.500	-	-	1.013.462.500	1.103.462.500
527	Kab. Tambrauw	0	478462250	478.462.250	-	-	-	4.501.076.326	-	-	4.501.076.326	4.979.538.576
528	Kab. Manokwari Selatan	500000000	237000000	737.000.000	-	-	-	2.048.481.000	-	-	2.048.481.000	2.785.481.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	7200000	876750000	883.950.000	-	146.000.000	-	683.153.000	-	-	683.153.000	1.567.103.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	0	2335283671	2.335.283.671	-	-	386.885.660	891.480.940	-	-	891.480.940	3.226.764.611
531	Kab. Majene	280490000	346935069	627.425.069	-	-	-	3.739.203.957	-	-	3.739.203.957	4.366.629.026
532	Kab. Mamuju	682920000	1758743990	2.441.663.990	-	-	-	4.394.462.875	-	-	4.394.462.875	6.836.126.865
533	Kab. Polewali Mandar	314360000	2277628772	2.591.988.772	-	-	-	7.314.647.392	-	-	7.314.647.392	9.906.636.164
534	Kab. Mamasa	358670000	0	358.670.000	-	276.000	-	5.457.884.988	-	-	5.457.884.988	5.816.554.988
535	Kab. Pasangkayu	266690000	711241296	977.931.296	-	5.718.000	-	4.001.619.277	-	-	4.001.619.277	4.979.550.573
536	Kab. Mamuju Tengah	196340000	6600000	202.940.000	-	13.500.400	-	3.869.272.765	-	-	3.869.272.765	4.072.212.765
537	Provinsi Kalimantan Utara	0	80360000	80.360.000	-	-	738.345.950	2.020.998.237	-	-	2.020.998.237	2.101.358.237
538	Kab. Bulungan	634060000	1108365428	1.742.425.428	-	2.867.280	25.424.034	5.073.279.726	-	-	5.073.279.726	6.815.705.154
539	Kab. Malinau	228440000	403382750	631.822.750	-	2.500.000	7.474.050	8.554.232.554	-	-	8.554.232.554	9.186.055.304
540	Kab. Nunukan	605800000	663950000	1.269.750.000	-	28.329.120	-	11.650.556.740	-	-	11.650.556.740	12.920.306.740
541	Kota Tarakan	1537840000	824601223	2.362.441.223	-	4.596.435	-	2.509.980.372	-	-	2.509.980.372	4.872.421.595
542	Kab. Tana Tidung	73000000	756189311	829.189.311	-	2.448.000	-	719.891.701	-	-	719.891.701	1.549.081.012
	Setoran Penerimaan Satker DBH									1.696.205.991.387		1.696.205.991.387
	Setoran Penerimaan Satker DAK Fisik dan dana Desa	0	0					48.103.778.235				48.108.908.345
	Jumlah	673.359.940.000	1.328.108.483.039	2.001.468.423.039	-	11.102.244.771	13.339.589.533	3.207.310.348.776	-	1.696.205.991.387	3.159.206.570.541	6.965.702.915.829

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2022					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)
1	Provinsi Aceh	171.071.748.312	257.089.910.267	428.161.658.579	170.769.089.967	257.089.910.267	427.859.000.234
2	Kab. Aceh Barat	18.491.734.066	67.831.319.834	86.323.053.900	18.477.976.951	67.812.897.784	86.290.874.735
3	Kab. Aceh Besar	16.867.061.166	7.165.921.228	24.032.982.394	16.843.477.086	7.152.248.128	23.995.725.214
4	Kab. Aceh Selatan	14.000.794.296	7.360.229.322	21.361.023.618	13.992.423.081	7.350.014.922	21.342.438.003
5	Kab. Aceh Singkil	20.691.847.146	7.011.023.647	27.702.870.793	20.683.475.931	6.994.166.447	27.677.642.378
6	Kab. Aceh Tengah	13.817.505.128	8.620.252.305	22.437.757.433	13.766.989.073	8.620.252.305	22.387.241.378
7	Kab. Aceh Tenggara	11.365.200.982	6.957.198.166	18.322.399.148	11.351.096.437	6.957.198.166	18.308.294.603
8	Kab. Aceh Timur	44.712.949.847	16.912.404.197	61.625.354.044	44.697.058.547	16.821.794.197	61.518.852.744
9	Kab. Aceh Utara	74.229.781.395	20.045.582.835	94.275.364.230	74.212.351.530	20.029.068.185	94.241.419.715
10	Kab. Bireuen	16.263.143.401	6.957.198.166	23.220.341.567	16.162.544.701	6.944.811.966	23.107.356.667
11	Kab. Pidie	15.318.159.752	7.811.446.271	23.129.606.023	15.290.778.962	7.799.029.471	23.089.808.433
12	Kab. Simeulue	9.941.334.444	6.975.107.268	16.916.441.712	9.785.827.544	6.975.107.268	16.760.934.812
13	Kota Banda Aceh	48.740.500.743	6.957.198.166	55.697.698.909	48.740.500.743	6.955.012.366	55.695.513.109
14	Kota Sabang	9.935.654.400	7.037.727.053	16.973.381.453	9.921.897.285	7.037.727.053	16.959.624.338
15	Kota Langsa	15.407.121.523	6.959.213.294	22.366.334.817	15.393.364.408	6.945.674.494	22.339.038.902
16	Kota Lhokseumawe	22.890.404.586	6.957.198.166	29.847.602.752	22.890.404.586	6.957.198.166	29.847.602.752
17	Kab. Gayo Lues	11.883.979.538	7.563.220.721	19.447.200.259	11.777.164.913	7.563.220.721	19.340.385.634
18	Kab. Aceh Barat Daya	11.522.456.684	6.664.876.339	18.187.333.023	11.514.085.469	6.652.368.589	18.166.454.058
19	Kab. Aceh Jaya	11.131.391.269	6.688.343.102	17.819.734.371	11.029.743.369	6.688.343.102	17.718.086.471
20	Kab. Nagan Raya	23.419.257.977	14.111.406.932	37.530.664.909	23.413.872.077	14.111.406.932	37.525.279.009
21	Kab. Aceh Tamiang	96.733.193.360	12.805.686.994	109.538.880.354	96.727.807.460	12.805.686.994	109.533.494.454
22	Kab. Bener Meriah	11.193.299.141	7.015.518.553	18.208.817.694	11.050.598.761	6.984.015.003	18.034.613.764
23	Kab. Pidie Jaya	10.635.954.995	6.917.892.846	17.553.847.841	10.605.422.675	6.917.892.846	17.523.315.521
24	Kota Subulussalam	12.850.707.724	7.034.457.983	19.885.165.707	12.836.950.609	6.998.678.083	19.835.628.692
25	Provinsi Sumatera Utara	631.614.620.216	177.701.316.870	809.315.937.086	631.447.556.486	177.701.316.870	809.148.873.356
26	Kab. Asahan	95.029.949.178	12.143.343.358	107.173.292.536	95.029.949.178	11.907.072.258	106.937.021.436
27	Kab. Dairi	18.823.894.157	17.942.275.511	36.766.169.668	18.810.488.177	17.942.275.511	36.752.763.688
28	Kab. Deli Serdang	120.951.798.416	12.113.295.190	133.065.093.606	120.946.577.666	12.113.295.190	133.059.872.856
29	Kab. Karo	19.438.101.321	12.174.959.039	31.613.060.360	19.438.101.321	12.174.959.039	31.613.060.360
30	Kab. Labuhanbatu	64.072.178.521	10.152.368.784	74.224.547.305	64.066.957.771	9.941.894.334	74.008.852.105
31	Kab. Langkat	203.219.949.620	14.718.092.236	217.938.041.856	203.214.728.870	14.718.092.236	217.932.821.106
32	Kab. Mandailing Natal	48.479.978.321	31.346.375.678	79.826.353.999	48.474.662.651	31.346.375.678	79.821.038.329
33	Kab. Nias	12.771.923.775	12.108.496.079	24.880.419.854	12.766.703.025	12.108.496.079	24.875.199.104
34	Kab. Simalungun	76.169.939.980	12.660.032.328	88.829.972.308	76.147.149.130	12.000.921.078	88.148.070.208
35	Kab. Tapanuli Selatan	150.683.387.245	310.465.481.207	461.148.868.452	150.683.387.245	310.465.481.207	461.148.868.452
36	Kab. Tapanuli Tengah	21.098.866.847	13.517.418.021	34.616.284.868	21.098.866.847	13.517.418.021	34.616.284.868
37	Kab. Tapanuli Utara	73.455.391.226	13.321.185.481	86.776.576.707	73.455.391.226	13.321.185.481	86.776.576.707
38	Kab. Toba Samosir	19.591.039.134	12.337.797.712	31.928.836.846	19.591.039.134	12.337.797.712	31.928.836.846
39	Kota Binjai	22.588.893.737	12.108.496.079	34.697.389.816	22.588.893.737	12.108.496.079	34.697.389.816
40	Kota Medan	250.809.335.428	10.169.189.097	260.978.524.525	250.804.101.778	10.169.189.097	260.973.290.875
41	Kota Pematang Siantar	29.568.607.646	12.127.703.892	41.696.311.538	29.432.886.566	12.127.703.892	41.560.590.458
42	Kota Sibolga	15.745.424.652	12.108.496.079	27.853.920.731	15.745.424.652	12.108.496.079	27.853.920.731
43	Kota Tanjung Balai	15.137.268.629	12.108.496.079	27.245.764.708	15.123.933.344	12.108.496.079	27.232.429.423
44	Kota Tebing Tinggi	16.034.383.981	12.108.496.079	28.142.880.060	16.034.383.981	12.108.496.079	28.142.880.060
45	Kota Padang Sidempuan	17.896.155.419	12.108.496.079	30.004.651.498	17.890.934.669	12.108.496.079	29.999.430.748
46	Kab. Pakpak Bharat	13.358.902.119	12.977.764.409	26.336.666.528	13.358.902.119	12.977.764.409	26.336.666.528
47	Kab. Nias Selatan	17.422.093.266	15.943.013.958	33.365.107.224	17.422.093.266	15.943.013.958	33.365.107.224
48	Kab. Humbang Hasundutan	15.011.948.557	12.269.653.225	27.281.601.782	14.996.329.387	12.269.653.225	27.265.982.612
49	Kab. Serdang Bedagai	63.097.334.442	12.108.496.079	75.205.830.521	63.092.113.692	12.108.496.079	75.200.609.771
50	Kab. Samosir	14.391.203.642	12.263.091.984	26.654.295.626	14.385.982.892	12.263.091.984	26.649.074.876
51	Kab. Batu Bara	35.761.388.409	12.108.553.690	47.869.942.099	35.761.388.409	12.108.553.690	47.869.942.099
52	Kab. Padang Lawas	45.204.751.216	14.010.505.426	59.215.256.642	45.198.391.486	14.010.505.426	59.208.896.912
53	Kab. Padang Lawas Utara	39.572.387.356	11.684.825.216	51.257.212.572	39.567.166.606	11.684.825.216	51.251.991.822
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	91.614.795.427	12.148.589.477	103.763.384.904	91.614.795.427	12.148.589.477	103.763.384.904
55	Kab. Labuhanbatu Utara	52.438.275.532	12.585.495.733	65.023.771.265	52.433.054.782	12.585.495.733	65.018.550.515
56	Kab. Nias Utara	13.152.190.818	12.108.496.079	25.260.686.897	13.146.970.068	12.108.496.079	25.255.466.147
57	Kab. Nias Barat	12.938.013.002	12.108.496.079	25.046.509.081	12.938.013.002	12.108.496.079	25.046.509.081
58	Kota Gunungsitoli	15.246.544.137	12.108.496.079	27.355.040.216	15.241.323.387	12.108.496.079	27.349.819.466
59	Provinsi Sumatera Barat	166.029.563.255	34.008.898.026	200.038.461.281	166.029.563.255	34.008.898.026	200.038.461.281
60	Kab. Lima Puluh Kota	14.972.184.416	5.246.005.408	20.218.189.824	14.962.729.136	5.246.005.408	20.208.734.544
61	Kab. Agam	21.565.838.150	4.878.729.683	26.444.567.833	21.549.220.145	4.768.933.483	26.318.153.628
62	Kab. Kepulauan Mentawai	13.416.514.809	6.550.156.692	19.966.671.501	13.395.283.219	6.550.156.692	19.945.439.911
63	Kab. Padang Pariaman	14.983.625.171	4.857.465.708	19.841.090.879	14.980.695.461	4.857.465.708	19.838.161.169
64	Kab. Pasaman	12.796.118.194	4.857.725.055	17.653.843.249	12.793.646.584	4.857.725.055	17.651.371.639
65	Kab. Pesisir Selatan	25.804.829.023	4.626.535.897	30.431.364.920	25.765.213.023	4.626.535.897	30.391.748.920
66	Kab. Sijunjung	14.970.996.541	10.131.035.515	25.102.032.056	14.968.066.831	10.131.035.515	25.099.102.346
67	Kab. Solok	14.018.453.875	8.100.965.255	22.119.419.130	13.957.622.875	8.100.965.255	22.058.588.130
68	Kab. Tanah Datar	14.507.741.900	4.989.539.913	19.497.281.813	14.497.177.520	4.989.539.913	19.486.717.433

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2022					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
69	Kota Bukit Tinggi	16.093.769.093	4.852.448.263	20.946.217.356	16.090.839.383	4.852.448.263	20.943.287.646
70	Kota Padang Panjang	11.226.285.322	4.852.448.263	16.078.733.585	11.186.669.322	4.852.448.263	16.039.117.585
71	Kota Padang	98.182.132.824	4.341.361.029	102.523.493.853	98.179.203.114	4.341.361.029	102.520.564.143
72	Kota Payakumbuh	12.931.694.407	4.852.618.915	17.784.313.322	12.930.284.587	4.852.618.915	17.782.903.502
73	Kota Sawahlunto	17.354.339.771	23.002.258.788	40.356.598.559	17.348.614.016	23.002.258.788	40.350.872.804
74	Kota Solok	13.330.412.163	4.852.448.263	18.182.860.426	13.327.482.453	4.852.448.263	18.179.930.716
75	Kota Pariaman	12.624.957.578	4.852.448.263	17.477.405.841	12.603.366.858	4.852.448.263	17.455.815.121
76	Kab. Pasaman Barat	33.249.915.185	4.869.680.313	38.119.595.498	33.246.985.475	4.869.680.313	38.116.665.788
77	Kab. Dharmasraya	26.067.058.529	6.574.582.682	32.641.641.211	26.064.128.819	6.356.516.032	32.420.644.851
78	Kab. Solok Selatan	55.482.251.665	20.599.430.023	76.081.681.688	55.479.321.955	20.448.993.623	75.928.315.578
79	Provinsi Riau	1.127.917.299.784	752.059.815.219	1.879.977.115.003	1.127.914.895.704	752.059.815.219	1.879.974.710.923
80	Kab. Bengkalis	1.811.636.444.192	561.297.585.215	2.372.934.029.407	1.811.636.346.587	561.297.585.215	2.372.933.931.802
81	Kab. Indragiri Hilir	89.324.910.409	187.129.061.956	276.453.972.365	89.324.891.104	187.129.061.956	276.453.953.060
82	Kab. Indragiri Hulu	117.942.627.266	154.566.043.975	272.508.671.241	117.942.366.266	148.794.060.275	266.736.426.541
83	Kab. Kampar	315.119.901.922	330.755.287.375	645.875.188.467	315.119.640.092	330.755.287.375	645.874.927.467
84	Kab. Kuantan Singingi	45.166.014.719	142.932.315.101	188.098.329.820	45.165.753.719	142.932.315.101	188.098.068.820
85	Kab. Pelalawan	174.264.249.623	234.957.761.593	409.222.011.216	174.264.031.463	234.957.761.593	409.221.793.056
86	Kab. Rokan Hilir	355.944.008.798	385.253.081.907	741.197.090.705	355.943.870.468	385.253.081.907	741.196.952.375
87	Kab. Rokan Hulu	106.506.646.912	142.685.801.370	249.192.448.282	106.506.385.912	142.685.801.370	249.192.187.282
88	Kab. Siak	588.910.292.465	357.806.982.648	946.717.275.113	588.910.031.465	357.806.982.648	946.717.014.113
89	Kota Dumai	69.249.297.714	138.110.384.692	207.359.682.406	69.249.079.554	138.110.384.692	207.359.464.246
90	Kota Pekanbaru	143.236.333.980	135.889.260.688	279.125.594.668	143.236.050.645	135.889.260.688	279.125.311.333
91	Kab. Kepulauan Meranti	71.446.449.576	178.532.611.424	249.979.061.000	71.446.188.576	178.532.611.424	249.978.800.000
92	Provinsi Jambi	220.650.735.978	450.810.194.151	671.460.930.129	220.650.735.978	450.810.194.151	671.460.930.129
93	Kab. Batanghari	115.859.793.192	133.413.066.636	249.272.859.828	115.805.065.192	133.413.066.636	249.218.131.828
94	Kab. Bungo	35.341.605.550	151.889.289.421	187.230.894.971	35.286.877.550	151.889.289.421	187.176.166.971
95	Kab. Kerinci	14.690.539.083	89.438.847.277	104.129.386.360	14.350.927.748	89.438.847.277	103.788.945.025
96	Kab. Merangin	16.002.251.967	91.821.508.619	107.823.760.586	15.929.499.147	91.821.508.619	107.751.007.766
97	Kab. Muaro Jambi	114.598.409.601	92.003.768.517	206.602.178.118	114.543.681.601	92.003.768.517	206.547.450.118
98	Kab. Sarolangun	72.744.842.773	166.285.021.934	239.029.864.707	72.690.114.773	163.540.339.634	236.230.454.407
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	177.958.802.096	572.004.192.800	749.962.994.896	177.904.074.096	564.453.735.450	742.357.809.546
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	71.263.362.814	140.738.199.146	212.001.561.960	71.233.536.054	140.738.199.146	211.971.735.200
101	Kab. Tebo	49.182.699.327	108.586.627.482	157.769.326.809	49.136.950.217	108.586.627.482	157.723.577.699
102	Kota Jambi	86.409.640.633	91.016.107.337	177.425.747.970	86.354.912.633	91.016.107.337	177.371.019.970
103	Kota Sungai Penuh	13.432.237.400	89.279.085.391	102.711.322.791	13.363.103.605	89.279.085.391	102.642.188.996
104	Provinsi Sumatera Selatan	958.981.285.515	1.693.658.949.343	2.652.640.234.858	958.928.385.870	1.693.658.949.343	2.652.587.335.213
105	Kab. Lahat	172.673.887.365	900.464.239.590	1.073.138.126.955	172.670.169.915	900.464.239.590	1.073.134.409.505
106	Kab. Musi Banyuasin	858.957.218.563	1.446.538.588.076	2.305.495.806.639	858.952.400.218	1.446.538.588.076	2.305.490.988.294
107	Kab. Musi Rawas	244.765.216.459	295.105.390.027	539.870.606.486	244.760.398.114	295.105.390.027	539.865.788.141
108	Kab. Muara Enim	621.488.784.118	1.091.582.638.541	1.713.071.422.659	621.479.943.118	1.090.999.741.841	1.712.479.684.959
109	Kab. Ogan Komering Ilir	82.048.874.931	232.582.333.666	314.631.208.597	82.040.033.931	232.582.333.666	314.622.367.597
110	Kab. Ogan Komering Ulu	104.683.361.070	241.597.791.325	346.281.152.395	104.674.520.070	239.751.071.975	344.425.592.045
111	Kota Palembang	142.296.446.619	205.994.692.895	348.291.139.514	142.287.605.619	205.994.692.895	348.282.298.514
112	Kota Prabumulih	126.489.053.061	218.341.620.769	344.830.673.830	126.480.212.061	218.341.620.769	344.821.832.830
113	Kota Pagar Alam	15.765.553.272	208.337.123.608	224.102.676.880	15.756.712.272	208.337.123.608	224.093.835.880
114	Kota Lubuk Linggau	18.500.749.978	212.000.334.149	230.501.084.127	18.491.908.978	212.000.334.149	230.492.243.127
115	Kab. Banyuasin	102.329.922.591	219.884.751.538	322.214.674.129	102.321.081.591	219.884.751.538	322.205.833.129
116	Kab. Ogan Ilir	86.626.263.726	214.841.488.679	301.467.752.405	86.625.608.891	214.841.488.679	301.467.098.570
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	22.439.536.498	212.713.749.859	235.153.286.357	22.437.466.798	212.713.749.859	235.151.216.657
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	22.516.603.932	213.760.701.201	236.277.305.133	22.408.651.032	213.760.701.201	236.169.352.233
119	Kab. Empat Lawang	18.048.306.016	203.054.848.538	221.103.154.554	18.039.465.016	203.054.848.538	221.094.313.554
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	617.423.358.191	198.699.605.924	816.122.964.115	617.415.967.801	198.699.605.924	816.115.573.725
121	Kab. Musi Rawas Utara	46.638.120.618	263.869.764.430	310.507.885.048	46.629.279.618	263.869.764.430	310.499.044.048
122	Provinsi Bengkulu	57.866.673.498	67.182.013.012	125.048.686.510	57.866.673.498	66.602.439.662	124.469.113.160
123	Kab. Bengkulu Selatan	11.227.142.466	17.055.148.044	28.282.290.510	11.227.142.466	17.055.148.044	28.282.290.510
124	Kab. Bengkulu Utara	35.847.251.072	82.991.667.870	118.838.918.942	35.847.251.072	82.991.667.870	118.838.918.942
125	Kab. Rejang Lebong	12.110.289.013	16.866.572.347	28.976.861.360	12.110.289.013	16.866.572.347	28.976.861.360
126	Kota Bengkulu	28.941.610.388	16.983.882.016	45.925.492.404	28.941.610.388	16.983.882.016	45.925.492.404
127	Kab. Kaur	12.050.235.224	16.844.331.563	28.894.566.787	12.050.235.224	16.844.331.563	28.894.566.787
128	Kab. Seluma	16.344.578.871	20.334.508.609	36.679.087.480	16.344.578.871	20.334.508.609	36.679.087.480
129	Kab. Mukomuko	27.139.371.012	18.756.598.251	45.895.969.263	27.139.371.012	18.756.598.251	45.895.969.263
130	Kab. Lebong	13.347.857.632	18.527.957.646	31.875.815.278	13.347.857.632	18.509.412.346	31.857.269.978
131	Kab. Kepahiang	10.238.849.130	17.176.527.205	27.415.376.335	10.238.849.130	17.176.527.205	27.415.376.335
132	Kab. Bengkulu Tengah	16.599.100.368	66.242.053.824	82.841.154.192	16.599.100.368	66.242.053.824	82.841.154.192
133	Provinsi Lampung	167.369.729.767	109.167.910.292	276.537.640.059	167.257.769.917	109.159.423.042	276.417.192.959
134	Kab. Lampung Barat	12.499.468.354	17.581.539.774	30.081.008.128	12.456.074.569	17.581.539.774	30.037.614.343
135	Kab. Lampung Selatan	40.077.014.879	17.778.744.519	57.855.759.398	40.073.522.159	17.778.744.519	57.852.266.678
136	Kab. Lampung Tengah	64.740.870.154	17.299.120.496	82.039.990.650	64.609.295.154	17.299.120.496	81.908.415.650
137	Kab. Lampung Utara	27.461.116.945	17.154.681.923	44.615.798.868	27.452.020.525	17.154.681.923	44.606.702.448
138	Kab. Lampung Timur	32.803.712.004	50.558.508.982	83.362.220.986	32.740.883.379	50.558.508.982	83.299.392.361
139	Kab. Tanggamus	58.632.032.790	75.979.353.451	134.611.386.241	58.617.516.645	75.979.353.451	134.596.870.096

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2022					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
140	Kab. Tulang Bawang	31.533.628.461	17.318.125.995	48.851.754.456	31.525.034.631	17.318.125.995	48.843.160.626
141	Kab. Way Kanan	29.599.709.141	19.076.325.219	48.676.034.360	29.476.769.141	19.076.325.219	48.553.094.360
142	Kota Bandar Lampung	63.062.947.937	17.315.224.354	80.378.172.291	63.045.124.802	17.315.224.354	80.360.349.156
143	Kota Metro	17.416.737.908	17.143.404.066	34.560.141.974	17.124.014.033	17.143.404.066	34.267.418.099
144	Kab. Pesawaran	20.137.247.724	17.839.987.196	37.977.234.920	20.123.149.764	17.839.987.196	37.963.136.960
145	Kab. Pringsewu	14.070.746.710	17.145.365.854	31.216.112.564	14.059.447.045	17.145.365.854	31.204.812.899
146	Kab. Mesuji	30.834.749.129	17.725.535.642	48.560.284.771	30.825.319.244	17.725.535.642	48.550.854.886
147	Kab. Tulang Bawang Barat	15.898.488.617	17.143.404.066	33.041.892.683	15.835.931.337	17.143.404.066	32.979.335.403
148	Kab. Pesisir Barat	12.230.878.882	17.150.394.563	29.381.273.445	12.169.980.612	17.150.394.563	29.320.375.175
149	Provinsi DKI Jakarta	17.932.807.393.165	55.633.238.419	17.988.440.631.584	17.932.807.393.165	55.633.238.419	17.988.440.631.584
150	Provinsi Jawa Barat	1.889.149.728.993	446.003.773.277	2.335.153.502.270	1.885.198.235.313	446.003.773.277	2.331.202.008.590
151	Kab. Bandung	220.654.946.080	360.861.619.486	581.516.565.566	220.260.773.860	360.861.619.486	581.122.393.346
152	Kab. Bekasi	441.152.494.461	47.714.102.408	488.866.596.869	440.753.052.156	47.714.102.408	488.467.154.564
153	Kab. Bogor	282.832.695.869	141.852.961.230	424.685.657.099	282.677.882.669	141.852.961.230	424.530.843.899
154	Kab. Ciamis	51.098.579.951	39.753.547.860	90.852.127.811	51.098.579.951	39.753.547.860	90.852.127.811
155	Kab. Cianjur	72.843.151.381	41.133.612.089	113.976.763.470	72.684.873.421	41.133.612.089	113.818.485.510
156	Kab. Cirebon	89.931.393.681	39.382.182.285	129.313.575.966	89.931.393.681	39.382.182.285	129.313.575.966
157	Kab. Garut	143.969.642.664	141.819.433.814	285.789.076.478	143.299.116.204	141.819.433.814	285.118.550.018
158	Kab. Indramayu	181.465.494.444	63.558.951.486	245.024.445.930	181.313.506.314	63.558.951.486	244.872.457.800
159	Kab. Karawang	367.809.155.169	67.588.751.083	435.397.906.252	364.650.145.269	67.588.751.083	432.238.896.352
160	Kab. Kuningan	52.969.491.661	39.571.596.953	92.541.088.614	52.798.165.501	39.571.596.953	92.369.762.454
161	Kab. Majalengka	97.975.181.605	40.354.275.058	138.329.456.663	97.975.181.605	40.354.275.058	138.329.456.663
162	Kab. Purwakarta	96.824.140.283	39.534.024.076	136.358.164.359	96.435.938.033	39.534.024.076	135.969.962.109
163	Kab. Subang	137.335.650.780	71.677.007.329	209.012.658.109	137.097.894.315	71.677.007.329	208.774.901.644
164	Kab. Sukabumi	122.374.261.858	109.547.573.529	231.921.835.387	122.137.963.483	109.547.573.529	231.685.537.012
165	Kab. Sumedang	76.365.780.526	39.512.238.970	115.878.019.496	75.781.950.796	39.512.238.970	115.294.189.766
166	Kab. Tasikmalaya	59.340.557.122	39.300.865.499	98.641.422.621	59.185.301.872	39.300.865.499	98.486.167.371
167	Kota Bandung	375.386.715.326	29.998.449.528	405.385.164.854	375.222.538.826	29.998.449.528	405.220.988.354
168	Kota Bekasi	154.001.365.841	42.261.384.910	196.262.750.751	153.846.706.151	42.261.384.910	196.108.091.061
169	Kota Bogor	90.361.215.117	39.358.138.570	129.719.353.687	89.972.601.162	39.358.138.570	129.330.739.732
170	Kota Cirebon	59.762.176.467	39.358.275.570	99.120.452.037	59.371.600.422	39.358.275.570	98.729.875.992
171	Kota Depok	111.143.329.822	39.358.275.570	150.501.605.392	110.751.907.702	39.358.275.570	150.110.183.272
172	Kota Sukabumi	50.021.758.028	39.366.137.756	89.387.895.784	49.869.703.028	39.366.137.756	89.235.840.784
173	Kota Tasikmalaya	54.543.613.435	39.446.305.306	93.989.918.741	54.391.484.725	39.446.305.306	93.837.790.031
174	Kota Cimahi	60.368.159.392	39.358.275.570	99.726.434.962	60.368.159.392	39.358.275.570	99.726.434.962
175	Kota Banjar	43.885.921.793	40.176.872.266	84.062.794.059	43.649.196.368	40.176.872.266	83.826.068.634
176	Kab. Bandung Barat	75.061.065.672	39.554.519.587	114.615.585.259	74.621.907.162	39.554.519.587	114.176.426.749
177	Kab. Pangandaran	44.094.108.972	39.614.345.770	83.708.454.742	43.938.201.462	39.614.345.770	83.552.547.232
178	Provinsi Jawa Tengah	1.015.997.786.814	20.171.262.745	1.036.169.049.559	1.015.997.786.814	20.171.262.745	1.036.169.049.559
179	Kab. Banjarnegara	42.401.685.966	7.089.571.377	49.491.257.363	42.151.370.366	7.089.571.377	49.240.941.743
180	Kab. Banyumas	58.674.117.183	3.950.989.899	62.625.107.082	58.435.056.273	3.950.989.899	62.386.046.172
181	Kab. Batang	46.938.973.583	4.548.284.637	51.487.258.220	46.938.973.583	4.548.284.637	51.487.258.220
182	Kab. Blora	133.349.977.733	23.032.921.356	156.382.899.089	133.349.977.733	23.032.921.356	156.382.899.089
183	Kab. Boyolali	59.299.363.603	3.587.082.026	62.886.445.629	58.599.358.633	3.587.082.026	62.186.440.659
184	Kab. Brebes	43.475.259.779	3.933.014.629	47.408.274.408	43.475.259.779	3.933.014.629	47.408.274.408
185	Kab. Cilacap	75.247.379.173	3.753.895.615	79.001.274.788	75.247.379.173	3.753.895.615	79.001.274.788
186	Kab. Demak	61.439.159.681	3.371.166.779	64.810.326.460	61.439.159.681	3.371.166.779	64.810.326.460
187	Kab. Grobogan	67.402.216.047	5.909.425.435	73.311.641.482	67.402.216.047	5.909.425.435	73.311.641.482
188	Kab. Jepara	57.896.937.850	3.521.854.628	61.418.792.478	57.896.937.850	3.521.854.628	61.418.792.478
189	Kab. Karanganyar	51.110.739.220	3.730.229.527	54.840.968.747	50.639.426.830	3.730.229.527	54.369.656.357
190	Kab. Kebumen	39.894.929.080	3.389.852.202	43.284.781.282	39.894.929.080	3.389.852.202	43.284.781.282
191	Kab. Kendal	55.326.155.327	4.388.082.890	59.714.238.217	54.802.764.167	4.388.082.890	59.190.847.057
192	Kab. Klaten	51.413.144.405	3.361.233.118	54.774.377.523	51.413.144.405	3.361.233.118	54.774.377.523
193	Kab. Kudus	309.701.941.656	3.338.670.363	313.040.612.019	309.701.941.656	3.338.670.363	313.040.612.019
194	Kab. Magelang	47.136.676.483	3.493.675.153	50.630.351.636	47.136.676.483	3.493.675.153	50.630.351.636
195	Kab. Pati	47.750.382.496	3.909.019.915	51.659.402.411	47.750.382.496	3.909.019.915	51.659.402.411
196	Kab. Pekalongan	34.410.164.990	3.591.486.174	38.001.651.164	34.410.164.990	3.591.486.174	38.001.651.164
197	Kab. Pemalang	38.679.808.931	4.843.276.445	43.523.085.376	38.679.808.931	4.843.276.445	43.523.085.376
198	Kab. Purbalingga	34.228.806.897	3.354.524.628	37.583.331.525	34.228.806.897	3.354.524.628	37.583.331.525
199	Kab. Purworejo	33.392.735.669	3.336.759.473	36.729.495.142	33.392.735.669	3.336.759.473	36.729.495.142
200	Kab. Rembang	73.546.136.589	4.943.396.862	78.489.533.451	72.675.922.629	4.943.396.862	77.619.319.491
201	Kab. Semarang	50.181.197.257	3.755.818.576	53.937.015.833	49.885.704.457	3.755.818.576	53.641.523.033
202	Kab. Sragen	36.515.973.351	3.584.680.144	40.100.653.495	36.515.973.351	3.584.680.144	40.100.653.495
203	Kab. Sukoharjo	46.020.951.304	3.342.407.906	49.363.359.210	46.020.951.304	3.342.407.906	49.363.359.210
204	Kab. Tegal	40.862.594.953	3.773.132.035	44.635.726.988	40.862.594.953	3.773.132.035	44.635.726.988
205	Kab. Temanggung	72.100.903.868	3.562.506.100	75.663.409.968	72.100.903.868	3.562.506.100	75.663.409.968
206	Kab. Wonogiri	44.652.497.107	3.694.862.207	48.347.359.314	44.160.430.927	3.694.862.207	47.855.293.134
207	Kab. Wonosobo	43.670.942.180	4.763.262.990	48.434.205.170	43.670.942.180	4.763.262.990	48.434.205.170
208	Kota Magelang	32.696.539.215	3.335.415.169	36.031.954.384	32.696.539.215	3.335.415.169	36.031.954.384
209	Kota Pekalongan	34.706.062.782	3.335.415.169	38.041.477.951	34.446.320.532	3.335.415.169	37.781.735.701
210	Kota Salatiga	32.954.925.943	3.340.952.497	36.295.878.440	32.721.918.613	3.340.952.497	36.062.871.110

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2022					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
211	Kota Semarang	207.842.590.523	3.276.287.549	211.118.878.072	207.842.590.523	3.276.287.549	211.118.878.072
212	Kota Surakarta	59.924.331.885	3.335.415.169	63.259.747.054	59.924.331.885	3.335.415.169	63.259.747.054
213	Kota Tegal	34.556.148.021	3.335.415.169	37.891.563.190	34.556.148.021	3.335.415.169	37.891.563.190
214	Provinsi DI Yogyakarta	119.680.859.852	108.770.050	119.789.629.902	119.576.758.892	108.770.050	119.685.528.942
215	Kab. Bantul	39.027.306.903	2.223.182.992	41.250.489.895	39.027.306.903	2.223.182.992	41.250.489.895
216	Kab. Gunung Kidul	27.525.469.621	2.323.544.593	29.849.014.214	27.525.469.621	2.323.544.593	29.849.014.214
217	Kab. Kulon Progo	26.163.003.568	2.398.755.062	28.561.758.630	26.163.003.568	2.398.755.062	28.561.758.630
218	Kab. Sleman	63.582.040.824	2.206.780.930	65.788.821.754	63.536.491.884	2.206.780.930	65.743.272.814
219	Kota Yogyakarta	62.588.652.498	2.243.417.233	64.832.069.731	62.547.079.563	2.243.417.233	64.790.496.796
220	Provinsi Jawa Timur	2.177.527.938.185	1.565.830.458.155	3.743.358.396.340	2.128.286.885.675	1.565.830.458.155	3.694.117.343.830
221	Kab. Bangkalan	56.602.666.153	89.060.295.798	145.662.961.951	55.014.930.838	89.060.295.798	144.075.226.636
222	Kab. Banyuwangi	159.879.656.782	210.661.285.966	370.540.942.748	159.879.656.782	210.661.285.966	370.540.942.748
223	Kab. Blitar	62.765.908.194	88.766.581.295	151.532.489.489	62.765.908.194	88.766.581.295	151.532.489.489
224	Kab. Bojonegoro	734.354.925.087	2.608.614.501.915	3.342.969.427.002	732.698.026.737	2.608.614.501.915	3.341.312.528.652
225	Kab. Bondowoso	89.820.387.161	88.830.447.067	178.650.834.228	89.820.387.161	88.830.447.067	178.650.834.228
226	Kab. Gresik	169.965.009.630	106.801.942.101	276.766.951.731	169.965.009.630	106.801.942.101	276.766.951.731
227	Kab. Jember	150.364.168.551	90.172.862.853	240.537.031.404	150.364.168.551	90.172.862.853	240.537.031.404
228	Kab. Jombang	85.756.241.082	85.365.134.310	171.121.375.392	84.536.729.562	85.365.134.310	169.901.863.872
229	Kab. Kediri	109.580.450.029	88.595.459.301	198.175.909.330	107.109.267.424	88.595.459.301	195.704.726.725
230	Kab. Lamongan	96.342.702.114	88.707.941.436	185.050.643.550	94.942.154.694	88.707.941.436	183.650.096.130
231	Kab. Lumajang	67.170.103.868	89.346.543.026	156.516.646.894	67.170.103.868	89.346.543.026	156.516.646.894
232	Kab. Madiun	65.059.940.468	88.446.207.969	153.506.148.437	64.406.733.818	88.446.207.969	152.852.941.787
233	Kab. Magetan	54.765.104.105	88.286.694.079	143.051.798.184	53.134.944.980	88.286.694.079	141.421.639.059
234	Kab. Malang	171.734.083.532	88.528.419.937	260.262.503.469	169.285.675.742	88.528.419.937	257.814.095.679
235	Kab. Mojokerto	72.948.024.794	88.334.078.276	161.282.103.070	72.948.024.794	88.334.078.276	161.282.103.070
236	Kab. Nganjuk	64.191.116.881	87.946.004.324	152.137.121.205	64.191.116.881	87.946.004.324	152.137.121.205
237	Kab. Ngawi	66.459.670.577	88.254.862.736	154.714.533.313	66.459.670.577	88.254.862.736	154.714.533.313
238	Kab. Pacitan	53.266.534.980	88.420.569.585	141.687.104.565	52.594.837.320	88.420.569.585	141.015.406.905
239	Kab. Pamekasan	121.473.232.136	88.219.731.198	209.692.963.334	121.473.232.136	88.219.731.198	209.692.963.334
240	Kab. Pasuruan	319.253.251.009	88.359.916.510	407.613.167.519	319.253.251.009	88.359.916.510	407.613.167.519
241	Kab. Ponorogo	63.809.081.625	89.534.208.721	153.343.290.346	63.809.081.625	89.534.208.721	153.343.290.346
242	Kab. Probolinggo	118.029.337.029	88.641.520.273	206.670.857.302	118.029.337.029	88.641.520.273	206.670.857.302
243	Kab. Sampang	61.273.208.775	88.215.851.851	149.489.060.626	61.273.208.775	88.215.851.851	149.489.060.626
244	Kab. Sidoarjo	180.122.911.741	96.851.424.836	276.974.336.577	180.122.911.741	96.851.424.836	276.974.336.577
245	Kab. Situbondo	89.009.859.715	88.214.443.715	177.224.303.430	89.009.859.715	88.214.443.715	177.224.303.430
246	Kab. Sumenep	83.550.189.695	104.388.218.491	187.938.408.186	83.550.189.695	104.388.218.491	187.938.408.186
247	Kab. Trenggalek	60.015.682.562	88.361.800.658	148.377.483.220	59.374.257.092	88.361.800.658	147.736.057.750
248	Kab. Tuban	143.009.995.576	97.010.399.518	240.020.395.094	142.155.135.466	97.010.399.518	239.165.534.984
249	Kab. Tulungagung	71.160.724.207	88.338.254.369	159.498.978.576	70.347.665.977	88.338.254.369	158.685.920.346
250	Kota Blitar	53.510.492.925	88.216.662.851	141.727.155.776	53.510.492.925	88.216.662.851	141.727.155.776
251	Kota Kediri	234.950.575.208	88.216.662.851	323.167.238.059	234.950.575.208	88.216.662.851	323.167.238.059
252	Kota Madiun	59.459.737.036	88.216.662.851	147.676.399.887	57.844.077.496	88.216.662.851	146.060.740.347
253	Kota Malang	119.286.317.029	88.216.662.851	207.502.979.880	118.202.052.139	88.216.662.851	206.418.714.990
254	Kota Mojokerto	52.828.808.019	88.216.662.851	141.045.470.870	51.175.735.779	88.216.662.851	139.392.398.630
255	Kota Pasuruan	54.207.746.581	88.216.662.851	142.424.409.432	53.217.302.926	88.216.662.851	141.433.965.777
256	Kota Probolinggo	52.450.286.074	88.217.118.808	140.667.404.882	52.450.286.074	88.217.118.808	140.667.404.882
257	Kota Surabaya	562.723.068.681	68.806.293.384	631.529.362.065	562.723.068.681	68.806.293.384	631.529.362.065
258	Kota Batu	49.854.575.969	88.277.905.534	138.132.481.503	49.854.575.969	88.277.905.534	138.132.481.503
259	Provinsi Kalimantan Barat	225.192.140.203	221.419.393.267	446.611.533.470	225.192.140.203	221.419.393.267	446.611.533.470
260	Kab. Bengkayang	32.106.740.307	28.372.850.941	60.479.591.248	32.101.847.397	28.372.850.941	60.474.698.338
261	Kab. Landak	37.966.382.983	47.024.198.771	84.990.581.754	37.965.685.228	47.024.198.771	84.989.883.999
262	Kab. Kapuas Hulu	35.551.879.711	35.197.958.215	70.749.837.926	35.551.455.136	35.197.958.215	70.749.413.351
263	Kab. Ketapang	224.976.302.163	259.219.056.368	484.195.358.531	224.975.604.408	259.219.056.368	484.194.660.776
264	Kab. Mempawah	18.336.493.902	33.192.410.070	51.528.903.972	18.336.069.327	33.192.410.070	51.528.479.397
265	Kab. Sambas	35.952.439.405	31.812.955.319	67.765.394.724	35.944.552.425	31.812.955.319	67.757.507.744
266	Kab. Sanggau	67.187.901.411	224.875.963.698	292.063.865.109	67.187.203.656	224.875.963.698	292.063.167.354
267	Kab. Sintang	58.722.589.193	29.900.736.913	88.623.326.106	58.721.891.438	29.900.736.913	88.622.628.351
268	Kota Pontianak	58.428.930.332	28.508.896.955	86.937.827.287	58.428.232.577	28.508.896.955	86.937.129.532
269	Kota Singkawang	19.001.835.696	31.688.353.914	50.690.189.610	19.001.561.256	31.688.353.914	50.689.915.170
270	Kab. Sekadau	28.056.172.584	29.296.892.554	57.353.065.138	28.055.899.404	29.296.892.554	57.352.791.958
271	Kab. Melawi	27.876.382.638	33.758.552.300	61.634.934.938	27.875.684.883	33.758.552.300	61.634.237.183
272	Kab. Kayong Utara	20.050.725.699	35.224.385.137	55.275.110.836	20.050.027.944	35.224.385.137	55.274.413.081
273	Kab. Kubu Raya	48.791.527.594	31.986.610.460	80.778.138.054	48.790.799.509	31.986.610.460	80.777.409.969
274	Provinsi Kalimantan Tengah	259.648.164.379	1.031.090.867.063	1.290.739.031.442	259.648.142.379	1.031.090.867.063	1.290.739.009.442
275	Kab. Barito Selatan	28.180.379.626	217.927.738.355	246.108.117.981	28.180.378.626	217.927.738.355	246.108.116.981
276	Kab. Barito Utara	123.377.247.463	499.428.821.091	622.806.068.554	123.377.246.463	499.428.821.091	622.806.068.554
277	Kab. Kapuas	101.224.202.986	523.466.325.000	624.690.527.986	101.224.201.986	523.466.325.000	624.690.526.986
278	Kab. Kotawaringin Barat	74.833.619.712	121.598.948.431	196.432.568.143	74.833.609.712	121.598.948.431	196.432.558.143
279	Kab. Kotawaringin Timur	128.819.404.067	152.777.025.523	281.596.429.590	128.819.399.067	152.777.025.523	281.596.424.590
280	Kota Palangkaraya	32.294.069.329	113.496.384.571	145.790.453.900	32.294.068.329	113.496.384.571	145.790.453.900
281	Kab. Katingan	45.999.691.767	154.068.239.071	200.067.930.838	45.999.690.767	154.068.239.071	200.067.929.838

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2022					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
282	Kab. Seruyan	83.306.279.446	125.184.745.552	208.491.024.998	83.306.278.446	125.184.745.552	208.491.023.998
283	Kab. Sukamara	22.645.943.463	115.474.075.057	138.120.018.520	22.645.942.633	115.474.075.057	138.120.017.690
284	Kab. Lamandau	48.191.376.157	144.864.974.773	193.056.350.930	48.191.370.707	144.864.974.773	193.056.345.480
285	Kab. Gunung Mas	33.916.145.354	139.492.795.080	173.408.940.434	33.916.144.354	139.492.795.080	173.408.939.434
286	Kab. Pulang Pisau	26.712.798.633	117.745.954.652	144.458.753.285	26.712.797.633	117.745.954.652	144.458.752.285
287	Kab. Murung Raya	89.641.477.856	537.270.103.091	626.911.580.947	89.641.476.856	537.270.103.091	626.911.579.947
288	Kab. Barito Timur	38.924.573.870	170.396.082.227	209.320.656.097	38.924.572.870	170.396.082.227	209.320.655.097
289	Provinsi Kalimantan Selatan	292.648.873.693	2.499.334.102.997	2.791.982.976.690	292.645.187.693	2.499.334.102.997	2.791.979.290.690
290	Kab. Banjar	49.117.223.196	594.320.744.799	643.437.967.995	49.116.911.196	594.320.744.799	643.437.655.995
291	Kab. Barito Kuala	23.499.150.614	409.171.148.649	432.670.299.263	23.498.843.614	409.171.148.649	432.669.992.263
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	58.228.636.945	623.333.279.702	681.561.916.647	58.228.329.945	623.333.279.702	681.561.609.647
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	15.323.840.976	411.083.883.630	426.407.724.606	15.323.533.976	411.083.883.630	426.407.417.606
294	Kab. Hulu Sungai Utara	15.279.788.739	406.379.603.102	421.659.391.841	15.279.481.739	406.294.281.852	421.573.723.591
295	Kab. Kotabaru	94.286.526.498	678.960.616.677	773.247.143.175	94.286.219.498	678.960.616.677	773.246.836.175
296	Kab. Tabalong	106.270.259.119	903.346.964.193	1.009.617.223.312	106.289.952.119	903.346.964.193	1.009.616.916.312
297	Kab. Tanah Laut	70.670.426.098	1.199.713.349.410	1.270.383.775.508	70.670.119.098	1.199.713.349.410	1.270.383.468.508
298	Kab. Tapin	53.780.496.446	823.751.332.979	877.531.829.425	53.780.189.446	823.751.332.979	877.531.522.425
299	Kota Banjarbaru	29.100.873.127	423.327.057.563	452.427.930.690	29.098.789.127	423.327.057.563	452.425.846.690
300	Kota Banjarmasin	58.151.805.855	423.015.357.829	481.167.163.684	58.148.667.855	423.015.357.829	481.164.025.684
301	Kab. Balangan	58.456.756.213	1.624.376.525.863	1.682.833.282.076	58.456.593.503	1.624.376.525.863	1.682.833.119.366
302	Kab. Tanah Bumbu	239.845.915.623	1.437.446.531.404	1.677.292.447.027	239.845.608.623	1.437.446.531.404	1.677.292.140.027
303	Provinsi Kalimantan Timur	812.886.247.747	5.963.938.852.933	6.776.825.100.680	812.883.898.747	5.963.938.852.933	6.776.822.751.680
304	Kab. Berau	144.284.026.836	2.447.631.290.308	2.591.915.317.144	144.283.765.836	2.447.631.290.308	2.591.915.056.144
305	Kab. Kutai Kartanegara	1.049.919.095.033	4.532.096.221.189	5.582.015.316.222	1.049.918.834.033	4.532.096.221.189	5.582.015.055.222
306	Kab. Kutai Barat	131.063.549.111	2.218.568.173.945	2.349.631.723.056	131.063.288.111	2.218.568.173.945	2.349.631.462.056
307	Kab. Kutai Timur	403.966.914.124	4.368.414.819.491	4.772.381.733.615	403.966.653.124	4.368.414.819.491	4.772.381.472.615
308	Kab. Paser	125.316.107.119	2.132.908.191.900	2.258.224.299.019	125.315.846.119	2.132.908.191.900	2.258.224.038.019
309	Kota Balikpapan	147.494.088.197	1.258.708.299.648	1.406.202.387.845	147.493.603.197	1.258.708.299.648	1.406.201.902.845
310	Kota Bontang	204.923.764.558	1.289.911.215.432	1.494.834.979.990	204.923.503.558	1.285.756.891.832	1.490.680.395.390
311	Kota Samarinda	114.836.213.710	1.481.815.256.300	1.596.651.470.010	114.835.995.685	1.481.815.256.300	1.596.651.251.985
312	Kab. Penajam Paser Utara	73.903.242.121	1.349.634.178.257	1.423.537.420.378	73.902.981.121	1.349.634.178.257	1.423.537.159.378
313	Kab. Mahakam Ulu	38.568.185.700	1.247.729.294.038	1.286.297.479.738	38.567.924.700	1.247.729.294.038	1.286.297.218.738
314	Provinsi Sulawesi Utara	116.938.447.530	151.068.410.894	268.006.858.424	116.938.447.530	151.068.410.894	268.006.858.424
315	Kab. Bolaang Mongondow	23.516.543.799	67.260.004.075	90.776.547.874	23.516.543.799	67.260.004.075	90.776.547.874
316	Kab. Minahasa	25.569.274.103	41.368.308.128	66.937.582.231	25.569.274.103	41.368.308.128	66.937.582.231
317	Kab. Sangihe	12.564.441.863	25.600.265.196	38.164.707.059	12.564.441.863	25.600.265.196	38.164.707.059
318	Kota Bitung	84.380.795.486	156.947.142.736	241.327.938.222	84.380.795.486	156.947.142.736	241.327.938.222
319	Kota Manado	51.792.189.876	23.423.622.022	75.215.811.898	51.792.189.876	23.423.622.022	75.215.811.898
320	Kab. Kepulauan Talaud	10.593.301.901	23.243.406.040	33.836.707.941	10.593.301.901	23.243.406.040	33.836.707.941
321	Kab. Minahasa Selatan	12.684.526.999	24.829.495.188	37.514.022.187	12.684.526.999	24.828.725.088	37.513.252.087
322	Kota Tomohon	20.065.607.141	36.997.220.917	57.062.828.058	20.065.607.141	36.997.220.917	57.062.828.058
323	Kab. Minahasa Utara	51.956.135.023	78.921.898.958	130.878.033.981	51.956.135.023	78.921.898.958	130.878.033.981
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	9.986.883.987	23.243.406.040	33.230.290.027	9.986.883.987	23.243.406.040	33.230.290.027
325	Kota Kotamobagu	12.431.683.732	23.642.462.151	36.074.145.883	12.431.683.732	23.641.692.051	36.073.375.783
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	9.975.235.692	23.569.690.224	33.544.925.916	9.975.235.692	23.569.690.224	33.544.925.916
327	Kab. Minahasa Tenggara	10.334.121.622	24.656.335.119	34.990.456.741	10.334.121.622	24.656.335.119	34.990.456.741
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	10.515.860.044	27.457.081.774	37.972.941.818	10.515.860.044	27.457.081.774	37.972.941.818
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	20.458.915.082	42.342.290.243	62.801.205.325	20.458.915.082	42.342.290.243	62.801.205.325
330	Provinsi Sulawesi Tengah	164.507.976.392	445.771.478.960	610.279.455.352	164.495.644.112	445.771.478.960	610.267.123.072
331	Kab. Banggai	205.983.297.809	446.014.699.896	651.997.997.705	205.975.869.284	446.014.699.896	651.990.569.180
332	Kab. Banggai Kepulauan	11.560.932.713	70.925.842.825	82.486.775.538	11.559.890.438	70.925.842.825	82.485.733.263
333	Kab. Buol	17.416.557.576	77.266.220.722	94.682.778.298	17.409.192.166	77.266.220.722	94.675.412.888
334	Kab. Tolitoli	14.401.818.238	77.219.888.906	91.621.707.144	14.400.775.963	77.219.888.906	91.620.664.869
335	Kab. Donggala	15.584.944.394	71.033.219.220	86.618.163.614	15.577.578.984	70.871.040.070	86.448.619.054
336	Kab. Morowali	99.809.974.595	394.663.735.276	494.473.709.871	99.802.609.185	394.119.095.376	493.921.704.561
337	Kab. Poso	15.108.056.278	71.842.717.569	86.950.773.847	15.107.639.368	71.842.717.569	86.950.356.937
338	Kota Palu	34.066.995.453	70.995.927.819	105.062.923.272	34.059.547.593	70.995.927.819	105.055.475.412
339	Kab. Parigi Moutong	14.809.267.312	71.828.203.194	86.637.470.506	14.805.151.252	71.828.203.194	86.633.354.446
340	Kab. Tojo Una Una	12.659.425.175	73.311.803.891	85.971.229.066	12.658.382.900	73.311.803.891	85.970.186.791
341	Kab. Sigi	12.213.918.758	76.351.553.984	88.565.472.742	12.206.553.348	76.351.553.984	88.558.107.332
342	Kab. Banggai Laut	10.721.645.039	70.606.351.788	81.327.996.827	10.720.602.764	70.606.351.788	81.326.954.552
343	Kab. Morowali Utara	33.734.105.518	152.672.015.482	186.406.121.000	33.726.740.108	152.672.015.482	186.398.755.590
344	Provinsi Sulawesi Selatan	266.536.996.465	138.542.614.566	405.079.611.031	266.415.389.155	138.542.614.566	404.958.003.721
345	Kab. Bantaeng	13.480.348.033	13.441.783.165	26.922.131.198	13.480.348.033	13.441.783.165	26.922.131.198
346	Kab. Barru	13.842.069.430	13.540.673.687	27.382.743.117	13.842.069.430	13.540.673.687	27.382.743.117
347	Kab. Bone	25.566.563.074	15.190.350.371	40.756.913.445	25.566.563.074	15.190.350.371	40.756.913.445
348	Kab. Bulukumba	18.449.196.899	13.451.966.826	31.901.163.725	18.442.096.049	13.451.966.826	31.894.062.875
349	Kab. Enrekang	13.567.471.659	13.482.086.669	27.049.558.328	13.567.471.659	13.482.086.669	27.049.558.328
350	Kab. Gowa	20.249.587.806	13.488.567.300	33.738.155.106	20.249.587.806	13.488.567.300	33.738.155.106
351	Kab. Jeneponto	16.563.960.968	13.437.394.801	30.001.355.769	16.563.960.968	13.437.394.801	30.001.355.769
352	Kab. Luwu	14.295.316.732	15.138.524.508	29.433.841.240	14.289.751.312	15.138.524.508	29.428.275.820

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2022					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
353	Kab. Luwu Utara	15.003.113.722	15.682.209.692	30.685.323.414	14.997.826.432	15.682.209.692	30.680.036.124
354	Kab. Maros	26.505.318.238	13.510.001.951	40.015.320.189	26.499.804.928	13.510.001.951	40.009.806.879
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	37.024.415.108	13.628.782.909	50.653.198.017	37.024.415.108	13.600.143.859	50.624.558.967
356	Kota Palopo	16.423.088.801	13.437.998.899	29.861.087.700	16.417.801.511	13.437.998.899	29.855.800.410
357	Kab. Luwu Timur	81.401.517.221	250.746.751.778	332.148.268.999	81.401.517.221	250.341.530.178	331.743.047.399
358	Kab. Pinrang	15.007.916.341	13.445.001.926	28.452.918.267	14.994.411.106	13.445.001.926	28.439.413.032
359	Kab. Sinjai	14.952.673.485	13.450.200.435	28.402.873.920	14.952.673.485	13.450.200.435	28.402.873.920
360	Kab. Kepulauan Selayar	13.190.489.077	13.442.175.890	26.632.664.967	13.190.489.077	13.442.175.890	26.632.664.967
361	Kab. Sidenreng Rappang	14.590.421.531	13.450.492.047	28.040.913.578	14.590.421.531	13.419.716.097	28.010.137.628
362	Kab. Soppeng	18.134.139.966	13.429.503.502	31.563.643.468	18.031.893.216	13.429.503.502	31.461.396.718
363	Kab. Takalar	17.602.982.345	13.494.051.467	31.097.033.812	17.602.982.345	13.494.051.467	31.097.033.812
364	Kab. Tana Toraja	13.620.752.742	13.680.686.850	27.301.439.592	13.615.465.452	13.680.686.850	27.296.152.302
365	Kab. Wajo	32.691.748.178	31.234.586.641	63.926.334.819	32.685.384.398	31.234.586.641	63.919.971.039
366	Kota Parepare	16.542.873.519	13.437.998.899	29.980.872.418	16.529.368.284	13.437.998.899	29.967.367.183
367	Kota Makassar	143.024.295.096	11.412.245.571	154.436.540.667	143.019.007.806	11.412.245.571	154.431.253.377
368	Kab. Toraja Utara	13.379.802.849	13.471.270.654	26.851.073.503	13.379.802.849	13.471.270.654	26.851.073.503
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	100.723.615.369	671.779.910.070	772.503.525.439	100.722.803.369	671.779.910.070	772.502.713.439
370	Kab. Buton	9.448.295.119	94.493.069.276	103.941.364.395	9.448.245.119	94.493.069.276	103.941.314.395
371	Kab. Konawe	17.192.688.723	94.093.809.157	111.286.497.880	17.192.638.723	93.901.820.157	111.094.458.880
372	Kab. Kolaka	53.336.284.574	412.494.926.077	465.831.210.651	53.336.234.574	412.494.926.077	465.831.160.651
373	Kab. Muna	10.423.300.300	90.767.275.725	101.190.576.025	10.423.250.300	90.702.786.225	101.126.036.525
374	Kota Kendari	32.612.578.805	90.687.410.115	123.299.988.920	32.611.495.805	90.687.410.115	123.298.905.920
375	Kota Bau-bau	11.392.998.229	90.743.803.392	102.136.801.621	11.392.948.229	90.743.803.392	102.136.751.621
376	Kab. Konawe Selatan	35.915.569.120	243.075.595.649	278.991.164.769	35.915.519.120	243.075.595.649	278.991.114.769
377	Kab. Bombana	66.192.601.571	290.119.634.557	356.312.236.128	66.192.551.571	290.119.634.557	356.312.186.128
378	Kab. Wakatobi	9.127.636.699	90.627.837.469	99.755.474.168	9.127.586.699	90.627.837.469	99.755.424.168
379	Kab. Kolaka Utara	9.987.040.448	153.384.394.601	163.371.435.049	9.986.990.448	153.384.394.601	163.371.385.049
380	Kab. Konawe Utara	61.789.440.081	543.786.077.859	605.575.517.940	61.789.390.081	543.591.417.659	605.380.807.740
381	Kab. Buton Utara	8.928.127.406	90.783.043.079	99.711.170.485	8.928.077.406	90.686.902.129	99.614.979.535
382	Kab. Konawe Kepulauan	8.637.486.498	91.350.585.303	99.988.071.801	8.637.436.498	91.350.585.303	99.988.021.801
383	Kab. Kolaka Timur	9.678.475.722	84.793.803.000	94.472.278.722	9.678.425.722	84.497.042.500	94.175.468.222
384	Kab. Muna Barat	8.573.329.468	90.627.837.469	99.201.166.937	8.573.279.468	90.627.837.469	99.201.116.937
385	Kab. Buton Tengah	11.488.931.871	113.976.627.069	125.465.558.940	11.488.904.621	113.976.627.069	125.465.531.690
386	Kab. Buton Selatan	8.841.557.376	90.646.813.472	99.488.370.848	8.841.507.376	90.587.587.172	99.429.094.548
387	Provinsi Bali	183.161.154.427	216.085	183.161.370.512	183.025.402.117	216.085	183.025.618.202
388	Kab. Badung	62.059.324.263	2.170.118.509	64.229.442.772	62.025.992.163	2.170.118.509	64.196.110.672
389	Kab. Bangli	19.884.728.424	2.170.118.509	22.054.846.933	19.877.724.054	2.170.118.509	22.047.842.563
390	Kab. Buleleng	30.637.561.100	2.170.118.509	32.807.679.609	30.637.561.100	2.170.118.509	32.807.679.609
391	Kab. Gianyar	26.091.576.387	2.170.118.509	28.261.694.896	26.057.559.792	2.170.118.509	28.227.678.301
392	Kab. Jembrana	21.415.805.652	2.170.518.544	23.586.324.196	21.408.596.052	2.170.518.544	23.579.114.596
393	Kab. Karangasem	22.655.203.192	2.170.118.509	24.825.321.701	22.633.509.022	2.170.118.509	24.803.627.531
394	Kab. Klungkung	20.851.423.154	2.170.118.509	23.021.541.663	20.844.779.804	2.170.118.509	23.014.898.313
395	Kab. Tabanan	26.974.653.668	2.170.118.509	29.144.772.177	26.940.572.753	2.170.118.509	29.110.691.262
396	Kota Denpasar	95.886.778.435	2.170.118.509	98.056.896.944	95.804.398.330	2.170.118.509	97.974.516.839
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	255.124.421.579	242.278.515.655	497.402.937.234	252.160.999.529	242.278.515.655	494.439.515.184
398	Kab. Bima	27.721.123.883	56.583.244.649	84.304.368.532	26.815.072.058	56.535.507.799	83.350.579.857
399	Kab. Dompu	21.451.598.692	57.707.692.919	79.159.291.611	21.268.827.262	57.580.697.819	78.849.525.081
400	Kab. Lombok Barat	37.698.989.777	56.391.354.488	94.090.344.265	37.698.989.777	56.391.354.488	94.090.344.265
401	Kab. Lombok Tengah	90.105.484.817	56.045.444.192	146.150.929.009	88.372.760.987	55.997.143.792	144.369.904.779
402	Kab. Lombok Timur	97.641.406.269	56.423.189.130	154.064.595.399	95.757.327.909	56.370.444.080	152.127.771.989
403	Kab. Sumbawa	38.665.315.544	58.973.619.918	97.638.935.462	38.311.866.584	58.973.619.918	97.285.486.502
404	Kota Mataram	107.671.966.497	56.044.192.004	163.716.158.501	103.788.552.552	56.044.192.004	159.832.744.556
405	Kota Bima	19.689.411.285	56.048.250.221	75.737.661.506	19.584.009.795	56.048.250.221	75.632.260.016
406	Kab. Sumbawa Barat	233.033.686.564	460.977.829.995	694.011.516.559	233.033.686.564	460.793.345.145	693.827.031.709
407	Kab. Lombok Utara	19.499.910.938	56.044.954.274	75.544.865.212	19.331.407.298	56.044.954.274	75.376.361.572
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	71.039.624.326	2.882.128.925	73.921.753.251	70.440.021.226	2.879.157.425	73.319.178.651
409	Kab. Alor	9.525.605.134	2.473.775.683	11.999.380.817	9.516.897.709	2.473.775.683	11.990.673.392
410	Kab. Belu	10.273.828.603	2.716.415.569	12.990.244.172	10.156.087.603	2.716.415.569	12.872.503.172
411	Kab. Ende	13.048.258.852	3.661.732.610	16.709.991.462	12.980.240.672	3.661.732.610	16.641.973.282
412	Kab. Flores Timur	10.598.762.869	2.443.894.560	13.042.657.429	10.297.570.799	2.443.846.960	12.741.417.759
413	Kab. Kupang	11.011.848.099	3.452.796.091	14.464.644.190	10.943.986.879	3.452.796.091	14.396.782.970
414	Kab. Lembata	9.085.976.530	2.635.227.498	11.721.204.028	9.078.174.505	2.635.227.498	11.713.402.003
415	Kab. Manggarai	12.501.752.581	3.572.136.974	16.073.889.555	12.300.693.826	3.572.136.974	15.872.830.800
416	Kab. Ngada	9.640.253.300	2.370.613.888	12.010.867.188	9.547.271.300	2.370.613.888	11.917.885.188
417	Kab. Sikka	12.520.661.452	2.351.340.173	14.872.001.625	12.406.388.827	2.351.340.173	14.757.729.000
418	Kab. Sumba Barat	9.295.575.536	2.351.340.173	11.646.915.709	9.201.074.536	2.351.340.173	11.552.414.709
419	Kab. Sumba Timur	15.512.239.065	2.351.340.173	17.863.579.238	15.459.401.940	2.351.340.173	17.810.742.113
420	Kab. Timor Tengah Selatan	10.685.786.342	3.596.140.194	14.281.926.536	10.616.291.757	3.596.140.194	14.212.431.951
421	Kab. Timor Tengah Utara	10.043.791.296	3.727.592.463	13.771.383.759	9.940.256.296	3.727.592.463	13.667.848.759
422	Kota Kupang	32.642.729.619	2.351.340.173	34.994.069.792	32.566.376.619	2.351.340.173	34.917.716.792
423	Kab. Rote Ndao	9.365.883.815	2.351.533.444	11.717.417.259	9.362.583.185	2.351.533.444	11.714.116.629

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2022					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
424	Kab. Manggarai Barat	10.144.816.022	2.353.107.068	12.497.923.090	10.131.846.572	2.353.107.068	12.484.953.640
425	Kab. Nagekeo	8.924.258.948	2.400.005.514	11.324.264.462	8.921.572.838	2.400.005.514	11.321.578.352
426	Kab. Sumba Barat Daya	9.669.229.476	2.351.340.173	12.020.569.649	9.643.858.191	2.351.340.173	11.995.198.364
427	Kab. Sumba Tengah	8.433.365.466	2.351.340.173	10.784.705.639	8.354.877.466	2.351.340.173	10.706.217.639
428	Kab. Manggarai Timur	9.438.867.410	2.431.814.194	11.870.681.604	9.393.403.790	2.431.814.194	11.825.217.984
429	Kab. Sabu Raijua	8.297.114.447	2.504.554.045	10.801.668.492	8.198.589.447	2.504.554.045	10.703.143.494
430	Kab. Malaka	9.127.746.145	2.893.665.029	12.021.411.174	9.021.830.145	2.893.665.029	11.915.495.174
431	Provinsi Maluku	45.498.832.230	52.678.453.471	98.177.285.701	45.498.832.230	51.252.648.758	96.751.480.988
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	10.451.628.195	7.657.040.337	18.108.668.532	10.451.628.195	5.817.369.187	16.268.997.382
433	Kab. Maluku Tengah	19.441.900.297	6.530.596.440	25.972.496.737	19.441.900.297	6.530.596.440	25.972.496.737
434	Kab. Maluku Tenggara	9.871.643.955	6.514.691.313	16.386.335.268	9.871.643.955	5.832.766.063	15.704.410.018
435	Kab. Buru	10.954.908.113	9.980.627.245	20.935.535.358	10.954.908.113	6.661.393.395	17.616.301.508
436	Kota Ambon	27.608.973.346	6.513.961.055	34.122.934.401	27.608.973.346	6.513.961.055	34.122.934.401
437	Kab. Seram Bagian Barat	9.775.762.701	7.088.856.872	16.864.619.573	9.775.762.701	7.088.856.872	16.864.619.573
438	Kab. Seram Bagian Timur	26.988.458.399	16.744.431.185	43.732.889.584	26.988.458.399	16.744.431.185	43.732.889.584
439	Kab. Kepulauan Aru	11.627.368.370	5.934.357.029	17.561.725.399	11.627.368.370	5.934.357.029	17.561.725.399
440	Kota Tual	8.629.725.631	6.513.961.055	15.143.686.686	8.629.725.631	6.513.961.055	15.143.686.686
441	Kab. Maluku Barat Daya	11.950.824.939	27.326.867.480	39.277.692.419	11.950.824.939	27.326.867.480	39.277.692.419
442	Kab. Buru Selatan	10.077.103.272	9.718.196.950	19.795.300.222	10.077.103.272	9.718.196.950	19.795.300.222
443	Provinsi Papua	569.934.994.544	1.509.447.368.748	2.079.382.363.292	569.934.994.544	1.509.447.368.748	2.079.382.363.292
444	Kab. Biak Numfor	14.523.942.564	104.848.544.270	119.372.486.834	14.523.942.564	104.848.544.270	119.372.486.834
445	Kab. Jayapura	21.860.698.773	106.911.259.122	128.771.957.895	21.860.698.773	106.911.259.122	128.771.957.895
446	Kab. Jayawijaya	14.426.709.420	104.848.185.236	119.274.894.656	14.426.709.420	104.848.185.236	119.274.894.656
447	Kab. Merauke	47.583.305.446	107.873.995.657	155.457.301.103	47.583.305.446	107.873.995.657	155.457.301.103
448	Kab. Mimika	1.307.768.892.205	2.858.899.934.669	4.166.668.826.874	1.307.768.892.205	2.856.147.882.869	4.163.916.775.074
449	Kab. Nabire	22.330.630.929	115.372.517.626	137.703.148.555	22.330.630.929	115.372.517.626	137.703.148.555
450	Kab. Paniai	12.261.502.282	100.345.398.503	112.606.900.785	12.261.502.282	100.345.398.503	112.606.900.785
451	Kab. Puncak Jaya	12.961.646.897	104.848.459.796	117.810.106.693	12.961.646.897	104.848.459.796	117.810.106.693
452	Kab. Kepulauan Yapen	12.339.262.391	104.848.185.236	117.187.447.627	12.339.262.391	104.848.185.236	117.187.447.627
453	Kota Jayapura	60.153.932.308	104.774.309.497	164.928.241.805	60.153.932.308	104.774.309.497	164.928.241.805
454	Kab. Sarmi	18.590.060.178	118.214.507.579	136.804.567.757	18.590.060.178	117.184.513.079	135.774.573.257
455	Kab. Keerom	18.930.484.870	112.025.227.249	130.955.712.119	18.930.484.870	112.025.227.249	130.955.712.119
456	Kab. Yahukimo	13.674.937.746	104.848.742.625	118.523.680.371	13.674.937.746	104.848.742.625	118.523.680.371
457	Kab. Pegunungan Bintang	14.688.942.427	117.343.587.306	132.032.529.733	14.688.942.427	117.343.587.306	132.032.529.733
458	Kab. Tolikara	12.769.234.109	104.848.185.236	117.617.419.345	12.769.234.109	104.848.185.236	117.617.419.345
459	Kab. Boven Digoel	26.457.372.246	107.229.294.179	133.686.666.425	26.457.372.246	107.229.294.179	133.686.666.425
460	Kab. Mappi	14.770.903.414	105.017.067.817	119.787.971.231	14.770.903.414	105.017.067.817	119.787.971.231
461	Kab. Asmat	14.735.579.291	102.612.643.701	117.348.222.992	14.735.579.291	102.612.643.701	117.348.222.992
462	Kab. Waropen	13.952.534.259	104.824.782.116	118.777.316.375	13.952.534.259	104.192.263.116	118.144.797.375
463	Kab. Supiori	11.691.281.449	104.848.698.300	116.539.979.749	11.691.281.449	104.848.698.300	116.539.979.749
464	Kab. Mamberamo Raya	15.000.222.975	104.810.428.309	119.810.222.975	15.000.222.975	104.173.115.884	119.173.338.859
465	Kab. Mamberamo Tengah	11.571.746.471	104.843.561.171	116.415.307.642	11.571.746.471	104.843.561.171	116.415.307.642
466	Kab. Yalimo	11.826.114.251	104.848.185.236	116.674.299.487	11.826.114.251	104.848.185.236	116.674.299.487
467	Kab. Lanny Jaya	11.483.148.896	104.848.185.236	116.331.334.132	11.483.148.896	104.848.185.236	116.331.334.132
468	Kab. Nduga	11.967.626.502	99.255.727.487	111.223.353.989	11.967.626.502	99.255.727.487	111.223.353.989
469	Kab. Dogiyai	12.068.231.932	101.453.534.629	113.521.766.561	12.068.231.932	101.453.534.629	113.521.766.561
470	Kab. Puncak	12.981.752.249	100.666.080.706	113.647.832.955	12.981.752.249	100.666.080.706	113.647.832.955
471	Kab. Intan Jaya	13.487.141.151	101.831.574.719	115.318.715.870	13.487.141.151	101.831.574.719	115.318.715.870
472	Kab. Deiyai	13.644.379.491	100.178.005.652	113.822.385.143	13.644.379.491	100.178.005.652	113.822.385.143
473	Provinsi Maluku Utara	116.804.026.036	391.549.669.098	508.353.695.134	116.804.026.036	390.886.845.730	507.690.871.766
474	Kab. Halmahera Tengah	111.749.120.429	212.504.563.222	324.253.683.651	111.749.120.429	212.504.563.222	324.253.683.651
475	Kota Ternate	32.290.207.947	84.195.604.060	116.485.812.007	32.290.207.947	83.873.063.060	116.163.271.007
476	Kab. Halmahera Barat	11.236.345.791	90.141.844.797	101.378.190.588	11.236.345.791	90.141.844.797	101.378.190.588
477	Kab. Halmahera Timur	46.427.596.909	325.328.957.875	371.756.554.784	46.427.596.909	325.328.957.875	371.756.554.784
478	Kab. Halmahera Selatan	57.182.402.907	206.749.718.711	263.932.121.618	57.182.402.907	204.821.446.111	262.003.849.018
479	Kab. Halmahera Utara	54.615.375.621	168.012.191.633	222.627.567.254	54.615.375.621	168.012.191.633	222.627.567.254
480	Kab. Kepulauan Sula	12.951.643.456	104.588.675.700	117.540.319.156	12.951.643.456	104.588.675.700	117.540.319.156
481	Kota Tidore Kepulauan	15.448.562.225	83.285.222.516	98.733.784.741	15.448.562.225	83.285.222.516	98.733.784.741
482	Kab. Pulau Morotai	10.440.013.686	85.591.809.448	96.031.823.134	10.440.013.686	85.268.662.398	95.708.676.084
483	Kab. Pulau Taliabu	17.387.709.612	150.861.103.245	168.248.812.857	17.387.709.612	150.432.285.895	167.819.995.507
484	Provinsi Banten	860.991.640.460	8.237.156.612	869.228.797.072	860.690.097.460	8.237.156.612	868.927.254.072
485	Kab. Lebak	79.716.632.037	5.985.668.802	85.702.300.839	79.673.555.037	5.985.668.802	85.659.223.839
486	Kab. Pandeglang	78.048.722.540	22.358.617.386	100.407.339.926	78.005.645.540	22.358.617.386	100.364.262.926
487	Kab. Serang	110.989.284.283	4.740.157.032	115.729.441.315	110.946.207.283	4.740.157.032	115.686.364.315
488	Kab. Tangerang	281.760.789.781	4.377.032.253	286.137.822.034	281.691.654.781	4.377.032.253	286.068.687.034
489	Kota Cilegon	142.074.183.052	5.041.368.440	147.115.551.492	142.031.106.052	5.041.368.440	147.072.474.492
490	Kota Tangerang	322.763.748.761	4.361.825.356	327.125.574.117	322.622.448.761	4.361.825.356	326.984.274.117
491	Kota Serang	99.408.792.400	5.045.972.631	104.454.765.031	99.365.715.400	5.045.972.631	104.411.688.031
492	Kota Tangerang Selatan	242.573.133.242	4.361.825.356	246.934.958.598	242.295.357.242	4.361.825.356	246.657.182.598
493	Provinsi Bangka Belitung	87.632.630.192	441.789.732.218	529.422.362.410	87.632.630.192	441.789.732.218	529.422.362.410
494	Kab. Bangka	77.308.002.995	265.194.269.454	342.502.272.449	77.308.002.995	265.194.269.454	342.502.272.449

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	TA 2022					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
495	Kab. Belitung	32.787.944.027	158.339.606.555	191.127.550.582	32.787.944.027	158.339.606.555	191.127.550.582
496	Kota Pangkal Pinang	26.594.857.999	126.844.611.814	153.439.469.813	26.594.857.999	126.844.611.814	153.439.469.813
497	Kab. Bangka Selatan	34.377.864.975	199.131.662.173	233.509.527.148	34.377.864.975	199.131.662.173	233.509.527.148
498	Kab. Bangka Tengah	32.760.745.673	153.958.826.593	186.719.572.266	32.760.745.673	153.958.826.593	186.719.572.266
499	Kab. Bangka Barat	40.163.781.181	188.006.573.945	228.170.355.126	40.163.781.181	188.006.573.945	228.170.355.126
500	Kab. Belitung Timur	40.581.868.605	188.997.911.795	229.579.780.400	40.581.868.605	188.997.911.795	229.579.780.400
501	Provinsi Gorontalo	25.593.210.316	1.609.836.723	27.203.047.039	25.593.106.266	1.609.836.723	27.202.942.989
502	Kab. Boalemo	11.242.607.337	2.230.118.515	13.472.725.852	11.242.569.337	2.230.118.515	13.472.687.852
503	Kab. Gorontalo	14.561.140.522	2.393.910.053	16.955.050.575	14.560.884.522	2.393.910.053	16.954.794.575
504	Kota Gorontalo	18.424.260.382	2.227.683.952	20.651.944.334	18.424.222.382	2.227.683.952	20.651.906.334
505	Kab. Pohuwato	12.111.820.177	3.326.144.492	15.437.964.669	12.111.782.177	3.326.144.492	15.437.926.669
506	Kab. Bone Bolango	11.474.778.664	2.654.761.804	14.129.540.468	11.474.704.664	2.611.750.954	14.086.491.618
507	Kab. Gorontalo Utara	11.166.274.188	2.429.067.838	13.595.342.026	11.166.236.188	2.429.067.838	13.595.304.026
508	Provinsi Kepulauan Riau	201.892.753.961	531.382.817.022	733.275.570.983	201.888.160.256	531.382.817.022	733.270.977.278
509	Kab. Natuna	84.705.358.482	251.523.137.344	336.228.495.826	84.704.592.912	251.523.137.344	336.227.730.256
510	Kab. Kepulauan Anambas	63.698.973.300	204.305.987.331	268.004.960.631	63.698.207.730	204.305.987.331	268.004.195.061
511	Kab. Karimun	49.632.803.034	184.696.728.086	234.329.531.120	49.632.037.464	184.522.344.636	234.154.382.100
512	Kota Batam	137.682.891.807	148.869.468.265	286.552.360.072	137.680.493.937	148.869.468.265	286.549.962.202
513	Kota Tanjung Pinang	33.880.742.391	158.888.590.981	192.769.333.372	33.879.976.821	158.888.590.981	192.768.567.802
514	Kab. Lingga	22.553.245.122	167.481.280.779	190.034.525.901	22.553.245.122	167.481.280.779	190.034.525.901
515	Kab. Bintan	30.916.167.406	157.837.853.105	188.754.020.511	30.915.401.836	157.791.374.255	188.706.776.091
516	Provinsi Papua Barat	201.804.872.146	3.073.775.330.126	3.275.580.202.272	201.804.872.146	3.073.775.330.126	3.275.580.202.272
517	Kab. Fak Fak	40.791.798.372	91.426.487.536	132.218.285.908	40.791.798.372	91.426.487.536	132.218.285.908
518	Kab. Manokwari	26.028.659.968	74.815.294.331	100.843.954.299	26.028.659.968	72.403.857.081	98.432.517.049
519	Kab. Sorong	133.470.771.780	97.579.139.108	231.049.910.888	133.470.771.780	94.569.348.608	228.040.120.388
520	Kota Sorong	22.639.632.810	68.282.674.153	90.922.306.963	22.639.632.810	68.282.674.153	90.922.306.963
521	Kab. Raja Ampat	27.628.338.377	136.198.699.954	163.827.038.331	27.628.338.377	136.198.699.954	163.827.038.331
522	Kab. Sorong Selatan	13.837.438.735	69.254.304.214	83.091.742.949	13.837.438.735	69.254.304.214	83.091.742.949
523	Kab. Teluk Bintuni	421.956.297.029	692.799.399.993	1.114.755.697.022	421.956.297.029	692.799.399.993	1.114.755.697.022
524	Kab. Teluk Wondama	13.242.514.015	75.587.696.503	88.830.210.518	13.242.514.015	69.003.726.553	82.246.240.568
525	Kab. Kaimana	22.989.702.115	81.120.585.278	104.110.287.393	22.989.702.115	81.120.585.278	104.110.287.393
526	Kab. Maybrat	11.988.795.036	69.645.371.826	81.634.166.862	11.988.795.036	67.245.310.976	79.234.106.012
527	Kab. Tambrauw	11.641.560.737	69.072.319.443	80.713.880.180	11.641.560.737	66.670.835.693	78.312.396.430
528	Kab. Manokwari Selatan	10.913.757.219	70.285.130.250	81.198.887.469	10.913.757.219	70.285.130.250	81.198.887.469
529	Kab. Pegunungan Arfak	12.805.869.986	70.223.190.873	83.029.060.859	12.805.869.986	70.223.190.873	83.029.060.859
530	Provinsi Sulawesi Barat	20.841.552.280	321.074.489	21.162.626.769	20.841.552.280	321.074.489	21.162.626.769
531	Kab. Majene	9.748.952.516	2.221.892.205	11.970.844.721	9.748.952.516	2.221.892.205	11.970.844.721
532	Kab. Mamuju	16.858.004.835	2.754.814.190	19.612.819.025	16.858.004.835	2.737.662.890	19.595.667.725
533	Kab. Polewali Mandar	11.563.088.054	2.364.892.708	13.927.980.762	11.563.088.054	2.364.892.708	13.927.980.762
534	Kab. Mamasa	9.227.341.405	2.240.175.250	11.467.516.655	9.227.341.405	2.240.175.250	11.467.516.655
535	Kab. Pasangkayu	20.116.973.581	2.298.345.967	22.415.319.548	20.116.973.581	2.290.557.417	22.407.530.998
536	Kab. Mamuju Tengah	10.857.473.410	2.225.851.555	13.083.324.965	10.857.473.410	2.225.851.555	13.083.324.965
537	Provinsi Kalimantan Utara	133.338.279.371	475.806.771.035	609.145.050.406	133.338.279.371	475.806.771.035	609.145.050.406
538	Kab. Bulungan	127.836.983.489	279.326.831.373	407.163.814.862	127.836.983.489	279.326.831.373	407.163.814.862
539	Kab. Malinau	68.948.856.317	444.838.320.545	513.787.176.862	68.948.856.317	444.838.320.545	513.787.176.862
540	Kab. Nunukan	76.848.875.787	319.239.978.413	396.088.854.200	76.848.875.787	319.239.978.413	396.088.854.200
541	Kota Tarakan	126.070.751.056	213.302.878.736	339.373.629.792	126.070.751.056	213.302.878.736	339.373.629.792
542	Kab. Tana Tidung	65.711.674.077	371.346.377.850	437.058.051.927	65.711.674.077	371.346.377.850	437.058.051.927
Sisa Lebih							
Kurang Bayar							
Jumlah		67.699.092.141.343	100.897.631.785.657	168.596.723.927.000	67.590.162.805.658	100.823.947.472.776	168.414.110.278.434

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
1	Provinsi Aceh	171.071.748.312	105.098.852.686	61.374.013.247	4.296.224.034	170.769.089.967
2	Kab. Aceh Barat	18.491.734.066	7.192.831.687	11.089.863.855	195.281.409	18.477.976.951
3	Kab. Aceh Besar	16.867.061.166	8.566.528.039	7.915.153.942	361.795.105	16.843.477.086
4	Kab. Aceh Selatan	14.000.794.296	5.260.376.589	8.514.953.375	217.093.117	13.992.423.081
5	Kab. Aceh Singkil	20.691.847.146	3.848.904.300	16.617.478.514	217.093.117	20.683.475.931
6	Kab. Aceh Tengah	13.817.505.128	5.500.072.407	7.549.843.420	717.073.246	13.766.989.073
7	Kab. Aceh Tenggara	11.365.200.982	4.471.487.506	6.662.970.002	216.638.929	11.351.096.437
8	Kab. Aceh Timur	44.712.949.847	6.751.802.448	37.719.680.019	225.576.080	44.697.058.547
9	Kab. Aceh Utara	74.229.781.395	9.271.255.428	64.671.992.349	269.103.753	74.212.351.530
10	Kab. Bireuen	16.263.143.401	7.744.986.151	8.290.711.010	126.847.540	16.162.544.701
11	Kab. Pidie	15.318.159.752	7.703.965.638	7.198.144.220	388.669.104	15.290.778.962
12	Kab. Simeulue	9.941.334.444	3.319.413.638	6.396.456.474	69.957.432	9.785.827.544
13	Kota Banda Aceh	48.740.500.743	38.925.941.527	6.192.603.825	3.621.955.391	48.740.500.743
14	Kota Sabang	9.935.654.400	3.588.852.416	6.121.337.652	211.707.217	9.921.897.285
15	Kota Langsa	15.407.121.523	7.805.779.190	7.375.878.001	211.707.217	15.393.364.408
16	Kota Lhokseumawe	22.890.404.586	10.628.048.193	12.004.040.445	258.315.948	22.890.404.586
17	Kab. Gayo Lues	11.883.979.538	3.321.878.870	6.813.022.146	1.642.263.897	11.777.164.913
18	Kab. Aceh Barat Daya	11.522.456.684	3.881.369.327	7.432.048.833	200.667.309	11.514.085.469
19	Kab. Aceh Jaya	11.131.391.269	3.473.051.337	7.449.301.408	107.390.624	11.029.743.369
20	Kab. Nagan Raya	23.419.257.977	6.563.769.968	16.646.449.485	203.652.624	23.413.872.077
21	Kab. Aceh Tamiang	96.733.193.360	5.988.353.458	90.519.375.570	220.078.432	96.727.807.460
22	Kab. Bener Meriah	11.193.299.141	3.965.363.211	6.895.554.002	189.681.548	11.050.598.761
23	Kab. Pidie Jaya	10.635.954.995	3.803.610.519	6.333.344.332	468.467.824	10.605.422.675
24	Kota Subulussalam	12.850.707.724	4.005.208.885	8.620.034.507	211.707.217	12.836.950.609
25	Provinsi Sumatera Utara	631.614.620.216	401.704.680.072	223.105.286.918	6.637.589.496	631.447.556.486
26	Kab. Asahan	95.029.949.178	15.970.256.407	78.847.047.575	212.645.196	95.029.949.178

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
27	Kab. Dairi	18.823.894.157	8.359.741.718	9.920.025.684	530.720.775	18.810.488.177
28	Kab. Deli Serdang	120.951.798.416	44.533.868.148	76.204.099.685	208.609.833	120.946.577.666
29	Kab. Karo	19.438.101.321	10.320.835.999	8.101.422.439	1.015.842.883	19.438.101.321
30	Kab. Labuhanbatu	64.072.178.521	14.032.750.143	49.836.799.438	197.408.190	64.066.957.771
31	Kab. Langkat	203.219.949.620	14.645.545.856	188.361.758.568	207.424.446	203.214.728.870
32	Kab. Mandailing Natal	48.479.978.321	9.679.435.335	38.584.127.255	211.100.061	48.474.662.651
33	Kab. Nias	12.771.923.775	6.387.035.594	6.172.242.985	207.424.446	12.766.703.025
34	Kab. Simalungun	76.169.939.980	14.698.260.503	60.544.007.740	904.880.887	76.147.149.130
35	Kab. Tapanuli Selatan	150.683.387.245	13.256.412.037	137.214.330.012	212.645.196	150.683.387.245
36	Kab. Tapanuli Tengah	21.098.866.847	8.199.359.356	12.686.862.295	212.645.196	21.098.866.847
37	Kab. Tapanuli Utara	73.455.391.226	10.461.052.830	61.560.608.928	1.433.729.468	73.455.391.226
38	Kab. Toba Samosir	19.591.039.134	12.445.746.962	6.932.646.976	212.645.196	19.591.039.134
39	Kota Binjai	22.588.893.737	11.922.622.540	10.453.626.001	212.645.196	22.588.893.737
40	Kota Medan	250.809.335.428	240.822.665.274	9.783.540.044	197.896.460	250.804.101.778
41	Kota Pematang Siantar	29.568.607.646	17.797.386.608	6.245.140.685	5.390.359.273	29.432.886.566
42	Kota Sibolga	15.745.424.652	9.462.805.308	6.069.974.148	212.645.196	15.745.424.652
43	Kota Tanjung Balai	15.137.268.629	8.751.456.550	6.173.166.883	199.309.911	15.123.933.344
44	Kota Tebing Tinggi	16.034.383.981	9.698.667.785	6.123.071.000	212.645.196	16.034.383.981
45	Kota Padang Sidempuan	17.896.155.419	11.020.662.546	6.662.847.677	207.424.446	17.890.934.669
46	Kab. Pakpak Bharat	13.358.902.119	6.232.718.475	6.907.968.310	218.215.334	13.358.902.119
47	Kab. Nias Selatan	17.422.093.266	6.741.304.767	10.468.143.303	212.645.196	17.422.093.266
48	Kab. Humbang Hasundutan	15.011.948.557	7.283.518.319	7.099.311.149	613.499.919	14.996.329.387
49	Kab. Serdang Bedagai	63.097.334.442	11.783.153.386	51.101.535.860	207.424.446	63.092.113.692
50	Kab. Samosir	14.391.203.642	6.887.578.341	7.290.980.105	207.424.446	14.385.982.892
51	Kab. Batu Bara	35.761.388.409	16.013.115.695	19.535.627.518	212.645.196	35.761.388.409
52	Kab. Padang Lawas	45.204.751.216	8.401.042.120	36.544.544.554	252.804.812	45.198.391.486
53	Kab. Padang Lawas Utara	39.572.387.356	7.686.244.199	31.683.514.217	197.408.190	39.567.166.606
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	91.614.795.427	10.035.214.518	81.376.951.969	202.628.940	91.614.795.427
55	Kab. Labuhanbatu Utara	52.438.275.532	9.428.693.819	42.796.936.517	207.424.446	52.433.054.782

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
56	Kab. Nias Utara	13.152.190.818	6.530.187.978	6.409.357.644	207.424.446	13.146.970.068
57	Kab. Nias Barat	12.938.013.002	6.381.848.232	6.343.519.574	212.645.196	12.938.013.002
58	Kota Gunungsitoli	15.246.544.137	8.780.242.773	6.253.656.168	207.424.446	15.241.323.387
59	Provinsi Sumatera Barat	166.029.563.255	129.863.107.569	35.277.271.466	889.184.220	166.029.563.255
60	Kab. Lima Puluh Kota	14.972.184.416	6.315.824.978	8.289.378.148	357.526.010	14.962.729.136
61	Kab. Agam	21.565.838.150	9.112.383.471	12.171.355.286	265.481.388	21.549.220.145
62	Kab. Kepulauan Mentawai	13.416.514.809	4.246.049.896	9.125.948.418	23.284.905	13.395.283.219
63	Kab. Padang Pariaman	14.983.625.171	8.250.866.747	6.683.360.586	46.468.128	14.980.695.461
64	Kab. Pasaman	12.796.118.194	5.974.728.243	6.718.016.251	100.902.090	12.793.646.584
65	Kab. Pesisir Selatan	25.804.829.023	8.279.981.029	17.475.450.156	9.781.838	25.765.213.023
66	Kab. Sijunjung	14.970.996.541	5.186.358.478	9.740.121.568	41.586.785	14.968.066.831
67	Kab. Solok	14.018.453.875	6.821.660.775	7.128.437.311	7.524.789	13.957.622.875
68	Kab. Tanah Datar	14.507.741.900	7.543.952.472	6.520.227.375	432.997.673	14.497.177.520
69	Kota Bukit Tinggi	16.093.769.093	10.071.098.362	5.973.272.893	46.468.128	16.090.839.383
70	Kota Padang Panjang	11.226.285.322	5.211.840.075	5.965.047.409	9.781.838	11.186.669.322
71	Kota Padang	98.182.132.824	78.799.583.381	19.338.032.948	41.586.785	98.179.203.114
72	Kota Payakumbuh	12.931.694.407	6.869.645.661	6.001.695.758	58.943.168	12.930.284.587
73	Kota Sawahlunto	17.354.339.771	5.190.170.352	12.077.166.953	81.276.711	17.348.614.016
74	Kota Solok	13.330.412.163	7.182.701.723	6.098.312.602	46.468.128	13.327.482.453
75	Kota Pariaman	12.624.957.578	6.337.998.245	6.237.561.495	27.807.118	12.603.366.858
76	Kab. Pasaman Barat	33.249.915.185	7.223.407.681	25.977.109.666	46.468.128	33.246.985.475
77	Kab. Dharmasraya	26.067.058.529	6.362.348.678	19.655.312.013	46.468.128	26.064.128.819
78	Kab. Solok Selatan	55.482.251.665	5.740.798.792	49.692.055.035	46.468.128	55.479.321.955
79	Provinsi Riau	1.127.917.299.784	264.567.813.926	863.346.043.142	1.038.636	1.127.914.895.704
80	Kab. Bengkalis	1.811.636.444.192	59.953.677.959	1.751.682.472.948	195.680	1.811.636.346.587
81	Kab. Indragiri Hilir	89.324.910.409	18.962.940.109	70.361.677.015	273.980	89.324.891.104
82	Kab. Indragiri Hulu	117.942.627.266	17.282.488.883	100.659.825.943	51.440	117.942.366.266
83	Kab. Kampar	315.119.901.092	19.269.481.118	295.850.126.689	32.285	315.119.640.092
84	Kab. Kuantan Singingi	45.166.014.719	16.029.955.578	29.135.765.856	32.285	45.165.753.719

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
85	Kab. Pelalawan	174.264.249.623	30.305.797.535	143.958.158.803	75.125	174.264.031.463
86	Kab. Rokan Hilir	355.944.008.798	17.819.768.338	338.123.947.175	154.955	355.943.870.468
87	Kab. Rokan Hulu	106.506.646.912	15.836.722.727	90.669.630.900	32.285	106.506.385.912
88	Kab. Siak	588.910.292.465	32.650.932.675	556.259.066.505	32.285	588.910.031.465
89	Kota Dumai	69.249.297.714	37.297.593.306	31.951.411.123	75.125	69.249.079.554
90	Kota Pekanbaru	143.236.333.980	118.343.068.391	24.888.960.695	4.021.559	143.236.050.645
91	Kab. Kepulauan Meranti	71.446.449.576	14.502.200.421	56.943.955.870	32.285	71.446.188.576
92	Provinsi Jambi	220.650.735.978	75.382.932.358	144.605.276.687	662.526.933	220.650.735.978
93	Kab. Batanghari	115.859.793.192	6.450.068.361	109.348.226.982	6.769.849	115.805.065.192
94	Kab. Bungo	35.341.605.550	9.894.170.529	25.381.182.724	11.524.297	35.286.877.550
95	Kab. Kerinci	14.690.539.083	5.112.810.528	8.825.665.284	411.621.936	14.350.097.748
96	Kab. Merangin	16.002.251.967	6.526.296.088	9.368.261.632	34.941.427	15.929.499.147
97	Kab. Muaro Jambi	114.598.409.601	8.268.419.050	106.268.492.702	6.769.849	114.543.681.601
98	Kab. Sarolangun	72.744.842.773	6.134.058.725	66.549.286.199	6.769.849	72.690.114.773
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	177.958.802.096	8.187.446.923	169.709.857.324	6.769.849	177.904.074.096
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	71.263.362.814	8.614.948.127	62.582.162.390	36.425.537	71.233.536.054
101	Kab. Tebo	49.182.699.327	5.775.412.665	43.345.788.813	15.748.739	49.136.950.217
102	Kota Jambi	86.409.640.633	42.420.243.640	43.923.144.696	11.524.297	86.354.912.633
103	Kota Sungai Penuh	13.432.237.400	7.002.278.818	6.273.841.967	86.982.820	13.363.103.605
104	Provinsi Sumatera Selatan	958.981.285.515	243.184.329.579	715.614.371.476	129.684.815	958.928.385.870
105	Kab. Lahat	172.673.887.365	14.188.265.086	158.429.924.969	51.979.860	172.670.169.915
106	Kab. Musi Banyuasin	858.957.218.563	24.577.885.167	834.369.398.766	5.116.285	858.952.400.218
107	Kab. Musi Rawas	244.765.216.459	11.050.579.206	233.704.702.623	5.116.285	244.760.398.114
108	Kab. Muara Enim	621.488.784.118	46.241.225.928	575.236.147.097	2.570.093	621.479.943.118
109	Kab. Ogan Komering Ilir	82.048.874.931	15.517.442.638	66.520.021.200	2.570.093	82.040.033.931
110	Kab. Ogan Komering Ulu	104.683.361.070	12.713.021.710	91.958.928.267	2.570.093	104.674.520.070
111	Kota Palembang	142.296.446.619	134.006.486.534	8.280.025.455	1.093.630	142.287.605.619
112	Kota Prabumulih	126.489.053.061	18.800.682.664	107.678.435.767	1.093.630	126.480.212.061
113	Kota Pagar Alam	15.765.553.272	8.240.515.631	7.515.103.011	1.093.630	15.756.712.272

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
114	Kota Lubuk Linggau	18.500.749.978	12.127.352.590	6.361.986.295	2.570.093	18.491.908.978
115	Kab. Banyuasin	102.329.922.591	16.379.385.540	85.940.602.421	1.093.630	102.321.081.591
116	Kab. Ogan Ilir	86.626.263.726	11.124.908.733	75.489.943.900	10.757.258	86.625.609.891
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	22.439.536.498	10.195.879.850	12.207.843.115	33.743.833	22.437.466.798
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	22.516.603.932	8.575.659.309	13.768.937.053	64.054.670	22.408.651.032
119	Kab. Empat Lawang	18.048.306.016	8.014.000.657	10.024.370.729	1.093.630	18.039.465.016
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	617.423.358.191	10.406.672.066	607.006.751.495	2.544.240	617.415.967.801
121	Kab. Musi Rawas Utara	46.638.120.618	8.119.724.928	38.508.461.060	1.093.630	46.629.279.618
122	Provinsi Bengkulu	57.866.673.498	40.411.892.333	17.454.781.165	-	57.866.673.498
123	Kab. Bengkulu Selatan	11.227.142.466	4.445.485.618	6.781.656.848	-	11.227.142.466
124	Kab. Bengkulu Utara	35.847.251.072	5.235.700.254	30.611.550.818	-	35.847.251.072
125	Kab. Rejang Lebong	12.110.289.013	5.276.621.886	6.833.667.127	-	12.110.289.013
126	Kota Bengkulu	28.941.610.388	22.542.421.113	6.399.189.275	-	28.941.610.388
127	Kab. Kaur	12.050.235.224	3.167.633.723	8.882.601.501	-	12.050.235.224
128	Kab. Seluma	16.344.578.871	3.811.793.697	12.532.785.174	-	16.344.578.871
129	Kab. Mukomuko	27.139.371.012	4.534.947.294	22.604.423.718	-	27.139.371.012
130	Kab. Lebong	13.347.857.632	3.184.546.955	10.163.310.677	-	13.347.857.632
131	Kab. Kepahiang	10.238.849.130	3.432.556.620	6.806.292.510	-	10.238.849.130
132	Kab. Bengkulu Tengah	16.599.100.368	3.738.869.049	12.860.231.319	-	16.599.100.368
133	Provinsi Lampung	167.369.729.767	115.491.527.274	50.080.805.349	1.685.437.294	167.257.769.917
134	Kab. Lampung Barat	12.499.468.354	5.758.485.709	6.601.624.939	95.963.921	12.456.074.569
135	Kab. Lampung Selatan	40.077.014.879	14.058.046.444	25.873.252.447	142.223.268	40.073.522.159
136	Kab. Lampung Tengah	64.740.870.154	16.993.226.281	47.589.068.414	27.000.459	64.609.295.154
137	Kab. Lampung Utara	27.461.116.945	9.294.007.102	18.019.742.264	138.271.159	27.452.020.525
138	Kab. Lampung Timur	32.803.712.004	9.570.793.465	22.291.578.262	878.511.652	32.740.883.379
139	Kab. Tanggamus	58.632.032.790	7.831.793.771	50.561.528.864	224.194.010	58.617.516.645
140	Kab. Tulang Bawang	31.533.628.461	8.324.439.235	23.069.284.367	131.311.029	31.525.034.631
141	Kab. Way Kanan	29.599.709.141	7.215.377.448	22.235.863.511	25.528.182	29.476.769.141
142	Kota Bandar Lampung	63.062.947.937	55.185.920.090	7.506.042.793	353.161.919	63.045.124.802

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
143	Kota Metro	17.416.737.908	10.350.402.379	6.179.766.639	593.845.015	17.124.014.033
144	Kab. Pesawaran	20.137.247.724	6.563.511.521	13.344.097.794	215.540.449	20.123.149.764
145	Kab. Pringsewu	14.070.746.710	7.340.375.558	6.544.783.629	174.287.858	14.059.447.045
146	Kab. Mesuji	30.834.749.129	5.342.624.530	25.338.380.688	144.314.026	30.825.319.244
147	Kab. Tulang Bawang Barat	15.898.488.617	5.275.671.863	10.484.773.724	75.485.750	15.835.931.337
148	Kab. Pesisir Barat	12.230.878.882	4.718.287.980	7.378.133.439	73.559.193	12.169.980.612
149	Provinsi DKI Jakarta	17.932.807.393.165	17.889.824.054.760	41.790.094.946	1.193.243.459	17.932.807.393.165
150	Provinsi Jawa Barat	1.889.149.728.993	1.557.693.780.205	178.089.230.715	149.415.224.393	1.885.198.235.313
151	Kab. Bandung	220.654.946.080	74.681.183.989	129.338.905.767	16.240.684.104	220.260.773.860
152	Kab. Bekasi	441.152.494.461	383.895.892.230	51.187.091.069	5.670.068.857	440.753.052.156
153	Kab. Bogor	282.832.695.869	160.994.216.561	115.441.887.731	6.241.778.377	282.677.882.669
154	Kab. Ciamis	51.098.579.951	34.841.797.365	9.945.683.405	6.311.099.181	51.098.579.951
155	Kab. Cianjur	72.843.151.381	44.527.061.901	21.761.419.292	6.396.392.228	72.684.873.421
156	Kab. Cirebon	89.931.393.681	58.471.654.122	24.020.098.922	7.439.640.637	89.931.393.681
157	Kab. Garut	143.969.642.664	43.385.170.894	72.505.626.954	27.408.318.356	143.299.116.204
158	Kab. Indramayu	181.465.494.444	50.971.685.318	124.208.511.857	6.133.309.139	181.313.506.314
159	Kab. Karawang	367.809.155.169	200.198.869.105	36.922.196.687	127.529.079.477	364.650.145.269
160	Kab. Kuningan	52.969.491.661	36.087.651.566	9.740.947.069	6.969.566.866	52.798.165.501
161	Kab. Majalengka	97.975.181.605	37.670.347.566	22.067.415.180	38.237.418.859	97.975.181.605
162	Kab. Purwakarta	96.824.140.283	75.223.944.336	15.315.237.214	5.896.756.483	96.435.938.033
163	Kab. Subang	137.335.650.780	49.997.674.031	81.400.934.075	5.699.286.209	137.097.894.315
164	Kab. Sukabumi	122.374.261.858	52.506.988.547	63.580.400.917	6.050.574.019	122.137.963.483
165	Kab. Sumedang	76.365.780.526	42.024.272.775	9.633.621.565	24.124.056.456	75.781.950.796
166	Kab. Tasikmalaya	59.340.557.122	36.096.226.659	16.816.330.955	6.272.744.258	59.185.301.872
167	Kota Bandung	375.386.715.326	359.552.484.673	9.462.156.545	6.207.897.608	375.222.538.826
168	Kota Bekasi	154.001.365.841	136.204.968.010	11.407.454.155	6.234.283.986	153.846.706.151
169	Kota Bogor	90.361.215.117	76.757.239.875	7.311.524.861	5.903.836.426	89.972.601.162
170	Kota Cirebon	59.762.176.467	46.443.801.427	6.994.741.884	5.933.057.111	59.371.600.422
171	Kota Depok	111.143.329.822	96.283.452.727	8.525.367.253	5.943.087.722	110.751.907.702

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPH Perorangan	PBB	CHT	Total
172	Kota Sukabumi	50.021.758.028	37.486.144.866	6.247.683.727	6.135.874.435	49.869.703.028
173	Kota Tasikmalaya	54.543.613.435	41.259.038.133	6.992.597.420	6.139.849.172	54.391.484.725
174	Kota Cimahi	60.368.159.392	47.403.489.498	6.550.105.062	6.414.564.832	60.368.159.392
175	Kota Banjar	43.885.921.793	30.593.200.020	6.994.670.762	6.061.325.586	43.649.196.368
176	Kab. Bandung Barat	75.061.065.672	53.762.471.976	14.160.809.193	6.698.625.993	74.621.907.162
177	Kab. Pangandaran	44.094.108.972	29.528.799.030	8.104.686.048	6.304.716.384	43.938.201.462
178	Provinsi Jawa Tengah	1.015.997.786.814	625.942.862.750	73.178.580.662	316.876.343.402	1.015.997.786.814
179	Kab. Banjarnegara	42.401.685.986	16.073.418.021	15.978.155.204	10.099.797.141	42.151.370.366
180	Kab. Banyumas	58.674.117.183	32.318.530.599	16.467.165.724	9.649.359.950	58.435.056.273
181	Kab. Batang	46.938.973.583	23.456.818.139	12.479.439.099	11.002.716.345	46.938.973.583
182	Kab. Blora	133.349.977.733	17.932.738.961	99.781.666.832	15.635.571.940	133.349.977.733
183	Kab. Boyolali	59.299.363.603	19.707.592.096	10.622.589.983	28.269.176.554	58.599.358.633
184	Kab. Brebes	43.475.259.779	18.218.459.312	14.869.254.793	10.387.545.674	43.475.259.779
185	Kab. Cilacap	75.247.379.173	39.073.489.145	26.289.102.709	9.884.787.319	75.247.379.173
186	Kab. Demak	61.439.159.681	18.767.019.530	8.292.469.689	34.379.670.462	61.439.159.681
187	Kab. Grobogan	67.402.216.047	17.133.874.923	26.795.252.029	23.473.089.095	67.402.216.047
188	Kab. Jepara	57.896.937.850	33.748.059.424	12.567.779.130	11.581.099.296	57.896.937.850
189	Kab. Karanganyar	51.110.739.220	22.470.131.126	9.060.581.940	19.108.713.764	50.639.426.830
190	Kab. Kebumen	39.894.929.080	17.843.719.829	9.775.099.019	12.276.110.232	39.894.929.080
191	Kab. Kendal	55.326.155.327	19.316.164.027	14.522.837.509	20.963.762.631	54.802.764.167
192	Kab. Klaten	51.413.144.405	22.510.196.305	7.878.384.348	21.024.563.752	51.413.144.405
193	Kab. Kudus	309.701.941.656	85.167.555.812	7.525.680.100	217.008.705.744	309.701.941.656
194	Kab. Magelang	47.136.676.483	17.161.315.093	8.353.347.663	21.622.013.727	47.136.676.483
195	Kab. Pati	47.750.382.496	20.577.191.704	12.879.191.630	14.293.999.162	47.750.382.496
196	Kab. Pekalongan	34.410.164.990	13.651.395.326	11.050.784.515	9.707.985.149	34.410.164.990
197	Kab. Pemalang	38.679.808.931	15.844.858.750	12.301.454.763	10.533.495.418	38.679.808.931
198	Kab. Purbalingga	34.228.806.897	15.533.081.474	7.769.114.577	10.926.610.846	34.228.806.897
199	Kab. Purworejo	33.392.735.669	13.732.192.982	8.218.397.560	11.442.145.127	33.392.735.669
200	Kab. Rembang	73.546.136.589	21.673.579.156	15.799.813.676	35.202.529.797	72.675.922.629

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPH Perorangan	PBB	CHT	Total
201	Kab. Semarang	50.181.197.257	24.879.597.413	13.059.475.124	11.946.631.920	49.885.704.457
202	Kab. Sragen	36.515.973.351	17.013.371.317	8.928.275.129	10.574.326.905	36.515.973.351
203	Kab. Sukoharjo	46.020.951.304	27.378.612.538	7.651.122.992	10.991.215.774	46.020.951.304
204	Kab. Tegal	40.862.594.953	18.788.170.207	10.721.817.459	11.352.607.287	40.862.594.953
205	Kab. Temanggung	72.100.903.868	15.812.681.877	8.730.737.332	47.557.484.659	72.100.903.868
206	Kab. Wonogiri	44.652.497.107	15.758.229.267	8.753.958.524	19.648.243.136	44.160.430.927
207	Kab. Wonosobo	43.670.942.180	13.817.388.127	13.550.989.443	16.302.564.610	43.670.942.180
208	Kota Magelang	32.696.539.215	17.039.387.520	5.906.198.523	9.750.953.172	32.696.539.215
209	Kota Pekalongan	34.706.062.782	17.737.712.702	6.240.819.618	10.467.788.212	34.446.320.532
210	Kota Salatiga	32.954.925.943	17.175.068.515	6.089.448.134	9.457.401.964	32.721.918.613
211	Kota Semarang	207.842.590.523	185.663.824.232	9.989.329.838	12.189.436.453	207.842.590.523
212	Kota Surakarta	59.924.331.885	42.419.690.355	6.557.003.939	10.947.637.591	59.924.331.885
213	Kota Tegal	34.556.148.021	18.778.179.887	6.140.898.983	9.637.069.151	34.556.148.021
214	Provinsi DI Yogyakarta	119.680.859.852	113.846.232.738	1.794.225.842	3.936.300.312	119.576.758.892
215	Kab. Bantul	39.027.306.903	27.595.492.260	7.219.199.178	4.212.615.465	39.027.306.903
216	Kab. Gunung Kidul	27.525.469.621	18.684.737.735	7.101.843.329	1.738.888.557	27.525.469.621
217	Kab. Kulon Progo	26.163.003.568	18.340.326.487	6.692.714.511	1.129.962.570	26.163.003.568
218	Kab. Sleman	63.582.040.824	54.780.323.762	7.033.856.166	1.722.311.956	63.536.491.884
219	Kota Yogyakarta	62.588.652.498	55.154.134.642	6.319.213.304	1.073.731.617	62.547.079.563
220	Provinsi Jawa Timur	2.177.527.938.185	1.173.649.527.665	255.662.307.371	698.975.050.639	2.128.286.885.675
221	Kab. Bangkalan	56.602.666.153	19.880.745.848	11.291.795.238	23.842.389.752	55.014.930.838
222	Kab. Banyuwangi	159.879.656.782	29.919.079.563	102.167.261.175	27.793.316.044	159.879.656.782
223	Kab. Blitar	62.765.908.194	20.234.411.907	14.307.229.495	28.224.266.792	62.765.908.194
224	Kab. Bojonegoro	734.354.925.087	28.211.001.678	641.835.821.009	62.651.204.050	732.698.026.737
225	Kab. Bondowoso	89.820.387.161	18.874.416.835	13.071.915.871	57.874.054.455	89.820.387.161
226	Kab. Gresik	169.965.009.630	108.799.624.776	35.056.663.997	26.108.720.857	169.965.009.630
227	Kab. Jember	150.364.168.551	34.265.089.967	23.654.084.471	92.444.994.113	150.364.168.551
228	Kab. Jombang	85.756.241.082	27.030.430.035	11.393.715.251	46.112.584.276	84.536.729.562
229	Kab. Kediri	109.580.450.029	27.341.052.995	17.102.117.863	62.666.096.566	107.109.267.424

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPH Perorangan	PBB	CHT	Total
230	Kab. Lamongan	96.342.702.114	23.555.189.576	18.217.876.961	53.169.088.157	94.942.154.694
231	Kab. Lumajang	67.170.103.868	20.674.486.353	16.396.726.084	30.098.891.431	67.170.103.868
232	Kab. Madiun	65.059.940.468	19.733.786.179	19.973.676.095	24.699.271.544	64.406.733.818
233	Kab. Magetan	54.765.104.105	20.576.729.964	7.820.576.764	24.737.638.252	53.134.944.980
234	Kab. Malang	171.734.083.532	42.261.352.707	27.800.185.979	99.224.137.056	169.285.675.742
235	Kab. Mojokerto	72.948.024.794	34.258.144.087	11.659.502.582	27.030.378.125	72.948.024.794
236	Kab. Nganjuk	64.191.116.881	22.287.260.926	13.654.641.184	28.249.214.771	64.191.116.881
237	Kab. Ngawi	66.459.670.577	20.980.886.627	14.784.066.664	30.694.717.286	66.459.670.577
238	Kab. Pacitan	53.266.534.980	18.378.329.125	7.172.649.415	27.043.858.780	52.594.837.320
239	Kab. Pamekasan	121.473.232.136	21.311.006.726	7.800.129.198	92.362.096.212	121.473.232.136
240	Kab. Pasuruan	319.253.251.009	64.327.310.772	11.009.480.641	243.916.459.596	319.253.251.009
241	Kab. Ponorogo	63.809.081.625	21.918.447.299	12.142.500.257	29.748.134.069	63.809.081.625
242	Kab. Probolinggo	118.029.337.029	23.796.907.265	11.589.881.451	82.642.548.313	118.029.337.029
243	Kab. Sampang	61.273.208.775	17.738.571.235	8.354.154.845	35.180.482.695	61.273.208.775
244	Kab. Sidoarjo	180.122.911.741	127.080.370.893	23.043.900.404	29.998.640.444	180.122.911.741
245	Kab. Situbondo	89.009.859.715	19.742.092.932	13.157.468.916	56.110.297.867	89.009.859.715
246	Kab. Sumenep	83.550.189.695	20.098.580.097	17.882.445.749	45.569.163.849	83.550.189.695
247	Kab. Trenggalek	60.015.682.562	19.186.937.036	14.344.324.586	25.842.995.470	59.374.257.092
248	Kab. Tuban	143.009.995.576	29.710.749.839	80.120.124.570	32.324.261.057	142.155.135.466
249	Kab. Tulungagung	71.160.724.207	25.465.682.433	12.055.388.564	32.826.594.980	70.347.665.977
250	Kota Blitar	53.510.492.925	20.878.111.898	6.009.473.013	26.622.908.014	53.510.492.925
251	Kota Kediri	234.950.575.208	121.097.925.695	6.267.252.331	107.585.397.182	234.950.575.208
252	Kota Madiun	59.459.737.036	27.296.560.991	6.042.217.256	24.505.299.249	57.844.077.496
253	Kota Malang	119.286.317.029	67.667.019.959	7.015.135.749	43.519.896.431	118.202.052.139
254	Kota Mojokerto	52.828.808.019	20.037.061.995	6.004.386.865	25.134.286.919	51.175.735.779
255	Kota Pasuruan	54.207.746.581	21.873.694.232	6.118.835.612	25.224.773.082	53.217.302.926
256	Kota Probolinggo	52.450.286.074	20.395.472.853	6.320.421.075	25.734.392.146	52.450.286.074
257	Kota Surabaya	562.723.068.681	518.278.982.408	10.237.605.600	34.206.480.673	562.723.068.681
258	Kota Batu	49.854.575.969	18.083.926.900	6.763.706.443	25.006.942.626	49.854.575.969

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
259	Provinsi Kalimantan Barat	225.192.140.203	113.240.135.050	111.814.166.503	137.838.650	225.192.140.203
260	Kab. Bengkayang	32.106.740.307	7.419.458.799	24.504.009.423	178.379.175	32.101.847.397
261	Kab. Landak	37.966.382.983	6.777.106.200	31.178.499.738	10.079.290	37.965.685.228
262	Kab. Kapuas Hulu	35.551.879.711	8.415.640.331	27.125.637.272	10.177.533	35.551.455.136
263	Kab. Ketapang	224.976.302.163	18.909.158.659	206.056.541.396	9.904.353	224.975.604.408
264	Kab. Mempawah	18.336.493.902	7.281.517.836	11.044.199.021	10.352.470	18.336.069.327
265	Kab. Sambas	35.952.439.405	9.491.529.274	26.450.133.086	2.890.065	35.944.552.425
266	Kab. Sanggau	67.187.901.411	10.181.185.161	56.996.114.142	9.904.353	67.187.203.656
267	Kab. Sintang	58.722.589.193	9.980.683.771	48.731.303.314	9.904.353	58.721.891.438
268	Kota Pontianak	58.428.930.332	51.587.646.361	6.830.681.863	9.904.353	58.428.232.577
269	Kota Singkawang	19.001.835.696	12.698.081.510	6.292.927.698	10.552.048	19.001.561.256
270	Kab. Sekadau	28.056.172.584	6.848.431.497	21.197.138.979	10.328.928	28.055.899.404
271	Kab. Melawi	27.876.382.638	6.338.459.794	21.527.320.736	9.904.353	27.875.684.883
272	Kab. Kayong Utara	20.050.725.699	5.530.775.104	14.509.348.487	9.904.353	20.050.027.944
273	Kab. Kubu Raya	48.791.527.594	14.302.852.681	34.477.612.088	10.334.740	48.790.799.509
274	Provinsi Kalimantan Tengah	259.648.164.379	90.150.530.413	169.497.609.245	2.721	259.648.142.379
275	Kab. Barito Selatan	28.180.379.626	5.816.723.532	22.363.654.971	123	28.180.378.626
276	Kab. Barito Utara	123.377.247.463	8.510.298.814	114.866.947.526	123	123.377.246.463
277	Kab. Kapuas	101.224.202.986	7.804.291.703	93.419.910.160	123	101.224.201.986
278	Kab. Kotawaringin Barat	74.833.619.712	16.673.826.287	58.159.782.189	1.236	74.833.609.712
279	Kab. Kotawaringin Timur	128.819.404.067	19.114.263.614	109.705.134.835	618	128.819.399.067
280	Kota Palangkaraya	32.294.069.329	25.204.912.947	7.089.155.259	123	32.294.068.329
281	Kab. Katingan	45.999.691.767	6.189.643.834	39.810.046.810	123	45.999.690.767
282	Kab. Seruyan	83.306.279.446	6.533.478.900	76.772.799.423	123	83.306.278.446
283	Kab. Sukamara	22.645.943.463	6.721.824.729	15.924.117.611	293	22.645.942.633
284	Kab. Lamandau	48.191.376.157	5.256.478.447	42.934.886.474	5.786	48.191.370.707
285	Kab. Gunung Mas	33.916.145.354	6.044.688.108	27.871.456.123	123	33.916.144.354
286	Kab. Pulang Pisau	26.712.798.633	5.542.271.396	21.170.526.114	123	26.712.797.633
287	Kab. Murung Raya	89.641.477.856	7.341.728.840	82.299.747.893	123	89.641.476.856

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
288	Kab. Barito Timur	38.924.573.870	9.898.435.444	29.026.137.303	123	38.924.572.870
289	Provinsi Kalimantan Selatan	292.648.873.693	136.093.233.882	156.551.497.854	455.957	292.645.187.693
290	Kab. Banjar	49.117.223.196	12.619.103.328	36.497.769.274	38.594	49.116.911.196
291	Kab. Barito Kuala	23.499.150.614	8.617.534.691	14.881.270.948	37.975	23.498.843.614
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	58.228.636.945	8.327.849.909	49.900.432.251	47.785	58.228.329.945
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	15.323.840.976	8.789.623.132	6.533.872.869	37.975	15.323.533.976
294	Kab. Hulu Sungai Utara	15.279.788.739	8.020.360.543	7.259.083.221	37.975	15.279.481.739
295	Kab. Kotabaru	94.286.526.498	16.231.280.943	78.054.900.580	37.975	94.286.219.498
296	Kab. Tabalong	106.270.259.119	14.833.362.592	91.436.551.552	37.975	106.269.952.119
297	Kab. Tanah Laut	70.670.426.098	13.495.814.188	57.174.257.125	47.785	70.670.119.098
298	Kab. Tapin	53.780.496.446	8.918.255.986	44.861.895.485	37.975	53.780.189.446
299	Kota Banjarbaru	29.100.873.127	22.575.984.520	6.522.460.154	344.453	29.098.789.127
300	Kota Banjarmasin	58.151.805.855	51.363.299.444	6.784.907.137	461.274	58.148.667.855
301	Kab. Balangan	58.456.756.213	12.180.643.357	46.275.767.881	182.265	58.456.593.503
302	Kab. Tanah Bumbu	239.845.915.623	20.218.736.267	219.626.834.381	37.975	239.845.608.623
303	Provinsi Kalimantan Timur	812.886.247.747	370.819.016.195	442.064.591.981	290.571	812.883.898.747
304	Kab. Berau	144.284.026.836	37.858.899.428	106.424.834.123	32.285	144.283.765.836
305	Kab. Kutai Kartanegara	1.049.919.095.033	64.276.546.586	985.642.255.162	32.285	1.049.918.834.033
306	Kab. Kutai Barat	131.063.549.111	27.812.758.915	103.250.496.911	32.285	131.063.288.111
307	Kab. Kutai Timur	403.966.914.124	62.526.447.481	341.440.173.358	32.285	403.966.653.124
308	Kab. Paser	125.316.107.119	30.028.891.420	95.286.922.414	32.285	125.315.846.119
309	Kota Balikpapan	147.494.088.197	139.575.012.333	7.918.530.870	59.994	147.493.603.197
310	Kota Bontang	204.923.764.558	77.324.127.222	127.599.344.051	32.285	204.923.503.558
311	Kota Samarinda	114.836.213.710	76.936.253.840	37.896.443.884	3.297.961	114.835.995.685
312	Kab. Penajam Paser Utara	73.903.242.121	21.941.793.106	51.961.155.730	32.285	73.902.981.121
313	Kab. Mahakam Ulu	38.568.185.700	19.818.246.214	18.749.646.201	32.285	38.567.924.700
314	Provinsi Sulawesi Utara	116.938.447.530	79.128.008.414	37.810.439.116	-	116.938.447.530
315	Kab. Bolaang Mongondow	23.516.543.799	6.216.171.517	17.300.372.282	-	23.516.543.799
316	Kab. Minahasa	25.569.274.103	7.158.773.670	18.410.500.433	-	25.569.274.103

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPH Perorangan	PBB	CHT	Total
317	Kab. Sangihe	12.564.441.863	5.542.477.980	7.021.963.883	-	12.564.441.863
318	Kota Bitung	84.380.795.486	8.067.319.511	76.313.475.975	-	84.380.795.486
319	Kota Manado	51.792.189.876	45.259.515.935	6.532.673.941	-	51.792.189.876
320	Kab. Kepulauan Talaud	10.593.301.901	4.095.368.582	6.497.933.319	-	10.593.301.901
321	Kab. Minahasa Selatan	12.684.526.999	5.531.174.694	7.153.352.305	-	12.684.526.999
322	Kota Tomohon	20.065.607.141	5.254.940.220	14.810.666.921	-	20.065.607.141
323	Kab. Minahasa Utara	51.956.135.023	9.329.489.169	42.626.645.854	-	51.956.135.023
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	9.986.883.987	3.650.609.799	6.336.274.188	-	9.986.883.987
325	Kota Kotamobagu	12.431.683.732	6.320.886.385	6.110.797.347	-	12.431.683.732
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	9.975.235.692	3.296.453.942	6.678.781.750	-	9.975.235.692
327	Kab. Minahasa Tenggara	10.334.121.622	3.655.644.672	6.678.476.950	-	10.334.121.622
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	10.515.860.044	3.434.632.828	7.081.227.216	-	10.515.860.044
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	20.458.915.082	3.259.686.948	17.199.228.134	-	20.458.915.082
330	Provinsi Sulawesi Tengah	164.507.976.392	100.145.362.473	64.175.225.721	175.055.918	164.495.644.112
331	Kab. Banggai	205.983.297.809	13.439.494.812	192.432.503.892	103.870.580	205.975.869.284
332	Kab. Banggai Kepulauan	11.560.932.713	4.902.405.653	6.642.911.003	14.573.782	11.559.890.438
333	Kab. Buol	17.416.557.576	5.233.755.618	12.165.977.774	9.458.774	17.409.192.166
334	Kab. Tolitoli	14.401.818.238	6.216.158.473	8.168.835.581	15.781.909	14.400.775.963
335	Kab. Donggala	15.584.944.394	5.660.629.237	9.908.699.100	8.250.647	15.577.578.984
336	Kab. Morowali	99.809.974.595	48.889.308.830	50.905.049.708	8.250.647	99.802.609.185
337	Kab. Poso	15.108.056.278	6.727.083.000	8.365.357.221	15.199.147	15.107.639.368
338	Kota Palu	34.066.995.453	26.128.242.900	7.923.136.496	8.168.197	34.059.547.593
339	Kab. Parigi Moutong	14.809.267.312	6.897.546.818	7.757.546.618	150.057.816	14.805.151.252
340	Kab. Tojo Una Una	12.659.425.175	5.230.024.931	7.413.784.187	14.573.782	12.658.382.900
341	Kab. Sigi	12.213.918.758	5.281.332.508	6.915.762.066	9.458.774	12.206.553.348
342	Kab. Banggai Laut	10.721.645.039	4.244.485.599	6.461.543.383	14.573.782	10.720.602.764
343	Kab. Morowali Utara	33.734.105.518	5.917.473.132	27.801.016.329	8.250.647	33.726.740.108
344	Provinsi Sulawesi Selatan	266.536.996.465	227.280.182.180	34.179.128.306	4.956.078.669	266.415.389.155
345	Kab. Bantaeng	13.480.348.033	6.830.750.005	6.331.394.815	318.203.213	13.480.348.033

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
346	Kab. Barru	13.842.069.430	7.232.409.348	6.359.400.356	250.259.726	13.842.069.430
347	Kab. Bone	25.566.563.074	11.886.787.749	12.551.135.059	1.128.640.266	25.566.563.074
348	Kab. Bulukumba	18.449.196.899	8.835.132.103	9.316.722.038	290.241.908	18.442.096.049
349	Kab. Enrekang	13.567.471.659	6.409.204.951	6.878.628.586	279.638.122	13.567.471.659
350	Kab. Gowa	20.249.587.806	11.148.555.907	8.880.263.200	220.768.699	20.249.587.806
351	Kab. Jenepono	16.563.960.968	8.647.879.849	7.680.013.947	236.067.172	16.563.960.968
352	Kab. Luwu	14.295.316.732	7.198.573.886	6.864.021.040	227.156.386	14.289.751.312
353	Kab. Luwu Utara	15.003.113.722	6.921.503.008	7.860.842.015	215.481.409	14.997.826.432
354	Kab. Maros	26.505.318.238	11.715.811.271	14.559.965.542	224.028.115	26.499.804.928
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	37.024.415.108	13.763.990.016	23.039.656.393	220.768.699	37.024.415.108
356	Kota Palopo	16.423.088.801	10.087.250.932	6.115.069.170	215.481.409	16.417.801.511
357	Kab. Luwu Timur	81.401.517.221	21.370.698.774	59.825.607.245	205.211.202	81.401.517.221
358	Kab. Pinrang	15.007.916.341	7.986.060.998	6.801.086.644	207.263.464	14.994.411.106
359	Kab. Sinjai	14.952.673.485	7.071.579.568	6.411.428.168	1.469.665.749	14.952.673.485
360	Kab. Kepulauan Selayar	13.190.489.077	6.355.444.148	6.614.276.230	220.768.699	13.190.489.077
361	Kab. Sidenreng Rappang	14.590.421.531	7.652.645.983	6.717.006.849	220.768.699	14.590.421.531
362	Kab. Soppeng	18.134.139.966	7.175.606.965	6.695.969.473	4.160.316.778	18.031.893.216
363	Kab. Takalar	17.602.982.345	7.325.151.726	10.057.061.920	220.768.699	17.602.982.345
364	Kab. Tana Toraja	13.620.752.742	6.720.537.014	6.679.447.029	215.481.409	13.615.465.452
365	Kab. Wajo	32.691.748.178	9.253.172.792	23.172.844.952	259.366.654	32.685.384.398
366	Kota Parepare	16.542.873.519	10.232.016.623	6.090.088.197	207.263.464	16.529.368.284
367	Kota Makassar	143.024.295.096	135.568.741.029	7.250.342.865	199.923.912	143.019.007.806
368	Kab. Toraja Utara	13.379.802.849	6.600.373.849	6.558.660.301	220.768.699	13.379.802.849
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	100.723.615.369	54.245.279.182	46.477.423.743	100.444	100.722.803.369
370	Kab. Buton	9.448.295.119	2.938.978.191	6.509.251.893	15.035	9.448.245.119
371	Kab. Konawe	17.192.688.723	4.221.171.270	12.971.461.269	6.184	17.192.638.723
372	Kab. Kolaka	53.336.284.574	11.096.182.607	42.240.045.783	6.184	53.336.234.574
373	Kab. Muna	10.423.300.300	3.757.324.509	6.665.910.756	15.035	10.423.250.300
374	Kota Kendari	32.612.578.805	26.245.254.705	6.365.918.322	322.778	32.611.495.805

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
375	Kota Bau-bau	11.392.998.229	4.999.795.384	6.393.137.810	15.035	11.392.948.229
376	Kab. Konawe Selatan	35.915.569.120	3.996.386.104	31.919.126.832	6.184	35.915.519.120
377	Kab. Bombana	66.192.601.571	3.447.917.473	62.744.627.914	6.184	66.192.551.571
378	Kab. Wakatobi	9.127.636.699	2.675.856.607	6.451.715.057	15.035	9.127.586.699
379	Kab. Kolaka Utara	9.987.040.448	2.523.542.400	7.463.441.864	6.184	9.986.990.448
380	Kab. Konawe Utara	61.789.440.081	2.913.786.612	58.875.597.285	6.184	61.789.390.081
381	Kab. Buton Utara	8.928.127.406	2.252.287.168	6.675.775.203	15.035	8.928.077.406
382	Kab. Konawe Kepulauan	8.637.486.498	1.881.098.326	6.756.323.137	15.035	8.637.436.498
383	Kab. Kolaka Timur	9.678.475.722	2.500.949.721	7.177.469.817	6.184	9.678.425.722
384	Kab. Muna Barat	8.573.329.468	2.220.158.538	6.353.105.895	15.035	8.573.279.468
385	Kab. Buton Tengah	11.488.931.871	2.456.040.830	9.032.826.006	37.785	11.488.904.621
386	Kab. Buton Selatan	8.841.557.376	2.139.746.185	6.701.746.156	15.035	8.841.507.376
387	Provinsi Bali	183.161.154.427	178.113.035.505	2.778.575.788	2.133.790.824	183.025.402.117
388	Kab. Badung	62.059.324.263	55.009.039.759	6.481.726.001	535.226.403	62.025.992.163
389	Kab. Bangli	19.884.728.424	13.306.319.342	6.278.976.334	292.428.378	19.877.724.054
390	Kab. Buleleng	30.637.561.100	22.419.248.776	7.234.015.667	984.296.657	30.637.561.100
391	Kab. Gianyar	26.091.576.387	19.028.820.211	6.498.581.147	530.158.434	26.057.559.792
392	Kab. Jembrana	21.415.805.652	14.128.569.915	6.979.930.932	300.095.205	21.408.596.052
393	Kab. Karangasem	22.655.203.192	15.393.289.937	6.901.717.994	338.501.091	22.633.509.022
394	Kab. Klungkung	20.851.423.154	14.435.631.293	6.132.099.765	277.048.746	20.844.779.804
395	Kab. Tabanan	26.974.653.668	19.344.929.550	7.069.588.978	526.054.225	26.940.572.753
396	Kota Denpasar	95.886.778.435	88.788.246.306	5.846.769.750	1.169.382.274	95.804.398.330
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	255.124.421.579	83.909.826.178	56.197.249.696	112.053.923.655	252.160.999.529
398	Kab. Bima	27.721.123.883	5.897.940.234	7.284.940.028	13.632.191.796	26.815.072.058
399	Kab. Dompu	21.451.598.692	6.738.122.394	7.147.793.886	7.382.910.982	21.268.827.262
400	Kab. Lombok Barat	37.698.989.777	9.030.788.072	7.083.194.742	21.585.006.963	37.698.989.777
401	Kab. Lombok Tengah	90.105.484.817	10.841.294.295	7.610.682.567	69.920.784.125	88.372.760.987
402	Kab. Lombok Timur	97.641.406.269	11.186.690.090	8.217.102.485	76.353.535.334	95.757.327.909
403	Kab. Sumbawa	38.665.315.544	9.390.122.229	15.557.011.896	13.364.732.459	38.311.866.584

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
404	Kota Mataram	107.671.966.497	37.809.420.259	6.409.839.895	59.569.292.398	103.788.552.552
405	Kota Bima	19.689.411.285	9.143.906.789	6.257.463.100	4.182.639.906	19.584.009.795
406	Kab. Sumbawa Barat	233.033.686.564	18.520.508.190	210.660.405.773	3.852.772.601	233.033.686.564
407	Kab. Lombok Utara	19.499.910.938	5.791.046.684	6.316.789.580	7.223.571.034	19.331.407.298
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	71.039.624.326	61.227.678.581	7.864.487.804	1.347.854.841	70.440.021.226
409	Kab. Alor	9.525.605.134	2.738.117.308	6.648.333.744	130.446.657	9.516.897.709
410	Kab. Belu	10.273.828.603	3.854.766.557	6.278.095.747	23.225.299	10.156.087.603
411	Kab. Ende	13.048.258.852	4.822.764.654	8.076.864.911	80.611.107	12.980.240.672
412	Kab. Flores Timur	10.598.762.869	3.297.423.643	6.656.948.866	343.198.290	10.297.570.799
413	Kab. Kupang	11.011.848.099	3.655.960.615	7.207.609.687	80.416.577	10.943.986.879
414	Kab. Lembata	9.085.976.530	2.565.997.118	6.395.421.903	116.755.484	9.078.174.505
415	Kab. Manggarai	12.501.752.581	4.002.990.607	7.871.106.619	426.596.600	12.300.693.826
416	Kab. Ngada	9.640.253.300	2.735.258.301	6.792.827.004	19.185.995	9.547.271.300
417	Kab. Sikka	12.520.661.452	5.461.271.920	6.588.226.308	356.890.599	12.406.388.827
418	Kab. Sumba Barat	9.295.575.536	2.726.763.782	6.455.496.492	18.814.262	9.201.074.536
419	Kab. Sumba Timur	15.512.239.065	4.994.043.515	10.350.783.513	114.574.912	15.459.401.940
420	Kab. Timor Tengah Selatan	10.685.786.342	3.491.556.254	7.042.746.179	81.989.324	10.616.291.757
421	Kab. Timor Tengah Utara	10.043.791.296	3.258.649.392	6.661.388.039	20.218.865	9.940.256.296
422	Kota Kupang	32.642.729.619	26.134.124.887	6.415.869.161	16.382.571	32.566.376.619
423	Kab. Rote Ndao	9.365.883.815	2.719.765.671	6.514.465.632	128.351.882	9.362.583.185
424	Kab. Manggarai Barat	10.144.816.022	3.335.978.339	6.604.497.593	191.370.640	10.131.846.572
425	Kab. Nagekeo	8.924.258.948	2.348.140.726	6.461.052.803	112.379.309	8.921.572.838
426	Kab. Sumba Barat Daya	9.669.229.476	2.483.928.221	6.784.294.074	375.635.896	9.643.858.191
427	Kab. Sumba Tengah	8.433.365.466	1.912.457.902	6.425.745.028	16.674.536	8.354.877.466
428	Kab. Manggarai Timur	9.438.867.410	2.678.976.929	6.614.392.323	100.034.538	9.393.403.790
429	Kab. Sabu Raijua	8.297.114.447	1.993.240.867	6.185.582.263	19.766.317	8.198.589.447
430	Kab. Malaka	9.127.746.145	2.644.970.377	6.355.398.790	21.460.978	9.021.830.145
431	Provinsi Maluku	45.498.832.230	33.346.155.073	12.152.677.157	-	45.498.832.230
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	10.451.628.195	2.724.647.545	7.726.980.650	-	10.451.628.195

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
433	Kab. Maluku Tengah	19.441.900.297	4.826.228.454	14.615.671.843	-	19.441.900.297
434	Kab. Maluku Tenggara	9.871.643.955	3.344.504.563	6.527.139.392	-	9.871.643.955
435	Kab. Buru	10.954.908.113	2.628.202.511	8.326.705.602	-	10.954.908.113
436	Kota Ambon	27.608.973.346	21.154.678.914	6.454.294.432	-	27.608.973.346
437	Kab. Seram Bagian Barat	9.775.762.701	2.449.086.289	7.326.676.412	-	9.775.762.701
438	Kab. Seram Bagian Timur	26.988.458.399	2.214.087.529	24.774.370.870	-	26.988.458.399
439	Kab. Kepulauan Aru	11.627.368.370	2.421.631.147	9.205.737.223	-	11.627.368.370
440	Kota Tual	8.629.725.631	2.151.155.909	6.478.569.722	-	8.629.725.631
441	Kab. Maluku Barat Daya	11.950.824.939	3.705.598.493	8.245.226.446	-	11.950.824.939
442	Kab. Buru Selatan	10.077.103.272	1.834.279.645	8.242.823.627	-	10.077.103.272
443	Provinsi Papua	569.934.994.544	254.734.027.135	315.200.967.409	-	569.934.994.544
444	Kab. Biak Numfor	14.523.942.564	7.857.502.577	6.666.439.987	-	14.523.942.564
445	Kab. Jayapura	21.860.698.773	8.018.745.917	13.841.952.856	-	21.860.698.773
446	Kab. Jayawijaya	14.426.709.420	7.454.200.544	6.972.508.876	-	14.426.709.420
447	Kab. Merauke	47.583.305.446	11.849.081.620	35.734.223.826	-	47.583.305.446
448	Kab. Mimika	1.307.768.892.205	185.742.356.014	1.122.026.536.191	-	1.307.768.892.205
449	Kab. Nabire	22.330.630.929	6.732.716.663	15.597.914.266	-	22.330.630.929
450	Kab. Paniai	12.261.502.282	5.268.792.652	6.992.709.630	-	12.261.502.282
451	Kab. Puncak Jaya	12.961.646.897	5.475.799.310	7.485.847.587	-	12.961.646.897
452	Kab. Kepulauan Yapen	12.339.262.391	5.556.909.385	6.782.353.006	-	12.339.262.391
453	Kota Jayapura	60.153.932.308	53.705.626.072	6.448.306.236	-	60.153.932.308
454	Kab. Sarmi	18.590.060.178	4.890.712.503	13.699.347.675	-	18.590.060.178
455	Kab. Keerom	18.930.484.870	5.324.893.782	13.605.591.088	-	18.930.484.870
456	Kab. Yahukimo	13.674.937.746	5.122.194.395	8.552.743.351	-	13.674.937.746
457	Kab. Pegunungan Bintang	14.688.942.427	5.295.169.757	9.393.772.670	-	14.688.942.427
458	Kab. Tolikara	12.769.234.109	5.207.931.196	7.561.302.913	-	12.769.234.109
459	Kab. Boven Digoel	26.457.372.246	6.694.086.367	19.763.285.879	-	26.457.372.246
460	Kab. Mappi	14.770.903.414	5.061.619.660	9.709.283.754	-	14.770.903.414
461	Kab. Asmat	14.735.579.291	5.475.603.933	9.259.975.358	-	14.735.579.291

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPH Perorangan	PBB	CHT	Total
462	Kab. Waropen	13.952.534.259	4.580.395.670	9.372.138.589	-	13.952.534.259
463	Kab. Supiori	11.691.281.449	4.701.987.867	6.989.293.582	-	11.691.281.449
464	Kab. Mamberamo Raya	15.000.222.975	4.376.487.190	10.623.735.785	-	15.000.222.975
465	Kab. Mamberamo Tengah	11.571.746.471	4.700.230.125	6.871.516.346	-	11.571.746.471
466	Kab. Yalimo	11.826.114.251	5.023.829.056	6.802.285.195	-	11.826.114.251
467	Kab. Lanny Jaya	11.483.148.896	4.662.756.401	6.820.392.495	-	11.483.148.896
468	Kab. Nduga	11.967.626.502	4.610.465.030	7.357.161.472	-	11.967.626.502
469	Kab. Dogiyai	12.068.231.932	4.508.595.467	7.559.636.465	-	12.068.231.932
470	Kab. Puncak	12.981.752.249	5.264.624.745	7.717.127.504	-	12.981.752.249
471	Kab. Intan Jaya	13.487.141.151	6.192.548.415	7.294.592.736	-	13.487.141.151
472	Kab. Deiyai	13.644.379.491	4.560.705.908	9.083.673.583	-	13.644.379.491
473	Provinsi Maluku Utara	116.804.026.036	65.218.746.635	51.585.279.401	-	116.804.026.036
474	Kab. Halmahera Tengah	111.749.120.429	16.098.296.784	95.650.823.645	-	111.749.120.429
475	Kota Ternate	32.290.207.947	25.771.143.886	6.519.064.061	-	32.290.207.947
476	Kab. Halmahera Barat	11.236.345.791	4.390.744.155	6.845.601.636	-	11.236.345.791
477	Kab. Halmahera Timur	46.427.596.909	6.303.185.177	40.124.411.732	-	46.427.596.909
478	Kab. Halmahera Selatan	57.182.402.907	12.871.356.783	44.311.046.124	-	57.182.402.907
479	Kab. Halmahera Utara	54.615.375.621	11.856.917.638	42.758.457.983	-	54.615.375.621
480	Kab. Kepulauan Sula	12.951.643.456	4.230.899.879	8.720.743.577	-	12.951.643.456
481	Kota Tidore Kepulauan	15.448.562.225	8.907.466.370	6.541.095.855	-	15.448.562.225
482	Kab. Pulau Morotai	10.440.013.686	3.780.237.638	6.659.776.048	-	10.440.013.686
483	Kab. Pulau Taliabu	17.387.709.612	3.751.155.219	13.636.554.393	-	17.387.709.612
484	Provinsi Banten	860.991.640.460	853.584.100.147	7.068.696.469	37.300.844	860.690.097.460
485	Kab. Lebak	79.716.632.037	63.532.287.184	16.135.939.232	5.328.621	79.673.555.037
486	Kab. Pandeglang	78.048.722.540	63.798.294.814	14.199.837.214	7.513.512	78.005.645.540
487	Kab. Serang	110.989.284.283	102.729.608.510	8.211.270.152	5.328.621	110.946.207.283
488	Kab. Tangerang	281.760.789.781	272.358.808.786	9.324.294.002	8.551.993	281.691.654.781
489	Kota Cilegon	142.074.183.052	135.631.506.397	6.392.120.395	7.479.260	142.031.106.052
490	Kota Tangerang	322.763.748.761	315.040.279.912	7.564.690.051	17.478.798	322.622.448.761

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
491	Kota Serang	99.408.792.400	92.622.243.013	6.735.974.501	7.497.886	99.365.715.400
492	Kota Tangerang Selatan	242.573.133.242	235.509.331.307	6.751.665.067	34.360.868	242.295.357.242
493	Provinsi Bangka Belitung	87.632.630.192	42.169.482.145	45.463.148.047	-	87.632.630.192
494	Kab. Bangka	77.308.002.995	9.408.467.519	67.899.535.476	-	77.308.002.995
495	Kab. Belitung	32.787.944.027	7.764.232.112	25.023.711.915	-	32.787.944.027
496	Kota Pangkal Pinang	26.594.857.999	20.185.700.394	6.409.157.605	-	26.594.857.999
497	Kab. Bangka Selatan	34.377.864.975	5.543.890.618	28.833.974.357	-	34.377.864.975
498	Kab. Bangka Tengah	32.760.745.673	6.578.440.118	26.182.305.555	-	32.760.745.673
499	Kab. Bangka Barat	40.163.781.181	7.236.645.793	32.927.135.388	-	40.163.781.181
500	Kab. Belitung Timur	40.581.868.605	6.211.151.483	34.370.717.122	-	40.581.868.605
501	Provinsi Gorontalo	25.593.210.316	22.397.002.687	3.195.978.786	124.793	25.593.106.266
502	Kab. Boalemo	11.242.607.337	3.206.159.115	8.036.402.651	7.571	11.242.569.337
503	Kab. Gorontalo	14.561.140.522	6.488.744.326	8.072.089.459	50.737	14.560.884.522
504	Kota Gorontalo	18.424.260.382	12.380.311.321	6.043.903.490	7.571	18.424.222.382
505	Kab. Pohuwato	12.111.820.177	3.758.471.915	8.353.302.691	7.571	12.111.782.177
506	Kab. Bone Bolango	11.474.778.664	4.749.084.360	6.725.648.733	7.571	11.474.740.664
507	Kab. Gorontalo Utara	11.166.274.188	3.098.655.658	8.067.572.959	7.571	11.166.236.188
508	Provinsi Kepulauan Riau	201.892.753.961	170.758.308.146	31.061.010.681	68.841.429	201.888.160.256
509	Kab. Natuna	84.705.358.482	15.426.155.617	69.267.570.324	10.866.971	84.704.592.912
510	Kab. Kepulauan Anambas	63.698.973.300	20.882.578.292	42.804.762.467	10.866.971	63.698.207.730
511	Kab. Karimun	49.632.803.034	29.939.157.055	19.681.407.702	11.472.707	49.632.037.464
512	Kota Batam	137.682.891.807	129.182.551.998	8.407.273.859	90.668.080	137.680.493.937
513	Kota Tanjung Pinang	33.880.742.391	27.242.685.429	6.625.818.685	11.472.707	33.879.976.821
514	Kab. Lingga	22.553.245.122	14.109.706.093	8.431.300.752	12.238.277	22.553.245.122
515	Kab. Bintan	30.916.167.406	20.045.917.829	10.858.011.300	11.472.707	30.915.401.836
516	Provinsi Papua Barat	201.804.872.146	58.250.921.932	143.553.950.214	-	201.804.872.146
517	Kab. Fak Fak	40.791.798.372	4.413.243.723	36.378.554.649	-	40.791.798.372
518	Kab. Manokwari	26.028.659.968	14.023.115.962	12.005.544.006	-	26.028.659.968
519	Kab. Sorong	133.470.771.780	6.482.783.972	126.987.987.808	-	133.470.771.780

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
520	Kota Sorong	22.639.632.810	15.241.795.862	7.397.836.948	-	22.639.632.810
521	Kab. Raja Ampat	27.628.338.377	3.143.760.068	24.484.578.309	-	27.628.338.377
522	Kab. Sorong Selatan	13.837.438.735	3.050.613.480	10.786.825.255	-	13.837.438.735
523	Kab. Teluk Bintuni	421.956.297.029	27.734.390.363	394.221.906.666	-	421.956.297.029
524	Kab. Teluk Wondama	13.242.514.015	2.903.898.767	10.338.615.248	-	13.242.514.015
525	Kab. Kaimana	22.989.702.115	3.287.271.224	19.702.430.891	-	22.989.702.115
526	Kab. Maybrat	11.988.795.036	2.832.851.414	9.155.943.622	-	11.988.795.036
527	Kab. Tambrauw	11.641.560.737	2.300.670.838	9.340.889.899	-	11.641.560.737
528	Kab. Manokwari Selatan	10.913.757.219	2.692.777.515	8.220.979.704	-	10.913.757.219
529	Kab. Pegunungan Arfak	12.805.869.986	2.565.844.496	10.240.025.490	-	12.805.869.986
530	Provinsi Sulawesi Barat	20.841.552.280	15.310.852.920	5.530.699.360	-	20.841.552.280
531	Kab. Majene	9.748.952.516	3.267.442.192	6.481.510.324	-	9.748.952.516
532	Kab. Mamuju	16.858.004.835	7.979.101.095	8.878.903.740	-	16.858.004.835
533	Kab. Polewali Mandar	11.563.088.054	4.668.667.171	6.894.420.883	-	11.563.088.054
534	Kab. Mamasa	9.227.341.405	2.446.450.707	6.780.890.698	-	9.227.341.405
535	Kab. Pasangkayu	20.116.973.581	2.572.959.552	17.544.014.029	-	20.116.973.581
536	Kab. Mamuju Tengah	10.857.473.410	2.040.590.731	8.816.882.679	-	10.857.473.410
537	Provinsi Kalimantan Utara	133.338.279.371	30.998.292.188	102.339.987.183	-	133.338.279.371
538	Kab. Bulungan	127.836.983.489	12.626.163.460	115.210.820.029	-	127.836.983.489
539	Kab. Malinau	68.948.856.317	6.811.446.237	62.137.410.080	-	68.948.856.317
540	Kab. Nunukan	76.848.875.787	6.548.175.027	70.300.700.760	-	76.848.875.787
541	Kota Tarakan	126.070.751.056	15.693.922.526	110.376.790.556	37.974	126.070.751.056
542	Kab. Tana Tidung	65.711.674.077	4.817.722.661	60.893.951.416	-	65.711.674.077
Sisa Lebih		-				
Kurang Bayar		-				
Jumlah		67.699.092.141.343	37.677.680.471.742	25.321.008.091.173	4.591.474.242.743	67.590.162.805.658

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
1	Provinsi Aceh	257.089.910.267	179.871.253.341	53.755.249.027	22.367.010.254	202.566.261	893.831.384	-	257.089.910.267
2	Kab. Aceh Barat	67.831.319.834	830.419.507	702.166.047	64.086.238.643	18.414.913	5.594.463	2.170.064.211	67.812.897.784
3	Kab. Aceh Besar	7.165.921.228	830.419.507	702.166.047	2.976.453.457	465.172.893	7.972.013	2.170.064.211	7.152.248.128
4	Kab. Aceh Selatan	7.360.229.322	830.419.507	702.166.047	3.616.744.685	24.665.032	5.955.440	2.170.064.211	7.350.014.922
5	Kab. Aceh Singkil	7.011.023.647	830.419.507	702.166.047	3.261.732.406	24.665.032	5.119.244	2.170.064.211	6.994.166.447
6	Kab. Aceh Tengah	8.620.252.305	830.419.507	702.166.047	4.785.356.027	18.414.913	113.831.600	2.170.064.211	8.620.252.305
7	Kab. Aceh Tenggara	6.957.198.166	830.419.507	702.166.047	3.208.902.795	24.665.032	20.980.574	2.170.064.211	6.957.198.166
8	Kab. Aceh Timur	16.912.404.197	5.613.856.747	6.778.060.822	2.213.880.790	18.414.913	27.516.714	2.170.064.211	16.821.794.197
9	Kab. Aceh Utara	20.045.582.835	6.843.492.982	7.776.927.947	3.208.902.795	24.665.032	5.015.218	2.170.064.211	20.029.068.185
10	Kab. Bireuen	6.957.198.166	830.419.507	702.166.047	3.208.902.795	24.665.032	8.594.374	2.170.064.211	6.944.811.966
11	Kab. Pidie	7.811.446.271	830.419.507	702.166.047	4.074.194.023	18.414.913	3.770.770	2.170.064.211	7.799.029.471
12	Kab. Simeulue	6.975.107.268	830.419.507	702.166.047	3.208.902.795	24.665.032	38.889.676	2.170.064.211	6.975.107.268
13	Kota Banda Aceh	6.957.198.166	830.419.507	702.166.047	3.208.902.795	24.665.032	18.794.774	2.170.064.211	6.955.012.366
14	Kota Sabang	7.037.727.053	830.419.507	702.166.047	3.208.902.795	104.213.941	21.960.552	2.170.064.211	7.037.727.053
15	Kota Langsa	6.959.213.294	830.419.507	702.166.047	3.208.902.795	24.665.032	9.456.902	2.170.064.211	6.945.674.494
16	Kota Lhokseumawe	6.957.198.166	830.419.507	702.166.047	3.208.902.795	24.665.032	20.980.574	2.170.064.211	6.957.198.166
17	Kab. Gayo Lues	7.563.220.721	830.419.507	702.166.047	3.732.853.963	24.665.032	103.051.961	2.170.064.211	7.563.220.721
18	Kab. Aceh Barat Daya	6.664.876.339	830.419.507	702.166.047	2.927.505.521	18.414.913	3.798.390	2.170.064.211	6.652.368.589
19	Kab. Aceh Jaya	6.688.343.102	830.419.507	702.166.047	2.935.997.008	18.414.913	31.281.416	2.170.064.211	6.688.343.102
20	Kab. Nagan Raya	14.111.406.932	830.419.507	702.166.047	10.369.548.185	18.414.913	20.794.069	2.170.064.211	14.111.406.932
21	Kab. Aceh Tamiang	12.805.686.994	6.650.888.090	702.166.047	3.208.902.795	24.665.032	49.000.819	2.170.064.211	12.805.686.994
22	Kab. Bener Meriah	7.015.518.553	830.419.507	702.166.047	3.208.902.795	24.665.032	47.797.411	2.170.064.211	6.984.015.003
23	Kab. Pidie Jaya	6.917.892.846	830.419.507	702.166.047	3.167.665.795	24.665.032	22.912.254	2.170.064.211	6.917.892.846
24	Kota Subulussalam	7.034.457.983	830.419.507	702.166.047	3.255.664.644	24.665.032	15.698.642	2.170.064.211	6.998.678.083
25	Provinsi Sumatera Utara	177.701.316.870	547.603.456	787.435.448	154.240.829.066	4.798.946.434	17.326.502.466	-	177.701.316.870
26	Kab. Asahan	12.143.343.358	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	106.663.555	2.170.064.211	11.907.072.258
27	Kab. Dairi	17.942.275.511	34.224.738	49.215.049	14.985.251.063	299.932.918	403.587.532	2.170.064.211	17.942.275.511
28	Kab. Deli Serdang	12.113.295.190	39.486.486	46.791.049	9.249.165.150	299.932.918	307.855.376	2.170.064.211	12.113.295.190
29	Kab. Karo	12.174.959.039	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	374.550.336	2.170.064.211	12.174.959.039
30	Kab. Labuhanbatu	10.152.368.784	10.486.238	27.318.741	7.379.835.060	290.272.576	63.917.508	2.170.064.211	9.941.894.334
31	Kab. Langkat	14.718.092.236	1.089.947.488	1.577.292.897	9.253.113.015	299.932.918	327.741.707	2.170.064.211	14.718.092.236
32	Kab. Mandailing Natal	31.346.375.678	34.224.738	49.215.049	18.448.861.514	9.597.895.086	1.046.115.080	2.170.064.211	31.346.375.678
33	Kab. Nias	12.108.496.079	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	308.087.376	2.170.064.211	12.108.496.079
34	Kab. Simalungun	12.660.032.328	34.224.738	49.215.049	9.247.323.294	299.932.918	200.160.868	2.170.064.211	12.000.921.078
35	Kab. Tapanuli Selatan	310.465.481.207	34.224.738	49.215.049	307.390.731.814	299.932.918	521.312.477	2.170.064.211	310.465.481.207
36	Kab. Tapanuli Tengah	13.517.418.021	34.224.738	49.215.049	10.655.900.289	299.932.918	308.080.816	2.170.064.211	13.517.418.021
37	Kab. Tapanuli Utara	13.321.185.481	34.224.738	49.215.049	10.045.594.303	299.932.918	722.154.262	2.170.064.211	13.321.185.481
38	Kab. Toba	12.337.797.712	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	537.389.009	2.170.064.211	12.337.797.712
39	Kota Binjai	12.108.496.079	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	308.087.376	2.170.064.211	12.108.496.079
40	Kota Medan	10.169.189.097	10.486.238	27.318.741	7.379.835.060	290.272.576	291.212.271	2.170.064.211	10.169.189.097

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
41	Kota Pematang Siantar	12.127.703.892	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	327.295.189	2.170.064.211	12.127.703.892
42	Kota Sibolga	12.108.496.079	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	308.087.376	2.170.064.211	12.108.496.079
43	Kota Tanjung Balai	12.108.496.079	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	308.087.376	2.170.064.211	12.108.496.079
44	Kota Tebing Tinggi	12.108.496.079	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	308.087.376	2.170.064.211	12.108.496.079
45	Kota Padang Sidempuan	12.108.496.079	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	308.087.376	2.170.064.211	12.108.496.079
46	Kab. Pakpak Bharat	12.977.764.409	34.224.738	49.215.049	10.034.636.451	299.932.918	389.691.042	2.170.064.211	12.977.764.409
47	Kab. Nias Selatan	15.943.013.958	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	4.142.605.255	2.170.064.211	15.943.013.958
48	Kab. Humbang Hasundutan	12.269.653.225	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	469.244.522	2.170.064.211	12.269.653.225
49	Kab. Serdang Bedagai	12.108.496.079	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	308.087.376	2.170.064.211	12.108.496.079
50	Kab. Samosir	12.263.091.984	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	462.683.281	2.170.064.211	12.263.091.984
51	Kab. Batu Bara	12.108.553.690	34.224.738	49.215.049	9.247.029.398	299.932.918	308.087.376	2.170.064.211	12.108.553.690
52	Kab. Padang Lawas	14.010.505.426	34.224.738	49.215.049	9.249.756.703	299.932.918	2.207.311.807	2.170.064.211	14.010.505.426
53	Kab. Padang Lawas Utara	11.684.825.216	34.224.738	49.215.049	8.203.866.083	290.272.576	937.182.559	2.170.064.211	11.684.825.216
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	12.148.589.477	10.486.238	27.318.741	7.379.835.060	290.272.576	2.270.612.651	2.170.064.211	12.148.589.477
55	Kab. Labuhanbatu Utara	12.585.495.733	34.224.738	49.215.049	9.650.282.362	299.932.918	381.776.455	2.170.064.211	12.585.495.733
56	Kab. Nias Utara	12.108.496.079	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	308.087.376	2.170.064.211	12.108.496.079
57	Kab. Nias Barat	12.108.496.079	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	308.087.376	2.170.064.211	12.108.496.079
58	Kota Gunungsitoli	12.108.496.079	34.224.738	49.215.049	9.246.971.787	299.932.918	308.087.376	2.170.064.211	12.108.496.079
59	Provinsi Sumatera Barat	34.008.898.026	-	-	14.873.194.860	8.268.626.070	10.867.077.096	-	34.008.898.026
60	Kab. Lima Puluh Kota	5.246.005.408	-	-	2.208.798.842	719.548.234	147.594.121	2.170.064.211	5.246.005.408
61	Kab. Agam	4.878.729.683	-	-	1.646.790.657	918.735.378	33.343.237	2.170.064.211	4.768.933.483
62	Kab. Kepulauan Mentawai	6.550.156.692	-	-	1.527.818.791	693.473.626	2.158.800.064	2.170.064.211	6.550.156.692
63	Kab. Padang Pariaman	4.857.465.708	-	-	1.624.928.292	918.735.378	143.737.827	2.170.064.211	4.857.465.708
64	Kab. Pasaman	4.857.725.055	-	-	1.621.200.585	918.735.378	147.724.881	2.170.064.211	4.857.725.055
65	Kab. Pesisir Selatan	4.626.535.897	-	-	1.387.083.746	918.735.378	150.652.562	2.170.064.211	4.626.535.897
66	Kab. Sijunjung	10.131.035.515	-	-	6.822.769.436	693.473.626	444.728.242	2.170.064.211	10.131.035.515
67	Kab. Solok	8.100.965.255	-	-	4.883.388.578	892.339.840	36.146.276	2.170.064.211	7.981.938.905
68	Kab. Tanah Datar	4.989.539.913	-	-	1.757.042.390	918.735.378	143.697.934	2.170.064.211	4.989.539.913
69	Kota Bukit Tinggi	4.852.448.263	-	-	1.621.018.977	918.735.378	142.629.697	2.170.064.211	4.852.448.263
70	Kota Padang Panjang	4.852.448.263	-	-	1.621.018.977	918.735.378	142.629.697	2.170.064.211	4.852.448.263
71	Kota Padang	4.341.361.029	-	-	1.325.233.618	693.473.626	152.589.574	2.170.064.211	4.341.361.029
72	Kota Payakumbuh	4.852.618.915	-	-	1.621.018.977	918.735.378	142.800.349	2.170.064.211	4.852.618.915
73	Kota Sawahlunto	23.002.258.788	-	-	19.995.286.752	693.473.626	143.434.199	2.170.064.211	23.002.258.788
74	Kota Solok	4.852.448.263	-	-	1.621.018.977	918.735.378	142.629.697	2.170.064.211	4.852.448.263
75	Kota Pariaman	4.852.448.263	-	-	1.621.018.977	918.735.378	142.629.697	2.170.064.211	4.852.448.263
76	Kab. Pasaman Barat	4.869.680.313	-	-	1.632.078.740	918.735.378	148.801.984	2.170.064.211	4.869.680.313
77	Kab. Dharmasraya	6.574.582.682	-	-	3.201.493.314	918.735.378	66.223.129	2.170.064.211	6.356.516.032
78	Kab. Solok Selatan	20.599.430.023	-	-	2.017.888.583	16.215.355.855	45.684.974	2.170.064.211	20.448.993.623
79	Provinsi Riau	752.059.815.219	611.580.391.875	52.589.386.076	31.532.564.318	-	56.357.472.950	-	752.059.815.219
80	Kab. Bengkalis	561.297.585.215	525.505.697.235	9.561.705.711	5.618.822.338	-	18.441.295.720	2.170.064.211	561.297.585.215
81	Kab. Indragiri Hilir	187.129.061.956	111.196.432.618	9.561.705.711	50.126.930.128	-	14.073.929.288	2.170.064.211	187.129.061.956
82	Kab. Indragiri Hulu	154.566.043.975	115.921.190.968	9.561.705.711	14.988.248.616	-	6.152.850.769	2.170.064.211	148.794.060.275
83	Kab. Kampar	330.755.287.375	286.792.000.383	25.868.706.286	4.119.125.438	-	11.805.391.057	2.170.064.211	330.755.287.375

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Total
84	Kab. Kuantan Singingi	142.932.315.101	111.196.432.618	9.561.705.711	8.193.419.047	-	11.810.693.514	2.170.064.211	142.932.315.101
85	Kab. Pelalawan	234.957.761.593	117.286.188.511	81.025.467.298	4.112.274.317	-	30.363.767.256	2.170.064.211	234.957.761.593
86	Kab. Rokan Hilir	385.253.081.907	366.073.108.236	4.426.862.906	4.118.255.719	-	8.464.790.835	2.170.064.211	385.253.081.907
87	Kab. Rokan Hulu	142.685.801.370	117.127.244.446	9.561.705.711	4.633.137.715	-	9.193.649.287	2.170.064.211	142.685.801.370
88	Kab. Siak	357.806.982.648	324.125.297.740	6.091.877.848	4.112.274.317	-	21.307.468.532	2.170.064.211	357.806.982.648
89	Kota Dumai	138.110.384.692	111.196.432.618	9.561.705.711	5.456.699.515	-	9.725.482.637	2.170.064.211	138.110.384.692
90	Kota Pekanbaru	135.889.260.688	111.196.432.618	11.043.911.471	4.112.274.317	-	7.366.578.071	2.170.064.211	135.889.260.688
91	Kab. Kepulauan Meranti	178.532.611.424	145.603.619.134	9.188.222.643	9.882.201.095	-	11.688.504.341	2.170.064.211	178.532.611.424
92	Provinsi Jambi	450.810.194.151	112.329.322.523	206.013.842.423	107.712.414.445	-	24.754.614.760	-	450.810.194.151
93	Kab. Batanghari	133.413.066.636	29.382.788.875	44.709.376.079	48.609.329.651	-	8.541.507.820	2.170.064.211	133.413.066.636
94	Kab. Bungo	151.889.289.421	22.465.862.953	41.202.767.819	82.989.512.046	-	3.061.082.392	2.170.064.211	151.889.289.421
95	Kab. Kerinci	89.438.847.277	22.465.862.953	41.202.767.819	20.574.683.107	-	3.025.469.187	2.170.064.211	89.438.847.277
96	Kab. Merangin	91.821.508.619	22.465.862.953	41.202.767.819	21.839.320.858	-	4.143.492.778	2.170.064.211	91.821.508.619
97	Kab. Muaro Jambi	92.003.768.517	26.695.378.936	39.176.096.809	20.028.296.467	-	3.933.932.094	2.170.064.211	92.003.768.517
98	Kab. Sarolangun	166.285.021.934	24.921.212.439	40.406.657.297	95.208.892.389	-	833.513.298	2.170.064.211	166.285.021.934
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	572.004.192.800	193.273.659.282	350.042.546.180	16.674.520.394	-	2.292.945.383	2.170.064.211	572.004.192.800
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	140.738.199.146	40.252.923.160	72.257.732.742	20.576.246.221	-	5.481.232.812	2.170.064.211	140.738.199.146
101	Kab. Tebo	108.586.627.482	23.222.558.663	41.202.767.819	38.061.994.304	-	3.929.242.485	2.170.064.211	108.586.627.482
102	Kota Jambi	91.016.107.337	24.028.390.888	41.202.767.819	20.574.505.834	-	3.040.378.585	2.170.064.211	91.016.107.337
103	Kota Sungai Penuh	89.279.085.391	22.465.862.953	41.202.767.819	20.574.505.834	-	2.865.884.574	2.170.064.211	89.279.085.391
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.693.658.949.343	142.984.741.344	601.761.471.917	921.281.335.031	4.539.351.453	23.092.049.598	-	1.693.658.949.343
105	Kab. Lahat	900.464.239.590	19.059.528.189	78.916.974.167	795.095.948.087	1.740.207.079	3.481.517.857	2.170.064.211	900.464.239.590
106	Kab. Musi Banyuasin	1.446.538.588.076	199.653.207.550	1.060.187.455.387	175.480.743.066	567.419.347	8.479.698.515	2.170.064.211	1.446.538.588.076
107	Kab. Musi Rawas	295.105.390.027	36.678.679.612	141.585.672.434	109.765.043.872	567.419.347	4.338.510.551	2.170.064.211	295.105.390.027
108	Kab. Muara Enim	1.091.582.638.541	30.866.243.139	119.610.505.877	927.734.304.709	6.178.295.348	4.440.328.557	2.170.064.211	1.091.582.638.541
109	Kab. Ogan Komering Ilir	232.582.333.666	17.873.092.957	75.220.183.962	113.450.154.022	567.419.347	23.301.419.167	2.170.064.211	232.582.333.666
110	Kab. Ogan Komering Ulu	241.597.791.325	32.767.716.781	84.692.124.732	118.676.447.445	567.419.347	877.299.459	2.170.064.211	241.597.791.325
111	Kota Palembang	205.994.692.895	17.873.092.957	75.220.183.962	108.062.243.186	567.419.347	2.101.689.232	2.170.064.211	205.994.692.895
112	Kota Prabumulih	218.341.620.769	25.119.957.077	81.154.800.321	107.227.690.581	567.419.347	2.101.689.232	2.170.064.211	218.341.620.769
113	Kota Pagar Alam	208.337.123.608	17.873.092.957	75.220.183.962	108.694.142.555	2.277.950.691	2.101.689.232	2.170.064.211	208.337.123.608
114	Kota Lubuk Linggau	212.000.334.149	17.873.092.957	75.220.183.962	113.446.768.449	567.419.347	2.722.805.223	2.170.064.211	212.000.334.149
115	Kab. Banyuasin	219.884.751.538	22.686.547.224	75.220.183.962	116.230.867.566	567.419.347	3.009.669.228	2.170.064.211	219.884.751.538
116	Kab. Ogan Ilir	214.841.488.679	20.714.247.487	75.220.183.962	113.446.768.449	567.419.347	2.722.805.223	2.170.064.211	214.841.488.679
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	212.713.749.859	17.873.092.957	75.220.183.962	113.456.510.695	567.419.347	3.426.478.687	2.170.064.211	212.713.749.859
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	213.760.701.201	17.873.092.957	75.220.183.962	115.016.946.562	584.505.611	2.895.907.898	2.170.064.211	213.760.701.201
119	Kab. Empat Lawang	203.054.848.538	17.873.092.957	75.220.183.962	105.122.398.829	567.419.347	2.101.689.232	2.170.064.211	203.054.848.538
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	198.699.605.924	28.045.457.541	70.779.245.726	95.035.729.867	567.419.347	2.101.689.232	2.170.064.211	198.699.605.924
121	Kab. Musi Rawas Utara	263.869.764.430	25.833.391.143	75.220.183.962	157.870.131.804	567.419.347	2.208.573.963	2.170.064.211	263.869.764.430
122	Provinsi Bengkulu	67.182.013.012	-	-	65.742.225.662	185.710.487	674.503.513	-	66.602.439.662
123	Kab. Bengkulu Selatan	17.055.148.044	-	-	14.820.322.469	41.267.889	23.493.475	2.170.064.211	17.055.148.044
124	Kab. Bengkulu Utara	82.991.667.870	-	-	80.668.497.697	41.267.889	111.838.073	2.170.064.211	82.991.667.870
125	Kab. Rejang Lebong	16.866.572.347	-	-	14.495.677.208	177.523.619	23.307.309	2.170.064.211	16.866.572.347
126	Kota Bengkulu	16.983.882.016	-	-	14.739.785.716	41.267.889	32.764.200	2.170.064.211	16.983.882.016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
127	Kab. Kaur	16.844.331.563	-	-	14.576.481.482	41.267.889	56.517.981	2.170.064.211	16.844.331.563
128	Kab. Seluma	20.334.508.609	-	-	18.093.235.931	41.267.889	29.940.578	2.170.064.211	20.334.508.609
129	Kab. Mukomuko	18.756.598.251	-	-	14.740.348.404	41.267.889	1.804.917.747	2.170.064.211	18.756.598.251
130	Kab. Lebong	18.527.957.646	-	-	16.292.448.355	41.267.889	5.631.891	2.170.064.211	18.509.412.346
131	Kab. Kepahiang	17.176.527.205	-	-	14.740.392.996	235.167.461	30.902.537	2.170.064.211	17.176.527.205
132	Kab. Bengkulu Tengah	66.242.053.824	-	-	63.998.821.866	41.267.889	31.899.858	2.170.064.211	66.242.053.824
133	Provinsi Lampung	109.167.910.292	76.228.351.740	-	6.955.832.688	25.226.481.248	748.757.366	-	109.159.423.042
134	Kab. Lampung Barat	17.581.539.774	10.350.835.298	-	1.324.551.260	3.629.650.852	106.438.153	2.170.064.211	17.581.539.774
135	Kab. Lampung Selatan	17.778.744.519	10.350.835.298	-	1.349.340.263	3.802.066.594	106.438.153	2.170.064.211	17.778.744.519
136	Kab. Lampung Tengah	17.299.120.496	10.350.835.298	-	1.068.000.892	3.603.781.942	106.438.153	2.170.064.211	17.299.120.496
137	Kab. Lampung Utara	17.154.681.923	10.350.835.298	-	923.562.319	3.603.781.942	106.438.153	2.170.064.211	17.154.681.923
138	Kab. Lampung Timur	50.558.508.982	45.334.008.800	-	912.284.462	2.035.713.356	106.438.153	2.170.064.211	50.558.508.982
139	Kab. Tanggamus	75.979.353.451	10.350.835.298	-	13.833.761.213	49.510.119.789	114.572.940	2.170.064.211	75.979.353.451
140	Kab. Tulang Bawang	17.318.125.995	10.350.835.298	-	1.087.006.391	3.603.781.942	106.438.153	2.170.064.211	17.318.125.995
141	Kab. Way Kanan	19.076.325.219	10.350.835.298	-	1.325.519.726	3.603.781.942	1.626.124.042	2.170.064.211	19.076.325.219
142	Kota Bandar Lampung	17.315.224.354	10.350.835.298	-	912.284.462	3.775.602.230	106.438.153	2.170.064.211	17.315.224.354
143	Kota Metro	17.143.404.066	10.350.835.298	-	912.284.462	3.603.781.942	106.438.153	2.170.064.211	17.143.404.066
144	Kab. Pesawaran	17.839.987.196	10.350.835.298	-	1.074.961.504	4.137.688.030	106.438.153	2.170.064.211	17.839.987.196
145	Kab. Pringsewu	17.145.365.854	10.350.835.298	-	914.246.250	3.603.781.942	106.438.153	2.170.064.211	17.145.365.854
146	Kab. Mesuji	17.725.535.642	10.350.835.298	-	1.186.036.608	3.603.781.942	414.817.583	2.170.064.211	17.725.535.642
147	Kab. Tulang Bawang Barat	17.143.404.066	10.350.835.298	-	912.284.462	3.603.781.942	106.438.153	2.170.064.211	17.143.404.066
148	Kab. Pesisir Barat	17.150.394.563	10.350.835.298	-	919.274.959	3.603.781.942	106.438.153	2.170.064.211	17.150.394.563
149	Provinsi DKI Jakarta	55.633.238.419	53.463.192.563	-	-	-	-	2.170.045.856	55.633.238.419
150	Provinsi Jawa Barat	446.003.773.277	93.573.507.095	82.565.964.321	20.984.626.357	247.432.369.487	1.447.306.017	-	446.003.773.277
151	Kab. Bandung	360.861.619.486	6.965.809.916	6.236.984.395	1.546.030.378	343.760.113.681	182.616.905	2.170.064.211	360.861.619.486
152	Kab. Bekasi	47.714.102.408	9.185.494.045	17.609.546.872	1.335.155.919	17.302.510.811	111.330.550	2.170.064.211	47.714.102.408
153	Kab. Bogor	141.852.961.230	6.965.809.916	6.236.984.395	38.300.325.654	87.991.297.723	188.479.331	2.170.064.211	141.852.961.230
154	Kab. Ciamis	39.753.547.860	6.965.809.916	6.236.984.395	1.545.481.698	22.301.699.463	533.508.177	2.170.064.211	39.753.547.860
155	Kab. Cianjur	41.133.612.089	6.965.809.916	6.236.984.395	2.580.959.833	22.301.699.463	878.094.271	2.170.064.211	41.133.612.089
156	Kab. Cirebon	39.382.182.285	6.965.809.916	6.236.984.395	1.570.160.874	22.301.699.463	137.463.426	2.170.064.211	39.382.182.285
157	Kab. Garut	141.819.433.814	6.965.809.916	6.236.984.395	1.985.523.853	124.283.749.017	177.302.422	2.170.064.211	141.819.433.814
158	Kab. Indramayu	63.558.951.486	21.067.863.156	16.232.000.398	1.545.481.698	22.301.699.463	241.842.560	2.170.064.211	63.558.951.486
159	Kab. Karawang	67.588.751.083	14.149.634.172	27.260.432.710	1.547.930.191	22.301.699.463	158.990.336	2.170.064.211	67.588.751.083
160	Kab. Kuningan	39.571.596.953	6.965.809.916	6.236.984.395	1.545.481.698	22.301.699.463	351.557.270	2.170.064.211	39.571.596.953
161	Kab. Majalengka	40.354.275.058	7.112.287.284	7.058.179.935	1.547.781.578	22.301.699.463	164.262.587	2.170.064.211	40.354.275.058
162	Kab. Purwakarta	39.534.024.076	6.965.809.916	6.236.984.395	1.506.725.774	22.394.278.228	260.161.552	2.170.064.211	39.534.024.076
163	Kab. Subang	71.677.007.329	11.710.271.404	38.822.874.643	1.335.155.919	17.496.199.838	142.441.314	2.170.064.211	71.677.007.329
164	Kab. Sukabumi	109.547.573.529	6.965.809.916	6.236.984.395	3.743.881.103	89.997.226.928	433.606.976	2.170.064.211	109.547.573.529
165	Kab. Sumedang	39.512.238.970	6.965.809.916	6.236.984.395	1.547.964.531	22.301.699.463	289.716.454	2.170.064.211	39.512.238.970
166	Kab. Tasikmalaya	39.300.865.499	6.965.809.916	6.236.984.395	1.360.819.789	22.301.699.463	265.487.725	2.170.064.211	39.300.865.499
167	Kota Bandung	29.998.449.528	6.391.704.974	2.687.683.063	1.335.155.919	17.302.510.811	111.330.550	2.170.064.211	29.998.449.528
168	Kota Bekasi	42.261.384.910	7.319.372.464	8.786.531.187	1.545.481.698	22.301.699.463	138.235.887	2.170.064.211	42.261.384.910
169	Kota Bogor	39.358.138.570	6.965.809.916	6.236.984.395	1.545.481.698	22.301.699.463	138.098.887	2.170.064.211	39.358.138.570

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
170	Kota Cirebon	39.358.275.570	6.965.809.916	6.236.984.395	1.545.481.698	22.301.699.463	138.235.887	2.170.064.211	39.358.275.570
171	Kota Depok	39.358.275.570	6.965.809.916	6.236.984.395	1.545.481.698	22.301.699.463	138.235.887	2.170.064.211	39.358.275.570
172	Kota Sukabumi	39.366.137.756	6.965.809.916	6.236.984.395	1.545.481.698	22.301.699.463	146.098.073	2.170.064.211	39.366.137.756
173	Kota Tasikmalaya	39.446.305.306	6.965.809.916	6.236.984.395	1.545.481.698	22.301.699.463	226.265.623	2.170.064.211	39.446.305.306
174	Kota Cimahi	39.358.275.570	6.965.809.916	6.236.984.395	1.545.481.698	22.301.699.463	138.235.887	2.170.064.211	39.358.275.570
175	Kota Banjar	40.176.872.266	6.965.809.916	6.236.984.395	1.625.053.852	22.301.699.463	877.260.429	2.170.064.211	40.176.872.266
176	Kab. Bandung Barat	39.554.519.587	6.965.809.916	6.236.984.395	1.550.246.880	22.422.798.184	208.616.001	2.170.064.211	39.554.519.587
177	Kab. Pangandaran	39.614.345.770	6.965.809.916	6.236.984.395	1.545.481.698	22.301.699.463	394.306.087	2.170.064.211	39.614.345.770
178	Provinsi Jawa Tengah	20.171.262.745	1.206.236.936	7.082.427.885	216.084.615	3.470.171.426	8.196.341.883	-	20.171.262.745
179	Kab. Banjarnegara	7.089.571.377	70.952.375	416.612.727	8.192.927	3.880.786.760	542.962.377	2.170.064.211	7.089.571.377
180	Kab. Banyumas	3.950.989.899	70.952.375	416.612.727	328.278.039	363.415.400	601.667.147	2.170.064.211	3.950.989.899
181	Kab. Batang	4.548.284.637	70.952.375	416.612.727	2.597.060	316.703.241	1.571.355.023	2.170.064.211	4.548.284.637
182	Kab. Blora	23.032.921.356	2.399.074.700	13.710.829.352	2.322.149	61.503.460	4.689.127.484	2.170.064.211	23.032.921.356
183	Kab. Boyolali	3.587.082.026	70.952.375	416.612.727	3.163.260	212.214.314	714.075.139	2.170.064.211	3.587.082.026
184	Kab. Brebes	3.933.014.629	70.952.375	416.612.727	4.214.871	260.273.935	1.010.896.510	2.170.064.211	3.933.014.629
185	Kab. Cilacap	3.753.895.615	70.952.375	416.612.727	111.648.007	204.126.069	780.492.226	2.170.064.211	3.753.895.615
186	Kab. Demak	3.371.166.779	70.952.375	416.612.727	1.795.653	204.126.069	507.615.744	2.170.064.211	3.371.166.779
187	Kab. Grobogan	5.909.425.435	70.952.375	416.612.727	52.857.369	204.126.069	2.994.812.684	2.170.064.211	5.909.425.435
188	Kab. Jepara	3.521.854.628	70.952.375	416.612.727	46.072.660	204.126.069	614.026.586	2.170.064.211	3.521.854.628
189	Kab. Karanganyar	3.730.229.527	70.952.375	416.612.727	2.073.896	599.131.275	471.395.043	2.170.064.211	3.730.229.527
190	Kab. Kebumen	3.389.852.202	70.952.375	416.612.727	4.665.222	204.126.069	523.431.598	2.170.064.211	3.389.852.202
191	Kab. Kendal	4.388.082.890	70.952.375	416.612.727	6.236.019	275.616.593	1.448.600.965	2.170.064.211	4.388.082.890
192	Kab. Klaten	3.361.233.118	70.952.375	416.612.727	2.337.144	204.126.069	497.140.592	2.170.064.211	3.361.233.118
193	Kab. Kudus	3.338.670.363	70.952.375	416.612.727	1.795.653	204.126.069	475.119.328	2.170.064.211	3.338.670.363
194	Kab. Magelang	3.493.675.153	70.952.375	416.612.727	6.832.843	332.857.312	496.355.685	2.170.064.211	3.493.675.153
195	Kab. Pati	3.909.019.915	70.952.375	416.612.727	1.850.245	204.126.069	1.045.414.288	2.170.064.211	3.909.019.915
196	Kab. Pekalongan	3.591.486.174	70.952.375	416.612.727	3.121.891	376.743.621	553.991.349	2.170.064.211	3.591.486.174
197	Kab. Pemalang	4.843.276.445	70.952.375	416.612.727	5.544.442	214.356.330	1.965.746.360	2.170.064.211	4.843.276.445
198	Kab. Purbalingga	3.354.524.628	70.952.375	416.612.727	3.906.638	217.492.339	475.496.338	2.170.064.211	3.354.524.628
199	Kab. Purworejo	3.336.759.473	70.952.375	416.612.727	14.752.048	204.126.069	460.252.043	2.170.064.211	3.336.759.473
200	Kab. Rembang	4.943.396.862	99.398.853	624.384.879	81.753.530	204.126.069	1.763.669.320	2.170.064.211	4.943.396.862
201	Kab. Semarang	3.755.818.576	70.952.375	416.612.727	4.263.189	643.374.606	450.551.468	2.170.064.211	3.755.818.576
202	Kab. Sragen	3.584.680.144	70.952.375	416.612.727	1.900.619	268.725.864	656.424.348	2.170.064.211	3.584.680.144
203	Kab. Sukoharjo	3.342.407.906	70.952.375	416.612.727	8.788.390	204.126.069	471.864.134	2.170.064.211	3.342.407.906
204	Kab. Tegal	3.773.132.035	70.952.375	416.612.727	10.142.957	209.601.342	895.758.423	2.170.064.211	3.773.132.035
205	Kab. Temanggung	3.562.506.100	70.952.375	416.612.727	1.795.653	271.747.771	631.333.363	2.170.064.211	3.562.506.100
206	Kab. Wonogiri	3.694.862.207	70.952.375	416.612.727	282.598.470	211.699.033	542.935.391	2.170.064.211	3.694.862.207
207	Kab. Wonosobo	4.763.262.990	70.952.375	416.612.727	1.795.653	1.534.989.919	568.848.105	2.170.064.211	4.763.262.990
208	Kota Magelang	3.335.415.169	70.952.375	416.612.727	1.795.653	204.126.069	471.864.134	2.170.064.211	3.335.415.169
209	Kota Pekalongan	3.335.415.169	70.952.375	416.612.727	1.795.653	204.126.069	471.864.134	2.170.064.211	3.335.415.169
210	Kota Salatiga	3.340.952.497	70.952.375	416.612.727	1.795.653	209.663.397	471.864.134	2.170.064.211	3.340.952.497
211	Kota Semarang	3.276.287.549	70.952.375	416.612.727	1.795.653	204.126.069	412.736.514	2.170.064.211	3.276.287.549
212	Kota Surakarta	3.335.415.169	70.952.375	416.612.727	1.795.653	204.126.069	471.864.134	2.170.064.211	3.335.415.169

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
213	Kota Tegal	3.335.415.169	70.952.375	416.612.727	1.795.653	204.126.069	471.864.134	2.170.064.211	3.335.415.169
214	Provinsi DI Yogyakarta	108.770.050	-	-	64.793.890	-	43.976.160	-	108.770.050
215	Kab. Bantul	2.223.182.992	-	-	14.729.193	-	38.389.588	2.170.064.211	2.223.182.992
216	Kab. Gunung Kidul	2.323.544.593	-	-	16.474.601	-	137.005.781	2.170.064.211	2.323.544.593
217	Kab. Kulon Progo	2.398.755.062	-	-	189.934.381	-	38.756.470	2.170.064.211	2.398.755.062
218	Kab. Sleman	2.206.780.930	-	-	14.729.193	-	21.987.526	2.170.064.211	2.206.780.930
219	Kota Yogyakarta	2.243.417.233	-	-	14.729.193	-	58.623.829	2.170.064.211	2.243.417.233
220	Provinsi Jawa Timur	1.565.830.458.155	1.436.651.594.288	59.961.041.731	61.367.437.600	614.537.057	7.235.847.479	-	1.565.830.458.155
221	Kab. Bangkalan	89.060.295.798	78.324.557.522	4.703.274.881	3.301.366.974	49.481.992	511.550.218	2.170.064.211	89.060.295.798
222	Kab. Banyuwangi	210.661.285.966	77.737.361.098	4.486.402.212	122.927.391.453	336.421.562	3.003.645.430	2.170.064.211	210.661.285.966
223	Kab. Blitar	88.766.581.295	77.737.361.098	4.486.402.212	3.305.394.049	49.481.992	1.017.877.733	2.170.064.211	88.766.581.295
224	Kab. Bojonegoro	2.608.614.501.915	2.584.134.484.634	17.075.173.400	3.300.135.576	33.217.320	1.901.426.774	2.170.064.211	2.608.614.501.915
225	Kab. Bondowoso	88.830.447.067	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.135.576	412.082.859	724.401.111	2.170.064.211	88.830.447.067
226	Kab. Gresik	106.801.942.101	89.194.554.538	11.548.870.714	3.316.955.336	49.481.992	522.015.310	2.170.064.211	106.801.942.101
227	Kab. Jember	90.172.862.853	77.737.361.098	4.486.402.212	3.700.941.667	49.481.992	2.028.611.673	2.170.064.211	90.172.862.853
228	Kab. Jombang	85.365.134.310	76.186.009.444	3.184.194.246	3.300.135.576	33.217.320	491.513.513	2.170.064.211	85.365.134.310
229	Kab. Kediri	88.595.459.301	77.737.361.098	4.486.402.212	3.307.753.003	49.481.992	844.396.785	2.170.064.211	88.595.459.301
230	Kab. Lamongan	88.707.941.436	77.737.361.098	4.486.402.212	3.313.300.908	49.481.992	951.331.015	2.170.064.211	88.707.941.436
231	Kab. Lumajang	89.346.543.026	77.737.361.098	4.486.402.212	3.645.316.426	49.481.992	1.257.917.087	2.170.064.211	89.346.543.026
232	Kab. Madiun	88.446.207.969	77.737.361.098	3.473.072.681	3.300.135.576	90.858.946	1.674.715.457	2.170.064.211	88.446.207.969
233	Kab. Magetan	88.286.694.079	77.737.361.098	4.486.402.212	3.310.676.626	95.080.916	487.109.016	2.170.064.211	88.286.694.079
234	Kab. Malang	88.528.419.937	77.737.361.098	4.486.402.212	3.304.725.760	76.784.639	753.082.017	2.170.064.211	88.528.419.937
235	Kab. Mojokerto	88.334.078.276	77.737.361.098	4.486.402.212	3.310.728.693	128.653.427	500.868.635	2.170.064.211	88.334.078.276
236	Kab. Nganjuk	87.946.004.324	77.737.361.098	3.433.592.035	3.300.135.576	33.217.320	1.271.634.084	2.170.064.211	87.946.004.324
237	Kab. Ngawi	88.254.862.736	77.737.361.098	3.516.492.658	3.300.135.576	113.030.422	1.417.778.771	2.170.064.211	88.254.862.736
238	Kab. Pacitan	88.420.569.585	77.737.361.098	4.486.402.212	3.504.625.964	49.481.992	472.634.108	2.170.064.211	88.420.569.585
239	Kab. Pamekasan	88.219.731.198	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.135.576	49.481.992	476.286.109	2.170.064.211	88.219.731.198
240	Kab. Pasuruan	88.359.916.510	77.737.361.098	4.486.402.212	3.372.497.605	109.148.326	484.443.058	2.170.064.211	88.359.916.510
241	Kab. Ponorogo	89.534.208.721	77.737.361.098	4.486.402.212	3.302.588.087	645.186.402	1.192.606.711	2.170.064.211	89.534.208.721
242	Kab. Probolinggo	88.641.520.273	77.737.361.098	4.486.402.212	3.310.403.828	49.481.992	887.806.932	2.170.064.211	88.641.520.273
243	Kab. Sampang	88.215.851.851	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.135.576	49.481.992	472.406.762	2.170.064.211	88.215.851.851
244	Kab. Sidoarjo	96.851.424.836	79.648.998.188	11.209.527.107	3.300.135.576	49.481.992	473.217.762	2.170.064.211	96.851.424.836
245	Kab. Situbondo	88.214.443.715	77.737.361.098	4.486.402.212	3.306.967.044	51.445.767	462.203.383	2.170.064.211	88.214.443.715
246	Kab. Sumenep	104.388.218.491	89.700.312.637	8.719.343.459	3.300.135.576	49.481.992	448.880.616	2.170.064.211	104.388.218.491
247	Kab. Trenggalek	88.361.800.658	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.240.542	49.481.992	618.250.603	2.170.064.211	88.361.800.658
248	Kab. Tuban	97.010.399.518	86.862.295.185	3.184.194.246	3.458.189.552	33.217.320	1.302.439.004	2.170.064.211	97.010.399.518
249	Kab. Tulungagung	88.338.254.369	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.891.998	49.481.992	594.052.858	2.170.064.211	88.338.254.369
250	Kota Blitar	88.216.662.851	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.135.576	49.481.992	473.217.762	2.170.064.211	88.216.662.851
251	Kota Kediri	88.216.662.851	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.135.576	49.481.992	473.217.762	2.170.064.211	88.216.662.851
252	Kota Madiun	88.216.662.851	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.135.576	49.481.992	473.217.762	2.170.064.211	88.216.662.851
253	Kota Malang	88.216.662.851	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.135.576	49.481.992	473.217.762	2.170.064.211	88.216.662.851
254	Kota Mojokerto	88.216.662.851	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.135.576	49.481.992	473.217.762	2.170.064.211	88.216.662.851
255	Kota Pasuruan	88.216.662.851	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.135.576	49.481.992	473.217.762	2.170.064.211	88.216.662.851

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
256	Kota Probolinggo	88.217.118.808	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.591.533	49.481.992	473.217.762	2.170.064.211	88.217.118.808
257	Kota Surabaya	68.806.293.384	59.737.067.363	3.184.194.246	3.300.135.576	33.217.320	381.614.668	2.170.064.211	68.806.293.384
258	Kota Batu	88.277.905.534	77.737.361.098	4.486.402.212	3.300.135.576	106.558.624	477.383.813	2.170.064.211	88.277.905.534
259	Provinsi Kalimantan Barat	221.419.393.267	-	-	200.333.164.105	-	21.086.229.162	-	221.419.393.267
260	Kab. Bengkayang	28.372.850.941	-	-	25.539.857.613	-	662.929.117	2.170.064.211	28.372.850.941
261	Kab. Landak	47.024.198.771	-	-	44.180.842.206	-	673.292.354	2.170.064.211	47.024.198.771
262	Kab. Kapuas Hulu	35.197.958.215	-	-	29.788.988.294	-	3.238.905.710	2.170.064.211	35.197.958.215
263	Kab. Ketapang	259.219.056.368	-	-	252.393.911.984	-	4.655.080.173	2.170.064.211	259.219.056.368
264	Kab. Mempawah	33.192.410.070	-	-	30.349.084.533	-	673.261.326	2.170.064.211	33.192.410.070
265	Kab. Sambas	31.812.955.319	-	-	28.996.068.668	-	646.822.440	2.170.064.211	31.812.955.319
266	Kab. Sanggau	224.875.963.698	-	-	221.735.190.439	-	970.709.048	2.170.064.211	224.875.963.698
267	Kab. Sintang	29.900.736.913	-	-	26.243.723.315	-	1.486.949.387	2.170.064.211	29.900.736.913
268	Kota Pontianak	28.508.896.955	-	-	25.647.542.134	-	691.290.610	2.170.064.211	28.508.896.955
269	Kota Singkawang	31.688.353.914	-	-	28.987.061.899	-	531.227.804	2.170.064.211	31.688.353.914
270	Kab. Sekadau	29.296.892.554	-	-	26.452.046.661	-	674.781.682	2.170.064.211	29.296.892.554
271	Kab. Melawi	33.758.552.300	-	-	30.648.693.666	-	939.794.423	2.170.064.211	33.758.552.300
272	Kab. Kayong Utara	35.224.385.137	-	-	32.391.618.975	-	662.701.951	2.170.064.211	35.224.385.137
273	Kab. Kubu Raya	31.986.610.460	-	-	27.034.013.861	-	2.782.532.388	2.170.064.211	31.986.610.460
274	Provinsi Kalimantan Tengah	1.031.090.867.063	140.440.030	1.329.178.194	761.963.157.364	-	267.658.091.475	-	1.031.090.867.063
275	Kab. Barito Selatan	217.927.738.355	21.604.111	204.487.758	208.128.571.089	-	7.403.011.186	2.170.064.211	217.927.738.355
276	Kab. Barito Utara	499.428.821.091	280.881.170	2.658.357.496	480.437.074.990	-	5.112.979.724	2.170.064.211	490.659.357.591
277	Kab. Kapuas	523.466.325.000	21.604.111	204.487.758	509.266.504.330	-	11.803.664.590	2.170.064.211	523.466.325.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	121.598.948.431	21.604.111	204.487.758	112.085.369.674	-	7.117.422.677	2.170.064.211	121.598.948.431
279	Kab. Kotawaringin Timur	152.777.025.523	21.604.111	204.487.758	139.016.791.370	-	11.364.078.073	2.170.064.211	152.777.025.523
280	Kota Palangkaraya	113.496.384.571	21.604.111	204.487.758	105.933.685.130	-	1.203.506.761	2.170.064.211	109.533.347.971
281	Kab. Katingan	154.068.239.071	21.604.111	204.487.758	132.361.307.216	-	19.310.775.775	2.170.064.211	154.068.239.071
282	Kab. Seruyan	125.184.745.552	21.604.111	204.487.758	105.180.605.858	-	17.607.983.614	2.170.064.211	125.184.745.552
283	Kab. Sukamara	115.474.075.057	21.604.111	204.487.758	107.847.641.488	-	5.230.277.489	2.170.064.211	115.474.075.057
284	Kab. Lamandau	144.864.974.773	21.604.111	204.487.758	131.896.751.431	-	10.572.067.262	2.170.064.211	144.864.974.773
285	Kab. Gunung Mas	139.492.795.080	21.604.111	204.487.758	125.872.002.533	-	11.224.636.467	2.170.064.211	139.492.795.080
286	Kab. Pulang Pisau	117.745.954.652	21.604.111	204.487.758	109.340.771.270	-	6.009.027.302	2.170.064.211	117.745.954.652
287	Kab. Murung Raya	537.270.103.091	21.604.111	204.487.758	522.493.027.307	-	12.380.919.704	2.170.064.211	537.270.103.091
288	Kab. Barito Timur	170.396.082.227	21.604.111	204.487.758	162.756.558.312	-	5.243.367.835	2.170.064.211	170.396.082.227
289	Provinsi Kalimantan Selatan	2.499.334.102.997	2.233.908.941	-	2.493.552.271.476	-	3.547.922.580	-	2.499.334.102.997
290	Kab. Banjar	594.320.744.799	372.316.292	-	591.677.873.479	-	100.490.817	2.170.064.211	594.320.744.799
291	Kab. Barito Kuala	409.171.148.649	372.316.292	-	406.514.051.149	-	114.716.997	2.170.064.211	409.171.148.649
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	623.333.279.702	372.316.292	-	620.676.175.554	-	114.723.645	2.170.064.211	623.333.279.702
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	411.083.883.630	372.316.292	-	408.442.861.780	-	98.641.347	2.170.064.211	411.083.883.630
294	Kab. Hulu Sungai Utara	406.379.603.102	372.316.292	-	403.725.938.591	-	25.922.758	2.170.064.211	406.294.241.852
295	Kab. Kotabaru	678.960.616.677	372.316.292	-	676.230.017.987	-	188.218.187	2.170.064.211	678.960.616.677
296	Kab. Tabalong	903.346.964.193	4.455.338.208	-	896.115.894.194	-	605.667.580	2.170.064.211	903.346.964.193
297	Kab. Tanah Laut	1.199.713.349.410	372.316.292	-	1.196.544.880.633	-	626.088.274	2.170.064.211	1.199.713.349.410
298	Kab. Tapin	823.751.332.979	372.316.292	-	821.091.560.452	-	117.392.024	2.170.064.211	823.751.332.979

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
299	Kota Banjarbaru	423.327.057.563	372.316.292	-	420.598.691.013	-	185.986.047	2.170.064.211	423.327.057.563
300	Kota Banjarmasin	423.015.357.829	372.316.292	-	420.265.780.498	-	207.196.828	2.170.064.211	423.015.357.829
301	Kab. Balangan	1.624.376.525.863	384.791.751	-	1.621.722.896.686	-	98.773.215	2.170.064.211	1.624.376.525.863
302	Kab. Tanah Bumbu	1.437.446.531.404	372.316.292	-	1.434.414.810.432	-	489.340.469	2.170.064.211	1.437.446.531.404
303	Provinsi Kalimantan Timur	5.963.938.852.933	293.067.256.896	483.478.443.602	4.963.275.578.459	-	224.117.573.976	-	5.963.938.852.933
304	Kab. Berau	2.447.631.290.308	62.738.631.494	101.454.529.268	2.256.888.079.952	-	24.379.985.383	2.170.064.211	2.447.631.290.308
305	Kab. Kutai Kartanegara	4.532.096.221.189	352.514.305.843	440.419.943.679	3.720.469.270.102	-	16.522.637.354	2.170.064.211	4.532.096.221.189
306	Kab. Kutai Barat	2.218.568.173.945	62.738.631.494	101.454.529.268	2.019.240.588.848	-	32.964.360.124	2.170.064.211	2.218.568.173.945
307	Kab. Kutai Timur	4.368.414.819.491	68.223.982.481	100.483.185.261	4.173.754.123.226	-	23.783.464.312	2.170.064.211	4.368.414.819.491
308	Kab. Paser	2.132.908.191.900	62.738.631.494	101.454.529.268	1.957.754.797.940	-	8.790.168.987	2.170.064.211	2.132.908.191.900
309	Kota Balikpapan	1.258.708.299.648	62.738.631.494	101.454.529.268	1.085.651.125.189	-	6.693.949.486	2.170.064.211	1.258.708.299.648
310	Kota Bontang	1.289.911.215.432	76.556.811.353	112.325.438.002	1.092.282.426.406	-	2.422.151.860	2.170.064.211	1.285.756.891.832
311	Kota Samarinda	1.481.815.256.300	64.219.397.166	102.668.830.099	1.306.208.269.088	-	6.548.695.736	2.170.064.211	1.481.815.256.300
312	Kab. Penajam Paser Utara	1.349.634.178.257	83.841.164.150	132.578.771.688	1.122.592.390.177	-	8.451.788.031	2.170.064.211	1.349.634.178.257
313	Kab. Mahakam Ulu	1.247.729.294.038	62.738.631.494	101.454.529.268	1.067.367.621.197	-	13.998.447.868	2.170.064.211	1.247.729.294.038
314	Provinsi Sulawesi Utara	151.068.410.894	-	-	133.217.544.753	17.836.751.883	14.114.258	-	151.068.410.894
315	Kab. Bolaang Mongondow	67.260.004.075	-	-	62.517.482.346	2.571.453.552	1.003.966	2.170.064.211	67.260.004.075
316	Kab. Minahasa	41.368.308.128	-	-	18.524.230.405	20.673.009.546	1.003.966	2.170.064.211	41.368.308.128
317	Kab. Sangihe	25.600.265.196	-	-	20.881.089.561	2.548.107.458	1.003.966	2.170.064.211	25.600.265.196
318	Kota Bitung	156.947.142.736	-	-	152.227.967.101	2.548.107.458	1.003.966	2.170.064.211	156.947.142.736
319	Kota Manado	23.423.622.022	-	-	18.524.230.405	2.728.323.440	1.003.966	2.170.064.211	23.423.622.022
320	Kab. Kepulauan Talaud	23.243.406.040	-	-	18.524.230.405	2.548.107.458	1.003.966	2.170.064.211	23.243.406.040
321	Kab. Minahasa Selatan	24.829.495.188	-	-	19.985.805.633	2.672.621.378	233.866	2.170.064.211	24.828.725.088
322	Kota Tomohon	36.997.220.917	-	-	18.524.466.796	16.301.685.944	1.003.966	2.170.064.211	36.997.220.917
323	Kab. Minahasa Utara	78.921.898.958	-	-	73.150.915.898	3.599.914.883	1.003.966	2.170.064.211	78.921.898.958
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	23.243.406.040	-	-	18.524.230.405	2.548.107.458	1.003.966	2.170.064.211	23.243.406.040
325	Kota Kotamobagu	23.642.462.151	-	-	18.688.460.721	2.782.933.253	233.866	2.170.064.211	23.641.692.051
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	23.569.690.224	-	-	18.848.667.336	2.548.107.458	2.851.219	2.170.064.211	23.569.690.224
327	Kab. Minahasa Tenggara	24.656.335.119	-	-	19.873.277.826	2.580.874.676	32.118.406	2.170.064.211	24.656.335.119
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	27.457.081.774	-	-	22.643.125.519	2.642.888.078	1.003.966	2.170.064.211	27.457.081.774
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	42.342.290.243	-	-	37.611.913.625	2.548.107.458	12.204.949	2.170.064.211	42.342.290.243
330	Provinsi Sulawesi Tengah	445.771.478.960	29.840.340.356	160.422.462.594	248.120.059.439	-	7.388.616.571	-	445.771.478.960
331	Kab. Banggai	446.014.699.896	59.554.702.787	320.844.930.512	63.069.798.253	-	375.204.133	2.170.064.211	446.014.699.896
332	Kab. Banggai Kepulauan	70.925.842.825	4.973.391.445	26.737.074.715	36.886.917.384	-	158.395.070	2.170.064.211	70.925.842.825
333	Kab. Buol	77.266.220.722	4.973.391.445	26.737.074.715	43.097.973.373	-	287.716.978	2.170.064.211	77.266.220.722
334	Kab. Tolitoli	77.219.888.906	4.973.391.445	26.737.074.715	42.952.242.085	-	387.116.450	2.170.064.211	77.219.888.906
335	Kab. Donggala	71.033.219.220	4.973.391.445	26.737.074.715	36.941.258.652	-	49.251.047	2.170.064.211	70.871.040.070
336	Kab. Morowali	394.663.735.276	4.973.391.445	26.737.074.715	359.921.016.188	-	317.548.817	2.170.064.211	394.119.095.376
337	Kab. Poso	71.842.717.569	4.973.391.445	26.737.074.715	37.739.047.386	-	223.139.812	2.170.064.211	71.842.717.569
338	Kota Palu	70.995.927.819	4.973.391.445	26.737.074.715	36.957.002.378	-	158.395.070	2.170.064.211	70.995.927.819
339	Kab. Parigi Moutong	71.828.203.194	4.973.391.445	26.737.074.715	37.745.021.236	-	202.651.587	2.170.064.211	71.828.203.194
340	Kab. Tojo Una Una	73.311.803.891	4.973.391.445	26.737.074.715	39.221.989.772	-	209.283.748	2.170.064.211	73.311.803.891
341	Kab. Sigi	76.351.553.984	4.973.391.445	26.737.074.715	42.262.937.941	-	208.085.672	2.170.064.211	76.351.553.984

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
342	Kab. Banggai Laut	70.606.351.788	4.973.391.445	26.737.074.715	36.567.426.347	-	158.395.070	2.170.064.211	70.606.351.788
343	Kab. Morowali Utara	152.672.015.482	5.099.370.373	26.737.074.715	118.098.220.920	-	567.285.263	2.170.064.211	152.672.015.482
344	Provinsi Sulawesi Selatan	138.542.614.566	1.796.973	9.298.233.537	124.507.713.889	-	4.734.870.167	-	138.542.614.566
345	Kab. Bantaeng	13.441.783.165	156.017	808.540.793	10.401.460.687	-	61.561.457	2.170.064.211	13.441.783.165
346	Kab. Barru	13.540.673.687	156.017	808.540.793	10.503.202.114	-	58.710.552	2.170.064.211	13.540.673.687
347	Kab. Bone	15.190.350.371	156.017	808.540.793	12.140.834.627	-	70.754.723	2.170.064.211	15.190.350.371
348	Kab. Bulukumba	13.451.966.826	156.017	808.540.793	10.401.721.039	-	71.484.766	2.170.064.211	13.451.966.826
349	Kab. Enrekang	13.482.086.669	156.017	808.540.793	10.431.846.954	-	71.478.694	2.170.064.211	13.482.086.669
350	Kab. Gowa	13.488.567.300	156.017	808.540.793	10.405.376.862	-	104.429.417	2.170.064.211	13.488.567.300
351	Kab. Jeneponto	13.437.394.801	156.017	808.540.793	10.402.002.589	-	56.631.191	2.170.064.211	13.437.394.801
352	Kab. Luwu	15.138.524.508	156.017	808.540.793	12.102.942.154	-	56.821.333	2.170.064.211	15.138.524.508
353	Kab. Luwu Utara	15.682.209.692	156.017	808.540.793	12.625.271.127	-	78.177.544	2.170.064.211	15.682.209.692
354	Kab. Maros	13.510.001.951	156.017	808.540.793	10.464.999.896	-	66.241.034	2.170.064.211	13.510.001.951
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	13.628.782.909	156.017	808.540.793	10.594.190.176	-	27.192.662	2.170.064.211	13.600.143.859
356	Kota Palopo	13.437.998.899	156.017	808.540.793	10.401.460.687	-	57.777.191	2.170.064.211	13.437.998.899
357	Kab. Luwu Timur	250.746.751.778	156.017	808.540.793	247.126.507.290	-	236.261.867	2.170.064.211	250.341.530.178
358	Kab. Pinrang	13.445.001.926	156.017	808.540.793	10.401.460.687	-	64.780.218	2.170.064.211	13.445.001.926
359	Kab. Sinjai	13.450.200.435	156.017	808.540.793	10.406.196.373	-	65.243.041	2.170.064.211	13.450.200.435
360	Kab. Kepulauan Selayar	13.442.175.890	156.017	808.540.793	10.401.460.687	-	61.954.182	2.170.064.211	13.442.175.890
361	Kab. Sidenreng Rappang	13.450.492.047	156.017	808.540.793	10.403.806.927	-	37.148.149	2.170.064.211	13.419.716.097
362	Kab. Soppeng	13.429.503.502	156.017	808.540.793	10.408.931.608	-	41.810.873	2.170.064.211	13.429.503.502
363	Kab. Takalar	13.494.051.467	156.017	808.540.793	10.457.513.255	-	57.777.191	2.170.064.211	13.494.051.467
364	Kab. Tana Toraja	13.680.686.850	156.017	808.540.793	10.620.687.668	-	81.238.161	2.170.064.211	13.680.686.850
365	Kab. Wajo	31.234.586.641	3.465.406	18.596.467.077	10.401.712.024	-	62.877.923	2.170.064.211	31.234.586.641
366	Kota Parepare	13.437.998.899	156.017	808.540.793	10.401.460.687	-	57.777.191	2.170.064.211	13.437.998.899
367	Kota Makassar	11.412.245.571	58.730	808.540.793	8.309.157.617	-	124.424.220	2.170.064.211	11.412.245.571
368	Kab. Toraja Utara	13.471.270.654	156.017	808.540.793	10.432.172.439	-	60.337.194	2.170.064.211	13.471.270.654
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	671.779.910.070	-	-	667.614.042.932	-	4.165.867.138	-	671.779.910.070
370	Kab. Buton	94.493.069.276	-	-	92.207.091.867	-	115.913.198	2.170.064.211	94.493.069.276
371	Kab. Konawe	94.093.809.157	-	-	91.619.817.985	-	111.937.961	2.170.064.211	93.901.820.157
372	Kab. Kolaka	412.494.926.077	-	-	410.219.880.904	-	104.980.962	2.170.064.211	412.494.926.077
373	Kab. Muna	90.767.275.725	-	-	88.481.200.010	-	51.522.004	2.170.064.211	90.702.786.225
374	Kota Kendari	90.687.410.115	-	-	88.430.169.817	-	87.176.087	2.170.064.211	90.687.410.115
375	Kota Bau-bau	90.743.803.392	-	-	88.490.267.084	-	83.472.097	2.170.064.211	90.743.803.392
376	Kab. Konawe Selatan	243.075.595.649	-	-	240.839.556.671	-	65.974.767	2.170.064.211	243.075.595.649
377	Kab. Bombana	290.119.634.557	-	-	287.872.358.027	-	77.212.319	2.170.064.211	290.119.634.557
378	Kab. Wakatobi	90.627.837.469	-	-	88.372.478.442	-	85.294.816	2.170.064.211	90.627.837.469
379	Kab. Kolaka Utara	153.384.394.601	-	-	151.145.533.215	-	68.797.175	2.170.064.211	153.384.394.601
380	Kab. Konawe Utara	543.786.077.859	-	-	541.362.238.459	-	59.114.989	2.170.064.211	543.591.417.659
381	Kab. Buton Utara	90.783.043.079	-	-	88.402.335.470	-	114.502.448	2.170.064.211	90.686.902.129
382	Kab. Konawe Kepulauan	91.350.585.303	-	-	89.101.026.706	-	79.494.386	2.170.064.211	91.350.585.303
383	Kab. Kolaka Timur	84.793.803.000	-	-	82.236.857.177	-	90.121.112	2.170.064.211	84.497.042.500
384	Kab. Muna Barat	90.627.837.469	-	-	88.372.478.442	-	85.294.816	2.170.064.211	90.627.837.469

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
385	Kab. Buton Tengah	113.976.627.069	-	-	111.721.559.480	-	85.003.378	2.170.064.211	113.976.627.069
386	Kab. Buton Selatan	90.646.813.472	-	-	88.372.443.357	-	45.079.604	2.170.064.211	90.587.587.172
387	Provinsi Bali	216.085	-	-	-	-	216.085	-	216.085
388	Kab. Badung	2.170.118.509	-	-	-	-	54.298	2.170.064.211	2.170.118.509
389	Kab. Bangli	2.170.118.509	-	-	-	-	54.298	2.170.064.211	2.170.118.509
390	Kab. Buleleng	2.170.118.509	-	-	-	-	54.298	2.170.064.211	2.170.118.509
391	Kab. Gianyar	2.170.118.509	-	-	-	-	54.298	2.170.064.211	2.170.118.509
392	Kab. Jembrana	2.170.518.544	-	-	-	-	454.333	2.170.064.211	2.170.518.544
393	Kab. Karangasem	2.170.118.509	-	-	-	-	54.298	2.170.064.211	2.170.118.509
394	Kab. Klungkung	2.170.118.509	-	-	-	-	54.298	2.170.064.211	2.170.118.509
395	Kab. Tabanan	2.170.118.509	-	-	-	-	54.298	2.170.064.211	2.170.118.509
396	Kota Denpasar	2.170.118.509	-	-	-	-	54.298	2.170.064.211	2.170.118.509
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	242.278.515.655	-	-	239.992.914.432	-	2.285.601.223	-	242.278.515.655
398	Kab. Bima	56.583.244.649	-	-	54.308.260.282	-	57.183.306	2.170.064.211	56.535.507.799
399	Kab. Dompu	57.707.692.919	-	-	55.331.120.508	-	79.513.100	2.170.064.211	57.580.697.819
400	Kab. Lombok Barat	56.391.354.488	-	-	54.129.169.557	-	92.120.720	2.170.064.211	56.391.354.488
401	Kab. Lombok Tengah	56.045.444.192	-	-	53.782.060.985	-	45.018.596	2.170.064.211	55.997.143.792
402	Kab. Lombok Timur	56.423.189.130	-	-	54.176.016.036	-	24.363.833	2.170.064.211	56.370.444.080
403	Kab. Sumbawa	58.973.619.918	-	-	56.562.732.348	-	240.823.359	2.170.064.211	58.973.619.918
404	Kota Mataram	56.044.192.004	-	-	53.782.060.985	-	92.066.808	2.170.064.211	56.044.192.004
405	Kota Bima	56.048.250.221	-	-	53.782.060.985	-	96.125.025	2.170.064.211	56.048.250.221
406	Kab. Sumbawa Barat	460.977.829.995	-	-	458.567.256.026	-	56.024.908	2.170.064.211	460.793.345.145
407	Kab. Lombok Utara	56.044.954.274	-	-	53.782.060.985	-	92.829.078	2.170.064.211	56.044.954.274
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.882.128.925	-	-	1.492.770.702	1.367.336.668	19.050.055	-	2.879.157.425
409	Kab. Alor	2.473.775.683	-	-	70.804.598	232.844.819	62.055	2.170.064.211	2.473.775.683
410	Kab. Belu	2.716.415.569	-	-	416.068.453	130.220.850	62.055	2.170.064.211	2.716.415.569
411	Kab. Ende	3.661.732.610	-	-	55.960.076	1.435.646.268	62.055	2.170.064.211	3.661.732.610
412	Kab. Flores Timur	2.443.894.560	-	-	50.993.057	222.775.237	14.455	2.170.064.211	2.443.846.960
413	Kab. Kupang	3.452.796.091	-	-	1.152.448.975	130.220.850	62.055	2.170.064.211	3.452.796.091
414	Kab. Lembata	2.635.227.498	-	-	51.846.114	413.255.118	62.055	2.170.064.211	2.635.227.498
415	Kab. Manggarai	3.572.136.974	-	-	200.290.708	1.201.720.000	62.055	2.170.064.211	3.572.136.974
416	Kab. Ngada	2.370.613.888	-	-	50.993.057	149.494.565	62.055	2.170.064.211	2.370.613.888
417	Kab. Sikka	2.351.340.173	-	-	50.993.057	130.220.850	62.055	2.170.064.211	2.351.340.173
418	Kab. Sumba Barat	2.351.340.173	-	-	50.993.057	130.220.850	62.055	2.170.064.211	2.351.340.173
419	Kab. Sumba Timur	2.351.340.173	-	-	50.993.057	130.220.850	62.055	2.170.064.211	2.351.340.173
420	Kab. Timor Tengah Selatan	3.596.140.194	-	-	1.295.793.078	130.220.850	62.055	2.170.064.211	3.596.140.194
421	Kab. Timor Tengah Utara	3.727.592.463	-	-	1.427.245.347	130.220.850	62.055	2.170.064.211	3.727.592.463
422	Kota Kupang	2.351.340.173	-	-	50.993.057	130.220.850	62.055	2.170.064.211	2.351.340.173
423	Kab. Rote Ndao	2.351.533.444	-	-	51.186.328	130.220.850	62.055	2.170.064.211	2.351.533.444
424	Kab. Manggarai Barat	2.353.107.068	-	-	51.792.554	130.220.850	1.029.453	2.170.064.211	2.353.107.068
425	Kab. Nagekeo	2.400.005.514	-	-	99.658.398	130.220.850	62.055	2.170.064.211	2.400.005.514
426	Kab. Sumba Barat Daya	2.351.340.173	-	-	50.993.057	130.220.850	62.055	2.170.064.211	2.351.340.173
427	Kab. Sumba Tengah	2.351.340.173	-	-	50.993.057	130.220.850	62.055	2.170.064.211	2.351.340.173

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
428	Kab. Manggarai Timur	2.431.814.194	-	-	131.467.078	130.220.850	62.055	2.170.064.211	2.431.814.194
429	Kab. Sabu Raijua	2.504.554.045	-	-	204.206.929	130.220.850	62.055	2.170.064.211	2.504.554.045
430	Kab. Malaka	2.893.665.029	-	-	593.317.913	130.220.850	62.055	2.170.064.211	2.893.665.029
431	Provinsi Maluku	52.678.453.471	5.515.289.769	-	12.247.782.270	-	33.489.576.719	-	51.252.648.758
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	7.657.040.337	1.103.057.510	-	1.985.570.651	-	558.676.815	2.170.064.211	5.817.369.187
433	Kab. Maluku Tengah	6.530.596.440	1.103.057.510	-	1.999.832.999	-	1.257.641.720	2.170.064.211	6.530.596.440
434	Kab. Maluku Tenggara	6.514.691.313	1.103.057.510	-	2.352.555.251	-	207.089.091	2.170.064.211	5.832.766.063
435	Kab. Buru	9.980.627.245	1.103.057.510	-	2.352.555.251	-	1.035.716.423	2.170.064.211	6.661.393.395
436	Kota Ambon	6.513.961.055	1.103.057.510	-	2.352.555.251	-	888.284.083	2.170.064.211	6.513.961.055
437	Kab. Seram Bagian Barat	7.088.856.872	1.103.057.510	-	2.824.173.302	-	991.561.849	2.170.064.211	7.088.856.872
438	Kab. Seram Bagian Timur	16.744.431.185	11.030.580.648	-	2.021.376.762	-	1.522.409.564	2.170.064.211	16.744.431.185
439	Kab. Kepulauan Aru	5.934.357.029	1.103.057.510	-	1.692.266.025	-	968.969.283	2.170.064.211	5.934.357.029
440	Kota Tual	6.513.961.055	1.103.057.510	-	2.352.555.251	-	888.284.083	2.170.064.211	6.513.961.055
441	Kab. Maluku Barat Daya	27.326.867.480	1.103.057.510	-	23.165.351.971	-	888.393.788	2.170.064.211	27.326.867.480
442	Kab. Buru Selatan	9.718.196.950	1.103.057.510	-	2.352.555.251	-	4.092.519.978	2.170.064.211	9.718.196.950
443	Provinsi Papua	1.509.447.368.748	-	-	1.431.498.364.359	-	77.949.004.389	-	1.509.447.368.748
444	Kab. Biak Numfor	104.848.544.270	-	-	101.809.578.451	-	868.901.608	2.170.064.211	104.848.544.270
445	Kab. Jayapura	106.911.259.122	-	-	101.809.578.451	-	2.931.616.460	2.170.064.211	106.911.259.122
446	Kab. Jayawijaya	104.848.185.236	-	-	101.809.578.451	-	868.542.574	2.170.064.211	104.848.185.236
447	Kab. Merauke	107.873.995.657	-	-	101.809.578.451	-	3.894.352.995	2.170.064.211	107.873.995.657
448	Kab. Mimika	2.858.899.934.669	-	-	2.853.142.067.369	-	835.751.289	2.170.064.211	2.856.147.882.869
449	Kab. Nabire	115.372.517.626	-	-	104.929.537.727	-	8.272.915.688	2.170.064.211	115.372.517.626
450	Kab. Paniai	100.345.398.503	-	-	97.327.234.346	-	848.099.946	2.170.064.211	100.345.398.503
451	Kab. Puncak Jaya	104.848.459.796	-	-	101.809.578.451	-	868.817.134	2.170.064.211	104.848.459.796
452	Kab. Kepulauan Yapen	104.848.185.236	-	-	101.809.578.451	-	868.542.574	2.170.064.211	104.848.185.236
453	Kota Jayapura	104.774.309.497	-	-	101.809.578.451	-	794.666.835	2.170.064.211	104.774.309.497
454	Kab. Sarmi	118.214.507.579	-	-	103.619.291.578	-	11.395.157.290	2.170.064.211	117.184.513.079
455	Kab. Keerom	112.025.227.249	-	-	107.008.949.985	-	2.846.213.053	2.170.064.211	112.025.227.249
456	Kab. Yahukimo	104.848.742.625	-	-	101.809.578.451	-	869.099.963	2.170.064.211	104.848.742.625
457	Kab. Pegunungan Bintang	117.343.587.306	-	-	114.298.417.320	-	875.105.775	2.170.064.211	117.343.587.306
458	Kab. Tolikara	104.848.185.236	-	-	101.809.578.451	-	868.542.574	2.170.064.211	104.848.185.236
459	Kab. Boven Digoel	107.229.294.179	-	-	101.809.578.451	-	3.249.651.517	2.170.064.211	107.229.294.179
460	Kab. Mappi	105.017.067.817	-	-	101.809.578.451	-	1.037.425.155	2.170.064.211	105.017.067.817
461	Kab. Asmat	102.612.643.701	-	-	99.202.813.024	-	1.239.766.466	2.170.064.211	102.612.643.701
462	Kab. Waropen	104.824.782.116	-	-	101.809.578.451	-	212.620.454	2.170.064.211	104.192.263.116
463	Kab. Supiori	104.848.698.300	-	-	101.809.578.451	-	869.055.638	2.170.064.211	104.848.698.300
464	Kab. Mamberamo Raya	104.810.205.334	-	-	101.809.578.451	-	193.473.222	2.170.064.211	104.173.115.884
465	Kab. Mamberamo Tengah	104.843.561.171	-	-	101.809.578.451	-	863.918.509	2.170.064.211	104.843.561.171
466	Kab. Yalimo	104.848.185.236	-	-	101.809.578.451	-	868.542.574	2.170.064.211	104.848.185.236
467	Kab. Lanny Jaya	104.848.185.236	-	-	101.809.578.451	-	868.542.574	2.170.064.211	104.848.185.236
468	Kab. Nduga	99.255.727.487	-	-	96.237.563.330	-	848.099.946	2.170.064.211	99.255.727.487
469	Kab. Dogiyai	101.453.534.629	-	-	98.435.353.850	-	848.116.568	2.170.064.211	101.453.534.629
470	Kab. Puncak	100.666.080.706	-	-	97.647.898.819	-	848.117.676	2.170.064.211	100.666.080.706

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
471	Kab. Intan Jaya	101.831.574.719	-	-	98.813.398.373	-	848.112.135	2.170.064.211	101.831.574.719
472	Kab. Deiyai	100.178.005.652	-	-	97.159.841.495	-	848.099.946	2.170.064.211	100.178.005.652
473	Provinsi Maluku Utara	391.549.669.098	-	-	375.434.801.619	217.308.829	15.234.735.282	-	390.886.845.730
474	Kab. Halmahera Tengah	212.504.563.222	-	-	209.267.501.177	48.290.112	1.018.707.722	2.170.064.211	212.504.563.222
475	Kota Ternate	84.195.604.060	-	-	81.556.758.526	48.290.112	97.950.211	2.170.064.211	83.873.063.060
476	Kab. Halmahera Barat	90.141.844.797	-	-	87.498.544.578	49.148.913	424.087.095	2.170.064.211	90.141.844.797
477	Kab. Halmahera Timur	325.328.957.875	-	-	322.205.719.674	48.290.112	904.883.878	2.170.064.211	325.328.957.875
478	Kab. Halmahera Selatan	206.749.718.711	-	-	201.657.329.229	408.469.103	585.583.568	2.170.064.211	204.821.446.111
479	Kab. Halmahera Utara	168.012.191.633	-	-	165.353.286.720	48.290.112	440.550.590	2.170.064.211	168.012.191.633
480	Kab. Kepulauan Sula	104.588.675.700	-	-	101.656.148.979	48.290.112	714.172.398	2.170.064.211	104.588.675.700
481	Kota Tidore Kepulauan	83.285.222.516	-	-	80.642.960.615	48.290.112	423.907.578	2.170.064.211	83.285.222.516
482	Kab. Pulau Morotai	85.591.809.448	-	-	82.952.173.817	48.290.112	98.134.258	2.170.064.211	85.268.662.398
483	Kab. Pulau Taliabu	150.861.103.245	-	-	148.083.707.042	48.290.112	130.224.530	2.170.064.211	150.432.285.895
484	Provinsi Banten	8.237.156.612	-	-	7.375.401.174	524.955.785	336.799.653	-	8.237.156.612
485	Kab. Lebak	5.985.668.802	-	-	3.530.055.976	149.987.683	135.560.932	2.170.064.211	5.985.668.802
486	Kab. Pandeglang	22.358.617.386	-	-	19.158.795.176	389.189.848	640.568.151	2.170.064.211	22.358.617.386
487	Kab. Serang	4.740.157.032	-	-	1.832.035.779	636.813.805	101.243.237	2.170.064.211	4.740.157.032
488	Kab. Tangerang	4.377.032.253	-	-	1.960.751.412	149.987.683	96.228.947	2.170.064.211	4.377.032.253
489	Kota Cilegon	5.041.368.440	-	-	2.620.518.903	154.556.379	96.228.947	2.170.064.211	5.041.368.440
490	Kota Tangerang	4.361.825.356	-	-	1.945.544.515	149.987.683	96.228.947	2.170.064.211	4.361.825.356
491	Kota Serang	5.045.972.631	-	-	2.620.327.105	159.352.368	96.228.947	2.170.064.211	5.045.972.631
492	Kota Tangerang Selatan	4.361.825.356	-	-	1.945.544.515	149.987.683	96.228.947	2.170.064.211	4.361.825.356
493	Provinsi Bangka Belitung	441.789.732.218	4.099.767.221	-	437.422.062.253	-	267.902.744	-	441.789.732.218
494	Kab. Bangka	265.194.269.454	1.170.228.940	-	261.813.460.835	-	40.515.468	2.170.064.211	265.194.269.454
495	Kab. Belitung	158.339.606.555	1.170.228.940	-	154.974.415.928	-	24.897.476	2.170.064.211	158.339.606.555
496	Kota Pangkal Pinang	126.844.611.814	1.170.228.940	-	123.461.207.953	-	43.110.710	2.170.064.211	126.844.611.814
497	Kab. Bangka Selatan	199.131.662.173	1.170.228.940	-	195.771.717.436	-	19.651.586	2.170.064.211	199.131.662.173
498	Kab. Bangka Tengah	153.958.826.593	1.170.228.940	-	150.594.233.248	-	24.300.194	2.170.064.211	153.958.826.593
499	Kab. Bangka Barat	188.006.573.945	1.170.228.940	-	184.646.585.991	-	19.694.803	2.170.064.211	188.006.573.945
500	Kab. Belitung Timur	188.997.911.795	1.170.228.940	-	185.614.604.342	-	43.014.302	2.170.064.211	188.997.911.795
501	Provinsi Gorontalo	1.609.836.723	-	-	409.118.562	-	1.200.718.161	-	1.609.836.723
502	Kab. Boalemo	2.230.118.515	-	-	2.181.079	-	57.873.225	2.170.064.211	2.230.118.515
503	Kab. Gorontalo	2.393.910.053	-	-	165.275.603	-	58.570.239	2.170.064.211	2.393.910.053
504	Kota Gorontalo	2.227.683.952	-	-	2.181.079	-	55.438.662	2.170.064.211	2.227.683.952
505	Kab. Pohuwato	3.326.144.492	-	-	1.086.475.278	-	69.605.003	2.170.064.211	3.326.144.492
506	Kab. Bone Bolango	2.654.761.804	-	-	428.625.080	-	13.061.663	2.170.064.211	2.611.750.954
507	Kab. Gorontalo Utara	2.429.067.838	-	-	2.181.079	-	256.822.548	2.170.064.211	2.429.067.838
508	Provinsi Kepulauan Riau	531.382.817.022	60.843.561.329	452.575.049.409	17.569.676.356	-	394.529.928	-	531.382.817.022
509	Kab. Natuna	251.523.137.344	67.838.752.434	177.687.676.897	3.766.050.117	-	60.593.685	2.170.064.211	251.523.137.344
510	Kab. Kepulauan Anambas	204.305.987.331	45.530.406.224	152.778.873.094	3.766.050.117	-	60.593.685	2.170.064.211	204.305.987.331
511	Kab. Karimun	184.696.728.086	19.503.995.771	132.213.032.723	30.582.294.646	-	52.957.285	2.170.064.211	184.522.344.636
512	Kota Batam	148.869.468.265	19.503.995.771	123.340.718.581	3.791.025.387	-	63.664.315	2.170.064.211	148.869.468.265
513	Kota Tanjung Pinang	158.888.590.981	19.503.995.771	132.213.032.723	4.937.584.632	-	63.913.644	2.170.064.211	158.888.590.981

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Sumber Daya Alam						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	
514	Kab. Lingga	167.481.280.779	19.503.995.771	132.213.032.723	13.385.685.559	-	208.502.515	2.170.064.211	167.481.280.779
515	Kab. Bintan	157.837.853.105	19.503.995.771	132.213.032.723	3.890.166.715	-	14.114.835	2.170.064.211	157.791.374.255
516	Provinsi Papua Barat	3.073.775.330.126	428.914.931.794	2.545.454.836.298	15.888.857.709	-	83.516.704.325	-	3.073.775.330.126
517	Kab. Fak Fak	91.426.487.536	3.709.784.882	59.079.237.754	6.452.703.154	-	20.014.697.535	2.170.064.211	91.426.487.536
518	Kab. Manokwari	74.815.294.331	3.709.784.882	59.079.237.754	6.452.703.154	-	992.067.080	2.170.064.211	72.403.857.081
519	Kab. Sorong	97.579.139.108	25.506.198.692	62.382.166.374	3.596.897.186	-	914.022.145	2.170.064.211	94.569.348.608
520	Kota Sorong	68.282.674.153	3.709.784.882	56.791.087.508	2.481.448.316	-	3.130.289.236	2.170.064.211	68.282.674.153
521	Kab. Raja Ampat	136.198.699.954	3.709.784.882	59.079.237.754	68.110.694.628	-	3.128.918.479	2.170.064.211	136.198.699.954
522	Kab. Sorong Selatan	69.254.304.214	3.709.784.882	57.711.836.648	2.481.448.316	-	3.181.170.157	2.170.064.211	69.254.304.214
523	Kab. Teluk Bintuni	692.799.399.993	17.583.793.071	654.782.419.604	2.481.448.316	-	15.781.674.791	2.170.064.211	692.799.399.993
524	Kab. Teluk Wondama	75.587.696.503	3.709.784.882	58.642.989.535	2.481.448.316	-	1.999.439.609	2.170.064.211	69.003.726.553
525	Kab. Kaimana	81.120.585.278	3.709.784.882	58.431.102.464	2.481.448.316	-	14.328.185.405	2.170.064.211	81.120.585.278
526	Kab. Maybrat	69.645.371.826	3.709.784.882	58.155.155.938	2.481.448.316	-	728.857.629	2.170.064.211	67.245.310.976
527	Kab. Tambrauw	69.072.319.443	3.709.784.882	57.580.248.546	2.481.448.316	-	729.289.738	2.170.064.211	66.670.835.693
528	Kab. Manokwari Selatan	70.285.130.250	3.709.784.882	58.235.630.909	2.481.448.316	-	3.688.201.932	2.170.064.211	70.285.130.250
529	Kab. Pegunungan Arfak	70.223.190.873	3.709.784.882	58.732.974.985	2.481.448.316	-	3.128.918.479	2.170.064.211	70.223.190.873
530	Provinsi Sulawesi Barat	321.074.489	-	-	248.136.230	-	72.938.259	-	321.074.489
531	Kab. Majene	2.221.892.205	-	-	42.701.431	-	9.126.563	2.170.064.211	2.221.892.205
532	Kab. Mamuju	2.754.814.190	-	-	562.390.122	-	5.208.557	2.170.064.211	2.737.662.890
533	Kab. Polewali Mandar	2.364.892.708	-	-	185.701.934	-	9.126.563	2.170.064.211	2.364.892.708
534	Kab. Mamasa	2.240.175.250	-	-	42.701.431	-	27.409.608	2.170.064.211	2.240.175.250
535	Kab. Pasangkayu	2.298.345.967	-	-	118.127.956	-	2.365.250	2.170.064.211	2.290.557.417
536	Kab. Mamuju Tengah	2.225.851.555	-	-	42.701.431	-	13.085.913	2.170.064.211	2.225.851.555
537	Provinsi Kalimantan Utara	475.806.771.035	11.125.674.091	1.514.196.570	368.946.956.051	-	94.219.944.323	-	475.806.771.035
538	Kab. Bulungan	279.326.831.373	14.050.278.282	2.273.278.332	245.164.234.847	-	15.668.975.701	2.170.064.211	279.326.831.373
539	Kab. Malinau	444.838.320.545	5.562.836.491	757.098.231	426.540.495.410	-	9.807.826.202	2.170.064.211	444.838.320.545
540	Kab. Nunukan	319.239.978.413	7.612.591.633	1.002.288.273	298.244.290.724	-	10.210.743.572	2.170.064.211	319.239.978.413
541	Kota Tarakan	213.302.878.736	11.714.152.357	1.399.768.383	191.965.076.955	-	6.053.816.830	2.170.064.211	213.302.878.736
542	Kab. Tana Tidung	371.346.377.850	5.562.836.491	832.606.245	354.366.334.896	-	8.414.536.007	2.170.064.211	371.346.377.850
	Sisa Lebih								
	Kurang Bayar								
	Jumlah	100.897.631.785.657	14.388.156.301.036	13.022.127.844.187	68.713.989.486.607	1.726.630.460.219	1.868.480.715.683	1.104.562.665.044	100.823.947.472.776

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Provinsi Aceh	1.947.783.847.000	1.947.783.847.000
2	Kab. Aceh Barat	543.825.941.000	543.825.941.000
3	Kab. Aceh Besar	746.906.382.000	746.906.382.000
4	Kab. Aceh Selatan	595.943.979.000	595.943.979.000
5	Kab. Aceh Singkil	407.073.542.000	407.073.542.000
6	Kab. Aceh Tengah	565.665.428.000	565.665.428.000
7	Kab. Aceh Tenggara	539.841.465.000	539.841.465.000
8	Kab. Aceh Timur	760.233.269.000	760.233.269.000
9	Kab. Aceh Utara	882.657.786.000	882.657.786.000
10	Kab. Bireuen	801.251.152.000	801.251.152.000
11	Kab. Pidie	823.251.463.000	823.251.463.000
12	Kab. Simeulue	419.892.376.000	419.892.376.000
13	Kota Banda Aceh	539.238.114.000	539.238.114.000
14	Kota Sabang	332.134.428.000	332.134.428.000
15	Kota Langsa	407.519.092.000	407.519.092.000
16	Kota Lhokseumawe	418.626.656.000	418.626.656.000
17	Kab. Gayo Lues	420.433.218.000	420.433.218.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	411.099.627.000	411.099.627.000
19	Kab. Aceh Jaya	393.215.559.000	393.215.559.000
20	Kab. Nagan Raya	477.405.680.000	477.405.680.000
21	Kab. Aceh Tamiang	488.964.332.000	488.964.332.000
22	Kab. Bener Meriah	418.060.203.000	418.060.203.000
23	Kab. Pidie Jaya	404.301.754.000	404.301.754.000
24	Kota Subulussalam	314.289.551.000	314.289.551.000
25	Provinsi Sumatera Utara	2.463.686.589.000	2.463.686.589.000
26	Kab. Asahan	818.693.947.000	818.693.947.000
27	Kab. Dairi	557.382.089.000	557.382.089.000
28	Kab. Deli Serdang	1.354.889.566.000	1.354.889.566.000
29	Kab. Karo	679.135.837.000	679.135.837.000
30	Kab. Labuhanbatu	638.234.403.000	638.234.403.000
31	Kab. Langkat	1.081.981.083.000	1.081.981.083.000
32	Kab. Mandailing Natal	743.340.668.000	743.340.668.000
33	Kab. Nias	412.621.552.000	412.621.552.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
34	Kab. Simalungun	1.120.786.035.000	1.120.786.035.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	595.549.093.000	595.549.093.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	603.228.847.000	603.228.847.000
37	Kab. Tapanuli Utara	597.808.962.000	597.808.962.000
38	Kab. Toba Samosir	510.871.853.000	510.871.853.000
39	Kota Binjai	532.627.031.000	532.627.031.000
40	Kota Medan	1.526.073.171.000	1.526.073.171.000
41	Kota Pematang Siantar	556.772.164.000	556.772.164.000
42	Kota Sibolga	384.535.437.000	384.535.437.000
43	Kota Tanjung Balai	403.249.168.000	403.249.168.000
44	Kota Tebing Tinggi	386.845.565.000	386.845.565.000
45	Kota Padang Sidempuan	468.092.452.000	468.092.452.000
46	Kab. Pakpak Bharat	318.945.304.000	318.945.304.000
47	Kab. Nias Selatan	617.556.640.000	617.556.640.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	481.987.960.000	481.987.960.000
49	Kab. Serdang Bedagai	718.135.179.000	718.135.179.000
50	Kab. Samosir	414.328.359.000	414.328.359.000
51	Kab. Batu Bara	555.512.477.000	555.512.477.000
52	Kab. Padang Lawas	490.835.624.000	490.835.624.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	513.951.816.000	513.951.816.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	472.807.253.000	472.807.253.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	552.684.492.000	552.684.492.000
56	Kab. Nias Utara	389.171.996.000	389.171.996.000
57	Kab. Nias Barat	330.192.600.000	330.192.600.000
58	Kota Gunungsitoli	399.419.428.000	399.419.428.000
59	Provinsi Sumatera Barat	1.887.033.911.000	1.887.033.911.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	686.668.871.000	686.668.871.000
61	Kab. Agam	745.501.923.000	745.501.923.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	549.794.757.000	549.794.757.000
63	Kab. Padang Pariaman	706.486.730.000	706.486.730.000
64	Kab. Pasaman	551.732.418.000	551.732.418.000
65	Kab. Pesisir Selatan	777.545.595.000	777.545.595.000
66	Kab. Sijunjung	502.198.374.000	502.198.374.000
67	Kab. Solok	654.499.415.000	654.499.415.000
68	Kab. Tanah Datar	637.174.929.000	637.174.929.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
69	Kota Bukit Tinggi	421.334.282.000	421.334.282.000
70	Kota Padang Panjang	346.447.747.000	346.447.747.000
71	Kota Padang	1.044.871.353.000	1.044.871.353.000
72	Kota Payakumbuh	413.827.474.000	413.827.474.000
73	Kota Sawahlunto	341.393.550.000	341.393.550.000
74	Kota Solok	369.336.357.000	369.336.357.000
75	Kota Pariaman	382.767.313.000	382.767.313.000
76	Kab. Pasaman Barat	597.346.929.000	597.346.929.000
77	Kab. Dharmasraya	472.606.168.000	472.606.168.000
78	Kab. Solok Selatan	437.443.271.000	437.443.271.000
79	Provinsi Riau	1.455.383.959.000	1.455.383.959.000
80	Kab. Bengkalis	338.312.985.000	338.312.985.000
81	Kab. Indragiri Hilir	885.858.086.000	885.858.086.000
82	Kab. Indragiri Hulu	630.760.891.000	630.760.891.000
83	Kab. Kampar	768.144.602.000	768.144.602.000
84	Kab. Kuantan Singingi	600.053.050.000	600.053.050.000
85	Kab. Pelalawan	596.380.358.000	596.380.358.000
86	Kab. Rokan Hilir	495.023.160.000	495.023.160.000
87	Kab. Rokan Hulu	642.947.308.000	642.947.308.000
88	Kab. Siak	369.707.154.000	369.707.154.000
89	Kota Dumai	429.554.051.000	429.554.051.000
90	Kota Pekanbaru	800.145.136.000	800.145.136.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	407.577.804.000	407.577.804.000
92	Provinsi Jambi	1.284.884.150.000	1.284.884.150.000
93	Kab. Batanghari	560.125.901.000	560.125.901.000
94	Kab. Bungo	589.404.249.000	589.404.249.000
95	Kab. Kerinci	557.771.989.000	557.771.989.000
96	Kab. Merangin	658.892.837.000	658.892.837.000
97	Kab. Muaro Jambi	620.129.875.000	620.129.875.000
98	Kab. Sarolangun	529.502.380.000	529.502.380.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	479.788.318.000	479.788.318.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	514.988.353.000	514.988.353.000
101	Kab. Tebo	528.684.400.000	528.684.400.000
102	Kota Jambi	675.288.713.000	675.288.713.000
103	Kota Sungai Penuh	405.067.761.000	405.067.761.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.563.041.287.000	1.563.041.287.000
105	Kab. Lahat	640.553.208.000	640.553.208.000
106	Kab. Musi Banyuasin	374.562.563.000	374.562.563.000
107	Kab. Musi Rawas	587.338.179.000	587.338.179.000
108	Kab. Muara Enim	606.756.199.000	606.756.199.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	967.657.461.000	967.657.461.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	590.080.276.000	590.080.276.000
111	Kota Palembang	1.207.730.107.000	1.207.730.107.000
112	Kota Prabumulih	392.368.815.000	392.368.815.000
113	Kota Pagar Alam	365.676.108.000	365.676.108.000
114	Kota Lubuk Linggau	441.802.413.000	441.802.413.000
115	Kab. Banyuasin	876.013.711.000	876.013.711.000
116	Kab. Ogan Ilir	579.569.016.000	579.569.016.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	743.468.343.000	743.468.343.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	581.290.776.000	581.290.776.000
119	Kab. Empat Lawang	398.163.201.000	398.163.201.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	291.104.702.000	291.104.702.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	362.621.650.000	362.621.650.000
122	Provinsi Bengkulu	1.213.764.868.000	1.213.764.868.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	513.903.304.000	513.903.304.000
124	Kab. Bengkulu Utara	580.035.368.000	580.035.368.000
125	Kab. Rejang Lebong	553.778.571.000	553.778.571.000
126	Kota Bengkulu	635.162.215.000	635.162.215.000
127	Kab. Kaur	408.812.452.000	408.812.452.000
128	Kab. Seluma	468.688.044.000	468.688.044.000
129	Kab. Mukomuko	452.918.047.000	452.918.047.000
130	Kab. Lebong	370.515.620.000	370.515.620.000
131	Kab. Kepahiang	395.317.091.000	395.317.091.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	400.452.040.000	400.452.040.000
133	Provinsi Lampung	1.726.296.248.000	1.726.296.248.000
134	Kab. Lampung Barat	492.394.862.000	492.394.862.000
135	Kab. Lampung Selatan	947.733.529.000	947.733.529.000
136	Kab. Lampung Tengah	1.233.938.840.000	1.233.938.840.000
137	Kab. Lampung Utara	868.735.213.000	868.735.213.000
138	Kab. Lampung Timur	996.893.721.000	996.893.721.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
139	Kab. Tanggamus	711.914.649.000	711.914.649.000
140	Kab. Tulang Bawang	571.687.479.000	571.687.479.000
141	Kab. Way Kanan	616.918.686.000	616.918.686.000
142	Kota Bandar Lampung	1.002.213.665.000	1.002.213.665.000
143	Kota Metro	427.590.058.000	427.590.058.000
144	Kab. Pesawaran	611.838.446.000	611.838.446.000
145	Kab. Pringsewu	569.803.319.000	569.803.319.000
146	Kab. Mesuji	403.974.381.000	403.974.381.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	437.174.360.000	437.174.360.000
148	Kab. Pesisir Barat	402.002.138.000	402.002.138.000
149	Provinsi DKI Jakarta	-	-
150	Provinsi Jawa Barat	3.015.641.290.000	3.015.641.290.000
151	Kab. Bandung	1.947.251.242.000	1.947.251.242.000
152	Kab. Bekasi	1.097.123.037.000	1.097.123.037.000
153	Kab. Bogor	1.865.830.791.000	1.865.830.791.000
154	Kab. Ciamis	1.099.393.370.000	1.099.393.370.000
155	Kab. Cianjur	1.483.406.286.000	1.483.406.286.000
156	Kab. Cirebon	1.407.550.394.000	1.407.550.394.000
157	Kab. Garut	1.665.908.667.000	1.665.908.667.000
158	Kab. Indramayu	1.282.966.828.000	1.282.966.828.000
159	Kab. Karawang	1.199.911.350.000	1.199.911.350.000
160	Kab. Kuningan	1.112.116.937.000	1.112.116.937.000
161	Kab. Majalengka	1.112.419.642.000	1.112.419.642.000
162	Kab. Purwakarta	799.002.962.000	799.002.962.000
163	Kab. Subang	1.182.520.441.000	1.182.520.441.000
164	Kab. Sukabumi	1.491.039.889.000	1.491.039.889.000
165	Kab. Sumedang	1.058.905.256.000	1.058.905.256.000
166	Kab. Tasikmalaya	1.375.992.285.000	1.375.992.285.000
167	Kota Bandung	1.566.037.358.000	1.566.037.358.000
168	Kota Bekasi	1.137.891.061.000	1.137.891.061.000
169	Kota Bogor	751.862.545.000	751.862.545.000
170	Kota Cirebon	536.524.293.000	536.524.293.000
171	Kota Depok	843.688.626.000	843.688.626.000
172	Kota Sukabumi	463.567.655.000	463.567.655.000
173	Kota Tasikmalaya	742.097.940.000	742.097.940.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
174	Kota Cimahi	530.425.978.000	530.425.978.000
175	Kota Banjar	346.807.146.000	346.807.146.000
176	Kab. Bandung Barat	1.012.676.514.000	1.012.676.514.000
177	Kab. Pangandaran	505.200.629.000	505.200.629.000
178	Provinsi Jawa Tengah	3.435.721.631.000	3.435.721.631.000
179	Kab. Banjarnegara	895.961.511.000	895.961.511.000
180	Kab. Banyumas	1.289.633.614.000	1.289.633.614.000
181	Kab. Batang	737.685.667.000	737.685.667.000
182	Kab. Blora	863.598.364.000	863.598.364.000
183	Kab. Boyolali	944.891.188.000	944.891.188.000
184	Kab. Brebes	1.239.370.246.000	1.239.370.246.000
185	Kab. Cilacap	1.274.344.606.000	1.274.344.606.000
186	Kab. Demak	856.667.569.000	856.667.569.000
187	Kab. Grobogan	1.034.216.110.000	1.034.216.110.000
188	Kab. Jepara	928.866.409.000	928.866.409.000
189	Kab. Karanganyar	903.630.027.000	903.630.027.000
190	Kab. Kebumen	1.179.288.910.000	1.179.288.910.000
191	Kab. Kendal	901.810.918.000	901.810.918.000
192	Kab. Klaten	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000
193	Kab. Kudus	747.504.503.000	747.504.503.000
194	Kab. Magelang	975.296.878.000	975.296.878.000
195	Kab. Pati	1.107.122.582.000	1.107.122.582.000
196	Kab. Pekalongan	871.105.712.000	871.105.712.000
197	Kab. Pemalang	1.107.792.827.000	1.107.792.827.000
198	Kab. Purbalingga	830.529.715.000	830.529.715.000
199	Kab. Purworejo	913.937.548.000	913.937.548.000
200	Kab. Rembang	718.204.574.000	718.204.574.000
201	Kab. Semarang	897.099.063.000	897.099.063.000
202	Kab. Sragen	984.484.500.000	984.484.500.000
203	Kab. Sukoharjo	847.875.034.000	847.875.034.000
204	Kab. Tegal	1.077.039.778.000	1.077.039.778.000
205	Kab. Temanggung	753.174.275.000	753.174.275.000
206	Kab. Wonogiri	1.059.941.416.000	1.059.941.416.000
207	Kab. Wonosobo	792.381.589.000	792.381.589.000
208	Kota Magelang	409.629.499.000	409.629.499.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
209	Kota Pekalongan	426.399.738.000	426.399.738.000
210	Kota Salatiga	418.013.566.000	418.013.566.000
211	Kota Semarang	1.167.622.970.000	1.167.622.970.000
212	Kota Surakarta	781.825.148.000	781.825.148.000
213	Kota Tegal	451.704.750.000	451.704.750.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	1.224.852.487.000	1.224.852.487.000
215	Kab. Bantul	911.168.107.000	911.168.107.000
216	Kab. Gunung Kidul	868.017.352.000	868.017.352.000
217	Kab. Kulon Progo	648.511.047.000	648.511.047.000
218	Kab. Sleman	925.964.567.000	925.964.567.000
219	Kota Yogyakarta	617.524.294.000	617.524.294.000
220	Provinsi Jawa Timur	3.652.119.082.000	3.652.119.082.000
221	Kab. Bangkalan	933.349.619.000	933.349.619.000
222	Kab. Banyuwangi	1.292.954.428.000	1.292.954.428.000
223	Kab. Blitar	1.043.910.472.000	1.043.910.472.000
224	Kab. Bojonegoro	870.125.915.000	870.125.915.000
225	Kab. Bondowoso	843.301.657.000	843.301.657.000
226	Kab. Gresik	870.446.047.000	870.446.047.000
227	Kab. Jember	1.607.489.075.000	1.607.489.075.000
228	Kab. Jombang	1.005.652.395.000	1.005.652.395.000
229	Kab. Kediri	1.149.914.158.000	1.149.914.158.000
230	Kab. Lamongan	1.086.400.453.000	1.086.400.453.000
231	Kab. Lumajang	899.452.272.000	899.452.272.000
232	Kab. Madiun	808.127.553.000	808.127.553.000
233	Kab. Magetan	837.710.006.000	837.710.006.000
234	Kab. Malang	1.558.477.503.000	1.558.477.503.000
235	Kab. Mojokerto	903.718.844.000	903.718.844.000
236	Kab. Nganjuk	982.963.245.000	982.963.245.000
237	Kab. Ngawi	966.397.195.000	966.397.195.000
238	Kab. Pacitan	731.754.165.000	731.754.165.000
239	Kab. Pamekasan	791.549.034.000	791.549.034.000
240	Kab. Pasuruan	1.096.961.554.000	1.096.961.554.000
241	Kab. Ponorogo	979.474.402.000	979.474.402.000
242	Kab. Probolinggo	926.631.817.000	926.631.817.000
243	Kab. Sampang	782.215.299.000	782.215.299.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
244	Kab. Sidoarjo	1.132.080.961.000	1.132.080.961.000
245	Kab. Situbondo	744.920.418.000	744.920.418.000
246	Kab. Sumenep	1.082.451.781.000	1.082.451.781.000
247	Kab. Trenggalek	823.518.272.000	823.518.272.000
248	Kab. Tuban	960.230.004.000	960.230.004.000
249	Kab. Tulungagung	1.062.757.430.000	1.062.757.430.000
250	Kota Blitar	393.968.854.000	393.968.854.000
251	Kota Kediri	569.724.453.000	569.724.453.000
252	Kota Madiun	465.495.171.000	465.495.171.000
253	Kota Malang	792.693.133.000	792.693.133.000
254	Kota Mojokerto	367.576.298.000	367.576.298.000
255	Kota Pasuruan	403.383.780.000	403.383.780.000
256	Kota Probolinggo	430.613.654.000	430.613.654.000
257	Kota Surabaya	1.182.439.723.000	1.182.439.723.000
258	Kota Batu	445.511.050.000	445.511.050.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	1.572.247.838.000	1.572.247.838.000
260	Kab. Bengkayang	543.574.136.000	543.574.136.000
261	Kab. Landak	608.634.091.000	608.634.091.000
262	Kab. Kapuas Hulu	893.022.913.000	893.022.913.000
263	Kab. Ketapang	1.034.131.410.000	1.034.131.410.000
264	Kab. Mempawah	531.669.620.000	531.669.620.000
265	Kab. Sambas	804.339.073.000	804.339.073.000
266	Kab. Sanggau	741.779.049.000	741.779.049.000
267	Kab. Sintang	838.160.435.000	838.160.435.000
268	Kota Pontianak	646.760.997.000	646.760.997.000
269	Kota Singkawang	457.023.658.000	457.023.658.000
270	Kab. Sekadau	464.250.612.000	464.250.612.000
271	Kab. Melawi	554.276.092.000	554.276.092.000
272	Kab. Kayong Utara	445.774.205.000	445.774.205.000
273	Kab. Kubu Raya	719.085.365.000	719.085.365.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	1.431.363.200.000	1.431.363.200.000
275	Kab. Barito Selatan	517.055.110.000	517.055.110.000
276	Kab. Barito Utara	501.624.803.000	501.624.803.000
277	Kab. Kapuas	778.146.334.000	778.146.334.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	593.355.915.000	593.355.915.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
279	Kab. Kotawaringin Timur	761.133.294.000	761.133.294.000
280	Kota Palangkaraya	592.472.958.000	592.472.958.000
281	Kab. Katingan	627.676.390.000	627.676.390.000
282	Kab. Seruyan	560.402.241.000	560.402.241.000
283	Kab. Sukamara	382.001.321.000	382.001.321.000
284	Kab. Lamandau	420.223.849.000	420.223.849.000
285	Kab. Gunung Mas	511.464.950.000	511.464.950.000
286	Kab. Pulang Pisau	515.815.678.000	515.815.678.000
287	Kab. Murung Raya	616.067.644.000	616.067.644.000
288	Kab. Barito Timur	437.443.208.000	437.443.208.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	1.093.343.743.000	1.093.343.743.000
290	Kab. Banjar	674.149.822.000	674.149.822.000
291	Kab. Barito Kuala	526.801.142.000	526.801.142.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	474.753.627.000	474.753.627.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	478.160.029.000	478.160.029.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	447.697.809.000	447.697.809.000
295	Kab. Kotabaru	584.509.383.000	584.509.383.000
296	Kab. Tabalong	451.421.653.000	451.421.653.000
297	Kab. Tanah Laut	494.306.446.000	494.306.446.000
298	Kab. Tapin	416.699.835.000	416.699.835.000
299	Kota Banjarbaru	411.679.729.000	411.679.729.000
300	Kota Banjarmasin	659.847.387.000	659.847.387.000
301	Kab. Balangan	346.527.140.000	346.527.140.000
302	Kab. Tanah Bumbu	428.237.770.000	428.237.770.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	828.907.266.000	828.907.266.000
304	Kab. Berau	547.451.781.000	547.451.781.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	449.315.895.000	449.315.895.000
306	Kab. Kutai Barat	544.622.975.000	544.622.975.000
307	Kab. Kutai Timur	560.135.883.000	560.135.883.000
308	Kab. Paser	376.914.440.000	376.914.440.000
309	Kota Balikpapan	428.306.693.000	428.306.693.000
310	Kota Bontang	225.977.741.000	225.977.741.000
311	Kota Samarinda	660.405.062.000	660.405.062.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	272.437.796.000	272.437.796.000
313	Kab. Mahakam Ulu	443.038.268.000	443.038.268.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
314	Provinsi Sulawesi Utara	1.330.463.660.000	1.330.463.660.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	511.266.733.000	511.266.733.000
316	Kab. Minahasa	614.935.145.000	614.935.145.000
317	Kab. Sangihe	494.152.589.000	494.152.589.000
318	Kota Bitung	464.686.698.000	464.686.698.000
319	Kota Manado	702.057.099.000	702.057.099.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	458.306.668.000	458.306.668.000
321	Kab. Minahasa Selatan	501.161.793.000	501.161.793.000
322	Kota Tomohon	393.387.326.000	393.387.326.000
323	Kab. Minahasa Utara	468.182.610.000	468.182.610.000
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	361.963.958.000	361.963.958.000
325	Kota Kotamobagu	353.039.596.000	353.039.596.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	348.896.970.000	348.896.970.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	379.906.431.000	379.906.431.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	324.405.495.000	324.405.495.000
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	328.616.753.000	328.616.753.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	1.494.941.239.000	1.494.941.239.000
331	Kab. Banggai	805.938.719.000	805.938.719.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	441.263.415.000	441.263.415.000
333	Kab. Buol	477.755.362.000	477.755.362.000
334	Kab. Tolitoli	579.299.327.000	579.299.327.000
335	Kab. Donggala	619.609.701.000	619.609.701.000
336	Kab. Morowali	458.893.660.000	458.893.660.000
337	Kab. Poso	672.294.065.000	672.294.065.000
338	Kota Palu	636.284.819.000	636.284.819.000
339	Kab. Parigi Moutong	720.186.220.000	720.186.220.000
340	Kab. Tojo Una Una	544.410.196.000	544.410.196.000
341	Kab. Sigi	579.175.622.000	579.175.622.000
342	Kab. Banggai Laut	386.229.968.000	386.229.968.000
343	Kab. Morowali Utara	533.286.782.000	533.286.782.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	2.340.040.525.000	2.340.040.525.000
345	Kab. Bantaeng	468.052.247.000	468.052.247.000
346	Kab. Barru	482.675.239.000	482.675.239.000
347	Kab. Bone	996.360.633.000	996.360.633.000
348	Kab. Bulukumba	659.907.896.000	659.907.896.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
349	Kab. Enrekang	496.696.804.000	496.696.804.000
350	Kab. Gowa	795.804.286.000	795.804.286.000
351	Kab. Jeneponto	604.867.921.000	604.867.921.000
352	Kab. Luwu	647.617.174.000	647.617.174.000
353	Kab. Luwu Utara	617.420.659.000	617.420.659.000
354	Kab. Maros	660.026.786.000	660.026.786.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	702.238.532.000	702.238.532.000
356	Kota Palopo	487.717.402.000	487.717.402.000
357	Kab. Luwu Timur	503.126.813.000	503.126.813.000
358	Kab. Pinrang	661.435.610.000	661.435.610.000
359	Kab. Sinjai	542.287.308.000	542.287.308.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	560.595.329.000	560.595.329.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	575.549.310.000	575.549.310.000
362	Kab. Soppeng	579.187.870.000	579.187.870.000
363	Kab. Takalar	564.934.568.000	564.934.568.000
364	Kab. Tana Toraja	537.324.447.000	537.324.447.000
365	Kab. Wajo	668.126.385.000	668.126.385.000
366	Kota Parepare	429.881.874.000	429.881.874.000
367	Kota Makassar	1.257.670.897.000	1.257.670.897.000
368	Kab. Toraja Utara	498.503.368.000	498.503.368.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.456.620.465.000	1.456.620.465.000
370	Kab. Buton	395.460.748.000	395.460.748.000
371	Kab. Konawe	654.840.854.000	654.840.854.000
372	Kab. Kolaka	542.631.257.000	542.631.257.000
373	Kab. Muna	611.804.752.000	611.804.752.000
374	Kota Kendari	629.053.541.000	629.053.541.000
375	Kota Bau-bau	486.630.411.000	486.630.411.000
376	Kab. Konawe Selatan	661.712.484.000	661.712.484.000
377	Kab. Bombana	449.798.400.000	449.798.400.000
378	Kab. Wakatobi	439.094.930.000	439.094.930.000
379	Kab. Kolaka Utara	455.008.254.000	455.008.254.000
380	Kab. Konawe Utara	421.367.680.000	421.367.680.000
381	Kab. Buton Utara	385.010.964.000	385.010.964.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	300.065.908.000	300.065.908.000
383	Kab. Kolaka Timur	379.028.144.000	379.028.144.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
384	Kab. Muna Barat	336.932.590.000	336.932.590.000
385	Kab. Buton Tengah	340.057.923.000	340.057.923.000
386	Kab. Buton Selatan	335.320.148.000	335.320.148.000
387	Provinsi Bali	1.201.511.839.000	1.201.511.839.000
388	Kab. Badung	330.011.170.000	330.011.170.000
389	Kab. Bangli	525.978.399.000	525.978.399.000
390	Kab. Buleleng	890.141.572.000	890.141.572.000
391	Kab. Gianyar	637.644.039.000	637.644.039.000
392	Kab. Jembrana	513.845.294.000	513.845.294.000
393	Kab. Karangasem	700.663.380.000	700.663.380.000
394	Kab. Klungkung	494.287.735.000	494.287.735.000
395	Kab. Tabanan	746.276.084.000	746.276.084.000
396	Kota Denpasar	609.734.565.000	609.734.565.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.478.509.073.000	1.478.509.073.000
398	Kab. Bima	833.301.560.000	833.301.560.000
399	Kab. Dompu	536.573.279.000	536.573.279.000
400	Kab. Lombok Barat	717.540.694.000	717.540.694.000
401	Kab. Lombok Tengah	939.405.513.000	939.405.513.000
402	Kab. Lombok Timur	1.072.534.185.000	1.072.534.185.000
403	Kab. Sumbawa	781.730.762.000	781.730.762.000
404	Kota Mataram	569.742.255.000	569.742.255.000
405	Kota Bima	432.159.814.000	432.159.814.000
406	Kab. Sumbawa Barat	371.041.136.000	371.041.136.000
407	Kab. Lombok Utara	374.284.147.000	374.284.147.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.730.933.330.000	1.730.933.330.000
409	Kab. Alor	566.240.969.000	566.240.969.000
410	Kab. Belu	466.681.212.000	466.681.212.000
411	Kab. Ende	587.010.907.000	587.010.907.000
412	Kab. Flores Timur	583.050.585.000	583.050.585.000
413	Kab. Kupang	629.437.173.000	629.437.173.000
414	Kab. Lembata	438.496.561.000	438.496.561.000
415	Kab. Manggarai	552.299.937.000	552.299.937.000
416	Kab. Ngada	439.602.004.000	439.602.004.000
417	Kab. Sikka	579.933.112.000	579.933.112.000
418	Kab. Sumba Barat	373.384.668.000	373.384.668.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
419	Kab. Sumba Timur	597.856.916.000	597.856.916.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	706.597.159.000	706.597.159.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	554.794.481.000	554.794.481.000
422	Kota Kupang	609.915.054.000	609.915.054.000
423	Kab. Rote Ndao	420.312.379.000	420.312.379.000
424	Kab. Manggarai Barat	496.029.645.000	496.029.645.000
425	Kab. Nagekeo	407.517.873.000	407.517.873.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	457.331.762.000	457.331.762.000
427	Kab. Sumba Tengah	330.446.192.000	330.446.192.000
428	Kab. Manggarai Timur	487.094.037.000	487.094.037.000
429	Kab. Sabu Raijua	337.332.898.000	337.332.898.000
430	Kab. Malaka	422.513.118.000	422.513.118.000
431	Provinsi Maluku	1.525.401.858.000	1.525.401.858.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	525.794.951.000	525.794.951.000
433	Kab. Maluku Tengah	878.408.027.000	878.408.027.000
434	Kab. Maluku Tenggara	453.350.155.000	453.350.155.000
435	Kab. Buru	476.797.877.000	476.797.877.000
436	Kota Ambon	621.203.847.000	621.203.847.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	561.546.470.000	561.546.470.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	502.009.628.000	502.009.628.000
439	Kab. Kepulauan Aru	555.383.670.000	555.383.670.000
440	Kota Tual	363.800.033.000	363.800.033.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	532.204.473.000	532.204.473.000
442	Kab. Buru Selatan	400.746.716.000	400.746.716.000
443	Provinsi Papua	2.314.920.067.000	2.314.920.067.000
444	Kab. Biak Numfor	532.363.441.000	532.363.441.000
445	Kab. Jayapura	629.527.573.000	629.527.573.000
446	Kab. Jayawijaya	662.518.235.000	662.518.235.000
447	Kab. Merauke	1.122.851.373.000	1.122.851.373.000
448	Kab. Mimika	550.841.316.000	550.841.316.000
449	Kab. Nabire	662.363.758.000	662.363.758.000
450	Kab. Paniai	538.889.485.000	538.889.485.000
451	Kab. Puncak Jaya	690.770.380.000	690.770.380.000
452	Kab. Kepulauan Yapen	513.130.572.000	513.130.572.000
453	Kota Jayapura	580.485.618.000	580.485.618.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
454	Kab. Sarmi	631.560.556.000	631.560.556.000
455	Kab. Keerom	492.219.568.000	492.219.568.000
456	Kab. Yahukimo	695.666.855.000	695.666.855.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	764.629.326.000	764.629.326.000
458	Kab. Tolikara	677.982.398.000	677.982.398.000
459	Kab. Boven Digoel	746.663.814.000	746.663.814.000
460	Kab. Mappi	697.790.298.000	697.790.298.000
461	Kab. Asmat	815.868.403.000	815.868.403.000
462	Kab. Waropen	522.616.999.000	522.616.999.000
463	Kab. Supiori	408.327.705.000	408.327.705.000
464	Kab. Mamberamo Raya	669.250.559.000	669.250.559.000
465	Kab. Mamberamo Tengah	592.696.848.000	592.696.848.000
466	Kab. Yalimo	561.979.012.000	561.979.012.000
467	Kab. Lanny Jaya	597.590.991.000	597.590.991.000
468	Kab. Nduga	560.571.126.000	560.571.126.000
469	Kab. Dogiyai	454.617.213.000	454.617.213.000
470	Kab. Puncak	736.247.211.000	736.247.211.000
471	Kab. Intan Jaya	629.502.649.000	629.502.649.000
472	Kab. Deiyai	447.601.680.000	447.601.680.000
473	Provinsi Maluku Utara	1.223.453.650.000	1.223.453.650.000
474	Kab. Halmahera Tengah	411.186.722.000	411.186.722.000
475	Kota Ternate	588.615.360.000	588.615.360.000
476	Kab. Halmahera Barat	456.627.847.000	456.627.847.000
477	Kab. Halmahera Timur	443.769.351.000	443.769.351.000
478	Kab. Halmahera Selatan	694.880.031.000	694.880.031.000
479	Kab. Halmahera Utara	450.753.682.000	450.753.682.000
480	Kab. Kepulauan Sula	450.292.909.000	450.292.909.000
481	Kota Tidore Kepulauan	504.088.132.000	504.088.132.000
482	Kab. Pulau Morotai	360.907.950.000	360.907.950.000
483	Kab. Pulau Taliabu	329.026.044.000	329.026.044.000
484	Provinsi Banten	1.071.260.267.000	1.071.260.267.000
485	Kab. Lebak	1.014.969.505.000	1.014.969.505.000
486	Kab. Pandeglang	1.111.234.459.000	1.111.234.459.000
487	Kab. Serang	1.021.090.210.000	1.021.090.210.000
488	Kab. Tangerang	1.115.215.153.000	1.115.215.153.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
489	Kota Cilegon	586.064.288.000	586.064.288.000
490	Kota Tangerang	827.928.901.000	827.928.901.000
491	Kota Serang	604.815.966.000	604.815.966.000
492	Kota Tangerang Selatan	552.258.319.000	552.258.319.000
493	Provinsi Bangka Belitung	940.858.778.000	940.858.778.000
494	Kab. Bangka	490.539.118.000	490.539.118.000
495	Kab. Belitung	453.691.144.000	453.691.144.000
496	Kota Pangkal Pinang	424.862.442.000	424.862.442.000
497	Kab. Bangka Selatan	435.231.369.000	435.231.369.000
498	Kab. Bangka Tengah	417.898.398.000	417.898.398.000
499	Kab. Bangka Barat	420.296.956.000	420.296.956.000
500	Kab. Belitung Timur	416.123.631.000	416.123.631.000
501	Provinsi Gorontalo	940.903.029.000	940.903.029.000
502	Kab. Boalemo	422.520.030.000	422.520.030.000
503	Kab. Gorontalo	611.185.280.000	611.185.280.000
504	Kota Gorontalo	481.877.171.000	481.877.171.000
505	Kab. Pohuwato	481.613.630.000	481.613.630.000
506	Kab. Bone Bolango	452.419.931.000	452.419.931.000
507	Kab. Gorontalo Utara	377.664.009.000	377.664.009.000
508	Provinsi Kepulauan Riau	1.092.929.539.000	1.092.929.539.000
509	Kab. Natuna	392.551.408.000	392.551.408.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	368.970.082.000	368.970.082.000
511	Kab. Karimun	417.642.353.000	417.642.353.000
512	Kota Batam	627.464.615.000	627.464.615.000
513	Kota Tanjung Pinang	448.777.293.000	448.777.293.000
514	Kab. Lingga	455.214.962.000	455.214.962.000
515	Kab. Bintan	477.093.608.000	477.093.608.000
516	Provinsi Papua Barat	1.307.710.344.000	1.307.710.344.000
517	Kab. Fak Fak	641.700.770.000	641.700.770.000
518	Kab. Manokwari	491.575.047.000	491.575.047.000
519	Kab. Sorong	496.641.880.000	496.641.880.000
520	Kota Sorong	457.994.121.000	457.994.121.000
521	Kab. Raja Ampat	644.234.374.000	644.234.374.000
522	Kab. Sorong Selatan	434.873.296.000	434.873.296.000
523	Kab. Teluk Bintuni	494.344.389.000	494.344.389.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
524	Kab. Teluk Wondama	422.301.104.000	422.301.104.000
525	Kab. Kaimana	569.173.342.000	569.173.342.000
526	Kab. Maybrat	401.833.080.000	401.833.080.000
527	Kab. Tambrau	463.243.481.000	463.243.481.000
528	Kab. Manokwari Selatan	317.050.694.000	317.050.694.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	344.097.123.000	344.097.123.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	972.189.180.000	972.189.180.000
531	Kab. Majene	486.476.378.000	486.476.378.000
532	Kab. Mamuju	593.740.140.000	593.740.140.000
533	Kab. Polewali Mandar	664.134.140.000	664.134.140.000
534	Kab. Mamasa	490.054.190.000	490.054.190.000
535	Kab. Pasangkayu	453.872.270.000	453.872.270.000
536	Kab. Mamuju Tengah	334.410.183.000	334.410.183.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	1.079.281.761.000	1.079.281.761.000
538	Kab. Bulungan	525.787.279.000	525.787.279.000
539	Kab. Malinau	782.097.116.000	782.097.116.000
540	Kab. Nunukan	505.057.181.000	505.057.181.000
541	Kota Tarakan	423.128.084.000	423.128.084.000
542	Kab. Tana Tidung	407.450.064.000	407.450.064.000
Jumlah		378.000.000.000.000	378.000.000.000.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	Jumlah Realisasi
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik			Reguler	Penugasan	DAK Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
1	Provinsi Aceh	236.055.351.000	39.134.717.000	275.190.068.000	769.394.539.000	1.044.584.607.000	234.423.893.220	36.628.904.727	271.052.797.947	698.293.703.389	969.346.501.336
2	Kab. Aceh Barat	72.659.526.000	-	72.659.526.000	100.181.216.000	172.840.742.000	70.582.798.866	-	70.582.798.866	93.495.658.695	164.078.457.561
3	Kab. Aceh Besar	54.212.494.000	32.645.248.000	86.857.742.000	179.782.188.000	266.639.930.000	52.118.775.892	28.607.513.570	80.726.289.462	163.352.281.566	244.078.571.028
4	Kab. Aceh Selatan	61.320.112.000	28.219.672.000	89.539.784.000	145.706.013.000	235.245.797.000	60.362.784.172	27.334.562.867	87.697.347.039	136.713.093.728	224.410.440.767
5	Kab. Aceh Singkil	67.903.440.000	11.113.570.000	79.017.010.000	77.022.204.000	156.039.214.000	67.063.942.070	10.605.363.035	77.669.305.105	76.004.603.731	153.673.908.836
6	Kab. Aceh Tengah	53.776.242.000	-	53.776.242.000	117.809.183.000	171.585.425.000	52.096.092.497	-	52.096.092.497	103.754.358.130	155.850.450.627
7	Kab. Aceh Tenggara	57.236.336.000	-	57.236.336.000	119.313.921.000	176.550.257.000	55.408.704.011	-	55.408.704.011	110.779.586.253	166.188.290.264
8	Kab. Aceh Timur	58.520.455.000	31.679.619.000	90.200.074.000	196.771.147.000	286.971.221.000	50.312.085.518	30.838.788.139	81.150.873.657	180.418.100.584	261.568.974.241
9	Kab. Aceh Utara	98.492.448.000	33.443.890.000	131.936.338.000	317.285.854.000	449.222.192.000	96.921.401.637	33.101.450.545	130.022.852.182	303.896.810.120	433.919.662.302
10	Kab. Bireuen	83.320.800.000	23.926.795.000	107.247.595.000	196.217.944.000	303.465.539.000	81.959.390.034	23.788.626.000	105.748.016.034	178.465.581.900	284.213.597.934
11	Kab. Pidie	57.116.441.000	23.312.785.000	80.429.226.000	179.259.889.000	259.689.115.000	54.835.576.828	22.830.420.900	77.665.997.728	163.807.457.440	241.473.455.168
12	Kab. Simeulue	33.045.972.000	-	33.045.972.000	60.641.877.000	93.687.849.000	31.328.347.166	-	31.328.347.166	56.391.639.140	87.719.986.306
13	Kota Banda Aceh	54.543.622.000	20.527.190.000	75.070.812.000	111.621.671.000	186.692.483.000	53.047.741.950	20.009.658.783	73.057.400.733	100.719.002.298	173.776.403.031
14	Kota Sabang	41.036.022.000	4.746.300.000	45.782.322.000	31.173.524.000	76.955.846.000	34.260.996.594	4.583.062.180	38.844.058.774	28.289.790.740	67.133.849.514
15	Kota Langsa	56.737.085.000	-	56.737.085.000	69.214.122.000	125.951.207.000	45.405.017.787	-	45.405.017.787	63.487.273.565	108.892.291.352
16	Kota Lhokseumawe	29.020.162.000	6.752.832.000	35.772.994.000	73.081.242.000	108.854.236.000	28.491.500.999	4.801.157.227	33.292.658.226	66.539.520.548	99.832.178.774
17	Kab. Gayo Lues	52.297.771.000	-	52.297.771.000	55.494.483.000	107.792.254.000	45.135.321.743	-	45.135.321.743	51.799.749.800	96.935.071.543
18	Kab. Aceh Barat Daya	70.163.574.000	-	70.163.574.000	73.177.216.000	143.340.790.000	68.756.176.097	-	68.756.176.097	67.814.837.072	136.571.013.169
19	Kab. Aceh Jaya	72.512.644.000	10.057.587.000	82.570.231.000	60.221.277.000	142.791.508.000	70.345.720.791	9.643.923.403	79.989.644.194	59.314.617.118	139.304.261.312
20	Kab. Nagan Raya	78.772.080.000	-	78.772.080.000	83.903.272.000	162.675.352.000	74.885.257.953	-	74.885.257.953	78.285.620.902	153.170.878.855
21	Kab. Aceh Tamiang	70.964.337.000	30.957.128.000	101.921.465.000	126.704.045.000	228.625.510.000	68.771.219.320	30.397.661.061	99.168.880.381	120.571.175.311	219.740.055.692
22	Kab. Bener Meriah	39.995.347.000	-	39.995.347.000	85.268.325.000	125.263.672.000	38.532.350.521	-	38.532.350.521	80.930.061.475	119.462.411.996
23	Kab. Pidie Jaya	74.829.406.000	25.550.569.000	100.379.975.000	78.621.534.000	179.001.509.000	73.979.599.889	25.302.691.198	99.282.291.087	73.935.003.613	173.217.294.700
24	Kota Subulussalam	76.579.400.000	11.401.072.000	87.980.472.000	52.041.996.000	140.022.468.000	74.742.426.661	11.184.372.760	85.926.799.421	50.768.419.050	136.695.218.471
25	Provinsi Sumatera Utara	252.913.300.000	77.964.759.000	330.878.059.000	1.818.097.331.000	2.148.975.390.000	209.525.318.234	72.813.841.248	282.339.159.482	1.762.799.940.075	2.045.139.099.557
26	Kab. Asahan	86.926.943.000	26.769.264.000	95.696.207.000	241.938.568.000	337.634.775.000	67.779.439.018	26.173.573.240	93.953.012.258	223.220.015.156	317.173.027.414
27	Kab. Dairi	101.865.197.000	70.457.223.000	172.322.420.000	161.683.776.000	334.006.196.000	88.601.397.357	64.528.074.245	153.129.471.602	151.293.472.368	304.422.943.970
28	Kab. Deli Serdang	60.403.449.000	29.046.702.000	89.450.151.000	603.907.485.000	693.357.636.000	55.763.529.653	27.818.213.750	83.581.743.403	557.995.208.277	641.576.951.680
29	Kab. Karo	41.789.800.000	50.310.129.000	92.099.929.000	175.468.415.000	267.568.344.000	27.164.292.019	30.412.683.664	57.576.975.683	157.454.566.655	215.031.542.338
30	Kab. Labuhanbatu	51.320.716.000	-	51.320.716.000	176.379.123.000	227.699.839.000	49.137.310.834	-	49.137.310.834	161.551.898.159	210.689.208.993
31	Kab. Langkat	56.358.283.000	25.080.761.000	81.439.044.000	408.948.578.000	490.387.622.000	51.775.300.911	22.395.703.384	74.171.004.295	373.978.740.269	448.149.744.564
32	Kab. Mandailing Natal	96.805.300.000	-	96.805.300.000	260.509.557.000	357.314.857.000	90.781.286.078	-	90.781.286.078	234.967.386.980	325.748.673.058
33	Kab. Nias	117.583.048.000	-	117.583.048.000	106.003.069.000	223.586.117.000	110.573.613.337	-	110.573.613.337	101.855.405.949	212.429.019.286
34	Kab. Simalungun	140.054.641.000	67.902.004.000	207.956.645.000	377.177.597.000	585.134.242.000	118.891.660.989	58.920.146.454	177.811.807.443	336.871.456.853	514.683.264.296
35	Kab. Tapanuli Selatan	56.200.778.000	-	56.200.778.000	153.825.034.000	210.025.812.000	50.496.436.240	-	50.496.436.240	137.121.500.374	187.617.936.614
36	Kab. Tapanuli Tengah	94.863.005.000	16.127.270.000	110.990.275.000	153.945.269.000	264.935.544.000	93.306.022.526	15.930.223.800	109.236.246.326	144.679.765.976	253.916.012.302
37	Kab. Tapanuli Utara	46.026.788.000	23.135.410.000	69.162.198.000	189.966.995.000	259.129.193.000	42.340.718.022	18.975.901.944	61.316.619.966	228.886.422.026	288.886.422.026
38	Kab. Toba Samosir	62.866.197.000	32.774.382.000	95.640.579.000	132.962.209.000	228.602.788.000	53.306.857.222	22.180.328.267	75.487.185.489	113.861.393.303	189.348.578.792
39	Kota Binjai	40.421.580.000	-	40.421.580.000	122.819.975.000	163.241.555.000	38.295.442.868	-	38.295.442.868	111.786.587.955	150.082.030.823
40	Kota Medan	34.665.737.000	-	34.665.737.000	565.481.782.000	600.147.519.000	33.107.210.141	-	33.107.210.141	506.496.222.050	539.603.432.191
41	Kota Pematang Siantar	47.944.463.000	2.151.300.000	50.095.763.000	113.302.007.000	163.397.770.000	12.925.550.673	1.805.882.548	14.731.433.221	99.672.478.336	114.403.911.557
42	Kota Sibolga	32.997.474.000	-	32.997.474.000	53.973.329.000	86.970.803.000	31.710.074.701	-	31.710.074.701	52.139.759.434	83.849.834.135
43	Kota Tanjung Balai	28.291.717.000	3.022.872.000	31.314.589.000	63.498.414.000	94.813.003.000	26.161.279.305	847.130.543	27.008.409.848	55.892.856.041	82.901.265.889
44	Kota Tebing Tinggi	50.031.359.000	-	50.031.359.000	72.851.446.000	122.882.805.000	32.851.803.167	-	32.851.803.167	64.886.220.240	97.738.023.407
45	Kota Padang Sidempuan	22.355.125.000	-	22.355.125.000	100.324.272.000	122.679.397.000	21.617.361.641	-	21.617.361.641	90.220.085.342	111.837.446.983
46	Kab. Pakpak Bharat	40.316.305.000	25.977.865.000	66.294.170.000	36.594.008.000	102.888.178.000	36.041.996.006	23.724.790.607	59.766.786.613	34.914.934.633	94.681.721.246
47	Kab. Nias Selatan	125.390.426.000	-	125.390.426.000	200.617.215.000	326.007.641.000	123.120.188.290	-	123.120.188.290	188.326.329.939	311.446.518.229
48	Kab. Humbang Hasundutan	43.747.744.000	87.385.998.000	131.133.742.000	125.815.130.000	256.948.872.000	41.610.627.831	29.756.889.225	71.367.517.056	115.007.370.448	186.374.887.504
49	Kab. Serdang Bedagai	116.846.847.000	27.110.101.000	143.956.948.000	240.970.432.000	384.927.380.000	110.391.183.375	26.766.660.248	137.157.843.623	219.737.453.193	356.895.296.816
50	Kab. Samosir	59.936.327.000	23.172.843.000	83.109.170.000	95.451.393.000	178.560.563.000	56.283.532.868	18.913.319.900	75.196.852.768	89.366.553.945	164.563.406.713

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	Jumlah Realisasi
Reguler	Penugasan	DAK Fisik	Reguler	Penugasan			DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
51	Kab. Batu Bara	47.229.851.000	20.281.945.000	67.511.796.000	164.267.421.000	231.779.217.000	44.499.401.883	17.908.623.145	62.408.025.028	151.272.415.041	213.680.440.069
52	Kab. Padang Lawas	57.730.080.000	-	57.730.080.000	123.272.679.000	181.002.759.000	55.371.358.755	-	55.371.358.755	111.460.137.603	166.831.496.358
53	Kab. Padang Lawas Utara	69.985.530.000	-	69.985.530.000	136.839.227.000	206.824.757.000	65.952.983.894	-	65.952.983.894	120.053.621.568	186.006.605.462
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	65.189.319.000	-	65.189.319.000	111.016.166.000	176.205.485.000	61.130.944.224	-	61.130.944.224	100.638.883.464	161.769.827.688
55	Kab. Labuhanbatu Utara	44.783.253.000	-	44.783.253.000	151.195.181.000	195.978.434.000	44.681.413.831	-	44.681.413.831	138.618.614.060	183.300.027.891
56	Kab. Nias Utara	76.661.686.000	-	76.661.686.000	96.204.658.000	172.866.344.000	75.372.312.621	-	75.372.312.621	91.323.549.721	166.695.862.342
57	Kab. Nias Barat	154.989.032.000	-	154.989.032.000	87.378.017.000	242.367.049.000	149.177.693.114	-	149.177.693.114	85.699.547.000	234.877.240.114
58	Kota Gunungsitoli	43.076.695.000	-	43.076.695.000	78.009.996.000	121.086.691.000	40.468.089.118	-	40.468.089.118	69.149.725.845	109.617.814.963
59	Provinsi Sumatera Barat	212.187.530.000	67.790.783.000	279.978.313.000	910.501.348.000	1.190.479.661.000	196.428.852.631	58.730.223.145	255.159.075.776	853.803.695.172	1.108.962.770.948
60	Kab. Lima Puluh Kota	83.357.654.000	31.115.480.000	114.473.134.000	217.480.458.000	331.953.592.000	71.161.031.590	27.357.260.828	98.518.292.418	188.476.439.308	286.994.731.726
61	Kab. Agam	68.747.020.000	37.610.503.000	106.357.523.000	253.554.364.000	359.911.887.000	61.332.454.390	30.822.199.828	92.154.654.218	230.110.375.420	322.265.029.638
62	Kab. Kepulauan Mentawai	57.927.803.000	24.076.821.000	82.004.624.000	74.879.862.000	156.884.486.000	47.218.025.722	19.338.498.497	66.556.524.219	71.664.424.473	138.220.948.692
63	Kab. Padang Pariaman	57.732.513.000	48.383.569.000	106.116.082.000	231.232.575.000	337.348.657.000	51.395.368.583	41.856.720.653	93.252.089.236	212.219.036.245	305.471.125.481
64	Kab. Pasaman	73.151.912.000	24.916.334.000	98.068.246.000	153.572.774.000	251.641.020.000	62.311.409.672	22.325.544.732	84.636.954.404	140.546.457.363	225.183.411.767
65	Kab. Pesisir Selatan	95.250.920.000	78.542.271.000	173.793.191.000	252.229.962.000	426.023.153.000	85.774.823.839	74.966.640.473	160.741.464.312	227.410.266.203	388.151.730.515
66	Kab. Sijunjung	131.972.946.000	-	131.972.946.000	130.302.345.000	262.275.291.000	98.020.713.771	-	98.020.713.771	114.079.543.434	212.100.257.205
67	Kab. Solok	84.470.162.000	25.394.344.000	109.864.506.000	210.051.045.000	319.915.551.000	76.604.113.376	21.293.159.540	97.897.272.916	194.471.057.215	292.368.330.131
68	Kab. Tanah Datar	33.007.916.000	26.153.228.000	59.161.144.000	202.348.074.000	261.509.218.000	30.114.178.495	24.327.771.459	54.441.949.954	181.918.598.272	236.360.548.226
69	Kota Bukit Tinggi	45.714.302.000	4.995.061.000	50.709.363.000	64.023.546.000	114.732.909.000	34.885.429.500	3.215.162.708	38.100.592.208	60.066.691.296	98.167.283.504
70	Kota Padang Panjang	26.013.378.000	-	26.013.378.000	34.259.797.000	60.273.175.000	21.616.550.919	-	21.616.550.919	30.738.657.451	52.355.208.370
71	Kota Padang	32.355.005.000	25.346.642.000	57.701.647.000	326.157.565.000	383.859.212.000	28.089.571.495	22.156.765.263	50.246.336.758	304.624.895.066	354.871.231.824
72	Kota Payakumbuh	37.855.472.000	7.021.295.000	44.876.767.000	76.861.682.000	121.738.449.000	33.268.415.063	4.711.038.680	37.979.453.743	72.809.891.097	110.789.344.840
73	Kota Sawahlunto	45.857.103.000	43.048.539.000	88.905.642.000	48.437.025.000	137.342.667.000	40.009.188.163	34.348.906.979	74.358.095.142	45.108.412.992	119.466.508.134
74	Kota Solok	31.055.651.000	-	31.055.651.000	45.114.050.000	76.169.701.000	27.199.217.536	-	27.199.217.536	40.420.531.879	67.619.749.415
75	Kota Pariaman	34.300.667.000	-	34.300.667.000	58.541.813.000	92.842.480.000	31.604.833.631	-	31.604.833.631	54.512.451.792	86.117.285.423
76	Kab. Pasaman Barat	76.597.904.000	22.356.560.000	98.954.464.000	186.116.240.000	285.070.704.000	68.544.212.923	19.897.614.688	88.441.827.611	175.429.436.189	263.871.263.800
77	Kab. Dharmasraya	68.025.379.000	-	68.025.379.000	119.345.587.000	187.370.966.000	64.465.577.604	-	64.465.577.604	109.584.001.289	174.049.578.893
78	Kab. Solok Selatan	90.874.080.000	-	90.874.080.000	103.904.098.000	194.778.178.000	82.711.466.024	-	82.711.466.024	92.030.391.462	174.741.857.486
79	Provinsi Riau	265.070.897.000	36.614.315.000	301.685.212.000	729.571.155.000	1.031.256.367.000	232.363.023.870	25.551.193.935	257.914.217.805	700.527.186.814	958.441.404.619
80	Kab. Bengkalis	80.873.440.000	-	80.873.440.000	238.390.863.000	319.264.303.000	77.629.486.104	-	77.629.486.104	229.962.448.090	307.591.934.194
81	Kab. Indragiri Hilir	40.145.184.000	30.036.239.000	70.181.423.000	256.491.768.000	326.673.191.000	35.922.942.413	22.918.927.633	58.841.870.046	242.237.825.221	301.079.695.267
82	Kab. Indragiri Hulu	51.729.889.000	-	51.729.889.000	189.314.903.000	241.044.792.000	49.008.014.174	-	49.008.014.174	177.522.676.101	226.530.690.275
83	Kab. Kampar	125.716.954.000	8.119.636.000	133.836.590.000	351.542.546.000	485.379.136.000	118.347.348.147	7.700.063.085	126.047.411.232	324.178.011.478	450.225.422.710
84	Kab. Kuantan Singingi	41.983.637.000	-	41.983.637.000	184.050.615.000	226.034.252.000	12.816.817.384	-	12.816.817.384	162.577.234.933	175.394.052.317
85	Kab. Pelalawan	56.891.813.000	-	56.891.813.000	182.475.677.000	239.367.490.000	50.735.385.583	-	50.735.385.583	160.569.696.319	211.305.081.902
86	Kab. Rokan Hilir	106.654.601.000	26.276.306.000	132.930.907.000	246.518.366.000	379.449.273.000	103.308.813.994	22.527.982.742	125.836.796.736	235.067.880.175	360.904.676.911
87	Kab. Rokan Hulu	117.030.093.000	-	117.030.093.000	231.508.909.000	348.539.002.000	108.221.256.591	-	108.221.256.591	218.110.888.986	326.332.145.577
88	Kab. Siak	67.303.698.000	-	67.303.698.000	198.076.272.000	265.379.970.000	63.309.650.959	-	63.309.650.959	188.923.516.444	252.233.167.403
89	Kota Dumai	65.238.891.000	-	65.238.891.000	120.808.771.000	186.047.662.000	61.389.147.488	-	61.389.147.488	116.193.472.160	177.582.619.648
90	Kota Pekanbaru	66.367.493.000	-	66.367.493.000	320.260.009.000	386.627.502.000	55.839.140.812	-	55.839.140.812	290.802.076.423	346.641.217.235
91	Kab. Kepulauan Meranti	90.992.082.000	-	90.992.082.000	86.806.421.000	177.798.503.000	90.000.911.186	-	90.000.911.186	82.347.158.439	172.348.069.625
92	Provinsi Jambi	215.903.566.000	16.253.294.000	232.156.860.000	409.062.861.000	641.219.721.000	200.181.390.617	15.861.853.024	216.043.243.641	394.475.652.760	610.518.896.401
93	Kab. Batanghari	101.433.665.000	-	101.433.665.000	133.922.022.000	235.355.687.000	95.085.007.622	-	95.085.007.622	124.422.228.957	219.507.236.579
94	Kab. Bungo	54.371.685.000	-	54.371.685.000	135.929.524.000	190.301.209.000	51.010.882.131	-	51.010.882.131	124.000.604.977	175.011.487.108
95	Kab. Kerinci	42.654.375.000	-	42.654.375.000	139.239.847.000	181.894.222.000	41.046.110.969	-	41.046.110.969	125.963.747.780	167.009.858.749
96	Kab. Merangin	52.358.842.000	-	52.358.842.000	171.277.533.000	223.636.375.000	49.737.155.202	-	49.737.155.202	156.194.738.415	205.931.893.617
97	Kab. Muaro Jambi	49.507.062.000	27.484.269.000	76.991.331.000	172.085.233.000	249.076.564.000	47.874.914.833	23.315.284.152	71.190.198.985	157.395.308.291	228.585.507.276
98	Kab. Sarolangun	84.173.789.000	-	84.173.789.000	127.015.965.000	211.189.754.000	75.557.520.503	-	75.557.520.503	118.061.090.743	193.618.611.246
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	56.089.572.000	13.919.290.000	70.008.862.000	128.560.868.000	198.569.730.000	55.183.227.354	12.211.492.590	67.394.719.944	117.993.723.930	185.388.443.874
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	79.765.288.000	37.628.872.000	117.394.160.000	120.869.087.000	238.263.247.000	78.370.855.787	35.688.380.918	114.059.236.705	111.981.294.262	226.040.530.967
101	Kab. Tebo	124.410.389.000	-	124.410.389.000	137.615.713.000	262.026.102.000	119.661.886.924	-	119.661.886.924	125.988.648.743	245.650.535.667
102	Kota Jambi	57.738.124.000	-	57.738.124.000	197.995.824.000	255.733.948.000	52.522.115.729	-	52.522.115.729	176.869.071.153	229.391.186.882

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									Jumlah Realisasi
		Pagu				Realisasi					
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik	DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	
Reguler	Penugasan						DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
103	Kota Sungai Penuh	40.019.372.000	-	40.019.372.000	61.087.836.000	101.107.208.000	39.456.411.602	-	39.456.411.602	55.594.400.526	95.050.812.128
104	Provinsi Sumatera Selatan	170.867.602.000	40.419.888.000	211.287.490.000	879.496.930.000	1.090.784.420.000	156.202.222.189	32.658.716.833	188.860.939.022	837.306.191.956	1.026.167.130.978
105	Kab. Lahat	88.714.704.000	3.143.947.000	91.858.651.000	205.073.382.000	296.932.033.000	84.153.270.818	2.937.519.663	87.090.790.481	187.071.247.553	274.162.038.034
106	Kab. Musi Banyuasin	79.796.474.000	27.459.770.000	107.256.244.000	291.315.210.000	398.571.454.000	71.499.942.630	16.670.628.077	88.170.570.707	268.412.131.380	356.582.702.087
107	Kab. Musi Rawas	105.437.726.000	28.394.049.000	133.831.775.000	179.891.940.000	313.723.715.000	101.824.866.351	26.903.196.190	128.728.062.541	165.562.755.955	294.290.818.496
108	Kab. Muara Enim	107.011.570.000	26.295.187.000	133.306.757.000	247.155.102.000	380.461.859.000	91.446.132.570	18.458.126.943	109.904.259.513	226.103.419.596	336.007.679.109
109	Kab. Ogan Komering Ilir	76.804.967.000	17.568.501.000	94.373.468.000	326.347.459.000	420.720.927.000	75.856.094.288	15.468.323.739	91.324.418.027	301.014.449.972	392.338.867.999
110	Kab. Ogan Komering Ulu	53.509.807.000	-	53.509.807.000	158.491.598.000	212.001.405.000	50.558.235.732	-	50.558.235.732	148.373.847.522	198.932.083.254
111	Kota Palembang	71.180.755.000	-	71.180.755.000	481.165.942.000	552.346.697.000	68.044.519.129	-	68.044.519.129	430.669.438.662	498.713.957.791
112	Kota Prabumulih	46.592.473.000	-	46.592.473.000	87.692.230.000	134.284.703.000	32.197.650.822	-	32.197.650.822	79.340.755.530	111.538.406.352
113	Kota Pagar Alam	75.773.626.000	12.880.760.000	88.654.386.000	61.525.989.000	150.180.375.000	64.049.020.954	12.647.857.389	76.696.878.343	56.758.146.384	133.455.024.727
114	Kota Lubuk Linggau	42.988.103.000	-	42.988.103.000	95.220.881.000	138.208.984.000	40.545.121.203	-	40.545.121.203	88.094.211.822	128.639.333.025
115	Kab. Banyuasin	128.031.900.000	31.232.707.000	159.264.607.000	338.298.660.000	497.563.267.000	123.993.012.141	29.763.612.011	153.756.624.152	313.388.919.297	467.145.543.449
116	Kab. Ogan Ilir	92.763.130.000	19.853.084.000	112.616.214.000	202.050.865.000	314.667.079.000	86.007.994.456	19.696.035.000	105.704.029.456	190.188.193.260	295.892.222.716
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	86.168.142.000	25.573.686.000	111.741.828.000	258.471.569.000	370.213.397.000	83.880.968.632	24.764.605.301	108.645.573.933	235.366.672.953	344.012.246.886
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	84.377.374.000	-	84.377.374.000	145.585.018.000	229.962.392.000	81.339.261.802	-	81.339.261.802	130.457.801.285	211.797.063.087
119	Kab. Empat Lawang	125.824.957.000	21.275.006.000	147.099.963.000	95.945.027.000	243.044.990.000	121.194.538.259	18.837.973.667	140.032.511.926	89.320.135.615	229.352.647.541
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	79.218.214.000	-	79.218.214.000	76.369.469.000	155.587.683.000	64.215.093.937	-	64.215.093.937	69.629.879.177	133.844.973.114
121	Kab. Musi Rawas Utara	74.106.010.000	-	74.106.010.000	69.460.192.000	143.566.202.000	71.947.911.551	-	71.947.911.551	66.148.974.664	138.096.886.215
122	Provinsi Bengkulu	214.697.233.000	2.737.656.000	217.434.889.000	291.208.513.000	508.643.402.000	205.134.771.017	2.388.343.381	207.523.114.398	285.216.024.440	492.739.138.838
123	Kab. Bengkulu Selatan	66.907.633.000	19.649.442.000	86.557.075.000	108.991.578.000	195.548.653.000	64.791.682.299	19.162.517.238	83.954.199.537	99.326.654.217	183.280.853.754
124	Kab. Bengkulu Utara	56.135.732.000	-	56.135.732.000	160.278.508.000	216.414.240.000	53.266.153.610	-	53.266.153.610	149.618.849.782	202.885.003.392
125	Kab. Rejang Lebong	62.033.635.000	-	62.033.635.000	140.418.320.000	202.451.955.000	59.796.388.886	-	59.796.388.886	128.634.555.698	188.430.944.584
126	Kota Bengkulu	47.652.731.000	-	47.652.731.000	156.919.145.000	204.571.876.000	43.581.285.484	-	43.581.285.484	143.593.708.220	187.174.993.704
127	Kab. Kaur	75.481.009.000	-	75.481.009.000	86.207.615.000	161.688.624.000	64.288.701.957	-	64.288.701.957	81.821.950.786	146.110.652.743
128	Kab. Seluma	73.118.480.000	-	73.118.480.000	118.395.810.000	191.514.290.000	68.146.275.435	-	68.146.275.435	108.682.840.608	176.829.116.043
129	Kab. Mukomuko	72.164.569.000	-	72.164.569.000	100.552.353.000	172.716.922.000	53.769.451.219	-	53.769.451.219	95.804.711.185	149.574.162.404
130	Kab. Lebong	79.375.189.000	-	79.375.189.000	58.881.730.000	138.256.919.000	70.025.060.813	-	70.025.060.813	56.623.599.849	126.648.660.662
131	Kab. Kepahiang	65.607.449.000	-	65.607.449.000	76.403.627.000	142.011.076.000	62.551.644.467	-	62.551.644.467	72.128.141.234	134.679.785.701
132	Kab. Bengkulu Tengah	83.261.351.000	13.894.517.000	97.155.868.000	83.398.190.000	180.554.058.000	81.195.768.092	13.699.574.871	94.895.342.963	79.187.926.564	174.083.269.527
133	Provinsi Lampung	304.770.660.000	40.440.668.000	345.211.328.000	813.794.103.000	1.159.005.431.000	287.807.377.951	36.902.239.179	324.709.617.130	802.120.437.093	1.126.830.054.223
134	Kab. Lampung Barat	96.123.277.000	-	96.123.277.000	143.563.431.000	239.686.708.000	93.382.823.627	-	93.382.823.627	133.445.533.253	226.828.356.880
135	Kab. Lampung Selatan	106.797.545.000	41.340.304.000	148.137.849.000	337.942.795.000	486.080.644.000	101.940.291.349	39.511.880.922	141.452.172.271	315.867.802.167	457.319.974.438
136	Kab. Lampung Tengah	167.047.032.000	29.600.639.000	196.647.671.000	465.211.340.000	661.859.011.000	158.718.504.432	28.356.655.436	187.075.159.868	423.897.732.831	610.972.892.699
137	Kab. Lampung Utara	96.894.627.000	-	96.894.627.000	255.898.861.000	352.793.488.000	90.450.970.247	-	90.450.970.247	221.639.217.435	312.090.187.682
138	Kab. Lampung Timur	87.440.805.000	21.943.830.000	109.384.635.000	365.249.535.000	474.634.170.000	83.688.794.136	21.196.037.689	104.884.831.825	326.415.880.380	431.300.712.205
139	Kab. Tanggamus	112.719.471.000	22.211.074.000	134.930.545.000	262.295.341.000	397.225.886.000	107.206.367.821	21.412.170.520	128.618.538.341	243.878.320.606	372.496.858.947
140	Kab. Tulang Bawang	91.373.650.000	22.632.883.000	114.006.533.000	168.130.374.000	282.136.907.000	77.788.176.195	17.106.372.170	94.894.548.365	155.447.323.634	250.341.871.999
141	Kab. Way Kanan	117.449.626.000	-	117.449.626.000	214.498.261.000	331.947.887.000	113.974.659.654	-	113.974.659.654	198.975.275.161	312.949.934.815
142	Kota Bandar Lampung	43.320.727.000	-	43.320.727.000	312.008.265.000	355.328.992.000	41.810.272.846	-	41.810.272.846	281.600.868.569	323.411.141.415
143	Kota Metro	32.537.834.000	-	32.537.834.000	85.730.985.000	118.268.819.000	29.845.190.868	-	29.845.190.868	79.872.243.523	109.717.434.391
144	Kab. Pesawaran	69.430.523.000	20.516.371.000	89.946.894.000	181.487.139.000	271.434.033.000	65.688.693.506	20.098.758.253	85.688.689.759	169.111.010.820	254.799.700.579
145	Kab. Pringsewu	74.807.168.000	31.739.955.000	106.547.123.000	186.784.679.000	293.331.802.000	73.388.758.116	29.673.334.780	103.062.092.896	170.992.046.716	274.054.139.612
146	Kab. Mesuji	122.977.030.000	20.593.438.000	143.570.468.000	90.699.094.000	234.269.562.000	75.120.432.589	20.052.174.380	95.172.606.969	87.521.155.950	182.693.762.919
147	Kab. Tulang Bawang Barat	89.409.492.000	-	89.409.492.000	119.298.555.000	208.708.047.000	87.680.822.078	-	87.680.822.078	109.928.023.850	197.608.845.928
148	Kab. Pesisir Barat	56.151.481.000	-	56.151.481.000	79.581.922.000	135.733.403.000	55.178.811.111	-	55.178.811.111	75.236.658.060	130.415.469.171
149	Provinsi DKI Jakarta	37.291.510.000	-	37.291.510.000	3.199.528.204.000	3.236.819.714.000	34.127.101.188	-	34.127.101.188	2.749.340.553.678	2.783.467.654.866
150	Provinsi Jawa Barat	499.252.928.000	141.433.519.000	640.686.447.000	4.301.238.835.000	4.941.925.282.000	488.069.356.547	85.084.647.462	573.154.004.009	4.159.661.730.717	4.732.815.734.726
151	Kab. Bandung	100.229.100.000	28.376.329.000	128.605.429.000	1.054.152.708.000	1.182.758.137.000	74.735.505.266	26.165.964.255	100.901.469.521	979.965.579.586	1.080.867.049.107
152	Kab. Bekasi	10.239.767.000	2.879.808.000	13.119.575.000	797.191.195.000	810.310.770.000	9.299.570.137	1.300.697.950	10.600.268.087	708.165.789.570	718.766.057.657
153	Kab. Bogor	73.644.308.000	9.378.564.000	83.022.872.000	1.437.358.236.000	1.520.381.108.000	61.072.728.375	6.738.512.147	67.811.240.522	1.354.228.632.786	1.422.039.873.308
154	Kab. Ciamis	149.825.457.000	26.959.257.000	176.784.714.000	451.372.034.000	628.156.748.000	144.520.594.134	26.740.474.177	171.261.068.311	405.281.711.607	576.542.779.918

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	Jumlah Realisasi
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik			Reguler	Penugasan	DAK Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
155	Kab. Cianjur	90.745.082.000	36.471.867.000	127.216.949.000	787.204.425.000	914.421.374.000	88.353.834.781	31.231.759.349	119.585.594.130	736.535.935.467	856.121.529.597
156	Kab. Cirebon	98.637.355.000	12.725.794.000	111.363.149.000	702.541.829.000	813.904.978.000	93.932.021.057	8.126.208.380	102.058.229.437	645.911.791.136	747.970.020.573
157	Kab. Garut	93.314.588.000	27.882.447.000	121.197.035.000	909.984.826.000	1.031.181.861.000	87.462.504.709	26.082.487.784	113.544.992.493	861.850.842.945	975.395.835.438
158	Kab. Indramayu	54.228.210.000	16.431.091.000	70.659.301.000	536.534.202.000	607.193.503.000	49.414.627.774	13.139.007.980	62.553.635.754	475.669.256.426	538.222.892.180
159	Kab. Karawang	69.415.510.000	20.701.330.000	90.116.840.000	682.479.423.000	772.596.263.000	65.719.806.321	18.747.369.000	84.467.175.321	632.747.098.863	717.214.274.184
160	Kab. Kuningan	122.041.350.000	24.876.850.000	146.918.200.000	489.174.134.000	636.092.334.000	109.481.633.601	22.766.487.296	132.248.120.897	454.053.653.936	586.301.774.833
161	Kab. Majalengka	91.526.330.000	29.700.727.000	121.227.057.000	472.112.054.000	593.339.111.000	85.094.755.430	28.524.079.446	113.618.834.876	422.139.466.727	535.758.301.603
162	Kab. Purwakarta	84.099.951.000	8.882.643.000	92.782.594.000	338.690.613.000	431.473.207.000	69.853.785.390	8.343.520.706	78.197.306.096	307.448.294.186	385.645.600.282
163	Kab. Subang	122.170.387.000	31.426.445.000	153.596.832.000	542.887.387.000	696.484.219.000	117.428.328.334	28.512.411.530	145.940.739.864	489.829.686.824	635.770.426.688
164	Kab. Sukabumi	125.815.599.000	76.588.706.000	202.404.305.000	735.900.697.000	938.305.002.000	121.880.030.764	72.144.417.114	194.024.447.878	669.405.596.702	863.430.044.580
165	Kab. Sumedang	192.067.572.000	23.105.249.000	215.172.821.000	454.765.817.000	669.938.638.000	184.607.426.645	22.690.740.423	207.298.167.073	421.059.674.625	628.357.841.698
166	Kab. Tasikmalaya	95.098.200.000	37.301.278.000	132.399.478.000	637.897.738.000	770.297.216.000	89.821.819.712	34.640.922.843	124.462.742.555	577.680.673.300	702.143.415.855
167	Kota Bandung	61.282.761.000	2.394.385.000	63.677.146.000	677.718.681.000	741.395.827.000	59.118.133.995	1.316.671.700	60.434.805.695	612.433.890.699	672.868.896.394
168	Kota Bekasi	61.961.492.000	-	61.961.492.000	588.058.824.000	650.020.316.000	55.624.251.060	-	55.624.251.060	531.775.716.008	587.399.967.068
169	Kota Bogor	87.790.818.000	-	87.790.818.000	308.106.809.000	395.897.627.000	79.141.831.118	-	79.141.831.118	283.487.119.770	362.628.950.888
170	Kota Cirebon	40.966.226.000	-	40.966.226.000	142.386.661.000	183.352.887.000	40.200.124.753	-	40.200.124.753	131.332.351.470	171.532.476.223
171	Kota Depok	28.056.260.000	-	28.056.260.000	425.272.166.000	453.328.426.000	25.504.964.350	-	25.504.964.350	391.207.108.540	416.712.072.890
172	Kota Sukabumi	74.444.388.000	-	74.444.388.000	122.367.175.000	196.811.563.000	50.305.855.128	-	50.305.855.128	113.540.892.094	163.846.747.222
173	Kota Tasikmalaya	63.958.110.000	4.323.384.000	68.281.494.000	258.001.575.000	326.283.069.000	61.141.802.331	4.056.886.330	65.198.688.661	234.408.723.652	299.607.412.313
174	Kota Cimahi	27.826.107.000	-	27.826.107.000	164.852.117.000	192.678.224.000	21.060.743.820	-	21.060.743.820	147.451.253.766	168.511.997.586
175	Kota Banjar	47.855.413.000	-	47.855.413.000	76.736.528.000	124.591.941.000	42.133.230.772	-	42.133.230.772	73.674.954.040	115.808.184.812
176	Kab. Bandung Barat	40.915.241.000	7.025.679.000	47.940.920.000	519.706.727.000	567.647.647.000	34.821.287.479	6.623.871.408	41.445.158.887	471.768.055.267	513.213.214.154
177	Kab. Pangandaran	59.565.318.000	22.065.781.000	81.631.099.000	152.563.116.000	234.194.215.000	54.377.282.509	20.081.873.136	74.459.155.645	143.579.097.718	218.038.253.363
178	Provinsi Jawa Tengah	343.957.421.000	110.281.274.000	454.238.695.000	3.135.395.952.000	3.589.634.647.000	278.382.008.669	93.352.776.516	371.734.785.185	3.016.202.028.528	3.387.936.813.713
179	Kab. Banjarnegara	81.940.193.000	22.501.651.000	104.441.844.000	337.961.411.000	442.403.255.000	61.492.049.117	7.036.319.752	68.528.368.869	312.224.782.945	380.753.151.814
180	Kab. Banyumas	91.243.605.000	29.148.971.000	120.392.576.000	551.933.684.000	673.326.260.000	86.131.465.053	25.860.478.610	514.899.384.277	626.891.327.940	741.789.714.210
181	Kab. Batang	75.856.569.000	24.367.154.000	100.223.723.000	249.037.449.000	349.261.172.000	74.276.964.793	22.234.951.067	96.511.915.860	227.102.870.852	323.614.786.712
182	Kab. Blora	79.930.180.000	40.564.947.000	120.495.127.000	308.997.709.000	429.492.836.000	76.665.977.221	37.205.154.605	113.871.131.826	291.664.350.836	405.535.482.662
183	Kab. Boyolali	137.462.984.000	42.849.420.000	180.312.404.000	331.520.275.000	511.832.679.000	133.912.563.276	41.197.464.535	175.110.027.811	304.280.670.243	479.390.698.054
184	Kab. Brebes	104.789.561.000	26.146.658.000	130.936.219.000	503.858.642.000	634.794.861.000	94.581.507.467	24.687.176.638	119.268.684.105	466.142.482.363	585.411.166.468
185	Kab. Cilacap	101.475.917.000	29.491.813.000	130.967.730.000	541.876.931.000	672.844.661.000	96.009.682.032	26.789.909.720	122.799.591.752	504.395.821.189	627.195.412.941
186	Kab. Demak	68.245.128.000	16.703.226.000	84.948.354.000	356.879.805.000	441.828.159.000	62.314.533.254	15.648.893.131	77.963.426.385	326.843.645.044	404.807.071.429
187	Kab. Grobogan	93.411.281.000	29.508.286.000	122.919.567.000	420.340.722.000	543.260.289.000	81.237.879.972	28.353.860.055	109.591.740.027	401.057.438.704	510.649.178.731
188	Kab. Jepara	97.896.888.000	29.236.980.000	127.133.868.000	349.574.991.000	476.708.859.000	83.612.991.450	23.238.187.790	106.851.179.240	319.835.500.552	426.686.679.792
189	Kab. Karanganyar	95.809.333.000	19.337.521.000	115.146.854.000	339.069.327.000	454.216.181.000	85.198.694.683	15.793.411.200	100.992.105.883	307.325.530.935	408.317.636.818
190	Kab. Kebumen	61.680.209.000	14.794.859.000	76.474.859.000	465.343.890.000	541.818.749.000	58.022.524.943	12.252.744.800	70.275.269.743	436.519.897.864	506.795.167.607
191	Kab. Kendal	70.530.221.000	30.125.398.000	100.655.619.000	359.702.911.000	460.358.530.000	67.357.875.646	29.584.476.990	96.942.352.636	331.497.589.237	428.439.941.873
192	Kab. Klaten	36.185.856.000	36.523.379.000	72.709.235.000	398.516.175.000	471.225.410.000	31.187.828.598	32.487.598.915	63.675.427.513	358.855.117.811	422.530.545.324
193	Kab. Kudus	64.754.736.000	15.559.148.000	80.313.884.000	256.024.495.000	336.338.379.000	61.935.754.510	15.181.051.240	77.116.805.750	225.752.174.396	302.868.980.146
194	Kab. Magelang	119.367.605.000	35.785.453.000	155.153.058.000	368.057.701.000	523.210.759.000	109.384.230.757	33.372.903.632	142.757.134.389	335.087.184.469	477.844.318.858
195	Kab. Pati	66.773.213.000	31.293.385.000	98.066.598.000	388.262.069.000	486.326.667.000	58.228.701.628	27.773.424.605	86.002.126.233	361.359.962.752	447.362.088.985
196	Kab. Pekalongan	79.737.890.000	4.909.904.000	84.647.794.000	319.912.371.000	404.560.525.000	73.654.018.942	4.586.617.477	78.240.636.419	290.751.722.568	368.992.358.987
197	Kab. Pemalang	47.926.831.000	14.551.564.000	62.478.395.000	449.999.771.000	512.478.106.000	43.525.425.213	10.656.255.574	54.181.680.787	430.947.460.976	485.129.141.763
198	Kab. Purbalingga	143.126.554.000	27.919.442.000	171.045.996.000	315.723.122.000	486.769.118.000	128.342.552.018	22.724.787.000	151.067.339.018	304.749.770.095	455.817.109.113
199	Kab. Purworejo	73.966.204.000	42.692.688.000	116.658.892.000	305.063.389.000	421.722.281.000	64.303.086.902	39.628.883.257	103.931.970.159	282.015.607.512	385.947.577.671
200	Kab. Rembang	83.160.188.000	23.934.075.000	107.094.263.000	233.506.996.000	340.601.259.000	77.863.338.985	20.117.373.902	97.980.712.887	212.107.090.874	310.087.803.761
201	Kab. Semarang	92.796.696.000	56.164.815.000	148.961.511.000	346.232.088.000	495.193.599.000	83.887.687.852	49.421.848.113	133.309.535.965	325.284.071.575	458.593.607.540
202	Kab. Sragen	42.736.193.000	68.500.860.000	111.237.053.000	327.387.517.000	438.624.570.000	38.979.474.646	60.627.070.911	99.606.545.557	304.704.936.160	404.311.481.717
203	Kab. Sukoharjo	35.700.577.000	17.481.118.000	53.181.695.000	281.305.445.000	334.487.140.000	32.041.198.828	15.265.423.750	47.306.622.578	258.614.806.805	305.921.429.383
204	Kab. Tegal	99.243.582.000	5.739.856.000	104.983.438.000	457.297.858.000	562.281.296.000	85.510.815.329	5.306.633.400	90.817.448.729	426.387.445.653	517.204.894.382
205	Kab. Temanggung	153.727.447.000	-	153.727.447.000	265.088.285.000	418.815.732.000	141.115.030.563	-	141.115.030.563	249.228.206.801	390.343.237.364
206	Kab. Wonogiri	68.649.726.000	37.922.377.000	106.572.103.000	381.909.538.000	488.481.641.000	62.893.869.074	35.290.600.353	98.184.459.427	355.404.078.302	453.588.537.729

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									Jumlah Realisasi
		Pagu					Realisasi				
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	
Reguler	Penugasan	DAK Fisik	Reguler	Penugasan			DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
207	Kab. Wonosobo	72.824.357.000	-	72.824.357.000	306.148.694.000	378.973.051.000	67.940.718.381	-	67.940.718.381	281.724.963.982	349.665.682.363
208	Kota Magelang	16.421.223.000	10.598.222.000	27.019.445.000	68.185.929.000	95.205.374.000	15.003.587.306	10.167.559.742	25.171.147.048	63.770.043.978	88.941.191.026
209	Kota Pekalongan	68.853.796.000	1.421.727.000	70.275.523.000	107.176.288.000	177.451.811.000	58.717.174.999	1.389.790.510	60.106.965.509	98.516.984.624	158.623.950.133
210	Kota Salatiga	12.296.292.000	16.097.362.000	28.393.654.000	82.573.841.000	110.967.495.000	11.520.340.479	14.695.536.744	26.215.877.223	76.370.294.203	102.586.171.426
211	Kota Semarang	38.580.483.000	20.801.169.000	59.381.652.000	427.970.488.000	487.352.140.000	34.813.157.884	15.745.439.717	50.558.597.601	399.617.427.922	450.176.025.523
212	Kota Surakarta	64.904.892.000	65.389.284.000	130.294.176.000	230.938.324.000	361.232.500.000	55.661.338.001	59.067.202.989	114.728.540.990	213.686.399.743	328.414.940.733
213	Kota Tegal	40.190.566.000	6.503.099.000	46.693.665.000	106.049.156.000	152.742.821.000	36.978.175.228	5.397.264.383	42.375.439.611	95.610.967.484	137.986.407.095
214	Provinsi DI Yogyakarta	129.351.419.000	14.062.629.000	143.414.048.000	515.082.054.000	658.496.102.000	124.777.189.931	12.752.666.538	137.529.856.469	469.737.726.471	607.267.582.940
215	Kab. Bantul	56.473.786.000	43.324.389.000	99.798.175.000	326.348.648.000	426.146.823.000	51.316.169.714	26.092.388.529	77.408.558.243	298.845.870.839	376.254.429.082
216	Kab. Gunung Kidul	108.745.641.000	48.099.718.000	156.845.359.000	318.105.399.000	474.950.758.000	99.131.603.401	42.278.798.406	141.410.401.807	294.191.136.266	435.601.538.073
217	Kab. Kulon Progo	62.128.059.000	13.115.662.000	75.243.721.000	208.186.070.000	283.429.791.000	53.196.454.047	9.159.934.500	62.356.388.547	190.599.986.952	252.956.375.499
218	Kab. Sleman	77.461.416.000	40.361.683.000	117.823.099.000	350.822.637.000	468.645.736.000	73.007.136.721	36.174.500.968	109.181.637.689	328.831.100.601	438.012.738.290
219	Kota Yogyakarta	23.077.615.000	65.979.458.000	89.057.073.000	165.527.344.000	254.584.417.000	19.253.224.106	58.966.434.688	78.219.658.794	152.755.512.569	230.975.171.363
220	Provinsi Jawa Timur	466.364.413.000	148.493.901.000	614.858.314.000	3.623.328.279.000	4.238.186.593.000	415.129.222.940	121.759.094.941	536.888.317.881	3.456.876.516.671	3.993.764.834.552
221	Kab. Bangkalan	75.755.042.000	58.566.562.000	134.321.604.000	341.933.642.000	476.255.246.000	73.031.914.680	57.733.604.202	130.765.518.882	335.600.886.700	466.366.405.582
222	Kab. Banyuwangi	47.448.700.000	30.082.900.000	77.531.600.000	490.543.014.000	568.074.614.000	42.710.998.788	22.600.785.603	65.311.784.391	439.187.313.843	504.499.098.234
223	Kab. Blitar	53.889.546.000	27.324.611.000	81.214.157.000	370.431.824.000	451.645.981.000	48.354.820.736	21.334.387.540	69.689.208.276	332.548.993.991	402.238.202.267
224	Kab. Bojonegoro	38.997.161.000	6.290.848.000	45.288.009.000	383.306.389.000	428.594.398.000	35.851.670.422	2.246.849.790	38.098.520.212	355.294.959.889	393.393.480.101
225	Kab. Bondowoso	68.955.020.000	44.181.743.000	113.136.763.000	262.537.664.000	375.674.427.000	60.835.252.686	35.030.874.456	95.866.127.142	235.509.754.278	331.375.881.420
226	Kab. Gresik	96.245.824.000	14.404.297.000	110.650.121.000	356.062.091.000	466.712.212.000	87.691.262.198	12.722.838.431	100.414.100.629	326.166.030.531	426.580.131.160
227	Kab. Jember	56.559.863.000	21.343.767.000	77.903.630.000	327.375.205.000	705.278.835.000	48.847.050.046	11.162.961.675	60.010.011.721	574.552.249.855	634.562.261.576
228	Kab. Jombang	70.059.174.000	45.677.408.000	115.736.582.000	380.214.562.000	495.951.144.000	63.722.131.915	37.682.042.286	101.404.174.201	348.758.672.358	450.162.846.559
229	Kab. Kediri	53.377.644.000	6.836.897.000	60.214.541.000	453.205.413.000	513.419.954.000	42.541.562.798	5.788.067.155	48.329.629.953	415.467.150.420	463.796.780.373
230	Kab. Lamongan	144.165.620.000	24.039.435.000	168.205.055.000	377.063.622.000	545.268.677.000	131.710.065.505	20.990.135.284	152.700.200.789	351.812.734.270	504.512.935.059
231	Kab. Lumajang	70.545.015.000	38.896.508.000	109.441.523.000	321.891.693.000	431.333.216.000	61.822.182.462	33.527.794.672	95.349.977.134	295.084.677.769	390.434.654.903
232	Kab. Madiun	121.535.865.000	25.059.155.000	146.595.020.000	243.140.565.000	389.735.585.000	116.650.194.629	24.814.607.540	141.464.802.169	217.856.223.588	359.321.025.757
233	Kab. Magetan	59.526.968.000	7.920.800.000	67.447.768.000	265.396.167.000	332.843.935.000	50.461.508.701	7.187.066.000	57.648.574.701	229.655.501.014	287.304.075.715
234	Kab. Malang	84.550.532.000	28.790.801.000	113.341.333.000	650.024.177.000	763.365.510.000	75.230.307.120	24.194.153.185	99.424.460.305	598.463.417.717	697.887.878.022
235	Kab. Mojokerto	61.219.769.000	8.064.378.000	69.284.147.000	322.839.548.000	392.123.695.000	57.247.721.949	6.864.674.980	64.112.396.929	301.306.392.285	365.418.789.214
236	Kab. Nganjuk	120.623.925.000	24.480.776.000	145.104.701.000	366.866.156.000	511.970.857.000	110.614.431.588	22.928.636.074	133.543.067.662	327.450.188.497	460.993.256.159
237	Kab. Ngawi	119.388.977.000	28.847.054.000	148.236.031.000	308.882.643.000	457.118.674.000	111.131.147.057	26.924.531.498	138.055.678.555	278.343.768.731	416.399.447.286
238	Kab. Pacitan	120.659.311.000	31.822.261.000	152.481.572.000	236.260.784.000	388.742.356.000	107.534.626.221	27.893.647.697	135.428.273.918	216.557.318.456	351.985.592.374
239	Kab. Pamekasan	112.314.778.000	6.904.870.000	119.219.648.000	277.873.629.000	397.093.277.000	105.787.163.873	5.636.416.550	111.423.580.423	253.137.139.398	364.560.719.821
240	Kab. Pasuruan	85.381.189.000	35.863.608.000	121.244.797.000	444.187.871.000	565.432.668.000	74.885.543.148	28.623.554.133	103.509.097.281	412.701.388.739	516.210.486.020
241	Kab. Ponorogo	83.278.145.000	25.385.624.000	108.663.769.000	326.049.808.000	434.713.577.000	51.365.399.535	14.911.981.369	66.277.380.904	297.275.987.115	363.553.368.019
242	Kab. Probolinggo	97.354.644.000	45.942.362.000	143.297.006.000	324.576.165.000	467.873.171.000	66.093.712.542	34.226.860.878	100.320.573.420	295.970.180.035	396.290.753.455
243	Kab. Sampang	106.306.114.000	11.039.392.000	117.345.506.000	284.751.474.000	402.096.980.000	102.401.194.730	10.389.712.980	112.790.907.710	262.036.629.717	374.827.537.427
244	Kab. Sidoarjo	65.376.008.000	6.518.689.000	71.894.697.000	365.084.313.000	634.979.010.000	58.399.391.729	5.824.824.479	64.224.216.208	504.252.163.655	568.476.379.863
245	Kab. Situbondo	76.079.500.000	39.500.772.000	115.580.272.000	251.475.860.000	367.056.132.000	65.711.503.072	25.458.888.947	91.170.392.019	229.045.878.229	320.216.270.248
246	Kab. Sumenep	86.844.450.000	42.749.443.000	129.593.893.000	323.669.035.000	453.262.928.000	84.334.510.508	41.046.931.680	125.381.442.188	296.827.134.095	422.208.576.283
247	Kab. Trenggalek	124.860.327.000	23.832.651.000	148.692.978.000	256.213.324.000	404.906.302.000	106.314.545.144	18.663.718.567	124.977.723.711	229.556.668.294	354.534.392.005
248	Kab. Tuban	65.529.953.000	19.675.431.000	85.205.384.000	359.554.508.000	444.759.892.000	49.489.201.277	15.129.292.696	64.618.493.973	328.782.720.505	393.401.214.478
249	Kab. Tulungagung	79.245.805.000	31.825.256.000	111.071.061.000	376.283.656.000	487.354.717.000	59.144.848.570	24.104.413.683	83.249.262.253	339.255.029.945	422.504.292.198
250	Kota Blitar	19.738.150.000	-	19.738.150.000	70.957.930.000	90.696.080.000	18.028.861.209	-	18.028.861.209	61.837.390.697	79.866.251.906
251	Kota Kediri	28.425.165.000	-	28.425.165.000	114.978.575.000	143.403.740.000	24.256.720.743	-	24.256.720.743	105.805.212.532	130.061.933.275
252	Kota Madiun	3.102.779.000	-	3.102.779.000	89.762.746.000	92.865.525.000	2.798.929.994	-	2.798.929.994	76.960.476.890	79.759.406.884
253	Kota Malang	18.122.201.000	-	18.122.201.000	239.209.747.000	257.331.948.000	13.614.853.380	-	13.614.853.380	217.222.160.500	230.837.013.880
254	Kota Mojokerto	22.523.422.000	-	22.523.422.000	63.807.207.000	86.330.629.000	17.820.615.622	-	17.820.615.622	59.381.130.186	77.201.745.808
255	Kota Pasuruan	26.093.011.000	18.196.273.000	44.289.284.000	81.121.702.000	125.410.986.000	19.357.407.213	14.194.482.100	33.551.889.313	74.756.394.823	108.308.284.136
256	Kota Probolinggo	26.221.963.000	4.541.351.000	30.763.314.000							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik	DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	Jumlah Realisasi
Reguler	Penugasan						DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
259	Provinsi Kalimantan Barat	283.960.280.000	30.708.841.000	314.669.121.000	563.048.292.000	877.717.413.000	269.691.247.887	29.951.257.300	299.642.505.187	549.934.722.140	849.577.227.327
260	Kab. Bengkayang	116.304.448.000	-	116.304.448.000	150.508.421.000	266.812.869.000	92.032.972.402	-	92.032.972.402	143.472.882.886	235.505.855.288
261	Kab. Landak	158.142.974.000	-	158.142.974.000	172.679.518.000	330.822.492.000	149.581.302.274	-	149.581.302.274	165.575.990.001	315.157.292.275
262	Kab. Kapuas Hulu	58.615.219.000	21.263.861.000	79.879.080.000	179.370.821.000	259.249.901.000	56.392.561.823	19.356.211.279	75.748.773.102	151.502.462.388	227.251.235.490
263	Kab. Ketapang	125.001.875.000	43.434.807.000	168.436.682.000	274.565.293.000	443.001.975.000	120.232.655.202	41.190.212.450	161.422.867.652	242.430.972.553	403.853.840.205
264	Kab. Mempawah	97.396.302.000	16.914.598.000	114.310.900.000	129.744.000.000	244.054.900.000	49.902.784.098	16.753.632.600	66.656.416.698	117.426.636.085	184.083.052.783
265	Kab. Sambas	82.200.799.000	45.029.310.000	127.230.109.000	298.520.103.000	425.750.212.000	78.784.879.859	43.427.874.813	122.212.754.672	262.624.873.801	384.837.628.473
266	Kab. Sanggau	56.713.171.000	-	56.713.171.000	214.990.587.000	271.703.758.000	53.772.555.906	-	53.772.555.906	193.855.172.339	247.627.728.245
267	Kab. Sintang	71.988.688.000	-	71.988.688.000	244.114.469.000	316.103.157.000	65.839.821.565	-	65.839.821.565	231.816.993.776	297.656.815.341
268	Kota Pontianak	61.040.019.000	-	61.040.019.000	188.661.556.000	249.701.575.000	58.730.112.869	-	58.730.112.869	170.764.220.833	229.494.333.702
269	Kota Singkawang	43.626.700.000	4.200.459.000	47.827.159.000	92.643.603.000	140.470.762.000	38.392.833.361	3.624.046.703	42.016.880.064	84.995.946.316	127.012.826.380
270	Kab. Sekadau	59.930.816.000	-	59.930.816.000	100.861.533.000	160.792.349.000	57.009.901.068	-	57.009.901.068	90.083.897.650	147.093.798.718
271	Kab. Melawi	67.675.118.000	-	67.675.118.000	117.924.334.000	185.599.452.000	59.697.279.082	-	59.697.279.082	112.681.303.840	172.378.582.922
272	Kab. Kayong Utara	74.693.124.000	16.759.376.000	91.452.500.000	65.610.339.000	157.062.839.000	59.245.188.225	12.920.469.842	72.165.658.067	64.074.564.436	136.240.222.503
273	Kab. Kubu Raya	104.848.189.000	23.573.244.000	128.421.433.000	228.614.058.000	357.035.491.000	92.646.092.483	20.538.591.000	113.184.683.483	211.426.603.164	324.611.286.647
274	Provinsi Kalimantan Tengah	211.574.326.000	44.257.032.000	255.831.358.000	347.312.191.000	603.143.549.000	199.052.863.697	41.879.501.889	240.932.365.586	326.337.131.468	567.269.497.054
275	Kab. Barito Selatan	83.540.162.000	10.303.396.000	93.843.558.000	101.645.150.000	195.488.708.000	79.534.452.502	10.026.124.209	89.560.576.711	95.300.037.193	184.860.613.904
276	Kab. Barito Utara	90.254.881.000	25.952.501.000	116.207.382.000	116.018.492.000	232.225.874.000	87.271.190.650	25.820.616.820	113.091.807.470	106.568.061.554	219.659.869.024
277	Kab. Kapuas	145.208.172.000	53.096.509.000	198.304.681.000	226.481.153.000	424.785.834.000	140.476.680.243	50.714.936.372	191.191.616.615	204.663.900.889	395.855.517.504
278	Kab. Kotawaringin Barat	112.235.300.000	-	112.235.300.000	124.797.400.000	237.032.700.000	110.134.562.916	-	110.134.562.916	116.237.719.840	226.372.282.756
279	Kab. Kotawaringin Timur	79.576.738.000	6.901.614.000	86.478.352.000	201.232.461.000	287.710.813.000	75.354.225.112	5.898.884.344	81.253.109.456	185.905.076.825	267.158.186.281
280	Kota Palangkaraya	57.026.773.000	-	57.026.773.000	126.888.145.000	183.914.918.000	53.902.566.319	-	53.902.566.319	112.114.016.330	166.016.582.649
281	Kab. Katingan	87.012.914.000	13.796.166.000	100.809.080.000	124.938.221.000	225.747.301.000	80.127.387.429	13.538.688.090	93.666.075.519	112.786.694.020	206.452.769.539
282	Kab. Seruyan	79.269.644.000	-	79.269.644.000	81.388.230.000	160.657.874.000	69.566.378.292	-	69.566.378.292	70.492.633.007	140.059.011.299
283	Kab. Sukamara	53.585.092.000	19.619.615.000	73.204.707.000	39.818.517.000	113.023.224.000	47.463.611.790	16.104.543.303	63.568.155.093	38.650.903.071	102.219.058.164
284	Kab. Lamandau	71.734.677.000	-	71.734.677.000	62.714.486.000	134.449.163.000	68.959.873.954	-	68.959.873.954	57.768.805.541	126.728.679.495
285	Kab. Gunung Mas	90.137.035.000	14.527.617.000	104.664.652.000	110.116.476.000	214.781.128.000	83.835.107.206	13.900.518.900	97.735.626.106	102.046.771.363	199.782.397.469
286	Kab. Pulang Pisau	67.346.505.000	35.607.044.000	102.953.549.000	103.129.547.000	206.083.096.000	64.229.017.833	34.329.555.650	98.558.573.483	91.205.995.413	189.764.568.896
287	Kab. Murung Raya	65.035.132.000	17.668.215.000	82.703.347.000	104.137.243.000	186.840.590.000	63.329.469.163	17.539.837.428	80.869.306.591	99.994.086.085	180.863.392.676
288	Kab. Barito Timur	55.557.477.000	-	55.557.477.000	83.682.011.000	139.239.488.000	52.354.260.414	-	52.354.260.414	76.460.610.604	128.814.871.018
289	Provinsi Kalimantan Selatan	214.995.027.000	52.151.901.000	267.146.928.000	417.073.537.000	684.220.465.000	185.728.409.105	41.597.036.594	227.325.445.699	384.365.111.050	611.690.556.749
290	Kab. Banjar	91.197.858.000	26.139.002.000	117.336.860.000	224.582.031.000	341.918.891.000	84.682.250.829	22.506.950.391	107.189.201.220	205.552.969.578	312.742.170.798
291	Kab. Barito Kuala	108.492.061.000	29.806.509.000	138.098.570.000	168.925.644.000	307.024.214.000	106.751.374.752	28.532.753.325	135.284.128.077	152.933.654.922	288.217.782.999
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	75.946.158.000	25.986.126.000	101.932.284.000	128.385.512.000	230.317.796.000	73.757.293.773	25.638.610.269	99.395.904.042	115.211.721.646	214.607.625.688
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	31.023.122.000	18.769.966.000	49.793.088.000	129.926.399.000	179.719.487.000	17.877.990.061	14.644.583.474	32.522.573.535	114.038.346.893	146.560.920.428
294	Kab. Hulu Sungai Utara	65.155.900.000	-	65.155.900.000	113.729.091.000	178.884.991.000	49.384.263.098	-	49.384.263.098	98.137.458.319	147.521.721.417
295	Kab. Kotabaru	58.052.574.000	24.212.418.000	82.264.992.000	153.153.612.000	235.418.604.000	55.312.458.854	19.576.290.661	74.888.749.515	140.153.238.570	215.041.988.085
296	Kab. Tabalong	46.650.266.000	-	46.650.266.000	138.510.337.000	185.160.603.000	42.086.658.122	-	42.086.658.122	126.824.430.827	168.911.088.949
297	Kab. Tanah Laut	70.161.598.000	29.028.015.000	99.189.613.000	175.221.130.000	274.410.743.000	62.057.727.473	27.634.123.286	89.691.850.759	159.043.334.298	248.735.185.057
298	Kab. Tapin	41.779.757.000	32.997.348.000	74.777.105.000	99.412.108.000	174.189.213.000	40.509.315.140	32.065.800.515	72.575.115.655	89.252.509.435	161.827.625.090
299	Kota Banjarbaru	23.564.172.000	-	23.564.172.000	106.293.592.000	129.857.764.000	21.660.127.795	-	21.660.127.795	96.518.472.398	118.178.600.193
300	Kota Banjarmasin	33.216.770.000	11.943.127.000	45.159.897.000	213.907.819.000	259.067.716.000	28.035.317.760	11.053.104.300	39.088.422.060	197.090.606.438	236.179.028.498
301	Kab. Balangan	57.597.485.000	-	57.597.485.000	86.861.934.000	144.459.419.000	52.704.154.259	-	52.704.154.259	76.304.128.122	129.008.282.381
302	Kab. Tanah Bumbu	75.056.133.000	35.442.757.000	110.498.890.000	138.708.221.000	249.207.111.000	69.887.677.325	32.501.064.197	102.388.741.522	131.379.637.077	233.768.378.599
303	Provinsi Kalimantan Timur	213.569.786.000	41.975.618.000	255.545.404.000	477.087.001.000	732.632.405.000	199.584.604.159	33.622.347.795	233.206.951.954	441.706.518.078	674.913.470.032
304	Kab. Berau	44.647.659.000	8.907.144.000	53.554.803.000	132.637.472.000	186.192.275.000	40.816.368.584	8.031.441.650	48.847.810.234	106.866.527.004	155.714.337.238
305	Kab. Kutai Kartanegara	101.765.890.000	40.867.562.000	142.633.452.000	388.960.605.000	531.594.057.000	97.602.707.583	38.525.419.355	136.128.126.938	346.840.513.462	482.968.640.400
306	Kab. Kutai Barat	34.715.904.000	-	34.715.904.000	108.582.457.000	143.298.361.000	30.853.973.762	-	30.853.973.762	71.468.009.337	102.321.983.099
307	Kab. Kutai Timur	152.548.583.000	-	152.548.583.000	185.650.790.000	338.199.373.000	133.609.470.896	-	133.609.470.896	172.232.102.462	305.841.573.358
308	Kab. Paser	101.765.658.000	-	101.765.658.000	134.070.734.000	235.836.392.000	97.551.276.075	-	97.551.276.075	125.280.052.608	222.831.328.683
309	Kota Balikpapan	56.359.102.000	12.292.054.000	68.651.156.000	209.364.249.000	278.015.405.000	45.725.976.660	10.907.453.447	56.633.430.107	185.954.886.904	242.588.317.011
310	Kota Bontang	21.732.234.000	-	21.732.234.000	66.676.727.000	88.408.961.000	18.939.771.631	-	18.939.771.631	59.951.619.203	78.891.390.834

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									Jumlah Realisasi
		Pagu				Realisasi					
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik	DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	
Reguler	Penugasan						DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
311	Kota Samarinda	47.673.788.000	-	47.673.788.000	277.005.264.000	324.679.052.000	45.606.852.356	-	45.606.852.356	254.453.514.245	300.060.366.601
312	Kab. Penajam Paser Utara	41.119.905.000	-	41.119.905.000	90.254.308.000	131.374.213.000	34.399.833.646	-	34.399.833.646	81.473.510.108	115.873.343.754
313	Kab. Mahakam Ulu	43.610.719.000	-	43.610.719.000	26.467.952.000	70.078.671.000	32.365.942.484	-	32.365.942.484	19.432.191.466	51.798.133.950
314	Provinsi Sulawesi Utara	278.388.193.000	67.510.678.000	345.898.871.000	416.268.513.000	762.167.384.000	241.550.251.550	61.676.197.464	303.226.449.014	381.829.189.608	685.055.638.622
315	Kab. Bolaang Mongondow	102.654.898.000	10.834.974.000	113.489.872.000	105.645.121.000	219.134.993.000	92.390.705.724	9.970.420.250	102.361.125.974	97.754.586.477	200.115.712.451
316	Kab. Minahasa	76.739.162.000	18.159.301.000	94.898.463.000	170.657.700.000	265.556.163.000	74.279.625.274	17.388.288.029	91.667.913.303	156.617.012.522	248.284.925.825
317	Kab. Sangihe	93.937.848.000	15.589.535.000	109.527.383.000	94.097.757.000	203.625.140.000	81.517.492.947	14.471.886.970	95.989.379.917	84.819.059.604	180.808.439.521
318	Kota Bitung	39.458.934.000	40.446.416.000	79.905.350.000	79.811.051.000	159.716.401.000	36.857.658.230	26.249.873.000	63.107.531.230	69.757.262.855	132.864.794.085
319	Kota Manado	53.782.127.000	92.905.821.000	146.687.948.000	163.135.798.000	309.823.746.000	44.542.772.204	91.540.997.563	136.083.769.767	147.202.667.126	283.286.436.893
320	Kab. Kepulauan Talaud	165.438.893.000	17.115.305.000	182.554.198.000	84.927.208.000	267.481.406.000	159.409.597.995	15.548.688.143	174.958.286.138	67.412.345.423	242.370.631.561
321	Kab. Minahasa Selatan	59.661.246.000	-	59.661.246.000	118.997.535.000	178.658.781.000	54.490.343.302	-	54.490.343.302	110.014.130.290	164.504.473.592
322	Kota Tomohon	32.198.516.000	-	32.198.516.000	53.904.751.000	86.103.267.000	26.034.847.959	-	26.034.847.959	49.696.708.267	75.731.556.226
323	Kab. Minahasa Utara	114.378.163.000	30.342.480.000	144.720.643.000	102.879.033.000	247.599.676.000	107.290.110.175	22.155.638.980	129.445.749.155	96.344.420.202	225.790.169.357
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	21.598.154.000	9.724.219.000	31.322.373.000	47.248.844.000	78.571.217.000	20.277.135.049	9.614.831.779	29.891.966.828	41.726.632.641	71.618.599.469
325	Kota Kotamobagu	54.291.947.000	-	54.291.947.000	50.786.209.000	105.078.156.000	52.641.101.389	-	52.641.101.389	46.135.072.833	98.776.174.222
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	138.000.090.000	-	138.000.090.000	50.702.028.000	188.702.118.000	134.705.440.990	-	134.705.440.990	46.550.551.390	181.255.992.380
327	Kab. Minahasa Tenggara	50.250.928.000	22.633.197.000	72.884.125.000	67.691.991.000	140.576.116.000	45.112.110.282	20.380.262.908	65.492.373.190	61.834.985.574	127.327.358.764
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	113.514.369.000	-	113.514.369.000	40.890.857.000	154.405.226.000	37.682.369.087	-	37.682.369.087	38.306.967.604	75.989.336.691
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	38.151.940.000	-	38.151.940.000	41.928.224.000	80.080.164.000	36.586.891.653	-	36.586.891.653	39.331.594.394	75.918.486.047
330	Provinsi Sulawesi Tengah	357.425.264.000	61.048.483.000	418.473.747.000	415.127.690.000	833.601.437.000	336.757.074.699	57.514.328.637	394.271.403.336	378.123.442.461	772.394.845.797
331	Kab. Banggai	103.994.498.000	18.893.840.000	122.888.338.000	205.238.723.000	328.127.061.000	69.367.754.738	18.643.128.650	88.010.883.388	185.497.651.583	273.508.534.971
332	Kab. Banggai Kepulauan	43.422.917.000	3.002.207.000	46.425.124.000	93.066.350.000	139.491.474.000	36.599.295.701	2.062.723.000	38.662.018.701	86.834.110.134	125.496.128.835
333	Kab. Buol	68.596.217.000	-	68.596.217.000	79.879.732.000	148.475.949.000	64.936.525.610	-	64.936.525.610	73.098.375.935	138.034.901.545
334	Kab. Tolitoli	58.247.755.000	-	58.247.755.000	101.108.922.000	159.356.677.000	57.341.908.622	-	57.341.908.622	93.707.754.945	151.049.663.567
335	Kab. Donggala	133.152.146.000	32.950.231.000	166.102.377.000	167.941.306.000	334.043.683.000	91.160.356.751	31.194.479.789	122.354.836.540	156.039.215.092	278.394.051.632
336	Kab. Morowali	93.314.997.000	31.150.672.000	124.465.669.000	90.849.347.000	184.164.344.000	60.148.237.700	29.994.013.657	90.142.251.357	85.243.201.487	175.385.452.844
337	Kab. Poso	132.087.247.000	-	132.087.247.000	138.458.573.000	270.545.820.000	121.969.951.251	-	121.969.951.251	120.199.761.590	242.169.712.841
338	Kota Palu	87.953.782.000	-	87.953.782.000	163.848.538.000	251.802.320.000	84.115.008.803	-	84.115.008.803	151.127.388.604	235.242.397.407
339	Kab. Parigi Moutong	200.439.662.000	38.511.351.000	238.951.013.000	222.296.594.000	461.247.607.000	151.477.496.228	33.018.876.104	184.496.372.332	198.058.193.881	382.554.566.213
340	Kab. Tojo Una Una	123.754.585.000	-	123.754.585.000	100.501.929.000	224.256.514.000	118.507.522.025	-	118.507.522.025	95.427.767.521	213.935.289.546
341	Kab. Sigi	138.434.497.000	-	138.434.497.000	147.733.538.000	286.168.035.000	127.000.737.389	-	127.000.737.389	137.135.084.397	264.135.821.786
342	Kab. Banggai Laut	37.400.973.000	10.219.703.000	47.620.676.000	43.456.114.000	91.076.790.000	32.289.220.846	7.178.303.200	39.467.524.046	40.616.007.776	80.083.531.822
343	Kab. Morowali Utara	96.199.244.000	31.191.053.000	127.390.297.000	82.432.936.000	209.823.233.000	93.298.888.332	28.225.104.449	121.523.992.781	75.556.714.558	197.080.707.339
344	Provinsi Sulawesi Selatan	254.203.960.000	67.789.608.000	321.993.568.000	1.198.433.427.000	1.520.426.995.000	220.582.587.692	57.079.612.943	277.662.200.635	1.112.923.271.527	1.390.585.472.162
345	Kab. Bantaeng	88.045.514.000	33.818.824.000	121.864.338.000	119.558.130.000	241.422.468.000	84.816.489.865	32.700.443.934	117.516.933.799	114.395.715.067	231.912.648.866
346	Kab. Barru	61.172.036.000	9.926.097.000	71.098.133.000	125.244.300.000	196.342.433.000	54.344.571.102	9.131.335.407	63.475.906.509	115.546.824.111	179.022.730.620
347	Kab. Bone	116.314.302.000	50.115.818.000	166.430.120.000	377.150.438.000	543.580.558.000	101.784.344.189	43.064.915.304	144.849.259.493	342.976.660.303	487.825.919.796
348	Kab. Bulukumba	102.189.836.000	37.494.006.000	139.683.842.000	208.682.003.000	348.365.845.000	93.533.864.628	35.605.862.883	129.139.727.511	191.347.069.217	320.486.796.728
349	Kab. Enrekang	78.486.978.000	-	78.486.978.000	139.730.385.000	218.217.363.000	76.679.861.830	-	76.679.861.830	133.496.884.411	210.176.746.241
350	Kab. Gowa	119.426.594.000	43.612.132.000	163.038.726.000	283.642.227.000	446.680.953.000	114.871.021.533	41.804.462.779	156.675.484.312	263.217.419.121	419.892.903.433
351	Kab. Jeneponto	75.823.355.000	33.348.228.000	109.171.583.000	174.828.443.000	284.000.026.000	73.374.833.478	31.039.337.432	104.414.170.910	163.772.017.114	268.186.188.024
352	Kab. Luwu	110.651.980.000	48.340.554.000	158.992.534.000	186.192.602.000	345.185.136.000	107.515.968.781	47.346.304.700	154.862.273.481	182.011.822.144	336.874.095.625
353	Kab. Luwu Utara	92.323.997.000	36.837.813.000	129.161.810.000	148.320.000.000	277.481.810.000	88.126.243.998	33.936.584.440	122.062.828.438	142.227.693.123	264.290.521.561
354	Kab. Maros	93.053.489.000	57.405.068.000	150.458.557.000	196.677.950.000	347.136.507.000	84.205.897.336	53.154.201.167	137.357.898.503	184.158.267.581	321.516.166.084
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	118.996.215.000	18.755.579.000	137.751.794.000	202.005.551.000	339.757.345.000	114.092.285.421	18.347.399.164	132.439.684.585	184.853.896.906	317.293.581.491
356	Kota Palopo	116.623.700.000	26.035.592.000	139.659.292.000	87.852.134.000	227.511.426.000	111.555.322.041	25.548.786.839	137.104.108.880	81.460.695.260	218.564.804.140
357	Kab. Luwu Timur	66.005.356.000	31.471.045.000	97.476.401.000	125.029.356.000	222.505.757.000	62.742.716.783	28.763.728.135	91.506.444.918	119.973.253.670	211.479.698.588
358	Kab. Pinrang	143.909.445.000	30.940.930.000	174.850.375.000	195.115.386.000	369.965.761.000	137.365.706.551	30.307.151.076	167.672.857.627	179.998.520.379	347.671.378.006
359	Kab. Sinjai	107.130.584.000	55.265.441.000	162.396.025.000	149.943.907.000	312.339.932.000	104.389.819.235	54.885.237.184	159.275.056.419	139.894.333.034	299.169.389.453
360	Kab. Kepulauan Selayar	137.737.338.000	25.299.357.000	163.036.695.000	112.002.490.000	275.039.185.000	118.919.605.065	24.511.028.873	143.430.633.938	109.105.884.797	252.536.518.735
361	Kab. Sidenreng Rappang	105.906.068.000	33.612.528.000	139.518.596.000	155.273.520.000	294.792.116.000	101.361.509.531	25.970.701.500	127.		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									Jumlah Realisasi
		Pagu					Realisasi				
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik	DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	
Reguler	Penugasan						DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
363	Kab. Takalar	106.250.122.000	16.986.051.000	123.236.173.000	161.931.084.000	285.167.257.000	101.907.709.188	16.765.535.416	118.673.244.604	150.254.490.605	268.927.735.209
364	Kab. Tana Toraja	82.628.070.000	39.562.141.000	122.190.211.000	162.763.248.000	284.953.459.000	76.489.417.506	31.129.847.419	107.619.264.925	151.063.494.360	258.682.759.285
365	Kab. Wajo	143.967.240.000	29.733.378.000	173.700.618.000	203.161.833.000	376.862.451.000	136.494.506.420	28.372.149.571	164.866.655.991	194.693.947.639	359.560.603.630
366	Kota Parepare	92.289.039.000	-	92.289.039.000	79.264.563.000	171.553.602.000	82.993.049.300	-	82.993.049.300	70.785.264.023	153.778.313.323
367	Kota Makassar	41.743.898.000	5.284.780.000	47.028.678.000	441.886.097.000	488.914.775.000	33.391.854.216	-	33.391.854.216	405.672.188.337	439.064.042.553
368	Kab. Toraja Utara	64.509.448.000	15.703.644.000	80.213.092.000	164.722.693.000	244.935.785.000	62.527.699.364	12.087.551.650	74.615.251.014	156.800.437.310	231.415.688.324
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	233.055.635.000	62.428.571.000	295.484.206.000	489.386.180.000	784.870.386.000	219.976.412.716	61.037.959.943	281.014.372.659	477.455.959.852	758.470.332.511
370	Kab. Buton	57.561.780.000	21.604.337.000	79.166.117.000	86.573.699.000	165.739.816.000	53.718.816.707	19.144.853.646	72.863.670.353	79.063.792.378	151.927.462.731
371	Kab. Konawe	87.345.736.000	31.703.807.000	119.049.543.000	170.069.659.000	289.119.202.000	78.305.038.233	29.045.787.014	107.350.825.247	161.148.210.773	268.499.036.020
372	Kab. Kolaka	61.402.386.000	28.691.794.000	90.094.180.000	116.486.276.000	206.580.456.000	56.714.292.124	25.760.939.504	82.475.231.628	109.464.225.843	191.939.457.471
373	Kab. Muna	95.052.154.000	32.056.217.000	127.108.371.000	187.955.830.000	315.064.201.000	90.872.836.789	31.833.827.960	122.706.664.749	179.630.154.420	302.336.819.169
374	Kota Kendari	68.224.924.000	41.409.463.000	109.634.387.000	163.992.460.000	273.626.847.000	65.605.480.626	40.015.130.192	105.620.610.818	151.402.123.250	257.022.734.068
375	Kota Bau-bau	43.786.769.000	-	43.786.769.000	95.782.262.000	139.569.031.000	41.415.844.314	-	41.415.844.314	86.614.817.861	128.030.662.175
376	Kab. Konawe Selatan	71.295.483.000	-	71.295.483.000	185.430.386.000	256.725.869.000	68.720.634.794	-	68.720.634.794	170.868.749.649	239.589.384.443
377	Kab. Bombana	77.815.958.000	-	77.815.958.000	111.130.087.000	188.946.045.000	71.029.390.368	-	71.029.390.368	105.703.930.827	176.733.321.195
378	Kab. Wakatobi	88.267.833.000	43.923.034.000	132.190.867.000	92.986.390.000	225.177.257.000	81.089.970.380	42.854.620.422	123.944.590.802	90.142.172.237	214.086.763.039
379	Kab. Kolaka Utara	59.377.363.000	13.862.937.000	73.240.300.000	82.005.045.000	155.245.345.000	51.697.716.294	13.555.471.010	65.253.187.304	78.952.520.590	144.205.707.894
380	Kab. Konawe Utara	48.113.322.000	18.922.130.000	67.035.452.000	63.512.385.000	130.547.837.000	47.018.851.595	18.777.279.200	65.796.130.795	62.841.926.488	128.638.057.283
381	Kab. Buton Utara	48.007.629.000	20.735.041.000	68.742.670.000	62.200.446.000	130.943.116.000	46.679.815.195	19.606.546.538	66.286.361.733	60.228.216.373	126.514.578.106
382	Kab. Konawe Kepulauan	66.561.809.000	-	66.561.809.000	26.731.716.000	93.293.525.000	64.572.680.390	-	64.572.680.390	26.514.653.682	91.087.334.072
383	Kab. Kolaka Timur	54.683.131.000	-	54.683.131.000	74.603.918.000	129.287.049.000	47.570.589.788	-	47.570.589.788	72.246.270.108	119.816.859.896
384	Kab. Muna Barat	69.544.502.000	-	69.544.502.000	73.606.519.000	143.151.021.000	65.369.726.626	-	65.369.726.626	72.764.621.268	138.134.347.894
385	Kab. Buton Tengah	63.078.107.000	18.473.206.000	81.551.313.000	70.685.000.000	152.236.313.000	56.138.331.080	17.514.119.038	73.652.450.118	69.961.121.500	143.613.571.618
386	Kab. Buton Selatan	41.821.547.000	11.641.870.000	53.463.417.000	57.980.329.000	111.443.746.000	35.330.825.976	11.381.985.100	46.712.811.076	55.427.759.049	102.140.570.125
387	Provinsi Bali	50.304.265.000	32.628.997.000	82.933.262.000	581.163.226.000	664.096.488.000	44.014.366.985	23.870.312.750	67.884.679.735	545.745.562.670	613.630.242.405
388	Kab. Badung	19.648.727.000	11.340.973.000	30.989.700.000	222.745.412.000	253.735.112.000	14.138.182.306	8.302.166.697	22.440.349.003	200.459.809.343	222.900.158.346
389	Kab. Bangli	111.442.549.000	-	111.442.549.000	108.832.128.000	220.274.677.000	99.489.151.070	-	99.489.151.070	102.791.916.153	202.281.067.223
390	Kab. Buleleng	68.380.245.000	27.168.987.000	95.549.232.000	312.874.658.000	408.423.890.000	62.529.182.366	20.639.725.046	83.168.907.412	289.484.393.116	372.653.300.528
391	Kab. Gianyar	54.105.637.000	99.920.903.000	154.026.540.000	190.645.070.000	344.671.610.000	46.304.423.578	91.796.798.370	138.101.221.948	183.765.466.876	321.866.688.824
392	Kab. Jembrana	68.512.926.000	39.254.610.000	107.767.536.000	110.928.406.000	218.695.942.000	53.427.918.198	33.195.777.646	86.623.695.844	103.691.867.142	190.315.562.986
393	Kab. Karangasem	42.662.081.000	20.223.206.000	62.885.287.000	227.349.635.000	290.234.922.000	31.251.132.805	11.713.919.484	42.965.052.289	213.383.107.836	256.348.160.125
394	Kab. Klungkung	42.617.427.000	21.658.838.000	64.276.265.000	109.084.089.000	173.360.354.000	37.652.857.463	18.714.378.269	56.367.235.732	101.806.584.112	158.173.819.844
395	Kab. Tabanan	59.149.062.000	44.581.850.000	103.730.912.000	202.204.300.000	305.935.212.000	47.786.371.702	17.349.573.185	65.135.944.887	182.288.391.035	247.424.335.922
396	Kota Denpasar	40.913.582.000	-	40.913.582.000	227.367.449.000	268.281.031.000	28.952.184.252	-	28.952.184.252	209.372.972.534	238.325.156.786
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	334.798.594.000	153.839.239.000	488.637.833.000	592.228.819.000	1.080.866.652.000	300.765.057.065	141.439.255.777	442.204.312.842	567.973.131.634	1.010.177.444.476
398	Kab. Bima	151.200.276.000	76.740.303.000	227.940.579.000	244.468.251.000	472.408.830.000	145.986.929.226	74.054.169.870	220.041.099.096	234.243.743.085	454.284.842.181
399	Kab. Dompu	114.123.634.000	80.782.421.000	194.906.055.000	120.431.676.000	315.337.731.000	112.860.438.011	80.363.859.843	193.224.297.854	111.650.546.958	304.874.844.812
400	Kab. Lombok Barat	127.323.160.000	61.699.800.000	189.022.960.000	249.841.923.000	438.864.883.000	117.462.764.760	54.715.297.602	172.178.062.362	235.065.605.188	407.243.867.550
401	Kab. Lombok Tengah	129.698.948.000	100.992.517.000	230.691.465.000	346.835.269.000	577.526.734.000	126.426.948.443	95.637.622.514	222.064.570.957	328.346.805.107	550.411.376.064
402	Kab. Lombok Timur	248.250.177.000	91.453.346.000	339.703.523.000	478.126.453.000	817.829.976.000	234.523.346.975	90.688.314.143	325.211.661.118	455.204.458.115	780.416.119.233
403	Kab. Sumbawa	176.231.818.000	82.123.864.000	258.355.682.000	238.378.237.000	496.733.919.000	96.271.783.056	77.100.431.808	173.372.214.864	220.512.765.232	393.884.980.096
404	Kota Mataram	36.226.800.000	4.887.544.000	41.114.344.000	152.034.990.000	193.149.334.000	32.724.754.089	4.433.901.000	37.158.655.089	140.032.415.345	177.191.070.434
405	Kota Bima	92.298.823.000	-	92.298.823.000	75.932.028.000	168.230.851.000	89.773.006.178	-	89.773.006.178	70.657.241.245	160.430.247.423
406	Kab. Sumbawa Barat	50.646.884.000	53.992.787.000	104.639.671.000	81.421.215.000	186.060.886.000	48.050.848.607	52.271.897.621	100.322.746.228	75.971.698.107	176.294.444.335
407	Kab. Lombok Utara	61.225.187.000	42.378.455.000	103.603.642.000	84.365.977.000	187.969.619.000	59.890.037.339	41.440.830.452	101.330.867.791	81.032.624.478	182.363.492.269
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	347.930.051.000	185.353.823.000	533.283.874.000	805.241.368.000	1.338.525.242.000	309.776.567.288	177.751.483.218	487.528.050.506	756.936.420.130	1.244.464.470.636
409	Kab. Alor	96.553.689.000	33.049.542.000	129.603.231.000	127.899.872.000	257.503.103.000	85.374.880.896	31.768.671.571	117.143.552.467	120.557.815.827	237.701.368.294
410	Kab. Belu	76.957.702.000	47.262.844.000	124.220.546.000	120.779.918.000	245.000.464.000	68.031.767.557	34.933.296.144	102.965.063.701	113.411.167.305	216.376.231.006
411	Kab. Ende	155.633.298.000	34.334.673.000	189.967.971.000	150.785.633.000	340.753.604.000	93.370.293.116	33.094.241.500	126.464.534.616	143.295.956.654	269.760.491.270
412	Kab. Flores Timur	113.177.802.000	27.838.738.000	141.016.540.000	135.095.493.000	276.112.033.000	94.473.367.931	26.668.736.221			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	Jumlah Realisasi
Reguler	Penugasan	DAK Fisik	Reguler	Penugasan			DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
415	Kab. Manggarai	125.120.544.000	6.439.488.000	131.560.032.000	183.851.266.000	315.411.298.000	114.020.344.248	4.632.045.069	118.652.389.317	176.699.859.022	295.352.248.339
416	Kab. Ngada	75.308.366.000	-	75.308.366.000	91.552.937.000	166.861.303.000	69.129.305.650	-	69.129.305.650	85.918.660.024	155.047.965.674
417	Kab. Sikka	90.659.110.000	8.545.921.000	99.205.031.000	166.384.889.000	265.589.920.000	79.823.362.072	8.270.621.451	88.093.983.523	164.025.028.462	252.119.011.985
418	Kab. Sumba Barat	53.099.859.000	44.524.406.000	97.624.265.000	65.509.376.000	163.133.641.000	51.242.925.883	43.309.016.866	94.551.942.749	50.725.363.197	145.277.305.946
419	Kab. Sumba Timur	105.074.189.000	93.468.129.000	198.542.318.000	128.913.499.000	327.455.817.000	99.230.942.250	91.979.954.980	191.210.897.230	123.484.975.953	314.695.873.183
420	Kab. Timor Tengah Selatan	189.321.174.000	48.624.758.000	237.945.932.000	126.689.381.000	454.635.313.000	132.418.931.876	44.729.377.100	177.148.308.976	190.622.036.907	367.770.345.883
421	Kab. Timor Tengah Utara	177.007.018.000	45.070.124.000	222.077.142.000	149.591.361.000	371.668.503.000	113.412.082.959	42.218.382.865	155.630.465.824	135.689.049.607	291.319.515.431
422	Kota Kupang	49.201.099.000	9.292.887.000	58.493.986.000	148.618.968.000	207.112.954.000	46.459.130.549	7.361.117.719	53.820.248.268	135.828.419.837	189.648.668.105
423	Kab. Rote Ndao	93.117.504.000	55.919.030.000	149.036.534.000	102.396.326.000	251.432.860.000	82.864.717.336	55.369.359.509	138.234.076.845	90.009.385.692	228.243.462.537
424	Kab. Manggarai Barat	193.926.536.000	70.332.348.000	264.258.884.000	128.113.447.000	392.372.331.000	188.932.844.523	69.041.185.946	257.974.030.469	125.878.422.623	383.852.453.092
425	Kab. Nagekeo	44.407.926.000	33.561.020.000	77.968.946.000	87.193.204.000	165.162.150.000	36.745.081.838	30.065.090.900	66.810.172.738	81.012.960.309	147.823.133.047
426	Kab. Sumba Barat Daya	83.575.884.000	73.587.071.000	157.162.955.000	160.760.267.000	317.923.222.000	77.353.304.544	72.589.303.306	149.942.607.850	147.047.493.208	296.990.101.058
427	Kab. Sumba Tengah	74.073.393.000	69.961.480.000	144.034.873.000	47.233.578.000	191.268.451.000	67.110.547.149	66.550.084.843	133.660.631.992	45.576.031.000	179.236.662.992
428	Kab. Manggarai Timur	115.583.333.000	59.354.759.000	174.938.092.000	183.237.246.000	358.175.338.000	104.789.377.099	57.352.232.087	162.141.609.186	178.210.304.002	340.351.913.188
429	Kab. Sabu Raijua	36.485.263.000	41.282.644.000	77.767.907.000	53.517.840.000	131.285.747.000	29.452.038.150	38.339.006.925	67.791.045.075	51.875.404.176	119.666.449.251
430	Kab. Malaka	68.415.005.000	33.810.105.000	102.225.110.000	98.849.093.000	201.074.203.000	58.317.103.202	30.353.851.372	88.670.954.574	94.213.262.413	182.884.216.987
431	Provinsi Maluku	241.336.389.000	92.512.762.000	333.849.151.000	345.172.291.000	679.021.442.000	227.024.596.609	86.398.387.278	313.422.983.887	321.006.787.059	634.429.770.946
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	58.227.858.000	78.215.124.000	136.442.982.000	86.724.974.000	223.167.956.000	52.381.899.594	61.961.169.751	114.343.069.345	80.125.779.514	194.468.848.859
433	Kab. Maluku Tengah	92.961.831.000	59.611.861.000	152.573.692.000	218.973.671.000	371.547.363.000	88.648.544.608	58.913.536.284	147.562.080.892	198.089.079.796	345.651.160.688
434	Kab. Maluku Tenggara	85.235.379.000	73.503.440.000	158.738.819.000	81.376.250.000	240.115.069.000	84.201.370.379	73.329.765.902	157.531.136.281	78.665.139.511	236.196.275.792
435	Kab. Buru	135.074.556.000	37.582.282.000	172.656.838.000	102.082.414.000	274.739.252.000	88.316.851.094	36.059.654.100	124.376.505.194	94.168.803.521	218.545.308.715
436	Kota Ambon	64.404.652.000	5.044.224.000	69.448.876.000	153.914.610.000	223.363.486.000	61.869.143.242	1.261.056.000	63.130.199.242	138.741.922.704	201.872.121.946
437	Kab. Seram Bagian Barat	64.775.027.000	27.532.809.000	92.307.836.000	121.821.537.000	214.129.373.000	57.469.978.123	22.676.129.752	80.146.107.875	106.657.575.833	186.803.683.708
438	Kab. Seram Bagian Timur	80.310.410.000	42.431.440.000	122.741.850.000	105.207.336.000	227.949.186.000	75.996.336.219	41.989.256.510	117.985.592.729	100.148.950.670	218.134.543.399
439	Kab. Kepulauan Aru	76.202.237.000	67.758.348.000	143.960.585.000	95.469.411.000	239.429.996.000	45.662.705.336	57.243.274.022	102.905.979.358	91.096.729.616	194.002.708.974
440	Kota Tual	94.916.425.000	18.087.132.000	113.003.557.000	41.977.723.000	154.981.280.000	93.058.242.040	17.844.332.000	110.902.574.040	40.903.356.280	151.805.930.320
441	Kab. Maluku Barat Daya	69.467.595.000	80.106.650.000	149.574.245.000	72.975.195.000	222.549.440.000	62.266.529.388	58.960.622.700	121.227.152.088	69.452.999.900	190.680.151.988
442	Kab. Buru Selatan	44.226.276.000	24.404.530.000	68.630.806.000	56.952.842.000	125.583.648.000	39.083.063.700	22.262.945.244	61.346.008.944	55.408.814.762	116.754.823.706
443	Provinsi Papua	291.964.295.000	125.924.676.000	417.888.971.000	423.167.540.000	841.056.511.000	253.541.999.921	113.292.632.200	366.834.632.121	385.026.543.519	751.861.175.640
444	Kab. Biak Numfor	130.295.500.000	138.668.227.000	268.963.727.000	112.570.073.000	381.533.800.000	111.695.155.352	126.185.984.410	237.881.139.762	106.967.307.857	344.848.447.619
445	Kab. Jayapura	68.667.992.000	57.911.291.000	126.579.283.000	113.980.246.000	240.559.529.000	65.713.427.698	53.151.808.325	118.865.236.023	105.131.245.492	223.996.481.515
446	Kab. Jayawijaya	179.661.257.000	12.413.949.000	192.075.206.000	101.269.648.000	293.344.854.000	177.327.117.785	12.359.319.967	189.686.437.752	93.465.349.515	283.151.787.267
447	Kab. Merauke	135.468.087.000	82.812.190.000	218.280.277.000	164.520.378.000	382.800.655.000	107.149.473.585	78.078.258.558	185.227.732.143	150.750.732.563	335.978.464.706
448	Kab. Mimika	120.614.335.000	42.960.278.000	163.574.613.000	116.217.485.000	279.792.098.000	111.724.629.292	40.185.952.790	151.910.582.082	111.083.684.599	262.994.266.681
449	Kab. Nabire	61.663.861.000	19.921.007.000	81.584.868.000	122.852.765.000	204.437.633.000	58.051.933.123	18.424.076.805	76.476.009.928	110.573.114.281	187.049.124.209
450	Kab. Paniai	67.648.497.000	36.822.605.000	104.471.102.000	95.832.616.000	200.303.718.000	67.259.498.269	35.590.206.119	102.849.704.388	87.281.997.411	190.131.701.799
451	Kab. Puncak Jaya	70.086.982.000	11.137.014.000	81.223.996.000	39.744.506.000	120.968.502.000	65.667.066.751	10.689.825.661	76.356.892.412	34.281.463.004	110.638.355.416
452	Kab. Kepulauan Yapen	126.847.679.000	47.625.924.000	174.473.603.000	77.695.922.000	252.169.525.000	123.391.396.876	41.336.568.500	164.727.965.376	68.962.595.727	233.690.561.103
453	Kota Jayapura	83.954.457.000	27.245.453.000	111.199.910.000	110.184.821.000	221.384.731.000	59.801.136.658	26.739.205.330	86.540.341.988	103.213.047.887	189.753.389.875
454	Kab. Sarmi	35.316.118.000	27.330.333.000	62.646.451.000	49.108.396.000	111.754.847.000	34.870.250.157	27.168.333.000	62.038.583.157	45.717.408.645	107.755.991.802
455	Kab. Keerom	48.049.108.000	30.870.640.000	78.919.748.000	57.512.812.000	136.432.560.000	43.046.388.395	29.511.787.250	72.558.175.645	46.931.343.315	119.489.518.960
456	Kab. Yahukimo	56.510.497.000	26.153.446.000	82.663.943.000	161.996.796.000	244.660.739.000	55.542.992.116	26.126.428.000	81.669.420.116	140.050.918.106	221.720.338.222
457	Kab. Pegunungan Bintang	85.235.314.000	13.728.892.000	98.964.206.000	78.528.285.000	177.492.491.000	82.307.895.115	13.350.656.133	95.658.551.248	74.679.072.400	170.337.623.648
458	Kab. Tolikara	104.190.773.000	25.921.899.000	130.112.672.000	76.990.908.000	207.103.580.000	98.145.256.374	25.517.755.915	123.663.012.289	72.708.963.986	196.371.976.275
459	Kab. Boven Digoel	40.862.463.000	29.973.805.000	70.836.268.000	58.522.707.000	129.358.975.000	36.309.401.424	25.540.966.438	61.850.367.862	54.316.630.934	116.166.998.796
460	Kab. Mappi	147.512.507.000	50.574.672.000	198.087.179.000	89.134.954.000	287.222.133.000	130.421.244.622	48.513.158.376	178.934.402.998	81.840.484.600	260.774.887.598
461	Kab. Asmat	98.233.188.000	52.693.600.000	150.926.788.000	100.763.298.000	251.690.086.000	84.342.286.656	50.837.743.618	135.180.030.274	94.507.348.158	229.687.378.432
462	Kab. Waropen	49.849.101.000	12.814.399.000	62.663.500.000	38.778.5						

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									Jumlah Realisasi
		Pagu					Realisasi				
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	
Reguler	Penugasan	DAK Fisik	Reguler	Penugasan			DAK Fisik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
467	Kab. Lanny Jaya	214.346.439.000	23.055.119.000	237.401.558.000	69.889.001.000	307.290.559.000	206.979.856.496	22.785.795.550	229.765.652.046	65.882.028.000	295.647.680.046
468	Kab. Nduga	135.152.631.000	26.864.008.000	162.016.639.000	27.006.389.000	189.023.028.000	134.570.153.441	26.444.225.233	161.014.378.674	25.434.131.700	186.448.510.374
469	Kab. Dogiyai	53.471.002.000	23.552.537.000	77.023.539.000	62.849.360.000	139.872.899.000	46.026.069.912	9.274.897.407	55.300.967.319	59.121.759.028	114.422.726.347
470	Kab. Puncak	206.046.680.000	21.474.652.000	227.521.332.000	27.738.405.000	255.259.737.000	141.465.687.779	16.528.334.550	157.994.022.329	20.296.437.020	178.290.459.349
471	Kab. Intan Jaya	49.932.470.000	27.031.577.000	76.964.047.000	23.049.638.000	100.013.685.000	38.003.299.450	26.776.484.694	64.779.784.144	19.969.370.500	84.749.154.644
472	Kab. Deiyai	120.788.668.000	25.070.595.000	145.859.263.000	49.274.842.000	195.134.105.000	73.532.018.779	24.898.182.771	98.430.201.550	47.951.407.825	146.381.609.375
473	Provinsi Maluku Utara	279.165.273.000	99.383.610.000	378.548.883.000	225.474.129.000	604.023.012.000	265.313.953.329	98.175.836.800	363.489.790.129	208.685.677.778	572.175.467.907
474	Kab. Halmahera Tengah	59.361.775.000	44.554.891.000	103.916.666.000	52.409.225.000	156.325.891.000	58.907.817.440	43.142.530.802	102.050.348.242	48.893.109.315	150.943.457.557
475	Kota Ternate	46.937.431.000	25.404.208.000	72.341.639.000	98.009.036.000	170.350.675.000	44.290.213.973	24.181.765.579	68.471.979.552	90.847.678.424	159.319.657.976
476	Kab. Halmahera Barat	55.517.856.000	23.734.586.000	79.252.442.000	91.687.881.000	170.940.323.000	54.158.790.091	23.257.427.090	77.416.217.181	86.685.447.708	164.101.664.889
477	Kab. Halmahera Timur	94.182.809.000	87.011.263.000	181.194.072.000	67.680.715.000	248.874.787.000	74.213.949.861	84.497.003.687	158.710.953.548	61.668.823.553	220.379.777.101
478	Kab. Halmahera Selatan	111.976.817.000	100.060.351.000	212.037.168.000	168.795.518.000	380.832.686.000	100.429.251.726	98.588.232.347	198.588.232.347	158.486.675.069	357.074.907.416
479	Kab. Halmahera Utara	105.473.500.000	38.770.727.000	144.244.227.000	97.497.550.000	241.741.777.000	93.495.174.016	37.900.805.200	131.395.979.216	91.666.366.881	223.062.346.097
480	Kab. Kepulauan Sula	73.427.367.000	50.813.193.000	124.240.560.000	65.713.657.000	170.350.675.000	66.482.597.246	47.432.882.931	113.915.480.177	62.198.024.300	176.113.504.477
481	Kota Tidore Kepulauan	89.102.300.000	64.529.927.000	153.632.227.000	64.664.814.000	218.297.041.000	82.694.252.463	64.054.682.900	146.748.935.363	60.026.586.325	206.775.521.688
482	Kab. Pulau Morotai	149.268.189.000	108.082.806.000	257.350.995.000	43.037.875.000	300.388.870.000	149.190.322.218	103.763.913.410	252.954.235.628	41.258.235.363	294.212.470.991
483	Kab. Pulau Taliabu	36.604.627.000	35.466.019.000	72.070.646.000	47.696.129.000	119.766.775.000	36.047.214.746	35.466.019.000	71.513.233.746	45.696.621.600	117.209.855.346
484	Provinsi Banten	152.421.552.000	-	152.421.552.000	994.469.200.000	1.146.890.752.000	136.846.692.613	-	136.846.692.613	956.501.148.732	1.093.347.841.345
485	Kab. Lebak	107.450.398.000	37.472.346.000	144.922.744.000	499.817.360.000	644.740.104.000	102.820.011.056	35.733.023.906	138.553.034.962	434.307.282.721	572.860.317.683
486	Kab. Pandeglang	96.020.121.000	38.576.629.000	134.596.750.000	509.175.939.000	643.772.689.000	89.946.429.234	35.571.755.304	125.518.184.538	442.728.902.927	568.247.087.465
487	Kab. Serang	63.455.480.000	29.003.353.000	92.458.833.000	491.332.549.000	583.791.382.000	58.913.007.416	27.910.035.887	86.823.043.303	450.774.798.314	537.597.841.617
488	Kab. Tangerang	52.571.846.000	2.972.147.000	55.543.993.000	770.269.295.000	825.813.288.000	48.458.694.701	2.572.676.000	51.031.370.701	707.648.847.965	758.680.218.666
489	Kota Cilegon	15.129.347.000	-	15.129.347.000	151.393.831.000	166.523.178.000	11.857.259.035	-	11.857.259.035	139.848.298.102	151.705.557.137
490	Kota Tangerang	5.229.257.000	-	5.229.257.000	458.257.736.000	463.486.993.000	1.658.145.200	-	1.658.145.200	419.245.314.329	420.903.459.529
491	Kota Serang	23.876.917.000	-	23.876.917.000	223.783.204.000	247.660.121.000	21.579.195.660	-	21.579.195.660	208.815.212.082	230.394.407.742
492	Kota Tangerang Selatan	15.134.075.000	-	15.134.075.000	322.989.612.000	338.123.687.000	13.613.661.502	-	13.613.661.502	298.925.734.523	312.539.396.025
493	Provinsi Bangka Belitung	113.698.370.000	29.546.638.000	143.245.008.000	169.086.361.000	312.331.369.000	108.962.729.594	27.852.271.750	136.815.001.344	160.044.104.157	296.859.105.501
494	Kab. Bangka	70.891.792.000	45.371.863.000	116.263.655.000	126.838.228.000	243.101.883.000	68.580.270.420	42.202.104.654	110.782.375.074	118.019.679.064	228.802.054.138
495	Kab. Belitung	51.611.716.000	42.330.582.000	93.942.298.000	89.770.239.000	183.712.537.000	46.768.109.918	38.532.233.128	85.300.343.046	81.976.349.260	167.276.692.306
496	Kota Pangkal Pinang	50.019.294.000	18.145.613.000	68.164.907.000	78.460.308.000	146.625.215.000	48.319.920.397	17.368.847.000	65.688.767.397	67.633.003.263	133.321.770.660
497	Kab. Bangka Selatan	95.261.325.000	20.430.180.000	115.691.505.000	90.649.577.000	206.341.082.000	89.107.177.892	19.664.226.500	108.771.404.392	81.857.992.622	190.629.397.014
498	Kab. Bangka Tengah	62.748.080.000	16.229.577.000	78.977.657.000	87.832.422.000	166.810.079.000	58.401.698.511	15.901.340.644	74.303.039.155	85.107.359.770	159.410.398.925
499	Kab. Bangka Barat	44.550.156.000	-	44.550.156.000	88.552.338.000	133.102.494.000	41.039.861.560	-	41.039.861.560	85.943.900.602	126.983.762.162
500	Kab. Belitung Timur	27.863.335.000	20.453.279.000	48.316.614.000	74.808.554.000	123.125.168.000	25.680.492.220	15.443.471.067	41.123.963.287	69.718.824.648	110.842.787.935
501	Provinsi Gorontalo	108.173.520.000	51.969.521.000	160.143.041.000	177.456.242.000	337.599.283.000	92.125.876.988	44.577.339.534	136.703.216.522	163.941.556.471	300.644.772.993
502	Kab. Boalemo	85.371.509.000	24.221.783.000	109.593.292.000	84.935.287.000	194.528.579.000	77.569.907.562	21.380.962.414	98.950.869.976	77.497.659.884	176.448.529.860
503	Kab. Gorontalo	73.912.491.000	34.939.854.000	108.852.345.000	190.357.341.000	299.209.686.000	64.152.992.909	31.828.592.415	95.981.585.324	164.076.363.392	260.057.948.716
504	Kota Gorontalo	36.737.929.000	3.091.974.000	39.829.903.000	95.238.006.000	135.067.909.000	29.999.505.733	2.550.077.862	32.549.583.595	88.485.982.543	121.035.566.138
505	Kab. Pohuwato	80.238.606.000	29.006.150.000	109.244.756.000	84.838.347.000	194.083.103.000	75.445.288.888	27.490.087.960	102.935.376.848	79.138.677.986	182.074.054.834
506	Kab. Bone Bolango	65.650.866.000	-	65.650.866.000	97.111.486.000	162.762.352.000	59.630.179.872	-	59.630.179.872	92.119.303.361	151.749.483.233
507	Kab. Gorontalo Utara	128.175.504.000	18.838.066.000	147.013.570.000	78.220.949.000	225.234.519.000	116.715.652.977	16.909.984.671	133.625.637.648	74.309.652.802	207.935.290.450
508	Provinsi Kepulauan Riau	145.861.431.000	20.870.100.000	166.731.531.000	264.864.648.000	431.596.179.000	139.954.729.322	19.690.190.500	159.644.919.822	255.551.790.025	415.196.709.847
509	Kab. Natuna	58.601.763.000	4.768.233.000	63.369.996.000	62.653.505.000	126.023.501.000	53.312.811.777	3.777.338.944	57.090.150.721	59.811.497.700	116.901.648.421
510	Kab. Kepulauan Anambas	47.726.192.000	-	47.726.192.000	40.365.117.000	88.091.309.000	45.419.256.929	-	45.419.256.929	34.982.390.713	80.402.187.642
511	Kab. Karimun	45.898.556.000	-	45.898.556.000	119.386.501.000	165.285.057.000	42.598.105.600	-	42.598.105.600	115.170.859.048	157.768.964.648
512	Kota Batam	48.788.351.000	14.982.683.000	63.771.034.000	361.664.321.000	425.435.355.000	41.860.652.241	14.014.695.052	55.875.347.293	331.223.792.620	387.099.139.913
513	Kota Tanjung Pinang	31.527.357.000	16.525.622.000	48.052.979.000	87.432.886.000	135.485.865.000	26.863.382.849	15.142.774.894	42.006.157.743	80.860.053.789	122.866.211.532
514	Kab. Lingga	59.263.622.000	-	59.263.622.000	80.155.748.000	139.419.370.000	57.466.864.348	-	57.466.864.348	75.920.060.689	133.386.925.037
515	Kab. Bintan	73.989.087.000	23.518.241.000	97.507.328.000	100.645.312.000	198.152.640.000	71.304.645.297	22.162.898.554	93.467.543.851	92.568.279.949	186.035.823.800
516	Provinsi Papua Barat	190.870.156.000	165.879.691.000	356.749.847.000	172.019.533.000	528.769.380.000	183.032.171.737	135.988.904.971	319.021.076.708	158.211.336.612	477.232.413.320
517	Kab. Fak Fak	45.419.079.000	14.447.								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK)									
		Pagu					Realisasi				
		DAK Fisik			DAK Nonfisik *	Jumlah Pagu	DAK Fisik			DAK Nonfisik **	Jumlah Realisasi
		Reguler	Penugasan	DAK Fisik			Reguler	Penugasan	DAK Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)
519	Kab. Sorong	109.429.331.000	67.167.218.000	176.596.549.000	88.737.435.400	265.333.984.400	107.438.736.520	65.978.172.108	173.416.908.628	83.249.730.309	256.666.638.937
520	Kota Sorong	79.473.130.000	40.126.710.000	119.599.840.000	76.798.421.400	196.398.261.400	42.802.122.796	38.979.972.900	81.782.095.696	67.928.203.958	149.710.299.654
521	Kab. Raja Ampat	113.102.285.000	63.406.613.000	176.508.898.000	70.503.829.400	247.012.727.400	109.165.547.123	60.701.725.590	169.867.272.713	68.833.661.968	238.700.934.681
522	Kab. Sorong Selatan	54.714.256.000	33.145.014.000	87.859.270.000	67.338.234.000	155.197.504.000	53.106.884.392	32.591.793.500	85.698.677.892	64.828.342.700	150.527.020.592
523	Kab. Teluk Bintuni	39.391.123.000	48.369.452.000	87.760.575.000	68.552.901.000	156.313.476.000	38.672.804.637	47.459.885.167	86.132.689.804	65.229.562.757	151.362.252.561
524	Kab. Teluk Wondama	52.864.746.000	75.917.721.000	128.782.467.000	35.499.671.400	164.282.138.400	50.401.656.929	74.301.201.287	124.702.858.219	31.854.601.344	156.557.459.560
525	Kab. Kaimana	22.696.848.000	10.611.924.000	33.308.772.000	49.790.777.000	83.099.549.000	21.915.056.039	9.950.156.000	31.865.212.039	46.497.819.620	78.363.031.659
526	Kab. Maybrat	216.676.601.000	48.269.586.000	264.946.187.000	38.851.843.000	303.798.030.000	201.162.198.198	48.229.187.000	249.391.385.198	37.707.090.160	287.098.475.358
527	Kab. Tambrauw	271.445.533.000	46.004.856.000	317.450.389.000	34.694.286.400	352.144.675.400	145.482.194.527	43.375.676.637	188.857.871.164	33.787.453.926	222.645.325.090
528	Kab. Manokwari Selatan	30.777.244.000	22.565.191.000	53.342.435.000	21.642.914.000	74.985.349.000	30.416.509.469	22.323.246.639	52.739.756.108	19.384.914.787	72.124.670.895
529	Kab. Pegunungan Arfak	67.148.795.000	42.861.476.000	110.010.271.000	32.557.349.000	142.567.620.000	42.414.062.191	42.384.040.340	84.798.102.531	24.008.610.390	108.806.712.921
530	Provinsi Sulawesi Barat	204.273.566.000	42.980.425.000	247.253.991.000	187.762.395.000	435.016.386.000	198.318.244.030	28.979.510.743	227.297.754.773	176.535.404.523	403.833.159.296
531	Kab. Majene	46.692.346.000	28.558.987.000	75.251.333.000	117.136.506.000	192.387.839.000	45.800.700.781	28.319.187.800	74.119.888.581	112.794.160.296	186.914.048.877
532	Kab. Mamuju	85.358.823.000	22.045.293.000	107.404.116.000	148.715.291.000	256.119.407.000	80.493.284.249	21.708.961.484	102.202.245.733	135.010.799.905	237.213.045.638
533	Kab. Polewali Mandar	110.083.860.000	29.667.365.000	139.751.225.000	202.184.342.000	341.935.567.000	107.928.647.042	28.661.897.573	136.590.544.615	188.992.600.476	325.583.145.091
534	Kab. Mamasa	91.313.295.000	-	91.313.295.000	110.673.369.000	201.986.664.000	78.018.866.408	-	78.018.866.408	107.440.750.413	185.459.616.821
535	Kab. Pasangkayu	140.228.126.000	35.346.213.000	175.574.339.000	71.951.897.000	247.526.236.000	129.284.080.330	34.089.180.745	163.373.261.075	68.493.023.913	231.866.284.988
536	Kab. Mamuju Tengah	101.517.633.000	-	101.517.633.000	63.716.805.000	165.234.438.000	99.381.886.246	-	99.381.886.246	60.469.636.992	159.851.523.238
537	Provinsi Kalimantan Utara	133.195.396.000	9.835.085.000	143.030.481.000	98.751.463.000	241.781.944.000	127.258.844.757	9.827.321.000	137.086.165.757	92.981.497.668	230.067.663.425
538	Kab. Bulungan	219.356.363.000	-	219.356.363.000	91.036.560.000	310.392.923.000	184.245.603.041	-	184.245.603.041	85.092.229.817	269.337.832.858
539	Kab. Malinau	54.814.639.000	-	54.814.639.000	60.846.214.000	115.660.853.000	42.781.897.867	-	42.781.897.867	57.173.507.651	99.955.405.518
540	Kab. Nunukan	54.897.167.000	17.031.884.000	71.929.051.000	97.277.153.000	169.206.204.000	54.154.972.671	16.131.721.098	70.286.693.769	91.411.852.131	161.698.545.900
541	Kota Tarakan	46.342.761.000	6.330.365.000	52.673.126.000	88.663.879.000	141.337.005.000	44.971.066.581	6.112.323.932	51.083.390.513	82.324.964.955	133.408.355.468
542	Kab. Tana Tidung	20.549.811.000	-	20.549.811.000	24.411.333.000	44.961.144.000	20.011.415.381	-	20.011.415.381	23.706.285.759	43.717.701.140
0	Dana Cadangan	-	-	-	762.269.969.000	762.269.969.000	-	-	-	-	-
Jumlah		47.421.623.025.000	13.452.376.975.000	60.874.000.000.000	128.719.843.066.000	189.593.843.066.000	42.698.467.396.430	12.085.486.657.682	54.783.954.054.112	118.380.687.000.719	173.164.641.054.831

* Pagu DAK Nonfisik terdiri dari Pagu DAK Nonfisik ditambah dengan Penggunaan Pagu Dana Cadangan/Dana Tambahan

** Realisasi DAK Nonfisik merupakan Realisasi berdasarkan SPM/SP2D dan Realisasi Dana Cadangan/Dana Tambahan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA

Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
1	Provinsi Aceh	7.560.000.000.000	31.880.169.000	-	-	7.591.880.169.000	7.560.000.000.000	31.880.169.000	-	-	7.591.880.169.000
2	Kab. Aceh Barat	-	39.111.201.000	-	234.408.383.000	273.519.584.000	-	39.111.201.000	-	233.842.959.000	272.954.160.000
3	Kab. Aceh Besar	-	8.472.345.000	-	415.515.724.000	423.988.069.000	-	8.472.345.000	-	414.472.303.320	422.944.648.320
4	Kab. Aceh Selatan	-	4.744.552.000	-	194.090.688.000	198.835.240.000	-	4.744.552.000	-	193.841.946.480	198.586.498.480
5	Kab. Aceh Singkil	-	16.463.702.000	-	96.138.732.000	112.602.434.000	-	16.463.702.000	-	96.048.544.800	112.512.246.800
6	Kab. Aceh Tengah	-	-	-	209.831.057.000	209.831.057.000	-	-	-	209.801.406.219	209.801.406.219
7	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-	265.902.419.000	265.902.419.000	-	-	-	265.892.419.000	265.892.419.000
8	Kab. Aceh Timur	-	-	-	373.119.830.000	373.119.830.000	-	-	-	373.119.830.000	373.119.830.000
9	Kab. Aceh Utara	-	13.344.389.000	-	607.509.747.000	620.854.136.000	-	13.344.389.000	-	605.906.205.463	619.250.594.463
10	Kab. Bireuen	-	-	-	442.297.899.000	442.297.899.000	-	-	-	442.090.317.300	442.090.317.300
11	Kab. Pidie	-	-	-	494.424.865.000	494.424.865.000	-	-	-	494.353.834.841	494.353.834.841
12	Kab. Simeulue	-	3.581.658.000	-	107.641.709.000	111.223.367.000	-	3.581.658.000	-	107.641.709.000	111.223.367.000
13	Kota Banda Aceh	-	50.554.816.000	-	70.100.703.000	120.655.519.000	-	50.554.816.000	-	70.100.703.000	120.655.519.000
14	Kota Sabang	-	18.323.678.000	-	14.179.325.000	32.503.003.000	-	18.323.678.000	-	14.179.325.000	32.503.003.000
15	Kota Langsa	-	20.294.005.000	-	53.156.136.000	73.450.141.000	-	20.294.005.000	-	52.848.664.733	73.142.669.733
16	Kota Lhokseumawe	-	34.445.081.000	-	53.928.333.000	88.373.414.000	-	34.445.081.000	-	53.900.119.902	88.345.200.902
17	Kab. Gayo Lues	-	5.101.181.000	-	101.044.300.000	106.145.481.000	-	5.101.181.000	-	101.044.299.910	106.145.480.910
18	Kab. Aceh Barat Daya	-	8.943.867.000	-	111.846.686.000	120.790.553.000	-	8.943.867.000	-	111.846.686.000	120.790.553.000
19	Kab. Aceh Jaya	-	16.108.422.000	-	118.845.057.000	134.953.479.000	-	16.108.422.000	-	118.845.057.000	134.953.479.000
20	Kab. Nagan Raya	-	6.331.498.000	-	161.264.111.000	167.595.609.000	-	6.331.498.000	-	161.264.111.000	167.595.609.000
21	Kab. Aceh Tamiang	-	-	-	163.372.347.000	163.372.347.000	-	-	-	162.463.169.800	162.463.169.800
22	Kab. Bener Meriah	-	12.457.127.000	-	167.049.012.000	179.506.139.000	-	12.457.127.000	-	167.049.012.000	179.506.139.000
23	Kab. Pidie Jaya	-	18.897.689.000	-	151.746.896.000	170.644.585.000	-	18.897.689.000	-	151.746.896.000	170.644.585.000
24	Kota Subulussalam	-	20.970.204.000	-	61.957.788.000	82.927.992.000	-	20.970.204.000	-	61.957.788.000	82.927.992.000
25	Provinsi Sumatera Utara	-	36.188.247.000	-	-	36.188.247.000	-	36.188.247.000	-	-	36.188.247.000
26	Kab. Asahan	-	-	-	152.159.305.000	152.159.305.000	-	-	-	151.463.892.800	151.463.892.800
27	Kab. Dairi	-	3.320.485.000	-	124.074.797.000	127.395.282.000	-	3.320.485.000	-	124.074.797.000	127.395.282.000
28	Kab. Deli Serdang	-	-	-	323.958.125.000	323.958.125.000	-	-	-	323.862.404.000	323.862.404.000
29	Kab. Karo	-	8.781.788.000	-	188.254.482.000	197.036.270.000	-	8.781.788.000	-	188.046.610.710	196.828.398.710
30	Kab. Labuhanbatu	-	-	-	67.682.851.000	67.682.851.000	-	-	-	67.408.046.530	67.408.046.530
31	Kab. Langkat	-	-	-	216.141.671.000	216.141.671.000	-	-	-	214.996.733.380	214.996.733.380
32	Kab. Mandailing Natal	-	-	-	285.342.307.000	285.342.307.000	-	-	-	284.748.020.740	284.748.020.740
33	Kab. Nias	-	2.183.191.000	-	169.756.703.000	171.939.894.000	-	2.183.191.000	-	168.962.445.080	171.145.636.080
34	Kab. Simalungun	-	-	-	306.916.025.000	306.916.025.000	-	-	-	306.916.025.000	306.916.025.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	-	11.384.193.000	-	160.406.281.000	171.790.474.000	-	11.384.193.000	-	160.139.721.400	171.523.914.400
36	Kab. Tapanuli Tengah	-	3.027.708.000	-	134.295.609.000	137.323.317.000	-	3.027.708.000	-	134.295.609.000	137.323.317.000
37	Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	188.374.828.000	188.374.828.000	-	-	-	188.374.828.000	188.374.828.000
38	Kab. Toba Samosir	-	6.204.938.000	-	168.602.730.000	174.807.668.000	-	6.204.938.000	-	168.602.730.000	174.807.668.000
39	Kota Binjai	-	9.792.420.000	-	-	9.792.420.000	-	9.792.420.000	-	-	9.792.420.000
40	Kota Medan	-	11.500.663.000	-	-	11.500.663.000	-	11.500.663.000	-	-	11.500.663.000
41	Kota Pematang Siantar	-	10.436.540.000	-	-	10.436.540.000	-	10.436.540.000	-	-	10.436.540.000
42	Kota Sibolga	-	18.430.524.000	-	-	18.430.524.000	-	18.430.524.000	-	-	18.430.524.000
43	Kota Tanjung Balai	-	2.014.604.000	-	-	2.014.604.000	-	2.014.604.000	-	-	2.014.604.000
44	Kota Tebing Tinggi	-	9.617.444.000	-	-	9.617.444.000	-	9.617.444.000	-	-	9.617.444.000
45	Kota Padang Sidempuan	-	17.113.672.000	-	30.782.227.000	47.895.899.000	-	17.113.672.000	-	30.782.227.000	47.895.899.000
46	Kab. Pakpak Bharat	-	14.834.567.000	-	39.218.593.000	54.053.160.000	-	14.834.567.000	-	38.446.619.487	53.281.186.487
47	Kab. Nias Selatan	-	-	-	375.606.997.000	375.606.997.000	-	-	-	371.959.764.729	371.959.764.729
48	Kab. Humbang Hasundutan	-	5.602.862.000	-	117.775.396.000	123.378.258.000	-	5.602.862.000	-	117.775.396.000	123.378.258.000
49	Kab. Serdang Bedagai	-	3.216.939.000	-	187.543.652.000	190.760.591.000	-	3.216.939.000	-	186.951.487.038	190.168.426.038
50	Kab. Samosir	-	14.370.192.000	-	97.022.574.000	111.392.766.000	-	14.370.192.000	-	97.022.574.000	111.392.766.000
51	Kab. Batu Bara	-	12.773.325.000	-	117.193.572.000	129.966.897.000	-	12.773.325.000	-	116.764.652.247	129.537.977.247
52	Kab. Padang Lawas	-	3.595.403.000	-	219.302.748.000	222.898.151.000	-	3.595.403.000	-	219.070.681.880	222.666.084.880
53	Kab. Padang Lawas Utara	-	5.450.202.000	-	280.002.008.000	285.452.210.000	-	5.450.202.000	-	278.508.173.149	283.958.375.149

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
(1)	(2)	Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	-	56.978.087.000	56.978.087.000	-	-	-	56.978.087.000	56.978.087.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	-	-	-	77.280.314.000	77.280.314.000	-	-	-	76.894.522.690	76.894.522.690
56	Kab. Nias Utara	-	2.068.284.000	-	122.826.989.000	124.895.273.000	-	2.068.284.000	-	119.970.707.813	122.038.991.813
57	Kab. Nias Barat	-	1.261.042.000	-	108.609.469.000	109.870.511.000	-	1.261.042.000	-	105.152.164.480	106.413.206.480
58	Kota Gunungsitoli	-	34.711.889.000	-	80.675.367.000	115.387.256.000	-	34.711.889.000	-	80.322.298.839	115.034.187.839
59	Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Kab. Lima Puluh Kota	-	-	-	74.850.449.000	74.850.449.000	-	-	-	74.850.449.000	74.850.449.000
61	Kab. Agam	-	-	-	75.099.628.000	75.099.628.000	-	-	-	75.099.628.000	75.099.628.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	44.929.317.000	44.929.317.000	-	-	-	44.685.845.300	44.685.845.300
63	Kab. Padang Pariaman	-	1.317.667.000	-	94.772.298.000	96.089.965.000	-	1.317.667.000	-	94.772.298.000	96.089.965.000
64	Kab. Pasaman	-	-	-	42.840.885.000	42.840.885.000	-	-	-	42.840.885.000	42.840.885.000
65	Kab. Pesisir Selatan	-	-	-	161.021.565.000	161.021.565.000	-	-	-	161.021.564.000	161.021.564.000
66	Kab. Sijunjung	-	2.061.902.000	-	54.256.361.000	56.318.263.000	-	2.061.902.000	-	54.256.361.000	56.318.263.000
67	Kab. Solok	-	6.706.681.000	-	71.976.339.000	78.683.020.000	-	6.706.681.000	-	71.976.339.000	78.683.020.000
68	Kab. Tanah Datar	-	13.171.068.000	-	64.919.594.000	78.090.662.000	-	13.171.068.000	-	64.919.594.000	78.090.662.000
69	Kota Bukit Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Kota Padang Panjang	-	12.775.829.000	-	-	12.775.829.000	-	12.775.829.000	-	-	12.775.829.000
71	Kota Padang	-	24.363.996.000	-	-	24.363.996.000	-	24.363.996.000	-	-	24.363.996.000
72	Kota Payakumbuh	-	1.946.993.000	-	-	1.946.993.000	-	1.946.993.000	-	-	1.946.993.000
73	Kota Sawahlunto	-	5.044.116.000	-	20.098.731.000	25.142.847.000	-	5.044.116.000	-	20.098.731.000	25.142.847.000
74	Kota Solok	-	7.213.458.000	-	-	7.213.458.000	-	7.213.458.000	-	-	7.213.458.000
75	Kota Pariaman	-	8.914.775.000	-	39.543.276.000	48.458.051.000	-	8.914.775.000	-	39.543.276.000	48.458.051.000
76	Kab. Pasaman Barat	-	9.337.340.000	-	37.336.600.000	46.673.940.000	-	9.337.340.000	-	37.336.600.000	46.673.940.000
77	Kab. Dharmasraya	-	6.527.889.000	-	47.755.788.000	54.283.677.000	-	6.527.889.000	-	47.755.788.000	54.283.677.000
78	Kab. Solok Selatan	-	-	-	37.621.151.000	37.621.151.000	-	-	-	37.621.151.000	37.621.151.000
79	Provinsi Riau	-	40.001.129.000	-	-	40.001.129.000	-	40.001.129.000	-	-	40.001.129.000
80	Kab. Bengkalis	-	-	-	127.460.843.000	127.460.843.000	-	-	-	127.024.597.939	127.024.597.939
81	Kab. Indragiri Hilir	-	30.923.294.000	-	168.557.880.000	199.481.174.000	-	30.923.294.000	-	168.557.880.000	199.481.174.000
82	Kab. Indragiri Hulu	-	4.875.628.000	-	147.116.724.000	151.992.352.000	-	4.875.628.000	-	146.367.198.160	151.242.826.160
83	Kab. Kampar	-	5.205.152.000	-	215.759.396.000	220.964.548.000	-	5.205.152.000	-	215.093.518.324	220.298.670.324
84	Kab. Kuantan Singingi	-	4.628.532.000	-	170.554.678.000	175.183.210.000	-	4.628.532.000	-	170.332.123.200	174.960.655.200
85	Kab. Pelalawan	-	-	-	98.018.806.000	98.018.806.000	-	-	-	98.018.806.000	98.018.806.000
86	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	142.253.661.000	142.253.661.000	-	-	-	141.598.411.800	141.598.411.800
87	Kab. Rokan Hulu	-	25.497.828.000	-	137.819.413.000	163.317.241.000	-	25.497.828.000	-	137.819.413.000	163.317.241.000
88	Kab. Siak	-	10.752.368.000	-	107.516.036.000	118.268.404.000	-	10.752.368.000	-	107.516.036.000	118.268.404.000
89	Kota Dumai	-	20.360.896.000	-	-	20.360.896.000	-	20.360.896.000	-	-	20.360.896.000
90	Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	3.070.579.000	-	85.239.193.000	88.309.772.000	-	3.070.579.000	-	85.239.193.000	88.309.772.000
92	Provinsi Jambi	-	14.187.913.000	-	-	14.187.913.000	-	14.187.913.000	-	-	14.187.913.000
93	Kab. Batanghari	-	5.305.030.000	-	92.059.465.000	97.364.495.000	-	5.305.030.000	-	92.059.465.000	97.364.495.000
94	Kab. Bungo	-	11.937.841.000	-	112.006.870.000	123.944.711.000	-	11.937.841.000	-	111.405.928.664	123.343.769.664
95	Kab. Kerinci	-	8.167.259.000	-	203.387.175.000	211.554.434.000	-	8.167.259.000	-	201.872.164.639	210.039.423.639
96	Kab. Merangin	-	3.471.673.000	-	163.683.838.000	167.155.511.000	-	3.471.673.000	-	163.524.382.600	166.996.055.600
97	Kab. Muaro Jambi	-	3.027.708.000	-	121.016.206.000	124.043.914.000	-	3.027.708.000	-	121.016.206.000	124.043.914.000
98	Kab. Sarolangun	-	2.953.126.000	-	122.254.794.000	125.207.920.000	-	2.953.126.000	-	122.158.611.400	125.111.737.400
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	11.445.780.000	-	95.700.485.000	107.146.265.000	-	11.445.780.000	-	95.700.485.000	107.146.265.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	16.457.861.000	-	64.480.357.000	80.938.218.000	-	16.457.861.000	-	64.480.357.000	80.938.218.000
101	Kab. Tebo	-	19.781.555.000	-	100.685.368.000	120.466.923.000	-	19.781.555.000	-	100.685.325.700	120.466.880.700
102	Kota Jambi	-	22.192.745.000	-	-	22.192.745.000	-	22.192.745.000	-	-	22.192.745.000
103	Kota Sungai Penuh	-	13.564.481.000	-	47.105.108.000	60.669.589.000	-	13.564.481.000	-	46.751.505.168	60.315.986.168
104	Provinsi Sumatera Selatan	-	60.870.557.000	-	-	60.870.557.000	-	60.870.557.000	-	-	60.870.557.000
105	Kab. Lahat	-	5.124.360.000	-	284.943.310.000	290.067.670.000	-	5.124.360.000	-	283.370.598.000	288.494.958.000
106	Kab. Musi Banyuasin	-	11.203.104.000	-	219.990.780.000	231.193.884.000	-	11.203.104.000	-	219.803.363.000	231.006.467.000
107	Kab. Musi Rawas	-	47.907.466.000	-	177.341.313.000	225.248.779.000	-	47.907.466.000	-	177.341.313.000	225.248.779.000
108	Kab. Muara Enim	-	18.383.720.000	-	226.087.294.000	244.471.014.000	-	18.383.720.000	-	226.087.294.000	244.471.014.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
109	Kab. Ogan Komering Ilir	-	11.678.590.000	-	291.700.759.000	303.379.349.000	-	11.678.590.000	-	290.664.573.640	302.343.163.640
110	Kab. Ogan Komering Ulu	-	4.908.944.000	-	128.256.080.000	133.165.024.000	-	4.908.944.000	-	127.748.053.225	132.656.997.225
111	Kota Palembang	-	8.972.792.000	-	-	8.972.792.000	-	8.972.792.000	-	-	8.972.792.000
112	Kota Prabumulih	-	6.249.357.000	-	11.064.172.000	17.313.529.000	-	6.249.357.000	-	11.064.172.000	17.313.529.000
113	Kota Pagar Alam	-	38.155.519.000	-	-	38.155.519.000	-	38.155.519.000	-	-	38.155.519.000
114	Kota Lubuk Linggau	-	27.740.966.000	-	-	27.740.966.000	-	27.740.966.000	-	-	27.740.966.000
115	Kab. Banyuasin	-	-	-	289.920.631.000	289.920.631.000	-	-	-	289.310.409.776	289.310.409.776
116	Kab. Ogan Ilir	-	6.544.006.000	-	192.257.971.000	198.801.977.000	-	6.544.006.000	-	192.070.558.400	198.614.564.400
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	16.748.454.000	-	248.412.271.000	265.160.725.000	-	16.748.454.000	-	248.412.271.000	265.160.725.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-	213.665.740.000	213.665.740.000	-	-	-	213.364.818.763	213.364.818.763
119	Kab. Empat Lawang	-	11.438.388.000	-	125.545.161.000	136.983.549.000	-	11.438.388.000	-	125.545.161.000	136.983.549.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	8.922.337.000	-	65.699.150.000	74.621.487.000	-	8.922.337.000	-	65.630.143.600	74.552.480.600
121	Kab. Musi Rawas Utara	-	3.337.693.000	-	79.966.082.000	83.303.775.000	-	3.337.693.000	-	79.966.082.000	83.303.775.000
122	Provinsi Bengkulu	-	49.548.556.000	-	-	49.548.556.000	-	49.548.556.000	-	-	49.548.556.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	-	6.187.022.000	-	102.043.926.000	108.230.948.000	-	6.187.022.000	-	102.043.926.000	108.230.948.000
124	Kab. Bengkulu Utara	-	1.832.705.000	-	164.554.819.000	166.387.524.000	-	1.832.705.000	-	164.554.819.000	166.387.524.000
125	Kab. Rejang Lebong	-	6.277.307.000	-	104.385.036.000	110.662.343.000	-	6.277.307.000	-	104.248.296.400	110.525.603.400
126	Kota Bengkulu	-	9.465.842.000	-	-	9.465.842.000	-	9.465.842.000	-	-	9.465.842.000
127	Kab. Kaur	-	8.993.236.000	-	135.207.233.000	144.200.469.000	-	8.993.236.000	-	135.207.233.000	144.200.469.000
128	Kab. Seluma	-	3.532.943.000	-	135.203.460.000	138.736.403.000	-	3.532.943.000	-	135.203.460.000	138.736.403.000
129	Kab. Mukomuko	-	5.009.043.000	-	114.015.607.000	119.024.650.000	-	5.009.043.000	-	113.928.969.840	118.938.012.840
130	Kab. Lebong	-	-	-	71.470.315.000	71.470.315.000	-	-	-	71.281.592.031	71.281.592.031
131	Kab. Kepahiang	-	7.499.292.000	-	78.223.781.000	85.723.073.000	-	7.499.292.000	-	78.223.781.000	85.723.073.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	-	20.805.972.000	-	104.173.033.000	124.979.005.000	-	20.805.972.000	-	103.616.813.482	124.422.785.482
133	Provinsi Lampung	-	1.441.174.000	-	-	1.441.174.000	-	1.441.174.000	-	-	1.441.174.000
134	Kab. Lampung Barat	-	11.559.480.000	-	117.483.497.000	129.042.977.000	-	11.559.480.000	-	117.483.497.000	129.042.977.000
135	Kab. Lampung Selatan	-	8.892.704.000	-	264.187.903.000	273.080.607.000	-	8.892.704.000	-	264.187.903.000	273.080.607.000
136	Kab. Lampung Tengah	-	-	-	318.359.441.000	318.359.441.000	-	-	-	318.212.844.100	318.212.844.100
137	Kab. Lampung Utara	-	-	-	224.935.998.000	224.935.998.000	-	-	-	224.935.998.000	224.935.998.000
138	Kab. Lampung Timur	-	-	-	279.834.396.000	279.834.396.000	-	-	-	279.183.363.800	279.183.363.800
139	Kab. Tanggamus	-	-	-	261.388.300.000	261.388.300.000	-	-	-	261.388.300.000	261.388.300.000
140	Kab. Tulang Bawang	-	5.952.635.000	-	129.382.766.000	135.335.401.000	-	5.952.635.000	-	129.382.766.000	135.335.401.000
141	Kab. Way Kanan	-	-	-	183.269.898.000	183.269.898.000	-	-	-	183.269.898.000	183.269.898.000
142	Kota Bandar Lampung	-	8.791.675.000	-	-	8.791.675.000	-	8.791.675.000	-	-	8.791.675.000
143	Kota Metro	-	30.673.067.000	-	-	30.673.067.000	-	30.673.067.000	-	-	30.673.067.000
144	Kab. Pesawaran	-	-	-	151.220.647.000	151.220.647.000	-	-	-	150.905.219.600	150.905.219.600
145	Kab. Pringsewu	-	16.414.400.000	-	122.633.341.000	139.047.741.000	-	16.414.400.000	-	122.633.341.000	139.047.741.000
146	Kab. Mesuji	-	2.020.689.000	-	94.477.304.000	96.497.993.000	-	2.020.689.000	-	94.384.794.400	96.405.483.400
147	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-	82.600.289.000	82.600.289.000	-	-	-	82.600.289.000	82.600.289.000
148	Kab. Pesisir Barat	-	27.002.655.000	-	97.051.628.000	124.054.283.000	-	27.002.655.000	-	97.051.628.000	124.054.283.000
149	Provinsi DKI Jakarta	-	29.684.233.000	-	-	29.684.233.000	-	29.684.233.000	-	-	29.684.233.000
150	Provinsi Jawa Barat	-	39.615.757.000	-	-	39.615.757.000	-	39.615.757.000	-	-	39.615.757.000
151	Kab. Bandung	-	52.445.287.000	-	345.331.515.000	397.776.802.000	-	52.445.287.000	-	344.209.450.800	396.654.737.800
152	Kab. Bekasi	-	14.160.353.000	-	264.353.007.000	278.513.360.000	-	14.160.353.000	-	264.353.007.000	278.513.360.000
153	Kab. Bogor	-	24.556.712.000	-	544.358.095.000	568.914.807.000	-	24.556.712.000	-	543.446.172.307	568.002.884.307
154	Kab. Ciamis	-	26.072.601.000	-	270.502.288.000	296.574.889.000	-	26.072.601.000	-	270.502.288.000	296.574.889.000
155	Kab. Cianjur	-	-	-	442.113.458.000	442.113.458.000	-	-	-	439.743.792.800	439.743.792.800
156	Kab. Cirebon	-	27.360.577.000	-	471.363.639.000	498.724.216.000	-	27.360.577.000	-	471.324.713.000	498.685.290.000
157	Kab. Garut	-	12.124.874.000	-	518.247.019.000	530.371.893.000	-	12.124.874.000	-	517.897.498.200	530.022.372.200
158	Kab. Indramayu	-	-	-	401.253.897.000	401.253.897.000	-	-	-	401.124.868.800	401.124.868.800
159	Kab. Karawang	-	-	-	355.943.391.000	355.943.391.000	-	-	-	355.943.391.000	355.943.391.000
160	Kab. Kuningan	-	-	-	315.201.708.000	315.201.708.000	-	-	-	315.201.708.000	315.201.708.000
161	Kab. Majalengka	-	19.160.198.000	-	389.573.880.000	408.734.078.000	-	19.160.198.000	-	389.573.880.000	408.734.078.000
162	Kab. Purwakarta	-	14.544.615.000	-	172.438.898.000	186.983.513.000	-	14.544.615.000	-	172.194.843.600	186.739.458.600
163	Kab. Subang	-	-	-	234.728.039.000	234.728.039.000	-	-	-	234.728.039.000	234.728.039.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
(1)	(2)	Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
164	Kab. Sukabumi	-	9.204.713.000	-	401.786.292.000	410.991.005.000	-	9.204.713.000	-	401.786.292.000	410.991.005.000
165	Kab. Sumedang	-	37.001.635.000	-	238.130.726.000	275.132.361.000	-	37.001.635.000	-	237.420.551.800	274.422.186.800
166	Kab. Tasikmalaya	-	-	-	410.638.722.000	410.638.722.000	-	-	-	410.271.552.000	410.271.552.000
167	Kota Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	Kota Bekasi	-	16.318.528.000	-	-	16.318.528.000	-	16.318.528.000	-	-	16.318.528.000
169	Kota Bogor	-	32.306.424.000	-	-	32.306.424.000	-	32.306.424.000	-	-	32.306.424.000
170	Kota Cirebon	-	27.043.861.000	-	-	27.043.861.000	-	27.043.861.000	-	-	27.043.861.000
171	Kota Depok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Kota Sukabumi	-	24.415.056.000	-	-	24.415.056.000	-	24.415.056.000	-	-	24.415.056.000
173	Kota Tasikmalaya	-	26.767.451.000	-	-	26.767.451.000	-	26.767.451.000	-	-	26.767.451.000
174	Kota Cimahi	-	5.528.168.000	-	-	5.528.168.000	-	5.528.168.000	-	-	5.528.168.000
175	Kota Banjar	-	3.403.723.000	-	16.018.603.000	19.422.326.000	-	3.403.723.000	-	16.018.603.000	19.422.326.000
176	Kab. Bandung Barat	-	-	-	252.779.336.000	252.779.336.000	-	-	-	252.779.335.000	252.779.335.000
177	Kab. Pangandaran	-	-	-	86.475.129.000	86.475.129.000	-	-	-	86.475.129.900	86.475.129.900
178	Provinsi Jawa Tengah	-	61.352.500.000	-	-	61.352.500.000	-	61.352.500.000	-	-	61.352.500.000
179	Kab. Banjarnegara	-	25.984.697.000	-	266.535.723.000	292.520.420.000	-	25.984.697.000	-	266.535.723.000	292.520.420.000
180	Kab. Banyumas	-	30.603.775.000	-	383.196.882.000	413.800.657.000	-	30.603.775.000	-	383.196.882.000	413.800.657.000
181	Kab. Batang	-	7.839.277.000	-	200.193.418.000	208.032.695.000	-	7.839.277.000	-	200.193.418.000	208.032.695.000
182	Kab. Blora	-	7.972.804.000	-	265.277.093.000	273.249.897.000	-	7.972.804.000	-	264.843.962.050	272.816.766.050
183	Kab. Boyolali	-	21.711.252.000	-	223.033.286.000	244.744.538.000	-	21.711.252.000	-	223.033.286.000	244.744.538.000
184	Kab. Brebes	-	-	-	453.819.700.000	453.819.700.000	-	-	-	453.819.700.000	453.819.700.000
185	Kab. Cilacap	-	23.352.408.000	-	309.114.066.000	332.466.474.000	-	23.352.408.000	-	308.764.756.104	332.117.164.104
186	Kab. Demak	-	50.226.198.000	-	280.456.401.000	330.682.599.000	-	50.226.198.000	-	279.969.116.000	330.195.314.000
187	Kab. Grobogan	-	20.817.027.000	-	307.655.877.000	328.472.904.000	-	20.817.027.000	-	307.655.877.000	328.472.904.000
188	Kab. Jepara	-	36.122.164.000	-	245.689.231.000	281.811.395.000	-	36.122.164.000	-	245.689.231.000	281.811.395.000
189	Kab. Karanganyar	-	22.407.052.000	-	169.874.596.000	192.281.648.000	-	22.407.052.000	-	169.874.596.000	192.281.648.000
190	Kab. Kebumen	-	-	-	416.756.373.000	416.756.373.000	-	-	-	416.756.373.000	416.756.373.000
191	Kab. Kendal	-	15.291.358.000	-	255.193.805.000	270.485.163.000	-	15.291.358.000	-	255.193.805.000	270.485.163.000
192	Kab. Klaten	-	11.209.129.000	-	379.432.533.000	390.641.662.000	-	11.209.129.000	-	379.338.801.000	390.547.930.000
193	Kab. Kudus	-	15.963.044.000	-	146.122.990.000	162.086.034.000	-	15.963.044.000	-	146.122.990.000	162.086.034.000
194	Kab. Magelang	-	14.367.981.000	-	393.231.309.000	407.599.290.000	-	14.367.981.000	-	393.231.309.000	407.599.290.000
195	Kab. Pati	-	35.744.088.000	-	427.096.131.000	462.840.219.000	-	35.744.088.000	-	426.815.696.200	462.559.784.200
196	Kab. Pekalongan	-	1.482.507.000	-	263.868.873.000	265.351.380.000	-	1.482.507.000	-	263.714.089.350	265.196.596.350
197	Kab. Pemalang	-	4.656.546.000	-	320.431.408.000	325.087.954.000	-	4.656.546.000	-	320.209.861.900	324.866.407.900
198	Kab. Purbalingga	-	-	-	247.368.204.000	247.368.204.000	-	-	-	246.998.927.400	246.998.927.400
199	Kab. Purworejo	-	41.600.943.000	-	346.454.872.000	388.055.815.000	-	41.600.943.000	-	346.381.470.375	387.982.413.375
200	Kab. Rembang	-	8.578.224.000	-	252.064.026.000	260.642.250.000	-	8.578.224.000	-	252.064.026.000	260.642.250.000
201	Kab. Semarang	-	31.323.880.000	-	190.973.161.000	222.297.041.000	-	31.323.880.000	-	190.973.161.000	222.297.041.000
202	Kab. Sragen	-	14.431.466.000	-	182.671.645.000	197.103.111.000	-	14.431.466.000	-	182.671.645.000	197.103.111.000
203	Kab. Sukoharjo	-	-	-	148.559.522.000	148.559.522.000	-	-	-	148.559.522.000	148.559.522.000
204	Kab. Tegal	-	-	-	359.781.317.000	359.781.317.000	-	-	-	359.312.887.800	359.312.887.800
205	Kab. Temanggung	-	2.438.134.000	-	245.879.771.000	248.317.905.000	-	2.438.134.000	-	245.879.771.000	248.317.905.000
206	Kab. Wonogiri	-	14.532.507.000	-	213.561.759.000	228.094.266.000	-	14.532.507.000	-	213.348.940.400	227.881.447.400
207	Kab. Wonosobo	-	3.506.837.000	-	221.885.021.000	225.391.858.000	-	3.506.837.000	-	221.885.021.000	225.391.858.000
208	Kota Magelang	-	17.049.883.000	-	-	17.049.883.000	-	17.049.883.000	-	-	17.049.883.000
209	Kota Pekalongan	-	4.696.260.000	-	-	4.696.260.000	-	4.696.260.000	-	-	4.696.260.000
210	Kota Salatiga	-	52.018.907.000	-	-	52.018.907.000	-	52.018.907.000	-	-	52.018.907.000
211	Kota Semarang	-	54.251.362.000	-	-	54.251.362.000	-	54.251.362.000	-	-	54.251.362.000
212	Kota Surakarta	-	30.558.815.000	-	-	30.558.815.000	-	30.558.815.000	-	-	30.558.815.000
213	Kota Tegal	-	9.097.912.000	-	-	9.097.912.000	-	9.097.912.000	-	-	9.097.912.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	-	64.312.676.000	1.320.000.000.000	-	1.384.312.676.000	-	64.312.676.000	1.320.000.000.000	-	1.384.312.676.000
215	Kab. Bantul	-	58.566.684.000	-	101.247.697.000	159.814.381.000	-	58.566.684.000	-	101.247.697.000	159.814.381.000
216	Kab. Gunung Kidul	-	12.428.629.000	-	144.366.117.000	156.794.746.000	-	12.428.629.000	-	144.366.117.000	156.794.746.000
217	Kab. Kulon Progo	-	42.707.212.000	-	88.152.875.000	130.860.087.000	-	42.707.212.000	-	88.152.875.000	130.860.087.000
218	Kab. Sleman	-	33.641.577.000	-	105.499.075.000	139.140.652.000	-	33.641.577.000	-	105.499.075.000	139.140.652.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
219	Kota Yogyakarta	-	73.496.525.000	-	-	73.496.525.000	-	73.496.525.000	-	-	73.496.525.000
220	Provinsi Jawa Timur	-	67.259.302.000	-	-	67.259.302.000	-	67.259.302.000	-	-	67.259.302.000
221	Kab. Bangkalan	-	-	-	317.495.477.000	317.495.477.000	-	-	-	316.703.996.400	316.703.996.400
222	Kab. Banyuwangi	-	43.122.557.000	-	221.710.360.000	264.832.917.000	-	43.122.557.000	-	221.710.360.000	264.832.917.000
223	Kab. Blitar	-	23.340.215.000	-	204.807.099.000	228.147.314.000	-	23.340.215.000	-	204.807.099.000	228.147.314.000
224	Kab. Bojonegoro	-	14.636.752.000	-	359.638.150.000	374.274.902.000	-	14.636.752.000	-	358.753.665.827	373.390.417.827
225	Kab. Bondowoso	-	7.725.363.000	-	231.667.832.000	239.393.195.000	-	7.725.363.000	-	239.393.195.000	239.393.195.000
226	Kab. Gresik	-	51.487.263.000	-	294.720.837.000	346.208.100.000	-	51.487.263.000	-	294.321.749.600	345.809.012.600
227	Kab. Jember	-	10.364.617.000	-	315.343.690.000	325.708.307.000	-	10.364.617.000	-	315.343.690.000	325.708.307.000
228	Kab. Jombang	-	25.108.865.000	-	293.111.955.000	318.220.820.000	-	25.108.865.000	-	293.111.955.000	318.220.820.000
229	Kab. Kediri	-	29.406.840.000	-	337.478.649.000	366.885.489.000	-	29.406.840.000	-	336.968.063.000	366.374.903.000
230	Kab. Lamongan	-	31.710.550.000	-	384.739.389.000	416.449.939.000	-	31.710.550.000	-	384.739.389.000	416.449.939.000
231	Kab. Lumajang	-	-	-	203.080.258.000	203.080.258.000	-	-	-	202.373.672.440	202.373.672.440
232	Kab. Madiun	-	15.612.627.000	-	167.769.564.000	183.382.191.000	-	15.612.627.000	-	167.717.386.200	183.330.013.200
233	Kab. Magetan	-	24.444.477.000	-	172.413.890.000	196.858.367.000	-	24.444.477.000	-	172.413.890.000	196.858.367.000
234	Kab. Malang	-	1.351.964.000	-	409.736.726.000	411.088.690.000	-	1.351.964.000	-	409.429.612.400	410.781.576.400
235	Kab. Mojokerto	-	23.003.791.000	-	253.872.807.000	276.876.598.000	-	23.003.791.000	-	253.366.051.800	276.369.842.800
236	Kab. Nganjuk	-	-	-	288.803.997.000	288.803.997.000	-	-	-	288.473.460.800	288.473.460.800
237	Kab. Ngawi	-	14.197.454.000	-	203.269.311.000	217.466.765.000	-	14.197.454.000	-	203.269.311.000	217.466.765.000
238	Kab. Pacitan	-	6.343.151.000	-	150.896.400.000	157.239.551.000	-	6.343.151.000	-	150.896.400.000	157.239.551.000
239	Kab. Pamekasan	-	8.831.682.000	-	198.575.032.000	207.406.714.000	-	8.831.682.000	-	198.575.032.000	207.406.714.000
240	Kab. Pasuruan	-	-	-	370.829.419.000	370.829.419.000	-	-	-	370.739.138.800	370.739.138.800
241	Kab. Ponorogo	-	27.869.139.000	-	258.704.586.000	286.573.725.000	-	27.869.139.000	-	258.704.586.000	286.573.725.000
242	Kab. Probolinggo	-	4.864.509.000	-	403.909.728.000	408.774.237.000	-	4.864.509.000	-	403.909.728.000	408.774.237.000
243	Kab. Sampang	-	6.062.576.000	-	227.571.894.000	233.634.470.000	-	6.062.576.000	-	227.571.894.000	233.634.470.000
244	Kab. Sidoarjo	-	-	-	315.207.304.000	315.207.304.000	-	-	-	313.804.958.000	313.804.958.000
245	Kab. Situbondo	-	-	-	137.587.526.000	137.587.526.000	-	-	-	136.619.102.400	136.619.102.400
246	Kab. Sumenep	-	13.905.506.000	-	332.807.461.000	346.712.967.000	-	13.905.506.000	-	332.807.461.000	346.712.967.000
247	Kab. Trenggalek	-	19.284.465.000	-	156.889.772.000	176.174.237.000	-	19.284.465.000	-	156.790.476.400	176.074.941.400
248	Kab. Tuban	-	17.921.986.000	-	280.860.593.000	298.782.579.000	-	17.921.986.000	-	280.347.177.200	298.269.163.200
249	Kab. Tulungagung	-	-	-	245.102.197.000	245.102.197.000	-	-	-	245.102.197.000	245.102.197.000
250	Kota Blitar	-	56.255.400.000	-	-	56.255.400.000	-	56.255.400.000	-	-	56.255.400.000
251	Kota Kediri	-	27.517.079.000	-	-	27.517.079.000	-	27.517.079.000	-	-	27.517.079.000
252	Kota Madiun	-	28.870.790.000	-	-	28.870.790.000	-	28.870.790.000	-	-	28.870.790.000
253	Kota Malang	-	40.048.548.000	-	-	40.048.548.000	-	40.048.548.000	-	-	40.048.548.000
254	Kota Mojokerto	-	30.946.546.000	-	-	30.946.546.000	-	30.946.546.000	-	-	30.946.546.000
255	Kota Pasuruan	-	18.008.742.000	-	-	18.008.742.000	-	18.008.742.000	-	-	18.008.742.000
256	Kota Probolinggo	-	10.418.443.000	-	-	10.418.443.000	-	10.418.443.000	-	-	10.418.443.000
257	Kota Surabaya	-	41.136.702.000	-	-	41.136.702.000	-	41.136.702.000	-	-	41.136.702.000
258	Kota Batu	-	3.691.408.000	-	21.487.586.000	25.178.994.000	-	3.691.408.000	-	21.487.586.000	25.178.994.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	-	16.330.650.000	-	-	16.330.650.000	-	16.330.650.000	-	-	16.330.650.000
260	Kab. Bengkayang	-	1.205.659.000	-	104.391.259.000	105.596.918.000	-	1.205.659.000	-	104.391.259.000	105.596.918.000
261	Kab. Landak	-	8.328.792.000	-	166.096.200.000	174.424.992.000	-	8.328.792.000	-	165.590.245.777	173.919.037.777
262	Kab. Kapuas Hulu	-	10.093.626.000	-	250.172.998.000	260.266.624.000	-	10.093.626.000	-	249.744.577.760	259.838.203.760
263	Kab. Ketapang	-	9.176.391.000	-	245.180.929.000	254.357.320.000	-	9.176.391.000	-	244.030.323.400	253.206.714.400
264	Kab. Mempawah	-	8.294.379.000	-	59.673.787.000	67.968.166.000	-	8.294.379.000	-	59.673.787.000	67.968.166.000
265	Kab. Sambas	-	5.151.026.000	-	180.366.154.000	185.517.180.000	-	5.151.026.000	-	179.518.572.000	184.669.598.000
266	Kab. Sanggau	-	14.447.266.000	-	151.528.785.000	165.976.051.000	-	14.447.266.000	-	150.973.782.800	165.421.048.800
267	Kab. Sintang	-	10.663.906.000	-	343.060.757.000	353.724.663.000	-	10.663.906.000	-	342.843.467.000	353.507.373.000
268	Kota Pontianak	-	33.656.679.000	-	-	33.656.679.000	-	33.656.679.000	-	-	33.656.679.000
269	Kota Singkawang	-	24.789.804.000	-	-	24.789.804.000	-	24.789.804.000	-	-	24.789.804.000
270	Kab. Sekadau	-	6.272.488.000	-	78.106.197.000	84.378.685.000	-	6.272.488.000	-	78.106.197.000	84.378.685.000
271	Kab. Melawi	-	-	-	148.634.495.000	148.634.495.000	-	-	-	148.634.494.994	148.634.494.994
272	Kab. Kayong Utara	-	7.356.742.000	-	40.762.967.000	48.119.709.000	-	7.356.742.000	-	40.464.129.939	47.820.871.939
273	Kab. Kubu Raya	-	4.232.855.000	-	125.837.399.000	130.070.254.000	-	4.232.855.000	-	125.707.747.600	129.940.602.600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
(1)	(2)	Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
274	Provinsi Kalimantan Tengah	-	41.180.938.000	-	-	41.180.938.000	-	41.180.938.000	-	-	41.180.938.000
275	Kab. Barito Selatan	-	3.659.236.000	-	71.563.400.000	75.222.636.000	-	1.829.618.000	-	71.130.142.240	72.959.760.240
276	Kab. Barito Utara	-	2.461.865.000	-	77.474.633.000	79.936.498.000	-	2.461.865.000	-	77.474.633.000	79.936.498.000
277	Kab. Kapuas	-	1.770.863.000	-	182.029.827.000	183.800.690.000	-	1.770.863.000	-	180.748.580.044	182.519.443.044
278	Kab. Kotawaringin Barat	-	13.214.332.000	-	70.631.198.000	83.845.530.000	-	13.214.332.000	-	69.814.093.086	83.028.425.086
279	Kab. Kotawaringin Timur	-	22.505.058.000	-	144.196.324.000	166.701.382.000	-	22.505.058.000	-	144.196.324.000	166.701.382.000
280	Kota Palangkaraya	-	7.471.798.000	-	-	7.471.798.000	-	7.471.798.000	-	-	7.471.798.000
281	Kab. Katingan	-	1.738.575.000	-	129.610.032.000	131.348.607.000	-	1.738.575.000	-	129.610.032.000	131.348.607.000
282	Kab. Seruyan	-	9.687.181.000	-	88.601.508.000	98.288.689.000	-	9.687.181.000	-	88.517.655.400	98.204.836.400
283	Kab. Sukamara	-	2.399.568.000	-	24.979.655.000	27.379.223.000	-	2.399.568.000	-	24.979.655.000	27.379.223.000
284	Kab. Lamandau	-	20.270.970.000	-	65.720.458.000	85.991.428.000	-	20.270.970.000	-	65.720.458.000	85.991.428.000
285	Kab. Gunung Mas	-	3.821.039.000	-	90.715.916.000	94.536.955.000	-	3.821.039.000	-	90.215.183.720	94.036.222.720
286	Kab. Pulang Pisau	-	26.803.680.000	-	79.514.196.000	106.317.876.000	-	26.803.680.000	-	79.514.196.000	106.317.876.000
287	Kab. Murung Raya	-	3.532.010.000	-	105.612.663.000	109.144.673.000	-	3.532.010.000	-	105.302.938.200	108.834.948.200
288	Kab. Barito Timur	-	4.984.971.000	-	73.795.812.000	78.780.783.000	-	4.984.971.000	-	73.795.812.000	78.780.783.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	-	25.985.007.000	-	-	25.985.007.000	-	25.985.007.000	-	-	25.985.007.000
290	Kab. Banjar	-	-	-	214.031.243.000	214.031.243.000	-	-	-	213.931.343.800	213.931.343.800
291	Kab. Barito Kuala	-	1.913.412.000	-	147.723.076.000	149.636.488.000	-	1.913.412.000	-	147.723.076.000	149.636.488.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	11.572.948.000	-	107.798.562.000	119.371.510.000	-	11.572.948.000	-	107.798.562.000	119.371.510.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	6.589.933.000	-	122.078.074.000	128.668.007.000	-	6.589.933.000	-	122.078.074.000	128.668.007.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	-	4.868.120.000	-	152.492.341.000	157.360.461.000	-	4.868.120.000	-	152.293.921.000	157.162.041.000
295	Kab. Kotabaru	-	1.847.236.000	-	162.429.854.000	164.277.090.000	-	1.847.236.000	-	162.429.853.910	164.277.089.910
296	Kab. Tabalong	-	36.539.612.000	-	98.556.423.000	135.096.035.000	-	36.539.612.000	-	98.556.423.000	135.096.035.000
297	Kab. Tanah Laut	-	10.342.946.000	-	104.333.770.000	114.676.716.000	-	10.342.946.000	-	104.093.790.400	114.436.736.400
298	Kab. Tapin	-	5.594.207.000	-	93.368.716.000	98.962.923.000	-	5.594.207.000	-	93.075.636.760	98.669.843.760
299	Kota Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Kota Banjarmasin	-	10.392.912.000	-	-	10.392.912.000	-	10.392.912.000	-	-	10.392.912.000
301	Kab. Balangan	-	13.333.129.000	-	108.780.249.000	122.113.378.000	-	13.333.129.000	-	107.836.177.240	121.169.306.240
302	Kab. Tanah Bumbu	-	5.494.327.000	-	114.913.176.000	120.407.503.000	-	5.494.327.000	-	114.913.176.000	120.407.503.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	-	37.169.461.000	-	-	37.169.461.000	-	37.169.461.000	-	-	37.169.461.000
304	Kab. Berau	-	-	-	87.834.603.000	87.834.603.000	-	-	-	87.834.603.000	87.834.603.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-	176.903.354.000	176.903.354.000	-	-	-	176.844.267.000	176.844.267.000
306	Kab. Kutai Barat	-	27.026.373.000	-	157.191.564.000	184.217.937.000	-	27.026.373.000	-	157.102.253.400	184.128.626.400
307	Kab. Kutai Timur	-	-	-	144.755.925.000	144.755.925.000	-	-	-	142.421.628.067	142.421.628.067
308	Kab. Paser	-	3.376.283.000	-	115.261.108.000	118.637.391.000	-	3.376.283.000	-	115.078.008.592	118.454.291.592
309	Kota Balikpapan	-	44.427.677.000	-	-	44.427.677.000	-	44.427.677.000	-	-	44.427.677.000
310	Kota Bontang	-	16.205.606.000	-	-	16.205.606.000	-	16.205.606.000	-	-	16.205.606.000
311	Kota Samarinda	-	46.434.416.000	-	-	46.434.416.000	-	46.434.416.000	-	-	46.434.416.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	-	18.401.226.000	-	27.029.362.000	45.430.588.000	-	18.401.226.000	-	27.029.362.000	45.430.588.000
313	Kab. Mahakam Ulu	-	29.758.298.000	-	51.323.109.000	81.081.407.000	-	29.758.298.000	-	48.520.466.751	78.278.764.751
314	Provinsi Sulawesi Utara	-	44.748.344.000	-	-	44.748.344.000	-	44.748.344.000	-	-	44.748.344.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	-	5.194.702.000	-	149.603.238.000	154.797.940.000	-	5.194.702.000	-	149.500.968.600	154.695.670.600
316	Kab. Minahasa	-	10.876.233.000	-	160.972.522.000	171.848.755.000	-	10.876.233.000	-	160.968.080.880	171.844.313.880
317	Kab. Sangihe	-	6.168.774.000	-	100.801.378.000	106.970.152.000	-	6.168.774.000	-	100.664.305.890	106.833.079.890
318	Kota Bitung	-	46.371.207.000	-	-	46.371.207.000	-	46.371.207.000	-	-	46.371.207.000
319	Kota Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Kab. Kepulauan Talaud	-	12.366.292.000	-	101.065.791.000	113.432.083.000	-	12.366.292.000	-	101.065.791.000	113.432.083.000
321	Kab. Minahasa Selatan	-	4.412.313.000	-	126.524.240.000	130.936.553.000	-	4.412.313.000	-	126.524.240.000	130.936.553.000
322	Kota Tomohon	-	6.750.142.000	-	-	6.750.142.000	-	6.750.142.000	-	-	6.750.142.000
323	Kab. Minahasa Utara	-	-	-	94.981.459.000	94.981.459.000	-	-	-	94.737.548.600	94.737.548.600
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	11.421.439.000	-	57.057.475.000	68.478.914.000	-	11.421.439.000	-	56.981.678.440	68.403.117.440
325	Kota Kotamobagu	-	15.021.407.000	-	11.747.310.000	26.768.717.000	-	15.021.407.000	-	11.747.310.000	26.768.717.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	-	74.473.858.000	77.755.122.000	-	-	-	74.473.858.000	77.755.122.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	-	9.380.102.000	-	94.882.285.000	104.262.387.000	-	9.380.102.000	-	94.882.285.000	104.262.387.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	6.220.649.000	-	57.961.389.000	64.182.038.000	-	6.220.649.000	-	57.961.389.000	64.182.038.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa								
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi			
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	6.442.219.000	-	58.428.307.000	64.870.526.000	-	6.442.219.000	-	58.428.307.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	-	60.958.070.000	-	-	60.958.070.000	-	60.958.070.000	-	-
331	Kab. Banggai	-	29.076.464.000	-	220.924.811.000	250.001.275.000	-	29.076.464.000	-	220.924.811.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	-	4.584.136.000	-	104.492.851.000	109.076.987.000	-	4.584.136.000	-	109.076.987.000
333	Kab. Buol	-	1.205.659.000	-	83.199.687.000	84.405.346.000	-	1.205.659.000	-	83.199.687.000
334	Kab. Tolitoli	-	-	-	81.919.498.000	81.919.498.000	-	-	-	81.887.390.179
335	Kab. Donggala	-	-	-	136.944.330.000	136.944.330.000	-	-	-	136.357.536.800
336	Kab. Morowali	-	-	-	96.507.897.000	96.507.897.000	-	-	-	96.438.859.000
337	Kab. Poso	-	4.785.831.000	-	121.377.492.000	126.163.323.000	-	4.785.831.000	-	121.102.325.997
338	Kota Palu	-	17.308.014.000	-	-	17.308.014.000	-	17.308.014.000	-	-
339	Kab. Parigi Moutong	-	-	-	230.642.908.000	230.642.908.000	-	-	-	230.184.615.800
340	Kab. Tojo Una Una	-	5.259.510.000	-	111.594.110.000	116.853.620.000	-	5.259.510.000	-	111.594.110.000
341	Kab. Sigi	-	3.326.856.000	-	142.796.945.000	146.123.801.000	-	3.326.856.000	-	142.625.540.995
342	Kab. Banggai Laut	-	3.586.502.000	-	46.154.598.000	49.741.100.000	-	3.586.502.000	-	46.154.598.000
343	Kab. Morowali Utara	-	14.648.767.000	-	101.993.104.000	116.641.871.000	-	14.648.767.000	-	101.993.104.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	Kab. Bantaeng	-	7.471.375.000	-	37.466.592.000	44.937.967.000	-	7.471.375.000	-	44.937.967.000
346	Kab. Barru	-	9.909.264.000	-	42.933.469.000	52.842.733.000	-	9.909.264.000	-	52.842.733.000
347	Kab. Bone	-	35.144.465.000	-	314.660.111.000	349.804.576.000	-	35.144.465.000	-	313.561.167.400
348	Kab. Bulukumba	-	10.457.015.000	-	103.308.610.000	113.765.625.000	-	10.457.015.000	-	103.308.610.000
349	Kab. Enrekang	-	5.722.448.000	-	98.840.451.000	104.562.899.000	-	5.722.448.000	-	98.744.590.400
350	Kab. Gowa	-	-	-	139.675.871.000	139.675.871.000	-	-	-	139.402.403.604
351	Kab. Jeneponto	-	-	-	93.929.160.000	93.929.160.000	-	-	-	93.926.022.670
352	Kab. Luwu	-	16.208.458.000	-	171.327.909.000	187.536.367.000	-	16.208.458.000	-	171.327.909.000
353	Kab. Luwu Utara	-	5.214.640.000	-	151.405.577.000	156.620.217.000	-	5.214.640.000	-	151.405.577.000
354	Kab. Maros	-	18.413.677.000	-	80.501.940.000	98.915.617.000	-	18.413.677.000	-	80.501.940.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	5.757.231.000	-	62.236.999.000	67.994.230.000	-	5.757.231.000	-	62.236.999.000
356	Kota Palopo	-	9.008.187.000	-	-	9.008.187.000	-	9.008.187.000	-	-
357	Kab. Luwu Timur	-	-	-	103.003.087.000	103.003.087.000	-	-	-	103.003.087.000
358	Kab. Pinrang	-	10.730.536.000	-	61.981.628.000	72.712.164.000	-	10.730.536.000	-	61.713.746.000
359	Kab. Sinjai	-	13.192.300.000	-	63.693.673.000	76.885.973.000	-	13.192.300.000	-	63.693.673.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	-	2.950.221.000	-	71.045.205.000	73.995.426.000	-	2.950.221.000	-	71.045.205.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	-	8.505.823.000	-	58.720.589.000	67.226.412.000	-	8.505.823.000	-	58.720.589.000
362	Kab. Soppeng	-	11.070.217.000	-	43.250.089.000	54.320.306.000	-	11.070.217.000	-	43.250.089.000
363	Kab. Takalar	-	-	-	75.045.028.000	75.045.028.000	-	-	-	75.045.028.000
364	Kab. Tana Toraja	-	-	-	110.910.140.000	110.910.140.000	-	-	-	110.910.140.000
365	Kab. Wajo	-	6.062.576.000	-	113.241.776.000	119.304.352.000	-	6.062.576.000	-	113.241.774.500
366	Kota Parepare	-	20.713.617.000	-	-	20.713.617.000	-	20.713.617.000	-	-
367	Kota Makassar	-	18.033.979.000	-	-	18.033.979.000	-	18.033.979.000	-	-
368	Kab. Toraja Utara	-	-	-	119.966.904.000	119.966.904.000	-	-	-	119.966.904.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	36.466.405.000	-	-	36.466.405.000	-	36.466.405.000	-	-
370	Kab. Buton	-	5.580.336.000	-	63.130.728.000	68.711.064.000	-	5.580.336.000	-	63.130.728.000
371	Kab. Konawe	-	-	-	210.422.399.000	210.422.399.000	-	-	-	210.396.173.613
372	Kab. Kolaka	-	6.559.996.000	-	78.052.400.000	84.612.396.000	-	6.559.996.000	-	77.772.799.400
373	Kab. Muna	-	-	-	109.501.771.000	109.501.771.000	-	-	-	109.501.771.000
374	Kota Kendari	-	34.779.474.000	-	-	34.779.474.000	-	34.779.474.000	-	-
375	Kota Bau-bau	-	9.770.256.000	-	-	9.770.256.000	-	9.770.256.000	-	-
376	Kab. Konawe Selatan	-	8.958.877.000	-	244.642.361.000	253.601.238.000	-	8.958.877.000	-	244.642.361.000
377	Kab. Bombana	-	11.921.412.000	-	94.568.922.000	106.490.334.000	-	11.921.412.000	-	94.568.922.000
378	Kab. Wakatobi	-	5.305.638.000	-	57.831.057.000	63.136.695.000	-	5.305.638.000	-	57.831.057.000
379	Kab. Kolaka Utara	-	5.517.717.000	-	111.308.971.000	116.826.688.000	-	5.517.717.000	-	111.308.971.000
380	Kab. Konawe Utara	-	22.765.107.000	-	113.186.437.000	135.951.544.000	-	22.765.107.000	-	113.186.435.100
381	Kab. Buton Utara	-	3.272.918.000	-	56.747.632.000	60.020.550.000	-	3.272.918.000	-	56.747.632.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	-	2.836.050.000	-	64.973.384.000	67.809.434.000	-	2.836.050.000	-	64.973.384.000
383	Kab. Kolaka Timur	-	15.578.307.000	-	87.322.762.000	102.901.069.000	-	15.578.307.000	-	87.322.762.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
(1)	(2)	Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
384	Kab. Muna Barat	-	4.491.158.000	-	68.175.154.000	72.666.312.000	-	4.491.158.000	-	68.175.154.000	72.666.312.000
385	Kab. Buton Tengah	-	2.197.552.000	-	54.194.259.000	56.391.811.000	-	2.197.552.000	-	54.194.259.000	56.391.811.000
386	Kab. Buton Selatan	-	3.140.497.000	-	50.027.957.000	53.168.454.000	-	3.140.497.000	-	50.027.957.000	53.168.454.000
387	Provinsi Bali	-	50.359.663.000	-	-	50.359.663.000	-	50.359.663.000	-	-	50.359.663.000
388	Kab. Badung	-	77.293.268.000	-	47.501.659.000	124.794.927.000	-	77.293.268.000	-	47.501.659.000	124.794.927.000
389	Kab. Bangli	-	10.515.789.000	-	55.559.929.000	66.075.718.000	-	10.515.789.000	-	55.559.929.000	66.075.718.000
390	Kab. Buleleng	-	52.097.872.000	-	126.128.286.000	178.226.158.000	-	52.097.872.000	-	126.128.286.000	178.226.158.000
391	Kab. Gianyar	-	68.806.082.000	-	58.985.409.000	127.791.491.000	-	68.806.082.000	-	58.985.409.000	127.791.491.000
392	Kab. Jembrana	-	25.641.736.000	-	42.432.139.000	68.073.875.000	-	25.641.736.000	-	42.432.139.000	68.073.875.000
393	Kab. Karangasem	-	9.523.895.000	-	77.843.710.000	87.367.605.000	-	9.523.895.000	-	77.843.710.000	87.367.605.000
394	Kab. Klungkung	-	21.254.382.000	-	45.857.734.000	67.112.116.000	-	21.254.382.000	-	45.857.734.000	67.112.116.000
395	Kab. Tabanan	-	25.359.033.000	-	117.486.524.000	142.845.557.000	-	25.359.033.000	-	117.486.524.000	142.845.557.000
396	Kota Denpasar	-	59.597.507.000	-	28.925.497.000	88.523.004.000	-	59.597.507.000	-	28.925.497.000	88.523.004.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	39.164.046.000	-	-	39.164.046.000	-	39.164.046.000	-	-	39.164.046.000
398	Kab. Bima	-	5.986.471.000	-	185.155.477.000	191.141.948.000	-	5.986.471.000	-	185.155.477.000	191.141.948.000
399	Kab. Dompu	-	8.865.840.000	-	67.127.607.000	75.993.447.000	-	8.865.840.000	-	67.127.607.000	75.993.447.000
400	Kab. Lombok Barat	-	11.193.094.000	-	155.626.923.000	166.820.017.000	-	11.193.094.000	-	155.626.923.000	166.820.017.000
401	Kab. Lombok Tengah	-	9.347.274.000	-	202.340.026.000	211.687.300.000	-	9.347.274.000	-	202.340.026.000	211.687.300.000
402	Kab. Lombok Timur	-	25.550.653.000	-	309.982.432.000	335.533.085.000	-	25.550.653.000	-	309.695.219.000	335.245.872.000
403	Kab. Sumbawa	-	8.324.467.000	-	143.426.960.000	151.751.427.000	-	8.324.467.000	-	143.284.775.700	151.609.242.700
404	Kota Mataram	-	54.171.364.000	-	-	54.171.364.000	-	54.171.364.000	-	-	54.171.364.000
405	Kota Bima	-	39.108.685.000	-	-	39.108.685.000	-	39.108.685.000	-	-	39.108.685.000
406	Kab. Sumbawa Barat	-	7.632.850.000	-	51.401.741.000	59.034.591.000	-	7.632.850.000	-	50.939.336.400	58.572.186.400
407	Kab. Lombok Utara	-	4.501.872.000	-	79.436.622.000	83.938.494.000	-	4.501.872.000	-	79.436.622.000	83.938.494.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	13.956.241.000	-	-	13.956.241.000	-	13.956.241.000	-	-	13.956.241.000
409	Kab. Alor	-	2.399.639.000	-	151.437.299.000	153.836.938.000	-	2.399.639.000	-	151.437.299.000	153.836.938.000
410	Kab. Belu	-	-	-	76.180.697.000	76.180.697.000	-	-	-	75.681.074.352	75.681.074.352
411	Kab. Ende	-	3.106.574.000	-	192.874.597.000	195.981.171.000	-	3.106.574.000	-	191.120.590.206	194.227.164.206
412	Kab. Flores Timur	-	2.713.288.000	-	171.186.831.000	173.900.119.000	-	2.713.288.000	-	171.111.553.800	173.824.841.800
413	Kab. Kupang	-	4.100.298.000	-	152.722.637.000	156.822.935.000	-	4.100.298.000	-	152.722.637.000	156.822.935.000
414	Kab. Lembata	-	6.368.630.000	-	123.621.783.000	129.990.413.000	-	6.368.630.000	-	123.341.312.030	129.709.942.030
415	Kab. Manggarai	-	-	-	123.185.581.000	123.185.581.000	-	-	-	123.185.581.000	123.185.581.000
416	Kab. Ngada	-	8.488.263.000	-	104.621.456.000	113.109.719.000	-	8.488.263.000	-	104.618.864.598	113.107.127.598
417	Kab. Sikka	-	14.806.884.000	-	141.334.007.000	156.140.891.000	-	14.806.884.000	-	141.334.007.000	156.140.891.000
418	Kab. Sumba Barat	-	13.804.604.000	-	71.006.553.000	84.811.157.000	-	13.804.604.000	-	71.006.553.000	84.811.157.000
419	Kab. Sumba Timur	-	21.882.610.000	-	123.230.634.000	145.113.244.000	-	21.882.610.000	-	123.230.634.000	145.113.244.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	278.443.438.000	278.443.438.000	-	-	-	276.362.054.800	276.362.054.800
421	Kab. Timor Tengah Utara	-	4.091.410.000	-	153.166.740.000	157.258.150.000	-	4.091.410.000	-	152.413.243.319	156.504.653.319
422	Kota Kupang	-	2.604.965.000	-	-	2.604.965.000	-	2.604.965.000	-	-	2.604.965.000
423	Kab. Rote Ndao	-	4.837.632.000	-	98.578.052.000	103.415.684.000	-	4.837.632.000	-	98.578.052.000	103.415.684.000
424	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	145.840.976.000	145.840.976.000	-	-	-	145.840.976.000	145.840.976.000
425	Kab. Nagekeo	-	2.301.731.000	-	80.345.106.000	82.646.837.000	-	1.150.865.000	-	80.345.106.000	81.495.971.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	-	2.301.731.000	-	214.005.766.000	216.307.497.000	-	2.301.731.000	-	214.005.766.000	216.307.497.000
427	Kab. Sumba Tengah	-	2.399.568.000	-	62.754.365.000	65.153.933.000	-	2.399.568.000	-	62.754.365.000	65.153.933.000
428	Kab. Manggarai Timur	-	1.938.300.000	-	170.013.901.000	171.952.201.000	-	1.938.300.000	-	170.013.901.000	171.952.201.000
429	Kab. Sabu Raijua	-	-	-	61.458.836.000	61.458.836.000	-	-	-	60.882.277.028	60.882.277.028
430	Kab. Malaka	-	4.066.693.000	-	109.503.100.000	113.569.793.000	-	4.066.693.000	-	109.503.100.000	113.569.793.000
431	Provinsi Maluku	-	38.600.009.000	-	-	38.600.009.000	-	38.600.009.000	-	-	38.600.009.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	4.735.383.000	-	72.956.653.000	77.692.036.000	-	4.735.383.000	-	72.956.653.000	77.692.036.000
433	Kab. Maluku Tengah	-	-	-	167.711.614.000	167.711.614.000	-	-	-	165.903.956.579	165.903.956.579
434	Kab. Maluku Tenggara	-	5.805.126.000	-	137.506.510.000	143.311.636.000	-	5.805.126.000	-	137.506.510.000	143.311.636.000
435	Kab. Buru	-	6.117.845.000	-	70.624.112.000	76.741.957.000	-	6.117.845.000	-	70.370.141.734	76.487.986.734
436	Kota Ambon	-	11.661.999.000	-	27.209.754.000	38.871.753.000	-	11.661.999.000	-	27.209.754.000	38.871.753.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	-	1.938.300.000	-	90.038.325.000	91.976.625.000	-	1.938.300.000	-	89.500.398.905	91.438.698.905
438	Kab. Seram Bagian Timur	-	1.078.841.000	-	152.051.538.000	153.130.379.000	-	1.078.841.000	-	152.051.538.000	153.130.379.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa		Dana Otonomi Khusus	DID	Dana Keisimewaan DIY	Dana Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
439	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-	97.374.806.000	97.374.806.000	-	-	-	97.374.806.000	97.374.806.000
440	Kota Tual	-	36.230.030.000	-	23.536.303.000	59.766.333.000	-	36.230.030.000	-	22.590.203.200	58.820.233.200
441	Kab. Maluku Barat Daya	-	13.183.738.000	-	94.280.049.000	107.463.787.000	-	13.183.738.000	-	94.280.049.000	107.463.787.000
442	Kab. Buru Selatan	-	3.587.861.000	-	71.349.529.000	74.937.390.000	-	3.587.861.000	-	71.349.353.219	74.937.214.219
443	Provinsi Papua	3.792.655.366.000	11.485.688.000	-	-	3.804.141.054.000	3.792.655.366.000	11.485.688.000	-	-	3.804.141.054.000
444	Kab. Biak Numfor	125.528.776.000	-	-	193.396.005.000	318.924.781.000	125.528.776.000	-	-	193.396.005.000	318.924.781.000
445	Kab. Jayapura	121.659.785.000	-	-	116.274.852.000	237.934.637.000	121.659.785.000	-	-	116.274.852.000	237.934.637.000
446	Kab. Jayawijaya	186.185.014.000	-	-	263.614.354.000	449.799.368.000	186.185.014.000	-	-	263.614.354.000	449.799.368.000
447	Kab. Merauke	144.313.825.000	22.022.830.000	-	187.141.891.000	353.478.546.000	144.313.825.000	22.022.830.000	-	184.483.855.600	350.820.510.600
448	Kab. Mimika	140.375.334.000	11.448.929.000	-	132.370.115.000	284.194.378.000	140.375.334.000	-	-	132.370.115.000	284.194.378.000
449	Kab. Nabire	136.360.886.000	-	-	76.709.492.000	213.070.378.000	136.360.886.000	-	-	76.709.492.000	213.070.378.000
450	Kab. Paniai	164.893.965.000	1.186.863.000	-	190.041.859.000	356.122.687.000	164.893.965.000	1.186.863.000	-	190.041.859.000	356.122.687.000
451	Kab. Puncak Jaya	191.102.540.000	-	-	274.992.662.000	466.095.202.000	191.102.540.000	-	-	274.992.662.000	466.095.202.000
452	Kab. Kepulauan Yapen	137.208.918.000	4.224.190.000	-	128.095.323.000	269.528.431.000	137.208.918.000	4.224.190.000	-	128.018.060.600	269.451.168.600
453	Kota Jayapura	121.843.324.000	13.517.202.000	-	13.151.364.000	148.511.890.000	121.843.324.000	13.517.202.000	-	12.852.404.000	148.212.930.000
454	Kab. Sarmi	127.338.801.000	11.388.825.000	-	85.432.655.000	224.160.281.000	127.338.801.000	11.388.825.000	-	85.432.655.000	224.160.281.000
455	Kab. Keerom	120.308.706.000	6.700.292.000	-	81.796.213.000	208.805.211.000	120.308.706.000	6.700.292.000	-	81.592.956.200	208.601.954.200
456	Kab. Yahukimo	214.243.680.000	-	-	427.041.775.000	641.285.455.000	214.243.680.000	-	-	427.041.775.000	641.285.455.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	168.639.761.000	-	-	237.957.959.000	406.597.720.000	168.639.761.000	-	-	237.957.959.000	406.597.720.000
458	Kab. Tolikara	205.843.676.000	-	-	414.589.513.000	620.433.189.000	205.843.676.000	-	-	414.589.513.000	620.433.189.000
459	Kab. Boven Digoel	137.718.194.000	-	-	114.750.035.000	252.468.229.000	137.718.194.000	-	-	114.750.035.000	252.468.229.000
460	Kab. Mappi	153.511.592.000	-	-	174.379.441.000	327.891.033.000	153.511.592.000	-	-	174.379.441.000	327.891.033.000
461	Kab. Asmat	156.146.572.000	-	-	232.923.517.000	389.070.089.000	156.146.572.000	-	-	232.923.517.000	389.070.089.000
462	Kab. Waropen	117.122.101.000	4.634.040.000	-	84.495.208.000	206.251.349.000	117.122.101.000	2.317.020.000	-	84.495.208.000	203.934.329.000
463	Kab. Supiori	105.462.694.000	2.070.721.000	-	29.369.697.000	136.903.112.000	105.462.694.000	2.070.721.000	-	29.369.697.000	136.903.112.000
464	Kab. Mamberamo Raya	139.886.022.000	-	-	70.694.684.000	210.580.706.000	139.886.022.000	-	-	70.694.684.000	210.580.706.000
465	Kab. Mamberamo Tengah	136.864.395.000	-	-	54.293.768.000	191.158.163.000	136.864.395.000	-	-	54.293.768.000	191.158.163.000
466	Kab. Yalimo	152.837.130.000	-	-	222.973.148.000	375.810.278.000	152.837.130.000	-	-	222.973.148.000	375.810.278.000
467	Kab. Lanny Jaya	191.225.373.000	-	-	333.997.270.000	525.222.643.000	191.225.373.000	-	-	333.997.270.000	525.222.643.000
468	Kab. Nduga	166.252.485.000	-	-	206.758.951.000	373.011.436.000	166.252.485.000	-	-	206.758.951.000	373.011.436.000
469	Kab. Dogiyai	154.929.883.000	3.320.485.000	-	94.115.790.000	252.366.158.000	154.929.883.000	3.320.485.000	-	94.115.790.000	252.366.158.000
470	Kab. Puncak	178.842.209.000	-	-	179.806.592.000	358.648.801.000	178.842.209.000	-	-	179.806.592.000	358.648.801.000
471	Kab. Intan Jaya	154.935.644.000	-	-	104.172.965.000	259.108.609.000	154.935.644.000	-	-	104.172.965.000	259.108.609.000
472	Kab. Deiyai	143.358.312.000	1.186.863.000	-	71.670.323.000	216.215.498.000	143.358.312.000	1.186.863.000	-	71.670.323.000	216.215.498.000
473	Provinsi Maluku Utara	-	38.679.345.000	-	-	38.679.345.000	-	38.679.345.000	-	-	38.679.345.000
474	Kab. Halmahera Tengah	-	16.753.635.000	-	48.704.118.000	65.457.753.000	-	16.753.635.000	-	48.704.118.000	65.457.753.000
475	Kota Ternate	-	11.789.245.000	-	-	11.789.245.000	-	11.789.245.000	-	-	11.789.245.000
476	Kab. Halmahera Barat	-	5.325.868.000	-	123.967.278.000	129.293.146.000	-	5.325.868.000	-	123.967.278.000	129.293.146.000
477	Kab. Halmahera Timur	-	-	-	86.231.252.000	86.231.252.000	-	-	-	85.614.222.200	85.614.222.200
478	Kab. Halmahera Selatan	-	18.274.274.000	-	196.099.147.000	214.373.421.000	-	18.274.274.000	-	196.078.375.820	214.352.649.820
479	Kab. Halmahera Utara	-	-	-	143.862.664.000	143.862.664.000	-	-	-	143.654.906.000	143.654.906.000
480	Kab. Kepulauan Sula	-	3.703.887.000	-	64.152.995.000	67.856.882.000	-	3.703.887.000	-	63.395.034.032	67.098.921.032
481	Kota Tidore Kepulauan	-	48.608.169.000	-	36.823.386.000	85.431.555.000	-	48.608.169.000	-	36.823.386.000	85.431.555.000
482	Kab. Pulau Morotai	-	6.954.808.000	-	65.619.504.000	72.574.312.000	-	6.954.808.000	-	65.619.504.000	72.574.312.000
483	Kab. Pulau Taliabu	-	4.107.977.000	-	55.651.598.000	59.759.575.000	-	4.107.977.000	-	55.651.598.000	59.759.575.000
484	Provinsi Banten	-	46.276.463.000	-	-	46.276.463.000	-	46.276.463.000	-	-	46.276.463.000
485	Kab. Lebak	-	8.666.591.000	-	318.421.580.000	327.088.171.000	-	8.666.591.000	-	316.177.854.000	324.844.445.000
486	Kab. Pandeglang	-	10.324.189.000	-	293.752.641.000	304.076.830.000	-	10.324.189.000	-	293.752.641.000	304.076.830.000
487	Kab. Serang	-	13.915.556.000	-	298.378.779.000	312.294.335.000	-	13.915.556.000	-	298.378.779.000	312.294.335.000
488	Kab. Tangerang	-	-	-	315.980.612.000	315.980.612.000	-	-	-	315.901.807.430	315.901.807.430
489	Kota Cilegon	-	4.420.181.000	-	-	4.420.181.000	-	4.420.181.000	-	-	4.420.181.000
490	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	Kota Serang	-	20.663.526.000	-	-	20.663.526.000	-	20.663.526.000	-	-	20.663.526.000
492	Kota Tangerang Selatan	-	8.885.795.000	-	-	8.885.795.000	-	8.885.795.000	-	-	8.885.795.000
493	Provinsi Bangka Belitung	-	58.131.167.000	-	-	58.131.167.000	-	58.131.167.000	-	-	58.131.167.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2022
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa									
		Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				Jumlah Realisasi
(1)	(2)	Dana Otonomi Khusus (3)	DID (4)	Dana Keisimewaan DIY (5)	Dana Desa (6)		Dana Otonomi Khusus (8)	DID (9)	Dana Keisimewaan DIY (10)	Dana Desa (11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)
494	Kab. Bangka	-	14.987.147.000	-	55.387.935.000	70.375.082.000	-	14.987.147.000	-	55.387.935.000	70.375.082.000
495	Kab. Belitung	-	37.414.115.000	-	38.928.207.000	76.342.322.000	-	37.414.115.000	-	38.559.339.600	75.973.454.600
496	Kota Pangkal Pinang	-	29.979.805.000	-	-	29.979.805.000	-	29.979.805.000	-	-	29.979.805.000
497	Kab. Bangka Selatan	-	3.578.860.000	-	44.415.323.000	47.994.183.000	-	3.578.860.000	-	44.396.951.500	47.975.811.500
498	Kab. Bangka Tengah	-	13.039.693.000	-	46.977.021.000	60.016.714.000	-	13.039.693.000	-	46.977.021.000	60.016.714.000
499	Kab. Bangka Barat	-	6.374.370.000	-	52.346.309.000	58.720.679.000	-	6.374.370.000	-	52.346.309.000	58.720.679.000
500	Kab. Belitung Timur	-	1.841.413.000	-	36.364.806.000	38.206.219.000	-	1.841.413.000	-	36.364.806.000	38.206.219.000
501	Provinsi Gorontalo	-	70.650.356.000	-	-	70.650.356.000	-	70.650.356.000	-	-	70.650.356.000
502	Kab. Boalemo	-	5.202.254.000	-	77.793.342.000	82.995.596.000	-	5.202.254.000	-	77.389.355.733	82.591.609.733
503	Kab. Gorontalo	-	8.951.668.000	-	189.868.934.000	198.820.602.000	-	8.951.668.000	-	189.868.934.000	198.820.602.000
504	Kota Gorontalo	-	11.272.265.000	-	-	11.272.265.000	-	11.272.265.000	-	-	11.272.265.000
505	Kab. Pohuwato	-	43.213.353.000	-	78.013.443.000	121.226.796.000	-	43.213.353.000	-	77.884.916.368	121.098.269.368
506	Kab. Bone Bolango	-	21.998.435.000	-	125.575.874.000	147.574.309.000	-	21.998.435.000	-	125.575.874.000	147.574.309.000
507	Kab. Gorontalo Utara	-	1.272.014.000	-	91.880.726.000	93.152.740.000	-	1.272.014.000	-	91.880.726.000	93.152.740.000
508	Provinsi Kepulauan Riau	-	50.148.653.000	-	-	50.148.653.000	-	50.148.653.000	-	-	50.148.653.000
509	Kab. Natuna	-	3.893.265.000	-	50.958.282.000	54.851.547.000	-	3.893.265.000	-	50.958.282.000	54.851.547.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	-	6.072.979.000	-	37.197.871.000	43.270.850.000	-	6.072.979.000	-	36.854.656.500	42.927.635.500
511	Kab. Karimun	-	30.380.815.000	-	34.083.861.000	64.464.676.000	-	30.380.815.000	-	34.017.569.532	64.398.384.532
512	Kota Batam	-	25.781.460.000	-	-	25.781.460.000	-	25.781.460.000	-	-	25.781.460.000
513	Kota Tanjung Pinang	-	11.509.778.000	-	-	11.509.778.000	-	11.509.778.000	-	-	11.509.778.000
514	Kab. Lingga	-	9.689.382.000	-	58.564.558.000	68.253.940.000	-	9.689.382.000	-	58.018.826.114	67.708.208.114
515	Kab. Bintan	-	19.885.822.000	-	28.338.150.000	48.223.972.000	-	19.885.822.000	-	28.226.109.120	48.111.931.120
516	Provinsi Papua Barat	2.306.842.711.000	10.752.040.000	-	-	2.317.594.751.000	2.306.842.711.000	10.752.040.000	-	-	2.317.594.751.000
517	Kab. Fak Fak	192.081.185.000	-	-	118.544.617.000	310.625.802.000	192.081.185.000	-	-	118.544.617.000	310.625.802.000
518	Kab. Manokwari	206.800.593.000	32.159.472.000	-	126.604.417.000	365.564.482.000	206.800.593.000	32.159.472.000	-	125.963.534.000	364.923.599.000
519	Kab. Sorong	201.384.954.000	11.602.407.000	-	162.861.263.000	375.848.624.000	201.384.954.000	11.602.407.000	-	162.859.760.300	375.847.121.300
520	Kota Sorong	176.451.077.000	10.662.752.000	-	-	187.113.829.000	176.451.077.000	10.662.752.000	-	-	187.113.829.000
521	Kab. Raja Ampat	202.771.391.000	1.770.863.000	-	92.294.135.000	296.836.389.000	202.771.391.000	1.770.863.000	-	92.294.135.000	296.836.389.000
522	Kab. Sorong Selatan	171.711.084.000	-	-	95.019.649.000	266.730.733.000	171.711.084.000	-	-	94.739.766.200	266.450.850.200
523	Kab. Teluk Bintuni	201.268.727.000	-	-	98.703.298.000	299.972.025.000	201.268.727.000	-	-	98.703.298.000	299.972.025.000
524	Kab. Teluk Wondama	162.285.998.000	7.891.719.000	-	61.510.869.000	231.688.586.000	162.285.998.000	7.891.719.000	-	61.510.869.000	231.688.586.000
525	Kab. Kaimana	175.423.081.000	-	-	80.444.961.000	255.868.042.000	175.423.081.000	-	-	80.444.961.000	255.868.042.000
526	Kab. Maybrat	194.897.092.000	2.059.443.000	-	183.825.584.000	380.782.119.000	194.897.092.000	1.029.721.000	-	183.825.584.000	379.752.397.000
527	Kab. Tambrauw	189.018.028.000	-	-	162.902.580.000	351.920.608.000	189.018.028.000	-	-	162.902.580.000	351.920.608.000
528	Kab. Manokwari Selatan	124.331.906.000	1.261.042.000	-	49.405.589.000	174.998.537.000	124.331.906.000	1.261.042.000	-	49.405.589.000	174.998.537.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	183.400.780.000	-	-	131.656.542.000	315.057.322.000	183.400.780.000	-	-	131.656.542.000	315.057.322.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	-	42.863.133.000	-	-	42.863.133.000	-	42.863.133.000	-	-	42.863.133.000
531	Kab. Majene	-	2.301.731.000	-	55.584.815.000	57.886.546.000	-	2.301.731.000	-	55.584.815.000	57.886.546.000
532	Kab. Mamuju	-	20.428.056.000	-	75.697.160.000	96.125.216.000	-	20.428.056.000	-	75.523.424.200	95.951.480.200
533	Kab. Polewali Mandar	-	15.373.658.000	-	152.102.072.000	167.475.730.000	-	15.373.658.000	-	151.758.204.200	167.131.862.200
534	Kab. Mamasa	-	-	-	139.793.602.000	139.793.602.000	-	-	-	139.651.360.000	139.651.360.000
535	Kab. Pasangkayu	-	10.755.538.000	-	52.144.670.000	62.900.208.000	-	10.755.538.000	-	51.464.115.600	62.219.653.600
536	Kab. Mamuju Tengah	-	1.186.863.000	-	47.084.900.000	48.271.763.000	-	1.186.863.000	-	47.084.900.000	48.271.763.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	-	33.821.037.000	-	-	33.821.037.000	-	33.821.037.000	-	-	33.821.037.000
538	Kab. Bulungan	-	16.433.471.000	-	72.298.739.000	88.732.210.000	-	16.433.471.000	-	72.298.739.000	88.732.210.000
539	Kab. Malinau	-	8.126.663.000	-	113.793.572.000	121.920.235.000	-	8.126.663.000	-	113.793.572.000	121.920.235.000
540	Kab. Nunukan	-	2.126.013.000	-	175.644.678.000	177.770.691.000	-	2.126.013.000	-	175.362.103.200	177.488.116.200
541	Kota Tarakan	-	15.199.717.000	-	-	15.199.717.000	-	15.199.717.000	-	-	15.199.717.000
542	Kab. Tana Tidung	-	6.146.976.000	-	28.444.897.000	34.591.873.000	-	6.146.976.000	-	28.444.897.000	34.591.873.000
	Sisa Dana Tambahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	20.436.263.570.000	7.000.000.000.000	1.320.000.000.000	68.000.000.000.000	96.756.263.570.000	20.436.263.570.000	6.993.672.774.000	1.320.000.000.000	67.906.138.390.431	96.656.074.734.431

REKAP PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
Tahun 2022 AUDITED
 (dalam Rupiah)

KODE PROV	PROVINSI	JUMLAH DESA		DESA SALUR BLT		KPM PER BULAN	BLT	
		TOTAL DESA	SALUR BLT DESA	SUDAH SALUR	BELUM SALUR		PAGU 12 BULAN	SALUR
2	ACEH	6.497	6.493	6.492	1	477.580	1.719.288.000.000	1.718.799.300.000
3	BALI	636	636	636	-	69.863	251.506.800.000	251.506.800.000
4	BANTEN	1.238	1.237	1.237	-	138.702	499.327.200.000	499.327.200.000
5	BENGKULU	1.341	1.341	1.341	-	105.695	380.502.000.000	380.502.000.000
6	DI YOGYAKARTA	392	392	392	-	49.780	179.208.000.000	179.208.000.000
7	GORONTALO	657	657	657	-	60.889	219.200.400.000	219.200.400.000
8	JAMBI	1.399	1.399	1.399	-	126.778	456.400.800.000	456.400.800.000
9	JAWA BARAT	5.312	5.312	5.311	1	693.809	2.497.712.400.000	2.496.166.200.000
10	JAWA TENGAH	7.809	7.809	7.809	-	910.089	3.276.320.400.000	3.276.239.400.000
11	JAWA TIMUR	7.724	7.720	7.720	-	874.623	3.148.642.800.000	3.148.019.100.000
12	KALIMANTAN BARAT	2.031	2.031	2.030	1	199.369	717.728.400.000	716.947.200.000
13	KALIMANTAN SELATAN	1.864	1.863	1.863	-	159.714	574.970.400.000	574.970.400.000
14	KALIMANTAN TENGAH	1.432	1.432	1.432	-	121.114	436.010.400.000	436.010.400.000
15	KALIMANTAN TIMUR	841	841	841	-	72.838	262.216.800.000	262.216.800.000
16	KALIMANTAN UTARA	447	446	446	-	23.840	85.824.000.000	85.824.000.000
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	309	309	309	-	31.102	111.967.200.000	111.967.200.000
18	KEPULAUAN RIAU	275	275	275	-	23.582	84.895.200.000	84.895.200.000
19	LAMPUNG	2.435	2.435	2.435	-	258.731	931.431.600.000	931.150.800.000
20	MALUKU	1.198	1.198	1.198	-	103.356	372.081.600.000	371.657.700.000
21	MALUKU UTARA	1.063	1.063	1.063	-	81.888	294.796.800.000	294.796.800.000
22	NUSA TENGGARA BARAT	1.005	1.005	1.005	-	133.707	481.345.200.000	481.345.200.000
23	NUSA TENGGARA TIMUR	3.026	3.026	3.026	-	335.559	1.208.012.400.000	1.208.012.400.000
24	PAPUA	5.411	5.411	5.411	-	546.478	1.967.320.800.000	1.967.228.100.000
25	PAPUA BARAT	1.742	1.740	1.740	-	140.187	504.673.200.000	504.673.200.000
26	RIAU	1.591	1.591	1.591	-	149.273	537.382.800.000	537.382.800.000
28	SULAWESI BARAT	575	575	575	-	60.194	216.698.400.000	216.698.400.000
29	SULAWESI SELATAN	2.255	2.255	2.255	-	245.179	882.644.400.000	882.558.900.000
30	SULAWESI TENGAH	1.842	1.842	1.842	-	157.708	567.748.800.000	567.545.400.000
31	SULAWESI TENGGARA	1.908	1.908	1.908	-	159.602	574.567.200.000	574.567.200.000
32	SULAWESI UTARA	1.507	1.507	1.507	-	122.980	442.728.000.000	442.728.000.000
33	SUMATERA BARAT	928	928	928	-	99.263	357.346.800.000	357.346.800.000
34	SUMATERA SELATAN	2.853	2.852	2.851	1	290.444	1.045.598.400.000	1.045.148.400.000
35	SUMATERA UTARA	5.417	5.410	5.410	-	461.790	1.662.444.000.000	1.662.060.600.000
TOTAL		74.960	74.939	74.935	4	7.485.706	26.948.541.600.000	26.943.101.100.000

RINCIAN DOKUMEN SP SABA, DAN SPP BA BUN 999.08 TA 2022

Dok. 1 Januari 2022 s.d.

28 April 2022

REKAPITULASI DOKUMEN PER BAGIAN ANGGARAN

ribu rupiah

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	SP SABA	SPP	JUMLAH TOTAL	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
TOTAL	44.977.830.335	1.797.808.856	46.775.639.191	-	46.775.639.191
006 KEJAKSAAN	325.797.000	-	325.797.000	-	325.797.000
011 KEMENLU	4.815.930	-	4.815.930	-	4.815.930
012 KEMENHAN	1.805.334.000	-	1.805.334.000	-	1.805.334.000
015 KEMENKEU	306.274.647	-	306.274.647	-	306.274.647
022 KEMENHUB	569.428.584	-	569.428.584	-	569.428.584
023 KEMENDIKBUDRISTEK	6.623.158.568	-	6.623.158.568	-	6.623.158.568
024 KEMENKES	28.655.450.155	-	28.655.450.155	-	28.655.450.155
033 KEMEN PU & PERA	2.667.845.625	-	2.667.845.625	-	2.667.845.625
040 KEMENPAREK/BP&EK	228.541.500	-	228.541.500	-	228.541.500
059 KEMENKOMINFO	70.472.104	-	70.472.104	-	70.472.104
060 POLRI	1.393.769.972	-	1.393.769.972	-	1.393.769.972
065 BKPM	593.015.638	-	593.015.638	-	593.015.638
077 MK	5.846.364	-	5.846.364	-	5.846.364
103 BNPB	1.646.344.145	-	1.646.344.145	-	1.646.344.145
120 KEMENKO MARVES	81.736.103	-	81.736.103	-	81.736.103
999.07 BUN BEL. SUBSIDI	-	1.797.808.856	1.797.808.856	-	1.797.808.856

RINCIAN DOKUMEN SP SABA, DAN SPP BA BUN 999.08 TA 2022

Dok. 1 Januari 2022 s.d.

28 April 2022

Rincian

ribu rupiah

Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
					44.977.830.335	-	46.775.639.191
006 KEJAKSAAN					325.797.000	-	325.797.000
	24	S-78/MK.2/2022, tgl. 24/Mar/22	SABA KEJAKSAAN (BA 006) untuk Tambahan Anggaran Pembangunan Gedung Utama Kejaksaan RI	CKM	325.797.000	-	325.797.000
011 KEMENLU					4.815.930	-	4.815.930
	30	S-90/MK.2/2022, tgl. 10/Apr/22	SABA KEMENLU (BA 011) untuk Kegiatan GPDRR	CKM	4.815.930	-	4.815.930
012 KEMENHAN					1.805.334.000	-	1.805.334.000
	18	S-54/MK.2/2022, tgl. 01/Mar/22	SABA KEMENHAN (BA 012) untuk Anggaran Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan Tahun 2022	CBN	855.296.000	-	855.296.000
	23	S-73/MK.2/2022, tgl. 22/Mar/22	SABA KEMENHAN (BA 012) untuk Tambahan Anggaran Tim Vaksinasi TNI di Seluruh Indonesia TA 2022	CBN	300.000.000	-	300.000.000
	44	S-120/MK.2/2022, tgl. 27/Apr/22	SABA KEMENHAN (BA 012) untuk Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng TNI TA 2022	CBN	650.038.000	-	650.038.000
015 KEMENKEU					306.274.647	-	306.274.647
	10	S-2/MK.2/2022, tgl. 07/Jan/22	SABA KEMENKEU (BA 015) untuk Penyelenggaraan Presidensi G20 Finance Track Kementerian Keuangan TA 2022	CDKI	196.168.522	-	196.168.522
	40	S-106/MK.2/2022, tgl. 22/Apr/22	SABA KEMENKEU (BA 015) untuk Tambahan Anggaran DJPPR dan DJKN TA 2022	CKM	104.469.723	-	104.469.723
	41	S-116/MK.2/2022, tgl. 26/Apr/22	SABA KEMENKEU (BA 015) untuk tambahan Anggaran DJKN TA 2022	CKM	5.636.402	-	5.636.402
022 KEMENHUB					569.428.584	-	569.428.584

	16	S-52/MK.2/2022, tgl. 28/Feb/22	SABA KEMENHUB (BA 022) untuk Revitalisasi Bandar Udara Halim Perdana Kusuma	CKM	569.428.584	-	569.428.584
023 KEMENDIKBUDRISTEK					6.623.158.568	-	6.623.158.568
	12	S-33/MK.2/2022, tgl. 07/Feb/22	SABA KEMENDIKBUDRISTEK (BA 023) untuk Tambahan anggaran program-program prioritas TA 2022 tahap I	DIDIK	3.017.463.070	-	3.017.463.070
	19	S-62/MK.2/2022, tgl. 08/Mar/22	SABA KEMENDIKBUDRISTEK (BA 023) untuk Tambahan anggaran program-program prioritas TA 2022 tahap II	DIDIK	2.944.683.345	-	2.944.683.345
	31	S-91/MK.2/2022, tgl. 12/Apr/22	SABA KEMENDIKBUDRISTEK (BA 023) untuk Tambahan Anggaran Program-Program Prioritas TA 2022 Tahap III	DIDIK	204.500.000	-	204.500.000
	46	S-121/MK.2/2022, tgl. 27/Apr/22	SABA KEMENDIKBUD (BA 023) untuk Tambahan Anggaran Program-Program Prioritas TA 2022 Tahap IV	DIDIK	456.512.153	-	456.512.153
024 KEMENKES					28.655.450.155	-	28.655.450.155
	22	S-74/MK.2/2022, tgl. 22/Mar/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Tambahan Anggaran Klaim Perawatan Pasien Covid-19 dan Penguatan Pelayanan Kesehatan TA 2022	SEHAT	8.442.217.410	-	8.442.217.410

RINCIAN DOKUMEN SP SABA, DAN SPP BA BUN 999.08 TA 2022

Rincian

ribu rupiah

Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
	25	S-77/MK.2/2022, tgl. 24/Mar/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Tambahan Anggaran Penanganan Covid-19 pada Unit Ditjen Tenaga Kesehatan TA 2022 Tahap I	SEHAT	5.792.542.794	-	5.792.542.794
	28	S-86/MK.2/2022, tgl. 05/Apr/22	SABA KEMENKES (BA 024) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan TA 2022	SEHAT	199.091.643	-	199.091.643
	29	S-85/MK.2/2022, tgl. 05/Apr/22	SABA KEMENKES (BA 024) pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan TA 2022	SEHAT	208.979.975	-	208.979.975
	35	S-97/MK.2/2022, tgl. 18/Apr/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Tambahan Anggaran Pembayaran Tunggakan Klaim Perawatan Pasien Covid19 TA 2021 Tahap II	SEHAT	3.185.720.614	-	3.185.720.614
	37	S-99/MK.2/2022, tgl. 19/Apr/22	SABA KEMENKES (BA 024) pada Unit Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TA 2022	SEHAT	19.171.985	-	19.171.985
	42	S-117/MK.2/2022, tgl. 27/Apr/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Tambahan Anggaran Pembayaran Tunggakan Klaim Perawatan Pasien Covid-19 TA 2021 Tahap III	CBN	8.742.369.170	-	8.742.369.170
	43	S-118/MK.2/2022, tgl. 27/Apr/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Tambahan Anggaran Pembayaran Klaim Perawatan Pasien Covid-19 TA 2021 Tahap IV	CBN	2.065.356.564	-	2.065.356.564
033 KEMEN PU & PERA					2.667.845.625	-	2.667.845.625
	14	S-47/MK.2/2022, tgl. 24/Feb/22	SABA KEMENPUPR (BA 033) untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara internasional di Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NTB dan Provinsi NTT TA 2022	CBN	2.667.845.625	-	2.667.845.625
040 KEMENPAREK/BP&EK					228.541.500	-	228.541.500
	13	S-42/MK.2/2022, tgl. 16/Feb/22	SABA KEMENPAREKRAF (BA 040) untuk Pembayaran Event Fee World Superbike dan MotoGP TA 2022	CBN	228.541.500	-	228.541.500
059 KEMENKOMINFO					70.472.104	-	70.472.104
	45	S-122/MK.2/2022, tgl. 27/Apr/22	SABA KOMINFO (BA 059) untuk Dukungan Penyelenggaraan Presidensi G20 TA 2022	CDKI	70.472.104	-	70.472.104

Rincian

ribu rupiah

Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
060 POLRI					1.393.769.972	-	1.393.769.972
	17	S-53/MK.2/2022, tgl. 01/Mar/22	SABA POLRI (BA 060) untuk Tambahan Anggaran Bantuan Tunai kepada Pedagang Kaki Lima dan Pemilik Warung dan Nelayan (BT-PKLWN) TA 2022	CBN	854.765.562	-	854.765.562
	27	S-87/MK.2/2022, tgl. 05/Apr/22	SABA POLRI (BA 060) untuk Tambahan Anggaran Tim Vaksinasi Polri TA 2022	CBN	305.478.810	-	305.478.810
	32	S-92/MK.2/2022, tgl. 12/Apr/22	SABA POLRI (BA 060) untuk Pengadaan Mobil dan Motor Listrik Pengamanan KTT G-20	CKM	233.525.600	-	233.525.600
065 BKPM					593.015.638	-	593.015.638
	15	S-48/MK.2/2022, tgl. 26/Feb/22	SABA BKPM (BA 065) untuk Peningkatan Investasi dan Pemberian Nomor Induk Berusaha TA 2022	CBN	419.502.638	-	419.502.638
	38	S-103/MK.2/2022, tgl. 20/Apr/22	SABA BKPM (BA 065) untuk Eksekusi Realisasi Investasi, Peningkatan Investasi Baru, dan Satgas Percepatan Investasi TA 2022	CBN	173.513.000	-	173.513.000
077 MK					5.846.364	-	5.846.364
	39	S-101/MK.2/2022, tgl. 20/Apr/22	SABA MK (BA 077) untuk Penyelenggaraan Pertemuan Berskala Internasional The Congress of The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)	CKM	5.846.364	-	5.846.364
103 BNPB					1.646.344.145	-	1.646.344.145
	20	S-64/MK.2/2022, tgl. 12/Mar/22	SABA BNPB (BA 103) untuk Tambahan Anggaran Penanganan Covid-19 TA 2022	CBN	1.369.035.796	-	1.369.035.796
	21	S-71/MK.2/2022, tgl. 18/Mar/22	SABA BNPB (BA 103) untuk Tambahan Anggaran Kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) TA 2022	CKM	85.080.145	-	85.080.145
	26	S-82/MK.2/2022, tgl. 01/Apr/22	SABA BNPB (BA 103) untuk Tambahan Anggaran Kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) TA 2022 Tahap 2	CKM	113.901.250	-	113.901.250
	36	S-98/MK.2/2022, tgl. 18/Apr/22	SABA BNPB (BA 103) untuk Operasional Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Semester I TA 2022	CBN	78.326.954	-	78.326.954

Rincian								ribu rupiah
Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)	
120 KEMENKO MARVES					81.736.103	-	81.736.103	
	34	S-94/MK.2/2022, tgl. 14/Apr/22	SABA KEMENKOMARVES (BA 120) untuk Percepatan Penuntasan Isu Strategis TA 2022	CDKI	14.499.185	-	14.499.185	
	34			CKM	58.361.557	-	58.361.557	
	34			GAJI	276.117	-	276.117	
	34			HONOR	8.599.244	-	8.599.244	
999.07 BUN BEL. SUBSIDI					-	-	1.797.808.856	
	11	S-9/MK.2/2022, tgl. 24/Jan/22	SPP BA BUN SUBSIDI (BA 999.07) untuk Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program PEN TA 2022	CSIJP	-	-	1.797.808.856	

RINCIAN DOKUMEN SP SABA, DAN SPP BA BUN 999.08 TA 2022

Dok. 1 Mei 2022 s.d.
31 Desember 2022REKAPITULASI DOKUMEN PER BAGIAN
ANGGARAN

ribu rupiah

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	SP SABA	SPP	JUMLAH TOTAL	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
TOTAL	71.921.482.423	6.217.236.996	78.138.719.419	5.450.302.368	72.688.417.051
001 MPR	102.506.740	-	102.506.740	-	102.506.740
004 BPK	262.706.353	-	262.706.353	-	262.706.353
006 KEJAKSAAN	315.757.661	-	315.757.661	-	315.757.661
007 SETNEG	1.693.179.265	-	1.693.179.265	-	1.693.179.265
010 KEMENDAGRI	54.916.834	-	54.916.834	-	54.916.834
012 KEMENHAN	1.614.597.189	-	1.614.597.189	-	1.614.597.189
015 KEMENKEU	1.221.953.813	-	1.221.953.813	-	1.221.953.813
018 KEMENTAN	3.661.320.984	-	3.661.320.984	1.026.040.395	2.635.280.589
023 KEMENDIKBUDRISTEK	2.303.579.000	-	2.303.579.000	725.136.267	1.578.442.733
024 KEMENKES	11.031.367.984	-	11.031.367.984	2.527.184.097	8.504.183.887
025 KEMENAG	1.415.803.977	-	1.415.803.977	-	1.415.803.977
026 KEMENAKER	8.804.969.750	-	8.804.969.750	1.039.092.261	7.765.877.489
027 KEMENSOS	19.592.206.927	-	19.592.206.927	-	19.592.206.927
029 KEMEN LHK	73.813.273	-	73.813.273	-	73.813.273
033 KEMEN PU & PERA	6.790.563.138	-	6.790.563.138	-	6.790.563.138
050 BIN	987.598.860	-	987.598.860	-	987.598.860
054 BPS	3.308.492.468	-	3.308.492.468	-	3.308.492.468
060 POLRI	1.212.770.328	-	1.212.770.328	132.849.348	1.079.920.980
068 BKKBN	185.620.000	-	185.620.000	-	185.620.000
076 KPU	1.076.713.481	-	1.076.713.481	-	1.076.713.481
077 MK	40.794.635	-	40.794.635	-	40.794.635
078 PPATK	2.946.379	-	2.946.379	-	2.946.379
088 BKN	73.900.629	-	73.900.629	-	73.900.629
089 BPKP	151.190.526	-	151.190.526	-	151.190.526
092 KEMENPORA	1.364.758.506	-	1.364.758.506	-	1.364.758.506
095 DPD	93.341.236	-	93.341.236	-	93.341.236
103 BNPB	2.701.155.834	-	2.701.155.834	-	2.701.155.834
104 BP2MI	55.418.610	-	55.418.610	-	55.418.610
115 BAWASLU	958.064.175	-	958.064.175	-	958.064.175
119 BAKAMLA	349.242.132	-	349.242.132	-	349.242.132
120 KEMENKO MARVES	4.699.840	-	4.699.840	-	4.699.840
122 B P I P	11.236.974	-	11.236.974	-	11.236.974
123 L P S K	11.877.717	-	11.877.717	-	11.877.717
124 B R I N	392.417.205	-	392.417.205	-	392.417.205
999.02 BUN HIBAH	-	577.395.792	577.395.792	-	577.395.792
999.07 BUN BEL. SUBSIDI	-	5.632.266.845	5.632.266.845	-	5.632.266.845
999.99 BUN TRAKSUS	-	7.574.359	7.574.359	-	7.574.359

RINCIAN DOKUMEN SP SABA, DAN SPP BA BUN 999.08 TA 2022

Dok. tmt 1 Mei 2022 s.d.
31 Desember 2022
Rincian

ribu rupiah

Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
					71.921.482.423	5.450.302.368	72.688.417.051
001 MPR					102.506.740	-	102.506.740
	47	S-128/MK.2/2022, tgl. 10/May/22	SABA MPR (BA 001) untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas MPR RI TA 2022	CKM	102.506.740	-	102.506.740
004 BPK					262.706.353	-	262.706.353
	72	S-193/MK.2/2022, tgl. 29/Jun/22	SABA BPK (BA 004)	CKM	78.907.642	-	78.907.642
	72			GAJI	70.313.192	-	70.313.192
	72			HONOR	113.485.519	-	113.485.519
006 KEJAKSAAN					315.757.661	-	315.757.661
	89	S-242/MK.2/2022, tgl. 02/Aug/22	SABA KEJAKSAAN (BA 006) untuk Tambahan Anggaran Kejaksaan RI TA 2022	CKM	315.757.661	-	315.757.661
007 SETNEG					1.693.179.265	-	1.693.179.265
	58	S-144/MK.2/2022, tgl. 25/May/22	SABA KEMENSETNEG (BA 007) untuk Tambahan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara RI TA 2022	CDKI	402.811.221	-	402.811.221
	58			CKM	246.478.565	-	246.478.565
	71	S-192/MK.2/2022, tgl. 28/Jun/22	SABA KEMENSETNEG (BA 007) untuk Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pelaksanaan Tugas Tim Transisi Pemindahan IKN	CKM	232.578.919	-	232.578.919
	90	S-248/MK.2/2022, tgl. 04/Aug/22	SABA KEMENSETNEG (BA 007) untuk Dukungan Pelaksanaan Tugas Tim Transisi Pemindahan IKN - Tahap II	CKM	15.991.832	-	15.991.832
	98	S-259/MK.2/2022, tgl. 10/Aug/22	SABA KEMENSETNEG (BA 007) untuk Pendukung Kunjungan VVIP TA 2022	CKM	76.412.468	-	76.412.468
	122	S-369/MK.2/2022, tgl. 22/Sep/22	SABA KEMENSETNEG (BA 007) untuk Penyediaan Rumah Kediaman bagi Mantan Wakil Presiden Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2022	CKM	172.984.931	-	172.984.931
	139	S-412/MK.2/2022, tgl. 20/Oct/22	SABA Kemensetneg (BA 007) untuk Pemeliharaan Pesawat Kepresidenan, Bantuan Pemerintah ke AIPI dan Kunjungan Presiden Ke Luar Negeri	CKM	406.214.284	-	406.214.284
	149	S-481/MK.2/2022, tgl. 10/Nov/22	SABA KEMENSETNEG (BA 007) untuk Penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan/Pimpinan Organisasi Internasional pada Penyelenggaraan KTT G20	CDKI	111.921.898	-	111.921.898

Dok. tmt 1 Mei 2022 s.d.
31 Desember 2022
Rincian

ribu rupiah

Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
	161	S-567/MK.2/2022, tgl. 19/Dec/22	SABA KEMENSETNEG (BA 007) untuk Dukungan Kunjungan Wapres ke Luar Negeri TA 2022	CKM	27.785.147	-	27.785.147
010 KEMENDAGRI					54.916.834	-	54.916.834
	87	S-237/MK.2/2022, tgl. 29/Jul/22	SABA KEMENDAGRI (BA 010) untuk Tambahan Anggaran Kemendagri TA 2022	CKM	23.185.891	-	23.185.891
	148	S-476/MK.2/2022, tgl. 10/Nov/22	SABA KEMENDAGRI (BA 010) untuk Tambahan Anggaran Prioritas Ditjen Dukcapil Tahun 2022	CKM	31.730.943	-	31.730.943
012 KEMENHAN					1.614.597.189	-	1.614.597.189
	83	S-232/MK.2/2022, tgl. 27/Jul/22	SABA KEMENHAN (BA 012) untuk Pengadaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB)	CKM	278.245.486	-	278.245.486
	107	S-289/MK.2/2022, tgl. 24/Aug/22	SABA KEMENHAN (BA 012) untuk Tambahan Anggaran Prioritas dan Mendesak TA 2022	DIDIK	498.197.034	-	498.197.034
	107			SEHAT	838.154.669	-	838.154.669
015 KEMENKEU					1.221.953.813	-	1.221.953.813
	57	S-145/MK.2/2022, tgl. 25/May/22	SABA KEMENKEU (BA 015) untuk Pendanaan Satker Komite Investasi Pemerintah (KIP) TA 2022	CKM	8.597.435	-	8.597.435
	69	S-185/MK.2/2022, tgl. 24/Jun/22	SABA KEMENKEU (BA 015) untuk Pemberian Premi Tahap I di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai TA 2022	CKM	138.504.231	-	138.504.231
	77	S-213/MK.2/2022, tgl. 13/Jul/22	SABA KEMENKEU (BA 015) (BA 015) untuk Kegiatan Pengawasan oleh Itjen	CKM	2.059.578	-	2.059.578
	153	S-500/MK.2/2022, tgl. 18/Nov/22	SABA KEMENKEU (BA 015) untuk Pemberian Premi Tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai TA 2022	CKM	118.061.708	-	118.061.708

RINCIAN DOKUMEN SP SABA, DAN SPP BA BUN 999.08 TA 2022

Rincian

ribu rupiah

Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	SPP	JUMLAH TOTAL	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
	158	S-550/MK.2/2022, tgl. 10/Dec/22	SABA KEMENKEU (BA 015) untuk Pemberian Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai TA 2021	CKM	377.102.406,0	-	377.102.406,0	-	377.102.406,0
	164	S-569/MK.2/2022, tgl. 20/Dec/22	SABA KEMENKEU (BA 015) untuk Pemberian Insentif atas Kinerja Direktorat Jenderal Pajak TA 2022	CKM	577.628.455,0	-	577.628.455,0	-	577.628.455,0
018 KEMANTAN					3.661.320.984,0	-	3.661.320.984,0	1.026.040.395,0	2.635.280.589,0
	66	S-165/MK.2/2022, tgl. 12/Jun/22	SABA KEMANTAN (BA 018) untuk Pembayaran Pelepasan Cadangan Beras Pemerintah Turun Mutu	CSHP	185.809.449,0	-	185.809.449,0	-	185.809.449,0
	70	S-186/MK.2/2022, tgl. 24/Jun/22	SABA KEMANTAN (BA 018) untuk Pengembangan Kedelai TA 2022	CKM	386.650.000,0	-	386.650.000,0	-	386.650.000,0
	76	S-204/MK.2/2022, tgl. 07/Jul/22	SABA KEMANTAN (BA 018) untuk Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku	CBN	3.088.861.535,0	-	3.088.861.535,0	-	3.088.861.535,0
	157	S-542/MK.2/2022, tgl. 08/Dec/22	Revisi Pengembalian SABA Kementan (BA 018) untuk SP SABA Nomor S-204/MK.2/2022	CBN	-	-	-	779.448.297,0	779.448.297,0
	160	S-565/MK.2/2022, tgl. 19/Dec/22	Revisi Pengembalian SABA Kementan (BA 018) untuk SP SABA Nomor S-186/MK.2/2022	CKM	-	-	-	246.592.098,0	246.592.098,0
023 KEMENDIKBUDRISTEK					2.303.579.000,0	-	2.303.579.000,0	725.136.267,0	1.578.442.733,0
	82	S-231/MK.2/2022, tgl. 27/Jul/22	SABA KEMENDIKBUD (BA 023) untuk Tambahan Anggaran Program-Program Prioritas TA 2022 Tahap V	CBN	651.559.000,0	-	651.559.000,0	-	651.559.000,0
	108	S-414/AG/AG.5/2022, tgl. 30/Aug/22	Ralat Pembebanan koreksi minus pada POS Cad. Belanja Negara atas SP SABA No.S-231/MK.2/2022 Tgl.27 Juli 2022 yaitu SABA KEMENDIKBUD (BA 023) untuk Tambahan Anggaran Program-Program Prioritas TA 2022 Tahap V	CBN	-	-	651.559.000,0	-	651.559.000,0
	108		Ralat Pembebanan menjadi pada POS Cad. Anggaran Pendidikan atas SP SABA No.S-231/MK.2/2022 Tgl.27 Juli 2022 yaitu SABA KEMENDIKBUD (BA 023) untuk Tambahan Anggaran Program-Program Prioritas TA 2022 Tahap V	DIDIK	651.559.000,0	-	651.559.000,0	-	651.559.000,0
	113	S-329/MK.2/2022, tgl. 07/Sep/22	SABA KEMENDIKBUD (BA 023) untuk Pengadaan Peralatan TIK TA 2022	DIDIK	1.652.020.000,0	-	1.652.020.000,0	-	1.652.020.000,0
	166	S-575/MK.2/2022, tgl. 22/Dec/22	Revisi Pengembalian SABA Kemendikbud (BA 023) untuk SP SABA Nomor S-33/MK.2/2022, S- 62/MK.2/2022, S-91/MK.2/2022, S-121/MK.2/2022, S-329/MK.2/2022	DIDIK	-	-	-	725.136.267,0	725.136.267,0
024 KEMENKES					11.031.367.984,0	-	11.031.367.984,0	2.527.184.097,0	8.504.183.887,0
	49	S-129/MK.2/2022, tgl. 12/May/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Tambahan Anggaran Tunggalan Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan TA 2021 Tahap II	SEHAT	22.075.529,0	-	22.075.529,0	-	22.075.529,0
	50	S-132/MK.2/2022, tgl. 13/May/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Tambahan Anggaran Pembayaran Tunggalan Klaim Perawatan Pasien Covid-19 TA 2021 Tahap V	CBN	1.434.660.513,0	-	1.434.660.513,0	-	1.434.660.513,0
	51	S-133/MK.2/2022, tgl. 13/May/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Tambahan Anggaran Tunggalan Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2021 Tahap III Kementerian Kesehatan TA 2022	SEHAT	98.541.257,0	-	98.541.257,0	-	98.541.257,0
	53	S-136/MK.2/2022, tgl. 18/May/22	SABA KEMENKES BA (024) untuk Tambahan Anggaran Pembayaran Klaim Perawatan Pasien Covid-19 TA 2021 Tahap VI	CBN	2.064.354.942,0	-	2.064.354.942,0	-	2.064.354.942,0

Rincian									ribu rupiah
Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	SPP	JUMLAH TOTAL	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
	55	S-139/MK.2/2022, tgl. 23/May/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Pembayaran Klaim Perawatan Pasien Covid-19 TA 2021 Tahap VII	CBN	2.026.029.058,0	-	2.026.029.058,0	-	2.026.029.058,0
	61	S-150/MK.2/2022, tgl. 01/Jun/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Pembayaran Tunggakan Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan TA 2021 Tahap IV	SEHAT	34.260.358,0	-	34.260.358,0	-	34.260.358,0
	62	S-157/MK.2/2022, tgl. 08/Jun/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Anggaran Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP) dan Bukan Pekerja (BP) dengan Manfaat Pelayanan di Kelas III Tahun 2022	IJKN	2.400.000.000,0	-	2.400.000.000,0	-	2.400.000.000,0

RINCIAN DOKUMEN SP SABA, DAN SPP BA BUN 999.08 TA 2022

Rincian

ribu rupiah

Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	SPP	JUMLAH TOTAL	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
	74	S-195/MK.2/2022, tgl. 02/Jul/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Pembayaran Klaim Perawatan Pasien Covid-19 TA 2021 Tahap VIII	CBN	1.180.389.237	-	1.180.389.237	-	1.180.389.237
	75	S-203/MK.2/2022, tgl. 06/Jul/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19 TA 2021 Tahap IX	CBN	1.298.259.145	-	1.298.259.145	-	1.298.259.145
	103	S-270/MK.2/2022, tgl. 17/Aug/22	SABA KEMENKES (BA 024) untuk Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Penguatan Jejaring Rujukan	SEHAT	472.797.945	-	472.797.945	-	472.797.945
	151	S-495/MK.2/2022, tgl. 17/Nov/22	Revisi Pengembalian SABA Kemenkes (BA 024) untuk 3 SP-SABA (S-77, S-86 dan S-99)	CBN	-	-	-	2.527.184.097	2.527.184.097
025 KEMENAG					1.415.803.977	-	1.415.803.977	-	1.415.803.977
	60	S-149/MK.2/2022, tgl. 30/May/22	SABA KEMENAG (BA 025) dalam rangka tambahan anggaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2022	CKM	124.570.616	-	124.570.616	-	124.570.616
	78	S-223/MK.2/2022, tgl. 21/Jul/22	SABA KEMENAG (BA 025) untuk Pembiayaan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dalam Rangka PEN	CBN	74.612.000	-	74.612.000	-	74.612.000
	169	S-584/MK.2/2022, tgl. 29/Dec/22	SABA KEMENAG (BA 025) untuk Tambahan Anggaran Belanja Pegawai ta 2022	GAJI	1.216.621.361	-	1.216.621.361	-	1.216.621.361
026 KEMENAKER					8.804.969.750	-	8.804.969.750	1.039.092.261	7.765.877.489
	114	S-331/MK.2/2022, tgl. 08/Sep/22	SABA KEMENAKER (BA 026) untuk Program Bantuan Subsidi Upah TA 2022	CBN	8.804.969.750	-	8.804.969.750	-	8.804.969.750
	152	S-496/MK.2/2022, tgl. 17/Nov/22	Revisi Pengembalian SABA Kemenaker (BA 026) untuk SP SABA Nomor S-331/MK.2/2022	CBN	-	-	-	1.039.092.261	1.039.092.261
027 KEMENSOS					19.592.206.927	-	19.592.206.927	-	19.592.206.927
	109	S-309/MK.2/2022, tgl. 04/Sep/22	SABA KEMENSOS (BA 027) untuk Tambahan Anggaran Bansos Kartu Sembako Tahun 2022	CBN	6.016.411.800	-	6.016.411.800	-	6.016.411.800
	115	S-333/MK.2/2022, tgl. 09/Sep/22	SABA KEMENSOS (BA 027) untuk Asistensi Rehabilitasi Sosial TA 2022	CBN	493.188.884	-	493.188.884	-	493.188.884
	116	S-332/MK.2/2022, tgl. 09/Sep/22	SABA KEMENSOS (BA 027) untuk Tambahan Anggaran Bansos BLT BBM dan Biaya Distribusi Tahun 2022	CBN	12.962.005.000	-	12.962.005.000	-	12.962.005.000
	146	S-466/MK.2/2022, tgl. 04/Nov/22	SABA KEMENSOS (BA 027) untuk Tambahan Anggaran Penanganan Bencana TA 2022	CPB	120.601.243	-	120.601.243	-	120.601.243
029 KEMEN LHK					73.813.273	-	73.813.273	-	73.813.273
	84	S-233/MK.2/2022, tgl. 27/Jul/22	SABA KLHK (BA 029) untuk kegiatan Rehabilitasi Mangrove	CKM	73.813.273	-	73.813.273	-	73.813.273
033 KEMEN PU & PERA					6.790.563.138	-	6.790.563.138	-	6.790.563.138
	81	S-226/MK.2/2022, tgl. 25/Jul/22	SABA KEMENPUPR (BA 033) untuk Penanganan Dampak Bencana di Provinsi Jawa Timur, Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Banten TA 2022	CPB	513.516.269	-	513.516.269	-	513.516.269
	97	S-261/MK.2/2022, tgl. 10/Aug/22	SABA KEMENPUPR (BA 033) untuk Tambahan Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara TA 2022	CBN	828.748.071	-	828.748.071	-	828.748.071
	100	S-265/MK.2/2022, tgl. 13/Aug/22	SABA KEMENPUPR (BA 033) untuk Penanganan Dampak Bencana Badai Siklon Tropis Seroja di Provinsi NTT	CPB	193.827.291	-	193.827.291	-	193.827.291
	104	S-272/MK.2/2022, tgl. 17/Aug/22	SABA KEMENPUPR (BA 033) untuk Tambahan Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara TA 2022 II	CBN	4.268.578.206	-	4.268.578.206	-	4.268.578.206

Rincian

ribu rupiah

Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	SPP	JUMLAH TOTAL	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
	112	S-316/MK.2/2022, tgl. 06/Sep/22	SABA KEMENPUPR (BA 033) untuk Penanganan Dampak Bencana di Provinsi Jawa Timur, Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Banten TA 2022 Tahap III	CPB	279.988.318	-	279.988.318	-	279.988.318
	118	S-342/MK.2/2022, tgl. 14/Sep/22	SABA KEMENPUPR (BA 033) untuk Penanganan Dampak Bencana di Provinsi Jawa Timur, Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Banten TA 2022 Tahap IV	CPB	358.876.300	-	358.876.300	-	358.876.300
	141	S-416/MK.2/2022, tgl. 20/Oct/22	SABA KEMENPUPR (BA 033) untuk Penanganan Dampak Bencana di Provinsi Jawa Timur, Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Banten TA 2022 Tahap V	CPB	186.319.758	-	186.319.758	-	186.319.758
	162	S-566/MK.2/2022, tgl. 19/Dec/22	SABA KEMENPUPR (BA 033) untuk Penanganan Dampak Bencana di Provinsi Jawa Timur, Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Banten TA 2022 Tahap VI	CPB	160.708.925	-	160.708.925	-	160.708.925
050 BIN					987.598.860	-	987.598.860	-	987.598.860
	54	S-137/MK.2/2022, tgl. 18/May/22	SABA BIN (BA 050) untuk Kegiatan Vaksinasi TA 2022	CBN	187.240.985	-	187.240.985	-	187.240.985
	88	S-238/MK.2/2022, tgl. 29/Jul/22	SABA BIN (BA 050) untuk Operasi Intelijen TA 2022	CKM	800.357.875	-	800.357.875	-	800.357.875
054 BPS					3.308.492.468	-	3.308.492.468	-	3.308.492.468
	102	S-274/MK.2/2022, tgl. 17/Aug/22	SABA BPS (BA 054) untuk Tambahan Anggaran Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi TA 2022	CBN	3.308.492.468	-	3.308.492.468	-	3.308.492.468
060 POLRI					1.212.770.328	-	1.212.770.328	132.849.348	1.079.920.980
	67	S-168/MK.2/2022, tgl. 14/Jun/22	SABA POLRI (BA 060) untuk Tambahan Anggaran Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng TA 2022	CBN	132.849.348	-	132.849.348	-	132.849.348
	110	S-321/MK.2/2022, tgl. 06/Sep/22	SABA POLRI (BA 060) untuk Tambahan Anggaran Mendesak Polri TA 2022	CKM	1.079.920.980	-	1.079.920.980	-	1.079.920.980
	170	S-585/MK.2/2022, tgl. 29/Dec/22	Pembatalan SABA 999.08 Nomor S-168/MK.2/2022 tanggal 14 Juni 2022 (SP SABA bagi Polri BA 060)	CBN	-	-	-	132.849.348	132.849.348
068 BKKBN					185.620.000	-	185.620.000	-	185.620.000
	96	S-256/MK.2/2022, tgl. 09/Aug/22	SABA BKKBN (BA 068) untuk Tambahan Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia TA 2022	CBN	185.620.000	-	185.620.000	-	185.620.000
076 KPU					1.076.713.481	-	1.076.713.481	-	1.076.713.481
	91	S-249/MK.2/2022, tgl. 05/Aug/22	SABA KPU (BA 076) untuk Tambahan Anggaran Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024	CKM	830.623.031	-	830.623.031	-	830.623.031
	105	S-277/MK.2/2022, tgl. 22/Aug/22	SABA KPU (BA 076) untuk Tambahan Anggaran Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024	CKM	246.090.450	-	246.090.450	-	246.090.450
077 MK					40.794.635	-	40.794.635	-	40.794.635
	101	S-271/MK.2/2022, tgl. 17/Aug/22	SABA MK (BA 077) untuk Kekurangan Penyelenggaraan Kegiatan Kongres WCCJ dan Penanganan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	CKM	40.794.635	-	40.794.635	-	40.794.635
078 PPATK					2.946.379	-	2.946.379	-	2.946.379
	124	S-376/MK.2/2022, tgl. 27/Sep/22	SABA PPATK (BA 078) untuk Tambahan Belanja Pegawai PPATK TA 2022	GAJI	1.949.211	-	1.949.211	-	1.949.211

Rincian

ribu rupiah

Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	SPP	JUMLAH TOTAL	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
	124			HONOR	997.168	-	997.168	-	997.168
088 BKN					73.900.629	-	73.900.629	-	73.900.629
	144	S-453/MK.2/2022, tgl. 31/Oct/22	SABA BKN (BA 088) untuk Kebutuhan Anggaran Seleksi Calon PPPK Formasi Tahun 2022 dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana TA 2022	CKM	73.900.629	-	73.900.629	-	73.900.629
089 BPKP					151.190.526	-	151.190.526	-	151.190.526
	86	S-236/MK.2/2022, tgl. 28/Jul/22	SABA BPKP (BA 089) untuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan di Tingkat Nasional dan Daerah	CKM	151.190.526	-	151.190.526	-	151.190.526
092 KEMENPORA					1.364.758.506	-	1.364.758.506	-	1.364.758.506
	48	S-127/MK.2/2022, tgl. 10/May/22	SABA KEMENPORA (BA 092) untuk Tambahan Anggaran Tahap II atas Penyelenggaraan PON XX dan Peparas XVI Papua Tahun 2021	CKM	527.941.606	-	527.941.606	-	527.941.606
	68	S-181/MK.2/2022, tgl. 21/Jun/22	SABA KEMENPORA (BA 092) dalam rangka Pemberian Penghargaan Olahraga Peraih Medali 31st SEA Games 2021 Vietnam	CKM	201.780.000	-	201.780.000	-	201.780.000
	80	S-228/MK.2/2022, tgl. 25/Jul/22	SABA KEMENPORA (BA 092) tahap I dalam rangka Penyelenggaraan 11th ASEAN Para Games TA 2022	CKM	316.365.760	-	316.365.760	-	316.365.760
	94	S-252/MK.2/2022, tgl. 08/Aug/22	SABA KEMENPORA (BA 092) Tahap II dalam rangka Penyelenggaraan 11th ASEAN Paragames TA 2022	CKM	45.586.140	-	45.586.140	-	45.586.140
	121	S-364/MK.2/2022, tgl. 21/Sep/22	SABA KEMENPORA (BA 092) untuk Pemberian Penghargaan Olahraga Peraih Medali pada ASEAN Para Games XI Tahun 2022	CKM	273.085.000	-	273.085.000	-	273.085.000
095 DPD					93.341.236	-	93.341.236	-	93.341.236
	85	S-235/MK.2/2022, tgl. 28/Jul/22	SABA DPD (BA 095) untuk Tambahan Anggaran DPD RI TA 2022	CKM	93.341.236	-	93.341.236	-	93.341.236

RINCIAN DOKUMEN SP SABA, DAN SPP BA BUN 999.08 TA 2022

Rincian

ribu rupiah

Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	SPP	JUMLAH TOTAL	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
103 BNPB					2.701.155.834	-	2.701.155.834	-	2.701.155.834
	79	S-222/MK.2/2022, tgl. 21/Jul/22	SABA BNPB (BA 103) untuk Tambahan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Penyakit Mulut dan Kuku TA 2022	CBN	315.741.664	-	315.741.664	-	315.741.664
	125	S-388/MK.2/2022, tgl. 09/Oct/22	SABA BNPB (BA 103) untuk pembayaran tunggakan penanganan Covid-19 TA 2020-2021	CBN	248.993.849	-	248.993.849	-	248.993.849
	142	S-439/MK.2/2022, tgl. 26/Oct/22	SABA BNPB (BA 103) untuk penanganan darurat bencana alam 2022	BENCANA	1.072.359.771	-	1.072.359.771	-	1.072.359.771
	155	S-528/MK.2/2022, tgl. 02/Dec/22	SABA BNPB (BA 103) untuk Pemberian Anggaran Stimulan Rumah Akibat Bencana Gempa di Kabupaten Cianjur	BENCANA	200.405.000	-	200.405.000	-	200.405.000
	156	S-533/MK.2/2022, tgl. 05/Dec/22	SABA BNPB (BA 103) untuk Pembayaran Tunggakan Penanganan COVID-19 BNPB TA 2020-2021	CBN	150.813.202	-	150.813.202	-	150.813.202
	163	S-563/MK.2/2022, tgl. 19/Dec/22	SABA BNPB (BA 103) untuk Pemberian Anggaran Stimulan Rumah Akibat Bencana Gempa di Kabupaten Cianjur Tahap II, Kekurangan Stimulan Rumah Akibat Bencana Gempa di Kabupaten Cianjur Tahap I dan Bantuan Darurat Bencana	BENCANA	619.194.017	-	619.194.017	-	619.194.017
	168	S-593/MK.2/2022, tgl. 29/Dec/22	SABA BNPB (BA 103) untuk Pembayaran Tunggakan Pengadaan Jasa Operasi Udara TA 2020 dan 2021	BENCANA	93.648.331	-	93.648.331	-	93.648.331
104 BP2MI					55.418.610	-	55.418.610	-	55.418.610
	56	S-143/MK.2/2022, tgl. 24/May/22	SABA BP2MI (BA 104) untuk Tambahan Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2022	CBN	55.418.610	-	55.418.610	-	55.418.610
115 BAWASLU					958.064.175	-	958.064.175	-	958.064.175
	93	S-254/MK.2/2022, tgl. 08/Aug/22	SABA BAWASLU (BA 115) Tahap I untuk Tambahan Anggaran Bawaslu TA 2022	CKM	714.719.425	-	714.719.425	-	714.719.425
	111	S-318/MK.2/2022, tgl. 06/Sep/22	SABA BAWASLU (BA 115) Tahap I untuk Tambahan Anggaran Bawaslu TA 2022	CKM	243.344.750	-	243.344.750	-	243.344.750
119 BAKAMLA					349.242.132	-	349.242.132	-	349.242.132
	52	S-135/MK.2/2022, tgl. 18/May/22	SABA BAKAMLA (BA 119) dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tahap I	CKM	254.510.392	-	254.510.392	-	254.510.392
	64	S-161/MK.2/2022, tgl. 12/Jun/22	SABA BAKAMLA (BA 119) dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tahap II (Final)	CKM	94.731.740	-	94.731.740	-	94.731.740
120 KEMENKO MARVES					4.699.840	-	4.699.840	-	4.699.840
	150	S-483/MK.2/2022, tgl. 11/Nov/22	SABA KEMENKOMARVES (BA 120) untuk Anggaran Pertemuan Tingkat Kepala Negara Khusus dengan Angola, Sudan Selatan, dan Zambia	CDKI	4.699.840	-	4.699.840	-	4.699.840
122 B P I P					11.236.974	-	11.236.974	-	11.236.974
	63	S-158/MK.2/2022, tgl. 08/Jun/22	SABA BPIP (BA 122) untuk Program Paskibraka	CKM	11.236.974	-	11.236.974	-	11.236.974
123 L P S K					11.877.717	-	11.877.717	-	11.877.717
	117	S-339/MK.2/2022, tgl. 12/Sep/22	SABA LPSK (BA 123) untuk Layanan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, serta Kompensasi Korban Terorisme	CKM	11.877.717	-	11.877.717	-	11.877.717
124 B R I N					392.417.205	-	392.417.205	-	392.417.205
	95	S-251/MK.2/2022, tgl. 08/Aug/22	SABA BRIN (BA 124) untuk Belanja Operasional BRIN TA 2022	CKM	70.213.527	-	70.213.527	-	70.213.527
	95			GAJI	17.755.031	-	17.755.031	-	17.755.031
	95			HONOR	304.448.647	-	304.448.647	-	304.448.647

Rincian

ribu rupiah

Bagian Anggaran	No	Tanggal dan Nomor Surat	Peruntukkan	Pos / Sub Pos	SP SABA	SPP	JUMLAH TOTAL	DIKEMBALIKAN KE BA BUN	JUMLAH TOTAL (NET)
999.02 BUN HIBAH					-	577.395.792	577.395.792	-	577.395.792
	65	S-164/MK.2/2022, tgl. 12/Jun/22	SPP HIBAH (BA 999.02) untuk pemberian hibah bantuan kemanusiaan kepada Lembaga Asing Ukrainian Red Cross Society (URCS)	HIBAH	-	3.587.500	3.587.500	-	3.587.500
	92	S-253/MK.2/2022, tgl. 08/Aug/22	SPP HIBAH (BA 999.02) untuk Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Periode Mei TA 2022	BENCANA	-	523.926.466	523.926.466	-	523.926.466
	119	S-347/MK.2/2022, tgl. 14/Sep/22	SPP HIBAH (BA 999.02) untuk Pemberian Hibah kepada Pemerintah Palestina dan 6 (Enam) Kegiatan untuk Pemerintah/Lembaga Asing Lainnya	HIBAH	-	21.277.837	21.277.837	-	21.277.837
	159	S-551/MK.2/2022, tgl. 10/Dec/22	SPP HIBAH (BA 999.02) untuk Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pakistan dan Negara-Negara Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG)	HIBAH	-	15.842.091	15.842.091	-	15.842.091
	174	S-597/MK.2/2022, tgl. 30/Dec/22	SPP HIBAH (BA 999.02) untuk Kegiatan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing Tahun 2022	HIBAH	-	12.761.898	12.761.898	-	12.761.898
999.07 BUN BEL. SUBSIDI					-	5.632.266.845	5.632.266.845	-	5.632.266.845
	59	S-148/MK.2/2022, tgl. 28/May/22	SPP BA BUN SUBSIDI (BA 999.07) untuk Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Generasi-2 TA 2022	CSIJP	-	980.000.000	980.000.000	-	980.000.000
	120	S-354/MK.2/2022, tgl. 18/Sep/22	SPP SUBSIDI (BA 999.07) untuk Penyelesaian Kekurangan Pembayaran Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)	TUNGGAK	-	578.667.554	578.667.554	-	578.667.554
	140	S-417/MK.2/2022, tgl. 20/Oct/22	SPP SUBSIDI (BA 999.07) untuk Pembayaran Kekurangan Subsidi Pupuk TA 2021 (Audited)	CASUPUK	-	2.904.868.291	2.904.868.291	-	2.904.868.291
	147	S-467/MK.2/2022, tgl. 04/Nov/22	SPP SUBSIDI (BA 999.07) untuk Penyelesaian Kekurangan Pembayaran Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2022	CPDTP	-	1.168.731.000	1.168.731.000	-	1.168.731.000
999.99 BUN TRAKSUS					-	7.574.359	7.574.359	-	7.574.359
	167	S-583/MK.2/2022, tgl. 28/Dec/22	SPP TRAKSUS (BA 999.99) untuk Pembayaran Trust Fund Indonesia pada Organisasi Internasional (OFID, GCF, dan AMTF) TA 2022	CKM	-	7.574.359	7.574.359	-	7.574.359

Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2022 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2021 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)
Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah (502000000980)	3.147.161.809.214	2.376.797.725.163	770.364.084.051
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH (519000143980)	2.412.732.511.396	2.260.791.985.808	151.940.525.588
Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih (500000002980)	184.317.792.809.485	173.593.844.450.266	10.723.948.359.219
Rekening Kas Penempatan Dalam Rupiah (518000122980)	34.293.585.351.085	11.764.717.811.752	22.528.867.539.333
Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah	267.897.200	259.643.691	8.253.509
*) Rekening Khusus dalam Rupiah	5.439.195.963.493	6.193.437.924.925	(754.241.961.432)
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-Gaji	8.495.421.788.199	-	8.495.421.788.199
Rekening SubRKUN Kuasa BUN Pusat	289.597.970.365	-	289.597.970.365
Total	238.395.756.100.437	196.189.849.541.605	42.205.906.558.832

Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2022 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2021 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)
Rekening KUN dalam Valuta USD	322,082,536,666	8,828,506,745	313,254,029,921
Rekening KUN Dalam Valuta Yen	27,267,669,242	213,937,337,853	(186,669,668,611)
Rekening KUN dalam Valuta Euro	22,082,827,222,971	13,148,851,051,455	8,933,976,171,516
Rekening Kas Penempatan Dalam USD	130,892,668,710,781	40,853,931,656,748	90,038,737,054,033
Rekening Khusus dalam Valas	2,375,859,331,346	3,268,152,710,907	(892,293,379,561)
Total	155,700,705,471,006	57,493,701,263,708	98,207,004,207,298

Rekening Pemerintah Lainnya

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2022 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2021 (Rupiah)
Rekening Penerimaan Dana Investasi	1	1
Rekening Penerimaan Dana Pembangunan Daerah	27	25
Rekening Penerimaan Migas	3,615,314,582,701	4,522,505,658,898
Rekening Penerimaan Panas Bumi	1,588,329,504,774	1,428,552,738,969
Kas di Rekening Dana Bergulir	9,548,799	733,077,484
*) Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji	245,275,438,525	242,290,609,825
*) Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	-	-
*) Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	2,688,233,023	8,771,943,759
Pembulatan		
Total	5,451,617,307,850	6,202,854,028,961

RINCIAN KAS DI KPPN

Kode KPPN	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	20,310,455.00	69,889,265	90,199,720
175	Jakarta VI	88,323,708	(88,323,708)	-
901	Penerimaan Negara	721,333,897,632	2,053,573,245,102	2,774,907,142,734
	Total	721,442,531,795	2,053,554,810,659	2,774,997,342,454

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kode KPPN	KPPN	TA 2022		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	28.006.632	1.655.999.624	1.684.006.256
003	MEULABOH	5.165.000	(5.165.000)	0
005	PEMATANG SIANTAR	32.614.000	(32.614.000)	0
006	PADANG SIDEMPUAN	142.273.843	(137.244.843)	5.029.000
008	PEKANBARU	0	24.039.000	24.039.000
010	PADANG	368.718.913	(241.555.903)	127.163.010
011	BUKITTINGGI	0	91.234.371	91.234.371
012	JAMBI	15.826.000	(14.701.000)	1.125.000
014	PALEMBANG	29.823.090	429.651.380	459.474.470
015	PANGKAL PINANG	15.703.010	131.275.118	146.978.128
017	BANDAR LAMPUNG	344.478.156	223.815.579	568.293.735
018	JAKARTA I	195.208.947.188	(33.178.511.683)	162.030.435.505
019	JAKARTA II	694.469.912	475.630.712	1.170.100.624
020	SERANG	1.855.999	21.200.965	23.056.964
022	BANDUNG I	196.329.840	(196.329.840)	0
023	BOGOR	219.210.998	(118.031.239)	101.179.759
024	CIREBON	289.443.844	(248.443.844)	41.000.000
026	SEMARANG I	16.330.000	14.646.000	30.976.000
028	SURAKARTA	0	15.822.500	15.822.500
029	PURWOKERTO	0	6.329.000	6.329.000
030	YOGYAKARTA	826.996.936	(515.785.275)	311.211.661
031	SURABAYA I	0	39.291.000	39.291.000
032	MALANG	140.371.321	(140.371.321)	0
033	MADIUN	0	61.356.570	61.356.570
037	DENPASAR	0	8.448.106	8.448.106
039	KUPANG	701.634.899	(151.998.151)	549.636.748
042	PONTIANAK	240.115.297	(82.677.362)	157.437.935
043	PALANGKARAYA	140.136.118	63.900.085	204.036.203
045	BANJARMASIN	0	29.511.000	29.511.000
046	SAMARINDA	42.841.900	(42.841.900)	0
047	BALIKPAPAN	29.714.000	29.003.000	58.717.000
049	MANADO	783.380.916	871.560.968	1.654.941.884
050	GORONTALO	11.373.325	5.226.675	16.600.000
051	PALU	3.430.163	11.605.639	15.035.802
052	POSO	0	9.632.700	9.632.700
057	PARE PARE	0	387.000	387.000
059	MAJENE	0	2.835.000	2.835.000
060	KENDARI	46.637.000	(16.695.650)	29.941.350
061	AMBON	1.444.564.654	(1.064.689.301)	379.875.353
062	TERNATE	0	45.690.000	45.690.000
063	JAYAPURA	344.519.050	1.234.322.441	1.578.841.491
064	BIAK	0	24.651.950	24.651.950
065	MANOKWARI	200.514.381	815.364.082	1.015.878.463
066	SORONG	35.177.788	(25.181.288)	9.996.500
067	FAK FAK	0	21.603.000	21.603.000
068	MERAUKE	7.182.520	(7.182.520)	0
072	PEKALONGAN	3.685.000	(429.000)	3.256.000
073	BOJONEGORO	124.323.840	(124.323.840)	0
074	TAPAKTUAN	10.716.000	(10.716.000)	0
077	SIJUNJUNG	0	16.212.000	16.212.000
080	BUNTOK	0	1.422.000	1.422.000
082	TOLI TOLI	0	22.149.000	22.149.000
083	TAHUNA	0	1.890.350	1.890.350
086	KARAWANG	223.889.685	(223.889.685)	0
088	JAKARTA III	15.600.727.759	8.159.578.226	23.760.305.985
090	SOLOK	0	27.231.000	27.231.000
091	LUBUK SIKAPING	0	103.880.000	103.880.000
092	RENGAT	0	16.070.835	16.070.835

Kode KPPN	KPPN	TA 2022		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
093	SINGKAWANG	45.450.000	(45.450.000)	0
095	BANDUNG II	0	1.572.087.900	1.572.087.900
096	GARUT	0	16.940.000	16.940.000
102	PANGKALAN BUN	14.800.000	(12.780.000)	2.020.000
103	BAU BAU	22.166.409	(18.691.409)	3.475.000
104	SAUMLAKI	0	20.159.091	20.159.091
109	BATURAJA	10.310.032	56.191.468	66.501.500
111	RUTENG	0	297.681.168	297.681.168
112	TOBELO	10.000.000	6.570.000	16.570.000
113	WAMENA	0	5.481.000	5.481.000
118	TEGAL	0	55.505.474	55.505.474
120	DUMAI	0	11.141.000	11.141.000
121	MANNA	0	57.749.000	57.749.000
123	MEDAN II	100.039.000	85.946.000	185.985.000
126	METRO LAMPUNG	60.200.000	(60.200.000)	0
133	JAKARTA IV	2.243.665.583	(1.027.450.414)	1.216.215.169
136	MAKASSAR II	15.487.500	44.416.970	59.904.470
138	SERUI	73.240.488	(73.240.488)	0
139	JAKARTA V	14.517.124.345	(8.786.106.561)	5.731.017.784
143	KUALA TUNGKAL	0	6.110.000	6.110.000
148	KLATEN	3.444.000	637.000	4.081.000
149	WONOSARI	0	10.000.000	10.000.000
151	TANJUNG	0	61.894.000	61.894.000
158	KOTAMOBAGU	0	54.660.000	54.660.000
161	RANGKASBITUNG	23.599.300	(23.599.300)	0
165	SIDOARJO	87.288.089	(86.592.588)	695.501
171	BEKASI	0	28.652.000	28.652.000
173	MASOHI	19.399.000	(18.849.000)	550.000
175	JAKARTA VI	4.655.460.806	3.243.391.232	7.898.852.038
178	MAMUJU	0	44.432.000	44.432.000
182	JAKARTA VII	7.547.735.388	(5.753.160.329)	1.794.575.059
185	TANJUNG SELOR	29.723.956	(29.723.956)	0
TOTAL		248.050.262.873	(32.123.110.511)	215.927.152.362

RINCIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PER K/L

Nama BA	Tahun 2022		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	789.050.702	(789.050.701)	1
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	50.179.986	(50.179.986)	-
BADAN NARKOTIKA NASIONAL	40.674.309	(40.674.309)	-
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	3.306.627.482	3.306.627.482
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	2.816.000	(2.816.000)	-
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	-	450	450
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	-	47.288.726	47.288.726
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	20.000	(20.000)	-
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	385.440.462	1.925.613.060	2.311.053.522
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3.686.848.825	(3.686.848.825)	-
BADAN PUSAT STATISTIK	210.032.717	(120.661.697)	89.371.020
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	-	1	1
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	7.931.020	(7.931.020)	-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	473.041.000	(473.040.800)	200
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	976.317.467	212.707.093	1.189.024.560
KEMENTERIAN AGAMA	1.614.305.423	265.048.641	1.879.354.064
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	217.982.448	32.311.359	250.293.807
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	266.061.283	(259.182.321)	6.878.962
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	10.716.000	12.784.000	23.500.000
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	557.409.357	4.348.609.568	4.906.018.925
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	202.407.079	(164.148.251)	38.258.828
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	133.879.986	48.939.409	182.819.395
KEMENTERIAN KESEHATAN	6.142.097.533	(5.820.935.906)	321.161.627
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	474.635.254	301.761.618	776.396.872
KEMENTERIAN KEUANGAN	655.059.911	445.125.676	1.100.185.587
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	186.696.870	(186.696.870)	-
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	145.030.697	145.030.697
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	84.400.000	(84.400.000)	-
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	89.214.755	40.972.114	130.186.869
KEMENTERIAN LUAR NEGERI	159.817.869.205	(34.861.195.998)	124.956.673.207
KEMENTERIAN PARIWISATA	6.360.000	(6.360.000)	-

Nama BA	Tahun 2022		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2.000.345.341	(470.075.003)	1.530.270.338
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	56.295.519	(54.735.519)	1.560.000
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	16.881.692.239	9.932.491.054	26.814.183.293
KEMENTERIAN PERDAGANGAN	4.561.143.868	(465.796.985)	4.095.346.883
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	73.005.701	13.474.477	86.480.178
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.531.781.543	(866.768.047)	665.013.496
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	254.329.664	292.013.138	546.342.802
KEMENTERIAN PERTAHANAN	-	805.000	805.000
KEMENTERIAN PERTANIAN	12.408.334.677	(11.789.230.897)	619.103.780
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	30.381.274.092	5.962.282.333	36.343.556.425
KEMENTERIAN SOSIAL	228.160.354	376.325.403	604.485.757
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	657.449.494	(316.746.109)	340.703.385
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	85.679.338	491.016.972	576.696.310
KOMISI PEMILIHAN UMUM	72.565.856	913.943.756	986.509.612
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	185.200.290	(185.200.290)	-
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	86.594.000	(86.594.000)	-
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	-	34.425.000	34.425.000
MAHKAMAH AGUNG	151.248.877	120.521.247	271.770.124
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	66.600.000	66.600.000
SEKRETARIAT KABINET	1.353.714.428	(670.539.251)	683.175.177
TOTAL	248.050.262.873	(32.123.110.511)	215.927.152.362

KAS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BERASAL DARI HIBAH LANGSUNG

Kode KPPN	KPPN	TA 2022		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
002	LANGSA	163.600.400	(163.600.400)	0
005	PEMATANG SIANTAR	38.600.000	(38.600.000)	0
008	PEKANBARU	0	7.506.000	7.506.000
010	PADANG	5.717.557	(5.312.164)	405.393
012	JAMBI	907	(907)	0
014	PALEMBANG	64.848.478	(64.848.478)	0
020	SERANG	0	8.675.610.000	8.675.610.000
022	BANDUNG I	0	5.086.601.000	5.086.601.000
030	YOGYAKARTA	934.755.000	(934.755.000)	0
032	MALANG	0	0	0
033	MADIUN	334.840.000	(334.840.000)	0
038	MATARAM	14.893	2.349.985.107	2.350.000.000
042	PONTIANAK	1.112.282.407	1.706.454.084	2.818.736.491
046	SAMARINDA	0	9.501.907.000	9.501.907.000
047	BALIKPAPAN	5.287.997.618	7.699.807.613	12.987.805.231
050	GORONTALO	7.195.204.297	(3.195.207.197)	3.999.997.100
052	POSO	0	61.321.753	61.321.753
062	TERNATE	0	5.535.284.000	5.535.284.000
063	JAYAPURA	26.113.846.903	(24.968.967.921)	1.144.878.982
065	MANOKWARI	34.802.298.895	(29.555.257.149)	5.247.041.746
075	RANTAU PRAPAT	67.726.753	(67.726.000)	753
088	JAKARTA III	41.078.601.099	24.874.212.193	65.952.813.292
095	BANDUNG II	300.000	(300.000)	0
105	KUTACANE	31.223.354	(31.223.354)	0
113	WAMENA	34.991.487.665	(34.991.487.665)	0
127	TANGERANG	0	24.739.750.500	24.739.750.500
133	JAKARTA IV	64.600.505.467	(64.600.505.467)	0
134	SEMARANG II	0	3.500.000.000	3.500.000.000
139	JAKARTA V	49.900.604.409	34.386.959.635	84.287.564.044
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	1.152.929.861.891	1.183.796.475.060	2.336.726.336.951
165	SIDOARJO	0	2.000.000.000	2.000.000.000
171	BEKASI	0	5.995.310.000	5.995.310.000
172	ATAMBUA	397.265.543	0	397.265.543
175	JAKARTA VI	8.565.543.286	389.908.793	8.955.452.079
182	JAKARTA VII	316.439.773.116	(10.702.631.138)	305.737.141.978
	TOTAL	1.745.056.899.938	1.150.651.829.898	2.895.708.729.836

RINCIAN KAS HIBAH PER K/L

Nama BA	Tahun 2022		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	8.835.433	(8.835.433)	-
BADAN NARKOTIKA NASIONAL	67.741.646	(6.419.140)	61.322.506
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	79.074.466.109	(951.119.228)	78.123.346.881
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	-	350.306.400	350.306.400
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	5.114.146.903	(5.091.177.921)	22.968.982
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	43.411.302	(43.411.302)	-
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	-	3.461.685.409	3.461.685.409
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	711.120.984	(711.120.984)	-
KEMENTERIAN AGAMA	956.105.000	12.949.879.780	13.905.984.780
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	49.900.604.409	34.386.959.635	84.287.564.044
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	621.556.946	(521.383.550)	100.173.396
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	672.392.751.397	(82.022.104.343)	590.370.647.054
KEMENTERIAN KESEHATAN	369.311.685.832	1.282.187.705.845	1.651.499.391.677
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7.529.691.651	33.490.343	7.563.181.994
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	296.197.275	(296.182.662)	14.613
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	4.032.465.152	4.968.146.503	9.000.611.655
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2.697.789.512	2.753.725.099	5.451.514.611
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	20.701.471.289	(15.688.437.180)	5.013.034.109
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	344.341.095	(343.934.868)	406.227
KEMENTERIAN PERTAHANAN	111.080.967.378	(101.580.970.278)	9.499.997.100
KEMENTERIAN PERTANIAN	3.403.267.271	909.408.557	4.312.675.828
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	35.522.456	(35.522.456)	-
KEMENTERIAN SOSIAL	316.086.562.362	(10.349.420.384)	305.737.141.978
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	67.158.974.617	44.080.990.476	111.239.965.093
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1.092.549.077	(1.088.412.324)	4.136.753
KOMISI PEMILIHAN UMUM	31.186.311.419	(30.939.269.673)	247.041.746
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.208.363.423	(1.208.363.423)	-
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	-	9.460.307.000	9.460.307.000
MAHKAMAH AGUNG	-	5.995.310.000	5.995.310.000
TOTAL	1.745.056.899.938	1.150.651.829.898	2.895.708.729.836

RINCIAN KAS PADA BLU

Kode KPPN	TA 2022			
	NERACA LAJUR			
	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	AMBON	27.346.389.868	(11.516.738.467)	15.829.651.401
004	BALIKPAPAN	115.789.333.062	(64.053.882.068)	51.735.450.994
008	BANDA ACEH	176.980.118.613	17.015.837.041	193.995.955.654
010	BANDAR LAMPUNG	415.080.985.646	(62.112.808.412)	352.968.177.234
011	BANDUNG I	841.910.678.784	116.383.273.738	958.293.952.522
012	BANDUNG II	170.211.191.149	(54.597.760.194)	115.613.430.955
014	BANJARMASIN	66.620.452.125	61.789.907.397	128.410.359.522
016	BANYUWANGI	8.370.071.345	(1.625.562.607)	6.744.508.738
017	BATAM	499.527.578.061	374.542.009.218	874.069.587.279
018	BEKASI	34.765.464.121	16.375.546.434	51.141.010.555
019	BENGKULU	130.717.604.846	(14.118.638.680)	116.598.966.166
020	BLITAR	160.737.230.943	55.611.869.842	216.349.100.785
022	BOGOR	196.220.900.202	(35.630.302.786)	160.590.597.416
023	BOJONEGORO	7.680.613.730	(833.989.243)	6.846.624.487
024	BONDOWOSO	27.469.374.557	2.111.702.933	29.581.077.490
025	BUKITTINGGI	80.669.967.054	33.100.939.909	113.770.906.963
026	CIREBON	41.975.945.800	20.577.718.505	62.553.664.305
028	DENPASAR	846.149.764.471	(82.857.459.742)	763.292.304.729
029	GARUT	33.728.235.796	(14.396.059.193)	19.332.176.603
030	GORONTALO	16.059.687.208	(5.250.347.439)	10.809.339.769
031	JAKARTA I	10.918.889.097.081	(3.914.704.068.353)	7.004.185.028.728
032	JAKARTA II	47.802.324.433.546	1.387.020.814.218	49.189.345.247.764
033	JAKARTA III	992.797.961.076	86.346.784.477	1.079.144.745.553
034	JAKARTA IV	746.457.191.782	137.581.907.133	884.039.098.915
035	JAKARTA VI	1.304.561.080.141	22.828.228.972	1.327.389.309.113
037	JAKARTA VII	2.471.819.734.751	216.317.665.164	2.688.137.399.915
038	JAMBI	244.624.801.554	(59.861.473.517)	184.763.328.037
039	JAYAPURA	54.036.903.361	(8.160.177.042)	45.876.726.319
042	JEMBER	171.647.787.021	81.769.606.902	253.417.393.923
043	KARAWANG	174.779.195.262	61.922.447.412	236.701.642.674
045	KEDIRI	136.241.033.183	(18.832.135.498)	117.408.897.685
046	KENDARI	124.627.128.724	(37.178.414.335)	87.448.714.389
047	KLATEN	177.601.619.546	73.193.609.716	250.795.229.262
048	KUPANG	127.298.398.734	17.864.185.771	145.162.584.505
049	MADIUN	23.578.349.045	(13.813.139.314)	9.765.209.731
050	MAGELANG	249.560.486.818	(42.512.380.626)	207.048.106.192
051	MAKASSAR I	338.520.882.416	61.904.169.167	400.425.051.583
054	MAKASSAR II	725.043.426.783	(101.701.724.714)	623.341.702.069
060	MALANG	1.363.327.965.742	(829.918.781.736)	533.409.184.006
061	MANADO	425.837.055.126	(120.227.203.920)	305.609.851.206
062	MATARAM	197.518.630.083	(9.515.884.133)	188.002.745.950
063	MEDAN I	445.270.567.155	(1.958.930.028)	443.311.637.127
066	MEDAN II	136.093.421.540	38.493.894.585	174.587.316.125
073	MOJOKERTO	9.277.617.976	9.482.290.485	18.759.908.461
086	PADANG	688.746.684.333	(498.672.303.160)	190.074.381.173
088	PALANGKARAYA	37.750.809.783	7.109.361.577	44.860.171.360
095	PALEMBANG	781.090.983.347	(31.621.215.661)	749.469.767.686
096	PALU	164.555.830.026	(49.544.548.283)	115.011.281.743
098	PEKANBARU	147.632.746.486	5.856.242.433	153.488.988.919
100	PONTIANAK	440.802.343.702	(142.067.365.719)	298.734.977.983
115	PURWODADI	128.076.881.982	8.548.476.774	136.625.358.756
118	PURWOKERTO	143.154.281.353	(26.914.158.449)	116.240.122.904
123	SAMARINDA	76.197.142.988	73.613.695.773	149.810.838.761
124	SEMARANG I	541.206.169.874	5.324.974.280	546.531.144.154
127	SEMARANG II	680.085.877.344	77.079.819.956	757.165.697.300
128	SERANG	176.424.586.623	30.858.194.615	207.282.781.238
131	SIDOARJO	45.109.935.687	(2.840.707.970)	42.269.227.717
132	SINGARAJA	23.324.151.890	(6.469.224.811)	16.854.927.079
133	SORONG	12.582.600.376	4.139.774.907	16.722.375.283

Kode KPPN	TA 2022			
	NERACA LAJUR			
	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
134	SUKABUMI	14.731.192.834	(11.195.955.536)	3.535.237.298
135	SURABAYA I	375.745.111.669	(100.235.635.847)	275.509.475.822
136	SURABAYA II	462.158.864.379	77.173.402.461	539.332.266.840
137	SURAKARTA	357.347.651.340	30.504.281.884	387.851.933.224
148	TANGERANG	2.544.285.223.811	(110.655.571.284)	2.433.629.652.527
150	TANJUNG REDEP	1.420.492.381	(494.344.711)	926.147.670
153	TARAKAN	24.142.515.959	(12.483.107.365)	11.659.408.594
163	TASIKMALAYA	22.487.586.162	12.691.035.430	35.178.621.592
165	TEBING TINGGI	4.640.689.305	8.826.972.871	13.467.662.176
171	TEGAL	42.880.534.309	(14.408.475.179)	28.472.059.130
175	TERNATE	38.471.711.921	10.723.583.055	49.195.294.976
182	YOGYAKARTA	758.717.205.661	246.002.970.602	1.004.720.176.263
	TOTAL	81.993.516.161.352	(3.022.293.280.385)	78.971.222.880.967

RINCIAN KAS BLU PER K/L

Nama BA	Tahun 2022		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	16.702.566.437	(16.702.566.437)	-
BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	499.527.578.061	374.542.009.218	874.069.587.279
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	4.978.783.209	(1.894.640.207)	3.084.143.002
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	-	10.002.339.850	10.002.339.850
KEMENTERIAN AGAMA	1.895.657.897.473	360.687.342.157	2.256.345.239.630
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	243.567.229.436	14.787.526.280	258.354.755.716
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	95.683.209.588	3.935.048.833	99.618.258.421
KEMENTERIAN KESEHATAN	6.969.560.696.165	171.995.855.105	7.141.556.551.270
KEMENTERIAN KEUANGAN	45.639.915.570.064	3.458.159.093.386	49.098.074.663.450
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.061.825.835.845	(3.886.911.889.408)	6.174.913.946.437
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1.208.876.576.380	20.713.451.085	1.229.590.027.465
KEMENTERIAN PARIWISATA	-	529.162.644	529.162.644
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2.079.859.670.641	(2.079.859.670.641)	-
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	109.052.214.432	88.221.634.147	197.273.848.579
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	8.205.205.693.651	(1.334.486.291.557)	6.870.719.402.094
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.044.063.926.981	113.851.953.118	1.157.915.880.099
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	88.432.120.903	22.889.497.719	111.321.618.622
KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.089.227.018.027	(232.274.082.393)	856.952.935.634
KEMENTERIAN PERTANIAN	148.409.013.473	11.490.329.129	159.899.342.602
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	1.294.173	(1.294.173)	-
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	801.730.649.039	3.220.967.028	804.951.616.067
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.791.238.617.374	(125.189.055.268)	1.666.049.562.106
TOTAL	81.993.516.161.352	(3.022.293.280.385)	78.971.222.880.967

UANG MUKA REKENING KHUSUS

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan (Penurunan)
ADB	2,740,298,842	4,546,970,222	(1,806,671,380)
IFAD	1,459,439,628	1,416,893,658	42,545,970
JBIC/OECF	-	180,428,446	(180,428,446)
BANK DUNIA	15,243,303,991	15,198,066,826	45,237,165
IDB	300,000,000	498,966,698	(198,966,698)
AUSTRALIA	-	-	-
UNI EROPA	-	-	-
KFW	1,135,920,649	3,586,262,764	(2,450,342,115)
SBSN	-	-	-
JUMLAH	20,878,963,110	25,427,588,614	(4,548,625,504)

**RINCIAN PIUTANG PNBP DIVIDEN DAN DENDA
PER 31 DESEMBER 2022**

Total Piutang	Total Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Total <i>Net Realizable Value</i>
56,554,713,538	56,554,713,539	-

No	Nama BUMN		Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (100%)	Net Realizable Value	Keterangan
1	PT Balai Pustaka	2004	196,749,800	196,749,800	-	Telah diserahkan ke PUPNC
2						Dalam proses pengajuan
	PT Perkebunan Nusantara II	1999	12,896,800,751	12,896,800,751	-	penghapusan ke Menteri
4	PT Inhutani V	1999	1,221,919,265	1,221,919,265	-	Keuangan
5	PT Istaka karya	2003	8,391,154,933	8,391,154,933	-	Telah diserahkan ke PUPNC
6	PT Industri Sandang Nusantara	1978-2001	33,132,436,990	33,132,436,990	-	Telah diserahkan ke PUPNC
7						
	PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	715,651,799	715,651,799	-	Dalam proses pengajuan
						penghapusan ke Menteri
						Keuangan (DIT SMI, DJPBN)
Jumlah			56,554,713,538	56,554,713,538	-	

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
1	Provinsi Aceh	129,300,997,263	3,462,122,923		132,763,120,186	-
2	Kab. Aceh Barat	1,860,203,514	1,388,754,532		3,248,958,046	-
3	Kab. Aceh Besar	1,394,609,338	13,238,955,255		14,633,564,593	-
4	Kab. Aceh Selatan	1,763,895,962	6,135,793,160		7,899,689,122	-
5	Kab. Aceh Singkil	1,258,836,695	1,695,728,777		2,954,565,472	-
6	Kab. Aceh Tengah	3,162,707,433	7,177,014,479		10,339,721,912	-
7	Kab. Aceh Tenggara	1,209,378,732	2,122,970,792		3,332,349,524	-
8	Kab. Aceh Timur	3,697,695,340	3,457,938,885		7,155,634,225	-
9	Kab. Aceh Utara	5,830,232,934	10,693,742,958		16,523,975,892	-
10	Kab. Bireuen	899,721,621	5,145,261,823		6,044,983,444	-
11	Kab. Pidie	1,678,474,582	7,550,221,741		9,228,696,323	-
12	Kab. Simeulue	1,448,257,590	3,876,301,633		5,324,559,223	-
13	Kota Banda Aceh	1,073,082,709	243,795,223		1,316,877,932	-
14	Kota Sabang	1,455,442,215	2,647,572,595		4,103,014,810	-
15	Kota Langsa	2,213,062,535	1,413,920,439		3,626,982,974	-
16	Kota Lhokseumawe	13,201,847,264	1,945,356,797		15,147,204,061	-
17	Kab. Gayo Lues	1,423,637,153	778,638,270		2,202,275,423	-
18	Kab. Aceh Barat Daya	1,386,562,893	2,982,476,328		4,369,039,221	-
19	Kab. Aceh Jaya	1,099,245,992	3,998,310,374		5,097,556,366	-
20	Kab. Nagan Raya	1,472,740,148	3,773,346,757		5,246,086,905	-
21	Kab. Aceh Tamiang	11,929,101,475	4,685,282,033		16,614,383,508	-
22	Kab. Bener Meriah	1,217,423,740	4,782,088,747		5,999,512,487	-
23	Kab. Pidie Jaya	782,681,877	4,358,984,607		5,141,666,484	-
24	Kota Subulussalam	800,917,739	3,364,329,114		4,165,246,853	-
25	Provinsi Sumatera Utara	7,338,016,736	2,882,576,277		10,220,593,013	-
26	Kab. Asahan	1,422,241,112	5,184,112,209		6,606,353,321	146,132,953
27	Kab. Dairi	1,558,913,791	3,280,154,362		4,839,068,153	-
28	Kab. Deli Serdang	1,303,792,757	6,121,070,243		7,424,863,000	-
29	Kab. Karo	1,602,441,600	3,488,528,099		5,090,969,699	-
30	Kab. Labuhanbatu	1,602,205,087	6,110,472,444		7,712,677,531	-
31	Kab. Langkat	8,485,784,680	1,421,303,575		9,907,088,255	-
32	Kab. Mandailing Natal	18,609,664,876	7,759,703,959		26,369,368,835	-
33	Kab. Nias	505,525,863	1,457,132,416		1,962,658,279	-
34	Kab. Simalungun	1,496,808,974	4,954,835,281		6,451,644,255	-
35	Kab. Tapanuli Selatan	6,291,859,790	2,759,410,709		9,051,270,499	-
36	Kab. Tapanuli Tengah	1,618,679,072	3,522,017,541		5,140,696,613	-
37	Kab. Tapanuli Utara	1,642,886,696	3,852,854,723		5,495,741,419	-
38	Kab. Toba Samosir	1,549,255,200	4,902,293,021		6,451,548,221	-
39	Kota Binjai	670,585,037	4,455,722,869		5,126,307,906	-
40	Kota Medan	2,041,961,339	9,583,284,810		11,625,246,149	-
41	Kota Pematang Siantar	1,139,563,869	790,456,198		1,930,020,067	-
42	Kota Sibolga	610,979,462	482,321,847		1,093,301,309	-
43	Kota Tanjung Balai	3,872,308,049	782,138,499		4,654,446,548	-
44	Kota Tebing Tinggi	575,994,751	1,408,071,999		1,984,066,750	-
45	Kota Padang Sidempuan	2,246,088,680	2,622,304,978		4,868,393,658	-
46	Kab. Pakpak Bharat	1,207,083,919	3,336,617,587		4,543,701,506	-
47	Kab. Nias Selatan	4,694,917,909	5,512,899,526		10,207,817,435	23,332,840
48	Kab. Humbang Hasundutan	5,163,686,838	4,732,492,670		9,896,179,508	-
49	Kab. Serdang Bedagai	897,797,883	2,706,862,536		3,604,660,419	258,494,212
50	Kab. Samosir	635,166,827	4,688,711,867		5,323,878,694	-
51	Kab. Batu Bara	1,068,125,683	328,368,034		1,396,493,717	-
52	Kab. Padang Lawas	1,062,280,731	1,628,327,914		2,690,608,645	193,949,120
53	Kab. Padang Lawas Utara	2,063,843,216	4,081,145,428		6,144,988,644	-
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	1,597,349,000	9,721,469,732		11,318,818,732	-
55	Kab. Labuhanbatu Utara	1,628,480,801	1,274,340,190		2,902,820,991	-
56	Kab. Nias Utara	524,861,079	1,929,982,626		2,454,843,705	906,294,244
57	Kab. Nias Barat	472,495,217	72,307,613		544,802,830	-
58	Kota Gunungsitoli	458,949,756	2,368,981,170		2,827,930,926	110,871,682
59	Provinsi Sumatera Barat	6,200,593,399	6,270,531,046		12,471,124,445	-
60	Kab. Lima Puluh Kota	742,162,888	2,295,459,497		3,037,622,385	-
61	Kab. Agam	716,624,615	11,035,449,326		11,752,073,941	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
62	Kab. Kepulauan Mentawai	3,430,246,400	8,880,579,224		12,310,825,624	-
63	Kab. Padang Pariaman	1,182,906,848	1,992,581,536		3,175,488,384	-
64	Kab. Pasaman	1,166,122,983	6,300,327,286		7,466,450,269	-
65	Kab. Pesisir Selatan	2,041,915,184	7,643,193,119		9,685,108,303	-
66	Kab. Sijunjung	2,675,428,493	2,318,934,957		4,994,363,450	-
67	Kab. Solok	742,758,378	6,203,927,888		6,946,686,266	-
68	Kab. Tanah Datar	625,134,658	13,092,059,532		13,717,194,190	-
69	Kota Bukit Tinggi	662,307,951	3,875,101,228		4,537,409,179	-
70	Kota Padang Panjang	532,889,631	1,773,745,301		2,306,634,932	-
71	Kota Padang	664,055,403	2,934,327,753		3,598,383,156	-
72	Kota Payakumbuh	922,908,704	2,451,937,496		3,374,846,200	-
73	Kota Sawahlunto	3,220,971,322	1,964,724,462		5,185,695,784	-
74	Kota Solok	567,938,323	2,609,554,785		3,177,493,108	-
75	Kota Pariaman	1,840,784,169	1,405,158,116		3,245,942,285	-
76	Kab. Pasaman Barat	1,670,333,070	11,944,543,882		13,614,876,952	-
77	Kab. Dharmasraya	2,340,557,595	1,080,856,110		3,421,413,705	-
78	Kab. Solok Selatan	1,241,855,407	3,512,887,929		4,754,743,336	-
79	Provinsi Riau	76,162,213,842	4,165,836,724		80,328,050,566	-
80	Kab. Bengkalis	85,393,845,977	8,968,451,334		94,362,297,311	-
81	Kab. Indragiri Hilir	23,640,887,734	11,148,971,173		34,789,858,907	-
82	Kab. Indragiri Hulu	26,775,514,906	8,686,492,193		35,462,007,099	-
83	Kab. Kampar	32,747,044,942	11,060,552,501		43,807,597,443	-
84	Kab. Kuantan Singingi	29,577,652,875	3,166,248,717		32,743,901,592	-
85	Kab. Pelalawan	19,224,952,495	10,996,114,658		30,221,067,153	-
86	Kab. Rokan Hilir	43,609,488,954	7,276,718,040		50,886,206,994	-
87	Kab. Rokan Hulu	18,580,312,093	9,523,486,085		28,103,798,178	-
88	Kab. Siak	47,267,562,140	8,583,806,900		55,851,369,040	-
89	Kota Dumai	24,492,069,185	1,290,455,665		25,782,524,850	-
90	Kota Pekanbaru	14,177,023,760	7,627,506,519		21,804,530,279	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	23,671,113,899	4,578,382,925		28,249,496,824	-
92	Provinsi Jambi	3,101,450,729	1,823,411,131		4,924,861,860	-
93	Kab. Batanghari	5,325,607,851	10,842,293,026		16,167,900,877	-
94	Kab. Bungo	12,129,764,402	7,377,414,179		19,507,178,581	-
95	Kab. Kerinci	482,438,616	3,818,587,801		4,301,026,417	-
96	Kab. Merangin	1,665,274,250	11,287,141,568		12,952,415,818	-
97	Kab. Muaro Jambi	6,564,438,520	9,821,221,392		16,385,659,912	-
98	Kab. Sarolangun	4,738,969,458	6,181,812,438		10,920,781,896	-
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,155,303,837	2,924,329,539		4,079,633,376	-
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1,734,670,868	7,123,833,912		8,858,504,780	-
101	Kab. Tebo	3,435,425,386	9,070,222,243		12,505,647,629	-
102	Kota Jambi	2,627,287,615	18,953,538,935		21,580,826,550	-
103	Kota Sungai Penuh	456,647,739	1,767,501,254		2,224,148,993	-
104	Provinsi Sumatera Selatan	27,419,625,676	3,285,140,024		30,704,765,700	-
105	Kab. Lahat	4,402,588,757	12,642,117,847		17,044,706,604	-
106	Kab. Musi Banyuasin	18,626,822,011	14,594,519,770		33,221,341,781	-
107	Kab. Musi Rawas	10,130,879,934	6,604,254,134		16,735,134,068	-
108	Kab. Muara Enim	30,190,627,792	9,263,746,056		39,454,373,848	-
109	Kab. Ogan Komering Ilir	5,114,755,356	8,014,573,224		13,129,328,580	-
110	Kab. Ogan Komering Ulu	7,410,721,763	5,338,530,031		12,749,251,794	-
111	Kota Palembang	3,114,400,382	10,117,360,769		13,231,761,151	-
112	Kota Prabumulih	7,074,690,448	3,439,622,017		10,514,312,465	-
113	Kota Pagar Alam	8,105,839,498	1,533,755,982		9,639,595,480	-
114	Kota Lubuk Linggau	5,048,243,627	1,710,433,027		6,758,676,654	-
115	Kab. Banyuasin	11,127,899,010	5,462,286,707		16,590,185,717	-
116	Kab. Ogan Ilir	10,655,668,818	2,497,704,808		13,153,373,626	-
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	7,984,315,133	6,642,441,006		14,626,756,139	-
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	5,610,529,263	6,939,571,841		12,550,101,104	-
119	Kab. Empat Lawang	6,019,419,112	2,908,819,144		8,928,238,256	-
120	Kab. Penulak Abab Lematang Ilir	3,231,233,030	2,142,945,957		5,374,178,987	-
121	Kab. Musi Rawas Utara	11,436,396,424	3,771,654,640		15,208,051,064	-
122	Provinsi Bengkulu	17,166,684,526	997,240,922		18,163,925,448	-
123	Kab. Bengkulu Selatan	3,133,613,716	4,198,548,927		7,332,162,643	-
124	Kab. Bengkulu Utara	31,931,195,276	9,579,434,197		41,510,629,473	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
125	Kab. Rejang Lebong	3,465,453,638	6,655,353,684		10,120,807,322	-
126	Kota Bengkulu	1,762,817,006	7,010,669,667		8,773,486,673	-
127	Kab. Kaur	5,186,702,452	5,580,205,632		10,766,908,084	-
128	Kab. Seluma	4,339,580,447	3,106,211,123		7,445,791,570	-
129	Kab. Mukomuko	2,933,073,806	6,339,359,999		9,272,433,805	-
130	Kab. Lebong	5,481,440,244	3,578,861,940		9,060,302,184	-
131	Kab. Kepahiang	3,437,059,051	4,418,045,720		7,855,104,771	-
132	Kab. Bengkulu Tengah	23,487,036,232	4,012,391,355		27,499,427,587	550,809,948
133	Provinsi Lampung	3,591,803,539	6,364,861,692		9,956,665,231	-
134	Kab. Lampung Barat	1,043,120,018	3,806,594,033		4,849,714,051	-
135	Kab. Lampung Selatan	3,214,693,807	1,422,096,435		4,636,790,242	-
136	Kab. Lampung Tengah	1,836,097,148	16,835,044,677		18,671,141,825	-
137	Kab. Lampung Utara	1,289,267,222	4,205,428,652		5,494,695,874	-
138	Kab. Lampung Timur	480,012,454	10,102,291,989		10,582,304,443	-
139	Kab. Tanggamus	2,597,044,819	10,023,794,290		12,620,839,109	-
140	Kab. Tulang Bawang	1,657,223,961	3,580,972,242		5,238,196,203	-
141	Kab. Way Kanan	2,208,026,267	5,888,957,700		8,096,983,967	-
142	Kota Bandar Lampung	929,971,860	8,893,938,141		9,823,910,001	-
143	Kota Metro	935,245,752	3,040,771,336		3,976,017,088	-
144	Kab. Pesawaran	1,274,348,565	2,174,196,438		3,448,545,003	-
145	Kab. Pringsewu	918,804,481	3,960,175,298		4,878,979,779	-
146	Kab. Mesuji	2,492,472,647	5,856,889,320		8,349,361,967	-
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1,419,038,024	5,251,742,630		6,670,780,654	-
148	Kab. Pesisir Barat	1,014,440,010	3,545,207,886		4,559,647,896	-
149	Provinsi DKI Jakarta	85,462,096,986	51,854,056,682		137,316,153,668	-
150	Provinsi Jawa Barat	10,687,101,838	13,757,117,808		24,444,219,646	-
151	Kab. Bandung	2,733,927,988	34,225,158,424		36,959,086,412	-
152	Kab. Bekasi	9,339,586,134	18,772,309,246		28,111,895,380	-
153	Kab. Bogor	2,648,719,465	31,394,461,404		34,043,180,869	-
154	Kab. Ciamis	1,352,206,407	9,331,162,467		10,683,368,874	-
155	Kab. Cianjur	2,279,449,184	9,579,906,975		11,859,356,159	-
156	Kab. Cirebon	2,380,463,682	17,605,958,949		19,986,422,631	-
157	Kab. Garut	2,356,480,781	22,540,167,838		24,896,648,619	-
158	Kab. Indramayu	6,892,024,566	15,463,303,207		22,355,327,773	-
159	Kab. Karawang	5,260,358,752	21,673,770,062		26,934,128,814	-
160	Kab. Kuningan	1,450,840,564	8,717,158,780		10,167,999,344	-
161	Kab. Majalengka	2,160,951,914	5,793,494,489		7,954,446,403	-
162	Kab. Purwakarta	1,734,513,019	1,508,714,130		3,243,227,149	-
163	Kab. Subang	8,181,680,064	14,737,752,991		22,919,433,055	-
164	Kab. Sukabumi	2,722,875,352	22,708,526,144		25,431,401,496	-
165	Kab. Sumedang	1,494,635,680	6,958,731,609		8,453,367,289	-
166	Kab. Tasikmalaya	2,153,052,370	11,615,844,064		13,768,896,434	-
167	Kota Bandung	1,789,395,751	24,016,823,218		25,806,218,969	-
168	Kota Bekasi	1,195,831,431	14,632,566,618		15,828,398,049	-
169	Kota Bogor	1,271,876,390	6,952,053,183		8,223,929,573	-
170	Kota Cirebon	1,352,388,505	4,295,224,714		5,647,613,219	-
171	Kota Depok	1,371,898,317	4,281,468,190		5,653,366,507	-
172	Kota Sukabumi	1,504,758,730	4,207,921,494		5,712,680,224	-
173	Kota Tasikmalaya	1,146,575,771	3,462,635,703		4,609,211,474	-
174	Kota Cimahi	1,301,438,878	7,118,559,288		8,419,998,166	-
175	Kota Banjar	3,484,720,979	2,506,824,083		5,991,545,062	-
176	Kab. Bandung Barat	1,905,762,070	21,879,670,269		23,785,432,339	-
177	Kab. Pangandaran	1,775,034,835	4,613,521,427		6,388,556,262	-
178	Provinsi Jawa Tengah	7,865,771,054	1,979,275,228		9,845,046,282	-
179	Kab. Banjarnegara	949,470,110	12,248,477,357		13,197,947,467	-
180	Kab. Banyumas	1,689,030,194	14,602,305,768		16,291,335,962	-
181	Kab. Batang	1,481,379,397	12,673,573,290		14,154,952,687	-
182	Kab. Blora	7,906,793,196	6,123,124,443		14,029,917,639	-
183	Kab. Boyolali	1,027,699,500	5,354,586,855		6,382,286,355	-
184	Kab. Brebes	1,068,560,714	5,618,858,272		6,687,418,986	-
185	Kab. Cilacap	2,571,977,954	2,826,262,107		5,398,240,061	-
186	Kab. Demak	969,334,262	15,300,592,474		16,269,926,736	-
187	Kab. Grobogan	1,962,703,481	7,664,965,017		9,627,668,498	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
188	Kab. Jepara	731,180,279	10,803,318,586		11,534,498,865	-
189	Kab. Karanganyar	1,306,593,831	4,751,303,937		6,057,897,768	-
190	Kab. Kebumen	1,224,665,922	8,049,772,374		9,274,438,296	-
191	Kab. Kendal	1,908,343,967	8,181,771,708		10,090,115,675	-
192	Kab. Klaten	1,574,863,894	22,751,822,986		24,326,686,880	-
193	Kab. Kudus	6,776,009,009	11,243,897,763		18,019,906,772	-
194	Kab. Magelang	1,367,899,312	11,647,251,644		13,015,150,956	-
195	Kab. Pati	1,015,198,110	5,571,216,446		6,586,414,556	-
196	Kab. Pekalongan	863,737,240	3,843,744,407		4,707,481,647	-
197	Kab. Pemalang	974,742,321	16,776,718,253		17,751,460,574	-
198	Kab. Purbalingga	764,999,143	15,888,815,303		16,653,814,446	-
199	Kab. Purworejo	1,021,083,069	15,570,771,896		16,591,854,965	-
200	Kab. Rembang	1,176,876,178	4,360,215,823		5,537,092,001	-
201	Kab. Semarang	1,229,050,116	6,448,680,737		7,677,730,853	-
202	Kab. Sragen	943,558,396	6,637,454,882		7,581,013,278	-
203	Kab. Sukoharjo	792,387,349	5,399,555,458		6,191,942,807	-
204	Kab. Tegal	1,211,429,516	4,992,123,047		6,203,552,563	-
205	Kab. Temanggung	565,478,224	10,703,436,047		11,268,914,271	-
206	Kab. Wonogiri	1,160,107,750	5,858,333,388		7,018,441,138	-
207	Kab. Wonosobo	661,321,030	17,133,952,924		17,795,273,954	-
208	Kota Magelang	496,610,730	3,976,890,073		4,473,500,803	-
209	Kota Pekalongan	1,348,533,538	2,839,237,294		4,187,770,832	-
210	Kota Salatiga	497,415,416	3,203,497,533		3,700,912,949	-
211	Kota Semarang	2,870,058,397	7,328,578,070		10,198,636,467	-
212	Kota Surakarta	4,670,672,940	6,647,853,184		11,318,526,124	-
213	Kota Tegal	881,402,520	1,920,999,971		2,802,402,491	-
214	Provinsi DI Yogyakarta	1,790,780,645	1,407,951,770	47,274,190,776	50,472,923,191	-
215	Kab. Bantul	631,411,093	5,290,956,801		5,922,367,894	-
216	Kab. Gunung Kidul	558,420,637	7,959,740,206		8,518,160,843	-
217	Kab. Kulon Progo	383,460,893	6,586,451,919		6,969,912,812	-
218	Kab. Sleman	773,424,994	9,533,503,432		10,306,928,426	213,773,500
219	Kota Yogyakarta	1,858,297,358	8,820,897,170		10,679,194,528	-
220	Provinsi Jawa Timur	11,043,787,700	23,143,452,208		34,187,239,908	-
221	Kab. Bangkalan	1,121,146,174	12,637,764,518		13,758,910,692	-
222	Kab. Banyuwangi	12,299,616,957	10,299,047,637		22,598,664,594	-
223	Kab. Blitar	1,844,199,901	8,331,637,427		10,175,837,328	-
224	Kab. Bojonegoro	53,659,678,803	3,668,396,323		57,328,075,126	-
225	Kab. Bondowoso	3,284,079,672	4,599,804,742		7,883,884,414	-
226	Kab. Gresik	837,433,316	15,525,146,900		16,362,580,216	-
227	Kab. Jember	3,289,931,476	22,001,784,173		25,291,715,649	-
228	Kab. Jombang	1,542,658,663	16,092,065,714		17,634,724,377	-
229	Kab. Kediri	2,761,212,852	18,947,987,431		21,709,200,283	-
230	Kab. Lamongan	1,498,777,220	10,213,397,705		11,712,174,925	-
231	Kab. Lumajang	2,111,512,342	9,925,624,781		12,037,137,123	-
232	Kab. Madiun	2,179,323,311	10,013,785,017		12,193,108,328	-
233	Kab. Magetan	1,940,930,835	12,264,839,244		14,205,770,079	-
234	Kab. Malang	2,741,625,733	13,088,284,543		15,829,910,276	-
235	Kab. Mojokerto	1,334,762,500	8,851,939,717		10,186,702,217	-
236	Kab. Nganjuk	1,721,729,288	10,339,968,621		12,061,697,909	-
237	Kab. Ngawi	3,106,830,999	4,144,336,251		7,251,167,250	-
238	Kab. Pacitan	2,118,560,056	5,600,850,652		7,719,410,708	-
239	Kab. Pamekasan	2,434,502,213	8,405,790,435		10,840,292,648	-
240	Kab. Pasuruan	1,402,870,365	4,028,658,469		5,431,528,834	-
241	Kab. Ponorogo	2,354,408,166	5,003,889,882		7,358,298,048	-
242	Kab. Probolinggo	1,361,361,231	25,473,279,246		26,834,640,477	-
243	Kab. Sampang	3,131,267,643	(242,534,849)		2,888,732,794	-
244	Kab. Sidoarjo	13,806,740,225	34,575,809,847		48,382,550,072	-
245	Kab. Situbondo	2,437,535,752	8,048,063,186		10,485,598,938	-
246	Kab. Sumenep	2,388,104,438	14,558,871,418		16,946,975,856	-
247	Kab. Trenggalek	2,333,223,607	2,076,363,995		4,409,587,602	-
248	Kab. Tuban	3,300,618,849	24,393,389,641		27,694,008,490	-
249	Kab. Tulungagung	1,903,414,669	13,325,459,784		15,228,874,453	-
250	Kota Blitar	1,977,590,342	2,307,583,509		4,285,173,851	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
251	Kota Kediri	2,285,309,551	4,106,317,633		6,391,627,184	-
252	Kota Madiun	2,058,296,755	538,955,946		2,597,252,701	-
253	Kota Malang	1,142,828,079	9,156,096,157		10,298,924,236	-
254	Kota Mojokerto	1,539,266,556	3,202,609,952		4,741,876,508	-
255	Kota Pasuruan	2,177,803,180	2,461,983,561		4,639,786,741	-
256	Kota Probolinggo	1,995,627,158	4,240,978,832		6,236,605,990	-
257	Kota Surabaya	4,877,941,303	13,712,825,227		18,590,766,530	-
258	Kota Batu	1,461,608,745	3,408,442,934		4,870,051,679	-
259	Provinsi Kalimantan Barat	20,927,838,764	3,150,684,547		24,078,523,311	-
260	Kab. Bengkayang	2,989,050,732	5,544,092,180		8,533,142,912	-
261	Kab. Landak	3,300,187,798	4,358,611,621		7,658,799,419	-
262	Kab. Kapuas Hulu	9,488,192,993	515,738,170		10,003,931,163	-
263	Kab. Ketapang	14,924,276,229	12,999,072,121		27,923,348,350	-
264	Kab. Mempawah	2,460,472,865	8,759,080,378		11,219,553,243	-
265	Kab. Sambas	3,139,442,229	12,337,470,511		15,476,912,740	-
266	Kab. Sanggau	7,448,826,860	8,958,792,329		16,407,619,189	-
267	Kab. Sintang	6,729,911,000	2,174,412,172		8,904,323,172	-
268	Kota Pontianak	910,167,034	7,740,329,011		8,650,496,045	-
269	Kota Singkawang	1,029,482,087	1,402,163,945		2,431,646,032	-
270	Kab. Sekadau	1,717,407,351	8,558,192,639		10,275,599,990	-
271	Kab. Melawi	8,707,490,917	3,511,096,726		12,218,587,643	-
272	Kab. Kayong Utara	3,257,823,795	1,532,952,406		4,790,776,201	-
273	Kab. Kubu Raya	5,424,228,338	5,102,871,396		10,527,099,734	-
274	Provinsi Kalimantan Tengah	32,596,739,920	1,399,108,144		33,995,848,064	-
275	Kab. Barito Selatan	8,055,288,265	933,933,280		8,989,221,545	-
276	Kab. Barito Utara	33,615,505,058	7,260,691,891		40,876,196,949	-
277	Kab. Kapuas	3,201,404,822	2,816,384,268		6,017,789,090	-
278	Kab. Kotawaringin Barat	7,780,961,071	3,667,283,251		11,448,244,322	-
279	Kab. Kotawaringin Timur	11,108,091,528	3,796,274,720		14,904,366,248	-
280	Kota Palangkaraya	1,478,642,393	2,783,136,723		4,261,779,116	-
281	Kab. Katingan	9,308,797,670	6,244,462,033		15,553,259,703	-
282	Kab. Seruyan	12,680,544,899	4,942,078,469		17,622,623,368	-
283	Kab. Sukamara	4,158,327,777	4,935,472,918		9,093,800,695	-
284	Kab. Lamandau	7,050,502,462	4,892,587,237		11,943,089,699	-
285	Kab. Gunung Mas	7,280,916,846	2,284,476,701		9,565,393,547	-
286	Kab. Pulang Pisau	1,929,344,263	4,155,027,754		6,084,372,017	-
287	Kab. Murung Raya	33,099,569,859	114,120,196		33,213,690,055	-
288	Kab. Barito Timur	8,226,817,334	2,778,362,786		11,005,180,120	-
289	Provinsi Kalimantan Selatan	193,490,439,494	2,915,313,743		196,405,753,237	-
290	Kab. Banjar	89,639,627,138	6,894,273,297		96,533,900,435	-
291	Kab. Barito Kuala	30,729,702,843	7,877,250,083		38,606,952,926	-
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	45,964,906,892	5,100,272,877		51,065,179,769	-
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	39,383,960,405	8,981,783,262		48,365,743,667	-
294	Kab. Hulu Sungai Utara	38,372,460,217	4,242,796,249		42,615,256,466	-
295	Kab. Kotabaru	122,481,441,098	19,700,755,722		142,182,196,820	-
296	Kab. Tabalong	149,463,150,347	986,196,497		150,449,346,844	-
297	Kab. Tanah Laut	41,148,951,053	15,725,421,625		56,874,372,678	-
298	Kab. Tapin	47,507,394,392	6,743,364,177		54,250,758,569	-
299	Kota Banjarbaru	35,876,090,127	3,226,111,726		39,102,201,853	-
300	Kota Banjarmasin	29,299,478,665	10,395,095,312		39,694,573,977	-
301	Kab. Balangan	164,528,529,889	8,004,666,190		172,533,196,079	-
302	Kab. Tanah Bumbu	35,502,035,559	4,503,221,750		40,005,257,309	-
303	Provinsi Kalimantan Timur	64,126,494,105	7,531,609,368		71,658,103,473	-
304	Kab. Berau	85,406,055,022	9,022,775,331		94,428,830,353	-
305	Kab. Kutai Kartanegara	78,641,248,983	24,530,914,254		103,172,163,237	-
306	Kab. Kutai Barat	31,890,538,041	8,072,482,511		39,963,020,552	-
307	Kab. Kutai Timur	114,339,001,610	3,896,214,270		118,235,215,880	-
308	Kab. Paser	97,169,936,845	690,144,922		97,860,081,767	-
309	Kota Balikpapan	20,724,333,964	15,397,832,133		36,122,166,097	-
310	Kota Bontang	26,953,807,922	5,123,184,265		32,076,992,187	-
311	Kota Samarinda	53,811,201,431	7,078,546,009		60,889,747,440	-
312	Kab. Penajam Paser Utara	32,797,591,185	1,281,213,824		34,078,805,009	-
313	Kab. Mahakam Ulu	31,190,351,458	869,104,759		32,059,456,217	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
314	Provinsi Sulawesi Utara	3,697,200,684	2,861,022,680		6,558,223,364	-
315	Kab. Bolaang Mongondow	4,065,646,213	6,732,588,120		10,798,234,333	-
316	Kab. Minahasa	429,351,758	9,388,548,285		9,817,900,043	-
317	Kab. Sangihe	417,443,999	5,317,995,803		5,735,439,802	-
318	Kota Bitung	1,244,823,895	3,089,640,997		4,334,464,892	-
319	Kota Manado	1,027,635,695	4,042,066,045		5,069,701,740	-
320	Kab. Kepulauan Talaud	563,339,141	2,868,224,254		3,431,563,395	-
321	Kab. Minahasa Selatan	579,765,817	5,260,678,270		5,840,444,087	-
322	Kota Tomohon	411,894,666	973,135,161		1,385,029,827	-
323	Kab. Minahasa Utara	12,360,146,404	4,371,979,740		16,732,126,144	-
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	404,597,936	1,935,278,981		2,339,876,917	-
325	Kota Kotamobagu	546,041,942	1,303,308,572		1,849,350,514	-
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1,009,692,387	5,375,659,165		6,385,351,552	-
327	Kab. Minahasa Tenggara	479,491,416	3,077,479,831		3,556,971,247	-
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3,055,152,279	347,774,671		3,402,926,950	-
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3,584,620,210	4,155,408,615		7,740,028,825	-
330	Provinsi Sulawesi Tengah	30,762,619,240	2,341,441,107		33,104,060,347	-
331	Kab. Banggai	37,986,997,296	8,188,474,634		46,175,471,930	-
332	Kab. Banggai Kepulauan	4,774,457,757	1,212,104,588		5,986,562,345	-
333	Kab. Buol	5,411,313,609	6,355,435,445		11,766,749,054	-
334	Kab. Tolitoli	5,900,620,884	3,546,494,632		9,447,115,516	-
335	Kab. Donggala	7,913,448,058	7,660,616,576		15,574,064,634	-
336	Kab. Morowali	6,008,787,078	6,716,398,638		12,725,185,716	-
337	Kab. Poso	8,294,364,010	5,455,057,157		13,749,421,167	-
338	Kota Palu	2,501,586,061	2,016,379,018		4,517,965,079	-
339	Kab. Parigi Moutong	11,978,965,860	7,408,007,334		19,386,973,194	251,441,400
340	Kab. Tojo Una Una	12,245,908,432	2,343,527,156		14,589,435,588	-
341	Kab. Sigi	5,763,986,977	11,195,883,834		16,959,870,811	-
342	Kab. Banggai Laut	4,690,264,768	1,455,674,525		6,145,939,293	-
343	Kab. Morowali Utara	14,586,677,031	5,568,198,650		20,154,875,681	-
344	Provinsi Sulawesi Selatan	6,504,897,318	23,370,404,728		29,875,302,046	-
345	Kab. Bantaeng	588,967,364	3,604,729,445		4,193,696,809	-
346	Kab. Barru	759,550,134	6,013,881,200		6,773,431,334	-
347	Kab. Bone	2,382,700,160	7,936,945,151		10,319,645,311	-
348	Kab. Bulukumba	4,871,368,286	12,504,499,446		17,375,867,732	-
349	Kab. Enrekang	1,034,861,581	3,920,523,908		4,955,385,489	-
350	Kab. Gowa	1,128,888,039	6,511,889,223		7,640,777,262	-
351	Kab. Jeneponto	776,517,003	1,847,770,455		2,624,287,458	-
352	Kab. Luwu	1,122,527,125	7,052,262,876		8,174,790,001	-
353	Kab. Luwu Utara	1,634,347,581	6,775,660,803		8,410,008,384	-
354	Kab. Maros	2,238,304,516	13,083,350,465		15,321,654,981	-
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	1,635,564,666	3,912,380,274		5,547,944,940	-
356	Kota Palopo	861,679,219	1,563,790,882		2,425,470,101	-
357	Kab. Luwu Timur	4,417,437,963	4,738,495,469		9,155,933,432	-
358	Kab. Pinrang	774,111,177	3,082,496,584		3,856,607,761	-
359	Kab. Sinjai	646,957,448	7,150,650,346		7,797,607,794	-
360	Kab. Kepulauan Selayar	1,265,715,965	6,724,551,297		7,990,267,262	-
361	Kab. Sidenreng Rappang	1,224,190,776	932,183,612		2,156,374,388	-
362	Kab. Soppeng	945,817,962	969,192,051		1,915,010,013	-
363	Kab. Takalar	745,684,461	2,448,576,199		3,194,260,660	-
364	Kab. Tana Toraja	942,397,516	9,056,991,020		9,999,388,536	-
365	Kab. Wajo	16,671,618,843	5,523,626,690		22,195,245,533	-
366	Kota Parepare	809,192,756	1,213,480,642		2,022,673,398	-
367	Kota Makassar	1,010,229,340	1,338,022,819		2,348,252,159	-
368	Kab. Toraja Utara	1,488,944,486	1,994,354,834		3,483,299,320	-
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	7,180,139,547	2,624,757,005		9,804,896,552	-
370	Kab. Buton	538,269,923	2,370,782,298		2,909,052,221	-
371	Kab. Konawe	9,548,935,589	982,705,135		10,531,640,724	-
372	Kab. Kolaka	10,418,285,208	705,923,561		11,124,208,769	-
373	Kab. Muna	438,331,431	3,214,759,165		3,653,090,596	-
374	Kota Kendari	282,932,891	2,190,542,054		2,473,474,945	-
375	Kota Bau-bau	498,287,151	5,851,925,170		6,350,212,321	-
376	Kab. Konawe Selatan	1,124,751,657	13,046,511,843		14,171,263,500	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
377	Kab. Bombana	3,356,848,769	5,044,795,103		8,401,643,872	-
378	Kab. Wakatobi	436,647,330	10,019,328,305		10,455,975,635	-
379	Kab. Kolaka Utara	4,153,074,010	3,305,684,566		7,458,758,576	-
380	Kab. Konawe Utara	13,443,791,161	170,404,540		13,614,195,701	-
381	Kab. Buton Utara	475,146,134	2,834,128,560		3,309,274,694	-
382	Kab. Konawe Kepulauan	577,130,844	1,377,255,410		1,954,386,254	-
383	Kab. Kolaka Timur	523,081,896	4,072,100,708		4,595,182,604	-
384	Kab. Muna Barat	384,257,534	347,009,446		731,266,980	-
385	Kab. Buton Tengah	523,596,889	5,087,753,020		5,611,349,909	-
386	Kab. Buton Selatan	712,440,422	589,172,608		1,301,613,030	-
387	Provinsi Bali	14,184,047,887	3,728,077,676		17,912,125,563	-
388	Kab. Badung	18,081,235,757	10,358,373,337		28,439,609,094	-
389	Kab. Bangli	1,028,062,545	4,568,442,189		5,596,504,734	-
390	Kab. Buleleng	469,839,857	9,686,380,876		10,156,220,733	-
391	Kab. Gianyar	2,882,000,892	10,495,438,012		13,377,438,904	-
392	Kab. Jembrana	1,546,916,726	7,704,722,339		9,251,639,065	-
393	Kab. Karangasem	1,130,250,056	10,642,118,034		11,772,368,090	-
394	Kab. Klungkung	363,395,467	4,490,512,277		4,853,907,744	-
395	Kab. Tabanan	870,412,078	12,775,109,504		13,645,521,582	-
396	Kota Denpasar	995,816,312	13,000,596,952		13,996,413,264	-
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	12,277,091,544	3,111,441,735		15,388,533,279	-
398	Kab. Bima	5,573,031,545	5,315,183,083		10,888,214,628	-
399	Kab. Dompu	4,356,917,749	1,542,070,042		5,898,987,791	-
400	Kab. Lombok Barat	2,170,821,288	5,141,674,080		7,312,495,368	-
401	Kab. Lombok Tengah	3,120,929,870	10,099,984,477		13,220,914,347	-
402	Kab. Lombok Timur	1,669,735,836	6,805,211,775		8,474,947,611	-
403	Kab. Sumbawa	5,322,077,878	15,432,092,468		20,754,170,346	-
404	Kota Mataram	2,372,640,675	5,170,753,492		7,543,394,167	-
405	Kota Bima	4,214,275,584	2,996,192,986		7,210,468,570	-
406	Kab. Sumbawa Barat	30,628,052,602	2,732,861,803		33,360,914,405	-
407	Kab. Lombok Utara	3,633,115,844	2,009,433,094		5,642,548,938	-
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,674,838,702	8,910,484,743		12,585,323,445	-
409	Kab. Alor	750,097,466	13,550,225,140		14,300,322,606	-
410	Kab. Belu	1,715,663,503	14,792,425,728		16,508,089,231	-
411	Kab. Ende	1,713,939,703	14,691,331,602		16,405,271,305	-
412	Kab. Flores Timur	813,445,375	5,754,318,910		6,567,764,285	-
413	Kab. Kupang	1,539,721,154	19,246,791,245		20,786,512,399	-
414	Kab. Lembata	663,098,406	5,211,712,516		5,874,810,922	-
415	Kab. Manggarai	561,677,221	2,730,377,676		3,292,054,897	-
416	Kab. Ngada	622,107,636	1,248,132,191		1,870,239,827	-
417	Kab. Sikka	669,181,430	262,764,647		931,946,077	-
418	Kab. Sumba Barat	662,745,227	1,987,737,939		2,650,483,166	-
419	Kab. Sumba Timur	1,643,695,731	1,580,441,525		3,224,137,256	-
420	Kab. Timor Tengah Selatan	1,763,216,402	15,728,645,329		17,491,861,731	-
421	Kab. Timor Tengah Utara	2,045,814,862	4,186,779,487		6,232,594,349	-
422	Kota Kupang	492,327,956	7,326,774,036		7,819,101,992	-
423	Kab. Rote Ndao	499,455,291	4,302,418,610		4,801,873,901	-
424	Kab. Manggarai Barat	439,959,716	7,098,430,136		7,538,389,852	-
425	Kab. Nagekeo	467,122,722	1,539,068,578		2,006,191,300	-
426	Kab. Sumba Barat Daya	874,194,741	6,354,819,506		7,229,014,247	-
427	Kab. Sumba Tengah	710,896,310	2,152,689,125		2,863,585,435	-
428	Kab. Manggarai Timur	590,720,072	8,954,906,899		9,545,626,971	-
429	Kab. Sabu Raijua	462,239,673	4,285,814,056		4,748,053,729	-
430	Kab. Malaka	370,199,009	5,326,270,437		5,696,469,446	-
431	Provinsi Maluku	12,647,692,698	4,094,300,349		16,741,993,047	-
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	3,562,524,375	3,368,182,551		6,930,706,926	-
433	Kab. Maluku Tengah	2,637,300,954	1,713,550,024		4,350,850,978	-
434	Kab. Maluku Tenggara	1,139,744,338	1,405,250,064		2,544,994,402	-
435	Kab. Buru	4,743,486,025	1,215,578,955		5,959,064,980	-
436	Kota Ambon	984,755,037	2,677,719,814		3,662,474,851	-
437	Kab. Seram Bagian Barat	5,345,260,865	5,431,272,021		10,776,532,886	-
438	Kab. Seram Bagian Timur	6,116,405,237	494,135,396		6,610,540,633	-
439	Kab. Kepulauan Aru	2,059,632,566	10,747,376,463		12,807,009,029	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
440	Kota Tual	892,094,274	3,128,460,338		4,020,554,612	-
441	Kab. Maluku Barat Daya	1,721,227,573	15,855,801,315		17,577,028,888	-
442	Kab. Buru Selatan	5,147,246,025	306,002,922		5,453,248,947	-
443	Provinsi Papua	46,198,825,163	2,722,689,130		48,921,514,293	-
444	Kab. Biak Numfor	6,441,992,555	6,205,696,001		12,647,688,556	-
445	Kab. Jayapura	5,987,648,688	2,098,012,150		8,085,660,838	-
446	Kab. Jayawijaya	7,147,617,911	1,933,365,171		9,080,983,082	-
447	Kab. Merauke	8,000,193,989	7,291,271,057		15,291,465,046	3,193,292,549
448	Kab. Mimika	48,690,463,954	1,222,928,109		49,913,392,063	-
449	Kab. Nabire	8,243,392,678	7,740,692,812		15,984,085,490	-
450	Kab. Paniai	12,753,276,906	160,535,124		12,913,812,030	-
451	Kab. Puncak Jaya	10,768,275,597	1,522,364,978		12,290,640,575	-
452	Kab. Kepulauan Yapen	3,439,643,583	4,749,643,226		8,189,286,809	-
453	Kota Jayapura	2,818,917,760	1,879,370,374		4,698,288,134	-
454	Kab. Sarmi	12,342,635,821	533,281,700		12,875,917,521	-
455	Kab. Keerom	9,834,498,765	11,303,852,449		21,138,351,214	-
456	Kab. Yahukimo	11,809,605,975	592,638,300		12,402,244,275	-
457	Kab. Pegunungan Bintang	3,842,146,854	1,275,841,440		5,117,988,294	-
458	Kab. Tolikara	3,139,887,974	2,042,840,960		5,182,728,934	-
459	Kab. Boven Digoel	4,478,244,694	871,652,360		5,349,897,054	-
460	Kab. Mappi	3,453,841,344	7,580,640,359		11,034,481,703	-
461	Kab. Asmat	4,267,455,775	1,797,951,647		6,065,407,422	-
462	Kab. Waropen	8,686,333,007	562,846,717		9,249,179,724	-
463	Kab. Supiori	4,182,909,893	1,482,940,027		5,665,849,920	-
464	Kab. Mamberamo Raya	32,867,122,346	53,724,840		32,920,847,186	-
465	Kab. Mamberamo Tengah	3,177,834,138	9,368,041,500		12,545,875,638	-
466	Kab. Yalimo	2,644,289,810	2,200,721,910		4,845,011,720	-
467	Kab. Lanny Jaya	2,699,157,097	2,759,219,027		5,458,376,124	-
468	Kab. Nduga	2,453,770,278	3,214,236,340		5,668,006,618	-
469	Kab. Dogiyai	3,897,581,951	1,513,580,298		5,411,162,249	-
470	Kab. Puncak	3,304,027,241	653,981,900		3,958,009,141	-
471	Kab. Intan Jaya	3,822,129,184	2,794,238,440		6,616,367,624	-
472	Kab. Deiyai	4,471,466,759	133,741,744		4,605,208,503	-
473	Provinsi Maluku Utara	20,516,064,873	649,783,720		21,165,848,593	-
474	Kab. Halmahera Tengah	5,685,442,282	567,286,655		6,252,728,937	-
475	Kota Ternate	1,696,809,299	1,758,678,336		3,455,487,635	-
476	Kab. Halmahera Barat	2,967,690,649	1,659,982,129		4,627,672,778	-
477	Kab. Halmahera Timur	35,375,875,597	3,061,620,182		38,437,495,779	-
478	Kab. Halmahera Selatan	5,534,574,331	4,231,633,692		9,766,208,023	-
479	Kab. Halmahera Utara	27,563,715,366	1,050,015,871		28,613,731,237	-
480	Kab. Kepulauan Sula	18,170,939,826	2,594,106,065		20,765,045,891	-
481	Kota Tidore Kepulauan	3,351,259,410	2,107,209,055		5,458,468,465	-
482	Kab. Pulau Morotai	2,631,312,699	2,001,516,997		4,632,829,696	-
483	Kab. Pulau Taliabu	6,146,913,620	377,879,615		6,524,793,235	-
484	Provinsi Banten	1,524,868,775	3,475,225,884		5,000,094,659	-
485	Kab. Lebak	2,094,977,069	10,145,392,520		12,240,369,589	-
486	Kab. Pandeglang	1,571,253,973	39,756,893,379		41,328,147,352	-
487	Kab. Serang	1,069,348,424	10,705,056,455		11,774,404,879	-
488	Kab. Tangerang	1,438,062,194	11,863,661,449		13,301,723,643	-
489	Kota Cilegon	363,572,202	3,360,892,805		3,724,465,007	-
490	Kota Tangerang	1,225,134,898	8,495,259,607		9,720,394,505	-
491	Kota Serang	396,477,451	3,022,706,158		3,419,183,609	-
492	Kota Tangerang Selatan	557,963,143	10,762,388,531		11,320,351,674	-
493	Provinsi Bangka Belitung	17,451,494,196	1,827,221,887		19,278,716,083	-
494	Kab. Bangka	4,951,605,088	5,702,020,583		10,653,625,671	-
495	Kab. Belitung	9,572,946,938	19,327,211,591		28,900,158,529	815,176,230
496	Kota Pangkal Pinang	1,589,860,822	3,659,696,779		5,249,557,601	-
497	Kab. Bangka Selatan	18,333,036,144	3,013,592,080		21,346,628,224	-
498	Kab. Bangka Tengah	5,614,775,833	747,835,304		6,362,611,137	-
499	Kab. Bangka Barat	16,396,676,443	3,658,155,890		20,054,832,333	-
500	Kab. Belitung Timur	5,845,800,930	981,545,219		6,827,346,149	-
501	Provinsi Gorontalo	4,820,998,436	1,605,579,800		6,426,578,236	-
502	Kab. Boalemo	1,025,986,813	4,325,806,060		5,351,792,873	-

No.	Nama Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Keistimewaan DIY	Total Piutang Transfer ke Daerah	Piutang TKDD Lainnya - Piutang Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
503	Kab. Gorontalo	1,214,189,160	4,829,425,937		6,043,615,097	-
504	Kota Gorontalo	477,497,273	2,061,749,251		2,539,246,524	-
505	Kab. Pohuwato	2,715,902,355	1,336,337,112		4,052,239,467	-
506	Kab. Bone Bolango	2,058,959,408	4,104,511,933		6,163,471,341	-
507	Kab. Gorontalo Utara	2,193,504,245	945,310,020		3,138,814,265	-
508	Provinsi Kepulauan Riau	27,349,630,774	675,922,067		28,025,552,841	-
509	Kab. Natuna	28,402,523,769	9,392,842,350		37,795,366,119	-
510	Kab. Kepulauan Anambas	23,759,528,649	458,265,829		24,217,794,478	-
511	Kab. Karimun	7,551,219,354	8,156,262,678		15,707,482,032	-
512	Kota Batam	5,543,004,767	21,548,116,002		27,091,120,769	-
513	Kota Tanjung Pinang	8,004,542,831	3,416,507,732		11,421,050,563	-
514	Kab. Lingga	9,340,993,859	6,376,384,383		15,717,378,242	-
515	Kab. Bintan	10,082,952,521	8,329,338,757		18,412,291,278	-
516	Provinsi Papua Barat	127,418,953,393	7,297,881,084		134,716,834,477	-
517	Kab. Fak Fak	4,089,820,545	729,519,907		4,819,340,452	-
518	Kab. Manokwari	10,188,232,316	946,954,797		11,135,187,113	-
519	Kab. Sorong	29,728,278,668	333,225,433		30,061,504,101	-
520	Kota Sorong	3,109,055,316	594,308,516		3,703,363,832	-
521	Kab. Raja Ampat	5,728,731,554	12,214,505,491		17,943,237,045	-
522	Kab. Sorong Selatan	6,355,253,371	480,275,551		6,835,528,922	-
523	Kab. Teluk Bintuni	9,985,835,022	4,578,346,295		14,564,181,317	-
524	Kab. Teluk Wondama	10,339,479,355	1,674,394,868		12,013,874,223	-
525	Kab. Kaimana	5,863,332,094	3,478,398,620		9,341,730,714	-
526	Kab. Maybrat	3,984,322,350	169,362,300		4,153,684,650	-
527	Kab. Tambrauw	3,853,816,421	35,126,760		3,888,943,181	-
528	Kab. Manokwari Selatan	2,817,967,807	480,562,899		3,298,530,706	-
529	Kab. Pegunungan Arfak	3,255,623,350	34,186,631,098		37,442,254,448	-
530	Provinsi Sulawesi Barat	1,867,348,983	1,138,364,458		3,005,713,441	-
531	Kab. Majene	510,708,930	1,401,466,235		1,912,175,165	-
532	Kab. Mamuju	1,130,477,439	2,708,012,751		3,838,490,190	-
533	Kab. Polewali Mandar	551,072,118	2,115,670,680		2,666,742,798	-
534	Kab. Mamasa	1,514,900,386	1,940,366,340		3,455,266,726	-
535	Kab. Pasangkayu	1,596,573,711	3,660,893,128		5,257,466,839	-
536	Kab. Mamuju Tengah	1,095,976,855	2,681,917,334		3,777,894,189	-
537	Provinsi Kalimantan Utara	83,039,779,504	2,256,119,281		85,295,898,785	-
538	Kab. Bulungan	47,781,713,320	5,129,435,117		52,911,148,437	-
539	Kab. Malinau	27,428,333,943	4,865,878,739		32,294,212,682	-
540	Kab. Nunukan	50,242,545,837	7,422,524,947		57,665,070,784	-
541	Kota Tarakan	15,725,959,437	4,807,982,592		20,533,942,029	-
542	Kab. Tana Tidung	24,821,175,576	5,017,998,305		29,839,173,881	-
		5,130,764,211,892	3,393,625,091,684	47,274,190,776	8,571,663,494,352	6,663,568,678
TKDD Diestimasi						1,616,216,532,079
TOTAL						10,194,543,595,109

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total	Mutasi	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)
JUMLAH	37.947.642.314.451	30.470.191.881.578	31.985.212.172.510	100.403.046.368.539	12.007.898.016.598	88.395.148.351.941

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

a Asset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2021 Audited	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	1.396.657.532	21.776.684.239.724	383.384.160	7.309.167.027.311	1.013.273.372	14.467.517.212.412
Dollar Australia (AUD)	7.721	81.622.576	530	7.015.575	7.191	74.607.001
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	(12.807.644)	(23.454.894.280)	12.807.644	23.454.894.280
Dollar Selandia Baru (NZD)	1.785.135	17.610.460.332	-	191.848.420	1.785.135	17.418.611.912
Dollar Singapura (SGD)	412.424	4.788.352.889	-	426.269.342	412.424	4.362.083.546
Euro (EUR)	51.100.302	848.704.480.780	(32.553.555)	(502.829.829.470)	83.653.858	1.351.534.310.250
Gulden Belanda (NLG)	195.945	1.476.772.375	189.552	1.429.899.486	6.393	46.872.889
Italian Lira (ITL)	777.963.520	6.673.080.158	-	6.673.080.158	-	-
Mark Jerman (DEM)	1.562.424	13.267.855.895	1.562.424	13.267.855.895	-	-
Poundsterling (GBP)	349.627	6.576.540.894	-	(169.603.815)	349.627	6.746.144.709
Rupiah (IDR)	12.413.520.076.954	12.413.520.076.954	2.332.147.446.896	2.332.147.446.896	10.081.372.630.058	10.081.372.630.058
Yen Jepang (JPY)	5.708.440.804	673.344.272.579	-	(34.749.562.548)	5.708.440.804	708.093.835.127
Jumlah	12.421.458.552.388	35.762.727.755.156	2.332.487.222.363	9.102.106.552.970	10.088.193.366.506	26.660.621.202.184

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2021 Audited	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	50.023.651	779.968.766.704	21.667.066	375.093.447.930	28.356.585	404.875.318.774
Dollar Australia (AUD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Singapura (SGD)	-	-	-	-	-	-
Euro (EUR)	-	-	-	-	-	-
Gulden Belanda (NLG)	-	-	-	-	-	-
Mark Jerman (DEM)	-	-	-	-	-	-
Poundsterling (GBP)	-	-	-	-	-	-
Rupiah (IDR)	1.404.965.792.590	1.404.965.792.590	93.664.826.245	93.664.826.245	1.311.300.966.345	1.311.300.966.345
Yen Jepang (JPY)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.405.015.816.241	2.184.934.559.294	93.686.493.311	468.758.274.175	1.311.329.322.930	1.716.176.285.119

*Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2021 Audited	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	1.446.681.183	22.556.653.006.428	405.051.226	7.684.260.475.241	1.041.629.957	14.872.392.531.186
Dollar Australia (AUD)	7.721	81.622.576	530	7.015.575	7.191	74.607.001
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	(12.807.644)	(23.454.894.280)	12.807.644	23.454.894.280
Dollar Selandia Baru (NZD)	1.785.135	17.610.460.332	-	191.848.420	1.785.135	17.418.611.912
Dollar Singapura (SGD)	412.424	4.788.352.889	-	426.269.342	412.424	4.362.083.546
Euro (EUR)	51.100.302	848.704.480.780	(32.553.555)	(502.829.829.470)	83.653.858	1.351.534.310.250
Gulden Belanda (NLG)	195.945	1.476.772.375	189.552	1.429.899.486	6.393	46.872.889
Italian Lira (ITL)	777.963.520	6.673.080.158	-	6.673.080.158	-	-
Mark Jerman (DEM)	1.562.424	13.267.855.895	1.562.424	13.267.855.895	-	-
Poundsterling (GBP)	349.627	6.576.540.894	-	(169.603.815)	349.627	6.746.144.709
Rupiah (IDR)	13.818.465.869.545	13.818.465.869.545	2.425.792.273.142	2.425.792.273.142	11.392.673.596.403	11.392.673.596.403
Yen Jepang (JPY)	5.708.440.804	673.344.272.579	-	(34.749.562.548)	5.708.440.804	708.093.835.127
Jumlah	13.826.454.368.630	37.947.642.314.451	2.426.153.715.675	9.570.844.827.146	11.399.522.689.436	28.376.797.487.303

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi	Saldo 31 Desember 2021 Audited	KPKNL
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	-	-	-	KPKNL Jakarta I
Setiawan Harjono, Hendarawan Harjono	Bank Aspac (BBKU)	3.550.593.854.094	- 28.818.181.819	3.579.412.035.913	KPKNL Jakarta I
Hindarto Tantular/Anton Tantular	Bank Central Dagang (BBKU)	1.470.120.709.878	-	1.470.120.709.878	KPKNL Jakarta I
Sjamsul Nursalim	Bank Dewa Rutji (BBKU)	-	- 334.294.427.214	334.294.427.214	KPKNL Jakarta I
Kaharudin Ongko	Bank Arya Panduartha (BBKU)	359.435.826.604	-	359.435.826.604	KPKNL Jakarta I
Sujanto Gondokusumo	Bank Dharmala (BBKU)	822.254.323.305	-	822.254.323.305	KPKNL Jakarta I
Kwan Benny Ahadi	Bank Orient (BBKU)	142.725.520.130	- 400.000.000	143.125.520.130	KPKNL Jakarta I
Andri Tedjadharna PT Centris Mekar Lestari Prasetyo Utomo Paul Banuara	Bank Centris (BBKU), PT	897.678.554.101	897.678.554.101	-	KPKNL Jakarta I
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000	-	170.144.000.000	KPKNL Jakarta II
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4.893.525.874.669	-	4.893.525.874.669	KPKNL Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000	-	70.460.000.000	KPKNL Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Bahari	406.415.000.000	-	406.415.000.000	KPKNL Jakarta II
I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509.986.363.636	-	509.986.363.636	KPKNL Jakarta II
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000	-	136.430.000.000	KPKNL Jakarta II
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000	-	596.794.000.000	KPKNL Jakarta II
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4.308.730.000.000	-	4.308.730.000.000	KPKNL Jakarta II
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.675.636.364	-	577.675.636.364	KPKNL Jakarta V
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000	-	155.727.000.000	KPKNL Jakarta V
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000	-	790.557.000.000	KPKNL Jakarta V
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	365.565.090.909	- 59.090.909.091	424.656.000.000	KPKNL Jakarta V
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.183	-	188.483.118.182	KPKNL Jakarta V
Samadikun Hartono	Bank Modern	2.328.905.860.968	- 196.745.713.735	2.525.651.574.703	KPKNL Jakarta V
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.727.984.148.737	-	7.727.984.148.737	KPKNL Jakarta V
Jumlah		30.470.191.881.578	278.329.322.242	30.191.862.559.335	

3. a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2021 Audited	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi
Rupiah (IDR)	11.098.156.098.003	11.098.156.098.003	121.746.550.280	121.746.550.280	10.976.409.547.723	10.976.409.547.723
Dollar Amerika (USD)	1.077.104.283	16.794.209.975.858	3.331.924	1.462.888.238.054	1.073.772.359	15.331.321.737.804
Dollar Australia (AUD)	1.351.561	14.287.866.193	-	265.270.901	1.351.561	14.022.595.292
Dollar Hongkong (HKD)	13.048.834	26.093.492.013	-	2.196.901.662	13.048.834	23.896.590.351
Dollar Selandia Baru (NZD)	252.281	2.488.767.202	-	27.112.639	252.281	2.461.654.563
Dollar Singapura (SGD)	223.678	2.596.961.710	217.192	2.528.362.462	6.486	68.599.248
Euro (EUR)	33.004.080	548.151.555.614	32.209.006	535.306.125.400	795.074	12.845.430.214
Gulden Belanda (NLG)	136.642	1.029.825.712	-	28.046.980	136.642	1.001.778.732
Poundsterling (GBP)	188.772	3.550.837.187	-	(91.573.297)	188.772	3.642.410.484
Yen Jepang (JPY)	998.413.744	117.768.791.746	-	(6.077.743.825)	998.413.744	123.846.535.571
Krona Swedia (SEK)	43.357	64.628.528	-	(3.777.245)	43.357	68.405.773
Krone Denmark (DKK)	86.826	193.917.012	-	5.304.219	86.826	188.612.793
Mark Jerman (DEM)	115.246	978.652.560	115.246	978.652.560	-	-
Franc Perancis (FRF)	1.428.156	3.616.039.583	1.428.156	3.616.039.583	-	-
Ringgit Malaysia (MYR)	173.080	615.515.750	173.080	615.515.750	-	-
Italian Lira (ITL)	-	-	-	-	-	-
Koreksi BPK ATK Hasil Inven		707.275.017.557				707.275.017.557
Jumlah	11.100.281.668.543	29.321.077.942.228	121.784.024.884	2.124.029.026.123	10.978.497.643.659	27.197.048.916.105

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi konversi	Saldo 31 Desember 2021 Audited	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271.003.330.924	271.003.330.924	-		271.003.330.924	271.003.330.924
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1.980.529.395.026	1.980.529.395.026	-		1.980.529.395.026	1.980.529.395.026
	Dollar Amerika	26.403.989	411.690.991.031	-	34.694.841.086	26.403.989	376.996.149.945
Eraska Tristi	Rupiah	893.182.300	893.182.300	-		893.182.300	893.182.300
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17.331.000	17.331.000	-		17.331.000	17.331.000
Total			2.664.134.230.281	-	34.694.841.086	2.252.469.643.239	2.629.439.389.195

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Total Saldo 31 Desember 2022	Mutasi	Saldo Total 31 Desember 2021
TOTAL	96.752.034.799.881	3.308.609.993.461	100.060.644.793.342	5.204.456.397.415	94.856.188.395.927

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)	Saldo 31 Desember 2021 nilai konversi
Dollar Amerika	4.018.728.212	62.660.010.275.339	(20.407)	5.280.317.502.681	4.018.748.618	57.379.692.772.659
Dollar Singapore	79.397	921.825.038	-	82.062.822	79.397	839.762.215
Rupiah	34.068.004.182.967	34.068.004.182.967	(49.896.184.866)	(49.896.184.866)	34.117.900.367.834	34.117.900.367.834
Yen Jepang	141.216.723	16.657.345.598	-	(859.642.677)	141.216.723	17.516.988.274
Deutchmark	758.513	6.441.170.939	-	175.423.266	758.513	6.265.747.673
Jumlah	34.072.164.965.811,80	96.752.034.799.881	(49.896.205.273)	5.229.819.161.226	34.122.061.171.085	91.522.215.638.655

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKNSI

(dalam rupiah)

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299.150.000	-	1.299.150.000
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108.990.024	-	108.990.024
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34.584.020.410	-	34.584.020.410
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69.168.040.820	-	69.168.040.820
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62.099.370.000	-	62.099.370.000
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.689	-	30.938.810.689
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.858	-	112.771.449.858
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425.983.823.549	-	425.983.823.549
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800	-	8.693.911.800
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097	-	91.489.249.097
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212.685.353.878	-	1.212.685.353.878
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.648	-	26.981.928.648
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	537.678.898.460	-	537.678.898.460
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000.000	-	45.000.000.000
PT Tuban Petrochemical Industries*	MCB & MYB	551.700.766.305	(26.897.039.197)	578.597.805.502
Jumlah		3.211.183.763.538	(26.897.039.197)	3.238.080.802.735

*Piutang yang tidak terkonversi berupa denda dan penalti MYB Tuban Petro selama 10 tahun

Group Texmaco (dalam perkara)*

No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 (Nilai Konversi)	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)	Saldo 31 Desember 2021 (Nilai konversi)
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24.561.586.875	24.561.586.875
2	Abdul Hadi	Rupiah	4.911.933	4.911.933
3	Faridah	Rupiah	2.528.941	2.528.941
4	Haryanto	Rupiah	59.267	59.267
5	Zainal Abidin	Rupiah	252.041	252.041
Jumlah			24.569.339.058	24.569.339.057

Debitur Dikembalikan ke Kantor Pusat

NO	KODE DEBITUR	NAMA	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)
1	03.02.00.00002021	GHAZIE AGUSNAN	Rupiah	11.813.746	11.813.746	-	-	11.813.746
2	03.02.00.00002148	PT. ADHIKARA DHARMA	Rupiah	39.340.455.507	39.340.455.507	-	-	39.340.455.507
3	03.02.00.00002225	BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN	Rupiah	250.000.000	250.000.000	-	-	250.000.000
4	03.02.00.00002226	BPR NUSAMBA TEMON	Rupiah	200.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000
5	03.02.00.00002264	PT. INDOKUNING FAJAR INDUSTRI	Rupiah	9.037.798.096	9.037.798.096	-	-	9.037.798.096
6	03.02.00.00002275	PT. SUPER DINAMIKA	Rupiah	5.811.023.048	5.811.023.048	-	-	5.811.023.048
7	03.02.00.00002281	CV. ARROZAQ RIENJAYA qq. PT. ASRI SUMBER LANCAR	Dollar Amerika	1.167.637	18.205.800.470	-	1.534.275.386	16.671.525.084
JUMLAH				54.652.258.034	72.856.890.867	-		71.322.615.481

Catatan

Kurs Penutup JISDOR

Kurs Mata Uang Asing	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1 Dollar Amerika (USD)	15.592,00	14.278,00
2 Dollar Australia (AUD)	10.571,38	10.375,11
3 Dollar Hongkong (HKD)	1.999,68	1.831,32
4 Dollar Selandia Baru (NZD)	9.865,06	9.757,59
5 Dollar Singapura (SGD)	11.610,26	10.576,69
6 Euro (EUR)	16.608,60	16.156,27
7 Gulden Belanda (NLG)	7.536,65	7.331,39
8 Poundsterling (GBP)	18.810,19	19.295,29
9 Rupiah (IDR)	1,00	1,00
10 Yen Jepang (JPY)	117,96	124,04
11 Deutschmark (DEM)	8.491,84	8.260,57
12 Krona Swedia (SEK) *)	1.490,62	1.577,74
13 Krone Denmark (DKK) *)	2.233,39	2.172,30

PIUTANG EKS BDL

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian	Saldo Hak Tagih
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2021	Pengembalian Periode s.d 31 Desember 2022	s.d. 31 Desember 2022	31-Dec-22
1	2	3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6	8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Talangan						
1	PT. Bank Anrico	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	63.002.518.549,78		72.535.475.889,85	137.545.252.485,88
2	PT. Bank Guna Internasional	251.055.008.000,00	183.555.008.000,00	55.493.047.500,21	124.008.951,00	239.307.666.518,21	11.747.341.481,79
3	PT. Bank Harapan Sentosa	3.866.182.312.852,07	585.728.056.499,00	107.474.466.218,52	109.470.679,00	693.442.155.374,52	3.172.724.472.811,55
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	9.063.346.280,00	10.000.000,00	34.180.626.026,19	167.621.540.909,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	201.812.614.291,48	46.872.202.071,00	53.392.579.322,83	135.120.140,00	100.901.871.121,83	100.910.743.169,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	336.763.209.866,98	31.186.000.000,00	10.008.577.476,00	90.909.091,00	41.285.486.567,00	295.477.723.299,98
7	PT. Bank Pasific	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	316.731.002.794,96	1.800.000,00	648.755.879.062,76	1.484.610.555.776,87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	388.909.597.926,15	87.371.555,00	1.246.474.377.486,80	440.875.137.885,73
9	PT. South East Asia Bank	899.399.023.305,99	99.302.719.380,89	102.264.315.664,79		201.567.035.045,68	697.831.988.260,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	110.105.997.130,87	6.970.134.600,00	28.025.558.872,00		34.995.693.472,00	75.110.303.658,87
11	PT. Astria Raya Bank	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	100.350.882.198,42	12.272.727.272,00	249.798.667.615,42	329.119.593.083,35
12	PT. Bank Pinaesaan	681.084.490.919,58	18.456.680.100,11	49.985.460.160,52	27.372.494,00	68.577.744.916,63	612.506.746.002,95
13	PT. Bank Jakarta	210.994.000.000,00	120.959.930.061,67	90.034.069.938,00		210.993.999.999,67	0,00
14	PT. Bank Industri	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	84.955.519.081,00	278.517.091,00	364.368.385.912,00	147.101.843.414,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	8.554.789.642,67	2.500.000.000,00	0,00		2.500.000.000,00	6.054.789.642,67
	Total BDL Eks Dana Talangan	11.888.938.781.558,30	2.730.645.774.151,38	1.459.690.941.983,18	13.137.297.273,00	4.209.685.065.008,56	7.679.238.031.883,39

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran kas ke Rekening			Total Pengembalian	Saldo Hak Tagih
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2021	Pengembalian Periode s.d 31 Desember 2022	s.d. 31 Desember 2022	31 Desember 2022
1	2	3				7 = Jumlah 4 s.d. 6	8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Penjaminan						
1	PT Bank Asiatic	886.579.224.443,83	5.000.000.000,00	84.535.687.898,00	195.989.530,00	89.731.677.428,00	796.847.547.015,83
2	PT Bank Dagang Bali	1.331.516.911.477,24	-	508.541.063.375,00	2.207.772.340,00	510.748.835.715,00	820.768.075.762,24
3	PT Bank Global Internasional	804.234.270.395,51	-	365.066.709.326,00	1.791.102.602,00	366.857.811.928,00	437.376.458.467,51
4	PT Bank Ratu	71.817.985.352,00	-	71.817.985.352,00	-	71.817.985.352,00	0,00
5	PT Bank Prasadha Utama	227.134.559.144,00	4.000.000.000,00	16.898.914.545,52	-	20.898.914.545,52	206.235.644.598,48
	Total BDL Eks Dana Penjaminan	3.321.282.950.812,58	9.000.000.000,00	1.046.860.360.496,52	4.194.864.472,00	1.060.055.224.968,52	2.261.227.725.844,06

TOTAL SALDO PIUTANG BDL	15.210.221.732.370,90	PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI	17.332.161.745,00	5.269.740.289.977,08	9.940.465.757.727,45

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH 2022

No	Uraian		Formula Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			Keterangan
				Saldo 31 Desember 2022	Nilai Agunan/Recovery Rate	Jumlah Penyisihan	
1	Aset kredit eks BPPN						
	a.	Selain Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham	Saldo piutang 31 Desember 2022 - (Saldo piutang 31 Desember 2022 x Recovery Rate)	69.932.854.486.962	2.515.816.963.445	67.417.037.523.517	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014
	b.	Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham	100% x (Saldo piutang 31 Desember 2022 - nilai agunan)	30.470.191.881.578	5.033.089.431.510	25.437.102.450.068	
2	Aset kredit eks kelolaan PT PPA		Saldo piutang 31 Desember 2022 - (Saldo piutang 31 Desember 2022 x Recovery Rate)	100.060.644.793.342	184.739.640.021	99.875.905.153.321	
3	Aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA		Saldo piutang 31 Desember 2022 - (Saldo piutang 31 Desember 2022 x Recovery Rate)	-	-	-	
4	Piutang eks BDL	100% x (Saldo piutang 31 Desember 2022 - nilai agunan)		9.940.465.757.727	985.636.207.959	8.954.829.549.768	Peraturan Menteri Keuangan No.69/PMK.06/2014
5	Piutang pada PT PPA	5% x (saldo piutang 31 Desember 2022)		-	-	-	
Jumlah				210.404.156.919.609	8.719.282.242.935	201.684.874.676.674	

ASET INVENTARIS EKS BPPN

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021		Mutasi Tahun 2022		Saldo 31 Desember 2022	
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar
1	Aset Inventaris	17,695	8,307,266,187	(6,116)	(2,640,961,515)	11,579	5,666,304,672
	a. Digunakan Instansi	11,269	6,391,600,338	(1,550)	(1,214,246,985)	9,719	5,177,353,353
	b. Tidak Digunakan (<i>idle</i>)	6,426	1,915,665,849	(4,566)	(1,426,714,530)	1,860	488,951,319

JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2021		Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2022	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	916	1,097,030,882,905	(3)	(95,757,910,313)	919	1,192,788,793,218.00
2	Temuan BPK	367	730,641,899,869	-	(106,966,286,000)	367	837,608,185,869.15
3	BJDA (verifikasi 2009)	63	281,187,736,000	-	(512,289,267,000)	63	793,477,003,000.00
4	Settlement	1	5,752,019,500	-	(6,374,852,500)	1	12,126,872,000.00
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-	-	-	-	-
	Sinar Bonana	42	139,208,400,000	-	-	42	139,208,400,000.00
6	Griya Potensa	2	295,000,000	-	-	2	295,000,000.00
7	Covernote	86	361,465,913,037	-	-	86	361,465,913,037.00
	Jumlah	1,477	2,615,581,851,311	(3)	(721,388,315,813)	1,480	3,336,970,167,124.15

RINCIAN ASET NOSTRO

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2021	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2022
Rekening Nostro tercatat dalam Neraca						
1	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha	Bank dalam negeri	Rp4,673,437,131.00	(Rp584,179,642)	Rp 4,089,257,489.50
2	BIRA	ClearStream Banking SA sebesar USD258.438,5	Bank luar negeri	Rp -		Rp -
3	Bank Bahari	Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD350.526,24	Bank luar negeri	Rp -		Rp -
Total				Rp4,673,437,131.00	(Rp584,179,642)	Rp 4,089,257,489.50
Rekening Nostro tercatat dalam CaLK						
1	Bank Central Dagang BBU	Bank CIC, Jakarta	Bank dalam negeri	Rp2,044,748.60		Rp2,044,748.60
3	BUN	BRI Cut Mutiah		Rp83,311,328.35		Rp83,311,328.35
4	BUN	Citibank		Rp8,776,916,074.45		Rp8,776,916,074.45
5	BDNI	BPR Tri Sejahtera Makmur, Jkt		Rp97,686,237.95		Rp97,686,237.95
6	BDNI	Bank Ganesha, Jkt		Rp706,429,119.47		Rp706,429,119.47
7	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha, Jkt		Rp196,059,779.49		Rp196,059,779.49
8	Bank Kharisma BBU	Bank Aspac	telah dikuidasi (BBO/BBKU)	Rp287,761.43		Rp287,761.43
9	Bank Budi Internasional BBU	Bank Astria (dalam likuidasi)		Rp6,601,373.85		Rp6,601,373.85
10	Bank Aken BBU	Bank Central Dagang		Rp625,069.88		Rp625,069.88
11	SANHO	Bank Central Dagang		Rp2,994,990.16		Rp2,994,990.16
14	HOKINDO	Bank Modern		Rp6,207,877.95		Rp6,207,877.95
15	SURYA	Bank Umum Majapahit		Rp122,086,331.08		Rp122,086,331.08
16	SANHO	Bank Umum Servitia		Rp4,887,591.05		Rp4,887,591.05
17	BDNI	BDNI Finance, Hongkong		Rp1,020,060,447.69		Rp1,020,060,447.69
18	HOKINDO	Bank Pelita		Rp6,017,122.84		Rp6,017,122.84
19	ARYA PANDUARTA	Bank Bahari		Rp11,739,033.84		Rp11,739,033.84
20	Bank Kharisma BBU	Indover Bank	Bank Indover	Rp141,402,439.43		Rp141,402,439.43
21	Bank Hastin Internasional BBU	Indover Bank		Rp361,433,693.83		Rp361,433,693.83
22	BUS	Indover Bank		Rp2,864,035.05		Rp2,864,035.05
23	BDI	Indover Bank		Rp268,237,424.51		Rp268,237,424.51
24	Bank Sahid Gajah Perkasa BBU	Indover Bank		Rp109,652,042.65		Rp109,652,042.65
25	BUN	Indover Bank		Rp925,492,300.93		Rp925,492,300.93
26	BUN	Indover Bank		Rp531,317,595.65		Rp531,317,595.65
27	Bank BIRA BBU	Indover Bank, Amsterdam		Rp24,530,231.65		Rp24,530,231.65
28	Bank Modern BBO	Indover Bank, Amsterdam		Rp32,416,251.32		Rp32,416,251.32
29	Bank Asia Pasific BBU	Indover Bank, Amsterdam		Rp16,993,382.21		Rp16,993,382.21
30	Bank Unibank BBU	Indover Bank, Amsterdam		Rp45,288,112.29		Rp45,288,112.29
31	Bank Unibank BBU	Indover Bank, Amsterdam		Rp24,849,497.60		Rp24,849,497.60
32	Bank Mashill Utama BBU	Indover Bank, Amsterdam		Rp354,542,691.02		Rp354,542,691.02
33	Bank Central Dagang BBU	Indover Bank, Amsterdam		Rp92,060,251.91		Rp92,060,251.91
34	Bank Ficorinvent BBU	Indover Bank, Amsterdam		Rp77,574,756.22		Rp77,574,756.22
35	DHARMALA	Indover Bank, Amsterdam		Rp1,139,267.42		Rp1,139,267.42
36	BDNI	Indover Bank, Amsterdam		Rp11,664,932.40		Rp11,664,932.40
37	BAHARI	Indover Bank, Amsterdam		Rp108,150,696.65		Rp108,150,696.65

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2021	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2022
38	PESONA	Indover Bank, Amsterdam		Rp120,045,719.99		Rp120,045,719.99
39	Mashil Utama	Indover Bank, Amsterdam		Rp341,740,942.42		Rp341,740,942.42
40	Bank Modern BBO	Indover Bank, Hamburg		Rp195,403,134.60		Rp195,403,134.60
41	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp956,004,466.45		Rp956,004,466.45
42	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp2,996,775.68		Rp2,996,775.68
43	BAHARI	Indover Bank, Hamburg		Rp254,274,894.54		Rp254,274,894.54
44	PESONA	Indover Bank, Hamburg		Rp27,358,123.38		Rp27,358,123.38
45	BDNI	Indover Ing Bank	Bank Indonesia	Rp122,424,186.80		Rp122,424,186.80
46	BDNI	Bank Indonesia		Rp406,733,525,331.33		Rp406,733,525,331.33
47	BDNI	Rekening Nostro (Unidentified)	tidak diketahui	Rp2,359,921,197.78		Rp2,359,921,197.78
48	BDNI	Keppel Bank, Singapore	Bank luar negeri	Rp2,257,377,867.88		Rp2,257,377,867.88
49	BDNI	Indovina Bank (Khusus Deviden)		Rp1,758,722,655.31		Rp1,758,722,655.31
50	BDNI	American Express Bank, NY		Rp1,834,239,834.61		Rp1,834,239,834.61
51	BDNI	ANZ Banking Group Bank		Rp666,429,511.70		Rp666,429,511.70
52	PESONA	Banca Comerciale		Rp61,815,826.61		Rp61,815,826.61
53	DHARMALA	Banco Ambrosiano (BAVE)		Rp44,241,246.97		Rp44,241,246.97
54	BDNI	Bank Boston, NA Singapore		Rp2,270,531.95		Rp2,270,531.95
55	SURYA	Bank Brussel Lambert		Rp378,699,549.31		Rp378,699,549.31
56	SURYA	Bank Credit Issue		Rp234,342,412.12		Rp234,342,412.12
57	Bank Yama BBKU	Bank Mashill		Rp58,834,913.90		Rp58,834,913.90
58	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Hongkong		Rp65,028,723.58		Rp65,028,723.58
59	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Kuala Lumpur		Rp41,766,481.92		Rp41,766,481.92
60	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, New York		Rp6,616,463,903.03		Rp6,616,463,903.03
61	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Singapore		Rp266,632,029.06		Rp266,632,029.06
62	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Tokyo		Rp339,690,834.35		Rp339,690,834.35
63	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Toronto		Rp357,108,818.21		Rp357,108,818.21
64	HOKINDO	Bank Pacific		Rp6,463,800.47		Rp6,463,800.47
65	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp208,766,445.27		Rp208,766,445.27
66	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp327,222,390.61		Rp327,222,390.61
67	BDNI	BBMB, Kuala Lumpur		Rp1,675,910.59		Rp1,675,910.59
68	BUN	BCCI London		Rp1,312,775,083.50		Rp1,312,775,083.50
69	BUN	BNP Singapore		Rp490,837,088.12		Rp490,837,088.12
70	BDNI	Chase Manhattan Bank, Singapore		Rp4,122,298.55		Rp4,122,298.55
71	BUN	Chemical Bank		Rp909,494,195.25		Rp909,494,195.25
72	BUN	National Australia Bank		Rp980,037,418.44		Rp980,037,418.44
73	BUN	National Australia Bank (Draft)		Rp103,609,247.09		Rp103,609,247.09
74	BUN	National Westminster		Rp1,708,457,513.38		Rp1,708,457,513.38
75	Bank Ficorinvent BBKU	National Westmonster Bank, London		Rp1,332,284,084.60		Rp1,332,284,084.60
76	BDNI	Security Pasific Nat'l Bank Singapore		Rp25,528,725.87		Rp25,528,725.87
77	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, New York		Rp72,226,080.57		Rp72,226,080.57
78	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Sidney		Rp566,327,485.65		Rp566,327,485.65
79	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Tokyo		Rp456,068,074.81		Rp456,068,074.81
80	BDNI	Sumitotmo Bank Ltd, Tokyo		Rp1,550,878,033.20		Rp1,550,878,033.20
81	BUN	Summa Hanlebank		Rp219,893,772.84		Rp219,893,772.84

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2021	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2022
82	BUN	Swiss Bank Corporation		Rp457,663,217.47		Rp457,663,217.47
83	BDNI	The Dai Ichi Kangyo Bank, NY		Rp449,662,818.68		Rp449,662,818.68
84	Bank Modern BBO	UBOC, New York		Rp25,317,208.51		Rp25,317,208.51
85	BUN	UMBC Kuala Lumpur		Rp230,472,902.02		Rp230,472,902.02
86	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of California		Rp124,810,097.58		Rp124,810,097.58
87	Bank Metropolitan BBKU	Union Bank of California		Rp22,488,860.17		Rp22,488,860.17
88	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of Switzerland, Zurich		Rp93,484,495.37		Rp93,484,495.37
89	Bank Modern BBO	United Bank of Swiss, Switzerland		Rp51,007,390.52		Rp51,007,390.52
90	BDNI	United Pasific Bank, LA		Rp1,926,555,302.27		Rp1,926,555,302.27
91	PESONA	Westpac Bank Sidney		Rp7,752,795.93		Rp7,752,795.93
92	Masih dalam penelusuran			Rp508,554,149.20		Rp508,554,149.20
Total				Rp454,445,361,290.83		Rp454,445,361,290.83

Surat Berharga Non Saham Eks BPPN

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar/Lembar per 30 Juni 2022	Nilai Pasar per 31 Desember 2021	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2021	mutasi	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2022	Keterangan	Kustodian
a. Corporate Bonds													
1	DGS International Finance Co.	<i>Scripless</i>	0.01	USD	1,000,000		-					HONGKONG	HONGKONG
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	<i>Scripless</i>	101.88	USD	4,500,000	1.02	4,584,686	29 April 2022	65,418,900,323	6,065,515,993	71,484,416,316	BRUSSEL	BRUSSEL
3	TPE International Finance Co. Bv	<i>Scripless</i>	1.00	USD	25,000,000	0.01	250,000	31 Maret 2021	3,567,251,250	330,748,750	3,898,000,000	BRUSSEL	BRUSSEL
4	Ciputra Surya	<i>Coupon</i>	38,750,000.00	IDR	-	1.00	38,750,000	27 Juni 2008	38,750,000		38,750,000	JAKARTA	JAKARTA
5	Jakarta International Hotel	<i>Coupon</i>	800,000,000.00	IDR	-	1.00	800,000,000	27 Juni 2008	800,000,000		800,000,000	JAKARTA	JAKARTA
6	Mulia Glass	<i>Coupon</i>	38,125,000.00	IDR	-	1.00	38,125,000	27 Juni 2008	38,125,000		38,125,000	JAKARTA	JAKARTA
7	Mulia Keramik	<i>Coupon</i>	38,125,000.00	IDR	-	1.00	38,125,000	27 Juni 2008	38,125,000		38,125,000	JAKARTA	JAKARTA
8	Polysindo Eka Perkasa	<i>Scripless</i>	2.10	USD	3,000,000	0.02	63,000	30 November 2021	898,947,315	83,348,685	982,296,000	BRUSSEL	BRUSSEL
9	TPE International Finance Co. Bv	<i>Scripless</i>	1.00	USD	2,000,000	0.01	20,000	31 Maret 2021	285,380,100	26,459,900	311,840,000	BRUSSEL	BRUSSEL
10	Bank Papan	<i>Principal dan Coupon</i>	100.00	IDR	500,000,000	1.00	500,000,000	10 Juni 2015	500,000,000		500,000,000	JAKARTA	JAKARTA
11	Polysindo Eka Perkasa	<i>Scripless</i>	2.10	USD	4,000,000	0.02	84,000	29 April 2022	1,198,596,420	111,131,580	1,309,728,000	EUROCLEAR	EUROCLEAR
12	Polysindo Eka Perkasa	<i>Scripless</i>	88.21	USD	182,000	0.88	160,547	29 April 2022	2,290,852,795	212,403,513	2,503,256,308	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Total									75,074,928,203	6,829,608,421	81,904,536,624		
b. Medium Term Notes													
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	<i>Scripless</i>	93.92	USD	182,000	0.94	170,937	29 April 2022	2,439,107,899	226,149,445	2,665,257,344	EUROCLEAR	EUROCLEAR
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	<i>Scripless</i>	90.00	USD	20,000,000	0.90	18,000,000	29 Maret 2022	256,842,090,000	23,813,910,000	280,656,000,000	HONGKONG	HONGKONG
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	<i>Scripless</i>	90.00	USD	960,560	0.90	864,504	29 April 2022	12,335,611,899	1,143,734,469	13,479,346,368	HONGKONG	HONGKONG
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	<i>Scripless</i>	90.00	USD	965,840	0.90	869,256	29 April 2022	12,403,418,210	1,150,021,342	13,553,439,552	HONGKONG	HONGKONG
5	Hutama Karya	<i>Principal</i>	100.00	USD	1,000,000	1.00	1,000,000	01 Oktober 2004	14,269,005,000	1,322,995,000	15,592,000,000	JAKARTA	JAKARTA
6	Hutama Karya	<i>Principal</i>	100.00	USD	1,000,000	1.00	1,000,000	01 Oktober 2004	14,269,005,000	1,322,995,000	15,592,000,000	JAKARTA	JAKARTA
7	Hutama Karya	<i>Principal</i>	100.00	USD	1,000,000	1.00	1,000,000	01 Oktober 2004	14,269,005,000	1,322,995,000	15,592,000,000	JAKARTA	JAKARTA
8	Hutama Karya	<i>Principal</i>	100.00	USD	5,000,000	1.00	5,000,000	01 Oktober 2004	71,345,025,000	6,614,975,000	77,960,000,000	JAKARTA	JAKARTA
Total									398,172,268,008	36,917,775,256	435,090,043,264		
c. Non-Convertible Debentures													
1	Polysindo Eka Perkasa	<i>Principal</i>	100.00	IDR	5,000,000,000	1.00	5,000,000,000	30 November 2021	5,000,000,000		5,000,000,000	Emiten Aktif	JAKARTA
Total									5,000,000,000	0	5,000,000,000		
Total (a+b+c)									478,247,196,211	43,747,383,677	521,994,579,888		

Total Nilai
*Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 28 April 2022

Catatan:		
Kurs Tengah BI	31 Desember 2022	
1	Dollar Amerika	15,592.00

* Emiten surat berharga yang telah dihapus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saham dan Surat Berharga di Kustodi Citibank antara Direktorat PKNSI, DJKN, Kementerian Keuangan dan BPK RI.
** Emiten surat berharga berstatus aktif karena masih tercatat di Bursa.
*** MTN dinyatakan batal dan tidak berlaku karena adanya putusan pengadilan.

Aset Saham Eks BPPN

No.	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2022	Nilai Per 31 Desember 2021	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2022	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU/OJK	Tanggapan Emiten	Nomor Surat Emiten	Ditjen AHU/OJK
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	Manufaktur Textile	Sertifikat	32,137,300	54	2,667,395,900	(931,981,700)	1,735,414,200	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1353/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	Manufaktur Textile	Sertifikat	37,459,700	54	3,109,155,100	(1,086,331,300)	2,022,823,800	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1352/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
3	PT Aster Dharma Ind.	-	Scriptless	40,000	850	34,000,000	-	34,000,000	Status Emiten Tidak Diketahui Saham sudah tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia	1. Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 Desember 2022. 2. Surat Nomor S-422/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU 3. surat nomor S-135/KN.4/2022 tanggal 16 Juni 2022 kepada Direktur PT KSEI	1. Surat Nomor S-422/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU 2. surat nomor S-135/KN.4/2022 tanggal 16 Juni 2022 kepada Direktur PT KSEI	-	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
4	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	46,250	75	3,468,750	-	3,468,750	BBO	1. Nilai per tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.	-	-	-	-
5	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	363	75	27,225	-	27,225	BBO	1. Nilai per tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.	-	-	-	-
6	PT Bank Ficorinvest	-	Sertifikat	400	50	20,000	-	20,000	BBKU	1. Nilai per tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.	-	-	-	-
7	PT Bank PDICI	-	Sertifikat	250	350	87,500	-	87,500	BT0	1. Nilai per tanggal 28 April 2009 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.	-	-	-	-
8	PT Bank Surya	-	Sertifikat	800	300	240,000	-	240,000	BBO	1. Nilai per tanggal 28 September 2006 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.	-	-	-	-
9	PT Citatah Tbk (CTTH)	Penggalan batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scriptless	11,304,425	50	565,221,250	-	565,221,250	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1350/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	034/CT1/TF/Lgal /VII/14 tanggal 10 Juli 2014	-
10	PT Citatah Tbk (CTTH)	Penggalan batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scriptless	41,421,439	50	2,071,071,950	-	2,071,071,950	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1351/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	034/CT1/TF/Lgal /VII/14 tanggal 10 Juli 2014	-
11	PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL)	Manufaktur Ban	Sertifikat	200	560	133,000	(21,000)	112,000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-475/KN.5/2021 tanggal 29 Maret 2021 kepada Datindo Entrycom selaku BAE	Informasi saham dan petunjuk untuk konversi/balik nama saham	DE/IV/21-1905 tanggal 12 April 2021	-
12	PT Holcim Indonesia, Tbk (PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk) (SMCB)	Manufaktur Semen	Sertifikat	13,898,500	1,425	23,488,465,000	(3,683,102,500)	19,805,362,500	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-553/KN.5/2021 tanggal 1 April 2021 kepada Datindo entrycom selaku BAE	informasi pemilik saham, dividen dan konversi saham/balik nama	DE/IV/21-1908 tanggal 15 April 2021	-
13	PT Langgeng Makmur Industri, Tbk (LMPI)	Manufaktur Plastik	Scriptless	57,901,002	116	11,290,695,390	(4,574,179,158)	6,716,516,232	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1367/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	02/VII/14/m-sb tanggal 11 Juli 2014	-
14	PT Star Pacific, Tbk (dib. PT Lippo E-Net) (LPLI)	Investasi dan bisnis media	Sertifikat	100	274	27,400	-	27,400	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1368/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
15	PT Merck, Tbk (MERK)	Farmasi dan Kimia	Sertifikat	100	4,750	389,000	106,000	475,000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	1. Surat Nomor S-801/KN.5/2021 tanggal 25 April 2021 2. Surat Nomor S-1510/KN.5/2021 tanggal 12 Juli 2021 kepada Emiten dan BAE	Tanggapan surat S-801: PT BONI tidak ada dalam database Pemegang saham. Meminta informasi nama pihak ketiga PS	07/CS/MS/V/2021 tanggal 3 Mei 2021	-
17	PT Multi Sarana R. Agung	-	Sertifikat	94,600	675	63,855,000	-	63,855,000	Status Emiten Tidak Diketahui Saham delisted	Nilai per 30 November 2006 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022. Keterangan: Delisted.	Surat Nomor S-423/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
18	PT Perdana Inti Investama	-	Sertifikat	49,251,500	50	2,462,575,000	-	2,462,575,000	Status Emiten Tidak Diketahui	Nilai per 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.	1. Surat Nomor S-424/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU 2. Surat Nomor S-69/KN.5/2021 tanggal 1 Februari 2021 kepada Direktur KNB OJK	-	-	1. Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas 2. surat Direktur kelembagaan dan produk KNB: S-1189/NB.111/2021
19	PT Prima Alloy Steel Universal, Tbk (PRAS)	Manufaktur velg Kendaraan (Industri Otomotif)	Sertifikat	2,500	152	635,000	(255,000)	380,000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-623/KN.5/2021 tanggal 7 April 2021 kepada PT Raya Saham Registrasi selaku BAE. Konfirmasi PT Exim Securities sebagai PS saham eks BPPN	Tanggapan: PT Exim Securities tidak terdaftar di DPS	001/DIR-PSR/PRAS/2021 tanggal 19 April 2021	-
20	PT Sreeya Sewu Indonesia (PT Sierad Produce, Tbk (SIPDI))	Peternakan	Scriptless	1,918,886	1,425	3,837,730,000	(1,103,347,375)	2,734,382,625	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1372/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
21	PT Sucoco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCD)	Manufaktur Kabel	Sertifikat	700	8,650	7,280,000	(1,225,000)	6,055,000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	1. Surat Nomor S-651/KN.5/2021 tanggal 9 April 2021 kepada PT Smartama Gunita selaku BAE 2. Surat Nomor S-1004/KN.5/2021 tanggal 18 Mei 2021 kepada emiten	1. Tanggapan Surat S-651: PS tercatat an Bank Utama bukan PT OVERSEAS	1. 91/SG-CAKBLM/IV/2021 tanggal 7 April 2021	-

No.	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2022	Nilai Per 31 Desember 2021	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2022	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU/OJK	Tanggapan Emiten	Nomor Surat Emiten	Ditjen AHU/OJK
22	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	Scriptless	348,000	8,850	3,619,200,000	(608,000,000)	3,010,200,000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1374/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confrim atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	290/XL.08/FD/2014 tanggal 14 Agustus	-
22	PT Trias Sentosa, Tbk (TRST)	Manufaktur polypropylene dan polyester film	Sertifikat	100	735	58,000	15,500	73,500	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	34.01/PTTS/2014 tanggal 15 Juli 2014	-
Total						53,221,710,405	(11,989,321,533)	41,232,388,872						

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 30 Juni 2021	Nilai Per 31 Desember 2020	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2021	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten
1	PT Karabba Digdaya	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga golf	100.00%	10,000	-	Rp -	Rp -	Rp -	Aktif	Telah diserahkan pengelolannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengalihan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020	Desa Tepes, Kecamatan Cimanggis, PO BOX 38, Depok 16953
2	PT Aqua Golden Mississippi	Consumer Goods	0.0024%	312	312,000	Rp312,000	Rp -	Rp312,000	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan surat Presiden Direktur PT Aqua GM No. 106/PD/AGM/XU/2021 tanggal 30 November 2021	Cyber 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
3	PT Kabelindo Murri, Tbk (KBLM)	Manufaktur Kabel	0.24%	69,882,400	244	Rp15,793,422,400	Rp1,257,883,200	Rp17,051,305,600	Aktif	Nilai per lembar saham per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai pada Bursa Efek Indonesia	Cyber Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Rawagirang No 2 Jakarta 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
4	PT Permadiani Khatulistiwa Nus	Perhotelan		1,218	-	Rp -	Rp -	Rp -	Aktif		
5	PT Sarana Maluku Ventura		0.00%	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	Pada laporan TW 3 tercatat Nilai nominal saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Maluku Ventura No 002/SM/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Setelah ditelusuri, lembar saham merupakan saham yang berasal dari BDL Saham SMV yang berasal dari eks BPPN hanya sejumlah 83.106, tercatat pada data saham eks PPA	Jalan Jend Sudirman, Irtive kecil, Kompleks Pondok Permisi (Aster) RT 004/RW 05,Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97128
Total						Rp 15,793,734,400	Rp 1,257,883,200	Rp 17,051,617,600			
Total Aset Saham Eks BPPN						Rp 88,015,444,805	Rp (10,721,438,333)	Rp 98,284,066,532			

Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan dalam Neraca			Saldo Per 31 Desember 2021		Mutasi Tahun 2022		Saldo Per 31 Desember 2022	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	624	2,267,395,841,927.00	235	1,817,510,553,944	(5)	474,367,696,744	230	2,291,878,250,688
BS	1162	1,780,494,999,019.00	953	1,444,027,866,947	(12)	307,866,049,409	941	1,751,893,916,355
BT	323	865,910,243,344.00	280	823,399,080,344	(1)	140,555,005,000	279	963,954,085,344
BD (Dokumen berupa Covernote)	37	123,953,401,452.00	28	174,129,254,000	-	-	28	174,129,254,000
JUMLAH	2146	5,037,754,485,742.00	1,496	4,259,066,755,235	(18)	922,788,751,153	1,478	5,181,855,506,388
Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang diungkap dalam CaLK								
BD (Dokumen berupa AJB, APHT, Copy Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	666	2,204,710,941,833.00	546	1,658,969,374,443	(3)	43,078,352,000	543	1,702,047,726,443
JUMLAH	666	2,204,710,941,833.00	546	1,658,969,374,443	(3)	43,078,352,000	543	1,702,047,726,443
JUMLAH TOTAL	2812	7,242,465,427,575.00	2,042	5,918,036,129,678	(21)	965,867,103,153	2,021	6,883,903,232,831

DAFTAR PEMANFAATAN ASET BERUPA SEWA ASET PPA

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
1	PT Biofarma	Cikopomayak			S-89/MK.6/2015	4/14/2015	PRJ-5/MK.6/2015	8/6/2015		20,281,344,000	36	20,281,344,000
2	PT Telkomsel	Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan			S-2227/MK.6/2016	12/27/2016	-	-	6/5/2017	249,433,000	0	249,433,000
3	Bank Nasional Parahyangan	Jalan Ciungwanara, Kelurahan Lebak, Kota Bandung			S-20/MK.6/2017	2/6/2017	PRJ-01/MK.6/WKN.08/2017	4/10/2017		1,350,000,000	36	1,350,000,000
4	Srijati Pohan	Jalan Ahmad Yani No.102 A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	93		S-42/MK.6/2017 (Revisi S-389/MK.6/2016 tanggal 6/12/2016)	2/22/2017	PRJ-1/MK.6/2017	2/22/2017	1/11/2017	125,000,000	60	125,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
5	Srijati Pohan	Jalan Pemuda Nomor 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	782		S-42/MK.6/2017 (Revisi S-389/MK.6/2016 tanggal 6/12/2016)	2/22/2017	PRJ-2/MK.6/2017	2/22/2017	1/11/2017	108,000,000	36	108,000,000
6	PT Telkomsel (Perpanjangan)	Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan			S-129/MK.6/2017	5/24/2017	PRJ-2/MK.6/2019	3/18/2019	3/22/2018	459,570,000	60	459,570,000
7	PT Indosat Tbk	Gedung eks Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan			S-128/MK.6/2017	5/24/2017	PRJ-1/MK.6/2019	3/18/2019	2/26/2019	546,360,000	60	546,360,000
8	Sdr. Sofyan	Jalan Imam Bonjol, Kompleks Batam Blok A No.10 dan No.11, Nagoya Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau			S-328/MK.6/2017	12/7/2017	PRJ-01/MK.6/WKN.03/2018	3/29/2018	2/21/2018	190,000,000	24	190,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
9	CV Jaya Agung	Jln. Pasar 16 Ilir No.123 Kota Palembang			S-342/MK.6/2017	12/19/2017	PRJ-01/MK.6/WKN.04/2018	1/2/2018		450,000,000	24	450,000,000
10	Sdr. Armin	Jalan Nusantara No. 106 Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar			S-395/MK.6/2017	12/29/2017	PRJ-01/MK.6/WKN.15/2018	2/21/2018	3/27/2018	24,000,000	36	24,000,000
11	Robby Mesa Nura	Jalan Bakti No. 72, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	712	239	S-409/MK.6/2018	9/7/2018	PRJ-01/MK.6/WKN.02/2018	10/1/2018	9/24/2018	55,000,000	60	55,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
12	PT Graha Pariwisata Sukses	Jalan Legian No. 188 (Jalan Padma Utara), Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	2400		S-420/MK.6/2018	9/12/2018	PRJ-01/WKN.14/2019	2/4/2019	1/31/2019	3,375,000,000	60	3,375,000,000
13	Sukamto Yuwono, Yayasan Syalom Probolinggo	Jalan Kol. Sugiyono No. 5 (d/h Jalan Damarwulan) RT 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	2680	117	S-443/MK.6/2018	10/1/2018	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2018	10/11/2018	10/9/2018	54,700,000	12	54,700,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
14	Bambang Rukmono	Jalan Surya Kencana No. 157A, 157B, 157C dan 157, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	1321	1031	S-461/MK.6/2018	10/5/2018	PRJ-01/MK.6/WKN.08/2018	11/5/2018	11/1/2018	123,000,000	36	123,000,000
15	Bambang Rukmono	Jalan Kol. Ahmad Syam/Jalan Sinangling, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	3911		S-458/MK.6/2018	10/5/2018	PRJ-02/MK.6/WKN.8/2018	11/5/2018	11/1/2018	138,000,000	36	138,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
16	Syarif Chanafi	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srandol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	86	150	S-460/MK.6/2018	10/5/2018	PRJ-82/MK.6/WKN.09/2018	12/17/2018	12/12/2018	33,500,000	12	33,500,000
17	William Tanoto	Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (sesuai SHM No. 162/Tanjung Morawa)	4641		S-515/MK.6/2018	11/19/2018	PRJ-02/MK.6/WKN.02/2018	12/10/2018	12/7/2018	88,500,000	60	88,500,000
18	William Tanoto	Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (sesuai SHGB No. 13/Tanjung Morawa)	17654		S-516/MK.6/2018	11/19/2018	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2018	12/10/2018	12/7/2018	241,500,000	60	241,500,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
19	Sudi Muji Sutrisno	Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur			S-520/MK.6/2018	11/19/2018	PRJ-02/MK.6/WKN.10/2018	12/19/2018	12/17/2018	145,000,000	12	145,000,000
20	Junaedi,SH.M.Si.,LL.M	Ruko Bona Indah Garden Blok A.2/D Kav. 11 Plaza Bona Lebak Bulus, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	101	281	S-555/MK.6/2018	12/7/2018	PRJ-01/MK.6/WKN.07/2019	1/10/2019	12/28/2018	88,300,000	12	88,300,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
21	Sarim	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 58, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat			S-621/MK.6/2018	12/26/2018	PRJ-01/MK.6/WKN.08/2019	1/18/2019	2/27/2019	8,650,000	12	8,650,000
22	Dartim	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	423		S-624/MK.6/2018	12/26/2018	PRJ-02/MK.6/WKN.08/2019	1/28/2019	5/27/2019	9,800,000	12	9,800,000
23	Yusuf Khotib	Jalan Serang-Cilegon KM. 7, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	4000		S-84/MK.6/2019	2/8/2019	PRJ-03/MK.6/WKN.06/2019	3/14/2019	1/17/2019	180,000,000	36	180,000,000
24	Sri Riry Hidayati, SH	Jalan Serang - Cilegon KM. 7, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten			S-94/MK.6/2019	2/13/2019	PRJ-01/MK.6/WKN.06/2019	3/11/2019	1/22/2019	51,000,000	12	51,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
25	Musli	Ruko Bintaro Jaya Sektor IX Blok E No. 1, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten			S-112/MK.6/2019	2/19/2019	PRJ-02/MK.6/WKN.06/2019	3/12/2019	2/26/2019	79,500,000	36	79,500,000
26	Fitriansyah Pratama Putra	Jalan Sambu No.3 RT.03 RW.03, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	518		S-113/MK.6/2019	2/19/2019	PRJ-03/MK.6/WKN.08/2019	3/1/2019	3/4/2019	13,000,000	60	13,000,000
27	Milyardi Salim	Jalan Merbabu No. 7, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	69		S-287/MK.6/2019	4/24/2019	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2019	7/1/2019	3/11/2019	62,895,000	60	62,895,000
28	MILYARDI SALIM	Jl. MT Haryono No. 218, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	100	300	S-344/MK.6/2019	5/15/2019	PRJ-04/MK.6/WKN.02/2019	8/6/2019	7/23/2019	182,345,000	60	182,345,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
29	KANK ISMETH	Desa Salamnunggal (dh. Desa Karangnunggal), Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	45725		S-345/MK.6/2019	5/15/2019	PRJ-04/MK.6/WKN.08/2019	5/22/2019	5/21/2019	4,800,000	24	4,800,000
30	BASIR JAPIDUNG	Jalan Raya Gading Boulevard Blok E3A-4 Cingcin, Ketapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	144	45	S-343/MK.6/2019	5/15/2019	PRJ-05/MK.6/WKN.08/2019	6/13/2019	6/12/2019	5,000,000	12	5,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
31	SDR. ISTIANTO RAJNA PRAWIRA	Jl. Raya Gading Boulevard Blok F3A-3 Cingcin, Ketapang, Kab. Bandung			S-351/MK.6/2019	5/16/2019	PRJ- 08/MK.6/WKN.08/2019	6/24/2019	6/20/2019	6,600,000	12	6,600,000
32	AGUS KUSNIADI	Jalan Raya Gading Boulevard Blok F2-27 Cingcin, Ketapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	195	45	S-353/MK.6/2019	5/20/2019	PRJ- 06/MK.6/WKN.08/2019	6/13/2019	6/13/2019	14,100,000	36	14,100,000
33	TAUPIK RAHMAT	Komplek Villa Intan Permai Blok A No.1, Desa Cibadak, Kec. Sukaresmi (d.h Kec. Pacet), Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat	341	128	S-356/MK.6/2019	5/20/2019	PRJ- 09/MK.6/WKN.08/2019	7/2/2019	7/2/2019	17,500,000	60	17,500,000
34	DAYAT SUDARYONO	Taman Permata Gadog Blok A6 No.3, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cinajur, Provinsi Jawa Barat	150	70	S-368/MK.6/2019	5/27/2019	PRJ- 07/MK.6/WKN.08/2019	6/24/2019	6/20/2019	15,000,000	24	15,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
100	Dayat SUDARYONO (perpanjangan)	Taman Permata Gadog Blok A6 No.3, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cinajur, Provinsi Jawa Barat	150	70	S-14/MK.6/WKN.08/2021	6/8/2021	PRJ-09/MK.6/WKN.8/2021	9/6/2021	8/19/2021	16,224,000	24	16,224,000
36	ITING SARWATY	Villa Permata Bogor, Jalan Bangbarung Ujung No. 9, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	242	274.5	KMK-184/MK.6/2019	7/30/2019	PRJ-15/MK.6/WKN.08/2019	9/18/2019	9/10/2019	15,500,000	12	15,500,000
35	TB. MUHAMMAD SYAM'UN	Jalan Ciburial No.15, RT.01 RW.05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	9810	584	S-499/MK.6/2019	7/22/2019	PRJ-10/MK.6/WKN.08/2019	8/6/2019	8/2/2019	102,500,000	60	102,500,000
37	YANTI	Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	1900		S-550/MK.6/2019	8/12/2019	PRJ-11/MK.6/WKN.08/2019	8/30/2019	8/28/2019	52,000,000	60	52,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
38	HARI BUDIYANTO SARTONO	Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	2083		S-551/MK.6/2019	8/12/2019	PRJ-12/MK.6/WKN.08/2019	8/30/2019	8/28/2019	57,000,000	60	57,000,000
39	HARI BUDIYANTO SARTONO	Jl Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	1900		S-545/MK.6/2019	8/12/2019	PRJ-13/MK.6/WKN.08/2019	8/30/2019	8/28/2019	58,500,000	60	58,500,000
40	DEDE AJAT	Jalan Hanjawa Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	1620		S-573/MK.6/2019	8/23/2019	PRJ-14/MK.6/WKN.08/2019	9/10/2019	9/6/2019	4,000,000	24	4,000,000
41	KURNIAWAN	Gang Kuburan Cina, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat	19337		S-630/MK.6/2019	9/4/2019	PRJ-3/MK.6/WKN.14/2019	10/10/2019	10/1/2019	17,500,000	60	17,500,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
42	DEWI SULASTRI	Perumahan Bogor Nirwana Residence, Jalan Graha Bogor Indah, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	7205		KMK-233/MK.6/2019	9/9/2019	PRJ-1/MK.6/WKN.08/2020	2/5/2020	10/31/2019	202,000,000	60	202,000,000
44	BAMBANG SUNKONO	Jalan Ancol Barat III Blok A5 Nomor 1-2, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	3048	1500	S-651/MK.6/2019	9/18/2019	PRJ-01/MK.6/WKN.07/2020	1/20/2020	12/20/2019	345,000,000	36	345,000,000
45	SYARIF CHANAFI (Perpanjangan)	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srandol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	86	150	S-747/MK.6/2019	10/14/2019	PRJ-01/MK.6/WKN.09/2019	12/16/2019	12/11/2019	40,200,000	12	40,200,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
46	SUKAMTO YOWONO, YAYASAN SYALOM PROBOLINGGO (Perpanjangan)	Jalan Kol. Sugiyono No. 5 (d/h Jalan Damarwulan) RT 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	2680	117	S-819/MK.6/2019	12/2/2019	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2019	12/5/2019	12/5/2019	271,000,000	60	271,000,000
47	MILYARDI SALIM	Jl. Medan - Binjai, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumut			S-927/MK.6/2019	12/23/2019	PRJ-01/MK.6/WKN.02/2020	3/13/2020	3/11/2020	44,100,000	60	44,100,000
48	MILYARDI SALIM	Jalan Irian Barat No. 35/37, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	49	99	S-928/MK.6/2019	12/23/2019	PRJ-03/MK.6/WKN.02/2020	3/13/2020	3/11/2020	36,000,000	60	36,000,000
49	WILLIAM TANOTO	Jalan Industri, Dusun II, Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (bagian dari SHGB No. 11/Tanjung Morawa B)	12000		S-31/MK.6/2020	1/27/2020	PRJ-02/MK.6/WKN.02/2020	3/13/2020	2/10/2020	186,000,000	60	186,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
50	NG DENI	Jalan Roa Malaka Selatan Nomor 27, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta			S-36/MK.6/2020	1/30/2020	PRJ-02/MK.6/WKN.07/2020	2/17/2020	2/10/2020	375,000,000	60	375,000,000
51	Dra. Hj. Srijati Pohan M.Psi (Perpanjangan)	Jalan Pemuda Nomor 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara			S-84/MK.6/2020	2/18/2020	PRJ-04/MK.6/WKN.02/2020	3/13/2020	3/10/2020	350,000,000	60	350,000,000
52	BADAN PENGURUS PUSAT GEREJA KEHILAT MESIANIK INDONESIA	Komplek Plaza Pasifik Blok A-1 Kavling Nomor 1, 3, 5 dan 7, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta			S-160/MK.6/2020 (Revisi S-30/MK.6/2020 tanggal 24 Jan 2020)	4/6/2020	0			0	12	

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
53	FAIDUL WAHAB	Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur (SHGU No. 1/Tanjung Kamal)	42940		S-189/MK.6/2020	4/29/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2020	6/30/2020	6/29/2020	222,000,000	60	222,000,000
54	Denny Sumantri	Jalan TGH Faisal Petak II, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat			S-207/MK.6/2020	5/5/2020	PRJ-15/MK.6/WKN.14/2020	5/29/2020	5/18/2020	165,000,000	60	165,000,000
55	ALIP SUGITO	Jalan Sentul Nyapah, Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	3500		S-224/MK.6/2020	5/27/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.06/2020	6/8/2020	6/2/2020	10,600,000	24	10,600,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
56	Dartim	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	423		S-234/MK.6/2020	6/3/2020	PRJ-02/MK.06/WKN.08/2020	7/28/2020	7/17/2020	17,315,000	12	17,315,000
80	Dartim (Perpanjangan)	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	423		S-4/MK.6/WKN.08/2021	2/3/2021	PRJ-04/MK.6/WKN.8/2021	2/17/2021	2/15/2021	17,315,000	12	17,315,000
57	Kuswinarti	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok A.5, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	96	288	S-255/MK.6/2020	7/2/2020	PRJ-02/MK.06/WKN.06/2020	8/26/2020	8/19/2020	140,000,000	60	140,000,000
58	Yayasan Indonesia Raya Bukittinggi (STIE H. Agus Salim)	Jalan Ahmad Yani No. 79, Kampung Cina, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	438	680	S-285/MK.6/2020	8/14/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.03/2020	9/10/2020	9/7/2020	108,204,000	36	108,204,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
59	Jonathan Wijaya	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok C7, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	78	234	S-302/MK.6/2020	8/28/2020	PRJ-04/MK.06/WKN.06/2020	9/16/2020	9/14/2020	137,500,000	60	137,500,000
60	Gereja Masehi Advent Hari ketujuh di Indonesia Jemaat Koinonia	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok E3, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	78	234	S-303/MK.6/2020	8/28/2020	PRJ-05/MK.06/WKN.06/2020	9/18/2020	9/16/2020	62,500,000	60	62,500,000
62	Robbie Irawan	Perumahan Taman Asri Blok F2 No. 8, RT 01/RW 06, Kelurahan Larangan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten	31		S-309/MK.6/2020	9/10/2020	PRJ-03/MK.06/WKN.06/2020	9/18/2020	9/16/2020	4,800,000	12	4,800,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
61	Firman	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B19, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	78	234	S-308/MK.6/2020	9/10/2020	PRJ-07/MK.06/WKN.06/2020	10/1/2020	9/28/2020	108,000,000	60	108,000,000
63	PT Siap Kirim	Ruko Ciputat Mega Mall Blok F9/10, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	96		S-316/MK.6/2020	9/17/2020	PRJ-06/MK.06/WKN.06/2020	9/24/2020	9/22/2020	150,000,000	60	150,000,000
65	CV Jaya Agung	Jalan Pasar 16 Ilir Nomor 123, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan			S-352/MK.6/2020	10/1/2020	0			0	24	0

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
64	Jonathan Wijaya	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok C2, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	78	234	S-348/MK.6/2020	9/25/2020	PRJ-08/MK.06/WKN.06/2020	10/16/2020	10/14/2020	120,000,000	60	120,000,000
66	Syafrudin MR	Perumahan Taman Asri Blok F2 No. 8 RT 01/RW 08, Kelurahan Larangan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten	58.37		S-179/WKN.06/2020	10/27/2020	PRJ-09/MK.06/WKN.03/2020	11/12/2020	11/10/2020	38,250,000	60	38,250,000
67	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama Pariwara)	Jalan Depok No. 56, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	8		S-368/MK.6/2020	10/27/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.09/2021	1/19/2021	1/18/2021	200,200,000	60	200,200,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
69	Ni Wayan Alit (Perpanjangan)	Komplek Pertokoan Amlapura, Jalan Kesatrian, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	80	140	S-14/MK.6/WKN.14/2020	11/16/2020	PRJ-17/MK.06/WKN.14/2020	11/30/2020	11/21/2020	17,000,000	12	17,000,000
68	Leo JP Siegers	Vila Japos E-2 No. 15, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Provinsi Banten	120		S-9/MK.6/WKN.06/2020	11/13/2020	PRJ-10/MK.6/WKN.6/2020	12/7/2020	12/3/2020	14,100,000	12	14,100,000
43	NI WAYAN ALIT	Komplek Pertokoan Amlapura, Jalan Kesatrian, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	80	140	S-644/MK.6/2019	9/13/2019	PRJ-4/MK.6/WKN.14/2019	11/11/2019	10/22/2019	16,600,000	12	16,600,000
70	H. Mohammad Suman	Blok Zein, Jalan Desa Wanantara, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	19630	-	S-06/MK.6/WKN.08/2020	11/18/2020	PRJ-02/MK.6/WKN.8/2021	2/15/2021	12/17/2020	40,000,000	60	40,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
71	PT Geotronics Pratama Indonesia (Perpanjangan)	Ruko Bona Indah Garden Blok A.2/D Kav. II, Plaza Bona Lebak Bulus, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	101	281	S-2/MK.6/WKN.07/2020	11/22/2020	PRJ-01/MK.06/WKN.07/2020	12/21/2020	11/29/2020	345,000,000	36	345,000,000
72	SYARIF CHANAFI (Perpanjangan)	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srandol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	86	150	S-36/MK.6/WKN.09/2020	12/7/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.09/2020	12/16/2020	12/14/2020	45,716,000	12	45,716,000
73	Enca	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 58, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	373	-	S-08/MK.6/WKN.08/2020	12/8/2020	PRJ-03/MK.6/WKN.8/2021	2/17/2021	12/22/2020	14,190,000	12	14,190,000
76	Syahrul	Kp. Sirnagalih Rt. 03 / 01, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, (Villa Kuala Deli)	2093	210	S-10/MK.6/WKN.08/2020	12/29/2020	PRJ-01/MK.6/WKN.8/2021	1/7/2021	1/6/2021	108,000,000	60	108,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
74	Ir. H. Adang Shalahuddin & Drh. Asep Rakhmat Khaerudin (KPBS Pengalengan)	Jalan Raya Pengalengan, Desa Margamukti, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	6545		S-09/MK.6/WKN.08/2020	12/14/2020	PRJ-03/MK.6/WKN.8/2020	12/21/2020	12/17/2020	25,000,000	24	25,000,000
75	William Wijaya	Desa Bengkulu Induk RT 01, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung	35000		S-262/WKN.05/2020	12/30/2020	PRJ-01/WKN.05/2021	1/11/2021	1/8/2021	31,200,000	24	31,200,000
77	Sorintuti Usain	Perumahan Duta Garden Blok F-15 No. 2, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten	120		S-18/WKN.06/2021	1/13/2021	PRJ-2/MK.6/WKN.06/2021	1/22/2021	1/20/2021	12,754,000	12	12,754,000
78	Kusmantono	Perumahan Tiga Raksa Blok AI 31 No. 57, Desa Margasari, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Provinsi Banten	120	60	S-1/MK.6/WKN.06/2021	1/14/2021	PRJ-1/MK.6/WKN.06/2021	1/20/2021	1/18/2021	3,000,000	12	3,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
79	Yayasan Anugrah Bunda Banten	Perumahan Ciujung Baru, Jalan Gunung Kerinci III No. 60, Desa Kedayakan, Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	180		S-2/MK.6/WKN.06/2021	1/15/2021	PRJ-3/MK.6/WKN.06/2021	1/26/2021	1/22/2021	5,844,500	12	5,844,500
81	BASIR JAPIDUNG (Perpanjangan)	Jalan Raya Gading Boulevard Blok E3A-4 Cingcin, Ketapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	144	45	S-5/MK.6.WKN.08/2021	2/3/2021	PRJ-05/MK.6/WKN.8/2021	4/12/2021	3/22/2021	5,500,000	12	5,500,000
82	Sugiyanto selaku Ketua RW 11	Jalan Petogogan I, Gang IV/13, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	243		S-6/MK.6/WKN.07/2021 (Revisi S-5/MK.6/WKN.07/2020 tanggal 08/12/2020)	2/16/2021	PRJ-/MK.6/WKN.07/2020	12/21/2020	12/11/2020	6,438,450	36	6,438,450
83	Mukhammad Ervan S	Jalan Taman Singosari Ujung No.2A RT 01 RW 21, Kel. Melong, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat	281	140	S-6/MK.6/WKN.08/2021	2/17/2021	PRJ-06/MK.6/WKN.8/2021	5/17/2021	5/11/2021	18,900,000	60	7,216,185

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
84	Carito Adi Prabowo	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	16		S-3/MK.6/WKN.09/2021	2/22/2021	PRJ-02/MK.6/WKN.09/2021	3/29/2021	3/12/2021	802,000	12	802,000
85	Nurhadi	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	20		S-4/MK.6/WKN.09/2021	2/23/2021	PRJ-03/MK.6/WKN.09/2021	3/29/2021	3/9/2021	896,000	12	896,000
86	Muchtazan	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	20		S-5/MK.6/WKN.09/2021	2/23/2021	PRJ-04/MK.6/WKN.09/2021	3/29/2021	3/9/2021	1,200,000	12	1,200,000
87	Zaemubah	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	6		S-6/MK.6/WKN.09/2021	2/26/2021	PRJ-05/MK.6/WKN.09/2021	3/29/2021	3/16/2021	314,000	12	314,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
88	Wahidin	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	30		S-7/MK.6/WKN.09/2021	2/26/2021	PRJ-06/MK.6/WKN.09/2021	3/29/2021	3/8/2021	1,800,000	12	1,800,000
89	Rudiono	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	6		S-8/MK.6/WKN.09/2021	2/26/2021	PRJ-07/MK.6/WKN.09/2021	3/29/2021	3/13/2021	269,000	12	269,000
90	Samsul Roman	Perumahan Banten Indah Blok B6 Nomor 483 RT/RW 078/11, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	136	90	S-1/MK.6/WKN.04/2021	3/2/2021	PRJ-01/MK.6/WKN.04/2021	3/12/2021	3/9/2021	5,000,000	12	5,000,000
91	ITING SARWATY (Perpanjangan)	Villa Permata Bogor, Jalan Bangbarung Ujung No. 9, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	242	274.5	S-7/MK.6/WKN.08/2021	3/25/2021	PRJ-07/MK.6/WKN.8/2021	6/24/2021	5/18/2021	98,380,000	60	98,380,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
92	Ahmad Kosasih	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B17, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten	78	234	S-3/MK.6/WKN.06/2021	3/30/2021	PRJ-7/MK.6/WKN.06/2021	4/7/2021	4/1/2021	110,000,000	60	55,000,000
93	Rd. Kartono Dwidjosewojo (Direktur PT Altra Widiya Agung)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B18, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten	78	234	S-4/MK.6/WKN.06/2021	4/16/2021	PRJ-8/MK.6/WKN.06/2021	6/9/2021	4/19/2021	110,000,000	60	44,000,000
94	H. Samsul, S.E.	Jalan Sudirman Nomor 121 (dahulu 69/10-11), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	180	540	S-9/MK.6/WKN.03/2021	5/3/2021	PRJ-01/MK.6/WKN.03/2021	8/2/2021	7/30/2021	360,000,000	96	90,000,000
	H. Samsul, S.E.	Jalan Sudirman Nomor 121 (dahulu 69/10-11), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	180	540	S-19/MK.6/WKN.03/2021	11/30/2021	PRJ-01/MK.6/WKN.03/2021	8/2/2021	12/24/2021	93,000,000	120	93,000,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
	H. Samsul, S.E.	Jalan Sudirman Nomor 121 (dahulu 69/10-11), Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	180	540	S-16/MK.6/WKN.03/2021	7/29/2021	0			0	0	
95	Ricky Wijaya	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 23, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten	48	144	S-7/MK.6/WKN.06/2021	5/10/2021	PRJ-09/MK.6/WKN.06/2021	6/10/2021	1) 20/05/2021 2) 09/09/2021 3) 13/12/2021	200,000,000	120	120,000,000
96	Ricky Wijaya	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 25, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten	48	144	S-8/MK.6/WKN.06/2021 (Revisi S-6/MK.5/WKN.06/2021 tanggal 28 April 2021)	5/11/2021	PRJ-10/MK.6/WKN.06/2021	6/10/2021	1) 20/05/2021 2) 09/09/2021 3) 05/11/2021	210,000,000	120	146,000,000
97	Rudiono	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	12	-	S-14/MK.6/WKN.09/2021	5/25/2021	PRJ-10/MK.6/WKN.09/2021	6/18/2021	6/17/2021	1,188,000	12	1,188,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
98	Jamal	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	6	-	S-15/MK.6/WKN.09/2021	5/25/2021	PRJ-08/MK.6/WKN.09/2021	6/7/2021	5/29/2021	308,000	12	308,000
99	Muhamad Rizal	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	12	-	S-16/MK.6/WKN.09/2021	5/25/2021	PRJ-09/MK.6/WKN.09/2021	6/7/2021	6/1/2021	832,000	12	832,000
101	Nana Dudu	Jalan Rondaan Blok Karyawangi, RT.01/RW.07, Desa Karyawangi, Kec. Parongpong, Bandung Barat	650	-	S-197/WKN.08/2021 (Ralat S-13/MK.6/WKN.08/2021 tgl 25 Juni 2021)	6/25/2021	PRJ-08/MK.6/WKN.8/2021	9/6/2021	7/26/2021	4,940,000	12	4,940,000
102	PT Sarana Edukasi Payakumbuh (LB LIA)	Jalan Sudirman Nomor 19, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	650	400	S-14/MK.6/WKN.03/2021	7/12/2021	PRJ-02/MK.6/WKN.03/2021	8/6/2021	8/4/2021	74,195,000	12	74,195,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
103	Wahid Asngari	Jalan Pesantren Mulyojati RT 03/RW 03, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung	8540		S-135/WKN.05/2021	7/14/2021	PRJ-01/MK.6/WKN.05/2021	7/29/2021	7/23/2021	25,000,000	120	25,000,000
104	Vinorita Arifin	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	20	-	S-18/MK.6/WKN.09/2021	8/10/2021	PRJ-11/MK.6/WKN.09/2021	8/31/2021	8/30/2021	1,212,000	12	1,212,000
105	Sari Setiyawati	Perumahan Bukit Nusa Indah, Jalan Pinang No. 1016, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	130	54	S-10/MK.6/WKN.06/2021	8/23/2021	PRJ-2/MK.6/WKN.06/2021	10/1/2021	8/26/2021	8,000,000	24	8,000,000
106	Dede Ajat (perpanjangan)	Jalan Hanjawar Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	915	705	S-15/MK.6/WKN.08/2021	8/30/2021	PRJ-10/MK.6/WKN.8/2021	9/15/2021	9/13/2021	10,620,000	60	10,620,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
107	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama Pariwara)	Jalan Depok No.56, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	4	-	S-19/MK.6/WKN.09/2021	8/31/2021	RRJ-12/MK.6/WKN.09/2021	10/21/2021	9/8/2021	91,685,000	60	91,685,000
	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama Pariwara)	Jalan Depok No.56, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	6	-	S-22/MK.6/WKN.09/2021	10/14/2021	0		10/18/2021	45,845,000	0	45,845,000
108	Bank Nagari Payakumbuh	Jalan Sudirman Nomor 19, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	727.2	-	S-17/MK.6/WKN.03/2021	9/8/2021	PRJ-03/MK.6/WKN.03/2021	11/15/2021	11/11/2021	81,625,000	60	81,625,000
109	ST Rohmah	Jalan Raya Blega No.16, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur	64	-	S-9/MK.6/WKN.10/2021	9/24/2021	PRJ-01/MK.6/WKN.10/2021	10/1/2021	9/28/2021	3,100,000	12	3,100,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
110	Narsan	Desa Sukamantri, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	2000		S-14/MK.6/WKN.06/2021	10/18/2021	PRJ-13/MK.6/WKN.06/2021	10/20/2021	10/19/2021	13,200,000	120	13,200,000
111	Yorni Wahid	Jalan Raya Terbanggi Besar Dusun VII Way Kekah, RT 01 / RW 01 Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	15000		S-4/MK.6/WKN.05/2021	10/22/2021	PRJ-02/MK.6/WKN.05/2021	11/30/2021	11/16/2021	10,000,000	60	10,000,000
112	SYARIF CHANAFI (Perpanjangan)	Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srandol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	86	150	S-23/MK.6/WKN.09/2021	11/23/2021	PRJ-13/MK.6/WKN.09/2021	12/16/2021	12/8/2021	49,810,000	12	49,810,000
113	Kusmantono	Perumahan Tiga Raksa Blok AI 31 No. 57, Desa Margasari, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Provinsi Banten	120	60	S-17/MK.6/WKN.06/2021	11/24/2021	0		11/30/2021	4,381,000	12	4,381,000

No.	Pemohon Sewa	Lokasi	LT	LB	No. Surat Persetujuan	Tgl Persetujuan	No. Perjanjian	Tgl Perjanjian	Tgl Pembayaran	Nilai Persetujuan Sewa	TOTAL PERIODE (Bulan)	Nilai Yang Sudah Dibayarkan
114	Robbie Irawan	Perumahan Taman Asri Blok F2 No. 8, RT 01/RW 06, Kelurahan Larangan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten	32		S-18/MK.6/WKN.06/2021	11/25/2021			12/8/2021	4,229,000	12	4,229,000
115	Leo JP Siegers	Vila Japos E-2 No. 15, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Provinsi Banten	120		S-19/MK.6/WKN.06/2021	12/3/2021	0		12/15/2021	14,459,000	12	14,459,000
116	Ni Wayan Alit (Perpanjangan)	Komplek Pertokoan Amlapura, Jalan Kesatrian, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	80	140	S-7/MK.6/WKN.14/2021	12/14/2021	PRJ-16/MK.06/WKN.14/2021	12/24/2021	12/22/2021	17,500,000	12	17,500,000
										34,813,637,950		34,266,954,135

DAFTAR IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA ASET PPA

No	PRK	Jenis Aset	Jumlah Aset	Alamat (isi lengkap dr Kel./Desa s.d. Prov.)	Luas Objek		Dokumen Kepemilikan		Nilai	Pemohon	Periode	Penetapan		
					LT	LB	Jenis	Nomor				Putusan	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PRK-B002026	Tanah dan Bangunan	1	Ruko Mirah II No. 30, Komplek Panakukang Mas, Jalan Pangayoman No. 30, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	95	285	SHGB	2299/Panaikang	Rp2,172,600,000.00	Kementerian Keuangan	5 tahun	Surat Menteri Keuangan	S-224/MK.6/2018	6/7/2018
2	PRK-B001885 dan PRK-B001886	Tanah dan Bangunan	2	Jalan Urip Sumoharjo No. 169 (d.h. Jalan Gn. Bawakaraeng), Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	217	637	SHGB	63/Malimongan, 64/Malimongan	Rp4,651,000,000.00	Kementerian Keuangan	5 tahun	Surat Menteri Keuangan	S-753/MK.6/2019	10/24/2019
3	PRK-B002283	Tanah dan Bangunan	1	Jalan Sultan Abdurrahman No. 142, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	1,629	214	SHGB	928/Parit Tokaya	Rp4,595,100,000.00	Badan Pengawas Pemilihan Umum	5 tahun	Surat Menteri Keuangan	S-244/MK.6/2020	6/22/2020
4	PRK-B001888	Tanah dan Bangunan	1	Jalan Hasanuddin RT/RW 01/09, Kelurahan Pandang-Pandang (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	955	417	SHGB	1/Kelurahan Katangka	Rp 1,500,500,000.00	Kementerian Perhubungan	5 tahun	Surat Menteri Keuangan	S-280/MK.6/2020	8/7/2020
Total									Rp 12,919,200,010.00					

DAFTAR IZIN PINJAM PAKAI ASET PPA

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Alamat (isi lengkap dr Kel./Desa s.d. Prov.)	Luas Objek		Dokumen	Nilai	Pemohon	Periode	Penetapan		
				LT	LB					Putusan	Nomor	Tanggal
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanah dan Bangunan	1	Jalan Untung Suropati No. 14, Kelurahan Semara Pura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali	400	492		Rp 1,641,500,000.00	Pemerintah Kabupaten Klungkung	5 tahun	Surat Menteri Keuangan	S-159/MK.6/2020	4/6/2020
2	Tanah	1	Kompleks Perumahan Bangun Reksa Asri Blok CK, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	11,000			Rp 814,000,000.00	Pemerintah Kota Balikpapan	5 tahun	Surat Menteri Keuangan	S-208/MK.6/2019	5/5/2020
Total							Rp 2,455,500,000.00					

Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA

No.	Emiten	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 31 Des 2021 (Audited)* (Rp)	Nilai Aset Per 31 Desember 2022 (Rupiah)	Asal Bank	CUR	ATK Value (Nominal Value)	Total Nominal Value (Rupiah)
1.	Dharmala Intiutama (0016060906)	Obligasi	2,793,450,000	2,793,450,000	Various	USD	22,000,000	343,024,000,000
2.	Ometraco Multi Artha (0016060794)	Obligasi	6,499,457,694	6,499,457,694	BII	USD	15,356,073	239,431,882,732
3.	Ongko Intl Fin (290304)	Obligasi	4,317,150,000	4,317,150,000	BALI	USD	30,000,000	467,760,000,000
4.	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	Obligasi	215,857,500	215,857,500	ASPAC	USD	1,500,000	23,388,000,000
5.	Pacific Intl CP (0016062464)	Obligasi	507,900,000	507,900,000	TAMARA	USD	2,000,000	31,184,000,000
6.	Pacific Intl CP (0016062504)	Obligasi	507,900,000	507,900,000	TAMARA	USD	2,000,000	31,184,000,000
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1,805,657,589	1,805,657,589	Danamon	USD	1,000,000	15,592,000,000
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408)	Warrants	4,934,713	4,934,713	Various	IDR	4,934,713	4,934,713
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507)	Warrants	4,934,713	4,934,713	Various	IDR	4,934,713	4,934,713
Total			16,657,242,209	16,657,242,209				1,151,573,752,158

Aset Saham Eks Kelolaan PT PPA

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2021	Nilai Per 31 Desember 2022	Mutasi	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	-	Intan		n/a	Rp 223,500	Rp223,500	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2007	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU, Kemenkumham melalui Surat Nomor S-425/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan ~~penyusunan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum~~
2	PT Bunas Multifinance	-	BUN	750,000	15.00%	Rp 75,000,000	Rp75,000,000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-01/KM.12/2006 tanggal 12 Juli 2004.
3	PT Danaloka Pratama	-	BDNI	380	14.29%	Rp 141,550,000	Rp141,550,000	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU, Kemenkumham melalui Surat Nomor S-426/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015
4	PT Pama Indonesia Ltd	-	BDNI	1,500	15.00%	Rp 28,310,000	Rp28,310,000	Rp -	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-02/KM.12/2006 tanggal 12 Juli 2004.
5	PT Pama Ventura Indonesia	-	BDNI	200	20.00%	Rp 234,871	Rp234,871	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU, Kemenkumham melalui Surat Nomor S-427/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan ~~penyusunan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum~~
6	PT Servitia Finance	-	BUS	24,750	99.00%	Rp 1,500,000,000	Rp1,500,000,000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU, Kemenkumham melalui Surat Nomor S-448/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan ~~penyusunan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum~~
7	PT Aplikasi Lintasarta	-	19 Bank	400	0.32%	Rp 400,540,829	Rp400,540,829	Rp -	Aktif	Sesuai Surat Yayasan Perbanas Nomor 13/Kes/YP/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021	Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Menteng, Gedung Manara Thamrin Lt. 19, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10250	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-02/KM.12/2006 tanggal 12 Juli 2004.
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	450	5.43%	Rp 385,154,000	Rp385,154,000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2013	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU, Kemenkumham melalui Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: -
9	PT Dbs Securities Indonesia	-	BDNI	330	15.00%	Rp -	Rp -	Rp -	Telah Likuidasi Tahun 2012	-	-	-
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	208,179	2.31%	Rp 208,179,000	Rp208,179,000	Rp -	Aktif	nilai berdasar surat Direktur Utama SJV no: 04/DIR/SJV/XII/2021 tgl 6-12-21	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 668388, 668389, Fax : (0741) 668 390	-
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI-BNN	551,793	3.67%	Rp 551,793,000	Rp551,793,000	Rp -	Aktif	Nilai berdasar surat surat Dirut Kalbar ventura No.172/SK V/07/2022 tgl 8 Juli 22. nilai buku Rp1.791. nilai pasar Rp1.000	Jalan M. Sohar No. 9 AB, Pontianak 78121, Phone : (0561) 736 613, Fax (0561) 746 883	-
12	PT Sarana Kalsel Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	193	1.04%	Rp 193,066,000	Rp193,066,000	Rp -	Aktif	Nilai saham Surat 114/SKV-L/Kopr/VII/2022 tgl 13 Juli 2022 rincian jumlah kepemilikan saham PT Sarana Kalbar ventura thn buku 2021 nilai buku Rp2.316. nilai nominal Rp1.000	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4252	1. saham per 31 des 2020 tercatat 207.861.000 (207.861 lembar) sesuai surat 180/SKV-L/Kopr/XI/2020 tanggal 5 Nop 2020, ada pembagian dividen saham sebanyak 14.795 lembar saham. 2. Sesuai Surat Kalsel Ventura Nomor 051/SKV-L/Kopr/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, tambahan dividen saham Kemenkau (14.795 lembar) belum dicatatkan pada sistem AHU karena data belum terverifikasi (belum menyerahkan NPWP an Menkau), sehingga jumlah saham masih tercatat sebagai 193.066 lembar.
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	63,106	1.33%	Rp 63,106,000	Rp63,106,000	Rp -	Aktif	Nilai nominal berdasar surat Direktur Utama PT Sarana Maluku Ventura Nomor 052/SMV/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Dikonfirmasi melalui email per tanggal 27-7-2021 mengenai aset saham per 30 Juni 2021	Jalan Jend Sudirman, hative kecil, Kompleks Pondok Permai (Aster) RT.004/RW.05,Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97128	-
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	-	20 Bank	1,115	16.64%	Rp -	Rp -	Rp -	Likuidasi	Nilai Buku saham per 31-12-2019 berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI Tahun 2018 (unaudited).	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920Phone : (021) 521 0715, 521 0732, 521 0799, Fax : (021) 521 0755	Telah dilikuidasi dengan nilai likuidasi sebesar Rp3.365.184.715 yang diterima oleh DJKN pada November 2020. Nilai mutasi dicatat sebesar Rp4.038.531.683,65 sehingga terdapat selisih Rp673.346.969 yang dicatat sebagai dampak kumulatif pengurang ekuitas
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	4,500	1.04%	Rp 4,500,000,000	Rp4,500,000,000	Rp -	Aktif	Sesuai surat Dirut AJTM S1143/AJTM/DIR/0321 tanggal 18 Maret 2021	Tamansari Parama Boutique Office Lantai 11, Jalan KH Wahid Hasyim No. 84-88, Jakarta 10430	-
16	PT Asuransi Putra Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	1,800,000	25.71%	Rp 335,020,000	Rp335,020,000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepom-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor : KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai Ralat KMK No. 155/KMK.06/200	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011 karena sanksi
17	PT Sarana Sulut Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	61,553	1.44%	Rp 61,553,000	Rp61,553,000	Rp -	Aktif	Nilai buku saham dan pasar berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sulut Ventura Nomor 002/SSV/II/2022 tanggal 10 Januari 2022	Kompleks Pasar Segar Blok RC-17 Paal Dua Jalan Yos Sudarso Manado	-
18	PT Sarana Sumbang Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	1,056,056	3.72%	Rp 1,044,757,465	Rp1,056,056,000	Rp11,298,535	Aktif	Berdasar Surat dirut SSV No. 05/SSBV-DIR/VII/2022 tgl 12 Juli 2022. surat 07/DIR-SSBV/II/2022 tgl 25-2-2022. Izin usaha sebagai badan hukum aktif	Gedung Rangkang Ventura. Jalan Khatib Sulaiman No 9 Kav. 5 s/d 7 Padang - Sumatera Barat.	-
19	PT Sarana Papua Ventura (d.h PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	BNN	82,471	1.41%	Rp 82,471,000	Rp82,471,000	Rp -	Aktif	Nilai per 30-6-21 berdasar surat Dirut SPV No.44/ADM-SPV/VII/2021 tgl 27-7-2021	Jl.Abe Tasangkapura No. 58, RT001/RW.011, Kelurahan Ardiapura, Japsel, Jayapura-Papua. Telp: 0967-5162490	-

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2021	Nilai Per 31 Desember 2022	Mutasi	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
20	PT SMBC Indonesia Finance	-	BDNI	3,750,000	15.00%	Rp 3,750,000,000	Rp3,750,000,000	Rp -	Dicabut ijin usahanya tahun 2010	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK.6/2007 tanggal 28 Juni 2007	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB DJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-546/KM.10/2010 tanggal 20
21	PT Asia Natural Resources Tbk	Perdagangan hasil tambang	-	22,006,500	0.97%	Rp 1,100,325,000	Rp1,100,325,000	Rp -	Aktif (Delisting dari BEI)	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022		Pada tahun 2016, aset saham PT Asia tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA.
22	PT Jembo Cable Company Tbk	Manufaktur kabel	-	654,500	0.43%	Rp 3,959,725,000	Rp3,233,230,000	(Rp726,495,000)	Aktif	berdasarkan nilai pasar saham per tanggal 31 Desember 2022		Pada tahun 2016, aset saham PT Jembo Cable tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan
23	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Jasa Sarana Olahraga terutama Golf	-	57	13.87%	Rp 1,425,000,000	Rp1,425,000,000	Rp -	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sukapraja Estetika Padang Golf Nomor 204/SEPG/DIR/OSW/XI/2021 tanggal 30 November 2021.	Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis Tangerang 15560	Aset saham PT SEPG direklasifikasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA. (Bersifat)
24	PT Bima Prima Perdana (Grup Tambak)	-	-		100.00%	Rp -	Rp -	Rp -	Tidak Aktif			
25	PT Sejahtera Eka Graha	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga	-	273,000	96.53%	Rp -	Rp -	Rp -	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017	Kawasan Bogor Raya, Bogor	Telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan BA 999.00 Aset Investasi sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Penyerahan Aset
Total						19,896,098,665	19,090,812,200	(715,196,465)				

NILAI PASAR ATAS ABMA/T YANG BELUM DAPAT DILUNASI/DISELESAIKAN

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
1	ABMA/T Perumahan di Jl. Pelita RT.006/09 DKI Jakarta	Rp1,047,674,100.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-517/MK.6/2019 tanggal 25 Juli 2019. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp1.047.674.100,00
2	ABMA/T SMA Muhammadiyah 3 Genteng Jawa Timur	Rp2,663,674,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-468/MK.6/2012 Tanggal 10 Agustus 2012. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp1.331.837.000,00
3	ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional SD Swasta Letjen Jamin Ginting's Berastagi (dh. SD Letjen Jamin Ginting) Sumatera Utara	Rp1,298,458,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-535/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp649.229.000,00
4	ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional TK Swasta Letjen Jamin Ginting's Berastagi (dh. TK Letjen Jamin Ginting) Sumatera Utara	Rp1,075,620,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-540/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp537.810.000,00
5	ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo (dh. Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI) Sulawesi Selatan	Rp6,874,139,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-349/MK.6/2016 Tanggal 14 Oktober 2016. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp3.437.069.500,00
6	ABMA/T Home Industry Atas Nama Iwan Jakarta Pusat DKI Jakarta	Rp2,334,060,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-410/MK.6/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp2.334.060.000,00
7	ABMA/T Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen (dh. Kantor DPD Golkar) Kebumen Jawa Tengah	Rp4,116,771,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.6/2017 tanggal 9 Februari 2017. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp4.116.771.000,00
8	ABMA/T SMK Yayasan Pendidikan Teknologi Pangkalan Susu (dh. ST dan STM) Sumatera Utara	Rp611,223,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-87/MK.6/2017 tanggal 3 April 2017. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp305.611.500,00
9	ABMA/T Rumah Nyoman Sidharta Suryanata Grogol Petamburan Provinsi DKI Jakarta	Rp1,469,468,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-288/MK.6/2017 tanggal 14 November 2017. Besaran Kompensasi sebesar 100% senilai Rp1.469.468.000,00
10	SMP Muhammadiyah 2 Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	Rp4,342,010,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.6/2018 tanggal 9 Februari 2018. Besaran kompensasi sebesar 50%+10% senilai Rp2.605.206.000,00
11	SD Al Wasliyah dan SMA Teladan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara	Rp743,560,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-193/MK.6/2018 tanggal 16 Mei 2018. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp371.780.000,00
12	ABMA/T Yayasan Pendidikan Angkatan 45	Rp4,144,299,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-496/MK.6/2019 tanggal 22 Juli 2019 kompensasi 50% senilai Rp2.072.149.500,00
13	ABMA/T SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah	Rp41,324,629,500.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-638/MK.6/2019 tanggal 6 September 2019. Kompensasi 100% senilai Rp41.324.629.500,00
14	ABMA/T Rumah Sakit Bersalin Sentosa Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar	Rp4,373,822,000.00	Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Sulawesi Selatan u.p. Sekretaris Daerah Nomor S 4514/A/2001 tanggal 12 November 2001 Surat Kepala Kanwil XXIII Ditjen Anggaran Makasar Nomor S-1349/W.A.23/BD.05/2002 tanggal 19 Juni 2002. Besaran Kompensasi senilai Rp2.186.911.000,00
15	ABMA/T Rumah Tinggal di Jalan Sumatera Nomor 27 (d.h 13-15), Bandung	Rp7,503,853,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-243/MK.6/2020 tanggal 22 Juni 2020 Kompensasi 100% senilai Rp7.503.853.000
TOTAL		Rp83,923,260,600.00	

NILAI PASAR ATAS ABMA/T YANG DITETAPKAN BESARAN KOMPENSASINYA

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
1	ABMA/T Tanah dan Bangunan Penguasaan alm. Hj. Nur Salim (d.h Kantor Koramil Bulakamba) di Provinsi Jawa Tengah	Rp1,380,465,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-31/MK.6/2022 tanggal 13 Januari 2022 kompensasi 100% senilai Rp Rp1.380.465.000,00.
2	ABMA/T Tempat Tinggal (d.h Pertokoan) atas nama R.Thiagu Rajen di Provinsi Sumatera Utara	Rp316,283,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-120/MK.6/2022 tanggal 02 Maret 2022 kompensasi 100% senilai Rp316.283.000,00
3	ABMA/T Tempat Tinggal Shanlunt (d.h Pertokoan) atas nama Shanlunt di Provinsi Sumatera Utara	Rp316,283,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-129/MK.6/2022 tanggal 16 Maret 2022 kompensasi 100% senilai Rp316.283.000,00
4	ABMA/T Tempat Tinggal dan Tempat Usaha (d.h Pertokoan) atas nama Djulyta di Provinsi Sumatera Utara	Rp349,286,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-130/MK.6/2022 tanggal 16 Maret 2022 kompensasi 100% senilai Rp349.286.000,00
5	ABMA/T Tempat Tinggal Henry Pin (d.h Pertokoan) atas nama Henry Pin di Sumatera Utara	Rp338,285,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-131/MK.6/2022 tanggal 16 Maret 2022 kompensasi 100% senilai Rp338.285.000,00
6	ABMA/T Ruko dan Tempat Tinggal (d.h Pertokoan) atas nama Tumini Als To Moy Nai di Sumatera Utara	Rp338,285,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.6/2022 tanggal 16 Maret 2022 kompensasi 100% senilai Rp338.285.000,00
7	ABMA/T Tempat Tinggal Mustafa Tantono (d.h Pertkoan) atas nama Mustafa Tantono di Provinsi Sumatera Utara	Rp338,385,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-137/MK.6/2022 tanggal 22 Maret 2022 kompensasi 100% senilai Rp338.385.000,00
8	ABMA/T SD Harapan di Provinsi Sumatera Utara	Rp146,244,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-183/MK.6/2022 tanggal 07 Juni 2022 kompensasi 35%+10% senilai Rp65.809.800,00
9	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Lie Ki Sang (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp18,733,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-608/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 100% senilai Rp18.733.000,00
10	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Liong Mung Kian (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp18,733,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-609/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 100% senilai Rp18.733.000,00
11	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Budiyanto (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp16,920,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-610/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 100% senilai Rp16.920.000,00

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
12	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Jimmy Hartono (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp22,842,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-611/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 100% senilai Rp22.842.000,00
13	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Suherman Khouw (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp15,953,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 100% senilai Rp15.953.000,00
14	ABMA/T Universitas Muhammadiyah Makassar (d.h Universitas Muhammadiyah dan SDN Ranggong)	Rp12,022,698,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-613/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 30% senilai Rp3.606.809.400,00
15	ABMA/T Vihara Yi Zhi (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp47,742,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-614/MK.6/2022 tanggal 01 Desember 2022 kompensasi 0% senilai Rp0,00
16	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Fie Sian (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp22,237,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-625/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp22.237.000,00
17	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Wie Lim (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp37,131,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp37.131.000,00
18	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Sudjanto (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp167,368,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-627/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp167.368.000,00
19	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Lie Jun (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp35,569,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp35.569.000,00
20	ABMA/T Gereja Katolik St. Petrus Stasi Sangking (d.h Tanah Kosong)	Rp10,433,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 0% senilai Rp0,00
21	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Nyuk Min (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp37,344,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp37.344.000,00
22	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Cham A Moi (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp19,337,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-632/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp19.337.000,00
23	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Arim (d.h Kantor Kepala Desa/Kebun PKK)	Rp57,463,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-633/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp57.463.000,00

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
24	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Lie Bun Fan (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp24,171,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-635/MK.6/2022 tanggal 14 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp24.171.000,00
		Rp16,098,190,000.00	

DAFTAR ABMA/T YANG TELAH DITERBITKAN KMK

No.	Nama Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Koreksi atas penetapan kembali besaran kompensasi ABMA/T Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT) Pangkalan Susu (d.h ST dan STM) Luas 1.509 m2 di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 1 (d.h Jalan Pelabuhan Pangkalan Susu), Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang lebih rendah sehingga diakui beban pelepasan aset	Rp183,425,000	S-1/MK.6/2022 tanggal 04 Januari 2022 Besaran kompensasi sebesar 30%+10% dari nilai wajar aset
2	Tanah dan Bangunan Penguasaan Alm. Hj. Nur Salim (d.h Kantor Koramil Bulakamba) Luas Tanah 560m2 dan Luas Bangunan 109m2 di Jalan Raya Bulukamba, Desa Bulusari (d.h Bulukamba), Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah	Rp1,380,465,000	KMK-20/KM.6/2022 tanggal 09 Februari 2022 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
3	Tempat Tinggal Henry Pin (d.h Pertokoan) Luas Tanah 123 m2 di Jalan Husni Thamrin Nomor 25 Lk. IX (d.h Jalan Binjai), Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota (d.h Kecamatan Pekan Binjai), Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara deng	Rp338,285,000	KMK-78/KM.6/2022 tanggal 21 April 2022 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
4	Tempat Tinggal Mustafa Tantono (d.h Pertokoan) Luas Tanah 123 m2 di Jalan Husni Thamrin Nomor 25 Lk. IX (d.h Jalan Binjai), Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota (d.h Kecamatan Pekan Binjai), Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara	Rp338,385,000	KMK-79/KM.6/2022 tanggal 21 April 2022 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
5	Tempat Tinggal (d.h Pertokoan) Luas Tanah 115 m2 di Jalan Husni Thamrin Nomor 33 Lk. XI (d.h Jalan Binjai), Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota (d.h Kecamatan Pekan Binjai), Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara	Rp316,283,000	KMK-81/KM.6/2022 tanggal 22 April 2022 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
6	Tempat Tinggal dan Tempat Usaha (d.h Pertokoan) Luas Tanah 127 m2 di Jalan Husni Thamrin Nomor 89/9 Lk. IX (d.h Jalan Binjai), Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota (d.h Kecamatan Pekan Binjai), Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara	Rp349,286,000	KMK-82/KM.6/2022 tanggal 22 April 2022 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
7	Tempat Tinggal Shanlunt (d.h Pertokoan) Luas Tanah 115m2 di Jalan Husni Thamrin Nomor 37 Lk. XI (d.h Jalan Binjai), Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota (d.h Kecamatan Pekan Binjai), Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara	Rp316,283,000	KMK-90/KM.6/2022 tanggal 10 Mei 2022 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
8	Ruko dan Tempat Tinggal (d.h Pertokoan) Luas Tanah 123 m2 di Jalan Husni Thamrin Nomor 17 Lk. IX (d.h Jalan Binjai), Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota (d.h Kecamatan Pekan Binjai), Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara	Rp338,285,000	KMK-87/KM.6/2022 tanggal 28 April 2022 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset

9	Koreksi pencatatan ABMA/T SD Muhammadiyah 10, SMP Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 1 (d.h SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah) Luas Tanah 1.945m2 di Jalan Kapasan Nomor 73-75, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Rp41,324,629,500	KET-7/KN.4/2022 tanggal 15 Mei 2022
10	Koreksi pencatatan ABMA/T SMP Muhammadiyah 2 Taman (d.h SMP Muhammadiyah Taman) Luas Tanah 846m2 di Jalan Belakang Pasar Lama Nomor 135 (d.h Jalan Wonocolo), Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Rp4,342,010,000	KET-8/KN.4/2022 tanggal 15 Mei 2022
11	SD Harapan Luas Tanah 983 m2 di Jalan Harapan Nomor 749, Dusun IV, Desa Denai Sarang Burung, Kelurahan Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu (d.h Lubuk Pakan), Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	Rp146,244,000	KMK-115/KM.6/2022 tanggal 20 Juli 2022 Besaran kompensasi sebesar 35%+10% dari nilai aset wajar
12	Koreksi atas penetapan kembali besaran kompensasi ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Sulawesi Selatan Luas Tanah 2.081 m2 dan Luas Bangunan 397,76 m2 di Jalan Diponegoro Nomor 33, Kelurahan Batu Pasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang lebih rendah sehingga diakui beban pelepasan aset	Rp908,667,000	S-512/MK.6/2022 tanggal 07 Oktober 2022 Besaran kompensasi sebesar 35%+10% dari nilai wajar aset
13	Universitas Muhammadiyah Makassar (d.h Universitas Muhammadiyah dan SDN Ranggong) Luas Tanah 938 m2 dan Luas Bangunan 1.015,1 m2 di Jalan Ranggong Nomor 21 (d.h Jalan Ranggong Daeng Romo Nomor 7), Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Rp12,022,698,000	KMK-263/KM.6/2022 tanggal 30 Desember 2022 Besaran kompensasi sebesar 30% dari nilai wajaar aset
14	Vihara Yi Zhi (d.h Rumah Tinggal Penampungan) Luas Tanah 400 m2 di Jalan Sudirman (d.h Jalan Raya Mempawah), Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (d.h Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat	Rp47,742,000	KMK-264/KM.6/2022 tanggal 30 Desember 2022 Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai wajaar aset
		Rp62,352,687,500.00	

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)			
1	2,010,104,001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Semarang	Kab. Blora	Jalan Giyanti No.87 Kel. Karangboyo, Kec. Cepu, Kab. Blora, Jawa Tengah	1860	1/1/1968	2,152,950,000	-	2,152,950,000	PSP BMN eks BMN Idle ke KESDM cq. Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas, BAST-001/WKN.09101/2022
2	2010104004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	KPKNL Surabaya	Kab. Lamongan	Kec. Brondong	1015	12/31/1982	1,380,400,000	-	1,380,400,000	Hibah BMN eks BMN Idle ke Pemerintah Kabupaten Lamongan, BAST nomor BA-02/KNL.1001/2022
TOTAL TANAH						2,875		3,533,350,000		3,533,350,000	
1	4,010,101,001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Semarang	Kab. Blora	Jalan Giyanti No.87 Kel. Karangboyo, Kec. Cepu, Kab. Blora, Jawa Tengah	100	1/1/1978	285,172,000	187,398,743	97,773,257	PSP BMN eks BMN Idle ke KESDM cq. Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas, BAST-001/WKN.09101/2022
2	4,010,124,001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	KPKNL Surabaya	Kab. Lamongan	Kec. Brondong	439	12/31/1982	109,116,485	59,518,080	49,598,405	Hibah BMN eks BMN Idle ke Pemerintah Kabupaten Lamongan, BAST nomor BA-02/KNL.1001/2022
TOTAL BANGUNAN						539		394,288,485	246,916,823	147,371,662	
TOTAL						3,414		3,927,638,485	246,916,823	3,680,721,662	

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DITERIMA PENGELOLA BARANG

No	Pengelola Barang	Berita Acara Serah Terima		Identitas Aset							Ket.
		Nomor	Tanggal	Kode Barang	Uraian Barang	Lokasi Aset		Luas	Perolehan Aset		
						Kabupaten/ Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	KPKNL Jambi	BA-4/SJ.7/2022	15/3/2022	2010104005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Kab. Tanjung Jabung Timur	Jl. Haji Asri, Kel. Muara Sabak Ilir, Kec. Muara Sabak Timur	1,512	1/1/2009	111,817,000	Penyerahan BMN Idle dari Kemenkeu c.q KPP Pratama Kuala Tunggal
2	KPKNL Semarang	B-081/02520/PL.800/01/2022	25/1/2022	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kab. Kudus	Kel. Purwosari, Kec. Kota, Kab. Kudus	120	1/1/1980	182,480,000	Penyerahan BMN Idle dari BPS c.q BPS Kabupaten Kudus
3	KPKNL Surabaya	BAST-1/KNL.1006/2022	22/03/2022	2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga	Kab. Tuban	Jalan Raya Glondong, Desa Merkawang, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban	287	1/1/2004	251,125,000	Penyerahan BMN Idle dari Kemenkeu c.q KPPBC TMP C Bojonegoro
4	KPKNL Surabaya	BA-2/SJ.7/2022	14/02/2022	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Gresik	Jalan Tambak Bawean, Desa Tambak, Kec. Tambak, Kab. Gresik	229	1/1/1994	70,303,000	Penyerahan BMN Idle dari Kemenkeu c.q KPPBC TMP B Gresik
5	KPKNL Surabaya	BA-2/SJ.7/2022	14/02/2022	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Lamongan	Jalan Brondong, Desa Brengkok, Kec. Brondong, Kab. Lamongan	299	1/1/1999	149,500,000	Penyerahan BMN Idle dari Kemenkeu c.q KPPBC TMP B Gresik
6	KPKNL Surabaya	35/100/V/2022	10/5/2022	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kota Surabaya	Jalan Medokan AsriBarat X, Komp. Medokan Asri Barat, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya	2,000	18/2/1994	1,000,000,000	Penyerahan BMN Idle dari Kantah Kota Surabaya II
7	KPKNL Ambon	BAST-01/KNL.1701/2022	11/10/2022	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Ambon	Jalan Dr. Kayadoe, Kelurahan Kadumati, Kecamatan Nusaniwe	240	1/1/1987	397,800,000	Penyerahan dari Mahkamah Agung c.q. Pengadilan Agama Kota Ambon
8	KPKNL Bima	BA-13/SJ.7/2022	11/10/2022	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Dompu	Jalan Udang, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu	2,000	1/1/2008	1,293,000,000	Penyerahan dari Kemenkeu c.q. KPP Raba Bima
9	KPKNL Singkawang	BA-15/SJ.7/2022	11/2/2022	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Sambas	Jalan Pelabuhan Pemangkat, Desa Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas	131	1/1/2007	39,300,000	Penyerahan dari Kemenkeu c.q. KPPBC Tipe Madya Sintete (eks. NUP 9)
10	KPKNL Lahat	BA-01/KNL.0403/2022	13-12-2022	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kota Pagar Alam	Jalan Lintas Pagar Alam-Bengkulu, Ulu Urah, Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	899	1/1/2006	1,111,399,000	Penyerahan dari Kemenkeu c.q. KPP Pratama Lahat (eks. NUP 1)
11	KPKNL Batam	BA-1/SJ.7/2022	10/2/2022	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kota Tanjung Pinang	Jalan Bali No. 2, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang	250	1/1/1971	130,843,000	Penyerahan dari Kemenkeu c.q. KPP Pratama Bintan (eks NUP. 1)
TOTAL TANAH								7,967		4,737,567,000	

1	KPKNL Jambi	BA-4/SJ.7/2022	15/3/2022	4010101003	Bangunan Gedung Kantor Darurat	Kab. Tanjung Jabung Timur	Jl. Haji Asri, Kel. Muara Sabak Ilir, Kec. Muara Sabak Timur	200	1/1/2009	75,470,000	Penyerahan BMN Idle dari Kemenkeu c.q KPP Pratama Kuala Tunggal, Kondisi Rusak Berat
2	KPKNL Semarang	B-081/02520/PL.800/01/2022	25/1/2022	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Kab. Kudus	Kel. Purwosari, Kec. Kota, Kab. Kudus	70	1/1/1979	129,539,000	Penyerahan BMN Idle dari BPS c.q BPS Kabupaten Kudus, Kondisi Rusak Berat
3	KPKNL Surabaya	BAST-1/KNL.1006/2022	22/03/2022	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Tuban	Jalan Raya Glondong, Desa Merkawang, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban	70	1/1/2004	122,813,000	Penyerahan BMN Idle dari Kemenkeu c.q KPPBC TMP C Bojonegoro, Kondisi Rusak Ringan
4	KPKNL Surabaya	BA-2/SJ.7/2022	14/02/2022	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Gresik	Jalan Tambak Bawean, Desa Tambak, Kec. Tambak, Kab. Gresik	70	1/1/2004	50,172,000	Penyerahan BMN Idle dari Kemenkeu c.q KPPBC TMP B Gresik, Kondisi Rusak Berat
5	KPKNL Surabaya	BA-2/SJ.7/2022	14/02/2022	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Lamongan	Jalan Brondong, Desa Brengkok, Kec. Brondong, Kab. Lamongan	70	1/1/2004	8,000,000	Penyerahan BMN Idle dari Kemenkeu c.q KPPBC TMP B Gresik, Kondisi Rusak Berat
6	KPKNL Bima	BA-13/SJ.7/2022	11/10/2022	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kab. Dompu	Jalan Udang, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu	197	1/1/2008	116,834,000	Penyerahan dari Kemenkeu c.q. KPP Raba Bima
7	KPKNL Singkawang	BA-15/SJ.7/2022	11/2/2022	4040104001	Pagar Permanen	Kab. Sambas	Jalan Bukit Raya, Kec. Jawai, Kab. Sambas	160	1/1/2009	179,567,000	Penyerahan dari Kemenkeu c.q. KPPBC Tipe Madya Sintete (eks. NUP 1)
8	KPKNL Singkawang	BA-15/SJ.7/2022	11/2/2022	4040104001	Pagar Permanen	Kab. Sambas	Jalan Kuala, Desa Kuala, Kec. Selakau, Kab. Sambas	160	1/1/2009	168,684,000	Penyerahan dari Kemenkeu c.q. KPPBC Tipe Madya Sintete (eks. NUP 2)
9	KPKNL Singkawang	BA-15/SJ.7/2022	11/2/2022	4040104001	Pagar Permanen	Kab. Sambas	Jalan Siaga Parit Baru, Desa Parit Baru, Kec. Selakau, Kab. Sambas	103	1/1/2009	108,590,000	Penyerahan dari Kemenkeu c.q. KPPBC Tipe Madya Sintete (eks. NUP 3)
10	KPKNL Singkawang	BA-15/SJ.7/2022	11/2/2022	4040104001	Pagar Permanen	Kab. Sambas	Jalan Pelabuhan Penjajab, Desa Penjajab, Kec. Pemangkat Kota, Kab. Sambas	120	1/1/2009	126,513,000	Penyerahan dari Kemenkeu c.q. KPPBC Tipe Madya Sintete (eks. NUP 4)
11	KPKNL Lahat	BA-01/KNL.0403/2022	13-12-2022	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kota Pagar Alam	Jalan Lintas Pagar Alam-Bengkulu, Ulu Urah, Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	100	1/1/2006	15,866,000	Penyerahan dari Kemenkeu c.q. KPP Pratama Lahat (eks. NUP 1)
TOTAL BANGUNAN								1,320		1,102,048,000	
TOTAL										5,839,615,000	

UTANG RETUR KPPN

KODE	KPPN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
001	BANDA ACEH	(871,612,749)	598,397,693	(273,215,056)
003	MEULABOH	(3,727,273)	3,727,273	0
004	MEDAN I	(4,373,073,140)	4,220,827,806	(152,245,334)
006	PADANG SIDEMPUAN	(36,600,000)	36,600,000	0
008	PEKANBARU	(1,040,077,909)	1,015,490,260	(24,587,649)
009	TANJUNG PINANG	(160,115,596)	160,115,596	0
010	PADANG	(730,683,944)	707,185,621	(23,498,323)
013	SUNGAI PENUH	(2,087,033,223)	2,087,033,223	0
014	PALEMBANG	(879,295,873)	633,469,671	(245,826,202)
015	PANGKAL PINANG	0	(35,000,250)	(35,000,250)
016	BENGKULU	(485,786,035)	485,786,035	0
017	BANDAR LAMPUNG	(2,279,040,071)	2,275,605,071	(3,435,000)
018	JAKARTA I	(2,704,810,000)	2,704,810,000	0
019	JAKARTA II	(172,180,000)	44,869,836	(127,310,164)
020	SERANG	(1,706,289,289)	1,424,946,402	(281,342,887)
022	BANDUNG I	(110,400,000)	(16,499,797,864)	(16,610,197,864)
023	BOGOR	(1,500,000)	1,500,000	0
024	CIREBON	(1,665,137,057)	1,412,182,120	(252,954,937)
025	TASIKMALAYA	(42,928,000)	(339,815,016)	(382,743,016)
026	SEMARANG I	(225,918,872)	(183,629,633,676)	(183,855,552,548)
028	SURAKARTA	(5,741,959,091)	5,741,959,091	0
030	YOGYAKARTA	(68,236,600)	(7,358,157)	(75,594,757)
031	SURABAYA I	(141,509,836)	98,917,294	(42,592,542)
032	MALANG	(191,022,944)	191,022,944	0
034	KEDIRI	(103,033,636)	(48,565,812)	(151,599,448)
036	PAMEKASAN	(177,682,909)	111,659,329	(66,023,580)
037	DENPASAR	0	(547,522,294)	(547,522,294)
038	MATARAM	(290,055,256)	244,255,256	(45,800,000)
039	KUPANG	(361,007,337)	361,007,337	0
042	PONTIANAK	(137,094,623)	(2,031,202,742)	(2,168,297,365)
043	PALANGKARAYA	(216,086,949)	(61,169,339)	(277,256,288)
046	SAMARINDA	(19,396,048)	(22,603,952)	(42,000,000)
048	TARAKAN	0	(502,054,500)	(502,054,500)
049	MANADO	0	(2,074,809,670)	(2,074,809,670)
050	GORONTALO	(78,596,000)	(86,237,230)	(164,833,230)
051	PALU	(1,629,483,755)	1,505,905,377	(123,578,378)
052	POSO	0	(7,913,500)	(7,913,500)
054	MAKASSAR I	(347,029,594)	347,029,594	0
055	WATAMPONE	(4,000,000)	4,000,000	0
059	MAJENE	0	(83,182,703)	(83,182,703)
060	KENDARI	(146,290,509)	28,314,563	(117,975,946)
061	AMBON	(87,185,455)	(35,939,545)	(123,125,000)
062	TERNATE	(684,000)	(391,165,126)	(391,849,126)
063	JAYAPURA	(116,287,454)	116,287,454	0
065	MANOKWARI	(225,177,741)	219,177,741	(6,000,000)
066	SORONG	0	(11,545,193)	(11,545,193)
067	FAK FAK	(5,000,000)	5,000,000	0

KODE	KPPN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
068	MERAUKE	0	(3,930,440)	(3,930,440)
073	BOJONEGORO	0	(24,570,229)	(24,570,229)
082	TOLI TOLI	0	(13,401,541)	(13,401,541)
083	TAHUNA	0	(3,833,000)	(3,833,000)
086	KARAWANG	0	(3,734,102,182)	(3,734,102,182)
087	SUMEDANG	(73,783,680)	73,783,680	0
088	JAKARTA III	(210,215,775,741)	207,394,270,377	(2,821,505,364)
089	LHOKSEUMAWE	(135,687,363)	135,687,363	0
092	RENGAT	(154,078,328)	154,078,328	0
094	KETAPANG	(977,671,197)	977,671,197	0
095	BANDUNG II	(2,544,000)	(53,456,000)	(56,000,000)
098	MOJOKERTO	(83,098,181)	83,098,181	0
100	BANYUWANGI	(87,255,549)	85,159,349	(2,096,200)
102	PANGKALAN BUN	0	(24,442,365)	(24,442,365)
109	BATURAJA	(104,878,000)	37,210,659	(67,667,341)
111	RUTENG	0	(62,117,170)	(62,117,170)
113	WAMENA	0	(5,814,000)	(5,814,000)
115	MAGELANG	0	(271,386,359)	(271,386,359)
116	KOTABUMI	(26,467,000)	26,467,000	0
123	MEDAN II	(22,000,000)	(206,304,549)	(228,304,549)
125	BALIGE	(38,828,100)	38,828,100	0
127	TANGERANG	(224,950,182)	219,941,948	(5,008,234)
129	KUDUS	0	(177,000,261)	(177,000,261)
133	JAKARTA IV	(1,900,000)	(1,959,155,256)	(1,961,055,256)
134	SEMARANG II	(56,824,880)	(23,913,061)	(80,737,941)
135	SURABAYA II	0	(344,731,087)	(344,731,087)
136	MAKASSAR II	(238,836,433)	238,836,433	0
137	BATAM	(4,294,204,572)	4,194,719,572	(99,485,000)
139	JAKARTA V	(1,028,191,767)	(12,969,663,526)	(13,997,855,293)
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HI	(988,712,505)	855,269,542	(133,442,963)
143	KUALA TUNGKAL	(20,000,000)	(33,687,982)	(53,687,982)
150	BLITAR	(712,500)	712,500	0
156	KOLAKA	0	(310,275,040)	(310,275,040)
160	SEKAYU	0	(88,157,500)	(88,157,500)
161	RANGKASBITUNG	(225,636,363)	225,636,363	0
165	SIDOARJO	(107,068,920)	6,696,390	(100,372,530)
173	MASOHI	(355,636,364)	355,636,364	0
175	JAKARTA VI	(475,932,240)	(1,038,158,031)	(1,514,090,271)
178	MAMUJU	(61,639,728)	(128,870,272)	(190,510,000)
179	BITUNG	(327,867,100)	327,867,100	0
180	MARISA	(6,770,909)	(11,379,091)	(18,150,000)
182	JAKARTA VII	(1,167,237,378)	(13,281,434,331)	(14,448,671,709)
185	TANJUNG SELOR	0	(262,425,446)	(262,425,446)
901	Penerimaan Negara	(19,007,782)	13,556,203	(5,451,579)
999	DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA	(32,511,346)	2,681,334,560	2,648,823,214
TOTAL		(251,218,736,876)	3,465,818,508	(247,752,918,368)

Utang TDF			
No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
1	Provinsi Aceh	33,009,630,231	90,019,973,241
2	Kab. Aceh Barat	5,119,095,629	-
3	Kab. Aceh Besar	2,053,321,214	-
4	Kab. Aceh Selatan	1,729,774,508	-
5	Kab. Aceh Singkil	2,136,377,129	-
6	Kab. Aceh Tengah	1,810,206,394	-
7	Kab. Aceh Tenggara	1,439,911,081	-
8	Kab. Aceh Timur	5,542,845,996	-
9	Kab. Aceh Utara	8,299,949,647	-
10	Kab. Bireuen	1,934,597,197	-
11	Kab. Pidie	1,916,638,666	-
12	Kab. Simeulue	1,340,498,784	-
13	Kota Banda Aceh	4,946,106,352	-
14	Kota Sabang	1,356,458,840	-
15	Kota Langsa	1,879,287,542	-
16	Kota Lhokseumawe	2,788,757,383	-
17	Kab. Gayo Lues	1,544,582,861	-
18	Kab. Aceh Barat Daya	1,484,104,551	-
19	Kab. Aceh Jaya	1,463,850,982	-
20	Kab. Nagan Raya	2,674,738,053	-
21	Kab. Aceh Tamiang	10,886,300,798	-
22	Kab. Bener Meriah	1,431,717,839	-
23	Kab. Pidie Jaya	1,424,912,508	-
24	Kota Subulussalam	1,597,565,631	-
25	Provinsi Sumatera Utara	66,637,493,833	-
26	Kab. Asahan	8,824,728,880	-
27	Kab. Dairi	2,544,314,235	-
28	Kab. Deli Serdang	8,815,859,427	-
29	Kab. Karo	4,618,814,363	-
30	Kab. Labuhanbatu	6,370,049,329	-
31	Kab. Langkat	22,222,337,175	-
32	Kab. Mandailing Natal	6,205,219,592	-
33	Kab. Nias	1,974,126,438	-
34	Kab. Simalungun	7,386,210,250	-
35	Kab. Tapanuli Selatan	113,400,479,672	-
36	Kab. Tapanuli Tengah	5,305,666,463	-
37	Kab. Tapanuli Utara	6,732,960,033	-
38	Kab. Toba Samosir	2,592,687,030	-
39	Kota Binjai	2,904,616,646	-
40	Kota Medan	24,626,842,929	-

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
41	Kota Pematang Siantar	3,770,063,272	-
42	Kota Sibolga	2,313,043,062	-
43	Kota Tanjung Balai	2,176,357,250	-
44	Kota Tebing Tinggi	2,306,584,813	-
45	Kota Padang Sidempuan	2,606,092,868	-
46	Kab. Pakpak Bharat	4,185,455,830	-
47	Kab. Nias Selatan	2,492,742,077	-
48	Kab. Humbang Hasundutan	2,234,113,380	-
49	Kab. Serdang Bedagai	8,061,376,817	-
50	Kab. Samosir	2,197,926,483	-
51	Kab. Batu Bara	4,011,519,265	-
52	Kab. Padang Lawas	4,292,824,162	-
53	Kab. Padang Lawas Utara	3,979,805,899	-
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	10,737,546,548	11,965,565,999
55	Kab. Labuhanbatu Utara	7,279,125,591	-
56	Kab. Nias Utara	2,031,884,529	-
57	Kab. Nias Barat	1,999,992,462	-
58	Kota Gunungsitoli	2,276,998,762	-
59	Provinsi Sumatera Barat	17,383,009,171	-
60	Kab. Lima Puluh Kota	1,847,868,971	-
61	Kab. Agam	2,318,405,458	-
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1,889,277,232	-
63	Kab. Padang Pariaman	1,605,774,707	-
64	Kab. Pasaman	1,574,060,781	-
65	Kab. Pesisir Selatan	2,536,272,766	-
66	Kab. Sijunjung	2,061,461,290	-
67	Kab. Solok	1,819,734,875	-
68	Kab. Tanah Datar	1,761,601,773	-
69	Kota Bukit Tinggi	1,849,462,625	-
70	Kota Padang Panjang	1,399,811,316	-
71	Kota Padang	8,637,843,338	-
72	Kota Payakumbuh	1,552,080,426	-
73	Kota Sawahlunto	3,001,031,612	-
74	Kota Solok	1,602,366,100	-
75	Kota Pariaman	1,629,474,689	-
76	Kab. Pasaman Barat	3,237,809,951	-
77	Kab. Dharmasraya	2,689,400,169	-
78	Kab. Solok Selatan	5,364,179,953	-
79	Provinsi Riau	184,846,380,916	-
80	Kab. Bengkalis	249,763,348,606	29,956,893,229
81	Kab. Indragiri Hilir	31,973,952,963	-
82	Kab. Indragiri Hulu	27,736,520,436	-

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
83	Kab. Kampar	57,889,970,489	-
84	Kab. Kuantan Singingi	18,296,927,128	13,807,204,884
85	Kab. Pelalawan	33,591,023,061	-
86	Kab. Rokan Hilir	65,622,729,470	-
87	Kab. Rokan Hulu	22,940,305,583	18,530,418,646
88	Kab. Siak	91,689,546,584	-
89	Kota Dumai	19,657,304,506	12,763,120,092
90	Kota Pekanbaru	25,465,860,836	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	22,342,795,882	-
92	Provinsi Jambi	46,606,437,622	-
93	Kab. Batanghari	21,624,891,590	-
94	Kab. Bungo	28,695,110,095	-
95	Kab. Kerinci	6,447,377,142	-
96	Kab. Merangin	6,904,372,496	-
97	Kab. Muaro Jambi	17,256,155,948	-
98	Kab. Sarolangun	16,775,082,326	-
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	47,892,089,127	-
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	15,715,021,876	-
101	Kab. Tebo	18,013,437,823	26,627,271,521
102	Kota Jambi	13,836,304,323	-
103	Kota Sungai Penuh	6,433,667,158	-
104	Provinsi Sumatera Selatan	198,834,528,479	-
105	Kab. Lahat	218,919,702,774	139,699,930,612
106	Kab. Musi Banyuasin	222,366,947,336	303,706,722,199
107	Kab. Musi Rawas	63,908,257,637	66,272,061,045
108	Kab. Muara Enim	133,182,467,991	-
109	Kab. Ogan Komering Ilir	21,726,368,998	-
110	Kab. Ogan Komering Ulu	25,180,545,789	-
111	Kota Palembang	47,010,882,747	35,638,041,196
112	Kota Prabumulih	47,406,659,690	31,763,007,842
113	Kota Pagar Alam	35,089,327,304	31,906,282,964
114	Kota Lubuk Linggau	14,899,722,718	-
115	Kab. Banyuasin	45,147,446,833	38,189,897,850
116	Kab. Ogan Ilir	42,130,105,110	-
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	35,635,040,480	-
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	15,311,936,269	-
119	Kab. Empat Lawang	14,728,284,407	-
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	71,222,712,521	-
121	Kab. Musi Rawas Utara	49,207,970,419	-
122	Provinsi Bengkulu	9,788,357,786	-
123	Kab. Bengkulu Selatan	2,249,392,929	-
124	Kab. Bengkulu Utara	25,852,020,843	11,767,858,318

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
125	Kab. Rejang Lebong	2,349,543,831	-
126	Kota Bengkulu	3,775,765,707	-
127	Kab. Kaur	2,243,569,321	-
128	Kab. Seluma	2,754,075,434	-
129	Kab. Mukomuko	3,520,828,478	-
130	Kab. Lebong	2,519,188,698	-
131	Kab. Kepahiang	2,179,092,225	-
132	Kab. Bengkulu Tengah	6,425,946,497	-
133	Provinsi Lampung	21,872,060,054	-
134	Kab. Lampung Barat	2,363,635,599	-
135	Kab. Lampung Selatan	4,182,870,263	-
136	Kab. Lampung Tengah	5,881,377,878	-
137	Kab. Lampung Utara	3,278,357,098	-
138	Kab. Lampung Timur	5,725,136,111	-
139	Kab. Tanggamus	9,182,157,150	-
140	Kab. Tulang Bawang	3,695,622,900	-
141	Kab. Way Kanan	3,611,614,421	-
142	Kota Bandar Lampung	7,821,347,630	-
143	Kota Metro	3,335,665,065	-
144	Kab. Pesawaran	2,819,741,085	-
145	Kab. Pringsewu	2,491,089,130	-
146	Kab. Mesuji	3,670,116,040	-
147	Kab. Tulang Bawang Barat	2,557,108,394	-
148	Kab. Pesisir Barat	2,282,169,616	-
149	Provinsi DKI Jakarta	1,742,378,693,672	-
150	Provinsi Jawa Barat	217,903,334,841	-
151	Kab. Bandung	46,898,785,261	-
152	Kab. Bekasi	48,421,637,409	-
153	Kab. Bogor	56,264,034,853	-
154	Kab. Ciamis	7,877,113,029	-
155	Kab. Cianjur	9,616,663,564	-
156	Kab. Cirebon	13,117,976,670	-
157	Kab. Garut	22,061,002,709	-
158	Kab. Indramayu	22,732,460,700	-
159	Kab. Karawang	41,215,173,246	-
160	Kab. Kuningan	7,876,826,944	-
161	Kab. Majalengka	12,677,500,376	-
162	Kab. Purwakarta	12,108,529,560	-
163	Kab. Subang	17,164,810,356	-
164	Kab. Sukabumi	19,017,872,168	-
165	Kab. Sumedang	11,247,520,973	-
166	Kab. Tasikmalaya	8,181,152,173	-

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
167	Kota Bandung	37,748,527,502	-
168	Kota Bekasi	18,355,456,228	-
169	Kota Bogor	12,400,188,687	-
170	Kota Cirebon	8,625,025,166	-
171	Kota Depok	12,874,173,032	-
172	Kota Sukabumi	8,262,174,065	-
173	Kota Tasikmalaya	8,160,783,711	-
174	Kota Cimahi	8,491,417,379	-
175	Kota Banjar	7,022,702,331	-
176	Kab. Bandung Barat	10,028,696,243	-
177	Kab. Pangandaran	7,132,741,502	-
178	Provinsi Jawa Tengah	103,488,065,991	-
179	Kab. Banjarnegara	4,329,853,813	-
180	Kab. Banyumas	6,852,019,595	-
181	Kab. Batang	4,932,006,798	-
182	Kab. Blora	14,682,891,150	-
183	Kab. Boyolali	6,466,181,015	-
184	Kab. Brebes	4,505,488,265	-
185	Kab. Cilacap	7,443,426,352	-
186	Kab. Demak	6,433,940,133	-
187	Kab. Grobogan	6,856,298,575	-
188	Kab. Jepara	5,651,751,730	-
189	Kab. Karanganyar	5,218,071,738	-
190	Kab. Kebumen	4,228,271,591	-
191	Kab. Kendal	5,851,313,807	-
192	Kab. Klaten	5,769,109,041	-
193	Kab. Kudus	31,755,859,539	-
194	Kab. Magelang	5,004,550,236	-
195	Kab. Pati	4,909,023,640	-
196	Kab. Pekalongan	3,627,060,448	-
197	Kab. Pemalang	4,188,306,813	-
198	Kab. Purbalingga	3,652,919,306	-
199	Kab. Purworejo	3,579,590,132	-
200	Kab. Rembang	7,265,861,146	-
201	Kab. Semarang	5,307,825,135	-
202	Kab. Sragen	4,199,910,216	-
203	Kab. Sukoharjo	4,677,891,542	-
204	Kab. Tegal	4,266,805,356	-
205	Kab. Temanggung	7,529,500,555	-
206	Kab. Wonogiri	5,275,246,530	-
207	Kab. Wonosobo	4,542,637,488	-
208	Kota Magelang	3,799,625,715	-

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
209	Kota Pekalongan	3,598,969,969	-
210	Kota Salatiga	3,730,030,293	-
211	Kota Semarang	19,964,861,788	-
212	Kota Surakarta	6,310,193,116	-
213	Kota Tegal	3,632,388,245	-
214	Provinsi DI Yogyakarta	11,724,696,357	-
215	Kab. Bantul	4,232,673,062	-
216	Kab. Gunung Kidul	2,878,766,365	-
217	Kab. Kulon Progo	3,183,580,801	-
218	Kab. Sleman	6,415,758,548	-
219	Kota Yogyakarta	6,463,653,857	-
220	Provinsi Jawa Timur	323,957,808,445	458,382,669,993
221	Kab. Bangkalan	11,359,337,247	-
222	Kab. Banyuwangi	71,074,142,287	-
223	Kab. Blitar	12,841,109,101	-
224	Kab. Bojonegoro	223,729,693,298	-
225	Kab. Bondowoso	14,587,753,069	-
226	Kab. Gresik	22,960,040,334	-
227	Kab. Jember	21,435,636,872	-
228	Kab. Jombang	14,396,058,139	-
229	Kab. Kediri	16,719,352,728	-
230	Kab. Lamongan	15,241,897,421	-
231	Kab. Lumajang	13,253,042,122	-
232	Kab. Madiun	12,687,942,143	20,218,253,816
233	Kab. Magetan	12,116,445,013	-
234	Kab. Malang	22,363,783,181	-
235	Kab. Mojokerto	12,447,629,294	-
236	Kab. Nganjuk	13,091,239,633	19,085,227,183
237	Kab. Ngawi	12,466,928,001	-
238	Kab. Pacitan	12,061,673,171	-
239	Kab. Pamekasan	17,980,199,817	-
240	Kab. Pasuruan	37,257,964,549	-
241	Kab. Ponorogo	12,080,085,794	-
242	Kab. Probolinggo	17,535,787,532	-
243	Kab. Sampang	11,759,809,340	-
244	Kab. Sidoarjo	23,389,528,161	-
245	Kab. Situbondo	14,366,101,371	-
246	Kab. Sumenep	16,037,113,055	-
247	Kab. Trenggalek	12,250,325,969	-
248	Kab. Tuban	18,857,542,245	-
249	Kab. Tulungagung	13,627,596,948	-
250	Kota Blitar	10,831,323,565	-

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
251	Kota Kediri	25,617,688,182	-
252	Kota Madiun	11,510,235,230	-
253	Kota Malang	17,420,902,218	-
254	Kota Mojokerto	10,905,390,995	-
255	Kota Pasuruan	11,032,993,275	-
256	Kota Probolinggo	11,927,599,890	-
257	Kota Surabaya	54,496,242,909	-
258	Kota Batu	10,462,670,304	-
259	Provinsi Kalimantan Barat	30,011,559,654	-
260	Kab. Bengkayang	4,120,407,530	-
261	Kab. Landak	5,311,141,631	-
262	Kab. Kapuas Hulu	4,949,377,492	-
263	Kab. Ketapang	90,623,441,787	81,951,720,829
264	Kab. Mempawah	3,320,523,535	-
265	Kab. Sambas	8,895,693,876	-
266	Kab. Sanggau	51,034,133,478	59,579,744,726
267	Kab. Sintang	10,946,043,749	13,008,425,818
268	Kota Pontianak	6,804,003,695	-
269	Kota Singkawang	3,214,112,073	-
270	Kab. Sekadai	3,912,364,046	-
271	Kab. Melawi	4,156,757,373	-
272	Kab. Kayong Utara	3,770,544,109	-
273	Kab. Kubu Raya	5,629,039,475	-
274	Provinsi Kalimantan Tengah	215,612,174,112	172,117,011,266
275	Kab. Barito Selatan	13,886,184,282	-
276	Kab. Barito Utara	124,764,032,272	120,025,177,858
277	Kab. Kapuas	37,063,150,291	-
278	Kab. Kotawaringin Barat	29,899,050,113	25,615,099,987
279	Kab. Kotawaringin Timur	18,986,228,023	-
280	Kota Palangkaraya	9,199,179,686	-
281	Kab. Katingan	13,054,117,355	-
282	Kab. Seruyan	30,714,816,608	-
283	Kab. Sukamara	8,127,829,458	-
284	Kab. Lamandau	32,641,945,976	31,705,976,200
285	Kab. Gunung Mas	10,234,288,235	-
286	Kab. Pulang Pisau	24,718,236,506	26,562,290,580
287	Kab. Murung Raya	120,423,632,265	-
288	Kab. Barito Timur	13,225,038,189	-
289	Provinsi Kalimantan Selatan	646,279,248,974	283,586,751,577
290	Kab. Banjar	40,943,910,403	-
291	Kab. Barito Kuala	27,225,436,837	-
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	171,169,994,723	-

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	99,978,345,638	41,533,267,804
294	Kab. Hulu Sungai Utara	26,762,259,800	-
295	Kab. Kotabaru	169,606,225,795	121,189,583,332
296	Kab. Tabalong	239,447,124,818	84,584,538,251
297	Kab. Tanah Laut	320,910,840,856	-
298	Kab. Tapin	54,362,661,841	-
299	Kota Banjarbaru	27,999,126,576	-
300	Kota Banjarmasin	30,596,138,979	-
301	Kab. Balangan	356,848,551,037	280,912,035,087
302	Kab. Tanah Bumbu	422,836,148,804	179,902,270,630
303	Provinsi Kalimantan Timur	421,614,578,730	-
304	Kab. Berau	551,283,992,142	347,296,284,338
305	Kab. Kutai Kartanegara	349,109,715,122	-
306	Kab. Kutai Barat	481,416,786,997	379,488,902,163
307	Kab. Kutai Timur	1,045,654,710,312	633,804,153,247
308	Kab. Paser	494,440,528,867	-
309	Kota Balikpapan	273,552,553,759	190,008,304,715
310	Kota Bontang	276,096,958,796	213,687,948,823
311	Kota Samarinda	318,821,504,239	-
312	Kab. Penajam Paser Utara	273,586,838,226	188,710,887,928
313	Kab. Mahakam Ulu	254,005,527,160	199,161,002,394
314	Provinsi Sulawesi Utara	19,190,904,729	-
315	Kab. Bolaang Mongondow	5,499,268,973	-
316	Kab. Minahasa	4,770,146,059	-
317	Kab. Sangihe	2,796,317,207	-
318	Kota Bitung	69,033,454,531	-
319	Kota Manado	6,398,310,551	-
320	Kab. Kepulauan Talaud	2,470,844,651	-
321	Kab. Minahasa Selatan	2,825,817,872	-
322	Kota Tomohon	3,975,040,385	-
323	Kab. Minahasa Utara	7,188,789,736	-
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang	2,430,901,577	-
325	Kota Kotamobagu	2,733,221,365	-
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,466,639,752	-
327	Kab. Minahasa Tenggara	2,494,012,174	-
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,764,165,750	-
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	4,555,262,193	-
330	Provinsi Sulawesi Tengah	30,925,489,573	-
331	Kab. Banggai	34,641,630,352	-
332	Kab. Banggai Kepulauan	4,296,699,032	-
333	Kab. Buol	4,843,040,165	-
334	Kab. Tolitoli	4,596,264,047	-

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
335	Kab. Donggala	4,649,025,047	-
336	Kab. Morowali	21,901,350,207	-
337	Kab. Poso	4,640,530,781	-
338	Kota Palu	6,210,422,990	-
339	Kab. Parigi Moutong	4,582,836,057	-
340	Kab. Tojo Una Una	9,007,613,628	20,229,493,795
341	Kab. Sigi	8,882,488,606	-
342	Kab. Banggai Laut	4,244,434,704	-
343	Kab. Morowali Utara	8,013,603,645	-
344	Provinsi Sulawesi Selatan	32,671,772,808	-
345	Kab. Bantaeng	2,135,667,426	-
346	Kab. Barru	2,182,825,792	-
347	Kab. Bone	3,378,399,956	-
348	Kab. Bulukumba	2,639,827,211	-
349	Kab. Enrekang	4,380,440,191	-
350	Kab. Gowa	2,708,109,750	-
351	Kab. Jeneponto	2,423,366,323	-
352	Kab. Luwu	2,356,445,434	-
353	Kab. Luwu Utara	2,453,857,480	-
354	Kab. Maros	3,208,555,220	-
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	3,664,884,124	-
356	Kota Palopo	2,407,498,841	-
357	Kab. Luwu Timur	20,519,902,854	-
358	Kab. Pinrang	2,331,905,841	-
359	Kab. Sinjai	4,515,523,220	-
360	Kab. Kepulauan Selayar	2,125,697,317	-
361	Kab. Sidenreng Rappang	2,303,294,222	-
362	Kab. Soppeng	4,845,761,110	-
363	Kab. Takalar	2,503,617,883	-
364	Kab. Tana Toraja	2,218,394,339	-
365	Kab. Wajo	5,895,352,420	-
366	Kota Parepare	2,495,087,413	-
367	Kota Makassar	13,887,976,370	-
368	Kab. Toraja Utara	2,157,383,741	-
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	37,223,470,578	-
370	Kab. Buton	4,980,860,614	-
371	Kab. Konawe	5,813,037,216	-
372	Kab. Kolaka	92,908,436,571	97,701,730,900
373	Kab. Muna	4,869,387,366	-
374	Kota Kendari	6,654,033,064	-
375	Kota Bau-bau	4,957,671,306	-
376	Kab. Konawe Selatan	12,544,531,725	-

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
377	Kab. Bombana	17,106,859,922	-
378	Kab. Wakatobi	15,789,874,605	-
379	Kab. Kolaka Utara	23,746,757,911	-
380	Kab. Konawe Utara	27,188,500,934	-
381	Kab. Buton Utara	4,715,525,928	-
382	Kab. Konawe Kepulauan	4,725,380,018	-
383	Kab. Kolaka Timur	15,856,472,435	21,372,889,212
384	Kab. Muna Barat	4,666,456,392	-
385	Kab. Buton Tengah	19,108,604,334	-
386	Kab. Buton Selatan	4,714,761,466	-
387	Provinsi Bali	19,575,067,331	-
388	Kab. Badung	7,236,760,875	-
389	Kab. Bangli	2,196,794,971	-
390	Kab. Buleleng	3,339,839,489	-
391	Kab. Gianyar	2,857,551,939	-
392	Kab. Jembrana	2,698,226,768	-
393	Kab. Karangasem	2,513,131,411	-
394	Kab. Klungkung	2,322,486,210	-
395	Kab. Tabanan	2,924,824,656	-
396	Kota Denpasar	9,933,154,375	-
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	37,055,783,154	-
398	Kab. Bima	5,936,263,639	-
399	Kab. Dompu	5,371,032,606	-
400	Kab. Lombok Barat	6,953,428,828	-
401	Kab. Lombok Tengah	12,364,197,049	-
402	Kab. Lombok Timur	13,170,077,983	-
403	Kab. Sumbawa	7,062,905,701	-
404	Kota Mataram	13,495,306,905	-
405	Kota Bima	5,109,857,054	-
406	Kab. Sumbawa Barat	38,386,896,671	-
407	Kab. Lombok Utara	5,033,728,675	-
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	7,137,185,651	-
409	Kab. Alor	1,128,382,638	-
410	Kab. Belu	1,184,316,324	-
411	Kab. Ende	1,544,409,045	-
412	Kab. Flores Timur	1,237,542,991	-
413	Kab. Kupang	1,293,211,973	-
414	Kab. Lembata	1,100,881,468	-
415	Kab. Manggarai	1,468,184,617	-
416	Kab. Ngada	1,105,498,072	-
417	Kab. Sikka	1,333,098,275	-
418	Kab. Sumba Barat	1,070,018,977	-

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
419	Kab. Sumba Timur	1,535,588,854	-
420	Kab. Timor Tengah Selatan	1,318,885,215	-
421	Kab. Timor Tengah Utara	1,201,257,626	-
422	Kota Kupang	3,303,500,175	-
423	Kab. Rote Ndao	1,070,207,051	-
424	Kab. Manggarai Barat	1,171,444,144	-
425	Kab. Nagekeo	1,048,220,265	-
426	Kab. Sumba Barat Daya	1,134,344,914	-
427	Kab. Sumba Tengah	983,025,402	-
428	Kab. Manggarai Timur	1,087,030,036	-
429	Kab. Sabu Raijua	987,446,163	-
430	Kab. Malaka	1,069,808,954	-
431	Provinsi Maluku	10,927,149,508	-
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,650,974,960	-
433	Kab. Maluku Tengah	2,156,322,302	-
434	Kab. Maluku Tenggara	1,422,279,640	-
435	Kab. Buru	1,884,108,736	-
436	Kota Ambon	3,316,261,206	-
437	Kab. Seram Bagian Barat	1,485,888,262	-
438	Kab. Seram Bagian Timur	4,376,621,521	-
439	Kab. Kepulauan Aru	1,460,869,748	-
440	Kota Tual	1,289,983,188	-
441	Kab. Maluku Barat Daya	2,627,404,496	-
442	Kab. Buru Selatan	1,745,339,545	-
443	Provinsi Papua	126,203,681,155	-
444	Kab. Biak Numfor	7,200,404,411	-
445	Kab. Jayapura	7,924,242,596	-
446	Kab. Jayawijaya	7,252,827,790	-
447	Kab. Merauke	10,204,740,074	-
448	Kab. Mimika	1,063,316,091,317	-
449	Kab. Nabire	8,296,501,129	-
450	Kab. Paniai	7,030,444,392	-
451	Kab. Puncak Jaya	6,993,502,300	-
452	Kab. Kepulauan Yapen	7,007,590,353	-
453	Kota Jayapura	26,744,272,087	-
454	Kab. Sarmi	25,320,513,564	-
455	Kab. Keerom	7,871,733,503	-
456	Kab. Yahukimo	23,420,742,223	-
457	Kab. Pegunungan Bintang	7,858,803,013	-
458	Kab. Tolikara	6,942,661,131	-
459	Kab. Boven Digoel	8,426,239,269	-
460	Kab. Mappi	7,200,824,218	-

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
461	Kab. Asmat	23,593,103,448	-
462	Kab. Waropen	7,124,418,084	-
463	Kab. Supiori	6,878,372,392	-
464	Kab. Mamberamo Raya	7,251,009,021	-
465	Kab. Mamberamo Tengah	6,855,647,674	-
466	Kab. Yalimo	6,831,376,355	-
467	Kab. Lanny Jaya	6,831,739,785	-
468	Kab. Nduga	6,879,972,734	-
469	Kab. Dogiyai	23,385,612,956	-
470	Kab. Puncak	6,965,921,166	-
471	Kab. Intan Jaya	23,368,836,223	17,935,724,234
472	Kab. Deiyai	23,492,181,315	15,634,949,040
473	Provinsi Maluku Utara	25,959,277,265	-
474	Kab. Halmahera Tengah	15,975,488,004	-
475	Kota Ternate	7,107,312,149	-
476	Kab. Halmahera Barat	5,174,466,273	-
477	Kab. Halmahera Timur	48,075,771,103	-
478	Kab. Halmahera Selatan	15,998,950,070	-
479	Kab. Halmahera Utara	13,923,982,207	-
480	Kab. Kepulauan Sula	6,110,027,085	-
481	Kota Tidore Kepulauan	5,354,962,169	-
482	Kab. Pulau Morotai	4,772,964,145	-
483	Kab. Pulau Taliabu	8,219,077,948	-
484	Provinsi Banten	78,451,188,535	-
485	Kab. Lebak	9,266,960,025	7,208,364,227
486	Kab. Pandeglang	8,290,490,539	-
487	Kab. Serang	9,928,126,750	-
488	Kab. Tangerang	25,003,555,366	35,210,527,443
489	Kota Cilegon	14,244,701,953	-
490	Kota Tangerang	31,606,848,199	-
491	Kota Serang	9,078,862,636	-
492	Kota Tangerang Selatan	22,852,046,585	25,761,956,421
493	Provinsi Bangka Belitung	30,232,445,186	-
494	Kab. Bangka	79,953,029,922	-
495	Kab. Belitung	37,142,564,768	-
496	Kota Pangkal Pinang	28,838,042,202	-
497	Kab. Bangka Selatan	12,728,721,838	-
498	Kab. Bangka Tengah	44,116,070,194	-
499	Kab. Bangka Barat	13,829,791,913	-
500	Kab. Belitung Timur	47,435,933,842	-
501	Provinsi Gorontalo	2,589,904,687	-
502	Kab. Boalemo	1,246,498,563	-

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
503	Kab. Gorontalo	1,521,840,999	-
504	Kota Gorontalo	1,908,039,113	-
505	Kab. Pohuwato	1,358,170,216	-
506	Kab. Bone Bolango	1,210,753,087	-
507	Kab. Gorontalo Utara	1,214,309,475	-
508	Provinsi Kepulauan Riau	42,819,744,452	-
509	Kab. Natuna	15,220,894,396	-
510	Kab. Kepulauan Anambas	13,321,710,788	-
511	Kab. Karimun	21,739,340,235	-
512	Kota Batam	20,632,786,277	-
513	Kota Tanjung Pinang	10,518,197,813	-
514	Kab. Lingga	11,477,576,843	-
515	Kab. Bintan	10,115,876,520	-
516	Provinsi Papua Barat	197,570,167,504	-
517	Kab. Fak Fak	8,393,749,042	-
518	Kab. Manokwari	6,212,763,715	-
519	Kab. Sorong	20,516,281,204	-
520	Kota Sorong	5,987,264,563	-
521	Kab. Raja Ampat	8,045,651,829	-
522	Kab. Sorong Selatan	5,205,435,904	-
523	Kab. Teluk Bintuni	72,511,918,391	-
524	Kab. Teluk Wondama	5,736,734,294	-
525	Kab. Kaimana	6,831,883,120	-
526	Kab. Maybrat	5,091,519,026	-
527	Kab. Tambrau	5,120,613,529	-
528	Kab. Manokwari Selatan	5,916,824,762	16,693,131,412
529	Kab. Pegunungan Arfak	5,224,270,811	-
530	Provinsi Sulawesi Barat	1,951,961,206	-
531	Kab. Majene	1,110,373,017	-
532	Kab. Mamuju	1,750,368,805	-
533	Kab. Polewali Mandar	1,302,744,614	-
534	Kab. Mamasa	1,052,677,068	-
535	Kab. Pasangkayu	1,959,859,362	-
536	Kab. Mamuju Tengah	1,153,628,438	-
537	Provinsi Kalimantan Utara	42,631,122,710	-
538	Kab. Bulungan	74,082,228,356	47,929,196,753
539	Kab. Malinau	112,969,822,753	77,856,460,093
540	Kab. Nunukan	90,645,211,114	28,483,439,677
541	Kota Tarakan	56,798,028,615	-
542	Kab. Tana Tidung	80,416,165,812	90,109,751,965
Jumlah		19,596,103,889,169	5,536,859,393,355
Total DBH Pokok			25,132,963,282,524

No	Daerah	TA 2022	
		TDF Reguler	TDF KB
Utang Remunerasi Pihak Ketiga		6,766,936,306	
penyesuaian pencatatan Remunerasi TDF-TKD		(270)	
TOTAL		25,139,730,218,560	

UTANG TRANSFER KE DAERAH Tahun 2022
(Dalam rupiah)

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		DBH	DAK Nonfisik	
1	Provinsi Aceh	21,115,796,192	-	21,115,796,192
2	Kab. Aceh Barat	2,221,900,074	-	2,221,900,074
3	Kab. Aceh Barat Daya	565,739,306	-	565,739,306
4	Kab. Aceh Besar	-	-	-
5	Kab. Aceh Jaya	298,871,496	-	298,871,496
6	Kab. Aceh Selatan	-	-	-
7	Kab. Aceh Singkil	-	280,950,000	280,950,000
8	Kab. Aceh Tamiang	-	-	-
9	Kab. Aceh Tengah	586,917,583	-	586,917,583
10	Kab. Aceh Tenggara	-	180,750,000	180,750,000
11	Kab. Aceh Timur	1,053,486,930	-	1,053,486,930
12	Kab. Aceh Utara	-	-	-
13	Kab. Bener Meriah	-	278,500,000	278,500,000
14	Kab. Bireuen	-	61,750,000	61,750,000
15	Kab. Gayo Lues	-	-	-
16	Kab. Nagan Raya	1,599,885,853	132,794,360	1,732,680,213
17	Kab. Pidie	340,482,974	13,195,000	353,677,974
18	Kab. Pidie Jaya	-	41,545,811	41,545,811
19	Kab. Simeulue	-	-	-
20	Kota Banda Aceh	-	154,312,250	154,312,250
21	Kota Langsa	-	-	-
22	Kota Lhokseumawe	-	-	-
23	Kota Sabang	-	2,750,000	2,750,000
24	Kota Subulussalam	-	65,618,200	65,618,200
25	Provinsi Sumatera Utara	-	8,398,780,900	8,398,780,900
26	Kab. Asahan	-	607,500,000	607,500,000
27	Kab. Batu Bara	-	-	-
28	Kab. Dairi	-	75,750,000	75,750,000
29	Kab. Deli Serdang	-	865,450,000	865,450,000
30	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	-
31	Kab. Karo	-	-	-
32	Kab. Labuhanbatu	2,931,868,716	-	2,931,868,716
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	2,806,737,704	-	2,806,737,704
34	Kab. Labuhanbatu Utara	-	-	-
35	Kab. Langkat	-	-	-
36	Kab. Mandailing Natal	-	-	-
37	Kab. Nias	-	2,400,467,352	2,400,467,352
38	Kab. Nias Barat	-	8,696,021,420	8,696,021,420

39	Kab. Nias Selatan	-	-	-
40	Kab. Nias Utara	-	-	-
41	Kab. Padang Lawas	-	231,500,000	231,500,000
42	Kab. Padang Lawas Utara	1,617,872,737	-	1,617,872,737
43	Kab. Pakpak Bharat	-	450,250,000	450,250,000
44	Kab. Samosir	-	-	-
45	Kab. Serdang Bedagai	-	718,612,620	718,612,620
46	Kab. Simalungun	-	-	-
47	Kab. Tapanuli Selatan	-	207,250,000	207,250,000
48	Kab. Tapanuli Tengah	-	-	-
49	Kab. Tapanuli Utara	-	-	-
50	Kab. Toba Samosir	-	-	-
51	Kota Binjai	-	118,850,000	118,850,000
52	Kota Gunungsitoli	-	-	-
53	Kota Medan	6,917,777,616	-	6,917,777,616
54	Kota Padang Sidempuan	-	-	-
55	Kota Pematang Siantar	-	-	-
56	Kota Sibolga	-	31,000,000	31,000,000
57	Kota Tanjung Balai	-	217,000,000	217,000,000
58	Kota Tebing Tinggi	-	124,000,000	124,000,000
59	Provinsi Sumatera Barat	-	52,497,000	52,497,000
60	Kab. Agam	-	-	-
61	Kab. Dharmasraya	-	67,850,000	67,850,000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	323,343,281	-	323,343,281
63	Kab. Lima Puluh Kota	255,997,716	-	255,997,716
64	Kab. Padang Pariaman	-	193,900,000	193,900,000
65	Kab. Pasaman	-	-	-
66	Kab. Pasaman Barat	-	-	-
67	Kab. Pesisir Selatan	-	-	-
68	Kab. Sijunjung	688,364,976	-	688,364,976
69	Kab. Solok	665,132,519	-	665,132,519
70	Kab. Solok Selatan	-	85,718,700	85,718,700
71	Kab. Tanah Datar	-	15,000,000	15,000,000
72	Kota Bukit Tinggi	-	5,250,000	5,250,000
73	Kota Padang	1,904,284,294	424,180,000	2,328,464,294
74	Kota Padang Panjang	-	-	-
75	Kota Pariaman	-	-	-
76	Kota Payakumbuh	-	-	-
77	Kota Sawahlunto	727,808,888	-	727,808,888
78	Kota Solok	-	-	-
79	Provinsi Riau	-	-	-
80	Kab. Bengkalis	5,051,200,495	-	5,051,200,495
81	Kab. Indragiri Hilir	6,362,366,852	-	6,362,366,852
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-	-
83	Kab. Kampar	9,981,415,518	204,500,000	10,185,915,518
84	Kab. Kepulauan Meranti	5,709,624,877	12,500,000	5,722,124,877
85	Kab. Kuantan Singingi	4,124,230,030	424,268,808	4,548,498,838
86	Kab. Pelalawan	13,732,415,176	-	13,732,415,176
87	Kab. Rokan Hilir	19,007,390,229	2,222,089,147	21,229,479,376
88	Kab. Rokan Hulu	3,124,518,258	24,010,900	3,148,529,158
89	Kab. Siak	10,451,563,419	-	10,451,563,419

90	Kota Dumai	2,152,061,565	-	2,152,061,565
91	Kota Pekanbaru	3,793,604,030	88,887,500	3,882,491,530
92	Provinsi Jambi	-	683,250,000	683,250,000
93	Kab. Batanghari	6,634,544,730	412,450,000	7,046,994,730
94	Kab. Bungo	-	-	-
95	Kab. Kerinci	-	2,992,500,000	2,992,500,000
96	Kab. Merangin	-	-	-
97	Kab. Muaro Jambi	6,367,369,619	129,500,000	6,496,869,619
98	Kab. Sarolangun	6,056,260,986	25,750,000	6,082,010,986
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	28,625,404,964	187,600,000	28,813,004,964
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	345,250,000	345,250,000
101	Kab. Tebo	6,245,903,196	19,590,000	6,265,493,196
102	Kota Jambi	-	-	-
103	Kota Sungai Penuh	-	60,750,000	60,750,000
104	Provinsi Sumatera Selatan	-	449,885,600	449,885,600
105	Kab. Banyuasin	6,439,413,776	-	6,439,413,776
106	Kab. Empat Lawang	9,314,753,644	193,579,600	9,508,333,244
107	Kab. Lahat	41,728,550,702	-	41,728,550,702
108	Kab. Muara Enim	-	-	-
109	Kab. Musi Banyuasin	51,209,701,016	-	51,209,701,016
110	Kab. Musi Rawas	11,174,505,481	-	11,174,505,481
111	Kab. Musi Rawas Utara	14,655,547,876	-	14,655,547,876
112	Kab. Ogan Ilir	-	81,762,500	81,762,500
113	Kab. Ogan Komering Ilir	-	-	-
114	Kab. Ogan Komering Ulu	-	-	-
115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-
116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	-	-
117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	28,621,869,096	-	28,621,869,096
118	Kota Lubuk Linggau	-	43,437,500	43,437,500
119	Kota Pagar Alam	5,379,898,078	-	5,379,898,078
120	Kota Palembang	6,009,130,852	473,947,000	6,483,077,852
121	Kota Prabumulih	7,450,582,086	-	7,450,582,086
122	Provinsi Bengkulu	2,250,540,528	114,112,500	2,364,653,028
123	Kab. Bengkulu Selatan	268,580,453	-	268,580,453
124	Kab. Bengkulu Tengah	-	-	-
125	Kab. Bengkulu Utara	3,515,074,563	106,000,000	3,621,074,563
126	Kab. Kaur	318,553,454	135,000,000	453,553,454
127	Kab. Kepahiang	-	-	-
128	Kab. Lebong	540,128,092	-	540,128,092
129	Kab. Mukomuko	-	-	-
130	Kab. Rejang Lebong	248,701,259	61,550,000	310,251,259
131	Kab. Seluma	992,140,109	-	992,140,109
132	Kota Bengkulu	-	50,546,500	50,546,500
133	Provinsi Lampung	-	-	-
134	Kab. Lampung Barat	-	-	-
135	Kab. Lampung Selatan	-	-	-
136	Kab. Lampung Tengah	-	-	-
137	Kab. Lampung Timur	4,513,804,980	-	4,513,804,980
138	Kab. Lampung Utara	-	-	-
139	Kab. Mesuji	-	61,882,129	61,882,129
140	Kab. Pesawaran	-	622,475,000	622,475,000

141	Kab. Pesisir Barat	-	193,750,000	193,750,000
142	Kab. Pringsewu	-	-	-
143	Kab. Tanggamus	-	-	-
144	Kab. Tulang Bawang	-	-	-
145	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-
146	Kab. Way Kanan	-	1,404,228	1,404,228
147	Kota Bandar Lampung	-	-	-
148	Kota Metro	-	-	-
149	Provinsi DKI Jakarta	359,067,395,091	4,317,993,274	363,385,388,365
150	Provinsi Jawa Barat	52,881,743,398	-	52,881,743,398
151	Kab. Bandung	-	-	-
152	Kab. Bandung Barat	-	117,586,420	117,586,420
153	Kab. Bekasi	5,935,377,742	14,210,000	5,949,587,742
154	Kab. Bogor	-	-	-
155	Kab. Ciamis	-	642,802,500	642,802,500
156	Kab. Cianjur	-	-	-
157	Kab. Cirebon	-	326,291,000	326,291,000
158	Kab. Garut	-	-	-
159	Kab. Indramayu	-	-	-
160	Kab. Karawang	-	-	-
161	Kab. Kuningan	-	355,000,000	355,000,000
162	Kab. Majalengka	-	-	-
163	Kab. Pangandaran	-	-	-
164	Kab. Purwakarta	-	-	-
165	Kab. Subang	9,630,002,330	-	9,630,002,330
166	Kab. Sukabumi	-	26,250,000	26,250,000
167	Kab. Sumedang	-	-	-
168	Kab. Tasikmalaya	-	773,925,700	773,925,700
169	Kota Bandung	9,774,075,580	-	9,774,075,580
170	Kota Banjar	-	94,875,250	94,875,250
171	Kota Bekasi	-	289,500,000	289,500,000
172	Kota Bogor	-	-	-
173	Kota Cimahi	-	-	-
174	Kota Cirebon	-	25,250,000	25,250,000
175	Kota Depok	-	535,575,000	535,575,000
176	Kota Sukabumi	-	-	-
177	Kota Tasikmalaya	-	279,000,000	279,000,000
178	Provinsi Jawa Tengah	10,784,007,289	2,609,453,159	13,393,460,448
179	Kab. Banjarnegara	-	-	-
180	Kab. Banyumas	-	-	-
181	Kab. Batang	-	-	-
182	Kab. Blora	2,063,338,898	-	2,063,338,898
183	Kab. Boyolali	-	467,750,000	467,750,000
184	Kab. Brebes	-	-	-
185	Kab. Cilacap	-	1,085,090,000	1,085,090,000
186	Kab. Demak	-	-	-
187	Kab. Grobogan	-	-	-
188	Kab. Jepara	-	-	-
189	Kab. Karanganyar	-	-	-
190	Kab. Kebumen	-	-	-
191	Kab. Kendal	-	751,000,000	751,000,000

192	Kab. Klaten	-	-	-
193	Kab. Kudus	-	-	-
194	Kab. Magelang	-	876,678,500	876,678,500
195	Kab. Pati	-	720,681,500	720,681,500
196	Kab. Pekalongan	-	408,000,000	408,000,000
197	Kab. Pemalang	-	431,697,500	431,697,500
198	Kab. Purbalingga	-	-	-
199	Kab. Purworejo	-	859,840,000	859,840,000
200	Kab. Rembang	-	57,837,500	57,837,500
201	Kab. Semarang	-	774,000,000	774,000,000
202	Kab. Sragen	-	55,785,000	55,785,000
203	Kab. Sukoharjo	-	-	-
204	Kab. Tegal	-	10,058,140	10,058,140
205	Kab. Temanggung	-	63,424,000	63,424,000
206	Kab. Wonogiri	-	-	-
207	Kab. Wonosobo	-	-	-
208	Kota Magelang	-	-	-
209	Kota Pekalongan	-	26,250,000	26,250,000
210	Kota Salatiga	-	-	-
211	Kota Semarang	-	205,250,000	205,250,000
212	Kota Surakarta	-	61,787,500	61,787,500
213	Kota Tegal	-	86,250,000	86,250,000
214	Provinsi DI Yogyakarta	2,043,588,059	-	2,043,588,059
215	Kab. Bantul	-	178,165,000	178,165,000
216	Kab. gunung kidul	-	193,265,000	193,265,000
217	Kab. Kulon Progo	-	249,005,000	249,005,000
218	Kab. Sleman	587,077,155	-	587,077,155
219	Kota Yogyakarta	-	-	-
220	Provinsi Jawa Timur	77,290,483,765	-	77,290,483,765
221	Kab. Bangkalan	-	-	-
222	Kab. Banyuwangi	-	-	-
223	Kab. Blitar	-	-	-
224	Kab. Bojonegoro	239,966,807,031	-	239,966,807,031
225	Kab. Bondowoso	-	-	-
226	Kab. Gresik	-	987,500,000	987,500,000
227	Kab. Jember	-	-	-
228	Kab. Jombang	6,058,533,825	-	6,058,533,825
229	Kab. Kediri	-	43,225,000	43,225,000
230	Kab. Lamongan	3,298,998,974	-	3,298,998,974
231	Kab. Lumajang	-	-	-
232	Kab. Madiun	3,409,113,653	-	3,409,113,653
233	Kab. Magetan	-	-	-
234	Kab. Malang	-	-	-
235	Kab. Mojokerto	-	234,750,000	234,750,000
236	Kab. Nganjuk	3,218,067,650	170,000,000	3,388,067,650
237	Kab. Ngawi	4,175,677,851	-	4,175,677,851
238	Kab. Pacitan	-	131,250,000	131,250,000
239	Kab. Pamekasan	-	-	-
240	Kab. Pasuruan	-	-	-
241	Kab. Ponorogo	-	352,000,000	352,000,000
242	Kab. Probolinggo	-	-	-

243	Kab. Sampang	-	1,092,500,000	1,092,500,000
244	Kab. Sidoarjo	-	-	-
245	Kab. Situbondo	-	-	-
246	Kab. Sumenep	-	-	-
247	Kab. Trenggalek	-	-	-
248	Kab. Tuban	6,409,086,782	-	6,409,086,782
249	Kab. Tulungagung	-	-	-
250	Kota Batu	-	244,500,000	244,500,000
251	Kota Blitar	-	-	-
252	Kota Kediri	-	63,500,000	63,500,000
253	Kota Madiun	-	-	-
254	Kota Malang	-	-	-
255	Kota Mojokerto	-	264,800,000	264,800,000
256	Kota Pasuruan	-	13,250,000	13,250,000
257	Kota Probolinggo	-	167,736,000	167,736,000
258	Kota Surabaya	21,466,792,640	-	21,466,792,640
259	Provinsi Kalimantan Barat	18,760,370,680	-	18,760,370,680
260	Kab. Bengkayang	3,653,484,687	-	3,653,484,687
261	Kab. Kapuas Hulu	2,532,550,110	140,537,500	2,673,087,610
262	Kab. Kayong Utara	2,810,377,301	280,750,000	3,091,127,301
263	Kab. Ketapang	19,223,243,158	1,091,456,387	20,314,699,545
264	Kab. Kubu Raya	1,965,913,324	360,556,940	2,326,470,264
265	Kab. Landak	-	-	-
266	Kab. Melawi	1,536,245,196	-	1,536,245,196
267	Kab. Mempawah	-	1,506,221,500	1,506,221,500
268	Kab. Sambas	-	-	-
269	Kab. Sanggau	13,975,495,676	74,750,000	14,050,245,676
270	Kab. Sekadau	2,595,595,674	5,750,000	2,601,345,674
271	Kab. Sintang	3,051,359,142	2,930,714,590	5,982,073,732
272	Kota Pontianak	3,511,100,615	20,000,000	3,531,100,615
273	Kota Singkawang	-	89,000,000	89,000,000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	40,373,126,100	536,637,500	40,909,763,600
275	Kab. Barito Selatan	11,597,365,068	49,750,000	11,647,115,068
276	Kab. Barito Timur	9,541,579,496	-	9,541,579,496
277	Kab. Barito Utara	28,154,054,066	58,450,000	28,212,504,066
278	Kab. Gunung Mas	6,531,321,130	-	6,531,321,130
279	Kab. Kapuas	22,978,928,990	-	22,978,928,990
280	Kab. Katingan	6,778,290,916	2,258,252,460	9,036,543,376
281	Kab. Kotawaringin Barat	7,651,263,633	-	7,651,263,633
282	Kab. Kotawaringin Timur	6,902,091,212	28,500,000	6,930,591,212
283	Kab. Lamandau	5,346,123,227	-	5,346,123,227
284	Kab. Murung Raya	29,627,972,671	117,409,900	29,745,382,571
285	Kab. Pulang Pisau	4,478,817,423	-	4,478,817,423
286	Kab. Seruyan	9,224,240,255	285,937,500	9,510,177,755
287	Kab. Sukamara	6,252,528,534	74,500,000	6,327,028,534
288	Kota Palangkaraya	8,385,886,349	50,250,000	8,436,136,349
289	Provinsi Kalimantan Selatan	47,817,159,447	-	47,817,159,447
290	Kab. Balangan	47,366,160,434	-	47,366,160,434
291	Kab. Banjar	19,551,632,309	535,250,000	20,086,882,309
292	Kab. Barito Kuala	13,808,903,458	239,750,000	14,048,653,458
293	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	268,891,920	268,891,920

294	Kab. Hulu Sungai Tengah	12,406,041,033	272,000,000	12,678,041,033
295	Kab. Hulu Sungai Utara	16,612,722,016	-	16,612,722,016
296	Kab. Kotabaru	28,427,186,214	801,750,000	29,228,936,214
297	Kab. Tabalong	25,265,511,426	328,840,000	25,594,351,426
298	Kab. Tanah Bumbu	30,334,335,125	-	30,334,335,125
299	Kab. Tanah Laut	-	212,347,500	212,347,500
300	Kab. Tapin	37,241,117,750	-	37,241,117,750
301	Kota Banjarbaru	-	107,250,000	107,250,000
302	Kota Banjarmasin	-	300,575,000	300,575,000
303	Provinsi Kalimantan Timur	221,540,566,943	1,691,823,960	223,232,390,903
304	Kab. Berau	58,559,582,601	-	58,559,582,601
305	Kab. Kutai Barat	113,353,827,919	180,750,000	113,534,577,919
306	Kab. Kutai Kartanegara	254,036,864,914	-	254,036,864,914
307	Kab. Kutai Timur	189,318,123,697	277,244,000	189,595,367,697
308	Kab. Mahakam Ulu	46,716,778,339	336,486,880	47,053,265,219
309	Kab. Paser	111,414,182,500	4,000,000	111,418,182,500
310	Kab. Penajam Paser Utara	31,819,605,701	93,750,000	31,913,355,701
311	Kota Balikpapan	56,755,727,383	479,850,000	57,235,577,383
312	Kota Bontang	50,124,333,674	-	50,124,333,674
313	Kota Samarinda	-	-	-
314	Provinsi Sulawesi Utara	-	660,500,000	660,500,000
315	Kab. Bolaang Mongondow	-	393,675,000	393,675,000
316	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-	-
317	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-	-
318	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	-
319	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	168,000,000	168,000,000
320	Kab. Kepulauan Talaud	-	204,000,000	204,000,000
321	Kab. Minahasa	-	-	-
322	Kab. Minahasa Selatan	-	137,000,000	137,000,000
323	Kab. Minahasa Tenggara	-	-	-
324	Kab. Minahasa Utara	-	-	-
325	Kab. Sangihe	-	110,750,000	110,750,000
326	Kota Bitung	-	215,000,000	215,000,000
327	Kota Kotamobagu	-	35,000,000	35,000,000
328	Kota Manado	-	412,250,000	412,250,000
329	Kota Tomohon	-	-	-
330	Provinsi Sulawesi Tengah	23,563,534,482	-	23,563,534,482
331	Kab. Banggai	43,596,007,523	-	43,596,007,523
332	Kab. Banggai Kepulauan	5,421,180,487	-	5,421,180,487
333	Kab. Banggai Laut	5,740,671,524	-	5,740,671,524
334	Kab. Buol	-	91,287,500	91,287,500
335	Kab. Donggala	5,506,604,775	-	5,506,604,775
336	Kab. Morowali	40,472,896,313	196,500,000	40,669,396,313
337	Kab. Morowali Utara	13,385,287,267	137,100,000	13,522,387,267
338	Kab. Parigi Moutong	4,546,807,236	-	4,546,807,236
339	Kab. Poso	4,526,840,991	-	4,526,840,991
340	Kab. Sigi	-	-	-
341	Kab. Tojo Una Una	3,411,008,889	166,750,000	3,577,758,889
342	Kab. Tolitoli	-	-	-
343	Kota Palu	5,356,764,707	161,407,500	5,518,172,207
344	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	-

345	Kab. Bantaeng	-	34,916,615	34,916,615
346	Kab. Barru	-	168,413,000	168,413,000
347	Kab. Bone	-	-	-
348	Kab. Bulukumba	-	-	-
349	Kab. Enrekang	-	146,037,500	146,037,500
350	Kab. Gowa	-	163,500,000	163,500,000
351	Kab. Jeneponto	-	-	-
352	Kab. Kepulauan Selayar	-	41,945,100	41,945,100
353	Kab. Luwu	-	-	-
354	Kab. Luwu Timur	6,603,690,506	677,000,000	7,280,690,506
355	Kab. Luwu Utara	-	-	-
356	Kab. Maros	-	-	-
357	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	-
358	Kab. Pinrang	-	-	-
359	Kab. Sidenreng Rappang	-	36,250,000	36,250,000
360	Kab. Sinjai	-	-	-
361	Kab. Soppeng	-	603,700,000	603,700,000
362	Kab. Takalar	-	-	-
363	Kab. Tana Toraja	-	439,500,000	439,500,000
364	Kab. Toraja Utara	-	368,250,000	368,250,000
365	Kab. Wajo	-	-	-
366	Kota Makassar	5,465,129,269	191,947,000	5,657,076,269
367	Kota Palopo	-	909,033,176	909,033,176
368	Kota Parepare	-	-	-
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	50,264,329,051	640,809,471	50,905,138,522
370	Kab. Bombana	16,032,826,405	120,500,000	16,153,326,405
371	Kab. Buton	-	-	-
372	Kab. Buton Selatan	-	255,750,000	255,750,000
373	Kab. Buton Tengah	-	-	-
374	Kab. Buton Utara	-	73,010,120	73,010,120
375	Kab. Kolaka	16,474,039,139	-	16,474,039,139
376	Kab. Kolaka Timur	6,384,109,764	42,103,280	6,426,213,044
377	Kab. Kolaka Utara	6,713,126,745	11,250,000	6,724,376,745
378	Kab. Konawe	7,860,826,180	201,750,000	8,062,576,180
379	Kab. Konawe Kepulauan	-	953,301,630	953,301,630
380	Kab. Konawe Selatan	25,737,561,151	5,424,469,680	31,162,030,831
381	Kab. Konawe Utara	54,235,293,008	89,378,736	54,324,671,744
382	Kab. Muna	-	1,248,918,000	1,248,918,000
383	Kab. Muna Barat	-	332,005,880	332,005,880
384	Kab. Wakatobi	-	-	-
385	Kota Bau-bau	-	-	-
386	Kota Kendari	-	132,750,000	132,750,000
387	Provinsi Bali	-	-	-
388	Kab. Badung	-	-	-
389	Kab. Bangli	-	-	-
390	Kab. Buleleng	-	271,500,000	271,500,000
391	Kab. Gianyar	-	-	-
392	Kab. Jembrana	-	174,831,800	174,831,800
393	Kab. Karangasem	-	-	-
394	Kab. Klungkung	-	221,750,000	221,750,000
395	Kab. Tabanan	-	-	-

396	Kota Denpasar	1,116,424,470	190,950,000	1,307,374,470
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	15,351,970,150	586,109,235	15,938,079,385
398	Kab. Bima	-	-	-
399	Kab. Dompu	-	-	-
400	Kab. Lombok Barat	-	433,500,000	433,500,000
401	Kab. Lombok Tengah	-	-	-
402	Kab. Lombok Timur	-	375,212,500	375,212,500
403	Kab. Lombok Utara	-	91,900,000	91,900,000
404	Kab. Sumbawa	3,569,451,112	-	3,569,451,112
405	Kab. Sumbawa Barat	34,226,895,232	190,000,000	34,416,895,232
406	Kota Bima	-	9,500,000	9,500,000
407	Kota Mataram	-	-	-
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	-
409	Kab. Alor	-	296,000,000	296,000,000
410	Kab. Belu	-	-	-
411	Kab. Ende	-	-	-
412	Kab. Flores Timur	-	-	-
413	Kab. Kupang	-	406,692,900	406,692,900
414	Kab. Lembata	-	-	-
415	Kab. Malaka	-	-	-
416	Kab. Manggarai	-	751,508,300	751,508,300
417	Kab. Manggarai Barat	-	1,078,879,345	1,078,879,345
418	Kab. Manggarai Timur	-	1,322,621,980	1,322,621,980
419	Kab. Nagekeo	-	845,800,000	845,800,000
420	Kab. Ngada	-	252,700,000	252,700,000
421	Kab. Rote Ndao	-	1,706,962,335	1,706,962,335
422	Kab. Sabu Raijua	-	1,814,893,300	1,814,893,300
423	Kab. Sikka	-	264,500,000	264,500,000
424	Kab. Sumba Barat	-	35,250,000	35,250,000
425	Kab. Sumba Barat Daya	-	228,750,000	228,750,000
426	Kab. Sumba Tengah	-	-	-
427	Kab. Sumba Timur	-	66,639,855	66,639,855
428	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-
429	Kab. Timor Tengah Utara	-	686,000,000	686,000,000
430	Kota Kupang	-	-	-
431	Provinsi Maluku	-	2,537,250,000	2,537,250,000
432	Kab. Buru	-	300,511,650	300,511,650
433	Kab. Buru Selatan	-	803,750,000	803,750,000
434	Kab. Kepulauan Aru	660,289,226	3,950,999,500	4,611,288,726
435	Kab. Maluku Barat Daya	2,008,859,250	-	2,008,859,250
436	Kab. Maluku Tengah	733,946,045	352,528,500	1,086,474,545
437	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-
438	Kab. Kepulauan Tanimbar	366,984,600	1,111,500,000	1,478,484,600
439	Kab. Seram Bagian Barat	-	743,417,580	743,417,580
440	Kab. Seram Bagian Timur	331,178,489	1,983,560,116	2,314,738,605
441	Kota Ambon	-	-	-
442	Kota Tual	-	42,762,300	42,762,300
443	Provinsi Papua	-	9,235,078	9,235,078
444	Kab. Asmat	2,606,765,427	2,367,429,680	4,974,195,107
445	Kab. Biak Numfor	-	200,696,180	200,696,180
446	Kab. Boven Digoel	-	431,984,998	431,984,998

447	Kab. Deiyai	4,670,179,584	188,500,000	4,858,679,584
448	Kab. Dogiyai	3,643,803,469	2,081,783,220	5,725,586,689
449	Kab. Intan Jaya	3,024,243,484	1,179,077,400	4,203,320,884
450	Kab. Jayapura	-	-	-
451	Kab. Jayawijaya	-	182,250,000	182,250,000
452	Kab. Keerom	-	-	-
453	Kab. Kepulauan Yapen	-	21,400,000	21,400,000
454	Kab. Lanny Jaya	-	259,364,760	259,364,760
455	Kab. Mamberamo Raya	-	387,000,000	387,000,000
456	Kab. Mamberamo Tengah	-	944,235,000	944,235,000
457	Kab. Mappi	-	-	-
458	Kab. Merauke	-	-	-
459	Kab. Mimika	-	459,544,000	459,544,000
460	Kab. Nabire	-	-	-
461	Kab. Nduga	5,592,457,749	-	5,592,457,749
462	Kab. Paniai	4,611,508,562	1,670,292,146	6,281,800,708
463	Kab. Pegunungan Bintang	-	81,287,700	81,287,700
464	Kab. Puncak	4,203,568,688	-	4,203,568,688
465	Kab. Puncak Jaya	-	-	-
466	Kab. Sarmi	-	-	-
467	Kab. Supiori	-	33,750,000	33,750,000
468	Kab. Tolikara	-	399,034,200	399,034,200
469	Kab. Waropen	-	87,250,000	87,250,000
470	Kab. Yahukimo	-	-	-
471	Kab. Yalimo	-	1,595,557,600	1,595,557,600
472	Kota Jayapura	-	36,703,700	36,703,700
473	Provinsi Maluku Utara	17,122,133,879	308,284,600	17,430,418,479
474	Kab. Halmahera Barat	-	708,250,000	708,250,000
475	Kab. Halmahera Selatan	8,207,777,405	-	8,207,777,405
476	Kab. Halmahera Tengah	24,412,199,209	3,151,116,400	27,563,315,609
477	Kab. Halmahera Timur	47,305,976,011	-	47,305,976,011
478	Kab. Halmahera Utara	-	-	-
479	Kab. Kepulauan Sula	-	977,881,299	977,881,299
480	Kab. Pulau Morotai	-	225,250,000	225,250,000
481	Kab. Pulau Taliabu	-	493,905,900	493,905,900
482	Kota Ternate	-	-	-
483	Kota Tidore Kepulauan	5,195,280,635	-	5,195,280,635
484	Provinsi Banten	13,087,613,909	-	13,087,613,909
485	Kab. Lebak	1,215,442,893	326,650,805	1,542,093,698
486	Kab. Pandeglang	-	-	-
487	Kab. Serang	3,009,575,750	-	3,009,575,750
488	Kab. Tangerang	5,937,045,351	-	5,937,045,351
489	Kota Cilegon	-	-	-
490	Kota Serang	-	180,145,568	180,145,568
491	Kota Tangerang	7,222,325,322	617,362,500	7,839,687,822
492	Kota Tangerang Selatan	6,042,928,049	-	6,042,928,049
493	Provinsi Bangka Belitung	-	-	-
494	Kab. Bangka	-	-	-
495	Kab. Bangka Barat	-	45,037,500	45,037,500
496	Kab. Bangka Selatan	15,101,250,386	-	15,101,250,386
497	Kab. Bangka Tengah	-	1,050,200,960	1,050,200,960

498	Kab. Belitung	-	69,000,000	69,000,000
499	Kab. Belitung Timur	-	224,037,500	224,037,500
500	Kota Pangkal Pinang	-	-	-
501	Provinsi Gorontalo	-	428,400,000	428,400,000
502	Kab. Boalemo	-	325,500,000	325,500,000
503	Kab. Bone Bolango	-	131,750,000	131,750,000
504	Kab. Gorontalo	-	-	-
505	Kab. Gorontalo Utara	-	196,691,644	196,691,644
506	Kab. Pohuwato	-	-	-
507	Kota Gorontalo	-	7,037,500	7,037,500
508	Provinsi Kepulauan Riau	-	7,484,123,506	7,484,123,506
509	Kab. Bintan	-	3,361,715,816	3,361,715,816
510	Kab. Karimun	-	1,369,580	1,369,580
511	Kab. Kepulauan Anambas	16,859,325,400	257,000,000	17,116,325,400
512	Kab. Lingga	-	7,000,000	7,000,000
513	Kab. Natuna	23,038,119,447	39,250,000	23,077,369,447
514	Kota Batam	10,267,451,693	480,975,000	10,748,426,693
515	Kota Tanjung Pinang	-	-	-
516	Provinsi Papua Barat	236,979,959,607	4,241,120,000	241,221,079,607
517	Kab. Fak Fak	8,967,374,749	-	8,967,374,749
518	Kab. Kaimana	7,689,335,863	120,682,460	7,810,018,323
519	Kab. Manokwari	-	-	-
520	Kab. Manokwari Selatan	4,986,260,032	-	4,986,260,032
521	Kab. Maybrat	5,373,724,379	465,000,000	5,838,724,379
522	Kab. Pegunungan Arfak	5,000,251,127	2,139,603,400	7,139,854,527
523	Kab. Raja Ampat	13,337,417,306	-	13,337,417,306
524	Kab. Sorong	7,887,499,076	147,500,000	8,034,999,076
525	Kab. Sorong Selatan	5,448,873,539	-	5,448,873,539
526	Kab. Tambrau	5,768,251,316	466,140,380	6,234,391,696
527	Kab. Teluk Bintuni	60,373,104,119	-	60,373,104,119
528	Kab. Teluk Wondama	4,407,503,057	-	4,407,503,057
529	Kota Sorong	6,726,095,474	-	6,726,095,474
530	Provinsi Sulawesi Barat	-	6,868,261,690	6,868,261,690
531	Kab. Majene	-	-	-
532	Kab. Mamasa	-	1,674,629,820	1,674,629,820
533	Kab. Mamuju	-	-	-
534	Kab. Mamuju Tengah	-	41,051,508	41,051,508
535	Kab. Pasangkayu	-	-	-
536	Kab. Polewali Mandar	-	533,221,100	533,221,100
537	Provinsi Kalimantan Utara	19,044,411,371	1,408,417,830	20,452,829,201
538	Kab. Bulungan	8,081,611,819	-	8,081,611,819
539	Kab. Malinau	18,262,626,442	-	18,262,626,442
540	Kab. Nunukan	6,681,300,665	-	6,681,300,665
541	Kab. Tana Tidung	15,193,912,809	178,750,000	15,372,662,809
542	Kota Tarakan	-	-	-
Jumlah		3,968,894,493,111	165,968,874,317	4,134,863,367,428
Utang Estimasi				45,707,179,744,949
Total Utang TKD				49,842,043,112,377

Utang SBN Jangka Pendek dan Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Rupiah

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Book Value
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			351,564,123,000,000		-146,061,797,000	351,418,061,203,000
A.SURAT UTANG NEGARA			183,077,212,000,000		-873,861,607,000	182,203,350,393,000
Zero Coupon			47,255,000,000,000		-535,810,411,000	46,719,189,589,000
1	SPN03230111	11-01-2023	450,000,000,000		-417,019,000	449,582,981,000
2	SPN03230125	25-01-2023	150,000,000,000		-427,086,000	149,572,914,000
3	SPN03230208	08-02-2023	1,000,000,000,000		-4,508,660,000	995,491,340,000
4	SPN03230222	22-02-2023	1,000,000,000,000		-6,465,246,000	993,534,754,000
5	SPN03230308	08-03-2023	1,000,000,000,000		-8,334,465,000	991,665,535,000
6	SPN12230105	05-01-2023	4,000,000,000,000		-1,573,412,000	3,998,426,588,000
7	SPN12230203	03-02-2023	6,450,000,000,000		-16,673,414,000	6,433,326,586,000
8	SPN12230303	03-03-2023	6,000,000,000,000		-27,026,111,000	5,972,973,889,000
9	SPN12230330	30-03-2023	3,700,000,000,000		-25,821,325,000	3,674,178,675,000
10	SPN12230413	13-04-2023	5,750,000,000,000		-47,284,899,000	5,702,715,101,000
11	SPN12230526	26-05-2023	3,550,000,000,000		-48,326,012,000	3,501,673,988,000
12	SPN12230622	22-06-2023	5,135,000,000,000		-82,751,000,000	5,052,249,000,000
13	SPN12230720	20-07-2023	120,000,000,000		-2,694,398,000	117,305,602,000
14	SPN12230818	18-08-2023	2,850,000,000,000		-71,629,538,000	2,778,370,462,000
15	SPN12230914	14-09-2023	3,000,000,000,000		-75,906,786,000	2,924,093,214,000
16	SPN12231012	12-10-2023	1,050,000,000,000		-31,658,880,000	1,018,341,120,000
17	SPN12231109	09-11-2023	1,500,000,000,000		-58,922,035,000	1,441,077,965,000
18	SPN12231207	07-12-2023	550,000,000,000		-25,390,125,000	524,609,875,000
Fixed Coupon			135,822,212,000,000		-338,051,196,000	135,484,160,804,000
1	FR0039	15-08-2023	3,993,000,000,000	11.75000	-2,116,356,000	3,990,883,644,000
2	FR0046	15-07-2023	22,175,000,000,000	9.50000	-61,190,957,000	22,113,809,043,000
3	FR0063	15-05-2023	78,346,000,000,000	5.62500	-274,743,883,000	78,071,256,117,000
4	ORI017	15-07-2023	18,336,042,000,000	6.40000	0	18,336,042,000,000
5	ORI018	15-10-2023	12,972,170,000,000	5.70000	0	12,972,170,000,000
B.SURAT BERTAGIH SYARIAH NEGARA			168,486,911,000,000		727,799,810,000	169,214,710,810,000
Zero Return			1,773,000,000,000		-12,563,588,000	1,760,436,412,000
1	SPNS02052023	02-05-2023	500,000,000,000		-7,298,494,000	492,701,506,000

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Book Value
2	SPNS07022023	07-02-2023	50,000,000,000		-146,300,000	49,853,700,000
3	SPNS07032023	07-03-2023	550,000,000,000		-2,943,065,000	547,056,935,000
4	SPNS10012023	10-01-2023	583,000,000,000		-424,187,000	582,575,813,000
5	SPNS30052023	30-05-2023	90,000,000,000		-1,751,542,000	88,248,458,000
Fixed Coupon			166,713,911,000,000		740,363,398,000	167,454,274,398,000
1	PBS011	15-08-2023	21,750,000,000,000	8.75000	141,417,024,000	21,891,417,024,000
2	PBS019	15-09-2023	43,040,000,000,000	8.25000	213,939,953,000	43,253,939,953,000
3	PBS027	15-05-2023	64,115,368,000,000	6.50000	385,006,421,000	64,500,374,421,000
4	SR-012	10-03-2023	12,142,572,000,000	6.30000	0	12,142,572,000,000
5	SR-013	10-09-2023	25,665,971,000,000	6.05000	0	25,665,971,000,000
II. SBN YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN			31,669,043,170,979		0	31,669,043,170,979
A. SURAT UTANG NEGARA			23,809,472,170,979		0	23,809,472,170,979
			12,966,084,170,979		0	12,966,084,170,979
1	SRBI01	01-02-2023	353,387,067,188	0.10000	0	353,387,067,188
2	SRBI01	01-08-2023	371,056,420,548	0.10000	0	371,056,420,548
3	SU002	01-04-2023	1,004,983,888,412	0.10000	0	1,004,983,888,412
4	SU002	01-10-2023	1,055,233,082,833	0.10000	0	1,055,233,082,833
5	SU004	01-06-2023	2,539,512,246,285	0.10000	0	2,539,512,246,285
6	SU004	01-12-2023	2,666,487,858,599	0.10000	0	2,666,487,858,599
7	SU007	01-02-2023	2,427,035,905,909	0.10000	0	2,427,035,905,909
8	SU007	01-08-2023	2,548,387,701,205	0.10000	0	2,548,387,701,205
Fixed Coupon			3,500,000,000,000			3,500,000,000,000
1	FRNT0001	29-08-2023	3,500,000,000,000	8.00000	0	3,500,000,000,000
Variable Coupon			7,343,388,000,000			7,343,388,000,000
1	SBR010	10-07-2023	7,343,388,000,000	5.85000	0	7,343,388,000,000
B. SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			7,859,571,000,000		0	7,859,571,000,000
			1,500,000,000,000		0	1,500,000,000,000
1	SDHI2023A	04-11-2023	1,500,000,000,000	8.82000	0	1,500,000,000,000
Fixed Coupon			1,524,141,000,000		0	1,524,141,000,000
1	PBSNT001	29-08-2023	1,500,000,000,000	8.00000	0	1,500,000,000,000
2	SWR002	10-06-2023	24,141,000,000	5.57000	0	24,141,000,000
Variable Coupon			4,835,430,000,000		0	4,835,430,000,000
1	ST008	10-11-2023	4,835,430,000,000	6.05000	0	4,835,430,000,000
GRAND TOTAL (I + II)			383,233,166,170,979		(146,061,797,000)	383,087,104,373,979

Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Valas

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Issued Principle Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Accrued Indexation	Indexed Principal Outstanding	Unamortized Premium (+)/Discount(-)	Nilai Buku
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			82,711,825,184,913		19,161,727,749,088	101,873,552,934,000	(20,830,004,000)	101,852,722,930,000
A.SURAT UTANG NEGARA			65,470,575,184,913		16,912,977,749,088	82,383,552,934,000	(20,830,004,000)	82,362,722,930,000
Denominasi Euro			22,487,805,000,000		2,425,095,000,000	24,912,900,000,000	(13,413,501,000)	24,899,486,499,000
1	RIEUR0623	14-06-2023	22,487,805,000,000	3	2,425,095,000,000	24,912,900,000,000	(13,413,501,000)	24,899,486,499,000
Denominasi US Dollars			31,150,386,244,913		15,739,622,459,088	46,890,008,704,000	(7,416,503,000)	46,882,592,201,000
1	RI0123	11-01-2023	13,542,000,000,000	3	2,050,000,000,000	15,592,000,000,000	(189,311,000)	15,591,810,689,000
2	RI0423	15-04-2023	11,177,958,254,913	3	8,482,774,145,088	19,660,732,400,000	(3,685,720,000)	19,657,046,680,000
3	RI1023	45216	6,430,427,990,000	5	5,206,848,314,000	11,637,276,304,000	(3,541,472,000)	11,633,734,832,000
Denominasi Yen			11,832,383,940,000		(1,251,739,710,000)	10,580,644,230,000	-	10,580,644,230,000
1	RIJPY0523	31-05-2023	5,007,494,700,000	1	(407,214,600,000)	4,600,280,100,000	-	4,600,280,100,000
2	RIJPY0723	45114	6,824,889,240,000	1	(844,525,110,000)	5,980,364,130,000	-	5,980,364,130,000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			17,241,250,000,000		2,248,750,000,000	19,490,000,000,000	-	19,490,000,000,000
Denominasi US Dollars			17,241,250,000,000		2,248,750,000,000	19,490,000,000,000	-	19,490,000,000,000
1	SNI0323	01-03-2023	17,241,250,000,000	4	2,248,750,000,000	19,490,000,000,000	-	19,490,000,000,000
GRAND TOTAL			82,711,825,184,913	-	19,161,727,749,088	101,873,552,934,000	(20,830,004,000)	101,852,722,930,000

Outstanding Utang PDN

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR ^{*)}	UTANG JANGKA PANJANG IDR ^{*)}	TOTAL POSISI UTANG IDR ^{*)}
BANK JATENG	IDR	3	-	-	-	-
BANK MANDIRI	IDR	170	13,750,541,873,769	1,831,385,350,087	11,919,156,523,682	13,750,541,873,769
PT. BNI (PERSERO)	IDR	132	7,925,701,543,136	1,703,389,488,745	6,222,312,054,391	7,925,701,543,136
PT. BRI (PERSERO)	IDR	5	-	-	-	-
TOTAL		310	21,676,243,416,905	3,534,774,838,832	18,141,468,578,073	21,676,243,416,905

Outstanding Utang Program Pinjaman Luar Negeri per Kreditor

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR ^{*)}	UTANG JANGKA PANJANG IDR ^{*)}	TOTAL POSISI UTANG IDR ^{*)}
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ADB	EUR	9	2.835.266.907	7.590.257.205.865	39.499.556.749.057	47.089.813.954.922
	JPY	13	612.580.041.670	3.733.756.439.656	68.523.673.697.566	72.257.430.137.222
	USD	19	505.075.737	3.142.950.175.915	4.732.190.714.765	7.875.140.890.680
AFD	EUR	11	1.102.183.517	1.626.054.944.430	16.679.670.208.376	18.305.725.152.806
	USD	3	130.000.000	1.091.440.000.000	935.520.000.000	2.026.960.000.000
AIIB	USD	3	1.500.000.000	615.104.400.000	22.772.895.600.000	23.388.000.000.000
AUSTRALIA	AUD	1	1.300.000.000	1.057.138.000.000	12.685.656.000.000	13.742.794.000.000
EXIM BANK KOREA	USD	1	40.000.000	-	623.680.000.000	623.680.000.000
IBRD	EUR	4	1.632.508.991	348.638.914.857	26.765.049.909.578	27.113.688.824.435
	JPY	2	142.770.600.000	-	16.840.634.616.540	16.840.634.616.540
	USD	44	12.307.085.220	13.497.361.463.058	178.394.711.280.477	191.892.072.743.535
IDA	SDR	1	11.791.963	98.294.929.020	146.393.732.430	244.688.661.450
JICA	JPY	32	305.907.511.000	4.242.380.313.470	31.841.215.463.295	36.083.595.776.765
KfW	EUR	12	2.704.035.000	3.126.269.995.200	41.783.965.705.800	44.910.235.701.000
	USD	5	455.006.412	1.623.409.690.243	5.471.050.282.543	7.094.459.972.786
TOTAL		160	1.085.781.106.417	41.793.056.471.714	467.695.863.960.427	509.488.920.432.141

Outstanding Utang Project Pinjaman Luar Negeri per Kreditor Per 31 Desember 2022

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
ABN AMRO ROTTERDAM	EUR	1	1.869.641	20.701.417.770	10.350.707.390	31.052.125.160
ADB	ADB	5	-	-	-	-
	JPY	6	39.078.532.481	238.853.490.843	4.370.689.978.633	4.609.543.469.476
	SDR	29	112.842.151	780.314.080.316	1.561.212.451.256	2.341.526.531.572
	USD	62	1.588.951.240	1.850.492.691.203	22.924.435.045.216	24.774.927.736.419
AFD	EUR	2	20.273.124	30.154.808.840	306.553.404.572	336.708.213.412
	USD	4	53.436.495	98.043.239.920	735.138.594.595	833.181.834.515
AIIB	USD	4	435.081.889	454.128.751.441	6.329.668.065.277	6.783.796.816.718
AKA	USD	1	4.282.058	66.765.846.933	-	66.765.846.933
AUSTRALIA	AUD	2	429.952.162	103.077.434.791	4.442.110.253.330	4.545.187.688.121
B A W A G	EUR	2	5.699.627	29.147.904.935	65.514.915.058	94.662.819.993
BANCO DE SABADELL	USD	1	-	-	-	-
BANK MANDIRI SIN	USD	15	369.415.670	1.941.351.204.852	3.818.577.924.127	5.759.929.128.979
BANQUE DE FRANCE	EUR	1	6.369.908	105.795.260.984	-	105.795.260.984
BBVA	EUR	2	765.558	4.238.281.646	8.476.563.292	12.714.844.938
	USD	2	-	-	-	-
BBVAIT	EUR	5	22.829.577	247.993.891.378	131.173.424.008	379.167.315.386
BELGIUM	EUR	4	2.462.325	21.805.271.331	19.090.499.166	40.895.770.497
BLG	EUR	1	12.550.000	41.687.586.000	166.750.344.000	208.437.930.000
BNI New York	USD	4	103.377.935	37.064.005.146	1.574.804.761.584	1.611.868.766.730
BNI SEOUL	USD	2	28.686.233	99.390.496.903	347.885.241.173	447.275.738.076
BNP PARIBAS, PARIS	CHF	1	65.965.566	370.843.681.766	741.687.363.532	1.112.531.045.298
	EUR	4	215.193.357	57.503.756.477	3.516.556.632.593	3.574.060.389.070
	GBP	1	-	-	-	-
BNPP SINGAPORE	USD	3	68.334.828	78.829.069.921	986.647.571.685	1.065.476.641.606
BRI SINGAPORE	USD	1	-	-	-	-
BRI-CAYMAN ISLAND	EUR	1	5.450.865	90.531.229.131	-	90.531.229.131
	USD	1	14.160.750	74.841.600.000	145.952.814.000	220.794.414.000
C A	EUR	1	9.593.654	31.867.433.062	127.469.732.250	159.337.165.312
CA CIB LONDON BRANCH	USD	1	39.666.664	309.241.343.728	309.241.280.113	618.482.623.841
CASA OF FRANCE	EUR	1	22.759.079	377.996.431.175	-	377.996.431.175
	USD	2	105.791.392	62.722.379.431	1.586.776.996.993	1.649.499.376.424
CIDA	CAD	20	41.431.776	79.947.483.488	396.667.927.912	476.615.411.400

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
CITIBANK LONDON	EUR	3	7.164.506	79.328.275.349	39.664.137.508	118.992.412.857
COMMERZBANK GERMANY	EUR	1	116.786.735	-	1.939.664.166.921	1.939.664.166.921
CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	5	245.136.026	481.539.047.396	3.589.827.147.218	4.071.366.194.614
	USD	1	99.166.667	441.773.333.437	1.104.433.332.970	1.546.206.666.407
CZECH EXPORT BANK	USD	1	104.379.864	203.436.354.936	1.424.054.484.552	1.627.490.839.488
DENMARK	DKK	1	986.667	2.203.611.318	-	2.203.611.318
DEUTSCHE BANK LONDON	USD	1	4.250.000	66.266.000.000	-	66.266.000.000
DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	1	3.512.555	11.667.723.198	46.670.892.128	58.338.615.326
DZ BANK AG HONG KONG	USD	1	8.492.109	26.481.794.109	105.927.176.435	132.408.970.544
DZ Bank AG Singapore	USD	1	-	-	-	-
EDC	USD	2	21.333.476	166.315.781.001	166.315.781.001	332.631.562.002
EFIC	USD	4	396.420	4.120.653.760	2.060.326.880	6.180.980.640
EKSPORTFINANS ASA	USD	1	-	-	-	-
EKSPORTKREDITT AS	USD	1	81.328.000	158.508.272.000	1.109.557.904.000	1.268.066.176.000
ERSTE BANK, VIENNA	EUR	4	95.785.208	238.624.481.694	1.352.233.717.251	1.590.858.198.945
EXIM BANK KOREA	KRW	16	349.697.705.860	178.367.067.722	4.147.393.553.766	4.325.760.621.488
	USD	13	3.082.442.136	1.785.991.190.440	46.275.446.586.759	48.061.437.777.199
EXIM BANK OF CHINA	CNY	1	387.520.870	347.553.517.462	521.330.276.484	868.883.793.946
	USD	15	1.412.644.106	1.348.805.545.111	20.677.141.353.770	22.025.946.898.881
EXIMBANK HUNGARY	USD	1	36.440.994	16.233.942.442	551.954.043.022	568.187.985.464
FINNVERA	EUR	1	24.381	404.937.100	-	404.937.100
GOSPODRSTWA	USD	1	-	-	-	-
IBRD	USD	66	4.709.200.378	5.112.657.828.912	68.313.194.468.123	73.425.852.297.035
ICO	EUR	9	76.548.222	25.256.832.217	1.246.101.968.855	1.271.358.801.072
	USD	13	46.245.706	200.189.158.686	520.873.887.083	721.063.045.769
IDA	SDR	31	296.994.526	2.752.930.600.042	3.409.842.439.680	6.162.773.039.722
	USD	28	30.223.229	214.815.951.299	256.424.638.387	471.240.589.686
IDB	ACU	27	61.991.506	215.339.462.922	1.071.012.798.064	1.286.352.260.986
	USD	33	1.282.336.073	6.909.607.311.047	13.084.576.734.819	19.994.184.045.866
IFAD	EUR	4	70.890.882	6.997.867.524	1.170.400.438.583	1.177.398.306.107
	SDR	8	94.562.431	130.834.454.645	1.831.379.488.153	1.962.213.942.798
	USD	2	50.755.000	-	791.371.960.000	791.371.960.000
ING BANK AMSTERDAM	EUR	3	216.577.162	807.186.091.404	2.789.857.355.244	3.597.043.446.648
JAICAF	JPY	2	961.815.000	18.908.625.660	94.543.128.299	113.451.753.959
JBIC	JPY	2	265.379.635	6.260.981.216	25.042.112.472	31.303.093.688
JICA	JPY	190	851.190.526.133	7.897.778.362.236	92.505.166.219.256	100.402.944.581.492

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
KDB SINGAPORE	USD	1	4.341.581	-	67.693.924.715	67.693.924.715
KfW	EUR	46	420.969.839	594.386.943.169	6.397.332.719.033	6.991.719.662.202
MAFF, JAPAN	JPY	1	317.604.560	37.463.331.719	-	37.463.331.719
MIZUHO SINGAPORE	USD	1	1.688.832	26.332.266.517	-	26.332.266.517
MUFG SINGAPORE	EUR	1	14.188.909	-	235.657.912.357	235.657.912.357
	USD	5	14.439.237	49.657.546.372	175.479.039.115	225.136.585.487
N I O	EUR	2	4.456.142	74.010.280.021	-	74.010.280.021
NATIXIS BANQUE	EUR	38	240.267.135	312.306.481.596	3.678.194.252.447	3.990.500.734.043
NIB	EUR	3	6.329.189	10.761.794.913	94.357.178.827	105.118.973.740
NORDEA FINLAND	USD	1	-	-	-	-
PT BNI TOKYO BRANCH	USD	6	23.771.382	91.819.851.197	278.823.530.710	370.643.381.907
PT MANDIRI CAYMAN IS	EUR	4	54.774.372	50.241.015.000	859.484.611.495	909.725.626.495
	USD	13	627.511.686	1.449.744.906.701	8.334.417.300.164	9.784.162.206.865
PT MANDIRI HONGKONG	EUR	1	815.622	-	13.546.340.047	13.546.340.047
	USD	9	296.718.884	1.036.647.097.533	3.589.793.743.198	4.626.440.840.731
PT. BNI-HONG KONG	USD	6	43.866.579	261.908.425.242	422.059.275.462	683.967.700.704
PT. BNI-SINGAPORE	USD	14	49.922.984	518.930.694.480	259.468.471.112	778.399.165.592
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	4	14.533.149	40.637.392.666	200.737.870.798	241.375.263.464
RUSIA FED.	USD	7	108.818.292	448.079.161.716	1.248.615.647.148	1.696.694.808.864
SERV	CHF	1	283.333	4.778.511.291	-	4.778.511.291
SFD	SAR	5	158.143.993	42.579.727.224	613.039.405.457	655.619.132.681
SOCIETE GENERALE	EUR	2	3.462.857	53.426.956.872	4.086.247.075	57.513.203.947
UBS, ZURICH	CHF	1	19.170.823	53.887.042.936	269.435.213.837	323.322.256.773
UNICREDIT BANK AUSTR	EUR	25	166.080.355	342.003.622.206	2.416.358.555.204	2.758.362.177.410
UNICREDIT MUNICH	EUR	1	-	-	-	-
US EXIM	USD	4	17.657.778	54.865.964.552	220.454.111.115	275.320.075.667
USAID	USD	82	60.607.594	289.408.087.563	655.585.522.996	944.993.610.559
USDA	USD	4	28.900.959	129.523.847.091	321.099.899.868	450.623.746.959
Grand Total		974		43.535.116.078.273	355.142.615.781.618	398.677.731.859.891

Klasifikasi Utang Pemerintah berdasarkan Jatuh Tempo (Umur Utang)

(Dalam Rupiah)

MATURITY PROFILE	OUTSTANDING PINJAMAN DALAM NEGERI	OUTSTANDING PINJAMAN LUAR NEGERI	TOTAL OUTSTANDING PINJAMAN	OUTSTANDING SBN RUPIAH	OUTSTANDING SBN VALAS	TOTAL OUTSTANDING SBN
0-5 TAHUN	1.728.531.548.925	19.895.918.407.362	21.624.449.956.287	2.298.311.635.889.870	557.450.592.048.000	2.855.762.227.937.870
6-10 TAHUN	19.947.711.867.980	86.873.842.243.729	106.821.554.111.709	1.607.562.783.000.000	345.161.649.052.000	1.952.724.432.052.000
11-15 TAHUN	-	365.219.261.922.518	365.219.261.922.518	727.129.079.000.000	72.306.288.766.000	799.435.367.766.000
16-20 TAHUN	-	106.155.195.519.051	106.155.195.519.051	442.922.229.000.000	66.452.657.536.000	509.374.886.536.000
21-25 TAHUN	-	151.922.564.195.355	151.922.564.195.355	261.408.853.912.784	144.226.000.000.000	405.634.853.912.784
26-30 TAHUN	-	59.070.495.727.843	59.070.495.727.843	115.029.385.000.000	170.732.400.000.000	285.761.785.000.000
LEBIH DARI 30 TAHUN	-	119.029.374.276.175	119.029.374.276.175	-	38.200.400.000.000	38.200.400.000.000
TOTAL	21.676.243.416.905	908.166.652.292.033	929.842.895.708.938	5.452.363.965.802.650	1.394.529.987.402.000	6.846.893.953.204.650
Utang Jangka Pendek/Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	3.534.774.838.832	85.328.172.549.984	88.862.947.388.816	383.233.166.170.979	101.873.552.934.000	485.106.719.104.979
Utang Jangka Panjang	18.141.468.578.073	822.838.479.742.049	840.979.948.320.122	5.069.130.799.631.670	1.292.656.434.468.000	6.361.787.234.099.670

Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0037	15-Sep-2026	(29,219,831,000.00)	0.00
2	FR0040	15-Sep-2025	(4,116,400,000.00)	245,971,606,000.00
3	FR0042	15-Jul-2027	(57,549,412,000.00)	25,997,061,000.00
4	FR0044	15-Sep-2024	(182,734,230,000.00)	3,555,875,000.00
5	FR0045	15-May-2037	(30,733,441,000.00)	513,164,706,000.00
6	FR0047	15-Feb-2028	(479,136,409,000.00)	18,216,730,000.00
7	FR0050	15-Jul-2038	(373,838,012,000.00)	113,313,299,000.00
8	FR0052	15-Aug-2030	(195,236,572,000.00)	73,406,421,000.00
9	FR0054	15-Jul-2031	(261,174,366,000.00)	268,642,974,000.00
10	FR0056	15-Sep-2026	(383,521,360,000.00)	1,020,153,721,000.00
11	FR0057	15-May-2041	(23,471,589,000.00)	960,565,712,000.00
12	FR0058	15-Jun-2032	(30,662,477,000.00)	2,781,238,136,000.00
13	FR0059	15-May-2027	(574,889,570,000.00)	631,235,770,000.00
14	FR0062	15-Apr-2042	(326,944,195,000.00)	91,247,315,000.00
15	FR0064	15-May-2028	(2,820,511,114,000.00)	158,171,983,000.00
16	FR0065	15-May-2033	(3,049,218,507,000.00)	467,900,218,000.00
17	FR0067	15-Feb-2044	(329,933,893,000.00)	878,392,643,000.00
18	FR0068	15-Mar-2034	(1,645,594,496,000.00)	1,252,238,022,000.00
19	FR0070	15-Mar-2024	(105,553,400,000.00)	412,746,399,000.00
20	FR0071	15-Mar-2029	(117,908,955,000.00)	1,830,167,523,000.00
21	FR0072	15-May-2036	(511,564,590,000.00)	2,153,266,528,000.00
22	FR0073	15-May-2031	(133,046,376,000.00)	2,517,532,829,000.00
23	FR0074	15-Aug-2032	(317,127,395,000.00)	555,247,535,000.00
24	FR0075	15-May-2038	(1,560,550,252,000.00)	1,006,643,433,000.00
25	FR0076	15-May-2048	(2,580,059,085,000.00)	206,364,175,000.00
26	FR0077	15-May-2024	(56,590,484,000.00)	398,223,133,000.00
27	FR0078	15-May-2029	(167,800,892,000.00)	1,725,870,815,000.00
28	FR0079	15-Apr-2039	(174,214,128,000.00)	1,152,886,595,000.00
29	FR0080	15-Jun-2035	(734,795,248,000.00)	1,400,599,067,000.00
30	FR0081	15-Jun-2025	(872,930,759,000.00)	474,837,643,000.00
31	FR0082	15-Sep-2030	(2,674,956,962,000.00)	965,542,322,000.00
32	FR0083	15-Apr-2040	(641,456,860,000.00)	3,666,071,893,000.00
33	FR0084	15-Feb-2026	(116,574,394,000.00)	0.00
34	FR0085	15-Apr-2031	(129,029,004,000.00)	0.00
35	FR0086	15-Apr-2026	(271,463,605,000.00)	482,645,803,000.00
36	FR0087	15-Feb-2031	(891,115,043,000.00)	1,398,315,297,000.00
37	FR0088	15-Jun-2036	(624,413,704,000.00)	22,414,752,000.00
38	FR0089	15-Aug-2051	(563,066,274,000.00)	192,272,657,000.00
39	FR0090	15-Apr-2027	(1,546,407,932,000.00)	59,582,071,000.00
40	FR0091	15-Apr-2032	(4,179,008,661,000.00)	699,701,166,000.00
41	FR0092	15-Jun-2042	(559,071,150,000.00)	1,705,211,521,000.00
42	FR0093	15-Jul-2037	(521,707,337,000.00)	0.00
43	FR0094	15-Jan-2028	(180,343,882,000.00)	0.00
44	FR0095	15-Aug-2028	(868,375,973,000.00)	0.00
45	FR0096	15-Feb-2033	(687,423,711,000.00)	128,280,563,000.00
46	FR0097	15-Jun-2043	(99,534,577,000.00)	0.00

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
47	FR0098	15-Jun-2038	(119,269,145,000.00)	0.00
48	FRSDG001	15-Oct-2030	(14,914,415,000.00)	8,998,509,000.00
Grand Total			(32,818,760,067,000.00)	32,666,834,421,000.00

Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Valas

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0035	12-Oct-2035	0.00	474,756,320,000.00
2	RI0037	17-Feb-2037	(97,367,261,000.00)	0.00
3	RI0038	17-Jan-2038	(211,893,073,000.00)	0.00
4	RI0124	15-Jan-2024	(11,769,957,000.00)	0.00
5	RI0125	15-Jan-2025	(31,279,798,000.00)	0.00
6	RI0126	8-Jan-2026	(34,587,444,000.00)	0.00
7	RI0127	8-Jan-2027	(27,430,972,000.00)	0.00
8	RI0128	11-Jan-2028	(35,798,606,000.00)	0.00
9	RI0142	17-Jan-2042	(188,499,505,000.00)	136,477,517,000.00
10	RI0144	15-Jan-2044	(214,474,161,000.00)	0.00
11	RI0145	15-Jan-2045	(210,055,733,000.00)	0.00
12	RI0146	8-Jan-2046	(93,189,400,000.00)	0.00
13	RI0147	8-Jan-2047	(121,784,645,000.00)	0.00
14	RI0148	11-Jan-2048	(164,440,760,000.00)	0.00
15	RI0224	11-Feb-2024	(2,204,280,000.00)	0.00
16	RI0229	11-Feb-2029	(27,612,330,000.00)	0.00
17	RI0230	14-Feb-2030	(30,435,789,000.00)	0.00
18	RI0249	11-Feb-2049	(58,168,831,000.00)	0.00
19	RI0250	14-Feb-2050	(90,894,075,000.00)	0.00
20	RI0331	12-Mar-2031	(66,283,155,000.00)	0.00
21	RI0332	31-Mar-2032	(55,330,891,000.00)	0.00
22	RI0351	12-Mar-2051	(263,195,335,000.00)	0.00
23	RI0352	31-Mar-2052	(87,395,653,000.00)	0.00
24	RI0371	12-Mar-2071	(82,661,008,000.00)	0.00
25	RI0428	24-Apr-2028	(18,021,067,000.00)	0.00
26	RI0443	15-Apr-2043	(195,818,363,000.00)	0.00
27	RI0470	15-Apr-2070	(147,218,093,000.00)	0.00
28	RI0727	18-Jul-2027	(24,872,973,000.00)	0.00
29	RI0731	28-Jul-2031	(53,121,955,000.00)	0.00
30	RI0747	18-Jul-2047	(86,167,535,000.00)	0.00
31	RI0927	20-Sep-2027	(117,848,382,000.00)	0.00
32	RI0929	18-Sep-2029	(30,776,974,000.00)	0.00
33	RI0932	20-Sep-2032	(240,559,691,000.00)	0.00
34	RI0952	20-Sep-2052	(107,816,684,000.00)	0.00
35	RI0961	23-Sep-2061	(159,176,715,000.00)	0.00
36	RI1030	15-Oct-2030	(82,095,994,000.00)	0.00
37	RI1049	30-Oct-2049	(112,248,080,000.00)	0.00
38	RI1050	15-Oct-2050	(200,713,676,000.00)	0.00
39	RIEUR0227	14-Feb-2027	(32,035,870,000.00)	0.00
40	RIEUR0333	12-Mar-2033	(120,975,317,000.00)	0.00
41	RIEUR0334	23-Mar-2034	(43,632,984,000.00)	0.00

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
42	RIEUR0425	24-Apr-2025	(10,991,559,000.00)	0.00
43	RIEUR0628	14-Jun-2028	(150,443,262,000.00)	0.00
44	RIEUR0724	18-Jul-2024	(6,106,132,000.00)	0.00
45	RIEUR0725	30-Jul-2025	(71,121,293,000.00)	0.00
46	RIEUR0729	28-Jul-2029	(36,385,012,000.00)	0.00
47	RIEUR0926	18-Sep-2026	(15,835,912,000.00)	0.00
48	RIEUR1031	30-Oct-2031	(15,152,298,000.00)	0.00
49	USDFR0003	15-Jan-2032	(114,977,139,000.00)	0.00
Grand Total			(4,400,865,622,000.00)	611,233,837,000.00

Unamortized Discount / Premium SBSN Rupiah

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0006	15-Mar-2030	(3,479,352,000.00)	9,403,256,000.00
2	IFR0007	15-Jan-2025	(3,019,474,000.00)	3,706,153,000.00
3	IFR0010	15-Feb-2036	(12,211,131,000.00)	205,045,825,000.00
4	PBS003	15-Jan-2027	(1,028,278,327,000.00)	80,436,791,000.00
5	PBS004	15-Feb-2037	(3,197,780,186,000.00)	0.00
6	PBS005	15-Apr-2043	(4,054,313,041,000.00)	0.00
7	PBS007	15-Sep-2040	(11,736,832,000.00)	419,744,058,000.00
8	PBS012	15-Nov-2031	(43,820,972,000.00)	2,047,337,344,000.00
9	PBS015	15-Jul-2047	(794,052,553,000.00)	363,046,632,000.00
10	PBS017	15-Oct-2025	(1,134,447,318,000.00)	400,063,798,000.00
11	PBS018	15-May-2028	(37,849,465,000.00)	275,793,912,000.00
12	PBS020	15-Oct-2027	(12,911,903,000.00)	2,444,405,000.00
13	PBS021	15-Nov-2026	(2,141,516,000.00)	218,666,702,000.00
14	PBS022	15-Apr-2034	(18,295,679,000.00)	501,344,378,000.00
15	PBS023	15-May-2030	(3,605,860,000.00)	93,991,780,000.00
16	PBS024	15-May-2032	(14,757,351,000.00)	7,105,703,000.00
17	PBS025	15-May-2033	(20,221,235,000.00)	1,698,619,057,000.00
18	PBS026	15-Oct-2024	(81,561,679,000.00)	599,185,047,000.00
19	PBS028	15-Oct-2046	(104,730,009,000.00)	3,503,459,266,000.00
20	PBS029	15-Mar-2034	(2,321,267,018,000.00)	26,418,047,000.00
21	PBS030	15-Jul-2028	(77,700,676,000.00)	26,972,225,000.00
22	PBS031	15-Jul-2024	(644,466,211,000.00)	857,618,000.00
23	PBS032	15-Jul-2026	(492,195,298,000.00)	7,228,605,000.00
24	PBS033	15-Jun-2047	(1,039,945,597,000.00)	0.00
25	PBS034	15-Jun-2039	(360,378,387,000.00)	0.00
26	PBS035	15-Mar-2042	(48,232,903,000.00)	0.00
27	PBS036	15-Aug-2025	(120,389,700,000.00)	0.00
28	PBSG001	15-Sep-2029	(47,559,935,000.00)	0.00
29	SW001	10-Mar-2025	(1,088,514,000.00)	0.00
30	SW002	30-Jun-2027	(1,930,294,000.00)	0.00
Grand Total			(15,734,368,416,000.00)	10,490,870,602,000.00

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah
Tahun 2022

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0039	15-Aug-2023	(2,116,356,000.00)	0.00
2	FR0046	15-Jul-2023	(92,975,503,000.00)	31,784,546,000.00
3	FR0063	15-May-2023	(288,291,630,000.00)	13,547,747,000.00
Grand Total			(383,383,489,000.00)	45,332,293,000.00

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar SBSN Rupiah
Tahun 2022

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	PBS011	15-Aug-2023	(611,416,000.00)	142,028,440,000.00
2	PBS019	15-Sep-2023	(8,327,975,000.00)	222,267,928,000.00
3	PBS027	15-May-2023	(952,596,000.00)	385,959,017,000.00
Grand Total			(9,891,987,000.00)	750,255,385,000.00

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Valas
Tahun 2022

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0123	11-Jan-2023	(189,311,000.00)	0.00

2	RI0423	15-Apr-2023	(3,685,720,000.00)	0.00
3	RI1023	17-Oct-2023	(3,541,472,000.00)	0.00
4	RIEUR0623	14-Jun-2023	(13,413,501,000.00)	0.00
Grand Total			(20,830,004,000.00)	0.00

Unamortized Discount / Premium SPN
Tahun 2022

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	SPN03230111	11-Jan-2023	(417,019,000)	0
2	SPN03230125	25-Jan-2023	(427,086,000)	0
3	SPN03230208	8-Feb-2023	(4,508,660,000)	0
4	SPN03230222	22-Feb-2023	(6,465,246,000)	0
5	SPN03230308	8-Mar-2023	(8,334,465,000)	0
6	SPN12230105	5-Jan-2023	(1,573,412,000)	0
7	SPN12230203	3-Feb-2023	(16,673,414,000)	0
8	SPN12230303	3-Mar-2023	(27,026,111,000)	0
9	SPN12230330	30-Mar-2023	(25,821,325,000)	0
10	SPN12230413	13-Apr-2023	(47,284,899,000)	0
11	SPN12230526	26-May-2023	(48,326,012,000)	0
12	SPN12230622	22-Jun-2023	(82,751,000,000)	0
13	SPN12230720	20-Jul-2023	(2,694,398,000)	0
14	SPN12230818	18-Aug-2023	(71,629,538,000)	0
15	SPN12230914	14-Sep-2023	(75,906,786,000)	0
16	SPN12231012	12-Oct-2023	(31,658,880,000)	0
17	SPN12231109	9-Nov-2023	(58,922,035,000)	0
18	SPN12231207	7-Dec-2023	(25,390,125,000)	0
Grand Total			(535,810,411,000)	0

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	SPNS02052023	2-May-2023	(7,298,494,000)	0
2	SPNS07022023	7-Feb-2023	(146,300,000)	0
3	SPNS07032023	7-Mar-2023	(2,943,065,000)	0
4	SPNS10012023	10-Jan-2023	(424,187,000)	0
5	SPNS30052023	30-May-2023	(1,751,542,000)	0
Grand Total			(12,563,588,000)	0

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 - 8	14
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	750.988.497	-	750.988.497	702.317.939	-	702.317.939	48.670.558	025
2	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	2.595.573	1.255.327.149	1.257.922.722	8.672.359.822	23.655.862	8.696.015.684	(7.438.092.962)	026
3	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	-	-	-	92.623.995	(1.091.738)	91.532.257	(91.532.257)	026
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	-	-	-	6.419.850.933	-	6.419.850.933	(6.419.850.933)	033
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	2.365.489.926	3.263.766	2.368.753.692	343.189.712	-	343.189.712	2.025.563.980	020
6	Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI)	17.500.000	13.431.901	30.931.901	17.500.000	7.775.444	25.275.444	5.656.457	025
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	16.066.881	952.014	17.018.895	13.908.857	3.618	13.912.475	3.106.420	025
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	-	-	-	22.631.910	-	22.631.910	(22.631.910)	090
9	Badan Restorasi Gambut	104.043	-	104.043	746.670.074	-	746.670.074	(746.566.031)	
10	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	22.126.524	-	22.126.524	18.724.855	-	18.724.855	3.401.669	025
11	Dewan Energi Nasional (DEN)	-	297.844	297.844	47.598.503	-	47.598.503	(47.300.659)	020
12	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	-	-	-	12.386.079	-	12.386.079	(12.386.079)	036
13	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	541.003	5.064.664	5.605.667	132.460.607	63.429.346	195.889.953	(190.284.286)	999
14	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	-	-	-	13.147.672	-	13.147.672	(13.147.672)	035
15	Dewan Pers	-	48.121	48.121	33.672.474	-	33.672.474	(33.624.353)	059
16	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	-	77.890	77.890	31.404.003	284	31.404.287	(31.326.397)	007
17	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	8.000	8.000	11.926.286	-	11.926.286	(11.918.286)	033
18	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	44.119	26.435	70.554	50.148.001	7.425	50.155.426	(50.084.872)	048
19	Komisi Informasi Pusat (KIP)	126	23.114	23.240	33.749.432	-	33.749.432	(33.726.192)	059
20	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	-	1.275.781	1.275.781	54.946.714	-	54.946.714	(53.670.933)	059
21	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	-	7.920	7.920	12.552.703	8.242	12.560.945	(12.553.025)	047
22	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	-	21.434	21.434	22.301.306	2.651	22.303.957	(22.282.523)	055
23	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	-	22.670	22.670	30.153.652	-	30.153.652	(30.130.982)	022
24	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	-	-	-	3.453.971	-	3.453.971	(3.453.971)	015

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 - 8	14
25	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	-	-	-	-	-	-	-	024
26	Lembaga Sensor Film (LSF)	2.325.800	-	2.325.800	29.157.625	-	29.157.625	(26.831.825)	023
27	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)			-			-	-	024
28	Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)	-		-	16.554.772		16.554.772	(16.554.772)	34
29	Sekretariat Pengadilan Pajak	11.553	73.313	84.866	79.303.618	13.886	79.317.504	(79.232.638)	015
30	SKK MIGAS (Satker)	809	3.945.508	3.946.317	1.678.029.671		1.678.029.671	(1.674.083.354)	999
31	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1.663.772.627	-	1.663.772.627	(1.817.147.678)	-	(1.817.147.678)	3.480.920.305	999
32	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	7.481.316.866	306.758.297	7.788.075.163	6.313.491.051	-	6.313.491.051	1.474.584.112	999
33	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-	14.125	14.125	5.189.750	4.435.242	9.624.992	(9.610.867)	999
34	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	44.198.026	330.410	44.528.436	61.517.641	4.537.608	66.055.249	(21.526.813)	007
35	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	6.149.455	-	6.149.455	7.314.930	-	7.314.930	(1.165.475)	007
36	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	5.187.880	14.331.840	19.519.720	40.154.845	20	40.154.865	(20.635.145)	040
37	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	-	523	523	32.330.767	29.991.629	62.322.396	(62.321.873)	040
38	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Komisi Nasional Anti Kekerasan	-	-	-	8.762	-	8.762	(8.762)	078
39	Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	-	5.838.924	5.838.924	2.465	5.787.404	5.789.869	49.055	-
40	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	-	30.925.037	30.925.037	22.156.615	-	22.156.615	8.768.422	0
41	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1.763.428		1.763.428	1.739.100	-	1.739.100	24.328	0
42	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	-	-	-	1.043.967	-	1.043.967	(1.043.967)	-
43	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	-	-	145.034.500	-	145.034.500	(145.034.500)	-
44	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	36.745.500		36.745.500	23.413.566		23.413.566	13.331.934	
45	Komite Cipta Kerja	16.315		16.315	19.708.825.543		19.708.825.543	(19.708.809.228)	
46	Komite Penanganan Covid 19 dan	-	-	-	-	-	-	-	
47	Kantor Staf Presiden	-	9.784	9.784	105.896.248	-	105.896.248	(105.886.464)	
J U M L A H		12.416.944.951	1.642.076.464	14.059.021.415	43.993.697.258	138.556.923	44.132.254.181	(30.073.232.766)	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	7,631,059		7,630,685			7,630,685	374		Bagian satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)						0	0		Bukan satker	025
3	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	2,485,656		2,485,656			2,485,656	0		Bagian satker	050
4	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	98,383,500	8,394,808	81,936,950	2,673,758		93,005,516	5,377,984		Satker	026
5	Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI)	17,500,000		17,500,000			17,500,000	-	3,871,643	Bagian satker	025
6	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	256,146,455	50,985,722	192,537,831	11,366,666		254,890,219	1,256,236		Satker	020
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	-	0	-	-		0			Bukan satker	025
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	22,199,942	11,381,827	10,563,797	254,318		22,199,942	-		Satker	090
9	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	793,062		786,367			786,367	6,695		Bagian satker	088
10	Badan Promosi Pariwisata Indonesia						0	0		tidak aktif	040
11	Badan Restorasi Gambut	1,687,056,833	8,623,085	762,791,229	2,511,524		773,925,838	913,130,995		Satker	029
12	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	-	-	-	-		0	0		Bukan satker	025
13	Dewan Energi Nasional (DEN)	48,131,837	18,794,264	27,541,416	1,741,450		48,077,130	54,707		Satker	020
14	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	12,542,996		12,015,877	101,675		12,117,552	425,444		Satker	036
15	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun	248,642,625				240,803,462	240,803,462	7,839,163		Satker	999
16	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	2,504,484		-		-	-	2,504,484		Bagian satker	044
17	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	16,500,000	1,371,693	11,406,333	318,300		13,096,326	3,403,674		Satker	035
18	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	750,000		744,532			744,532	5,468		Bagian satker	026
19	Dewan Pers	30,099,370	3,455,861	29,845,614	2,412,463		35,713,938	(5,614,568)		Satker	059
20	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	1,406,397	-	1,404,978			1,404,978	1,419		Bagian satker	010

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
21	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	33,230,399	3,412,220	27,355,530	1,172,624		31,940,374	1,290,025		Satker	007
22	Dewan Riset Nasional (DRN)	4,862,623	-	3,024,685			3,024,685	1,837,938		Bagian satker	042
23	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	12,582,695	358,698	10,954,427	604,699		11,917,824	664,871		Satker	033
24	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)	3,615,999		3,611,261			3,611,261	4,738		Bagian satker	055
25	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	55,483,639	19,150,489	27,002,609	8,445,407		54,598,505	885,134		Bagian satker	048
26	Komisi Banding Merek	250,234		249,334			249,334	900		Bagian satker	013
27	Komisi Banding Paten	3,559,469	-	3,559,469	-		3,559,469	0		Bagian satker	013
28	Komisi Informasi Pusat (KIP)	34,990,754	5,469,453	28,063,455	999,340		34,532,248	458,506		Satker	059
29	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	739,700,000		739,700,000			739,700,000	-		Bagian satker	043
30	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	13,881,367	5,624,485	542,791	-	7,661,950	13,829,226	52,141		Bagian satker	034
31	Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)	16,642,672	4,240,226	12,314,546	-		16,554,772	87,900		Bagian satker	034
32	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	21,661,404	7,655,511	13,582,714	99,361		21,337,586	323,818		Bagian satker	074
33	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	59,032,784	7,258,902	46,746,499	2,298,312		56,303,713	2,729,071		Satker	059
34	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	13,215,816	2,345,201	9,489,609	1,241,647		13,076,457	139,359		Satker	047
35	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	23,697,962		22,802,215	611,351		23,413,566	284,396	-	Satker	084
36	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	17,373,913	-	16,471,487	-	-	16,471,487	902,426		Bagian satker	012
37	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	778,311	-	778,248			778,248	63		Bagian satker	035
38	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	22,100,000	-	22,043,055	-	-	22,043,055	56,945		bagian satker	055
39	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KKPPIP)	15,691,000		15,677,375	-		15,677,375	13,625		Bagian satker	035
40	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	9,252		8,762			8,762	490		Bagian satker	078
41	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	39,721,808	8,222,613	30,933,933	49,985	-	39,206,531	515,277		Satker	022
42	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	30,925,307	-	-		22,156,615	22,156,615	8,768,692		Bagian satker	092
43	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	1,059,341	-	1,043,967	-	-	1,043,967	15,374		Bagian satker	048
44	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)						0	0		Tidak aktif	041
45	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	3,434,972		3,410,749	-		3,410,749	24,223		Satker	015

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	NON APBN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
46	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)						-	-		Tidak aktif	084
47	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	-	-	-	-		-	-		Satker	024
48	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1,535,000		1,533,745		-	1,533,745	1,255		Bagian satker	088
49	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1,763,428		1,739,100			1,739,100	24,328		Bagian satker	026
50	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	1,372,247		202,523			202,523	1,169,724		Bagian satker	026
51	Lembaga Sensor Film (LSF)	29,189,112	11,399,862	17,450,303	195,360		29,045,525	143,587		Satker	023
52	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)						0	0		Tidak aktif	024
53	Otorita Asahan	-	-	-			0	0		Likuidasi	019
54	Sekretariat Pengadilan Pajak	82,960,128	53,543,065	22,541,546	1,612,015		77,696,626	5,263,502		Satker	015
55	SKK MIGAS (Satker)	1,751,594,316				1,663,772,627	1,663,772,627	87,821,689		satker	999
56	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1,751,594,316				1,663,772,627	1,663,772,627	87,821,689		Bukan satker	999
57	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden	8,851,877	-	8,251,241			8,251,241	600,636		Bagian satker	114
58	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	-					0	0	6,303,696,966	Bukan Satker	999
59	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-	-			-	0	0		Satker	999
60	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII						0	0		Bukan Satker	007
61	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"						0	0		Bukan Satker	007
62	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BPODT)	52,861,527	5,621,827	31,345,474	14,425,111		51,392,412	1,469,115		Satker	040
63	Otoritas Nasional Senjata Kimia	-		-			0	0		tidak aktif	019
64	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	34,444,465	3,226,535	17,454,496	6,677,285		27,358,316	7,086,149		satker	040
65	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	-		-	-		0	0		Bagian satker	024
66	Komite Nasional Disabilitas	5,803,359		3,599,548			3,599,548	2,203,811		Tahun 2022 U	
67	Komite Cipta Kerja	21,200,000,000				18,258,534,947	18,258,534,947	2,941,465,053		satker	999
68	Komite Penanganan Covid 19 dan PEN	-	-	-			-	-		Bagian satker	036
69	Tim Pengembangan Vaksin COVID-19	32,906,825	2,479,531	21,394,830	3,652,539	0	27,526,900	5,379,925	16,999,915	bagian satker	024
70	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)	704,209	0	689,947	0	0	689,947	14,262	16,999,916	bagian satker	in 2022 U
71	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	0	0	0	0	0	0	0	16,999,917	bagian satker	in 2021 U
72	Kantor Staf Presiden	105,784,896	52,961,964	49,552,779	2,658,999		105,173,742	611,154	16,999,918	bagian satker	in 2022 U
	J U M L A H	28,681,641,642	295,977,842	2,374,313,517	66,124,189	21,856,702,228	24,593,117,776	4,088,523,866	6,375,568,275	-	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	172.359.290	-	32.898.668	-	205.257.958	6.664.999	12.353.693	19.018.692	186.239.266	205.257.958
2	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	232.029.226	12.500	12.157.273.278	1.894.316.455	14.283.631.459	29.815.136	-	29.815.136	14.253.816.323	14.283.631.459
3	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	739.663		44.763.635	1.514.786	47.018.084	247.911	-	247.911	46.770.173	47.018.084
4	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda					-			-	-	-
5	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	310.007	-	1.481.983	-	1.791.990	300.000	-	300.000	1.491.990	1.791.990
6	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	1.430.426.153	-	316.366.465	2.552.256	1.749.344.874	141.470.582		141.470.582	1.607.874.292	1.749.344.874
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	54.423.840	155.427.090	2.733.097	-	212.584.027	49.152.283	142.164.496	191.316.779	21.267.248	212.584.027
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	30.186.000		953.741.226	374.803.114	1.358.730.340	-		-	1.358.730.340	1.358.730.340
9	Badan Restorasi Gambut	60.485.102		15.600.094	294.598	76.379.794	1.927	-	1.927	76.377.867	76.379.794
10	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	11.272.322	-	-	327.196.824	338.469.146	-	318.117.897	318.117.897	20.351.249	338.469.146
11	Dewan Energi Nasional (DEN)	183.137		3.162.277	-	3.345.414	-		-	3.345.414	3.345.414
12	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	231.573		614.830	-	846.403	149.076		149.076	697.327	846.403
13	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	-	-	908.482.747	9.896.988	918.379.735	-	-	-	918.379.735	918.379.735
14	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	342.264		414.466	-	756.730	720.129		720.129	36.601	756.730
15	Dewan Pers	145.980		845.435	543.707	1.535.122	40.511		40.511	1.494.611	1.535.122
16	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	901.039		2.333.325	74.324	3.308.688	7.480		7.480	3.301.208	3.308.688
17	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	-	1.645.641	-	1.645.641	-	-	-	1.645.641	1.645.641
18	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	3.076.806		46.647.230	294.721	50.018.757	141.958		141.958	49.876.799	50.018.757
19	Komisi Informasi Pusat (KIP)	131.222	-	1.931.800	-	2.063.022	-		-	2.063.022	2.063.022
20	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	435.488	-	3.717.453	1.077.482	5.230.423	38.214		38.214	5.192.209	5.230.423
21	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	17.315		2.104.893	131.894	2.254.102	-	-	-	2.254.102	2.254.102
22	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	-	-	-	-	-	-		-	-	-
23	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	402.058	-	3.401.591	11.812.382	15.616.031	1.045.715		1.045.715	14.570.316	15.616.031
24	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	23.997		78.385	-	102.382	-	-	-	102.382	102.382
25	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	-		-	-	-	-		-	-	-

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA
26	Lembaga Sensor Film (LSF)	122.495	-	2.226.223	865.754	3.214.472	-	-	-	3.214.472	3.214.472
27	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)					-	-	-	-	-	-
28	Otorita Asahan	2.471.153		4.615.662	-	7.086.815	234.422		234.422	6.852.393	7.086.815
29	Sekretariat Pengadilan Pajak	719.447	-	16.254.436	31.943	17.005.826	151.990	-	151.990	16.853.836	17.005.826
30	SKK MIGAS (Satker)	23.096.669		80.107.576	47.758.829.836	47.862.034.081	15.870.785	47.750.621.548	47.766.492.333	95.541.748	47.862.034.081
31	MIGAS (Bukan Satker)	27.003.229		151.349.691	-	178.352.920	62.061.173	1.630.447.129	1.692.508.302	(1.514.155.382)	178.352.920
32	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	7.635.738.787		2.402.175.772	965.113.758	11.003.028.317	291.666.974	2.833.406.196	3.125.073.170	7.877.955.147	11.003.028.317
33	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-		1.367.432	7.112.408	8.479.840		-	-	8.479.840	8.479.840
34	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	15.079.345	-	106.256.551	4.919.767	126.255.663	47.577.940	10.308.850	57.886.790	68.368.873	126.255.663
35	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	1.460.609		2.980.163		4.440.772	-	7.117.330	7.117.330	(2.676.558)	4.440.772
36	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	674.045		442.057.271	500.972	443.232.288	-	-	-	443.232.288	443.232.288
37	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	-		-	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	249.784	-	42.101.289	3.000	42.354.073	211.801		211.801	42.142.272	42.354.073
39	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1.763.428	-	-	-	1.763.428	-	-	-	1.763.428	1.763.428
40	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	4.088				4.088	-	-	-	4.088	4.088
41	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	-		141.772.022		141.772.022	-	-	-	141.772.022	141.772.022
42	DPN Korpri	3.486.166	-	183.856	-	3.670.022	74.148	-	74.148	3.595.874	3.670.022
43	Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)	-	-	-		-	-	-	-	-	-
44	Tim Pengembangan Vaksin Covid	85.785	-	95.111.704	47.135	95.244.624	-	-	-	95.244.624	95.244.624
45	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	-	-		-	-	-	-	-	-
46	Komite Penanganan Covid 19 dan PEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Komite Cipta Kerja	656.326	-	-	1.088.970.650	1.089.626.976	-	-	-	1.089.626.976	1.089.626.976
48	Komite TPPU	-	-	-		-	-	-	-	-	-
49	Kantor Staf Presiden	362.490		8.106.512	320.372	8.789.374	-	-	-	8.789.374	8.789.374
TOTAL		9.711.096.328	155.439.590	17.996.904.679	52.451.225.126	80.314.665.723	647.645.154	52.704.537.139	53.352.182.293	26.962.483.430	80.314.665.723

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NO	BUMN	KODE	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	8 = (6-7)	9	11	12=10+11	13	14
1	Perum Perhutani	PHTN	4.812.351	4.926.804	(114.453)	1.012.403	158.245	24.202	715.503	550.271	(70.165)	480.106	549.897
2	Perum Bulog	PBLG	26.437.316	25.279.291	1.158.025	628.032	195.402	1.121.403	469.252	333.176	(27.461)	305.716	370.472
3	Perum Jasa Tirta I	JST1	614.676	518.378	96.298	17.775	17.837	302	95.934	74.890	513	75.403	74.994
4	Perum Jasa Tirta II	JST2	981.047	793.225	187.822	30.699	25.156	1.509	191.855	145.248	(43.729)	101.519	145.803
5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	PNRI	167.372	179.525	(12.153)	14.720	13.686	28.557	(39.676)	(39.676)	(16)	(39.692)	(39.676)
6	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	PURI	3.884.455	3.405.007	479.449	105.657	43.764	73.113	468.229	351.392	(102.295)	249.097	347.894
7	Perum Produksi Film Negara	PPFN	18.165	20.140	(1.976)	3.400	568	-	856	856	-	856	856
8	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	ANTR	399.187	378.460	20.727	146.262	25.628	1.499	139.862	134.200	(5.535)	128.664	134.195
9	Perum Perumnas	PRNS	1.043.560	1.107.246	(63.686)	174.073	136.519	378.168	(404.300)	(429.793)	(9.194)	(438.987)	(430.260)
10	Perum Damri	DMRI	931.545	927.626	3.919	33.961	37.395	-	484	8.480	-	8.480	8.480
11	Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	PPPD	409.034	398.016	11.018	1.078	94	10.815	1.186	1.183	-	1.183	1.183
12	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	PNPI	2.231.478	2.144.608	86.869	74.830	(48.059)	-	209.758	154.525	544	155.069	154.525
Total Perum			41.930.184	40.078.326	1.851.858	2.242.890	606.236	1.639.568	1.848.944	1.284.752	(257.338)	1.027.414	1.318.362
1	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	RJNI	15.788.293	14.060.408	1.727.886	455.615	1.880.007	564.105	(260.611)	(297.922)	(35.628)	(333.550)	(297.919)
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	PN03	55.863.302	46.044.737	9.818.565	3.375.722	1.988.545	3.151.477	8.054.265	6.016.981	(1.688.789)	4.328.192	5.633.064
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	PSRI	103.859.493	77.140.686	26.718.808	898.209	208.822	2.243.064	25.165.130	18.510.592	1.480.776	19.991.368	18.461.814
4	PT Bio Farma (Persero)	BIFR	21.539.333	20.566.363	972.970	432.432	-	597.307	808.094	505.458	194.231	699.689	539.456
5	PT Pertamina (Persero)	PTMN	1.262.797.681	1.121.175.499	141.622.183	15.126.869	34.252.674	18.386.617	104.109.760	60.393.942	450.505	60.844.447	56.629.600
6	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	BTDC	668.375	631.241	37.134	27.160	111.721	70.300	(117.728)	(148.128)	10.939	(137.188)	(148.523)
7	PT Pos Indonesia (Persero)	POSI	4.646.297	4.491.999	154.298	757.507	85.807	198.208	627.790	637.046	718.961	1.356.007	650.369
8	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	PLNA	441.131.943	386.193.802	54.938.141	3.529.170	19.790.474	17.135.165	21.541.672	14.414.720	(9.006.358)	5.408.362	14.334.040
9	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	36.378.597	31.809.451	4.569.146	157.308	-	1.427.618	3.298.835	2.499.083	419.518	2.918.601	2.364.836
10	PT Semen Kupang (Persero)	SKPG	6.926	61.012	(54.086)	183	-	903	(54.805)	(54.805)	-	(54.805)	(54.805)
11	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	TLKM	147.257.398	101.000.960	46.256.439	(3.687.577)	2.194.703	4.032.695	36.341.464	27.680.659	1.766.222	29.446.881	20.753.371
12	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	INKI	97.355	92.418	4.937	554	4.791	-	700	525	-	525	525

NO	BUMN	KODE	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
13	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	DPKB	406.211	425.477	(19.266)	-	29.881	-	(49.146)	(53.283)	-	(53.283)	(53.283)
14	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	DPSB	10.398	50.417	(40.019)	1.970	4.832	9.650	(52.531)	(52.531)	-	(52.531)	(52.531)
15	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	INLM	126.937.570	105.281.579	21.655.991	12.998.476	62.272	6.419.033	28.173.162	22.495.251	4.774.067	27.269.318	16.299.694
16	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRST	34.166.007	33.087.244	1.078.763	4.643.662	105.218	2.147.410	3.469.797	1.219.103	(1.102.148)	116.955	1.173.032
17	PT Boma Bisma Indra (Persero)	BOBI	267.122	267.039	83	15.737	18.221	8.407	(10.808)	(10.808)	-	(10.808)	(10.808)
18	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	INTI	309.029	333.444	(24.415)	14.281	8.802	54.538	(73.474)	(82.234)	(4.269)	(86.503)	(81.744)
19	PT Barata Indonesia (Persero)	BARI	395.372	473.153	(77.781)	4.721	6.926	16.462	(96.448)	(96.448)	-	(96.448)	(96.448)
20	PT LEN Industri (Persero)	LENI	19.715.303	16.396.950	3.318.353	584.291	2.610.767	773.021	518.856	465.366	128.538	593.904	449.532
21	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	ADKA	13.549.010	12.479.090	1.069.920	632.269	344.133	806.691	551.365	175.210	(7.831)	167.379	81.242
22	PT Amarta Karya (Persero)	AMKA	466.170	447.274	18.896	16.099	1.396	21.292	12.307	3.336	-	3.336	3.336
23	PT Brantas Abipraya (Persero)	BRAP	4.012.546	3.851.408	161.139	312.009	66.063	177.678	229.407	135.380	(8.465)	126.916	134.201
24	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	JSMG	16.582.849	11.099.535	5.483.314	2.863.600	708.320	3.885.342	3.753.252	2.323.708	(1.506.092)	817.616	2.746.884
25	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	WKTG	15.302.872	16.307.899	(1.005.027)	5.707.066	1.341.392	4.286.996	(926.349)	(1.672.734)	(36.089)	(1.708.823)	(1.899.817)
26	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	WIKA	21.480.792	21.322.929	157.863	1.864.015	473.919	1.371.878	176.081	12.586	5.284	17.871	(59.596)
27	PT Hutama Karya (Persero)	HTMK	24.208.538	21.143.048	3.065.490	(96.160)	691.426	3.105.614	(827.710)	(1.447.367)	68.156	(1.379.211)	(1.446.601)
28	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	PTPP	18.921.839	16.944.702	1.977.136	688.501	546.039	1.255.014	864.584	365.742	32.307	398.048	271.699
29	PT Industri Kereta Api (Persero)	INKA	1.154.124	1.293.055	(138.930)	2.764	25.317	264.942	(426.426)	(451.242)	(15.155)	(466.397)	(451.865)
30	PT PDI Pulau Batam (Persero)	PDIB	55.625	60.379	(4.754)	5.437	2.300	1	(1.618)	(1.618)	-	(1.618)	(1.618)
31	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	PEL2	32.666.951	25.552.131	7.114.820	683.106	488.229	2.571.043	4.738.654	3.908.470	(1.711.656)	2.196.814	3.772.546
32	PT Indah Karya (Persero)	IDHK	41.536	39.969	1.567	1.255	790	564	1.468	1.468	-	1.468	1.468
33	PT Bina Karya (Persero)	BIKA	41.869	62.693	(20.824)	4.102	5.565	-	(22.287)	(23.518)	3.085	(20.433)	(23.518)
34	PT Virama Karya (Persero)	VRMK	445.517	403.131	42.386	22.891	15.068	11.262	38.946	25.566	(4.653)	20.912	25.566
35	PT Yodya Karya (Persero)	YDKA	302.719	285.812	16.907	27.289	21.307	-	22.888	21.323	1.003	22.326	21.323
36	PT Indra Karya (Persero)	IDRK	215.601	200.930	14.671	9.845	-	572	23.944	18.651	47.841	66.491	18.651
37	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	74.809.885	51.911.030	22.898.855		212.147	-	22.686.708	18.481.780	(3.825.684)	14.656.096	18.312.054
38	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMDR	155.822.222	99.895.099	55.927.122	15.544	(435.059)	-	56.377.726	44.952.368	394.173	45.346.541	41.170.637

NO	BUMN	KODE	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
39	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	193.738.807	139.455.688	54.283.119	15.250.443	4.936.861	-	64.596.702	51.408.207	(2.839.024)	48.569.183	51.170.312
40	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	28.402.980	24.128.986	4.273.994	267.886.726	268.285.030	-	3.875.689	3.045.072	(1.061.317)	1.983.755	3.045.072
41	PT ASABRI (Persero)	AABR	6.489.386	2.564.745	3.924.641	15.645	-	-	3.940.286	3.884.458	(223.049)	3.661.408	3.884.458
42	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	AJWS	95.828	167.267	(71.439)	-	-	-	(71.439)	(59.970)	(97.177)	(157.147)	(59.970)
43	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	AEKS	4.518.685	4.411.690	106.995	42.186	329.275	63.000	(243.094)	(219.019)	(25.809)	(244.828)	(219.020)
44	PT Taspen (Persero)	TASP	41.255.895	40.860.400	395.495	-	13.146	-	382.349	113.845	(1.634.074)	(1.520.229)	112.383
45	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	GRDI	31.240.784	37.479.002	(6.238.218)	70.916.300	-	6.138.642	58.539.440	55.586.707	10.972	55.597.679	55.605.075
46	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	PLNI	4.906.600	4.800.570	106.030	168.366	-	-	274.396	173.619	88.909	262.528	173.248
47	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	PKAI	25.171.611	21.380.798	3.790.813	279.641	1.117.141	973.162	1.980.152	1.537.633	806.379	2.344.012	1.629.178
48	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	BPUI	31.250.102	27.298.687	3.951.415	1.364.323	-	-	5.315.738	4.002.301	-	4.002.301	4.002.301
49	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	PBKI	5.545.831	4.965.307	580.525	365.455	64.686	-	881.294	688.386	(84.921)	603.465	646.304
50	PT Danareksa (Persero)	DNRS	9.505.672	5.986.154	3.519.518	142.365	2.240.286	-	1.421.597	1.245.276	3.223.856	4.469.132	683.454
51	PT PANN (Persero)	PPNM	3.377	5.983	(2.606)	3.008	888	-	(486)	(486)	-	(486)	(486)
52	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	ASDP	4.322.157	3.756.739	565.418	89.456	37.433	134.155	483.286	455.556	-	455.556	435.229
53	PT Djakarta Lloyd (Persero)	DJLL	296.237	309.880	(13.643)	59.105	53.445	16.231	(24.214)	(28.104)	26	(28.078)	(28.104)
54	PT Iglas (Persero) (dalam likuidasi)	IGLS	-	384	(384)	180	5.546	1.546	(7.295)	(5.805)	-	(5.805)	(5.805)
55	PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi)	INSN	4.900	7.585	(2.685)	36	29	1.097	(3.775)	(3.775)	-	(3.775)	(3.775)
56	PT Primmisima (Persero)	CMBG	41.735	57.391	(15.656)	10.976	15.962	2.465	(23.107)	(23.107)	-	(23.107)	(23.107)
57	PT Aviari Pariwisata Indonesia (Persero)	SUPN	15.498.535	9.118.244	6.380.291	1.157.467	5.954.298	2.901.012	(1.317.551)	(913.827)	(155.034)	(1.068.861)	(922.871)
58	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	VRTP	225.885	230.474	(4.589)	12.760	3.431	77	4.664	3.404	-	3.404	3.404
59	PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (dalam likuidasi)	KTKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT Kertas Leces (Persero) (dalam pailit)	KTLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (dalam pailit)	MNAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Persero			3.054.837.678	2.569.869.963	484.967.715	409.860.355	350.930.271	85.226.255	458.671.544	341.762.046	(10.447.475)	331.314.571	319.297.140
TOTAL			3.096.767.861	2.609.948.288	486.819.573	412.103.245	351.536.507	86.865.823	460.520.488	343.046.798	(10.704.813)	332.341.985	320.615.502

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2022**

NO	BUMN	KODE	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	KEPEMILIKAN NEGARA
1	Perum Perhutani	PHTN	2.360.790	14.959.113	17.319.903	1.391.085	4.007.993	5.399.078	2.586.303	(1.334.148)	-	10.676.515	11.928.670	(7.845)	11.920.825	11.928.670
2	Perum Bulog	PBLG	14.275.545	6.918.566	21.194.111	11.746.119	569.072	12.315.191	12.522.387	-	(109.913)	(3.374.394)	9.038.080	(159.160)	8.878.920	9.038.080
3	Perum Jasa Tirta I	JST1	743.568	391.612	1.135.180	200.395	8.658	209.053	31.701	4.186	7.989	880.536	924.412	1.716	926.128	924.412
4	Perum Jasa Tirta II	JST2	939.123	974.294	1.913.416	231.385	299.306	530.691	164.548	-	(179.351)	1.390.012	1.375.209	7.517	1.382.726	1.375.209
5	Perum Percetakan Neg	PNRI	70.494	897.592	968.086	628.067	222.171	850.239	43.749	-	801.747	(727.649)	117.847	-	117.847	117.847
6	Perum Percetakan Uar	PURI	2.580.419	3.744.495	6.324.914	1.247.073	1.299.040	2.546.114	363.573	(64.059)	(189.664)	3.646.016	3.755.866	22.934	3.778.800	3.755.866
7	Perum Produksi Film N	PPFN	5.336	30.301	35.637	15.690	17.236	32.926	56.783	-	-	(54.071)	2.712	-	2.712	2.712
8	Perum Lembaga Kanto	ANTR	234.860	158.971	393.831	39.875	130.209	170.084	9.116	47.605	-	166.357	223.078	668	223.747	223.078
9	Perum Perumnas	PRNS	8.107.913	697.404	8.805.317	3.729.891	3.624.994	7.354.885	1.000	3.583.411	212.817	(2.348.900)	1.448.328	2.104	1.450.432	1.448.328
10	Perum Damri	DMRI	143.500	786.081	929.581	109.003	409.220	518.223	647.421	17.292	(59.256)	(194.099)	411.358	-	411.358	411.358
11	Perum Pengangkutan f	PPPD	116.587	545.834	662.422	199.437	162.803	362.240	231.769	270.230	357.417	(559.234)	300.182	-	300.182	300.182
12	Perum Lembaga Penye	PNPI	2.451.900	2.489.816	4.941.716	700.455	65.631	766.086	2.446.043	(516.195)	(26.663)	2.272.445	4.175.630	-	4.175.630	4.175.630
Total Perum					64.624.114			31.054.808	19.104.393	2.008.322	815.122	11.773.535	33.701.372	(132.066)	33.569.306	33.701.372
1	PT Rajawali Nusantara	RJNI	8.180.983	20.509.612	28.690.595	8.970.170	6.575.115	15.545.285	10.333.472	996.231	2.335.987	(582.141)	13.083.549	61.761	13.145.310	13.083.549
2	PT Perkebunan Nusan	PN03	29.746.311	119.409.540	149.155.850	26.126.561	52.913.145	79.039.706	40.216.132	-	31.432.762	(6.265.933)	65.382.960	4.733.184	70.116.144	65.382.960
3	PT Pupuk Indonesia (P	PSRI	77.975.093	80.745.414	158.720.508	42.752.125	24.808.082	67.560.208	25.000.000	-	30.286.202	35.820.662	91.106.864	53.436	91.160.300	91.106.864
4	PT Bio Farma (Persero)	BIFR	15.686.466	19.128.489	34.814.955	10.346.408	4.403.849	14.750.256	17.481.279	(6.402.398)	1.971.107	3.760.037	16.810.025	3.254.674	20.064.698	16.810.025
5	PT Pertamina (Persero)	PTMN	588.296.420	780.852.677	1.369.149.096	330.585.794	458.303.047	788.888.840	173.329.926	(15.958.864)	86.149.477	297.622.217	541.155.208	39.105.048	580.260.256	541.155.208
6	PT Pengembangan Par	BTDC	-	-	6.869.589	1.378.233	3.290.890	4.669.123	2.147.660	148	10.421	43.667	2.201.896	(1.430)	2.200.466	2.201.896
7	PT Pos Indonesia (Pers	POSI	3.675.912	7.473.179	11.149.091	2.104.699	2.094.819	4.199.518	455.023	-	3.247.794	3.264.315	6.967.131	(17.558)	6.949.573	6.967.131
8	PT Perusahaan Listrik N	PLNA	119.391.382	1.518.747.894	1.638.139.276	145.071.451	501.617.259	646.688.710	145.536.096	5.034.608	675.692.936	164.095.397	990.359.037	1.091.529	991.450.566	990.359.037
9	PT Semen Indonesia (P	SMGR	18.878.978	64.081.035	82.960.013	13.061.027	22.659.626	35.720.654	675.154	6.217.240	1.585.254	34.270.564	42.748.213	4.491.146	47.239.359	21.887.085
10	PT Semen Kupang (Per	SKPG	25.254	484.563	509.817	102.502	533.974	636.476	133.713	-	-	(260.372)	(126.659)	-	(126.659)	-
11	PT Telkom Indonesia (T	TLKM	63.581.889	211.610.497	275.192.387	70.387.829	55.543.019	125.930.848	4.953.111	11.792.885	615.695	111.895.924	129.257.615	20.003.924	149.261.539	67.330.292
12	PT Industri Kapal Indor	INKI	139.894	851.731	991.625	131.943	315.365	447.308	456.694	3.656	423.843	(339.876)	544.317	-	544.317	544.317
13	PT Dok dan Perkapalar	DPKB	296.074	1.845.216	2.141.289	3.415.014	303.567	3.718.582	976.600	635	-	(2.554.527)	(1.577.292)	-	(1.577.292)	-
14	PT Dok dan Perkapalar	DPBS	204.844	413.040	617.883	516.851	507.007	1.023.857	240.936	51	2.145	(649.106)	(405.974)	-	(405.974)	-
15	PT Indonesia Asahan A	INILM	67.935.400	161.392.753	229.328.153	41.906.654	77.175.008	119.081.662	54.177.941	(17.344.313)	17.770.850	35.553.188	90.157.666	20.088.825	110.246.491	90.157.666
16	PT Krakatau Steel (Per	KRST	14.402.315	36.956.922	51.359.237	32.481.909	10.616.109	43.098.019	9.673.196	2.728.912	28.383.552	(31.874.102)	8.911.561	(650.342)	8.261.219	7.129.249

NO	BUMN	KODE	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	KEPEMILIKAN NEGARA
17	PT Boma Bisma Indra (P	BOBI	500.370	545.821	1.046.191	658.899	270.179	929.078	340.916	33	468.513	(692.301)	117.160	(47)	117.113	117.160
18	PT Industri Telekomun	INTI	281.623	902.644	1.184.268	702.921	1.106.849	1.809.770	350.000	1.229	744.870	(1.716.710)	(620.610)	(4.892)	(625.502)	-
19	PT Barata Indonesia (P	BARI	2.416.240	1.276.807	3.693.046	2.854.679	1.962.685	4.817.364	762.915	3.221	597.763	(2.488.217)	(1.124.318)	-	(1.124.318)	-
20	PT LEN Industri (Perser	LENI	31.007.395	15.224.799	46.232.194	22.228.557	12.206.105	34.434.662	19.640.321	(8.796.012)	645.852	36.594	11.526.755	270.777	11.797.532	11.526.755
21	PT Adhi Karya (Persero	ADKA	29.593.504	10.392.913	39.986.417	24.618.080	6.544.546	31.162.626	840.761	4.826.985	610.405	2.114.788	8.392.940	430.852	8.823.791	5.399.178
22	PT Amarta Karya (Pers	AMKA	555.978	263.191	819.169	649.378	151.791	801.169	44.285	-	104.582	(130.867)	18.000	-	18.000	18.000
23	PT Brantas Abipraya (P	BRAP	4.963.759	3.009.186	7.972.946	4.147.657	1.969.850	6.117.508	161.555	-	394.334	1.269.082	1.824.971	30.467	1.855.438	1.824.971
24	PT Jasa Marga (Persero	JSMG	12.487.212	78.651.970	91.139.182	12.142.988	53.374.805	65.517.793	3.628.936	3.950.603	(2.178.722)	16.424.786	21.825.603	3.795.786	25.621.389	15.277.922
25	PT Waskita Karya (Pers	WIKT	33.430.243	64.802.074	98.232.317	21.452.886	62.534.746	83.987.632	2.880.681	13.565.914	867.396	(8.214.646)	9.099.345	5.145.340	14.244.685	6.856.266
26	PT Wijaya Karya (Perso	WIKY	39.634.795	35.434.810	75.069.604	36.135.331	21.441.067	57.576.398	896.995	6.555.389	1.139.038	4.372.391	12.963.813	4.529.394	17.493.206	8.432.960
27	PT Hutama Karya (Pers	HTMK	40.836.175	115.480.241	156.316.417	20.723.713	50.813.165	71.536.878	52.808.000	31.394.037	582.954	(871.138)	83.913.853	865.686	84.779.539	83.913.853
28	PT Pembangunan Peru	PTPP	32.391.723	25.220.660	57.612.383	26.763.804	16.027.527	42.791.331	619.990	5.536.238	1.335.594	3.661.961	11.153.783	3.667.270	14.821.052	5.688.429
29	PT Industri Kereta Api	INKA	1.654.008	2.055.769	3.709.777	3.104.320	458.858	3.563.178	1.251.843	-	754.376	(1.898.491)	117.728	28.871	146.599	117.728
30	PT PDI Pulau Batam (P	PDIB	17.627	61.166	78.793	18.394	22.681	41.075	19.000	-	(419)	19.138	37.719	0	37.719	37.719
31	PT Pelabuhan Indones	PEL2	21.620.167	96.730.411	118.350.578	19.948.604	55.597.281	75.545.885	40.575.584	(33.331.222)	838.371	33.041.956	41.124.689	1.680.004	42.804.693	41.124.689
32	PT Indah Karya (Perser	IDHK	566.138	301.331	867.469	522.470	871.669	1.394.139	7.000	-	99.939	(111.139)	(4.200)	-	(4.200)	-
33	PT Bina Karya (Persero	BIKA	30.446	54.893	85.340	61.488	18.597	80.084	15.000	-	(949)	(8.796)	5.255	-	5.255	5.255
34	PT Virama Karya (Pers	VRMK	388.320	141.117	529.437	168.397	88.898	257.296	25.000	1.051	225.178	20.912	-	-	272.141	272.141
35	PT Yodya Karya (Perso	YDKA	422.560	72.629	495.188	231.117	18.172	249.290	50.000	-	(7.878)	203.777	245.899	-	245.899	245.899
36	PT Indra Karya (Perser	IDRK	162.701	181.309	344.010	107.249	75.551	182.800	10.001	-	104.485	46.723	161.210	-	161.210	161.210
37	PT Bank Negara Indon	BBNI			1.029.836.868			889.639.206	9.054.807	17.010.254	15.690.914	94.059.740	135.815.715	4.381.947	140.197.662	81.489.429
38	PT Bank Mandiri (Pers	BMDR			1.992.544.687			1.740.299.232	11.666.667	17.537.263	33.479.625	166.995.231	229.678.786	22.566.669	252.245.455	119.432.968
39	PT Bank Rakyat Indone	BBRI			1.865.639.010			1.562.243.693	7.577.950	77.395.663	13.150.465	201.169.933	299.294.011	4.101.306	303.395.317	159.194.484
40	PT Bank Tabungan Neg	BBTN			402.148.313			376.238.960	5.295.000	4.811.029	1.856.357	13.946.968	25.909.353	-	25.909.353	15.545.612
41	PT ASABRI (Persero)	AABR			38.314.420			38.893.861	200.000	-	(2.839.419)	1.059.978	(1.579.441)	-	(1.579.441)	-
42	PT Asuransi Jiwasraya	AJWS			6.793.449			9.910.983	235.000	23.141.195	2.623.421	(29.117.150)	(3.117.534)	-	(3.117.534)	-
43	PT Reasuransi Indones	AEKS			11.382.484			8.817.441	878.358	777.433	267.247	641.986	2.565.024	19	2.565.043	2.565.024
44	PT Taspen (Persero)	TASP			345.669.640			334.660.090	500.000	-	(5.003.512)	15.417.969	10.914.456	95.093	11.009.550	10.914.456
45	PT Garuda Indonesia (P	GRDI	12.491.590	84.724.701	97.216.291	26.210.615	94.940.942	121.151.557	24.738.403	472.114	8.695.952	(57.263.611)	(23.357.142)	(578.124)	(23.935.266)	-
46	PT Pelayaran Nasional	PLNI	4.564.964	3.149.015	7.713.978	884.410	143.743	1.028.154	7.629.900	398.022	(33.821)	(1.311.674)	6.682.427	3.398	6.685.825	6.682.427
47	PT Kereta Api Indones	PKAI	15.409.097	57.065.527	72.474.624	9.952.464	33.029.416	42.981.879	19.168.743	3.200.000	(285.375)	7.352.422	29.435.790	56.954	29.492.744	29.435.790
48	PT Bahana Pembinaan	BPUI			137.613.350			95.955.188	87.163.537	-	(55.757.677)	9.362.041	40.767.901	890.261	41.658.162	40.767.901
49	PT Biro Klasifikasi Indo	PBKI	4.680.051	3.266.267	7.946.318	1.009.768	816.320	1.826.087	7.012.393	(2.630.821)	184.214	1.219.500	5.785.286	334.945	6.120.230	5.785.286
50	PT Danareksa (Persero	DNRS	13.965.479	39.525.526	53.491.005	9.494.383	7.742.751	17.237.134	18.332.900	5.487.013	1.815.100	(447.586)	25.187.427	11.066.444	36.253.871	25.187.427
51	PT PANN (Persero)	PPNM			1.019.802			6.827.745	45.997	192.066	(486)	(6.045.520)	(5.807.943)	-	(5.807.943)	-
52	PT ASDP Indonesia Fer	ASDP	1.744.660	8.062.545	9.807.205	877.270	1.662.886	2.540.157	5.173.195	133.326	-	1.810.595	7.117.116	149.932	7.267.048	7.117.116
53	PT Djakarta Lloyd (Pers	DJLL	168.884	688.130	857.014	387.479	272.007	659.486	1.961.787	1.426	65	(1.765.751)	197.528	-	197.528	155.355
54	PT Iglas (Persero) (dal	IGLS	594	11.763	12.358	1.391.271	-	1.391.271	47.007	94.583	-	(1.520.503)	(1.378.913)	-	(1.378.913)	-
55	PT Industri Sandang N	INSN	61.256	422.840	484.096	329.545	107.446	436.991	198.870	0	-	(151.765)	47.105	-	47.105	47.105
56	PT Primmisima (Perser	CMBG	13.199	144.277	157.476	136.791	17.527	154.318	13.000	133.232	-	(143.074)	3.158	0	3.158	1.667
57	PT Aviara Pariwisata In	SUPN	8.868.284	85.795.608	94.663.891	11.579.377	47.780.943	59.360.321	65.164.367	(28.765.976)	(163.069)	(1.123.080)	35.112.241	191.329	35.303.571	35.112.241
58	PT Varuna Tirta Prakas	VRTP	50.741	265.949	316.690	135.076	23.591	158.667	11.000	206	232.373	(85.556)	158.023	-	158.023	158.023
59	PT Kertas Kraft Aceh (P	KTKA	33.039	919.640	952.679	1.999.652	191.490	2.191.141	798.994	-	(2.037.456)	(1.238.462)	0	(1.238.462)	-	-
60	PT Kertas Lece (Perso	KTLC	26.791	567.027	593.818	591.048	725.419	1.316.467	417.049	-	618.400	(1.758.098)	(722.649)	-	(722.649)	-
61	PT Merpati Nusantara	MNAL	48.517	421.571	470.088	166.233	2.224.562	2.390.796	1.964.556	1,531,252	4.409.118	(8.294.501)	(1.920.826)	118,69368	(1.920.707)	-
Total Persero					10.921.673.643			7.752.583.362	885.965.197	130.164.284	906.173.596	1.090.860.755	3.013.176.286	155.913.995	3.169.090.281	2.634.727.724
TOTAL					10.986.297.757			7.783.638.170	905.069.590	132.172.606	906.988.719	1.102.634.290	3.046.877.658	155.781.929	3.202.659.587	2.668.429.095

NILAI BPYBDS PADA PERSERO/PERUM

NO	BUMN	Nilai BPYBDS per 31 Desember 2021	Telah Ditetapkan Menjadi PMN s.d. Desember 2022	Pengurangan s.d. Desember 2022	Nilai BPYBDS Per 31 Desember 2022	Selisih	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)		
1	PT Pertamina	12,452,878,178.53	0.00	-	12,452,878,178.53		1. Rincian aset BPYBDS tersebut adalah sebagai berikut: a. DPPU Bandara Hasanudin Makassar Tahap II - Instalasi Refueling Apron senilai Rp3.042.863.450,00. b. Fasilitas DPPU Bandara Juanda Surabaya- Fuel Hydrant Facilities senilai Rp9.410.014.728,53. 2. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan dengan alternatif penyelesaian melalui skema PMPP.
Jumlah		12,452,878,178.53	-	-	12,452,878,178.53	-	

Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing

No.	Nama Perusahaan	% Saham Kepemilikan RI	Nilai Ekuitas	Kepemilikan Pemerintah
1	PT Perkebunan Nusantara I	24,00%	265.647.666.181	63.755.439.883
			Jumlah I	63.755.439.883
No.	Nama Perusahaan	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham	Kepemilikan Pemerintah
1	PT Perkebunan Nusantara II	10,00%	32.761	32.761.000.000
2	PT Perkebunan Nusantara IV	10,00%	294.212	294.212.000.000
3	PT Perkebunan Nusantara V	10,00%	131.332	131.332.000.000
4	PT Perkebunan Nusantara VI	10,00%	65.329	65.329.000.000
5	PT Perkebunan Nusantara VII	10,00%	140.122	140.122.000.000
6	PT Perkebunan Nusantara VIII	13,17%	122.528	122.528.000.000
7	PT Perkebunan Nusantara IX	10,00%	159.981	159.981.000.000
8	PT Perkebunan Nusantara X	10,00%	184.560	184.560.000.000
9	PT Perkebunan Nusantara XI	10,00%	116.848	116.848.000.000
10	PT Perkebunan Nusantara XII	10,00%	127.298	127.298.000.000
11	PT Perkebunan Nusantara XIII	10,00%	102.974	102.974.000.000
12	PT Perkebunan Nusantara XIV	10,00%	23.500	23.500.000.000
13	PT Asean Bintulu Fertilizer	13,00%	39.000	138.684.000.000
14	PT Istaka Karya (Persero)	7,66%	50.000	50.000.000.000
15	PT Rekayasa Industri	4,97%	22.366	22.366.000.000
16	PT Indosat, Tbk	0,00%	1	100
17	PT PANN Pembiayaan Maritim	0,00%	1	1.000.000
18	PT Bukit Asam Tbk	0,00%	5	500
19	PT Timah Tbk	0,00%	1	50
20	PT Aneka Tambang Tbk	0,00%	1	100
21	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	0,00%	1	100
22	PT Indofarma Tbk	0,00%	1	100
23	PT Kimia Farma Tbk	0,00%	1	100
24	PT Asuransi Jasa Indonesia	0,00%	1	1.000.000
25	PT Jasa Raharja	0,00%	1	1.000.000
26	PT Jaminan Kredit Indonesia	0,00%	1	1.000.000
27	PT Asuransi Kredit Indonesia	0,00%	1	1.000.000
28	PT Energy Management Indonesia	0,00%	1	1.000.000
29	PT Pegadaian	0,00%	1	1.000.000
30	PT Permodalan Nasional Madani	0,00%	1	1.000.000
31	PT Hotel Indonesia Natour	0,00%	1	1.000.000
32	PT Sarinah	0,00%	1	1.000.000
33	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan	0,00%	1	1.000.000
34	PT Angkasa Pura I	0,00%	1	1.000.000
35	PT Angkasa Pura II	0,00%	1	1.000.000
36	PT Sucofindo	0,00%	1	1.000.000
37	PT Surveyor Indonesia	0,00%	1	1.000.000
38	PT Perikanan Indonesia	0,00%	1	1.000.000
39	PT Berdikari	0,00%	1	1.000.000
40	PT Sang Hyang Seri	0,00%	1	1.000.000
41	PT Garam	0,00%	1	1.000.000
42	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	0,00%	1	1.000.000
43	PT Nindya Karya	0,00%	1	1.000.000
44	PT Kawasan Berikat Nusantara	0,00%	1	1.000.000
45	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	0,00%	1	1.000.000
46	PT Kawasan Industri Medan	0,00%	1	1.000.000
47	PT Kawasan Industri Makassar	0,00%	1	1.000.000
48	PT Balai Pustaka	0,01%	1	1.000.000
49	PT Kliring Berjangka Indonesia	0,00%	1	1.000.000
50	PT Perusahaan Pengelola Aset	0,00%	1	1.000.000
51	PT Dahana	0,00%	1	1.000.000
52	PT Pindad	0,00%	1	1.000.000
53	PT Dirgantara Indonesia	0,00%	1	1.000.000
54	PT PAL Indonesia	0,00%	1	1.000.000

No.	Nama Perusahaan	% Saham Kepemilikan RI	Nilai Ekuitas	Kepemilikan Pemerintah
55	PT Industri Nuklir Indonesia	0,00%	1	1.000.000
56	PT Semen Baturaja Tbk	0,00%	1	100
57	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	0,00%	1	500
Jumlah II				1.712.528.001.650
Total				1.776.283.441.533

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
1	PT Perkebunan Nusantara I	Audited 2022	963,421	349,711	88,006	-	437,717	143,974	293,743	49,473	244,270	(25,395)	218,876	244,319	218,877
2	PT Perkebunan Nusantara II	Audited 2022	2,144,476	717,784	597,897	81,987	1,233,693	230,772	1,002,921	(8,503)	1,011,423	(88,009)	923,414	1,011,291	923,282
3	PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2022	7,279,521	3,198,888	487,803	392,751	3,293,940	438,617	2,855,323	680,535	2,174,788	(288,749)	1,886,039	2,185,399	1,896,156
4	PT Perkebunan Nusantara V	Audited 2022	6,084,714	2,407,435	138,412	232,396	2,313,451	314,884	1,998,567	479,823	1,518,744	(99,793)	1,418,950	1,518,743	1,418,950
5	PT Perkebunan Nusantara VI	Audited 2022	2,286,004	642,926	64,011	49,525	657,412	121,831	535,581	134,305	401,276	(46,826)	354,449	406,104	359,444
6	PT Perkebunan Nusantara VII	Audited 2022	4,078,630	57,811	68,414	-	126,224	555,360	(429,136)	(95,359)	(333,777)	(388,602)	(722,379)	(333,376)	(721,978)
7	PT Perkebunan Nusantara VIII	Audited 2022	1,747,955	(340,663)	813,867	448,182	25,023	113,052	(88,029)	(1,696)	(86,333)	(380,343)	(466,676)	(86,047)	(446,417)
8	PT Perkebunan Nusantara IX	Audited 2022	1,009,890	(140,839)	265,705	174,996	(50,130)	163,408	(213,538)	(17,461)	(196,077)	(90,717)	(286,794)	(196,077)	(286,794)
9	PT Perkebunan Nusantara X	Audited 2022	4,019,298	45,623	251,248	104,085	192,787	143,548	49,238	41,580	7,659	43,710	51,369	6,434	43,330
10	PT Perkebunan Nusantara XI	Audited 2022	4,565,441	(68,333)	60,605	695	(8,424)	143,885	(152,308)	58,873	(211,181)	11,508	(199,674)	(211,181)	(199,674)
11	PT Perkebunan Nusantara XII	Audited 2022	1,647,563	(141,142)	9,315	-	(131,827)	275,352	(407,179)	(118,026)	(289,152)	(707)	(289,860)	(289,009)	(289,716)
12	PT Perkebunan Nusantara XIII	Audited 2022	1,421,823	244,288	402,176	159,128	487,337	383,381	103,956	(8,645)	112,601	(256,951)	(144,350)	(123,134)	(133,750)
13	PT Perkebunan Nusantara XIV	Audited 2022	841,716	(192,215)	56,001	113,315	(249,529)	180,301	(429,830)	(616)	(429,214)	1,085	(428,129)	(429,214)	(428,128)
14	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2022	1,112,985	109,020	14,252	-	123,272	558	122,714	22,317	100,397	-	100,397	100,397	100,397
15	PT Istaka Karya (Persero) (dalam pailit)			-			-		-		-		-		
16	PT Rekayasa Industri	Audited 2022	2,626,469	(956,267)	530,908	386,463	(811,822)	461,138	(1,272,960)	41,801	(1,314,761)	80,154	(1,234,607)	(1,322,328)	(1,248,244)
17	PT Indosat Tbk	Audited 2022	40,986,797	5,765,522	5,120,863	5,582	10,880,803	4,345,014	6,535,789	1,165,586	5,370,203	1,448	5,371,651	4,723,415	4,726,966
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	Unaudited 2022	16,776	17,094	-	-	17,094	-	17,094	-	17,094	-	17,094	17,094	17,094
19	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2022	28,025,760	14,622,830	1,779,687		16,402,517	200,203	16,202,314	3,422,887	12,779,427	(13,061)	12,766,366	12,567,582	12,554,521
20	PT Timah Tbk	Audited 2022	11,100,887	1,403,410	228,509	18,009	1,613,910	207,282	1,406,628	365,065	1,041,563	147,898	1,189,461	1,041,484	1,189,382
21	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2022	41,988,485	3,941,871	1,653,988	-	5,595,859	381,088	5,214,771	1,393,807	3,820,964	(15,131)	3,805,833	3,820,965	3,805,834
22	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2022	44,430,394	8,656,022	2,830,851	1,443,315	10,043,558	1,970,289	8,073,269	2,102,897	5,970,372	(170,127)	5,800,244	4,853,142	4,863,015
23	PT Indofera Tbk	Audited 2022	1,623,652	(479,544)	85	-	(479,459)	38,099	(517,558)	(89,070)	(428,488)	6,526	(421,961)	(428,463)	(421,937)
24	PT Kimia Farma Tbk	Audited 2022	9,299,569	306,576	264,792	16,594	554,774	520,608	34,166	143,949	(109,783)	216,230	106,447	(170,045)	60,622
25	PT Asuransi Jasa Indonesia	Audited 2022	3,731,539	53,333	702,296	464,488	291,141	472	290,669	59,074	231,595	1,267,057	1,498,652	231,059	1,498,081
26	PT Jasa Raharja	Unaudited 2022	5,466,128	1,802,785	32,983	21,235	1,814,533	-	1,814,533	278,701	1,535,832	(157,798)	1,378,034	1,529,146	1,372,573
27	PT Jaminan Kredit Indonesia	Unaudited 2022	4,873,829	967,321	851,689	240,387	1,578,623	-	1,578,623	409,702	1,168,921	-	1,168,921	1,168,921	1,168,921
28	PT Asuransi Kredit Indonesia	Unaudited 2022	11,362,451	1,362,637	-	286,898	1,075,739	-	1,075,739	156,392	919,348	53,737	973,085	919,213	973,086
29	PT Energy Management Indonesia	Unaudited 2022	27,882	(7,211)	1,519	1,055	(6,746)	612	(7,359)	(2,122)	(5,237)	1,143	(4,094)	(5,236)	(4,094)
30	PT Pegadaian	Audited 2022	18,551,282	4,325,305	3,899	-	4,329,204	-	4,329,204	1,030,259	3,298,945	317,115	3,616,060	3,298,312	3,615,427
31	PT Permodalan Nasional Madani	Audited 2022	11,737,444	877,655	378,570	-	1,256,225	-	1,256,225	263,931	992,294	874	993,168	982,769	983,643
32	PT Hotel Indonesia Natour	Audited 2022	139,131	(72,437)	2,888	11,696	(81,245)	1,321	(82,566)	(15,608)	(66,958)	899,725	832,766	(67,696)	832,029
33	PT Sarinah	Audited 2022	819,769	(2,554)	30,111	26,052	1,504	54,359	(52,855)	(14,577)	(38,279)	(7,750)	(46,029)	(38,293)	(46,043)
34	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Audited 2022	262,415	4,561	6,057	-	10,618	5,326	5,292	2,303	2,990	5,842	8,832	3,048	8,890
35	PT Angkasa Pura I	Audited 2022	5,981,565	(18,710)	958,880	23,471	916,699	1,637,532	(720,833)	24,062	(744,896)	98,487	(646,408)	(745,072)	(646,587)
36	PT Angkasa Pura II	Audited 2022	7,502,820	915,349	191,098	247,517	858,930	1,178,857	(319,927)	(411,831)	91,904	(258,047)	(166,143)	83,728	(182,316)
37	PT Sucofindo	Audited 2022	2,596,628	303,555	167,338	17,012	453,881	-	453,881	102,754	351,126	(70,015)	281,112	350,394	280,395
38	PT Surveyor Indonesia	Audited 2022	1,612,705	132,500	167,544	32,678	267,366	-	267,366	50,883	216,483	(16,125)	200,358	215,555	199,435
39	PT Perikanan Indonesia	Unaudited 2022	507,948	(28,916)	5,258	6,217	(29,875)	39,738	(69,613)	-	(69,613)	(69,613)	(69,613)	(69,613)	(69,613)
40	PT Berdikari	Audited 2022	3,029,073	147,694	5,439	81,026	72,107	-	72,107	18,790	53,317	1,015	54,331	54,310	54,325
41	PT Sang Hyang Seri	Unaudited 2022	1,000,141	(111,868)	8,856	24,709	(127,721)	150,290	(278,011)	-	(278,011)	-	(278,011)	(278,016)	(278,016)
42	PT Garam	Audited 2022	382,275	(61,376)	105,340	22,804	21,160	5,394	15,766	7,604	8,163	(531)	7,631	8,163	7,631
43	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	Unaudited 2022	2,319,425	22,049	46,607	-	68,656	18,086	50,570	(1,387)	51,957	42,066	94,023	51,963	94,019
44	PT Nindya Karya	Audited 2022	3,969,316	75,319	182,979	95,566	162,732	70,165	92,567	627	91,940	304	92,244	97,266	97,468
45	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2022	564,002	167,945	86,591	48,148	260,388	11,072	195,316	8,136	187,181	119,177	306,358	187,156	306,329
46	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Audited 2022	251,302	117,673	23,077	29	140,721	-	140,721	31,962	108,759	22,879	131,638	106,221	129,100
47	PT Kawasan Industri Medan	Audited 2022	251,015	10,567	27,460	13,078	24,949	-	24,949	1,166	23,783	42,015	65,797	23,783	65,797
48	PT Kawasan Industri Makassar	TW III / 2022	26,990	10,409	2,341	-	12,750	1,221	11,529	3,566	7,963	-	7,963	7,963	7,963
49	PT Balai Pustaka	TW III / 2022	26,520	(10,243)	6,934	23	(3,332)	-	(3,332)	152	(3,484)	561	(2,923)	(3,484)	(2,923)
50	PT Klining Berjangka Indonesia	Audited 2022	53,574	127,965	9,724	788	136,901	-	136,901	27,269	109,633	1,574	111,206	109,519	111,093
51	PT Perusahaan Pengelola Aset	Unaudited 2022	1,742,297	207,420	296,955	11,049	493,326	18,523	474,803	1,826	472,977	(211,352)	261,625	472,978	261,626
52	PT Dahana	Audited 2022	2,953,614	368,653	3,089	22,344	349,398	14,659	334,740	74,044	260,696	450,219	710,915	263,212	713,432
53	PT Pindad	Unaudited 2022	5,801,120	631,840	116,690	253,890	494,640	380,680	113,960	7,650	106,310	-	106,310	106,310	106,310
54	PT Dirgantara Indonesia	Unaudited 2022	2,421,124	221,396	109,048	83,059	247,385	212,427	34,958	6,845	28,113	-	28,113	28,113	28,113
55	PT PAL Indonesia	Unaudited 2022	2,345,340	196,145	86,904	186,798	96,251	77,313	18,938	4,921	14,017	(4,300)	9,717	14,015	9,715
56	PT Industri Nuklir Indonesia	Audited 2022	33,793	(22,793)	6	2,109	(24,896)	1,787	(26,683)	(1,623)	(25,060)	(14)	(25,073)	(25,060)	(25,073)
57	PT Semen Baturaja Tbk	Audited 2022	1,620,040	261,727	11,691	-	273,418	158,151	115,267	20,439	94,828	(8,078)	86,750	94,827	86,749
58	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Audited 2022	17,676,302	5,647,674	8,534	-	5,656,208	-	5,656,208	1,396,026	4,260,182	50,893	4,311,075	4,260,182	4,311,075
			340,943,025	58,791,176	20,365,791	5,851,149	73,305,817	15,370,630	57,935,187	13,305,458	44,629,729	1,284,819	45,914,548	42,343,150	43,889,789

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2022

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA (Rp Juta)
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16
1	PT Perkebunan Nusantara I	Audited 2022	949.522	2.298.432	3.247.954	357.007	2.625.233	2.982.241	160.997	56.967	-	910.001	(862.317)	265.648	65	265.713	24,00%	63.755
2	PT Perkebunan Nusantara II	Audited 2022	2.021.842	8.539.284	10.561.126	2.243.963	4.034.084	6.278.047	327.606	40.130	-	3.997.263	(82.038)	4.282.961	117	4.283.079	10,00%	32.761
3	PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2022	6.149.481	16.851.745	23.001.226	3.419.977	7.790.586	11.210.563	2.942.116	(22.832)	-	3.688.289	5.353.262	11.960.835	(170.172)	11.790.663	10,00%	294.212
4	PT Perkebunan Nusantara V	Audited 2022	4.242.900	7.893.549	12.136.449	1.777.032	5.562.785	7.339.817	1.313.322	(2.057)	-	1.178.486	2.306.878	4.796.630	2	4.796.632	10,00%	131.332
5	PT Perkebunan Nusantara VI	Audited 2022	1.525.172	3.820.081	5.345.254	821.739	2.262.628	3.084.367	653.293	29.778	-	785.378	797.960	2.266.409	(5.522)	2.260.887	10,00%	65.329
6	PT Perkebunan Nusantara VII	Audited 2022	2.318.910	10.361.671	12.680.581	1.640.396	11.416.324	13.056.720	1.401.223	175.839	-	4.530.220	(6.483.248)	(375.965)	(173)	(376.138)	10,00%	140.122
7	PT Perkebunan Nusantara VIII	Audited 2022	561.648	10.482.584	11.044.232	1.321.421	4.650.142	5.971.563	930.302	65.640	-	6.160.735	(2.085.792)	5.070.885	1.784	5.072.669	13,17%	122.528
8	PT Perkebunan Nusantara IX	Audited 2022	855.071	4.115.841	4.970.912	1.234.052	2.608.643	3.842.695	1.599.815	57.679	-	1.884.313	(2.413.590)	1.128.217	-	1.128.217	10,00%	159.981
9	PT Perkebunan Nusantara X	Audited 2022	2.118.617	11.796.596	13.915.213	1.461.513	851.912	2.313.425	1.845.596	272.844	-	6.624.909	2.782.056	11.525.405	76.383	11.601.788	10,00%	184.560
10	PT Perkebunan Nusantara XI	Audited 2022	1.341.140	5.819.249	7.160.389	1.109.339	1.191.354	2.300.692	1.168.481	-	-	3.597.363	93.853	4.859.697	-	4.859.697	10,00%	116.848
11	PT Perkebunan Nusantara XII	Audited 2022	895.039	8.911.032	9.806.072	502.096	3.737.256	4.239.352	1.272.976	71.762	-	5.453.091	(1.230.839)	5.566.990	(270)	5.566.720	10,00%	127.298
12	PT Perkebunan Nusantara XIII	Audited 2022	948.708	4.018.811	4.967.519	573.968	7.135.286	7.709.254	1.029.738	-	-	2.216.352	(6.015.560)	(2.769.470)	27.735	(2.741.735)	10,00%	102.974
13	PT Perkebunan Nusantara XIV	Audited 2022	263.358	2.300.962	2.564.321	997.059	3.381.312	4.378.371	235.000	-	-	1.496.758	(3.545.808)	(1.814.050)	(1)	(1.814.051)	10,00%	23.500
14	PT Rekayasa Industri	Audited 2022	5.034.344	531.019	5.565.363	11.614.137	817.152	12.431.289	450.000	-	-	372.119	(7.749.568)	(6.927.449)	61.523	(6.865.926)	4,97%	22.366
15	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2022	1.172.961	3.241.429	4.414.390	276.692	552.986	829.679	2.517.911	-	-	-	1.066.800	3.584.711	-	3.584.711	13,00%	138.684
16	PT Istaka Karya (Persero) (dalam p	Audited 2020	238.151	247.267	485.417	375.782	62.330	438.112	652.898	-	-	147.662	(753.254)	47.306	-	47.306	7,66%	50.000
17	PT Indosat Tbk	Audited 2022	18.683.115	95.197.115	113.880.230	35.874.074	46.391.168	82.265.242	806.270	17.713.518	-	396.701	9.426.507	28.342.996	3.271.992	31.614.988	0,00%	0
18	PT PANN Pembinaan Maritim	Unaudited 2022	387.796	431.389	819.185	86.890	74.351	161.242	1.315.061	87.690	-	-	(744.808)	657.943	-	657.943	0,00%	0
19	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2022	24.432.148	20.927.059	45.359.207	10.701.780	5.741.381	16.443.161	1.152.066	594.303	-	666.882	26.291.817	28.705.068	210.978	28.916.046	0,00%	0
20	PT Timah Tbk	Audited 2022	5.634.787	7.432.189	13.066.976	2.547.165	3.477.908	6.025.073	372.388	64.383	-	106.694	6.498.164	7.041.629	274	7.041.903	0,00%	0
21	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2022	11.694.779	21.942.492	33.637.271	5.971.662	3.953.549	9.925.211	2.403.076	3.934.833	-	4.231.622	13.142.512	23.712.043	17	23.712.060	0,00%	0
22	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2022	34.495.196	77.687.061	112.182.257	15.476.145	43.042.024	58.518.169	2.424.151	(7.290.424)	-	1.960.354	43.978.323	41.072.404	12.591.684	53.664.088	0,00%	0
23	PT Indofarma Tbk	Audited 2022	863.577	670.423	1.534.000	985.246	462.406	1.447.652	309.927	81.120	-	360.336	(615.024)	86.359	(11)	86.349	0,00%	0
24	PT Kimia Farma Tbk	Audited 2022	8.501.422	11.852.571	20.353.993	8.030.857	2.983.845	11.014.703	555.400	(894.171)	-	6.454.838	1.852.294	7.968.362	1.370.928	9.339.290	0,00%	0
25	PT Asuransi Jasa Indonesia	Audited 2022		16.070.717				13.194.190	425.000	439.008	-	2.823.375	(816.065)	2.871.317	5.210	2.876.528	0,00%	1
26	PT Jasa Raharja	Unaudited 2022		19.151.615				7.340.852	8.500.000	-	-	(752.406)	3.985.077	11.732.671	78.092	11.810.763	0,00%	1
27	PT Jaminan Kredit Indonesia	Unaudited 2022		27.960.118				15.243.723	10.638.733	-	-	907.560	1.168.804	12.715.097	1.298	12.716.395	0,00%	1
28	PT Asuransi Kredit Indonesia	Unaudited 2022		35.955.925				24.843.024	9.611.000	-	-	(16.834)	1.518.001	11.112.167	735	11.112.901	0,00%	1
29	PT Energy Management Indonesia	Unaudited 2022	29.482	20.771	50.252	34.831	3.401	38.231	15.555	-	-	1.143	(4.663)	12.035	(14)	12.021	0,00%	1
30	PT Pegadaian	Audited 2022		73.329.790				44.911.304	6.250.000	-	-	7.123.491	15.041.786	28.415.277	3.209	28.418.486	0,00%	1
31	PT Permodalan Nasional Madani	Audited 2022		46.833.225				39.404.677	3.800.000	-	-	2.448	3.596.241	7.398.689	29.859	7.428.548	0,00%	1
32	PT Hotel Indonesia Natour	Audited 2022	52.828	9.779.096	9.831.924	101.272	707.683	808.955	101.700	405.617	-	7.626.291	889.488	9.023.096	(127)	9.022.969	0,00%	1
33	PT Sarinah	Audited 2022	224.490	1.214.773	1.439.262	350.703	1.058.418	1.409.121	46.850	181	-	29.085	(46.043)	30.073	69	30.142	0,00%	1
34	PT Taman Wisata Candi Borobudur	Audited 2022	154.220	667.835	822.054	77.690	187.302	264.992	250.000	106	-	(8.712)	315.503	556.897	166	557.062	0,00%	1
35	PT Angkasa Pura I	Audited 2022	3.216.762	37.918.579	41.135.341	2.945.366	28.826.912	31.772.278	6.414.412	39.388	-	64.543	2.840.809	9.359.151	3.912	9.363.063	0,00%	1
36	PT Angkasa Pura II	Audited 2022	5.313.126	37.041.052	42.354.178	8.162.686	16.673.681	24.836.367	15.971.652	821.974	-	(1.156.914)	1.690.373	17.327.085	190.726	17.517.811	0,00%	1
37	PT Sucofindo	Audited 2022	2.401.826	1.880.383	4.282.209	550.917	522.680	1.073.597	300.000	1.141	-	526.955	2.380.057	3.208.154	459	3.208.613	0,00%	1
38	PT Surveyor Indonesia	Audited 2022	1.352.608	774.453	2.127.062	319.801	130.382	450.183	25.000	105	-	160.576	1.495.693	1.681.374	(4.495)	1.676.879	0,00%	1
39	PT Perikanan Indonesia	Unaudited 2022	227.790	1.008.502	1.236.291	339.055	686.306	1.025.361	495.217	222.106	-	(12.602)	(493.790)	210.930	-	210.930	0,00%	1
40	PT Berdikari	Audited 2022	1.141.432	202.405	1.343.837	1.150.135	16.966	1.167.101	75.000	423	-	6.448	94.892	176.762	(26)	176.736	0,00%	1
41	PT Sang Hyang Seri	Unaudited 2022	407.809	5.889.029	6.296.837	1.159.053	2.094.152	3.253.205	1.506.993	141.106	-	3.935.103	(2.539.577)	3.043.625	7	3.043.632	0,00%	1
42	PT Garam	Audited 2022	177.699	573.082	750.782	80.729	91.082	171.811	600.000	-	-	292.844	(313.874)	578.970	-	578.970	0,00%	1
43	PT Perusahaan Perdagangan Indon	Unaudited 2022	895.961	3.685.471	4.581.432	722.687	977.429	1.700.116	942.745	-	-	288.585	1.649.976	2.881.306	10	2.881.316	0,00%	1
44	PT Nindya Karya	Audited 2022	3.469.969	1.379.084	4.849.054	2.950.874	404.404	3.355.278	559.497	-	-	203.697	713.543	1.476.737	17.038	1.493.776	0,00%	1
45	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2022	646.367	3.854.225	4.500.592	570.692	617.548	1.188.240	363.945	111.968	-	117.640	2.718.063	3.311.616	735	3.312.351	0,00%	1
46	PT Kawasan Industri Wijayakusum	Audited 2022	783.732	1.449.778	2.233.510	253.055	194.219	447.275	89.488	933.131	-	21.311	592.342	1.636.272	149.963	1.786.235	0,00%	1
47	PT Kawasan Industri Medan	Audited 2022	262.343	788.373	1.050.716	100.054	412.456	512.510	150.000	-	-	44.242	343.964	538.206	-	538.206	0,00%	1
48	PT Kawasan Industri Makassar	Audited 2022	74.210	1.019.186	1.093.395	43.858	350.241	394.099	40.000	-	-	75.936	583.360	699.297	-	699.297	0,00%	1
49	PT Balai Pustaka	Audited 2022	37.025	148.188	185.213	114.347	9.333	123.680	14.400	-	-	45.471	1.663	61.533	-	61.533	0,01%	1
50	PT Kilirng Berjangka Indonesia	Audited 2022	1.927.072	24.835	1.951.908	1.295.309	10.994	1.306.303	500.000	-	-	1.055	142.738	643.793	1.811	645.604	0,00%	1
51	PT Perusahaan Pengelola Aset	Audited 2022	4.768.057	10.049.094	14.817.151	2.912.255	4.213.861	7.126.116	5.452.627	(1.386.916)	-	2.694.194	931.128	7.691.033	2	7.691.035	0,00%	1
52	PT Dahana	Audited 2022	1.911.820	1.984.630	3.896.450	1.256.454	691.785	1.948.239	250.000	2.013	-	474.610	1.081.345	1.807.969	140.242	1.948.211	0,00%	1
53	PT Pindad	Unaudited 2022	10.094.170	3.645.440	13.739.610	9.570.620	475.640	10.046.260	1.367.542	-	-	1.737.370	588.438	3.693.350	-	3.693.350	0,00%	1
54	PT Dirgantara Indonesia	Unaudited 2022	7.904.741	3.906.873	11.811.615	3.043.346	4.982.814	8.026.160	6.668.124	1.125.618	-	17.298.140	(21.306.427)	3.785.455	(0)	3.785.455	0,00%	1

[illegible]

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Lab a (Rugi) Usa ha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	Lab a (Rugi) Sebelu m Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Lab a (Rugi) Sebelu m Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Lab a (Rugi) Tahu n Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Lab a (Rugi) Komprehensif	Lab a (Rugi) Tahu n Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Non Pengendali	Lab a (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 - 13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
	<i>Persero</i>															
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited	6,201,211,417,867	3,655,088,389,683	2,546,123,028,184	67,507,685,767	20,334,286,049	2,593,296,427,902	-	2,593,296,427,902	429,549,053,377	2,163,747,374,525	(87,746,894,246)	2,076,000,480,279	2,163,747,374,525	2,076,000,480,279
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited	1,088,852,311,000	386,215,841,000	702,636,470,000	-	-	702,636,470,000	-	702,636,470,000	(11,537,151,000)	714,173,621,000	(278,068,916,000)	436,104,705,000	714,173,621,000	436,104,705,000
3	PT Sarana Multiinfra Financial	Audited	1,778,362,000,000	1,259,950,000,000	518,412,000,000	-	-	518,412,000,000	-	518,412,000,000	100,727,000,000	417,685,000,000	(3,046,000,000)	414,639,000,000	417,685,000,000	414,639,000,000
4	PT Geo Dipa Energi	Audited	964,368,245,040	694,733,818,190	269,634,426,850	-	-	26,332,567,836	243,301,859,014	-	243,301,859,014	86,167,076,298	157,134,782,716	(3,140,703,242)	153,994,079,474	157,134,782,716
	Total Persero		10,032,793,973,907	5,995,988,048,873	4,036,805,925,034	67,507,685,767	46,666,853,885	4,057,646,756,916	-	4,057,646,756,916	604,905,978,675	3,452,740,778,241	(372,002,513,488)	3,080,738,264,753	3,452,740,778,241	3,080,738,264,753
	<i>Badan Usaha Lainnya</i>															
1	PT Tuban Petrochemical Industries	Audited	4,098,446,000,000	3,919,364,000,000	179,082,000,000	313,699,000,000	80,261,000,000	412,520,000,000	-	412,520,000,000	93,536,000,000	318,984,000,000	289,450,000,000	618,434,000,000	298,702,000,000	572,137,000,000
2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Audited	3,945,858,000,000	5,854,643,000,000	(1,908,785,000,000)	16,420,000,000	-	(1,892,365,000,000)	-	(1,892,365,000,000)	1,222,189,000,000	(3,114,554,000,000)	(26,784,000,000)	(3,141,338,000,000)	(3,114,554,000,000)	(3,141,338,000,000)
3	Lembaga Pengelola Investasi	Audited	3,446,786,000,000	805,638,000,000	2,641,148,000,000	-	-	2,641,148,000,000	-	2,641,148,000,000	20,747,000,000	2,620,401,000,000	15,269,820,000,000	17,890,221,000,000	2,620,401,000,000	17,890,221,000,000
	Total Badan Usaha Lainnya		11,491,090,000,000	10,579,645,000,000	911,445,000,000	330,119,000,000	80,261,000,000	1,161,303,000,000	-	1,161,303,000,000	1,336,472,000,000	(175,169,000,000)	15,542,486,000,000	15,367,317,000,000	(195,451,000,000)	15,321,020,000,000
			21,523,883,973,907	16,575,633,048,873	4,948,250,925,034	397,626,685,767	126,927,853,885	5,218,949,756,916	-	5,218,949,756,916	1,941,377,978,675	3,277,571,778,241	15,170,483,486,512	18,448,055,264,753	3,257,289,778,241	18,401,758,264,753

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA

No	Perusahaan Negara	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disorot	BPPBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistribusikan kepada Pemilik Emitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara
(1)	(2)	(3)	(4)	(7 = 3 + 4)	(5)	(6)	(10 = 8 + 9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15)	(17)	(18 = 16 - 17)	(19)	(20 = 18 x 10)
	<i>Perusahaan</i>																
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	-	-	117.126.762.853,388	-	-	70.981.048.526,224	30.516.000.000,000	-	-	(44.803.745,000)	10.075.736.889,240	40.947.723.124,174	-	40.947.723.124,174	100,00	40.947.723.124,174
2	PT Pembangunan Infrastruktur Indonesia	-	-	35.966.080.538,000	-	-	401.811.626,000	10.000.000.000,000	-	-	28.911.400,000	4.471.952.025,000	15.153.488.912,000	-	15.153.488.912,000	100,00	15.153.488.912,000
3	PT Sarana Multiinfrastruktural	-	-	32.957.132.000,000	-	-	16.036.825,000,000	12.800.000.000,000	-	-	5.000.000,000	3.515,501,000,000	16.320,507,000,000	-	16.320,507,000,000	100,00	16.320,507,000,000
4	PT Geo Dipa Energi	1.124.039.771,832	5.132.709.202,720	6.256.748.974,552	504.868.631,364	1.807.081.502,230	2.111.930.133,594	3.975.443.770,000	-	-	(23,911,237,000)	103,288,308,166	6.144,818,840,956	-	6.144,818,840,956	94,50	3.917,035,048,402
	<i>Total Perusahaan</i>	1.124.039.771,832	5.132.709.202,720	171.897.744.186,368	504.868.631,364	1.807.081.502,230	95.731.216.288,818	97.947.843.770,000	-	-	(36,987,573,874)	18.256,481,080,000	76.186,527,877,132	-	76.186,527,877,132		76.186,527,877,132
	<i>Badan Usaha Lainnya</i>																
5	PT Tuban Petrochemical Industries	6.907.769,000,000	3.285,640,000,000	10.253,409,000,000	868,034,000,000	1,875,299,000,000	2,743,333,000,000	7,841,307,000,000	-	-	(484,888,000,000)	-	7,376,421,000,000	133,455,000,000	7,510,076,000,000	35,23	2,988,680,043,544
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	-	63,875,752,000,000	-	-	56,947,507,000,000	37,602,431,000,000	-	-	119,207,000,000	(10,852,294,000,000)	26,868,244,000,000	1,000,000	26,868,244,000,000	100,00	26,868,244,000,000
7	Lembaga Pengelola Investasi	-	-	99,949,063,000,000	-	-	2,903,822,000,000	75,000,000,000	-	-	19,325,440,000,000	2,630,401,000,000	96,945,841,000,000	-	96,945,841,000,000	100,00	96,945,841,000,000
	<i>Total Badan Usaha Lainnya</i>	6.907.769,000,000	3.285.640,000,000	193,918,824,000,000	868,034,000,000	1,875,299,000,000	62,594,662,000,000	120,443,738,000,000	-	-	(8,232,953,000,000)	121,198,766,080,000	133,456,000,000		133,456,000,000	239	126,412,785,043,544
		8.041.806.973,832	8.418.349.202,720	265.816.618,186,368	1.372.902.631,364	1.782.380,502,230	168.325,875,636,818	118.965,583,770,000			14,578,514,525,000	10,028,418,689,240	2,19,53,513,977,132		133,456,000,000		265.816.618,186,368

**LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL**

No	Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah			Surat hutang		
			Asing	IDR	Utang dalam MUA	Utang dalam IDR	
	A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional						
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289,100,000	5,782,922,934,404			
	World Bank Group						
2	International Bank for Reconstruction and Development	USD	200,262,243	2,859,344,303,698			
3	International Development Association (IDA)	USD	65,021,422	928,375,863,274			(5,237,901,545)
4	International Finance Corporation (IFC)	USD	263,736,000	3,765,622,608,000			
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	3,797,820	54,225,273,960	USD	1,135,018	(17,697,200,656)
6	Bank Pembangunan Islam (IDB)	ID	148,223,487	2,964,942,927,749			
7	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	USD	2,060,000	29,412,680,000			
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit	ID	246,693	4,934,650,953			
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD	81,959,000	1,170,210,602,000			
10	Common Fund for Commodities (CFC) EUR 223.450 (Sept 2017)	EUR	223,450	18,300,772,637	EUR	223,450	(3,711,195,158)
		USD	1,028,901				
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD	22,242,649	317,580,542,422			
12	Credit Guarantee and Investment Facility	USD	18,600,000	265,570,800,000			
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	USD	672,100,000	9,596,243,800,000			
	Jumlah			27,757,687,759,097.00			(26,646,297,358.95)
	PMN Lainnya						
15	ASEAN Infrastructure Fund	USD	120,000,000	1,713,360,000,000			
16	International Rubber Consortium Limited	USD	4,000,000	57,112,000,000			
	Jumlah		-	1,770,472,000,000.00			
	Jumlah		-	29,528,159,759,097.00	-	-	(26,646,297,359)

1. Kurs ID = kurs Islamic Dinar. Kurs ID sama dengan kurs SDR

2. Kurs Special Drawing Right (SDR); SDR1 = USD 1,32976

3. Kurs Euro to IDR 16.608,60

4. Kurs USD to IDR Rp 15.592

5. Kurs USD to SDR 0,781323

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
31-Dec-22	4,000,000,000,000	24,867,390,102,000	10,981,076,000	161,146,075,892,000	186,024,447,070,000

REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	DIPA 2022	REALISASI TUNAI S.D 31 DESEMBER 2022	% REALISASI
	PEMBIAYAAN ANGGARAN UAP BUN INVESTASI PEMERINTAH	(134,936,874,331,000)	(116,556,314,104,887)	86.38%
1	PEMBIAYAAN INVESTASI	(133,806,011,331,000)	(115,425,451,104,887)	86.26%
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	18,380,560,113,522	-
1	Penerimaan pembiayaan dari UAP DJPK	-	2,311,496,745,459	
2	Penerimaan pembiayaan dari BPJT		22,000,000,000	
3	Penerimaan pembiayaan dari BLU LMAN		16,047,063,368,063	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(133,806,011,331,000)	(133,806,011,218,409)	1
I	Investasi Klaster Infrastruktur	(97,119,000,000,000)	(97,118,999,942,400)	1
1	PMN kepada PT Utama Karya (Persero)	(31,350,000,000,000)	(31,350,000,000,000)	1
2	PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(2,000,000,000,000)	(2,000,000,000,000)	1
3	PMK kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	(1,085,000,000,000)	(1,085,000,000,000)	1
4	PMN kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk	(3,000,000,000,000)	(3,000,000,000,000)	1
6	PMN kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk	(1,976,000,000,000)	(1,975,999,942,400)	1
8	PMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(5,000,000,000,000)	(5,000,000,000,000)	1
9	PMN kepada Perum Perumnas	(1,568,000,000,000)	(1,568,000,000,000)	1
10	PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	(3,200,000,000,000)	(3,200,000,000,000)	1
11	Investasi kepada BLU LMAN	(28,840,000,000,000)	(28,840,000,000,000)	1
12	Investasi Pemerintah Program FLPP	(19,100,000,000,000)	(19,100,000,000,000)	1
II	Investasi Klaster Pendidikan	(20,000,000,000,000)	(20,000,000,000,000)	1
1	DPPN	(20,000,000,000,000)	(20,000,000,000,000)	1
III	Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat	(3,000,000,000,000)	(3,000,000,000,000)	1
1	Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)	(3,000,000,000,000)	(3,000,000,000,000)	1
III	Investasi Klaster Kerja Sama Internasional	(2,005,867,831,000)	(2,005,867,829,073)	1
1	Investasi kepada BLU LDKPI	(1,000,000,000,000)	(1,000,000,000,000)	1
2	Investasi kepada LKI	(1,005,867,831,000)	(1,005,867,829,073)	1
	Islamic Development Bank (IsDB)	(83,773,459,000)	(83,773,458,551)	1
	International Finance Corporation (IFC)	(356,779,824,000)	(356,779,823,470)	1
	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(46,977,000,000)	(46,977,000,000)	1
	International Development Association (IDA)	(212,375,430,000)	(212,375,430,000)	1
	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	(258,985,118,000)	(258,985,117,052)	1
	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	(46,977,000,000)	(46,977,000,000)	1
VI	Pembiayaan Investasi Lainnya	(11,681,143,500,000)	(11,681,143,446,936)	1
1	Investasi kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	(1,201,143,500,000)	(1,201,143,500,000)	1
2	PMN kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	(7,500,000,000,000)	(7,499,999,969,336)	1
3	PMN kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	(2,480,000,000,000)	(2,479,999,977,600)	1
4	PMN kepada Bank Tanah	(500,000,000,000)	(500,000,000,000)	1

	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	DIPA 2022	REALISASI TUNAI S.D 31 DESEMBER 2022	% REALISASI
2	Kewajiban Penjaminan	(1.130,863,000,000)	(1.130,863,000,000)	1
I	Penjaminan Pemerintah	(1.130,863,000,000)	(1.130,863,000,000)	1
1	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(316,863,000,000)	(316,863,000,000)	1
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(5,786,000,000)	(5,786,000,000)	1
	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(158,470,000,000)	(158,470,000,000)	1
	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(7,664,000,000)	(7,664,000,000)	1
	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(141,882,000,000)	(141,882,000,000)	1
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(3,061,000,000)	(3,061,000,000)	1
2	Dukungan Penjaminan pada Program Pernulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	(814,000,000,000)	(814,000,000,000)	1
	Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN	(814,000,000,000)	(814,000,000,000)	1

PENJELASAN MUTASI LAIN LAIN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)

NO	BUMN	Saldo Ekuitas pada IKPN 2021	Laba Bersih	OO Non Reval	OO Reval	Laba Komprehensif	Dividen	PMN	Mutasi Ekuitas	ILKPN 2021 + Mutasi Ekuitas	Saldo Ekuitas	Selisih	Dampak Penerapan PSAK 71	pengukuran kembali program imbalan pasti	PKBL
				1	2	3=(1+2)	4	9	5	6=(4+5)	7	8	10	11	12=7+8+9+10+11
<i>Persero</i>															
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	38.900.280.295.754	2.163.747.374.525	(87.746.894.246)	-	2.076.000.480.279	(457.534.000.000)	-	1.618.466.480.279	40.518.746.776.033	40.547.733.124.174	28.986.348.141	-	-	-
2	PT Panjaminan Infrastruktur Indonesia	13.788.714.741.000	714.173.621.000	(278.068.916.000)	-	436.104.705.000	(156.350.534.000)	1.085.000.000.000	1.364.754.171.000	15.153.468.912.000	15.153.468.912.000	-	-	-	-
3	PT Sarana Multi Griya Finansial	14.020.849.000.000	417.685.000.000	(3.046.000.000)	-	414.639.000.000	(114.981.000.000)	2.000.000.000.000	2.299.658.000.000	16.320.507.000.000	16.320.507.000.000	-	-	-	-
4	PT Geo Dipa Energi	3.788.478.745.276	148.499.240.823	(2.968.101.900)	-	145.531.138.923	(16.974.834.918)	-	128.556.304.005	3.917.035.049.281	3.917.035.048.452	(829)	-	-	-
	Total Persero	70.498.322.782.030	3.444.105.236.348	(371.829.912.146)	0	3.072.275.324.202	(745.840.368.918)	3.085.000.000.000	5.411.434.955.284	75.909.757.737.314	75.938.744.084.626	28.986.347.312	0	0	0
<i>Badan Usaha Lainnya</i>															
5	PT Tuban Petrochemical Industries	2.001.641.958.100	105.228.522.161	96.327.312.696	-	201.555.834.857	-	-	201.555.834.857	2.203.197.792.957	2.598.680.043.554	395.482.250.597	-	-	-
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indone	30.120.377.000.000	(3.114.554.000.000)	(26.784.000.000)	-	(3.141.338.000.000)	(110.795.000.000)	-	(3.252.133.000.000)	26.868.244.000.000	26.868.244.000.000	-	-	-	-
7	Lembaga Pengelola Investasi	79.055.620.000.000	2.620.401.000.000	15.269.820.000.000	-	17.890.221.000.000	-	-	17.890.221.000.000	96.945.841.000.000	96.945.841.000.000	-	-	-	-
	Total Lembaga/Badan Usaha Lainnya	111.177.838.958.100	(886.924.477.839)	15.339.363.312.696	0	14.950.438.834.857	(110.795.000.000)	0	14.839.643.834.857	126.917.282.792.957	126.412.765.043.554	395.482.250.597	0	0	0
	JUMLAH	181.675.961.740.130	3.055.180.758.508	14.967.533.400.551	0	18.022.714.159.059	(656.635.368.918)	3.085.000.000.000	20.251.078.790.141	201.927.040.530.271	202.351.509.126.180	424.468.597.909	0	0	0

Daftar Realisasi Pendapatan Hibah Terkait Penanggulangan Pandemi COVID-19 Tahun 2022 (*Audited*)

NO	NOMOR REGISTER	NAMA HIBAH	NAMA DONOR	JENIS HIBAH	BENTUK HIBAH	NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA UANG	NILAI HIBAH	REALISASI PENDAPATAN HIBAH
1	278S8KCA	PROJECT FOR STRENGTHENING CAPACITY FOR EARLY WARNING AND RESPONSE TO INFECTIOUS DISEASES (PROYEK PENGUATAN KAPASITAS UNTUK PERINGATAN DINI DAN RESPONSE TERHADAP PENYAKIT MENULAR)	JICA	LANGSUNG	BARANG DAN JASA	KEMENKES	JPY	373.882.882	8.612.794.872
2	24MH3V7A	REGIONAL SUPPORT TO ADDRESS THE OUTBREAK OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 AND POTENTIAL OUTBREAKS OF OTHER COMMUNICABLE DISEASES	ADB	LANGSUNG	JASA	KEMENKES	USD	828.496	12.947.733.925
3	23CAKCYA	HIBAH BARANG DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 UNTUK PENGEMBANGAN SURVEILANS GENOM SARS-COV-2 DI INDONESIA	Illumina Singapore	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	IDR	6.564.691.980	487.901.190
4	25QQKP6A	HIBAH BARANG BERUPA 2 (DUA) UNIT MOBIL DAIHATSU GRANMAX AMBULANCE DARI PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK.	CORPORATIONS	LANGSUNG	BARANG	KEMENHAN	IDR	313.589.500	313.589.500
5	2LMY61ZA	HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KEPADA KODIM 0611/GARUT (KOREM 062 DAM III/SLW) UNTUK COVID-19	PEMKAB GARUT	LANGSUNG	KAS	KEMENHAN	IDR	1.000.000.000	1.000.000.000

6	2EEEH49A	HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KEPADA POLRES GARUT UNTUK COVID 19	PEMKAB GARUT	LANGSUNG	KAS	POLRI	IDR	1.000.000.000	1.000.000.000
7	2CYX74KA	HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KEPADA KODIM 0624/KAB. BANDUNG (KOREM 062 DAM III/SLW) UNTUK COVID 19	PEMKAB BANDUNG	LANGSUNG	KAS	KEMENHAN	IDR	750.000.000	750.000.000
8	26WSBMLA	HIBAH BARANG DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19	CANADA	LANGSUNG	BARANG	KEMENLU	IDR	1.841.200.000	1.841.200.000
9	2BYQ1X6A	ADDITIONAL FINANCING FOR INDONESIA EMERGENCY RESPONSE TO COVID-19 PROGRAM	IBRD	LANGSUNG	KAS	KEMENKES	USD	9.900.000	100.837.992.420
10	273MLZBA	HIBAH KAS LANGSUNG DARI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN KEPADA POLRES TAPANULI SELATAN UNTUK KEGIATAN HARKAMTIBNAS TERMASUK PENANGANAN COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2022	PEMKAB TAPANULI SLTN	LANGSUNG	KAS	POLRI	IDR	1.600.000.000	1.600.000.000
11	2ALQKGEA	HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KEPADA POLRES CIMAHI UNTUK COVID 19	PEMKAB BANDUNG	LANGSUNG	KAS	POLRI	IDR	200.000.000	200.000.000
12	22HY3SLA	HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KEPADA POLRESTA BANDUNG UNTUK COVID 19	PEMKAB BANDUNG	LANGSUNG	KAS	POLRI	IDR	2.200.000.000	2.200.000.000

13	2KNAH8AA	RESPONSE TOWARD COVID-19 RESILIENCE (RESTORE) IN INDONESIA PROJECT	UNDP	LANGSUNG	JASA	KEMEN PAN DAN RB	USD	73.886	1.057.308.660
14	23LRSYJA	HIBAH LANGSUNG BARANG UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DARI PT. HARSEN LABORATORIES	CORPORATIONS	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	IDR	465.100.000	465.100.000
15	22K95MTA	HIBAH UANG DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW KEPADA KODIM 1810/TAMBRAUW UNTUK KEGIATAN PENANGANAN WABAH CORONA (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN TAMBRAUW	PEMKAB TAMBRAUW	LANGSUNG	KAS	KEMENHAN	IDR	150.000.000	150.000.000
16	24SS679A	HIBAH BARANG ALAT KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19	AUSTRALIA	LANGSUNG	BARANG	KEMENHAN	IDR	42.242.736.445	42.242.736.445
17	24RS2FYA	HIBAH BERUPA UANG YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK POLRES KAPUAS HULU DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022	PEMKAB KAPUAS HULU	LANGSUNG	KAS	POLRI	IDR	150.000.000	150.000.000
18	2UTVSFBA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI RS BENDAN UNTUK BALAI BESAR POM SEMARANG	BUMD	LANGSUNG	BARANG	BPOM	IDR	247.500.000	247.500.000
19	23E1HU7A	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI BALABKES DAN PENGUJIAN ALKES UNTUK BALAI BESAR POM SEMARANG	PEMPROV JATENG	LANGSUNG	BARANG	BPOM	IDR	120.687.600	120.687.600

20	2PED4HWA	HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG DARI PT UNILEVER INDONESIA TBK KEPADA KESDAM VI/MULAWARMAN	CORPORATIONS	LANGSUNG	BARANG	KEMENHAN	IDR	6.330.000	6.330.000
21	2PYV3F9A	HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG DARI PT ARUTMIN INDONESIA KEPADA KESDAM VI/MULAWARMAN	CORPORATIONS	LANGSUNG	BARANG	KEMENHAN	IDR	7.300.000	7.300.000
22	221Q39PA	HIBAH UANG LANGSUNG UNTUK KEGIATAN PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 WILAYAH SUMATERA BARAT	OTHER ORGANIZATIONS	LANGSUNG	KAS	POLRI	IDR	550.997.400	528.010.000
23	2GR4UTNA	HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG KEPADA SUBDENPOM III/5-1 CIMAH (MAKODAM III/SLW) UNTUK COVID 19	PEMKAB BANDUNG	LANGSUNG	KAS	KEMENHAN	IDR	75.000.000	75.000.000
24	25VGCE6A	THE PROJECT FOR STRENGTHENING CAPACITY BUILDING MANAGEMENT OF VACCINATION AND LABORATORY FOR COVID-19 AND OTHER INFECTIOUS DISEASES	JICA	LANGSUNG	BARANG DAN JASA	KEMENKES	JPY	199.999.000	6.448.000.000
25	21EDPNLA	HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG KEPADA LANUD SULAIMAN UNTUK COVID 19	PEMKAB BANDUNG	LANGSUNG	KAS	KEMENHAN	IDR	79.500.000	79.500.000
26	2659ERSA	HIBAH BARANG DALAM RANGKA BANTUAN DUKUNGAN LOGISTIK KESEHATAN PENANGANAN COVID-19	MULTI DONOR	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	IDR	26.223.732.973	39.933.715.684

27	2TJTEK3A	HIBAH BARANG DALAM RANGKA BANTUAN DUKUNGAN LOGISTIK KESEHATAN PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2021	MULTI DONOR	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	IDR	97.830.573.400	96.991.672.585
28	2P8HK9DA	HIBAH LANGSUNG BARANG DALAM RANGKA BANTUAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 DARI MULTIDONOR	CORPORATIONS	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	IDR	1.294.000.000	1.294.000
29	2MZZ43FA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA MATERIAL KESEHATAN DARI TEMASEK FOUNDATION KEPADA MABES TNI DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19	TEMASEK	LANGSUNG	BARANG	KEMENHAN	SGD	15.619.332	165.114.759.758
30	2W896LEA	HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DARI PEMERINTAH KAB BANDUNG KEPADA SUB GARNISUM 0609/CIMAHI (KOGARTAP II/BDG) UNTUK COVID-19	PEMKAB BANDUNG	LANGSUNG	KAS	KEMENHAN	IDR	75.868.500	75.868.000
31	2PPDX3UA	HIBAH BARANG BERUPA OBAT RAMVIT-C 500 INJEKSI DARI PT DOS-NI-ROHA (DNR COORPORATION) KEPADA SATKER PUSKES TNI (684136) DALAM RANGKA PENANGANAN COVID -19	CORPORATIONS	LANGSUNG	BARANG	KEMENHAN	IDR	12.635.500.000	12.635.500.000
32	23GMVM9A	DANA BANTUAN (HIBAH) UNDP - SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (COVID-19)	UNDP	LANGSUNG	BARANG DAN JASA	KEMENKES	IDR	1.720.101.364	1.720.101.364

33	27V9NLCA	DANA BANTUAN (HIBAH) WHO - SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DALAM RANGKA PENGANGGULANGAN COVID-19	W H O	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	IDR	7.783.721.160	7.783.721.160
34	2GHTX8JA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA REAGEN PEMERIKSAAN COVID-19 DARI PT. UBC MEDICAL INDONESIA	CORPORATI ONS	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	IDR	78.865.500	78.865.500
35	2LQH8S5A	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH AUSTRALIA (COVID-19)	AUSTRALIA	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	AUD	13.986.000	142.919.577.360
36	2NNVZZFA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH JEPANG (COVID-19)	JAPAN	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	6.645.622	95.092.199.474
37	2F5NEYDA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH JEPANG (COVID-19)	JAPAN	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	5.064.192	72.625.577.472
38	2WFLGG4A	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH JEPANG (COVID-19)	JAPAN	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	3.680.187	52.659.792.349
39	273UD1TA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERUPA VAKSIN PENAGGULANGAN COVID-19	U S A	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	23.621.423	338.991.034.298
40	2B8EYQBA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERUPA VAKSIN PENANGGULANGAN COVID-19	U S A	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	6.744.465	96.405.382.710
41	2FPFJU6A	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERUPA	U S A	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	8.489.812	121.480.727.063

		VAKSIN PENANGGULANGAN COVID-19							
42	2BJBALWA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERUPA VAKSIN PENANGGULANGAN COVID-19	U S A	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	14.006.160	201.254.513.040
43	21UQFWPA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERUPA VAKSIN PENANGGULANGAN COVID-19	U S A	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	9.102.240	130.626.246.240
44	2GLMNHQA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERUPA VAKSIN PENANGGULANGAN COVID-19	U S A	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	11.873.200	170.309.180.800
45	2E1GTMDA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERUPA VAKSIN PENANGGULANGAN COVID-19	U S A	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	20.691.450	339.156.384.255
46	2S6CE6NA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA ITALIA BERUPA VAKSIN PENANGGULANGAN COVID-19	ITALY	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	915.200	13.095.596.800
47	2QJQ1ZEA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA KOREA (COVID-19)	KOREA	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	14.265.600	203.912.486.400
48	27G54R5A	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA SPANYOL BERUPA VAKSIN PENANGGULANGAN COVID-19	SPAIN	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	5.318.400	75.813.792.000

49	22XGA7LA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA SPANYOL BERUPA VAKSIN PENANGGULANGAN COVID-19	SPAIN	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	5.011.200	71.434.656.000
50	29AYR56A	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA SPANYOL BERUPA VAKSIN PENANGGULANGAN COVID-19	SPAIN	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	7.411.200	105.646.656.000
51	2HW3158A	HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG BERUPA 4 (EMPAT) UNIT KENDARAAN AMBULANCE DAN 6 (ENAM) UNIT PEMADAM KEBAKARAN (COVID-19)	JAPAN FIREFIGHTER S	LANGSUNG	BARANG	KEMENHAN	JPY	100.000	10.515.935
52	2XV6KS4A	HIBAH LANGSUNG KAS DARI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KEPADA POLRESTABES MAKASSAR UNTUK KEGIATAN HARKAMTIBMAS PENANGANAN PEMULIHAN COVID-19 TAHUN 2022	PEMKOT MAKASSAR	LANGSUNG	KAS	POLRI	IDR	1.500.000.000	1.500.000.000
53	2J31ZG6A	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERUPA VAKSIN PENANGGULANGAN COVID-19	U S A	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	USD	7.390.800	105.991.462.800
54	2FB9K6CA	HIBAH UANG DALAM RANGKA PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 SATGAS TNI ANGKATAN LAUT TOLITOLI TAHUN 2021	PEMKAB TOLITOLI	LANGSUNG	KAS	KEMENHAN	IDR	248.015.000	248.015.000
55	21847TNA	HIBAH OBAT PFIZER DARI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT KE PEMERINTAH INDONESIA UNTUK	U S A	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	IDR	676.818.909.000	676.818.909.000

		PERCEPATAN PANDEMI COVID19							
56	21LRPY2A	HIBAH BARANG DARI UNICEF KE PEMERINTAH INDONESIA UNTUK BANTUAN PANDEMI COVID-19	UNICEF	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	IDR	6.475.435.218	6.475.435.218
57	2C4P5P9A	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH NEGARA JERMAN BERUPA OBAT COVID- 19 DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	GERMANY FED.	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	IDR	67.295.377.663	67.295.377.663
58	2EVV8N9A	HIBAH BARANG DARI GAVI COVAX FACILITY KE PEMERINTAH INDONESIA UNTUK BANTUAN PANDEMI COVID-19	GAVI ALLIANCE	LANGSUNG	BARANG	KEMENKES	IDR	27.164.757.593	27.164.757.592
TOTAL									3.624.632.458.132

RINCIAN PENDAPATAN HIBAH-LO TA 2022 *AUDITED* PER KEMENTERIAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

Kementerian Negara/Lembaga	Pengesahan Hibah TAYL (Akun Ekuitas)	Pengesahan Hibah TAB (Akun Pendapatan)	Total
004 - BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	(11.596.357.870)	(6.807.744.517)	(18.404.102.387)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(11.596.357.870)	(6.807.744.517)	(18.404.102.387)
005 - MAHKAMAH AGUNG	(19.068.832.217)	(70.282.350.800)	(89.351.183.017)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(19.068.832.217)	(59.793.798.945)	(78.862.631.162)
Hibah Langsung Uang		(10.488.551.855)	(10.488.551.855)
006 - KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	(78.035.955.224)	(630.508.241.980)	(708.544.197.204)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(78.035.955.224)	(617.913.548.180)	(695.949.503.404)
Hibah Langsung Uang		(12.594.693.800)	(12.594.693.800)
007 - KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA		(245.891.926.715)	(245.891.926.715)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(245.891.926.715)	(245.891.926.715)
010 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI	(1.599.676.000)	(154.416.890.074)	(156.016.566.074)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(1.599.676.000)	(145.683.839.677)	(147.283.515.677)
Hibah Langsung Uang		(8.733.050.397)	(8.733.050.397)
011 - KEMENTERIAN LUAR NEGERI	(1.237.500.000)	(465.415.073.677)	(466.652.573.677)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(1.237.500.000)	(465.415.073.677)	(466.652.573.677)
012 - KEMENTERIAN PERTAHANAN	(27.069.007.311)	(1.198.298.680.994)	(1.225.367.688.305)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(27.069.007.311)	(642.681.281.461)	(669.750.288.772)
Hibah Langsung Uang		(555.617.399.533)	(555.617.399.533)
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	(1.437.722.100)	(102.911.787.256)	(104.349.509.356)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(1.437.722.100)	(102.636.852.973)	(104.074.575.073)
Hibah Langsung Uang		(274.934.283)	(274.934.283)
015 - KEMENTERIAN KEUANGAN	(970.386.918)	(63.273.985.746)	(64.244.372.664)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(970.386.918)	(63.273.985.746)	(64.244.372.664)
018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	(1.260.075.313)	(76.033.272.165)	(77.293.347.478)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(1.164.240.400)	(66.576.996.484)	(67.741.236.884)
Hibah Langsung Uang	(95.834.913)	(9.456.275.681)	(9.552.110.594)

Kementerian Negara/Lembaga	Pengesahan Hibah TAYL (Akun Ekuitas)	Pengesahan Hibah TAB (Akun Pendapatan)	Total
019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		(3.023.120.296)	(3.023.120.296)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(71.500.000)	(71.500.000)
Hibah Langsung Uang		(2.951.620.296)	(2.951.620.296)
020 - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		(111.543.359.874)	(111.543.359.874)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(99.737.052.467)	(99.737.052.467)
Hibah Langsung Uang		(11.806.307.407)	(11.806.307.407)
022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(22.381.283.500)	(478.656.852.281)	(501.038.135.781)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(22.381.283.500)	(478.656.852.281)	(501.038.135.781)
023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(5.285.697.282)	(221.006.057.569)	(226.291.754.851)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(2.396.397.282)	(174.515.856.189)	(176.912.253.471)
Hibah Langsung Uang	(2.889.300.000)	(46.490.201.380)	(49.379.501.380)
024 - KEMENTERIAN KESEHATAN	(12.262.479.149)	(6.888.456.187.043)	(6.900.718.666.192)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(12.262.479.149)	(4.604.962.725.445)	(4.617.225.204.594)
Hibah Langsung Uang		(2.283.493.461.598)	(2.283.493.461.598)
025 - KEMENTERIAN AGAMA	(120.519.709.608)	(1.055.769.083.003)	(1.176.288.792.611)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(119.519.709.608)	(130.148.295.132)	(249.668.004.740)
Hibah Langsung Uang	(1.000.000.000)	(925.620.787.871)	(926.620.787.871)
026 - KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	(6.675.755.012)	(83.097.801.030)	(89.773.556.042)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(6.675.755.012)	(83.097.801.030)	(89.773.556.042)
027 - KEMENTERIAN SOSIAL		(129.196.840.408)	(129.196.840.408)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(8.525.193.451)	(8.525.193.451)
Hibah Langsung Uang		(120.671.646.957)	(120.671.646.957)
029 - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	(17.107.184.094)	(576.036.282.831)	(593.143.466.925)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(7.102.483.607)	(538.642.060.543)	(545.744.544.150)
Hibah Langsung Uang	(10.004.700.487)	(37.394.222.288)	(47.398.922.775)
032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	(11.480.174.270)	(113.404.392.514)	(124.884.566.784)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(11.480.174.270)	(91.913.573.847)	(103.393.748.117)
Hibah Langsung Uang		(21.490.818.667)	(21.490.818.667)

Kementerian Negara/Lembaga	Pengesahan Hibah TAYL (Akun Ekuitas)	Pengesahan Hibah TAB (Akun Pendapatan)	Total
033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	(412.933.266.216)	(434.998.898.415)	(847.932.164.631)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(412.933.266.216)	(434.998.898.415)	(847.932.164.631)
034 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN		(998.384.652)	(998.384.652)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(998.384.652)	(998.384.652)
035 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		(22.094.322.778)	(22.094.322.778)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(22.094.322.778)	(22.094.322.778)
040 - KEMENTERIAN PARIWISATA		(198.855.966.426)	(198.855.966.426)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(198.855.966.426)	(198.855.966.426)
041 - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	(1.311.700.000)		(1.311.700.000)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(1.311.700.000)		(1.311.700.000)
047 - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		(32.401.613.959)	(32.401.613.959)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(19.732.433.267)	(19.732.433.267)
Hibah Langsung Uang		(12.669.180.692)	(12.669.180.692)
048 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		(14.412.390.969)	(14.412.390.969)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(14.412.390.969)	(14.412.390.969)
050 - BADAN INTELIJEN NEGARA	(693.900.000)	(103.656.095.050)	(104.349.995.050)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(693.900.000)	(103.656.095.050)	(104.349.995.050)
054 - BADAN PUSAT STATISTIK	(104.456.755)	(17.817.847.485)	(17.922.304.240)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(104.456.755)	(15.011.297.430)	(15.115.754.185)
Hibah Langsung Uang		(2.806.550.055)	(2.806.550.055)
055 - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		(1.099.972.569.824)	(1.099.972.569.824)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(1.080.444.817.516)	(1.080.444.817.516)
Hibah Langsung Uang		(19.527.752.308)	(19.527.752.308)

Kementerian Negara/Lembaga	Pengesahan Hibah TAYL (Akun Ekuitas)	Pengesahan Hibah TAB (Akun Pendapatan)	Total
056 - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	(15.051.772.440)	(152.758.647.804)	(167.810.420.244)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(15.051.772.440)	(27.471.990.756)	(42.523.763.196)
Hibah Langsung Uang		(125.286.657.048)	(125.286.657.048)
059 - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		(73.617.330.463)	(73.617.330.463)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(73.617.330.463)	(73.617.330.463)
060 - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	(241.714.370.435)	(1.912.484.398.769)	(2.154.198.769.204)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(241.714.370.435)	(1.173.499.168.305)	(1.415.213.538.740)
Hibah Langsung Uang		(738.985.230.464)	(738.985.230.464)
063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		(24.252.141.306)	(24.252.141.306)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(23.208.341.906)	(23.208.341.906)
Hibah Langsung Uang		(1.043.799.400)	(1.043.799.400)
064 - LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL		(402.897.000)	(402.897.000)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(402.897.000)	(402.897.000)
065 - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL		(27.293.000.000)	(27.293.000.000)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(27.293.000.000)	(27.293.000.000)
066 - BADAN NARKOTIKA NASIONAL	(674.044.400)	(33.174.730.419)	(33.848.774.819)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(674.044.400)	(16.541.903.548)	(17.215.947.948)
Hibah Langsung Uang		(16.632.826.871)	(16.632.826.871)
067 - KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	(517.539.147)	(4.590.721.115)	(5.108.260.262)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(517.539.147)		(517.539.147)
Hibah Langsung Uang		(4.590.721.115)	(4.590.721.115)
068 - BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	(1.840.984.584)	(22.161.354.932)	(24.002.339.516)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(1.840.984.584)	(16.766.164.187)	(18.607.148.771)
Hibah Langsung Uang		(5.395.190.745)	(5.395.190.745)

Kementerian Negara/Lembaga	Pengesahan Hibah TAYL (Akun Ekuitas)	Pengesahan Hibah TAB (Akun Pendapatan)	Total
074 - KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA		(5.530.195.233)	(5.530.195.233)
Hibah Langsung Uang		(5.530.195.233)	(5.530.195.233)
075 - BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	(507.997.619)	(1.223.187.296)	(1.731.184.915)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(507.997.619)	(1.223.187.296)	(1.731.184.915)
076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM	(4.031.804.758)	(135.172.120.881)	(139.203.925.639)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(4.031.804.758)	(41.423.126.446)	(45.454.931.204)
Hibah Langsung Uang	-	(93.748.994.435)	(93.748.994.435)
078 - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN		(13.588.861.406)	(13.588.861.406)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(13.588.861.406)	(13.588.861.406)
079 - LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA		-	-
Hibah Langsung Uang		-	-
086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA		(1.447.574.000)	(1.447.574.000)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(1.447.574.000)	(1.447.574.000)
087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	(669.737.445)		(669.737.445)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(669.737.445)		(669.737.445)
088 - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	(395.063.310)	(395.063.310)
Hibah Langsung Barang/Jasa	-	(395.063.310)	(395.063.310)
089 - BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		(929.411.880)	(929.411.880)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(929.411.880)	(929.411.880)
090 - KEMENTERIAN PERDAGANGAN		(14.083.902.773)	(14.083.902.773)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(14.083.902.773)	(14.083.902.773)
093 - KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI		(10.160.838.855)	(10.160.838.855)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(10.160.838.855)	(10.160.838.855)
095 - DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)		(3.498.967.000)	(3.498.967.000)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(3.498.967.000)	(3.498.967.000)
100 - KOMISI YUDISIAL RI		(3.990.399.100)	(3.990.399.100)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(3.990.399.100)	(3.990.399.100)

Kementerian Negara/Lembaga	Pengesahan Hibah TAYL (Akun Ekuitas)	Pengesahan Hibah TAB (Akun Pendapatan)	Total
103 - BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA		(183.694.233.760)	(183.694.233.760)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(180.245.108.866)	(180.245.108.866)
Hibah Langsung Uang		(3.449.124.894)	(3.449.124.894)
104 - BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA		(33.900.000)	(33.900.000)
Hibah Langsung Barang/Jasa		(33.900.000)	(33.900.000)
107 - BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	(678.685.291)	(1.214.425.000)	(1.893.110.291)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(678.685.291)	(1.214.425.000)	(1.893.110.291)
110 - OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	(91.889.964)	(9.482.536.295)	(9.574.426.259)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(91.889.964)	(9.482.536.295)	(9.574.426.259)
115 - BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	(2.153.100.000)	(28.835.166.928)	(30.988.266.928)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(2.153.100.000)	(16.713.107.795)	(18.866.207.795)
Hibah Langsung Uang		(12.122.059.133)	(12.122.059.133)
116 - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	(474.901.000)	(10.417.469.785)	(10.892.370.785)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(474.901.000)	(565.469.785)	(1.040.370.785)
Hibah Langsung Uang		(9.852.000.000)	(9.852.000.000)
117 - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	(10.581.292.500)	(35.236.874.062)	(45.818.166.562)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(10.581.292.500)	(32.252.064.691)	(42.833.357.191)
Hibah Langsung Uang		(2.984.809.371)	(2.984.809.371)
119 - BADAN KEAMANAN LAUT	(477.300.000)	(593.275.000)	(1.070.575.000)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(477.300.000)	(593.275.000)	(1.070.575.000)
124 - BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	(2.574.319.182)	(9.483.578.741)	(12.057.897.923)
Hibah Langsung Barang/Jasa	(436.163.490)	(987.529.751)	(1.423.693.241)
Hibah Langsung Uang	(2.138.155.692)	(8.496.048.990)	(10.634.204.682)
TOTAL	(1.035.070.857.604)	(17.318.985.223.444)	(18.354.056.081.048)



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Juanda I, Jl. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 Telepon (021) 3449230
Faximile (021) 3852143 Email portalkemenkeu@kemenkeu.go.id
Situs <https://www.kemenkeu.go.id/>



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Juanda I, Jl. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 Telepon (021) 3449230
Faximile (021) 3852143 Email portalkemenkeu@kemenkeu.go.id
Situs <https://www.kemenkeu.go.id/>